

20
24

Laporan Tahunan
Annual Report



BANK BPD BALI



Meraih Pertumbuhan **BERKELANJUTAN**
Melalui **PENINGKATAN** Kemampuan Digital
Driving Sustainable Growth by Enhanced Digital Proficiency

www.bpdbali.co.id



SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB

Disclaimer and Limitations of Liability

Laporan Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Bali (selanjutnya disebut "Bank BPD Bali" atau "Bank") tahun buku 2024 ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan pelaporan hasil kinerja Bank BPD Bali pada periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 kepada *regulator*.

Laporan Tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan Bank, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Sedangkan, pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang, serta lingkungan bisnis yang terkait, sehingga dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan. Oleh karena itu, Bank BPD Bali tidak menjamin bahwa pernyataan atau informasi prospektif tersebut menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan ataupun akan membawa hasil tertentu sesuai harapan, hasil sebenarnya di masa depan dapat berbeda karena dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor di luar kendali Bank.

The Annual Report of PT Bank Pembangunan Daerah Bali (hereinafter referred to as "Bank BPD Bali" or "the Bank") for the financial year 2024 has been prepared in order to comply with the requirements for reporting the results of the performance of Bank BPD Bali for the period from January 1, 2024 to December 31, 2024 to the regulatory authorities.

This Annual Report contains statements regarding the Bank's financial condition, results of operations, projections, plans, strategies, policies and objectives that, other than statements of historical fact, are forward-looking statements within the meaning of applicable law. These statements are subject to risks and uncertainties and could cause actual results to differ materially from those expressed or implied by such statements.

The forward-looking statements in this annual report are based on various assumptions regarding current and future conditions and the related business environment. As a result, actual developments may differ materially from those reported. Therefore, Bank BPD Bali does not guarantee that these forward-looking statements or information are the main basis for decision making or will bring certain results as expected. Actual results in the future may differ as they may be affected by various factors beyond the control of the Bank.



TENTANG LAPORAN TAHUNAN

About the Annual Report

Laporan Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Bali tahun buku 2024 bertemakan **"Meraih Pertumbuhan Berkelanjutan Melalui Peningkatan Kemampuan Digital"**. Tema tersebut dipilih berdasarkan analisis dan kajian yang mendalam berdasarkan fakta dan perkembangan lingkungan ekonomi dan bisnis selama tahun 2024 serta mempertimbangkan keberlanjutan usaha Bank.

Laporan Tahunan dan Berkelanjutan Bank BPD Bali disusun dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan Surat Edaran OJK No. 16/SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam rangka menjalankan praktik terbaik terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG), penyampaian laporan ini juga mengacu pada Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Selain itu, Laporan Tahunan ini juga disusun dengan memperhatikan aspek *best practice* sebagaimana yang ditetapkan dalam Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) dan *ASEAN Corporate Governance Scorecards* (ACGS). Dengan demikian, Bank BPD Bali mengharapkan Laporan Tahunan dan Berkelanjutan ini mampu mendorong peningkatan keterbukaan informasi dan transparansi yang sejalan dengan prinsip-prinsip GCG.

Dalam laporan ini, penyebutan satuan mata uang dinyatakan dalam "Rupiah", "Rp" atau IDR merujuk pada mata uang resmi Republik Indonesia. Semua informasi keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan pelaporan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Auditan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan Tahunan dan Berkelanjutan Bank BPD Bali Tahun 2024 diterbitkan secara terpisah tetapi saling melengkapi satu dengan yang lain dan disajikan dalam dua bahasa yakni Bahasa Indonesia dan Inggris dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca dan dicetak dengan kualitas yang baik. Kedua laporan ini dapat dilihat dan diunduh di *website* resmi BPD Bali yaitu <https://www.bpd Bali.co.id/page/read/33> dan <https://www.bpd Bali.co.id/page/read/178>.

The annual report of PT Bank Pembangunan Daerah Bali for the financial year 2024 has the theme "Driving Sustainable Growth by Enhanced Digital Proficiency". The theme has been selected on the basis of in-depth analysis and research on the basis of facts and developments in the economic and business environment in 2024, and in consideration of the sustainability of the Bank's business.

Bank BPD Bali's annual report and sustainability report are prepared in accordance with POJK Regulation No. 29/POJK.04/2016 on the annual report of issuers or public companies and OJK Circular No. 16/SEOJK.04/2021 on the form and content of the annual report of issuers or public companies. In submitting this report, the Company also refers to the Guidelines for Public Company Governance to implement best practices for implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG).

In addition, this annual report is also prepared in accordance with the best practice aspects of the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI) and the ASEAN Corporate Governance Scorecards (ACGS). Accordingly, Bank BPD Bali expects that this Annual Report and the Sustainability Report will be able to promote the increased disclosure of information and transparency in line with the principles of the GCG.

In this report, references to currency units are in "Rupiah", "Rp" or "IDR", referring to the official currency of the Republic of Indonesia. All financial information is presented in Rupiah currency in accordance with the reporting in the audited financial statements prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

The Annual Report 2024 and the Sustainability Report 2024 of Bank BPDB Bali are published separately but complementary to each other and are presented in two languages, namely Indonesian and English, using easy-to-read fonts and sizes and printed with good quality. Both reports can be viewed and downloaded from BPD Bali's official website at <https://www.bpd Bali.co.id/page/read/33> and <https://www.bpd Bali.co.id/page/read/178>.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Executive Summary

Meraih Pertumbuhan Berkelanjutan Melalui Peningkatan Kemampuan Digital

Driving Sustainable Growth by Enhanced Digital Proficiency

Bali, yang terkenal dengan sebutan Pulau Dewata, adalah salah satu permata eksotis di antara ribuan kepulauan Indonesia. Pulau ini tidak hanya keindahan alam yang sangat memukau tetapi juga kekayaan seni budaya dan tradisi termasuk upacara keagamaan yang masih dilestarikan. Kombinasi yang sangat menarik antara alam dan budaya ini menjadikan Bali sebagai salah satu destinasi favorit dan terkenal di seluruh dunia.

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, TripAdvisor sebuah platform perencanaan perjalanan terkemuka telah merilis ajang penghargaan tahunan mereka yang bertajuk "Traveler's Choice Awards Best of the Best". Ajang penghargaan tertinggi dalam dunia perjalanan ini mengungkapkan berbagai daftar destinasi pilihan, berdasarkan ulasan pengguna mengenai tempat-tempat terbaik di dunia. Berdasarkan laman resmi Tripadvisor, pada ajang penghargaan *Travellers' Choice Awards Best of the Best 2025*, Bali meraih peringkat kedua sebagai destinasi wisata terbaik.

Capaian tersebut menempatkan Bali di posisi teratas sebagai destinasi unggulan internasional. Selain itu, Bali mampu mempertahankan posisinya di urutan kedua dalam ajang tersebut seperti yang diraih pada tahun 2023. Pada tahun 2024, Bali pernah menempati peringkat pertama sebagai destinasi wisata terpopuler dunia versi Tripadvisor. Capaian tersebut tentunya sangat melibatkan peran aktif Pemerintah Daerah setempat baik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota maupun Pemerintah Kabupaten disamping dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia.

Peran aktif Pemerintah Daerah Bali dalam mengembangkan industri pariwisata khususnya dan sektor ekonomi pada umumnya tentu melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Salah satu BUMD tersebut adalah PT Bank Pembangunan Daerah Bali (Bank BPD Bali atau Bank) yang didirikan pada 5 Juni 1962 dan secara resmi telah menjadi sebuah bank devisa sejak tahun 2004. Per 31 Desember 2024 sebagai sebuah Bank Umum Devisa, susunan pemegang saham Bank BPD Bali adalah Pemerintah Kabupaten Badung (43,65%), Pemerintah Provinsi Bali (29,91%), Pemerintah Kota Denpasar (12,46%), dan 7 (tujuh) Pemerintah Kabupaten lainnya yakni Gianyar, Buleleng, Karangasem, Jembrana, Klungkung, Tabanan, dan Bangli dengan kepemilikan saham secara kumulatif sebesar 13,98%.

Bank BPD Bali, sebagai sebuah bank pemegang kas daerah yang mengelola ekosistem penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah Bali serta memiliki *captive market* Aparatur Sipil Negara (ASN), pensiunan ASN, dan pembiayaan proyek-proyek yang dibiayai dengan APBD/BUMD, telah berperan penting dalam menopang pembangunan di Provinsi Bali sejak berdiri. Pada tahun 2024, Bank BPD Bali menyalurkan kredit sebesar Rp22,83 triliun dengan pertumbuhan sebesar 7,94%. Pertumbuhan kredit ini mampu tumbuh di atas pertumbuhan kredit perbankan di Bali sebesar 6,81% yoy menjadi Rp112,31 triliun dan pertumbuhan kredit Bank BPD sebesar 6,44% yoy menjadi Rp645,77 triliun. Pertumbuhan kredit lebih tinggi dibukukan oleh industri perbankan sebesar 10,39% menjadi Rp7.827,15 triliun. Dengan demikian, kontribusi penyaluran kredit Bank BPD Bali di provinsi Bali sebesar 20,33% pada tahun 2024 atau lebih tinggi dari sebesar 20,11% pada tahun sebelumnya.

Bali, known as the Island of the Gods, is one of the most exotic gems among Indonesia's thousands of islands. This island is not only a very stunning natural beauty, but it is also rich in art, culture and traditions, including religious ceremonies, which are still being preserved. This very interesting combination of nature and culture make Bali one of the most popular and famous destinations worldwide.

TripAdvisor, a leading travel planning platform, has released their annual awards event entitled "Traveler's Choice Awards Best of the Best" in the past few years. This premier awards event in the travel world reveals various lists of selected destinations based on user reviews of the world's best places. According to the official Tripadvisor website, Bali is the second-best tourist destination in the 2025 Travelers' Choice Awards Best of the Best.

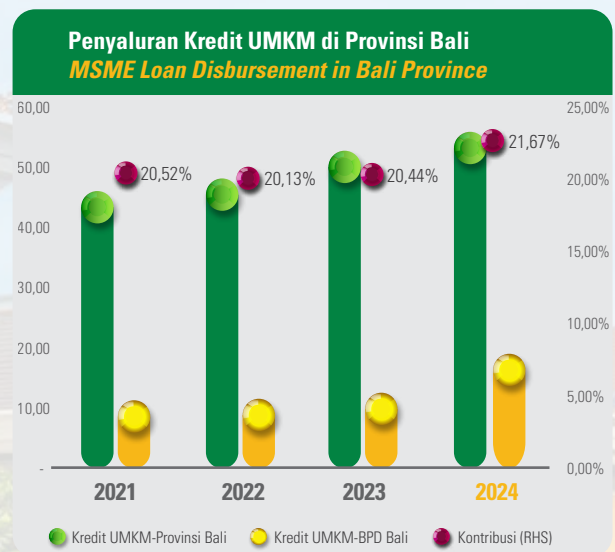
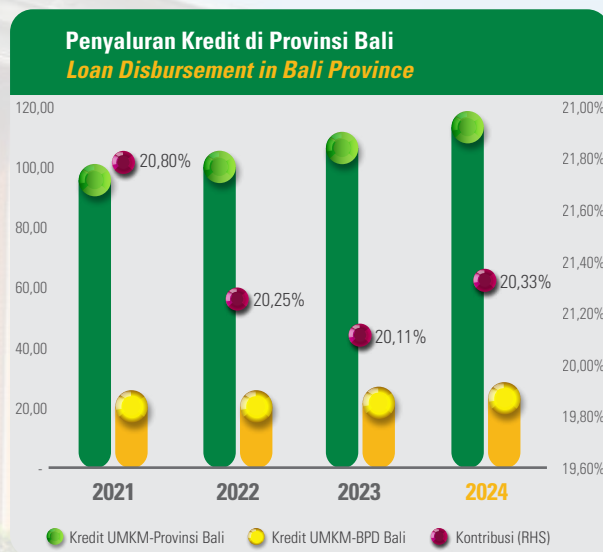
This achievement places Bali at the top of the list as one of the leading international tourist destinations. Furthermore, Bali was able to maintain its second position in the event achieved in 2023. According to Tripadvisor, Bali was ranked first as the world's most popular tourist destination in 2024. This success is undoubtedly due to the active role of the local regional administration, both the province, city and regency administration, as well as the support of the Republic of Indonesia.

The active role of the Bali Regional Government in the development of the tourism industry, particularly, and the economic sector, in general, certainly involves the Regional Owned Enterprises (BUMD). One of these BUMDs is PT Bank Pembangunan Daerah Bali (Bank BPD Bali or Bank), which has been in existence since June 5, 1962 and is officially a foreign exchange bank since 2004. As of December 31, 2024, the composition of shareholders of Bank BPD Bali is as follows: Badung regency (43.65%), Bali province (29.91%), Denpasar city (12.46%), and 7 (Seven) other regency, i.e. Gianyar, Buleleng, Karangasem, Jembrana, Klungkung, Tabanan, and Bangli with an accumulated shareholding of 13.98%.

Since its establishment, Bank BPD Bali has played an important role in supporting the development of Bali Province as a regional cash holding bank that manages the revenue and expenditure ecosystem of the Bali Regional Government and has a captive market of the State Civil Apparatus (ASN), retired ASN, and the financing of projects financed by APBD/BUMD. In 2024, Bank BPD Bali disbursed loans of Rp22.83 trillion with a growth of 7.94%. This loan growth has outperformed the total bank loans in Bali which grew by 6.81% yoy to reach Rp112.31 trillion and Bank BPDs' loan growth of 6.44% yoy to Rp645.77 trillion. The higher loan growth is recorded by banking industry of 10.39% yoy to Rp7,827.15 trillion. As a result, the contribution of Bank BPD Bali's loan disbursement in Bali Province was 20.33% in 2024, higher than 20.11% in the previous year.

Dari jumlah kredit Bank BPD Bali tersebut, 51,20% atau setara dengan Rp11,69 triliun disalurkan ke sektor UMKM pada tahun 2024. Penyaluran kredit UMKM tersebut meningkat 13,85% yoy dari sebesar Rp10,27 triliun dengan porsi kredit UMKM sebesar 48,54% pada tahun 2023. Sementara itu, kontribusi kredit UMKM Bank BPD Bali yang disalurkan terhadap perbankan di Provinsi Bali mencapai 21,67% dan 20,44% masing-masing untuk tahun 2024 dan 2023. Hal ini menunjukkan komitmen Bank terhadap sektor UMKM khususnya di Provinsi Bali dan wilayah sekitarnya.

Of the total loan disbursement of Bank BPD Bali in 2024, 51.20% or equivalent to Rp11.69 trillion was distributed to the MSME sector. MSME loan distribution increased by 13.85% yoy from Rp10.27 trillion with MSME loan share of 48.54% in 2023. Meanwhile, the contribution of MSME loan distributed by Bank BPD Bali in Bali province was 21.67% and 20.44% for 2024 and 2023 respectively. This shows the Bank's commitment to MSME sector, especially in Bali Province and surrounding areas.



Sumber/Source: Bank BPD Bali & OJK/OJK - Bali Province

Bank BPD Bali juga menyalurkan pembiayaan berwawasan lingkungan bagi kegiatan usaha yang bertujuan untuk menjaga dan/atau meningkatkan perbaikan kualitas atau fungsi lingkungan. Nilai pembiayaan berwawasan lingkungan (12 kriteria) mencapai Rp11,80 triliun pada tahun 2024, tumbuh sebesar 14,90% yoy dari senilai Rp10,27 triliun pada tahun sebelumnya. Melalui penyaluran jenis kredit ini diharapkan mampu membantu dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Penjelasan lengkap terkait penerapan aspek Lingkungan, Sosial, Tata Kelola dapat dilihat di Laporan keberlanjutan yang disajikan terpisah dari Laporan Tahunan ini.

Bank BPD Bali also disburses environmentally friendly financing for business activities aimed at the preservation and/or improvement of the quality or function of the environment. The value of environmentally friendly financing (12 criteria) in 2024 was Rp11.80 trillion, an increase of 14.90% yoy from Rp10.27 trillion in the previous year. Through the disbursement of this type of loan, it is expected to contribute to climate change mitigation and adaptation. Please refer to the Sustainability Report, which is presented separately from this Annual Report, for a full explanation of the implementation of environmental, social and governance aspects.

Ekspansi kredit yang dilakukan Bank BPD Bali senantiasa mengedepankan aspek kehati-hatian sesuai dengan ketentuan internal Bank BPD Bali. Pengelolaan aset produktif Bank BPD Bali yang lebih baik berdampak positif terhadap rasio NPL yang membaik menjadi 0,92% pada tahun 2024 dari sebesar 1,29% pada tahun sebelumnya. Rasio NPL tahun 2024 tersebut jauh lebih baik dibandingkan rasio NPL di industri perbankan di provinsi Bali sebesar 2,94%, rasio NPL Bank Pembangunan Daerah (Bank BPD) sebesar 2,48% dan rasio NPL industri perbankan sebesar 2,08%.

The expansion of lending activities carried out by Bank BPD Bali always gives priority to the aspect of prudence in accordance with the internal regulations of Bank BPD Bali. The better management of the productive assets of Bank BPD Bali has had a positive impact on the NPL ratio, which has improved from 1.29% in the previous year to 0.92% in 2024. The NPL ratio in 2024 is much better than the NPL ratio of the banking industry in Bali province of 2.94%, the NPL ratio of the regional development banks (Bank BPDs) of 2.48%, and the NPL ratio of the banking industry of 2.08%.

Pertumbuhan kredit tersebut juga disertai ketersediaan modal dengan rasio KPM Bank BPD Bali sebesar 27,45% pada tahun 2024. Capaian rasio ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 25,38% dan

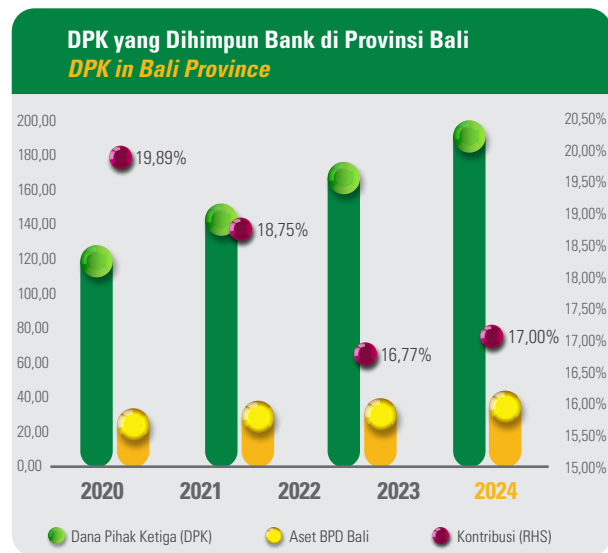
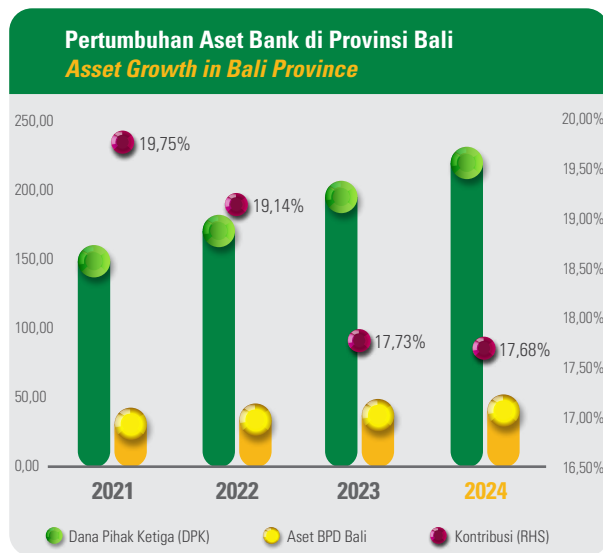
The loan growth is also accompanied by the availability of capital: Bank BPD Bali's CAR ratio is 27.45% in 2024. The achievement of this ratio is higher than the previous year's ratio of 25.38% and provides Bank BPD

memberikan ruang yang lebih lebar bagi Bank BPD Bali untuk ekspansi bisnis di masa mendatang. Capaian rasio KPMM ini lebih tinggi dibandingkan rasio KPMM Bank BPD sebesar 25,77% dan rasio KPMM industri perbankan sebesar 26,69%.

Didukung oleh ekspansi kredit tersebut, Bank BPD Bali mampu membukukan total aset senilai Rp38,31 triliun dengan pertumbuhan sebesar 11,66% yoy. Pertumbuhan aset ini sedikit lebih rendah dibandingkan aset industri perbankan di Bali yang mencatatkan kenaikan sebesar 11,96% yoy. Namun demikian, capaian pertumbuhan aset ini lebih tinggi dibandingkan Bank BPD sebesar 3,70% yoy dan industri perbankan sebesar 5,91% yoy.

Bali with more room for future business expansion. The achievement of this CAR ratio is higher than Bank BPD's CAR ratio of 25.77% and the banking industry's ratio of 26.69%.

With the support of this loan expansion, Bank BPD Bali was able to record a total asset of Rp38.31 trillion with a growth of 11.66% yoy. This growth in assets is slightly lower than the growth in assets of the banking industry in Bali which recorded a growth of 11.96% yoy. However, the achieved asset growth is higher than Bank BPD's 3.70% yoy and the banking industry's 5.91% yoy.



Sumber/Source: Bank BPD Bali & OJK/OJK - Bali Province

Kontribusi total aset Bank BPD Bali terhadap total aset perbankan di Provinsi Bali sebesar 17,68%. Sementara itu, kontribusi total aset Bank BPD Bali terhadap total aset Bank BPD dan total aset industri perbankan masing-masing sebesar 3,69% dan 0,31% pada tahun 2024.

The contribution of the total assets of Bank BPD Bali to the total assets of the Bali provincial banking industry is 17.68%. Meanwhile, the contribution of the total assets of Bank BPD Bali to the total assets of Bank BPD and to the total assets of the banking industry in 2024 is 3.69% and 0.31%, respectively.

Pertumbuhan kredit Bank BPD Bali didukung oleh likuiditas yang memadai dengan dana pihak ketiga (DPK) berhasil tumbuh 15,10% yoy menjadi Rp32,17 triliun pada tahun 2024. Pertumbuhan DPK Bank BPD Bali ini di atas kenaikan DPK di perbankan di Provinsi Bali sebesar 13,53% yoy dengan kontribusi sebesar 17,00% pada tahun 2024. Dalam skala lebih besar, kontribusi DPK Bank BPD Bali terhadap DPK Bank BPD dan industri perbankan masing-masing sebesar 4,27% dan 0,36%.

Bank BPD Bali's loan growth is supported by adequate liquidity with Third Party Funds (DPK) successful to grow by 15.10 percent year-on-year to Rp32.17 trillion in 2024. The growth of Bank BPD Bali's TPF is higher than the growth of DPK in the banking industry in Bali province of 13.53% yoy, with a contribution of 17.00% in 2024. In a broader sense, the TPK contribution of Bank BPD Bali to the DPK of Bank BPD and the banking industry are 4.27% and 0.36%, respectively.

Sejalan dengan pertumbuhan DPK yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit, rasio LDR Bank BPD Bali turun menjadi 70,95% pada tahun 2024. Meski demikian, rasio ini lebih tinggi dibandingkan perbankan di provinsi Bali sebesar 59,36%. Sementara itu, rasio LDR Bank BPD dan industri perbankan adalah sebesar 85,91% dan 88,57%.

With higher DPK growth than loan growth, Bank BPD Bali's LDR ratio decreases to 70.95% in 2024. However, this ratio is higher than that of Bali province banks with 59.36%. By comparison, the LDRs of BPD and the banking sector are 85.91% and 88.57%, respectively.

Dalam melakukan ekspansi bisnis tersebut, Bank BPD Bali juga mampu mencatatkan efisiensi operasional dengan rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 66,85% pada tahun 2024 dari 67,32% dari tahun sebelumnya. Capaian rasio BOPO ini lebih baik dibandingkan rasio BOPO Bank BPD dan industri perbankan masing-masing sebesar 81,13% dan 81,30%.

Selaras dengan ekspansi bisnis dan efisiensi Bank BPD Bali tersebut yang juga secara umum lebih baik dibandingkan target sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2024, Bank mampu membukukan pendapatan bunga bersih sebesar Rp2,38 triliun atau 101,04% dari target dengan rasio margin bunga bersih (NIM) sebesar 6,66%. Meski sedikit lebih rendah dari target sebesar 6,82%, capaian rasio ini lebih baik dibandingkan rasio NIM Bank BPD dan industri perbankan masing-masing sebesar 5,24% dan 4,62%.

Selanjutnya, capaian laba tahun berjalan senilai Rp878,47 miliar atau 112,36% dari target yang ditetapkan menghasilkan rasio ROA sebesar 3,20%. Meski sedikit lebih tinggi dari target sebesar 3,02%, capaian rasio ini lebih tinggi dibandingkan rasio ROA Bank BPD sebesar 1,76% dan rasio ROA industri perbankan sebesar 2,69%. Sementara itu, rasio ROE meningkat menjadi 21,68% pada tahun 2024, lebih tinggi dibandingkan target sebesar 20,11%.

Pencapaian kinerja yang solid yang secara umum lebih baik dari target dan kinerja perbankan di Bali, Bank BPD lainnya dan industri perbankan menunjukkan implementasi strategi yang efektif dan tepat sasaran atas tiga arah kebijakan Bank BPD Bali yang terdiri dari 3 (tiga) aspek utama yakni peningkatan kemampuan sebagai ketahanan kelembagaan, peningkatan kemampuan sebagai *agent of regional development*, dan peningkatan daya saing. Ketiga arah kebijakan strategis Bank tersebut diturunkan menjadi sejumlah inisiatif strategis yang dijelaskan secara lebih lengkap di bab Laporan Manajemen dan bab Analisa dan Pembahasan Manajemen.

Selain itu, perbaikan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dan pilar governansi korporat memperkuat ekspansi bisnis dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beragam aktivitas penerapan GCG yang telah memenuhi ketentuan regulator diperkuat dengan partisipasi aktif dan sinergi yang kuat mampu meningkatkan kualitas penerapan GCG di semua jenjang organisasi. Langkah ini juga diperkuat dengan penerbitan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) baru serta melakukan pembaruan atas BPP dan SOP yang secara kumulatif mencapai 75 (tujuh puluh lima) ketentuan yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi Bank BPD Bali selama tahun 2024.

Capaian penting lain terkait penerapan GCG adalah kemampuan Bank BPD Bali untuk mempertahankan hasil *Self-Assessment GCG* berperingkat 2 dengan Predikat Komposit "Baik". Selain itu, penilaian Tingkat Kesehatan Bank BPD Bali juga berperingkat PK-2. Artinya, kondisi Bank secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal.

In carrying out this business expansion, Bank BPD Bali was also able to achieve operational efficiency with a ratio of operating expenses to operating income (BOPO) of 66.85% in 2024 compared to 67.32% in the previous year. This achievement of the BOPO ratio is better than the BOPO ratio of Bank BPD and the banking industry, which were 81.13% and 81.30%, respectively.

In line with Bank BPD Bali's business expansion and efficiency, which is also generally better than the target set in the Bank's Business Plan (RBB) for 2024, the Bank achieved net interest income of Rp2.38 trillion or 101.04% of target with net interest margin (NIM) ratio of 6.66%. Although slightly lower than the targeted 6.82%, this ratio is better than the NIM ratio of Bank BPD and the banking industry, which was 5.24% and 4.62% respectively.

Furthermore, the profit for the year of Rp878.47 billion or 112.36% of the target resulted in an ROA ratio of 3.20%. Although slightly higher than the target of 3.02%, the achieved ROA ratio is higher than Bank BPD's ROA ratio of 1.76% and the banking industry's ROA ratio of 2.69%. Meanwhile, the ROE ratio increased to 21.68% in 2024, higher than the targeted 20.11%.

The solid performance achieved, which is generally better than the target and the performance of banking in Bali, other BPD banks and the banking industry, shows the implementation of effective and targeted strategies for the three strategic directions of Bank BPD Bali that consist of 3 (three) main aspects, namely strengthening capacity as institutional resilience, strengthening capacity as an agent of regional development, and strengthening competitiveness. The three strategic policy directions of the Bank are broken down into a number of strategic initiatives which are explained in more detail in the chapter on the Management Report and in the chapter on Management's Analysis and Discussion.

In addition, improving the implementation of the Good Corporate Governance (GCG) Principles and Pillars strengthens business expansion while still prioritizing the principle of prudence and complying with applicable regulations. Various GCG implementation activities that have met regulatory requirements are strengthened by active participation and strong synergy. This can improve the quality of GCG implementation at all levels of the organization. This step is also strengthened by the issuance of a new Company Manual (BPP) and Standard Operating Procedure (SOP) as well as updating the BPP and SOP, which cumulatively reached 75 (seventy-five) provisions stipulated by the Decree of the Board of Directors of Bank BPD Bali during 2024.

Another important achievement in relation to the implementation of GCG is the ability of Bank BPD Bali to maintain the results of the GCG self-assessment at the level of 2 with a composite predicate of "Good". In addition, the Health Level Assessment of Bank BPD Bali is also rated PK-2. This reflects that the bank's condition is generally healthy such that it is considered capable of withstanding significant negative impacts from changes in business conditions and external factors.



Penilaian eksternal yang dilakukan PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) juga menetapkan peringkat *General Obligation* idA+/stabil kepada Bank BPD Bali. Artinya, Bank BPD Bali memiliki kemampuan yang kuat dibandingkan obligor Indonesia lainnya untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya.

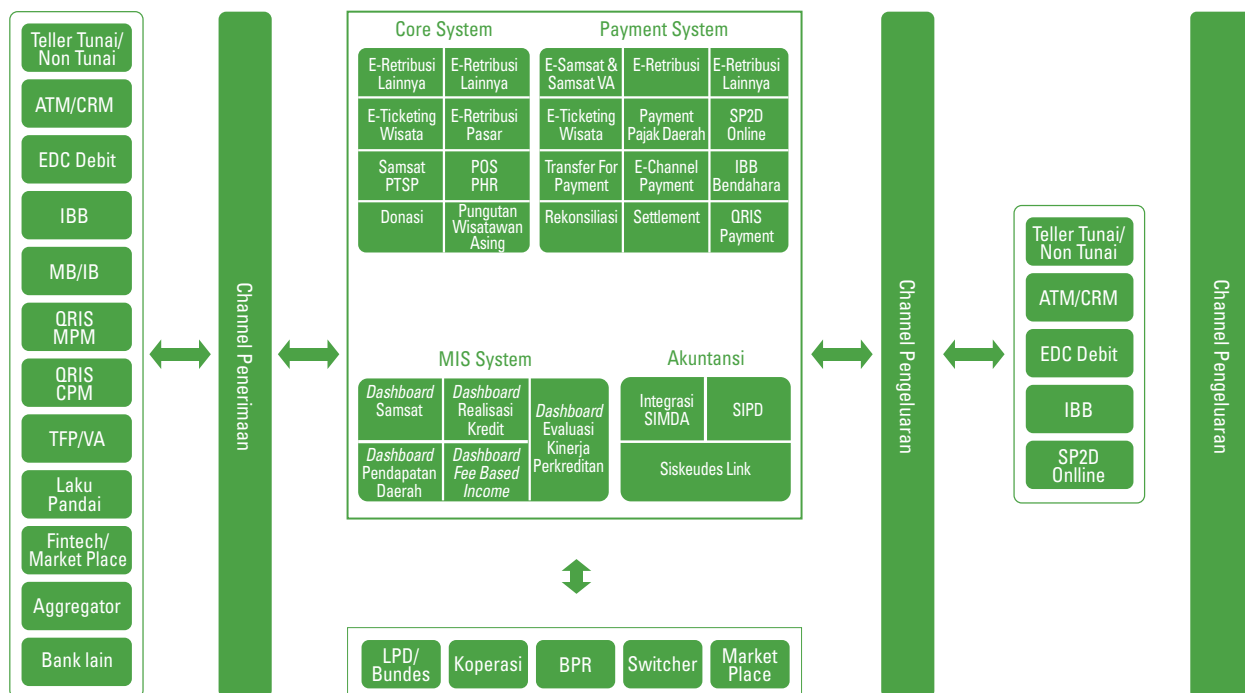
Hal strategis lainnya yang menjadi aspek penting dibalik keberhasilan Bank mencapai kinerja yang solid pada tahun 2024 adalah peningkatan kemampuan digital yang dilakukan melalui transformasi digital yang dilakukan secara berkesinambungan. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan salah satu Misi Bank BPD Bali adalah untuk memberikan solusi produk layanan yang inovatif melalui pengembangan ekosistem digital. Secara historis, program transformasi digital dimulai sejak tahun 2023 yang dimulai dengan ATM Bersama, MPN, dan PPOB hingga periode 2024-2025 yang berada pada fase *Digital Banking Enhancement*, *E-Money Enhancement*, *Open API Enhancement*, *Siskeudes*, dan *New Mobile Banking*.

Hingga saat ini, Bank BPD Bali telah menerapkan produk digital dan elektronik seperti *Mobile Banking*, *Internet Banking* Bisnis/Korporasi, *Laku Pandai*, *Automatic Teller Machine (ATM)*, *Cash Recycling Machine (CRM)*, *Uang Elektronik Server Based* *Balipay* serta produk ekosistem digital lainnya untuk mendukung digitalisasi dan elektronifikasi pendapatan dan penerimaan Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali. Langkah ini mampu mendukung transformasi transaksi penerimaan dan pendapatan daerah dan berperan sebagai *subject expert matter* dalam elektronifikasi sistem, transaksi, dan pembayaran berbasis digital untuk mendukung transparansi pembayaran serta mendukung inklusi keuangan daerah yang merupakan mitra pemerintah daerah dalam rangka menunjang peningkatan perekonomian Provinsi Bali.

The external assessment conducted by PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) also assigned Bank BPD Bali a general obligation rating of idA+/stable. This means that Bank BPD Bali has a strong ability to meet its long-term financial obligations in comparison to other Indonesian debtors.

Another strategic aspect is the improvement of digital capabilities through continuous digital transformation, which is an important aspect behind the bank's success in achieving solid performance in 2024. This is for the realization of one of Bank BPD Bali's missions, which is the provision of innovative product service solutions through the development of a digital ecosystem. Historically, the digital transformation program began in 2023, starting with ATM Bersama, MPN, and PPOB until the period 2024-2025, which is in the phases of digital banking expansion, electronic money expansion, open API expansion, siskeudes, and new mobile banking.

So far, Bank BPD Bali has implemented digital and electronic products like mobile bank, corporate internet bank, laku pandai, ATM, cash recycling device (CRM), Balipay Server Based Electronic Money, and other digital ecosystem products to support the digitalization and electronification of income and revenue of Bali Regency and cities in Bali. This step is able to support the transformation of regional income and receipt transactions and act as a subject matter expert in the electronification of digital-based systems, transactions and payments to support payment transparency and regional financial inclusion. This is a partner of the regional government to support the improvement of the economy of the Province of Bali.



Sumber/Source: Bank BPD Bali

Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah juga terus ditingkatkan pada lini penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui E-Samsat, Pemantauan POS PHR, serta *Dashboard* Pemantauan Pajak Daerah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penerimaan pajak daerah. Selain itu, Inovasi dan transformasi digital juga tak henti-hentinya diperluas dalam rangka peningkatan inklusi keuangan dan pelayanan menyeluruh kepada institusi dan mitra Bank BPD Bali untuk bersinergi dan bertransformasi bersama-sama. Penggunaan platform digitalisasi untuk perluasan layanan diantaranya dengan integrasi pembayaran pada sistem informasi Rumah Sakit, UKM, maupun institusi pendidikan dari segala jenjang.

Di sisi lain, Bank BPD Bali juga senantiasa meningkatkan sistem yang mampu melindungi data nasabah dari risiko pencurian atau penyalahgunaan. Investasi pada teknologi enkripsi, firewall, serta sistem deteksi dan respon ancaman siber menjadi prioritas untuk menjaga kepercayaan nasabah. Hal ini sebagai realisasi atas komitmen untuk pemenuhan adopsi teknologi informasi dalam mendukung fungsi bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 21 Tahun 2023 tentang Layanan Bank Oleh Bank Umum.

Transformasi digital yang telah dilakukan oleh Bank BPD Bali terbukti berdampak signifikan dalam mendorong perbaikan berkelanjutan di berbagai aspek operasional, layanan, dan manajemen. Dampak positif utama dari transformasi digital Bank adalah peningkatan efisiensi operasional, perbaikan kualitas layanan, peningkatan customer experience, transparansi dan akuntabilitas, mendorong inovasi berkelanjutan, penguatan inklusi dan literasi keuangan, dan peningkatan daya saing.

Optimization of regional revenue collection is also further improved in motor vehicle tax collection through E-Samsat, POS PHR monitoring and Regional Tax Monitoring Dashboard to realize transparency and accountability of regional tax collection. In addition, digital innovation and transformation are also continuously expanded to increase financial inclusion and comprehensive services for institutions and partners of Bank BPD Bali for synergy and transformation together. The use of digitalization platforms for the expansion of services includes the integration of payments into the information systems of hospitals, small and medium enterprises and educational institutions of all levels.

On the other hand, Bank BPD Bali is also continuing to improve the systems that are able to protect the data of its customers from the risk of theft or misuse. Investments in encryption technology, firewalls, and systems to detect and respond to cyber threats are prioritized to maintain customer trust. This is a realization of the commitment to fulfill the adoption of information technology in the support of banking functions as stipulated in the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 21 of 2023 on banking services provided by commercial banks.

The digital transformation undertaken by Bank BPD Bali has proven to have a significant impact in driving continuous improvement in various aspects of operations, services, and management. Key positive impacts of its digital transformation include increased operational efficiency, improved service quality, enhanced customer experience, transparency and accountability, continuous innovation, enhanced financial inclusion and literacy, and increased competitiveness.



PENCAPAIAN PENTING TAHUN 2024

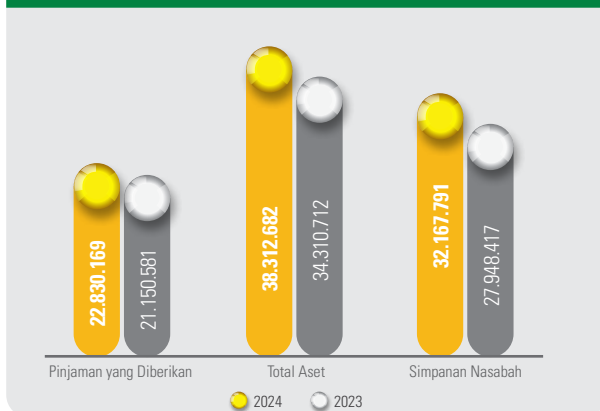
2024 Key Accomplishments

Pencapaian kinerja Bank BPD Bali yang solid dan mampu di atas kinerja pertumbuhan dari bank-bank BPD dan industri perbankan dijelaskan pada tabel dan bagan berikut ini:

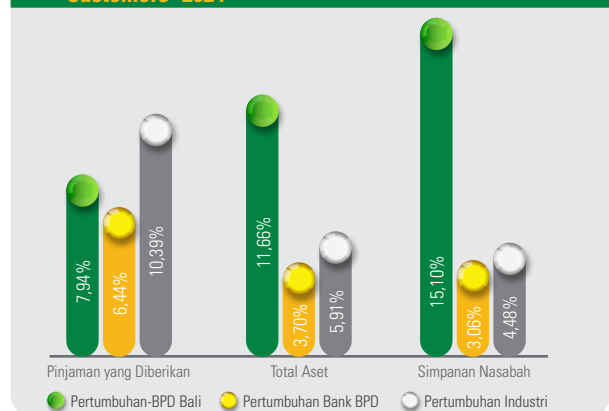
The following table and chart illustrate the solid performance of Bank BPD Bali and its ability to outperform the growth performance of BPD banks and the banking industry:

Keterangan Description	2024	2023	Pertumbuhan- BPD Bali BPD Bali growth	Pertumbuhan Bank-Bank BPD BPDs growth	Pertumbuhan Industri Industry growth
Pinjaman yang diberikan Loans	22.830.169	21.150.581	7,94%	6,23%	10,39%
Total Aset Total Assets	38.312.682	34.310.712	11,66%	3,50%	5,91%
Simpanan Nasabah Deposits from Customers	32.167.791	27.948.417	15,10%	2,67%	4,48%
Pendapatan Bunga Bersih Net Interest Income	2.377.735	2.241.669	6,07%	NA	NA
Laba Tahun Berjalan Income For the Year	878.466	738.228	19,00%	NA	NA

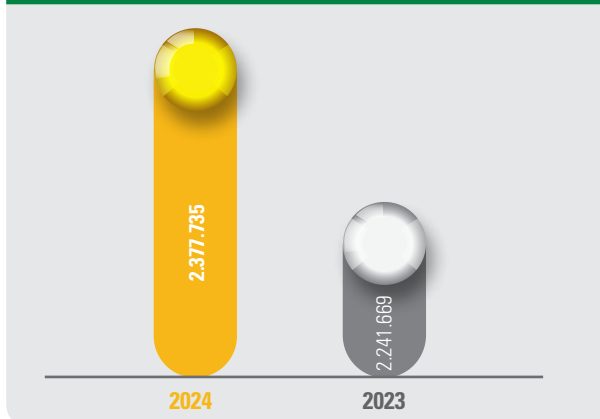
Pinjaman yang diberikan, Total Aset, dan Simpanan Nasabah
Loans, Total Assets, and Deposits from Customers



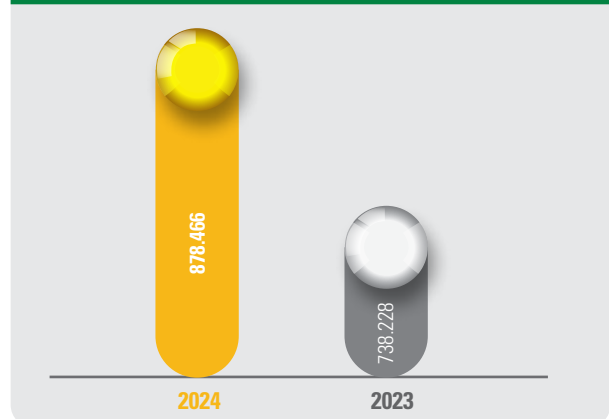
Pertumbuhan: Pinjaman yang diberikan, Total Aset, dan Simpanan Nasabah - 2024
Growths of Loans, Total Assets, and Deposits from Customers -2024



Pendapatan Bunga Bersih
Net Interest Income



Laba Tahun Berjalan
Income For the Year

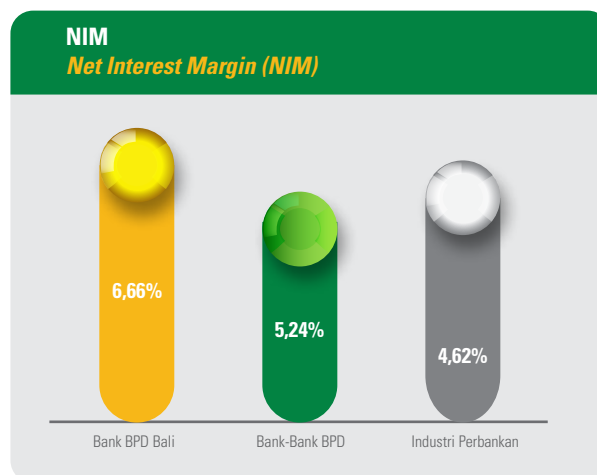
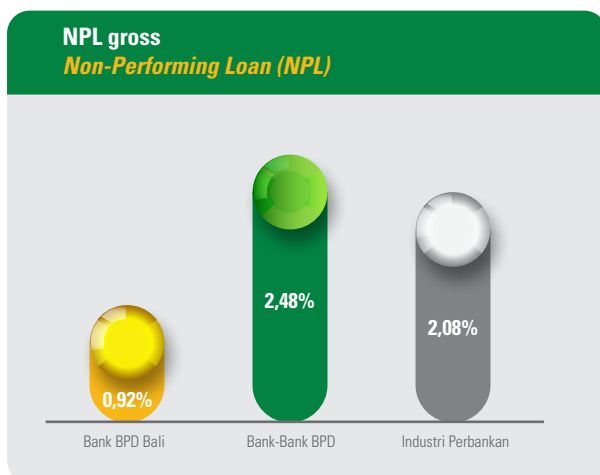
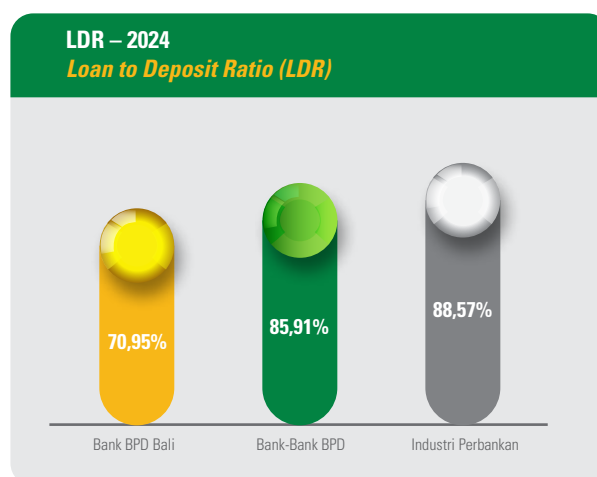
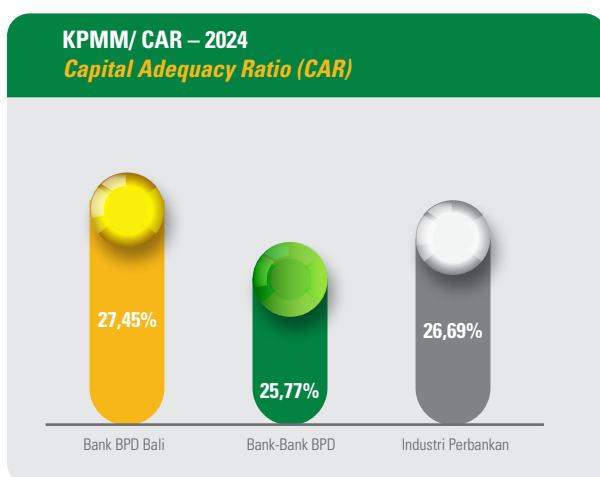


Sumber/Source: Bank BPD Bali & OJK/OJK - Bali Province

Selain itu, capaian rasio keuangan BPD Bali dibandingkan bank-bank BPD dan industri perbankan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Moreover, BPD Bali's financial ratio achievements compared to BPD banks and banking industry in 2024 are

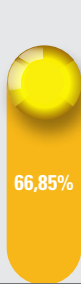
Keterangan Description	Bank BPD Bali		Bank-Bank BPD BPDs	Industri Perbankan Banking Industry
	2024	2023		
KPMM/ CAR	27,45%	25,38%	25,77%	26,69%
LDR	70,95%	75,65%	85,91%	88,57%
NPL gross	0,92%	1,29%	2,48%	2,08%
NPL net	0,02%	0,06%	NA	NA
NIM	6,66%	7,16%	5,24%	4,62%
BOPO	66,85%	67,32%	81,13%	81,30%
ROA	3,20%	3,24%	1,76%	2,69%
ROE	21,68%	20,23%	NA	NA



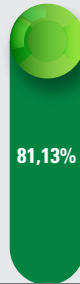


BOPO

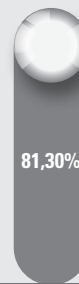
Operating Expenses/Operating Income



Bank BPD Bali



Bank-Bank BPD



Industri Perbankan

ROA

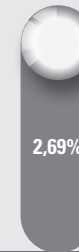
Return On Assets Ratio



Bank BPD Bali



Bank-Bank BPD



Industri Perbankan

PENJELASAN TEMA

Theme Description



Meraih Pertumbuhan **BERKELANJUTAN** Melalui **PENINGKATAN** Kemampuan Digital *Driving Sustainable Growth by Enhanced Digital Proficiency*

Komitmen kuat Bank BPD Bali terhadap pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan diwujudkan melalui konsistensi penerapan Tata Kelola Yang Baik termasuk terkait dengan transformasi layanan perbankan digital. Selain melakukan inovasi digital secara berkelanjutan dan kerja sama strategis dengan berbagai pihak, Bank BPD Bali juga melakukan pengembangan aplikasi yang terintegrasi dengan tim keamanan dan pemantauan keamanan teknologi informasi secara *real-time* untuk mengantisipasi potensi serangan siber.

Bank BPD Bali juga melakukan edukasi kepada para nasabah terkait dengan keamanan digital maupun terkait dengan produk dan layanan perbankan digital. Pemberdayaan UMKM dan pengembangan ekonomi masyarakat juga dilakukan dengan mengoptimalkan digitalisasi layanan Bank disamping senantiasa meningkatkan kualitas penerapan tata kelola yang baik, manajemen risiko, dan pengendalian dalam operasional organisasinya.

Melalui beragam langkah strategis tersebut, Bank BPD Bali optimis mampu menjadi yang kuat, berdaya saing tinggi, dan terkemuka dalam melayani UMKM serta berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat diwujudkan dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang terarah dan terukur dampaknya serta mengacu pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Bank BPD Bali's strong commitment to achieving sustainable business growth is demonstrated through consistent implementation of Good Governance, including those related to transforming digital banking services. In addition to the implementation of continuous digital innovation and strategic cooperation with various parties, Bank BPD Bali also develops applications that are integrated with the security team and real-time monitoring of the security of information technology in order to anticipate potential cyber-attacks.

Bank BPD Bali also provides customer education on digital security and in relation to digital banking products and services. MSME empowerment and community economic development are also carried out through the optimization of the digitalization of the bank's services, in addition to the continuous improvement of the quality of the implementation of good governance, risk management and control in the operations of its organization.

Through these various strategic steps, Bank BPD Bali is optimistic that it will be strong, highly competitive, and a leader in providing services to MSMEs and in contributing to the sustainable economic growth and development of the region. Supporting the improvement of community welfare is manifested in the implementation of social and environmental responsibility (TJSL), which is targeted and has measurable impact and refers to the Sustainable Development Goals (TPB).

KESINAMBUNGAN TEMA

Theme Continuity


2023

Tumbuh Kuat & Berkesinambungan

Bank BPD Bali memahami bahwa pertumbuhan tanpa keberlanjutan tidak berarti apa-apa. Oleh karena itu, Bank BPD Bali telah memastikan bahwa pertumbuhannya didasarkan pada prinsip-prinsip keberlanjutan. Bank BPD Bali telah mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan. Ini termasuk kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang terintegrasi dengan baik, praktik tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*), serta investasi dalam teknologi dan efisiensi energi.

Bank BPD Bali understands that growth without sustainability means nothing. Therefore, Bank BPD Bali has ensured that its growth is based on the principles of sustainability. Bank BPD Bali has taken concrete steps to ensure that its activities support sustainable economic, social, and environmental development. These include a well-integrated Social and Environmental Responsibility (CSR) policy, good corporate governance (GCG) practices, as well as investments in technology and energy efficiency.


2022

Tumbuh dan Berkembang dengan Inovasi Digital

Pada tahun 2022, Bank BPD Bali telah meluncurkan produk dan layanan baru antara lain uang elektronik *server based* *Balipay*, Layanan Transaksi Tarik/Setor Tunai Tanpa Kartu (*Cardless*) menggunakan *Mobile Banking*, *QRIS Cross Border*, Kerjasama Layanan *Payment Gateway*, *BI FAST*, *Online on Boarding*, Kerjasama *merchant aggregator* dengan PT Artajasa Pembayaran Elektronik, Deposito Kapitalisasi, *Co-branding* Jakcard, dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).

In 2022, Bank BPD Bali has launched new products and services including Balipay server-based electronic money, Cardless Cash Withdrawal/Deposit Transaction Services using Mobile Banking, QRIS Cross Border, Payment Gateway Service Collaboration, BI FAST, Online On Boarding, Merchant aggregator collaboration with PT Artajasa Electronic Payments, Capitalization Deposits, Jakcard Co-branding, and Regional Government Credit Cards (KKPD).


2021

Pertumbuhan Berkelanjutan di Era Baru

Bank BPD Bali berupaya mengambil peranan dalam terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Upaya yang dijalani untuk bisa bertahan dan senantiasa bertumbuh di era baru setelah munculnya pandemi COVID-19 adalah dengan tetap konsisten dalam menjalani perannya sebagai pembiayaan pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sustainable Growth In the New Era

Bank BPD Bali seeks to take a role in the realization of economic growth and regional development. The efforts undertaken to survive and grow in the new era after the COVID-19 pandemic is to remain consistent in carrying out its role as financing for development that is able to improve the welfare of the community.

KEUNGGULAN KOMPETITIF KAMI

Our Competitive Advantages

Sebagai sebuah Bank Pembangunan Daerah yang berdiri sejak tahun 1962, Bank BPD Bali memiliki keunggulan kompetitif sebagai berikut:

As a regional development bank established in 1962, Bank BPD Bali has the following competitive advantages:

No	Keunggulan Kompetitif	Penjelasan	Description
1	Kepemilikan saham dimiliki oleh berbagai Pemerintah Kota dan Kabupaten serta Pemerintah Provinsi Bali <i>Shares owned by various city and regency governments and the provincial government of Bali</i>	Sebagai sebuah Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang fokus kegiatan usaha di Bali, kepemilikan saham oleh berbagai Pemerintah Kota dan Kabupaten serta Pemerintah Provinsi Bali berdampak positif terhadap operasional Bank BPD Bali. Dari sisi pendanaan dan penyaluran kredit serta <i>captive market</i> atas produk dan layanan Bank di pasar lokal menjadi keunggulan kompetitif.	As a Regional Development Bank (BPD) that focuses on operating in Bali, Bank BPD Bali's operations are positively impacted by its ownership by various City and Regency Governments as well as the Bali Provincial Government. It is a competitive advantage in terms of funding and loan distribution, as well as having a captive market for the Bank's products and services in the local market.
2	Ekspansi kredit Bank turut mendukung pertumbuhan ekonomi Bali <i>Bank BPD Bali's loan disbursement supports Bali's economic growth</i>	Bank BPD Bali mampu membukukan pertumbuhan kredit sebesar 7,94% yoy pada tahun 2024 atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit Bank BPD sebesar 6,44% yoy. Capaian ini turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Bali yang mencapai 5,48% pada tahun 2024.	Bank BPD Bali was able to record a loan growth of 7.94% yoy in 2024, or higher than Bank BPDs' loan growth of 6.44% yoy. This performance also contributed to Bali's economic growth, which reached 5.48% yoy in 2024.
3	Kontribusi lainnya kepada Pemerintah Kota dan Kabupaten serta Pemerintah Provinsi Bali berupa pembagian dividen <i>Another contribution to the city, regency and provincial governments of Bali in the form of dividend payments.</i>	Kontribusi kepada Pemerintah Kota dan Kabupaten serta Pemerintah Provinsi Bali dalam bentuk pembagian dividen. Secara kumulatif, Bank BPD Bali telah membagikan dividen senilai Rp553,67 miliar dan Rp452,64 miliar masing-masing untuk tahun buku 2023 dan 2022. Pembagian dividen ini berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan Pemerintah Kota dan Kabupaten serta Pemerintah Provinsi Bali.	On a cumulative basis, Bank BPD Bali has distributed dividends of Rp553.67 billion and Rp452.64 billion for the fiscal years 2023 and 2022, respectively. This dividend distribution has a positive impact on increasing revenue for city, regency and provincial governments.
4	Pertumbuhan aset Bank BPD Bali lebih tinggi dibandingkan Bank Umum dan Bank BPD <i>Bank BPD Bali's asset growth higher than commercial banks and BPD banks</i>	Bank BPD Bali berhasil membukukan pertumbuhan aset sebesar 11,66% yoy didukung oleh pertumbuhan kredit. Pertumbuhan aset ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan aset Bank BPD dan industri perbankan yang masing-masing naik sebesar 3,70% yoy dan 5,91% yoy.	Bank BPD Bali achieved asset growth at 13.25% yoy, driven primarily by credit growth. This asset growth is higher than that of Bank BPDs and banking industry, which grew by 3.70% yoy and 5.91% yoy, respectively.
5	Pengelolaan aset produktif lebih baik dibandingkan industri dan Bank BPD <i>Better than industry and BPD Banks in productive asset management</i>	Kenaikan aset ini mampu diperkuat dengan pengelolaan aset produktif lebih baik dibandingkan Bank BPD dan industri perbankan. NPL gross Bank BPD Bali sebesar 0,92%, lebih baik dibandingkan NPL Bank BPD sebesar 2,48% dan NPL industri perbankan sebesar 2,08% pada tahun 2024.	This increase in assets has been strengthened by a better management of the productive assets compared to Bank BPDs and industry average. Bank BPD Bali's gross NPL was 0.92%, better than Bank BPDs' NPL of 2.48% and banking industry's NPL of 2.08% in 2024.
6	Permodalan yang lebih kuat untuk menopang ekspansi bisnis <i>Stronger capital in support of business expansion</i>	Pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata Bank BPD tersebut didukung oleh ketersediaan modal yang memadai dengan rasio KPMM sebesar 27,45% pada tahun 2024. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan rasio KPMM Bank BPD sebesar 25,77% dan rasio KPMM industri perbankan sebesar 26,69%.	The higher loan growth compared to the BPD Bank average was supported by the availability of adequate capital with a CAR ratio of 27.45% in 2024. This performance is higher than BPD Bank's CAR of 25.77% and banking industry's CAR of 26.69%.

Selain itu, terkait dengan digitalisasi layanan perbankan, keunggulan kompetitif perbankan digital Bank BPD Bali dibandingkan dengan BPD lainnya adalah sebagai berikut:

In addition, with regard to the digitalization of banking services, the competitive advantages of Bank BPD Bali's digital banking services over other BPDs are as follows:

- Bank BPD Bali sebagai salah satu bank BPD pertama yang mendapatkan persetujuan KKI Segmen Pemerintah Berbasis QRIS as Issuer dan Acquirer, KKI Segmen Pemerintah berbasis kartu Fisik as Issuer, serta sebagai Bank BPD pertama yang mendapatkan rekomendasi ASPI untuk pengembangan KKI Segmen Pemerintah Online Payment Tokenisasi as Issuer dan Acquirer.
- Bank BPD Bali as one of the first BPD banks to receive approval for Government Segment KKI based on QRIS as Issuer and Acquirer, Government Segment KKI based on Physical Card as Issuer, and as the first BPD bank to receive ASPI recommendations for developing Government Segment KKI Online Payment Tokenization as Issuer and Acquirer.



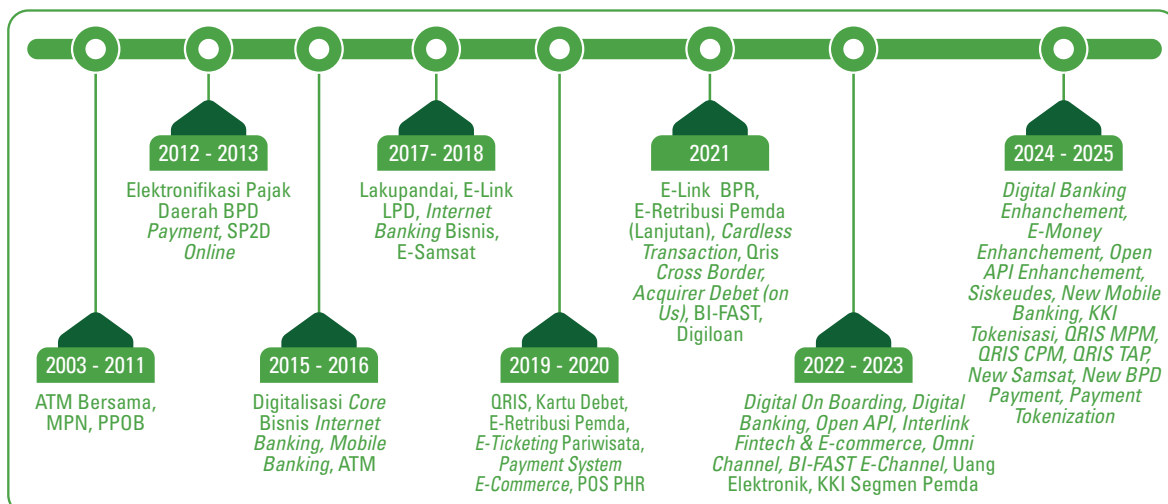
- Bank BPD Bali sebagai bank BPD yang telah memiliki persetujuan QRIS MPM, serta sebagai bank BPD pertama yang mendapatkan persetujuan QRIS Crossborder Thailand, Malaysia dan Singapura, serta sebagai Bank BPD pertama yang masuk dalam *sandbox* pengembangan QRIS Cross Border dengan Negara Jepang.
 - Bank BPD Bali juga sebagai bank BPD yang telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia untuk pengembangan produk dan kerja sama berupa migrasi *Proprietary API* ke Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) berdasarkan surat Bank Indonesia nomor: 24/581/DKSP/Srt/B Tanggal 29 Desember 2022.
 - Bank BPD Bali sebagai bank BPD yang ikut sebagai peserta *sandbox* pengembangan QRIS Tap Berbasis NFC berdasarkan surat penetapan Bank Indonesia nomor: 26/477/DKSP/Srt/B Tanggal 20 Desember 2024 perihal: Penetapan peserta dan skenario uji coba Pengembangan Inovasi Teknologi Sistem Pembayaran QRIS Tap Berbasis NFC.
 - Bank BPD Bali sebagai salah satu bank BPD yang telah menyelesaikan tahapan Tes operasional SIPD RI bersama Pusdatin Kemendagri di tahun 2024.
 - Bank BPD Bali sebagai Bank RKUD terbaik II se-Jawa-Bali dalam rangka *championship* TP2DD.
 - Bank BPD Bali sebagai salah bank BPD piloting pengembangan Siskeudes Link pengeluaran dalam mendukung percepatan transaksi non tunai pada Pemerintah Desa bersama Kemendagri.
- Bank BPD Bali as the first BPD bank to obtain QRIS MPM approval and the first BPD bank to obtain approval for QRIS Cross Border Thailand, Malaysia and Singapore and the first BPD bank to enter the QRIS Cross Border development sandbox with Japan.*
 - Bank BPD Bali is also a BPD Bank that has received approval from Bank Indonesia for product development and cooperation in the form of Proprietary API Migration to the National Standard Open API Payment (SNAP) based on Bank Indonesia Letter Number: 24/581/DKSP/Srt/B dated December 29, 2022.*
 - Bank BPD Bali as a BPD bank that participated as a participant in the sandbox for the development of the NFC-based QRIS Tap payment system based on the determination letter number: 26/477/DKSP/Srt/B of Bank Indonesia dated December 20, 2024 regarding: Determination of Participants and Testing Scenarios for the Development of NFC-Based QRIS Tap Payment System Technology Innovation.*
 - Bank BPD Bali as one of the BPD banks that completed the SIPD RI operational test phase with the Pusdatin of the Ministry of Home Affairs in 2024.*
 - Bank BPD Bali as the second best RKUD bank in Java-Bali in the TP2DD championship.*
 - Bank BPD Bali as one of the BPD banks to pilot the development of Siskeudes Link expenses in support of the acceleration of cashless transactions in village government with the Ministry of Home Affairs.*

PENGUATAN EKOSISTEM UNTUK MENDUKUNG TRANSFORMASI DIGITAL SECARA *END TO END*

Ecosystem Empowerment in Support of End-to-End Digital Transformation

Transformasi Digital Bank BPD Bali

Digital Transformation of Bank BPD Bali



Bank BPD Bali melakukan inovasi terhadap produk layanan digital secara berkelanjutan dalam memenuhi keinginan para pemangku kepentingan. Secara kronologis, produk-produk yang telah diluncurkan dari awal antara lain:

1. Selama tahun 2003-2011, Bank BPD Bali bekerjasama dengan lembaga *switching* untuk penerapan ATM Bersama diantaranya bekerja sama dengan lembaga *switching* PT Arta Jasa.
2. Pada tahun 2016-2017, Bank BPD Bali mendapatkan persetujuan penerbitan *mobile banking* dan *internet banking* Bisnis.
3. Pada tahun 2017-2018, Bank BPD Bali mengimplementasikan LAKUPANDAI Layanan Keuangan Tanpa Kantor Cabang berupa agen dengan nama agen MAILAKU dan aplikasi MAILAKU *mobile*.
4. Selama tahun 2019-2021 Bank BPD Bali mendapatkan persetujuan implementasi Kartu debit GPN, QRIS MPM, Implementasi QRIS *cross border* Thailand, SMS notifikasi dan *Direct Debet*.
5. Selanjutnya, selama tahun 2022-2023:
 - Bank BPD Bali mendapatkan persetujuan atas implementasi *cardless* pada *Mobile Banking* penarikan di Mesin ATM/CRM, *Teller*, Agen *lakupandai* dan *Indomaret*.
 - Mendapatkan persetujuan atas UE *server base* dengan nama *Balipay*
 - Bank BPD Bali melakukan Kerjasama *co-branding* Kartu UE Bank DKI atas nama *Balipaycard*,
 - Implementasi QRIS *Crossborder* Malaysia dan Singapore.
 - Implementasi Kartu Kredit Pemerintah/KKI berbasis QRIS pada *mobile banking*
 - Mendapatkan persetujuan penerbitan fisik Kartu Kredit Indonesia
 - Implementasi perluasan kanal penerimaan pemda bekerjasama dengan *payment gateway* salah satu yang berjalan Kerjasama Layanan *payment gateway* sebagai *merchant* dengan bank BCA
 - Kerjasama kartu *co-branding* uang elektronik dengan BCA yaitu *co-branding* BPD Bali Flazz
 - Implementasi *siskeudes* link
 - Integrasi SP2D *Online* pada *web teller* pada aplikasi SIPD RI

Tahun 2024, on proses memohon persetujuan diantaranya:

- *New mobile banking* Bank BPD Bali
- QRIS CPM
- *Acquiring* debit
- QRIS Tuntas
- QRIS Tap/NFC
- KKI *online payment*
- Tahap awal pengembangan Layanan Keuangan Digital

Informasi lebih lengkap terkait perbankan digital termasuk di dalamnya tranformasi digital dapat dilihat di Bab Profil Perusahaan bagian Perbankan Digital.

Bank BPD Bali has been innovating digital service products sustainably to meet its stakeholders' needs. Chronologically, the products that were launched from the beginning include:

1. *During 2003-2011, Bank BPD Bali cooperated with exchange institutions to implement ATM Bersama, including cooperation with exchange institutions PT Arta Jasa.*
2. *In 2016-2017, Bank BPD Bali received approval to issue mobile banking and internet banking business.*
3. *In 2017-2018, Bank BPD Bali implemented LAKUPANDAI financial services without branches in the form of agents named MAILAKU agents and MAILAKU mobile application.*
4. *During 2019-2021, Bank BPD Bali received approval to implement GPN debit cards, QRIS MPM, implementation of QRIS cross-border Thailand, SMS notifications and direct debit.*
5. *Furthermore, during 2022-2023:*
 - *Bank BPD Bali received approval for the implementation of cardless on mobile banking withdrawals at ATM/CRM machines, tellers, Lakupandai agents and Indomaret.*
 - *Received approval for UE server base with the name Balipay*
 - *Bank BPD Bali conducted a co-branding cooperation with UE Bank DKI Card under the name Balipaycard,*
 - *Implementation of QRIS Cross Border in Malaysia and Singapore.*
 - *Implementation of Government Credit Cards/KKI based on QRIS on Mobile Banking*
 - *Received approval for physical issuance of Indonesian credit cards*
 - *Implementation of expansion of local government acceptance channels in cooperation with payment gateways, one of which is the ongoing payment gateway service cooperation as a merchant with BCA Bank.*
 - *Co-branding Electronic money card collaboration with BCA, namely BPD Bali Flazz co-branding*
 - *Implementation of the Siskeudes link*
 - *Integration of SP2D Online on the web teller on the SIPD RI application.*

In 2024, on the process of requesting approval including:

- *New Mobile Banking Bank BPD Bali*
- *QRIS CPM*
- *Debit acquisition*
- *QRIS Tuntas*
- *QRIS Tap/NFC*
- *KKI Online Payment*
- *Early stage of digital financial services development*

Please refer to the Company Profile chapter in the Digital Banking section for more information on digital banking, including digital transformation.



Penguatan Ekosistem untuk Mendukung Tranformasi Digital Secara *End to End* *Strengthening the Ecosystem for End-to-End Digital Transformation*

Bank BPD Bali telah melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota serta sebagai bagian dari program TP2DD yang tertuang pada Permendagri No 56 tahun 2021 dalam rangka penguatan ekosistem guna mendukung transformasi digital secara *end to end*.

Hingga tahun 2024, Bank BPD Bali bersinergi dan berintegrasi dengan Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota untuk menguatkan ekosistem digital antara lain dalam bentuk:

- Samsat Bali: Samsat Vast, e-samsat Bali dan SIGNAL
- Pajak Hotel Restoran (PHR) dengan iPOS PHR kepada WP
- Sistem *e-tiketing, e-parkir*, iPOS MBLB
- Pungutan Wisata Asing
- Pembayaran Sp2D *Online*
- E-retribusi Pasar
- E-retribusi Pemerintah daerah
- E-Bansos
- E-retribusi Sampah
- Penerimaan Pajak-Pajak Daerah PBB P2.
- Siskuedes Link
- *Dashboard Monitoring CMS* terintegrasi dengan BPD *Payment*.

Bank BPD Bali has entered into a cooperation agreement with the provincial/ district/city governments as part of the TP2DD program, as stated in Permendagri No. 56 of 2021, to strengthen the ecosystem and support end-to-end digital transformation.

By 2024, Bank BPD Bali has synergized and integrated with the Provincial/ District/City Governments to strengthen the digital ecosystem. This includes in the form of

- *Samsat Bali: Samsat Vast, e-Samsat Bali and SIGNAL*
- *Hotel Restaurant Tax (PHR) with iPOS PHR to WP*
- *E-Ticketing System, E-Parking, iPOS MBLB*
- *Foreign Tourism Levy*
- *Online Sp2D payment*
- *Market E-remittance*
- *Local Government E-retribution*
- *E-Bansos*
- *Waste E-retribution*
- *Receipt of PBB P2 Regional Taxes.*
- *Siskuedes Link*
- *CMS monitoring dashboard integrated with BPD payment.*

Penghargaan Perbankan Digital Tahun 2024 *2024 Digital Banking Awards*

Kerja keras, komitmen dan dedikasi kuat serta beragam inovasi digital yang dilakukan oleh Bank BPD Bali dalam rangka transformasi perbankan digital telah mendapatkan beragam pengakuan dari pihak eksternal. Beberapa penghargaan penghargaan terkait perbankan digital yang berhasil diraih oleh Bank BPD Bali selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Bank BPD Bali's diligent work, strong commitment and dedication, and various digital innovations related to its digital banking transformation has been recognized externally. Some awards related to digital banking successfully achieved by Bank BPD Bali in 2024 are as follows:

No	Penghargaan Awards	Tanggal Date of Acceptance	Penyelenggara Organizers
1.	<i>Top Digital Corporate Brand Awards 2024 Special Achievement For BUMD</i>	28 Maret 2024 March 28, 2024	Info Ekonomi.ID dan Trans Co Indonesia
2.	Instansi yang telah Mengembangkan Inovasi dan Digitalisasi yang Berdampak Signifikan bagi Peningkatan Pendapatan Daerah di Wilayah Bali <i>Agencies that Have Developed Innovation and Digitization with Significant Impact on Increasing Regional Income in Bali Region</i>	02 Mei 2024 May 2, 2024	KPK RI
3.	<i>Best Digital Innovations</i>	13 Mei 2024 May 13, 2024	CNN Indonesia Awards 2024
4.	<i>Best Digital Management</i>	13 Mei 2024 May 13, 2024	CNN Indonesia Awards 2024
5.	<i>The Best Indonesia IT & Digital Operational Excellence Award - 2024</i>	21 November 2024 November 21, 2024	Economic Review
6.	<i>Top Digital Implementation 2024</i>	05 Desember 2024 December 5, 2024	Majalah It Works

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Awards and Certification

Penghargaan yang Diterima Tahun 2024

Awards Received in 2024

Selain penghargaan perbankan digital sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Bank BPD Bali juga menerima berbagai penghargaan selama tahun 2024 yang terdiri dari:

In addition to the aforementioned digital banking awards, Bank BPD Bali was also the recipient of various awards during the year 2024, namely:

No	Penghargaan Awards	Tanggal Date of Acceptance	Penyelenggara Organizers
1.	<i>The Best Indonesia Enterprises Risk Management Award VI - 2024</i>	18 Januari 2024 <i>January 18, 2024</i>	Economic Review
2.	<i>The Best Indonesia GCG Award – VIII – 2024 Gold Award (B)</i>	22 Februari 2024 <i>February 22, 2024</i>	Economic Review
3.	<i>UMKM Summit</i>	07 Maret 2024 <i>March 7, 2024</i>	OMG
4.	<i>Golden Trophy Top BUMD Awards 2024</i>	20 Maret 2024 <i>March 20, 2024</i>	Top Business
5.	<i>Top BUMD Awards 2024 BPD #Bintang 5</i>	20 Maret 2024 <i>March 20, 2024</i>	Top Business
6.	<i>Outstanding Business Ethics of The Year</i>	13 Mei 2024 <i>May 13, 2024</i>	CNN Indonesia Awards 2024
7.	<i>Golden Champion Excellent Financial Performance in 5 Consecutive Years 2-10-2023</i>	31 Mei 2024 <i>May 13, 2024</i>	The Asian Post/Infobank
8.	<i>Top Bank 2024 Kategori KBMI 1</i>	20 Juni 2024 <i>June 20, 2024</i>	The Iconomics Media
9.	<i>Best Bank 2024 Kategori Bank Pembangunan Daerah KBMI 1 (Modal Inti sampai dengan Rp6 Triliun)</i> <i>Best Bank 2024 Regional Development Bank KBMI 1 (Core capital up to Rp6 trillion)</i>	11 Juli 2024 <i>July 11, 2024</i>	Investortrust.id
10.	<i>BPD Terbaik II Dalam Mendukung Kebijakan P2DD</i> <i>Best BPD II in Supporting P2DD Policy</i>	22 Juli 2024 <i>July 22, 2024</i>	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
11.	<i>Indonesia Best Bank Awards 2024</i>	31 Juli 2024 <i>July 31, 2024</i>	Warta Ekonomi
12.	<i>Indonesia Most Acclaimed Company 2024 with Outstanding Provision of Reliable Banking Services to Support Regional Economic Growth Category Regional Bank, KBMI 1</i>	31 Juli 2024 <i>July 31, 2024</i>	Warta Ekonomi
13.	<i>"The Best Execution Winner in BPD Sector" dan "Outstanding Achievement in Sustainability & Governance"</i>	31 Juli 2024 <i>July 31, 2024</i>	PT GML Performance Consulting dan KONTAN Business & Investment Media
14.	<i>Human Capital 2024 Category The Best Competition Strategy, The Best HR Support, The Best Company of Culture & Employee Experience</i>	1 Agustus 2024 <i>August 1, 2024</i>	First Indonesia MAGazine
15.	<i>Penggerak Inovasi Ekonomi dan Edukasi</i> <i>Driver of Economic and Educational Innovation</i>	3 Agustus 2024 <i>August 3, 2024</i>	Liputan 6
16.	<i>SPEX2 Award "The Best Execution Winner in BPD Sector"</i>	3 Agustus 2024 <i>August 3, 2024</i>	QuBisa Kontan
17.	<i>SPEX2 Award "Outstanding Achievement in Sustainability & Governance"</i>	3 Agustus 2024 <i>August 3, 2024</i>	QuBisa Kontan
18.	<i>The Best Indonesia Finance "Bank-BPD Company" 2024</i>	12 Agustus 2024 <i>August 12, 2024</i>	Economic Review
19.	<i>Bank Teraktif Pelaksanaan Bank Goes to School Sekolah Luar Biasa</i> <i>Most Active Bank in the Implementation of Bank Goes to School for Special Schools</i>	22 Agustus 2024 <i>August 22, 2024</i>	OJK
20.	<i>The Excellent Performance Bank In 25 Consecutive Years 1998-2023</i>	29 Agustus 2024 <i>August 29, 2024</i>	Infobank



No	Penghargaan Awards	Tanggal Date of Acceptance	Penyelenggara Organizers
21.	<i>The Best GRC Corporate Governance & Compliance 2024</i>	30 Agustus 2024 <i>August 30, 2024</i>	GRC & Performance Award 2024
22.	<i>The Best Chief Executive Officer 2024</i>	30 Agustus 2024 <i>August 30, 2024</i>	GRC & Performance Award 2024
23.	<i>7 Most Populer Brand Of The Year 2024 "Keuangan Perbankan Daerah"</i> <i>7 Most Popular Brands of 2024 "Regional Banking Finance"</i>	3 September 2024 <i>September 3, 2024</i>	Jawa Post
24.	Bank Berpredikat Sangat Prima <i>Bank with Outstanding Predicate</i>	9 September 2024 <i>September 9, 2024</i>	Best Bank Performance of MSMEs Loans Award
25.	<i>TOP GRC Awards 2024 #5 Star</i>	11 September 2024 <i>September 11, 2024</i>	Majalah Top Business
26.	<i>Best Performance Bank Kategori BPD Jawa – Bali</i>	18 September 2024 <i>September 18, 2024</i>	Bisnis Indonesia Financial Award
27.	<i>Best Company in Human Capital 2024</i>	26 September 2024 <i>September 26, 2024</i>	Economic Review
28.	<i>Best Regional Bank</i>	8 Oktober 2024 <i>October 8, 2024</i>	CNBC Awards
29.	<i>The Best Performing Bank 2024 Based on Financial Performance 2022-2024</i>	22 Oktober 2024 <i>October 22, 2024</i>	The Finance
30.	<i>Stellar Workplace Recognition in Employee Commitment</i>	31 Oktober 2024 <i>October 31, 2024</i>	QuBisa Kontan
31.	<i>Stellar Workplace Recognition in Employee Satisfaction</i>	31 Oktober 2024 <i>October 31, 2024</i>	QuBisa Kontan
32.	Bank Dengan <i>Money Changer</i> Tertinggi Tahun 2024 <i>Bank with the Highest Money Changer in 2024</i>	1 November 2024 <i>November 1, 2024</i>	BRI Treasury Banking Summit Award 2024
33.	Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 Kategori Usaha Milik Daerah <i>Public Information Disclosure in 2024 in the Category of Regionally Owned Enterprises</i>	10 Desember 2024 <i>December 10, 2024</i>	Komisi Informasi Provinsi <i>Bali Provincial Information Commission</i>
34.	Penerapan Tata Kelola (<i>Governance</i>) Peringkat 2 (Baik) dan Pengelolaan Risiko (<i>Risk</i>) Peringkat 2 (Sehat) <i>Implementation of Corporate Governance - Rank 2 (Good) and Risk Management - Rank 2 (sound)</i>	11 Desember 2024 <i>December 11, 2024</i>	BPKP Provinsi Bali <i>BPKP Bali Province</i>

Sertifikasi yang Dimiliki Tahun 2024

Certifications Held in 2024

Komitmen Bank BPD Bali terhadap praktik terbaik atas pengelolaan operasional perbankan ditunjukkan dengan beberapa sertifikasi yang dimiliki dan masih berlaku hingga 31 Desember 2024 yang terdiri dari:

Bank BPD Bali's commitment to best practices in banking operations management is evidenced by several certifications it holds, which are valid until December 31, 2024. These certifications include

Jenis Sertifikasi Certification Type	Tahun Perolehan Date of Acceptance	Pemberi Sertifikasi Certificate Provider	Masa Berlaku Validity period
Sertifikasi/ Certification			
ISO/IEC 27001:2013	2023	TUV Rheinland	25 Oktober 2025 <i>October 25, 2025</i>
SNI ISO 37001:2016 SMAP	2022	Garuda Sertifikasi Indonesia	13 Mei 2025 <i>May 13, 2025</i>

TESTIMONI DARI PEMANGKU KEPENTINGAN

Stakeholder Testimonials

Selain capaian atas kinerja Bank BPD Bali tersebut di atas, pemangku kepentingan juga memberikan apresiasi atas kontribusi Bank BPD Bali yang disajikan berikut ini:

In addition to the above mentioned achievements of Bank BPD Bali, stakeholders also recognize the contribution of Bank BPD Bali, as shown below:



PT Puri Santrian Group telah menjadi nasabah Bank BPD Bali sejak tahun 2006 hingga saat ini. Menurut kami, layanan yang diberikan Bank BPD Bali sangat baik untuk mendukung kelancaran operasional bisnis kami. Salah satu aspek yang paling kami hargai adalah pelayanan yang luar biasa dari tim kredit Bank BPD Bali. Dalam setiap proses kredit, tim kredit selalu dapat memahami kebutuhan spesifik bisnis kami. Dengan proses yang transparan dan efisien, ditambah dengan solusi yang dirancang secara personal, memberikan kami rasa percaya diri dalam pengembangan bisnis.

Jenis produk yang kami gunakan adalah kredit modal kerja, giro, QRIS, EDC, dan layanan *mobile* dan *internet banking*. Nilai tambah yang kami dapatkan dari produk/layanan Bank BPD Bali adalah kredit dengan bunga terbaik, pembayaran yang praktis dan aman dengan QRIS dan EDC sehingga kami dapat melayani pelanggan dengan lebih cepat dan modern, serta layanan *mobile* dan *internet banking* yang memberikan kami akses *real time* untuk mengelola transaksi kapan saja dan di mana saja.

Harapan kami, Bank BPD Bali Tetap menjadi mitra yang responsif, ramah, dan selalu berorientasi pada solusi, sehingga selalu bisa menjadi pendukung dalam setiap perjalanan bisnis kami.

PT Puri Santrian Group has been a customer of Bank BPD Bali since 2006 to date. We believe that Bank BPD Bali's services are excellent for the proper functioning of our business. One aspect we appreciate most is Bank BPD Bali Credit Team's exceptional service. In each credit process, the credit team always has an understanding of the specific needs of our business. With a transparent and efficient process, coupled with personalized solutions, it gives us the confidence to develop our business.

The types of products we use are working capital loans, current accounts, QRIS, EDC, and mobile and internet banking services. The added value that we get from Bank BPD Bali's products/services are loans with the best interest rate, convenient and secure payments with QRIS and EDC so that we can serve our customers faster and more modern, as well as mobile and internet banking services that give us real-time access to manage transactions anytime and anywhere.

It is our hope that Bank BPD Bali will always be a responsive, friendly, and solution-oriented partner to be a supporter in every journey of our business.



Ida Bagus Ngurah Agung Kumbayana

Direktur Utama | President Director
PT Puri Santrian

**dr. I Gede Parwata Yasa, Sp. OG**Direktur Utama | President Director
PT Sekar Tunjung Biru (PT STB)

PT STB Sudah 10 Tahun menjadi nasabah Bank BPD Bali terhitung dari tahun 2014 hingga sekarang. Menurut saya, pelayanan Bank BPD Bali selama ini sudah bagus, transaksi diproses dengan cepat, baik itu penarikan, transfer, pembayaran, atau pembukaan rekening baru. PT STB menggunakan produk Bank BPD Bali berupa Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, Kredit SCF dan Layanan *Internet Banking*.

Nilai tambah yang kami peroleh dari produk/layanan Bank BPD Bali adalah kredit bunga pinjaman yang diberikan sudah yang terbaik dan bisa bersaing dengan bank lain dan layanan *internet banking* mudah digunakan, cepat, dan tanpa masalah teknis.

Harapan kami, Bank BPD Bali bisa lebih banyak lagi membantu para pemilik usaha, kemudahan dalam mendapatkan kredit dengan bunga ringan serta bisa menawarkan berbagai produk dan layanan untuk memenuhi beragam kebutuhan nasabah, baik itu tabungan, kredit, investasi, maupun produk digital.

PT STB has been a customer of Bank BPD Bali for 10 years, since 2014 to date. I think Bank BPD Bali's service has been good so far, transactions are processed quickly whether it is withdrawing, transferring, paying or opening new accounts. PT STB uses Bank BPD Bali's products in the form of working capital loan, investment loan, SCF loan and internet banking services.

The added value we get from Bank BPD Bali's products and services is that the loan interest rate is the best and most competitive with other banks, and the Internet banking service is quick to use and without technical hitches.

We hope that Bank BPD Bali can help entrepreneurs even more, make it easy to get loans with low interest rates, and offer various products and services to meet different customer needs, whether it is saving, borrowing, investing, or digital products.



Kami telah menjadi mitra Bank BPD Bali selama 5 tahun dan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, yang kami anggap sangat baik. Produk yang kami gunakan adalah Kredit Konstruksi & Pengadaan Barang/Jasa Bali Dwipa, yang memberikan nilai tambah dengan membantu mempercepat penyelesaian proyek melalui bantuan pembiayaan. Keberadaan kredit ini memungkinkan proyek kami dapat diselesaikan tepat waktu tanpa hambatan finansial. Namun, kami berharap agar proses administrasi dapat dipermudah dan plafon kredit yang diberikan dapat ditingkatkan di masa depan untuk mendukung kelancaran proyek dan kebutuhan finansial kami.

We have partnered with Bank BPD Bali for 5 years and are satisfied with their services, which we consider very good. The product that we use is the Bali Dwipa Construction & Procurement Credit, which provides an added value by helping to speed up the completion of the project by providing financial assistance. Having this credit allows our projects to be completed on time without having to worry about financial constraints. However, we hope that in the future, the administrative process can be simplified and the credit limit provided can be increased. This would support the smooth running of the project and our financial needs.



I Gede Januartha

Direktur | Director
PT Kresna Putra Karya



DAFTAR ISI

Table of Contents



02	Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab <i>Disclaimer and Limitations of Liability</i>
03	Tentang Laporan Tahunan <i>About the Annual Report</i>
04	Ringkasan Eksekutif <i>Executive Summary</i>
10	Pencapaian Penting Tahun 2024 <i>2024 Key Accomplishments</i>
13	Penjelasan Tema <i>Theme Description</i>
14	Kesinambungan Tema <i>Theme Continuity</i>
15	Keunggulan Kompetitif Kami <i>Our Competitive Advantages</i>
16	Penguatan Ekosistem Untuk Mendukung Transformasi Digital Secara End To End <i>Ecosystem Empowerment in Support of End-to-End Digital Transformation</i>
19	Penghargaan dan Sertifikasi <i>Awards and Certification</i>
21	Testimoni Dari Pemangku Kepentingan <i>Stakeholder Testimonials</i>
24	Daftar Isi <i>Table of Contents</i>

28

KILAS KINERJA 2024

2024 Performance Highlight

30	Ikhtisar Keuangan <i>Financial Highlights</i>
37	Ikhtisar Operasional <i>Operational Highlights</i>
37	Ikhtisar Organisasi <i>Organizational Highlights</i>
38	Informasi Saham <i>Shares Information</i>
39	Informasi Efek Lainnya <i>Other Securities Highlights</i>
39	Proyek Pembiayaan Tahun 2024 <i>2024 Financing Projects</i>



40	Rating Perusahaan <i>Corporate Ratings</i>
41	Peristiwa Penting 2024 <i>Important Events in 2024</i>

44

PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile

46	Identitas Perusahaan <i>Corporate Identity</i>
48	Sejarah Singkat Perusahaan <i>Company Brief History</i>
51	Jejak Langkah Perusahaan <i>The Company's Milestones</i>
55	Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Perusahaan <i>Vision, Mission, and Corporate Values</i>
56	Tata Nilai <i>Corporate Values</i>
58	Logo Perusahaan <i>Company Logo</i>
60	Bidang dan Kegiatan Usaha <i>Business Sector and Business Activities</i>
62	Produk dan Jasa <i>Products and Services</i>





65	Perbankan Digital <i>Digital Banking</i>
74	Wilayah Operasional <i>Operational Areas</i>
75	Keanggotaan dalam Asosiasi <i>Association Membership</i>
76	Struktur Organisasi <i>Organizational Structure</i>
78	Profil Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners' Profile</i>
84	Profil Direksi <i>Board of Directors' Profile</i>
92	Perubahan Anggota Manajemen Setelah Tahun Buku 2024 <i>Changes in Management Membership Following Fiscal Year 2024</i>
92	Profil Pejabat Eksekutif & Pimpinan Kepala Cabang <i>Profile of Executive Officials & Branch Managers</i>
126	Demografi Karyawan <i>Employee Demographics</i>
128	Struktur dan Komposisi Pemegang Saham <i>Shareholders Structure and Composition</i>
130	Entitas Anak dan Entitas Asosiasi <i>Subsidiary and Associate Entities</i>
131	Struktur Grup Perusahaan <i>Group Structure</i>
131	Kronologi Penerbitan Saham dan Efek Lainnya <i>Chronology of Shares and Other Securities Issuance</i>
133	Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal <i>Supporting Institutions and Professions in The Capital Market</i>
134	Informasi <i>Website</i> Perusahaan <i>Information on The Company's Website</i>
136	Daftar Alamat Jaringan Kantor <i>List of Office Network Addresses</i>



142

LAPORAN MANAJEMEN *Management Report*

144	Laporan dewan Komisaris <i>Report of the Board of Commissioners</i>
156	Laporan direksi <i>Report of the Board of Directors</i>

174

TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS *Business Support Review*

176	Sumber Daya Manusia <i>Human Resources</i>
185	Teknologi Informasi <i>Information Technology</i>

190

ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN *Management Discussion and Analysis*

192	Tinjauan Perekonomian <i>Economic Review</i>
196	Tinjauan Industri Perbankan <i>Banking Industry Review</i>
200	Tinjauan Ekonomi Digital dan Keuangan Digital Indonesia <i>Review of Indonesian Digital Economy and Finance</i>
202	Kebijakan Strategis Tahun 2024 <i>2024 Strategic Policy</i>
204	Aspek Pemasaran <i>Marketing Aspect</i>



206	Perbandingan Target dan Realisasi 2024 serta Proyeksi 2025 <i>Comparison of 2024 Targets and Achievements and 2025 Projections</i>
207	Tinjauan Operasi per Segmen Usaha <i>Operational Review by Business Segment</i>
218	Tinjauan Operasi per Segmen Geografis <i>Operational Review by Geographic Segment</i>
219	Tinjauan Keuangan <i>Financial Review</i>
238	Rasio Keuangan <i>Financial Ratio</i>
240	Suku Bunga Dasar Kredit <i>Prime Lending Rate</i>
243	Komitmen dan Kontijensi <i>Commitments and Contingencies</i>
244	Transaksi Spot dan Derivatif <i>Spot and Derivative Transactions</i>
244	Informasi Keuangan Material Lainnya <i>Other Material Financial Information</i>
247	Perjanjian Signifikan <i>Significant Agreements</i>
247	Struktur Permodalan dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal <i>Capital Structure and Management Policy on Capital Structure</i>
252	Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal <i>Material Commitments for Capital Expenditures</i>
252	Properti Investasi <i>Investment Property</i>
252	Investasi Barang Modal yang Direalisasikan Tahun Buku Terakhir <i>Capital Expenditures Realized in the Last Fiscal Year</i>
253	Kebijakan dan Pembagian Dividen <i>Dividend Policy and Distribution</i>
254	Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum <i>Realization of The Use of Proceeds from The Public Offering</i>
255	Kepatuhan Membayar Pajak <i>Tax Payment Compliance</i>
256	Informasi Tentang Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP) <i>Information on Employee and/or Management Stock Ownership Programs (ESOP/MSOP)</i>
257	Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan <i>Material Information and Events Subsequent to The Date of The Financial Statements</i>
257	Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, Restrukturisasi Utang/Modal <i>Material Information Regarding Investment, Expansion, Divestment, Business Merger/Merger, Acquisition, Debt/Capital Restructuring</i>
257	Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi <i>Financial Information Containing Extraordinary and Infrequent Events</i>

257	Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi <i>Material Transaction Information Involving Conflicts of Interest and/or Related Party Transactions</i>
259	Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan <i>Legislative Changes That Significantly Impact The Company</i>
269	Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan Perusahaan pada Tahun Buku Terakhir <i>Changes in Accounting Policies Adopted by The Company During The Last Financial Year</i>
271	Tingkat Kesehatan Bank <i>Bank Health Level</i>
273	Perbandingan Target dan Realisasi 2024 Serta Proyeksi 2025 <i>Comparison of 2024 Targets and Achievements and 2025 Projections</i>
276	Prospek Usaha <i>Business Prospects</i>
278	Informasi Kelangsungan Usaha <i>Business Continuity Information</i>
280	Informasi Permodalan dan Exposure Risiko <i>Information on Capital and Exposure to Risk</i>
280	Struktur Permodalan <i>Capital Structure</i>
284	Informasi Eksposur Risiko <i>Risk Exposure Information</i>

308

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

310	Komitmen Tata Kelola <i>Governance Commitment</i>
311	Dasar Hukum Penerapan Tata Kelola <i>Legal Basis for The Implementation of Governance</i>
313	Penerapan Prinsip-Prinsip GCG dan Implementasi GCG Perusahaan Tahun Buku 2024 <i>Application of The GCG Principles and Implementation of The GCG in The Company in Fiscal Year 2024</i>
319	Struktur Tata Kelola <i>Governance Structure</i>
321	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) <i>General Meeting of Shareholders (GMS)</i>
338	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>
358	Direksi <i>Board of Directors</i>
378	Transparansi Informasi Terkait Dewan Komisaris dan Direksi <i>Transparency of Information Related to The Board of Commissioners and Board of Directors</i>

380	Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi <i>Working Relationship Between The Board of Commissioners and The Board of Directors</i>
403	Organ Pendukung Dewan Komisaris <i>Organ Pendukung Dewan Komisaris</i>
405	Komite Audit <i>Audit Committee</i>
415	Komite Pemantau Risiko <i>Risk Monitoring Committee</i>
425	Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Remuneration and Nomination Committee</i>
438	Organ Pendukung Direksi <i>Board of Directors' Supporting Organs</i>
438	Komite Manajemen Risiko <i>Risk Management Committee</i>
440	<i>Asset & Liability Committee (ALCO)</i> <i>Asset & Liability Committee (ALCO)</i>
442	Komite Kebijakan Perkreditan <i>Credit Policy Committee</i>
445	Komite Kredit <i>Credit Committee</i>
447	Komite Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen <i>Consumer Complaint Handling and Resolution</i>
449	Komite Pengarah Teknologi Informasi <i>Information Technology Steering Committee</i>
452	Komite Tim Tanggap Insiden Siber <i>Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Committee</i>
454	Sekretaris Perusahaan <i>Corporate Secretary</i>
459	Satuan Kerja Audit Intern & Anti Fraud (SKAI & AF) <i>Internal Audit & Anti Fraud Work Unit (SKAI & AF)</i>
471	Fungsi Kepatuhan <i>Compliance Function</i>
481	Satuan Kerja Manajemen Risiko <i>Risk Management Work Unit</i>
491	Sistem Pengendalian Intern <i>Internal Control System</i>
495	Akuntan Publik <i>Public Accountant</i>
498	Kode Etik <i>Code of Ethics</i>
500	Sistem Pelaporan Pelanggaran <i>Whistleblowing System</i>
504	Akses Informasi dan Data Perusahaan <i>Access to Company Information and Data</i>
506	Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) <i>Anti-Money Laundering (APU), Prevention of the Financing of Terrorism (PPT), and Prevention of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction (PPSPM) Program</i>

511	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) <i>Public Official Asset Declaration (LHKPN) Management</i>
512	Perkara Hukum dan Sanksi Administratif <i>Legal Cases and Administrative Sanctions</i>
520	Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Lainnya <i>Other Good Corporate Governance Practices</i>
524	Kebijakan Pendukung Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Lainnya <i>Other Supporting Policies for the Implementation of Good Corporate Governance</i>
528	<i>Self Assessment</i> Penerapan Tata Kelola Perusahaan <i>Self Assessment on Corporate Governance Implementation</i>
544	Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) <i>General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI)</i>
562	Penerapan Asean <i>Corporate Governance Scorecards</i> <i>Implementation of Asean Corporate Governance Scorecards</i>
580	Pernyataan Akuntabilitas Laporan Dewan Komisaris dan Direksi <i>Statement of Accountability Over The Report of Board of Commissioners and Board of Directors</i>

582 **KEBERLANJUTAN** *Sustainability*

584	Aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola <i>Environmental, Social and Governance Aspects</i>

586 **LAPORAN KEUANGAN** *Financial Report*





01

Kilas **KINERJA 2024** *2024 Performance Highlight*





IKHTISAR KEUANGAN

Financial Highlights

Laporan Posisi Keuangan

Statements of Financial Position

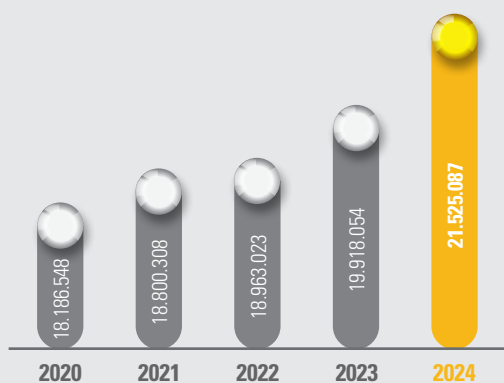
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)/(Expressed in millions of Rupiah)

Keterangan	2024	2023	2022	2021	2020	Description
ASET						ASSETS
Kas	580.736	569.571	519.162	944.904	545.099	Cash
Giro pada Bank Indonesia	2.694.875	2.393.875	2.689.637	1.007.685	647.738	Current Accounts with Bank Indonesia
Giro pada Bank Lain	45.087	70.081	52.674	41.974	45.691	Current Accounts with Other Banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	3.143.159	2.526.747	1.293.200	1.314.049	1.607.687	Placements with Bank Indonesia and Other Banks
Efek-Efek	9.760.077	4.356.008	2.748.911	1.772.147	1.683.221	Securities
Efek-Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	-	3.965.878	5.255.178	4.342.390	3.015.433	Securities Purchased Under Resale Agreements
Efek-Efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	-	-	199.985	248.761	-	Securities Sold Under Repurchase Agreements
Pinjaman yang Diberikan	21.525.087	19.918.054	18.963.023	18.800.308	18.186.548	Loans
Penyertaan Saham	-	-	425	425	425	Investment in Shares
Aset Tetap	129.634	123.443	96.184	84.682	91.154	Fixed Assets
Aset Takberwujud	7.460	8.208	5.813	3.713	5.459	Intangible Assets
Aset Hak Guna	44.771	41.018	43.369	38.721	36.477	Right-of-Use Assets
Aset Lain-Lain	229.637	213.233	184.460	218.998	168.470	Other Assets
Aset Pajak Tangguhan - Bersih	152.159	124.597	108.662	92.215	75.963	Deferred Tax Assets - Net
Total Aset	38.312.682	34.310.712	32.160.682	28.910.973	26.109.365	Total Assets
LIABILITAS DAN EKUITAS						LIABILITIES AND EQUITY
Liabilitas Segera	74.679,63	103.395	196.859	150.198	142.469	Liabilities Due Immediately
Simpanan Nasabah	32.167.791	27.948.417	26.452.997	23.377.092	21.451.014	Deposits from Customers
Simpanan dari Bank Lain	661.692	1.550.582	1.113.898	1.293.107	834.599	Deposits from Other Banks
Liabilitas Efek-Efek Yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	-	0	192.220	241.406	0	Liability for Securities Sold Under Agreements to Repurchased
Pinjaman yang Diterima	24.433,65	66.730	57.216	37.529	38.222	Borrowings
Utang Pajak	69.106,20	117.287	50.982	44.655	22.418	Taxes Payable
Beban yang Masih Harus Dibayar	22.595,47	20.025	22.201	26.290	33.978	Accrued Expenses

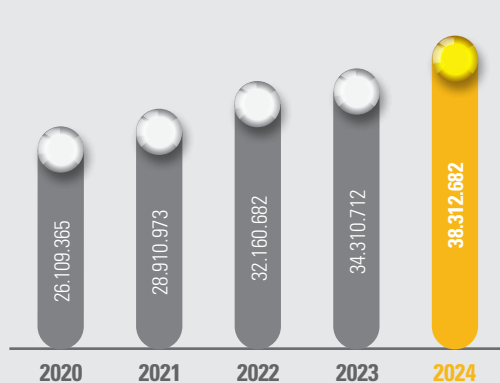
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)/(Expressed in millions of Rupiah)

Keterangan	2024	2023	2022	2021	2020	Description
Liabilitas Imbalan Kerja	265.776,65	232.261	226.674	231.730	212.221	Post-Employment Benefit Obligation
Liabilitas Sewa	15.056,56	13.576	16.214	17.032	13.779	Lease Liabilities
Liabilitas Lain - lain	351.353,24	268.270	240.248	172.591	155.957	Other Liabilities
Total Liabilitas	33.652.485	30.320.544	28.569.508	25.591.631	22.904.658	Total Liabilities
Total Ekuitas	4.660.197	3.990.169	3.591.175	3.319.342	3.204.707	Total Equity
Total Liabilitas dan Ekuitas	38.312.682	34.310.712	32.160.682	28.910.973	26.109.365	Total Liabilities and Equity

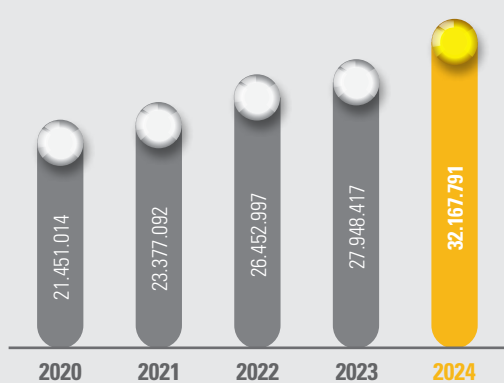
Pinjaman yang Diberikan Loans



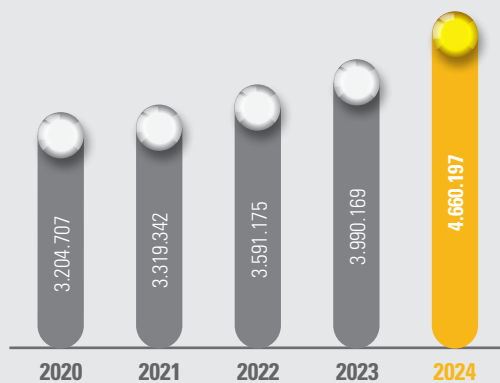
Total Aset Total Assets



Simpanan Nasabah Deposits from Customers



Total Ekuitas Total Equity



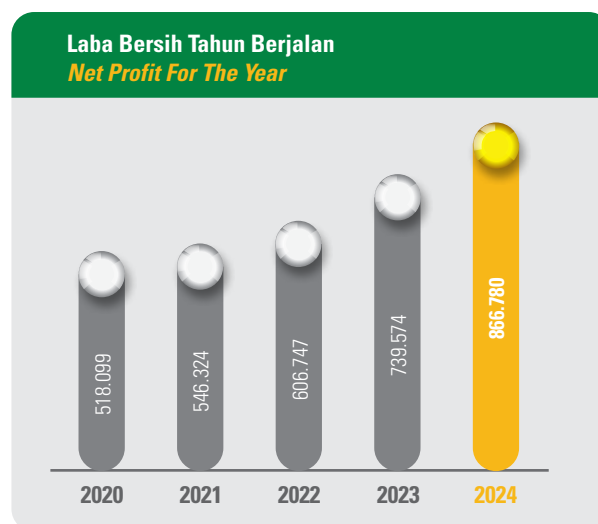
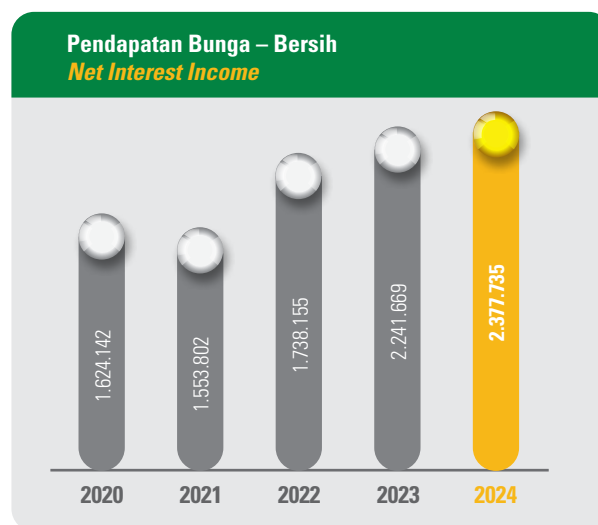
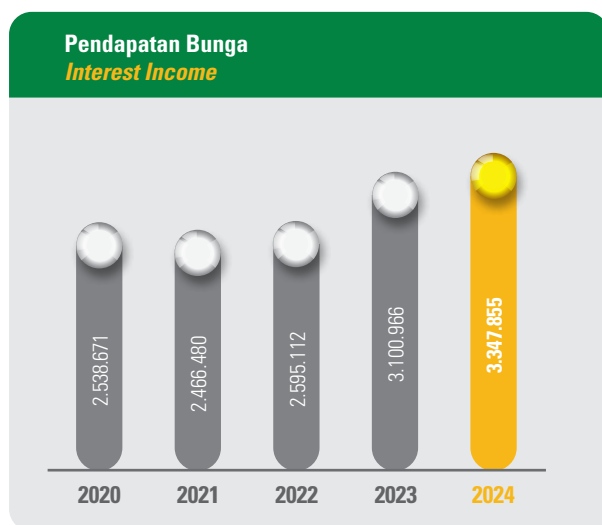


Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)/(Expressed in millions of Rupiah)

Keterangan	2024	2023	2022	2021	2020	Description
Pendapatan Bunga	3.347.855	3.100.966	2.595.112	2.466.480	2.538.671	Interest income
Beban Bunga	(970.120)	(859.297)	(856.957)	(912.678)	(914.529)	Interest Expense
Pendapatan Bunga – Bersih	2.377.735	2.241.669	1.738.155	1.553.802	1.624.142	Net Interest Income
Pendapatan Operasional	215.886	171.572	137.154	109.940	85.523	Operating Income
Provisi dan Komisi lainnya	9.768	8.764	7.640	5.839	6.855	Provision and Commission
Lain-lain	1.086	988	1.214	1.056	882	Miscellaneous
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	226.739	181.324	146.009	116.836	93.260	Total Other Operating Income
Aset Keuangan	(148.945)	(338.266)	(185.715)	(133.260)	(216.213)	Financial Assets
Transaksi Rekening Administratif	3.029	3.633	(520)	(465)	1.371	Transactions of Administrative Accounts
Jumlah Pembentukan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(145.915)	(334.633)	(186.236)	(133.725)	(214.841)	Total Provision for Impairment Losses
Gaji dan Tunjangan Karyawan	(857.371)	(648.632)	(549.688)	(525.996)	(534.018)	Salaries and Employee Benefits
Umum dan Administrasi	(372.759)	(341.058)	(283.647)	(262.910)	(236.955)	General and Administrative
Beban Modifikasi	(44.541)	(25.032)	(12.740)	(7.977)	(25.381)	Personnel Expenses
Jumlah Beban Operasional lainnya	(1.274.670)	(1.014.722)	(846.075)	(796.883)	(796.355)	Total Other Operating Expenses
Laba Operasional	1.183.889	1.073.637	851.853	740.029	706.206	Operating Income
Pendapatan Non Operasional	55.191	5.323	5.858	3.378	4.301	Non-Operating Income
Beban Non Operasional	(41.081)	(10.804)	(47.846)	(22.373)	(12.945)	Non-Operating Expenses
Jumlah Beban Non Operasional	14.110	(5.480)	(41.988)	(18.995)	(8.644)	Total Non Operating Expense
Laba Sebelum Pajak	1.197.999	1.068.156	809.865	721.035	697.561	Income Before Tax Expense
Jumlah Beban Pajak	(319.534)	(329.928)	(206.349)	(171.882)	(175.740)	Total Tax Expense
Laba Tahun Berjalan	878.466	738.228	603.516	549.153	521.821	Income For The Year
Jumlah Pendapatan Komprehensif Lain	(11.686)	1.346	3.231	(2.829)	(3.722)	Total Other Comprehensive Income
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	866.780	739.574	606.747	546.324	518.099	Total Comprehensive Income For The Year
Laba Per Saham	411.318	366.234	321.772	297.771	286.287	Earnings Per Share



* (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)/(Expressed in millions of Rupiah)

Laporan Arus Kas

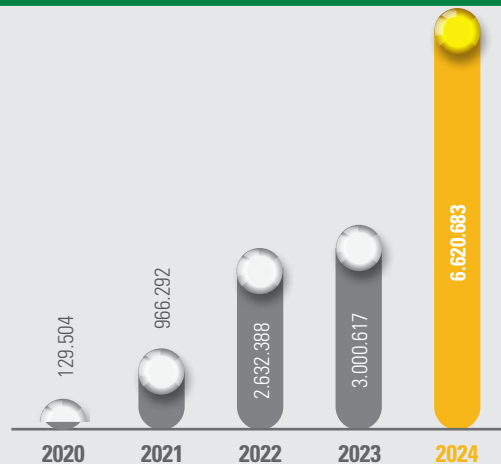
Statements of Cash Flows

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)/(Expressed in millions of Rupiah)

Keterangan	2024	2023	2022	2021	2020	Description
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	6.620.683	3.000.617	2.632.388	966.292	129.504	Net Cash (Used in) Provided by Operating Activities
Kas bersih yang Diperoleh (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(5.449.524)	(1.671.367)	(1.031.332)	(131.996)	(521.674)	Net Cash (Used in) Provided from Investing Activities
Kas bersih yang Diperoleh (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(239.048)	(331.066)	(315.227)	(432.383)	(512.677)	Net Cash (Used in) Provided from Financing Activities
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas	932.111	998.184	1.285.830	401.913	(904.847)	Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	5.533.557	4.535.373	3.249.544	2.847.631	3.752.477	Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	6.465.668	5.533.557	4.535.373	3.249.544	2.847.631	Cash and Cash Equivalents at The End of Year
Laba Per Saham	411.318	366.234	321.772	297.771	286.287	Earnings Per Share

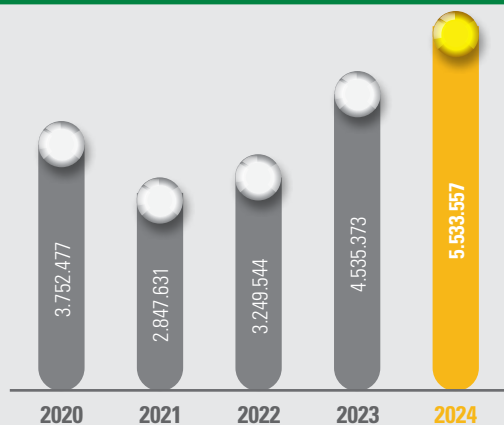
Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi

Net Cash Provided by Operating Activities



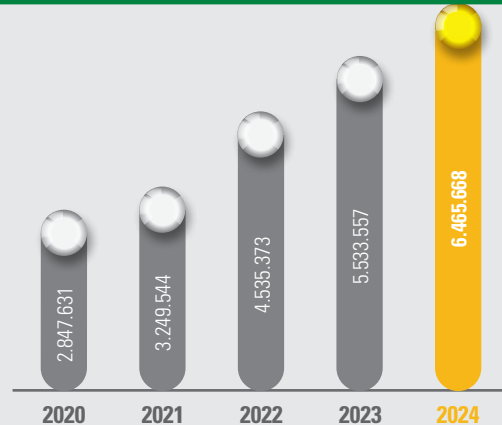
Kas dan Setara Kas Awal Tahun

Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year



Kas dan Setara Kas Akhir Tahun

Cash and Cash Equivalents at The End of Year Income



* (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)/(Expressed in millions of Rupiah)

Rasio Keuangan

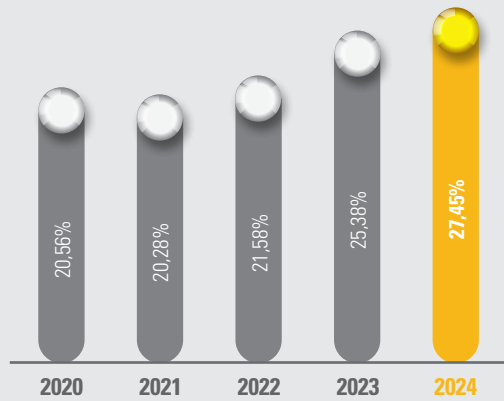
Financial Ratios

Keterangan	2024	2023	2022	2021	2020	Description
Modal						Capital
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	27,45%	25,38%	21,58%	20,28%	20,56%	Capital Adequacy Ratio (CAR)
KPMM Modal Inti	26,29%	24,22%	20,56%	19,26%	19,54%	Tier 1 ratio
KPMM Modal Pelengkap	1,16%	1,17%	1,01%	1,02%	1,02%	Tier 2 ratio

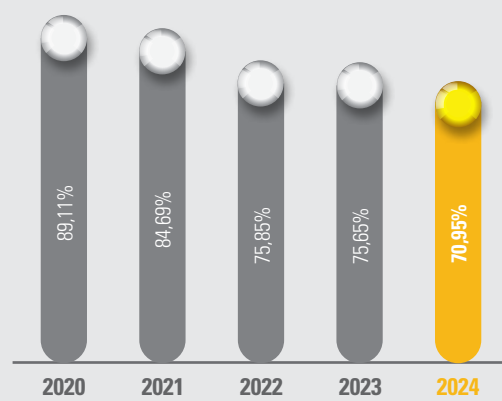
Keterangan	2024	2023	2022	2021	2020	Description
CET 1	26,29%	24,22%	20,56%	19,26%	19,54%	CET 1 ratio
Aset Produktif						Earning Assets
Aset Produktif Bermasalah dan Aset Non-Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif dan Aset Non-Produktif	0,58%	0,83%	1,57%	1,69%	1,89%	Non-Performing Earning Assets and Non-Productive Assets to Total Earnings and Non-Productive Assets
Aset Produktif Bermasalah terhadap Total Aktiva Produktif	0,58%	0,83%	1,57%	1,69%	1,89%	Non-Performing Earning Assets to Total productive Assets
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan Terhadap Aset Produktif	3,65%	3,85%	3,73%	3,64%	3,69%	Allowance for Impairment Losses for Financial Assets to Productive Assets
Rasio Kredit Bermasalah (NPL) – Bruto	0,92%	1,29%	2,37%	2,42%	2,61%	Non-Performing Loans (NPL) to Total Loans - Gross
Rasio Kredit Bermasalah (NPL) – Bersih	0,02%	0,02%	0,06%	0,13%	0,06%	Non-Performing Loans (NPL) to Total Loans - Net
Rentabilitas						Rentability
Imbal Hasil Aktiva (ROA)	3,20%	3,24%	2,68%	2,62%	2,70%	Return On (ROA)
Imbal Hasil Ekuitas (ROE)	21,68	20,23	18,27	17,78	16,95	Return On Equity (ROE)
Marjin Bunga Bersih (NIM)	6,66%	7,16%	6,00%	5,78%	6,41%	Net Interest Margin (NIM)
Beban Operasional terhadap Penghasilan Operasional (BOPO)	66,85%	67,32%	68,87%	71,34%	73,14%	Operating Expense to Operating Income (BOPO)
Cost to Income Ratio (CIR)	49,39%	42,61%	46,03%	48,96%	47,76%	Cost to Income Ratio (CIR)
Likuiditas						Liquidity
Loan to Deposit Ratio (LDR)	70,95%	75,65%	75,85%	84,69%	89,11%	1. Loan to Deposit ratio (LDR)
Liquidity Coverage Ratio (LCR)	751,07%	660,75%	-	-	-	Liquidity Coverage Ratio (LCR)
Pendanaan						
Dana Murah	70,80%	71,48%	61,20%	54,50%	53,22%	Current Account Saving Account (CASA)
Net Stable Funding Ratio (NSFR)	140,99%	137,31%	-	-	-	Net Stable Funding Ratio (NSFR)
Kepatuhan						Compliance
a. Presentase Pelanggaran BMPK		-	-	-	-	a. Percentage of Violation of Legal Lending Limit
a.1. Pihak Terkait	-	-	-	-	-	a.1. Related Parties
a.2. Pihak Tidak Terkait	-	-	-	-	-	a.2. Third Parties
b. Presentase Pelampauan BMPK	-	-	-	-	-	b. Percentage of Excess of Legal Lending Limit
b.1. Pihak Terkait	-	-	-	-	-	b.1. Related Parties
b.2. Pihak Tidak Terkait	-	-	-	-	-	b.2. Third Parties
GWM Utama Rupiah						GWM Primary Rupiah
Harian	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	Daily
Rata-Rata	5,29%	6,46%	7,20%	3,14%	3,12%	Average
GWM Valuta Asing	21,22%	28,08%	26,29%	2,00%	2,00%	GWM Foreign Currency
Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan	0,61%	0,48%	0,55%	0,63%	0,45%	Net Open Position



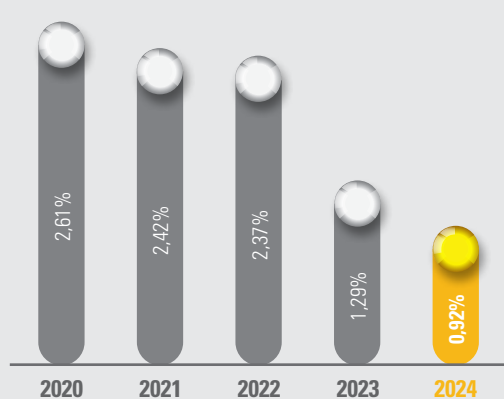
Rasio KPMM
CAR Ratio



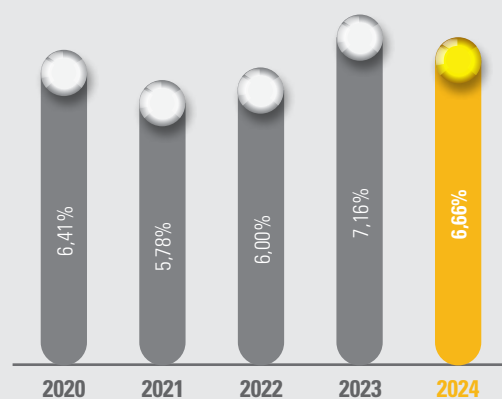
Loan to Deposit Ratio (LDR)
Loan to Deposit Ratio (LDR)



Rasio Kredit Bermasalah (NPL) – Bruto
Non-Performing Loans (NPL) to Total Loans - Gross



Marjin Bunga Bersih (NIM)
Net Interest Margin (NIM)



IKHTISAR OPERASIONAL

Operational Highlights

Keterangan	2024	2023	2022	2021	2020	Description
Operasional Non-Digital						Non-Digital Operations
Kantor Pusat	1	1	1	1	1	Main Office
Kantor Cabang Utama	1	1	1	1	1	Main Branch Office
Kantor Cabang	13	13	13	13	13	Branch Office
Kantor Cabang Pembantu	88	88	88	89	89	Sub Branch Office
Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	215	212	207	206	200	Automated Teller Machines
ATM Setor Tarik Tunai (CRM)	26	26	25	24	12	Cash Recycling Machines
Sistem Pembayaran Elektronik (EDC)	103	153	183	173	123	Electronic Data Captures
Kegiatan/Aktivitas Lainnya	57	59	59	59	55	Other Events/ Activities
Layanan Perbankan Digital						Digital Banking Services
Jumlah Pengguna BPD Bali Mobile Apps	287.065	233.311	192.692	147.926	109.790	Number of BPD Bali Mobile Apps users
Nilai Transaksi (Rp Juta)	2.225.896	1.581.602	1.222.626	760.576	514.697	Transactions Value (Rp million)
Jumlah Transaksi	1.671.810	1.291.409	1.034.517	734.171	514.452	Number of transactions

IKHTISAR ORGANISASI

Organizational Highlights

Keterangan	2024	2023	2022	2021	2020	Description
Tingkat Kesehatan Bank	2	2	2	2	2	Bank Health Level
Profil risiko	2	2	2	2	2	Risk Profile
GCG	2	2	2	2	2	GCG
Rentabilitas	2	2	2	2	2	Profitability
Permodalan	2	2	2	2	2	Capitalization
Survei Kepuasan Nasabah	82,90%	85,38%	79,9%	85,6%	79,8%	Customer Satisfaction Survey



INFORMASI SAHAM

Shares Information

Jumlah Saham

Total Shares

Secara kumulatif, pemegang saham utama Bank BPD Bali adalah Pemerintah Kabupaten Badung (43,65%), Pemerintah Provinsi Bali (29,91%), dan Pemerintah Kota Denpasar (12,46%) dari jumlah saham sebanyak 1.938,20 miliar saham. Pemegang saham Bank lainnya adalah pemerintah kota dan pemerintah kabupaten lainnya di Bali. Bank BPD Bali tidak memperdagangkan sahamnya kepada publik.

Cumulatively, the major shareholders of Bank BPD Bali are the Regency Government of Badung (43.65%), the Provincial Government of Bali (29.91%), and the City Government of Denpasar (12.46%) of the total shares of 1,938.20 billion shares. The other shareholders of the Bank are the city governments and the other regency governments in Bali. Bank BPD Bali does not trade its shares to the public.

Informasi Saham

Shares Information

Sampai dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 maupun tanggal disampaikan data/informasi ini, Bank BPD Bali tidak melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan tidak memperdagangkan sahamnya di bursa saham manapun. Oleh karena itu Bank tidak menyajikan informasi terkait dengan jumlah saham yang beredar; kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan volume perdagangan pada Bursa Efek tempat saham tersebut dicatatkan.

Until the period ending December 31, 2024 and the date of submission of this data/information, Bank BPD Bali did not conduct an initial public offering and did not trade its shares on any stock exchange. Therefore, we are not providing information with respect to the number of shares outstanding, market capitalization based on the price on the stock market where the shares are listed, high, low and closing share prices based on the price on the stock market where the shares are listed, and trading volume on the stock market where the shares are listed.

Suspensi Perdagangan Saham dan/Delisting

Corporate Actions and/Delisting

Sebagai sebuah perusahaan non-publik, Bank BPD Bali tidak pernah dikenakan sanksi perdagangan saham baik berupa penghentian sementara perdagangan saham maupun penghapusan pencatatan saham.

As a private company, Bank BPD Bali was not subject to any stock trading sanction either in the form of stock trading suspension and/or stock delisting.

Aksi Korporasi

Corporate Actions

Selama tahun 2024 Bank BPD Bali tidak melakukan aksi korporasi seperti pemecahan saham, penggabungan saham, dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham.

Throughout 2024, Bank BPD Bali did not conduct corporate actions such as stock split, reverse stock, stock dividend, bonus shares, and changes in the nominal share value.

Meski demikian, Bank BPD Bali melakukan pembayaran dividen sebanyak Rp553,67 miliar untuk tahun buku 2023 yang dibayarkan pada 1 Maret 2024. Penjelasan lebih lanjut terkait pembagian dividen dijelaskan di bab Analisa dan Pembahasan Manajemen.

However, Bank BPD Bali has made a dividend payment for the financial year 2023 in the amount of Rp553.67 billion which was paid on March 01, 2024. Please refer to the Management Discussion and Analysis section for further explanation of the dividend payment.

INFORMASI EFEK LAINNYA

Other Securities Highlights

Per 31 Desember 2024, Bank BPD Bali tidak melakukan pencatatan obligasi, sukuk atau obligasi konversi, maupun pencatatan efek lainnya. Oleh karena itu, bank tidak menyajikan informasi terkait jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (*outstanding*), tingkat bunga/imbalance, tanggal jatuh tempo, dan peringkat obligasi/sukuk.

As of December 31, 2024, Bank BPD Bali did not conduct listing of bonds, sukuk or convertible bonds and other securities. Therefore, the Bank did not disclose any information regarding nominal value of outstanding bond, sukuk or convertible bonds, coupon, maturity date, dan bond/sukuk ratings.

PROYEK PEMBIAYAAN TAHUN 2024

2024 Financing Projects

Sebagai sebuah Bank Pembangunan Daerah yang fokus kegiatan usahanya di Bali, Bank BPD Bali senantiasa berkontribusi terhadap pembangunan di provinsi Bali. Terkait dengan hal tersebut, Bank telah memberikan fasilitas pembiayaan atas beragam proyek selama tahun 2024 yang dapat diringkas sebagai berikut:

As a regional development bank with its business focus in Bali, Bank BPD Bali is consistently contributing to the development of Bali province. In this regard, the Bank has provided financing facilities for various projects during the year 2024. These projects can be summarized as follows:



Nama Proyek Project Name	Pembangunan Rumah Sakit Bali Kapal Construction of Bali Kapal Hospital
Deskripsi Ringkas Description	Kredit investasi untuk pembangunan gedung rumah sakit Bali Kapal yang berlokasi di Kapal, Mengwi, Badung Investment credit for the construction of the Bali Kapal hospital building located in Kapal, Mengwi, Badung
Nilai Pinjaman Loan Value	Rp50,00 Miliar Rp50.00 Billion
Tenor Tenors	10 (sepuluh) tahun 10 (ten) years



Nama Proyek Project Name	Pembangunan Rumah Sakit Bangli Medika Canti Bangli Medika Canti Hospital Development
Deskripsi Ringkas Description	Kredit investasi untuk perluasan gedung rumah sakit Bangli Medika Canti yang berlokasi di Bebalang, Bangli, Bangli Investment credit for the expansion of the Bangli Medika Canti hospital building located in Bebalang, Bangli, Bangli
Nilai Pinjaman Loan Value	Rp25,00 Miliar Rp25.00 Billion
Tenor Tenors	10 (sepuluh) tahun 10 (ten) years



Nama Proyek Project Name	Pembangunan Rumah Sakit Kasna Medika Construction of Kasna Medika Hospital
Deskripsi Ringkas Description	Kredit investasi untuk pembangunan gedung rumah sakit Kasna Medika yang berlokasi di Tianyar Barat, Kubu, Karangasem Investment credit for the construction of the Kasna Medika hospital building located in West Tianyar, Kubu, Karangasem
Nilai Pinjaman Loan Value	Rp22,00 Miliar Rp22.00 Billion
Tenor Tenors	10 (sepuluh) tahun 10 (ten) years



RATING PERUSAHAAN

Corporate Ratings

Berdasarkan *Press Release* Pefindo tertanggal 18 November 2024, Pefindo telah menetapkan peringkat *General Obligation* idA+ dengan prospek stabil kepada Bank BPD Bali. Penjelasan atas peringkat tersebut adalah sebagai berikut:

Based on the press release of Pefindo dated November 18, 2024, Pefindo has assigned a general obligation rating of idA+ with a stable outlook to Bank BPD Bali. The rating is explained as follows

Lembaga Pemeringkat Rating Agency	Periode Pemeringkatan Rating Period	Kriteria Pemeringkatan Rating Criteria	Peringkat Rating		Keterangan Description
			2024	2023	
Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)	1 November 2024- 1 November 2025 <i>November 1, 2024- November 1, 2025</i>	General Obligation (GO)	idA+	idA+	<i>Obligor dengan peringkat idA memiliki kemampuan yang kuat dibandingkan obligor Indonesia lainnya untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya. Walaupun demikian, kemampuan obligor mungkin akan mudah terpengaruh oleh perubahan buruk keadaan dan kondisi ekonomi dibandingkan obligor dengan peringkat lebih tinggi. Tanda tambah (+) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan.</i> <i>An obligor rated idA has a strong capacity to meet its long-term financial commitments relative to those of other Indonesian obligors. However, the obligor is somewhat more susceptible to the adverse effects of changes in circumstances and economic conditions than higher-rated obligors. The plus (+) sign indicates that the rating is relatively strong within its category.</i>
		Prospek Outlook	Stabil Stable	Stabil Stable	

PERISTIWA PENTING 2024

Important Events in 2024



14 Februari 2024
February 14, 2024



Bank BPD Bali buka layanan Pembayaran Retribusi Wisatawan Asing di Bandara Ngurah Rai.

Bank BPD Bali opened the Foreign Tourist Retribution Payment Service at Ngurah Rai Airport.



15 Maret 2024
March 15, 2024



Digelar Donor Darah Serangkaian HUT Bank BPD Bali ke-62 pada tanggal 15 Maret 2024 bertempat di gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bank BPD Bali di Jalan Seruni No 25-27 Dangin Puri Kangin.

The Blood Donation Series of the 62nd Anniversary of Bank BPD Bali was held on March 15, 2024, at the building of the Bank BPD Bali Education and Training Center located at Jalan Seruni No. 25-27 Dangin Puri Kangin.



17 Maret 2024
March 17, 2024



Menjelang HUT Ke-62, Bank BPD Bali Laksanakan Persembahyangan Bersama di Pura Ulun Danu Batur, Pura Agung Besakih, dan Pura Goa Lawah.

Before the 62nd Anniversary of Bank BPD Bali, joint prayers were held at the Ulun Danu Batur Temple, the Agung Besakih Temple, and the Goa Lawah Temple.



20 April 2024
April 20, 2024



Peduli Lingkungan, Bank BPD Bali Gelar Aksi Bersih Bersih Pantai

Caring for the Environment, Bank BPD Bali Held a Beach Clean-up Action



2 Mei 2024
May 2, 2024



Bank BPD Bali Terima Penghargaan KPK RI – Unggul Soal Inovasi Tingkatkan Pendapatan Daerah di Gedung Wisma Sabha Kantor Gubernur Provinsi Bali.

Bank BPD Bali Received KPK RI Award - Excellence in Innovation to Increase Regional Revenue at Wisma Sabha Building, Office of the Governor of Bali Province.



14 Agustus 2024
August 14, 2024



Bank BPD Bali Fasilitasi Transaksi Non Tunai UMKM di Kolaborasi Event di Taman Budaya Provinsi Bali, Art Centre Denpasar.

Bank BPD Bali Facilitated Cashless Transactions for MSMEs in Collaborative Event at Bali Provincial Cultural Park, Denpasar Art Center

22 Agustus 2024
 August 22, 2024



Bank BPD Bali Raih Penghargaan dari OJK atas Program Satu Rekening Satu Pelajar di Jiexpo Convention Centre and Theatre Kemayoran Jakarta Utara.

Bank BPD Bali was Awarded by OJK for One Account One Student Program at Jiexpo Convention Center and Theatre Kemayoran North Jakarta.

11 September 2024
 September 11, 2024



Bank BPD Bali Raih Tiga Penghargaan di TOP GRC Awards 2024 di Hotel Raffles Jakarta pada tanggal 11 September 2024.

Bank BPD Bali Received Three Awards at the TOP GRC Awards 2024 Held at Raffles Hotel Jakarta on September 11, 2024.

14 September 2024
 September 14, 2024



Apresiasi Nasabah Setia, Bank BPD Bali Gelar Customer Gathering di Hongkong Garden Restaurant.

Appreciating Loyal customers, Bank BPD Bali Held a Customer Meeting at Hongkong Garden Restaurant.

27 September 2024
 September 27, 2024



Bank BPD Bali Dukung Perayaan Dies Natalis ke-62 Universitas Udayana di Gedung Rektorat Universitas Udayana.

Bank BPD Bali supported the 62nd Anniversary Celebration of Udayana University at the Udayana University Rectorate Building.

17 November 2024
 November 17, 2024



Dukung Program Pemerintah Pusat, Bank BPD Bali Bersama Pemerintah Buleleng Gelar Lomba Cipta Menu Bergizi Beragam Sehat dan Aman di Taman Kota Singaraja.

In support of the central government program, Bank BPD Bali together with the Buleleng Regency Government held a Healthy, Diverse and Safe Nutritious Menu Creation Competition at Singaraja City Park.

21 November 2024
 November 21, 2024



Bank BPD Bali Terima Penghargaan CSR dari Pemkab Badung di The Stone Hotel Legian.

Bank BPD Bali was awarded a CSR Award by the Badung Regency Government at The Stone Hotel Legian.



29 November 2024
November 29, 2024



I Nyoman Sudharma, Direktur Utama Bank BPD Bali, Raih Penghargaan *TOP 100 CEO 2024* di Jakarta.

I Nyoman Sudharma, President Director of Bank BPD Bali, was awarded with the TOP 100 CEO 2024 Award in Jakarta.



10 Desember 2024
December 10, 2024



Bank BPD Bali Sabet Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2024 di Komisi Informasi Provinsi Bali.

Bank BPD Bali received the 2024 Public Information Transparency Award at the Bali Provincial Information Commission.



11 Desember 2024
December 11, 2024



Penghujung Tahun 2024, Bank BPD Bali Meraih Penghargaan dari BPKP Provinsi Bali di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Bali.

At the end of 2024, Bank BPD Bali Won Bali Provincial BPKP Award at Bali Provincial BPKP Office.



21-22 Desember 2024
December 21-22, 2024



Bank BPD Bali Tanam Puluhan Bibit Pohon di Kawasan Pura Andakasa dan Pura Melanting.

Bank BPD Bali Planted Dozens of Tree Seedlings in the areas of Andakasa Temple and Melanting Temple.



23 Desember 2024
December 23, 2024



Peluncuran Buku "Menopang Asa Masyarakat Bali Sejahtera" Tandai Puncak Perayaan 40 Tahun LPD Bali di Aula Universitas Hindu Indonesia (UNHI).

Launching the Book "Supporting the Balinese Community's Hope for Prosperity" Culminated LPD Bali's 40th Anniversary Celebration at the Indonesian Hindu University (UNHI) Hall ..



02

Profil **PERUSAHAAN** *Company Profile*





IDENTITAS PERUSAHAAN

Corporate Identity

	Nama Perusahaan <i>Company Name</i>	PT Bank Pembangunan Daerah Bali	
	Tanggal Berdiri <i>Date of Establishment</i>	5 Juni 1962 <i>June 5, 1962</i>	
	Bidang Usaha <i>Line of Business</i>	Jasa Perbankan <i>Banking Services</i>	
	Dasar Hukum Pendirian <i>Legal Basis of Establishment</i>	Akta No.131 tanggal 5 Juni 1962 yang dibuat dihadapan Ida Bagus Ketut Rurus, Sekretaris Daerah Tingkat I Bali merangkap Notaris. <i>Deed No.131 dated June 5, 1962 by Ida Bagus Ketut Rurus, as Secretary of the Government of Bali and Notary.</i>	
	Perijinan Usaha Bank <i>Banking Licence</i>	- Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Negara Indonesia No Kep. No Kep 110/UBS/65 tanggal 02 November 1965 - Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali - Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.6/26/KEPDGS/2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Bali menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali - Bank Umum Devisa - Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 6/32/KEPDGS/2004 tentang Penunjukkan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai Bank Umum Devisa <i>Decree of the Minister of Central Bank Affairs/Governor of Bank Negara Indonesia No. Kep. No Kep 110/UBS/65 dated November 02, 1965</i> <i>Limited Liability Company of Bali Regional Development Bank</i> <i>Decree of Senior Deputy Governor of Bank Indonesia No. 6/26/KEPDGS/2004 dated July 19, 2004 on the Change of Legal Form of Regional Company of Bali Regional Development Bank to Limited Liability Company of Bali Regional Development Bank</i> <i>Foreign Exchange Bank</i> <i>Letter of Decree of Senior Deputy Governor Bank Indonesia No. 6/32/KEPDGS/2004 on the appointment of Bank Pembangunan Daerah Bali Limited Liability Company as a Foreign Exchange Bank.</i>	
	SWIFT Code	ABALIDBS	ABALIDBS
	Domisili <i>Domicile</i>	Provinsi Bali, Indonesia	<i>Bali Province, Indonesia</i>
	Modal Dasar <i>Authorized Share Capital</i>	Sebesar Rp4.000.000.000.000 yang terdiri dari 400.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham	<i>Amounted to Rp4,000,000,000,000 comprising of 400,000 shares at nominal value of Rp1,000,000 per share</i>
	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh <i>Issued and Paid-Up Share Capital</i>	Sebesar Rp2.407.177.000.000 yang terdiri dari 2.407.177 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham	<i>Amounted to Rp2,407,177,000,000 comprising of 2,407,177 shares at nominal value of Rp1,000,000 per share</i>
	Pemegang Saham <i>Shareholders</i>	Pemegang saham Bank per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut: <i>The Bank's shareholders as of December 31, 2024 were as follows:</i>	
		Pemegang Saham <i>Shareholders</i>	Persentase Kepemilikan <i>Ownership Percentage</i>
		Pemerintah Kabupaten Badung	<i>Regency Government of Badung</i> 43,65%
		Pemerintah Provinsi Bali	<i>Bali Province Government</i> 29,91%
		Pemerintah Kota Denpasar	<i>City Government of Denpasar</i> 12,46%
		Pemerintah Kabupaten Lainnya	<i>Other Regencies Government</i> 13,98%
		Jumlah	Total 100,00%

	Jumlah Karyawan <i>Total Employees</i>	1.298 karyawan (per 31 Desember 2024)	1,298 employees (as of December 31, 2024)	
	Jaringan Bisnis <i>Business Network</i>	Kantor Pusat	Head Office	1
		Kantor Cabang Utama	Main Branch Office	1
		Kantor Cabang	Branch Office	13
		Kantor Cabang Pembantu	Sub Branch Office	88
		Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	Automated Teller Machines	215
		ATM Setor Tarik Tunai (CRM)	Cash Recycling Machines	26
		Sistem Pembayaran Elektronik (EDC)	Electronic Data Captures	103
		Kegiatan/Aktivitas Lainnya	Other Events/ Activities	57
		Jumlah	Total	504
	Alamat <i>Address</i>	Kantor Pusat <i>Head Office:</i> Jalan Raya Puputan Niti Mandala Denpasar 80235 Bali Telp. : +62 361 223301 ext. 5 Fax. : +62 361 237691 Call Center (Bank BPD Bali Call) : 1500 844 Email : bpdbalicare@bpd Bali.co.id		
	Sekretaris Perusahaan & Hubungan Investor <i>Corporate Secretary & Investor Relation</i>	Telp. : +62 361 223301 ext. 138 Email: divisi.sekper@bpd Bali.co.id		
	Situs Web dan Media Sosial <i>Website and Social Media</i>	 www.bpdbali.co.id		
		 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali		
		 @bankbpd Bali		
		 Bank BPD Bali		

SEJARAH SINGKAT PERUSAHAAN

Company Brief History

Perubahan Nama dan Status Badan Hukum

Name and Legal Entity Status Change

Secara historis, nama perusahaan tidak pernah mengalami perubahan yakni Bank Pembangunan Daerah Bali. Perubahan hanya terkait status hukum Bank terakhir yakni dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.

Historically, the name of the company has never been changed, namely Bank Pembangunan Daerah Bali. The only change relates to the Bank's latest legal status, from a regional company, to a limited liability company.

Sekilas Bank BPD Bali

Bank BPD Bali at a Glance

PT Bank Pembangunan Daerah Bali (selanjutnya disebut Bank BPD Bali atau Bank) didirikan berdasarkan Akta Nomor 131 tanggal 5 Juni 1962 yang dibuat dihadapan Ida Bagus Ketut Rurus, Sekretaris Daerah Tingkat I Bali merangkap Notaris.

PT Bank Pembangunan Daerah Bali (hereinafter referred to as Bank BPD Bali or The Bank) was established based on deed No.131 dated June 5, 1962 by Ida Bagus Ketut Rurus, as Secretary of the Government of Bali and Notary.

Dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 No.59, Tambahan Lembaran Negara No.2490), Pemerintah Provinsi Bali menetapkan perubahan status hukum Bank dari Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Daerah melalui Surat Nomor 6/DPDGR/65 tanggal 9 Februari 1965 dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor Des.9/21/28-128 tanggal 14 Juli 1965. Setelah itu diterbitkan ijin usaha Bank BPD Bali melalui Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Negara Indonesia No. Kep. 110/UBS/65 pada tanggal 2 November 1965.

In relation to the amendment of Law No. 13 year 1962 regarding the Basic regulation of the Regional Development Banks (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1962 No. 59, Supplement to State Gazette No. 2490), the Provincial Government of Bali set a change of legal status of the Bank of Limited Liability Company into Region through Letter No. 6/DPDGR dated February 9, 1965 and approved by the Ministry of Internal Affairs in its decision No. Des.9/21/28-128 dated July 14, 1965. Thereafter, Bank BPD Bali's license to operate was granted by the Minister of Central Bank Affairs/Governor of Bank Negara Indonesia by Decree No. Kep. 110/UBS/65 on November 2, 1965.

Bank kembali mengubah bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Perubahan badan hukum Bank BPD Bali ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No.2 Tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank BPD Bali dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank BPD Bali yang diundangkan pada tanggal 5 Maret 2002 (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2002 No.6 Seri D No.3).

The Bank has changed again its legal form from Regional Companies into a Limited Liability Company (PT). Changes in legal entities established in the Provincial Government of Bali Regulation No. 2 year 2002 regarding Changes Legal Entity Bank BPD Bali from "PD" to PT Bank Pembangunan Daerah Bali ("Bank BPD Bali") (Bali Provincial Gazette year 2002 No.6 Series D. No. 3).

Penyesuaian bentuk badan hukum Bank BPD Bali menjadi Perseroan Terbatas dinyatakan dalam akta notaris No.7 tanggal 12 Mei 2004, yang dibuat dihadapan Notaris Ida Bagus Alit Sudiarmika, S.H., yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor C-12858 HT.01.01 TH.2004 tanggal 21 Mei 2004 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.50 tanggal 22 Juni 2004, tambahan No.6004.

Changes to the Bank's legal form into a Limited Liability Company as stated in notarial deed No. 7 dated May 12, 2004, made before Notary Ida Bagus Alit Sudiarmika, S.H., which has been approved by the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia under the Decree of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic Indonesia by Decree No. C-12858 HT.01.01.TH. 2004 dated May 21, 2004 and published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 50 dated June 22, 2004, Supplement No. 6004.

Melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor 6/26/KEPDGS/2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Bali menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali, telah disetujui pengalihan izin usaha Bank BPD Bali dari Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Bali kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali.

Through Letter of Decree of Senior Deputy Governor Bank Indonesia No.6/26/KEPDGS/2004 dated July 19, 2004 regarding Corporate Entity Change from "Perusahaan Daerah" Bank Pembangunan Daerah to "Perseroan Terbatas" Bank Pembangunan Daerah Bali, has approved the transfer of the business license of Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Bali to Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali.

Pada tanggal 11 November 2004 Bank BPD Bali telah memperoleh izin beroperasi sebagai Bank Umum Devisa sesuai dengan Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor 6/32/KEPDGS/2004 tentang Penunjukkan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai Bank Umum Devisa.

Anggaran Dasar Bank BPD Bali telah beberapa kali mengalami perubahan, antara lain dengan akta No.25 tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan I Made Widiada, S.H., mengenai penyesuaian dan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar sesuai Akta Nomor 78 tanggal 24 Desember 2024 tentang Pernyataan keputusan Rapat PT bank Pembangunan Daerah Bali yang dibuat oleh I Made Widiada, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar dan telah dicatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum Nomor AHU-0284083.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 27 Desember 2024.

Bank BPD Bali secara terus menerus melakukan inovasi dalam peningkatan layanan kepada nasabah. Pada tahun 2014 Bank BPD Bali meluncurkan layanan *e-money co-branding* dengan Bank Mandiri. Kemudian pada tahun 2015, Bank BPD Bali membuka Kantor Cabang di Mataram Nusa Tenggara Barat serta meluncurkan layanan *e-banking* "Bank BPD Bali Mobile Banking". Pada tahun 2016 Bank BPD Bali kembali meluncurkan layanan *e-banking* "Bank BPD Bali Internet Banking" dan Kartu ATM Giro Perorangan.

Pada tahun 2017 Bank BPD Bali meluncurkan layanan baru Laku Pandai "MaiLaku Bank BPD Bali" yang sampai saat ini mencapai 717 agen yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bank BPD Bali secara terus menerus melakukan inovasi dalam meningkatkan kualitas layanan, tercermin dengan diluncurkannya layanan *Call Center* "Bank BPD Bali Call" dengan nomor hotline 1500-844. Melalui layanan "Bank BPD Bali Call" nasabah dapat menyampaikan keluhan atau memperoleh informasi terkait produk dan layanan Bank BPD Bali tanpa harus datang ke kantor Bank.

Pada tahun 2018 Bank BPD Bali meluncurkan layanan Bancassurance Model Bisnis Referensi pada tanggal 17 April 2018 kerjasama dengan PT Equity Life Indonesia, serta meluncurkan layanan Internet Banking Bisnis/Korporasi pada tanggal 26 Maret 2018.

Bank BPD Bali meningkatkan fokus kepada layanan digital dengan melakukan berbagai inovasi pada tahun 2019 diantaranya sebagai Penerbit Kartu Debet yaitu sebuah kartu pembayaran secara elektronik yang diterbitkan oleh Bank; *Co-branding* BRIZZI Bank BPD Bali yaitu kerjasama dengan Bank BRI sebagai penerbit uang elektronik *card based* (BRIZZI); QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standards*) Bank BPD Bali yaitu sistem pembayaran berbasis *QR Code* dengan transaksi non tunai.

On November 11, 2004, the Bank has obtained a license to operate as a Foreign Exchange Bank in accordance with the Letter of Decree of Senior Deputy Governor Bank Indonesia No. 6/32/KEPDGS/2004 on the appointment of the Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali as a Foreign Exchange Bank.

The Bank's Articles of Association have amended several times, among other, by deed No. 25 dated August 8, 2008, Notary I Made Widiada, S.H., regarding the adjustment and amendment Bank's Articles by Law No. 40 year 2007 concerning Limited Liability Companies.

The latest amendment to the Articles of Association according to Deed Number 78 dated December 24, 2024 concerning the Statement of Decisions of the Meeting of PT Bank Pembangunan Daerah Bali made by I Made Widiada, Bachelor of Law, Notary in Denpasar and has been recorded in the Legal Entity Administration System Number AHU-0284083.AH.01.11.YEAR 2024 dated December 27, 2024.

Bank BPD Bali continuously innovates in improving services to customers. In 2014 Bank BPD Bali launched an e-money co-branding service with Bank Mandiri. Then in 2015, Bank BPD Bali opened a Branch Office in Mataram, West Nusa Tenggara and launched the e-banking service "Bank BPD Bali Mobile Banking". In 2016 Bank BPD Bali re-launched the e-banking service "Bank BPD Bali Internet Banking" and Individual Current Account ATM Cards.

In 2017 Bank BPD Bali launched a new Laku Pandai service "MaiLaku Bank BPD Bali" which to date has reached 717 agents spread across the Provinces of Bali and West Nusa Tenggara Province. Bank BPD Bali continuously innovates in improving service quality, reflected in the launch of the "Bank BPD Bali Call" Call Center service with hotline number 1500-844. Through the "Bank BPD Bali Call" service, customers can submit complaints or obtain information regarding Bank BPD Bali products and services without having to come to the Bank's office.

In 2018 Bank BPD Bali launched the Reference Business Model Bancassurance service on April 17, 2018 in collaboration with PT Equity Life Indonesia, and launched the Business/Corporate Internet Banking service on March 26, 2018.

Bank BPD Bali is increasing its focus on digital services by carrying out various innovations in 2019 including as a Debit Card Issuer, which is an electronic payment card issued by the Bank; BRIZZI Bank BPD Bali co-branding, namely collaboration with Bank BRI as the issuer of card-based electronic money (BRIZZI); QRIS (Quick Response Code Indonesian Standards) Bank BPD Bali is a QR Code-based payment system with non-cash transactions.



Pada tahun 2020, Bank BPD Bali semakin fokus pada pengembangan layanan digital yang diantaranya EDC Mini ATM yang bertujuan untuk memudahkan layanan kepada nasabah sehingga dapat bertransaksi di mesin EDC dengan fitur sama dengan ATM. Selain hal tersebut, Bank BPD Bali juga mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Mitra Bank dan bekerjasama dengan rumah sakit di Provinsi Bali.

Pada tahun 2021, Bank BPD Bali Meluncurkan Produk/Aktivitas Layanan Baru, antara lain: *Deposito On Call*, *Negotiable Certificate Of Deposit (NCD)*, *EDC Merchant*, Layanan Transaksi Lintas Negara melalui keanggotaan lembaga *switching* PT Rintis Sejahtera untuk Asian *Payment Network (APN)* dan UnionPay, Layanan *Billing Payment* dan Pembayaran *Online* Lainnya, dan E-Link BPR.

Mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran serta Surat Bank Indonesia Nomor 23/717/DKSP/Srt/B tanggal 1 Juli 2021 tentang Konversi Izin Penyelenggara Sistem Pembayaran Pasca Pemberlakuan Peraturan Bank Indonesia No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran, Bank Indonesia telah melakukan konversi izin Bank BPD Bali menjadi Penyedia Jasa Pembayaran dengan kategori izin I yaitu Penatausahaan Sumber Dana.

Pada tahun 2022, Bank BPD Bali meluncurkan Produk/Aktivitas Layanan Baru, antara lain: Uang elektronik *server* based Balipay, Layanan Transaksi Tarik/Setor Tunai Tanpa Kartu (*Cardless*) menggunakan *Mobile Banking*, QRIS *Cross Border*, Kerjasama Layanan *Payment Gateway*, BI FAST, *Online On Boarding*, Kerjasama *merchant aggregator* dengan PT Artajasa Pembayaran Elektronis, *Deposito Kapitalisasi*, *Co-branding* Jakcard, dan Kartu Kredit Indonesia (KKI).

Bank BPD Bali terus melakukan inovasi berkelanjutan dalam digitalisasi untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi, dimana pada tahun 2023 Bank BPD Bali meluncurkan Produk/Aktivitas Layanan Baru, antara lain: QRIS *Cross Border* Malaysia dan Singapura, Penerbitan Kartu Kredit Indonesia Fisik Segmen Pemerintah Berlogo Nasional Berbasis GPN, *Deposito dengan Mekanisme Retensi (Diskonto)*, Implementasi transaksi non tunai pada Pemerintahan Desa melalui integrasi Siskuedes Link dengan CMS Bank BPD Bali.

Selanjutnya, Bank BPD Bali juga berperan aktif dalam memberdayakan sektor UMKM pada tahun 2024. Komitmen Bank ini diwujudkan dengan memfasilitasi pembayaran atau transaksi non tunai UMKM. Selain itu, sebagai bentuk dukungan bagi pembangunan sektor pariwisata di Bali, Bank BPD Bali membuka layanan pembayaran retribusi wisatawan asing di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Internasional Ngurah Rai mulai 14 Februari 2024.

Per 31 Desember 2024, Bank BPD Bali mengoperasikan jaringan kantor, terminal perbankan elektronik dan kegiatan/aktivitas lainnya yang tersebar di seluruh Bali dan Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari 1 kantor pusat, 14 kantor cabang dan 88 kantor cabang pembantu. Selain itu Bank memiliki 344 terminal perbankan elektronik yang terdiri dari 215 terminal ATM, 26 terminal CRM dan 103 terminal EDC serta 57 Kegiatan/Aktivitas Lainnya berupa 50 KPK Permanen dan 7 KPK Bergindah.

In 2020, Bank BPD Bali increasingly focuses on developing digital services, including the EDC Mini ATM, which aims to facilitate services to customers so that they can make transactions on EDC machines with the same features as ATMs. In addition to this, Bank BPD Bali has also developed a Bank Partner Information System application and collaborated with hospitals in the Province of Bali.

In 2021, Bank BPD Bali Launches New Products/Services Activities, including: Deposits On Call, Negotiable Certificate Of Deposit (NCD), EDC Merchant, Cross-border Transaction Services through PT Rintis Sejahtera switching agency membership for the Asian Payment Network (APN) and UnionPay, Billing Payment and Payment Services Other Online, and BPR E-Link.

Referring to Bank Indonesia Regulation Number 22/23/PBI/2020 concerning Payment Systems and Bank Indonesia Regulation Number 23/6/PBI/2021 concerning Payment Service Providers and Bank Indonesia Letter Number 23/717/DKSP/Srt/B dated July 1, 2021 regarding the Conversion of Payment System Operator Permits After the Enactment of Bank Indonesia Regulation No. 22/23/PBI/2020 concerning the Payment System, Bank Indonesia has converted the permit of Bank BPD Bali to become a Payment Service Provider with permit category I, namely Administration of Fund Sources.

In 2022, Bank BPD Bali launched new products/service activities, including: Balipay server-based electronic money, Cardless Cash Withdrawal / Deposit Transaction Services using Mobile Banking, QRIS Cross Border, Payment Gateway Service Cooperation, BI FAST, Online On Boarding, merchant aggregator cooperation with PT Artajasa Electronic Payment, Capitalization Deposit, Jakcard Co-branding, and Indonesian Credit Card (KKI).

Bank BPD Bali continues to make continuous innovations in digitalization to provide convenience and comfort in transactions, where in 2023 Bank BPD Bali launched New Products / Service Activities, including: QRIS Cross Border Malaysia and Singapore, Issuance of Government Segment Physical Indonesian Credit Card with National Logo Based on GPN, Deposit with Retention Mechanism (Discount), Implementation of non-cash transactions in the Village Government through the integration of Siskuedes Link with Bank BPD Bali CMS.

In addition, Bank BPD Bali also plays an active role in strengthening the MSME sector in 2024. The bank's commitment is realized by facilitating cashless transactions for MSMEs. In addition, as a form of support for Bali's tourism development, Bank BPD Bali opened a foreign tourist tax payment service at Ngurah Rai International Airport's International Arrival Terminal from February 14, 2024.

As of December 31, 2024, Bank BPD Bali operates a network of offices, electronic banking terminals, and other activities in Bali and West Nusa Tenggara, consisting of 1 main office, 1 main branch office, 13 branch offices, and 88 sub-branch offices. The Bank also has 215 Automated Teller Machines, 26 Cash Recycling Machines, 103 Electronic Data Captures, and 57 other activities consisting of 50 fixed KPKs and 7 mobile KPKs.

JEJAK LANGKAH PERUSAHAAN

The Company's Milestones



1962 - 1965



BANK BPD BALI

Bank BPD Bali didirikan berdasarkan Akta No. 131 tanggal 5 Juni 1962. Kemudian pada tahun 1965, Pemerintah Provinsi Bali menetapkan perubahan status hukum Bank dari Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Daerah melalui Surat Nomor 6/DPRD-GR/65 tanggal 9 Februari 1965 dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor Des.9/21/28-128 tanggal 14 Juli 1965.

Bank BPD Bali was established according to Act No. 131 dated June 5, 1962. Then in 1965, the Balinese Government determined the change of status of the bank from Limited Liability Company into Regionally Owned Enterprise through the a Letter number 6/DPRDGR/ 65 dated February 9, 1965 and legalized by Minister of Internal Affairs through a Decree number Des.9/21/28-128 dated July 14, 1965.



2004 - 2008



BANK BPD BALI

Pada tanggal 21 Mei 2004 Bank BPD Bali kembali mengubah status bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Di tahun 2004, Bank BPD Bali meningkatkan Modal Dasar Bank dari Rp250 miliar menjadi Rp1 triliun. Pada tanggal 11 November 2004, Bank BPD Bali meningkatkan aktivitas Perseroan menjadi Bank Umum Devisa. Pada tahun 2008, Bank BPD Bali melakukan perubahan Anggaran Dasar sesuai akta No.25 tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan I Made Widiada, S.H., mengenai penyesuaian dan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

On May 21, 2004, Bank BPD Bali changed its legal status from Regionally Owned Enterprise into Limited Liability Company. In 2004, Bank BPD Bali increased Bank's Authorized Capital from Rp250 billion to Rp1 trillion. On November 11, 2004, Bank BOD Bali increased its activity to be a general bank. In 2008, Bank BPD Bali amended its Articles of Association according to Act No.25 dated August 8, 2008, which was signed before notary I Made Widiada, S.H., concerning the adjustment and amendment of Article of Association based on Company Law No.40 of 2007.



2014



BANK BPD BALI

- Bank BPD Bali meningkatkan Modal Dasar Bank dari Rp1 triliun menjadi Rp2 triliun.
- Bank BPD Bali meluncurkan layanan *e-Money* dengan pola *Co-Branding* dengan Bank Mandiri.

- *Bank BPD Bali increased Bank's Authorized Capital from Rp1 trillion to Rp2 trillion.*
- *Bank BPD Bali launched e-Money under Co-Branding framework with Bank Mandiri*



2015



BANK BPD BALI

- Bank BPD Bali meningkatkan Modal Dasar Bank dari Rp2 triliun menjadi Rp4 triliun.
- Bank BPD Bali membuka Kantor Cabang Mataram di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jl. Raya Pejanggik, Mataram.
- Bank BPD Bali meluncurkan produk *e-banking* "Bank BPD Bali *Mobile Banking*".
- Bank BPD Bali meningkatkan pelayanan dengan meluncurkan mobil kas keliling.

- *Bank BPD Bali increased Bank's Authorized Capital from Rp2 trillion to Rp4 trillion.*
- *Bank BPD Bali inaugurated Mataram Branch Office in West nusa Tenggara Province on Jl. Raya Pejanggik, Mataram.*
- *Bank BPD Bali launched e-banking service called "Bank BPD Bali Mobile Banking".*
- *Bank BPD Bali improved services to the customers by launching mobile cash*



2016



BANK BPD BALI

- Bank BPD Bali meluncurkan produk *e-banking* "Bank BPD Bali *Internet Banking*".
- Bank BPD Bali meningkatkan pelayanan dengan meluncurkan layanan Kartu ATM Giro Perorangan dan mesin *Cash Deposit Machine* (CDM).

- *Bank BPD Bali launched e-banking service called "Bank BPD Bali Internet Banking"*
- *Bank BPD Bali improved quality of services through the launch of Kartu ATM Giro Perorangan and Cash Deposit Machine.*



2017



BANK BPD BALI

- Bank BPD Bali meluncurkan produk Laku Pandai "MAILAKU Bank BPD Bali".
- Bank BPD Bali meningkatkan pelayanan dengan meluncurkan layanan *Call Center* "Bank BPD Bali Call".
- Bank BPD Bali bekerjasama dengan Kepolisian RI, Kementerian Dalam Negeri, Jasa Raharja, dan Bapenda se-Jawa Bali meluncurkan layanan e-samsat Bali dan e-samsat Nasional.
- *Bank BPD Bali launched online service called "MAILAKU Bank BPD Bali".*
- *Bank BPD Bali improved services through the launch of Call Center service called "Bank BPD Bali Call".*
- *Bank BPD Bali sealed cooperation with Indonesian Police Department, Ministry of Internal Affairs, Jasa Raharja, and Regional Income Offices in Java and Bali, to launch e-samsat Bali and e-samsat nasional services.*



2018



BANK BPD BALI

- Bank BPD Bali meluncurkan Produk *Bancassurance* Model Bisnis Referensi yang bekerjasama dengan PT Equity Life Indonesia.
- Bank BPD Bali meluncurkan produk layanan *Internet Banking* Bisnis/ Korporasi.
- *Bank BPD Bali Launched Reference Business Model Bancassurance in partnership with PT Equity Life Indonesia.*
- *Bank BPD Bali launched Corporate Internet Banking service*



2019



BANK BPD BALI

- Bank BPD Bali sebagai Penerbit Kartu Debit Bank BPD Bali.
- Bank BPD Bali meluncurkan layanan uang elektronik *Co - Branding* dengan BRI.
- Bank BPD Bali mengembangkan APEX BPR.
- Bank BPD Bali meluncurkan Layanan QRIS.
- Bank BPD Bali meluncurkan Layanan E-link LPD.
- *Bank BPD Bali as Bank BPD Bali Debit Card Issuer.*
- *Bank BPD Bali launched Co-Branding electronic money service with BRI.*
- *Bank BPD Bali develops APEX BPR.*
- *Bank BPD Bali launches QRIS Services.*
- *Bank BPD Bali launches LPD E-link Service.*



2020



BANK BPD BALI

- Bank BPD Bali meluncurkan layanan EDC Mini ATM & Sistem Informasi Mitra Bank.
- Bank BPD Bali sebagai Bank Mitra Penyaluran Dana Penempatan Uang Negara (PUN) dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.
- Bank BPD Bali menerima 27 penghargaan di tahun 2020, di antaranya:
 1. Bank BPD Bali sebagai Bank Mitra Kerja Terbaik Kantor PwBI Provinsi Bali Kategori PJSP Teraktif dalam Implementasi QRIS.
 2. Bank BPD Bali menerima penghargaan sebagai Bank Pendukung UMKM Terbaik Bank BUKU 1 & BUKU 2.
 3. Bank BPD Bali sebagai peserta Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Terbaik Bank BUKU 1 dan BUKU 2.
- *Bank BPD Bali Launches EDC Mini ATM Service & Bank Partner Information System.*
- *Bank BPD Bali as Partner Bank for Distribution of State Funds Placement (PUN) in the Context of National Economic Recovery.*
- *Bank BPD Bali received 27 awards in 2020, including:*
 1. *Bank BPD Bali as the Best Partner Bank for the Bali Province PwBI Office in the Most Active PJSP Category in QRIS Implementation.*
 2. *Bank BPD Bali received an award as the Best Supporting Bank for MSMEs for Business Group Commercial Bank 1 & Business Group Commercial Bank 2.*
 3. *Bank BPD Bali as a participant in the BestBI-RTGS and BI-SSSS Systems of Business Group Commercial Bank 1 and Business Group Commercial Bank 2.*



2021



BANK BPD BALI

- Bank BPD Bali menerbitkan *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD) sebanyak Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah).
- Bank BPD Bali meluncurkan produk/aktivitas layanan baru antara lain: *Deposito On Call*; *EDC Merchant*, layanan transaksi lintas Negara melalui keanggotaan lembaga *switching* PT Rintis Sejahtera untuk *Asian Payment Network* (APN) dan *UnionPay*; layanan *Billing Payment* dan *Pembayaran Online* Lainnya; *E-Link BPR*
- Bank BPD Bali menerima 36 Penghargaan diantaranya:
 1. Bank Penyalur KUR Terbaik III di Provinsi Bali dari DJPB Provinsi Bali.
 2. Bank Pendukung UMKM Terbaik Bank BUKU 1 & 2
 3. Bank Peserta SKNBI dan KPDHN Terbaik Bank Buku 1 & 2 dari Bank Indonesia.
 4. Mitra Kerja Terbaik Kategori PJP QRIS.
 5. Peringkat Pertama Penghargaan lelang dalam kategori Mitra Kolaborasi Terbaik dari KPKNL.
- Bank BPD Bali published *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD) total Rp300.000.000.000,00 (three hundred billion rupiah).
- Bank BPD Bali launched new product/service activities, including: *On Call Deposits*; *EDC Merchant*, a crossborder transaction service through membership of the switching agency PT Rintis Sejahtera for the *Asian Payment Network* (APN) and *UnionPay*; *Billing Payment* and *Other Online Payment services*; *PR E-Link BPR*
- Bank BPD Bali received 36 awards including:
 1. The Third Best KUR Channeling Bank in Bali Province from DJPB of Bali Province.
 2. The Best MSME Supporting Bank Business Group Commercial Bank 1 & Business Group Commercial Bank 2 from Bank Indonesia.
 3. The Best SKNBI and KPDHN Participating Banks Business Group Commercial Bank 1 & Business Group Commercial Bank 2 from Bank Indonesia.
 4. Best Partners in the PJP QRIS Category.
 5. First Place Award in the Best Collaboration Partner category from KPKNL.



2022



BANK BPD BALI

Bank BPD Bali terus berinovasi untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi, dimana pada tahun 2022 Bank BPD Bali meluncurkan produk/aktivitas layanan baru, antara lain:

1. Uang elektronik *server-based* Bali Pay.
2. Layanan Transaksi Tarik/Setor Tunai Tanpa Kartu (*Cardless*) menggunakan *Mobile Banking*
3. Pengembangan Open API.
4. QRIS *Cross Border* Thailand.
5. Kerja sama layanan *Payment Gateway*.
6. BI FAST.
7. *Online On Boarding*.
8. Kerja sama *merchant aggregator* dengan PT Artajasa Pembayaran Elektronik.
9. Deposito Kapitalisasi.
10. Transaksi valuta asing/*forex market* yaitu FX Spot, FX Swap, FX Forward.
11. Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF).
12. Kerja sama *co-branding* uang elektronik *card based* "Jakcard" dengan Bank DKI.
13. Pengembangan Kartu Kredit Indonesia (KKI) a. Kerja Sama Penyediaan Jasa Layanan Kartu Kredit Indonesia (KKI).
14. Pengembangan Kartu Kredit Indonesia (KKI) b. Penerbitan Kartu Kredit Indonesia (KKI) Bank BPD Bali.
15. Bank BPD Bali sebagai Sub Mitra Distribusi Penjualan Surat Berharga Negara (SBN) Ritel di Pasar Perdana.

Pada Tahun 2022, Bank BPD Bali berhasil meraih 32 penghargaan beberapa diantaranya sebagai berikut:

1. Bank Penyalur KUR Terbaik I Tahun 2021 Kategori Bank Daerah dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
2. Bank Penyalur KUR Terbaik II di Provinsi Bali dari DJPB Provinsi Bali.
3. Bank KBMI 1-2 Peserta Inovasi Digital SP Terbaik dari Bank Indonesia.

Bank BPD Bali continues to innovate to provide convenience and comfort in transactions, where in 2022 Bank BPD Bali launched new products/service activities, including:

1. Bali Pay *server-based* electronic money.
2. *Cardless Cash Withdrawal/Deposit Transaction Services* using *Mobile Banking*
3. Open API development.
4. QRIS *Cross Border* Thailand.
5. *Payment Gateway* service cooperation.
6. BI FAST
7. *Online On Boarding*.
8. *Merchant aggregator* collaboration with PT Artajasa Electronic Payments.
9. *Capitalization Deposits*.
10. *Foreign exchange/forex market* transactions, namely FX Spot, FX Swap, FX Forward.
11. *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF) transactions.
12. Collaboration on *co-branding* of card-based electronic money "Jakcard" with Bank DKI.
13. Development of Local Government Credit Cards (KKPD) - (a). Cooperation in the Provision of Local Government Credit Card Services (KKPD).
14. Development of Local Government Credit Cards (KKPD) - (b). Issuance of Regional Government Credit Cards (KKPD) Bank BPD Bali.
15. Bank BPD Bali as Sub-Partner for Retail Government Securities (SBN) Sales Distribution in the Primary Market.

In 2022, Bank BPD Bali won 32 awards, some of which are as follows:

1. The Best KUR Channeling Bank I in 2021 for the Regional Bank Category from the Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia.
2. The 2nd best KUR channeling bank in the Province of Bali from the DJPB of the Province of Bali.
3. KBMI Bank 1-2 Best SP Digital Innovation Participant from Bank Indonesia.



2023



BANK BPD BALI

Di sepanjang tahun 2023, Bank BPD Bali terus tumbuh kuat dan berkesinambungan dengan menghadirkan beragam inovasi dan digitalisasi yang dapat memudahkan pelanggan dalam bertransaksi sekaligus memberikan kenyamanan dan keamanan. Beberapa produk/aktivitas layanan baru yang diluncurkan Bank BPD Bali di tahun 2023 antara lain adalah:

- QRIS Cross Border Malaysia dan Singapura;
- Penerbitan Kartu Kredit Indonesia Fisik Segmen Pemerintah Berlogo Nasional Berbasis GPN;
- Deposito dengan Mekanisme Retensi (Diskonto);
- Implementasi transaksi non tunai pada Pemerintahan Desa melalui integrasi Siskuedes Link dengan CMS Bank BPD Bali.

Throughout 2023, Bank BPD Bali continues to grow strongly and sustainably by presenting various innovations and digitalization that can facilitate customers in transactions while providing comfort and security. Some of the new products/service activities launched by Bank BPD Bali in 2023 include:

- *QRIS Cross Border Malaysia and Singapore;*
- *Issuance of Government Segment Physical Indonesian Credit Card with National Logo Based on NPG;*
- *Deposits with Retention Mechanism (Discounting);*
- *Implementation of non-cash transactions in the Village Government through the integration of Siskuedes Link with Bank BPD Bali CMS.*



2024



BANK BPD BALI

Sejalan dengan capaian kinerja dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang, Bank BPD Bali memperoleh beragam penghargaan antara lain:

- Pencapaian Kualitas Penerapan Tata Kelola (*Governance*), dengan meraih peringkat ke-2 (Baik) serta Kualitas Pengelolaan Risiko (*risk*) dengan peringkat ke-2 (Sehat) dari dari BPKP Provinsi Bali;
- Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 dari Komisi Informasi Provinsi Bali;
- Salah satu TOP 100 CEO 2024 dalam ajang "Top 100 CEO & The 200 Leader Future Forum 2024" untuk Direktur Utama Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma yang diselenggarakan oleh Infobank Media Group
- "TOP GRC Awards 2024 #5 Star" untuk Bank BPD Bali, "The Most Committed GRC Leader 2024" yang diberikan kepada I Nyoman Sudharma SH, MH, Direktur Utama Bank BPD Bali, dan "The High Performing Compliance Director on GRC 2024" untuk Drs. I Wayan Sutela Negara, M.M., Direktur Kepatuhan Bank BPD Bali.

Selain itu, Bank BPD Bali memperoleh apresiasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam kegiatan Pencanangan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) dan penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pemberantasan Korupsi Pada Pemerintah Daerah di Wilayah V Tahun 2024.

Bank BPD Bali has received various awards in line with the achievement of performance and implementation of corporate governance, including

- *Achievement of Governance Implementation Quality, ranking 2nd (Good) and Risk Management Quality, ranking 2nd (Healthy) from Bali Province BPKP;*
- *The 2024 Public Information Transparency Award from the Information Commission of the Province of Bali;*
- *One of the TOP 100 CEO 2024 in the event "Top 100 CEO & The 200 Leader Future Forum 2024" for the President Director of Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma organized by Infobank Media Group;*
- *TOP GRC Awards 2024 #5 Star" for Bank BPD Bali, "The Most Committed GRC Leader 2024" for I Nyoman Sudharma SH, MH, President Director of Bank BPD Bali, and "The High Performing Compliance Director on GRC 2024" for Drs. I Wayan Sutela Negara, M.M., Compliance Director of Bank BPD Bali.*

In addition, Bank BPD Bali received recognition from the Financial Services Authority (OJK) in launching the National Financial Intelligence Movement (GENCARKAN) and received an award from the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia in the Regional Coordinating Meeting (Rakorda) for Corruption Eradication in Regional Governments in Region V in 2024.

VISI, MISI, DAN NILAI-NILAI PERUSAHAAN

Vision, Mission, and Corporate Values

Bank BPD Bali telah menetapkan visi, misi, dan nilai-nilai Perusahaan sebagaimana yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 0477/KEP/DIR/RENSTRA/2021 tentang Corporate Plan PT Bank Pembangunan Bali Tahun 2021-2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi No. 0556/KEP/DIR/RENSTRA/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi No. 0477/KEP/DIR/RENSTRA/2021 Corporate Plan PT Bank Pembangunan Bali Tahun 2021-2025 sebagai berikut

Bank BPD Bali has established the Vision, Mission and Values of the Company as set forth in the Resolution of the Board of Directors Decree No. 0477/KEP/DIR/RENSTRA/2021 concerning the Corporate Plan of PT Bank Pembangunan Bali for 2021-2025 as amended by Board of Directors Decree No. 0556/KEP/DIR/RENSTRA/2022 concerning Amendments to Board of Directors Decree No. 0477/KEP/DIR/RENSTRA/2021 Corporate Plan of PT Bank Pembangunan Bali for 2021-2025, 2024 as follows



VISI VISION

Menjadi Bank yang Kuat, Berdaya Saing Tinggi, dan Terkemuka dalam Melayani UMKM serta Berkontribusi bagi Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan.

To be a Strong, Highly Competitive and Leading Bank in the Service of MSMEs, Contributing to Sustainable Economic Growth and Regional Development.



MISI MISSION

- Memberikan solusi produk, layanan, dan/atau jasa keuangan yang inovatif melalui pengembangan ekosistem digital;
- Memberdayakan sektor UMKM dalam rangka menggerakkan pembangunan daerah;
- Meningkatkan kualitas SDM, teknologi dan informasi serta budaya perusahaan;
- Meningkatkan penerapan tata kelola yang baik, manajemen risiko, dan pengendalian dalam operasional organisasi;
- Meningkatkan kepedulian sosial bagi komunitas dan lingkungan.

- *Provide innovative products, services and/or financial solutions by developing a digital ecosystem;*
- *Empower the MSME sector to drive regional development;*
- *Improve the quality of human resources, technology and information, and corporate culture;*
- *Enhance the implementation of good governance, risk management and control in the organization's operations;*
- *Increase social awareness for the community and the environment.*

TATA NILAI

Corporate Values

Dengan tetap mengacu pada filsafat Tri Kaya Parisudha, dilakukan redefinisi terhadap perilaku utama serta penetapan budaya yang diharapkan dan kalimat afirmasi dari masing-masing nilai dengan penjelasan dalam mencapai visi Bank BPD Bali menjadi bank yang kuat, berdaya saing tinggi, dan terkemuka dalam melayani UMKM serta berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

By still referring to the Tri Kaya Parisudha Philosophy, redefining the main behaviors and establishing the expected culture and affirming sentences of each value with an explanation in achieving the vision of Bank BPD Bali to become a strong, highly competitive and leading bank in serving MSMEs and contributing to economic growth and sustainable regional development.

Kompeten



Competence

Melakukan sesuatu dengan baik dan benar, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, serta adaptif terhadap perubahan, dengan perilaku utama:

1. Berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif untuk mencapai visi dan misi.
2. Menerapkan standar kerja tinggi dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
3. Selalu siap mengikuti perubahan dan memiliki motivasi yang gigih untuk berkembang dengan tetap mempertahankan akurasi dan ketelitian dalam bekerja.

Budaya yang diharapkan muncul dari nilai dan perilaku *Competence* yaitu *Digital and Learning Culture*.

Dengan Kalimat Afirmasi: Kami Beradaptasi dengan perubahan untuk bekerja secara profesional.

Doing things well and correctly, having knowledge and skills, and being adaptable to change, with key behaviors:

1. *Think and act creatively and innovatively to achieve the vision and mission.*
2. *Apply high standards of work while complying with applicable regulations.*
3. *Always be ready to follow changes and have a persistent motivation to develop while maintaining accuracy and precision in work.*

The expected culture emerges from the values and behaviours of competence, namely Digital and Learning Culture.

With Affirmative Sentences: We adapt to changes to work professionally.

Integritas



Integrity

Berpikir dan berperilaku sesuai ketentuan dan peraturan dengan penuh tanggung jawab, dan selalu memperhatikan nilai etika dan moral, dengan perilaku utama:

1. Menerapkan standar etika/moral tinggi, sesuai dengan norma lingkungan.
2. Berlaku jujur dan tidak memberi, menerima serta tidak membuka peluang suap menyuap atau mengharap jasa berkaitan dengan jabatan.
3. Menunjukkan etos kerja dengan penuh komitmen dan rasa tanggung jawab.

Budaya yang diharapkan muncul dari nilai dan perilaku *Integrity* yaitu *Discipline Culture*.

Dengan Kalimat Afirmasi: Kami mentaati dan melaksanakan etika, ketentuan, dan peraturan dengan penuh tanggung jawab.

Think and act in accordance with the rules and regulations with full responsibility, and always pay attention to ethical and moral values, with the main behavior:

1. *Apply high ethical/moral standards in accordance with environmental standards.*
2. *Act with honesty and refrain from offering, accepting or soliciting bribes or benefits in connection with your job.*
3. *Demonstrate a work ethic with full commitment and a sense of responsibility.*

The expected culture emerges from the values and behaviours of Integrity, namely the Discipline Culture.

With Affirmative Sentences: We are in full compliance with ethics, rules and regulations, with a sense of responsibility.

Kerja Sama Tim**Teamwork**

Rasa kekompakan atau persatuan yang ada dalam organisasi dan kedekatan dengan sesama individu atau pada sesama satuan kerja sehingga mampu mendukung terciptanya kerjasama dan komunikasi yang baik, dengan perilaku utama:

1. Mengutamakan kepentingan perusahaan dan mengesampingkan ego sektoral.
2. Menghargai perbedaan pendapat dan aktif berkontribusi dalam membangun komunikasi yang harmonis.
3. Mengembangkan rasa empati dan tidak mengeksploitasi perbedaan jabatan/pangkat dan generasi dalam menciptakan sinergi yang positif.

Budaya yang diharapkan muncul dari nilai dan perilaku *Teamwork* yaitu *Respect Culture*.

Dengan Kalimat Afirmasi: Kami berkolaborasi dan bersinergi untuk menciptakan Kerjasama dan komunikasi yang baik.

A sense of togetherness or unity that exists within the organization and proximity to fellow individuals or fellow work units to support the creation of good cooperation and communication, with the most important behaviors:

1. *Put the company's interests first and set aside departmental egos.*
2. *Respect differences of opinion and actively contribute to building harmonious communication.*
3. *Develop empathy and do not take advantage of differences in position/rank and generation in the creation of positive synergy.*

The expected culture that emerges from the Teamwork values and behaviours is the Respect Culture.

With Affirmative Sentences: We cooperate and synergize to create good cooperation and communication.

Kepedulian Pelanggan**Customer Awareness**

Menjadikan pengguna sebagai fokus utama dari tindakan kita, mengemban dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan secara produktif, dengan perilaku utama:

1. Memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan untuk meningkatkan produktifitas dan loyalitasnya.
2. Mengenal pelanggan dari sisi personal dan memberikan rasa nyaman saat berinteraksi.
3. Menjaga hubungan baik dengan pelanggan, bertindak cepat memenuhi kebutuhannya, menyelesaikan masalahnya dan menghindari komitmen yang berlebihan.

Budaya yang diharapkan muncul dari nilai dan perilaku *Customer Awareness* yaitu *Service Culture*.

Dengan Kalimat Afirmasi: Kami memberikan pelayanan terbaik demi kepuasan pengguna dan pelanggan.

Put the user at the center of our actions and productively develop and maintain customer relationships with key behaviours:

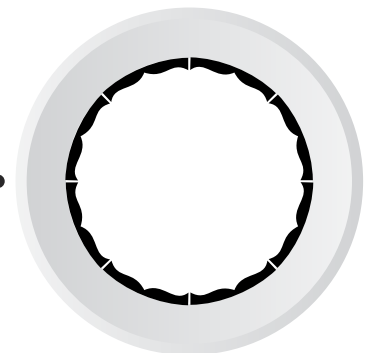
1. *Provide the best experience for customers to increase their productivity and loyalty.*
2. *Get to know customers personally and provide a sense of comfort when interacting.*
3. *Maintain good relationships with customers, act quickly to meet their needs, solve their problems, and avoid over-commitment.*

The expected culture emerges from the values and behaviours of Customer Awareness, namely Service Culture.

With Affirmative Sentences: We provide the best service for user and customer satisfaction.

LOGO PERUSAHAAN

Company Logo



Simbol Utama Logo
The Main Symbol of The Logo

Logo Bank BPD Bali *Bank BPD Bali Logo*

Melambungkan kepribadian serta keunikan yang membuatnya berbeda sekaligus menjadi mudah dikenali. Logo merepresentasikan semangat, harapan, dan sikapnya yang antisipatif terhadap perubahan. Logo ini juga mewakili nilai dan komitmen Bank BPD Bali yang menggerakkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk tumbuh bersama-sama, dan dengan kemantapan hati, terus berkarya menghasilkan kreasi yang inovatif.

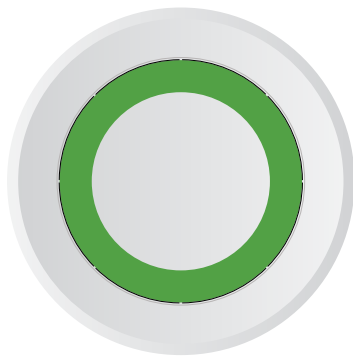
The logo symbolizes the bank's personality and uniqueness, which makes it different and easily recognizable. It represents the bank's spirit, hope, and anticipatory attitude towards change. This logo also represents the values and commitment of Bank BPD Bali, which drives all stakeholders to grow together and continue to work with determination to produce innovative creations.

Simbol Utama Logo

Yang berbentuk lingkaran dengan 8 (delapan) sudut terinspirasi dari keindahan dan keagungan bunga teratai/padma. Sementara itu, sejumlah elemen kaya makna melengkapi simbol utama logo Bank BPD Bali. Lingkaran bersudut delapan berwarna dasar putih mewakili kesadaran dari seluruh insan Bank BPD Bali untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan berdasarkan kejujuran dan pikiran yang bersih.

Main symbol of the logo

It is shaped like an 8-cornered circle, inspired by the beauty and majesty of the lotus flower. In the meantime, a number of meaningful elements complement the main symbol of the Bank BPD Bali logo. The eight-cornered circle with white background represents Bank BPD Bali employees' awareness to perform their duties and responsibilities based on honesty and clean mind.



Lingkaran Berwarna Hijau
The Green Circle



BPD
BPD

Lingkaran Berwarna Hijau

Lingkaran berwarna hijau yang mengelilingi warna putih bermakna bahwa Pulau Bali, di mana Bank BPD Bali menjalankan usahanya, merupakan tanah yang subur yang akan menjadi modal utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.

BPD

Yang ditulis dengan warna kuning emas mewakili integritas dari seluruh insan Bank BPD Bali dalam menjalankan aktivitas pekerjaannya dan komitmen yang tak lekang oleh waktu dalam memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali. Sementara itu, tulisan BALI DWIPA JAYA yang berwarna hitam berarti kesigapan dan kesungguhan dari seluruh insan Bank BPD Bali untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya demi mewujudkan Bali yang jaya dan sejahtera.

Dengan seluruh energi positif yang terwakili dalam logo ini, Bank BPD Bali mampu menjaga kesinambungan bisnisnya serta memposisikan dirinya sebagai bank pilihan di hati masyarakat.

Green Circle

The green circle around the white color means that the island of Bali, where Bank BPD Bali has its operations, is a fertile land that will be the main capital in the realization of the welfare of its people.

BPD

The golden yellow letters represent the integrity of all Bank BPD Bali employees in the performance of their work activities and the timeless commitment to contribute to the improvement of the welfare of the Balinese people. Meanwhile, BALI DWIPA JAYA written in black represents the vigilance and sincerity of all Bank BPD Bali employees in performing their duties and responsibilities to realize a glorious and prosperous Bali.

Through all the positive energy represented in the logo, Bank BPD Bali can maintain the continuity of its business and become the bank of choice in the heart of the public.

BIDANG DAN KEGIATAN USAHA

Business Sector and Business Activities

Bidang Usaha

Business Sector

Berdasarkan Pasal 3 perubahan terakhir Anggaran Dasar Bank sesuai dengan Akta Nomor 38 tanggal 22 Nopember 2023, maksud dan tujuan Bank adalah berusaha di bidang perbankan.

Pursuant to Article 3 of the latest amendment to the Bank's Articles of Association under Act No. 38 of November 22, 2023, the Bank's object and purpose is to engage in banking activities.

Kegiatan Usaha

Business Activities

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Bank BPD Bali melaksanakan kegiatan usaha Bank Umum Pemerintah Daerah Devisa (Kelompok ini mencakup kegiatan bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang undangan yang berlaku dan memperoleh surat penunjukan Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam Valuta Asing dan/atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak luar negeri) yang kegiatan usaha utamanya adalah sebagai berikut:

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- Memberikan kredit;
- Menerbitkan surat pengakuan utang;
- Membeli, menjual atau menjamin atas risiko maupun kepentingan dan atas perintah nasabahnya yaitu berupa surat-surat wesel termasuk yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud, surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud, kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), obligasi, surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan surat berharga lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- Menempatkan dana, meminjam dana dari/atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan/atau antar pihak ketiga;
- Menyediakan tempat untuk penyimpanan barang dan surat berharga;
- Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek;

In order to achieve the aforementioned aims and objectives, the Company may carry out the business activities of Regional Government Foreign Exchange Commercial Banks (This group includes the activities of banks whose capital is wholly or substantially owned by the Regional Government as stated in the applicable laws and regulations and obtain a letter of appointment of Bank Indonesia to be able to conducting banking business activities in foreign currencies and/or conducting banking transactions with foreign parties) whose main business activities are as follows:

- To collect third-party funds in the form of demand deposits, time deposits, certificates of deposits, savings and/or other similar forms;*
- To grant loans;*
- Issuing a letter of acknowledgment of debt;*
- Buying, selling or guaranteeing at risk or interest and at the behest of its customers, namely in the form of bills of exchange including those accepted by the bank whose validity period is no longer than the custom in trading of said letters, debt acknowledgments and other trade papers whose validity period is not longer than is customary in trading such documents, state treasury papers and government guarantee letters, Bank Indonesia Certificates (SBI), Bonds, trade papers with a maturity in accordance with applicable laws and regulations and other securities in accordance with laws and regulations applicable;*
- Transferring money both for its own interests and for the benefit of customers;*
- To put placement, obtain borrowings from/or provide financing to other banks, either by letter, telecommunication facilities, sight letter of credit (L/C), cheque or other facilities;*
- Receive payments from bills on securities and perform calculations with/or between third parties;*
- Provide a place for storage of goods and securities;*
- Carry out custodial activities for the benefit of other parties based on a contract;*
- Placing funds from customers to other customers in the form of securities listed on the stock exchange;*

- k. Membeli agunan, baik sebagian maupun seluruhnya melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- m. Melakukan kegiatan dalam perdagangan Valuta Asing dan/atau sebagai Bank Devisa dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang Jasa keuangan lainnya atau mendirikan Perusahaan baru sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- o. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus Dana Pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- p. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Per 31 Desember 2024, Bank BPD Bali telah menjalankan beragam kegiatan usaha utama tersebut di atas.

- k. *Purchasing collateral, either in part or in whole through an auction or in other ways in the event that the debt or does not fulfil his obligations to the bank, provided that the collateral purchased must be disbursed as soon as possible in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations;*
- l. *Performing factoring activities, credit card business and trustee activities;*
- m. *Carrying out activities in Foreign Exchange trading and/or as a Foreign Exchange Bank by complying with the provisions of the applicable laws and regulations;*
- n. *To conduct investment activities through share participation in banks or other financial institution in accordance with the prevailing regulation;*
- o. *Act as the founder and administrator of the Pension Fund in accordance with the applicable laws and regulations;*
- p. *Carry out other activities commonly carried out by commercial banks as long as they do not conflict with the applicable laws and regulations.*

As of December 31, 2024, Bank BPD Bali is engaged in various principal business activities as described above.



PRODUK DAN JASA

Products and Services

Bank BPD Bali menyediakan beragam produk dan layanan perbankan baik untuk produk simpanan, pinjaman, *treasury*, *e-banking* dan layanan jasa yang diringkas sebagai berikut. Bank BPD Bali juga menyediakan produk investasi berupa Surat Berharga Negara (SBN) Ritel baik konvensional maupun syariah.

Informasi lebih lengkap terkait beragam produk dan layanan jasa dapat diakses di *website* Bank yakni <https://www.bpd Bali.co.id/>.

Bank BPD Bali offers a variety of banking products and services for savings, loans, treasury, e-banking and service products as summarized below. Bank BPD Bali also offers investment products in the form of Retail Government Bonds (SBN) both conventional and Shariah.

More detailed information on the various products and services can be found on the Bank's website, namely <https://www.bpd Bali.co.id/>.

Produk Simpanan Deposit Products		
Giro Current Account	Tabungan Savings	Deposito Deposits
Giro Perorangan Individual Current Account	SIBAPA	Deposito Umum General Deposit
Giro Perusahaan Corporate Current Account	SIMPEDA	Deposito Pemda Regional Government Deposit
Giro Pemerintah Government Current Account	Tabunganku My savings	Deposito LPD LPD Deposit
Giro Valas Foreign Current Account	Simpanan Pelajar (SimPel) Student Savings (SimPel)	Deposito on Call
	THT Bali Dwipa	Deposito Valas Foreign Current Deposit
	Simpanan Valas Foreign Savings	

Produk Pinjaman Loan Products		
Kredit Produktif	Kredit Program	Kredit Konsumtif
Kredit Modal Kerja (KMK) Working Capital Loan (KMK)	Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (KUA) Agricultural Equipment and Machinery Business Loan (KUA)	Kredit Multiguna Multipurpose Loan
Kredit Investasi Investment Loan		Kredit Multiguna Pembelian Emas Gold Multipurpose Loan
Kredit Konstruksi & pengadaan Barang/Jasa Bali Dwipa Construction Loans & Procurement of Goods/Services Bali Dwipa		Kredit Multiguna Perumahan Multipurpose Housing Loans
Kredit kepada Lembaga Keuangan (KKLK) Loan to Financial institutions (KKLK)		Kredit Multiguna Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Multipurpose Loan for Purchase of Battery-Backed Electric Vehicles (KBLBB)
Kredit Usaha Persiapan Pensiunan Retirement Preparation Business Loan		Kredit Multiguna Pembelian Kendaraan Bermotor Konvensional Multipurpose Loan for Purchase of Conventional Vehicles
Kredit Usaha Pensiunan Retirement Business Loan		Kredit Pensiunan Retirement Loan
Kredit KUSUMA KUSUMA Loan		Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Bali Dwipa Home Ownership Loan (KPR) Bali Dwipa
Kredit KUSUMA SARI KUSUMA Loan		Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) MLT BPJS TK Bank BPD Bali Home Ownership Loan (KPR) MLT BPJS TK Bank BPD Bali
Kredit Prioritas Sektor Pertanian (KPSP) Agricultural Sector Priority Loan (KPSP)		Kredit kepada Para Pengurus/Pegawai LPD Loan for LPD administrators/employees
Kredit Pasar Bali Dwipa, Supply Chain Financing Bali Dwipa, Kredit Konstruksi Tagihan Termyn Bali Dwipa Market Credit, Bali Dwipa Supply Chain Financing, Termyn Bill Construction Credit		Kredit kepada Anggota DPR/DPRD Loan to DPR/DPRD Members

Jasa Services		
Bank memiliki berbagai layanan perbankan sebagai berikut: <i>The Bank has a variety of banking services as follows:</i>		
E-Money Bank BPD Bali	Layanan <i>cashless</i> Bank BPD Bali sebagai alat pembayaran yang praktis dalam bentuk kartu ataupun non kartu.	<i>Bank BPD Bali cashless service as a convenient payment tool in the form of cards or non-cards.</i>
Transfer Dalam Negeri	Layanan transfer antar rekening, baik nasabah atau non nasabah dalam mata uang Rupiah. Transfer yang dilayani melalui RTGS dan Kliring.	<i>Transfer services between accounts, both customers and non-customers in Rupiah currency. Transfer services through RTGS and Clearing.</i>
Kliring	layanan transfer dari rekening nasabah Bank BPD Bali ke rekening nasabah di luar Bank BPD Bali yang transaksinya menggunakan warkat	<i>Transfer services from Bank BPD Bali customer accounts to customer accounts outside Bank BPD Bali whose transactions are paper-based.</i>
Bali Dwipa Remittance*	layanan transfer dalam valuta asing untuk transaksi domestik dan internasional, baik penerimaan (<i>incoming transfer</i>) maupun pengiriman (<i>outgoing transfer</i>)	<i>Foreign currency remittance services for domestic and international transactions, both receiving (incoming remittances) and sending (outgoing remittances)</i>
Payment Point	Transaksi pembayaran seperti: Pembayaran PLN, PDAM, Telkom, Telkomsel, Indosat, <i>e-Tax</i> (Pembayaran Pajak <i>Online</i>), Pembayaran Pajak (Pajak Pusat, PHR, dan PBB) dan SPP <i>Online</i> , dan lainnya melalui seluruh unit kerja Bank BPD Bali, loket-loket khusus pembayaran <i>Payment Point</i> , dan E-Banking (ATM, <i>Mobile Banking</i> , <i>Internet Banking</i>).	<i>Payment transactions such as Payment of PLN, PDAM, Telkom, Telkomsel, Indosat, e-Tax (Online Tax Payment), Tax Payment (Central Tax, PHR and PBB) and SPP Online, and others through all Bank BPD Bali branches, special payment counters and e-banking (ATM, Mobile Banking, Internet Banking).</i>
Safe Deposit Box (SDB)	Tempat penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang khusus dalam ruang khasanah dari bahan baja, tahan bongkar, dan tahan api serta dilengkapi sistem keamanan selama 24 jam. Penyewa SDB adalah nasabah Perorangan dan Non Perorangan dengan jangka waktu sewa 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis dan SDB tersedia dengan 3 (tiga) jenis ukuran.	<i>A place to store valuables or valuables that is specially designed in a steel vault that is burglar and fire resistant and is equipped with a 24-hour security system. SDB tenants are individual and non-individual customers with a rental period of 1 (one) year, which can be automatically renewed, and SDB is available in 3 (three) types of sizes.</i>
Payroll Package	Layanan pembayaran gaji dimana pembayaran dilaksanakan secara pemindahbukuan dari rekening pemberi gaji ke rekening penerima gaji. <i>Payroll Package</i> dapat dilayani diseluruh Kantor Cabang Bank BPD Bali.	<i>Payroll services where payments are made by bank transfer from the payer's account to the payee's account. Payroll packages can be served at all Bank BPD Bali Branch Offices.</i>
Inkaso	Layanan penagihan warkat-warkat yang bank transaksinya berada di dalam negeri atau di luar wilayah. Melayani nasabah dan non nasabah, jenis warkat yang dilayani antara lain: <i>Cheque</i> , Bilyet Giro, <i>Bank Draft</i> , dan warkat lainnya.	<i>Collection services for documents whose transaction banks are located within or outside the region. Serving customers and non-customers, the types of documents served include: Checks, bank drafts, promissory notes and other documents.</i>
Collection	Layanan penagihan warkat-warkat yang bank transaksinya berada di dalam negeri atau di luar wilayah. Melayani nasabah dan non nasabah, jenis warkat yang dilayani antara lain: <i>bank draft</i> , <i>cheque</i> , <i>international money order</i> , dan warkat lainnya.	<i>Collection services for documents whose transaction banks are located domestically or outside the region. Serving clients and non-clients, the types of documents served include: drafts, checks, international money orders, and other documents.</i>
Money Changer*	Layanan jual beli valuta asing. Transaksi dalam jumlah besar akan disediakan fasilitas antar jemput <i>Rate</i> kompetitif.	<i>Foreign exchange buying and selling services. Large transactions are offered with pick-up and drop-off facilities. Competitive rates.</i>
Western Union*	Layanan penerima dan pengiriman uang / transfer melalui Western Union yang dapat dilayani oleh seluruh kantor operasional Bank BPD Bali. Prosesnya cepat (<i>real time</i>), jaringan sangat luas dengan 385.000 outlet di 200 negara di dunia	<i>Receive and send money/transfer services via Western Union, which can be served by all operational offices of Bank BPD Bali. The process is fast (real time), a very wide network with 385,000 outlets in 200 countries in the world.</i>
Cash Deposit Machine (CDM)	Mesin anjungan tunai mandiri (ATM) yang dapat dipergunakan oleh nasabah Bank BPD Bali untuk melakukan penyetoran ke rekening sendiri atau ke rekening orang lain. Selain penyetoran uang tunai, CDM juga berfungsi untuk melakukan transfer, pembayaran, dan pembelian.	<i>Automated Teller Machines (ATMs) that Bank BPD Bali customers can use to make deposits to their own or other people's accounts. In addition to cash deposits, CDMs can also be used for money transfers, payments and purchases.</i>
Mobil Kas Keliling	Layanan untuk menjangkau nasabah hingga ke pelosok dan memberikan layanan yang mudah, cepat, serta aman.	<i>Services to reach customers in remote areas and provide easy, fast and secure services.</i>
Mailaku Bank BPD Bali	Layanan keuangan dari Bank BPD Bali yang dapat dilakukan tanpa melalui jaringan kantor Bank BPD Bali. Nasabah dapat bertransaksi di agen Mailaku Bank BPD Bali yang tersebar di seluruh Bali. Tidak hanya itu, nasabah juga dapat menjadi agen Mailaku Bank BPD Bali	<i>Financial services from Bank BPD Bali that can be done without going through the Bank BPD Bali office network. Customers can make transactions at Bank BPD Bali Mailaku agents spread throughout Bali. Not only that, customers can also become agents of Bank BPD Bali Mailaku.</i>
Speed ID	Dalam rangka meningkatkan layanan Bank, khususnya terhadap sistem antrian di <i>Customer Service</i> dan <i>Teller</i> , maka kami bekerjasama dengan SpeedID untuk memberlakukan Sistem Antrian Berbasis <i>Online</i> .	<i>In order to improve the bank's services, especially the queuing system at customer service and teller, we are working with SpeedID to implement an online based queuing system.</i>

* Layanan *Treasury/Treasury Services*



Bank BPD Bali juga menyediakan layanan *e-banking* yang dijelaskan pada tabel berikut. Informasi lebih lengkap terkait layanan *e-banking* tersebut dapat diakses di *website* Bank yakni <https://www.bpd Bali.co.id/>.

Bank BPD Bali also offers e-banking services as described in the table below. More detailed information on e-banking services can be found on the Bank's website, namely <https://www.bpd Bali.co.id/>.

E-Banking		
Bank memiliki berbagai layanan perbankan sebagai berikut: <i>The Bank has a variety of banking services as follows:</i>		
Internet Banking Korporasi <i>Corporate Internet Banking</i>	Layanan transaksi <i>realtime online</i> bagi nasabah umum dan Pemerintah (Bendaharawan). Untuk keamanan bertransaksi, <i>Internet Banking</i> Bisnis/ <i>Internet Banking</i> Korporasi memiliki tingkat <i>approval</i> /transaksi, di mana setiap <i>approval</i> akan mendapat nomor token. Jumlah limit transaksi <i>Internet Banking</i> Bisnis/ <i>Internet Banking</i> Korporasi dapat disesuaikan dengan jumlah kebutuhan nasabah. Nasabah mengakses https://ibank.bpd Bali.id/ibb/ untuk melakukan transaksi.	<i>Real-time online transaction services for general and Government (Treasurer) customers. For security purposes, Business Internet Banking/Corporate Internet Banking has a transaction approval level where each approval is assigned a token number. The amount of Business Internet Banking/Corporate Internet Banking transaction limits can be adjusted according to the customer's needs. Customers access https://ibank.bpd Bali.id/ibb/ to conduct transactions.</i>
Mobile Banking Bank BPD Bali	Layanan transaksi <i>realtime online</i> melalui telepon genggam. Untuk dapat bertransaksi menggunakan layanan <i>mobile banking</i> , nasabah menggunakan aplikasi <i>mobile banking</i> Bank BPD Bali yang dapat diunduh melalui <i>Play Store</i> dan <i>App Store</i> .	<i>Real-time online transaction services via mobile phones. To transact using mobile banking services, customers use the Bank BPD Bali mobile banking application, which can be downloaded from Play Store and App Store.</i>
Balipay	Layanan uang elektronik berbasis aplikasi <i>mobile server-based</i> yang diterbitkan oleh Bank BPD Bali yang dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Saatnya menikmati kemudahan bertransaksi dengan Balipay di seluruh ekosistem transaksi nontunai di seluruh Indonesia yang diterima baik secara <i>online</i> atau melalui kanal pembayaran yang berlogo QRIS. Hanya daftar dengan nomor telepon seluler di <i>smartphone</i> sudah bisa transaksi di Balipay, sehingga transaksi makin mudah, cepat, dan fleksibel.	<i>An e-money service based on a mobile server-based application issued by BPD Bali that can be used anytime, anywhere. It's time to enjoy the ease of transacting with Balipay in all cashless transaction ecosystems throughout Indonesia that are accepted both online and through payment channels with the QRIS logo. Just register with a mobile phone number on smartphone and we can transact with Balipay, making transactions easier, faster, and more flexible.</i>
Kartu ATM/Debet Bali Dwipa <i>Bali Dwipa ATM/ Debit Card</i>	Kartu ATM yang dapat dipergunakan bertransaksi secara <i>realtime online</i> di mesin ATM Bank BPD Bali yang tersebar di seluruh Bali dan Mataram. Kartu ATM Bali Dwipa sudah sesuai dengan <i>National Standard Indonesian Chip Card Specification (NSICCS)</i> dan dapat ditransaksikan ke seluruh jaringan ATM Bersama dan Prima, serta sudah berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Kartu ATM Bali Dwipa dapat ditransaksikan di jaringan ATM Bersama, Prima, dan ATM berlogo GPN. Dengan memiliki kartu ATM Bali Dwipa, nasabah dapat menikmati layanan <i>e-channel</i> lainnya seperti <i>mobile banking</i> dan <i>internet banking</i> .	<i>ATM card that can be used for real-time online transactions at Bank BPD Bali's ATMs located throughout Bali and Mataram. The Bali Dwipa ATM card is compliant with the National Standard Indonesian Chip Card Specification (NSICCS) and can be used at all ATM Bersama and Prima networks and has the National Payment Gateway (GPN) logo. The Bali Dwipa ATM card can be used at ATM Bersama, Prima and ATM networks with the GPN logo. With a Bali Dwipa ATM card, customers can enjoy other e-channel services such as mobile banking and internet banking.</i>
QRIS Bank BPD Bali	BPD Bali <i>Merchant</i> adalah <i>merchant</i> dan/atau donasi menggunakan <i>QR Code Standard</i> yang dapat menerima pembayaran dari fitur QRIS perbankan dan <i>fintech</i> (BPD BALI <i>Mobile</i> , OVO, GoPay, DANA, LinkAja dan lainnya).	<i>BPD Bali Merchant is a merchant and/or donation using QR code standard that can accept payments from banking and fintech QRIS functions (BPD BALI Mobile, OVO, GoPay, DANA, LinkAja and others).</i>
Layanan Tarik/Setor Tunai tanpa Kartu <i>Cardless Cash Withdrawal/ Deposit Service</i>	Layanan tarik/setor tanpa kartu (<i>cardless</i>) melalui <i>mobile banking</i> (BPD Bali <i>Mobile</i>) di Mesin ATM/CRM, Teller, Agen Bank (Mailaku) dan <i>cash out</i> (tarik tunai) melalui <i>Biller</i> di toko berjaringan (Indomaret).	<i>Cardless withdrawal/deposit services via mobile banking (BPD Bali Mobile) at ATM/CRM machines, tellers, bank agents (Mailaku) and cash out (cash withdrawal) via biller at networked stores (Indomaret).</i>

PERBANKAN DIGITAL

Digital Banking

Latar Belakang Transformasi Digital

Background of Digital Transformation

Transformasi digital menjadi kebutuhan strategis bagi perbankan daerah di era yang semakin kompetitif dan dinamis. Perbankan nasional dan *fintech* terus memperluas jangkauan layanan mereka hingga ke daerah, sehingga hal ini menuntut perbankan daerah untuk meningkatkan daya saing, salah satunya dengan adopsi teknologi yang mendukung efisiensi operasional dan inovasi produk. Sebagai penggerak ekonomi lokal, perbankan daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan. Digitalisasi memungkinkan perbankan daerah menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama di daerah terpencil, dengan biaya operasional yang lebih rendah.

Pemerintah juga mendorong perbankan untuk mendukung transformasi ekonomi digital melalui inisiatif seperti percepatan layanan non-tunai dan interoperabilitas sistem pembayaran menjadi pendorong agar perbankan daerah segera beradaptasi. Pada akhirnya digitalisasi membantu perbankan daerah mengoptimalkan proses operasional, mengurangi ketergantungan pada sistem manual, dan meningkatkan ketahanan terhadap ancaman keamanan siber.

Digital transformation has become a strategic imperative for regional banks in an increasingly competitive and dynamic era. As national banks and fintechs continue to expand their services to the regions, regional banks need to increase their competitiveness. One way to do this is to adopt technologies that support operational efficiency and product innovation. As a driver of local economies, regional banking has an important role in the expansion of financial inclusion. Digitization allows regional banks to reach more people, especially in remote areas, with lower operational costs.

The government is also encouraging banks to support digital economic transformation through initiatives such as accelerating cashless services and payment system interoperability to encourage regional banks to adapt immediately. In the end, digitization helps regional banks optimize processes, reduce dependence on manual systems, and become more resilient to cyber threats.

Tujuan Transformasi Digital

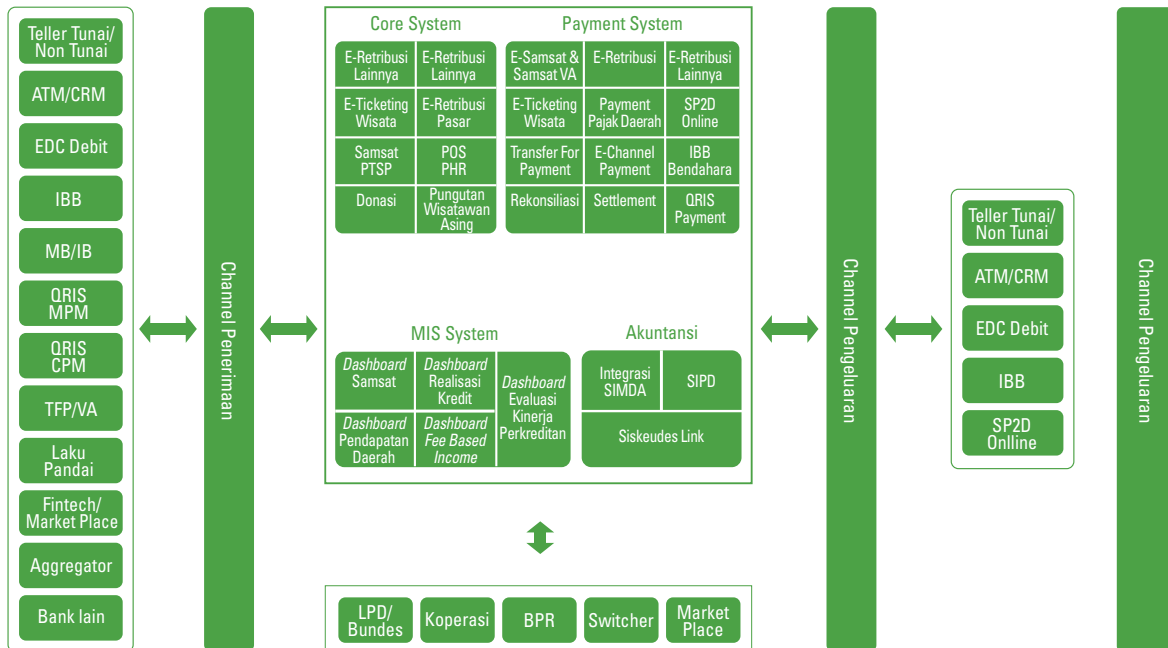
Digital Transformation Objectives

Visi Bank BPD Bali adalah menjadi Bank yang kuat, berdaya saing tinggi, dan terkemuka dalam melayani UMKM serta berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Selain itu, terkait dengan digitalisasi perbankan, salah satu Misi Bank BPD Bali adalah untuk memberikan solusi produk layanan yang inovatif melalui pengembangan ekosistem digital. Sejalan dengan Visi dan Misi tersebut, Bank BPD Bali harus melakukan Transformasi Digital agar menjadi Bank yang agile terhadap perubahan yang terjadi serta untuk mendorong pertumbuhan bisnis khususnya kredit termasuk dapat mengoptimalkan sumber daya manusia dan inovasi teknologi.

Bank BPD Bali menerapkan produk digital dan elektronik meliputi *Mobile Banking*, *Internet Banking*, *Internet Banking Bisnis/Korporasi*, *Laku Pandai*, *Automatic Teller Machine (ATM)*, *Cash Recycling Machine (CRM)* serta produk ekosistem digital lainnya untuk mendukung digitalisasi dan elektronifikasi pendapatan dan penerimaan Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali yang mendukung transformasi transaksi penerimaan dan pendapatan daerah dan berperan sebagai *subject expert matter* dalam elektronifikasi sistem, transaksi, dan pembayaran berbasis digital untuk mendukung transparansi pembayaran serta mendukung inklusi keuangan daerah yang merupakan mitra pemerintah daerah dalam rangka menunjang peningkatan perekonomian Provinsi Bali.

The vision of Bank BPD Bali is to become a strong, highly competitive and leading bank in the service of MSMEs and to contribute to the sustainable economic growth and development of the region. In addition, in relation to the digitalization of banking, one of Bank BPD Bali's missions is to provide innovative product and service solutions through the development of a digital ecosystem. In line with its vision and mission, Bank BPD Bali needs to undergo a digital transformation to become a bank that is agile to the changes that occur and to promote business growth, especially in credit. This includes being able to optimize human resources and technological innovation.

Bank BPD Bali is implementing digital and electronic products such as mobile bank, internet bank, corporate internet bank, laku pandai, ATM, cash recycling device (CRM) and other digital ecosystem products to support the digitalization and electronification of income and receipts for Bali Regencies/Cities across Bali, supporting the transformation of regional income and receipt transactions, and acting as an expert in the electronification of digital transactions and payments to support payment transparency, Transactions and Payments to support payment transparency and regional financial inclusion, which is a partner of the regional government to support the improvement of the economy of the Province of Bali.



Roadmap Transformasi Digital

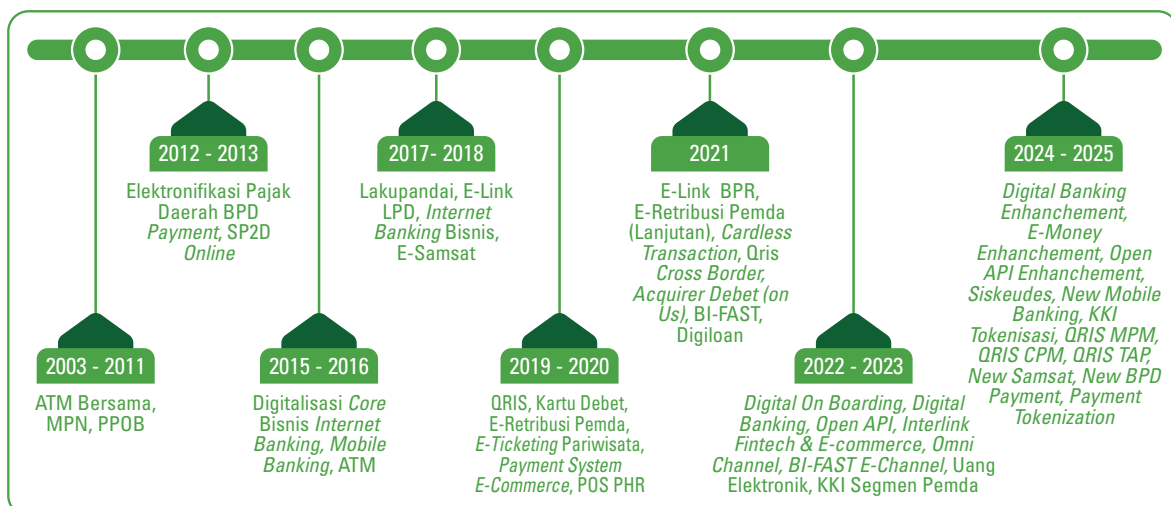
Digital Transformation Roadmap

Inovasi dan transformasi digital secara terus menerus diperluas dalam rangka peningkatan inklusi keuangan dan pelayanan menyeluruh kepada institusi dan mitra Bank BPD Bali untuk bersinergi dan bertransformasi bersama-sama. E-Retribusi juga tidak luput dari perluasan dalam rangka penatausahaan objek retribusi yang terintegrasi dari pengelolaan data, pembayaran sampai dengan pelaporan dan transaksi *cashless*.

Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah juga terus ditingkatkan pada lini penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui E-Samsat, Pemantauan POS PHR, serta *Dashboard* Pemantauan Pajak Daerah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penerimaan pajak daerah.

Digital innovation and transformation will be continuously expanded to improve financial inclusion and comprehensive services for Bank BPD Bali's institutions and partners for synergy and transformation together. E-Retribution is also not excluded from expansion in the context of integrated remittance object management from data management, payments to reporting and cashless transactions.

Optimization of regional revenue collection is also continuously improved in vehicle tax collection through E-Samsat, POS PHR monitoring and Regional Tax Monitoring Dashboard to realize regional tax collection transparency and accountability.



Program Transformasi Digital

Digital Transformation Program

Program transformasi digital Bank BPD Bali meliputi berbagai aspek sebagai berikut:

- 1) Dalam hal channel penerimaan, Bank BPD Bali memiliki layanan *Teller Tunai/Non Tunai*, *ATM*, *EDC Debit*, *Internet Banking Bisnis*, *Mobile Banking/Internet Banking*, *QRIS*, *Transfer for Payment (TFP)* dan *Virtual Account (VA)*, *Laku Pandai*, serta aliansi dan kemitraan strategis dengan *Fintech* dan *Marketplace* baik lokal maupun nasional.
- 2) Adapun untuk *core system* Bank BPD Bali memiliki layanan *i-Samsat*, *E-Ticketing* Pariwisata, *Samsat PTSP*, *Donasi Love Bali*, *E-Retribusi Pasar* dan *E-Retribusi Lainnya*, *POS PHR*. Untuk memudahkan pemantauan penerimaan pajak dan retribusi daerah, Bank BPD Bali juga menyediakan *Management Information System (MIS)* diantaranya *Dashboard Samsat*, *Dashboard PHR*, serta *Dashboard Pendapatan Daerah*. Dukungan *payment system* juga diberikan melalui *E-Samsat & Samsat VA*, *SP2D Online*, *Payment Pajak Daerah*, *Internet Banking Bendahara*, sistem *Rekonsiliasi* dan *Settlement*.
- 3) Dari sisi *channel*/pengeluaran Bank BPD Bali hadir dalam transaksi *Teller Tunai/Non Tunai*, *ATM*, *EDC Debit*, *Internet Banking Bisnis*, dan *SP2D Online*. Adapun seluruh layanan-layanan tersebut dapat diintegrasikan dengan instansi mitra yaitu *LPD/Bumdes*, *Koperasi*, *BPR*, Lembaga *Switcher*, serta *Marketplace*. Terkini Bank BPD Bali telah meluncurkan kanal pengeluaran terbaru yaitu melalui *Kartu Kredit Indonesia* berbasis *QRIS* (pertama di BPD) serta berbasis *Kartu Fisik* khusus pada segmen pemerintah daerah.
- 4) Seluruh lini layanan pemerintah daerah yang didukung oleh Bank BPD Bali pada akhirnya telah membentuk satu ekosistem elektronifikasi dan digitalisasi pembayaran daerah, yang akuntabel, transparan, terpercaya, serta meningkatkan inklusi keuangan daerah.

Dalam upaya menghadapi tantangan era digital, Bank BPD Bali mengutamakan peningkatan infrastruktur teknologi informasi (IT). Infrastruktur IT yang kuat tidak hanya mendukung operasional bisnis yang lebih efisien tetapi juga menjadi pondasi untuk memberikan layanan yang aman dan andal bagi nasabah. Dengan transformasi digital, *volume* transaksi dan data yang dikelola Bank BPD Bali akan meningkat signifikan. Peningkatan infrastruktur IT, seperti *server* berkapasitas tinggi dan penggunaan teknologi berbasis *cloud*, akan memungkinkan operasional yang lebih responsif dan skalabilitas untuk mendukung pertumbuhan bisnis.

Adapun di tengah meningkatnya ancaman siber, Bank BPD Bali terus meningkatkan sistem yang mampu melindungi data nasabah dari risiko pencurian atau penyalahgunaan. Investasi pada teknologi enkripsi, *firewall*, serta sistem deteksi dan respon ancaman siber menjadi prioritas untuk menjaga kepercayaan nasabah.

The digital transformation program of Bank BPD Bali includes the following aspects:

- 1) In terms of receipt channels, Bank BPD Bali has cash / non-cash teller services, ATMs, EDC debit, business internet banking, mobile banking / internet banking, QRIS, transfer for payment (TFP) and virtual account (VA), Laku Pandai, as well as strategic alliances and partnerships with fintech and marketplaces both local and national.
- 2) As for the core system, Bank BPD Bali has i-Samsat, Tourism E-Ticketing, Samsat PTSP, Love Bali Donation, Market E-Retribution and Other E-Retribution, POS PHR services. To facilitate the monitoring of tax and regional retribution revenue, Bank BPD Bali also provides a Management Information System (MIS) including the Samsat Dashboard, PHR Dashboard and Regional Revenue Dashboard. Payment system support is also provided through E-Samsat & Samsat VA, SP2D Online, Regional Tax Payment, Treasurer Internet Banking, Reconciliation and Settlement systems.
- 3) Regarding spending channels, Bank BPD Bali is present in Teller Cash / Non-Cash Transactions, ATM, EDC Debit, Business Internet Banking and SP2D Online. All these services can be integrated with partner agencies, namely LPD / Bumdes, cooperatives, BPR, exchange institutions, and marketplaces. Recently, Bank BPD Bali has launched the latest spending channel, namely through the QRIS-based Indonesian credit card (the first in BPD) and a special physical card-based card for the regional government segment.
- 4) All lines of regional government services supported by Bank BPD Bali have ultimately formed an ecosystem of electronic and digitized regional payments, which is accountable, transparent, trusted, and increases regional financial inclusion.

Facing the challenges of the digital age, the bank is prioritizing the improvement of its IT infrastructure. A strong IT infrastructure not only supports more efficient business operations, but is also the foundation for the delivery of secure and reliable services to customers. With digital transformation, the volume of transactions and data managed by Bank BPD Bali will increase significantly. Improvements in IT infrastructure, such as high-capacity servers and the use of cloud-based technology, will enable more responsive operations and scalability to support business growth.

In the midst of increasing cyber threats, Bank BPD Bali continues to improve the systems that can protect the data of its customers from the risk of theft or misuse. Investments in encryption technology, firewalls, and cyber threat detection and response systems are a priority in order to maintain the trust of its customers.

Pelaksanaan Transformasi Digital

Implementation of Digital Transformation

Direktur Utama Bank BPD Bali berperan penting dalam pelaksanaan transformasi digital. Dalam hal ini, Direktur Utama Bank bertanggung jawab menetapkan visi jangka panjang dan menjadikan transformasi digital sebagai prioritas strategis organisasi, dan memastikan investasi diarahkan pada solusi teknologi yang relevan, aman, dan memberikan dampak maksimal terhadap layanan Bank BPD Bali.

Direktur Utama Bank juga memastikan penerapan kerangka kerja manajemen risiko yang mencakup aspek keamanan data nasabah dan ketahanan sistem IT disamping menjadi jembatan penghubung antara bank dengan *regulator*, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan dukungan dan sinergi terhadap program digitalisasi. Terakhir, Direktur Utama Bank memantau perkembangan implementasi transformasi digital untuk memastikan target yang telah ditetapkan tercapai sesuai waktu dan anggaran.

Bank BPD Bali's President Director plays an important role in implementing digital transformation. In this case, the President Director of the Bank is responsible for setting a long-term vision and making digital transformation a strategic priority for the organization, and ensuring that investments are directed towards technology solutions that are relevant, secure, and have the maximum impact on the services of Bank BPD Bali.

The President Director of the Bank also ensures the implementation of a risk management framework that includes aspects of customer data security and IT system resilience. In addition, the President Director of the Bank acts as a bridge between the Bank and regulators, local governments, and other stakeholders to ensure support and synergy for the digitalization program. Finally, the President Director of the Bank will monitor the progress made in implementing the Digital Transformation to ensure that the goals set are achieved according to the timeline and budget that has been established.

Terobosan dan Inovasi

Breakthrough and Innovation

Inovasi dan transformasi digital juga tak henti-hentinya diperluas dalam rangka peningkatan inklusi keuangan dan pelayanan menyeluruh kepada institusi dan mitra Bank BPD Bali untuk bersinergi dan bertransformasi bersama-sama. Penggunaan platform digitalisasi untuk perluasan layanan diantaranya dengan integrasi pembayaran pada sistem informasi Rumah Sakit, UKM, maupun institusi pendidikan dari segala jenjang.

E-Retribusi juga terus dilakukan perluasan dalam rangka penatausahaan objek retribusi yang terintegrasi dari pengelolaan data, pembayaran sampai dengan pelaporan dan transaksi *cashless*, begitupun layanan E-Link yang juga tidak luput dari perluasan dalam rangka integrasi sistem informasi mitra (BPR/LPD/Koperasi) dengan sistem informasi Bank BPD Bali sehingga nasabah mitra dapat mempergunakan fasilitas jangkauan saluran/*channel* yang dimiliki Bank BPD Bali. Untuk inovasi terbaru mendukung transformasi digital, Bank juga melakukan integrasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Link dengan CMS Bank BPD Bali.

The digital innovation and transformation is also continuously expanded in order to improve the financial inclusion and comprehensive services for the institutions and partners of Bank BPD Bali to achieve synergy and transformation together. Utilizing digitization platforms to expand services includes integrating payments into the information systems of hospitals, SMEs, and educational institutions of all levels.

E-Retribution is also continuously expanded to manage integrated remittance objects from data management, payments to reporting and cashless transactions. E-Link services are also not excluded from expansion to integrate partner information systems (BPR/LPD/Cooperatives) with Bank BPD Bali information system so that partner customers can use the channel coverage facilities owned by Bank BPD Bali. As the latest innovation in support of digital transformation, the bank is also integrating the village financial system (Siskeudes) link with the Bank BPD Bali CMS.

Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah juga terus ditingkatkan melalui program Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP) yang merupakan program yang dicanangkan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi penerimaan daerah, serta mendorong efektivitas pengelolaan dana Pemda dengan tetap mengedepankan transparansi dan *good governance*. Hal ini tidak saja berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah dan perluasan akses keuangan, namun di sisi masyarakat juga meningkatkan kecepatan dan kemudahan pembayaran.

The optimization of regional revenue collection is also being further improved through the Regional Government Transaction Electronification (ETP) program, which is a program initiated by the government and Bank Indonesia to increase the efficiency and optimization of regional revenue collection, as well as to promote the effectiveness of regional government fund management, while continuing to prioritize transparency and good governance. This not only has a positive impact on economic growth in the regions and expanding financial access, but also increases the speed and ease of payment on the community side.

Adapun program digitalisasi dan elektronifikasi penerimaan daerah telah dilaksanakan oleh Bank BPD Bali dengan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota di Bali sejak tahun 2014 dengan dimulainya pengalihan PBB-P2 yang dikelola oleh Kabupaten/Kota sesuai amanat UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sejak saat itu penerapan digitalisasi dan elektronifikasi penerimaan daerah yang sejalan dengan ETP secara bertahap telah terimplementasi dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Bali melalui digitalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui E-Samsat, Pemantauan POS PHR, serta *Dashboard* Pemantauan Pajak Daerah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penerimaan pajak daerah.

The program of digitalization and electronification of regional income has been implemented by Bank BPD Bali in cooperation with the provincial/regency/city governments in Bali since 2014 with the start of the transfer of PBB-P2 managed by the regency/city in accordance with the mandate of Law No. 28 of 2009 on Regional Taxes and Regional Returns. Since then, the implementation of regional revenue digitization and electronification in accordance with ETP has been gradually implemented with the Provincial/Regency/City Governments in Bali. This has been done through the digitization of motor vehicle tax receipts through E-Samsat, POS PHR monitoring, and the Regional Tax Monitoring Dashboard to realize transparency and accountability of regional tax receipts.

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring and Evaluation

Evaluasi transformasi digital di perbankan daerah merupakan langkah penting untuk memastikan keberhasilan program serta dampaknya terhadap layanan dan operasional. Proses ini diawali dengan melakukan penilaian awal guna memahami kondisi eksisting, termasuk infrastruktur IT, proses bisnis, serta kepuasan nasabah sebelum transformasi dilakukan. Data ini menjadi baseline untuk mengukur perubahan yang terjadi. Evaluasi juga menitikberatkan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti peningkatan efisiensi operasional dan penambahan jumlah pengguna layanan digital. Dari sini, kelebihan yang perlu diperkuat dan kekurangan yang harus segera diperbaiki dapat diidentifikasi. Dalam konteks ini, perhatian khusus juga diberikan pada aspek keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi, mengingat pentingnya perlindungan data nasabah serta mitigasi risiko siber di era digital.

Evaluating digital transformation in regional banking is an important step in ensuring the success of the program and its impact on services and operations. This process begins with an initial assessment to understand existing conditions, including IT infrastructure, business processes, and customer satisfaction, before implementing transformation. This data becomes the basis to measure the change. The assessment also focuses on achieving pre-established goals, such as improving operational efficiency and increasing the number of digital service users. From here, it is possible to identify the strengths that need to be strengthened and the weaknesses that need to be addressed immediately. Special attention is given to security and regulatory compliance, given the importance of protecting customer data and mitigating cyber risks in the digital age.

Hasil dan Dampak terhadap Kinerja Bisnis

Results and Impact on Business Performance

Transformasi digital yang telah dilakukan oleh Bank BPD Bali berdampak signifikan dalam mendorong perbaikan berkelanjutan di berbagai aspek operasional, layanan, dan manajemen. Berikut ini adalah beberapa dampak utama dari Transformasi Digital yang telah dilakukan Bank:

1. Peningkatan Efisiensi Operasional
 - Otomatisasi Proses: Integrasi layanan seperti E-Retribusi, E-Link, dan CMS mengurangi ketergantungan pada proses manual, sehingga mempercepat waktu penyelesaian dan menurunkan risiko kesalahan.
 - Pengelolaan Data yang Terintegrasi: Digitalisasi seperti integrasi Siskeudes dengan CMS memungkinkan pengelolaan data yang lebih akurat dan mudah diakses untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
2. Perbaikan Kualitas Layanan
 - Kemudahan dan Kecepatan Layanan: Penggunaan teknologi digital memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja, menciptakan pengalaman layanan yang lebih baik.

Bank BPD Bali's digital transformation has significantly impacted the continuous improvement of various aspects of operations, services, and management. Below are some of the key impacts of digital transformation implemented by the Bank:

1. *Increased operational efficiency*
 - *Process automation: The integration of services such as E-Retribution, E-Link, and CMS reduces the reliance on manual processes, thereby accelerating turnaround time and reducing the risk of errors.*
 - *Integrated data management: Digitization, such as the integration of Siskeudes with CMS, enables more accurate and accessible data management to support data-driven decision making.*
2. *Service Quality Improvement*
 - *Ease and speed of service: The use of digital technology makes it easier for customers to conduct transactions anytime, anywhere, creating a better service experience.*

- Inovasi Berbasis Kebutuhan Nasabah: Transformasi digital memungkinkan bank untuk lebih responsif terhadap kebutuhan nasabah dengan menghadirkan produk dan layanan yang relevan, seperti pembayaran elektronik untuk sektor rumah sakit, UKM, dan pendidikan.

3. Peningkatan *Customer Experience*

- Dengan adanya pembaruan pada infrastruktur IT dan layanan berbasis digital, nasabah juga merasakan kemudahan dalam melakukan transaksi lintas platform dan integrasi dengan berbagai layanan lain seperti *E-Banking*, *E-Wallet* (Balipay) dan sistem pembayaran elektronik lainnya. Hal ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan, tetapi juga membuat proses transaksi lebih cepat, efisien, dan bebas hambatan.
- Transformasi digital yang dilakukan oleh Bank BPD Bali tidak hanya memodernisasi proses internal, tetapi juga memberikan *experience* yang lebih baik dan lebih aman bagi nasabah, mendorong loyalitas, serta memperkuat engagement antara Bank dan nasabah.

4. Transparansi dan Akuntabilitas

- Pemantauan *Real-Time*: Implementasi dashboard pajak daerah dan digitalisasi penerimaan pajak mempermudah pemantauan, sehingga meningkatkan akuntabilitas bagi pemerintah daerah.
- *Good Governance*: Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETP) mendukung tata kelola keuangan yang lebih transparan, menciptakan kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat dan pemangku kepentingan.

5. Mendorong Inovasi Berkelanjutan

- Pengembangan Produk dan Layanan Baru: Sistem seperti E-Samsat dan POS PHR menunjukkan bahwa transformasi digital memicu bank untuk terus menghadirkan inovasi yang menjawab kebutuhan lokal.
- Peluang Kolaborasi dengan Mitra: Integrasi dengan BPR, LPD, koperasi, dan institusi lainnya membuka ruang untuk inovasi kolaboratif yang dapat memperluas jangkauan layanan.

6. Penguatan Inklusi dan Literasi Keuangan

- Akses yang Lebih Luas: Digitalisasi memungkinkan masyarakat, termasuk yang di daerah terpencil melalui layanan Agen Mailaku, untuk mendapatkan akses terhadap layanan keuangan, mendukung pertumbuhan inklusi keuangan.
- Peningkatan Literasi Keuangan: Transformasi digital turut meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penggunaan layanan perbankan digital dan manfaatnya.

7. Meningkatkan Daya Saing

- Dengan transformasi digital yang terus berkembang, Bank BPD Bali dapat bersaing lebih baik di era modern, baik dengan bank nasional maupun fintech yang menawarkan layanan serupa.

- *Innovation based on customer needs: Digital transformation enables banks to be more responsive to customer needs by presenting relevant products and services, such as electronic payments for the hospital, SME and education sectors.*

3. *Enhanced Customer Experience*

- *With upgraded IT infrastructure and digital-based services, customers also feel the ease of conducting cross-platform transactions and integrating with various other services such as e-banking, e-wallet (Balipay) and other electronic payment systems. This not only increases convenience, but also makes the transaction process faster, more efficient and hassle-free.*
- *Bank BPD Bali's digital transformation not only modernizes internal processes, but also provides a better and safer experience for customers, builds loyalty, and strengthens engagement between the bank and its customers.*

4. *Transparency and Accountability*

- *Real-time monitoring: Implementation of local tax dashboard and digitization of tax revenue facilitates monitoring, thereby increasing the accountability of local governments.*
- *Good governance: Electronification of Local Government Transactions (ETP) supports more transparent financial management, creating greater trust among the public and stakeholders.*

5. *Fostering Sustainable Innovation*

- *Develop new products and services: Systems such as E-Samsat and POS PHR demonstrate that digital transformation is a catalyst for banks to continue to present innovations that meet local needs.*
- *Ability to collaborate with partners: There is room for collaborative innovation that can expand the reach of services through integration with BPR, LPD, cooperatives, and other institutions.*

6. *Strengthening Financial Inclusion and Literacy*

- *Broader access: Digitization enables people to access financial services, including in remote areas through Mailaku agent services, supporting the growth of financial inclusion.*
- *Increased financial literacy: The digital transformation is also increasing the awareness of the public on the use of digital banking services and their benefits.*

7. *Enhancing competitiveness.*

- *With the ever-growing digital transformation, Bank BPD Bali can better compete in the modern era, both with national banks and fintech offering similar services.*

Transformasi Aplikasi *Mobile Banking* *Mobile Banking Application Transformation*

Perkembangan Aplikasi *Mobile Banking*

Bank BPD Bali telah meluncurkan aplikasi *mobile banking* yang diberi nama Bank BPD Bali *Mobile* pada 1 Juli 2015. Melalui aplikasi digital Bank ini, nasabah diberikan kemudahan untuk mengakses informasi dan layanan perbankan dalam satu genggam. Perkembangan transformasi layanan perbankan digital Bank BPD Bali hingga 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Mobile Banking Application

Bank BPD Bali launched its *mobile banking* application, Bank BPD Bali *Mobile*, on July 1, 2015. This digital banking app offers customers the convenience of accessing banking information and services from the palm of their hand. The development of Bank BPD Bali's digital banking service transformation is planned through December 31, 2024, and will proceed as follows

2015	Aplikasi Bank BPD Bali <i>Mobile</i> diluncurkan pada 1 Juli 2015 <i>Bank BPD Bali Mobile application has been launched on July 1, 2015.</i>
	Adapun fitur-fitur yang disediakan pada aplikasi Bank BPD Bali <i>Mobile</i> adalah sebagai berikut: <i>Bank BPD Bali Mobile application has the following features</i>
	<i>Log in & register:</i> a. Login; b. Tips aman bertransaksi; c. <i>Soft token internet banking</i> <i>Login & Registration: a. Login; b. Secure transaction tips; c. Soft token internet banking</i>
	Main Menu: a. <i>Home</i> ; b. Info; c. <i>Admin</i> ; d. Keluar <i>Main Menu: a. Home; b. Info; c. Admin; d. Exit</i>
	<i>Home: Portfolio Rekening</i> 1) Tabungan: informasi saldo, mutasi rekening, transfer dana, transfer by QR, transaksi QRIS, pembelian, pembayaran, <i>history</i> transaksi. 2) Kredit: portfolio rekening kredit, mutase rekening, dan informasi pinjaman
	<i>Home: Account Portfolio</i> 1) <i>Savings: balance information, account mutations, transfers, QR transfers, QRIS transactions, purchases, payments, transaction history.</i> 2) <i>Loans: loan account portfolio, account mutations and loan information</i>
	Info: lokasi ATM, Lokasi BPD Bali, inbox, dan histori kode Tarik/setor <i>Info: ATM locations, BPD Bali locations, inbox and withdrawal/deposit history</i>
	Admin: ubah password, ubah mobile PIN, ubah email, buat kode billing pajak, histori kode billing, informasi tagihan e-samsat Bali, blokir/buka blokir <i>Admin: change password, change mobile PIN, change email, create tax billing codes, billing code history, Bali e-samsat billing information, block/unblock</i>
	Keluar <i>Exit</i>

Selanjutnya, Bank BPD Bali melakukan inovasi Bank BPD Bali *Mobile* tersebut setiap tahun yang dapat diringkas sebagai berikut

In addition, Bank BPD Bali carries out the Bank BPD Bali *Mobile* innovation every year. This innovation can be summarized as follows.

Tahun Year	Inovasi Bank BPD Bali <i>Mobile App</i> <i>Bank BPD Bali Mobile App Innovation</i>
2021	a. Beragam pembayaran & pembelian listrik kepada PLN b. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan c. Beragam pembayaran untuk telepon d. Beragam pembayaran pasca bayar untuk sejumlah <i>operator</i> seluler e. Beragam pembayaran untuk <i>pre-paid</i> untuk sejumlah <i>operator</i> seluler f. Beragam pembayaran untuk pendidikan di sejumlah institusi pendidikan g. Pembayaran Samsat, BPHTB h. Pembayaran PDAM i. Pembayaran beragam e-tiket j. Pembayaran untuk sejumlah RS di provinsi bali k. Pembayaran tiket sejumlah tempat wisata l. Top up sejumlah dompet digital



Tahun Year	Inovasi Bank BPD Bali <i>Mobile App</i> <i>Bank BPD Bali Mobile App Innovation</i>
2021	a. Various payments & purchases of electricity in PLN b. Payment of real estate tax c. Various telephone payments d. Various mobile operator postpaid payments e. Various payments for prepaid for a number of mobile operators f. Various education payments for multiple educational institutions g. Payment from Samsat, BPHTB h. Payment of PDAM i. Payment of various e-tickets j. Payment for various hospitals in Balikpapan Province k. Payment of tickets for various tourist attractions l. Top up a number of digital wallets
2022	a. Payment crossborders Malaysia b. Perluasan pasar pembayaran BPHTB untuk sejumlah wilayah baru di Provinsi Bali c. Perluasan pasar pembayaran PDAM untuk sejumlah wilayah baru di Provinsi Bali d. Perluasan pembayaran biaya sekolah untuk sejumlah sekolah dan perguruan tinggi baru di Provinsi Bali e. Perluasan pembayaran pajak hotel, parkir, dan restoran f. Pembayaran tiket sejumlah maskapai penerbangan g. Pembayaran pajak reklame, perizinan h. Perluasan pasar pembayaran e-tiket i. Pembelian sejumlah paket telkomsel j. Perluasan pasar untuk pembayaran sejumlah tiket untuk tempat wisata di Provinsi Bali a. Malaysia Crossborder Payment b. Expand BPHTB payment market to a number of new areas in Bali Province c. Expand PDAM payment market to a number of new areas in Bali Province d. Expanded school fee payments to a number of new schools and universities in Bali Province e. Expansion of hotel, parking and restaurant tax payments f. Airfare payments g. Payment of advertising tax, licensing h. Expansion of e-ticket payment market i. Purchase of multiple Telkomsel packages j. Expand the market for payment of a number of tickets for tourist attractions in Bali Province.
2023	a. Payment crossborders Singapura b. Perluasan pasar pembayaran e-tiket untuk sejumlah tempat wisata c. Pembayaran biaya sekolah secara online untuk sejumlah sekolah di provinsi Bali d. KKI QRIS a. Cross-border payment Singapore b. Expanding the e-ticket payment market for a range of tourist attractions c. Online payment of school fees for a number of schools in Bali province d. KKI QRIS
2024	a. Telkomsel Omni channel b. KKI Online Payment QRIS c. Opsen PKB dan BNNKB d. Pembayaran kontribusi wisatawan asing e. Pembayaran tiket TGIF f. Pembayaran sejumlah retribusi a. Telkomsel Omni Channel b. KKI Online Payment QRIS c. Opsen PKB and BNNKB d. Payment of foreign tourist tax e. Payment of TGIF tickets f. Payment of a variety of levies

Didukung oleh inovasi layanan perbankan digital tersebut, Bank BPD Bali berhasil mencatatkan kenaikan jumlah pengguna aplikasi Bank BPD Bali *Mobile* yang mencapai 287.065 pengguna pada tahun 2024 dengan pertumbuhan sebesar 23,04% *yoy*.

Sejalan dengan kenaikan jumlah pengguna Bank BPD Bali *Mobile* tersebut, Bank BPD Bali membukukan peningkatan nilai transaksi melalui aplikasi Bank BPD Bali *Mobile* sebesar 40,74% *yoy* menjadi Rp2,23 triliun. Capaian ini didukung oleh pertumbuhan jumlah transaksi sebesar 29,46% *yoy* menjadi 1,67 juta transaksi selama tahun 2024.

Thanks to the advancements in digital banking services, Bank BPD Bali has achieved a remarkable increase in the usage of its mobile application, reaching a total of 287,065 users in 2024 an impressive yoy growth of 23.04%.

In tandem with the rise in mobile users, the bank also saw a significant boost in transaction value through the Bank BPD Bali Mobile application, which surged by 40.74% year over year, amounting to Rp2.23 trillion. This outstanding performance was further underscored by a 29.46% yoy increase in the number of transactions, totaling 1.67 million in 2024.

Layanan Perbankan Digital Digital Banking Services						
	2024	2023	2022	2021	2020	
Jumlah Pengguna BPD Bali <i>Mobile App</i>	287.065	233.311	192.692	147.926	109.790	Number of BPD Bali Mobile App users
Nilai Transaksi (RpJuta)	2.225.896	1.581.602	1.222.626	760.576	514.697	Transaction value (Rp million)
Jumlah Transaksi	1.671.810	1.291.409	1.034.517	734.171	514.452	Number of transactions



WILAYAH OPERASIONAL

Operational Areas

Bank BPD Bali fokus menyediakan beragam produk dan layanan perbankan untuk wilayah Pulau Bali dan Nusa Tenggara dengan didukung jaringan operasional sebagai berikut:

Bank BPD Bali focuses on offering diversified banking products and services to the Bali and Nusa Tenggara regions supported by the following operational networks:

	2024	2023	2022	2021	2020	
Kantor Pusat	1	1	1	1	1	Main Office
Kantor Cabang Utama	1	1	1	1	1	Main Branch Office
Kantor Cabang	13	13	13	13	13	Branch Office
Kantor Cabang Pembantu	88	88	88	89	89	Sub Branch Office
Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	215	212	207	206	200	Automated Teller Machines
ATM Setor Tarik Tunai (CRM)	26	26	25	24	12	Cash Recycling Machines
Sistem Pembayaran Elektronik (EDC)	103	153	183	173	123	Electronic Data Captures
Kegiatan/Aktivitas Lainnya	57	59	59	59	55	Other Events/ Activities



Adapun daftar alamat jaringan kantor operasional Bank BPD Bali disajikan di bagian akhir dari bab Profil Perusahaan ini.

Bank BPD Bali's operational office network addresses are presented at the end of this Company Profile chapter.

KEANGGOTAAN DALAM ASOSIASI

Association Membership

Bank BPD Bali telah bergabung dalam beberapa asosiasi profesional dan organisasi lainnya untuk menjalin komunikasi yang lebih luas dengan para pemangku kepentingan dan memperluas jaringan bisnis. Keanggotaan Bank BPD Bali dalam organisasi/asosiasi per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Bank BPD Bali is actively engaging with various professional associations and organizations to strengthen communication with stakeholders and broaden its business network. As of December 31, 2024, Bank BPD Bali holds membership in the following organizations and associations:

No.	Nama Asosiasi/Perhimpunan Name of Association/Society	Posisi di Asosiasi/Organisasi Position in Association/Organization
1	Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) National Bank Association	Anggota Member
2	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) Association of Regional Development Banks (ASBANDA)	Anggota Member
3	Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan (FKLJK) Financial Services Institution Communication Forum (FKLJK)	Ketua Chairperson
4	Forum Komunikasi Dewan Komisaris (FKDK) Board of Commissioners Communication Forum (FKDK)	Anggota Member
5	Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) Indonesian Payment System Association (ASPI)	Anggota Member
6	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSI) Indonesian Alternative Banking Dispute Resolution Institution (LAPSI)	Anggota Member
7	Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Regional Banking Consultative Body (BMPD)	Anggota Member

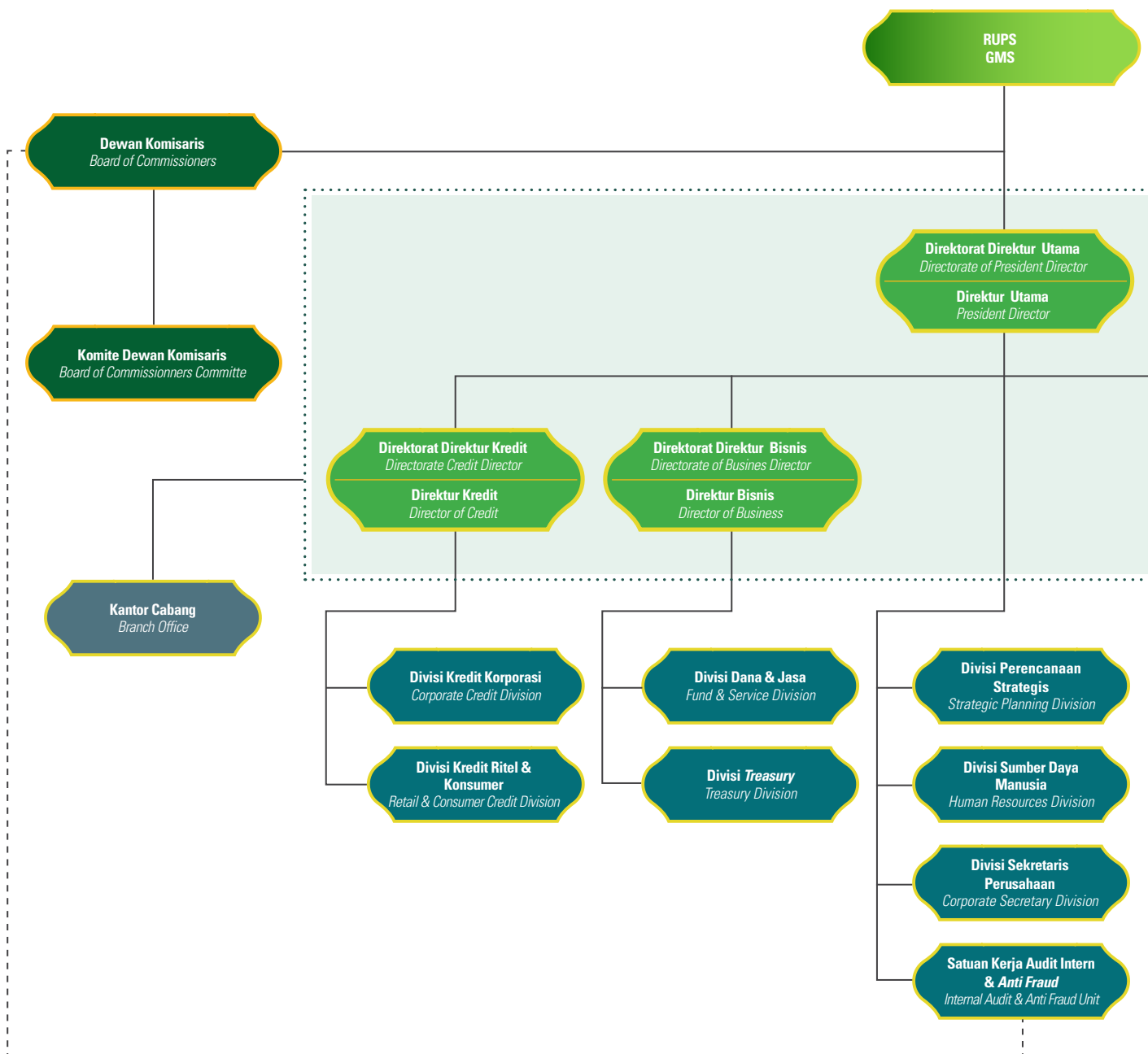


STRUKTUR ORGANISASI

Organizational Structure

Bank BPD Bali menyadari pentingnya penetapan struktur organisasi untuk merespon dinamika yang terjadi di industri perbankan dan dalam rangka meningkatkan kualitas proses bisnis internal untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Struktur organisasi yang berlaku hingga 31 Desember 2024 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 0424/KEP/DIR/RENSTRA/2024 tanggal 13 Agustus 2024 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi Bank

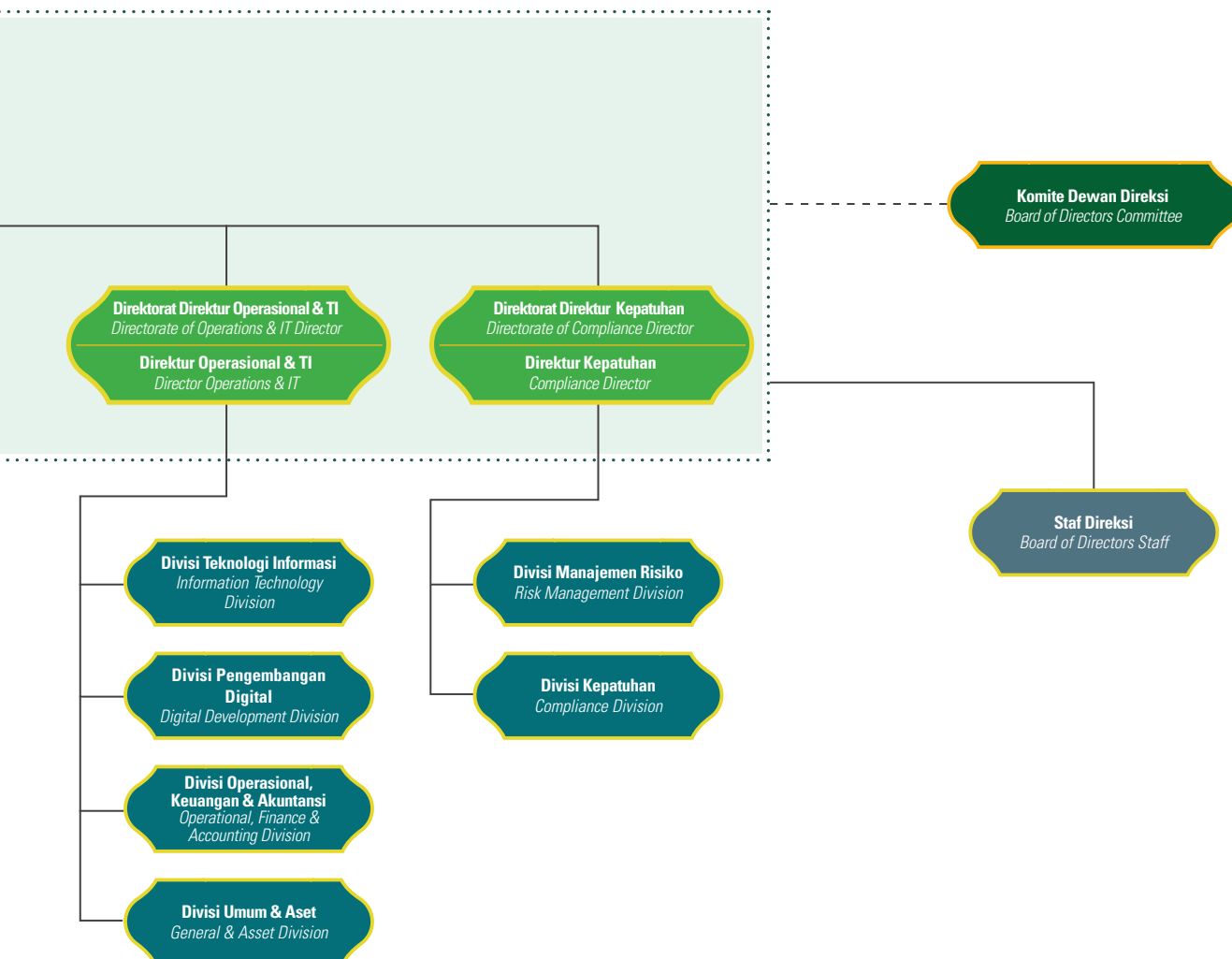


Garis Supervisi —————

Garis Koordinasi

Bank BPD Bali recognizes the importance of establishing an effective organizational structure to adapt to the dynamics of the banking industry and enhance the quality of internal business processes, ultimately achieving sustainable business growth. The organizational structure, which will remain in effect until December 31, 2024, is defined by the Decree of the Board of Directors No. 0424/KEP/DIR/RENSTRA/2024 dated 13 August 2024 concerning the Company Guidelines for Organizational Structure and is outlined as follows:

The Bank's organizational structure





PROFIL DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners' Profile

Susunan Dewan Komisaris Bank BPD Bali terakhir kali ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Sirkuler tanggal 12 Mei 2023. Selanjutnya susunan Dewan Komisaris tersebut tidak mengalami perubahan hingga periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Adapun susunan dan profil dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Bank BPD Bali adalah sebagai berikut:

The composition of the Board of Commissioners of Bank BPD Bali was last established based on the Resolution of the Circular Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) held on May 12, 2023. There have been no changes to the Board of Commissioners' composition until the period ending December 31, 2024. Below are the details and profiles of each member of the Board of Commissioners of Bank BPD Bali:

DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS

per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
as of December 31, 2024 and December 31, 2023

Komisaris Utama President Commissioner	I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.
Komisaris Independen Independent Commissioner	Insinyur Gede Arimbawa
Komisaris Independen Independent Commissioner	I Nyoman Suparsa Widana, S.E., M.M.
Komisaris Non Independen Non-Independent Commissioner	Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.
Komisaris Non Independen Non-Independent Commissioner	I Gede Darmawa, S.E., M.Si.

I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.**Komisaris Utama Independen** | *Independent President Commissioner*

Periode Jabatan <i>Term of Office</i>	Pertama (22 November 2023 - RUPS 2027) <i>First (November 22, 2023 – GMS 2027)</i>
Usia <i>Age</i>	58 tahun pada akhir tahun buku 2024 <i>58 years at the end of the 2024 financial year</i>
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia <i>Indonesia</i>
Domisili <i>Domicile</i>	Badung, Bali <i>Badung, Bali</i>
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Keputusan RUPS Luar Biasa Sirkuler pada 22 November 2023 yang dikuatkan dalam Akta No. 38 tanggal 22 November 2023 <i>Circular EGMS resolution on November 22, 2023, confirmed by Deed Number 38 on November 22, 2023.</i>
Pendidikan <i>Education</i>	Sarjana Hukum Keperdataan Universitas Ngurah Rai <i>Bachelor of Civil Law Ngurah Rai University</i>
Sertifikasi <i>Certification</i>	Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat III <i>Risk Management Level III Certification</i>
Pengalaman Kerja <i>Professional Experience</i>	• Kepala Cabang Bank BPD Bali Kantor Cabang Mangupura (2018-2021) • Kepala Cabang Bank BPD Bali Kantor Cabang Negara (2015-2018) • Kepala Bagian Kepatuhan Divisi Kepatuhan Bank BPD Kantor Pusat (2008-2015) • Kepala Bidang Administrasi Kredit Bank BPD Bali Cabang Utama Denpasar (2004-2008) • Kepala Seksi Pemasaran Bank BPD Bali Cabang Pembantu Ngurah Rai (2004) • Pelaksana Bank BPD Bali Cabang Utama Denpasar (1995-2003) • Pelaksana Bank BPD Bali Cabang Kuta (1993-1995) • Head of Bank BPD Bali Bank Branch Office in Mangupura (2018-2021) • Head of Bank BPD Bali Bank Branch Office in Negara (2015-2018) • Head of Compliance Division at BPD Bank Head Office (2008-2015) • Head of Credit Administration Division at Bank BPD Bali Bank Main Branch in Denpasar (2004-2008) • Head of Marketing Section at Bank BPD Bali Bank Sub-Branch in Ngurah Rai (2004) • Executive at Bank BPD Bali Bank Main Branch in Denpasar (1995-2003) • Executive at Bank BPD Bali Bank Kuta Branch (1993-1995)
Rangkap Jabatan <i>Concurrent Position</i>	Tidak memiliki rangkap jabatan per 31 Desember 2024 <i>Did not hold concurrent positions as of December 31, 2024</i>
Hubungan Afiliasi <i>Affiliate Relationship</i>	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham. <i>Does not have affiliations with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or shareholders.</i>

**Insinyur Gede Arimbawa****Komisaris Independen** | *Independent Commissioner*

Periode Jabatan <i>Term of Office</i>	Pertama (12 Mei 2023 - RUPS 2027) <i>First (May 12, 2023 – GMS 2027)</i>
Usia <i>Age</i>	60 tahun pada akhir tahun buku 2024 <i>60 years at the end of the 2024 financial year</i>
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia <i>Indonesia</i>
Domisili <i>Domicile</i>	Denpasar, Bali <i>Denpasar, Bali</i>
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Keputusan RUPSLB Sirkuler pada 12 Mei 2023 yang dikukuhkan dalam Akta Nomor 25 tanggal 12 Mei 2023 <i>Circular EGMS resolution May 12, 2023 confirmed by Deed Number 25 on May 12, 2023.</i>
Pendidikan <i>Education</i>	Insinyur Peternakan Universitas Udayana <i>Udayana University - Animal Husbandry Engineering Program</i>
Sertifikasi <i>Certification</i>	Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 7 <i>Risk Management Level 7 Certification</i>
Pengalaman Kerja <i>Professional Experience</i>	• Direktur PT Bali Dana Sejahtera (2019-2021) • Kepala Divisi Kepatuhan Bank BPD Bali Kantor Pusat (2018-2019) • Kepala Cabang Bank BPD Bali Kantor Cabang Renon (2016-2018) • Kepala Bagian Pengadaan Divisi Administrasi Umum Bank BPD Bali Kantor Pusat (2014-2015) • Kepala Bagian Pengendalian Risiko Divisi Manajemen Risiko Bank BPD Bali Kantor Pusat (2013-2014) • Kepala Cabang Bank BPD Bali Kantor Cabang Singaraja (2012-2013) • Kepala Cabang Bank BPD Bali Kantor Cabang Gianyar (2010-2012) • Kepala Bagian Operasional Kredit Divisi Kredit Bank BPD Bali Kantor Pusat (2003-2005) • Kepala Bidang Pemasaran Kredit Bank BPD Bali Kantor Cabang Kuta (2002-2003) • Kepala Seksi Administrasi Kredit Bank BPD Bali Cabang Negara (2001-2002) • Kepala Seksi Pemasaran Bank BPD Bali Cabang Bangli (1999-2001) • Analis Kredit Bank BPD Bali Cabang Singaraja (1995-1996) • Teller Bank BPD Bali Cabang Singaraja (1995-1996) • Pelaksana Bank BPD Bali Cabang Singaraja (1995) • <i>Director of PT Bali Dana Sejahtera (2019-2021)</i> • <i>Head of Compliance Division, Bank BPD Bali Head Office (2018-2019)</i> • <i>Head of Branch Office, Bank BPD Bali Renon Branch (2016-2018)</i> • <i>Head of Procurement Section, General Administration Division, Bank BPD Bali Head Office (2014-2015)</i> • <i>Head of Risk Control Section, Risk Management Division, Bank BPD Bali Head Office (2013-2014)</i> • <i>Head of Branch Office, Bank BPD Bali Singaraja Branch (2012-2013)</i> • <i>Head of Branch Office, Bank BPD Bali Gianyar Branch (2010-2012)</i> • <i>Head of Credit Operations Section, Credit Division, Bank BPD Bali Head Office (2003-2005)</i> • <i>Head of Credit Marketing Division, Bank BPD Bali Kuta Branch (2002-2003)</i> • <i>Head of Credit Administration Section, Bank BPD Bali Negara Branch (2001-2002)</i> • <i>Head of Marketing Section, Bank BPD Bali Bangli Branch (1999-2001)</i> • <i>Credit Analyst, Bank BPD Bali Singaraja Branch (1995-1996)</i> • <i>Teller, Bank BPD Bali Singaraja Branch (1995-1996)</i> • <i>Executive, Bank BPD Bali Singaraja Branch (1995)</i>
Rangkap Jabatan <i>Concurrent Position</i>	Tidak memiliki rangkap jabatan per 31 Desember 2024 <i>Did not hold concurrent positions as of December 31, 2024</i>
Hubungan Afiliasi <i>Affiliate Relationship</i>	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham. <i>Does not have affiliations with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or shareholders.</i>



I Nyoman Suparsa Widana, S.E., M.M.

Komisaris Independen | Independent Commissioner

Periode Jabatan <i>Term of Office</i>	Pertama (12 Mei 2023 - RUPS 2027) <i>First (May 12, 2023 – GMS 2027)</i>
Usia <i>Age</i>	55 tahun pada akhir tahun buku 2024 <i>55 years at the end of the 2024 financial year</i>
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia <i>Indonesia</i>
Domisili <i>Domicile</i>	Gianyar, Bali <i>Gianyar, Bali</i>
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Keputusan RUPSLB Sirkuler pada 12 Mei 2023 yang dikuatkan dalam Akta Nomor 25 tanggal 12 Mei 2023 <i>Circular EGMS resolution May 12, 2023 confirmed by Deed Number 25 on May 12, 2023</i>
Pendidikan <i>Education</i>	• Sarjana Ekonomi Akuntansi, Universitas Pendidikan Nasional (1992) • Magister Manajemen STIE IPWI Jakarta (1998) • Bachelor of Economics in Accounting, National Education University (1992) • Master of Management STIE IPWI Jakarta (1998)
Sertifikasi <i>Certification</i>	Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 6 <i>Risk Management Level 6 Certification</i>
Pengalaman Kerja <i>Professional Experience</i>	• Direktur Utama PT BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda) d/h PD BPR Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar (2006-2023) • Direktur PD BPR Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar (2005-2006) • Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Hindu Indonesia (2004-2005) • President Director of PT BPR Bank Daerah Gianyar (Perseroda), formerly PD BPR Werdhi Sedana, Gianyar Regency (2006-2023) • Director of PD BPR Werdhi Sedana, Gianyar Regency (2005-2006) • Assistant Dean for Academic Affairs at the Faculty of Economics, Hindu University of Indonesia (2004-2005)
Rangkap Jabatan <i>Concurrent Position</i>	Tidak memiliki rangkap jabatan per 31 Desember 2024 <i>Did not hold concurrent positions as of December 31, 2024.</i>
Hubungan Afiliasi <i>Affiliate Relationship</i>	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham. <i>Does not have affiliations with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or shareholders.</i>

**Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.****Komisaris Non Independen | Non Independent Commissioner**

Periode Jabatan <i>Term of Office</i>	Pertama (12 Mei 2023 - RUPS 2027) <i>First (May 12, 2023 – GMS 2027)</i>
Usia <i>Age</i>	68 tahun pada akhir tahun buku 2024 <i>68 years at the end of the 2024 financial year</i>
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia <i>Indonesia</i>
Domisili <i>Domicile</i>	Badung, Bali <i>Badung, Bali</i>
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Keputusan RUPSLB Sirkuler pada 12 Mei 2023 yang dikuatkan dalam Akta Nomor 25 tanggal 12 Mei 2023 <i>Circular EGMS resolution May 12, 2023 confirmed by Deed Number 25 on May 12, 2023</i>
Pendidikan <i>Education</i>	• Sarjana Hukum Universitas Udayana (1981) • Magister Hukum Universitas Udayana (2004) • Bachelor of Laws, Udayana University (1981) • Master of Laws, Udayana University (2004)
Sertifikasi <i>Certification</i>	Sertifikasi Mangement Risiko Tingkat 6 <i>Risk Management Level 6 Certification</i>
Pengalaman Kerja <i>Professional Experience</i>	• Inspektur Kabupaten Badung (2009-2014) • Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten Badung (2008-2009) • Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung (2004-2008) • Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Badung (2001-2004) • Kepala Dinas Kebersihan Pemda Tk. II Badung (1998-2001) • Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Pemda Tk. II Badung (1994-1998) • Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Pemda Tk. II Badung (1989-1994) • Kepala Bagian Urusan Generasi Muda dan Olahraga Pada Biro Mental Spiritual Pemda Tk. I Bali (1989-1993) • Kepala Bagian Pengembangan Pegawai Pada Biro Kepegawaian Pemda Tk. I Bali (1988-1989) • Kepala Bagian Kesra Pada Setwilda Pemda Tk. II Karangasem (1985-1988) • Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemda Tk. II Karangasem (1984-1985) • Inspector of Badung Regency (2009-2014) • Assistant for Government and Public Welfare, Badung Regency Government (2008-2009) • Head of the Manpower Office, Badung Regency Government (2004-2008) • Head of the National Unity and Community Protection Agency, Badung Regency Government (2001-2004) • Head of the Sanitation Office, Badung Regency Level II (1998-2001) • Head of the Village Community Development Office, Badung Regency Level II (1994-1998) • Head of the Village Development Office, Badung Regency Level II (1989-1994) • Head of the Youth and Sports Affairs Section, Mental Spiritual Bureau, Bali Regency Level I (1989-1993) • Head of the Employee Development Section, Personnel Bureau, Bali Regency Level I (1988-1989) • Head of the Social Welfare Section, Setwilda of Karangasem Regency Level II (1985-1988) • Head of the Public Relations Section, Karangasem Regency Level II (1984-1985)
Rangkap Jabatan <i>Concurrent Position</i>	Tidak memiliki rangkap jabatan per 31 Desember 2024 <i>Did not hold concurrent positions as of December 31, 2024.</i>
Hubungan Afiliasi <i>Affiliate Relationship</i>	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham. <i>Does not have affiliations with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or shareholders.</i>





I Gede Darmawa, S.E., M.Si.

Komisaris Non Independent | Non Independent Commissioner

Periode Jabatan <i>Term of Office</i>	Pertama (12 Mei 2023 - RUPS 2027) <i>First (May 12, 2023 – GMS 2027)</i>
Usia <i>Age</i>	63 tahun pada akhir tahun buku 2024 <i>63 years at the end of the 2024 financial year</i>
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia <i>Indonesia</i>
Domisili <i>Domicile</i>	Denpasar, Bali <i>Denpasar, Bali</i>
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Keputusan RUPSLB Sirkuler pada 12 Mei 2023 yang dikuatkan dalam Akta Nomor 25 tanggal 12 Mei 2023 <i>Circular EGMS resolution May 12, 2023 confirmed by Deed Number 25 on May 12, 2023</i>
Pendidikan <i>Education</i>	• Sarjana Manajemen Keuangan Universitas Pendidikan Nasional (1990) • Pasca Sarjana Akuntansi Pemerintahan/Pengawasan Keuangan Negara (2010) • Bachelor of Financial Management, National Education University (1990) • Postgraduate in Government Accounting/State Financial Supervision (2010)
Sertifikasi <i>Certification</i>	Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 6 <i>Risk Management Level 6 Certification</i>
Pengalaman Kerja <i>Professional Experience</i>	• Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali (2020-2021) • Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem (2019-2020) • Kepala Biro Umum Setda Provinsi Bali (2016-2020) • Kepala Biro Umum Setda, pada Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali (2015-2016) • Sekretaris Dispenda Provinsi Bali (2012-2015) • Kepala UPTD Dispenda Provinsi Bali, di Kabupaten Karangasem (2012) • Kepala UPTD Dispenda Provinsi Bali di Kabupaten Bangli (2010-2012) • Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Provinsi Bali (2008-2010) • Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas Badan Pengawasan Daerah, Provinsi Bali (2006-2008) • Staf Badan Pengawasan Daerah Provinsi Bali (1997-2006) • Head of the Bali Province Human Resources Development Agency (2020-2021) • Acting Regional Secretary of Karangasem Regency (2019-2020) • Head of the General Bureau of the Bali Provincial Secretariat (2016-2020) • Head of the General and Protocol Bureau of the Bali Provincial Secretariat (2015-2016) • Secretary of the Bali Provincial Revenue Service (2012-2015) • Head of the Bali Provincial Revenue Service UPTD in Karangasem Regency (2012) • Head of the Bali Provincial Revenue Service UPTD in Bangli Regency (2010-2012) • Head of the Program, Evaluation, and Reporting Sub-Division of the Bali Provincial Inspectorate (2008-2010) • Head of the Legal and Public Relations Sub-Division of the Regional Supervisory Agency of Bali Province (2006-2008) • Staff Member of the Bali Provincial Revenue Service (1997-2006)
Rangkap Jabatan <i>Concurrent Position</i>	Tidak memiliki rangkap jabatan per 31 Desember 2024 <i>Did not hold concurrent positions as of December 31, 2024.</i>
Hubungan Afiliasi <i>Affiliate Relationship</i>	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham. <i>Does not have affiliations with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or shareholders.</i>



PROFIL DIREKSI

Board of Directors' Profile

Susunan Direksi Bank BPD Bali terakhir kali ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 22 Februari 2023. Selanjutnya susunan Direksi tersebut tidak mengalami perubahan hingga periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Adapun susunan dan profil dari masing-masing anggota Direksi Bank BPD Bali adalah sebagai berikut:

The composition of the Board of Commissioners of Bank BPD Bali was last established based on the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) held on February 22, 2023. There have been no changes to the Board of Directors' composition until the period ending December 31, 2024. Below are the details and profiles of each member of the Board of Directors of Bank BPD Bali:

DIREKSI BOARD OF DIRECTORS	
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 as of December 31, 2024 and December 31, 2023	
Direktur Utama President Director	I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.
Direktur Operasional & TI Director of Operational & TI	Ida Bagus Gede Setia Yasa
Direktur Bisnis Director of Business Non Loan	I Nyoman Sumanaya, S.E., M.M.
Direktur Kredit Director of Loan	Made Lestara Widiatmika
Direktur Kepatuhan Director of Compliance	Drs. I Wayan Sutela Negara



I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.

Direktur Utama | President Director

Periode Jabatan <i>Term of Office</i>	Pertama (14 Februari 2019 – 14 Februari 2024) Kedua (14 Februari 2024 - 14 Februari 2029) <i>First (February 14, 2019 – February 14, 2024) Second (February 14, 2024 – February 14, 2029)</i>
Usia <i>Age</i>	52 tahun pada akhir tahun buku 2024 <i>52 years at the end of the 2024 financial year</i>
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia <i>Indonesia</i>
Domisili <i>Domicile</i>	Badung, Bali <i>Badung, Bali</i>
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	- Keputusan RUPST pada 14 Februari 2019 yang dikuatkan dalam Akta Nomor 28 tanggal 14 Februari 2019 - Keputusan RUPST pada 22 Februari 2023 yang dikuatkan dalam Akta Nomor 47 tanggal 22 Februari 2023 - AGMS resolution Februari 14, 2019, confirmed by Deed Number 28 on February 14, 2019 - AGMS resolution February 22, 2023, confirmed by Deed Number 47 on February 22, 2023
Pendidikan <i>Education</i>	- Sarjana Hukum Universitas Udayana (1996) - Magister Hukum Universitas Udayana (2000) - Bachelor of Laws, Udayana University (1996) - Master of Laws, Udayana University (2000)
Sertifikasi <i>Certification</i>	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 <i>Risk Management Level 7 Certification</i>
Pengalaman Kerja <i>Professional Experience</i>	- Pelaksana Tugas Direktur Utama dan Direktur Bisnis Non Kredit Bank BPD Bali (2018-2019) - Kepala Divisi Kredit Bank BPD Bali Kantor Pusat (2016-2018) - Kepala Divisi Sumber Daya Manusia Bank BPD Bali Kantor Pusat (2014-2016) - Kepala Divisi Kredit Bank BPD Bali Kantor Pusat (2011-2014) - Kepala Divisi Kredit Bank BPD Bali Kantor Pusat (2010-2011) - Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Singaraja (2008-2010) - Kepala Bagian Kepatuhan Divisi Manajemen Risiko Bank BPD Bali Kantor Pusat (2007-2008) - Kepala Bagian Kepatuhan & Hukum Divisi Manajemen Risiko Bank BPD Bali Kantor Pusat (2005-2007) - Kepala Cabang Pembantu Ngurah Rai Bank BPD Bali Kantor Cabang Kuta (2004-2005) - Kepala Cabang Pembantu Nusa Dua Bank BPD Bali Kantor Cabang Kuta (2003-2004) - Acting President Director and Non-Credit Business Director of Bank BPD Bali (2018-2019) - Head of the Credit Division at Bank BPD Bali Head Office (2016-2018) - Head of the Human Resources Division at Bank BPD Bali Head Office (2014-2016) - Head of the Credit Division at Bank BPD Bali Head Office (2011-2014) - Head of the Credit Division at Bank BPD Bali Head Office (2010-2011) - Head of Bank BPD Bali Singaraja Branch Office (2008-2010) - Head of the Compliance Section within the Risk Management Division at Bank BPD Bali Head Office (2007-2008) - Head of the Compliance and Legal Section within the Risk Management Division at Bank BPD Bali Head Office (2005-2007) - Head of the Ngurah Rai Sub-Branch at Bank BPD Bali Kuta Branch Office (2004-2005) - Head of the Nusa Dua Sub-Branch at Bank BPD Bali Kuta Branch Office (2003-2004)
Rangkap Jabatan <i>Concurrent Position</i>	Tidak memiliki rangkap jabatan per 31 Desember 2024 <i>Did not hold concurrent positions as of December 31, 2024.</i>
Hubungan Afiliasi <i>Affiliate Relationship</i>	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham. <i>Does not have affiliations with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or shareholders.</i>

**Ida Bagus Gede Setia Yasa****Direktur Operasional & TI | Director of Operational & TI**

Periode Jabatan <i>Term of Office</i>	Pertama (22 Juni 2018 – 22 Juni 2023) Kedua (22 Juni 2023 – 22 Juni 2028) First (June 22, 2018 – June 22, 2023) Second (June 22, 2023 – June 22, 2028)
Usia <i>Age</i>	54 tahun pada akhir tahun buku 2024 54 years at the end of the 2024 financial year
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia Indonesia
Domisili <i>Domicile</i>	Denpasar, Bali Denpasar, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	- Keputusan RUPST pada 22 Juni 2018 yang dikukuhkan dalam Akta Nomor 36 tanggal 22 Juni 2018 - Keputusan RUPST pada 22 Februari 2023 yang dikukuhkan dalam Akta Nomor 47 tanggal 22 Februari 2023 - AGMS resolution on June 22, 2018, confirmed by Deed Number 36 on June 22, 2018 - AGMS resolution February 22, 2023, confirmed by Deed Number 47 on February 22, 2023
Pendidikan <i>Education</i>	- Teknik Komputer Institut Teknologi Sepuluh November (1995) - Magister Manajemen Universitas Udayana (2005) - Computer Engineering Sepuluh November Institute of Technology (1995) - Master of Management Udayana University (2005)
Sertifikasi <i>Certification</i>	Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi Jenjang 7 Risk Management Level 7 Certification
Pengalaman Kerja <i>Professional Experience</i>	- Direktur Operasional (2019-2023) - Direktur Operasional dan Pelaksana Tugas Direktur Kredit Bank BPD Bali (2018-2019) - Kepala Divisi Teknologi & Akuntansi Bank BPD Bali Kantor Pusat (2016-2018) - Kepala Divisi Teknologi Informasi Bank BPD Bali Kantor Pusat (2012-2016) - Kepala Divisi Perencanaan Strategis Bank BPD Bali Kantor Pusat (2010-2012) - Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Bangli (2008-2010) - Senior Officer Satuan Pengawasan Intern (SPI) & QA Bank BPD Bali Kantor Pusat (2005-2008) - Junior Officer Satuan Pengawasan Intern (SPI) & QA Bank BPD Bali Kantor Pusat (2003-2005) - Assistant Officer Satuan Pengawasan Intern (SPI) & QA Bank BPD Bali Kantor Pusat (2001-2003) - Operational Director (2019-2023) - Operational Director and Acting Credit Director, Bank BPD Bali (2018-2019) - Head of Technology and Accounting Division, Bank BPD Bali Head Office (2016-2018) - Head of Information Technology Division, Bank BPD Bali Head Office (2012-2016) - Head of Strategic Planning Division, Bank BPD Bali Head Office (2010-2012) - Head of Bank BPD Bali Bangli Branch Office (2008-2010) - Senior Officer, Internal Audit Unit (SPI) and Quality Assurance, Bank BPD Bali Head Office (2005-2008) - Junior Officer, Internal Audit Unit (SPI) and Quality Assurance, Bank BPD Bali Head Office (2003-2005) - Assistant Officer, Internal Audit Unit (SPI) and Quality Assurance, Bank BPD Bali Head Office (2001-2003)
Rangkap Jabatan <i>Concurrent Position</i>	Tidak memiliki rangkap jabatan per 31 Desember 2024 Did not hold concurrent positions as of December 31, 2024.
Hubungan Afiliasi <i>Affiliate Relationship</i>	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham. Does not have affiliations with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or shareholders.



I Nyoman Sumanaya, S.E., M.M.

Direktur Bisnis | Director of Business

Periode Jabatan <i>Term of Office</i>	Pertama (20 Mei 2019 – 20 Mei 2024) Kedua (20 Mei 2024 – 20 Mei 2029) <i>First (May 20, 2019 – May 20, 2024) Second (May 20, 2024 – May 20, 2029)</i>
Usia <i>Age</i>	51 tahun pada akhir tahun buku 2024 <i>51 years at the end of the 2024 financial year</i>
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia <i>Indonesia</i>
Domisili <i>Domicile</i>	Denpasar, Bali <i>Denpasar, Bali</i>
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	- Keputusan RUPST pada 20 Mei 2019 yang dikukuhkan dalam Akta Nomor 37 tanggal 20 Mei 2019 - Keputusan RUPST pada 22 Februari 2023 yang dikukuhkan dalam Akta Nomor 47 tanggal 22 Februari 2023 <i>AGMS resolution May 20, 2019, confirmed by Deed Number 37 on May 20, 2019</i> <i>AGMS resolution February 22, 2023, confirmed by Deed Number 47 on February 22, 2023</i>
Pendidikan <i>Education</i>	- Sarjana Ekonomi Universitas Pendidikan Nasional (1996) - Magister Manajemen Universitas Pendidikan Nasional (2005) <i>Bachelor of Economics, National Education University (1996)</i> <i>Master of Management, National Education University (2005)</i>
Sertifikasi <i>Certification</i>	Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi Jenjang 7 <i>Risk Management Level 7 Certification</i>
Pengalaman Kerja <i>Professional Experience</i>	- Kepala Divisi Dana dan Jasa (2018-2020) - Kepala Divisi Kepatuhan Bank BPD Bali Kantor Pusat (2017-2018) - Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Utama Denpasar (2016-2017) - Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Mangupura (2014-2016) - Kepala Bagian Kredit Korporasi Divisi Kredit Bank BPD Bali Kantor Pusat (2012-2014) - Wakil Kepala Operasional Bank BPD Bali Kantor Cabang Utama Denpasar (2010-2012) - Wakil Kepala Operasional Bank BPD Bali Kantor Cabang Tabanan (2008-2010) - Wakil Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Seririt (2005-2008) - Kepala Seksi Pemasaran Cabang Pembantu Mengwi Bank BPD Bali Kantor Cabang Utama Denpasar (2003-2005) - Kepala Seksi Pemasaran Cabang Pembantu Teuku Umar Bank BPD Bali Kantor Cabang Utama Denpasar (2002-2003) <i>Head of Fund and Services Division (2018-2020)</i> <i>Head of the Compliance Division, Bank BPD Bali Head Office (2017-2018)</i> <i>Head of the Bank BPD Bali Main Branch Office, Denpasar (2016-2017)</i> <i>Head of the Bank BPD Bali Mangupura Branch Office (2014-2016)</i> <i>Head of the Corporate Credit Division, Bank BPD Bali Head Office (2012-2014)</i> <i>Deputy Head of Operations, Bank BPD Bali Main Branch Office, Denpasar (2010-2012)</i> <i>Deputy Head of Operations, Bank BPD Bali Tabanan Branch Office (2008-2010)</i> <i>Deputy Head of the Bank BPD Bali Seririt Branch Office (2005-2008)</i> <i>Head of the Marketing Section, Mengwi Sub-Branch, Bank BPD Bali Main Branch Office, Denpasar (2003-2005)</i> <i>Head of the Marketing Section, Teuku Umar Sub-Branch, Bank BPD Bali Main Branch Office, Denpasar (2002-2003)</i>
Rangkap Jabatan <i>Concurrent Position</i>	Tidak memiliki rangkap jabatan per 31 Desember 2024 <i>Did not hold concurrent positions as of December 31, 2024</i>
Hubungan Afiliasi <i>Affiliate Relationship</i>	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham. <i>Does not have affiliations with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or shareholders.</i>

**Made Lestara Widiatmika****Direktur Kredit** | *Director of Loan*

Periode Jabatan <i>Term of Office</i>	Pertama (14 Februari 2019 – 14 Februari 2024) Kedua (14 Februari 2024 – 14 Februari 2029) <i>First (February 14, 2019 – February 14, 2024) Second (February 14, 2024 – February 14, 2029)</i>
Usia <i>Age</i>	60 tahun pada akhir tahun buku 2024 <i>60 years at the end of the 2024 financial year</i>
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia <i>Indonesia</i>
Domisili <i>Domicile</i>	Buleleng, Bali <i>Buleleng, Bali</i>
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	- Keputusan RUPST pada 14 Februari 2019 yang dikukuhkan dalam Akta Nomor 28 tanggal 14 Februari 2019 - Keputusan RUPST pada 22 Februari 2023 yang dikukuhkan dalam Akta Nomor 47 tanggal 22 Februari 2023 <i>AGMS resolution February 14, 2019, confirmed by Deed Number 28 on February 14, 2019</i> <i>AGMS resolution February 22, 2023, confirmed by Deed Number 47 on February 22, 2023</i>
Pendidikan <i>Education</i>	- Sarjana Ekonomi Universitas Panji Sakti (1998) - Sarjana Ekonomi Manajemen Universitas Gajayana (2022) <i>Bachelor of Economics, Panji Sakti University (1998)</i> <i>Bachelor of Management Economics, Gajayana University (2022)</i>
Sertifikasi <i>Certification</i>	Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi Jenjang 7 <i>Risk Management Level 7 Certification</i>
Pengalaman Kerja <i>Professional Experience</i>	- Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Renon (2018-2019) - Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Renon (2018-2019) - Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Singaraja (2016-2018) - Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Seririt (2014-2016) - Wakil Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Seririt (2012-2014) - Yunior Officer Kredit Retail, Mikro & Konsumer Divisi Kredit Bank BPD Bali Kantor Pusat (2011-2012) - Kepala Seksi Kredit Bank BPD Bali Kantor Cabang Singaraja (2010-2011) - Kepala Seksi Penyelamatan Kredit Bank BPD Bali Kantor Cabang Singaraja (2007-2010) - Kepala Kantor Kas Lovina Bank BPD Bali Kantor Cabang Singaraja (2006-2007) - Kepala Seksi Pemasaran Kredit Kantor Cabang Pembantu Sanur Bank BPD Bali Kantor Cabang Utama Denpasar (2004-2006) <i>Head of the Bank BPD Bali Renon Branch Office (2018-2019)</i> <i>Head of the Bank BPD Bali Renon Branch Office (2018-2019)</i> <i>Head of the Bank BPD Bali Singaraja Branch Office (2016-2018)</i> <i>Head of the Bank BPD Bali Seririt Branch Office (2014-2016)</i> <i>Deputy Head of the Bank BPD Bali Seririt Branch Office (2012-2014)</i> <i>Junior Officer of Retail, Micro & Consumer Credit, Credit Division, Bank BPD Bali Head Office (2011-2012)</i> <i>Head of the Credit Section, Bank BPD Bali Singaraja Branch Office (2010-2011)</i> <i>Head of the Credit Rescue Section, Bank BPD Bali Singaraja Branch Office (2007-2010)</i> <i>Head of the Lovina Cash Office, Bank BPD Bali Singaraja Branch Office (2006-2007)</i> <i>Head of the Credit Marketing Section, Sanur Assistant Branch Office, Bank BPD Bali Main Branch Office, Denpasar (2004-2006)</i>
Rangkap Jabatan <i>Concurrent Position</i>	Tidak memiliki rangkap jabatan per 31 Desember 2024 <i>Did not hold concurrent positions as of December 31, 2024.</i>
Hubungan Afiliasi <i>Affiliate Relationship</i>	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham. <i>Does not have affiliations with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or shareholders.</i>

**Drs. I Wayan Sutela Negara****Direktur Kepatuhan | Director of Compliance**

Periode Jabatan <i>Term of Office</i>	Pertama (22 Juni 2018 – 22 Juni 2023) Kedua (22 Juni 2023 – 22 Juni 2028) <i>First (June 22, 2018 – June 22, 2023) Second (June 22, 2023 – June 22, 2028)</i>
Usia <i>Age</i>	61 tahun pada akhir tahun buku 2024 <i>61 years at the end of the 2024 financial year</i>
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia <i>Indonesia</i>
Domisili <i>Domicile</i>	Denpasar, Bali <i>Denpasar, Bali</i>
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	- Keputusan RUPST pada 22 Juni 2018 yang dikuatkan dalam Akta Nomor 36 tanggal 22 Juni 2018 - Keputusan RUPST pada 22 Februari 2023 yang dikuatkan dalam Akta Nomor 47 tanggal 22 Februari 2023 <i>AGMS resolution June 22, 2018, confirmed by Deed Number 36 on June 22, 2018</i> <i>AGMS resolution February 22, 2023, confirmed by Deed Number 47 on February 22, 2023</i>
Pendidikan <i>Education</i>	- Sarjana Ekonomi Pembangunan Universitas Mataram (1989) - Magister Manajemen Universitas Udayana (2002) <i>Bachelor of Development Economics, University of Mataram (1989)</i> <i>Master of Management, University of Udayana (2002)</i>
Sertifikasi <i>Certification</i>	Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi Jenjang 7 <i>Risk Management Level 7 Certification</i>
Pengalaman Kerja <i>Professional Experience</i>	- Kepala Satuan Kerja Audit Intern & Anti-Fraud Bank BPD Bali Kantor Pusat (2016-2018) - Kepala Divisi Manajemen Risiko Bank BPD Bali Kantor Pusat (2015-2016) - Wakil Kepala Satuan Kerja Audit Intern & Anti-Fraud Bank BPD Bali Kantor Pusat (2015) - Wakil Kepala Divisi Sumber Daya Manusia Bank BPD Bali Kantor Pusat (2014-2015) - Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Mangupura (2012-2014) - Kepala Bagian Luar Negeri Divisi <i>Treasury</i> Bank BPD Bali Kantor Pusat (2010-2012) - Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Negara (2008-2010) - Kepala Bagian Perencanaan Strategis & Riset Divisi Perencanaan Strategis Bank BPD Bali Kantor Pusat (2005-2008) - Junior Officer Biro Manajemen Risiko Bank BPD Bali Kantor Pusat (2004-2005) - Junior Officer Biro Kesekretariatan & Umum Bank BPD Bali Kantor Pusat (2003-2004) - Junior Officer Biro TRP Bank BPD Bali Kantor Pusat (2001-2003) - Kepala Seksi Biro TRP Bank BPD Bali Kantor Pusat (1998-2001) <i>Head of Internal Audit and Anti-Fraud Work Unit, Bank BPD Bali Head Office (2016-2018)</i> <i>Head of Risk Management Division, Bank BPD Bali Head Office (2015-2016)</i> <i>Deputy Head of Internal Audit and Anti-Fraud Work Unit, Bank BPD Bali Head Office (2015)</i> <i>Deputy Head of Human Resources Division, Bank BPD Bali Head Office (2014-2015)</i> <i>Head of Bank BPD Bali Mangupura Branch Office (2012-2014)</i> <i>Head of Foreign Affairs Division, Bank BPD Bali Treasury Division, Head Office (2010-2012)</i> <i>Head of Bank BPD Bali Negara Branch Office (2008-2010)</i> <i>Head of Strategic Planning and Research Division, Bank BPD Bali Head Office (2005-2008)</i> <i>Junior Officer of Risk Management Bureau, Bank BPD Bali Head Office (2004-2005)</i> <i>Junior Officer of Secretariat and General Affairs Bureau, Bank BPD Bali Head Office (2003-2004)</i> <i>Junior Officer of TRP Bureau, Bank BPD Bali Head Office (2001-2003)</i> <i>Head of TRP Bureau Section, Bank BPD Bali Head Office (1998-2001)</i>
Rangkap Jabatan <i>Concurrent Position</i>	Tidak memiliki rangkap jabatan per 31 Desember 2024 <i>Did not hold concurrent positions as of December 31, 2024.</i>
Hubungan Afiliasi <i>Affiliate Relationship</i>	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham. <i>Does not have affiliations with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or shareholders.</i>



Dewan Komisaris *Board of Commissioners*



Direksi
Board of Directors





PERUBAHAN ANGGOTA MANAJEMEN SETELAH TAHUN BUKU 2024

Changes in Management Membership Following Fiscal Year 2024

Bank BPD Bali tidak melaporkan adanya perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi setelah berakhirnya tahun buku 2024 hingga diterbitkannya laporan keuangan auditan tahun buku 2024.

Bank BPD Bali did not report any changes to its Board of Commissioners and Board of Directors following the end of the 2024 financial year until the issuance of the 2024 audited financial report.

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF & PIMPINAN KEPALA CABANG

Profile of Executive Officials & Branch Managers

Profil pejabat eksekutif atau satu level di bawah Direksi Bank BPD Bali adalah sebagai berikut:

The profiles of Bank BPD Bali's executive officers or one level below directors are as follows:

PROFIL KEPALA DIVISI

Head of Division Profile



I Gusti Ayu Citrawati, S.E.

Kepala Divisi Kredit Korporasi | Head of Credit Corporate Division

Usia Age	54 tahun pada akhir tahun buku 2024 54 years at the end of the 2024 financial year
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Denpasar, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	Keputusan Direksi No. 0140/KEP/DIR/SDM/2024 Directors Decree No. 0140/KEP/DIR/SDM/2024
Pendidikan Education	Sarjana Ekonomi Universitas Udayana Bali (1995) Bachelor of Economics, Udayana University, Bali (1995)
Sertifikasi Certification	Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi Jenjang 6 Risk Management Certification - Level 6 Qualification
Pengalaman Kerja Professional Experience	- Kepala Divisi Kredit Retail dan Konsumer (2023-2024) - Kepala Divisi Kredit Bank BPD Bali (2018-2023) - Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Utama Denpasar (2018) - Wakil Kepala Divisi Kredit Bank BPD Bali Kantor Pusat (2017-2018) - Pejabat Sementara Wakil Kepala Divisi Kredit Bank BPD Bali Kantor Pusat (2016-2017) - Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Ubud (2014-2016) - Kepala Bagian Kredit Mikro & Kecil Divisi Kredit Bank BPD Bali Kantor Pusat (2011-2014) - Kepala Bagian Kredit Konsumtif Divisi Kredit Bank BPD Bali Kantor Pusat (2010) - Kepala Bidang Kredit Bank BPD Bali Kantor Cabang Utama Denpasar (2005-2010) - Assistant Officer Biro Kredit Bank BPD Bali Kantor Pusat (2002-2005) - Head of Retail and Consumer Credit Division (2023-2024) - Head of Credit Division, Bank BPD Bali (2018-2023) - Head of Bank BPD Bali Main Branch Office, Denpasar (2018) - Deputy Head of Credit Division, Bank BPD Bali Head Office (2017-2018) - Acting Deputy Head of Credit Division, Bank BPD Bali Head Office (2016-2017) - Head of Bank BPD Bali Ubud Branch Office (2014-2016) - Head of Micro & Small Credit Division, Bank BPD Bali Head Office (2011-2014) - Head of Consumer Credit Division, Bank BPD Bali Head Office (2010) - Head of Credit Division, Bank BPD Bali, Denpasar Main Branch Office (2005-2010) - Assistant Officer, Credit Bureau, Bank BPD Bali Head Office (2002-2005)
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham. Does not have affiliations with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or shareholders.

**Ida Bagus Nyoman Ari Suryantara, S.H., M.M.****Kepala Divisi Kepatuhan | Head of Compliance Division**

Usia <i>Age</i>	53 tahun pada akhir tahun buku 2024 <i>53 years at the end of the 2024 financial year</i>
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia
Domisili <i>Domicile</i>	Denpasar, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Keputusan Direksi No. 0271/KEP/DIR/ SDM/2023 <i>Directors Decree No. 0271/KEP/DIR/ SDM/2023</i>
Pendidikan <i>Education</i>	• Sarjana Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta (1995) • Magister Manajemen, Universitas Udayana Bali (2003) • Bachelor of Law, Atma Jaya University, Yogyakarta (1995) • Master of Management, Udayana University, Bali (2003)
Sertifikasi <i>Certification</i>	Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi Jenjang 7 <i>Risk Management Level 7 Certification</i>
Pengalaman Kerja <i>Professional Experience</i>	• Kepala Divisi Dana & Jasa Bank BPD Bali Kantor Pusat (2019-2023) • Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Karangasem (2016-2019) • Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Singaraja (2014-2016) • Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Seririt (2012-2014) • Kepala Bagian Dana & Jasa Divisi Dana dan Jasa Bank BPD Bali Kantor Pusat (2010-2012) • Junior Officer Biro Treasuri Bank BPD Bali Kantor Pusat (2005-2010) • Assistant Officer Biro Treasuri Bank BPD Bali Kantor Pusat (2001-2005) • Head of Fund and Services Division, Bank BPD Bali Head Office (2019-2023) • Head of Bank BPD Bali Karangasem Branch Office (2016-2019) • Head of Bank BPD Bali Singaraja Branch Office (2014-2016) • Head of Bank BPD Bali Seririt Branch Office (2012-2014) • Head of Funds and Services Department, Funds and Services Division, Bank BPD Bali Head Office (2010-2012) • Junior Officer, Treasury Bureau, Bank BPD Bali Head Office (2005-2010) • Assistant Officer, Treasury Bureau, Bank BPD Bali Head Office (2001-2005)
Hubungan Afiliasi <i>Affiliate Relationship</i>	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham. <i>Does not have affiliations with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or shareholders.</i>

Anak Agung Istri Eka Parwita Dewi, S.E., M.M.**Kepala Divisi Treasury | Head of Treasury Division**

Usia <i>Age</i>	51 tahun pada akhir tahun buku 2024 <i>51 years at the end of the 2024 financial year</i>
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia
Domisili <i>Domicile</i>	Denpasar, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Keputusan Direksi No. 0140/KEP/DIR/SDM/2024 <i>Directors Decree No. 0140/KEP/DIR/SDM/2024</i>
Pendidikan <i>Education</i>	• Sarjana Ekonomi Manajemen, Universitas Udayana (1996) • Magister Manajemen, Universitas Udayana Bali (2002) • <i>Bachelor of Management Economy, Udayana University (1996)</i> • <i>Master of Management, Udayana University, Bali (2002)</i>
Sertifikasi <i>Certification</i>	• Sertifikasi Manajemen Sumber Daya Manusia • Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi Jenjang 6 • <i>Human Resource Management Certification</i> • <i>Risk Management Certification - Level 6 Qualification</i>
Pengalaman Kerja <i>Professional Experience</i>	• Kepala Divisi Sumber Daya Manusia (2017-2023) • Pejabat Sementara Kepala Divisi Sumber Daya Manusia (2017) • Bagian Pengembangan & Pelatihan (2015-2017) • Bagian Pengembangan SDM, Divisi SDM (2014-2015) • Wakil kepala Cabang Bisnis - Renon (2012-2014) • Wakil kepala Cabang Operasional - Renon (2012) • <i>Head of Human Resources Division (2017-2023)</i> • <i>Acting Head of Human Resources Division (2017)</i> • <i>Development & Training Section (2015-2017)</i> • <i>HR Development Section, HR Division (2014-2015)</i> • <i>Deputy Head of Business Branch - Renon (2012-2014)</i> • <i>Deputy Head of Operational Branch - Renon (2012)</i>
Hubungan Afiliasi <i>Affiliate Relationship</i>	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham. <i>Does not have affiliations with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or shareholders.</i>

**A.A. Indraprasta Yasa, S.Kom., M.M.****Kepala Divisi Pengembangan Digital | Head of Digital Development Division**

Usia <i>Age</i>	52 tahun pada akhir tahun buku 2024 <i>52 years at the end of the 2024 financial year</i>
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia
Domisili <i>Domicile</i>	Denpasar, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Keputusan Direksi No. 0267/KEP/DIR/SDM/2023 tanggal 27 Juni 2023 <i>Board of Directors Decree No. 0267/KEP/DIR/SDM/2023 dated June 27, 2023</i>
Pendidikan <i>Education</i>	• Sarjana Komputer Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1996) • Magister Manajemen Universitas Pendidikan Nasional (2015) • <i>Bachelor of Computer Science, Sepuluh Nopember Institute of Technology (1996)</i> • <i>Master of Management, National Education University (2015)</i>
Sertifikasi <i>Certification</i>	Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi Jenjang 6 <i>Risk Management Certification - Level 6 Qualification</i>
Pengalaman Kerja <i>Professional Experience</i>	• Kepala Divisi Teknologi Informasi Bank BPD Bali Kantor Pusat (2021-2023) • Kepala Divisi Teknologi & Akuntansi Bank BPD Bali Kantor Pusat (2018-2021) • Wakil Kepala Divisi Teknologi & Akuntansi Bank BPD Bali Kantor Pusat (2016-2018) • Pejabat Sementara Wakil Kepala Divisi Teknologi & Akuntansi Bank BPD Bali Kantor Pusat (2016) • Kepala Bagian Pengembangan Aplikasi Biro TSI Bank BPD Bali Kantor Pusat (2007-2016) • Pejabat Sementara Kepala Bagian Pengembangan Aplikasi Biro TSI Bank BPD Bali Kantor Pusat (2005-2007) • <i>Junior Officer</i> Biro TSI Bank BPD Bali Kantor Pusat (2003-2005) • <i>Assistant Officer</i> Biro TSI Bank BPD Bali Kantor Pusat (2001-2003) • <i>Head of Information Technology, Bank BPD Bali Head Office (2021-2023)</i> • <i>Head of Technology and Accounting Division, Bank BPD Bali Head Office (2018-2021)</i> • <i>Deputy Head of Technology and Accounting Division, Bank BPD Bali Head Office (2016-2018)</i> • <i>Acting Deputy Head of Technology and Accounting Division, Bank BPD Bali Head Office (2016)</i> • <i>Head of Application Development Section, TSI Bureau, Bank BPD Bali Head Office (2007-2016)</i> • <i>Acting Head of Application Development Section, TSI Bureau, Bank BPD Bali Head Office (2005-2007)</i> • <i>Junior Officer, TSI Bureau, Bank BPD Bali Head Office (2003-2005)</i> • <i>Assistant Officer, TSI Bureau, Bank BPD Bali Head Office (2001-2003)</i>
Hubungan Afiliasi <i>Affiliate Relationship</i>	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham. <i>Does not have affiliations with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or shareholders.</i>



**Ida Bagus Gd. Ary Wijaya Guntur, S.E., M.M.****Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan | Head of Corporate Secretary Division**

Usia <i>Age</i>	54 tahun pada akhir tahun buku 2024 <i>54 years at the end of the 2024 financial year</i>
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia
Domisili <i>Domicile</i>	Denpasar, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Keputusan Direksi No. 0267/KEP/DIR/SDM/2023 tanggal 27 Juni 2023 <i>Board of Directors Decree No. 0267/KEP/DIR/SDM/2023 tanggal June 27, 2023</i>
Pendidikan <i>Education</i>	• Sarjana Ekonomi, Universitas Udayana Bali (2002) • Magister Manajemen, Universitas Udayana Bali (2006) • Bachelor of Economics, Udayana University Bali (2002) • Master of Management, Udayana University Bali (2006)
Sertifikasi <i>Certification</i>	Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi Jenjang 7 <i>Risk Management Certification Level 7 Qualification</i>
Pengalaman Kerja <i>Professional Experience</i>	• Kepala Divisi Umum & Kesekretariatan Bank BPD Bali (2018-2021) • Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Tabanan (2014-2018) • Kepala Bank BPD Bali kantor Cabang Gianyar (2013-2014) • Kepala Bagian Sekretariat & Rumah Tangga Divisi Sekretaris Perusahaan Bank BPD Bali Kantor Pusat (2010-2013) • Kepala Bagian Kesekretariatan, Humas & Protokol Divisi Sekretariat & Umum Bank BPD Bali Kantor Pusat (2010) • Junior Officer Divisi Sekretariat & Umum Bank BPD Bali Kantor Pusat (2007-2010) • Assistant Officer Sekretaris Direksi Divisi Sekretariat & Umum Bank BPD Bali Kantor Pusat (2004-2007) • Assistant Officer Biro Treasury & Luar Negeri Bank BPD Bali Kantor Pusat (2003-2004) • Head of the General Affairs & Secretariat Division, Bank BPD Bali (2018-2021) • Head of the Bank BPD Bali Tabanan Branch Office (2014-2018) • Head of the Bank BPD Bali Gianyar Branch Office (2013-2014) • Head of the Secretariat & Household Section, Corporate Secretary Division, Bank BPD Bali Head Office (2010-2013) • Head of the Secretariat, Public Relations & Protocol Section, Secretariat & General Division, Bank BPD Bali Head Office (2010) • Junior Officer, Secretariat & General Division, Bank BPD Bali Head Office (2007-2010) • Assistant Officer, Secretary to the Board of Directors, Secretariat & General Division, Bank BPD Bali Head Office (2004-2007) • Assistant Officer, Treasury & Foreign Affairs Bureau, Bank BPD Bali Head Office (2003-2004)
Hubungan Afiliasi <i>Affiliate Relationship</i>	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham. <i>Does not have affiliations with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or shareholders.</i>

**Ida Ayu Putri Yuniawati, S.E.****Kepala Divisi Sumber Daya Manusia | Head of Human Resources Division**

Usia <i>Age</i>	50 tahun pada akhir tahun buku 2024 <i>50 years at the end of the 2024 financial year</i>
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia
Domisili <i>Domicile</i>	Tabanan, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Keputusan Direksi No. 0140/KEP/DIR/SDM/2024 <i>Directors Decree No. 0140/KEP/DIR/SDM/2024</i>
Pendidikan <i>Education</i>	Sarjana Ekonomi, Universitas Pendidikan Nasional (1997) <i>Bachelor of Economics, National Education University (1997)</i>
Sertifikasi <i>Certification</i>	Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi Jenjang 6 <i>Risk Management Certification - Level 6 Qualification</i>
Pengalaman Kerja <i>Professional Experience</i>	• Kepala Divisi <i>Treasury</i> Bank BPD Bali (2017-2024) • Kepala Bagian Likuiditas Divisi <i>Treasury</i> Bank BPD Bali (2012-2015) • Kepala Bidang Pelayanan Tunai & Non Tunai Bank BPD Bali Kantor Cabang Utama Denpasar (2011-2012) • Kepala Cabang Pembantu Monang-Maning Bank BPD Bali Kantor Cabang Utama Denpasar (2005-2011) • <i>Assistant Officer</i> Biro TRP Bank BPD Bali Kantor Pusat (2004-2005) • <i>Head of Treasury Division, Bank BPD Bali (2017-2024)</i> • <i>Head of Liquidity Division, Treasury Division, Bank BPD Bali (2012-2015)</i> • <i>Head of Cash and Non-Cash Services, Bank BPD Bali, Main Branch Office, Denpasar (2011-2012)</i> • <i>Head of Monang-Maning Assistant Branch, Bank BPD Bali, Main Branch Office, Denpasar (2005-2011)</i> • <i>Assistant Officer, TRP Bureau, Bank BPD Bali, Head Office (2004-2005)</i>
Hubungan Afiliasi <i>Affiliate Relationship</i>	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham. <i>Does not have affiliations with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or shareholders.</i>

**Ni Wayan Suciati, S.E., Ak.****Kepala Divisi Perencanaan Strategis | Head of Strategic Planning Division**

Usia <i>Age</i>	52 tahun pada akhir tahun buku 2024 <i>52 years at the end of the 2024 financial year</i>
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia
Domisili <i>Domicile</i>	Denpasar, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Keputusan Direksi Nomor 0140/KEP/DIR/SDM/2024 <i>Directors Decree No. 0140/KEP/DIR/SDM/2024</i>
Pendidikan <i>Education</i>	Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Udayana (1996) <i>Bachelor of Economics in Accounting, Udayana University (1996)</i>
Sertifikasi <i>Certification</i>	Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi Jenjang 6 <i>Risk Management Certification - Level 6 Qualification</i>
Pengalaman Kerja <i>Professional Experience</i>	• Kepala Divisi Umum & Aset (2023-2024) • Wakil Kepala Satuan Kerja Audit Intern & Anti Fraud (2023) • Wakil Kepala Divisi Kredit (2021-2023) • Wakil Kepala Satuan Kerja Audit Intern & Anti Fraud (2019-2021) • Head of General & Asset Division (2023-2024) • Deputy Head of SKAI & Anti Fraud Work Unit (2023) • Deputy Head of Credit Division (2021-2023) • Deputy Head of SKAI & Anti Fraud Work Unit (2019-2021)
Hubungan Afiliasi <i>Affiliate Relationship</i>	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham. <i>Does not have affiliations with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or shareholders.</i>

**Ni Nyoman Sri Utari Tresna, S.E.****Kepala Divisi Manajemen Risiko | Head of Risk Management Division**

Usia <i>Age</i>	50 tahun pada akhir tahun buku 2024 <i>50 years at the end of the 2024 financial year</i>
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia
Domisili <i>Domicile</i>	Denpasar, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Keputusan Direksi No. 0643/KEP/DIR/SDM/2023 <i>Directors Decree No. 0643/KEP/DIR/SDM/2023</i>
Pendidikan <i>Education</i>	Sarjana Ekonomi Universitas Pendidikan Nasional (1996) <i>Bachelor of Economics, National Education University (1996)</i>
Sertifikasi <i>Certification</i>	Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi Jenjang 6 <i>Risk Management Certification - Level 6 Qualification</i>
Pengalaman Kerja <i>Professional Experience</i>	• Wakil Kepala Divisi Umum & Kesekretariatan (2020-2023) • Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Gianyar (2019-2020) • Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Bangli (2016-2019) • Kepala Bagian Jasa & Pelayanan (2012-2016) • Wakil Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Gianyar (2010-2012) • Deputy Head of General Affairs and Secretariat Division (2020-2023) • Head of Bank BPD Bali Gianyar Branch Office (2019-2020) • Head of Bank BPD Bali Bangli Branch Office (2016-2019) • Head of Services and Services (2012-2016) • Deputy Head of Bank BPD Bali Gianyar Branch Office (2010-2012)
Hubungan Afiliasi <i>Affiliate Relationship</i>	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham. <i>Does not have affiliations with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or shareholders.</i>

**I Gede Sukanada, S.E., QIA.****Kepala Divisi Kredit Retail dan Konsumer | Head of Retail and Consumer Credit Division**

Usia <i>Age</i>	51 tahun pada akhir tahun buku 2024 <i>51 years at the end of the 2024 financial year</i>
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia
Domisili <i>Domicile</i>	Denpasar, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Keputusan Direksi Nomor 0140/KEP/DIR/SDM/2024 <i>Directors Decree No. 0140/KEP/DIR/SDM/2024</i>
Pendidikan <i>Education</i>	Sarjana Ekonomi STIMI Handayani Denpasar <i>Bachelor of Economics, STIMI Handayani Denpasar</i>
Sertifikasi <i>Certification</i>	- Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi Jenjang 6 - Qualified Internal Auditor (QIA) - Risk Management Certification - Level 6 Qualification - Qualified Internal Auditor (QIA)
Pengalaman Kerja <i>Professional Experience</i>	- Kepala Divisi Kredit Korporasi (2023) - Kepala SKAI & Anti Fraud (2018-2023) - Kepala Divisi Umum dan Kesekretariatan Bank BPD Bali Kantor Pusat (2016-2018) - Anggota Tim Penanganan dan Penyelamatan Kredit Bermasalah (2016) - Wakil Kepala Divisi Kredit Bank BPD Bali Kantor Pusat (2014-2016) - Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Badung (2013-2014) - Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Singaraja (2011-2013) - Wakil Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Singaraja (2005-2011) - Kepala Seksi Pemasaran Kredit Bank BPD Bali Kantor Cabang Singaraja (2003-2005) - Head of Corporate Credit Division (2023) - Head of SKAI and Anti-Fraud (2018-2023) - Head of General Affairs and Secretariat Division, Bank BPD Bali Head Office (2016-2018) - Member of the Problematic Credit Handling and Rescue Team (2016) - Deputy Head of Credit Division, Bank BPD Bali Head Office/Head of Bank BPD Bali Badung Branch Office (2014-2016) - Head of Bank BPD Bali Badung Branch Office (2013-2014) - Head of Bank BPD Bali Singaraja Branch Office (2011-2013) - Deputy Head of Bank BPD Bali Singaraja Branch Office (2005-2011) - Head of Credit Marketing Section, Bank BPD Bali Singaraja Branch Office (2003-2005)
Hubungan Afiliasi <i>Affiliate Relationship</i>	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham. <i>Does not have affiliations with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or shareholders.</i>

**Ni Ketut Lestari, S.TP.****Kepala Divisi Operasional, Keuangan & Akuntansi | Head of Operations, Finance & Accounting Division**

Usia <i>Age</i>	51 tahun pada akhir tahun buku 2024 <i>51 years at the end of the 2024 financial year</i>
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia
Domisili <i>Domicile</i>	Denpasar, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Keputusan Direksi No. 0535A/KEP/DIR/SDM/2024 <i>Directors Decree No. 0535A /KEP/DIR/HR/2024</i>
Pendidikan <i>Education</i>	Sarjana Teknologi Pertanian Universitas Udayana Bali (1997) <i>Bachelor of Agricultural Technology, Udayana University, Bali (1997)</i>
Sertifikasi <i>Certification</i>	Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi Jenjang 6 <i>Risk Management Certification - Level 6 Qualification</i>
Pengalaman Kerja <i>Professional Experience</i>	• Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Tabanan (2023) • Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Badung (2021-2023) • Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Bangli (2019-2021) • Wakil Kepala Cabang Bisnis Bank BPD Bali Kantor Cabang Renon (2018-2019) • Kepala Bagian Kredit Retail, Mikro & Konsumer Divisi Kredit Bank BPD Bali Kantor Pusat (2016-2018) • Pejabat Sementara Kepala Bagian Kredit Retail, Mikro & Konsumer Divisi Kredit Bank BPD Bali Kantor Pusat (2015-2016) • Wakil Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Bangli (2014-2015) • Kepala Cabang Pembantu Payangan Bank BPD Bali Kantor Cabang Ubud (2010-2014) • Kepala Seksi Pemasaran Kredit Bank BPD Bali Kantor Cabang Gianyar (2005-2010) • <i>Head of Bank BPD Bali, Tabanan Branch Office (2023)</i> • <i>Head of Bank BPD Bali, Badung Branch Office (2021-2023)</i> • <i>Head of Bank BPD Bali, Bangli Branch Office (2019-2021)</i> • <i>Deputy Head of Business Branch, Bank BPD Bali, Renon Branch Office (2018-2019)</i> • <i>Head of Retail, Micro & Consumer Credit Division, Bank BPD Bali Head Office (2016-2018)</i> • <i>Temporary Head of Retail, Micro & Consumer Credit Division, Bank BPD Bali Head Office (2015-2016)</i> • <i>Deputy Head of Bank BPD Bali, Bangli Branch Office (2014-2015)</i> • <i>Head of Payangan Assistant Branch, Bank BPD Bali, Ubud Branch Office (2010-2014)</i> • <i>Head of Credit Marketing Section, Bank BPD Bali, Gianyar Branch Office (2005-2010)</i>
Hubungan Afiliasi <i>Affiliate Relationship</i>	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham. <i>Does not have affiliations with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or shareholders.</i>


I Gd. Arya Purusa Dhana, S.Kom., M.M.
Kepala Divisi Teknologi Informasi | Head of Information Technology Division

Usia <i>Age</i>	48 tahun pada akhir tahun buku 2024 <i>48 years at the end of the 2024 financial year</i>
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia
Domisili <i>Domicile</i>	Denpasar, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Keputusan Direksi No. 0643/KEP/DIR/SDM/2023 <i>Directors Decree No. 0643/KEP/DIR/SDM/2023</i>
Pendidikan <i>Education</i>	• Sarjana Teknik Informatika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1994) • Magister Manajemen, Universitas Pendidikan Nasional (2015) • <i>Bachelor of Informatics Engineering, Sepuluh November Institute of Technology (1994)</i> • <i>Master of Management, National Education University (2015)</i>
Sertifikasi <i>Certification</i>	Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi Jenjang 6 <i>Risk Management Certification - Level 6 Qualification</i>
Pengalaman Kerja <i>Professional Experience</i>	• Wakil Kepala Divisi Teknologi Informasi (2021-2023) • Wakil Kepala Divisi Teknologi & Akuntansi (2018-2020) • Kepala Bagian <i>Technical Support</i> Divisi TIF (2014-2018) • Wakil Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Bangli (2013-2014) • <i>Deputy Head of the Technology Division (2021-2023)</i> • <i>Deputy Head of the Technology and Accounting Division (2018-2020)</i> • <i>Head of Technical Support Division, TIF Division (2014-2018)</i> • <i>Deputy Head of Bank BPD Bali Bangli Branch Office (2013-2014)</i>
Hubungan Afiliasi <i>Affiliate Relationship</i>	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham. <i>Does not have affiliations with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or shareholders.</i>

**I. A. Sri Wahyuni Darmawati, S.E., M.M., QIA.****Kepala Divisi Umum & Aset | Head of General Affairs & Assets Division**

Usia <i>Age</i>	50 tahun pada akhir tahun buku 2024 <i>50 years at the end of the 2024 financial year</i>
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia
Domisili <i>Domicile</i>	Denpasar, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Keputusan Direksi No. 0140/KEP/DIR/SDM/2024 <i>Directors Decree No. 0140/KEP/DIR/SDM/2024</i>
Pendidikan <i>Education</i>	• Sarjana Manajemen, Universitas Udayana Bali (1997) • Magister Manajemen, Universitas Udayana Bali (2008) • Bachelor of Management, Udayana University Bali (1997) • Master of Management, Udayana University Bali (2008)
Sertifikasi <i>Certification</i>	• Qualified Internal Auditor (QIA) • Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi Jenjang 6 • Qualified Internal Auditor (QIA) • Risk Management Certification - Level 6 Qualification
Pengalaman Kerja <i>Professional Experience</i>	• Kepala Satuan Kerja Audit Intern & Anti Fraud (2023) • Wakil Kepala Satuan Kerja Audit Intern & Anti Fraud (2021-2023) • Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Ubud (2018-2021) • Wakil Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Tabanan (2016-2018) • Kepala Bagian Project Management Divisi Perencanaan dan Strategi (2012-2016) • Wakil Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Ubud (2011-2012) • Kepala Bidang Dana dan Jasa Bank BPD Bali Cabang Utama Denpasar (2007-2011) • Kepala Cabang Pembantu Bank BPD Bali Cabang Pembantu Gatsu Barat (2005-2007) • Kepala Seksi Pemasaran Kredit Bank BPD Bali Cabang Pembantu Abiansema (2004-2005) • Head of the Internal Audit & Anti-Fraud Work Unit (2023) • Deputy Head of the Internal Audit & Anti-Fraud Work Unit (2021-2023) • Head of the Bank BPD Bali Ubud Branch Office (2018-2021) • Deputy Head of the Bank BPD Bali Tabanan Branch Office (2016-2018) • Head of the Project Management, Planning, and Strategy Division (2012-2016) • Deputy Head of the Bank BPD Bali Ubud Branch Office (2011-2012) • Head of the Funds and Services Division at Bank BPD Bali Denpasar Main Branch (2007-2011) • Head of the Assistant Branch at Bank BPD Bali Gatsu Barat Sub-Branch (2005-2007) • Head of the Credit Marketing Section at Bank BPD Bali Abiansema Sub-Branch (2004-2005)
Hubungan Afiliasi <i>Affiliate Relationship</i>	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham. <i>Does not have affiliations with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or shareholders.</i>

**Putu Dharmapatni, S.E., M.M.****Kepala Divisi Dana & Jasa** | *Head of Funds & Services Division*

Usia <i>Age</i>	53 tahun pada akhir tahun buku 2024 <i>53 years at the end of the 2024 financial year</i>
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia
Domisili <i>Domicile</i>	Denpasar, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Keputusan Direksi No. 0643/KEP/DIR/SDM/2023 <i>Directors Decree No. 0643/KEP/DIR/SDM/2023</i>
Pendidikan <i>Education</i>	• Sarjana Ekonomi, STIMI Handayani Denpasar (1998) • Magister Manajemen, Universitas Pendidikan Nasional (2000) • <i>Bachelor of Economics, STIMI Handayani Denpasar (1998)</i> • <i>Master of Management, National Education University (2000)</i>
Sertifikasi <i>Certification</i>	-
Pengalaman Kerja <i>Professional Experience</i>	• Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Utama Denpasar (2018-2023) • Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Mangupura (2016-2018) • Kepala Bagian Humas & Kesekretariatan Divisi Sekretaris (2014-2016) • Kepala Cabang Pembantu Sanur Bank BPD Bali Kantor Cabang Utama Denpasar (2012-2014) • Kepala Cabang Pembantu Ubung Bank BPD Bali Kantor Cabang Utama Denpasar (2010-2012) • Kepala Seksi Dana & Jasa Bank BPD Bali Kantor Cabang Badung (2010) • <i>Assistant Officer</i> Divisi Kredit Bank BPD Bali Kantor Pusat (2008-2010) • <i>Head Teller</i> Divisi Treasuri & Luar Negeri Bank BPD Bali Kantor Pusat (2005-2008) • Kepala Seksi Pelayanan Tunai & Non Tunai Bank BPD Bali Kantor Cabang Utama Denpasar (2004-2005) • <i>Head of the Bank BPD Bali Main Branch Office in Denpasar (2018-2023)</i> • <i>Head of the Bank BPD Bali Mangupura Branch Office (2016-2018)</i> • <i>Head of the Public Relations and Secretariat Division (2014-2016)</i> • <i>Head of the Sanur Sub-Branch at the Bank BPD Bali Main Branch Office in Denpasar (2012-2014)</i> • <i>Head of the Ubung Sub-Branch at the Bank BPD Bali Main Branch Office in Denpasar (2010-2012)</i> • <i>Head of the Fund and Services Section at the Bank BPD Bali Badung Branch Office (2010)</i> • <i>Assistant Officer of the Credit Division at Bank BPD Bali Head Office (2008-2010)</i> • <i>Head Teller of the Treasury and Overseas Division at Bank BPD Bali Head Office (2005-2008)</i> • <i>Head of the Cash and Non-Cash Services Section at the Bank BPD Bali Main Branch Office in Denpasar (2004-2005)</i>
Hubungan Afiliasi <i>Affiliate Relationship</i>	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham. <i>Does not have affiliations with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or shareholders.</i>

**I Komang Wiratna Jaya, S.T., M.M., QIA.****Kepala SKAI & Anti Fraud | Head of SKAI & Anti Fraud**

Usia <i>Age</i>	53 tahun pada akhir tahun buku 2024 <i>53 years at the end of the 2024 financial year</i>
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia
Domisili <i>Domicile</i>	Denpasar, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Keputusan Direksi No. 0140/KEP/DIR/SDM/2024 tanggal 22 Maret 2024 <i>Directors Decree No. 0140/KEP/DIR/SDM/2024 dated March 22, 2024</i>
Pendidikan <i>Education</i>	• Sarjana Teknik Sipil Universitas Udayana Bali (1996) • Magister Manajemen Universitas Udayana Bali (2001) • Bachelor of Civil Engineering, Udayana University, Bali (1996) • Master of Management, Udayana University, Bali (2001)
Sertifikasi <i>Certification</i>	• Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi Jenjang 6 • Qualified Internal Auditor (QIA) • Certified Anti Fraud Manager • Risk Management Certification - Level 6 Qualification • Qualified Internal Auditor (QIA) • Certified Anti Fraud Manager
Pengalaman Kerja <i>Professional Experience</i>	• Kepala Divisi Perencanaan Strategis (2016-2024) • Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Utama Denpasar (2014-2016) • Wakil Kepala Divisi Perencanaan Strategis Bank BPD Bali Kantor Pusat (2014) • Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Negara (2010-2014) • Wakil Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Kuta (2006-2010) • Kepala Cabang Pembantu Pekutatan Bank BPD Bali Kantor Cabang Negara (2005-2006) • Kepala Seksi Pemasaran Bank BPD Bali Kantor Cabang Gianyar (2002-2005) • Head of Strategic Planning Division (2016-2024) • Head of the Bank BPD Bali Main Branch Office in Denpasar (2014-2016) • Deputy Head of the Strategic Planning Division at Bank BPD Bali Head Office (2014) • Head of the Bank BPD Bali Negara Branch Office (2010-2014) • Deputy Head of the Bank BPD Bali Kuta Branch Office (2006-2010) • Head of the Pekutatan Assistant Branch Office at Bank BPD Bali Negara Branch Office (2005-2006) • Head of Marketing Section at Bank BPD Bali Gianyar Branch Office (2002-2005)
Hubungan Afiliasi <i>Affiliate Relationship</i>	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham. <i>Does not have affiliations with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or shareholders.</i>

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank



→ **I. A. Sri Wahyuni Darmawati, S.E., M.M., QIA.**
Kepala Divisi Umum & Aset
Head of General Affairs & Assets Division

→ **Putu Dharmapatni, S.E., M.M.**
Kepala Divisi Dana & Jasa
Head of Funds & Services Division

→ **Ni Wayan Suciati, S.E. AK.**
Kepala Divisi Perencanaan Strategis
Head of Strategic Planning Division

→ **Anak Agung Istri Eka Parwita Dewi, S.E., M.M.**
Kepala Divisi Treasury
Head of Treasury Division

→ **Ni Ketut Lestari, S.TP.**
Kepala Divisi Operasional, Keuangan & Akuntansi
Head of Operations, Finance & Accounting Division

→ **Ni Nyoman Sri Utari Tresna, S.E.**
Kepala Divisi Manajemen Risiko
Head of Risk Management Division

→ **Ida Ayu Putri Yuniawati, S.E.**
Kepala Divisi Sumber Daya Manusia
Head of Human Resources Division

→ **I Gusti Ayu Citrawati, S.E.**
Kepala Divisi Kredit Korporasi
Head of Credit Corporate Division



→ **I Gd. Arya Purusa Dhana, S.Kom., M.M.**
Kepala Divisi Teknologi Informasi
Head of Information Technology Division

→ **I Komang Wiratna Jaya, S.T., M.M., QIA.**
Kepala SKAI & Anti Fraud
Head of SKAI & Anti Fraud

→ **Ida Bagus Nyoman Ari Suryantara, S.H., M.M.**
Kepala Divisi Kepatuhan
Head of Compliance Division

→ **I Gede Sukanada, S.E, QIA**
Kepala Divisi Kredit Retail dan Konsumer
Head of Retail and Consumer Credit Division

→ **Ida Bagus Gd. Ary Wijaya Guntur, S.E., M.M.**
Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan
Head of Corporate Secretary Division

→ **A.A. Indraprasta Yasa, S.Kom., M.M.**
Kepala Divisi Pengembangan Digital
Head of Digital Development Division



PROFIL KEPALA CABANG

Head of Branch Office Profile



I Made Sudarma, S.E., M.M.

Kepala Cabang Utama Denpasar | Head of Denpasar Main Branch

Usia <i>Age</i>	53 tahun pada akhir tahun buku 2024 <i>53 years at the end of the 2024 financial year</i>
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia
Domisili <i>Domicile</i>	Karangasem, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Keputusan Direksi No. 0271/KEP/DIR/SDM/2023 tanggal 27 Juni 2023 <i>Directors Decree No. 0271/KEP/DIR/SDM/2023 dated June 27, 2023</i>
Pendidikan <i>Education</i>	Magister Manajemen, Universitas Warmadewa, Bali (2015) <i>Master of Management, Warmadewa University, Bali (2015)</i>
Sertifikasi <i>Certification</i>	Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi Jenjang 6 <i>Risk Management Certification - Level 6 Qualification</i>
Pengalaman Kerja <i>Professional Experience</i>	• Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Singaraja (2019-2023) • Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Seririt (2018-2019) • Kepala Bidang Kredit Bank BPD Bali Kantor Cabang Utama Denpasar (2013-2018) • Kepala Seksi Kredit Bank BPD Bali Kantor Cabang Bangli (2007-2012) • Head of Bank BPD Bali Singaraja Branch Office (2019-2023) • Head of Bank BPD Bali Seririt Branch Office (2018-2019) • Head of Credit Division at Bank BPD Bali Denpasar Main Branch Office (2013-2018) • Head of Credit Section at Bank BPD Bali Bangli Branch Office (2007-2012)
Hubungan Afiliasi <i>Affiliate Relationship</i>	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham. <i>Does not have affiliations with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or shareholders.</i>


Ida Bagus Made Surawan, S.Pi., M.M.
Kepala Cabang Mangupura | Head of Mangupura Branch Office

Usia <i>Age</i>	52 tahun pada akhir tahun buku 2024 <i>52 years at the end of the 2024 financial year</i>
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia
Domisili <i>Domicile</i>	Denpasar, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Keputusan Direksi No. 0066/KEP/DIR/SDM/2023 tanggal 16 Februari 2023 <i>Directors Decree No. 0066/KEP/DIR/SDM/2023 dated February 16, 2023</i>
Pendidikan <i>Education</i>	• Sarjana Perikanan Universitas Warmadewa (1997) • Magister Manajemen Universitas Warmadewa (2020) • Bachelor of Fisheries, Warmadewa University (1997) • Master of Management, Warmadewa University (2020)
Sertifikasi <i>Certification</i>	Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi Jenjang 3 <i>Risk Management Certification - Level 3 Qualification</i>
Pengalaman Kerja <i>Professional Experience</i>	• Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Negara (2018-2023) • Kepala Bagian Pengembangan Produk & Organisasi Divisi Perencanaan Strategis Bank BPD Bali Kantor Pusat (2018) • Wakil Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Mangupura (2016-2018) • Kepala Cabang Pembantu Ngurah Rai Bank BPD Bali Kantor Cabang Badung (2012-2016) • Kepala Cabang Pembantu Bajera Bank BPD Bali Kantor Cabang Tabanan (2011-2012) • Assistant Officer Divisi Kredit Bank BPD Bali Kantor Pusat (2007-2011) • Kepala Seksi Pemasaran Kredit Bank BPD Bali Kantor Cabang Negara (2002-2007) • Head of Bank BPD Bali Negara Branch Office (2018-2023) • Head of Product & Organization Development Division, Strategic Planning Division, Bank BPD Bali Head Office (2018) • Deputy Head of Bank BPD Bali Mangupura Branch Office (2016-2018) • Head of Ngurah Rai Sub-Branch, Bank BPD Bali Badung Branch Office (2012-2016) • Head of Bajera Sub-Branch, Bank BPD Bali Tabanan Branch Office (2011-2012) • Assistant Officer of Credit Division, Bank BPD Bali Head Office (2007-2011) • Head of the Credit Marketing Section, Bank BPD Bali Negara Branch Office (2002-2007)
Hubungan Afiliasi <i>Affiliate Relationship</i>	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham. <i>Does not have affiliations with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or shareholders.</i>

**I Komang Sandhyana Kartika, S.E., M.M.****Kepala Cabang Singaraja** | *Head of Singaraja Branch Office*

Usia <i>Age</i>	40 tahun pada akhir tahun buku 2024 <i>40 years at the end of the 2024 financial year</i>
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia
Domisili <i>Domicile</i>	Denpasar, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Keputusan Direksi No. 0142/KEP/DIR/SDM/2024 tanggal 1 April 2024 <i>Board of Directors Decree No. 0142/KEP/DIR/SDM/2024 dated April 1, 2024</i>
Pendidikan <i>Education</i>	• Sarjana Manajemen Keuangan Universitas Udayana (2001) • Magister Manajemen Universitas Udayana (2007) • <i>Bachelor of Financial Management Udayana University (2001)</i> • <i>Master of Management Udayana University (2007)</i>
Sertifikasi <i>Certification</i>	Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi Jenjang 5 <i>Risk Management Certification - Level 5 Qualification</i>
Pengalaman Kerja <i>Professional Experience</i>	• Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Ubud (2023-2024) • Kepala Bagian Dana & Hubungan Kelembagaan, Divisi Dana dan Jasa (2020-2023) • Kepala Cabang Pembantu Nusa Dua (2018-2020) • Kepala Cabang Pembantu Gilimanuk (2017-2018) • Kredit Officer Relationship Manager (2016-2017) • <i>Head of Bank BPD Bali Ubud Branch (2023-2024)</i> • <i>Head of Funds & Institutional Relations, Funds and Services Department (2020-2023)</i> • <i>Head of Nusa Dua Assistant Branch (2018-2020)</i> • <i>Head of Gilimanuk Assistant Branch (2017-2018)</i> • <i>Credit Officer Relationship Manager (2016-2017)</i>
Hubungan Afiliasi <i>Affiliate Relationship</i>	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham. <i>Does not have affiliations with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or shareholders.</i>

**Ayun Marheny, S.E.****Kepala Cabang Renon | Head of Renon Branch Office**

Usia <i>Age</i>	51 tahun pada akhir tahun buku 2024 <i>51 years at the end of the 2024 financial year</i>
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia
Domisili <i>Domicile</i>	Denpasar, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Keputusan Direksi No. 0066/KEP/DIR/SDM/2023 tanggal 27 Februari 2021 <i>Board of Directors Decree No. 0066/KEP/DIR/SDM/2023 dated February 27, 2021</i>
Pendidikan <i>Education</i>	Sarjana Ekonomi Universitas Brawijaya (1997) <i>Bachelor of Economics, Brawijaya University (1997)</i>
Sertifikasi <i>Certification</i>	Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi Jenjang 3 <i>Risk Management Certification - Level 3 Qualification</i>
Pengalaman Kerja <i>Professional Experience</i>	• Kepala Cabang Bank BPD Bali Kantor Cabang Mangupura (2021-2023) • Kepala Bagian Luar Negeri Divisi Bank BPD Bali Kantor Pusat (2016-2023) • Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Badung (2014-2016) • Wakil Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Badung (2012-2014) • Kepala Cabang Pembantu Nusa Dua Bank BPD Bali Kantor Cabang Badung (2010-2012) • Kepala Seksi Kredit Cabang Pembantu Nusa Dua Bank BPD Bali Kantor Cabang Kuta (2002-2010) • Head of Bank BPD Bali Bank Branch Office, Mangupura Branch (2021-2023) • Head of Overseas Section, Treasury Division, Bank BPD Bali Head Office (2016-2023) • Head of Bank BPD Bali Badung Branch Office (2014-2016) • Deputy Head of the Bank BPD Bali Badung Branch Office (2012-2014) • Head of Nusa Dua Sub-Branch, Bank BPD Bali Badung Branch Office (2010-2012) • Head of Credit Section, Nusa Dua Sub-Branch, Bank BPD Bali Kuta Branch Office (2002-2010)
Hubungan Afiliasi <i>Affiliate Relationship</i>	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham. <i>Does not have affiliations with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or shareholders.</i>

**I Ketut Bagus Ariana, S.E., M.M.****Kepala Cabang Gianyar | Head of Gianyar Branch Office**

Usia <i>Age</i>	44 tahun pada akhir tahun buku 2024 <i>44 years at the end of the 2024 financial year</i>
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia
Domisili <i>Domicile</i>	Denpasar, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Keputusan Direksi No. 0176/KEP/DIR/SDM/2020 tanggal 08 Mei 2020 <i>Board of Directors Decree No. 0176/KEP/DIR/SDM/2020 dated May 08, 2020</i>
Pendidikan <i>Education</i>	• Sarjana Ekonomi Akuntansi, Universitas Udayana (2002) • Magister Manajemen Universitas Udayana (2009) • <i>Bachelor of Economics Accounting, Udayana University (2002)</i> • <i>Master of Management, Udayana University (2009)</i>
Sertifikasi <i>Certification</i>	Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi Jenjang 5 <i>Risk Management Certification - Level 5 Qualification</i>
Pengalaman Kerja <i>Professional Experience</i>	• Kepala Bagian Dana & Hubungan Kelembagaan Divisi Dana & Jasa Bank BPD Bali Kantor Pusat (2020) • Kepala Bagian Dana & Pengembangan Produk Divisi Dana & Jasa Bank BPD Bali Kantor Pusat (2018-2019) • Kepala Cabang Pembantu Sanur Bank BPD Bali Kantor Cabang Renon (2016-2018) • <i>Assistant Officer</i> Pengendalian Risiko Operasional dan Risiko Lainnya Divisi MRO Bank BPD Bali Kantor Pusat (2012-2016) • Kepala Seksi Unit Kontrol Internal Bank BPD Bali Kantor Cabang Singaraja (2011-2012) • <i>Head of Fund & Institutional Relations Division, Fund & Services Division, Bank BPD Bali Head Office (2020)</i> • <i>Head of Fund & Product Development Division, Fund & Services Division, Bank BPD Bali Head Office (2018-2019)</i> • <i>Head of Sanur Sub-Branch, Renon Branch Office, Bank BPD Bali (2016-2018)</i> • <i>Assistant Officer of Operational Risk Control and Other Risks Division, Management Risk Office (MRO), Bank BPD Bali Head Office (2012-2016)</i> • <i>Head of Internal Control Unit, Bank BPD Bali Singaraja Branch Office (2011-2012)</i>
Hubungan Afiliasi <i>Affiliate Relationship</i>	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham. <i>Does not have affiliations with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or shareholders.</i>

**Ketut Andayana Kusuma Yasa, S.E., M.M.****Kepala Cabang Karangasem | Head of Karangasem Branch Office**

Usia <i>Age</i>	47 tahun pada akhir tahun buku 2024 <i>47 years at the end of the 2024 financial year</i>
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia
Domisili <i>Domicile</i>	Denpasar, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Keputusan Direksi No. 0355/KEP/DIR/SDM/2019 tanggal 03 Juli 2019 <i>Board of Directors Decree No. 0355/KEP/DIR/SDM/2019 dated July 3, 2019</i>
Pendidikan <i>Education</i>	• Sarjana dari Universitas Pendidikan Nasional (2000) • Magister Manajemen Universitas Pendidikan Nasional (2002) • <i>Bachelor of National Education University (2000)</i> • <i>Master of Management National Education University (2002)</i>
Sertifikasi <i>Certification</i>	Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi Jenjang 5 <i>Risk Management Certification - Level 5 Qualification</i>
Pengalaman Kerja <i>Professional Experience</i>	• Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Mataram (2018-2019) • Kepala Bagian Sistem & Prosedur Divisi Kepatuhan Bank BPD Bali Kantor Pusat (2017-2018) • Pejabat Sementara Kepala Bagian Sistem & Prosedur Divisi Kepatuhan Bank BPD Bali Kantor Pusat (2016-2017) • <i>Officer</i> Kebijakan & Prosedur Operasional & Non Operasional Divisi Kepatuhan Bank BPD Bali Kantor Pusat (2016) • <i>Junior Officer Monitoring & Pelaporan</i> Divisi Kepatuhan Bank BPD Bali Kantor Pusat (2014-2016) • <i>Head of Bank BPD Bali Mataram Branch Office (2018-2019)</i> • <i>Head of System & Procedure Section, Compliance Division, Bank BPD Bali Head Office (2017-2018)</i> • <i>Acting Head of the System & Procedure Section, Compliance Division, Bank BPD Bali Head Office (2016-2017)</i> • <i>Junior Officer of Operational & Non-Operational Policy & Procedures, Compliance Division, Bank BPD Bali Head Office (2016)</i> • <i>Junior Officer of Monitoring & Reporting, Compliance Division, Bank BPD Bali Head Office (2014-2016)</i>
Hubungan Afiliasi <i>Affiliate Relationship</i>	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham. <i>Does not have affiliations with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or shareholders.</i>

**Ida Bagus Purwa Pidada, S.E.****Kepala Cabang Bangli | Head of Bangli Branch Office**

Usia <i>Age</i>	46 tahun pada akhir tahun buku 2024 <i>46 years at the end of the 2024 financial year</i>
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia
Domisili <i>Domicile</i>	Denpasar, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Keputusan Direksi No. 0147/KEP/DIR/SDM/2023 tanggal 29 Maret 2023 <i>Board of Directors Decree No. 0147/KEP/DIR/SDM/2023 dated March 29, 2023</i>
Pendidikan <i>Education</i>	Sarjana Ekonomi (2001) <i>Bachelor of Economics (2001)</i>
Sertifikasi <i>Certification</i>	Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi Jenjang 5 <i>Risk Management Certification - Level 5 Qualification</i>
Pengalaman Kerja <i>Professional Experience</i>	• Kepala Bidang Kredit Kantor Bank BPD Bali Cabang Denpasar (2021-2023) • Kepala Bidang Kredit Kantor Bank BPD Bali Cabang Tabanan (2019-2021) • Kepala Bidang Penyelamatan Kredit Bank BPD Bali Kantor Cabang Renon (2018-2019) • Kepala Seksi Kredit Kantor Bank BPD Bali Cabang Singaraja (2015-2018) • Head of Credit Division at Bank BPD Bali Office, Denpasar Branch (2021-2023) • Head of Credit Division at Bank BPD Bali Office, Tabanan Branch (2019-2021) • Head of Credit Rescue Division at Bank BPD Bali Office, Renon Branch (2018-2019) • Head of Credit Section at Bank BPD Bali Office, Singaraja Branch (2015-2018)
Hubungan Afiliasi <i>Affiliate Relationship</i>	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham. <i>Does not have affiliations with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or shareholders.</i>

**A.A. Ngurah Aryadiputra, S.E., Ak.****Kepala Cabang Mataram | Head of Mataram Branch Office**

Usia <i>Age</i>	45 tahun pada akhir tahun buku 2024 <i>45 years at the end of the 2024 financial year</i>
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia
Domisili <i>Domicile</i>	Denpasar, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Keputusan Direksi No. 0148/KEP/DIR/SDM/2023 tanggal 29 Maret 2023 <i>Board of Directors Decree No. 0148/KEP/DIR/SDM/2023 dated March 29, 2023</i>
Pendidikan <i>Education</i>	Sarjana Ekonomi Akuntansi (2003) <i>Bachelor of Economics in Accounting (2003)</i>
Sertifikasi <i>Certification</i>	Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi Jenjang 5 <i>Risk Management Certification - Level 5 Qualification</i>
Pengalaman Kerja <i>Professional Experience</i>	• Kepala Kantor Bank BPD Bali Cabang Pembantu Nusa Dua (2020-2023) • Kepala Kantor Bank BPD Bali Cabang Pembantu Gatsu Timur (2018-2020) • Kepala Kantor Bank BPD Bali Cabang Pembantu Pupuan (2017-2018) • Kepala Kantor Bank BPD Bali Cabang Pembantu Pekutatan (2016) • Head of Bank BPD Bali Nusa Dua Sub-Branch Office (2020-2023) • Head of Bank BPD Bali East Gatsu Sub-Branch Office (2018-2020) • Head of Bank BPD Bali Pupuan Sub-Branch Office (2017-2018) • Head of Bank BPD Bali Pekutatan Sub-Branch Office (2016)
Hubungan Afiliasi <i>Affiliate Relationship</i>	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham. <i>Does not have affiliations with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or shareholders.</i>

**I Made Indra Taurisiana, S.T.****Kepala Cabang Klungkung | Head of Klungkung Branch Office**

Usia <i>Age</i>	46 tahun pada akhir tahun buku 2024 <i>46 years at the end of the 2024 financial year</i>
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia
Domisili <i>Domicile</i>	Denpasar, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Keputusan Direksi Nomor 0271/KEP/DIR/SDM/2023 <i>Directors Decree No. 0271/KEP/DIR/SDM/2023</i>
Pendidikan <i>Education</i>	Sarjana Teknik Industri (2000) <i>Bachelor of Industrial Engineering (2000)</i>
Sertifikasi <i>Certification</i>	Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi Jenjang 5 <i>Risk Management Certification - Level 5 Qualification</i>
Pengalaman Kerja <i>Professional Experience</i>	• Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Ubud (2021-2023) • Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Mataram (2019-2021) • Kepala Bagian <i>Treasury</i> Divisi <i>Treasury</i> Bank BPD Bali Kantor Pusat (2016-2019) • Pejabat Sementara Kepala Bagian <i>Treasury</i> Divisi <i>Treasury</i> Bank BPD Bali Kantor Pusat (2016) • Wakil Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Mataram (2015-2016) • Kepala Cabang Pembantu Kintamani Bank BPD Bali Kantor Cabang Bangli (2014-2015) • Head of Ubud Branch Office, Bank BPD Bali (2021-2023) • Head of Mataram Branch Office, Bank BPD Bali (2019-2021) • Head of Treasury Section, Treasury Division, Bank BPD Bali Head Office (2016-2019) • Acting Head of the Treasury Section, Treasury Division, Bank BPD Bali Head Office (2016) • Vice Head of Mataram Branch Office, Bank BPD Bali (2015-2016) • Head of the Kintamani Assistant Branch, Bank BPD Bali Bangli Branch Office (2014-2015)
Hubungan Afiliasi <i>Affiliate Relationship</i>	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham. <i>Does not have affiliations with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or shareholders.</i>

**Made Adhitya Pranajaya, S.E., M.M.****Kepala Cabang Badung | Head of Badung Branch Office**

Usia <i>Age</i>	50 tahun pada akhir tahun buku 2024 <i>50 years at the end of the 2024 financial year</i>
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia
Domisili <i>Domicile</i>	Denpasar, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Keputusan Direksi No. 0142/KEP/DIR/SDM/2024 <i>Directors Decree No. 0142/KEP/DIR/SDM/2024</i>
Pendidikan <i>Education</i>	• Sarjana Ekonomi Akuntansi, Universitas Pendidikan Nasional (1998) • Magister Manajemen, Universitas Udayana (2006) • <i>Bachelor of Economics in Accounting, National Education University (1998)</i> • <i>Master of Management, Udayana University (2006)</i>
Sertifikasi <i>Certification</i>	Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi Jenjang 5 <i>Risk Management Certification - Level 5 Qualification</i>
Pengalaman Kerja <i>Professional Experience</i>	• Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Klungkung (2019-2023) • Kepala Bagian Kredit Korporasi Divisi Kredit Bank BPD Bali Kantor Pusat (2018-2019) • <i>Officer Relationship Manager</i> Divisi Kredit Bank BPD Bali Kantor Pusat (2014-2018) • <i>Officer Administrasi & Laporan</i> Divisi Kredit Bank BPD Bali Kantor Pusat (2014) • Kepala Bidang Hukum & Administrasi Kredit Bank BPD Bali Kantor Cabang Tabanan (2013-2014) • <i>Head of Klungkung Branch Office, Bank BPD Bali (2019-2023)</i> • <i>Head of Corporate Credit Division, Bank BPD Bali Head Office (2018-2019)</i> • <i>Officer Relationship Manager, Corporate Credit Division, Bank BPD Bali Head Office (2014-2018)</i> • <i>Officer for Administration & Reporting, Corporate Credit Division, Bank BPD Bali Head Office (2014)</i> • <i>Head of Legal and Credit Administration, Bank BPD Bali Tabanan Branch Office (2013-2014)</i>
Hubungan Afiliasi <i>Affiliate Relationship</i>	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham. <i>Does not have affiliations with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or shareholders.</i>

**A.A. Bagus Dharma Putra, S.E., M.M.****Kepala Cabang Ubud | Head of Ubud Branch Office**

Usia <i>Age</i>	42 tahun pada akhir tahun buku 2024 <i>42 years at the end of the 2024 financial year</i>
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia
Domisili <i>Domicile</i>	Denpasar, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Keputusan Direksi Nomor 0142/KEP/DIR/SDM/2024 <i>Directors Decree No. 0142/KEP/DIR/SDM/2024</i>
Pendidikan <i>Education</i>	• Sarjana Ekonomi Universitas Udayana (2004) • Magister Manajemen Universitas Udayana (2013) • <i>Bachelor of Economics, Udayana University (2004)</i> • <i>Master of Management, Udayana University (2013)</i>
Sertifikasi <i>Certification</i>	Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi Jenjang 5 <i>Risk Management Certification - Level 5 Qualification</i>
Pengalaman Kerja <i>Professional Experience</i>	• Wakil Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Tabanan (2021-2023) • Kepala Bidang Kredit, Bank BPD Bali Kantor Cabang Denpasar (2019-2021) • <i>Officer Kajian Divisi Manajemen Risiko, Bank BPD Bali Kantor Pusat (2018-2019)</i> • Anggota Tim Penanganan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah (2016-2018) • <i>Officer Realationship Manager Divisi Kredit Bank BPD Bali Kantor Pusat (2015-2016)</i> • <i>Deputy Head of Bank BPD Bali Tabanan Branch (2021-2023)</i> • <i>Head of Credit Department, Bank BPD Bali Denpasar Branch (2019-2021)</i> • <i>Risk Management Division Study Officer, Bank BPD Bali Head Office (2018-2019)</i> • <i>Member of Problem Credit Handling and Resolution Team (2016-2018)</i> • <i>Officer Relationship Manager of Credit Division, Bank BPD Bali Head Office (2015-2016)</i>
Hubungan Afiliasi <i>Affiliate Relationship</i>	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham. <i>Does not have affiliations with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or shareholders.</i>



I Dw. Gede Dodi Baskara, S.E., M.M.

Kepala Cabang Negara | *Head of Negara Branch Office*

Usia <i>Age</i>	47 tahun pada akhir tahun buku 2024 <i>47 years at the end of the 2024 financial year</i>
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia
Domisili <i>Domicile</i>	Denpasar, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Keputusan Direksi Nomor 0066/KEP/DIR/SDM/2023 tanggal 16 Februari 2023 <i>Directors Decision No. 0066/KEP/DIR/SDM/2023 dated February 16, 2023</i>
Pendidikan <i>Education</i>	• Sarjana Ekonomi Universitas Pendidikan Nasional (2000) • Magister Manajemen Universitas Pendidikan Nasional (2010) • <i>Bachelor of Economics, National Education University (2000)</i> • <i>Master of Management, National Education University (2010)</i>
Sertifikasi <i>Certification</i>	Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi Jenjang 5 <i>Risk Management Certification - Level 5 Qualification</i>
Pengalaman Kerja <i>Professional Experience</i>	• Wakil Kepala Kantor Bank BPD Bali Cabang Renon (2021-2023) • Wakil Kepala Kantor Bank BPD Bali Cabang Tabanan (2018-2021) • Kepala Kantor Bank BPD Bali Cabang Pembantu Sukawati (2014-2018) • <i>Deputy Head of Bank BPD Bali Office, Renon Branch (2021-2023)</i> • <i>Deputy Head of Bank BPD Bali Office, Tabanan Branch (2018-2021)</i> • <i>Head of Bank BPD Bali Office, Sukawati Branch (2014-2018)</i>
Hubungan Afiliasi <i>Affiliate Relationship</i>	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham. <i>Does not have affiliations with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or shareholders.</i>

**I Made Astika Budiya, S.T., M.M.****Kepala Cabang Seririt | Head of Seririt Branch Office**

Usia <i>Age</i>	44 tahun pada akhir tahun buku 2024 <i>44 years at the end of the 2024 financial year</i>
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia
Domisili <i>Domicile</i>	Badung, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Keputusan Direksi No. 0066/KEP/DIR/SDM/2023 tanggal 16 Februari 2023 <i>Board of Directors Decree No. 0066/KEP/DIR/SDM/2023 dated February 16, 2023</i>
Pendidikan <i>Education</i>	• Sarjana dari ITN Malang (2003) • Magister Manajemen, Universitas Udayana (2010) • <i>Bachelor of ITN Malang (2003)</i> • <i>Master of Management, Udayana University (2010)</i>
Sertifikasi <i>Certification</i>	Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi Jenjang 5 <i>Risk Management Certification - Level 5 Qualification</i>
Pengalaman Kerja <i>Professional Experience</i>	• Kepala Bagian Kepatuhan (2020-2023) • Wakil Kepala Kantor Bank BPD Bali Cabang Badung (2018-2020) • Kepala Kantor Bank BPD Bali Cabang Pembantu Candidasa (2017-2018) • <i>Head of Compliance (2020-2023)</i> • <i>Deputy Head of Bank BPD Bali Badung Branch Office (2018-2020)</i> • <i>Head of Bank BPD Bali Candidasa Branch Office (2017-2018)</i>
Hubungan Afiliasi <i>Affiliate Relationship</i>	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham. <i>Does not have affiliations with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or shareholders.</i>

**Sanjaya Caesar, S.H., M.H.****Kepala Cabang Tabanan | Head of Tabanan Branch Office**

Usia <i>Age</i>	45 tahun pada akhir tahun buku 2024 <i>45 years at the end of the 2024 financial year</i>
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia
Domisili <i>Domicile</i>	Denpasar, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Keputusan Direksi Nomor 0141/KEP/DIR/SDM/2024 tanggal 22 Maret 2024 <i>Directors Decision No. 0141/KEP/DIR/SDM/2024 dated March 22, 2024</i>
Pendidikan <i>Education</i>	• Sarjana Hukum Universitas Udayana (2001) • Magister Hukum Universitas Udayana (2007) • Bachelor of Law, Udayana University (2001) • Master of Law, Udayana University (2007)
Sertifikasi <i>Certification</i>	Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi Jenjang 5 <i>Risk Management Certification - Level 5 Qualification</i>
Pengalaman Kerja <i>Professional Experience</i>	• Kepala Kantor Bank BPD Bali Cabang Badung (2023-2024) • Kepala Kantor Bank BPD Bali Cabang Seririt (2019-2023) • Kepala Bagian Kajian & Laporan – Divisi Manajemen Risiko – Bank BPD Bali (2016-2019) • Head of Bank BPD Bali Office, Badung Branch (2023-2024) • Head of Bank BPD Bali Office, Seririt Branch (2019-2023) • Head of Study & Report Section – Risk Management Division – Bank BPD Bali (2016-2019)
Hubungan Afiliasi <i>Affiliate Relationship</i>	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham. <i>Does not have affiliations with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or shareholders.</i>



→ **Ayun Marheny, S.E.**
Kepala Cabang Renon
Head of Renon Branch Office

→ **Ketut Andayana Kusuma Yasa, S.E., M.M.**
Kepala Cabang Karangasem
Head of Karangasem Branch Office

→ **I Made Indra Taurisiana, S.T.**
Kepala Cabang Klungkung
Head of Klungkung Branch Office

→ **I Made Astika Budiayasa, S.T., M.M.**
Kepala Cabang Seririt
Head of Seririt Branch Office

→ **I Ketut Bagus Ariana, S.E., M.M.**
Kepala Cabang Gianyar
Head of Gianyar Branch Office

→ **Ida Bagus Purwa Pidada, S.E.**
Kepala Cabang Bangli
Head of Bangli Branch Office

→ **Ida Bagus Made Surawan, S.Pi., M.M.**
Kepala Cabang Mangupura
Head of Mangupura Branch Office



→ **A.A. Bagus Dharma Putra, S.E., M.M.**

Kepala Cabang Ubud
Head of Ubud Branch Office

→ **Made Adhitya Pranajaya, S.E., M.M.**

Kepala Cabang Badung
Head of Badung Branch Office

→ **I Komang Sandhyana Kartika, S.E., M.M.**

Kepala Cabang Singaraja
Head of Singaraja Branch Office

→ **I Made Sudarma, S.E., M.M.**

Kepala Cabang Utama Denpasar
Head of Denpasar Main Branch

→ **A.A. Ngurah Aryadiputra, S.E., Ak.**

Kepala Cabang Mataram
Head of Mataram Branch Office

→ **I Dw. Gede Dodi Baskara, S.E., M.M.**

Kepala Cabang Negara
Head of Negara Branch Office

→ **Sanjaya Caesar, S.H., M.H.**

Kepala Cabang Tabanan
Head of Tabanan Branch Office



DEMOGRAFI KARYAWAN

Employee Demographics

Per 31 Desember 2024, jumlah karyawan Bank BPD Bali sebanyak 1.298 karyawan dengan profil demografi karyawan dalam 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2024, the number of employees of Bank BPD Bali was 1,298 employees, with the demographic profile of the employees in the past 2 (two) years as follows:

Jumlah Karyawan Berdasarkan Tingkat Jabatan (Orang)

Employee by Job Position (Person)

Tingkat Jabatan	2024	2023	Job Position
Kepala Divisi	14	10	Division Head
Wakil Kepala Divisi	4	6	Deputy Division Head
Kepala Bagian	54	55	Section Head
Kepala Bidang	74	80	Division Head
Kepala Seksi	212	216	Section Head
Pelaksana	766	675	Executive
Pembantu Pelaksana	92	118	Assistant Executive
Satpam	38	40	Security Guard
Sopir	10	10	Driver
Karyawan Tidak Tetap	34	117	Non-Permanent Employee
Jumlah	1.298	1.327	Total

Jumlah Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Orang)

Employee by Education Level (Person)

Tingkat Pendidikan	2024	2023	Education Level
S2	197	191	Master's Degree
S1	921	939	Bachelor's Degree
D4	5	-	Diploma 4
D3	11	12	Diploma 3
D1	1	1	Diploma 1
SMA dan Sederajat	156	175	High School and Equivalent
SLTP	3	3	Junior high school
Jumlah	1.298	1.327	Total

Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian (Orang)

Employee by Employment Status (Person)

Status Kepegawaian	2024	2023	Employment Status
Permanen	1.264	1.210	Permanent Employee
Kontrak	34	117	Non-Permanent Employee
Jumlah	1.298	1.327	Total

Jumlah Karyawan Berdasarkan Rentang Usia (Orang)

Employee by Age (Person)

Rentang Usia	2024	2023	Age
> 50 tahun	164	182	> 50 years old
40-50 tahun	381	386	40-50 years old
30-<40 tahun	607	593	30-<40 years old
20-<30 tahun	146	166	20-<30 years old
Jumlah	1.298	1.327	Total

Jumlah Karyawan Berdasarkan Gender/Jenis Kelamin (Orang)

Employee by Gender (Person)

Jenis Kelamin	2024	2023	Gender
Pria	728	749	Male
Wanita	570	578	Female
Jumlah	1.298	1.327	Total

Jumlah karyawan berdasarkan Masa Kerja (Orang)

Employee by Tenure (Person)

Masa Kerja	2024	2023	Tenure
< 10 tahun	362	514	< 10 years
10-<20 tahun	714	555	10-<20 years
20-<30 tahun	183	182	20-<30 years
> 30 tahun	39	76	> 30 years
Jumlah	1.298	1.327	Total



STRUKTUR DAN KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Shareholders Structure and Composition

Struktur pemegang saham Bank BPD Bali per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

The shareholders composition of Bank BPD Bali as of December 31, 2024 was as follows:

Struktur dan Komposisi Pemegang Saham Shareholders Structure and Composition						
Pemegang Saham Shareholders	Kepemilikan Saham di Awal Tahun (1 Januari 2024) Share Ownership at the End of the Year (January 1, 2024)			Kepemilikan Saham di Akhir Tahun (31 Desember 2024) Share Ownership at the End of the Year (December 31, 2024)		
	Jumlah Saham* (lembar) Number of Shares (sheets)	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp) Issued and Fully Paid Capital (Rp)	Kepemilikan (%) Ownership (%)	Jumlah Saham* (lembar) Number of Shares (sheets)	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp) Issued and Fully Paid Capital (Rp)	Kepemilikan (%) Ownership (%)
Pemerintah Kabupaten Badung Badung Regency Government	850.617	850.617.000.000	41,49%	1.050.617	1.050.617.000.000	43,65%
Pemerintah Provinsi Bali Bali Province Government	719.912	719.912.000.000	35,11%	719.912	719.912.000.000	29,91%
Pemerintah Kota Denpasar Denpasar City Government	214.476	214.476.000.000	10,46%	300.000	300.000.000.000	12,46%
Pemerintah Kabupaten lainnya: Other Regency Government:						
Gianyar	29.604	29.604.000.000	1,45%	100.000	100.000.000.000	4,15%
Buleleng	80.000	80.000.000.000	3,90%	80.000	80.000.000.000	3,32%
Karangasem	42.550	42.550.000.000	2,08%	43.550	43.550.000.000	1,81%
Jembrana	37.092	37.092.000.000	1,81%	37.092	37.092.000.000	1,54%
Klungkung	31.423	31.423.000.000	1,53%	31.423	31.423.000.000	1,31%
Tabanan	31.006	31.006.000.000	1,51%	31.006	31.006.000.000	1,29%
Bangli	13.577	13.577.000.000	0,66%	13.577	13.577.000.000	0,56%
Total	2.050.257	2.050.257.000.000	100,00%	2.407.177	2.407.177.000.000	100,00%

* Nilai nominal saham = Rp1.000.000/lembar saham
Nominal value of shares = Rp1,000,000/share

Struktur dan Komposisi Pemegang Saham Shareholders Structure and Composition						
Pemegang Saham Shareholders	Kepemilikan Saham di Awal Tahun (1 Januari 2024) Share Ownership at the End of the Year (January 1, 2024)			Kepemilikan Saham di Akhir Tahun (31 Desember 2024) Share Ownership at the End of the Year (December 31, 2024)		
	Jumlah Saham (Lembar Saham) Total Shares (Number of Shares)	Jumlah Modal Disetor Total Paid in Capital (Rp)	Kepemilikan (%) Ownership (%)	Jumlah Saham (Lembar Saham) Total Shares (Number of Shares)	Jumlah Modal Disetor Total Paid in Capital (Rp)	Kepemilikan (%) Ownership (%)
Mencapai 5% atau lebih Reach 5% or more						
Pemerintah Kabupaten Badung Badung Regency Government	850.617	850.617.000.000	41,49%	1.050.617	1.050.617.000.000	43,65%
Pemerintah Provinsi Bali Bali Province Government	719.912	719.912.000.000	35,11%	719.912	719.912.000.000	29,91%
Pemerintah Kota Denpasar Denpasar City Government	214.476	214.476.000.000	10,46%	300.000	300.000.000.000	12,46%

Pemegang Saham Shareholders	Kepemilikan Saham di Awal Tahun (1 Januari 2024) Share Ownership at the End of the Year (January 1, 2024)			Kepemilikan Saham di Akhir Tahun (31 Desember 2024) Share Ownership at the End of the Year (December 31, 2024)		
	Jumlah Saham (Lembar Saham) Total Shares (Number of Shares)	Jumlah Modal Disetor Total Paid in Capital (Rp)	Kepemilikan (%) Ownership (%)	Jumlah Saham (Lembar Saham) Total Shares (Number of Shares)	Jumlah Modal Disetor Total Paid in Capital (Rp)	Kepemilikan (%) Ownership (%)
Di bawah 5% Below 5%						
Pemerintah Kabupaten lainnya: Other Regency Government:						
Gianyar	29.604	29.604.000.000	1,45%	100.000	100.000.000.000	4,15%
Buleleng	80.000	80.000.000.000	3,90%	80.000	80.000.000.000	3,32%
Karangasem	42.550	42.550.000.000	2,08%	43.550	43.550.000.000	1,81%
Jembrana	37.092	37.092.000.000	1,81%	37.092	37.092.000.000	1,54%
Klungkung	31.423	31.423.000.000	1,53%	31.423	31.423.000.000	1,31%
Tabanan	31.006	31.006.000.000	1,51%	31.006	31.006.000.000	1,29%
Bangli	13.577	13.577.000.000	0,66%	13.577	13.577.000.000	0,56%
Total	2.050.257	2.050.257.000.000	100,00%	2.407.177	2.407.177.000.000	100,00%

Struktur dan Komposisi Pemegang Saham Shareholders Structure and Composition

Status Kepemilikan Ownership Status	Kepemilikan Saham di Awal Tahun (1 Januari 2024) Share Ownership at the End of the Year (January 1, 2024)			Kepemilikan Saham di Akhir Tahun (31 Desember 2024) Share Ownership at the End of the Year (December 31, 2024)		
	Jumlah Investor Number of Investors	Jumlah Saham (Lembar Saham) Total Shares (Number of Shares)	Kepemilikan (%) Ownership (%)	Jumlah Investor Number of Investors	Jumlah Saham (Lembar Saham) Total Shares (Number of Shares)	Kepemilikan (%) Ownership (%)
Pemodal Nasional National Investors						
Pemerintah Kabupaten Badung Badung Regency Government	850.617	850.617.000.000	41,49%	1.050.617	1.050.617.000.000	43,65%
Pemerintah Provinsi Bali Bali Province Government	719.912	719.912.000.000	35,11%	719.912	719.912.000.000	29,91%
Pemerintah Kota Denpasar Denpasar City Government	214.476	214.476.000.000	10,46%	300.000	300.000.000.000	12,46%
Pemerintah Kabupaten lainnya: Other Regency Government:						
Gianyar	29.604	29.604.000.000	1,45%	100.000	100.000.000.000	4,15%
Buleleng	80.000	80.000.000.000	3,90%	80.000	80.000.000.000	3,32%
Karangasem	42.550	42.550.000.000	2,08%	43.550	43.550.000.000	1,81%
Jembrana	37.092	37.092.000.000	1,81%	37.092	37.092.000.000	1,54%
Klungkung	31.423	31.423.000.000	1,53%	31.423	31.423.000.000	1,31%
Tabanan	31.006	31.006.000.000	1,51%	31.006	31.006.000.000	1,29%
Bangli	13.577	13.577.000.000	0,66%	13.577	13.577.000.000	0,56%
Pemodal Asing Foreign Investors						
-	-	-	-	-	-	-
Total	2.050.257	2.050.257.000.000	100,00%	2.407.177	2.407.177.000.000	100,00%



Transparansi Kepemilikan Saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Transparency of Share Ownership by the Board of Commissioners and Board of Directors

Dewan Komisaris dan Direksi Bank BPD Bali tidak memiliki kepemilikan saham di Bank ini.

The Board of Commissioners and Board of Directors of Bank BPD Bali do not own shares in this Bank.

Informasi Tentang Pemegang Saham Mayoritas

Information on Majority Shareholders

Pemegang saham utama Bank BPD Bali per 31 Desember 2024 adalah Pemerintah Kabupaten Badung sebesar 43,65% dan Pemerintah Provinsi Bali (29,91%).

As of December 31, 2024, the main shareholders of Bank BPD Bali are the Badung Regency Government, holding 43,65%, and the Bali Provincial Government, holding (29,91%).

Pemkab Badung adalah pemerintah Kabupaten Badung yang terletak di Provinsi Bali. Kabupaten Badung merupakan salah satu dari 9 kabupaten/kota di Bali. Kabupaten Badung merupakan pintu gerbang utama kepariwisataan Bali dan Indonesia bagian tengah.

The Badung Regency Government is responsible for the administration of Badung Regency, which is located in Bali Province. Badung Regency is one of the nine regencies and cities in Bali and serves as the primary gateway to tourism in Bali and central Indonesia.

Kabupaten Badung adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Bali, Indonesia. Ibu kota Badung berada di Mangupura, yang sebelumnya ibu kota Badung berada di Kota Denpasar. Daerah Badung meliputi Kuta dan Nusa Dua, objek wisata yang terkenal di Bali.

Badung Regency, with its capital in Mangupura, was formerly governed from Denpasar City. This area includes renowned tourist destinations such as Kuta and Nusa Dua.

Sementara itu, Pemprov Bali adalah pemerintahan Provinsi Bali, yaitu provinsi di Indonesia yang beribu kota di Kota Denpasar. Wilayah Pemprov Bali meliputi Pulau Bali dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, seperti Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, Pulau Serangan, dan Pulau Menjangan. Pemprov Bali terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kotamadya.

Meanwhile, the Bali Provincial Government governs the Province of Bali, which includes the island of Bali and several smaller surrounding islands, such as Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, Serangan Island, and Menjangan Island. The Bali Provincial Government is comprised of eight regencies and one city.

ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI

Subsidiary and Associate Entities

Per 31 Desember 2024, Bank BPD Bali tidak memiliki Entitas Anak, Entitas Asosiasi, maupun Perusahaan Ventura. Dengan demikian Bank tidak menyajikan informasi terkait dengan hal tersebut.

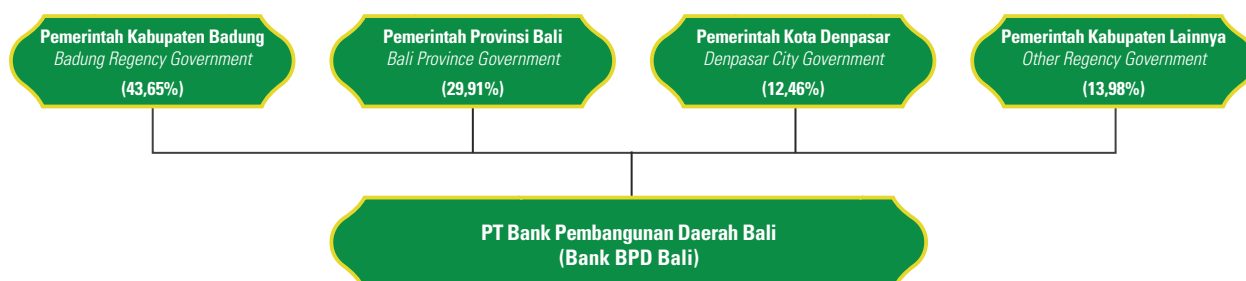
As of December 31, 2024, Bank BPD Bali has no Subsidiaries, Associates, or Venture Companies. The Bank is unable to provide information regarding this matter.

STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN

Group Structure

Struktur grup perusahaan Bank BPD Bali per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Bank BPD Bali's business group structure as of December 31, 2024 was as follows:



KRONOLOGI PENERBITAN SAHAM DAN EFEK LAINNYA

Chronology of Shares and Other Securities Issuance

Kronologis Penerbitan Saham

Chronology of Shares Issuance

Bank BPD Bali bukanlah sebuah perusahaan publik yang telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu, Bank BPD Bali tidak menjelaskan informasi kronologis pencatatan saham, jenis Tindakan korporasi yang menyebabkan perubahan jumlah saham, perubahan jumlah saham dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku, dan nama bursa dimana saham Bank dicatatkan.

Bank BPD Bali is not a public company and does not have its shares listed on the Indonesia Stock Exchange. As a result, Bank BPD Bali does not provide details such as the chronological information of any share listing, the types of corporate actions that lead to changes in the number of shares, or the changes in share quantity from the inception of listing to the end of the fiscal year. Additionally, it does not disclose the name of the exchange where the Bank's shares would be listed if applicable.

Namun demikian, Bank BPD Bali menjelaskan penambahan modal disetor oleh pemegang saham yang terjadi dalam 2 (dua) tahun terakhir dan telah dilaporkan sebagai berikut:

However, Bank BPD Bali does provide information regarding the increases in paid-in capital by shareholders over the past two years, as follows:

- Penambahan modal disetor oleh Pemerintah Provinsi Bali sebanyak 75.000 lembar saham atau bernilai nominal sebesar Rp75.000.000.000 sehingga sekarang menjadi sebanyak 719.912 lembar saham atau bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp719.912.000.000 berdasarkan akta No. 47 tanggal 22 Februari 2023.
- The Bali Provincial Government contributed an additional 75,000 shares, totaling a nominal value of Rp75,000,000,000. This brings the total to 719,912 shares, with a cumulative nominal value of Rp719,912,000,000, based on deed No. 47 dated February 22, 2023.
- Penambahan modal disetor oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) lembar saham atau bernilai nominal sebesar Rp1.500.000.000 sehingga sekarang menjadi sebanyak 42.550 lembar saham atau bernilai nominal Rp42.550.000.000 berdasarkan akte No.25 tanggal 12 Mei 2023.
- The Karangasem Regency Government provided an additional 1,500 shares, with a nominal value of Rp1,500,000,000. This results in a total of 42,550 shares and a nominal value of Rp42,550,000,000, according to deed No. 25 dated May 12, 2023.
- Penambahan modal disetor oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng sebanyak 5.557 lembar saham atau bernilai nominal sebesar Rp5.557.000.000 sehingga sekarang menjadi sebanyak 80.000 lembar saham atau bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp80.000.000.000 berdasarkan akta No.27 tanggal 13 Juli 2023.
- The Buleleng Regency Government added 5,557 shares, amounting to a nominal value of Rp5,557,000,000, bringing the total to 80,000 shares and a total nominal value of Rp80,000,000,000, as stated in deed No. 27 dated July 13, 2023.
- Penambahan modal disetor oleh Pemerintah Kota Denpasar sebanyak 30.000 lembar saham atau bernilai nominal sebesar Rp30.000.000.000
- The Denpasar City Government contributed 30,000 shares, valued at Rp30,000,000,000, resulting in a total of 214,476 shares with a

sehingga sekarang menjadi sebanyak 214.476 lembar saham atau bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp214.476.000.000 berdasarkan akta No.38 tanggal 22 November 2023.

- Penambahan modal disetor oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar sebanyak 70.396 lembar saham atau bernilai nominal sebesar Rp70.396.000.000 sehingga sekarang menjadi sebanyak 100.000 lembar saham atau bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp100.000.000.000 berdasarkan akta No.15 tanggal 13 Mei 2024
- Penambahan modal disetor oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem sebanyak 1.000 lembar saham atau bernilai nominal sebesar Rp1.000.000.000 sehingga sekarang menjadi sebanyak 43.550 lembar saham atau bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp43.550.000.000 berdasarkan akta No.36 tanggal 23 Juli 2024
- Penambahan modal disetor oleh Pemerintah Kota Denpasar sebanyak 85.524 lembar saham atau bernilai nominal sebesar Rp85.524.000.000 sehingga sekarang menjadi sebanyak 300.000 lembar saham atau bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp300.000.000.000 berdasarkan akta No.31 tanggal 23 Oktober 2024.
- Penambahan modal disetor oleh Pemerintah Kabupaten Badung sebanyak 200.000 lembar saham atau bernilai nominal sebesar Rp200.000.000.000 sehingga sekarang menjadi sebanyak 1.050.617 lembar saham atau berniali nominal seluruhnya sebesar Rp1.050.617.000.000 berdasarkan akta No 78 tanggal 24 Desember 2024

Keterangan lebih lengkap terkait hal ini dapat dilihat di catatan laporan keuangan tentang modal saham.

total nominal value of Rp214,476,000,000, based on deed No. 38 dated November 22, 2023.

- *Additional paid-in capital by the Government of Gianyar Regency of 70.396 shares or with a total nominal value of Rp70.396 billion to 100.000 shares or with a total nominal value of Rp100.000 billion pursuant to Instrument No.15 dated May 13, 2024.*
- *Additional paid-in capital by the Government of Karangasem Regency by 1,000 shares or with a total nominal value of Rp1,000,000,000 to 43,550 shares or with a total nominal value of Rp43,550,000,000 pursuant to Instrument No. 36 dated July 23, 2024.*
- *Additional paid-in capital by the Denpasar City Government of 85,524 shares or with a total nominal value of Rp85,524,000,000 to become 300,000 shares or with a total nominal value of Rp300,000,000,000 pursuant to Instrument No. 31 dated October 23, 2024.*
- *Additional paid-in capital by the Badung Regency Government is 200,000 shares or with a nominal value of Rp200,000,000,000, so that now it is 1,050,617 shares or with a total nominal value of Rp1,050,617,000,000 based on deed No. 78 dated December 24, 2024.*

For further information, please refer to the notes to the financial statements on share capital.

Kronologis Penerbitan Efek Lainnya

Chronology of Other Securities Issuance

Bank BPD Bali tidak menerbitkan efek lainnya hingga periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Oleh karena itu, Bank tidak menyajikan informasi tentang nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, tanggal jatuh tempo efek lainnya, nilai penawaran efek lainnya, nama bursa di mana efek lainnya dicatatkan, dan peringkat efek.

Bank BPD Bali did not issue other securities until the period ending December 31, 2024. Therefore, The Bank did not provide information about other securities' names, year of issuance, interest rates/yields, maturity dates, offering value, the name of the exchange on which other securities are listed, and their ratings.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Supporting Institutions and Professions in The Capital Market

Bank BPD Bali hanya menyajikan informasi terkait profesi penunjang pasar modal yang terdiri dari kantor akuntan publik (KAP) dan notaris sedangkan informasi tentang lembaga penunjang pasar modal tidak relevan karena Bank BPD Bali belum mencatatkan efek apapun di Bursa Efek Indonesia.

Bank BPD Bali provides information exclusively about capital market-supporting professions, including public accounting firms (KAP) and notaries. Information regarding capital market-supporting institutions is not applicable, as Bank BPD Bali has not listed any securities on the Indonesia Stock Exchange.

Profesi Penunjang Pasar Modal Capital market-Supporting Professions	Nama & Alamat Name & Address	Jenis dan Bentuk Jasa Types and Form of Service	Periode Penugasan Assignment Period
Profesi Penunjang Pasar Modal			
Kantor Akuntan Publik	KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (Kreston Indonesia) Intiland Tower 18th floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 32, Jakarta 10220 T: +62 21 571 2000 F: +62 21 570 6118 www.kreston.co.id	Audit umum atas Laporan Keuangan Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. <i>General audit of the Bank's Financial Statements for the year ended December 31, 2024.</i>	2024
Notaris	I Made Widiada, S.H. Jl. A. Yani 125 Denpasar, Bali T: +62 361 423071, 424341	Jasa Notaris <i>Notary Services</i>	2024

INFORMASI WEBSITE PERUSAHAAN

Information on The Company's Website



Bank BPD Bali berkomitmen membuat dan mengelola *webite* yakni <https://www.bpd Bali.co.id/> dengan berpedoman pada POJK No.8/POJK.04/2015 tentang *website* emiten atau perusahaan publik. Situs Bank telah dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris tersebut tersebut merefleksikan komitmen Perusahaan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta meningkatkan pelaksanaan Tata Kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) khususnya kepada pemegang saham, nasabah, masyarakat, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 POJK No. 8/POJK.4/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, Bank BPD Bali telah menyajikan informasi di *website* terkait dengan informasi sebagai berikut:

1. Informasi Umum tentang Bank;
2. Informasi bagi Pemodal atau Investor;
3. Informasi Tata Kelola Perusahaan; dan
4. Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Keberlanjutan).

Bank BPD Bali is dedicated to developing and managing its website, accessible at <https://www.bpd Bali.co.id/>, in accordance with POJK No. 8/POJK.04/2015, which pertains to the websites of issuers or public companies. The Bank's website is available in both Indonesian and English, demonstrating the Company's commitment to implementing Law Number 8 of 1995 regarding the Capital Market and enhancing Good Corporate Governance, particularly for shareholders, customers, the community, government, and other stakeholders.

In compliance with Article 6 of POJK No. 8/POJK.4/2015 concerning the websites of issuers or public companies, Bank BPD Bali has made the following information available on its website:

1. *General Information about the Bank;*
2. *Information for Investors;*
3. *Corporate Governance Information;*
4. *Corporate Social Responsibility Information (Sustainability).*



SIBAPA

S VALAS

LAST UPDATE 2025-02-17 15:26:09 WITA

EUR : Buy = 16770 | Sell = 17270



Simulasi



Kontak Kami



Kurs



E-Banking



Temukan Kami



Pengumuman

Simpanan Bali Dwipa (SIBAPA) adalah simpanan dalam bentuk mata uang Rupiah yang pembukaan, penyetoran, dan penarikannya dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang Bank BPD Bali. Fasilitas yang didapat oleh nasabah antara lain : E-Banking, Internet Banking, dan ATM untuk dapat melakukan transaksi secara real time online. Nasabah SIBAPA juga dapat kesempatan untuk mengikuti Undian Gong Bali Dwipa yang pengundiannya dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali. Untuk informasi lebih lengkap silahkan [KLIK DISINI](#)

Penjelasan lebih rinci terkait informasi yang dapat diperoleh para pemangku kepentingan di *website* Bank BPD Bali yang terdiri dari 9 (sembilan) *header* yakni simpanan, pinjaman, *treasury*, *e-banking* dan investasi yang menjelaskan tentang beragam produk dan layanan Bank.

Header Perusahaan menyajikan informasi tentang Bank BPD Bali, Tata Kelola Perusahaan, Laporan Publikasi, dan Informasi Keuangan. Bank telah menyajikan informasi laporan tahunan, laporan dan laporan keuangan secara terpisah. Selain itu, Bank BPD Bali juga menyajikan secara terpisah laporan keuangan publikasi bulanan, triwulanan, dan auditan selain laporan rasio LCR dan NSFR serta laporan lainnya.

Untuk meningkatkan transparansi, Bank BPD Bali juga menyajikan informasi tentang Lelang dan kontak yang salah satunya memberikan ruang untuk pengaduan nasabah.

The Bank BPD Bali website provides detailed information organized under nine headers: savings, loans, treasury, e-banking, and investment, which describe the various products and services offered by the Bank.

The "Company" section includes information about Bank BPD Bali, details on Corporate Governance, published reports, and financial information. The Bank offers annual reports and financial statements separately, as well as monthly, quarterly, and audited published financial reports. Additionally, it provides specific reports on the LCR (Liquidity Coverage Ratio) and NSFR (Net Stable Funding Ratio), along with other relevant reports.

To enhance transparency, Bank BPD Bali also features information about Auctions and provides contact options, including a space for customer complaints.



DAFTAR ALAMAT JARINGAN KANTOR

List of Office Network Addresses

Tabel berikut menyajikan informasi daftar Alamat jaringan kantor Bank BPD Bali per 31 Desember 2024:

The following table provides details on the list of network addresses of Bank BPD Bali offices as of December 31, 2024:

Cabang Branch	Nama Kantor Office Name	Jenis Kantor Type of Office	Alamat Address
Kantor Pusat	Bank BPD Bali Kantor Pusat	Kantor Pusat	Jalan Raya Puputan Niti Mandala Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar Bali 80235
Cabang Badung	Cabang Badung	Cabang Kelas 3	Jalan Bakung Sari No. 1 Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kab. Badung Bali 80361
	Capem Bandara Ngurah Rai	Capem Kelas 5	Jalan Kediri Blok IB/43 Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta Kab. Badung Bali 80352
	Capem Cangu	Capem Kelas 5	Jalan Raya Cangu-Tanah Lot Banjar Aseman Kawan Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kab. Badung Bali 80361
	Capem Legian	Capem Kelas 3	Jalan Raya Kerobokan No. 106 Kelurahan Kerobokan Kelod Kecamatan Kuta Utara Kab. Badung Bali 80361
	Capem Legian II	Capem Kelas 5	Jalan Legian No. 494 Desa Legian Kaja Kecamatan Kuta Kab. Badung Bali 80361
	Capem Ngurah Rai	Capem Kelas 3	Jalan By Pass Ngurah Rai Komp. Pertokoan Segitiga Emas Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kab. Badung Bali 80361
	Capem Nusa Dua	Capem Kelas 1	Komp Pertokoan Niaga Blok No. 10 Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kab. Badung Bali 80362
	Capem Politeknik Negeri Bali	Capem Kelas 5	Politeknik Negeri Bali Bukit Jimbaran Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kab. Badung Bali 80361
	Capem Tegal Buah	Capem Kelas 4	Jalan Teuku Umar Barat Banjar Tegal Lantang Kelod Desa Padangsambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Bali 80117
	KPK Gerai Samsat Mumbul	KPK Permanen (Samsat)	Jalan By Pass Ngurah Rai Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kab. Badung Bali 80361
	KPK Tanjung Benoa	KPK Permanen	Jalan Pratama No 25 Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kab. Badung Bali 80361
	KPK UPT Samsat Kuta	KPK Permanen (Samsat)	Jalan Bypass Ngurah Rai Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta Kab. Badung Bali 80361
Cabang Bangli	Cabang Bangli	Cabang Kelas 3	Jalan Mojopahit No. 1 Desa Kawan Kecamatan Bangli Kab. Bangli Bali 80613
	Capem Kawan Bangli	Capem Kelas 5	Jalan Brigjen Ngurah Rai No. 20 Lingkungan Kawan Kelurahan Kawan Kecamatan Bangli Kab. Bangli Bali 80613
	Capem Kayu Ambua	Capem Kelas 5	Jalan Sribatu Komplek Pasar Kayu Ambua Desa Tiga Kecamatan Susut Kab. Bangli Bali 80652
	Capem Kintamani	Capem Kelas 3	Jalan Raya Kintamani Desa Kintamani Kecamatan Kintamani Kab. Bangli Bali 80652
	Capem Penelokan	Capem Kelas 5	Jalan Raya Penelokan Desa Kedisan Kecamatan Kintamani Kab. Bangli Bali 80652
	Capem Tembuku	Capem Kelas 5	Jalan Besakih No. 1 Desa Tembuku Kecamatan Tembuku Kab. Bangli Bali 80671
	KPK Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bangli	KPK Permanen (Instansi)	Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bangli, Jalan Brigjen Ngurah Rai, Desa Kawan Kecamatan Bangli Kab. Bangli Bali 80613
	KPK UPT Samsat Bangli	KPK Permanen (Samsat)	Jalan Lettu Kanten 11 Desa Kawan Kecamatan Bangli Kab. Bangli Bali 80613

Cabang Branch	Nama Kantor Office Name	Jenis Kantor Type of Office	Alamat Address
Cabang Gianyar	Cabang Gianyar	Cabang Kelas 3	Jalan By Pass Dharma Giri Kelurahan Gianyar Kecamatan Gianyar Kab. Gianyar Bali 80511
	Capem Batubulan	Capem Kelas 5	Jalan Raya Batubulan No. 104 Banjar Batur Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kab. Gianyar Bali 80582
	Capem Blahbatuh	Capem Kelas 5	Jalan Wisma Gajah Mada Banjar Laud Desa Blahbatuh Kecamatan Blahbatuh Kab. Gianyar Bali 80581
	Capem I.B. Mantra	Capem Kelas 5	Jalan Raya By Pass Prof Dr I.B. Mantra No. 99X Desa Ketewel Kecamatan Sukawati Kab. Gianyar Bali 80582
	Capem Ngurah Rai Gianyar	Capem Kelas 5	Jalan Ngurah Rai No. 17 Kelurahan Gianyar Kecamatan Gianyar Kab. Gianyar Bali 80511
	Capem Sukawati	Capem Kelas 2	Jalan Raya Sukawati No. 96X Banjar Peninjoan Desa Batuan Kecamatan Sukawati Kab. Gianyar Bali 80582
	Capem Tampaksiring	Capem Kelas 4	Jalan Dr. Ir. Soekarno Banjar Buruan Desa Tampaksiring Kecamatan Tampaksiring Kab. Gianyar Bali 80552
	KPK Dispenda Gianyar	KPK Permanen (Instansi)	Jalan Ciung Wenara No. 16 Kelurahan Gianyar Kecamatan Gianyar Kab. Gianyar Bali 80511
	KPK Mal Pelayanan Publik Pemkab Gianyar	KPK Permanen (Instansi)	Jalan Udayana, Desa Buruan Kecamatan Gianyar Kab. Gianyar Bali 80581
	KPK Mobil Gianyar	KPK Berpindah	Jalan By Pass Dharma Giri Kelurahan Gianyar Kecamatan Gianyar Kab. Gianyar Bali 80511
	KPK RSUD Sanjiwani	KPK Permanen (Instansi)	Jalan Ciung Wanara No. 2 Kelurahan Gianyar Kecamatan Gianyar Kab. Gianyar Bali 80511
	KPK UPT Samsat Gianyar	KPK Permanen (Samsat)	Jalan Raya Samplangan Kelurahan Samplangan Kecamatan Gianyar Kab. Gianyar Bali 80512
Cabang Karangasem	Cabang Karangasem	Cabang Kelas 3	Jalan Ahmad Yani Kelurahan Subagan Kecamatan Karangasem Kab. Karangasem Bali 80813
	Capem Abang	Capem Kelas 5	Jalan Raya Desa Culik Kecamatan Abang Kab. Karangasem Bali 80852
	Capem Amlapura	Capem Kelas 4	Jalan Diponegoro Kelurahan Karangasem Kecamatan Karangasem Kab. Karangasem Bali 80811
	Capem Bebandem	Capem Kelas 5	Desa Bebandem Kecamatan Bebandem Kab. Karangasem Bali 80861
	Capem Candidasa	Capem Kelas 3	Jalan Raya Candidasa Banjar Samuh Desa Bugbug Kecamatan Karangasem Kab. Karangasem Bali 80811
	Capem Kubu	Capem Kelas 5	Jalan Raya Kubu Banjar Dinas Kubu Kangin Kecamatan Kubu Kab. Karangasem Bali 80853
	Capem Menanga	Capem Kelas 4	Desa Menanga Kecamatan Rendang Kab. Karangasem Bali 80863
	Capem Padangbai	Capem Kelas 5	Jalan Raya Ulakan Banjar Kodok Desa Ulakan Kecamatan Manggis Kab. Karangasem Bali 80871
	Capem Selat	Capem Kelas 3	Desa Duda Kecamatan Selat Kab. Karangasem Bali 80862
	Capem Sidemen	Capem Kelas 5	Jalan Raya Sidemen Dinas Sindubali Desa Sinduwati Kecamatan Sidemen Kab. Karangasem Bali 80864
	KPK Besakih	KPK Permanen	Areal Pura Agung Besakih, Desa Besakih Kecamatan Rendang Kab. Karangasem Bali 80863
	KPK Mobil Karangasem	KPK Berpindah	Jalan Ahmad Yani Kelurahan Subagan Kecamatan Karangasem Kab. Karangasem Bali 80813
	KPK Pemkab Karangasem	KPK Permanen (Instansi)	Mall Pelayanan Publik Karangasem Jalan Gajah Mada Kelurahan Subagan Kecamatan Karangasem Kab. Karangasem Bali 80811
	KPK UPT Samsat Karangasem	KPK Permanen (Samsat)	Jalan Ahmad Yani Kelurahan Subagan Kecamatan Karangasem Kab. Karangasem Bali 80813



Cabang Branch	Nama Kantor Office Name	Jenis Kantor Type of Office	Alamat Address
Cabang Klungkung	Cabang Klungkung	Cabang Kelas 4	Jalan Gajah Mada No.4 Kelurahan Semarapura Kelod Kecamatan Klungkung Kab. Klungkung Bali 80716
	Capem Jungutbatu	Capem Kelas 5	Jalan Menara Banjar Kaja Desa Jungutbatu Kecamatan Nusa Penida Kab. Klungkung Bali 80771
	Capem Kusamba	Capem Kelas 5	Jalan Raya Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kab. Klungkung Bali 80761
	Capem Nusa Penida	Capem Kelas 3	Jalan Nusa Indah Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kab. Klungkung Bali 80771
	KPK Mal Pelayanan Publik Kabupaten Klungkung	KPK Permanen (Instansi)	Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Klungkung, Jalan Gajah Mada, Kelurahan Semarapura Tengah Kecamatan Klungkung Kab. Klungkung Bali 80711
	KPK Pasar Galiran Klungkung	KPK Permanen	Jalan Puputan N.108 Blok B Kelurahan Semarapura Klod Kecamatan Klungkung Kab. Klungkung Bali 80714
	KPK RSUD Kabupaten Klungkung	KPK Permanen (Instansi)	Jalan Flamboyan No.40 Kelurahan Semarapura Kauh Kecamatan Klungkung Kab. Klungkung Bali 80714
	KPK UPT Samsat Klungkung	KPK Permanen (Samsat)	Jalan Ngurah Rai No.3 Kelurahan Semarapura Tengah Kecamatan Klungkung Kab. Klungkung Bali 80712
	KPK UPT Samsat Nusa Penida	KPK Permanen (Samsat)	Jalan Nusa Indah Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Kab. Klungkung Bali 80771
Cabang Mangupura	Cabang Mangupura	Cabang Kelas 3	Jalan Raya Sempidi Kelurahan Sempidi Kecamatan Mengwi Kab. Badung Bali 80351
	Capem Abianbase	Capem Kelas 5	Jalan Raya Abianbase Kelurahan Abianbase Kecamatan Mengwi Kab. Badung Bali 80351
	Capem Abiansemal	Capem Kelas 2	Jalan Raya Blahkiuh Banjar Delod Pasar Desa Blahkiuh Kecamatan Abiansemal Kab. Badung Bali 80352
	Capem Gatot Subroto Barat	Capem Kelas 1	Jalan Gatot Subroto Barat No. 14 Kelurahan Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara Kab. Badung Bali 80116
	Capem Kerobokan	Capem Kelas 5	Jalan Gunung Sanghyang No. 45 X Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kab. Badung Bali 80361
	Capem Mambal	Capem Kelas 5	Jalan Raya Mambal Banjar Dinas Mambal Kajian Desa Mambal Kecamatan Abiansemal Kab. Badung Bali 80352
	Capem Mengwi	Capem Kelas 1	Komplek Pasar Beringkit Desa Mengwitani Kecamatan Mengwi Kab. Badung Bali 80351
	Capem Munggu	Capem Kelas 5	Jalan By Pass Tanah Lot Desa Munggu Kecamatan Mengwi Kab. Badung Bali 80351
	Capem Petang	Capem Kelas 5	Jalan Raya I Gst Ngurah Rai Desa Petang Kecamatan Petang Kab. Badung Bali 80353
	Capem Puspem Badung	Capem Kelas 5	Jalan Raya Sempidi Kelurahan Sempidi Kecamatan Mengwi Kab. Badung Bali 80351
	Capem Sembung	Capem Kelas 5	Komplek Pertokoan Desa Sembung Jalan Raya Denpasar-Singaraja Desa Sembung Kecamatan Mengwi Kab. Badung Bali 80351
	KPK Gerai Samsat Dalung	KPK Permanen (Samsat)	Jalan Raya Padang Luwih Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kab. Badung Bali 80361
	KPK RSUD Badung	KPK Permanen (Instansi)	Jalan Raya Kapal Desa Kapal Kecamatan Mengwi Kab. Badung Bali 80351

Cabang Branch	Nama Kantor Office Name	Jenis Kantor Type of Office	Alamat Address
	KPK UPT PHR Badung	KPK Permanen (Instansi)	Dispenda Kab Badung Jl. Raya Sempidi Kelurahan Sempidi Kecamatan Mengwi Kab. Badung Bali 80115
	KPK UPT Samsat Mengwi	KPK Permanen (Samsat)	Jalan I Gusti Ngurah Rai Desa Mengwitani Kecamatan Mengwi Kab. Badung Bali 80351
Cabang Mataram	Cabang Mataram	Cabang Kelas 4	Jalan Pejanggik No. 92 B-D Kelurahan Pejanggik Kecamatan Mataram Kota Mataram Nusa Tenggara Barat 83127
	Capem Tanjung, Lombok Utara	Capem Kelas 4	Jalan Raya Tanjung Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kab. Lombok Utara Nusa Tenggara Barat 83352
Cabang Negara	Cabang Negara	Cabang Kelas 3	Jalan Gatot Subroto No. 24 Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Negara Kab. Jembrana Bali 82216
	Capem Gilimanuk	Capem Kelas 4	Jalan Raya Pelabuhan Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kab. Jembrana Bali 82252
	Capem Melaya	Capem Kelas 5	Jalan Raya Denpasar Gilimanuk Banjar Pasar Desa Melaya Kecamatan Melaya Kab. Jembrana Bali 82252
	Capem Pekutatan	Capem Kelas 3	Jalan Raya Pekutatan Desa Pekutatan Kecamatan Pekutatan Kab. Jembrana Bali 82262
	Capem Yeh Embang	Capem Kelas 5	Desa Yeh Embang Kecamatan Mendoyo Kab. Jembrana Bali 82261
	KPK Gerai Samsat Gilimanuk	KPK Permanen (Samsat)	Jalan Raya Pelabuhan Gilimanuk Desa Gilimanuk Kecamatan Melaya Kab. Jembrana Bali 82252
	KPK Mal Pelayanan Publik Pemkab Jembrana	KPK Permanen (Instansi)	Jalan Udayana, Kelurahan Baler Bale Agung Kecamatan Negara Kab. Jembrana Bali 82212
	KPK Mobil Negara	KPK Berpindah	Jalan Gatot Subroto No.24 Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Negara Kab. Jembrana Bali 82216
	KPK UPT Samsat Jembrana	KPK Permanen (Samsat)	Jalan Raya Gilimanuk Denpasar Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kab. Jembrana Bali 82252
Cabang Renon	Cabang Renon	Cabang Kelas 2	Jalan Raya Puputan Niti Mandala Kelurahan Sumerta Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar Bali 80235
	Capem Dispenda	Capem Kelas 5	Dispenda Provinsi Bali Jalan Cok Agung Tresna Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar Bali 80235
	Capem Gubernur	Capem Kelas 5	Jalan Basuki Rahmat Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar Bali 80235
	Capem Renon	Capem Kelas 5	Jalan Tukad Bilok No. 100 Kelurahan Renon Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Bali 80226
	Capem Sanur	Capem Kelas 1	Jalan Ngurah Rai Ruko Sanur Raya XXIV Desa Sanur Kaja Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Bali 80227
	Capem Tohpati	Capem Kelas 3	Jalan W.R. Supratman No. 303C Desa Kesiman Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar Bali 80237
	Capem Warmadewa	Capem Kelas 4	Jalan Terompong No. 36 Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar Bali 80239
	KPK Bandara Ngurah Rai	KPK Permanen	Areal Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta Kab. Badung Bali 80362
	KPK Mobil Renon	KPK Berpindah	Jalan Raya Puputan Niti Mandala Kelurahan Sumerta Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar Bali 80235
	KPK RS Bali Mandara	KPK Permanen (Instansi)	Jalan By Pass Ngurah Rai No 548 Desa Sanur Kauh Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Bali 80227



Cabang Branch	Nama Kantor Office Name	Jenis Kantor Type of Office	Alamat Address
Cabang Seririt	KPK Samsat Pembantu Sesetan	KPK Permanen (Samsat)	Kantor Samsat Pembantu Sesetan, Jalan Raya Sesetan Nomor 516 Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Bali 80223
	KPK Samsat Polda Bali	KPK Permanen (Instansi)	Jl. W.R. Supratman No. 6, Desa Dangin Puri Kangin Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar Bali 80233
	KPK Undiknas	KPK Permanen (Instansi)	Jalan Bedugul No. 39 Sidakarya Denpasar Selatan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Bali 80224
	Cabang Seririt	Cabang Kelas 4	Jalan Jendral Sudirman No. 1 Kelurahan Seririt Kecamatan Seririt Kab. Buleleng Bali 81153
	Capem Banyuatis	Capem Kelas 5	Desa Banyuatis Kecamatan Banjar Kab. Buleleng Bali 81152
	Capem Pupuan	Capem Kelas 4	Komplek Terminal Pasar Pupuan Desa Pupuan Kecamatan Pupuan Kab. Tabanan Bali 82163
	Capem Sumberkima	Capem Kelas 5	Desa Sumberkima Kecamatan Gerokgak Kab. Buleleng Bali 81155
Cabang Singaraja	KPK Gerai Samsat Pupuan	KPK Permanen (Samsat)	Komplek Terminal Pasar Pupuan Desa Pupuan Kecamatan Pupuan Kab. Tabanan Bali 82163
	KPK Gerai Samsat Seririt	KPK Permanen (Samsat)	Jalan Raya Seririt-Singaraja Kelurahan Seririt Kecamatan Seririt Kab. Buleleng Bali 81155
	KPK Mobil Seririt	KPK Berpindah	Jalan Jendral Sudirman No.1 Kelurahan Seririt Kecamatan Seririt Kab. Buleleng Bali 81153
	Cabang Singaraja	Cabang Kelas 3	Jalan Dewi Sartika No. 30 Kelurahan Kaliuntu Kecamatan Buleleng Kab. Buleleng Bali 81116
	Capem Ahmad Yani Singaraja	Capem Kelas 5	Jalan Jendral Ahmad Yani No. 56 Kelurahan Banyuasri Kecamatan Buleleng Kab. Buleleng Bali 81116
	Capem Lovina	Capem Kelas 4	Jalan Raya Seririt Desa Kalibukbuk Kecamatan Buleleng Kab. Buleleng Bali 81119
	Capem Pasar Buleleng	Capem Kelas 5	Jalan Mayor Metra Kelurahan Kampung Singaraja Kecamatan Buleleng Kab. Buleleng Bali 81119
	Capem Sawan	Capem Kelas 5	Jalan Raya Kerobokan Desa Kerobokan Kecamatan Sawan Kab. Buleleng Bali 81171
	Capem Tamblang	Capem Kelas 3	Jalan Raya Kubutambahan Air Sanih Desa Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan Kab. Buleleng Bali 81172
	Capem Tejakula	Capem Kelas 5	Jalan Raya Singaraja Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kab. Buleleng Bali 81173
	KPK BRSU Tabanan	KPK Permanen (Instansi)	Jalan Pahlawan No 14 Desa Delod Peken Kecamatan Tabanan Kab. Tabanan Bali 82121
	KPK Gerai Samsat Baturiti	KPK Permanen (Samsat)	Jalan Raya Denpasar-Singaraja Desa Baturiti Kecamatan Baturiti Kab. Tabanan Bali 82191
	KPK Mall Pelayanan Publik Kabupaten Tabanan	KPK Permanen (Instansi)	Jalan Gatot Subroto II, Desa Banjar Anyar Kecamatan Kediri Kab. Tabanan Bali 82123
	KPK Pancasari	KPK Permanen	Jalan Desa Pancasari Kecamatan Sukasada Kab. Buleleng Bali 81161
	KPK UPT Samsat Bajra	KPK Permanen (Samsat)	Jalan Ngurah Rai Bajera Desa Bajera Kecamatan Selemadeg Kab. Tabanan Bali 82162
	KPK UPT Samsat Tabanan	KPK Permanen (Samsat)	Jalan Katamso No.6 Desa Delod Peken Kecamatan Tabanan Kab. Tabanan Bali 82114
Cabang Ubud	Cabang Ubud	Cabang Kelas 4	Jalan Raya Ubud No. 44 Kelurahan Ubud Kecamatan Gianyar Kab. Gianyar Bali 80571
	Capem Payangan	Capem Kelas 3	Banjar Pengaji Desa Melinggih Klod Kecamatan Payangan Kab. Gianyar Bali 80572
	KPK Tegallalang	KPK Permanen	Banjar Tegallalang, Desa Tegallalang Kecamatan Tegallalang Kab. Gianyar Bali 80561
	KPK UPT Samsat Ubud	KPK Permanen (Samsat)	Pasar Sindhu Desa Sayan Kecamatan Ubud Kab. Gianyar Bali 80571

Cabang Branch	Nama Kantor Office Name	Jenis Kantor Type of Office	Alamat Address
Cabang Utama Denpasar	Cabang Utama Denpasar	Cabang Kelas 1	Jalan Gajah Mada No. 6 Desa Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar Bali 80111
	Capem Bali Med Denpasar	Capem Kelas 5	Jalan Mahendradatta No. 139 Kelurahan Padangsembian Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Bali 80118
	Capem Fak Ekonomi UNUD	Capem Kelas 2	Jalan Ir. I.B. Oka Kelurahan Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Bali 80225
	Capem Gatot Subroto	Capem Kelas 2	Jalan Gatot Subroto No. 268 Blok E-F Kelurahan Tonja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar Bali 80239
	Capem Gunung Agung	Capem Kelas 5	Jalan Gunung Agung No. 133 Kelurahan Pemecutan Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Bali 80119
	Capem Kamboja	Capem Kelas 2	Plaza Pos Kamboja Jalan Kamboja No. 6 Desa Dangin Puri Kangin Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar Bali 80233
	Capem Monang-Maning	Capem Kelas 3	Jalan Gunung Batukaru No. 49A Kelurahan Pemecutan Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Bali 80119
	Capem Peguyangan	Capem Kelas 5	Jalan Ahmad Yani Banjar Den Yeh Desa Peguyangan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar Bali 80115
	Capem Pemogan	Capem Kelas 5	Jalan Raya Pemogan No. 102 Kelurahan Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Bali 80221
	Capem Penatih	Capem Kelas 5	Jalan Padma Kelurahan Penatih Denpasar Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar Bali 80238
	Capem RSUD Wangaya	Capem Kelas 5	Jalan Kartini Denpasar (RSUD Wangaya) Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar Bali 80111
	Capem RSUP Sanglah	Capem Kelas 5	Jalan Pulau Nias (RSUP Sanglah) Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Bali 80114
	Capem Sesetan	Capem Kelas 3	Jalan Raya Sesetan No. 644-646 Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Bali 80222
	Capem Teuku Umar	Capem Kelas 1	Jalan Teuku Umar No. 246 Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Bali 80119
	Capem Ubung	Capem Kelas 3	Jalan Cokroaminoto No. 96 Kelurahan Ubung Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar Bali 80116
	Capem Uma Anyar	Capem Kelas 5	Jalan Gunung Galunggung (Pasar Batu Kandik) Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar Bali 80116
	KPK Dispenda Denpasar	KPK Permanen (Instansi)	Jalan Letda Tantular No.12 Desa Dangin Puri Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar Bali 80235
	KPK Gerai Samsat Penatih	KPK Permanen (Samsat)	Jalan Padma No. 35 Desa Penatih Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar Bali 80238
	KPK Mobil Denpasar	KPK Berpindah	Jalan Gajah Mada No.6 Desa Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Bali 80111
	KPK Nusa Barung	KPK Permanen	Jalan Nusa Barung Desa Dauh Puri kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Bali 80114
	KPK Pasar Kumbasari	KPK Permanen	Jalan Sulawesi No 1 Desa Dauh Puri Kangin Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Bali 80112
	KPK UPT Pelayanan Catatan Sipil	KPK Permanen (Instansi)	Jalan Majapahit Lumintang Kelurahan Peguyangan Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar Bali 80111



03

Laporan **MANAJEMEN** *Management Report*





LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Report of the Board of Commissioners



I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.

Komisaris Utama Independen | *Independent President Commissioner*

Pencapaian kinerja Bank BPD Bali yang di atas target selaras dengan implementasi strategi dan pengelolaan Bank secara baik dan efektif yang diperkuat dengan penerapan praktik-praktik terbaik atas prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik dan Pilar Governansi Korporat pada seluruh jenjang organisasi Bank.

Bank BPD Bali's above target performance is in line with the good and effective implementation of the Bank's strategy and management. This is strengthened by the application of best practices in the principles of good governance and the pillars of corporate governance at all levels of the Bank's organization.

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Kami mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, PT Bank Pembangunan Daerah Bali (selanjutnya disebut "Bank BPD Bali" atau "Bank") berhasil melalui tahun 2024 dengan capaian kinerja yang lebih baik terkait pengelolaan Bank didukung oleh rekam jejak yang panjang dan teruji serta keunggulan kompetitif Bank BPD Bali yang memiliki *captive market* di provinsi Bali dan inovasi layanan perbankan digital.

Dewan Komisaris telah menunaikan tugas dan tanggung jawabnya secara kolegial dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan Bank BPD Bali, memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank sepanjang tahun 2024. Dewan Komisaris senantiasa menegakkan integritas dan bertindak secara profesional serta menjaga independensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan, Anggaran Dasar, Pedoman Tata Kelola, dan *Board Charter* Dewan Komisaris Bank BPD Bali.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini, kami menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan terkait pelaksanaan tugas pengawasan atas pengelolaan Bank BPD Bali, serta pemberian nasihat kepada Direksi terkait implementasi strategi dan tata kelola Bank untuk tahun buku 2024.

Our Esteemed Shareholders and Stakeholders,

We express our gratitude to the presence of God Almighty, for the blessings of His grace and blessings, PT Bank Pembangunan Daerah Bali (hereinafter referred to as "Bank BPD Bali" or "Bank") has successfully gone through 2024 with better performance achievements in terms of bank management supported by a long and proven track record and competitive advantages of Bank BPD Bali, which has a captive market in the province of Bali and innovation in digital banking services.

The Board of Commissioners has fulfilled its duties and responsibilities collegially in exercising its oversight function over the policies and management of Bank BPD Bali, advising the Board of Directors and ensuring the implementation of integrated governance, risk management and compliance and the Bank's strategic policies throughout 2024. The Board of Commissioners always upholds integrity, acts professionally and maintains independence in the performance of its duties and responsibilities with reference to the provisions of laws and regulations, the Articles of Association, the Governance Guidelines and the Board Charter of the Board of Commissioners of Bank BPD Bali.

In this regard, on this occasion, we submit a report on the implementation of duties and responsibilities as the Board of Commissioners to the shareholders and stakeholders regarding the implementation of oversight duties over the management of Bank BPD Bali and providing advice to the Board of Directors on the implementation of the Bank's strategy and governance for the financial year 2024.

Pandangan atas Lingkungan Ekonomi dan Bisnis

An Overview of The Economic and Business Environment

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga, ekspor, dan investasi menjadi katalis pertumbuhan kredit ketika ekonomi tumbuh lebih terbatas

Perlambatan ekonomi dunia tahun 2024 menjadi tantangan global sejalan dengan perubahan lanskap geopolitik dan ekonomi dunia. Krisis geopolitik di berbagai wilayah dunia dan keterpilihan Trump sebagai presiden Amerika menjadi faktor utama telah mengakibatkan ketidakstabilan pasar keuangan dunia khususnya pada kuartal IV tahun 2024. Hal ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi dunia yang tumbuh melambat menjadi 3,2% dari sebesar 3,3% pada tahun 2023. Ekonomi dunia yang tumbuh melambat ini juga dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi negara berkembang ketika ekonomi negara maju tumbuh terbatas.

Dinamika yang terjadi di perekonomian global tersebut turut mempengaruhi ekonomi Indonesia yang tumbuh lebih terbatas menjadi 5,03% yoy pada tahun 2024 dibandingkan sebesar 5,05% pada tahun sebelumnya. Meski demikian, hal yang patut disyukuri adalah perbaikan konsumsi rumah tangga yang berhasil tumbuh sebesar 4,98% yoy pada kuartal IV 2024 setelah mengalami tekanan pada kuartal-kuartal sebelumnya akibat kondisi deflasi selama lima bulan beruntun secara bulanan pada Mei-September 2024. Pada tahun 2024, pengeluaran konsumsi rumah tangga akhirnya tumbuh lebih kuat sebesar 4,94% yoy atau lebih tinggi dibandingkan sebesar 4,82% yoy pada tahun 2023.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga didukung oleh kinerja ekspor barang yang membaik dengan pertumbuhan sebesar 5,78% yoy, jauh lebih tinggi dibandingkan kontraksi ekspor barang sebesar 1,12% yoy pada tahun 2023 berdasarkan data BPS. Sementara itu, investasi atau Pembentukan Modal Tetap *Bruto* (PMTB) tumbuh lebih terbatas menjadi sebesar 3,97% yoy pada tahun 2024 dari 4,40% yoy pada tahun sebelumnya dimana hal ini turut berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih relatif terjaga dengan baik tersebut mampu mendorong pertumbuhan kredit kepada pihak ketiga sebesar 10,39% yoy pada tahun 2024. Pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 sebesar 10,38% yoy tersebut terutama didukung oleh ketersediaan modal yang kuat dengan rasio KPMM sebesar 26,76% dan peningkatan DPK sebesar 4,48%. Pertumbuhan kredit *double digit* tersebut mampu diikuti dengan kualitas aset produktif yang lebih baik dengan rasio NPL sebesar 2,08% dari sebesar 2,19% pada tahun sebelumnya dan di saat yang sama aset industri perbankan tumbuh 5,91%.

Growth in household consumption, exports and investment are catalysts for credit growth as economic growth slows

The global economic slowdown in 2024 is driven by the changing global geopolitical and economic landscape. The geopolitical crisis in various regions of the world and the election of Trump as US president are the main factors that have led to instability in global financial markets, especially in the fourth quarter of 2024. This has an impact on global economic growth, which slows from 3.3% in 2023 to 3.2%. The slowdown in the global economy is also influenced by lower economic growth in developing countries as the economies of developed countries grow at a limited pace.

The dynamics occurring in the global economy also affect Indonesia's economy, which grows more limited to 5.03% yoy in 2024 from 5.05% last year. However, something to be thankful for is the improvement in household consumption, which managed to grow 4.98% yoy in Q4 2024 after being pressured by deflationary conditions for five consecutive months on a monthly basis in May-September 2024. In 2024, household consumption expenditure finally grew stronger at 4.94% yoy compared to 4.82% yoy in 2023.

Indonesia's economic growth is also supported by the improving performance of merchandise exports, which grew by 5.78% yoy, much higher than the 1.12% yoy contraction of merchandise exports in 2023 based on BPS data. Meanwhile, investment or gross fixed capital formation (PMTB) grew at a slower pace to 3.97% yoy in 2024 from 4.40% yoy in the previous year. This also weighed on Indonesia's economic growth.

The relatively well-maintained economic growth performance of Indonesia was able to drive the growth of credit to third parties by 10.39% yoy in 2024. The higher growth from 10.38% yoy in 2023 was mainly supported by strong capital availability with a CAR ratio of 26.76% and an increase in DPK of 4.48%. The double-digit credit growth was accompanied by a better quality of productive assets with an NPL ratio of 2.08% yoy from 2.19% in the previous year and a 5.91% yoy increase in banking industry assets.

Penilaian Terhadap Kinerja Direksi dan Implementasi Strategi Perusahaan

An Overview of The Economic and Business Environment

Pencapaian Kinerja Direksi dan Dasar Penilaiannya

Dewan Komisaris telah menjalankan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Bank BPD Bali serta memberikan nasihat kepada Direksi selama tahun 2024. Fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris juga mencakup pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RKAB), dan Rencana Kerja Jangka Panjang (RJP) dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian untuk kepentingan Bank BPD Bali sesuai dengan Visi dan Misi Bank.

Evaluasi atas pencapaian kinerja Direksi Bank selama tahun 2024 dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan pencapaian kinerja Direksi Bank BPD Bali berdasarkan pemenuhan tugas dan tanggung jawab serta target disusun oleh Direksi yang selaras dengan RBB Bank. Dewan Komisaris memberikan penilaian kepada Direksi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank terutama terkait permodalan, rentabilitas, tata kelola, dan profil risiko.

Dari sisi kinerja keuangan, Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas capaian total aset senilai Rp38,31 triliun pada tahun 2024 atau 104,32% dari target yang ditetapkan. Selain itu, pertumbuhan aset sebesar 11,66% yoy ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata industri sebesar 5,91% yoy. Pertumbuhan aset yang kuat ini didukung oleh penyaluran kredit senilai Rp22,83 triliun atau 99,95% dari target sebesar Rp22,84 triliun.

Meski demikian, hal yang patut diapresiasi adalah pengelolaan aset produktif yang semakin membaik dengan raihan rasio NPL *gross* hanya sebesar 0,92%, lebih baik dibandingkan target sebesar 1,75%. Raihan rasio ini juga jauh lebih baik dibandingkan rata-rata industri sebesar 2,08%. Selain itu, ekspansi kredit Bank BPD Bali juga didukung oleh ketersediaan modal yang lebih baik dengan rasio KPMM mencapai 27,45% atau lebih tinggi dibandingkan target sebesar 26,69% pada tahun 2024. Capaian rasio KPMM ini juga lebih tinggi dibandingkan industri perbankan sebesar 26,69%.

Ekspansi kredit yang diikuti dengan pengelolaan aset produktif yang lebih baik tersebut mampu menghasilkan laba tahun berjalan senilai Rp878,47 miliar atau 112,36% dari target tahun 2024. Capaian laba tahun berjalan yang lebih tinggi didukung oleh raihan pendapatan bunga-bersih senilai Rp2,38 triliun yang melebihi target senilai Rp2,35 triliun.

Secara rasio keuangan, capaian laba tahun berjalan tersebut diperkuat dengan rasio NIM sebesar 6,66%. Meskipun lebih rendah dari target sebesar 6,82% capaian rasio NIM tersebut berhasil lebih tinggi dibandingkan industri sebesar 4,62%. Selain itu, Dewan Komisaris juga

Performance of the Board of Directors and Basis of Assessment

The Board of Commissioners has been in charge of the supervision of the Board of Directors' policy in the management of Bank BPD Bali and the provision of advice to the Board of Directors during the year 2024. The supervisory function performed by the Board of Commissioners also includes implementing the Work Plan and Budget (RKAP), Bank Business Plan (RBB), Sustainable Financial Action Plan (RKAB) and Long Term Work Plan (RJP) in good faith and with the principle of prudence for the interests of Bank BPD Bali according to the Bank's Vision and Mission.

The evaluation of the achievement of the performance of the Board of Directors of Bank BPD Bali during 2024 was conducted by the Board of Commissioners based on the achievement of the performance of the Board of Directors of Bank BPD Bali based on the fulfillment of duties and responsibilities and goals prepared by the Board of Directors in accordance with the Bank's RBB. The Audit Committee provides the Board of Directors with an assessment of the factors affecting the Bank's performance, particularly in terms of capital, profitability, governance and risk profile.

Regarding the financial performance, the Board of Commissioners appreciates achieving total assets of Rp38.31 trillion in 2024 or 104.32% of the set target. Furthermore, asset growth of 11.66 % yoy outpaced the industry average of 5.91%. This strong asset growth is supported by loan disbursement amounting to Rp22.83 trillion or 99.95% of the targeted Rp22.84 trillion.

However, it should be noted that the management of productive assets is improving. The gross NPL ratio was only 0.92%, better than the target of 1.75%. The achievement of this ratio is also much better than the average of the industry of 2.08%. Furthermore, the loan expansion of Bank BPD Bali is also supported by better capital availability with a CAR ratio of 27.45%, above the target of 26.69 percent by 2024. Achieving this CAR is also higher than the banking industry which stands at 26.69%.

The credit expansion followed by the better management of the productive assets has been able to achieve a current year profit of Rp878.47 billion or 112.36% of the target in 2024. The achievement of net interest income of Rp2.38 trillion, exceeding the target of Rp2.35 trillion, supported the achievement of higher current year profit.

Regarding financial ratios, the current year's profit was supported by the NIM ratio which reached 6.66%. Although lower than the targeted 6.82%, the NIM ratio achieved was higher than the industry which stood at 4.62%. In addition, the Board of Directors was also recognized



memberikan penghargaan kepada Direksi atas keberhasilan melakukan efisiensi operasional yang turut berperan atas capaian profitabilitas Bank BPD Bali. Realisasi rasio BOPO Bank sebesar 66,85% atau lebih baik dibandingkan target sebesar 69,13% dan rata-rata industri sebesar 81,30%.

Capaian kinerja Direksi tersebut juga terefleksi dari hasil *Self-Assessment Good Corporate Governance* yang mencakup 11 (sebelas) aspek penilaian dimana salah satu diantaranya adalah aspek pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Hasil *Self-Assessment* GCG Bank BPD Bali menunjukkan peringkat 2 (Baik) untuk semester I 2024 dan semester II tahun 2024. Capaian ini salah satu satunya didukung oleh aspek pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi berperingkat 2 yang mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola.

Pengawasan Terhadap Implementasi Strategi Perusahaan dan Pemberian Nasihat Kepada Direksi

Beragam capaian tersebut juga tidak terlepas dari pengawasan yang efektif dari dewan Komisaris atas kebijakan strategis dan kajian atas pencapaian kinerja Bank BPD Bali secara berkala dalam forum Rapat Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2024. Rapat Gabungan ini telah diselenggarakan sebanyak 12 (dua belas) kali, lebih banyak dari ketentuan yang diatur dalam pasal 55 POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yakni paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Intensitas dan kualitas Rapat Gabungan tersebut sangat didukung oleh hubungan yang harmonis dalam pengelolaan Tata Kelola Bank BPD Bali khususnya antara Dewan Komisaris dan Direksi. Hal ini tidak terlepas dari komitmen bersama untuk menerapkan prinsip-prinsip kepatutan, keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Direksi telah menindaklanjuti saran/rekomendasi dari Dewan Komisaris yang telah disepakati yang didukung oleh penyediaan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu dari Direksi sehingga mampu menghasilkan saran/rekomendasi dari Dewan Komisaris yang dapat diandalkan.

Dewan Komisaris, secara internal, juga menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris guna mendukung fungsi pengawasan atas pengelolaan Bank BPD Bali. Beberapa aspek penting yang dikaji antara lain pencapaian kinerja, pembahasan persetujuan atas berbagai keputusan strategis Bank termasuk pembahasan program kerja Dewan Komisaris dan Komite untuk tahun 2025. Rapat Dewan Komisaris tersebut diselenggarakan sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali atau jauh lebih banyak dibandingkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

for its success in the implementation of operational efficiency, which also played a role in the achievement of Bank BPD Bali's profitability. The Bank's BOPO ratio realization was 66.85%, better than the target of 69.13% and industry average of 81.30%.

The performance of the Board of Directors is also reflected in the results of the Good Corporate Governance Self-Assessment. The GCG Self-Assessment consists of 11 (eleven) aspects, one of which is the aspect of the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors. The results of the GCG Self-Assessment of Bank BPD Bali show a rating of 2 (Good) for the first half of 2024 and the second half of 2024. This result is supported by the aspect of implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors, which has a rating of 2. This is a reflection that the management of the bank has generally implemented good governance. This is reflected in the adequate compliance with the principles of governance.

Overseeing Corporate Strategy and Advising the Board of Directors

These various achievements are also inseparable from the effective supervision of the Board of Commissioners regarding the strategic policies and reviewing the performance of Bank BPD Bali periodically in the forums of the Board of Commissioners and the Board of Directors Meeting held in 2024. This Joint Meeting was held 12 times, more than the requirements stipulated in Article 55 of POJK No. 17 of 2023 on the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks, namely at least once in 4 months.

The intensity and quality of the Joint Meeting is strongly supported by the harmonious relationship in managing the governance of Bank BPD Bali, especially between the Board of Commissioners and the Board of Directors. This is inseparable from the joint commitment to the application of the principles of propriety, openness, accountability, responsibility, independence and fairness. The Board of Directors has followed up on the agreed suggestions/recommendations of the Board of Commissioners, supported by the provision of accurate, relevant and timely data and information by the Board of Directors, in order to produce suggestions/recommendations of the Board of Commissioners that can be relied upon.

The Board of Commissioners, internally, also held a Board of Commissioners meeting to support the oversight function of the management of Bank BPD Bali. Several important aspects reviewed include performance achievements, discussing and approving various strategic decisions of the Bank including discussing the Work Program of the Board of Commissioners and Committees for 2025. The Board of Commissioners Meeting was held 28 (twenty-eight) times or much more than required by the Financial Services Authority (OJK) to meet at least 1 (one) time in 4 (four) months.

Dewan Komisaris melakukan kajian dan pembahasan mengenai beberapa aspek penting yang berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis Bank dan stakeholder. Pembahasan secara internal beberapa aspek strategis antara lain rencana bisnis Bank, capaian kinerja, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RKAB), penerapan GCG di lingkungan Bank menjadi fokus utama untuk memperkuat fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Implementation of Corporate Governance

Pandangan Dewan Komisaris Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Dengan kewenangan yang dimilikinya, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rangka membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung Jawab Dewan Komisaris. Keberadaan ketiga komite tersebut membantu Dewan Komisaris dalam mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.

Memastikan penerapan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi menjadi tujuan pembentukan Komite Dewan Komisaris. Untuk mencapai tujuan tersebut ketiga komite tersebut telah membina hubungan kerja yang efektif serta berkoordinasi dengan unit-unit kerja terkait Bank BPD Bali dengan sepengetahuan Dewan Komisaris sebagai sebuah mekanisme kerja yang telah diatur dalam Piagam Komite Dewan Komisaris.

Penerapan beragam aktivitas terkait implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, dan Rapat Komite. Implementasi tugas dan tanggung jawab Organ Utama dan Organ Pendukung Bank beserta karyawan Bank di setiap jenjang organisasi Bank BPD Bali.

Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas upaya terbaik yang telah dilakukan semua jenjang organisasi Bank BPD Bali terkait penerapan prinsip-prinsip GCG. Hal ini dibuktikan dengan capaian nilai komposit *Self-Assessment* GCG pada PK-2 yang mencerminkan manajemen Bank BPD Bali telah melakukan penerapan GCG yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola.

The Board of Commissioners conducted studies and discussions on several important aspects that have an impact on the continuity of the Bank's business and stakeholders. The internal discussions on various strategic aspects include the Bank's Business Plan, the performance achieved, the Sustainable Financial Action Plan (RKAB), the implementation of GCG in the Bank's environment as the main focus to strengthen the supervisory function and provide advice to the Board of Directors.

Views of the Board of Commissioners on the implementation of Corporate Governance

The Board of Commissioners has established an Audit Committee, a Risk Monitoring Committee and a Remuneration and Nomination Committee to assist and support the Board of Commissioners in carrying out its duties and responsibilities. The existence of these three committees assists the Board of Commissioners in the direction, monitoring and evaluation of the implementation of the strategic policies of the Bank.

The objective of the establishment of the Board of Commissioners Committees is to ensure the implementation of good governance in the conduct of the Bank's business at all levels of the organization. In order to achieve this objective, as a working mechanism regulated in the Charter of the Board of Commissioners Committee, the three committees have fostered effective working relationships and coordinated with related work units of Bank BPD Bali with the knowledge of the Board of Commissioners.

The implementation of various activities related to the implementation of Good Corporate Governance (GCG) has been in accordance with laws and regulations such as the General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners Meeting, Board of Directors Meeting, Board of Commissioners Meeting with the Board of Directors and Committee Meetings. In addition, the implementation of the duties and responsibilities of the main organs and supporting organs of the Bank together with Bank employees at all levels of the Bank BPD Bali organization.

The Board of Commissioners appreciates the best efforts made by all levels of Bank BPD Bali organization in implementing the GCG principles. This is evidenced by the achievement of the composite score of the GCG Self-Assessment in PK-2, which reflects that the management of Bank BPD Bali has implemented GCG, which is generally good. This is reflected in adequate fulfillment of governance principles.



Upaya terbaik atas penerapan GCG di lingkungan Bank BPD Bali juga dapat dibuktikan dari pembaruan atas kebijakan internal supaya selaras dengan peraturan perundang-undangan baru yang ditetapkan regulator dan merespon terhadap dinamika yang terjadi di industri perbankan. Secara kumulatif, terdapat 75 Keputusan Direksi tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) baru dan BPP perubahan serta Standar Operasional Prosedur (SOP) baru dan SOP perubahan yang diterbitkan selama tahun 2024.

Beberapa Keputusan Direksi yang ditetapkan selama tahun 2024 terkait BPP yang terkait langsung dengan *soft structure* GCG Bank BPD Bali antara lain adalah BPP Penerapan Tata Kelola, BPP Sekretaris Perusahaan, BPP Perlindungan Konsumen, dan BPP Susunan Organisasi dan Uraian Tugas. Pada tahun yang sama, beberapa SOP baru yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direksi adalah SOP Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal (PPSPM), SOP Strategi *Fraud*, SOP Penilaian Kinerja Satuan Kerja dan Unit Kerja, serta SOP Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

Hal tersebut diatas juga menunjukkan implementasi tugas dan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan dalam penyusunan, perumusan, dan pengembangan kebijakan dan prosedur. Hal ini selaras dengan *Blueprint* Kepatuhan tahun 2023-2024 yang bertemakan Stabilitas, Meningkatkan, dan Melanjutkan yang diterapkan melalui 4 (empat) pilar kepatuhan yaitu supervisi, kajian, konsultasi dan regulasi serta optimalisasi budaya kepatuhan.

Capaian lainnya atas penerapan GCG di lingkungan Bank BPD Bali adalah kemampuan untuk mempertahankan kualitas manajemen risiko. Hasil *self-assessment* dan penilaian OJK, Tingkat Kesehatan menunjukkan penilaian Tingkat Kesehatan Bank berada pada peringkat PK-2. Artinya, Manajemen Bank BPD Bali telah melakukan penerapan GCG yang secara umum baik. Dewan Komisaris turut berperan melakukan pengawasan aktif terhadap penerapan manajemen risiko diantaranya dengan menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko serta menilai kecukupan kualitas manajemen risiko Bank BPD Bali.

Selanjutnya, Dewan Komisaris berpandangan bahwa *Whistleblowing System* (WBS) berperan penting dalam meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian *Fraud* dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan. Bank BPD Bali telah melakukan sosialisasi WBS, memfasilitasi mekanisme pelaporan melalui aplikasi *Anti-Fraud Awareness* (AFS) dan mekanisme pelaporan pengaduan melalui media lainnya, perlindungan bagi pelapor, penanganan pengaduan sebagaimana yang tertuang dalam SOP Strategi *Anti-Fraud* yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi No. 0628/KEP/DIR/SAF/2024 tanggal 5 November 2024. Berpedoman pada ketentuan ini, Dewan Komisaris memastikan bahwa setiap laporan yang masuk dapat diterima dan ditindaklanjuti secara baik, sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.

Dewan Komisaris juga mengapresiasi langkah pengembangan bisnis Bank BPD Bali yang selaras dengan aspek *Environment, Social, and Governance* (ESG). Selain melakukan efisiensi penggunaan listrik, air, kertas dan bahan bakar yang disesuaikan dengan peningkatan operasional,

The best efforts for the implementation of GCG in the environment of Bank BPD Bali can also be evidenced from the updates of the internal policies so that they are in line with the new laws and regulations set by the regulators and respond to the dynamics that occur in the banking industry. Cumulatively, there are 75 Board of Directors' Decrees on the new Corporate Policy (BPP) and amended BPP as well as new Standard Operating Procedures (SOP) and amended SOPs issued during 2024.

Several Board of Directors' Decisions on BPP issued in 2024 that are directly related to the soft structure of Bank BPD Bali's GCG include the BPP on Governance Implementation, the BPP on Corporate Secretary, the BPP on Consumer Protection, and the BPP on Organizational Structure and Job Descriptions. In the same year, several new SOPs were issued by the Board of Directors, namely the SOP on Implementation of Anti-Money Laundering Program (APU) and Prevention of Financing of Terrorism (PPT) and Proliferation of Weapons of Mass Destruction (PPSPM), SOP on Fraud Strategy, SOP on Work Unit and Work Unit Performance Assessment, and SOP on Bank Health Level Assessment.

The above also shows the implementation of the duties and responsibilities of the Compliance Function in preparing, formulating and developing policies and procedures. This is in line with the Compliance Blueprint 2023-2024 with the theme "Stabilize, Improve and Continue", which is implemented through 4 (four) pillars of compliance, namely monitoring, reviewing, advising and regulating, and optimizing the compliance culture.

Another result of the implementation of GCG in the environment of Bank BPD Bali is the ability to maintain the quality of risk management. The results of the health level self-assessment and OJK assessment show that the bank's health level assessment is at PK-2. This means that the management of Bank BPD Bali has implemented GCG, which is generally good. The Board of Commissioners also plays a role in actively overseeing the implementation of risk management, including the approval and evaluation of risk management policies and the assessment of the adequacy of the quality of Bank BPD Bali's risk management.

In addition, the Board of Commissioners believes that the Whistleblowing System (WBS) plays an important role in increasing the effectiveness of the implementation of the anti-fraud system by emphasizing the disclosure of complaints. Bank BPD Bali has socialized the WBS, facilitated reporting mechanisms through Anti-Fraud Awareness (AFS) application and complaint reporting mechanisms through other media, protecting reporters, handling complaints as stipulated in the Anti-Fraud Strategy SOP through Board Resolution No. 0628/KEP/DIR/SAF/2024 dated 5 November 2024. In accordance with this provision, the Board of Commissioners ensures that any report received can be properly received and followed up in accordance with the applicable procedures and mechanisms.

The Board of Commissioners also appreciates the steps taken by Bank BPD Bali to develop a business which is aligned with Environmental, Social and Governance (ESG) aspects. Aside from the efficient use of electricity, water, paper and fuel adjusted to operational enhancements,

Bank BPD Bali juga meningkatkan jumlah transaksi nasabah melalui *channel* layanan digital Bank termasuk di dalamnya *Mobile Banking* Bank BPD Bali. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan peran Bank dalam mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RKAB) yang disusun setiap tahun.

Penilaian Atas Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Berdasarkan kewenangan yang diberikan, Dewan Komisaris Bank BPD Bali telah membentuk komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Ketiga komite yang telah dibentuk yang terdiri dari Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Pemantau Risiko membantu tugas-tugas Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Disamping turut memastikan penerapan GCG dalam penyelenggaraan kegiatan Bank, ketiga Komite Dewan Komisaris tersebut juga berperan dalam mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. Partisipasi aktif dan penyelenggaraan rapat masing-masing komite mampu menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan Dewan Komisaris untuk menyampaikan arahan dan nasihat kepada Direksi. Selama tahun 2024, Komite Dewan Komisaris telah melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja Komite dan hasilnya telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris setiap triwulan.

Sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, Komite Audit telah membantu Dewan Komisaris melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta tindak lanjut hasil audit untuk menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 17 (tujuh belas) kali selama tahun 2024 atau lebih banyak dibandingkan ketentuan yakni 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk komite tersebut. Dewan Komisaris juga mengapresiasi atas hubungan kerja yang efektif dan berkoordinasi dengan melakukan pertemuan dengan SKAI & AF sebanyak 7 (tujuh) kali dan pertemuan dengan KAP sebanyak 3 (tiga) kali, serta telah melakukan kajian sebanyak 63 (enam puluh tiga) kali laporan hasil audit internal dan audit eksternal selama tahun 2024 sebagaimana diatur dalam POJK Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Komite Pemantau Risiko telah membantu Dewan Komisaris antara lain melaksanakan berbagai kegiatan antara lain evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan kebijakan Bank, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko. Komite ini telah mengadakan rapat sebanyak 16 (enam belas) kali selama tahun 2024 atau lebih banyak dibandingkan ketentuan yakni 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk komite tersebut. Selain itu, Komite Pemantau Risiko telah melakukan kajian sebanyak 85 (delapan puluh lima) kali laporan terkait dengan manajemen risiko.

Bank BPD Bali has also increased the number of customer transactions through the bank's digital service channels, including Bank BPD Bali's mobile bank. This is to enhance the bank's role in supporting the acceleration and expansion of digitalization in the region. This is in line with the annual Sustainable Finance Action Plan (RKAB).

Assessment of the Performance of Committees Reporting to the Board of Commissioners

Based on its authority, Bank BPD Bali's Board of Commissioners has formed committees responsible to the Board of Commissioners. Three committees have been formed to assist the Board of Commissioners in overseeing the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors and to advise the Board of Directors, namely the Audit Committee, the Remuneration and Nomination Committee and the Risk Monitoring Committee.

The three Committees of the Board of Commissioners play a role in directing, monitoring and evaluating the implementation of the Bank's strategic policies, in addition to ensuring the implementation of the GCG in the execution of the Bank's activities. Through active participation and meetings, each Committee is able to make recommendations that can be used by the Board of Commissioners to guide and advise the Board of Directors. During the year under review, the Committee of the Board of Commissioners carried out its activities in accordance with the Committee's work plan. The results were reported to the Board of Commissioners on a quarterly basis.

In accordance with its duties and responsibilities, the Audit Committee has assisted the Board of Commissioners in monitoring and evaluating the planning and conduct of audits and in following up on audit results to assess the adequacy of internal control, including the adequacy of the financial reporting process. The Audit Committee held 17 (seventeen) meetings during 2024 or more than the provision of 1 (one) time in 1 (one) month for the Committee. The Committee also appreciated the effective cooperation and coordination by holding 7 (seven) meetings with SKAI & AF and 3 (three) meetings with KAP. The Committee also conducted 63 (sixty-three) studies of internal and external audit reports during 2024 as stipulated in the POJK on the Implementation of Governance for Commercial Banks.

The Risk Monitoring Committee has assisted the Board of Commissioners in the performance of various activities, including the evaluation of the conformity between the risk management policies and the implementation of the Bank's policies, the monitoring and evaluation of the performance of the duties of the Risk Management Committee and the Risk Management Work Unit. This Committee has held 16 (sixteen) meetings during 2024 or more than the provision of 1 (one) time in 1 (one) month for the Committee. In addition, the Risk Monitoring Committee has reviewed 85 (eighty-five) reports related to risk management. This performance is supported by

Capaian kerja ini didukung dengan hubungan kerja yang efektif dan koordinasi antar komite dan unit terkait lainnya seperti komite manajemen risiko, satuan kerja manajemen risiko dan fungsi kepatuhan.

Selanjutnya, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menjalankan tugasnya antara lain melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi, menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komite Remunerasi dan Nominasi tahun 2024 telah mengadakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali, lebih banyak dibandingkan ketentuan yakni 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk komite tersebut. Komite ini juga telah melakukan kajian sebanyak 11 (sebelas) kali terkait remunerasi dan nominasi didukung oleh hubungan kerja yang efektif dengan Direksi melalui Divisi SDM, antar komite, serta unit kerja terkait.

Informasi lebih lengkap terkait ketiga Komite Dewan Komisaris tersebut dapat dilihat di bab GCG bagian Komite di bawah Dewan Komisaris.

effective working relationships and coordination between the Committee and other related units such as the Risk Management Committee, the Risk Management Work Unit and the Compliance Function.

In addition, the Remuneration and Nomination Committee has performed its duties, including evaluating the remuneration policy, submitting the evaluation results and recommendations to the Board of Directors, and ensuring that the remuneration policy is in compliance with applicable regulations. The Remuneration and Nomination Committee has held 7 (seven) meetings in 2024, more than the provision of 1 (one) time in 3 (three) months for the Committee. This committee has also conducted 11 (eleven) studies related to remuneration and nomination, supported by effective working relationships with the Board of Directors through the Human Resources Department, between committees and related work units.

More detailed information on the three Committees of the Board of Directors can be found in the GCG chapter under Committees of the Board of Directors.

Pandangan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi dan Dasar Pertimbangannya *Board of Commissioners' View of Business Prospects and its Considerations*

Dewan Komisaris berpendapat bahwa kebijakan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) Bank BPD Bali tahun 2025 dan akan diimplementasikan oleh Direksi telah sesuai dengan prospek ekonomi Indonesia dan industri perbankan di Indonesia. Prospek usaha Bank BPD Bali disusun dengan memperhatikan aspek kekuatan, kekurangan, peluang dan tantangan serta dinamika yang terjadi di industri perbankan selama tahun 2024.

Arah kebijakan Bank pada tahun mendatang fokus pada peningkatan ketahanan kelembagaan, peningkatan kemampuan sebagai agent of regional development, dan peningkatan daya saing. Beberapa inisiatif strategis yang dilakukan antara lain peningkatan modal, kualitas kredit dan *Governance, Risk Management, Compliance*, dan *Control* untuk mengoptimalkan rentabilitas secara berkelanjutan dan penguatan bisnis.

Peningkatan kemampuan sebagai *agent of regional development* dilakukan dengan mendorong pertumbuhan penyaluran kredit dan penghimpunan dana pihak ketiga, mengoptimalkan segmen UMKM, meningkatkan sinergi dan kolaborasi ekosistem digital. Terakhir, penguatan daya saing dilakukan antara lain dengan inovasi produk dan layanan, optimalisasi digitalisasi untuk memperluas jangkauan, penguatan organisasi dan *Corporate Brand*.

Arah kebijakan dan beragam inisiatif strategis tersebut relevan dengan estimasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2% dan rekam jejak pertumbuhan ekonomi provinsi Bali yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut. Optimisme pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut didukung oleh perkiraan tingkat inflasi yang terkendali

The Board of Commissioners believes that the strategic policies that have been set in Bank BPD Bali's Bank Business Plan (RBB) for 2025, which will be implemented by the Board of Directors, are aligned with the prospects of the Indonesian economy and the banking industry in Indonesia. Bank BPD Bali's business prospects are prepared by considering aspects of strengths, weaknesses, opportunities and challenges as well as banking industry dynamics in 2024.

The direction of the bank's policy in the coming year is focused on increasing the institutional resilience, enhancing the capabilities as an agent of regional development, and increasing the competitiveness. Some of the strategic initiatives undertaken include increasing capital, credit quality and governance, risk management, compliance and control to optimize sustainable profitability and strengthen the business.

Increasing capabilities as an agent of regional development is carried out by promoting the growth of lending and collecting third-party funds, optimizing the MSME segment, increasing synergies and collaborating with the digital ecosystem. Finally, strengthening competitiveness is achieved by, inter alia, innovating products and services, optimizing digitalization to expand reach, and strengthening the organization and corporate brand.

Policy direction and various strategic initiatives are relevant to Indonesia's estimated economic growth of 5.2% and Bali Province's economic growth track record, which is higher than Indonesia's economic growth. The optimism for Indonesia's economic growth is supported by the country's inflation rate, which is estimated to be under control at 2.5%

sebesar 2,5% pada tahun mendatang. Selain itu, industri perbankan diperkirakan mampu membukukan pertumbuhan kredit yang lebih tinggi sebesar 11-13% pada tahun 2025 menurut Bank Indonesia (BI).

Estimasi pertumbuhan kredit tersebut didukung oleh ketahanan perbankan Indonesia yang kuat, tecermin pada ketahanan permodalan CAR yang masih di atas 25% pada berbagai skenario. Selain itu, menurut BI, risiko kredit masih terjaga dengan baik yang tercermin pada rasio *Loan at Risk* (LAR) yang terus menurun.

Terakhir, prospek layanan perbankan digital di Indonesia masih menjanjikan didorong oleh nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan akan mencapai *Gross Merchandise Value* (GMV) sebesar US\$200-360 miliar pada tahun 2030. Selain itu, menurut laporan yang disusun oleh Google, Temasek, dan *Bain & Company*, persentase *unbanked* dan *underbanked* masing-masing sebesar 51,00% dan 26,00% dari total populasi penduduk Indonesia berusia di atas 18 tahun sebanyak 181 juta yang mencerminkan potensi pasar perbankan digital masih sangat besar di Indonesia.

next year. In addition, according to Bank Indonesia (BI), the banking industry is estimated to have higher loan growth of 11-13% in 2025.

The estimated loan growth is supported by the strong resilience of Indonesia's banking industry, which is reflected in the capital adequacy ratio (CAR), which remains above 25% in various scenarios. Moreover, according to BI, credit risk is still well maintained. This is reflected in the Loan at Risk (LAR) ratio, which continues to decline.

Finally, the outlook for digital banking services in Indonesia remains promising, driven by the value of Indonesia's digital economy, which is expected to reach a gross merchandise value (GMV) of USD 200-360 billion by 2030. In addition, according to a report by Google, Temasek and Bain & Company, the unbanked and underbanked percentage is 51.00% and 26.00% respectively of the total Indonesian population aged 18+ years of 181 million, reflecting the potential of the digital banking market is still very large in Indonesia.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris Tahun Buku 2024

Changes to The Composition of The Board of Commissioners in Fiscal Year 2024

Komposisi Dewan Komisaris Tidak Mengalami Perubahan Selama Tahun 2024

Bank BPD Bali melaporkan tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris selama tahun 2024. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris Bank BPD Bali berpedoman pada Akta No. 25 tanggal 12 Mei 2023 dan Akta No. 38 tanggal 22 Nopember 2023. Adapun susunan Dewan Komisaris Bank BPD Bali per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

The Composition of the Board of Commissioners Unchanged in 2024

Bank BPD Bali reported that the composition of the Board of Commissioners remained unchanged during 2024. The number and composition of the Board of Commissioners of Bank BPD Bali is governed by the Deed No. 25 dated May 12, 2023 and the Deed No. 38 dated November 22, 2023. As of December 31, 2024, the composition of the Board of Commissioners of Bank BPD Bali shall be as follows:

DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS

per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
as of December 31, 2024 and December 31, 2023

Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.
Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Insinyur Gede Arimbawa
Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	I Nyoman Suparsa Widana
Komisaris Non Independen <i>Non-Independent Commissioner</i>	Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.
Komisaris Non Independen <i>Non-Independent Commissioner</i>	I Gede Darmawa, S.E.

Penutup *Closing*

Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Direksi dan segenap karyawan Bank BPD Bali atas komitmen, kerja keras dan dedikasinya, sehingga Bank BPD Bali mampu membukukan kinerja yang secara umum lebih baik dibandingkan target yang ditetapkan di tengah dinamika dan tantangan yang terjadi di lingkungan ekonomi dan bisnis perbankan pada tahun 2024.

Dewan Komisaris optimis Bank BPD Bali mampu mempertahankan pertumbuhan bisnis yang berkualitas pada tahun mendatang. Kekuatan Bank BPD Bali sebagai Bank pemegang kas daerah yang mengelola ekosistem penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah dan memiliki captive market di Provinsi Bali disertai dukungan yang kuat dari pemegang saham dan keunggulan kompetitif yang dimiliki akan menjadi *key drivers* pertumbuhan bisnis berkelanjutan di masa mendatang sesuai dengan Visi dan Misi Bank.

Selanjutnya, Dewan Komisaris juga mengucapkan terima kasih kepada para pemegang saham, nasabah, mitra, dan seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungan yang memungkinkan Bank untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan sambil berkontribusi pada ekonomi Indonesia dan Provinsi Bali khususnya sektor UMKM melalui layanan perbankan digital.

Terakhir, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia atas dukungan yang tiada henti kepada industri perbankan termasuk Bank BPD Bali.

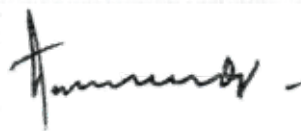
The Board of Commissioners wishes to thank the entire Board of Directors and all employees of Bank BPD Bali for their commitment, hard work and dedication in enabling Bank BPD Bali to achieve a performance that is generally higher than the target set amidst the dynamics and challenges that occurred in the economic and banking business environment in 2024.

The Board of Commissioners is optimistic that Bank BPD Bali will be able to maintain the quality of business growth in the coming year. Bank BPD Bali's strength as a regional cash holding bank managing the ecosystem of regional government revenues and expenditures and having a captive market in Bali, coupled with strong shareholder support and competitive advantages will be key drivers for sustainable business growth in the future in line with the Bank's vision and mission.

Furthermore, the Board of Commissioners also wishes to thank the Shareholders, Customers, Partners and all stakeholders for their trust and support that enables the Bank to deliver value to stakeholders while contributing to the Indonesian economy and Bali Province, especially the MSME sector, by providing digital banking services.

Finally, the Board of Commissioners thanks the Government of the Republic of Indonesia, Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia for their continuous support to the banking industry including Bank BPD Bali.

Atas Nama Dewan Komisaris
On Behalf of the Board of Commissioners



Komisaris Utama
President Commissioner
I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.





LAPORAN DIREKSI

Report of the Board of Directors



I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.

Direktur Utama | *President Director*

Pencapaian kinerja Bank BPD Bali di atas target pada tahun 2024 didukung oleh implementasi strategi bisnis yang efektif, transformasi dan inovasi digital, kolaborasi ekosistem digital, kemitraan strategis, dan dukungan yang kuat dari pemegang saham serta penerapan praktik terbaik GCG di semua jenjang organisasi.

Bank BPD Bali's achievement of the 2024 target is supported by the implementation of effective business strategies, digital transformation and innovation, collaboration with the digital ecosystem, strategic partnerships and strong shareholder support, as well as the implementation of GCG best practices at all levels of the organization.

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh lebih terbatas menjadi 5,03% yoy pada tahun 2024 dibandingkan sebesar 5,05% yoy pada tahun sebelumnya yang dipengaruhi oleh faktor geopolitik dan keterpilihan Trump yang telah mengubah lanskap geopolitik dan ekonomi dunia. Pengeluaran konsumsi rumah tangga, ekspor dan investasi masih menjadi penopang utama pertumbuhan PDB Indonesia. Sejalan dengan kondisi tersebut, meski tumbuh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan PDB Indonesia, juga tumbuh lebih terbatas menjadi 5,48% yoy pada tahun 2024 dari 5,71% yoy pada tahun sebelumnya.

Pertumbuhan PDB Indonesia yang masih relatif terjaga dengan baik tersebut didukung oleh penyaluran kredit dari industri perbankan di Indonesia disertai dengan pengelolaan aset produktif yang terkendali dengan baik. Bank BPD Bali dengan captive market yang berada di provinsi Bali juga turut berperan mendukung pembangunan antara lain melalui penyaluran kredit dan pengelolaan ekosistem penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah. Dalam menjalankan ekspansi bisnisnya, Bank BPD Bali secara proaktif menyinergikan prinsip *Governance, Risk, and Compliance (GRC)* dengan *Environmental, Social, and Governance (ESG)*.

Sehubungan dengan hal tersebut, menjadi suatu kehormatan bagi Direksi Bank BPD Bali dapat menyampaikan laporan pengelolaan Bank selama tahun 2024 melalui laporan tahunan ini dimana Bank berhasil mencapai kinerja yang lebih baik dari target yang telah ditetapkan dan turut berkontribusi terhadap pembangunan dan pemberdayaan UMKM di provinsi Bali.

Our Esteemed Shareholders and Stakeholders,

Indonesia's gross domestic product (GDP) grew at a slower pace at 5.03% yoy in 2024 compared to 5.05% yoy in the previous year. This was influenced by geopolitical factors and Trump's election, which changed the geopolitical and economic landscape of the world. Household consumption, exports and investment remain the mainstays of Indonesia's GDP growth. In line with these conditions, although higher than Indonesia's GDP growth, its growth is also more limited to 5.48% yoy in 2024 from 5.71% yoy in the previous year.

Indonesia's GDP growth, which is still relatively well maintained, is supported by the distribution of credit from the banking industry in Indonesia, accompanied by a well controlled management of productive assets. Bank BPD Bali, which has a captive market in the province of Bali, is also playing a role in supporting development, including through the distribution of credit and the management of the regional government's revenue and expenditure system. Bank BPD Bali proactively integrates the principles of *Governance, Risk and Compliance (GRC)* with *Environmental, Social and Governance (ESG)* as it pursues its business expansion.

In this regard, it is an honor for the Board of Directors of Bank BPD Bali to present a report on the management of the Bank during the year 2024 through this Annual Report. The Bank has succeeded in achieving better performance than set targets and has contributed to the development and empowerment of MSMEs in Bali Province.

Tinjauan Lingkungan Ekonomi

Economic Environment Review

Perubahan Lanskap geopolitik dan ekonomi dunia akibat faktor geopolitik dan keterpilihan Trump

Ekonomi dunia menghadapi tantangan atas situasi yang berubah cepat dengan ketidakpastian tinggi pada tahun 2024. Ketegangan geopolitik yang terjadi di beberapa wilayah dunia dan keterpilihan Trump sebagai Presiden Amerika Serikat yang mengedepankan kebijakan *America First* pada kuartal IV 2024 telah mengubah lanskap geopolitik dan ekonomi dunia.

Kondisi tersebut juga menyebabkan ketidakpastian pasar keuangan dunia seiring dengan peningkatan suku bunga acuan, depresiasi berbagai mata uang dunia, serta risiko fragmentasi perdagangan dan investasi dunia. Akibatnya, menurut *International Monetary Fund* (IMF), pertumbuhan ekonomi global melambat menjadi 3,2% pada tahun 2024 dari sebesar 3,3% pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang yang selama ini menjadi motor pertumbuhan ekonomi dunia yang dilaporkan tumbuh melambat berpengaruh terhadap capaian PDB dunia tersebut meski di sisi lain ekonomi negara maju tumbuh dengan penguatan terbatas.

Perbaikan Konsumsi Rumah Tangga dan Ekspor disamping Investasi yang Relatif Terjaga Menjadi Pendorong Pertumbuhan Kredit

Ekonomi Indonesia masih relatif terjaga dengan baik meski membukukan pertumbuhan lebih terbatas sebesar 5,03% yoy pada tahun 2024 dibandingkan sebesar 5,05% yoy pada tahun sebelumnya. Pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mampu tumbuh lebih baik sebesar 4,94% yoy pada tahun 2024 dari 4,82% yoy pada tahun 2023 meski menghadapi tantangan deflasi selama bulan Mei-September 2024 menjadi salah satu faktor kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kontribusinya terhadap PDB Indonesia mencapai 52,52% pada tahun 2024. Capaian ini sejalan dengan peningkatan indeks keyakinan konsumen dan indeks penjualan riil sebagaimana dilaporkan oleh BI.

Pertumbuhan PDB Indonesia tersebut juga didukung oleh kenaikan ekspor barang sebesar 5,78% yoy, jauh lebih tinggi dibandingkan kontraksi ekspor barang sebesar 1,12% yoy pada tahun 2023 berdasarkan data BPS. Pertumbuhan ekspor ini didukung oleh realisasi nilai ekspor Indonesia yang tumbuh 2,29% yoy menjadi US\$264,70 miliar. Kinerja ekspor yang lebih baik ini didukung oleh pertumbuhan ekspor nonmigas sebesar 2,46% yoy menjadi US\$248,83 miliar pada tahun 2024.

Selanjutnya, investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) meski tumbuh sebesar 3,97% yoy atau lebih rendah dari tahun 2023 4,40% yoy turut berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari realisasi investasi yang berhasil tumbuh 20,8% yoy menjadi Rp1.714,2 triliun pada tahun 2024 menurut data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Changes in the Global Geopolitical and Economic Landscape due to Geopolitical Factors and Trump's election

The global economy is challenged by a rapidly changing and uncertain landscape in 2024. The world's geopolitical and economic landscape has changed due to geopolitical tensions in several regions of the world and the election of Trump as the President of the United States in the fourth quarter of 2024, who prioritizes an "America First" policy.

These conditions have also created uncertainty in the world's financial markets. As a result, benchmark interest rates are rising, various world currencies are depreciating, and there is a risk of fragmentation in global trade and investment. As a result, according to the International Monetary Fund (IMF), global economic growth will slow to 3.2% in 2024 from 3.3% last year. The economic growth of developing countries, which have been the driving force of global economic growth, is reported to have slowed, which has an impact on the achievement of global GDP, although the economies of developed countries are growing with limited reinforcement.

Improved Household Consumption, Exports and Relatively Sustained Investment Drive Loan Growth

Despite a more limited growth of 5.03% yoy in 2024 compared to 5.05% yoy in the previous year, the Indonesian economy is still relatively well maintained. Household consumption expenditure is one of the key drivers of Indonesia's economic growth. Despite facing deflationary challenges in May-September 2024, household consumption expenditure grew 4.94% yoy in 2024, up from 4.82% yoy in 2023. It contributes to Indonesia's GDP reaching 52.52% in 2024. This performance is in line with the rising consumer confidence index and real sales index reported by BI.

Indonesia's GDP growth was also supported by rising merchandise exports of 5.78% yoy, much higher than the declining merchandise exports of 1.12% yoy in 2023 based on BPS data. This export growth is supported by the realization of Indonesia's export value, which increased by 2.29% yoy to USD \$264.70 billion. This better export performance is supported by non-oil and gas exports, which grow by 2.46% yoy to reach US\$248.83 billion in 2024.

In addition, investment or gross fixed capital formation (PMTB) also had an impact on Indonesia's economic growth, even though it grew 3.97% yoy or lower than the 4.40% yoy in 2023. This is evidenced by the realization of investment which, according to data from the Ministry of Investment / Investment Coordinator (BKPM), managed to increase by 20.8% yoy to Rp1,714.2 trillion in 2024.

Sementara itu, dari sisi lapangan usaha menurut data BPS, pertumbuhan PDB Indonesia didukung oleh beberapa industri yang mampu tumbuh lebih tinggi. Sektor yang dimaksud antara lain sektor konstruksi dengan pertumbuhan sebesar 7,02% yoy, sektor informasi dan komunikasi sebesar 7,57% yoy, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,56% yoy, serta sektor transportasi dan pergudangan sebesar 8,69% yoy.

Ekonomi Provinsi Bali Kembali Tumbuh Lebih Tinggi dibandingkan PDB Indonesia Meski Juga dengan Pertumbuhan lebih Terbatas

Provinsi Bali kembali membukukan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 5,48% yoy atau lebih tinggi dibandingkan PDB Indonesia sebesar 5,03%. Namun demikian, PDRB Provinsi Bali tahun 2024 ini juga tumbuh lebih terbatas dibandingkan sebesar 5,71% yoy pada tahun 2023.

Pertumbuhan yang lebih rendah tersebut terutama dipengaruhi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga yang tumbuh lebih terbatas menjadi 4,65% yoy pada tahun 2024 dari sebesar 5,57% yoy pada tahun sebelumnya. Ekspor luar negeri juga tercatat tumbuh lebih rendah menjadi 15,99% yoy. Sementara itu, Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh lebih kuat 5,56% yoy dibandingkan sebesar 3,01% yoy pada tahun 2023.

Dari sisi lapangan usaha, beberapa industri mampu membukukan pertumbuhan *double digit* yakni jasa keuangan dan asuransi sebesar 15,08% yoy diikuti oleh industri pengadaan listrik dan gas (11,78% yoy) dan industri penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar (11,95% yoy). Industri lainnya yang mampu tumbuh di atas pertumbuhan PDRB Bali adalah jasa perusahaan (6,80% yoy) serta transportasi dan pergudangan (5,96% yoy).

Ketersediaan Modal yang Kuat dan Dukungan Dana Pihak Ketiga Mendukung Penyaluran Kredit di Industri Perbankan

Selaras dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 tersebut, industri perbankan mampu membukukan pertumbuhan kredit kepada pihak ketiga sebesar 10,39% yoy pada tahun 2024 atau lebih tinggi dibandingkan sebesar 10,38% yoy pada tahun sebelumnya. Ekspansi kredit ini mampu diimbangi dengan pengelolaan aktiva produktif lebih baik dengan rasio NPL sebesar 2,08% dari sebesar 2,19% pada tahun 2023. Selaras dengan pertumbuhan *double digit* tersebut, aset perbankan mengalami kenaikan sebesar 5,91% yoy pada tahun 2024 atau lebih tinggi dari sebesar 5,87% yoy pada tahun sebelumnya.

Pertumbuhan kredit perbankan didukung oleh permodalan yang lebih kuat dengan rasio KPMM yang relatif terjaga sebesar 26,69% pada tahun 2024. Selain permodalan, penyaluran kredit yang meningkat juga ditopang oleh peningkatan DPK yang mampu tumbuh 4,48% yoy pada tahun 2024. Pada tahun sebelumnya DPK industri perbankan hanya tumbuh 3,73% yoy. Sejalan dengan pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan DPK tersebut, rasio LDR mencapai 88,57% pada tahun 2024 atau lebih tinggi dibandingkan sebesar 83,83% pada tahun sebelumnya.

Meanwhile, in terms of industrial origin, Indonesia's GDP growth is supported by several industries capable of higher growth according to BPS. These sectors include the construction sector with a growth of 7.02% yoy, the information and communication sector with 7.57% yoy, the accommodation and food services sector with 8.56% yoy, and the transport and storage sector with 8.69% yoy.

Bali Province's Economy Again Outpaces Indonesia's GDP, albeit with More Limited Growth

Bali Province's Gross Regional Domestic Product (GRDP) growth of 5.48% yoy was again higher than Indonesia's GDP growth of 5.03%. However, Bali's GRDP growth in 2024 was also more limited compared to 5.71% yoy in 2023.

The lower growth was mainly influenced by household consumption expenditure, which grew more limited to 4.65% yoy in 2024 from 5.57% yoy in the previous year. Foreign exports were also recorded to grow at a lower rate of 15.99% yoy. Meanwhile, investment or gross fixed capital formation (PMTB) grew stronger at 5.56% yoy compared to 3.01% yoy in 2023.

In terms of industrial origin, several industries recorded double-digit growth, namely financial and insurance services at 15.08% yoy, followed by electricity and gas supply (11.78% yoy) and accommodation and food services (11.95% yoy). Other industries that grew faster than Bali's GRDP growth were business services (6.80% yoy) and transport and storage (5.96% yoy).

Strong Capital Availability and Third Party Funding Support the Banking Industry's Credit Distribution

In line with Indonesia's economic growth in 2024, the banking industry was able to record loan growth to third parties of 10.39% yoy or higher in 2024 compared to 10.38% yoy in the previous year. This loan expansion can be balanced with better management of productive assets with an NPL ratio of 2.08% from 2.19% in 2023. In line with the double-digit growth, bank assets increases by 5.91% yoy in 2024 or higher than 5.87% yoy in the previous year.

Bank loan growth is supported by stronger capital with a relatively stable CAR ratio of 26.69% in 2024. In addition to capital, higher credit distribution is also supported by an increase in DPK, which could grow by 4.48% yoy in 2024. In the previous year, DPK in the banking industry grew only 3.73% yoy. In line with the higher loan growth compared to the increase in DPK, the LDR ratio reached 88.57% in 2024, higher than 83.83% in the previous year.



Penyaluran Kredit dan DPK di Provinsi Bali Mampu Tumbuh Lebih Tinggi Dibandingkan Industri

Pertumbuhan PDRB Bali sebesar 5,48% yoy pada tahun 2024 didukung oleh pertumbuhan penyaluran kredit sebesar 6,81% yoy. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan sebesar 6,10% yoy pada tahun 2023. Ekspansi kredit industri perbankan di provinsi Bali tersebut ditopang dengan kenaikan DPK sebesar 13,53% yoy atau jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan DPK di Indonesia sebesar 4,48% yoy pada tahun 2024.

Pertumbuhan DPK yang lebih tinggi dibandingkan kredit tersebut berdampak pada penurunan rasio LDR di perbankan provinsi Bali menjadi 59,36%. Capaian rasio LDR ini lebih rendah dibandingkan sebesar 63,09% pada tahun sebelumnya dan jauh lebih rendah dibandingkan rasio LDR industri perbankan di Indonesia sebesar 88,57% pada tahun 2024. Sejalan dengan peningkatan kredit tersebut, total aset perbankan di Bali mampu mempertahankan pertumbuhan *double digit* sebesar 11,96% yoy, lebih tinggi dibandingkan kenaikan aset perbankan di Indonesia sebesar 5,91% yoy.

Meski demikian, perbankan di Bali menghadapi tantangan pengelolaan aktiva produktif dengan rasio NPL yang mencapai 2,94% pada 2024. Meski sebenarnya sedikit lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,95% tetapi capaian ini masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata industri sebesar 2,08%.

Kenaikan Suku Bunga Acuan dan Beban Operasional Menjadi Tantangan Industri Perbankan

Bank Indonesia melakukan penyesuaian suku bunga acuan dengan menaikkan BI *rate* sebesar 25bps menjadi 6,25% pada bulan April 2024. BI *rate* ini selanjutnya dipertahankan hingga Agustus 2024. Kebijakan ini berpengaruh terhadap rentabilitas industri perbankan. Data OJK menunjukkan NIM Bank Umum mengalami penurunan dari 4,81% pada tahun 2023 menjadi 4,62% pada tahun 2024.

Disamping itu, industri perbankan juga mencatatkan kenaikan beban operasional. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) mengalami kenaikan menjadi 81,30% pada tahun 2024. Capaian rasio BOPO ini lebih tinggi dibandingkan sebesar 78,92% pada tahun sebelumnya.

Peningkatan Ekonomi Digital Mendorong Kebutuhan Layanan Perbankan Digital

Berdasarkan laporan Google, Temasek, dan *Bain & Company*, nilai ekonomi digital Indonesia mencatatkan *Gross Merchandise Value* (GMV) tumbuh sebesar 13% menjadi US\$90 pada tahun 2024. Capaian GMV pada tahun 2024 tersebut adalah yang terbesar di Asia Tenggara.

Bali's Provincial Loan Distribution and Third Party Funds are Poised to Outpace Industrial Growth

Bali's GRDP growth of 5.48% yoy in 2024 is supported by credit distribution growth of 6.81% yoy. This performance is up from 6.10% y/y for 2023. The credit expansion of the banking industry in Bali province is supported by the growth of third-party funds of 13.53% yoy. This is much higher than the growth of third-party funds in Indonesia of 4.48% yoy in 2024.

The higher growth of third-party funds compared to loans has an impact on the decrease of LDR ratio in banking in Bali province to 59.36%. The LDR ratio performance is lower than last year's 63.09%. It is much lower than Indonesia's banking industry LDR ratio of 88.57% in 2024. In line with the increase in lending, total banking assets in Bali managed to maintain a double-digit growth of 11.96% yoy, which is higher than the growth of banking assets in Indonesia, which increased by 5.91% yoy.

However, the banking industry in Bali is facing the challenge of productive asset management with the NPL ratio at 2.94% in 2024. Although slightly better than the previous year's 2.95%, this performance is still higher than the industry average of 2.08%.

Benchmark Interest Rate Hike and Operating Expenses Challenge Banking Industry

Bank Indonesia adjusted benchmark interest rate by increasing BI rate 25bps to 6.25% in April 2024. This BI rate was subsequently maintained until August 2024. This policy affects the profitability of the banking industry. The NIM of commercial banks decreased from 4.81% in 2023 to 4.62% in 2024, according to OJK data.

Moreover, the banking industry experienced increased operating expenses. The ratio of operating expenses to operating income (BOPO) increased to 81.30% in 2024. This BOPO ratio is higher than 78.92% last year.

Growing Digital Economy Drives Need for Digital Banking Services

Based on a report by Google, Temasek and Bain & Company, Indonesia's digital economy recorded a 13% growth in gross merchandise value (GMV) to US\$90 in 2024. The GMV achievement in 2024 is the highest in Southeast Asia.

Peningkatan nilai ekonomi digital, menurut laporan tersebut, didukung oleh layanan keuangan digital atau *digital financial services* (DFS) dengan *gross transaction value* (GTV) dari digital payments diperkirakan mampu tumbuh sebesar 19,00% *yoy* menjadi US\$404 miliar pada 2024. Faktor ini menjadi pendorong peningkatan nilai transaksi yang dilakukan melalui kanal pembayaran individu (*proprietary channel*) berupa *mobile banking* dan *internet banking*.

Menurut BI, nilai transaksi *proprietary channel* mencapai Rp87.867,19 triliun pada tahun 2024 dengan pertumbuhan sebesar 50,65% *yoy*. Dari jumlah tersebut, nilai transaksi *internet banking* memberikan kontribusi terbesar yakni 73,73%. Kenaikan nilai transaksi *proprietary channel* tersebut didukung oleh peningkatan *volume* transaksi sebesar 37,15% *yoy* menjadi 22,00 miliar transaksi.

Analisa Kinerja Perusahaan

Analysis of The Company Performance

Arah Kebijakan Bank yang Berfokus pada Peningkatan Ketahanan Kelembagaan, Agent of Regional Development, dan Daya Saing

Bank BPD Bali memperkuat posisinya sebagai Bank pemegang kas daerah yang mengelola ekosistem penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah serta mempunyai *captive market* Aparatur Sipil Negara (ASN), pensiunan ASN, dan pembiayaan proyek-proyek yang dibiayai APBD/BUMD dengan 3 (tiga) arah kebijakan strategis. Secara garis besar, sebagaimana yang tertuang dalam RBB Bank BPD Bali, arah kebijakan strategis Bank meliputi peningkatan ketahanan kelembagaan, peningkatan kemampuan sebagai *agent of regional development*, dan peningkatan daya saing. Ketiga arah kebijakan strategis tersebut selanjutnya diturunkan menjadi beragam inisiatif strategis.

Kebijakan strategis peningkatan ketahanan kelembagaan diimplementasikan antara lain dengan peningkatan atas modal; kualitas atas penerapan *Governance, Management, Compliance*, dan *Control*; dan kualitas aktiva produktif dengan mengedepankan penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Selain itu, Bank BPD Bali melakukan penguatan bisnis guna mengoptimalkan rentabilitas melalui peningkatan *fee-based income*, aktivitas *treasury*, dan efisiensi usaha.

Selanjutnya, kebijakan peningkatan kemampuan sebagai *agent of regional development* diimplementasikan peningkatan DPK berbiaya murah melalui sinergi dengan Pemda dan institusi lain serta *cross selling* dalam pemasaran dana. Bank BPD Bali juga melakukan kemitraan strategis dalam memperkuat *supply chain ecosystem*, *rebranding* produk kredit, dan penyempurnaan platform digital kredit *low risk* untuk percepatan penetrasi pasar. Langkah lainnya penyaluran KUR bagi UMKM dan program TJSL sebagai bagian dari keuangan berkelanjutan serta melakukan kolaborasi ekosistem digital dan peningkatan dukungan infrastruktur digital solution bagi pemda.

According to the report, the increase in the value of the digital economy will be supported by digital financial services (DFS), with the gross transaction value (GTV) of digital payments estimated to grow by 19.00% *yoy* to US\$404 billion in 2024. This factor is driven by the increase in the value of transactions made through proprietary channels, such as *mobile banking* and *internet banking*.

According to BI, the value of proprietary channel transactions will reach Rp87,867.19 trillion in 2024 with a growth of 50.65% *yoy*. Of this amount, the value of internet banking transactions contributed the most, namely 73.73%. The increase in the value of proprietary channel transactions was supported by the higher transaction volume of 37.15% *yoy* to 22.00 billion transactions.

Bank Policy Direction Focused on Improving Institutional Resilience, Agent of Regional Development and Competitiveness

Bank BPD Bali strengthens its position as a regional cash holding bank that manages the ecosystem of Regional Government Revenues and Expenditures and has a captive market of State Civil Apparatus (ASN), retired ASN and financing the projects financed by APBD/BUMD with 3 (three) strategic policy directions. In general, as stated in the RBB of Bank BPD Bali, the strategic policy direction of the bank includes the enhancement of institutional resilience, the enhancement of capacity as an agent of regional development, and the enhancement of competitiveness. Various strategic initiatives are then derived from the three strategic policy directions.

The strategic policy of increasing institutional resilience is implemented, among others, by increasing capital; quality of implementation of governance, management, compliance and control; and quality of productive assets by prioritizing the application of the principle of prudence in credit allocation. In addition, Bank BPD Bali is strengthening its business to optimize profitability by increasing fee-based income, treasury activities and business efficiency.

In addition, the policy of enhancing capacity as an agent of regional development is implemented by increasing low-cost DPK through synergy with the regional government and other institutions, and cross-selling in fund marketing. Bank BPD Bali also implements strategic partnerships in strengthening supply chain ecosystem, rebranding loan products and improving low-risk digital platform to accelerate market penetration. Other steps include the distribution of KUR for MSMEs and the TJSL program as part of sustainable finance. The bank is also collaborating on digital ecosystems and increasing support for digital solution infrastructure for regional governments.



Terakhir, arah kebijakan peningkatan daya saing yang diimplementasikan melalui inovasi produk dan layanan, aliansi strategis dengan mitra dan penguatan daya saing sebagai Bank Devisa. Langkah strategis lainnya yang ditempuh Bank BPD Bali adalah optimalisasi digitalisasi sebagai *backbone* pelayanan kepada nasabah maupun pengelolaan internal selain peningkatan *corporate brand*, penguatan organisasi dan kapabilitas strategis SDM.

Peran Penting Direksi dalam Perumusan Kebijakan Strategi dan Proses Implementasi Strategi

Berpedoman pada Anggaran Dasar, Pedoman GCG, dan Piagam Direksi Bank BPD Bali, Direksi melaksanakan pengelolaan Bank dengan itikad baik dan tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Bank BPD Bali. Direksi telah menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP), Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) beserta perubahannya disamping Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. Selain itu, Direksi juga menetapkan susunan organisasi, pedoman dan tata tertib kerja Bank lengkap dengan perincian tugasnya sebagai panduan implementasi strategi Bank.

Dalam RBB yang disusun setiap tahun, Direksi Bank BPD Bali telah menjelaskan arah kebijakan Bank serta Langkah-langkah strategis manajemen Bank yang sesuai dengan Visi dan Misi Bank. Secara spesifik, Direksi juga menjelaskan kebijakan manajemen risiko, kepatuhan, pengembangan organisasi dan sumber daya manusia. Hal penting lainnya Direksi juga merumuskan proyeksi laporan keuangan beserta rasio keuangan serta rencana pendanaan, penanaman dana, dan permodalan.

Beragam hal strategis yang telah dirumuskan dalam RBB tersebut telah melalui pembahasan dalam rapat dengan Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuannya dan pengawasan dan masukan atau nasihat. Direksi Bank BPD Bali mengembangkan hubungan yang harmonis dalam Tata Kelola Bank dengan menerapkan prinsip-prinsip kepatutan, keterbukaan, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi, dan kewajaran. Selain menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris, Direksi juga menindaklanjuti saran/rekomendasi dari dewan Komisaris.

Selain Rapat dengan Dewan Komisaris, secara internal, Direksi Bank BPD Bali telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi antar Direksi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali. Selain itu, Direksi juga menyelenggarakan Rapat Direksi dengan Satuan dan/atau Unit Kerja sebanyak 59 (lima puluh Sembilan) kali dan Rapat Direksi dengan Komite Direksi sebanyak 45 (empat puluh lima) kali.

Pencapaian Target Tahun 2024

Bank BPD Bali telah menetapkan target tahun 2024 yang sejalan dengan proyeksi dalam RBB untuk tahun buku tersebut. Sehubungan dengan target tahun 2024 tersebut, Bank BPD Bali telah menetapkan arah

Finally, the policy direction of increasing competitiveness is being implemented through product and service innovation, strategic alliances with partners, and the strengthening of competitiveness as a foreign exchange bank. Other strategic steps taken by Bank BPD Bali are optimizing digitalization as the backbone of customer service and internal management, in addition to improving corporate brands, strengthening organizations and strategic HR capabilities.

Board of Directors' Important Role in Strategic Policy Formulation and Implementation

The Board of Directors conducts the management of the Bank in good faith and responsibility for the interests and objectives of Bank BPD Bali based on the Articles of Association, GCG Guidelines and the Board Charter of Bank BPD Bali. The Board of Directors has prepared the Company's Long Term Plan (RJPP), the Bank's Business Plan (RBB), the Company's Work and Budget Plan (RKAP) and its amendments in addition to the Sustainable Financial Action Plan which is submitted to the Board of Commissioners. The Board of Directors also determines the Bank's organizational structure, policies and working procedures, including the details of its tasks. These serve as a guide for the implementation of the Bank's strategy.

In the RBB, which is prepared annually, the Board of Directors of Bank BPD Bali has explained the direction of the Bank's policies and the strategic steps taken to manage the Bank according to the Bank's Vision and Mission. In particular, the Board of Directors has also explained the policies on risk management, compliance, organizational development, and human resources management. Importantly, the Board also formulates financial report projections along with financial ratios and financing plans, investments and capitalization.

Various strategic matters formulated in the RBB were discussed in meetings with the Board of Commissioners for their approval, supervision, input or advice. The Board of Directors of Bank BPD Bali develops a harmonious relationship in bank governance through the implementation of the principles of propriety, openness, accountability, responsibility, independence and fairness. In addition to providing accurate, relevant and timely data and information to the Board of Commissioners, the Board of Directors also follows up on suggestions/recommendations from the Board of Commissioners.

In addition to meetings with the Board of Commissioners, internally, the Board of Directors of Bank BPD Bali has held coordination meetings between directors 27 (twenty-seven) times during 2024. In addition, the Board of Directors also held Board of Directors Meetings with Units and/or Work Units 59 (fifty nine) times and Board of Directors Meetings with the Board of Directors Committee 45 (forty five) times.

Target Achievement for 2024

Bank BPD Bali has set a target for 2024 that is aligned with the projections made in the RBB for the fiscal year. In relation to the target for 2024, together with the strong support from shareholders, in this case the

kebijakan dan beragam inisiatif strategis yang telah dijelaskan sebelumnya disertai dukungan yang kuat dari pemegang saham dalam hal ini Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten di Bali.

Bank BPD Bali berhasil membukukan pertumbuhan aset sebesar 11,66% yoy menjadi Rp38,31 triliun pada tahun 2024 atau ekuivalen dengan 104,32% dari target yang ditetapkan. Selain itu, pertumbuhan aset ini mampu melebihi pertumbuhan aset industri perbankan sebesar 5,91% yoy. Pertumbuhan aset Bank BPD Bali ini terutama ditopang oleh pinjaman yang diberikan (*bruto*) sebesar 7,94% yoy menjadi Rp22,83 triliun. Penyaluran kredit ini sedikit dibawah target bank dengan capaian sebesar 99,95% dan lebih rendah dibandingkan rata-rata industri sebesar 10,39% yoy.

Ekspansi kredit yang dilakukan Bank mampu diimbangi dengan pengelolaan aktiva produktif yang lebih baik. Realisasi rasio NPL bruto sebesar 0,92%, lebih baik dibandingkan tahun 2023 sebesar 1,29% dan target yang ditetapkan sebesar 1,75%. Selain itu, rasio ini lebih baik dibandingkan sebesar 2,08% yang dibukukan oleh industri perbankan. Sejalan dengan capaian ini, rasio NPL bersih adalah sebesar 0,02% atau sama dibandingkan tahun sebelumnya dan lebih baik dibandingkan target sebesar 0,04%.

Selain itu, ekspansi kredit Bank BPD Bali tahun 2024 juga didukung oleh ketersediaan likuiditas yang memadai dengan simpanan nasabah (DPK) mencapai Rp32,17 triliun dengan pertumbuhan 15,10% yoy pada tahun 2024. Pertumbuhan DPK Bank BPD Bali ini juga lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan industri sebesar 4,48% yoy. Pertumbuhan DPK yang lebih tinggi dibandingkan kredit ini berdampak pada realisasi rasio LDR Bank BPD Bali sebesar 70,95%. Capaian rasio LDR ini lebih rendah dibandingkan target sebesar 75,68% dan rata-rata industri sebesar 88,57% pada tahun 2024.

Di sisi lain, pertumbuhan pinjaman yang diberikan Bank BPD Bali tahun 2024 juga didukung oleh ketersediaan modal yang memadai. Hal ini dapat dilihat dari realisasi rasio KPMI sebesar 27,45% atau lebih tinggi dibandingkan target sebesar 26,69%. Capaian rasio ini sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata industri sebesar 26,69% pada tahun 2024.

Dari sisi rentabilitas, selaras dengan pertumbuhan kredit, Bank BPD Bali berhasil mencatatkan pendapatan bunga bersih senilai Rp2,38 triliun pada tahun 2024 atau ekuivalen dengan 101,04% dibandingkan target. Realisasi pendapatan bunga bersih ini juga meningkat 6,07% yoy dibandingkan tahun sebelumnya.

Meski demikian, rasio NIM Bank BPD Bali mengalami penurunan menjadi 6,66% pada tahun 2024 ditengah kenaikan suku bunga acuan. Meski lebih rendah dibandingkan target sebesar 6,82%, capaian ini masih lebih baik dibandingkan rata-rata industri sebesar 4,62%. Hal lain yang patut diapresiasi adalah efisiensi operasional Bank BPD Bali dengan capaian rasio BOPO sebesar 66,85% pada tahun 2024 atau lebih baik dibandingkan sebesar 67,32% pada tahun sebelumnya. Selain itu, realisasi rasio BOPO ini jauh lebih baik dibandingkan rata-rata industri sebesar 81,30%.

Bali Provincial Government, City Government, Regency Government in Bali, Bank BPD Bali has set a policy direction and various strategic initiatives that have been explained earlier.

Bank BPD Bali has successfully achieved asset growth of 11.66% yoy to Rp38.31 trillion in 2024 or 104.32% of the target set. Moreover, this asset growth was able to outperform the banking industry's asset growth of 5.91% yoy. Bank BPD Bali's asset growth was mainly supported by gross loan disbursement of 7.94% yoy to Rp22.83 trillion. This loan disbursement is slightly below the bank's target of 99.95% achievement and lower than the industry average of 10.39% yoy.

The Bank's loan expansion was balanced by better management of productive assets. The realization of the gross NPL ratio was 0.92%, better than in 2023 of 1.29% and the target set at 1.75%. This ratio is also better than the 2.08% recorded by the banking sector. In line with this performance, the net NPL ratio was 0.02%, the same as last year and better than the target of 0.04%.

In addition, Bank BPD Bali's lending expansion in 2024 is also supported by the availability of adequate liquidity, with total customer deposits (TPF) reaching Rp32.17 trillion in 2024, growing by 15.10% yoy. Bank BPD Bali's TPF growth is also higher than the industry growth of 4.48% yoy. The higher TPF growth compared to loans has an impact on the realization of Bank BPD Bali's LDR ratio of 70.95%. The achievement of this LDR ratio is lower than the target of 75.68% and the industry average of 88.57% in 2024.

On the other hand, Bank BPD Bali's loan growth in 2024 is also supported by the availability of adequate capital. This can be seen from the achievement of CAR ratio of 27.45% or higher than the target of 26.69%. The achievement of this ratio is slightly lower than the industry average of 26.69% in 2024.

In terms of profitability, in line with loan growth, Bank BPD Bali managed to realize net interest income of Rp2.38 trillion in 2024 or equivalent to 101.04% compared to the target. The realization of net interest income also increased by 6.07% yoy compared to the previous year.

However, Bank BPD Bali's NIM ratio declined to 6.66% in 2024 amid the increase in the benchmark interest rate. Although lower than the target of 6.82%, this performance is still better than the industry average of 4.62%. Another thing that deserves appreciation is the operational efficiency of Bank BPD Bali with a BOPO ratio of 66.85% in 2024 or better than 67.32% last year. Moreover, the realization of this BOPO ratio is much better than the industry average of 81.30%.

Selanjutnya, laba tahun berjalan Bank BPD Bali juga menunjukkan kinerja lebih baik dengan pertumbuhan sebesar 19,00% yoy menjadi Rp878,47 miliar. Capaian ini juga ekuivalen dengan 112,36% dari target yang ditetapkan. Selaras dengan capaian ini, rasio ROA dan ROE Bank naik menjadi 3,20% dan 21,68% pada tahun 2024 atau lebih tinggi dari target masing-masing sebesar 3,02% dan 20,11%. Selain itu, rasio ROA Bank BPD Bali lebih rendah dari 3,24% pada tahun sebelumnya tetapi masih lebih baik dibandingkan capaian industri perbankan sebesar 2,69%.

Tantangan yang Dihadapi dan Beragam Langkah Penyelesaian

Sebagai salah satu pelaku di industri perbankan dan sektor keuangan dalam cakupan yang lebih luas, Bank BPD Bali sebagai sebuah bank pembangunan daerah menghadapi beberapa tantangan dari faktor eksternal. Tantangan utama yang dihadapi Bank BPD Bali pada tahun 2024 adalah menjalankan fungsi intermediasi menyalurkan dana kepada masyarakat, menjaga pertumbuhan kredit, dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Bali yang berkelanjutan.

Tantangan tersebut tidak terlepas dari pertumbuhan pinjaman yang diberikan belum optimal dengan mempertimbangkan DPK yang dihimpun oleh Bank BPD Bali. Akibatnya, rasio LDR di provinsi Bali mengalami penurunan menjadi 59,36% pada tahun 2024 atau lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 63,09%. Capaian ini juga lebih rendah dibandingkan rata-rata rasio LDR industri perbankan sebesar 88,57% pada tahun 2024. Berkurangnya rasio LDR juga dimungkinkan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi Bali yang tumbuh lebih terbatas terutama akibat pengeluaran konsumsi rumah tangga yang tumbuh lebih rendah pada tahun 2024.

Bank BPD Bali berpandangan bahwa persaingan antar bank sebagai hal yang alamiah khususnya dalam hal penyaluran kredit, terutama kredit UMKM. Namun demikian, Bank BPD Bali telah mempersiapkan diri dengan mengidentifikasi posisi Bank BPD Bali dalam menghadapi persaingan usaha. Bank melakukan kajian terkait kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi sehingga mampu langkah strategis yang akan dilakukan.

Melalui kajian tersebut, Bank BPD Bali akan tetap melakukan penyaluran kredit kepada pihak ketiga dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk menjaga kualitas kredit. Bank BPD Bali mengoptimalkan kekuatannya yang mempunyai *captive market* Aparatur Sipil Negara (ASN), pensiunan ASN untuk ekspansi penyaluran kredit ke segmen tersebut. Selain itu, Bank BPD Bali akan memaksimalkan jaringan kantor dan layanan yang tersebar di setiap kecamatan dengan *online real time* termasuk jaringan agen Bank di seluruh Bali dan Lombok.

Bank BPD Bali selanjutnya mendorong penyaluran kredit produktif dengan melakukan kemitraan strategis sehingga memperkuat *supply chain ecosystem*. Terkait dengan penyaluran kredit untuk UMKM, Bank mengintensifkan penyaluran KUR melalui kerja sama dengan agen bank dan pihak ketiga lainnya. Selanjutnya, dengan adanya tuntutan

Furthermore, Bank BPD Bali's current year profit also showed a better performance with a growth of 19.00% yoy to Rp878.47 billion. This performance is also equivalent to 112.36% of the set target. In line with this achievement, the bank's ROA and ROE ratios increased to 3.20% and 21.68% in 2024 or higher than the respective targets of 3.02% and 20.11%. In addition, Bank BPD Bali's ROA ratio was lower than the previous year's 3.24%, but still better than the banking industry's performance of 2.69%.

Challenges and Solutions

As one of the players in the banking industry and the financial sector in a wider scope, Bank BPD Bali as a regional development bank is faced with several challenges from the external factors. The main challenge faced by Bank BPD Bali in the year 2024 is to carry out the intermediary function of channelling funds to the community by maintaining the growth of credit in order to support the economic growth and sustainable development of Bali.

This challenge is inseparable from the growth of loan provision, which has not been optimal in light of Bank BPD Bali's DPK collection. As a result, the LDR ratio in the province of Bali has decreased to 59.36% in 2024 or lower than the previous year of 63.09%. This performance is also lower than the average LDR ratio of the banking industry of 88.57% in 2024. The decline in the LDR ratio is also likely to be influenced by Bali's more limited economic growth, especially due to lower household consumption expenditure growth in 2024.

Bank BPD Bali considers competition among banks as a natural thing, especially in terms of lending, especially MSME lending. However, Bank BPD Bali has prepared itself by identifying the position of Bank BPD Bali in the face of business competition. The bank conducts a study related to the strengths, weaknesses, opportunities and challenges faced so that it is able to take strategic steps.

Through this review, Bank BPD Bali will continue to distribute credit to third parties by adhering to the principle of prudence in order to maintain the quality of credit. Bank BPD Bali is optimizing its strength, which has a captive market of state civilian agency (ASN), retired ASN to expand credit distribution to the segment. Moreover, Bank BPD Bali will optimize the network of offices and services distributed to each sub-district with online real time including the bank's agent network all over Bali and Lombok.

Bank BPD Bali further promotes the distribution of productive loans by establishing strategic partnerships to strengthen the supply chain ecosystem. In terms of credit distribution to MSMEs, the bank is intensifying the distribution of KUR through cooperation with bank agents and other third parties. Furthermore, with the demands of

perkembangan digital semakin kompleks, Bank BPD Bali menerapkan tata kelola yang baik dengan menjaga ketahanan dan keamanan siber Bank. Bank juga senantiasa melakukan inovasi produk dan layanan guna menjangkau konsumen yang beragam, serta permodalan Bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Implementation

Partisipasi Aktif dan Sinergi yang Kuat oleh Seluruh Struktur Tata Kelola

Bank BPD Bali berkomitmen kuat terhadap implementasi prinsip-prinsip GCG yakni Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kewajaran yang diperkuat dengan perilaku beretika dan aspek keberlanjutan. Pelibatan dan partisipasi aktif struktur tata kelola Bank BPD Bali sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 401/KEP/DIR/KPN/2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang mencakup Organ Utama dan Organ Pendukung Dewan Komisaris dan Direksi dengan menjalankan tugas dan tanggung jawab terbukti mampu mendukung penerapan praktik terbaik GCG di semua jenjang organisasi Bank.

Implementasi atas penerapan GCG juga ditunjukkan oleh Bank BPD Bali dengan menerbitkan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) baru serta melakukan pembaruan atas BPP dan SOP selama tahun 2024 dalam rangka memperkuat penerapan GCG dan merespon dinamika yang terjadi di industri perbankan dengan mengacu pada ketentuan *regulator*. Direksi sangat mengapresiasi atas diterbitkannya BPP baru dan BPP perubahan serta SOP baru dan SOP perubahan yang mencapai 75 (tujuh puluh lima) ketentuan yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi Bank BPD Bali. Dengan demikian, secara kumulatif, Bank BPD Bali telah memiliki 175 ketentuan internal yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) Buku Pedoman Perusahaan (BPP) dan 148 Standar Operasional Prosedur (SOP).

Tersedianya beragam ketentuan internal yang senantiasa diperbarui tersebut mendukung terselenggaranya beragam kegiatan terkait penerapan GCG di lingkungan Bank. Penyelenggaraan RUPS, Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris dan Direksi, Rapat Komite dan Satuan Kerja beserta implemntasi tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dilaksanakan sebagai bentuk kepatuhan Bank BPD Bali terhadap POJK No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Bank BPD Bali juga melakukan evaluasi atas penerapan GCG di lingkungan Bank dengan melakukan *Self-Assessment Good Corporate Governance* yang dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun. Hasil *self-assessment* GCG untuk periode Januari-Juni 2024 dan periode

increasingly complex digital developments, Bank BPD Bali is implementing good governance by maintaining the Bank's cyber resilience and security. The bank also continues to innovate products and services to reach diverse consumers, as well as the bank's capital in accordance with the regulations set by the Financial Services Authority (OJK).

Active Participation and Strong Synergy of the Entire Governance Structure

Bank BPD Bali is strongly committed to the implementation of GCG principles, namely transparency, accountability, responsibility, independence and fairness, which are reinforced by ethical behavior and sustainability aspects. The involvement and active participation of Bank BPD Bali governance structure, as stipulated in the Board of Directors' Decree No. 401/KEP/DIR/KPN/2024 dated August 5, 2024, which includes the main and supporting bodies of the Board of Commissioners and Directors through the performance of their duties and responsibilities, has proven to be able to support the implementation of GCG best practices at all levels of the Bank's organization.

The implementation of GCG is also demonstrated by Bank BPD Bali by issuing a new Corporate Policy (BPP) and Standard Operating Procedures (SOP) and updating the BPP and SOP during 2024 to strengthen the implementation of GCG and respond to the dynamics that occur in the banking industry by referring to regulatory provisions. The Board of Directors highly appreciates the issuance of the new BPP and the revised BPP, as well as the new SOP and the revised SOP, reaching 75 (seventy-five) provisions stipulated by the Decree of the Board of Directors of Bank BPD Bali. Thus, Bank BPD Bali has cumulatively 175 internal regulations consisting of 27 (twenty-seven) corporate policies (BPP) and 148 standard operating procedures (SOP).

The availability of various internal regulations, which are constantly updated, supports the implementation of various activities related to the implementation of the GCG within the Bank. The implementation of GMS, Board of Commissioners Meeting, Board of Directors Meeting, Board of Commissioners and Board of Directors Meeting, Committee and Work Unit Meetings as well as the implementation of duties and responsibilities of each corporate body has been in accordance with the applicable provisions. This is done as a form of compliance of Bank BPD Bali with POJK No. 17 of 2023 dated September 14, 2023 regarding the implementation of governance for commercial banks.

Bank BPD Bali also evaluates the implementation of GCG in the Bank's environment by conducting a Good Corporate Governance Self-Assessment, which is conducted 2 (two) times a year. The results of the GCG Self-Assessment for the period January-June 2024 and the period July-



Juli-Desember 2024 adalah peringkat 2 dengan Predikat Komposit “Baik”. Bank BPD Bali berkomitmen mempertahankan dan memperbaiki nilai komposit GCG tersebut melalui monitoring pemenuhan 11 pilar faktor penilaian GCG dalam konteks *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome* serta mempertimbangkan rekomendasi dan saran dari OJK.

Kualitas dari penerapan GCG Bank BPD Bali juga terefleksi dari Tingkat Kesehatan Bank. Berdasarkan hasil penilaian sendiri dan penilaian OJK, Tingkat Kesehatan Bank berada pada peringkat PK-2, dimana didalamnya terdapat penilaian Profil Risiko yaitu pada peringkat “LowMod” dengan Risiko *Inherent* pada peringkat “LowMod” dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) pada peringkat “Satisfactory”. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi Bank secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal.

Terakhir, kualitas atas penerapan GCG di lingkungan Bank BPD Bali yang mampu menghasilkan kinerja keuangan dan operasional yang lebih baik juga diakui oleh pihak eksternal. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) telah menetapkan peringkat *General Obligation idA+* dengan prospek stabil kepada Bank BPD Bali. Peringkat tersebut menunjukkan bahwa Bank BPD Bali memiliki kemampuan yang kuat dibandingkan obligor Indonesia lainnya untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya.

Penilaian Atas Kinerja Komite di Bawah Direksi

Dalam menjalankan tugas pengelolaan Bank BPD Bali, Direksi dibantu oleh Komite-Komite di bawah Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh ketentuan internal Bank. Direksi berpandangan bahwa komite-komite di bawah Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik selama tahun 2024 sebagai berikut:

Komite Manajemen Risiko telah menjalankan tugas dan kewajibannya terkait dengan penyusunan kebijakan, dan pedoman risiko beserta pelaksanaannya serta menyelenggarakan rapat sebanyak 7 (tujuh) selama tahun 2024. Komite Kebijakan Perkreditan telah menjalankan tugas dan melaksanakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali terkait penyusunan Kebijakan Perkreditan beserta implementasinya.

Komite Kredit telah menjalankan tugas dan kewajibannya terkait dengan rekomendasi dan/atau persetujuan kredit disamping evaluasi dan menganalisa permohonan kredit serta penyelenggaraan 7 (tujuh) rapat pada tahun 2024. Komite *Asset and Liability Management* (ALCO) telah menjalankan tugas dan kewajibannya terkait dengan pengelolaan aset dan liabilitas Bank yang sesuai dengan tujuan dan perkembangan Bank. Komite ALCO melaksanakan 13 (tiga belas) kali selama tahun 2024.

Selanjutnya, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah menjalankan tugas dan kewajibannya terkait dengan pengelolaan rencana, kebijakan, dan implementasi teknologi informasi Bank. Komite Tim Tanggap Insiden

December 2024 are ranked 2 with a composite predicate of “Good”. Bank BPD Bali is committed to maintain and improve the GCG composite score by monitoring the fulfillment of the 11 pillars of GCG assessment factors in the context of governance structure, governance process and governance outcome as well as considering the recommendations and suggestions from the OJK.

The quality of Bank BPD Bali’s GCG implementation is also reflected in the Bank’s Health Level. Based on the results of the self-assessment and OJK assessment, the Bank’s Health Level is PK-2, which includes a risk profile assessment, namely at the “LowMod” level with the inherent risk at the “LowMod” level and the quality of risk management implementation (KPMR) at the “Satisfactory” level. This indicates that the bank’s condition is generally sound, such that it is considered capable of withstanding significant negative impacts from changes in business conditions and external factors.

Finally, the quality of GCG implementation in the environment of Bank BPD Bali, which is capable of producing better financial and operational performance, is also recognized by external parties. The Indonesian Securities Rating Agency (Pefindo) has assigned a general obligation rating of idA+ with a stable outlook to Bank BPD Bali. The rating indicates that Bank BPD Bali has a strong ability to meet its long-term financial obligations compared to other Indonesian borrowers.

Assessment of the Performance of the Committees under the Board of Directors

In performing the management duties of Bank BPD Bali, the Board of Directors is assisted by the Committees under the Board of Directors in accordance with the duties and responsibilities set forth in the Bank’s Internal Regulations. The Board of Directors is of the opinion that the Committees under the Board of Directors have performed their duties and responsibilities well during the year under review as follows:

The Risk Management Committee has fulfilled its duties and responsibilities related to the preparation of policies and risk guidelines and their implementation and held 7 (seven) meetings in 2024.. The Credit Policy Committee fulfilled its duties and their implementation with 8 (eights) meetings related to the preparation of credit policies and their implementation.

The Credit Committee has fulfilled its duties and obligations related to credit recommendations and/or approvals, in addition to the evaluation and analysis of credit applications as well as 7 (seven) meetings in 2024. The Asset and Liability Management (ALCO) Committee has performed its duties and obligations related to the management of the Bank’s assets and liabilities in accordance with the Bank’s objectives and developments. The ALCO Committee held 13 meetings in 2024.

In addition, the Information Technology Steering Committee has fulfilled its duties and obligations related to the management of the Bank’s information technology plans, policies and implementation. The Computer Security

Siber (CSIRT) telah menjalankan tugas dan kewajibannya terkait dengan pengelolaan pelaksanaan BPD Bali CSIRT dan metodologi penanganan insiden siber, dan supervisi terhadap penanganan dan penanggulangan insiden siber yang sedang dihadapi. Komite CSIRT menyelenggarakan rapat sebanyak 5 (lima) kali pada tahun 2024.

Komite Tim Tanggap Insiden Siber telah menjalankan tugas dan kewajibannya untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan BPD Bali CSIRT dan metodologi penanganan insiden siber, dan supervisi terhadap penanganan dan penanggulangan insiden siber yang sedang dihadapi. Komite ini melaksanakan 5 (lima) kali rapat selama tahun 2024.

Terakhir dan tidak kalah penting adalah Komite Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen yang telah menjalankan tugas dan kewajibannya terkait dengan pengelolaan pengaduan konsumen dari penyusunan sistem dan prosedur internal Bank hingga penyelesaian pengaduan konsumen tersebut. Komite ini juga telah mengadakan 4 (empat) kali rapat pada tahun 2024.

Informasi lengkap terkait implementasi tugas dari masing-masing Komite di bawah Direksi dapat dilihat di Bab Tata Kelola dari laporan tahunan ini.

Incident Response Team (CSIRT) Committee has performed its duties and obligations related to the management of the implementation of the BPD Bali CSIRT and the methodology for handling cyber incidents, as well as the supervision of the handling and management of cyber incidents currently faced. The CSIRT Committee organized 5 (five) meetings in 2024.

The Computer Security Incident Response Team Committee has performed its duties and obligations to manage the implementation of BPD Bali CSIRT and the methodology for handling cyber incidents, and to supervise the handling and management of cyber incidents currently faced. This committee held 5 (five) meetings during 2024.

Last but not least is the Consumer Complaints Handling and Resolution Committee, which has performed its duties and obligations related to managing consumer complaints from preparing the Bank's internal systems and procedures to resolving consumer complaints. This committee also held 4 (four) meetings in 2024.

Complete information regarding the implementation of the duties of each Committee under the Board of Directors, please refer to Governance Chapter of this annual report.

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi

Human Resources and Information Technology Development

Pencapaian Kinerja Bank BPD Bali Didukung oleh Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) berperan penting dalam mencapai target kinerja sebagaimana yang ditetapkan dalam RBB. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank BPD Bali telah menetapkan strategi manajemen SDM pada tahun 2024. Pilar pertama adalah pengembangan SDM yang dilakukan dengan mengoptimalkan kapabilitas organisasi berbasis kinerja dan risiko, penguatan internalisasi budaya kerja, dan meningkatkan Standarisasi kerja SDM dan Kepuasan Layanan Pelanggan Internal.

Selain itu, Bank BPD Bali juga mengoptimalkan kapabilitas pengelolaan SDM yang profesional, berintegritas dan berdaya saing melalui pengembangan manajemen talenta, menyempurnakan Kebijakan di Bidang *Human Capital*, dan meningkatkan Hubungan Industrial. Bank juga mengimplementasikan kebijakan remunerasi dengan *me-review* kebijakan remunerasi bagi Pengurus Bank BPD Bali, melaksanakan *review* Standar Operasional Prosedur (SOP) Gaji dan Tunjangan, melaksanakan penangguhan remunerasi yang bersifat variabel bagi material *risk takers*, dan menyusun kebijakan *job grading* yang mengakomodir remunerasi berbasis kinerja dan risiko.

Bank BPD Bali's Performance Achievements Supported by Human Resources and Information Technology Development

Human Resource (HR) development plays an important role in achieving the performance targets set out in the RBB. In this regard, Bank BPD Bali has established an HR Management Strategy in 2024. The first pillar is HR development, which is carried out by optimizing organizational capabilities based on performance and risk, strengthening the internalization of work culture, and improving HR work standards and internal customer service satisfaction.

In addition, Bank BPD Bali also optimizes professional, integrity and competitive HR management capabilities by developing talent management, improving human capital policies and improving labor relations. The bank is also implementing a remuneration policy by reviewing the remuneration policy for Bank BPD Bali's management, conducting a review of the Salary and Allowance Standard Operating Procedure (SOP), implementing a suspension of variable remuneration for material risk takers, and preparing a job grading policy that takes into account performance and risk-based remuneration.

Komitmen Bank BPD Bali terhadap pengembangan SDM dapat dilihat dari survei kepuasan pegawai yang dilakukan pada tahun 2024. Hasil survei tersebut menunjukkan terdapat peningkatan kepuasan Karyawan sebesar 5.17% dari hasil survei tahun 2023. Hal ini menunjukkan kepuasan karyawan terhadap kebijakan dan fasilitas dari manajemen serta pekerjaan sebagai Karyawan Bank BPD Bali. Efektivitas pengelolaan SDM Bank Bali juga diperkuat dengan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia yang mencakup beragam aspek pengelolaan SDM.

Aspek penting lainnya yang menjadi perhatian Bank BPD Bali adalah pengembangan teknologi informasi (TI). Pengembangan TI Bank BPD Bali selama tahun 2024 fokus pada peningkatan produk *Digital Banking*, *E-Money*, *Open API*, *Siskeudes*, *New Mobile Banking*, dan *Infrastruktur*. Beberapa aspek terkait dengan infrastruktur yang menjadi fokus pengembangan Bank adalah *Security* dan *Keamanan Siber*, *Data Privacy*, *Peningkatan dan Optimalisasi Digital Banking*, dan *Peningkatan Infrastruktur*. Pengembangan beberapa aspek infrastruktur penting dengan memperhatikan perkembangan teknologi digital, kebutuhan layanan yang lebih cepat, handal, dan efisien sekaligus untuk memperkuat perlindungan nasabah.

TI Bank BPD Bali melakukan beragam inovasi selama tahun 2024 yang mencakup peningkatan terhadap layanan eksisting dan optimalisasi *system monitoring*, pelaporan, dan pencatatan data keuangan. Inovasi digital lainnya adalah pengembangan *Open Application Program Interface (API) QRIS* untuk meningkatkan daya saing Bank dan integrasi dengan aplikasi pihak lain serta dukungan solusi digital untuk retribusi dari wisatawan asing di Bali yang memudahkan pembayaran melalui berbagai channel pembayaran. Selain itu, TI Bank melakukan berbagai inovasi untuk mendukung kegiatan operasional Bank BPD Bali.

Disamping penerapan berbagai kebijakan strategis dan inovasi TI di atas, Bank BPD Bali juga memperkuat tata kelola dalam penyelenggaraan TI supaya memberikan nilai tambah bagi Bank. Peningkatan kualitas Tata Kelola TI dilakukan oleh Bank BPD Bali antara lain melalui penguatan pada aspek *people*, *process*, dan *technology*. Dengan kata lain, peningkatan kompetensi SDM TI, penyesuaian dan penyempurnaan BPP dan SOP TI supaya relevan dengan dinamika yang terjadi di internal dan eksternal Bank serta implementasi solusi *security* untuk meningkatkan tata kelola.

Komitmen Keuangan Keberlanjutan

Sustainability Finance Commitment

Implementasi Strategi Keberlanjutan

Bank BPD Bali menyadari pentingnya untuk menciptakan nilai ekonomi, sosial dan lingkungan melalui tata kelola yang baik dengan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan disamping aspek kualitas pertumbuhan bisnis dan profitabilitas. Hal ini selaras dengan visi dan misi Bank BPD Bali dalam implementasi Keuangan Berkelanjutan yang selaras dengan fokus utama pembangunan Bali.

Bank BPD Bali's commitment to human resource development is evidenced by the employee satisfaction survey conducted in 2024. The results of the survey showed an increase in employee satisfaction of 5.17% compared to the results of the 2023 survey. This shows that employees are satisfied with the policies and facilities of management and working as an employee of Bank BPD Bali. The effectiveness of human resource management of Bank BPD Bali is also strengthened by the use of Human Resource Management Information System which covers various aspects of human resource management.

Another important aspect that Bank BPD Bali is concerned with is the development of Information Technology (IT). Bank BPD Bali's IT development in 2024 focuses on improving Digital Banking, E-Money, Open API, Siskeudes, New Mobile Banking and Infrastructure products. Several aspects related to infrastructure that are the focus of the bank's development are security and cybersecurity, data protection, digital banking improvement and optimization, and infrastructure improvement. The development of several important infrastructure aspects by paying attention to the development of digital technology, the need for faster, more reliable and efficient services as well as strengthening customer protection.

Bank BPD Bali's IT implemented various innovations in 2024, including improvements to existing services and optimization of monitoring systems, reporting and recording of financial data. Other digital innovations include the development of the QRIS Open Application Program Interface (API) to increase the bank's competitiveness and integration with other third-party applications, as well as the support of digital solutions for foreign tourist fees in Bali, facilitating payments through various payment channels. In addition, Bank IT is implementing various innovations to support the operational activities of Bank BPD Bali.

In addition to the implementation of various strategic policies and IT innovations mentioned above, Bank BPD Bali is also strengthening governance in IT implementation in order to add value to the bank. Improving the quality of IT governance is carried out by Bank BPD Bali, among others, by strengthening the aspects of people, process and technology. In other words, improving the competence of IT HR, adjusting and refining BPP and IT SOP to be relevant to the dynamics that occur internally and externally in the bank, and implementing security solutions to improve governance.

Implementation of Sustainability Strategy

Bank BPD Bali is aware of the importance of the creation of economic, social and environmental value through good governance by contributing to the achievement of sustainable development goals in addition to aspects of business growth, quality and profitability. This is in line with the vision and mission of Bank BPD Bali in the implementation of sustainable finance, which is in line with the main focus of the development of Bali.

Sebagai Bank yang dimiliki Pemerintah di Provinsi Bali, Bank BPD Bali memastikan bahwa setiap langkah yang diambil Bank sejalan dengan upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dengan menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan sekaligus memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang diambil. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank BPD Bali telah menerapkan sejumlah strategi yang melibatkan berbagai aspek.

Direksi mengapresiasi atas aktualisasi strategi yang meliputi efisiensi sumber daya khususnya energi. Bank BPD Bali memberikan fokus pada efisiensi penggunaan sumber daya, terutama energi, sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi dampak lingkungan. Bank BPD Bali juga menerapkan kriteria *Beyond Compliance* yang menerapkan kriteria di luar standar kepatuhan dan mencerminkan komitmen pada praktik-praktik berkelanjutan yang melebihi kewajiban hukum atau tidak hanya sekedar mematuhi peraturan yang berlaku.

Terakhir, Bank BPD Bali memberdayakan kesehatan masyarakat dan mencapai kemandirian. Bank berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat untuk menjaga kualitas layanan dan mencapai kemandirian, serta menciptakan nilai bersama melalui pendekatan *Creating Shared Value* (CSV).

Penjelasan lebih lanjut mengenai strategi keberlanjutan Bank BPD Bali beserta nilai keberlanjutan dan komitmen terhadap pelaksanaan keuangan berkelanjutan dapat dilihat pada bab Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan ini.

As a government-owned bank in the Province of Bali, Bank BPD Bali ensures that every step taken by the Bank is aligned with striving to achieve sustainable development goals by creating sustainable economic value while considering social and environmental impacts. In this regard, Bank BPD Bali has implemented a number of strategies covering various aspects.

The Board of Directors appreciates that the Bank BPD Bali continues to implement strategies that include resource efficiency, especially energy. Bank BPD Bali focuses on the efficient use of resources, especially energy, as part of its efforts to reduce environmental impact. Bank BPD Bali also applies the "Beyond Compliance" criteria, which apply criteria that go beyond complying with standards and reflect a commitment to sustainable practices that go beyond legal obligations or just complying with applicable regulations.

Finally, Bank BPD Bali strengthens public health and achieves independence. The bank actively participates in community empowerment to maintain service quality and achieve independence. It also creates shared value through the Creating Shared Value (CSV) approach.

Please refer to Bank BPD Bali's Sustainability Report, which is published separately from this Annual Report, for further explanation of Bank BPD Bali's sustainability strategy, sustainability values and commitment to implementing sustainable finance.

Prospek Usaha Tahun 2025

Business Prospect 2025

Estimasi Pertumbuhan PDB Tetap Stabil Mendorong Pertumbuhan Kredit Tetap Kuat

Sejalan dengan perkiraan IMF bahwa perekonomian dunia akan tumbuh stabil pada tahun 2025, Pemerintah Indonesia memproyeksikan pertumbuhan PDB Indonesia masih terjaga di level 5,2% pada tahun mendatang ditopang dengan estimasi inflasi yang terkendali sebesar 2,5%. Sejalan dengan perkiraan pertumbuhan PDB tersebut, Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan kredit sebesar 11-13% pada tahun mendatang atau sedikit lebih baik dibandingkan pertumbuhan kredit pada tahun sebelumnya.

Menurut BI, optimisme pertumbuhan kredit tersebut didukung oleh terjaganya risiko kredit yang tercermin pada rasio *Loan at Risk* (LAR) yang menunjukkan penurunan. Faktor penopang lainnya adalah hasil *stress-test* yang menunjukkan ketahanan perbankan Indonesia yang kuat dengan rasio permodalan CAR yang masih di atas 25% pada berbagai *scenario*. Selanjutnya, ketahanan permodalan dan likuiditas perbankan juga ditopang oleh kemampuan membayar atau *Interest Coverage Ratio* (ICR) dan profitabilitas korporasi yang terjaga yang sejalan dengan hasil *stress-test* perbankan terkini.

GDP Growth Estimates Remain Stable, Driving Strong Loan Growth

In line with the IMF's estimate that the global economy will grow steadily in 2025, the Indonesian government expects Indonesia's GDP growth to remain stable at 5.2% next year, supported by controlled inflation estimates of 2.5%. In line with the GDP growth estimates, Bank Indonesia (BI) expects credit growth to be 11-13% next year or slightly better than last year's credit growth.

According to BI, the optimism for credit growth is supported by the sustained credit risk as reflected in the Loan at Risk (LAR) ratio, which shows a decline. Another supportive factor is the stress test results, which show strong resilience of Indonesian banks with the CAR capital ratio still above 25% in various scenarios. Furthermore, the resilience of bank capital and liquidity is also supported by the solvency or interest coverage ratio (ICR) and sustained corporate profitability which is in line with the latest bank stress test results.



Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Bali di Atas Pertumbuhan PDB Indonesia Setelah mampu membukukan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,48% yoy pada tahun 2024, PDRB diperkirakan oleh Bank Indonesia akan tumbuh pada rentang 5,0-5,8% yang didorong oleh pertumbuhan sektor Pertanian, Konstruksi, serta sektor terkait pariwisata. Kenaikan kinerja sektor konstruksi diharapkan meningkat, seiring dengan percepatan proyek strategis daerah. Selain itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali diperkirakan tetap berada pada rentang sasaran inflasi $2,5\pm 1\%$. Optimisme pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan kredit yang lebih baik di wilayah tersebut.

Prospek Pertumbuhan Ekonomi Digital

Kondisi industri perbankan di Indonesia yang kuat dibutuhkan untuk mendukung perkembangan ekonomi digital pada tahun mendatang. Menurut Google, Temasek, dan Bain & Company, nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai *Gross Merchandise Value* (GMV) sebesar US\$200-360 miliar pada tahun 2030. Proyeksi peningkatan ekonomi digital tersebut didukung oleh layanan keuangan digital atau *digital financial services* (DFS) dengan *gross transaction value* (GTV) dari *digital payments* diperkirakan mencapai US\$900 miliar, pinjaman digital sebesar US\$40 miliar, AUM atau kekayaan digital senilai US\$40 miliar, dan asuransi digital sebesar US\$1 miliar.

Selain itu, peluang pertumbuhan *industry* perbankan di Indonesia dipengaruhi oleh tingkat penetrasi layanan perbankan yang masih lebih rendah di Indonesia. Google, Temasek, dan Bain & Company melaporkan persentase *unbanked* dan *underbanked* masing-masing sebesar 51,00% dan 26,00% dari total populasi penduduk Indonesia berusia di atas 18 tahun sebanyak 181 juta pada tahun 2024. Dengan demikian, secara kumulatif terdapat 77% target pasar yang bisa dikembangkan termasuk melalui layanan perbankan digital.

Dengan mempertimbangkan prospek ekonomi dan industri perbankan pada tahun mendatang, Bank BPD Bali telah menetapkan kebijakan strategis untuk tahun mendatang. Arah kebijakan Bank BPD Bali tahun 2025 berkenaan dengan rencana strategis Bank sebagai suatu entitas bisnis yang kuat, kontributif dan kompetitif terdiri dari Peningkatan Ketahanan Kelembagaan, Peningkatan Kemampuan sebagai *Agent of Regional Development*, dan Peningkatan Daya Saing. Selanjutnya ketiga arah kebijakan tersebut diturunkan menjadi sejumlah inisiatif strategis yang telah dijalankan pada tahun sebelumnya dan akan dilanjutkan pada tahun mendatang.

Bali's Economic Growth Forecast Higher than Indonesia's GDP Growth After achieving economic growth of 5.48% yoy in 2024, Bank Indonesia estimates that GDP will grow in the range of 5.0-5.8%, driven by growth in agriculture, construction and tourism-related sectors. The performance of the construction sector is expected to increase in line with the acceleration of regional strategic projects. In addition, the economic growth projection for Bali Province is expected to remain within the inflation target range of $2.5\pm 1\%$. Optimism about economic growth in Bali Province is expected to support better credit growth in the region.

Growth Prospects for the Digital Economy

Indonesia needs a strong banking industry to support digital economy development in the coming years. According to Google, Temasek and Bain & Company, the value of Indonesia's digital economy is estimated to reach a gross merchandise value (GMV) of US\$200-360 billion by 2030. The projected growth of the digital economy will be supported by digital financial services (DFS), with an estimated gross transaction value (GTV) of US\$900 billion from digital payments, US\$40 billion from digital loans, US\$40 billion from AUM or digital assets, and US\$1 billion from digital insurance.

In addition, the growth opportunities for the banking industry in Indonesia are influenced by the penetration of banking services, which is still low in Indonesia. According to Google, Temasek and Bain & Company, the percentage of unbanked and underbanked is 51.00% and 26.00%, respectively, of Indonesia's total population of 181 million over the age of 18 in 2024. Thus, cumulatively, there is 77% of the target market that can be developed, including through digital banking services.

Considering the economic and banking industry prospects in the coming year, Bank BPD Bali has set a strategic policy for the coming year. The direction of Bank BPD Bali's policy in 2025 regarding the Bank's strategic plan as a strong, contributing and competitive business entity consists of increasing institutional resilience, increasing capabilities as an agent of regional development, and increasing competitiveness. The three policy directions are further broken down into a number of strategic initiatives that were implemented in the previous year and will be continued in the coming year.

Perubahan Komposisi Direksi Tahun Buku 2024

Changes in The Composition of the Board of Directors for The Fiscal Year 2024

Susunan dan Nomenklatur Direksi Tidak Berubah

Bank BPD Bali melaporkan tidak terdapat perubahan komposisi Direksi selama tahun 2024. Jumlah dan Komposisi Direksi Bank BPD Bali sesuai Akta No. 47 (empat puluh tujuh) tanggal 22 Februari dan Akta No. 25 (dua puluh lima) tanggal 12 Mei 2023. Adapun susunan Direksi Bank BPD Bali per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Board of Directors Composition and Nomenclature Unchanged

Bank BPD Bali reported that there were no changes in the composition of the Board of Directors during 2024. The number and composition of the Board of Directors of Bank BPD Bali according to Deed No. 47 (forty-seven) dated February 22 and Deed No. 25 (twenty-five) dated May 12, 2023. The composition of the Board of Directors of Bank BPD Bali as of December 31, 2024 is as follow:

DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS

per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
as of December 31, 2024 and December 31, 2023

Direktur Utama President Director	I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.
Direktur Operasional & TI Director of Operational & TI	Ida Bagus Gede Setia Yasa
Direktur Bisnis Director of Business Non Loan	I Nyoman Sumanaya, S.E., M.M.
Direktur Kredit Director of Loan	Made Lestara Widiatmika
Direktur Kepatuhan Director of Compliance	Drs. I Wayan Sutela Negara

Penutup dan Apresiasi

Conclusion and Appreciation

Bank BPD Bali berhasil membukukan kinerja yang lebih baik dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2024 di tengah tantangan PDB Indonesia yang tumbuh lebih terbatas dan kenaikan suku bunga acuan yang dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi global. Direksi Bank BPD Bali berkeyakinan pencapaian kinerja yang memuaskan ini berkat dukungan dari berbagai pemangku kepentingan.

Oleh karena itu, atas nama Direksi, kami menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada Dewan Komisaris atas kepercayaan, arahan, rekomendasi, dan nasihat yang telah diberikan kepada Direksi terkait pengelolaan Bank BPD Bali selama tahun 2024. Kami juga berterima kasih dan memberikan penghargaan kepada nasabah, pemegang saham yakni Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Kabupaten di Provinsi Bali yang telah memberikan dukungan sangat kepada Bank BPD Bali, regulator, masyarakat dan segenap pemangku kepentingan lainnya atas dukungan dan kerjasama yang telah terjalin baik.

Bank BPD Bali has succeeded in achieving a better performance compared to the target set in 2024. This was achieved amidst the challenges of Indonesia's GDP which grew more limited and the increase in the benchmark interest rate influenced by the global economic uncertainty. The Board of Directors of Bank BPD Bali believes that this satisfactory performance is due to the support of various stakeholders.

Therefore, on behalf of the Board of Directors, we would like to express our gratitude and appreciation to the Board of Commissioners for the trust, guidance, recommendations and advice that have been given to the Board of Directors with regard to the management of Bank BPD Bali during 2024. We also thank and appreciate customers, shareholders, namely the Provincial Government, City Government and Regency Government in Bali Province who have provided great support to Bank BPD Bali, regulators, community and all other stakeholders for the support and cooperation that has been well established.

Hubungan yang baik dengan beragam pemangku kepentingan ini menjadi pendorong bagi Bank BPD Bali untuk terus berkontribusi dengan menyajikan beragam produk dan layanan perbankan serta melakukan inovasi produk dan layanan perbankan digital. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan layanan perbankan kepada nasabah sekaligus memastikan tercapainya pertumbuhan Bank BPD Bali secara berkelanjutan.

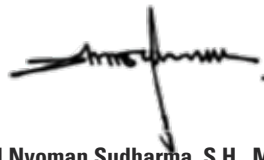
Terakhir kami menyampaikan rasa terima kasih kepada segenap karyawan Bank BPD Bali atas dedikasi dan kerja keras untuk mewujudkan visi dan misi Bank.

This good relationship with various stakeholders is a driving force for Bank BPD Bali to continue to contribute through the presentation of various banking products and services and the innovation of digital banking products and services. This is done in order to improve banking services to customers while ensuring the achievement of sustainable growth of Bank BPD Bali.

Finally, we would like to thank all the employees of Bank BPD Bali for their dedication and hard work in helping us to achieve the Bank's vision and mission.

Atas Nama Direksi

On Behalf of the Board of Directors



I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.

Direktur Utama

President Director





04

Tinjauan **PENDUKUNG BISNIS** *Business Support Review*



SUMBER DAYA MANUSIA

Human Resources

Bank BPD Bali berkomitmen meningkatkan kualitas *Human Capital* (HC) secara berkelanjutan dalam rangka berkontribusi terhadap pertumbuhan bisnis Bank. HC Bank BPD Bali diharapkan memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk mendukung ekspansi di tengah dinamika yang terjadi di industri perbankan. Kompetensi HC juga dibutuhkan untuk mendukung perkembangan transformasi digitalisasi Bank sehingga mampu menyediakan beragam layanan perbankan yang selaras dengan visi Bank yaitu "Menjadi Bank yang kuat, berdaya saing tinggi, dan terkemuka dalam melayani UMKM serta berkontribusi bagi pertumbuhan perekonomian daerah yang berkelanjutan".

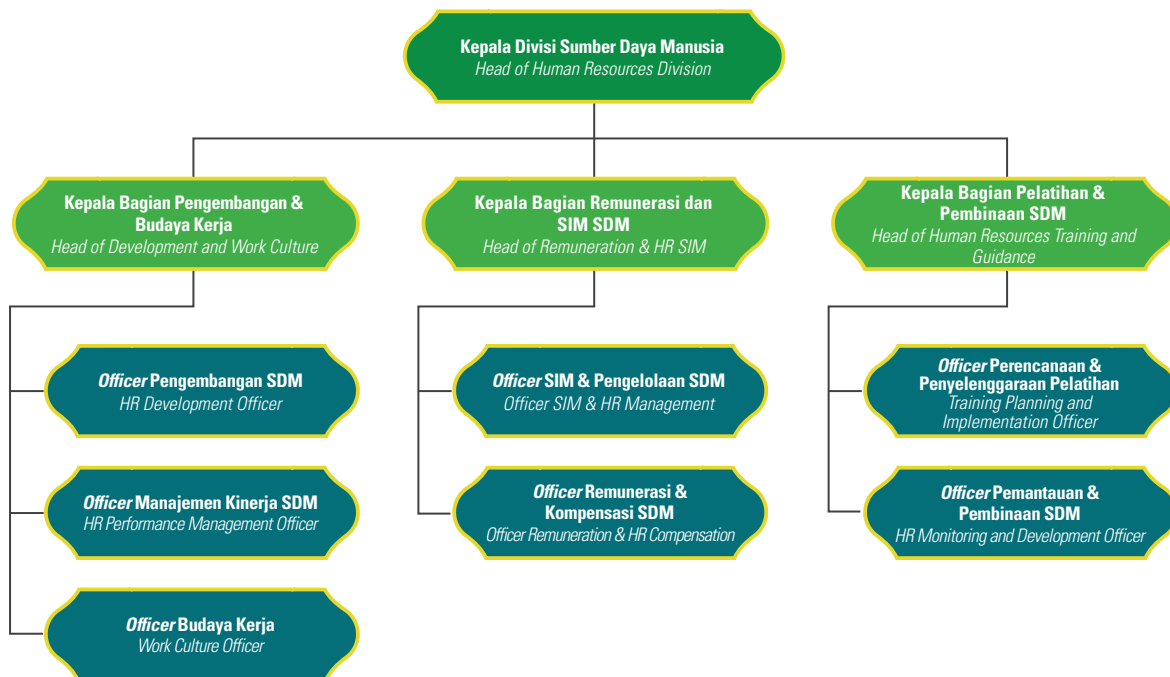
Bank BPD Bali is committed to sustainably improve the quality of Human Capital (HC) to contribute to the bank's business growth. Bank BPD Bali HC is expected to have the necessary competencies to support the expansion amidst the dynamics occurring in the banking industry. HC competencies are also needed to support the development of the bank's digital transformation so that it is able to provide various banking services that are in line with the bank's vision, namely "to be a strong, highly competitive and leading bank in the service of MSMEs and a contributor to sustainable regional economic growth".

Struktur Pengelola SDM

Human Resources Management Structure

Struktur Pengelola Sumber Daya Manusia Bank BPD Bali diketuai oleh seorang Kepala Divisi Sumber Daya Manusia sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 0424/KEP/DIR/RENSTRA/2024. Adapun bagan struktur pengelola SDM Bank adalah sebagai berikut ini:

The Human Resources Management Structure of Bank BPD Bali is chaired by a Head of Human Resources Division as stipulated in the Board of Directors' decree No. 0424/KEP/DIR/RENSTRA/2024. The Bank's Human Resources Management Structure is described in the following diagram:



Strategi Pengelolaan *Human Capital* *Human Capital Management Strategy*

Terkait dengan hal tersebut di atas, Bank BPD Bali telah menetapkan strategi manajemen HC pada tahun 2024 yang terdiri dari:

- 1) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dilaksanakan melalui:
 - a. Mengoptimalkan kapabilitas organisasi berbasis kinerja dan risiko
 - b. Penguatan Internalisasi Budaya Kerja
 - c. Meningkatkan Standarisasi kerja SDM dan Kepuasan Layanan Pelanggan Internal
 - d. Mengoptimalkan kapabilitas pengelolaan SDM yang profesional, berintegritas dan berdaya saing melalui pengembangan manajemen *talenta*.
 - e. Menyempurnakan Kebijakan di Bidang *Human Capital*.
 - f. Meningkatkan Hubungan Industrial
- 2) Kebijakan Remunerasi (*Remuneration Policies*) melalui :
 - a. Me-review kebijakan remunerasi bagi Pengurus Bank BPD Bali
 - b. Melaksanakan *review* Standar Operasional Prosedur (SOP) Gaji dan Tunjangan
 - c. Melaksanakan penangguhan remunerasi yang bersifat variabel bagi material *risk takers*
 - d. Menyusun kebijakan *job grading* yang mengakomodir remunerasi berbasis kinerja dan risiko.

Concerning the above, Bank BPD Bali has set up a strategy for the management of HC in 2024, which consists of:

- 1) *Human Resources (HR) Development* implemented through:
 - a. *Optimizing organizational capabilities based on performance and risk*
 - b. *Strengthening the internalization of work culture*
 - c. *Increasing HR work standards and internal customer service satisfaction*
 - d. *Optimizing professional, integrity-based and competitive HR management capabilities through talent management development*
 - e. *Improving human capital policies.*
 - f. *Improving labour relations.*
- 2) *Compensation policies* through
 - a. *Reviewing the remuneration policy for the management of Bank BPD Bali*
 - b. *Reviewing the Standard Operating Procedure (SOP) for Salaries and Allowances*
 - c. *Implementation of suspension of variable compensation for material risk takers*
 - d. *Preparation of a job grading policy to reflect performance and risk-based compensation.*

Kebijakan dan Pelaksanaan Pengelolaan *Human Capital* *Human Capital Management Strategy*

Bank BPD Bali telah menetapkan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan HC tahun 2024 yang mencakup Rekrutmen, Pengembangan Kompetensi, Pengembangan Karir, Penilaian Kinerja, Remunerasi dan Kompensasi Jangka Panjang (jika ada), dan Program Pensiun. Penjelasan dari masing-masing kebijakan dan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

Rekrutmen

Adanya Karyawan yang memasuki masa bebas tugas pada tahun 2024 dan berdasarkan perhitungan WLA sehingga menimbulkan kebutuhan Karyawan sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) orang yang meliputi kebutuhan Kantor Pusat maupun operasional Kantor Cabang dengan rincian dan rencana pemenuhan di Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Kebutuhan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang diperoleh dari *repositioning* Karyawan *existing*.
- b. Kebutuhan sebanyak 20 (dua puluh) orang diperoleh dari Tenaga Alih Daya memperhatikan ruang lingkup pekerjaan yang dapat dialihdayakan.
- c. Kebutuhan sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang untuk posisi Teller yang disebabkan oleh *repositioning* Karyawan *existing* dapat diisi dari peserta pemagangan.
- d. Sebanyak 54 (lima puluh empat) orang diperoleh dari rencana rekrutmen Karyawan Tahun 2024.

Bank BPD Bali has established policies and implementation of HC management in 2024, which include recruitment, competency development, career development, performance evaluation, long-term remuneration and compensation (if any), and pension program. The explanation of each of these policies and the implementation thereof is as follows:

Recruitment

There are employees who will enter the free service period in 2024 and based on the WLA calculation, resulting in the need for 198 (one hundred and ninety-eight) employees to cover the needs of Head Office and Branch Office operations with details and fulfillment plans in 2024 as follows:

- a. The need for 75 (seventy-five) employees is derived from the *repositioning* of existing employees.
- b. The need for 20 (twenty) people will come from outsourcing employees considering the scope of work that can be outsourced.
- c. The need for 49 (forty-nine) people for the cashier position created by *repositioning* existing employees can be filled by interns.
- d. A total of 54 (fifty-four) people were obtained from the 2024 Employee Recruitment Plan.

Pelaksanaan atas kebijakan Rekrutmen Karyawan Tahun 2024 sebagai berikut

- a. Rencana pemenuhan kebutuhan sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang untuk posisi Teller yang disebabkan oleh *repositioning* Karyawan *existing* melalui Pemagangan ditunda sampai dengan ketentuan Pemagangan ditetapkan dan untuk memenuhi kebutuhan Karyawan sebanyak 49 (empat puluh sembilan) Orang dilakukan *repositioning* kembali sebanyak 10 (sepuluh) Orang dan melaksanakan penyesuaian kembali atas kebutuhan Karyawan sehingga terdapat tambahan kebutuhan melalui perekrutan sebagai berikut :
 - 1) Perekrutan Karyawan ditambah sebanyak 9 (sembilan) Orang sehingga menjadi 63 (enam puluh tiga) Orang terdiri dari *Teller* 5 Orang dan *Customer Service* 4 Orang.
 - 2) Perekrutan Tenaga Alih Daya ditambah sebanyak 30 (tiga puluh) Orang sehingga menjadi 50 (lima puluh) Orang terdiri dari :
 - a) Tenaga Alih Daya *Teller Payment Point* 2 Orang
 - b) Tenaga Alih Daya *Teller Pungutan Wisatawan* 6 Orang
 - c) Tenaga Alih Daya *Pemasaran Langsung Bidang Kredit* 22 Orang
- b. *Repositioning* Karyawan *existing* sebanyak 85 (delapan puluh lima) Orang pada tahun 2024.
- c. Rekrutmen Karyawan tahun 2024 semula direncanakan sebanyak 54 (lima puluh empat) orang dimana telah dilakukan pemenuhan sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang yang dilaksanakan pada bulan Mei 2024 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Posisi sebagai *Analisis Kredit* 4 Orang
 - 2) Posisi *Customer Service* 1 Orang
 - 3) Posisi *Dukungan Operasional Cabang* 1 Orang
 - 4) Posisi *Pemasaran Dana* 2 Orang
 - 5) Posisi *Teller* 5 Orang
 - 6) Posisi *Officer Audit Anti-Fraud* 1 Orang
 - 7) Posisi *Officer Audit Operasional* 2 Orang
 - 8) Posisi *Officer Audit Bisnis* 1 Orang
 - 9) Posisi *Officer Core Banking* 2 Orang
 - 10) Posisi *Officer CSR* 1 Orang
 - 11) Posisi *Officer Eksternal Bisnis Analisis* 2 Orang
 - 12) Posisi *Officer Engineer Hardware* 1 Orang
 - 13) Posisi *Officer Engineer Jaringan Komunikasi* 1 Orang
 - 14) Posisi *Officer FDS* 2 Orang
 - 15) Posisi *Officer Internal Bisnis Analisis* 1 Orang
 - 16) Posisi *Officer IT Risk & Compliance* 1 Orang
 - 17) Posisi *Officer Management Information System* 1 Orang
 - 18) Posisi *Officer Non-Core Banking* 2 Orang
 - 19) Posisi *Officer Security* 2 Orang
 - 20) Posisi *Officer Sekretaris Direksi* 1 Orang

Pada bulan Desember 2024 dilaksanakan proses perekrutan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Orang dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Posisi *Analisis Kredit* 3 Orang
- 2) Posisi *Pemasaran Dana* 1 Orang
- 3) Posisi *Customer Service* 3 Orang
- 4) Posisi *Teller* 11 Orang
- 5) Posisi *Officer Engineer Data Center* 5 Orang
- 6) *Officer Bisnis & Ekosistem Digital* 1 Orang

Implement the 2024 Employee Recruitment Policy as follows:

- a. *The plan to meet the need for 49 (forty-nine) teller positions by repositioning existing employees through internships will be postponed until the internship regulations are finalized and to meet the need for 49 (forty-nine) employees, 10 (ten) people will be repositioned and the need for employees will be adjusted to meet the additional need through hiring as follows:*
 - 1) *The number of employees will be increased by 9 (nine) to 63 (sixty-three), consisting of 5 tellers and 4 customer service representatives.*
 - 2) *Recruitment of Outsourced Workers will be increased by 30 (thirty) persons to 50 (fifty) persons consisting of*
 - a) *Outsourced cashiers 2 people*
 - b) *Outsourced Tourist Levy Cashiers 6 Persons*
 - c) *Outsourced Direct Marketing Credit Field 22 People*
- b. *Redeploy 85 (eighty-five) existing employees in 2024.*
- c. *Recruitment of employees in 2024 was originally planned for 54 (fifty-four) people, of which 34 (thirty-four) people were filled in May 2024 with the following details:*
 - 1) *Credit Analyst position 4 people*
 - 2) *Customer service position 1 person*
 - 3) *Branch Operational Support Position 1 person*
 - 4) *Marketing Fund position 2 people*
 - 5) *Cashier position 5 people*
 - 6) *Audit Anti-Fraud Officer position 1 person*
 - 7) *Operational Audit Officer position 2 people*
 - 8) *Head of audit department 1 person*
 - 9) *Core Banking Officer 2 people*
 - 10) *CSR Officer 1 person*
 - 11) *External Business Analyst Officer Position 2 People*
 - 12) *Owner Hardware Engineer Position 1 Person*
 - 13) *Network Communications Engineer Officer Position 1 Person*
 - 14) *FDS Officer Position 2 people*
 - 15) *Internal Business Analyst Officer Position 1 person*
 - 16) *IT Risk & Compliance Officer Position 1 person*
 - 17) *Management Information System Officer Position 1 person*
 - 18) *Non-Core Banking Officer Position 2 people*
 - 19) *Security Officer Position 2 people*
 - 20) *Secretary Officer Position 1 person*

In December 2024, the recruitment process was carried out for 29 (twenty-nine) people with the following details

- 1) *Credit Analyst Position 3 people*
- 2) *Fund Marketing Position 1 person*
- 3) *Customer Service Position 3 People*
- 4) *Teller position 11 people*
- 5) *Data Center Engineer Officer Position 5 People*
- 6) *Digital Business & Ecosystem Officer 1 Person*

- 7) *Officer FDS* 1 Orang
 - 8) *Officer Enterprise & Regulatory Reporting* 1 Orang
 - 9) *Officer Akuntansi* 1 Orang
 - 10) *Officer Perpajakan* 1 Orang
 - 11) *Officer Pengembangan Produk Ritel & Consumer* 1 Orang
 - 12) Total pelaksanaan perekrutan Karyawan di tahun 2024 sebanyak 63 (enam puluh tiga) Orang.
- d. Perekrutan Tenaga Alih Daya tahun 2024 yang semula direncanakan sebanyak 20 (dua puluh) Orang sudah direalisasikan pada Tahun 2024 sebanyak 50 (lima puluh) Orang dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Tenaga Alih Daya *Teller Pungutan Wisatawan* 6 Orang
 - 2) Tenaga Alih Daya *DC DRC Baturiti* 8 Orang
 - 3) Tenaga Alih Daya *Pemasaran Langsung Bidang Kredit* sebanyak 22 Orang
 - 4) Tenaga Alih Daya *Teller Payment Point* 2 Orang
 - 5) Tenaga Alih Daya *Call Center* 4 Orang
 - 6) Tenaga Alih Daya *Sekretaris dan Protokol* 1 Orang
 - 7) Tenaga Alih Daya *Sopir* 5 Orang
 - 8) Tenaga Alih Daya *Cleaning Service* 2 Orang

Total perekrutan Tenaga Alih Daya tahun 2024 sebanyak 50 (lima puluh) Orang.

Pengembangan Kompetensi

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan menjaga kualitas mutu sumber daya manusia Bank BPD Bali menyelenggarakan berbagai pendidikan. Dalam pelaksanaannya program Pendidikan dan Pelatihan akan diselenggarakan mengacu pada POJK Nomor 24 Tahun 2022 serta sesuai Arah Kebijakan Direksi dan perkembangan bisnis bank untuk memenuhi sasaran dan target yang akan dicapai. Jenis pendidikan dan pelatihan yang akan diselenggarakan di tahun 2024 terdiri dari :

- a. *Leadership and Managerial Skills* dengan realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp3.529.169.543,-
- b. *Sertifikasi Kompetensi* dengan realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp3.417.609.753.57
- c. *Basic Banking Operations* dengan realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp2.008.057.556.40
- d. *Perkreditan* dengan realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp1.214.779.978,-
- e. *Treasury* dengan realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp371.717.627,-
- f. *Good Corporate Governance and Compliance* dengan realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp1.704.898.052,-
- g. *Banking Strategic Management* dengan realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp846.639.719,-
- h. *Corporate Secretary* dengan realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp472.071.836,-
- i. *Internal Audit & Anti-Fraud Strategy* dengan realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp214.411.600,-
- j. *Human Capital Management* dengan realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp189.178.700,-

- 7) *FDS Officer* 1 person
 - 8) *Enterprise & Regulatory Reporting Officer* 1 Person
 - 9) *Accounting Officer* 1 person
 - 10) *Tax Officer* 1 Person
 - 11) *Retail & Consumer Product Development Officer* 1 Person
 - 12) The total implementation of employee recruitment in 2024 was 63 (sixty-three) people.
- d. The recruitment of outsourcing workers in 2024, which was originally planned for 20 (twenty) people, was realized in 2024 as many as 50 (fifty) people with the following details:
- 1) *Outsourcing Cashier Tourist Fees* 6 people
 - 2) *Outsourcing DC DRC Baturiti* 8 people
 - 3) *Outsourcing Direct Marketing Credit Field* 22 people
 - 4) *Outsourcing Cashier Payment Point* 2 People
 - 5) *Outsourcing Call Center* 4 people
 - 6) *Outsourcing secretary and protocol* 1 person
 - 7) *Outsourcing driver* 5 people
 - 8) *Outsourcing cleaning service* 2 people

The total recruitment of outsourcing workers in 2024 is 50 (fifty) people.

Competency Development

Bank BPD Bali organizes various training programs to improve competency and maintain the quality of human resources. In its implementation, the education and training program was held with reference to POJK Number 24 of 2022 and in accordance with the policy direction of the directors and the development of the bank's business to achieve the goals and objectives to be achieved. The types of education and training that will be held in 2024 consist of:

- a. *Leadership and management skills* with a budget realization of Rp3,529,169,543 in 2024, -.
- b. *Competency Certification* with a budget realized in 2024 amounting to Rp 3,417,609,753.57
- c. *Basic Banking Operations* with a budgeted realization of Rp2,008,057,556.40 in 2024
- d. *Credit* with a budget realization of Rp1,214,779,978 in 2024
- e. *Treasury* with a budget realization of Rp371,717,627 in 2024
- f. *Corporate Governance and Compliance* with a budgeted realization of Rp1,704,898,052 in 2024
- g. *Strategic Banking Management* with a budget realization of Rp846,639,719 in 2024
- h. *Corporate Secretary* with a budget realization of Rp472,071,836 in 2024
- i. *Internal Audit & Anti-Fraud Strategy* with a budget realization of Rp214,411,600 in 2024
- j. *Human Capital Management* with a budget realization of Rp189,178,700 in 2024

- k. *Information Technology* dengan realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp819.006.318,-
- l. *Sustainable Finance Awareness* dengan realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp818.480.000,-
- m. *Digital Adaptability* dengan realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp2.266.987.640,-
- n. *Communication skills* dengan realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp486.068.470,-

Pengembangan Karir

Dampak era *Society 5.0* pada bidang ketenagakerjaan menimbulkan ketatnya kompetisi dan persaingan mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dampak lainnya juga mempengaruhi karakter generasi pada angkatan kerja di perusahaan. Sehingga perubahan karakteristik sumber daya manusia dikarenakan pesatnya perkembangan teknologi dan meningkatnya *turn over* karyawan pada perusahaan yang disebabkan oleh cepatnya arus informasi dan pesatnya pertumbuhan industri kreatif menjadi tantangan dalam pengelolaan *Human Capital*. Pengembangan Karir Karyawan dilaksanakan melalui:

- a. Penyusunan *career path* dan *succession plan* serta implementasi *talent management system*.
- b. Asesmen Karyawan *existing* baik untuk talent mapping dan pengisian posisi jabatan kosong yang dilaksanakan mengacu pada Kamus Kompetensi Karyawan Bank BPD Bali.

Penilaian Kinerja

Penilaian Kinerja menjadi salah satu faktor dalam menentukan posisi karyawan dalam *talent pools*, pemberian remunerasi dan jenjang karir. Indikator kinerja masing-masing posisi/jabatan disusun untuk mendorong pencapaian kinerja Bank dan adanya kesesuaian antara pencapaian kinerja Karyawan dengan pencapaian kinerja Bank. Periode penilaian kinerja individu Karyawan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun, namun terkait *review* kinerja dilakukan setiap triwulan.

Remunerasi dan Kompensasi Jangka Panjang

Strategi kebijakan remunerasi yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum merupakan pedoman dalam mengatur sistem remunerasi dan mendorong pelaksanaan *prudent risk taking* sehingga kelangsungan usaha bank tetap terjaga. Remunerasi dan kompensasi jangka panjang yang diberikan kepada karyawan meliputi:

- a. Gaji dan Tunjangan Karyawan
- b. Tunjangan Hari Raya
- c. Tambahan Penghasilan
- d. Insentif Bagi Hasil
- e. Bonus
- f. Penghargaan Masa Bhakti
- g. Penghargaan Pensiun

- k. *Information Technology* with a budget realization of Rp819,006,318 in 2024
- l. *Sustainable Finance Awareness* with a budget realization of Rp818,480,000 in 2024
- m. *Digital Adaptability* with a budget realization of Rp 2,266,987,640 in 2024
- n. *Communication Skills* with a budget realization of Rp486,068,470 in 2024

Career Development

The impact of the "Society 5.0" era on the employment sector has led to a fierce competition and war for the acquisition of high-quality human resources. Other impacts also impact the character of generations in the workforce in companies. Thus, the changing characteristics of human resources due to the rapid development of technology and the increasing turnover in companies caused by the rapid flow of information and the rapid growth of the creative industry have become challenges in managing human capital. Employee career development is carried out through:

- a. *Developing career paths and succession plans and implementing talent management systems.*
- b. *Assessing existing employees for both talent mapping and filling vacant positions using the Bank BPD Bali Employee Competency Dictionary.*

Performance Assessment

Performance assessment is one of the factors in determining employees' positions in talent pools, remuneration and career paths. The performance indicators of each position/job are compiled to promote the achievement of the Bank's performance and the conformity between the achievement of the employee's performance and the achievement of the Bank's performance. The period for individual employee performance assessment is 1 (one) time per year, but related performance reviews are conducted every quarter.

Long Term Remuneration and Compensation

The remuneration policy strategy, which refers to the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 45/POJK.03/2015 on the Implementation of Governance in the Provision of Remuneration for Commercial Banks and the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 17 of 2023 on the Implementation of Governance for Commercial Banks, is a guideline for regulating the remuneration system and encouraging the implementation of prudent risk-taking so that the Bank's business continuity is maintained. Long-term remuneration and compensation provided to employees include

- a. *Salaries and allowances of employees*
- b. *Vacation allowances*
- c. *Supplemental income*
- d. *Profit sharing incentives*
- e. *Bonuses*
- f. *Long Service Awards*
- g. *Retirement Awards*

Program Pensiun

Program Pensiun Bank BPD Bali merupakan program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi karyawan yang dikelola oleh Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Bali dengan memberikan Manfaat Pasti Bulanan kepada peserta.

Jenis Manfaat Pensiun yang diperoleh Peserta terdiri dari:

- Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Disabilitas atau Pensiun Ditunda.
- Manfaat Pensiun Janda/Duda atau Anak.

Survei Kepuasan Pegawai

Employee Satisfaction Survey

Survei kepuasan pegawai tahun 2024

Bank BPD Bali melaksanakan Survei pada tahun 2023 terhadap 1.311 responden memperoleh hasil sebesar 85.12% (indeks skor 4.26) yang menunjukkan bahwa responden Sangat Puas terhadap kebijakan dan fasilitas dari manajemen serta pekerjaan sebagai Karyawan Bank BPD Bali.

Pada tahun 2024 dilaksanakan Survei kembali terhadap 1.175 responden memperoleh hasil sebesar 90.29% (indeks skor 4.51) yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada kepuasan Karyawan sebesar 5.17% dari hasil survey tahun 2023. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa manajemen telah memperhatikan beberapa faktor yang mampu memengaruhi kepuasan karyawan.

Human Capital Information System

Human Capital Information System

Pengelolaan *Human Capital* Bank BPD Bali dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia (SIM-SDM). SIM-SDM adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengelola data Karyawan, membantu mempermudah, mempercepat dan meningkatkan akurasi serta efektifitas pengelolaan administrasi kepegawaian tanpa meninggalkan faktor ketepatan data. Adapun Modul dan fitur yang telah terimplementasi pada Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia (SIM-SDM) sebagai berikut:

- Organisasi
- Karyawan
- Remunerasi
- Surat
- Pelatihan
- Absensi
- Lembur
- Cuti
- Laporan
- Notifikasi

Pension Program

The Bank BPD Bali Pension Program is a program that seeks to provide pension benefits for employees managed by the Bali Regional Development Bank Pension Fund by providing monthly defined benefits to participants.

The types of pension benefits received by participants consist of:

- Normal Pension Benefits or Accelerated Pension Benefits or Disability Pension Benefits or Deferred Pension Benefits.
- Widow (er) or Children's Pension Benefits.

Employee Satisfaction Survey in 2024

Bank BPD Bali conducted a survey in 2023 on 1,311 respondents and obtained a result of 85.12% (index score 4.26) which shows that the respondents are very satisfied with the policies and facilities of the management and work as an employee of Bank BPD Bali.

In 2024, a survey was conducted again with 1,175 respondents. The result was 90.29% (index score 4.51) which shows that there was an increase of 5.17% in employee satisfaction from the results of the 2023 survey. This shows that management has paid attention to several factors that can influence employee satisfaction.

Bank BPD Bali's Human Capital Management is performed through Human Resources Management Information System (SIM-SDM). SIM-SDM is a system used to manage employee data, which helps to simplify, accelerate and improve the accuracy and effectiveness of personnel administration management without neglecting the data accuracy factor. The modules and functions implemented in the Human Resources Management Information System (SIM-SDM) are as follows

- Organization
- Personnel
- Remuneration
- Letters
- Education
- Attendance
- Overtime
- Leave
- Reports
- Notifications

Internalisasi Budaya

Internalization of Culture

Budaya kerja dapat mendorong motivasi karyawan dalam meningkatkan kinerja yang tercermin dalam perilaku karyawan dalam memberikan usaha ekstra berupa semangat, dedikasi dan kenyamanan untuk tercapainya tujuan dan keberhasilan Bank (*employee engagement*). Penguatan keterikatan Karyawan (*employee engagement*), diselenggarakan dengan program kerja sebagai berikut:

1. Penguatan program internalisasi budaya kerja CINTA dilakukan dengan evaluasi dan penyesuaian program sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan budaya kerja dan mendukung kinerja karyawan serta kinerja bisnis Bank.
2. Program “CEO Talk” yang dilaksanakan secara berkala dengan tujuan sharing inspirasi, motivasi dan berdiskusi terkait isu-isu terkini serta sebagai wadah komunikasi langsung pimpinan tertinggi perusahaan dengan seluruh Karyawan.
3. Implementasi aktivitas berkaitan dengan isu “*work life balance*” diantaranya program “*sportday*”, aktivitas kebersamaan karyawan seperti *employee/family gathering* dan bimbingan Rohani.
4. Peningkatan peran Kelompok Mitra Perubahan (KMP) dalam mengingatkan, mensosialisasikan, memantau, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terkait dengan penerapan nilai-nilai Budaya Kerja.
5. Peningkatan *engagement* karyawan dan mengakomodir mental health dalam pekerjaan yang mempengaruhi kinerja karyawan melalui tagline “*human caring*”.

The work culture can promote the motivation of employees in the improvement of performance, which is reflected in the behavior of employees in the provision of extra effort in the form of enthusiasm, dedication and comfort for the achievement of the bank's goals and success (employee engagement). Strengthening employee engagement is aligned with the following work programs:

1. *Strengthening the CINTA Work Culture Internalization Program involves evaluating and adjusting the program so that it can improve the understanding and implementation of the work culture and support employee performance and the Bank's business performance.*
2. *The “CEO Talk” program will be conducted regularly to provide inspiration, motivation, and discussion of current issues. It will also provide a forum for direct communication between the Company's top executives and all employees.*
3. *Implementation of activities related to work-life balance, including the “Sportday” program, employee togetherness activities such as employee/family reunions, and spiritual guidance.*
4. *Strengthen the role of the Change Partner Group (KMP) in reminding, socializing, monitoring, evaluating and making recommendations related to the implementation of Work Culture Values.*
5. *Increasing employee engagement and taking mental health into account in the work that affects employee performance through the slogan “Human Caring”.*

Struktur Pengelolaan Human Capital

Human Capital Management Structure

Struktur Pengelolaan *Human Capital* Bank BPD Bali adalah sebagai berikut:

1. Kepala Divisi Sumber Daya Manusia mempunyai tanggung jawab utama sebagai berikut:
 - a. Mengevaluasi kebijakan serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Divisi Sumber Daya Manusia.
 - b. Melakukan rekrutmen sesuai kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan
 - c. Merancang dan mengelola kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan *Gap Kompetensi* dan *Gap Perilaku*.
 - d. Mencari dan menarik kandidat yang memiliki potensi/talenta terbaik, menerapkan serta memantau identifikasi kandidat berbakat serta proses retensi.
 - e. Memastikan pelaksanaan pembinaan (*coaching, counseling* dan *mentoring*) karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - f. Bertanggung jawab memastikan penerapan strategi *anti-fraud* pada seluruh karyawan di bawah supervisinya.
 - g. Memberikan pembinaan berupa *coaching, counseling* dan *mentoring* serta *Performance Appraisal* (PA) seluruh karyawan dibawah supervisinya.

The Human Capital Management structure of Bank BPD Bali is as follows:

1. *The Human Resources Manager has the following main responsibilities:*
 - a. *Evaluation of policies and annual work plan and budget of the Human Resources Department.*
 - b. *Conducting recruitment according to the needs and requirements established.*
 - c. *Design and manage training and development activities in accordance with the competency gap and behaviour gap.*
 - d. *Identify and attract candidates with the best potential/talents, implement and monitor the identification of talented candidates and the retention process.*
 - e. *Ensure the implementation of employee coaching (coaching, counseling and mentoring) in accordance with applicable regulations.*
 - f. *Responsible for ensuring the implementation of anti-fraud strategies for all employees under his/her supervision.*
 - g. *Provide coaching, counseling, mentoring and performance appraisal (PA) for all employees under his/her supervision.*

Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dibantu oleh Kepala Bagian dengan tanggung utama sebagai berikut:

1. Kepala Bagian Pengembangan & Budaya Kerja mempunyai tanggung jawab utama sebagai berikut:
 - a. Merumuskan kebijakan serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bagian Pengembangan & Budaya Kerja.
 - b. Secara berkala melakukan kajian terhadap kebutuhan karyawan menyesuaikan dengan perubahan susunan organisasi terkait perubahan strategi atau visi Bank.
 - c. Mengevaluasi indikator pengukuran penilaian kinerja dan menyusun target kinerja (KPI).
 - d. Melakukan identifikasi dan pemetaan posisi-posisi kunci dan karyawan-karyawan potensial.
 - e. Mengajukan konsep kebijakan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Divisi Sumber Daya Manusia, melakukan sosialisasi untuk setiap kebijakan kepada pihak-pihak yang terkait.
2. Kepala Bagian Remunerasi & Sistem Informasi Manajemen (SIM) SDM mempunyai tanggung jawab utama sebagai berikut :
 - a. Merumuskan kebijakan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bagian Remunerasi & SIM.
 - b. Memastikan penerimaan & penempatan calon karyawan di Kantor Pusat dan Kantor Cabang sesuai rencana kebutuhan dan perencanaannya.
 - c. Melakukan kajian terhadap sistem penggajian dan remunerasi (kompensasi) Bank agar tetap kompetitif dan berperan aktif dalam survei penggajian ataupun melakukan perbandingan secara proaktif dan *regular*.
 - d. Menyusun dan mengawasi pengelolaan database karyawan serta memonitor proses *update database* karyawan.
 - e. Melakukan evaluasi dan implementasi program manajemen risiko serta memastikan seluruh karyawan dibawah supervisinya telah menerapkan budaya yang sadar risiko.
3. Kepala Bagian Pelatihan & Pembinaan SDM
 - a. Merumuskan kebijakan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bagian Pelatihan & Pembinaan.
 - b. Melakukan kajian atas laporan Audit khusus SKAI & Anti-Fraud terkait dengan karyawan sebelum disampaikan kepada Tim Pertimbangan Hukuman Jabatan.
 - c. Mengusulkan rancangan program pelatihan (*Training Need Analysis*) beserta silabusnya yang diperlukan oleh Bank secara ke seluruhan dengan mempertimbangkan asas prioritas dan pemerataan pengetahuan dan keterampilan.
 - d. Membina hubungan industrial yang kondusif dan harmonis dalam lingkungan kerja Bank serta menangani dan membantu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hubungan industrial.
 - e. Bertanggung jawab memastikan penerapan strategi *anti-fraud* pada seluruh karyawan di bawah supervisinya.

The Head of Human Resources is assisted by the Section Head, who has the following primary responsibilities

1. *The Head of the Development & Work Culture Section shall have the following principal responsibilities*
 - a. *Formulating policies and the annual work plan and budget of the Development & Work Culture Section.*
 - b. *Periodically conduct employee needs studies in accordance with changes in the organizational structure related to changes in the Bank's strategy or vision.*
 - c. *Evaluating performance measurement indicators and preparing KPIs.*
 - d. *Identifying and mapping key positions and potential staff.*
 - e. *Submit the concept of policies and Standard Operating Procedures (SOP) of the Human Resources Department, conduct socialization for each policy to the relevant parties.*
2. *The Manager of Compensation & Management Information System (MIS) HR has the following primary responsibilities:*
 - a. *Formulate policies and the annual work plan and budget for the Compensation & MIS Department.*
 - b. *Ensure the recruitment and placement of prospective employees at the Head Office and Branch Offices as per the projected needs and planning.*
 - c. *Conduct a review of the Bank's payroll and remuneration (compensation) system to remain competitive and play an active role in salary surveys or conduct comparisons proactively and regularly.*
 - d. *Establish and oversee the management of employee databases and oversee the employee database update process.*
 - e. *Evaluate and implement risk management programs and ensure that all employees under his/her supervision have adopted a risk-aware culture.*
3. *Head of HR Training & Development Section*
 - a. *Formulate policies and annual work plan and budget for the Training & Development Section.*
 - b. *Review the Special Audit Report of SKAI & Anti-Fraud regarding employees before submitting it to the Position Punishment Consideration Team.*
 - c. *Propose a training program design (Training Needs Analysis) and its curriculum required by the Bank as a whole, taking into consideration the principle of priority and equal distribution of knowledge and skills.*
 - d. *Promote conducive and harmonious labour relations in the Bank's work environment, and address and help resolve labour relations issues.*
 - e. *Be responsible for ensuring the implementation of anti-fraud policies for all employees under his/her supervision.*

Rencana Kerja *Human Capital* Tahun 2025

Human Capital Work Plan 2025

Dalam Cetak Biru Pengembangan SDM Bank BPD Bali tahun 2022-2025 dilakukan kajian dan analisis melalui kajian mendalam atas *Corporate Plan* Bank BPD Bali tahun 2021-2025 yang berisikan strategi dalam mewujudkan visi dan misi Bank BPD Bali. Berdasarkan hal tersebut Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kebijakan Remunerasi (*Remuneration Policies*) pada tahun 2025 akan dilaksanakan melalui:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tahun 2025 akan dilaksanakan melalui:
 - a. Mengoptimalkan kapabilitas organisasi berbasis kinerja dan risiko
 - b. Penguatan Internalisasi Budaya Kerja
 - c. Meningkatkan Standarisasi kerja SDM dan Kepuasan Layanan Pelanggan Internal
 - d. Mengoptimalkan kapabilitas pengelolaan SDM yang profesional, berintegritas dan berdaya saing melalui pengembangan manajemen talenta.
 - e. Menyempurnakan Kebijakan di Bidang *Human Capital*
 - f. Meningkatkan Hubungan Industrial
2. Strategi Kebijakan Remunerasi (*Remuneration Policies*)
 - a. Melaksanakan *review* kebijakan remunerasi bagi Pengurus Bank BPD Bali
 - b. Melaksanakan *review* Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Penggajian
 - c. Menyusun kebijakan remunerasi dan fasilitas bagi Tenaga Alih Daya
 - d. Melaksanakan penangguhan remunerasi yang bersifat variabel bagi material *risk takers*.

In Bank BPD Bali Human Resources Development Blueprint for 2022-2025, a study and analysis was conducted through in-depth study of Bank BPD Bali Corporate Plan for 2021-2025, which contains strategies to realize Bank BPD Bali Vision and Mission. Based on this, the Human Resources (HR) Development Strategy and Remuneration Policy in 2025 will be implemented through:

1. *Human Resources Development in 2025 will be implemented through:*
 - a. *Optimizing organizational capabilities based on performance and risk*
 - b. *Strengthening the internalization of the work culture*
 - c. *Increasing HR work standards and internal customer service satisfaction*
 - d. *Optimizing HR management capabilities that are professional, have integrity, and are competitive through the development of talent management.*
 - e. *Improving human capital policies*
 - f. *Improve labour relations.*
2. *Compensation Policy Strategy (Compensation Policies)*
 - a. *Conduct a review of the remuneration policies for the management of Bank BPD Bali.*
 - b. *Conduct a review of the Payroll System Standard Operating Procedure (SOP)*
 - c. *Preparation of Compensation and Benefits Policies for Outsourced Employees*
 - d. *Implemented suspension of variable compensation for material risk takers.*

TEKNOLOGI INFORMASI

Information Technology

Berpedoman pada POJK No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, Bank BPD Bali telah menyusun rencana bisnis Teknologi Informasi (TI). Penyusunan rencana bisnis TI juga dilakukan sejalan dengan salah satu misi Bank yakni Meningkatkan Kualitas SDM, Teknologi dan Informasi serta Budaya Perusahaan.

In accordance with POJK No. 11/POJK.03/2022 on the Implementation of Information Technology by Commercial Banks, Bank BPD Bali has prepared an Information Technology (IT) Business Plan. The preparation of the IT Business Plan is also in line with one of the Bank's missions, namely to improve the quality of human resources, technology and information, and corporate culture.

Strategi Teknologi Informasi Tahun 2024

2024 Information Technology Strategy

Dalam perencanaannya Pengembangan Teknologi Informasi Bank BPD Bali tahun 2024 berfokus pada *enhancement* produk *Digital Banking*, *E-Money*, *Open API*, *Siskeudes*, *New Mobile Banking*, dan Infrastruktur yang terbagi dalam kelompok berikut:

1. **Security dan Keamanan Siber**
Seiring dengan berkembangnya teknologi digital, ancaman siber seperti pencurian data, serangan *ransomware*, dan sabotase infrastruktur semakin marak terjadi. Hal ini mengharuskan sistem keamanan informasi untuk selalu diperbarui mengikuti perkembangan zaman agar mampu menghadapi ancaman yang terus berkembang. Dalam hal ini, pengembangan dari sisi *security* yang direncanakan Bank adalah dengan proyek *API Management*, implementasi *API Security F5* dan *Advanced Firewall Manager (AFM) F5* dalam rangka memperkuat perlindungan terhadap akses aplikasi dan infrastruktur jaringan dari berbagai ancaman siber.
2. **Data Privacy**
Di era digital saat ini, data pribadi menjadi aset yang sangat berharga, baik bagi individu maupun organisasi. Namun, pemrosesan dan penyimpanan data sering kali menghadirkan risiko kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi yang memanfaatkan lemahnya pengendalian terhadap data pribadi. Hal ini semakin menjadi perhatian khusus dengan mulai berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Untuk meningkatkan kepatuhan Bank terhadap regulasi ini, Bank BPD Bali sedang merencanakan pengembangan aplikasi *Data Privacy Management* serta *IT Tools Data Privacy (PDP) - Data Security*.
3. **Enhancement dan Optimasi Digital Banking**
Pengembangan *digital banking* merupakan proyek pengembangan TI yang berfokus pada pengembangan dan optimasi layanan sistem serta meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas melalui pemantauan secara *real-time* dan *Good Governance* sebagai pemenuhan kewajiban kepada *regulator*. Proyek pengembangan dalam hal ini mencakup proyek Otomatisasi Laporan LCR NSFR, Aplikasi *Retail Bond Price*, Pengembangan FDS, dan lain-lain.
4. **Enhancement Infrastruktur**
Seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya kebutuhan digital, permintaan akan layanan yang lebih cepat, handal, dan efisien terus bertambah. Hal ini mendorong kebutuhan akan pengembangan infrastruktur yang mampu mendukung kapabilitas layanan dan kapasitas penyimpanan (*storage*) yang semakin tinggi. Tanpa pengembangan infrastruktur yang memadai, kualitas layanan dapat menurun, risiko *downtime* meningkat yang dapat membuat

In its planning, Bank BPD Bali's information technology development in 2024 focused on the improvement of Digital Banking, E-Money, Open API, Siskeudes, New Mobile Banking and Infrastructure products, which are divided into the following groups:

1. **Security and Cybersecurity**
With the development of digital technology, cyber threats such as data theft, ransomware attacks and infrastructure sabotage are becoming increasingly common. This requires the information security system to be constantly updated to keep up with the times and to be able to face the constantly evolving threats. In this case, the development of the security side planned by the bank is through the API Management project, the implementation of API Security F5 and Advanced Firewall Manager (AFM) F5 to strengthen the protection of application access and network infrastructure from various cyber threats.
2. **Data Privacy**
In today's digital age, personal information is a highly valuable asset for both individuals and organizations. However, data processing and storage often pose a risk of leakage or misuse of personal data, taking advantage of weak control over personal data. With the implementation of Law No. 22 of 2022 on the Protection of Personal Data, this has become a particular concern. To improve the Bank's compliance with this regulation, Bank BPD Bali plans to develop a Data Privacy Management Application and IT Tools Data Privacy (PDP) - Data Security.
3. **Digital Banking Development and Optimization**
The development of digital banking is an IT development project focused on developing and optimizing system services and increasing transparency and accountability through real-time monitoring and good governance as a fulfilment of obligations to regulators. Development projects in this case include the LCR NSFR Report Automation project, Retail Bond Price Application, FDS development, and others.
4. **Improving infrastructure**
As technology evolves and digital needs increase, the demand for faster, more reliable and efficient services continues to grow. This drives the need for infrastructure development that can support ever-increasing service capabilities and storage capacity. Without adequate infrastructure development, service quality can deteriorate and the risk of downtime increases, which can reduce competitiveness. In this regard, the Bank is committed to further improving system



daya saing menurun. Terkait hal tersebut, Bank berkomitmen untuk terus meningkatkan infrastruktur sistem dan layanan melalui pengembangan Sistem *Single Sign On*, *Upgrade Database Core Banking* serta *Managed Services* ATM mekanisme TPP.

infrastructure and services through the development of the single sign-on system, core banking database upgrade, and managed services ATM TPP mechanism.

Inovasi Teknologi Informasi Tahun 2024

2024 Information Technology Innovation

Bank BPD Bali telah melakukan beragam inovasi TI selama tahun 2024 yang mencakup *enhancement* terhadap layanan Eksisting (Penambahan Biller pada *E-channel*) dan optimasi sistem *monitoring*, pelaporan, dan pencatatan data keuangan (Optimasi Antasena dan Apollo, Optimasi Pencatatan Sewa PSAK 73, Optimasi LCR & NSFR).

Bank BPD Bali has implemented various IT innovations in 2024, including the enhancement of existing services (addition of billers to electronic channels) and the optimization of monitoring systems, reporting and financial data collection (optimization of Antasena and Apollo, optimization of PSAK 73 rental collection, optimization of LCR & NSFR).

Selain itu, TI Bank BPD Bali juga melakukan pengembangan *Open Application Program Interface* (API) QRIS untuk meningkatkan daya saing Bank dan memungkinkan integrasi aplikasi pihak lain dengan layanan QRIS Bank BPD Bali sehingga dapat digunakan sebagai sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, dan handal.

In addition, Bank BPD Bali IT has also developed the QRIS Open Application Program Interface (API) to increase the bank's competitiveness and enable the integration of third-party applications with Bank BPD Bali's QRIS service, which can be used as a fast, easy, cheap, and reliable payment system.

Inovasi lainnya adalah berupa Layanan Pungutan Wisata yang merupakan solusi digital pemungutan retribusi pungutan wisatawan asing Provinsi Bali di mana Bank BPD Bali berperan sebagai portal payment utama dengan menyediakan kemudahan pembayaran pungutan wisatawan melalui berbagai *channel* pembayaran (VISA, Mastercard, American Express, QRIS, Virtual Account, dan lain-lain).

Another innovation is the Tourism Levy Service, a digital solution for collecting foreign tourist levies in Bali Province. Bank BPD Bali is the main payment portal, providing easy payment of tourist levies through various payment channels (VISA, Mastercard, American Express, QRIS, Virtual Account, etc.).

Bank juga melaksanakan pengembangan *Executive Information System* (EIS) yang merupakan informasi terkait manajemen risiko guna mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen yang bersumber dari Laporan TKB (Tingkat Kesehatan Bank), PRC (Profil Risiko Cabang), PRKP (Profil Risiko Kantor Pusat), Limit Risiko, LED (*Loss Event Database*) dan lainnya. Hal ini membuat manajemen mampu melakukan monitoring pengendalian risiko secara komprehensif.

The Bank also implemented the development of the Executive Information System (EIS), which provides risk management-related information to support management decision making from TKB Report (Bank Health Level), PRC (Branch Risk Profile), PRKP (Head Office Risk Profile), Risk Limit, LED (Loss Even Database) and others. This enables management to perform comprehensive risk control monitoring.

Pengembangan Aplikasi Siperi Kerja yang berfungsi memberikan penilaian perilaku kerja karyawan yang bersumber dari nilai-nilai budaya perusahaan Bank BPD Bali, yaitu Kompetensi, Integritas, Kerjasama dan Orientasi Pelanggan serta tingkat kehadiran karyawan selama periode penilaian.

Development of the Siperi Kerja application, which provides employee work behaviour assessments based on the corporate cultural values of Bank BPD Bali, namely competence, integrity, cooperation and customer focus, as well as employee attendance levels during the assessment period.

Berbagai inovasi teknologi informasi dalam hal *internal business process* yang dilakukan Bank BPD Bali antara lain ITSM SIM Audit, SIM Aset, E-Procurement, Dashboard Perkreditan, dan *Talent Management System* yang digunakan untuk pengelompokan *talent* dan pencarian kebutuhan posisi yang kosong sesuai dengan data karyawan Bank BPD Bali, berdasarkan beberapa parameter seperti riwayat jabatan sebelumnya, penilaian KPI, *Assessment*, *Reward*, *Punishment*, Evaluasi Analis Kredit, Evaluasi Satuan/Unit Kerja. Terakhir, Bank BPD Bali juga melakukan berbagai inovasi teknologi informasi dalam rangka penguatan tata kelola dan *security* antara lain melalui implementasi *Privilege Access Management* (PAM), EDR/XDR, NAC, dan lain-lain.

Various information technology innovations in terms of internal business processes carried out by Bank BPD Bali include ITSM SIM Audit, SIM Asset, E-Procurement, Credit Dashboard, and Talent Management System which are used for talent grouping and searching for vacant position needs according to Bank BPD Bali employee data, based on several parameters such as previous job history, KPI assessment, Assessment, Reward, Punishment, Credit Analyst Evaluation, Work Unit/Unit Evaluation. Finally, Bank BPD Bali also carries out various information technology innovations in order to strengthen governance and security, including through the implementation of Privilege Access Management (PAM), EDR/XDR, NAC, and others.

Infrastruktur Teknologi Informasi Information Technology Infrastructure

Bank BPD Bali melakukan pembangunan *Data Centre* dan *Refreshment Perangkat Data Centre* dan *Disaster Recovery Center* untuk memastikan infrastruktur TI dapat memberikan layanan yang selalu tersedia, handal, optimal dan aman.

Bank BPD Bali is building a Data Center and Data Center Equipment Refreshment and Disaster Recovery Center to ensure that IT infrastructure can provide services that are always available, reliable, optimal and safe.

Tata Kelola Teknologi Informasi Information Technology Governance

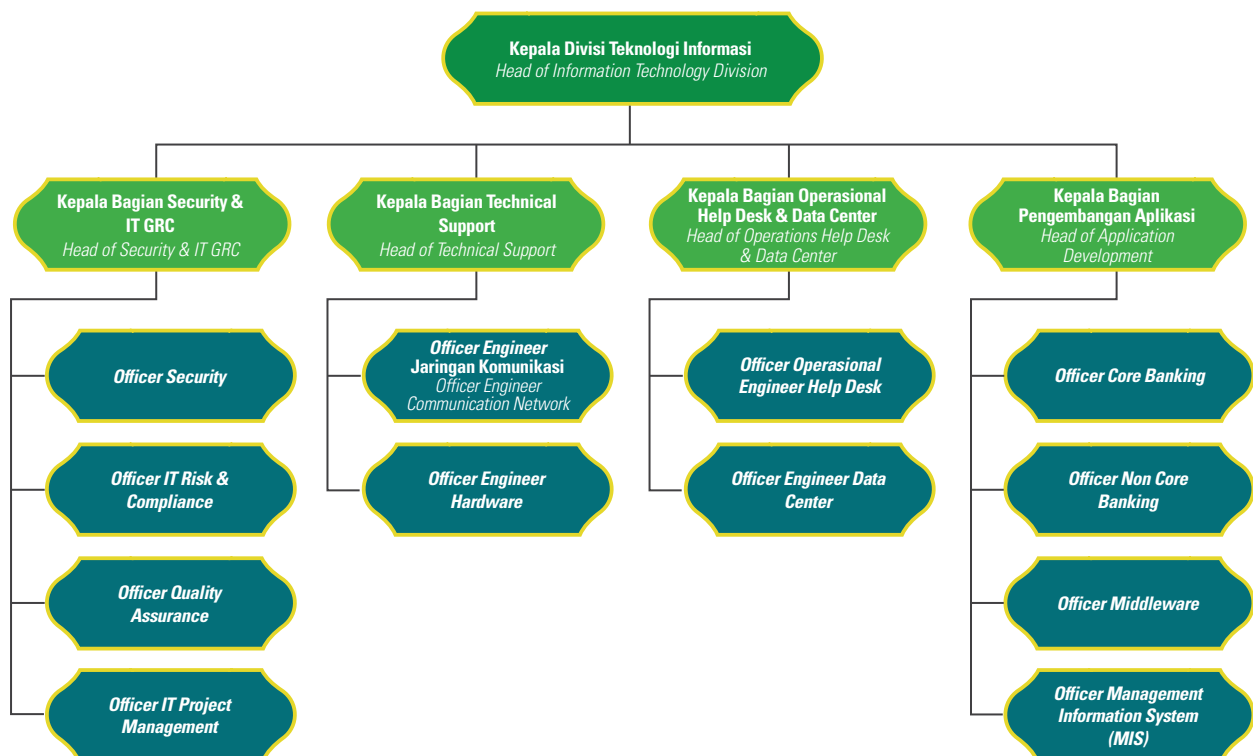
Bank BPD Bali meningkatkan kualitas Tata kelola TI melalui penguatan pada aspek *people* (peningkatan kompetensi SDM TI melalui pelatihan dan sertifikasi), *process* (Penyesuaian dan penyempurnaan BPP dan SOP TI agar tetap relevan dengan kondisi internal-eksternal), dan *technology* (Implementasi solusi *security* untuk meningkatkan tata kelola seperti *Active Directory*, *NAC*, dan lain-lain).

Bank BPD Bali improves the quality of IT governance by strengthening the aspects of people (improvement of IT HR competency through training and certification), process (adjustment and refinement of BPP and IT SOP to remain relevant to internal-external conditions), and technology (implementation of security solutions to improve governance such as Active Directory, NAC, and others).

Struktur Pengelola Teknologi Informasi Information Technology Management Structure

Struktur Pengelola TI BPD ditetapkan berpedoman pada Keputusan Direksi No. 0424/KEP/DIR/RENSTRA/2024 yang dipimpin oleh seorang Kepala Divisi Teknologi Informasi. Bagan struktur pengelola TI dijelaskan melalui bagan berikut ini:

The BPD's IT management structure is determined based on the Board of Directors' Decree No. 0424/KEP/DIR/RENSTRA/2024, which is headed by a Head of Information Technology Division. The following diagram explains the IT Management Structure:



Rencana Kerja Teknologi Informasi Tahun 2025

Information Technology Work Plan for 2025

Rencana Kerja TI Bank untuk tahun 2025 mencakup beberapa hal seperti peningkatan kualitas layanan (sistem antrian online dan pengembangan data warehouse), peningkatan kualitas pengelolaan *governance, risk management, and compliance* (pengembangan *Enterprise Architecture*, Pengkinian BPP/SOP, Evaluasi Implementasi ISO/IEC 27001), meningkatkan optimasi, kapabilitas produk dan layanan bank (Peningkatan *Digital Maturity*, Pengembangan layanan *Digital Banking* melalui *cardless transaction* dan *Online on Boarding*, pengembangan Open API, dll), peningkatan infrastruktur sistem (*storage enhancement* dan Infrastruktur *Data Center & Data Recovery Center*, Penambahan *cluster HCI, enhancement Core Banking*), dan peningkatan keamanan infrastruktur Bank (Pengelolaan *Security Operation Center, Fraud Detection System, Cyber Threat Intelligence*, perluasan SD WAN, DLP, DNS Security, API Security, FDS Network, *enhancement ITSM, Backup* Sentralisasi serta Pengujian keamanan melalui VAPT secara berkala).

The Bank's IT work plan for 2025 includes several things, such as improving service quality (online queue system and data warehouse development), improving governance, risk management and compliance quality (enterprise architecture development, BPP/SOP updates, ISO/IEC 27001 implementation evaluation), improving optimization, bank product and service capabilities (digital maturity improvement, digital banking service development through cardless transactions and online on boarding, open API development, etc.), and improving system infrastructure (storage enhancement and data centre & recovery infrastructure, HCI clusters, core banking enhancement), improvement of system infrastructure (improvement of storage and data centre & data recovery centre infrastructure, addition of HCI clusters, improvement of core banking), and improvement the Bank's infrastructure security (Security Operation Center Management, Fraud Detection System, Cyber Threat Intelligence, SD WAN expansion, DLP, DNS Security, API Security, FDS Network, ITSM enhancement, Centralized Backup and periodic security testing through VAPT).

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank



05

Analisis & **PEMBAHASAN MANAJEMEN** *Management Discussion and Analysis*



TINJAUAN PEREKONOMIAN

Economic Review

Tinjauan Perekonomian Dunia

World Economic Review

Perubahan yang cepat dengan ketidakpastian tinggi mempengaruhi perekonomian dunia tahun 2024. Dari awal tahun tersebut konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina masih berlanjut dengan tensi yang tinggi yang selanjutnya diperburuk dengan peningkatan ketegangan geopolitik yang dipicu oleh serangan Israel ke Palestina. Disamping itu, keterpilihan Kembali Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) yang mengedepankan kebijakan *America First* membawa perubahan besar pada lanskap geopolitik dan ekonomi dunia hingga saat ini.

Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump diperkirakan akan menerapkan kebijakan tarif impor yang lebih tinggi khususnya terhadap negara-negara yang mengalami surplus perdagangan besar dengan AS. Restriksi migran juga akan dilakukan yang akan berdampak pada pasar tenaga kerja yang ketat di AS selain kebijakan pemotongan pajak yang diharapkan mampu meningkatkan permintaan domestik di negara tersebut. Sebagai konsekuensinya, kebijakan-kebijakan Trump tersebut menyebabkan kenaikan inflasi dan defisit fiskal sehingga berdampak pada peningkatan imbal hasil obligasi AS seiring dengan penerbitan obligasi AS meningkat.

Respon pasar global pasca terpilihnya Trump telah menimbulkan ketidakpastian pasar keuangan dunia pada kuartal terakhir 2024 yang ditunjukkan dengan depresiasi berbagai mata uang dunia terhadap Dollar AS. Selanjutnya, dunia juga menghadapi tantangan fragmentasi perdagangan dan investasi yang semakin meningkat sehingga diproyeksikan menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi global.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, *International Monetary Fund* (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia melambat menjadi 3,2% pada tahun 2024 dari sebesar 3,3% pada tahun sebelumnya. Perlambatan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang menjadi 4,2% pada tahun 2024 dari sebesar 4,4% pada tahun 2023 menjadi katalis utama meskipun negara-negara maju mampu membukukan pertumbuhan ekonomi menjadi 1,8% pada tahun 2024 dibandingkan sebesar 1,7% pada tahun sebelumnya.

Rapid changes with a high degree of uncertainty are affecting the global economy in 2024. Since the beginning of the year, the geopolitical conflict between Russia and Ukraine has continued at a high level of tension, which has been further aggravated by the increase in geopolitical tensions triggered by Israel's attack on Palestine. In addition, the re-election of Trump as president of the United States (US), with his "America First" policy as a priority, has been a major change in the geopolitical and economic landscape of the world to date.

Under Trump's leadership, the United States is expected to implement a policy of higher import tariffs, especially against countries that have a large trade surplus with the United States. There will also be restrictions on immigration, which will have an impact on the tight labor market in the U.S. This is in addition to the tax cut policy, which is expected to boost domestic demand in the country. As a result, Trump's policies have led to rising inflation and budget deficits, which are reflected in rising US bond yields as US bond issuance increases.

The global market reaction following Trump's election has created uncertainty in global financial markets in the last quarter of 2024, as evidenced by various world currencies depreciating against the US Dollar. In addition, the world faces the challenge of increasing trade and investment fragmentation. This is expected to lead to a slowdown in global economic growth.

In line with the above, the International Monetary Fund (IMF) projects that global economic growth will slow to 3.2 per cent in 2024 from 3.3 per cent in the previous year. The slowdown in the economic growth of the developing countries to 4.2% in 2024 from 4.4% in 2023 is the main catalyst, although the developed countries were be able to record an economic growth of 1.8% in 2024, compared to 1.7% in the previous year.

Tinjauan Perekonomian Indonesia

Indonesian Economic Review

Sejalan dengan yang terjadi di perekonomian dunia, ekonomi Indonesia juga membukukan pertumbuhan lebih terbatas menjadi 5,03% yoy pada tahun 2024 dari sebesar 5,05% yoy pada periode yang sama tahun 2023. Namun demikian, secara umum, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih relatif terjaga dengan baik dibandingkan dengan pertumbuhan negara ekonomi sedang berkembang di dunia.

Consistent with the global economy, Indonesia's economy also recorded a more limited growth at 5.03 percent year-on-year (y/y) for 2024 compared to 5.05 percent y/y for the same period for 2023. However, compared to the growth of developing countries in the world, Indonesia's gross domestic product (GDP) growth is still relatively well maintained.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut terutama dipengaruhi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) yang mampu tumbuh lebih kuat sebesar 4,94% yoy pada tahun 2024 dari 4,82% yoy pada tahun 2023 meski menghadapi tantangan deflasi selama bulan Mei-September 2024 menjadi salah satu faktor kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia. PKRT yang mampu tumbuh lebih kuat menjadi 4,98% yoy pada kuartal IV menjadi katalis perbaikan komponen PDB ini untuk tahun 2024. PKRT berkontribusi signifikan terhadap PDB sebesar 52,68% pada tahun 2024.

Selain itu, pertumbuhan PDB Indonesia juga didukung oleh peningkatan ekspor barang 5,78% yoy. Capaian ini jauh lebih baik dibandingkan kontraksi ekspor barang sebesar 1,12% yoy pada tahun 2023 berdasarkan data BPS. Selaras dengan kenaikan ekspor barang ini, nilai ekspor Indonesia mampu tumbuh 2,29% yoy menjadi US\$264,70 miliar pada tahun 2024. Kinerja ekspor yang lebih baik ini didukung oleh kenaikan ekspor nonmigas sebesar 2,46% yoy menjadi US\$248,83 miliar pada tahun 2024.

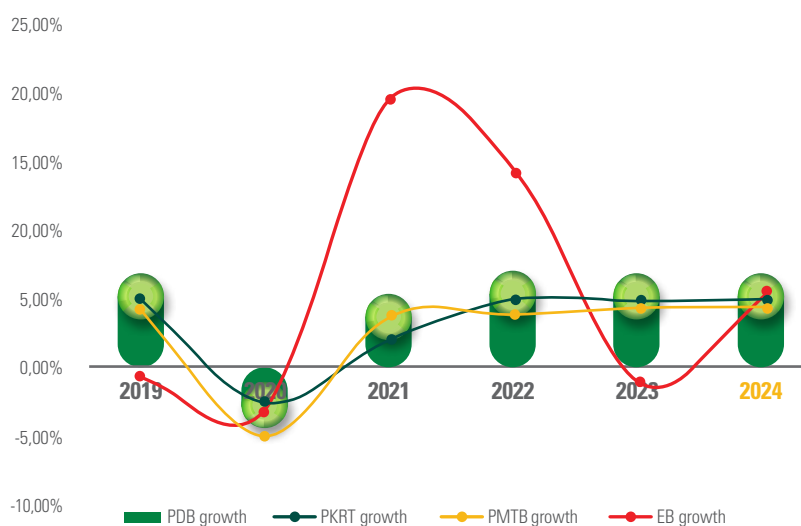
Selanjutnya, meski tumbuh sebesar 3,97% yoy atau lebih rendah dari tahun 2023 4,40% yoy, investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) turut berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini diperkuat dengan realisasi investasi yang berhasil meningkat sebesar 20,8% yoy menjadi Rp1.714,2 triliun pada tahun 2024 menurut data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

In terms of expenditure, Indonesia's economic growth is mainly influenced by household consumption expenditure (PKRT). Despite the challenge of deflation in May-September 2024, PKRT was able to grow stronger by 4.94% yoy in 2024 from 4.82% yoy in 2023, which is one of the key factors of Indonesia's economic growth. PKRT, which was able to grow at a stronger pace to 4.98% yoy in the fourth quarter, became a catalyst for the improvement of this component of GDP in 2024. PKRT's contribution to GDP in 2024 is significantly 52.68%.

In addition, Indonesia's GDP growth was also supported by a 5.78% yoy increase in merchandise exports. This performance is much better than the 1.12% yoy contraction of merchandise exports in 2023 based on BPS data. In line with this increase in merchandise exports, Indonesia's export value was able to grow by 2.29% yoy to US\$264.70 billion in 2024. This better export performance will be supported by a 2.46% yoy increase in non-oil and gas exports to US\$248.83 billion in 2024.

In addition, investment or gross fixed capital formation (PMTB) also has an impact on Indonesia's economic growth despite growing by 3.97% yoy or lower than 4.40% yoy in 2023. This is reinforced by the realization of investment, which according to data from the Ministry of Investment/Investment Coordinator (BKPM) increased by 20.8% y/y to Rp1,714.2 trillion in 2024.

Grafik Pertumbuhan PDB Indonesia
Indonesia GDP Growth Chart



Sumber: BPS, diolah | Source: BPS, processed

Sementara itu, dari sisi lapangan usaha menurut data BPS, beberapa sektor mampu tumbuh lebih tinggi dibandingkan PDB Indonesia. Sektor yang dimaksud antara lain adalah sektor konstruksi dengan pertumbuhan sebesar 7,02% yoy; sektor informasi dan komunikasi sebesar 7,57% yoy; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,56% yoy; serta sektor transportasi dan pergudangan sebesar 8,69% yoy.

Meanwhile, in terms of industrial origin according to the BPS data, several sectors have been able to grow at a higher rate than Indonesia's GDP. These sectors include construction with a growth of 7.02% yoy, information and communication with 7.57% yoy, accommodation and food services with 8.56% yoy, and transport and storage with 8.69% yoy.

Di sisi lain, beberapa sektor dengan kontribusi dominan tumbuh lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yakni sektor pengolahan tumbuh melambat menjadi 4,43% yoy, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor sebesar 4,87% yoy dan industri pertanian, kehutanan & perikanan dengan pertumbuhan sebesar 0,67% yoy.

On the other hand, several sectors with dominant contributions grew less than Indonesia's economic growth, namely manufacturing, which grew slower at 4.43% yoy, wholesale and retail trade, auto and motorcycle repair at 4.87% yoy, and agriculture, forestry and fishery with growth of 0.67% yoy.

Tinjauan Perekonomian Provinsi Bali

Bali Province Economic Review

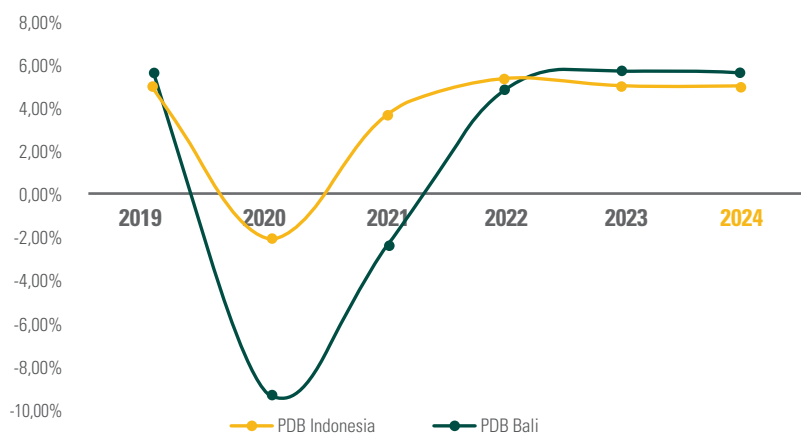
Provinsi Bali kembali mencatatkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 5,48% yoy, lebih tinggi dari PDB Indonesia sebesar 5,03% yoy. Meski demikian, sejalan dengan yang terjadi di perekonomian Indonesia, PDRB Provinsi Bali tahun 2024 ini juga tumbuh lebih terbatas dibandingkan sebesar 5,71% yoy pada tahun 2023.

Bali Province's Gross Regional Domestic Product (GRDP) growth of 5.48% yoy was again higher than Indonesia's GDP growth of 5.03% yoy. However, in line with the performance of the Indonesian economy, Bali's GRDP growth in 2024 was also more limited from 5.71% yoy in 2023.

Pertumbuhan PDRB Bali yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan PDB Indonesia ini sebenarnya sudah terjadi pada periode sebelum pandemi. Pada tahun 2019, PDRB Bali tumbuh sebesar 5,60% yoy ketika PDB Indonesia membukukan pertumbuhan sebesar 5,02% yoy. Seperti halnya yang terjadi di perekonomian Indonesia, pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) juga merupakan katalis utama pertumbuhan PDRB Bali. Rata-rata kontribusi PKRT terhadap PDRB adalah sebesar 55,14% selama tahun 2019-2023 atau lebih tinggi dibandingkan rata-rata kontribusi PKRT terhadap PDB Indonesia sebesar 53,34% pada periode yang sama.

The growth of Bali's GRDP, which is higher than the growth of Indonesia's GDP, actually took place in the period prior to the pandemic. In 2019, Bali's GRDP grew by 5.60% yoy compared to Indonesia's GDP which grew by 5.02% yoy. Household consumption expenditure (PKRT) is also the main catalyst for Bali's GRDP growth, as in the Indonesian economy. The average contribution of PKRT to GRDP in 2019-2023 is 55.14%. This is higher than the average contribution of PKRT to Indonesia's GDP of 53.34% in the same period.

Grafik Pertumbuhan PDRB Bali
Bali GRDP Growth Chart



Sumber: BPS, diolah | Source: BPS, processed

Dengan kondisi ini, perlambatan pertumbuhan PKRT akan berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia maupun di provinsi Bali. PKRT sebagai komponen utama PDRB provinsi Bali tumbuh lebih terbatas menjadi 4,65% yoy pada tahun 2024 dari sebesar 5,57% yoy pada tahun sebelumnya sehingga hal ini berdampak pada pertumbuhan PDRB yang lebih rendah pada tahun 2024.

Under this condition, the slowdown in the growth of PKRT will have a significant impact on the economy of Indonesia as well as on the province of Bali. PKRT as the main component of Bali's provincial GRDP grew more limited to 4.65% yoy in 2024 from 5.57% yoy in the previous year. Therefore, this has an impact on lower GRDP growth in 2024.

Di tengah tantangan pertumbuhan yang lebih terbatas pada PKRT, ekonomi Bali mampu membukukan kenaikan investasi. Investasi yang direfleksikan dengan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) berhasil tumbuh sebesar 5,56% yoy pada tahun 2024, lebih tinggi dibandingkan hanya sebesar 3,01% yoy pada tahun 2023. Bahkan pertumbuhan investasi ini mampu melebihi pertumbuhan PMTB Indonesia sebesar 3,97% yoy. Hal ini menunjukkan investasi berperan vital di perekonomian provinsi Bali tahun 2024.

Sementara itu, dari sisi lapangan usaha, industri penyediaan akomodasi dan makan minum masih memberikan kontribusi terbesar sejalan dengan industri pariwisata di provinsi Bali. Rata-rata kontribusi industri terhadap PDRB Bali sebesar 17,08% diikuti oleh industri pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 13,93% serta industri konstruksi sebesar 10,62% selama 2019-2023.

Setelah berkontraksi akibat pandemi, Industri penyediaan akomodasi dan makan minum berhasil membukukan pertumbuhan *double digit* sebesar 13,89% yoy pada 2022 dan 16,16% yoy pada tahun 2023. Pada tahun 2024, industri ini masih mampu membukukan pertumbuhan *double digit* sebesar 11,95% yoy meski lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 16,16% yoy.

Selain itu, beberapa industri mampu membukukan pertumbuhan *double digit* adalah jasa keuangan dan asuransi sebesar 15,08% yoy diikuti oleh industri pengadaan listrik dan gas (11,78% yoy). Industri lainnya yang mampu tumbuh di atas pertumbuhan PDRB Bali adalah jasa perusahaan (6,80% yoy) serta transportasi dan pergudangan (5,96% yoy).

Amidst the challenges of more limited PKRT growth, the Balinese economy has managed to record increased investment. Investment, as reflected in Gross Fixed Capital Formation (PMTB), grew by 5.56% yoy in 2024, higher than just 3.01% yoy in 2023. In fact, this investment growth exceeded Indonesia's PMTB growth of 3.97% yoy. This is an indication of the important role of investment in Bali's provincial economy in 2024.

Meanwhile, in terms of industrial origin, the accommodation and food services industry is still the largest contributor in line with the tourism industry in Bali province. The average contribution of the industry to Bali's GRDP is 17.08%. This is followed by agriculture, forestry and fishery with 13.93% and construction with 10.62% during 2019-2023.

After a contraction due to the pandemic, the accommodation and food services industry has double-digit growth of 13.89% yoy in 2022 and 16.16% yoy in 2023. In 2024, this industry was still able to post double-digit growth of 11.95% yoy, albeit lower than the previous year's 16.16% yoy.

Moreover, several industries were able to post double-digit growth, namely finance & insurance 15.08% yoy, followed by electricity & gas (11.78% yoy). Other industries that outperformed Bali's GRDP growth were business services (6.80% yoy) and transport and storage (5.96% yoy).

TINJAUAN INDUSTRI PERBANKAN

Banking Industry Review

Industri Perbankan

Banking Industry

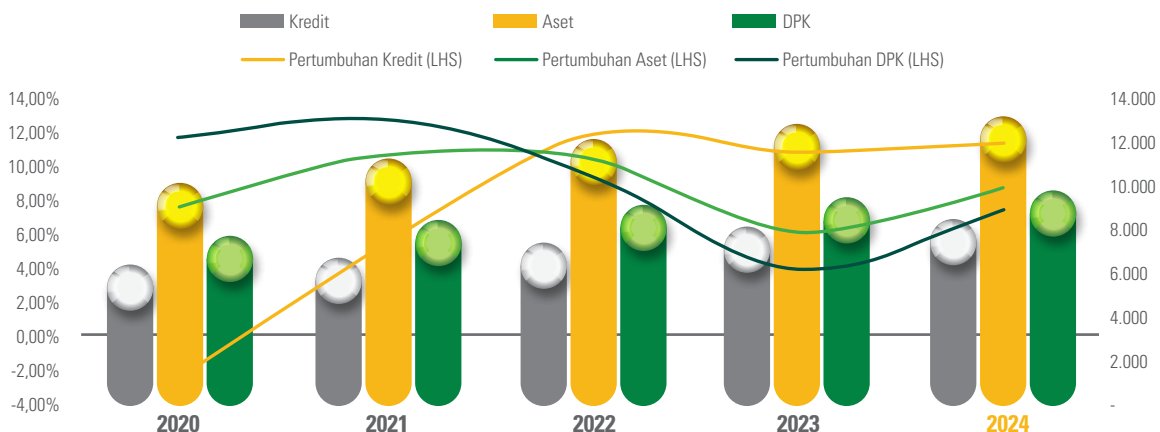
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif terjaga dengan baik mendukung penyaluran kredit kepada pihak ketiga dengan pertumbuhan sebesar 10,39% yoy menjadi Rp7.827,15 triliun pada tahun 2024. Kenaikan kredit ini lebih tinggi dibandingkan sebesar 10,38% yoy pada tahun sebelumnya yang didukung oleh kecukupan modal perbankan dengan rasio CAR sebesar 26,96% pada tahun 2024.

The relatively well-maintained economic growth of Indonesia supports the distribution of credit to third parties with a growth of 10.39% yoy to Rp7,827.15 trillion in 2024. This credit growth is higher than last year's 10.38% yoy. It is supported by adequate bank capitalization with a CAR ratio of 26.96% in 2024.

Selain itu, realisasi investasi yang tumbuh lebih kuat di Indonesia menopang pertumbuhan kredit investasi sebesar 13,62% yoy menjadi Rp2.182,31 triliun atau tertinggi dibandingkan jenis kredit lainnya. Jenis kredit yang lain yakni kredit modal kerja dan kredit konsumsi masing-masing tumbuh lebih rendah sebesar 8,35% yoy dan 10,61% yoy menjadi Rp3.506,11 triliun dan Rp2.138,73 triliun.

In addition, Indonesia's stronger investment realization supported the growth of investment credit by 13.62% yoy to Rp2,182.31 trillion. This is the highest compared to other types of credit. Other types of credit, namely working capital credit and consumer credit, grew at a lower rate of 8.35% yoy and 10.61% yoy to Rp3,506.11 trillion and Rp2,138.73 trillion, respectively.

Grafik Industri Perbankan
Banking Industry Chart



Sumber: BPS, diolah | Source: BPS, processed

Didukung oleh kenaikan kredit tersebut di atas, industri perbankan Indonesia membukukan total aset senilai Rp12.460,96 triliun pada tahun 2024 dengan pertumbuhan sebesar 5,91% yoy. Pertumbuhan aset ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,87% yoy dan diikuti dengan pengelolaan aktiva produktif baik. Rasio NPL mampu diperbaiki menjadi sebesar 2,08% pada tahun 2024 di tengah pertumbuhan kredit pada tahun tersebut dari 2,19% pada tahun 2023.

With the support of the above credit growth, the Indonesian banking industry has a total asset of Rp12,460.96 trillion in 2024 with a growth of 5.91% yoy. This asset growth is higher than the previous year's 5.87% yoy. It is followed by well-managed productive assets. NPL can be improved to 2.08% in 2024 amid credit growth in that year compared to 2.19% in 2023.

Sementara itu, dari sisi liabilitas, pertumbuhan kredit industri perbankan didukung dengan likuiditas yang masih terjaga dengan baik. Berdasarkan data OJK, dana pihak ketiga (DPK) meningkat 4,48% yoy menjadi Rp8.837,24 triliun pada tahun 2024. DPK berbiaya murah (CASA) yang mencapai Rp5.601,61 triliun dengan pertumbuhan 5,06% yoy berperan atas peningkatan DPK ini karena berkontribusi sebesar 63,39% dari total DPK. Hal ini berpengaruh terhadap capaian rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang masih terjaga dengan baik sebesar 88,57% pada tahun 2024.

Meanwhile, on the liabilities side, credit growth of the banking industry is supported by well-maintained liquidity. Based on data from the OJK, third-party funds (DPK) increased by 4.48% yoy to Rp8,837.24 trillion in 2024. Low-cost DPK (CASA), which grew by 5.06% yoy to reach Rp5,601.61 trillion, played a role in increasing DPK as it contributed 63.39% of total DPK. This has impacted on achieving the Loan to Deposit Ratio (LDR) which is still well maintained at 88.57% in 2024.

Peningkatan aktivitas penyaluran kredit selama tahun 2024 tersebut berdampak positif terhadap kinerja profitabilitas Bank. Laba tahun berjalan sebelum pajak mengalami kenaikan 6,17% yoy menjadi Rp323,22 triliun pada tahun 2024. Hal ini sejalan dengan peningkatan pendapatan bunga menjadi sebesar Rp1.084,82 triliun dengan pertumbuhan sebesar 11,04% yoy.

Namun demikian, capaian ROA industri perbankan berkurang menjadi 2,69% pada tahun 2024 dari tahun sebelumnya sebesar 2,74%. Hal ini dipengaruhi oleh tantangan yang dihadapi industri perbankan yakni kenaikan rasio BOPO yang meningkat menjadi 81,30% pada tahun 2024 dari sebesar 78,92% pada tahun sebelumnya. Tantangan lainnya adalah penurunan rasio *margin* bunga bersih dengan rasio NIM menurun menjadi 4,62% pada tahun 2024 akibat kenaikan suku bunga acuan. Pada tahun sebelumnya, rasio NIM adalah sebesar 4,81%.

The increase in loan distribution activities during 2024 has a positive impact on the bank's profitability performance. Pre-tax profit for the year rose 6.17% yoy to Rp323.22 trillion in 2024. This is in line with the increase in interest income to Rp1,084.82 trillion with a growth of 11.04% yoy.

However, the banking industry's ROA declined to 2.72% in 2024 from 2.69% a year earlier. This is due to the challenges faced by the banking industry, namely the increase in the BOPO ratio. The BOPO ratio has increased to 81.30% in 2024 from 78.92% in the previous year. Another challenge is the declining net interest margin, with the NIM ratio falling to 4.62% in 2024 as the benchmark rate rises. In the previous year, the NIM ratio was 4.81%.

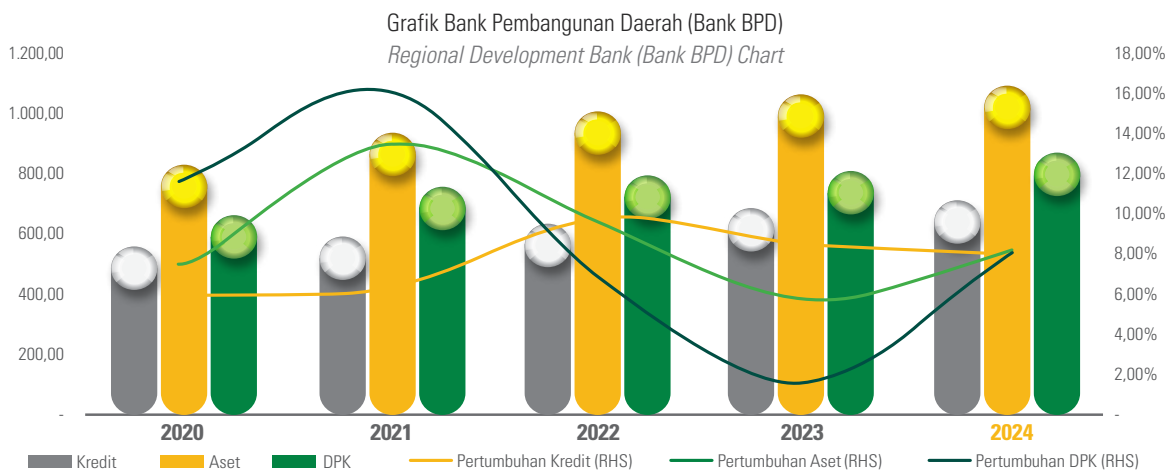
Perbankan - Bank Pembangunan Daerah (BPD) Banking - Regional Development Bank (BPD)

Bank Pembangunan Daerah (Bank BPD) memiliki peran penting dalam industri perbankan di Indonesia. Bank BPD merupakan bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di daerah terutama bagi masyarakat kecil dan menengah. Bank BPD dapat memberikan kredit atau pembiayaan dengan suku bunga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan bank konvensional. Selain itu, BPD berperan strategis dalam penghimpunan dana masyarakat dan melakukan investasi di sektor riil guna membuka lapangan kerja baru serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Regional Development Banks (Bank BPD) play an important role in the banking industry in Indonesia. Bank BPD is a bank that is owned by the regional government and aims to promote the economic growth and development in the regions, especially for the small and medium sized communities. Bank BPD is able to provide loans or financing at a more competitive interest rate as compared to the conventional banks. In addition, BPD plays a strategic role in the collection of public funds and investment in the real sector in order to create new jobs and improve the welfare of people in the regions.

Berdasarkan data OJK, terdapat 27 Bank BPD di Indonesia pada tahun 2024. Ke-27 Bank BPD tersebut berhasil membukukan kenaikan aset sebesar 3,70% yoy menjadi Rp1.021,88 triliun pada tahun tersebut. Kenaikan aset ini didukung oleh pertumbuhan kredit sebesar 6,44% yoy pada tahun 2024. Meski demikian, pertumbuhan kredit ini masih lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2023 sebesar 7,79%. Selain itu, Bank BPD juga menghadapi tantangan pengelolaan aset produktif karena rasio NPL mengalami kenaikan menjadi 2,48% pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 sebesar 2,18% dan juga lebih tinggi dibandingkan rata-rata industri sebesar 2,08%.

According to OJK data, there were 27 Bank BPDs in Indonesia in by 2024. The 27 Bank BPDs were able to record an increase in assets of 3.70% yoy to Rp1,021.88 trillion during the same period. This asset growth was supported by lending which grew by 6.44% yoy in 2024. However, this credit growth is still lower than the growth rate of 7.79% in 2023. Moreover, Bank BPDs also faces challenges in managing productive assets as NPL ratio increased to 2.48% in 2024 from 2.18% in 2023 and also higher than industry average of 2.08%.



Sumber: OJK, diolah | Source: OJK, processed



Namun demikian, hal yang pantas diapresiasi adalah pertumbuhan kredit tersebut didukung oleh ketersediaan modal yang memadai dengan rasio KPMM Bank BPD sebesar 25,77% pada tahun 2024. Namun demikian, capaian rasio ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 25,91% dan rata-rata industri sebesar 26,69%.

Pertumbuhan kredit tersebut juga didukung oleh pertumbuhan DPK Bank BPD sebesar 3,06% yoy pada tahun 2024. Kenaikan DPK ini jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 0,89% yoy. Namun demikian, pertumbuhan DPK Bank BPD ini lebih rendah dibandingkan rata-rata industri sebesar 4,48% yoy. Dari sisi rasio, Bank BPD membukukan rasio LDR sebesar 85,91% pada tahun 2024, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 83,03% dipengaruhi oleh pertumbuhan DPK lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit. Namun demikian, rasio LDR Bank BPD ini lebih rendah dibandingkan industri sebesar 88,57%.

Selanjutnya, sebagaimana yang dihadapi industri perbankan, Bank BPD juga menghadapi tantangan penurunan rasio NIM menjadi 5,24% pada tahun 2024 atau lebih rendah dari 5,52% pada tahun sebelumnya sejalan dengan kenaikan suku bunga acuan pada tahun 2024. Meski demikian, rasio NIM Bank BPD ini lebih tinggi dibandingkan 4,62% yang dibukukan oleh industri.

Tantangan lainnya adalah peningkatan rasio BOPO menjadi 81,13% dibandingkan sebesar 78,38% pada tahun 2023. Walaupun demikian, rasio BOPO Bank BPD ini masih lebih rendah dibandingkan rata-rata industri sebesar 81,30%.

Akibatnya, rasio ROA Bank BPD turun menjadi 1,76% pada tahun 2024 dibandingkan sebesar 1,98% pada tahun 2023 sebelumnya dan lebih rendah dibandingkan rata-rata industri sebesar 2,69%. Penurunan rasio ROA Bank BPD tersebut disebabkan oleh penurunan laba tahun berjalan sebelum pajak sebesar 6,07% yoy menjadi Rp17,35 triliun pada tahun 2024.

Perbankan - Provinsi Bali

Banking - Bali Province

Sejalan dengan perbaikan ekonomi pasca pandemi, kredit perbankan di provinsi Bali tumbuh sebesar 4,10% yoy pada tahun 2022 dan 6,10% yoy pada tahun 2023 didukung oleh pertumbuhan PDRB yang lebih kuat masing-masing sebesar 4,84% yoy dan 5,71%. Pertumbuhan kredit kembali menguat sebesar 6,81% yoy menjadi Rp112,31 triliun pada tahun 2024 yang sejalan dengan kenaikan kredit yang lebih tinggi di industri perbankan.

However, it is worth noting that loan growth is supported by adequate capital availability with Bank BPDs' CAR ratio of 25.77% in 2024. However, this ratio was lower than the previous year's ratio of 25.91% and industry average of 26.69%.

The credit growth was also supported by the growth of Bank BPDs' DPK of 3.06% yoy in 2024. This DPK growth was much higher than the previous year's 0.89%. However, Bank BPDs' DPK growth was lower than the industry average of 4.48% yoy. In terms of ratio, Bank BPDs recorded an LDR ratio of 85.91% in 2024, which is higher than the previous year's ratio of 83.03% which was influenced by the lower DPK growth compared to the loan growth. However, Bank BPDs' LDR ratio is lower than the industry at 88.57%.

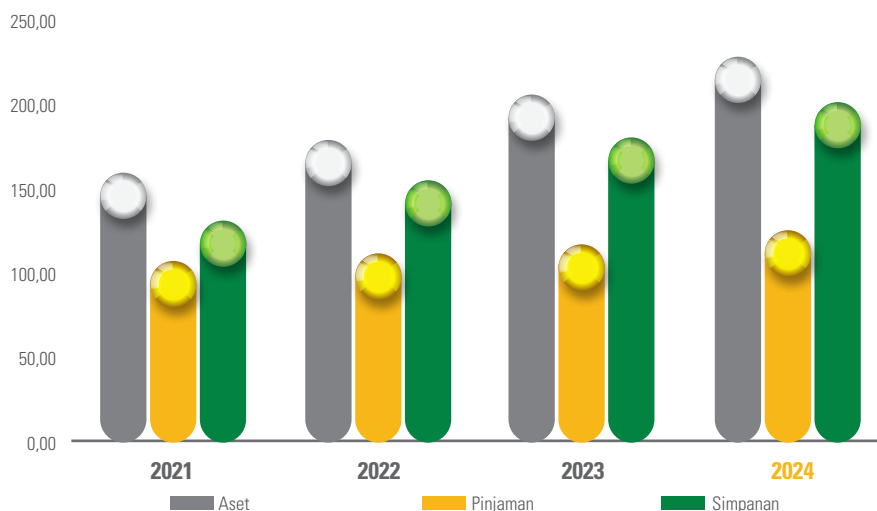
Furthermore, like the banking industry, Bank BPDs also face the challenge of reducing the NIM ratio to 5.24% in 2024, or lower than 5.52% in the previous year, in line with the increase in the benchmark interest rate in 2024. However, the NIM ratio of Bank BPDs is higher than the industry average of 4.62%.

Another challenge is the increase in the BOPO ratio to 81.13% from 78.38% in 2023. However, Bank BPDs' BOPO ratio remain below the industry average of 81.30%.

As a result, the ROA ratio of Bank BPDs falls to 1.76% in 2024, compared to 1.98% in the previous year, and below the industry average of 2.69%. Bank BPDs' ROA ratio declined due to a 6.07% yoy decrease in current year profit before tax to Rp17.35 trillion.

In line with the post-pandemic economic recovery, bank credit in Bali province grew by 4.10% yoy in 2022 and 6.10% yoy in 2023. This was supported by stronger GRDP growth of 4.84% yoy and 5.71% yoy, respectively. In 2024, credit growth strengthens again by 6.81% yoy to Rp112.31 trillion in line with higher credit growth in the banking industry.

Grafik Perbankan di Provinsi Bali
Banking in Bali Province



Sumber: OJK, diolah | Source: OJK, processed

Sejalan dengan pertumbuhan kredit tersebut, total aset perbankan di Provinsi Bali mampu tumbuh 11,66% yoy pada tahun 2024. Pertumbuhan aset ini lebih tinggi dibandingkan sebesar 6,69% yoy dan 11,24% yoy masing-masing untuk tahun 2023 dan 2022.

In line with loan growth, total banking assets in Bali Province were able to grow by 11.66% yoy in 2024. This asset growth is higher than the 6.69% yoy and 11.24% yoy for 2023 and 2022, respectively.

Pertumbuhan kredit di provinsi Bali tersebut didukung kenaikan dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil membukukan pertumbuhan *double digit* sebesar 20,01% yoy dan 18,13% yoy masing-masing untuk tahun 2022 dan 2023. Selanjutnya, pada tahun 2024 DPK di provinsi Bali masih mampu membukukan pertumbuhan *double digit* sebesar 13,53% yoy menjadi Rp189,22 triliun.

Bali's loan growth is supported by an increase in third-party funds (DPK), which is able to grow at double-digit rates of 20.01% yoy and 18.13% yoy in 2022 and 2023, respectively. In addition, DPK in Bali Province was still able to post a double-digit growth of 13.53% yoy to Rp189.22 trillion in 2024.

Dengan membandingkan *outstanding* kredit dan DPK industri perbankan di Indonesia, maka kontribusi kredit dan DPK di provinsi Bali diperkirakan masing-masing sebesar 1,43% dan 1,74% pada tahun 2024. Sementara itu, kontribusi total aset perbankan di Bali adalah sebesar 1,76% dibandingkan industri perbankan di Indonesia.

In comparison with the outstanding credit and DPK of the banking industry in Indonesia, the contribution of credit and DPK in Bali province is estimated to be 1.43% and 1.74%, respectively, in 2024. Meanwhile, the contribution of Bali's total banking assets to Indonesia's banking industry is 1.76%.

Potensi besar industri pariwisata di provinsi ini menjadi daya tarik bagi pelaku di industri perbankan untuk menjalankan operasinya di Bali. Menurut data BI, secara kumulatif terdapat 764 kantor bank yang beroperasi di Bali yang terdiri dari 723 kantor cabang bank devisa dan 41 kantor bank non devisa.

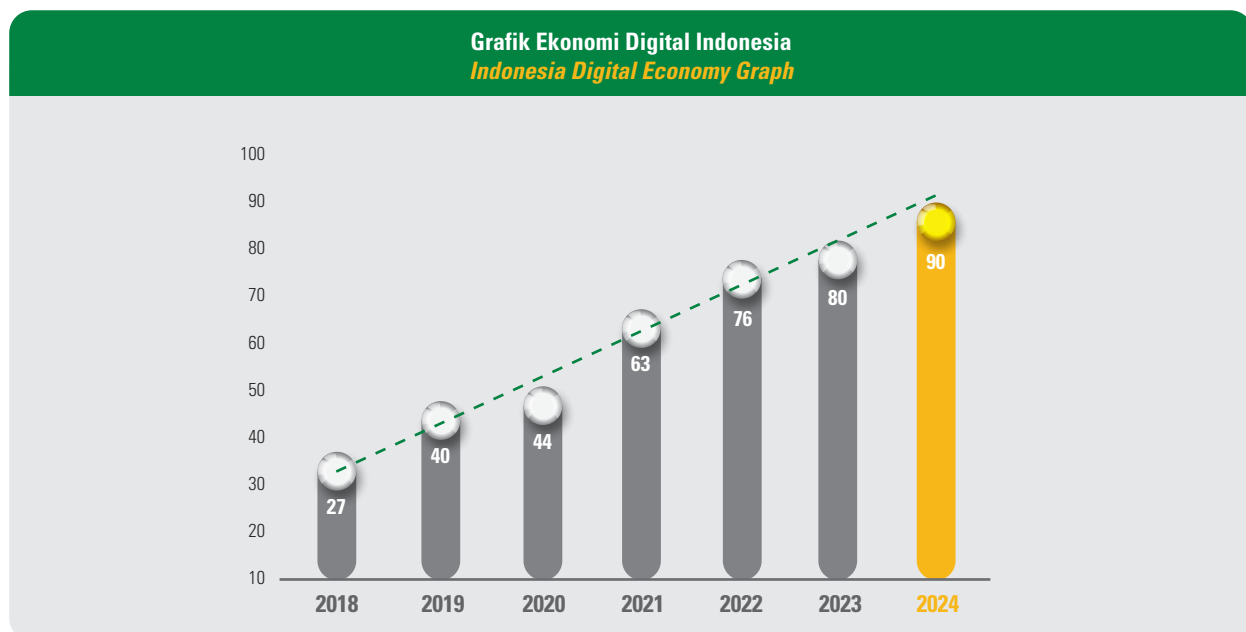
The great potential of the tourism industry in this province is an attraction for players in the banking industry to conduct their business in Bali. According to BI data, there are a total of 764 bank branches in Bali, consisting of 723 foreign exchange bank branches and 41 non-foreign exchange bank branches.

TINJAUAN EKONOMI DIGITAL DAN KEUANGAN DIGITAL INDONESIA

Review of Indonesian Digital Economy and Finance

Ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai *Gross Merchandise Value* (GMV) senilai US\$90 miliar pada tahun 2024, naik 13% dibandingkan tahun 2023 dan merupakan GMV terbesar di Asia Tenggara menurut Laporan *e-Economy SEA 2024* yang disusun oleh Google, Temasek, dan Bain & Company. Ekonomi digital Indonesia juga dilaporkan tumbuh stabil dari US\$27 miliar pada tahun 2018 menjadi US\$90 miliar pada tahun 2024 sebagaimana dijelaskan pada grafik berikut ini:

Indonesia's digital economy is estimated to reach a gross merchandise value (GMV) of US\$90 billion in 2024, an increase of 13% from 2023 and the largest GMV in Southeast Asia, according to the *e-Economy SEA 2024* report by Google, Temasek, and Bain & Company. Indonesia's digital economy is also reported to grow steadily from US\$27 billion in 2018 to US\$90 billion in 2024, as shown in the chart below:



Sumber: e-Economy SEA 2024

Ekonomi digital Indonesia yang diperkirakan mencapai US\$90 miliar pada tahun 2024 tumbuh sebesar 13,0% yoy dibandingkan tahun sebelumnya senilai US\$80 miliar. Tingkat pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan sebesar 6% yoy pada tahun sebelumnya dari US\$76 miliar pada tahun 2022 menjadi US\$80 miliar pada tahun 2023. Sektor *e-commerce* memberikan kontribusi terbesar yang mencapai US\$65 miliar dengan pertumbuhan sebesar 11,00% yoy pada tahun 2024 dari total nilai ekonomi digital pada tahun 2024 tersebut. Sementara itu, *online travel* mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 24,00% yoy menjadi US\$9 miliar pada tahun 2024.

Indonesia's digital economy is estimated to reach US\$90 billion in 2024. This is 13.0% yoy growth from US\$80 billion in the previous year. This growth rate is higher than the previous year's growth rate of 6% yoy from US\$ 76 billion in 2022 to US\$ 80 billion in 2023. The *e-commerce* sector makes the largest contribution to the total value of the digital economy in 2024, reaching US\$65 billion with a growth rate of 11.00% yoy in 2024. Meanwhile, *Online travel* recorded the highest growth of 24.00% yoy to reach US\$9 billion in 2024.

Sektor transportasi *online* dan pengiriman makanan tumbuh sebesar 13% yoy menjadi US\$9 miliar pada tahun 2024. Terakhir, sektor media *online* juga membukukan pertumbuhan yang konsisten, meskipun pangsa pasarnya secara keseluruhan dalam ekonomi digital masih relatif kecil. GMV sektor ini diperkirakan akan tumbuh 12% menjadi US\$8 miliar pada tahun 2024 dari US\$7 miliar pada tahun 2023 terutama didorong oleh meningkatnya popularitas konten digital, *game*, dan layanan *streaming*.

Online transportation and food delivery sector grew by 13% yoy to US\$9 billion in 2024. Finally, the *online media* sector also experienced steady growth, although its overall market share in the digital economy is still relatively small. The sector's GMV is expected to grow by 12% from \$7 billion in 2023 to \$8 billion in 2024. This growth will be driven primarily by the increasing popularity of digital content, gaming, and streaming services.

Berdasarkan Analisa Bain, peningkatan ekonomi digital tersebut didukung layanan keuangan digital atau digital *financial services* (DFS) dengan *gross transaction value* (GTV) dari *digital payments* diperkirakan mampu tumbuh

Based on Bain's analysis, the rise of the digital economy will be driven by digital financial services (DFS), with digital payments gross transaction value (GTV) estimated to grow 19.00% yoy to US\$404 billion in 2024.

sebesar 19,00% yoy menjadi US\$404 miliar pada 2024. GTV untuk pembayaran digital ini mencakup nilai transaksi kartu kredit, debit, kartu prabayar, antar-akun (A2A), dan dompet elektronik. Sementara itu, untuk *loan book balance* atau saldo pinjaman untuk pinjaman digital yang mencakup saldo akhir tahun untuk pinjaman konsumen (tidak termasuk kartu kredit dan hipotek) dan pinjaman usaha kecil/menengah (UKM) diproyeksikan mampu tumbuh 27% yoy menjadi US\$9 miliar pada tahun 2024.

Selain itu, *Assets Under Management* (AUM) untuk kekayaan digital yang mencakup saldo AUM reksa dana akhir tahun diperkirakan tumbuh 32% yoy menjadi US\$5 miliar pada tahun 2024. Terakhir, *annual premium equivalent* (APE) and *gross written premium* (GWP), untuk asuransi digital mencakup APE untuk asuransi jiwa dan kesehatan berdasarkan polis asuransi jiwa dan GWP untuk asuransi non-jiwa, diproyeksikan mampu membukukan pertumbuhan sebesar 18% yoy menjadi US\$0,2 miliar pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa DFS terus menunjukkan pertumbuhan yang kuat meskipun pengawasan yang dilakukan oleh regulator semakin meningkat.

Selaras dengan perkembangan DFS tersebut di atas, menurut data Bank Indonesia (BI), nilai transaksi yang dilakukan melalui kanal pembayaran individu (*proprietary channel*) berupa *mobile banking* dan *internet banking* secara kumulatif mencapai Rp87.867,19 triliun pada tahun 2024 dengan pertumbuhan sebesar 50,65% yoy. Capaian ini didukung oleh pertumbuhan *volume* transaksi sebesar 37,15% yoy menjadi 22,00 miliar transaksi selama periode tersebut dibandingkan tahun sebelumnya.

Nilai transaksi yang berasal dari *internet banking* berkontribusi paling besar yang mencapai 73,73% atau setara dengan Rp64.788,64 triliun pada tahun 2024. Capaian ini lebih tinggi 47,43% dibandingkan sebesar Rp43.945,07 triliun pada tahun sebelumnya. Selain itu, transaksi *mobile banking* mencatatkan nilai transaksi sebesar Rp23.077,47 triliun pada tahun 2024. Jenis transaksi ini membukukan pertumbuhan lebih tinggi sebesar 60,50% yoy dengan kontribusi sebesar 26,26%.

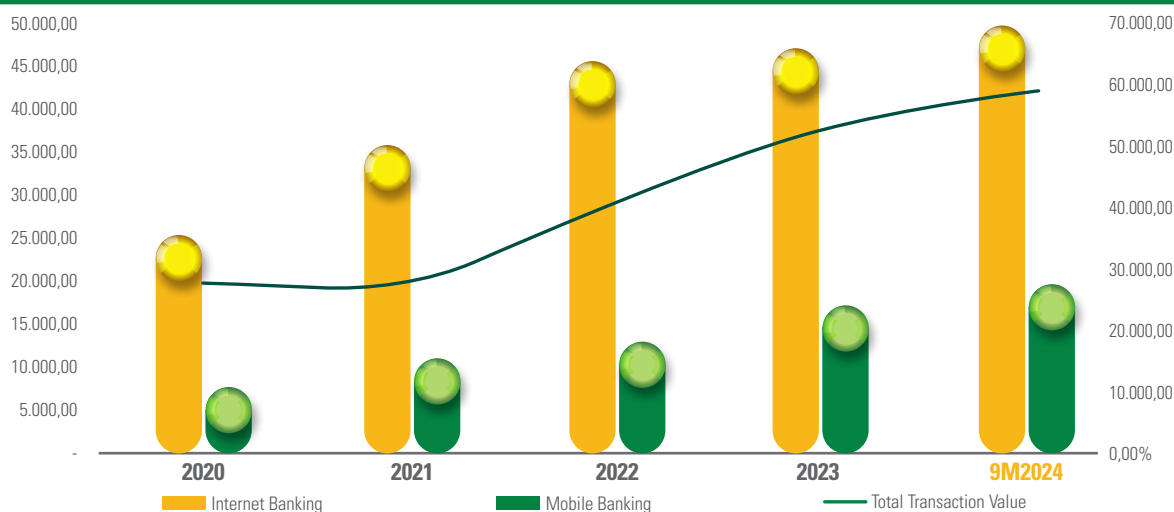
The GTV of digital payments includes the transaction value of credit cards, debit cards, prepaid cards, accounts to accounts (A2A), and e-wallets. Meanwhile, GTV for digital loans is projected to grow 27% yoy to US\$9 billion in 2024, which includes the year-end balance of consumer loans (excluding credit cards and mortgages) and small and medium enterprise (SME) loans.

In addition, the assets under management (AUM) for digital assets, which includes the year-end AUM balance of mutual funds, is estimated to grow by 32% yoy to US\$5 billion in 2024. Finally, annual premium equivalent (APE) and gross written premium (GWP) for digital insurance, which comprises APE for life and health insurance policies and GWP for non-life insurance policies, is projected to grow by 18% yoy to US\$0.2 billion in 2024. This shows: DFS continues to show strong growth despite increased regulatory oversight.

In line with the above DFS development, according to Bank Indonesia (BI), the value of transactions made through individual payment channels (proprietary channels) in the form of mobile banking and internet banking cumulatively reached Rp87,867.19 trillion in 2024, growing 50.65% yoy. This achievement was supported by the transaction volume which grew by 37.15% yoy to reach 22.00 billion transactions during the period compared to the previous year.

Internet banking transaction value was the largest contributor with 73.73% or equivalent to Rp64,788.64 trillion in 2024. This performance is 47.43% higher than the Rp43,945.07 trillion recorded in the previous year. In addition, the transaction value of mobile banking transactions has been recorded at Rp23,077.47 trillion in 2024. This type of transaction recorded a higher growth of 60.50% yoy, contributing 26.26%.

Grafik Transaksi Internet dan Mobile Banking
Internet and Mobile Banking Transaction Graph



Sumber: Bank Indonesia, diolah | Source: Bank Indonesia, processed

KEBIJAKAN STRATEGIS TAHUN 2024

2024 Strategic Policy

Dalam menjalankan pengembangan bisnis, Bank BPD Bali telah menetapkan kebijakan strategis untuk tahun buku 2024 yakni membangun posisi sebagai pemimpin pasar dengan memelihara dan terus meningkatkan skala dan kinerja bisnis sehingga mampu berdaya saing tinggi dan berkontribusi optimal bagi perekonomian daerah serta memenuhi ekspektasi *stakeholders*.

Arah kebijakan Bank BPD Bali terbagi menjadi tiga aspek utama yakni peningkatan kemampuan sebagai ketahanan kelembagaan, peningkatan kemampuan sebagai *agent of regional development*, dan peningkatan daya saing.

In conducting business development, Bank BPD Bali has set a strategic policy for FY 2024, namely to build a market leader position by maintaining and continuously improving the size and performance of the business to be highly competitive, optimally contribute to the regional economy and meet stakeholders' expectations.

Bank BPD Bali's policy direction is divided into three main aspects: improving institutional resilience, capability enhancement as a regional development agent, and enhancement of competitiveness.

Peningkatan Ketahanan Kelembagaan

Improving Institutional Resilience

Aspek peningkatan ketahanan kelembagaan diimplementasikan melalui penguatan permodalan bank dari pemegang saham, penyisihan laba yang ditempatkan dalam cadangan umum dan melakukan *review* kecukupan modal terhadap perkembangan usaha Bank. Bank BPD Bali juga melakukan peningkatan kualitas pengelolaan *Governance, Risk Management, Compliance*, dan *Control* serta mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank pada peringkat 2 antara lain melalui penerapan budaya *anti-fraud*, peningkatan kapabilitas *cyber resilience*, dan peningkatan kualitas dan kompetisi SDM.

The aspect of improving the institutional resilience is implemented by strengthening the bank's capital from the shareholders, setting aside the profits to be placed in the general reserves, and conducting a capital adequacy review of the bank's business development. Bank BPD Bali also improves the quality of Governance, Risk Management, Compliance and Control Management and maintains the Bank's Health Level at Rank 2, including by implementing an anti-fraud culture, enhancing cyber resilience capabilities, and improving the quality and competitiveness of human resources.

Langkah strategis selanjutnya adalah peningkatan kualitas kredit melalui pengendalian NPL secara ketat sesuai dengan target NPL *gross* yang ditetapkan. Hal ini dapat dilakukan antara lain melalui penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit, pemantauan kredit yang berpotensi bermasalah, dan peningkatan penyaluran kredit *low risk*.

The next strategic step is the improvement of credit quality through strict NPL control in accordance with the set gross NPL target. This can be achieved by, among others, applying the principle of prudence in loan allocation, monitoring potentially problematic loans, and increasing low-risk loan allocation.

Terakhir, Bank BPD Bali melakukan penguatan bisnis guna mengoptimalkan rentabilitas secara berkelanjutan sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini dapat dijalankan diantaranya melalui peningkatan *fee-based income*, aktivitas *treasury*, dan efisiensi usaha.

Finally, Bank BPD Bali is strengthening its business to sustainably optimize profitability in accordance with the set targets. This can be done by increasing fee income, treasury activities and business efficiency, among others.



Peningkatan Kemampuan sebagai *Agent of Regional Development* *Capacity Building as an Agent of Regional Development*

Aspek peningkatan kemampuan sebagai *agent of regional development* diimplementasikan dengan Upaya mendorong penghimpunan DPK dan komposisi CASA sesuai dengan target yang ditetapkan. Kebijakan ini dilakukan antara melalui peningkatan rekening DPK, sinergi dengan Pemda dan institusi lain, dan peningkatan kegiatan promosi dan *cross selling* dalam pemasaran dana.

Bank BPD Bali juga mendorong penyaluran kredit dengan komposisi kredit produktif sesuai dengan target yang ditetapkan. Kebijakan ini dapat ditempuh antara lain melalui kemitraan strategis dalam memperkuat *supply chain ecosystem*, *rebranding* produk kredit, dan penyempurnaan *platform digital* kredit *low risk* untuk percepatan penetrasi pasar.

Langkah strategis selanjutnya adalah mendorong segmen UMKM menjadi salah satu motor penggerak ekonomi dan pembangunan daerah. Kebijakan ini dijalankan diantaranya melalui penyaluran KUR, kerja sama dengan agen bank dan pihak ketiga lainnya, dan program TJSL sebagai bagian dari keuangan berkelanjutan.

Terakhir, BPD Bali bersinergi dan kolaborasi ekosistem digital melalui peningkatan sinergi dan kolaborasi dengan Lembaga keuangan, edukasi dan literasi digital, dan peningkatan dukungan *infrastructure digital solution* bagi pemda.

The capacity building as regional development agent aspect is implemented through efforts to promote DPK and CASA composition collection according to set targets. This policy is implemented by increasing DPK accounts, synergizing with local governments and other institutions, and increasing promotion and cross-selling activities.

Bank BPD Bali also promotes the distribution of loans with a composition of productive loans in accordance with the targets that have been set. This policy can be done, among others, through strategic partnerships in the strengthening of the supply chain ecosystem, re-branding of credit products, and improvement of the digital platform for low-risk credit to accelerate market penetration.

The next strategic step is to encourage the MSME segment to become an economic and regional development driver. This policy is implemented by distributing KUR, collaborating with bank agents and other third parties, and implementing the TJSL program under sustainable finance, among others.

Finally, BPD Bali is synergizing and collaborating with the digital ecosystem by increasing the synergy and cooperation with financial institutions, digital education and literacy, and increasing the support for the infrastructure of digital solutions for local governments.

Peningkatan Daya Saing *Enhancement of Competitiveness*

Bank BPD Bali melakukan peningkatan daya saing melalui inovasi produk dan layanan untuk penguatan loyalitas pelanggan, memperluas layanan dan akses dengan memanfaatkan digitalisasi serta meningkatkan aliansi strategis dengan mitra. Langkah strategis lainnya adalah penguatan peran sebagai Bank devisa dengan meningkatkan pertumbuhan dari layanan Bank Devisa.

Langkah penting lainnya adalah peningkatan corporate brand, penguatan organisasi dan kapabilitas strategis SDM serta internalisasi budaya Bank. Terakhir dan tidak kalah penting adalah optimalisasi digitalisasi sebagai *backbone* pelayanan kepada nasabah maupun pengelolaan internal.

Bank BPD Bali is committed to enhancing its competitiveness by innovating products and services to strengthen customer loyalty, expanding services and access by leveraging digitalization, and strengthening strategic alliances with partners. Another strategic step is to strengthen its role as a foreign exchange bank by continuing to grow foreign exchange services.

Another important step is to enhance the corporate brand, to strengthen the organization and strategic capabilities of the human resources department and to internalize the culture of the bank. Last but not least is the optimization of digitalization as the backbone of customer service and internal management.

ASPEK PEMASARAN

Marketing Aspect

Strategi Pemasaran

Marketing Strategy

Pengembangan usaha Bank BPD Bali selama tahun 2024 juga diperkuat dengan beragam strategi pemasaran yang antara lain melalui peningkatan *fee based income* minimal 25% untuk mendukung ketahanan kelembagaan yang dilakukan melalui:

- pelaksanaan kegiatan retensi atensi untuk rekanan dan debitur dalam rangka mendukung program Bank seperti penurunan suku bunga Kredit Multi Guna, Kredit Usaha Persiapan Pensiun, dan Kredit Usaha Pensiun.
- Bank BPD Bali juga melakukan penambahan *referral* produk *Bancassurance* termasuk penambahan jenis produk kerja sama dengan pihak mitra Asuransi. Bank juga telah melakukan *launching* kerja sama pemasaran pada serangkaian Bulan Inklusi Keuangan.
- Penambahan nilai persentase KPI ke tenaga Pemasar Eksternal terkait akuisisi layanan *E-Banking* serta pemberian *reward* kepada tenaga Pemasar Eksternal atas pencapaian perolehan user *Mobile Banking* dan ATM.

Selain itu dalam rangka peningkatan kemampuan sebagai *agent of regional development*, Bank juga meningkatkan kegiatan promosi dan *cross selling* dalam pemasaran dana. Strategi ini dijalankan dengan meningkatkan kegiatan promosi dan aktivitas pemasaran melalui *website* dan sosial media Bank BPD Bali untuk peningkatan *cross selling*. Bank juga melakukan pemasaran produk DPK valas dalam promosi bisnis devisa ke sekolah pariwisata, memasarkan produk DPK dan promosi penjualan SBN ritel.

Selanjutnya, Bank BPD Bali juga meningkatkan kegiatan promosi dan *cross selling* dalam pemasaran kredit. Langkah ini dilakukan melalui *gathering* dan retensi dengan debitur-debitur korporasi. Bank BPD Bali juga melaksanakan kegiatan promosi dan aktivitas kredit terintegrasi secara serentak pada seluruh unit operasional, dengan memanfaatkan momen-momen tertentu dan fitur produk yang menarik pasar, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan asosiasi, instansi pemerintah sudah dilakukan di masing-masing Kantor Cabang. Bank BPD Bali juga melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah daerah dalam kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk perluasan layanan perkreditan dan peningkatan kapasitas UMKM seperti kegiatan aktivitas pemasaran bersinergi dengan dinas koperasi dan UMKM Pemerintah Kabupaten dan Kota di provinsi Bali.

Terakhir, terkait dengan peningkatan daya saing, Bank BPD Bali melakukan pengembangan ekosistem digital yang antara lain melalui implementasi kerja sama pemasaran bersama *Payment Gateway*. Bank juga mengoptimalkan pemasaran kredit kepada debitur eksisting yang membutuhkan tambahan pembiayaan. Strategi pemasaran lainnya adalah meningkatkan pemasaran layanan *E-Banking* oleh seluruh Kantor Cabang dan Cabang Pembantu dengan mengoptimalkan aktivasi ATM, *Mobile Banking*, *Internet Banking*, *Direct Debet*, *Balipay*, *QRIS*. Bank juga meningkatkan pemasaran produk tabungan berbiaya administrasi melalui kegiatan pemasaran dan *cross selling* produk melibatkan seluruh karyawan Bank BPD Bali.

Bank BPD Bali's business development in 2024 is also be strengthened by various marketing strategies, including increasing fee-based income by at least 25% to support institutional resilience, which is achieved by:

- *Implementing attention retention activities for partners and debtors to support the bank's programs such as reducing interest rates on multipurpose loans, business loans for retirement preparation, and business loans for retirement.*
- *Bank BPD Bali also added bancassurance product recommendations, including adding types of cooperation products with insurance partners. The bank has also started marketing cooperation in a series of Financial Inclusion Months.*
- *Added KPI percentages to external marketers related to acquisition of e-banking services and provided rewards to external marketers for achieving mobile banking and ATM user acquisition.*

In addition, to enhance its capabilities as an agent of regional development, the Bank is also increasing promotional and cross-selling activities in marketing funds. This strategy will be implemented through increased promotional and marketing activities through the BankBPBali website and media to increase cross-sell. The Bank also markets DPK foreign currency products in the promotion of foreign exchange business to tourism schools, the marketing of DPK products and the promotion of SBN sales to retail customers.

In addition, Bank BPD Bali also increases promotional and cross-selling activities in credit marketing. This step is carried out through collection and retention with corporate debtors. In addition, Bank BPD Bali conducts promotional activities and integrated credit activities simultaneously in all operational units, taking advantage of certain moments and product features that attract the market, both independently and in cooperation with associations, governmental bodies in every branch. Bank BPD Bali also cooperates with local government agencies in activities aimed at expanding credit services and increasing the capacity of MSMEs, such as marketing activities in synergy with the Cooperative and MSME Services of the Regency and City Governments in Bali Province.

Finally, in relation to increasing competitiveness, Bank BPD Bali is developing a digital ecosystem, including through the implementation of joint marketing cooperation with payment gateway. The Bank is also optimizing the marketing of loans to existing borrowers who need additional financing. Another marketing strategy is to increase the marketing of e-banking services through all branches and sub-branches by optimizing the activation of ATMs, Mobile Banking, Internet Banking, Direct Debit, Balipay, QRIS. The Bank also increases the marketing of savings products with management fees through marketing activities and product cross-selling involving all employees of Bank BPD Bali.

Pangsa Pasar Market Share

Implementasi strategi Bank BPD Bali yang berjalan efektif dan tepat sasaran didukung dengan implementasi strategi pemasaran berhasil meningkatkan kontribusi Bank baik terhadap industri perbankan maupun perbankan BPD sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini:

The implementation of Bank BPD Bali's strategy, which is effective and on target, is supported by the implementation of a marketing strategy that succeeded in increasing the bank's contribution to both the banking industry and BPD banking as explained in the table below:

(Dinyatakan dalam miliar Rupiah)/(Expressed in billion of Rupiah)

Uraian		2024	2023	2022
Total Aset Total Assets	Industri perbankan -Indonesia Banking Industry - Indonesia	12.461	11.766	11.113
	Bank-Bank BPD BPD Banks	1.022	985	938
	Industri perbankan - Provinsi Bali Banking Industry - Bali Province	217	194	168
	BPD Bali	38	34	32
	Pangsa pasar terhadap Indonesia Market share to Indonesia	0,31%	0,29%	0,29%
	Pangsa pasar terhadap Bank BPD Market share to BPD Banks	3,75%	3,48%	3,43%
	Pangsa pasar terhadap Provinsi Bali Market share to Bali Province	17,68%	17,73%	19,14%
Kredit Loan	Industri perbankan -Indonesia Banking Industry - Indonesia	7.827	7.090	6.424
	Bank-Bank BPD BPD Banks	646	607	563
	Industri perbankan - Provinsi Bali Banking Industry - Bali Province	112	105	99
	BPD Bali	23	21	20
	Pangsa pasar terhadap Indonesia Market share to Indonesia	0,29%	0,30%	0,31%
	Pangsa pasar terhadap Bank BPD Market share to BPD Banks	3,54%	3,49%	3,57%
	Pangsa pasar terhadap Provinsi Bali Market share to Bali Province	20,33%	20,11%	20,25%
DPK Customer Deposits	Industri perbankan -Indonesia Banking Industry - Indonesia	8.837	8.458	8.154
	Bank-Bank BPD BPD Banks	753	730	724
	Industri perbankan - Provinsi Bali Banking Industry - Bali Province	189	167	141
	BPD Bali	32	28	26
	Pangsa pasar terhadap Indonesia Market share to Indonesia	0,36%	0,33%	0,32%
	Pangsa pasar terhadap Bank BPD Market share to BPD Banks	4,27%	3,83%	3,65%
	Pangsa pasar terhadap Provinsi Bali Market share to Bali Province	17,00%	16,77%	18,75%



Perbandingan Target dan Realisasi 2024 serta Proyeksi 2025

Comparison of 2024 Targets and Achievements and 2025 Projections

Bank BPD Bali telah menetapkan beberapa target dari aspek operasional dan keuangan serta sumber daya manusia yang telah ditetapkan pada awal tahun 2024. Adapun perbandingan antara target dan realisasi tahun 2024 dan proyeksi tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bank BPD Bali has set a number of operational, financial and human resources targets to be achieved by the beginning of 2024. The comparison between the targets and realizations in 2024 and the projections for 2025 are as follows:

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)/(Expressed in millions of Rupiah)

Indikator Indicator	2024			2025
	Target	Realisasi Realization	Pencapaian/Deviasi* (%) Achievement/Deviation* (%)	Target
Operasional dan Keuangan Operational & Financial				
Pinjaman yang diberikan Loans	22.842.627	22.830.169	99,95%	24.903.382
Jumlah Aset Total Assets	36.725.502	38.312.682	104,32%	40.419.455
Simpanan dari Nasabah Deposits from Customers	30.184.291	32.167.791	106,57%	33.233.251
Pendapatan bunga – bersih Net Interest Income	2.353.186	2.377.735	101,04%	2.727.079
Laba Tahun Berjalan Income for The Year	781.847	878.466	112,36%	935.346
Rasio Rentabilitas Profitability Ratio				
Marjin Bunga Bersih (NIM) Net Interest Margin (NIM)	6,82%	6,66%	(0,16%)	6,85%
Beban Operasional terhadap Penghasilan Operasional (BOPO) Operating Expenses to Operating income (BOPO)	69,13%	66,85%	(-2,28%)	68,48%
Imbal Hasil Aktiva (ROA) Return on Assets Ratio (ROA)	3,02%	3,20%	0,18%	3,13%
Imbal Hasil Aktiva (ROE) Return on Equity Ratio (ROE)	20,11%	21,68%	1,57%	21,27%
Rasio Likuiditas Liquidity Ratio				
Loan to Deposit Ratio (LDR)	75,68%	70,95%	(4,73%)	74,94%
Aset Produktif Productive Assets				
NPL - gross	1,75%	0,92%	(0,83%)	1,35%
NPL - net	0,04%	0,02%	(0,02%)	0,03%
Struktur Modal Capital Structure				
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Capital Adequacy Ratio	26,69%	27,45%	0,76%	25,87%
Divident- Divident Pay Out Ratio	75,00%	75,00%	100,00%	75,00%
SDM				
Total Peserta Program Pendidikan dan Pelatihan Total training program participants	3.543	7.946	224%	3.214
Anggaran Program Pendidikan dan Pelatihan (Rp juta) Budget of the education and training programs (Rp million)	21.904	21.528	91,84%	23.595

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

Operational Review by Business Segment

Tinjauan operasi per segmen usaha Bank BPD Bali akan disajikan berdasarkan produk dan layanan perbankan Bank yaitu segmen pinjaman yang diberikan, simpanan nasabah atau dana pihak ketiga (DPK) dan jasa lainnya yaitu *treasury*. Selain itu, di bagian akhir cari bagian ini, akan disajikan informasi terkait perkembangan perbankan digital Bank BPD Bali pada tahun 2024.

The operational review per business segment of Bank BPD Bali will be presented based on the Bank's banking products and services: loans segment, customer deposits or third-party funds (DPK) and other services, namely treasury. Additionally, at the end of this section, information on Bank BPD Bali's digital banking development in 2024 is presented.

Segmen Kredit

Loan Segment

1. Segmen Kredit Produktif

Deskripsi Kredit Produktif

Kredit Produktif Bank BPD Bali merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha, baik perorangan maupun badan usaha/perusahaan, yang digunakan untuk tujuan pembiayaan usaha, baik untuk modal kerja usaha atau untuk pembelian barang modal/investasi.

Pengembangan Produk tahun 2024

Fokus pengembangan produk kredit produktif Bank BPD Bali untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- KPSP (Kredit Prioritas Sektor Pertanian) adalah kredit modal kerja/kredit investasi yang diberikan pada pelaku usaha sektor pertanian yang mencakup dari proses bisnis praproduksi hingga pasca produksi.
- Kusuma Sari (Kredit Usaha Sejahtera, Unggul dan Maju untuk masyarakat Bali) adalah kredit yang diberikan kepada Debitur yang sedang/pernah memperoleh fasilitas kredit produktif pada Bank BPD Bali yang diberikan suku bunga khusus dengan plafon kredit menyesuaikan dengan prospek usaha debitur, kinerja debitur dan kemampuan membayar (*repayment capacity*) debitur dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Inisiatif Strategi Tahun 2024

Merespon perkembangan yang terjadi di industri perbankan khususnya di wilayah provinsi Bali dan sekitarnya, Bank BPD Bali menjalankan beberapa inisiatif strategi sebagai berikut:

- Memaksimalkan *brand awareness* Bank dengan melakukan promosi melalui pelaksanaan sosialisasi, promosi media cetak dan media promosi lainnya.
- Melakukan pendekatan secara masif pada klaster-klaster terkait sektor produksi khususnya pertanian, peternakan, perikanan dan jasa-jasa.
- Digitalisasi proses bisnis penyaluran untuk penyaluran yang lebih efektif dan efisien, serta mendukung transformasi digital UMKM.

1. Productive Loan Segment

Productive Loans Description

Bank BPD Bali Productive Credit is credit granted to entrepreneurs, both individuals and business entities/companies, for business financing purposes, either for business working capital or for the purchase of capital goods/investments.

Product Development in 2024

Bank BPD Bali's productive credit product development focus for 2024 is as follows

- *KPSP (Kredit Prioritas Sektor Pertanian) is a working capital/ investment credit given to business actors in the agricultural sector, covering pre-production to post-production business processes.*
- *Kusuma Sari (Kredit Usaha Sejahtera, Unggul dan Maju untuk masyarakat Bali) is a credit given to debtors who are/have received productive credit facilities from Bank BPD Bali, with special interest rates and credit ceilings adjusted to the debtor's business prospects, debtor's performance, and debtor's repayment capacity, while maintaining the principle of prudence.*

2024 Strategic initiatives

In response to the developments in the banking industry, especially in the province of Bali and surrounding areas, Bank BPD Bali is implementing several strategic initiatives as follows

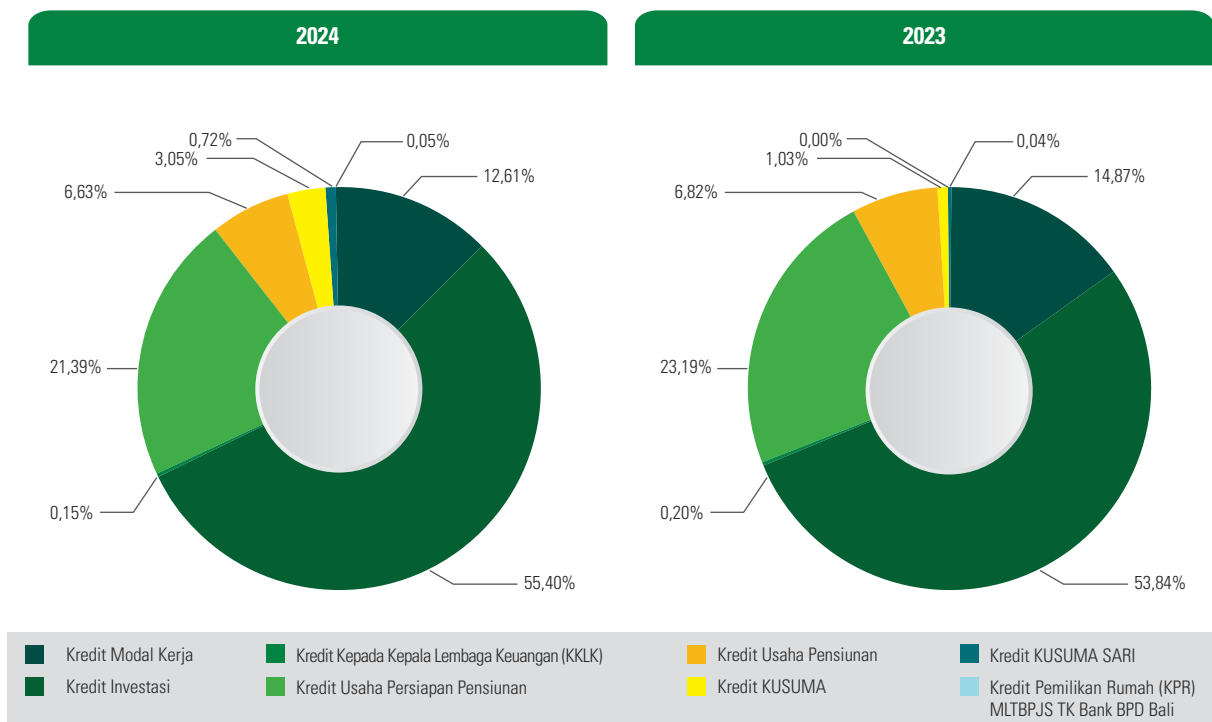
- *Maximize the bank's brand awareness by conducting promotions through socialization, print media promotions and other promotional media.*
- *Conducting a massive approach to clusters related to the production sector, especially agriculture, livestock, fisheries and services.*
- *Digitize the distribution business process for more effective and efficient distribution and support the digital transformation of MSMEs.*



Produktivitas Kredit Produktif Tahun 2024

Productive Loan Productivity in 2024

Jenis	2024	2023	Perubahan	
			Nominal	%
Kredit Modal Kerja	2.403.335	2.487.514	(84.179)	(3,38%)
Kredit Investasi	10.555.287	9.005.790	1.549.498	17,21%
Kredit Kepada Kepala Lembaga Keuangan (KKLK)	27.792	34.148	(6.356)	(18,61%)
Kredit Usaha Persiapan Pensiunan	4.075.761	3.879.063	196.698	5,07%
Kredit Usaha Pensiunan	1.263.706	1.140.857	122.848	10,77%
Kredit KUSUMA	580.525	172.268	408.257	236,99%
Kredit KUSUMA SARI	136.953	-	136.953	
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) MLT BPJS TK Bank BPD Bali	9.015	6.308	2.707	42,92%
Jumlah	19.052.375	16.725.948	2.326.427	13,91%



2. Segmen Kredit Program

Deskripsi Kredit Program

Kredit Program adalah kredit/pembiayaan usaha produktif yang disalurkan oleh Bank BPD Bali yang memperoleh fasilitas subsidi dari pemerintah dan/atau kredit/pembiayaan atas penugasan pemerintah.

2. Program Loan Segment

Description of Program Loan

Program Loan is a productive business loan/financing disbursed by Bank BPD Bali which obtains subsidy facilities from the government and/or loan/financing on government assignments.

Pengembangan Produk tahun 2024

Pengembangan produk yang dilakukan oleh Bank BPD Bali adalah sebagai berikut:

- KUA (Kredit Usaha Alsintan) adalah Kredit investasi yang dikhususkan untuk pembelian Alat dan Mesin Pertanian yang diusahakan sebagai taksi Alat dan Mesin Pertanian yang diberikan oleh Bank kepada Debitur yang memperoleh subsidi bunga dari Pemerintah.
- Kredit Sidi Kumbara (Kredit Usaha Mikro Badung Sejahtera) adalah Program inovasi subsidi kredit usaha mikro Badung sejahtera yang diperuntukan bagi usaha mikro Kabupaten Badung dengan bunga 0%, tanpa biaya provisi & administrasi dan tanpa agunan tambahan.

Inisiatif Strategi Tahun 2024

Merespon perkembangan yang terjadi di industry perbankan khususnya di wilayah provinsi Bali dan sekitarnya, Bank BPD Bali menjalankan beberapa inisiatif strategi sebagai berikut:

- Memaksimalkan brand awareness Bank dengan melakukan promosi melalui pelaksanaan sosialisasi, promosi media cetak dan media promosi lainnya.
- Melakukan pendekatan secara masif pada klaster-klaster terkait sektor produksi khususnya pertanian, peternakan, perikanan dan jasa-jasa.
- Digitalisasi proses bisnis penyaluran untuk penyaluran yang lebih efektif dan efisien, serta mendukung transformasi digital UMKM.

Produktivitas Kredit Program Tahun 2024

Bank BPD Bali berhasil menyalurkan Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (KUA) senilai Rp4,67 miliar pada tahun 2024.

3. Segmen Kredit Konsumtif**Deskripsi Kredit Konsumtif**

Kredit konsumtif Bank BPD Bali diberikan kepada perorangan dan digunakan untuk tujuan konsumsi.

Pengembangan Produk tahun 2024

Bank BPD Bali melakukan pengembangan produk baru maupun *review* produk *existing* dengan penambahan fitur-fitur baru yang lebih *adaptable* dengan kebutuhan pangsa pasar Bank BPD Bali, utamanya *captive market low risk* Bank BPD Bali. Adapun produk-produk tersebut antara lain:

- KMG Emas adalah Kredit Multiguna dengan tujuan pembelian lainnya (pembelian emas batangan).
- KMG Perumahan adalah Kredit Multiguna dengan tujuan pembelian rumah baru/bekas, renovasi, membangun, *refinancing*, *take over* dari Bank Lain) kepada CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil), Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pensiunan yang gaji disalurkan atau tidak disalurkan pada Bank BPD Bali.

Product Development in 2024

Product development carried out by Bank BPD Bali is as follows:

- KUA (Alsintan Business Loan) is an investment loan specifically for the purchase of agricultural equipment and machinery, which is used as a taxi for agricultural equipment and machinery provided by the bank to debtors who receive interest subsidies from the government.
- Sidi Kumbara Loan (Badung Sejahtera Micro Business Loan) is an innovation program for Badung Sejahtera Micro Business Loan subsidy which is intended for micro businesses in Badung Regency with 0% interest rate, no provision and administration fees and no additional collateral.

Strategic Initiatives in 2024

In response to developments in the banking industry, especially in the province of Bali and surrounding areas, Bank BPD Bali is implementing several strategic initiatives as follows:

- Maximize the bank's brand awareness by conducting promotions through socialization, print media promotions and other promotional media.
- Conduct a massive approach to clusters related to the production industry, especially agriculture, livestock, fisheries and services.
- Digitize the distribution business process for more effective and efficient distribution and support the digital transformation of MSMEs.

Program Loan Productivity in 2024

Bank BPD Bali successfully distributed agricultural equipment and machinery business loan (KUA) worth Rp4.67 billion in 2024.

3. Consumptive Loan Segment**Description of Consumer Loans**

Bank BPD Bali consumer loan disbursement to individuals for consumption purposes.

Product Development in 2024

Bank BPD Bali is developing new products and revising existing products by adding new features that are more adaptable to the needs of the market share of Bank BPD Bali, especially the less risky captive market of Bank BPD Bali. The products include:

- KMG Emas is a multipurpose loan for the purchase of other things (e.g., gold bars).
- KMG Perumahan is a multipurpose loan for CPNS (Civil Servant Candidates), Civil Servants (PNS), Government Employees with Work Agreements (PPPK) and Pensioners whose salaries are distributed or not distributed to Bank BPD Bali for the purpose of purchasing new/used houses, renovation, construction, refinancing, taking over from other banks.



- KMG KBLBB adalah Fasilitas kredit yang diberikan untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.
- KMG KKB Konvensional adalah Fasilitas kredit yang diberikan untuk Pembelian Kendaraan konvensional.

Inisiatif Strategi Tahun 2024

Merespon perkembangan yang terjadi di industri perbankan khususnya di wilayah provinsi Bali dan sekitarnya, Bank BPD Bali menjalankan beberapa inisiatif strategi sebagai berikut:

- Melakukan evaluasi berkala atas suku bunga kredit dan tarif layanan kredit untuk menjaga daya saing produk sekaligus mempertahankan debitur-debitur lama Bank yang berkinerja baik.
- Mengoptimalkan promosi produk dengan memanfaatkan momen-momen khusus di daerah, serta promosi melalui berbagai media termasuk media sosial yang *level engagement* nya lebih tinggi.
- Meningkatkan *internal business process* layanan kredit UMKM berbasis aplikasi atau *digital platform*.
- Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM bidang perkreditan agar tetap sesuai dengan standar perbankan secara umum.

Produktivitas Kredit Konsumtif Tahun 2024

Jumlah kredit konsumtif tumbuh signifikan sebesar 54,57% *yoy* menjadi Rp695,72 miliar. Peningkatan ini terutama berasal dari kredit kepada anggota DPR/DPRD sebesar 392,04% *yoy* menjadi Rp327,70 miliar pada tahun 2024. Kredit ini memiliki kontribusi terbesar mencapai 47,10% diikuti dengan Kredit Aneka Guna sebesar 42,31%.

- KMG KBLBB is a loan facility provided for the purchase of battery-powered electric motor vehicles.
- KMG KKB Conventional is a credit facility provided for the purchase of conventional vehicles.

Strategic Initiatives in 2024

In response to the developments in the banking industry, especially in the province of Bali and surrounding areas, Bank BPD Bali is implementing several strategic initiatives as follows:

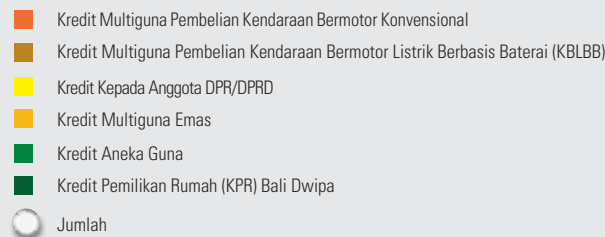
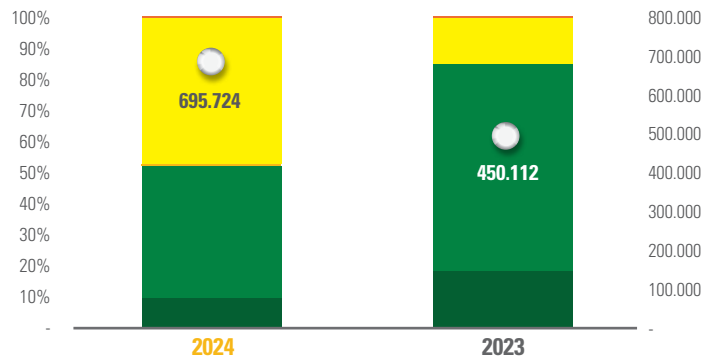
- Conducting periodic evaluations of credit interest rates and credit service rates in order to maintain the competitiveness of the product while retaining the old debtors of the bank who are performing well.
- Optimizing product promotion by taking advantage of special moments in the region and promotions through various media, including social media with a higher level of engagement.
- Improving the internal business process of MSME lending services based on applications or digital platforms.
- Enhancing the quality and competence of the human resources in the credit sector, so that they continue to be in line with the general banking standards.

Consumptive Loan Productivity in 2024

The amount of productive loans increased significantly by 54.57% *yoy* to Rp695.72 billion. This increase mainly came from loans granted to members of DPR/DPRD, which increased by 392.04% *yoy* to Rp327.70 billion in 2024. This credit had the largest contribution of 47.10 percent followed by Multipurpose Loan of 42.31%.

(Disajikan dalam jutaan Rupiah)/(Expressed in millions of Rupiah)

	2024	2023	Perubahan Change		
			Nominal	%	
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bali Dwipa	66.449	80.839	(14.390)	(17,80%)	Bali Dwipa Home Ownership Loan (KPR)
Kredit Aneka Guna	294.361	298.940	(4.579)	(1,53%)	Multipurpose Loan
Kredit Multiguna Emas	4.010	1.781	2.228	125,09%	Gold Multipurpose Loan
Kredit kepada Anggota DPR/DPRD	327.699	66.600	261.099	392,04%	Loan for DPR/DPRD members
Kredit Multiguna Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)	241	104	137	132,77%	Multipurpose Loan for the Purchase of Battery Electric Vehicles (KBLBB)
Kredit Multiguna Pembelian Kendaraan Bermotor Konvensional	2.964	1.848	1.116	60,38%	Multipurpose Credit for Purchase of Conventional Motor Vehicles
Jumlah	695.724	450.112	245.612	54,57%	Total



Segmen Dana Pihak Ketiga (Simpanan Nasabah)

Third Party Fund Segment (Customer Deposits)

1. Segmen Giro

Deskripsi Giro

Giro merupakan produk simpanan yang dimiliki Bank BPD Bali yang biasanya digunakan oleh Nasabah yang memiliki frekuensi transaksi yang tinggi, yang penarikannya dapat mempergunakan Cek/Bilyet Giro serta *E-Banking*. Nasabah juga memperoleh bunga yang kompetitif serta dapat melakukan transaksi keuangan sewaktu-waktu sesuai mekanisme dan kebutuhan nasabah.

Pengembangan Produk tahun 2024

Bank BPD Bali melakukan pengembangan produk terhadap beberapa produk giro seperti Giro VA terkait PMK 183, Giro untuk Dana BOS/BOSP serta Penggunaan Giro Untuk Siskeudes *Link* (pengelolaan dana desa), dan integrasi Giro Kas Umum Daerah dengan SIPD RI.

Inisiatif Strategi Tahun 2024

Bank BPD Bali menghadapi tantangan giro di tahun 2024 yakni pengelolaan Giro Pemerintah dimana pada tahun tersebut terjadi anomali penurunan dan kenaikan pengelolaan Giro Pemerintah.

Merespon kondisi tersebut Inisiatif strategis yang dilakukan oleh Bank BPD Bali adalah mencari sumber DPK giro dengan memanfaatkan ekosistem digital antara lain melalui pengelolaan keuangan desa dengan siskeudes *Link*, Integrasi dengan Marketplace pada SIPLah,

1. Current Account Segment

Description of Current Account

Giro is a savings product owned by Bank BPD Bali, which is usually used by customers who have a high frequency of transactions and whose withdrawals can be made using cheques/bank drafts and e-banking. Customers receive competitive interest and can make financial transactions anytime according to mechanism and customer needs.

Product Development in 2024

*Bank BPD Bali has developed products for several current account products such as current account VA related to PMK 183, current account for BOS/BOSP funds and use of current account for Siskeudes *Link* (village fund management) and integration of current account General Regional Cash with SIPD RI.*

Strategic Initiatives in 2024

Bank BPD Bali faced Current Account challenges in 2024, namely the management of Government Current Account. In this year, there was an anomaly of decrease and increase in the management of Government Current Account.

*In response to these conditions, the strategic initiative undertaken by Bank BPD Bali is to seek sources of Current Account by utilizing digital ecosystems, including through Village Financial Management with Siskeudes *Link*, integration with Marketplace on SIPLah,*



integrasi penerimaan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) dimana rekening giro Bank BPD Bali menjadi rekening penampungannya, maupun upaya integrasi lainnya yang dapat mendukung peningkatan DPK terutama CASA.

Produktivitas Giro Tahun 2024

Secara kumulatif, Bank BPD Bali mampu membukukan kenaikan giro sebesar 10,27% yoy menjadi Rp4,96 triliun pada tahun 2024 dari Rp4,50 triliun pada tahun sebelumnya.

integration of BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) contribution payment receipts where the current account of Bank BPD Bali becomes the holding account, as well as other integration efforts that can support the increase in DPK, especially CASA.

Current Account Productivity in 2024

On a cumulative basis, Bank BPD Bali was able to record an increase of 10.27% yoy in the current account to Rp4.96 trillion in 2024 from Rp4.50 trillion in the previous year.

2. Segmen Tabungan

Deskripsi Tabungan

Tabungan Bank BPD Bali merupakan simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan syarat tertentu.

Pengembangan Produk tahun 2024

Bank BPD Bali melakukan pengembangan produk tabungan yang terdiri dari Tabungan Sibapa (baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing), Tabungan Simpeda (baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing), THT Bali Dwipa, TabunganKu dan Simpanan Pelajar (Simpel).

Inisiatif Strategi Tahun 2024

Segmen Mahasiswa dan Pemuda menjadi salah satu tantangan bagi Bank BPD Bali, untuk menjadi salah satu segmen potensial yang dapat diraih oleh Bank BPD Bali. Terkait dengan hal tersebut, Bank melakukan peningkatan kerja sama dengan Lembaga Pendidikan baik sekolah maupun perguruan tinggi.

Produktivitas Tabungan Tahun 2024

Secara kumulatif, Bank BPD Bali mampu membukukan kenaikan tabungan sebesar 15,10% yoy menjadi Rp17,81 triliun pada tahun 2024 dari Rp15,48 triliun pada tahun sebelumnya.

2. Savings Segment

Savings Description

Bank BPD Bali Savings is a savings in the bank, which can be withdrawn at any time only under certain conditions.

Product Development in 2024

Bank BPD Bali develops savings products consisting of Sibapa Savings (both Rupiah and FX), Simpeda Savings (both Rupiah and FX), THT Bali Dwipa, TabunganKu and Student Savings (Simpel).

Strategic Initiatives in 2024

The student and youth segments are one of the challenges for Bank BPD Bali to become one of its potential segments that can be achieved by Bank BPD Bali. In this regard, the bank is increasing its cooperation with educational institutions, both schools and universities.

Savings Productivity in 2024

On a cumulative basis, Bank BPD Bali was able to record an increase in savings of 15.10% yoy to Rp17.81 trillion in 2024 from Rp15.48 trillion in the previous year.

3. Segmen Deposito

Deskripsi Deposito

Deposito Bank BPD Bali merupakan simpanan untuk nasabah perorangan, non perorangan yang sah menurut perundang-undangan, dan Korporasi yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu atau berakhir sesuai dengan perjanjian dan syarat-syarat tertentu dan dapat dijadikan agunan kredit.

Pengembangan Produk tahun 2024

Bank BPD Bali melakukan pengembangan produk deposito pada tahun 2024. Deposito dalam mata uang rupiah dan mata uang asing dengan pilihan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 24 bulan dengan pembayaran bunga diafiliasikan ke rekening simpanan lainnya, Deposito Kapitalisasi dalam mata uang rupiah dengan pembayaran bunga dapat langsung masuk ke pokok deposito

3. Deposit Segment

Deposit Description

Bank BPD Bali Deposits are savings for individual customers, non-individual legal entities and corporations, whose withdrawals can only be made at certain times or end in accordance with certain agreements and conditions, and can be used as collateral for loans.

Product Development in 2024

Bank BPD Bali developed deposit products in 2024. Deposits in Rupiah and Foreign Currency with a choice of maturities of 1 month, 3 months, 6 months, 12 months and 24 months with interest payments linked to other savings accounts, Capitalization Deposits in Rupiah with interest payments that can be credited directly to the principal of the deposit, and On Call Deposits in Rupiah with

dan *Deposito On Call* dalam mata uang rupiah dengan pilihan jangka waktu *overnight* dan maksimal 30 hari, serta menambahkan fitur produk *Deposito* dengan mekanisme *Diskonto* untuk dapat mengakomodir permintaan *Deposito* sebagai bagian pengelolaan retensi kepada nasabah.

Inisiatif Strategi Tahun 2024

Persaingan Suku Bunga dari *competitor* yang menawarkan bunga sangat tinggi, serta menawarkan berbagai program menarik untuk menarik *deposito* pindah dari Bank BPD Bali terutama nasabah dari segmen *LPD*. Merespon kondisi tersebut, Bank menawarkan bunga yang kompetitif serta mempersiapkan program yang dapat bersaing serta mempersiapkan layanan serta *value added* yang dapat diberikan kepada nasabah sehingga nasabah tidak hanya melihat besarnya suku bunga.

Produktivitas Deposito Tahun 2024

Secara kumulatif, Bank BPD Bali mampu membukukan kenaikan *deposito* berjangka sebesar 17,82% *yoy* menjadi Rp9,39 triliun pada tahun 2024 dari Rp7,97 triliun pada tahun sebelumnya.

a choice of overnight maturities and a maximum of 30 days, as well as the addition of a deposit product feature with a discount mechanism to accommodate depositor requests as part of customer loyalty management.

Strategic Initiatives in 2024

Interest rate competition from competitors offering very high interest rates, as well as offering various attractive programs to attract depositors to switch from Bank BPD Bali, especially customers from the LPD segment. In response to this condition, the Bank offers competitive interest rates and prepares competitive programs and prepares services and added value that can be provided to customers so that customers do not only see the high interest rates.

Deposit Productivity in 2024

*On a cumulative basis, Bank BPD Bali was able to record an increase in time deposits of 17.82% *yoy* to Rp9.39 trillion in 2024 from Rp7.97 trillion in the previous year.*

Segmen Jasa Lainnya

Other Service Segments

Treasury

Treasury Bank BPD Bali memiliki fungsi dan peran sebagai unit kerja bisnis (*profit centre unit*) dan unit kerja pendukung (*supporting unit*). Unit Kerja Bisnis (*profit centre unit*) merupakan aktivitas dan transaksi *treasury* di pasar keuangan meliputi: aktivitas dan transaksi di pasar uang antar bank (*money market*); aktivitas dan transaksi di pasar valuta asing (*foreign exchange market*); aktivitas dan transaksi di pasar modal dan surat berharga (*capital market*); dan aktivitas dan transaksi di pasar derivatif.

Sementara itu, unit kerja pendukung (*supporting unit*) *treasury* terdiri dari:

1. Aktivitas dan transaksi terkait perdagangan internasional, berupa kegiatan pada jasa dan layanan untuk perdagangan internasional dan jasa layanan valuta asing lainnya, meliputi:
 - a. Memproses dokumen terkait perdagangan internasional;
 - b. Transfer valuta asing; dan
 - c. Pembukaan jaringan dan korespondensi di bank nasional dan internasional.
2. Mengelola dan memenuhi keuangan dana untuk pemenuhan likuiditas dan GWM, baik ruoiah dan valas, PLM, RIM dan kewajiban regulator lainnya;
3. Mengelola likuiditas Bank dalam mata uang rupiah dan valuta asing secara harian;
4. Mengelola posisi nilai tukar dan pemenuhan ketentuan Bank Indonesia;

Treasury Department

Treasury Bank BPD Bali has functions and roles as a Profit Center Unit, and a Support Unit. The business work unit (*profit centre unit*) is a treasury activity and transaction in the financial market, which includes: activities and transactions in the interbank money market (*money market*); activities and transactions in the foreign exchange market (*foreign exchange market*); activities and transactions in the capital market and securities (*capital market*); and activities and transactions in the derivatives market.

Meanwhile, the Treasury Support Department consists of

1. Activities and transactions related to international trade in the form of activities in the service sector and services for international trade and other foreign exchange services, including the following:
 - a. Processing of documents related to international trade;
 - b. Transfer of foreign exchange; and
 - c. Opening of networks and correspondence with national and international banks.
2. Management and fulfillment of financial funds to meet liquidity and GWM, both in rupiah and foreign exchange, PLM, RIM and other regulatory obligations;
3. Managing the bank's liquidity in rupiah and foreign currencies on a daily basis;
4. Managing the foreign exchange position and compliance with Bank Indonesia regulations;

5. Membantu unit bisnis, yaitu Divisi dan Cabang atas transaksi perdagangan internasional sebagai *Bill Processing Centre* seperti menerima, memeriksa/otentifikasi *Letter of Credit* yang diterima dari bank koresponden/pekerjaan sejenis lainnya dalam kaitan dengan ekspor/impor;
6. Meningkatkan Hubungan Institusi pada industri perbankan nasional dan internasional dalam rangka meningkatkan jaringan kerja (*networking*) untuk mendukung bisnis Bank;
7. Membantu unit bisnis dalam memberikan *quotation*/harga produk jasa valuta asing; dan
8. Apex BPR, yaitu:
 - a. *Pooling of Funds* merupakan total dana yang dihimpun terdiri dari Simpanan Wajib Minimum (SWM) dan Dana *Sharing Apex*;
 - b. *Financial Assistance* merupakan fasilitas bantuan keuangan yang diberikan Bank kepada anggota Apex BPR;
 - c. *Technical Assistance* merupakan dukungan teknis yang diberikan Bank kepada anggota Apex;
 - d. Mendorong pemberdayaan UMKM dan peningkatan kontribusi pembiayaan perbankan kepada UMKM.

Produk-produk *treasury* Bank BPD Bali terdiri dari

1. Bali Dwipa *Remittance* yaitu layanan transfer dalam valuta asing untuk transaksi domestik dan internasional, berupa transaksi penerimaan dana (*incoming transfer*) maupun pengiriman dana (*outgoing transfer*);
2. Perdagangan valuta asing yaitu layanan jual beli uang kertas valuta asing (*banknotes*);
3. *Western Union* yaitu layanan penerimaan dan pengiriman uang melalui sistem *Western Union*;
4. Pembiayaan dan transaksi perdagangan internasional (*Internasional Trade Service & Financing*);
5. Apex BPR, yaitu:
 - a. Fasilitas Dana *Mismatch* diberikan Bank kepada Anggota Apex BPR yang mengalami kesulitan likuiditas yang bersifat non sistemik;
 - b. Fasilitas Dana Bergulir diberikan kepada Anggota Apex BPR secara bergantian dan/atau atas pengajuan dari anggota Apex BPR;
 - c. Linkage Program adalah Bank memberikan fasilitas Kredit kepada anggota Apex BPR yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan perkreditan.

Pengelolaan *Treasury*

Pengelola transaksi tresuri terdiri dari *Front Office*, yaitu pada Divisi *Treasury*; *Middle Office*, yaitu Divisi Manajemen Risiko; dan *Back Office*, yaitu Divisi Operasional Keuangan & Akuntansi. Adapun struktur organisasi *Treasury* adalah sebagai berikut:

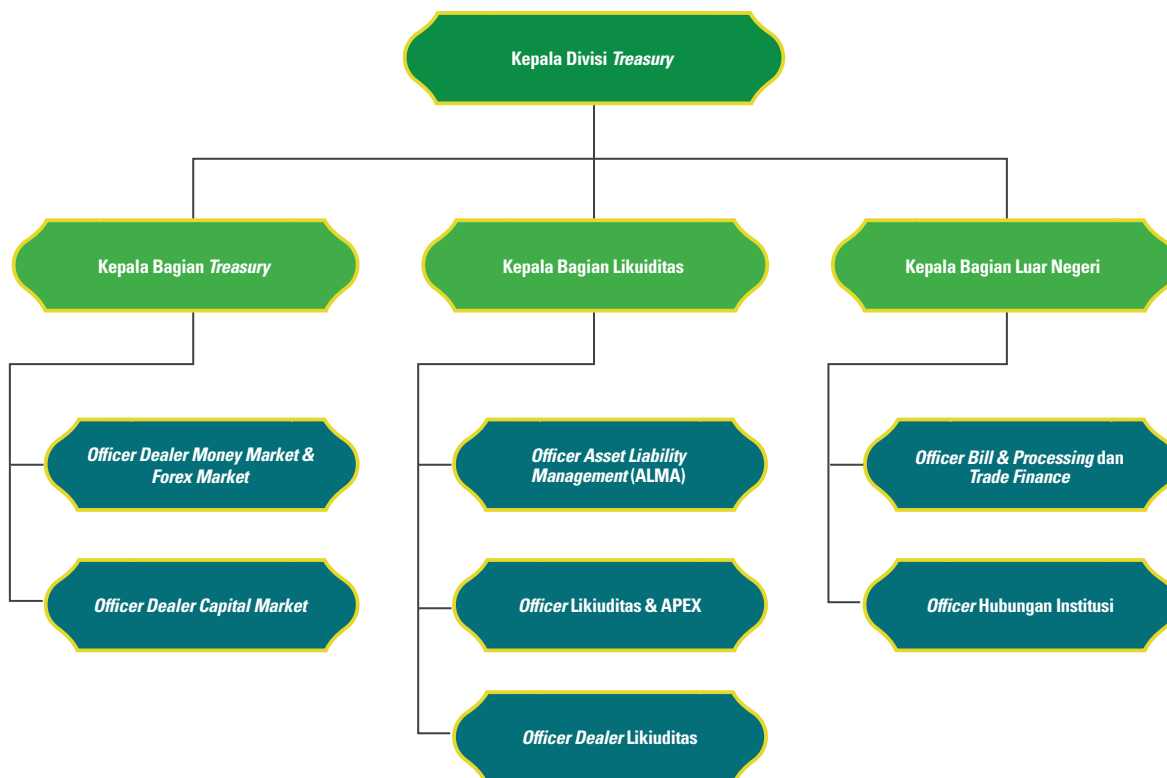
5. *Assisting business units, namely divisions and branches, in international trade transactions as bill processing centres such as receiving, verifying / authenticating letters of credit received from correspondent banks / other similar work related to export/import;*
6. *Enhancing institutional relations in the domestic and international banking industry to improve networking to support the Bank's business;*
7. *Assisting business units in providing quotations/prices for foreign exchange service products; and*
8. *Apex BPR, namely*
 - a. *Pooling of Funds is the total amount of funds collected consisting of the Minimum Mandatory Savings (SWM) and the Apex Sharing Funds;*
 - b. *Financial Assistance is the Bank's financial assistance to Apex BPR members;*
 - c. *Technical Assistance means technical assistance provided by the Bank to Apex Members;*
 - d. *Promoting the empowerment of MSMEs and increasing the contribution of bank financing to MSMEs.*

The treasury products of Bank BPD Bali consist of

1. *Bali Dwipa Remittance, a foreign currency remittance service for domestic and international transactions in the form of incoming and outgoing remittances;*
2. *Foreign Exchange Trading, a service for buying and selling foreign currency banknotes;*
3. *Western Union, a money sending and receiving service through the Western Union system;*
4. *International Trade Service & Financing;*
5. *Apex BPR, namely:*
 - a. *Mismatch Fund Facility provided by the Bank to Apex BPR members experiencing non-systemic liquidity difficulties;*
 - b. *Revolving Fund Facility provided to Apex BPR Members in turn and/or upon request by Apex BPR Members;*
 - c. *The Linkage Program is the Bank's provision of credit facilities to Apex BPR members, and its implementation relates to credit provision.*

Treasury Management

The Treasury transaction managers consist of the front office, namely the Treasury Division, the middle office, namely the Risk Management Division, and the back office, namely the Financial Operations & Accounting Division. The organizational structure of the Treasury Department is as follows:



Aset Kelolaan dan Produktivitas Treasury

Portofolio Aset Keuangan masih pada posisi *Amortized Cost*. Secara kumulatif, total aset *treasury* mencapai Rp12,90 triliun dengan pertumbuhan sebesar 18,92% yoy.

Assets under Management and Productivity of the Treasury

The financial assets portfolio continues to be carried at *amortized cost*. Cumulatively, total *treasury* assets reached Rp12.90 trillion. This represents a growth of 18.92% yoy.

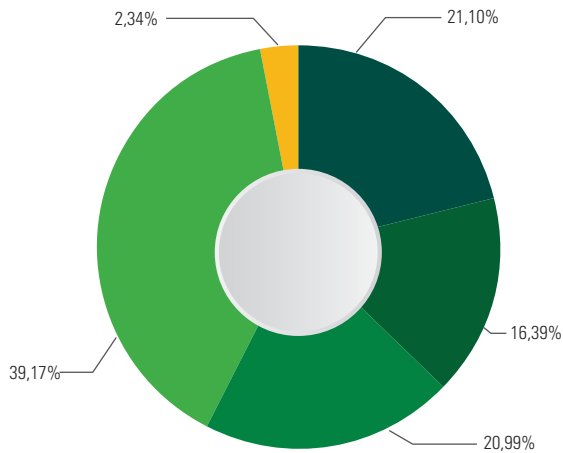
(Disajikan dalam jutaan Rupiah)/(Expressed in millions of Rupiah)

Jenis Type	2024	2023	Perubahan Change	
			Nominal	%
Total aset tresuri	12.904.989.797,50	10.850.699.285.150,70	2.054.290.512.054,83	18,93

Sementara itu, produktivitas *treasury* mengalami pertumbuhan sebesar 17,45% yoy menjadi Rp15,61 triliun pada tahun 2024. Secara umum, portofolio produk Bank BPD Bali terdiversifikasi dengan baik. Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), yang merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah, memiliki kontribusi terbesar 39,17% pada tahun 2024 diikuti dengan penempatan pada BI dan Surat Utang Negara dengan kontribusi masing-masing sebesar 21,10% dan 20,99%.

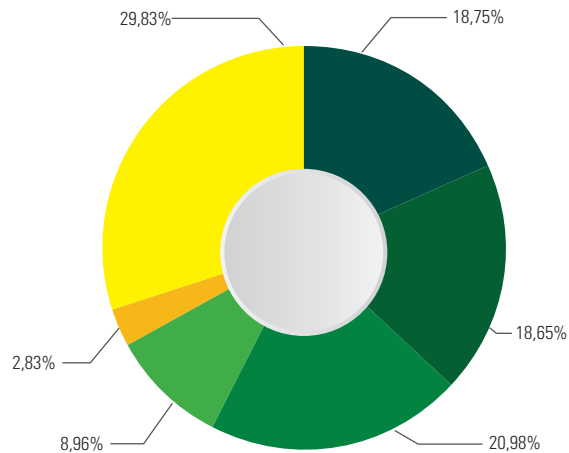
Meanwhile, *treasury* productivity is expected to grow by 17.45% yoy to reach Rp15.61 trillion in 2024. In general, the product portfolio of Bank BPD Bali is well diversified. Bank Indonesia Rupiah Securities (SRBI), which are securities issued by Bank Indonesia (BI) to strengthen the stability of the rupiah exchange rate, had the largest contribution of 39.17% in 2024. This was followed by placements in BI and government bonds with contributions of 21.10% and 20.99%, respectively.

2024



■ Penempatan pada Bank Indonesia
 ■ Penempatan pada Bank Lain
 ■ Surat Utang Negara

2023



■ SRBI
 ■ Obligasi Korporasi
 ■ Reverse Repo

Fokus Pengembangan Tahun 2024

Pada tahun 2024 *treasury* Bank BPD Bali memfokuskan pengembangan usaha pada transaksi di pasar uang antar bank (*money market*), pasar valuta asing (*foreign exchange market*), pasar modal (*capital market*) dan pasar derivatif sesuai ketentuan yang berlaku didukung dengan sistem treasuri yang memadai.

Tantangan dan Solusi

Treasury Bank BPD Bali menghadapi beberapa tantangan pada tahun 2024 berupa kompetensi/pengetahuan serta kepercayaan diri petugas di unit kerja untuk memasarkan produk devisa; minimnya informasi tempat pengelola/pengguna valuta asing; dan persaingan tingkat suku bunga penempatan.

Merespon tantangan tersebut, inisiatif strategis yang dilakukan Bank BPD Bali untuk menghadapi tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pendidikan dan pelatihan produk Devisa kepada seluruh petugas yang melayani produk devisa;
2. Melakukan kolaborasi strategi untuk sosialisasi bersama layanan dan produk devisa serta treasuri antara Divisi *Treasury* dan Unit Kerja;
3. Melakukan kerjasama dengan Instansi pemerintah seperti Dinas ketenagakerjaan dan MSDM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam hal menyiapkan data-data perusahaan yang bergerak dalam

Development Focus in 2024

In 2024, the *Treasury* Department of Bank BPD Bali focused on developing business in the interbank money market, foreign exchange market, capital market and derivatives market according to the applicable regulations, supported by an adequate treasury system.

Challenges and Solutions

Bank BPD Bali *treasury* faced several challenges in 2024 in terms of competence/knowledge and confidence of work unit officers to market foreign exchange products, lack of information on where foreign exchange managers/users are located.

Responding to these challenges, the strategic initiatives undertaken by Bank BPD Bali to face these challenges are as follows:

1. Providing education and training on foreign exchange products to all officers serving foreign exchange products;
2. Collaborating on strategies for joint socialization of foreign exchange and treasury services and products between the *Treasury* Division and Work Units;
3. Cooperating with government agencies such as the Manpower and HRD Office, the Trade and Industry Office in terms of preparing

- eksport-impor, Perguruan Tinggi/sekolah yang lulusannya akan bekerja keluar negeri, menyiapkan data perusahaan yang memperkerjakan tenaga migran ke luar negeri, dan melakukan kerjasama dengan balai latihan kerja atau lembaga pelatihan kerja;
4. Komunikasi secara aktif dengan anggota Apex BPR dan menyelenggarakan *Technical Assistance* untuk Anggota APEX BPR.

- data on companies engaged in export-import, universities/schools whose graduates will work abroad, preparing data on companies that employ migrant workers abroad, and cooperating with job training centers or job training institutions;*
4. *Actively communicating with Apex BPR members and holding regular Technical Assistance for APEX BPR Members.*

Perbankan Digital Digital Banking

Perbankan digital Bank BPD Bali berhasil membukukan inovasi digital yang sejalan dengan proses tranformasi digital yang telah direncanakan. Adapun ringkasan kinerja perbankan digital adalah sebagai berikut:

Bank BPD Bali's digital banking has been successful in the implementation of digital innovations that are in line with the bank's digital transformation plan. The summary of the performance of the Digital Banking is shown in the following table:

	2024	2023	Perubahan Change		
			Nominal	%	
Jumlah Pengguna Bank BPD Bali Mobile	287.065	233.311	53.754	23,04%	<i>Number of Bank BPD Bali Mobile users</i>
Nilai Transaksi (RpJuta)	2.225.896	1.581.602	644.294	40,74%	<i>Transaction Value (RpMillion)</i>
Jumlah Transaksi	1.671.810	1.291.409	380.401	29,46%	<i>Number of Transactions</i>





TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT GEOGRAFIS

Operational Review by Geographic Segment

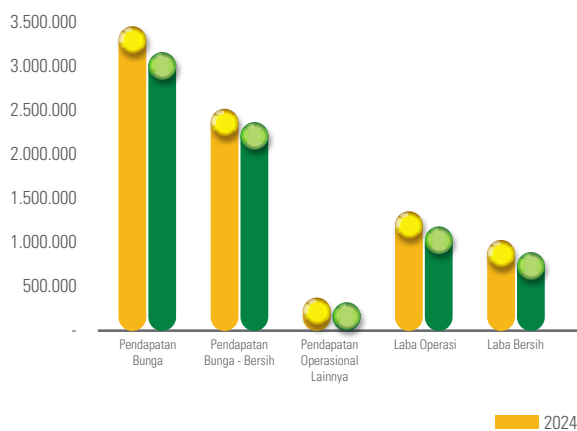
Berdasarkan catatan No. 38 dari laporan keuangan auditan tahun 2024, Bank BPD Bali membagi cakupan geografis menjadi 2 (dua) wilayah yakni Bali dan Mataram, Profitabilitas beserta nilai aset dan liabilitas berdasarkan segmen geografis secara ringkas dijelaskan pada tabel berikut ini:

Based on the note No. 38 of the audited financial report 2024, Bank BPD Bali divides its geographical coverage into 2 (two) regions, namely Bali and Mataram. The profitability as well as the values of assets and liabilities based on the geographical segments are briefly explained in the following table:

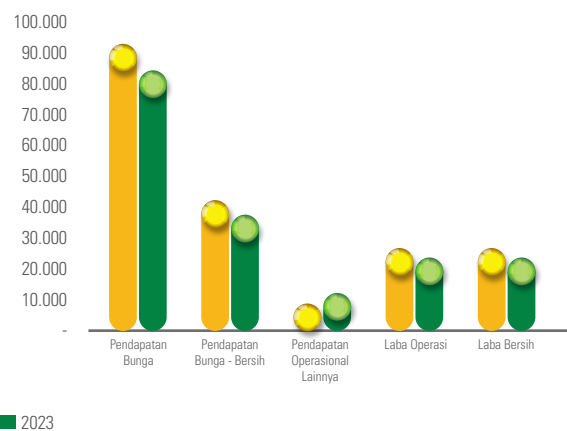
(Disajikan dalam jutaan Rupiah)/(Expressed in millions of Rupiah)

	2024	2023	Perubahan Change		
			Nominal	%	
Bali					
Pendapatan Bunga	3,260,460	3,021,586	238,874	7,91%	Interest Income
Pendapatan Bunga - Bersih	2,341,430	2,209,588	131,842	5,97%	Interest Income - Net
Pendapatan Operasional Lainnya	222,357	174,963	47,394	27,09%	Other Operating Income
Laba Operasional	1,162,519	1,055,547	106,972	10,13%	Operating Income
Laba Bersih	857,198	720,237	136,961	19,02%	Net Profit
Jumlah Aset	37,561,666	33,552,162	4,009,504	11,95%	Total Assets
Jumlah Liabilitas	33,449,364	30,111,445	3,337,919	11,09%	Total Liabilities
Mataram					
Pendapatan Bunga	87,395	79,380	8,015	10,10%	Interest Income
Pendapatan Bunga - Bersih	36,305	32,081	4,224	13,17%	Interest Income - Net
Pendapatan Operasional Lainnya	4,382	6,361	(1,979)	(31,11%)	Other Operating Income
Laba Operasional	21,369	18,091	3,278	18,12%	Operating Income
Laba Bersih	21,267	17,991	3,276	18,21%	Net Profit
Jumlah Aset	751,016	758,550	(7,534)	(0,99%)	Total Assets
Jumlah Liabilitas	203,121	209,099	(5,978)	(2,86%)	Total Liabilities

Bali



Mataram



Provinsi Bali mampu membukukan laba bersih senilai Rp857,20 miliar pada tahun 2024 dengan pertumbuhan sebesar 19,02% yoy, Capaian kinerja yang solid ini terutama didukung oleh pertumbuhan pendapatan bunga sebesar 7,91% yoy menjadi Rp3,26 triliun dan kenaikan pendapatan bunga bersih sebesar 5,97% yoy menjadi Rp2,34 triliun, Perbaikan kinerja profitabilitas tersebut seiring dengan pertumbuhan aset dan liabilitas masing-masing sebesar 11,95% yoy dan 11,09% yoy,

Meski membukukan penurunan jumlah aset dan jumlah liabilitas, Bank BPD Bali juga mampu membukukan laba bersih sebesar Rp21,27 miliar di wilayah Mataram, Capaian ini terutama didukung oleh pertumbuhan bunga dan pertumbuhan pendapatan bunga-bersih masing-masing sebesar 10,10% yoy dan 13,17% yoy menjadi Rp87,40 miliar dan Rp36,31 miliar pada tahun 2024,

Bali Province recorded a net profit of Rp857.20 billion in 2024, representing a growth of 19.02% yoy. This solid performance was mainly supported by interest income growing by 7.91% yoy to Rp3.26 trillion and net interest income growing by 5.97% year over year to Rp2.34 trillion. The improved profitability performance was in line with the growth in assets and liabilities, which grew by 11.95% year over year and 11.09% year over year, respectively.

Despite the decline in assets and liabilities, Bank BPD Bali in the Mataram area also recorded a net profit of Rp21.27 billion. This performance was mainly supported by the growth of interest income and net interest income by 10.10% yoy and 13.17% yoy to Rp87.40 billion and Rp36.31 billion in 2024, respectively.

TINJAUAN KEUANGAN

Financial Review

Pernyataan Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan dan Opini Auditor Independen Statement of Compliance with Financial Accounting Standards and Independent Auditors' Report

Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan

Laporan keuangan Bank telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI),

Laporan keuangan juga disusun dan disajikan sesuai dengan Buku Panduan Akuntansi Perbankan (BPAK) sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/SEOJK.03/2021 tentang Buku Panduan Akuntansi Perbankan bagi Bank Umum Konvensional,

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan PSAK 201 (sebelumnya PSAK 1), Penyajian Laporan Keuangan, Laporan keuangan disusun atas basis akrual dengan menggunakan konsep nilai historis, kecuali jika standar akuntansi mensyaratkan pengukuran nilai wajar, Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan,

Statement of Compliance

The financial statements of the Bank have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (IFAS) which comprise the Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISFAS) issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI).

The Financial statements of the Bank have also been prepared and presented in accordance with the Banking Accounting Guidebook (BPAK) in accordance with the Circular Letter of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 34/SEOJK.03/2021 concerning the Banking Accounting Guidebook for Conventional Commercial Banks.

Basis for Preparation of the Financial Statements

The financial statements have been prepared in accordance with SFAS 201 (previously SFAS 1). Presentation of Financial Statement. The financial statements have been prepared on an accrual basis using the historical cost concept, except where the accounting standards require fair value measurement. The statements of cash flows are prepared using the direct method with cash flows classified into operating, investing and financing activities.



Opini Auditor Independen

Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (Kreston Indonesia) telah mengaudit laporan keuangan PT Bank BPD Bali yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk kebijakan akuntansi material,

Menurut opini KAP, laporan keuangan Bank BPD Bali menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia,

Laporan auditor independen terkait laporan keuangan Bank BPD Bali sebagaimana yang dimuat dalam laporan No/Ref: 00002/2.1127/AU.1/07/0060-4/1/1/2025 telah ditandatangani pada tanggal 10 Januari 2025 oleh auditor Welly Adrianto, CPA dengan Ijin Akuntan Publik No: AP.0060,

Independent Auditor's Opinion

Public Accounting Firm (KAP) Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (Kreston Indonesia) has audited the financial statements of PT Bank BPD Bali, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2024, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policies.

In the opinion of the KAP, the financial statements of Bank BPD Bali present fairly in all material respects, the financial position of the Bank as of December 31, 2024, and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Accounting Standards.

The independent auditor's report on the financial statements of Bank BPD Bali as contained in the report No/Ref: 00002/2.1127/AU.1/07/0060-4/1/1/2025 was signed on January 10, 2025 by the auditor Welly Adrianto, CPA with Public Accountant License No: AP.0060.

Laporan Posisi Keuangan Statement of Financial Position

Bank BPD Bali berhasil membukukan pertumbuhan aset sebesar 11,66% yoy menjadi Rp38,31 triliun pada tahun 2024. Pertumbuhan aset sebesar *double digit* ini terutama didukung oleh kenaikan aset keuangan sebesar 11,66% yoy menjadi Rp37,98 triliun, Meski secara nominal masih terbatas, aset non keuangan tumbuh lebih tinggi sebesar 12,37% yoy menjadi Rp334,02 miliar,

Sejalan dengan pertumbuhan total aset tersebut, total liabilitas Bank mencapai Rp33,65 triliun dengan kenaikan sebesar 10,99% yoy. Kenaikan total liabilitas ini terutama didukung oleh peningkatan liabilitas keuangan sebesar 11,17% yoy menjadi Rp33,32 triliun pada tahun 2024,

Bank BPD Bali managed to grow its assets by 11.66% yoy to Rp38.31 trillion in 2024. This double-digit growth was mainly driven by financial assets, which grew by 11.66% yoy to reach Rp37.98 trillion. Although still limited in nominal terms, non-financial assets grew at a higher rate of 12.37% yoy to Rp334.02 billion.

In line with total asset growth, the Bank's total liabilities increased by 10.99% yoy to Rp33.65 trillion. This increase in total liabilities was primarily supported by an 11.17 % yoy increase in financial liabilities to Rp33.32 trillion in 2024.

(Disajikan dalam jutaan Rupiah)/(Expressed in millions of Rupiah)

	2024	2023	Perubahan Change		
			Nominal	%	
Aset Keuangan	37,978,659	34,013,447	3,965,211	11,66%	Financial Assets
Aset Non Keuangan	334,023	297,265	36,758	12,37%	Non-Financial Assets
Total aset	38,312,682	34,310,712	4,001,969	11,66%	Total Assets
Liabilitas Keuangan	33,317,602	29,970,996	3,346,606	11,17%	Financial Liabilities
Liabilitas Non Keuangan	334,883	349,548	(14,665)	(4,20%)	Non-Financial Liabilities
Total Liabilitas	33,652,485	30,320,544	3,331,941	10,99%	Total Liabilities
Total Ekuitas	4,660,197	3,990,169	670,028	16,79%	Total Equity
Total Liabilitas dan Ekuitas	38,312,682	34,310,712	4,001,969	11,66%	Total Liabilities and Equity

Ekspansi bisnis yang dilakukan oleh Bank BPD Bali juga berdampak positif terhadap ekuitas yang mampu tumbuh sebesar 16,79% yoy menjadi Rp4,66 triliun, Pertumbuhan ekuitas ini terutama didukung oleh peningkatan laba ditahan selaras dengan peningkatan profitabilitas Bank,

Aset Keuangan

Bank BPD Bali berhasil membukukan pertumbuhan jumlah aset keuangan sebesar 11,66% yoy menjadi Rp37,98 triliun pada tahun 2024, Pertumbuhan ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan pinjaman yang diberikan sebesar 8,07% yoy menjadi Rp21,53 triliun, Selain itu, efek-efek tumbuh signifikan sebesar 124,06% yoy menjadi Rp9,76 triliun,

Penjelasan lebih rinci terkait komponen aset keuangan Bank BPD Bali adalah sebagai berikut:

Bank BPD Bali's expanding business has also had a positive impact on total equity, which managed to grow by 16.79% yoy to reach IDR 4.66 trillion. This equity growth was mainly supported by higher retained earnings as the Bank's profitability increased.

Financial Assets

Bank BPD Bali managed to grow financial assets by 11.66% yoy to reach Rp37.98 trillion in 2024. This growth was mainly due to the increase in loan disbursements by 8.07% yoy to IDR 21.53 trillion. Moreover, securities grew significantly by 124.06% yoy to Rp9.76 trillion.

A more detailed explanation of the components of Bank BPD Bali's financial assets is as follows:

(Disajikan dalam jutaan Rupiah)/(Expressed in millions of Rupiah)

	2024	2023	Perubahan Change		
			Nominal	%	
Kas	580,736	569,571	11,165	1,96%	Cash
Giro pada Bank Indonesia	2,694,875	2,393,875	301,000	12,57%	Current Accounts with Bank Indonesia
Giro pada Bank Lain - Bersih	45,087	70,081	(24,994)	(35,66%)	Current Accounts with Other Banks - Net
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	3,143,159	2,526,747	616,411	24,40%	Placements with Bank Indonesia and Other Banks
Efek-Efek	9,760,077	4,356,008	5,404,070	124,06%	Securities
Efek-Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	-	3,965,878	(3,965,878)	(100,00%)	Securities Purchased Under Resale Agreements
Pinjaman yang Diberikan	21,525,087	19,918,054	1,607,034	8,07%	Loans
Aset Lain-Lain	229,637	213,233	16,404	7,69%	Other Assets
Jumlah Aset Keuangan	37,978,659	34,013,447	3,965,211	11,66%	Total Financial Assets

Kas

Bank BPD Bali mencatatkan kenaikan kas sebesar 1,96% yoy menjadi Rp580,74 miliar pada tahun 2024, Kenaikan kas ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan kas dalam mata uang Rupiah sebesar 2,08% yoy menjadi Rp580,38 miliar,

Cash

BPD Bali posted a 1.96 percent year-on-year rise in cash to IDR 580.74 billion in 2024. This increase was mainly driven by a 2.08% yoy increase in Rupiah cash to Rp580.38 billion.

Giro pada Bank Indonesia

Bank BPD Bali membukukan kenaikan *double digit* atas giro pada Bank Indonesia sebesar 12,57% yoy menjadi Rp2,69 triliun pada tahun 2024, Bank dipersyaratkan untuk memiliki Giro Wajib Minimum (GWM) dalam mata uang Rupiah dalam kegiatannya sebagai bank umum serta GWM dalam mata uang asing dalam kegiatannya melakukan transaksi mata uang asing, GWM disimpan dalam bentuk Giro pada Bank Indonesia,

Current Accounts with Bank Indonesia

Bank BPD Bali recorded a double-digit increase in current accounts with Bank Indonesia by 12.57% y/y to IDR 2.69 trillion in 2024. The Bank is required to maintain Minimum Statutory Reserves (GWM) in Rupiah for conventional banking and statutory reserves in foreign currencies for foreign exchange transactions. The statutory reserves are maintained in the form of current accounts with Bank Indonesia.



Pada 31 Desember 2024 dan 2023, Giro Wajib Minimum (GWM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Terkait dengan hal tersebut, berdasarkan surat dari Bank Indonesia No.26/ /DKMP/Srt/B pada Bulan Desember 2024, Bank BPD Bali telah memperoleh insentif atas KLM periode tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 3,80%,

GWM adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank Umum Konvensional (BUK) atau Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUK atau DPK BUS dan UUS, Sementara itu, PLM adalah cadangan likuiditas minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh BUK dalam bentuk surat berharga yang memenuhi persyaratan tertentu, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUK dalam Rupiah,

Penjelasan lebih lanjut terkait rasio GMW disajikan di bagian rasio keuangan dari bab ini,

Giro pada Bank Lain - Bersih

Bank BPD Bali melaporkan giro pada bank lain-bersih mengalami penurunan sebesar 35,66% yoy menjadi Rp45,09 miliar, Penurunan akun ini disebabkan oleh berkurangnya giro pada bank lain dalam mata uang Rupiah sebesar 70,81% yoy menjadi Rp14,55 miliar,

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk giro pada bank lain dalam mata uang Rupiah dan Dollar AS untuk tahun 2024 sebesar 0,00%-2,00% dan 0,00%, Sementara untuk tahun sebelumnya sebesar 0,00%-1,25% dan 0,00%,

Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain – Bersih

Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain - Bersih dilaporkan mengalami kenaikan signifikan sebesar 24,40% yoy menjadi Rp3,14 triliun pada tahun 2024, Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan signifikan fasilitas penyimpanan Bank Indonesia dari Rp100,00 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp600,00 miliar pada tahun 2024, Selain itu, Bank BPD Bali juga mencatatkan *deposito oncall* sebesar Rp400,00 miliar pada tahun 2024 yang tidak dibukukan pada tahun sebelumnya,

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain adalah sebesar 0,00%-6,57% untuk tahun 2024 dan sebesar 0,00%-6,60% untuk tahun 2023,

Efek-Efek

Bank BPD Bali membukukan kenaikan tajam atas efek-efek sebesar 124,06% yoy menjadi Rp9,76 triliun pada tahun 2024, Pertumbuhan signifikan ini terutama berasal dari efek berupa Sekuritas Rupiah Bank

As of December 31, 2024 and 2023 the Bank's Minimum Statutory Reserve (GWM) and Macroprudential Liquidity Buffer (PLM) is in accordance with Bank Indonesia Regulation. In this regard, based on a letter from Bank Indonesia No.26/ /DKMP/Srt/B dated December 2024. Bank BPD Bali has received an incentive of 3.80% for KLM for the period from December 1, 2024 to December 31, 2024.

GWM is the minimum amount of funds that must be maintained by Conventional Commercial Banks (BUK) or Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. the amount of which is determined by Bank Indonesia in the amount of a certain percentage of DPK BUK or DPK BUS and UUS. Meanwhile, PLM is a minimum liquidity reserve in Rupiah that must be maintained by BUK in the form of securities that meet certain requirements. the amount of which is determined by Bank Indonesia at a certain percentage of BUK Deposits in Rupiah.

Please refer to the Financial Ratios section of this chapter for further discussion of GMW.

Current Accounts with Other Banks - Net

Bank BPD Bali reported that current accounts with other banks - net declined 35.66% yoy to Rp45.09 billion. The decrease in this account was due to Rupiah denominated current accounts with other banks which decreased by 70.81% yoy to Rp14.55 billion.

The average interest rate per annum for current accounts with other banks in Rupiah and US dollar currency for the year 2024 is 0.00% - 2.00% and 0.00%. respectively. While for the previous year: it was 0.00%-1.25% and 0.00%.

Placements with Bank Indonesia and Other Banks - Net

Placements with Bank Indonesia and Other Banks - Net are reported to have increased significantly by 24.40% yoy to Rp3.14 trillion in 2024. This increase is mainly due to a significant increase in the Saving Facilities of Bank Indonesia from Rp100.00 billion in 2023 to Rp600.00 billion in 2024. In addition, Bank BPD Bali also recorded a Deposit on Call of Rp400.00 billion in 2024. This was not recorded in the previous year.

The average annual interest rate for placements with Bank Indonesia and other banks is 0.00% - 6.57% for the year 2024 and 0.00% - 6.60% for the year 2023.

Securities

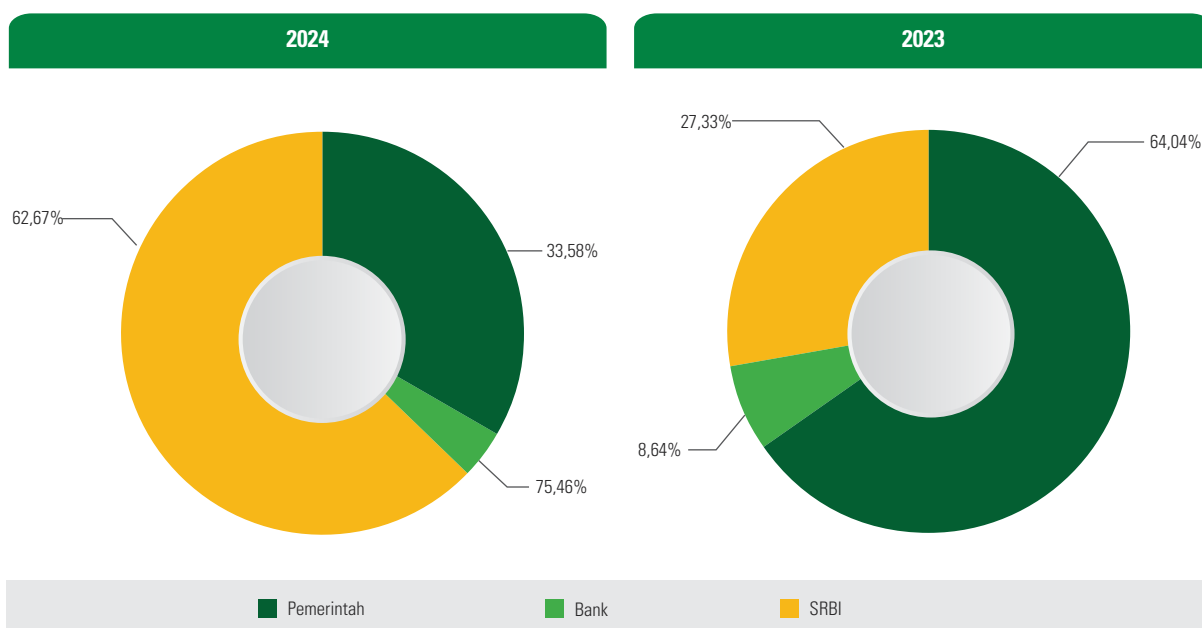
Bank BPD Bali recorded a sharp increase in its securities portfolio of 124.06% yoy to reach Rp9.76 trillion in 2024. This significant growth was mainly due to securities in the form of Bank Indonesia Rupiah

Indonesia (SRBI) yang mencapai Rp6,12 triliun pada tahun 2024 dari hanya sebesar Rp1,19 triliun pada tahun sebelumnya, Bank juga mencatatkan kenaikan nilai efek berupa Surat Utang Negara (SUN) menjadi Rp3,28 triliun pada tahun 2024 dibandingkan senilai Rp2,79 triliun pada tahun sebelumnya,

Securities (SRBI), which reached Rp6.12 trillion in 2024, compared to only Rp1.19 trillion in the previous year. Bank BPD Bali also saw a rise in value of government bonds (Sun) to Rp3.28 trillion in 2024 from Rp2.79 trillion last year.

(Disajikan dalam jutaan Rupiah)/(Expressed in millions of Rupiah)

	2024	2023	Perubahan Change		
			Nominal	%	
Pemerintah	3,277,824	2,789,455	488,369	17,51%	Government
Bank	366,000	376,000	(10,000)	(2,66%)	Bank
SRBI	6,116,253	1,190,581	4,925,672	413,72%	SRBI
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		-28,500	28,500	(100,00%)	Allowance for Impairment Losses
Jumlah Bersih	9,760,077	4,327,536			Total - Net



Komposisi efek-efek Bank BPD Bali berdasarkan penerbit didominasi oleh SRBI dengan porsi sebesar 62,67% pada tahun 2024, jauh lebih tinggi dibandingkan sebesar 27,33% pada tahun sebelumnya. Efek-efek lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah berupa SUN juga memiliki kontribusi signifikan sebesar 33,58% sedangkan sisanya efek-efek yang diterbitkan oleh Bank,

The composition of Bank BPD Bali's securities by issuer was dominated by SRBI with a share of 62.67% in 2024. This is much higher than 27.33% in the previous year. Other securities issued by the government in the form of SUN also had a significant contribution of 33.58%. The rest were securities issued by the bank.

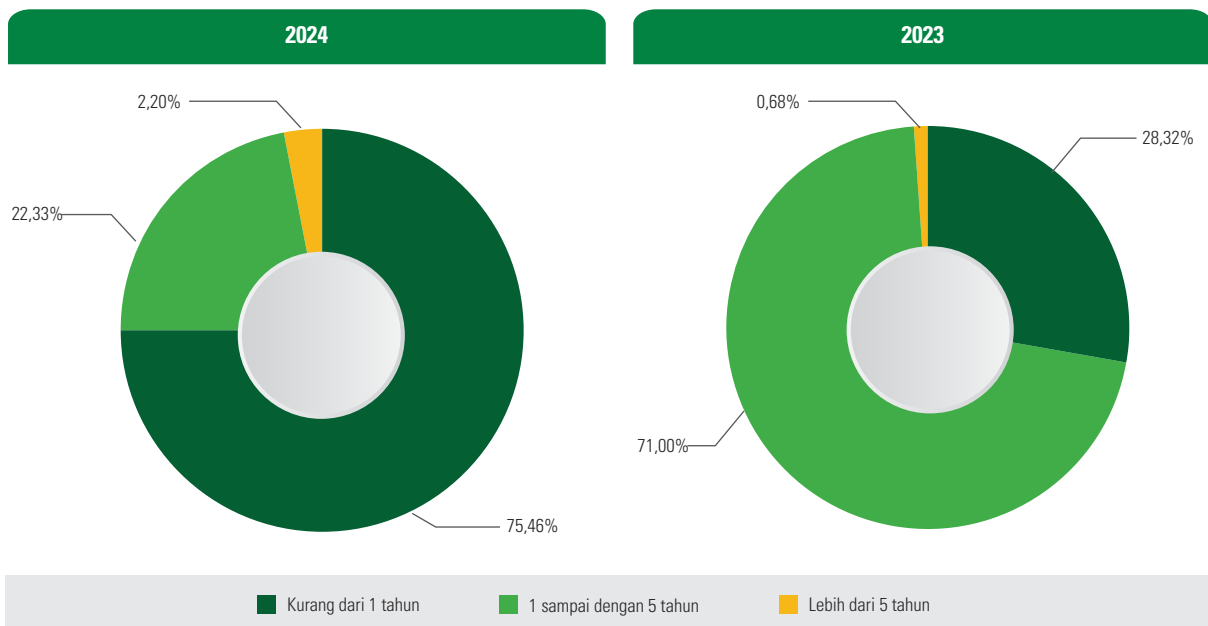
Efek-efek yang diterbitkan oleh perbankan berperingkat antara AA+ hingga AAA yang ditetapkan Pefindo dan Fitch untuk tahun buku 2024, Sedangkan untuk tahun sebelumnya, peringkat efek-efek yang diterbitkan oleh perbankan berperingkat A+ hingga AAA oleh Pefindo dan Fitch,

The rating of the securities issued by the banks is between AA+ and AAA by Pefindo and Fitch for the fiscal year 2024. Meanwhile, for the previous year, the ratings of the securities issued by the banks were rated between A+ to AAA as determined by Pefindo and Fitch.



(Disajikan dalam jutaan Rupiah)/(Expressed in millions of Rupiah)

	2024	2023	Perubahan Change		
			Nominal	%	
Kurang dari 1 tahun	7,365,111	1,233,552	6,131,559	497,07%	Less than 1 year
1 sampai dengan 5 tahun	2,179,861	3,092,801	(912,941)	(29,52%)	1 to 5 year
Lebih dari 5 tahun	215,106	29,654	185,452	625,38%	More than 5 year
Jumlah	9,760,077	4,356,008	5,404,070	124,06%	Total



Sementara itu, jika dilihat berdasarkan sisa umur jatuh tempo, portofolio efek Bank BPD Bali dengan sisa umur jatuh tempo kurang dari 1 tahun memiliki kontribusi dominan sebesar 75,46% pada tahun 2024. Berbeda dengan tahun sebelumnya, efek-efek dengan sisa umur jatuh tempo 1 sampai dengan 5 tahun berkontribusi signifikan sebesar 71,00%.

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun efek-efek adalah sebesar 5,125%-10,25% untuk tahun 2024 dan 2023,

Efek-Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali

Bank tidak membukukan akun ini pada tahun 2024 dibandingkan senilai Rp3,97 triliun pada tahun sebelumnya,

Pinjaman yang Diberikan

Bank BPD Bali mencatatkan pertumbuhan pinjaman yang diberikan sebesar 8,07% yoy menjadi Rp21,53 triliun pada tahun 2024. Sejalan dengan pertumbuhan investasi di provinsi Bali pada tahun 2024, Bank BPD Bali juga membukukan pertumbuhan *double digit* kredit investasi sebesar 18,32% yoy menjadi Rp10,15 triliun sebagai katalis utama pertumbuhan kredit Bank,

Meanwhile, the securities portfolio of Bank BPD Bali with a remaining maturity of less than 1 year has a dominant contribution of 75.46% in 2024, based on the remaining maturity. Unlike last year, securities with remaining maturity of 1-5 years contributed significantly with 71.00%.

The average annual interest rate on the securities is between 5.125% and 10.25% for the years 2024 and 2023.

Securities Purchased Under Resale Agreements

The bank did not record this account in the year 2024 as compared to Rp3.97 trillion in the previous year.

Loans

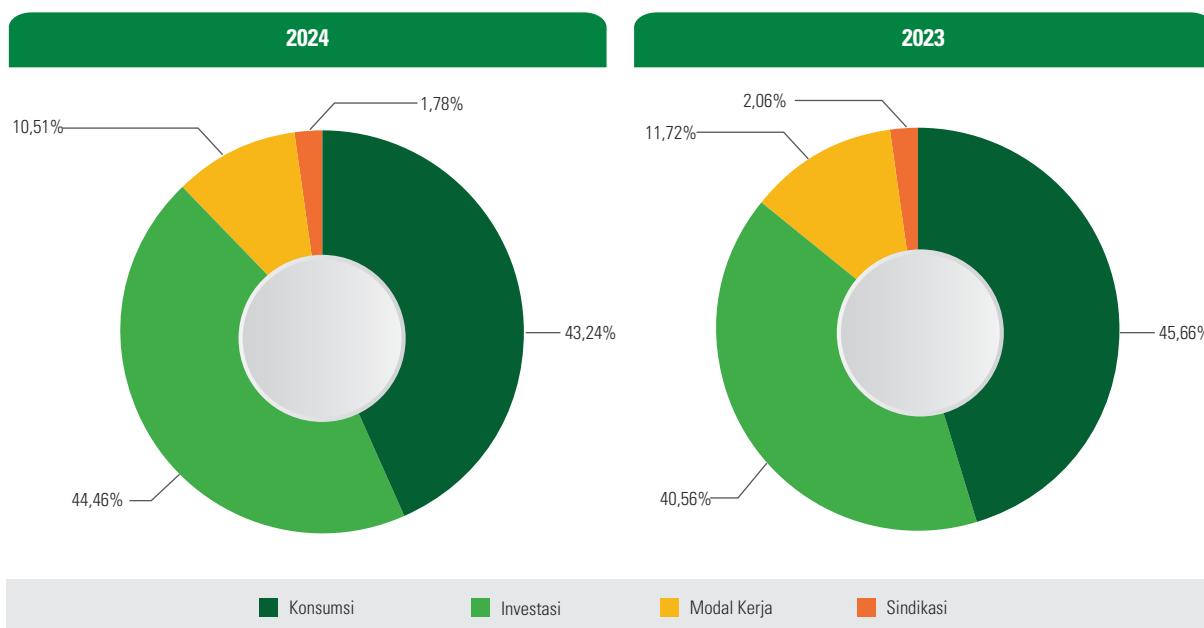
Bank BPD Bali recorded 8.07% yoy loan growth to Rp21.53 trillion in 2024. In line with the growth of investments in the province of Bali in 2024, Bank BPD Bali also recorded a double-digit growth in investment loans of 18.32% yoy to Rp10.15 trillion as the main catalyst for the growth of the bank's loans.

Meski secara prosentase lebih rendah, Bank juga membukukan pertumbuhan kredit konsumsi sebesar 2,2% yoy menjadi Rp9,87 triliun pada tahun 2024,

Although lower in percentage terms, the Bank also recorded Consumer Loans growing by 2.2% yoy to reach Rp9.87 trillion in 2024.

(Disajikan dalam jutaan Rupiah)/(Expressed in millions of Rupiah)

	2024	2023	Perubahan Change		
			Nominal	%	
Konsumsi	9,871,547	9,657,277	214,270	2,22%	Consumer
Investasi	10,151,187	8,579,344	1,571,843	18,32%	Investment
Modal kerja	2,400,021	2,478,802	(78,781)	(3,18%)	Working Capital
Sindikasi	407,414	435,158	(27,743)	(6,38%)	Syndication
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1,305,082)	(1,232,527)	(72,555)	5,89%	Allowance for Impairment Losses
Jumlah bersih	21,525,087	19,918,054	1,607,034	8,07%	Total - Net



Kredit investasi memiliki kontribusi terbesar sebesar 44,46% pada tahun 2024 dibandingkan sebesar 40,56% pada tahun sebelumnya. Secara kumulatif, kredit produktif yang terdiri dari kredit investasi, modal kerja, dan sindikasi berkontribusi sebesar 56,76% sedangkan kredit konsumsi sebesar 43,24%,

Investment credit is the largest contributor at 44.46%. up from 40.56% last year. On a cumulative basis, production loans, consisting of investment loans, working capital loans and syndicated loans, accounted for 56.76% while consumer loans accounted for 43.24%.

Sementara itu, jika dilihat dari sektor ekonomi, terdapat 5 (lima) sektor yang memiliki kontribusi terbesar yakni rumah tangga; perdagangan besar dan eceran; pertanian, kehutanan dan perikanan; penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; dan konstruksi. Kredit konsumsi yang diberikan kepada rumah tangga memiliki kontribusi sebesar 43,24% dan 45,66% masing-masing untuk tahun 2024 dan 2023,

In terms of economic sectors, there are 5 (five) sectors that contributed the most, namely, households; wholesale and retail trade; agriculture, forestry and fishery; accommodation and culinary supplying; and construction. Consumer credit disbursed to households contributed 43.24% and 45.66% in 2024 and 2023, respectively.

Sementara itu, untuk sektor produktif, kontribusi kredit *double digit* dibukukan oleh perdagangan besar dan eceran dengan kontribusi sebesar 26,49% dan 26,27% untuk tahun 2024 dan 2023. Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum berkontribusi terbesar kedua masing-

Meanwhile, for the productive sector, double-digit credit contributions were recorded by wholesale and retail trade, contributing 26.49% and 26.27% in 2024 and 2023, respectively. Accommodation and food services are the second largest contributors with 8.17% and 6.59%

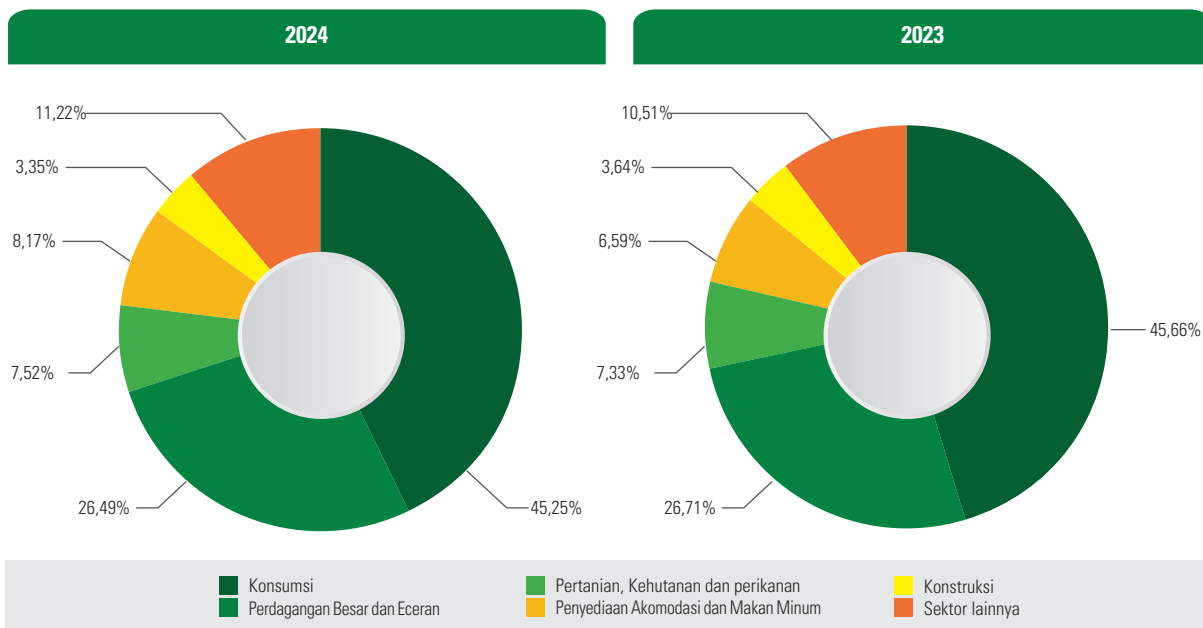


masing sebesar 8,17% dan 6,59% selama dua tahun terakhir, Peningkatan kredit ini sejalan dengan peningkatan industri pariwisata di Pulau Bali,

respectively over the past two years. This increase is consistent with Bali's growing tourism industry.

(Disajikan dalam jutaan Rupiah)/(Expressed in millions of Rupiah)

	2024	2023	Perubahan Change		
			Nominal	%	
Rumah Tangga	9,871,547	9,657,277	214,270	2,22%	Household
Perdagangan Besar dan Eceran	6,048,280	5,556,217	492,063	8,86%	Wholesale and Retail Trade
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,716,941	1,549,326	167,615	10,82%	Agriculture, forestry, and fishery
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	1,866,187	1,393,961	472,226	33,88%	Accommodation and culinary supplying
Konstruksi	765,664	770,169	(4,505)	(0,58%)	Construction
Sektor lainnya	2,561,549	2,223,630	337,919	15,20%	Other sectors
Jumlah - Bruto	22,830,169	21,150,581	1,679,588	7,94%	Total - Gross
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1,305,082)	(1,232,527)	(72,555)	5,89%	Allowance for Impairment Losses
Jumlah - Bersih	21,525,087	19,918,054	1,607,034	8,07%	Total - Net



Per 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat pelanggaran ataupun pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada pihak ketiga dan pihak berelasi serta sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan Bank Indonesia,

As of December 31, 2024 and 2023, there were no violations or exceedances of the legal limit for lending to third parties and related parties (BMPK) and in accordance with the regulations set by Bank Indonesia.

Aset Lain-Lain

Aset lain-lain Bank BPD Bali tumbuh sebesar 7,69% yoy menjadi Rp229,64 miliar pada tahun 2024, Pertumbuhan aset lain-lain ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan bunga yang akan diterima sebesar 10,91% yoy menjadi Rp138,39 miliar, Pertumbuhan tertinggi dibukukan oleh tagihan switching antar Bank & GPN sebesar 101,40% yoy menjadi Rp50,15 miliar pada tahun 2024,

Other Assets

Other assets of Bank BPD Bali grew by 7.69% yoy to Rp229.64 billion in 2024. The growth in other assets was mainly influenced by an increase in accrued interest receivable by 10.91% yoy to Rp138.39 billion. The highest growth was recorded by Interbank Switching Bills & GPN. It grew by 101.40% yoy to Rp50.15 billion in 2024.

Aset Non Keuangan

Sejalan dengan pertumbuhan aset keuangan, Bank BPD Bali juga membukukan pertumbuhan jumlah aset non keuangan sebesar 12,37% yoy menjadi Rp334,02 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset pajak tangguhan - bersih sebesar 22,12% yoy menjadi Rp152,16 miliar,

Non-Financial Assets

In line with the growth in financial assets, Bank BPD Bali recorded a 12.37% yoy increase in non-financial assets to Rp334.02 billion. This increase was mainly due to an increase in deferred tax assets. Net deferred tax assets increased by 22.12% yoy to Rp152.16 billion.

(Disajikan dalam jutaan Rupiah)/(Expressed in millions of Rupiah)

	2024	2023	Perubahan Change		
			Nominal	%	
Aset Tetap	129,634	123,443	6,191	5,02%	Fixed Assets
Aset Takberwujud	7,460	8,208	(748)	(9,11%)	Intangible Assets
Aset Hak Guna	44,771	41,018	3,753	9,15%	Right-of-Use Assets
Aset Pajak Tangguhan - Bersih	152,159	124,597	27,562	22,12%	Deferred Tax Assets - Net
Jumlah Aset Non Keuangan	334,023	297,265	36,758	12,37%	Total Non-Financial Assets

Aset Tetap

Aset tetap Bank BPD Bali meningkat 5,02% yoy menjadi Rp129,63 miliar pada tahun 2024. Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan harga perolehan bangunan menjadi Rp123,43 miliar pada tahun 2024 dibandingkan sebesar Rp110,77 miliar pada tahun sebelumnya,

Fixed Assets

Bank BPD Bali's fixed assets grew 5.02% yoy to Rp129.63 billion in 2024. This increase was mainly influenced by the increased cost of acquiring buildings to Rp123.43 billion in 2024 compared to Rp110.77 billion in the previous year.

Aset Takberwujud

Aset takberwujud mengalami penurunan sebesar 9,11% yoy menjadi Rp7,46 miliar pada tahun 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan akumulasi amortisasi yang mencapai Rp44,30 miliar pada tahun 2024 dari senilai Rp39,56 miliar pada tahun sebelumnya,

Intangible Assets

Intangible assets declined 9.11% yoy to Rp7.46 billion in 2024. This decrease was mainly due to an increase in accumulated depreciation reaching Rp44.30 billion in 2024 from Rp39.56 billion in the previous year.

Aset Hak Guna

Bank BPD Bali mencatatkan kenaikan aset hak guna sebesar 9,15% yoy menjadi Rp44,77 miliar pada tahun 2024. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan harga perolehan Gedung dan ATM yang naik 6,69% yoy dan 24,36% menjadi Rp48,55 miliar dan Rp24,81 miliar pada tahun 2024,

Right-of-Use Assets

Bank BPD Bali registered a 9.15% yoy increase in rights to use assets to Rp44.77 billion in 2024. This increase was mainly due to an increase in the acquisition price of buiding and ATM which increased by 6.69% yoy and 24.36% yoy to Rp48.55 billion and Rp24.81 billion in 2024, respectively.

Aset Pajak Tangguhan - Bersih

Aset Pajak Tangguhan - Bersih Bank meningkat 22,12% yoy menjadi Rp152,16 miliar pada tahun 2024. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penyisihan cadangan bonus dan tantiem dari senilai Rp34,52 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp41,10 miliar pada tahun 2024,

Deferred Tax Assets - Net

The Bank's deferred tax assets - net increased by 22.12% yoy to Rp152.16 billion in 2024. This increase was mainly due to increase in bonus and tantiem provision from Rp34.52 billion in 2023 to Rp41.10 billion in 2024.

Liabilitas Keuangan

Pertumbuhan *double digit* atas simpanan nasabah sebesar 15,10% yoy berdampak positif terhadap kenaikan jumlah liabilitas keuangan sebesar 11,17% yoy menjadi Rp33,32 triliun pada tahun 2024. Penjelasan dari masing-masing komponen liabilitas keuangan adalah sebagai berikut:

Financial Liabilities

The double-digit growth of customer deposits at 15.10% yoy has a positive impact on the increase in the amount of financial liabilities by 11.17% yoy to Rp33.32 trillion in 2024. Each component of financial liabilities is explained below:



(Disajikan dalam jutaan Rupiah)/(Expressed in millions of Rupiah)

	2024	2023	Perubahan Change		
			Nominal	%	
Liabilitas Segera	74,680	103,395	(28,715)	(27,77%)	Liabilities Due Immediately
Simpanan Nasabah	32,167,791	27,948,417	4,219,374	15,10%	Deposits from Customers
Simpanan dari Bank Lain	661,692	1,550,582	(888,890)	(57,33%)	Deposits from Other Banks
Pinjaman yang Diterima	24,434	66,730	(42,297)	(63,38%)	Borrowings
Beban yang Masih Harus Dibayar	22,595	20,025	2,571	12,84%	Accrued Expenses
Liabilitas Sewa	15,057	13,576	1,480	10,90%	Lease Liabilities
Liabilitas Lain - lain	351,353	268,270	83,083	30,97%	Other Liabilities
Jumlah Liabilitas Keuangan	33,317,602	29,970,996	3,346,606	11,17%	Total Financial Liabilities

Liabilitas Segera

Liabilitas Segera Bank BPD Bali mengalami penurunan sebesar 27,77% yoy menjadi Rp74,68 miliar pada tahun 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya titipan kewajiban *switching* antar Bank & GPN dari Rp60,76 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp36,32 miliar pada tahun 2024,

Liabilities Due Immediately

Bank BPD Bali's liabilities due immediately decreased by 27.77% yoy to Rp74.68 billion in 2024. This decrease was mainly due to lower interbank switching & GPN liabilities from Rp60.76 billion in 2023 to Rp36.32 billion in 2024.

Simpanan Nasabah

Bank BPD Bali mencatatkan kenaikan simpanan nasabah sebesar 15,10% yoy menjadi Rp32,17 triliun pada tahun 2024. Ketiga jenis simpanan nasabah Bank membukukan pertumbuhan *double digit* dengan kenaikan tertinggi secara nominal dibukukan oleh tabungan. Tabungan tumbuh 15,10% yoy atau ekuivalen dengan Rp2,34 triliun menjadi Rp17,81 triliun. Simpanan nasabah berbiaya murah lainnya yakni giro meningkat 10,27% menjadi Rp4,96 triliun pada tahun 2024. Secara kumulatif, simpanan berbiaya murah (CASA) mencapai Rp22,78 triliun atau 70,80% dari jumlah simpanan nasabah,

Deposits from Customers

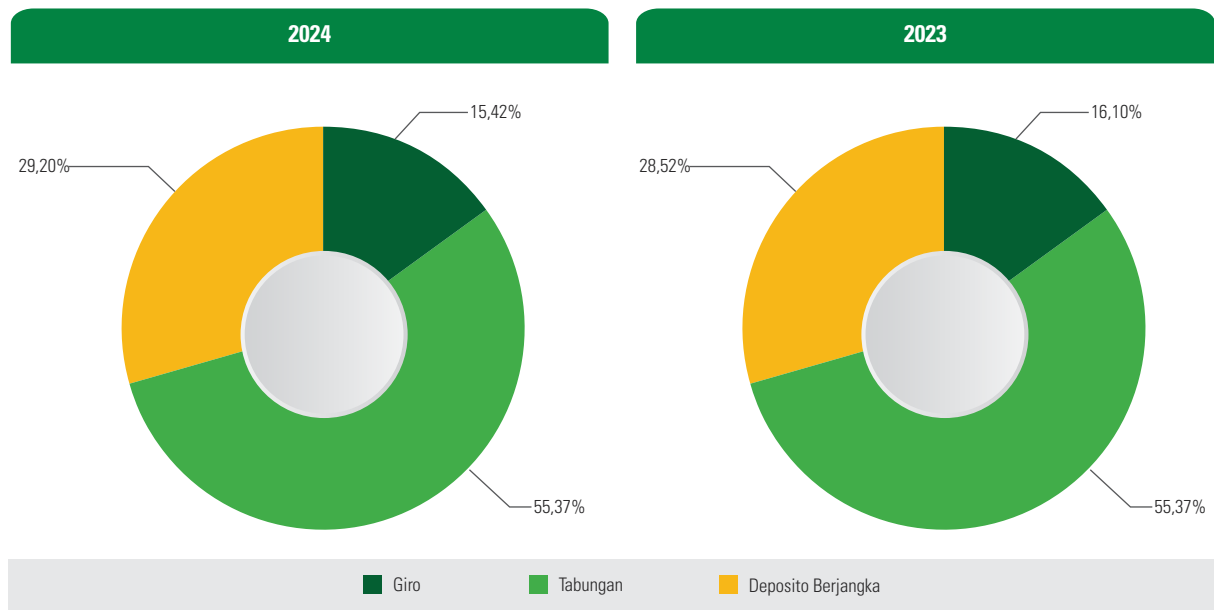
Bank BPD Bali recorded an increase in customer deposits of 15.10% yoy to Rp32.17 trillion in 2024. The Bank's three types of customer deposits recorded double-digit growth. with savings recording the highest nominal growth. Savings deposits grew by 15.10% yoy or the equivalent of Rp2.34 trillion to Rp17.81 trillion. Other low-cost customer deposits. namely current accounts. grew by 10.27% to Rp4.96 trillion in 2024. On a cumulative basis. low-cost deposits (CASA) reached Rp22.78 trillion or 70.80% of the total customer deposits.

Selanjutnya, deposito berjangka secara persentase membukukan kenaikan tertinggi sebesar 17,82% yoy menjadi Rp9,39 triliun atau 29,20% dari jumlah simpanan nasabah. Deposito berjangka memiliki kisaran suku bunga per tahun dalam mata uang Rupiah sebesar 2,90%-4,00% atau lebih tinggi dibandingkan tabungan 0,00%-3,50% dan giro sebesar 0,00%-1,90%.

Furthermore, time deposits recorded the highest percentage increase of 17.82% yoy to Rp9.39 trillion or 29.20% of total deposits. Time deposits have an annual interest rate range in Rupiah currency of 2.90%-4.00% or higher compared to savings accounts of 0.00%-3.50% and current accounts of 0.00%-1.90%.

(Disajikan dalam jutaan Rupiah)/(Expressed in millions of Rupiah)

	2024	2023	Perubahan Change		
			Nominal	%	
Giro	4,962,826	4,500,767	462,058	10,27%	Current Account
Tabungan	17,812,439	15,475,796	2,336,642	15,10%	Savings
Deposito Berjangka	9,392,527	7,971,853	1,420,673	17,82%	Time Deposit
Jumlah	32,167,791	27,948,417	4,219,374	15,10%	Total



Simpanan dari Bank Lain

Ditengah peningkatan simpanan nasabah tersebut, Bank BPD Bali mencatatkan penurunan signifikan simpanan dari bank lain sebesar 57,33% yoy menjadi Rp661,69 miliar. Penurunan tajam dari tahun sebelumnya senilai Rp1,55 triliun terutama disebabkan oleh tidak dibukukannya Interbank Call Money pada tahun buku 2024 dibandingkan tahun sebelumnya senilai Rp838,00 miliar,

Pinjaman yang Diterima

Bank BPD Bali membukukan penurunan signifikan atas pinjaman yang diterima dalam mata uang Rupiah sebesar 63,38% yoy menjadi Rp24,43 miliar. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh pelunasan pinjaman oleh Bank atas sebagian pinjaman yang berasal dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero),

Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar mencapai Rp22,60 miliar pada tahun 2024, Pertumbuhan sebesar 12,84% yoy terutama disebabkan oleh biaya deposito yang masih harus dibayar senilai Rp17,08 miliar pada tahun 2024 dari senilai Rp14,20 miliar pada tahun sebelumnya,

Liabilitas Lain-lain

Liabilitas lain-lain Bank mencapai Rp351,35 miliar pada tahun 2024, Kenaikan signifikan sebesar 30,97% yoy terutama disebabkan oleh pembukuan cadangan iuran pensiun senilai Rp47,79 miliar pada tahun 2024, Akun ini tidak dibukukan pada tahun sebelumnya. Selain itu, terdapat kenaikan jasa produksi dan tantiem menjadi Rp186,84 miliar pada tahun 2024 dari tahun sebelumnya senilai Rp156,90 miliar,

Deposits from Other Banks

Bank BPD Bali recorded a significant decrease of 57.33% yoy in deposits from other banks to Rp661.69 billion amid the increase in customer deposits. The sharp decrease from the previous year of Rp1.55 trillion was mainly due to the non-recognition of interbank call money in the financial year 2024 as compared to the previous year of Rp838.00 billion.

Borrowings

Bank BPD Bali recorded a significant decline of 63.38% yoy to Rp24.43 billion in terms of borrowings and advances received in Rupiah currency. This decrease was mainly influenced by the bank's partial loan repayment from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

Accrued Expenses

The accrued expenses reached Rp22.60 billion in 2024. The growth of 12.84% yoy was mainly due to the accrued cost of deposits amounting to Rp17.08 billion in 2024 as compared to Rp14.20 billion in the previous year.

Other Liabilities

The Bank's other liabilities reached Rp351.35 billion in 2024. The significant increase of 30.97% yoy was mainly due to the allowance pension contribution amounting to Rp47.79 billion in 2024. In the previous year, this account was not recorded. Furthermore, production service bonus and tantiem increased to Rp186.84 billion in 2024 from Rp156.90 billion in the previous year.



Liabilitas Non Keuangan

Jumlah liabilitas non keuangan Bank sebesar Rp334,88 miliar atau berkurang 4,20% yoy terutama akibat dari berkurangnya utang pajak sebagaimana dijelaskan berikut ini:

Non Financial Liabilities

The Bank's total non-financial liabilities amounted to Rp334.88 billion. or a decrease of 4.20% yoy. mainly due to the decrease in tax payable as discussed below:

(Disajikan dalam jutaan Rupiah)/(Expressed in millions of Rupiah)

	2024	2023	Perubahan Change		
			Nominal	%	
Utang Pajak	69,106	117,287	(48,180)	(41,08%)	Taxes Payable
Liabilitas Imbalan Kerja	265,777	232,261	33,515	14,43%	Post-Employment Benefit Obligation
Jumlah Liabilitas Non Keuangan	334,883	349,548	(14,665)	(4,20%)	Total Non Financial Liabilities

Utang Pajak

Utang pajak Bank berkurang tajam sebesar 41,08% yoy menjadi Rp69,11 miliar. Penurunan ini terutama berasal dari penurunan pajak pasal 25 menjadi hanya Rp9,35 miliar dari senilai Rp67,31 miliar pada tahun sebelumnya,

Taxes Payable

The taxes payable of the Bank showed a significant decrease of 41.08% yoy to Rp69.11 billion. This decrease was mainly due to a decrease in the Article 25 tax to only Rp9.35 billion from Rp67.31 billion in the previous year.

Liabilitas Imbalan Kerja

Bank BPD Bali mencatatkan kenaikan liabilitas imbalan kerja sebesar 14,43% yoy menjadi Rp265,78 miliar pada tahun 2024. Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh pembukuan program dana pension senilai Rp11,49 miliar pada tahun 2024 yang tidak dibukukan pada tahun sebelumnya,

Post-Employment Benefit Obligation

Bank BPD Bali recorded an increase of 14.43% yoy to Rp265.78 billion in its liabilities for employee benefits in 2024. This increase was mainly influenced by recognizing a Pension Fund Program amounting to Rp11.49 billion in 2024. which was not recognized in the previous year.

Ekuitas

Bank BPD Bali berhasil membukukan pertumbuhan ekuitas sebesar 16,79% yoy menjadi Rp4,66 triliun pada tahun 2024. Pertumbuhan ekuitas ini terutama didukung oleh kenaikan saldo laba sebesar 16,25% yoy menjadi Rp2,32 triliun,

Equity

Bank BPD Bali managed to grow equity by 16.79% yoy to reach Rp4.66 trillion in 2024. This equity growth was mainly supported by a 16.25% yoy increase in retained earnings to Rp2.32 trillion.

(Disajikan dalam jutaan Rupiah)/(Expressed in millions of Rupiah)

	2024	2023	Perubahan Change		
			Nominal	%	
Modal ditempatkan dan disetor penuh	2,407,177	2,050,257	356,920	17,41%	Issued and fully paid capital:
Tambahan Modal Disetor	2	2	-0	(19,59%)	Additional Paid-In Capital
Pengukuran Kembali atas Imbalan Pasca Kerja	(70,905)	(59,219)	(11,686)	19,73%	Remeasurement of Post-Employment Benefit Obligation
Saldo laba	2,323,923	1,999,129	324,795	16,25%	Retained Earnings
Total Ekuitas	4,660,197	3,990,169	670,028	16,79%	Total Equity
Total Liabilitas dan Ekuitas	38,312,682	34,310,712	4,001,969	11,66%	Total Liabilities and Equity

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

Bank BPD Bali berhasil membukukan pertumbuhan laba tahun berjalan sebesar 19,00% yoy menjadi Rp878,47 miliar, Peningkatan laba tahun berjalan ini terutama didukung oleh pertumbuhan pendapatan bunga sebesar 7,96% yoy sejalan dengan penyaluran kredit Bank yang tumbuh sebesar 8,07% yoy dan kenaikan pendapatan bunga dari pengelolaan aktiva produktif Bank,

Bank BPD Bali managed to record current year profit growth of 19.00% yoy to Rp878.47 billion. The increase in current year profit was mainly supported by interest income growth of 7.96% in line with the bank's loan distribution which grew by 8.07% yoy and higher interest income from the management of the Bank's productive assets.

(Disajikan dalam jutaan Rupiah)/(Expressed in millions of Rupiah)

	2024	2023	Perubahan Change		
			Nominal	%	
Pendapatan Bunga	3,347,855	3,100,966	246,890	7,96%	Interest Income
Beban Bunga	(970,120)	(859,297)	(110,823)	12,90%	Interest Expense
Jumlah Pendapatan Bunga Bersih	2,377,735	2,241,669	136,067	6,07%	Net Interest Income
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	226,739	181,324	45,415	25,05%	Total Other Operating Income
Jumlah Pembentukan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(145,915)	(334,633)	188,718	(56,40%)	Total Provision for Impairment Losses
Jumlah Beban Operasional Lainnya	(1,274,670)	(1,014,722)	(259,948)	25,62%	Total Other Operating Expenses
Laba Operasional	1,183,889	1,073,637	110,252	10,27%	Operating Income
Laba Sebelum Pajak	1,197,999	1,068,156	129,843	12,16%	Income Before Tax Expense
Jumlah Beban Pajak	(319,534)	(329,928)	10,394	(3,15%)	Total Tax Expense
Laba Tahun Berjalan	878,466	738,228	140,237	19,00%	Income For The Year
Jumlah Pendapatan Komprehensif Lain	(11,686)	1,346	(13,032)	(968,16%)	Total Other Comprehensive Income
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	866,780	739,574	127,206	17,20%	Total Comprehensive Income For The Year
Laba Per Saham	411,318	366,234	45,084	12,31%	Earnings Per Share

Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga Bank BPD Bali mencapai Rp3,35 triliun pada tahun 2024, Pertumbuhan sebesar 7,96% yoy dibandingkan Rp3,10 triliun pada tahun sebelumnya terutama didukung oleh pendapatan bunga yang berasal efek-efek yang tumbuh 21,57% yoy atau ekuivalen dengan Rp120,77 miliar menjadi Rp680,65 miliar, Pendapatan bunga dari penempatan bank lain juga meningkat tajam 198,71% yoy atau setara dengan Rp109,31 miliar menjadi Rp164,32 miliar,

Selanjutnya, pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan naik terbatas sebesar 0,79% yoy menjadi Rp2,49 triliun, Meski demikian, pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan masih memberikan kontribusi terbesar yakni 74,29% pada tahun 2024 dibandingkan 79,57% pada tahun sebelumnya,

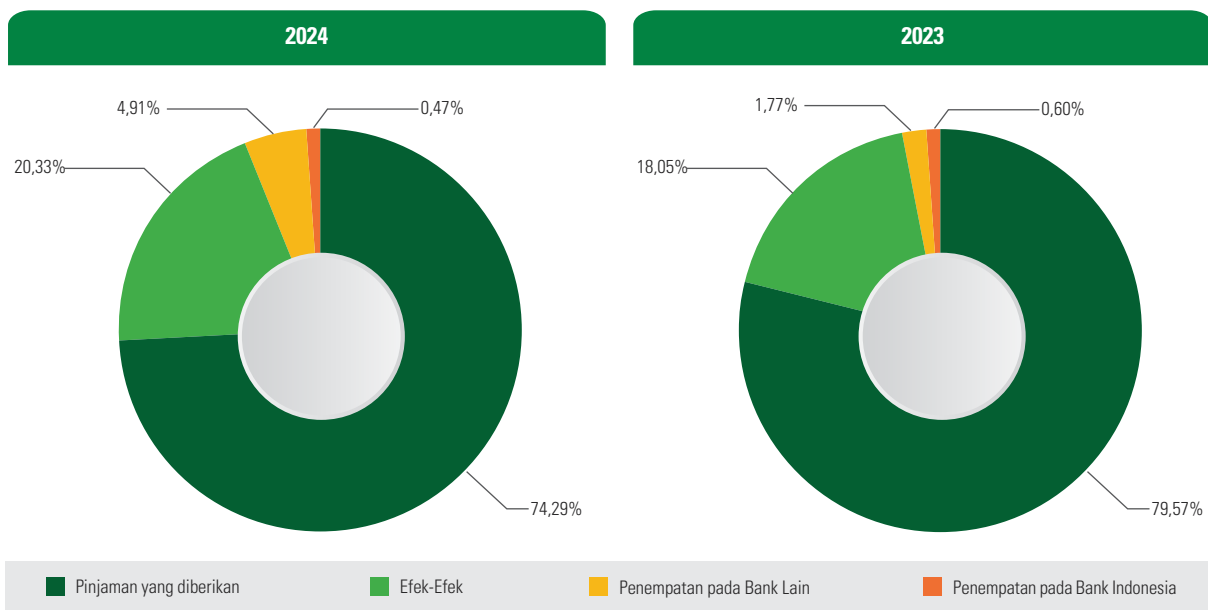
Interest Income

Bank BPD Bali's interest income reached Rp3.35 trillion in 2024. The growth of 7.96% yoy from Rp3.10 trillion in the previous year was mainly supported by interest income from securities which grew by 21.57% yoy or equivalent to Rp120.77 billion to reach Rp680.65 billion. Interest income from placements with other bank also increased sharply by 198.71% yoy or equivalent to Rp109.31 billion to Rp164.32 billion.

In addition, interest income from loans rose by a modest 0.79% yoy to Rp2.49 trillion. However, interest income from loans still contributed the largest share of 74.29% compared to 79.57% last year.

(Disajikan dalam jutaan Rupiah)/(Expressed in millions of Rupiah)

	2024	2023	Perubahan Change		
			Nominal	%	
Pinjaman yang diberikan	2,487,123	2,467,518	19,605	0,79%	Loans
Efek - efek	680,647	559,874	120,772	21,57%	Securities
Penempatan pada Bank Lain	164,315	55,008	109,307	198,71%	Placements with Other Banks
Penempatan pada Bank Indonesia	15,771	18,565	(2,795)	(15,05%)	Placements with Bank Indonesia
Jumlah	3,347,855	3,100,966	246,890	7,96%	Total



Beban Bunga

Beban bunga Bank tumbuh lebih tinggi sebesar 12,90% yoy menjadi Rp970,12 miliar. Beban bunga dari simpanan nasabah berupa deposito berjangka, tabungan, dan giro secara kumulatif masih memiliki porsi dominan sebesar 80,96% dari total beban bunga pada tahun 2024. Deposito berjangka sebagai simpanan nasabah dengan beban bunga lebih mahal merupakan komponen beban bunga tertinggi dengan kontribusi sebesar 39,23% pada tahun 2024 dibandingkan 43,45% pada tahun sebelumnya. Penurunan porsi ini seiring dengan kenaikan CASA yang berhasil dibukukan oleh Bank pada tahun 2024,

Komponen beban bunga lainnya adalah penjaminan dan premi asuransi untuk program penjaminan dana nasabah dengan kontribusi masing-masing sebesar 8,54% dan 6,93% pada tahun 2024,

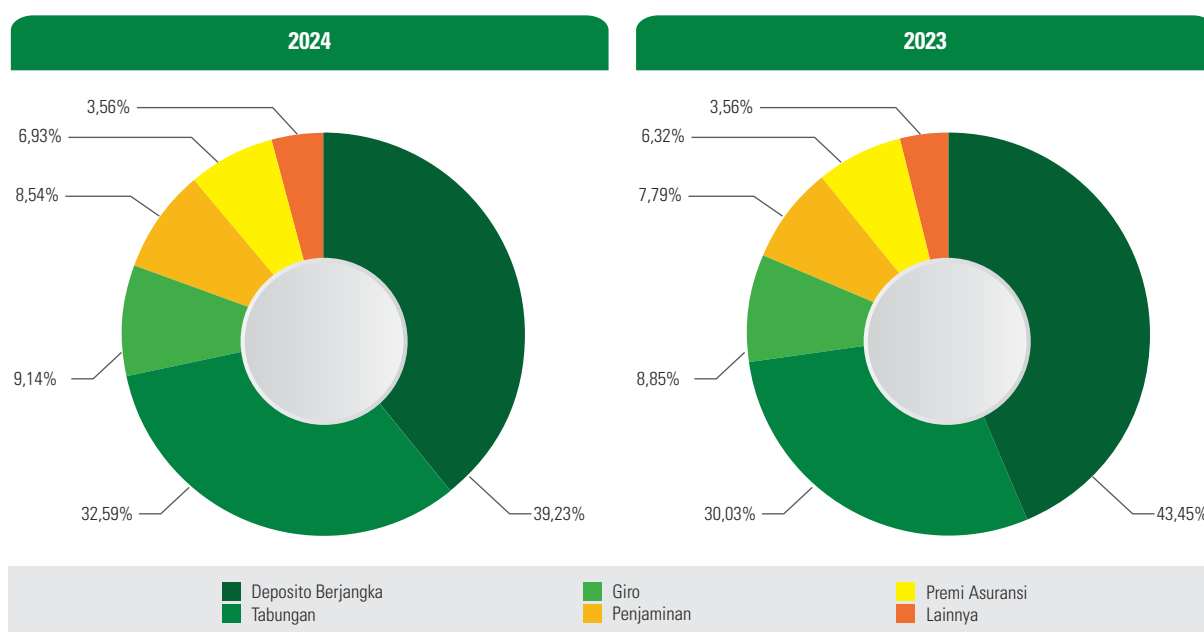
Interest Expense

The Bank's interest expense increased by 12.90% yoy to Rp970.12 billion. Interest expense from customer deposits in the form of term deposits, savings and current accounts still has a dominating share of 80.96% of total interest expense cumulatively in 2024. Time deposits, as customer deposits with higher interest expense, are the largest component of interest expense with a contribution of 39.23% in 2024 compared to 43.45% in the previous year. The decreasing share corresponds to the increasing CASA the Bank has successfully achieved in 2024.

Other components of interest expense are guarantees and insurance premiums for Customer Fund Guarantee Programs, which contribute 8.54% and 6.93%, respectively, in 2024.

(Disajikan dalam jutaan Rupiah)/(Expressed in millions of Rupiah)

	2024	2023	Perubahan Change		
			Nominal	%	
Deposito Berjangka	380,620	373,360	7,260	1,94%	Time Deposits
Tabungan	316,147	258,018	58,128	22,53%	Savings Account
Giro	88,669	76,050	12,618	16,59%	Current Accounts
Penjaminan	82,864	66,974	15,890	23,73%	Guarantee
Premi Asuransi	67,269	54,274	12,995	23,94%	Insurance Premium
Lainnya	34,551	30,620	3,931	12,84%	Others
Jumlah	970,120	859,297	110,823	12,90%	Total



Pendapatan Bunga Bersih

Pertumbuhan pendapatan bunga yang secara nominal lebih tinggi dibandingkan kenaikan beban bunga berdampak positif terhadap pertumbuhan pendapatan bunga bersih sebesar 6,07% yoy menjadi Rp2,38 triliun pada tahun 2024,

Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya Bank BPD Bali berasal dari pendapatan operasional, provisi dan komisi, dan lainnya. Ketiga sumber pendapatan operasional lainnya tersebut masing-masing tumbuh sebesar 25,83% yoy; 11,46% yoy; dan 9,82% yoy menjadi Rp215,89 miliar; Rp9,77 miliar; dan Rp1,09 miliar pada tahun 2024,

Capaian pertumbuhan tersebut menyebabkan kenaikan jumlah pendapatan operasional lainnya naik 25,05% yoy menjadi Rp226,74 miliar pada tahun 2024,

Net Interest Income

The nominal growth of interest income higher than the increase of interest expense positively impacts the growth of net interest income by 6.07% yoy to Rp2.38 trillion in 2024.

Total Other Operating Income

The other operating income of Bank BPD Bali is derived from operating income, provision and commission, and other income. The three sources of other operating income grew by 25.83% yoy; 11.46% yoy and 9.82% yoy to Rp215.89 billion; Rp9.77 billion and Rp1.09 billion in 2024.

This growth resulted in other operating income amount increasing 25.05% yoy to Rp226.74 billion in 2024.



Pembentukan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai

Pengelolaan aset keuangan lebih baik yang berhasil dilakukan oleh Bank BPD Bali berdampak positif terhadap berkurangnya pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai secara signifikan sebesar 55,97% yoy menjadi Rp148,95 miliar. Dengan pembukuan transaksi rekening administratif sebesar Rp3,03 miliar, maka jumlah pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai mencapai Rp145,92 miliar atau berkurang 56,40% yoy dari tahun sebelumnya,

Beban Operasional Lainnya

Sejalan dengan ekspansi bisnis yang dilakukan oleh Bank BPD Bali selama tahun 2024, jumlah beban operasional lainnya mengalami kenaikan sebesar 25,62% yoy menjadi Rp1,27 triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan gaji dan tunjangan karyawan sebesar 32,18% yoy menjadi Rp867,37 miliar pada tahun 2024,

Provision for Impairment Losses

The improved financial asset management successfully implemented by Bank BPD Bali has had a positive impact in significantly reducing the provision for impairment losses by 55.97% yoy to Rp148.95 billion. With administrative account transactions accounting for Rp3.03 billion, loan loss provisions amounted to Rp145.92 billion or down 56.40% yoy from the previous year.

Other Operating Expenses

In line with Bank BPD Bali's business expansion in 2024, other operating expenses increased by 25.62% yoy to Rp1.27 trillion. This increase was mainly caused by the higher salaries and employee benefits, which rose 32.18% yoy to Rp867.37 billion in 2024.

(Disajikan dalam jutaan Rupiah)/(Expressed in millions of Rupiah)

	2024	2023	Perubahan Change		
			Nominal	%	
Gaji dan Tunjangan Karyawan	857,371	648,632	208,738	32,18%	Salaries and Employee Benefits
Umum dan Administrasi	372,759	341,058	31,701	9,29%	General and Administrative
Beban Modifikasi	44,541	25,032	19,508	77,93%	Modification Expenses
Jumlah Beban Operasional Lainnya	1,274,670	1,014,722	259,948	25,62%	Total Other Operating Expenses

Laba Operasional

Peningkatan pendapatan bunga bersih dan pendapatan operasional lainnya yang diikuti dengan penurunan pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai mampu menghasilkan laba operasional yang lebih tinggi meskipun disisi lain dihadapkan pada kenaikan beban operasional lainnya, Laba operasional Bank tumbuh 10,27% yoy menjadi Rp1,18 triliun pada tahun 2024,

Operating Income

The increase in net interest income and other operating income, followed by a lower provisioning for impairment losses, resulted in higher operating profit despite the increase in other operating income. The Bank's operating income grew by 10.27% yoy to Rp1.18 trillion in 2024.

Jumlah Pendapatan Non Operasional

Bank BPD Bali membukukan jumlah pendapatan non operasional senilai Rp14,11 miliar pada tahun 2024 dibandingkan kerugian non operasional sebesar Rp5,48 miliar pada tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan signifikan atas pendapatan non operasional menjadi Rp55,19 miliar pada tahun 2024 dibandingkan hanya sebesar Rp5,32 miliar pada tahun sebelumnya. Disisi lain, beban operasional meningkat menjadi Rp41,08 miliar dari Rp10,80 miliar pada tahun 2023,

Total Non-Operating Income

Bank BPD Bali recorded non-operating income of Rp14.11 billion in 2024, compared to a non-operating loss of Rp5.48 billion in the previous year. This was mainly due to a significant increase in non-operating income to Rp55.19 billion in 2024, compared to only Rp5.32 billion in the previous year. On the other hand, the operating expenses increased to Rp41.08 billion in 2024 from Rp10.80 billion in 2023.

Laba Sebelum Pajak

Peningkatan kinerja profitabilitas sebagaimana dijelaskan di atas berdampak positif terhadap kenaikan laba sebelum pajak sebesar 12,16% yoy menjadi Rp1,20 triliun tahun 2024,

Income Before Tax Expense

The above improved profitability performance positively impacts the increase in Income Before Tax Expense by 12.16% yoy to Rp1.20 trillion in 2024.

Laba Tahun Berjalan

Setelah memperhitungkan beban pajak senilai Rp319,53 miliar pada tahun 2024, laba tahun berjalan Bank BPD Bali meningkat 19,00% yoy menjadi Rp878,47 miliar,

Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Pembukuan rugi komprehensif lain senilai Rp11,69 miliar pada tahun 2024 dibandingkan pendapatan komprehensif lain senilai Rp1,35 miliar pada tahun sebelumnya berdampak pada capaian jumlah laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp866,78 miliar, tumbuh 17,20% yoy dari tahun sebelumnya sebesar Rp739,57 miliar,

Laba Per Saham

Sejalan dengan capaian kinerja profitabilitas Bank yang solid pada tahun 2024, laba per saham Bank BPD Bali tumbuh 12,31% yoy menjadi Rp411,32 ribu pada tahun 2024,

Laporan Arus Kas Statement of Cash Flows

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Bank BPD Bali mencatatkan kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi senilai Rp6,62 triliun pada tahun 2024. Kenaikan tajam sebesar 120,64% yoy dari Rp3,00 triliun pada tahun sebelumnya terutama dipengaruhi kenaikan arus kas sebelum perubahan pada aset dan liabilitas operasi sebesar 11,18% yoy menjadi Rp1,47 triliun. Selanjutnya, faktor utama lainnya adalah peningkatan simpanan nasabah sebesar 182,15% yoy menjadi Rp4,22 triliun pada tahun 2024,

Profit for The Year

Taking into account the tax expense of Rp319.53 billion in 2024. Bank BPD Bali's profit for the year rose 19.00% yoy to Rp878.47 billion.

Total Comprehensive Income for The Year

The recognition of other comprehensive loss of Rp11.69 billion in 2024 compared to other comprehensive income of Rp1.35 billion in the previous year had an impact on the achievement of total comprehensive income for the current year of Rp866.78 billion. The total comprehensive income for the year increased by 17.20% yoy from Rp739.57 billion in the previous year.

Earnings Per Share

In line with the Bank's solid profitability performance achieved in 2024. Bank BPD Bali's earnings per share grew by 12.31% yoy to reach Rp411.32 thousand in 2024.

Cash Flows from Operating Activities

Bank BPD Bali recorded a net cash provided by operating activities of Rp6.62 trillion in the year 2024. The sharp increase of 120.64 % yoy from Rp3.00 trillion in the previous year was mainly influenced by an increase in cash flows before changes to operating assets and liabilities of 11.18 % yoy to Rp1.47 trillion. Another key factor was the increase in customer deposits of 182.15% yoy to Rp4.22 trillion.

(Disajikan dalam jutaan Rupiah)/(Expressed in millions of Rupiah)

	2024	2023	Perubahan Change		
			Nominal	%	
Penerimaan dari Pendapatan Bunga, Provisi, dan Komisi	3,325,426	3,100,642	224,784	7,25%	Receipts from Interest Income, Fee and Commissions
Pembayaran Bunga	(967,549)	(861,473)	(106,076)	12,31%	Payments of Interest Expense
Pembayaran Beban Tenaga Kerja	(735,821)	(785,985)	50,164	(6,38%)	Payments of Employee Expense
Pembayaran Beban Umum dan Adminitrasi	(335,378)	(297,711)	(37,667)	12,65%	Payments of General and Administrative Expense
Penerimaan dari Pendapatan Operasional dan Non Operasional Lainnya	224,164	177,340	46,824	26,40%	Receipts from Other Operating Income and Other Non-Operating Income
Pembayaran Beban Non Operasional	(41,081)	(10,804)	(30,277)	280,25%	Non Operating Expense Paid



(Disajikan dalam jutaan Rupiah)/(Expressed in millions of Rupiah)

	2024	2023	Perubahan Change		
			Nominal	%	
Arus Kas Sebelum Perubahan pada Aset dan Liabilitas Operasi	1,469,761	1,322,009	147,752	11,18%	Cash Flows Before Changes to Operating Assets and Liabilities
(Kenaikan)/Penurunan dalam Aset Operasi					(Increase)/Decrease in Operating Assets
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	28,800	(9,105)	37,905	(416,31%)	Placements with Bank Indonesia and other Banks
Efek-Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	3,965,878	1,289,300	2,676,577	207,60%	Marketable Securities Purchased Under Resale Agreement
Pinjaman yang Diberikan	(1,797,174)	(1,309,647)	(487,527)	37,23%	Loans
Aset Lain-lain	6,502	(19,687)	26,188	(133,03%)	Other Assets
Kenaikan/(Penurunan) Liabilitas Operasi					(Increase)/Decrease In Operating Liabilities
Liabilitas Segera	(28,715)	(93,464)	64,748	(69,28%	Liabilities Due Immediately
Simpanan Nasabah	4,219,374	1,495,421	2,723,953	182,15%	Deposits from Customers
Simpanan dari Bank Lain	(888,890)	436,685	(1,325,575)	(303,55%)	Deposits from Other Banks
Liabilitas Lain-lain	(20,548)	169,043	(189,591)	(112,16%)	Other Liabilities
Utang Pajak	(51,713)	65,699	(117,412)	(178,71%)	Taxes Payable
Pembayaran Pajak Penghasilan	(340,267)	(345,636)	5,370	(1,55%)	Payment of Income Tax
Penerimaan Pengembalian Pajak	57,677	-	57,677		Tax Refund
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	6,620,683	3,000,617	3,620,066	120,64%	Net Cash Provided by Operating Activities

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi mengalami kenaikan tajam sebesar 226,05% yoy menjadi Rp5,45 triliun pada tahun 2024, Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh pembelian efek-efek yang meningkat signifikan sebesar 237,94% yoy menjadi Rp5,40 triliun,

Cash Flows from Investing Activities

Net cash used in investing activities increased sharply by 226.05% yoy to reach Rp 5.45 trillion in 2024. This increase was mainly influenced by the purchase of securities which showed a significant increase of 237.94% yoy to Rp5.40 trillion in 2024.

(Disajikan dalam jutaan Rupiah)/(Expressed in millions of Rupiah)

	2024	2023	Perubahan Change		
			Nominal	%	
Pembelian Efek-efek	(5,404,041)	(1,599,125)	(3,804,916)	237,94%	Acquisition from Marketable Securities
Penyertaan Saham	-	799	(799)	(100,00%)	Proceeds from Investment in Shares
Pembelian Aset Tetap	(35,677)	(49,430)	13,753	(27,82%)	Acquisitions of Fixed Assets
Penjualan Aset Tetap	-	247	(247)	(100,00%)	Proceeds from Sale of Fixed Assests
Pembelian Aset Takberwujud	(3,991)	(6,137)	2,146	(34,96%)	Acquisitions of Intangible Assests
Pembayaran Aset Hak Guna	(5,814)	(17,722)	11,907	(67,19%)	Payment of Right-of-Use Assets
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(5,449,524)	(1,671,367)	(3,778,157)	226,05%	Net Cash Used in Investing Activities

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan mengalami penurunan sebesar 27,79% yoy menjadi Rp239,05 miliar. Penurunan ini terutam disebabkan oleh penambahan setoran modal yang naik signifikan sebesar 218,52% yoy menjadi Rp356,92 miliar,

Cash Flows from Financing Activities

Net cash used in financing activities fell 27.79% yoy to Rp239.05 billion. This decrease was mainly due to the proceeds from issuance of share capital which rose significantly by 218.52% yoy to Rp356.92 billion.

(Disajikan dalam jutaan Rupiah)/(Expressed in millions of Rupiah)

	2024	2023	Perubahan Change		
			Nominal	%	
Penambahan Setoran Modal	356,920	112,057	244,863	218,52%	Proceeds from Issuance of Share Capital
Penerimaan Pinjaman yang Diterima	-	10,000	(10,000)	(100,00%)	Receipt of Borrowings
Pembayaran Pinjaman yang Diterima	(42,297)	(486)	(41,811)	8603,08%	Payments of Borrowings
Pembayaran Dividen	(553,671)	(452,637)	(101,034)	22,32%	Dividend Paid
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(239,048)	(331,066)	92,018	(27,79%)	Net Cash Used in Financing Activities

Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun

Bank BPD Bali berhasil membukukan kas dan setara kas pada akhir tahun 2024 sebesar Rp6,47 triliun dengan pertumbuhan sebesar 16,84% yoy. Capaian ini terutama didukung oleh peningkatan kas dan setara kas pada awal tahun 2024 sebesar 22,01% yoy menjadi Rp5,53 triliun,

Cash and Cash Equivalents at the Year

Bank BPD Bali managed to record cash and cash equivalents at end of the year 2024 amounting to Rp6.47 trillion. growing by 16.84% yoy. This performance was mainly supported by increasing cash and cash equivalents by 22.01% yoy to Rp5.53 trillion at the beginning of 2024.

(Disajikan dalam jutaan Rupiah)/(Expressed in millions of Rupiah)

	2024	2023	Perubahan Change		
			Nominal	%	
Kenaikan Bersih Kas dan Stara Kas	932,111	998,184	(66,073)	(6,62%)	Net Increase Cash and Cash Equivalents
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun	5,533,557	4,535,373	998,184	22,01%	Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun	6,465,668	5,533,557	932,111	16,84%	Cash and Cash Equivalents at End of the Year



RASIO KEUANGAN

Financial Ratio

Selain mengacu kepada penjelasan tentang laporan keuangan auditan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, capaian kinerja Bank BPD Bali pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya juga disajikan melalui beragam rasio keuangan sebagai berikut:

In addition to the explanations of the audited financial statements above, the year-on-year performance of Bank BPD Bali is also presented through various financial ratios as follows:

	2024	2023	
Modal			Capital
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	27,45%	25,38%	Capital Adequacy Ratio (CAR)
KPMM Sesuai Profil Risiko	9,21%	9,21%	CAR by Risk Profile
KPMM Modal Inti	26,29%	24,22%	Tier 1 ratio
KPMM Modal Pelengkap	1,16%	1,17%	Tier 2 ratio
CET 1	26,29%	24,22%	CET 1 ratio
Aset Produktif			Earning Assets
Aset Produktif Bermasalah dan Aset Non-Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif dan Aset Non-Produktif	0,58%	0,83%	Non-Performing Earning Assets and Non-Productive Assets to Total Earnings and Non Productive Assets
Aset Produktif Bermasalah terhadap Total Aktiva Produktif	0,58%	0,83%	Non-Performing Earning Assets to Total productive Assets
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan Terhadap Aset Produktif	3,65%	3,85%	Allowance for Impairment Losses for Financial Assets to Productive Assets
Rasio Kredit Bermasalah (NPL) – Bruto	0,92%	1,29%	Non-Performing Loans (NPL) to Total Loans - Gross
Rasio Kredit Bermasalah (NPL) – Bersih	0,02%	0,02%	Non-Performing Loans (NPL) to Total Loans - Nett
Rentabilitas			Rentability
Imbal Hasil Aktiva (ROA)	3,20%	3,24%	Return On (ROA)
Imbal Hasil Ekuitas (ROE)	21,68%	20,23%	Return On Equity (ROE)
Marjin Bunga Bersih (NIM)	6,66%	7,16%	Net Interest Margin (NIM)
Beban Operasional terhadap Penghasilan Operasional (BOPO)	66,85%	67,32%	Operating Expense to Operating Income (BOPO)
Cost to Income Ratio (CIR)	49,39%	42,61%	Cost to Income Ratio (CIR)
Likuiditas			Liquidity
Loan to Deposit Ratio (LDR)	70,95%	75,65%	1. Loan to Deposit ratio (LDR)
Liquidity Coverage Ratio (LCR)	751,07%	660,75%	Liquidity Coverage Ratio (LCR)
Pendanaan			
Dana Murah	70,80%	71,48%	Current Account Saving Account (CASA)
Net Stable Funding Ratio (NSFR)	140,99%	137,31%	Net Stable Funding Ratio (NSFR)

	2024	2023	
Kepatuhan			Compliance
a. Presentase Pelanggaran BMPK	-	-	a. Percentage of Violation of Legal Lending Limit
a.1. Pihak Terkait	-	-	a.1. Related Parties
a.2. Pihak Tidak Terkait	-	-	a.2. Third Parties
b. Presentase Pelampauan BMPK	-	-	b. Percentage of Excess of Legal Lending Limit
b.1. Pihak Terkait	-	-	b.1. Related Parties
b.2. Pihak Tidak Terkait	-	-	b.2. Third Parties
GWM Utama Rupiah			GWM Primary Rupiah
Harian	0,00%	0,00%	Daily
Rata-Rata	5,29%	6,46%	Average
GWM Valuta Asing	21,22%	28,08%	GWM Foreign Currency
Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan	0,61%	0,48%	Net Open Position



SUKU BUNGA DASAR KREDIT

Prime Lending Rate

Bank BPD Bali berkomitmen terhadap publikasi penyajian Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) sebagaimana diamanatkan dalam POJK No.13 Tahun 2024 tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Kredit bagi Bank Umum Konvensional. Bank BPD Bali menyajikan SBDK sebagai indikasi suku bunga efektif terendah yang mencerminkan Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK), *overhead cost*, dan *margin*, untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penetapan suku bunga kredit. Tabel berikut menjelaskan SBDK Bank BPD Bali dengan berpedoman pada POJK Publikasi Suku Bunga Kredit bagi Bank Umum Konvensional yang mulai berlaku tanggal 12 Agustus dan disajikan dengan format terbaru pada awal bulan Oktober 2024.

In accordance with POJK No. 13 of 2024 on Transparency and Publication of Credit Interest Rates for Conventional Commercial Banks, Bank BPD Bali is committed to publish the presentation of the Standardized Bank Rate (SBDK). Bank BPD Bali presents SBDK as an indication of the lowest effective interest rate that reflects the cost of funds for credit (HPDK), overheads and margins, which is the reference for the determination of credit interest rates. The following table explains Bank BPD Bali's SBDK in relation to POJK's published credit interest rates for conventional commercial banks, which came into effect on August 12 and will be presented in the latest format in early October 2024.

Berlaku 4 Desember 2024
Effective December 4, 2024

Pengungkapan Secara Kuantitatif *Quantitative Disclosure*

Periode Data Oktober 2024 <i>Data Period October 2024</i>	Suku Bunga Dasar Kredit <i>Prime Lending Rate</i>						
	Berdasarkan Jenis <i>Based on Type of Loan</i>						
	Kredit Non UMKM <i>Non MSME Loan</i>		Kredit UMKM <i>MSME Loan</i>			KPR <i>Mortgage</i>	Non KPR <i>Non-Mortgage</i>
	Korporasi <i>Corporate</i>	Ritel <i>Retail</i>	Menengah <i>Middle</i>	Kecil <i>Small</i>	Mikro <i>Micro</i>		
Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) (%) <i>Cost of Fund Credit</i>	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94
Biaya <i>Overhead</i> (%) <i>Overhead Cost</i>	0,27	0,40	2,12	2,12	2,09	0,06	5,40
<i>Margin</i> Keuntungan (%) <i>Profit Margin</i>	3,63	4,03	3,86	4,36	4,86	4,79	1,04
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (%) (HPDK + <i>Overhead</i> + <i>Margin</i>) <i>Prime Lending Rate (HPDK + Overhead + Margin)</i>	6,84	7,38	8,92	9,42	9,92	7,79	9,38

Pengungkapan Secara Kuantitatif *Qualitative Disclosure*

Kategori <i>Category</i>	Definisi Kategori Kredit <i>Definition of Loan Category</i>	Indikator/Kriteria dari Kategori Kredit <i>Indicators/Criteria of Loan Category</i>
Korporasi <i>Corporate</i>	KMK dan KI Non UMKM dan Non Ritel yang kriterianya sesuai dengan kebijakan BUK. <i>KMK and KI Non-UMKM and Non-Retail whose criteria are in accordance with BUK policy.</i>	1. Termasuk dalam kredit produktif Non UMKM. 2. KMK dan KI Non UMKM dengan Plafond diatas Rp25 Miliar <i>1. Included in non-UMKM productive loans. 2. KMK and KI Non-UMKM with a ceiling above Rp25 billion.</i>
Ritel <i>Retail</i>	KMK dan KI Non UMKM dan Non Korporasi yang kriterianya sesuai dengan kebijakan BUK. <i>KMK and KI Non-UMKM and Non-Retail whose criteria are in accordance with BUK policy.</i>	1. Termasuk dalam kredit produktif Non UMKM. 2. KMK dan KI Non UMKM dengan Plafond diatas Rp25 Miliar <i>1. Included in non-UMKM productive loans. 2. KMK and KI Non-UMKM with a ceiling above Rp25 billion.</i>

Berlaku 7 November 2024 Effective November 7, 2024							
Pengungkapan Secara Kuantitatif Quantitative Disclosure							
Periode Data September 2024 Data Period September 2024	Suku Bunga Dasar Kredit Prime Lending Rate						
	Berdasarkan Jenis Based on Type of Loan						
	Kredit Non UMKM Non MSME Loan		Kredit UMKM MSME Loan			KPR Mortgage	Non KPR Non-Mortgage
	Korporasi Corporate	Ritel Retail	Menengah Middle	Kecil Small	Mikro Micro		
Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) (%) Cost of Fund Credit	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11
Biaya Overhead (%) Overhead Cost	0,26	0,39	2,09	2,09	2,09	0,06	5,34
Margin Keuntungan (%) Profit Margin	3,63	4,03	3,86	4,36	4,86	4,79	1,04
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (%) (HPDK + Overhead + Margin) Prime Lending Rate (HPDK + Overhead + Margin)	7,00	7,53	9,05	9,55	10,05	7,95	9,49

Pengungkapan Secara Kuantitatif Qualitative Disclosure		
Kategori Category	Definisi Kategori Kredit Definition of Loan Category	Indikator/Kriteria dari Kategori Kredit Indicators/Criteria of Loan Category
Korporasi Corporate	KMK dan KI Non UMKM dan Non Ritel yang kriterianya sesuai dengan kebijakan BUK. KMK and KI Non-UMKM and Non-Retail whose criteria are in accordance with BUK policy.	1. Termasuk dalam kredit produktif Non UMKM. 2. KMK dan KI Non UMKM dengan Plafond diatas Rp25 Miliar 1. Included in non-UMKM productive loans. 2. KMK and KI Non-UMKM with a ceiling above Rp25 billion.
Ritel Retail	KMK dan KI Non UMKM dan Non Korporasi yang kriterianya sesuai dengan kebijakan BUK. KMK and KI Non-UMKM and Non-Retail whose criteria are in accordance with BUK policy.	1. Termasuk dalam kredit produktif Non UMKM. 2. KMK dan KI Non UMKM dengan Plafond diatas Rp25 Miliar 1. Included in non-UMKM productive loans. 2. KMK and KI Non-UMKM with a ceiling above Rp25 billion.

Berlaku 1 Oktober 2024
Effective October 1, 2024Pengungkapan Secara Kuantitatif
Quantitative Disclosure

Periode Data Agustus 2024 Data Period August 2024	Suku Bunga Dasar Kredit Prime Lending Rate						
	Berdasarkan Jenis Based on Type of Loan						
	Kredit Non UMKM Non MSME Loan		Kredit UMKM MSME Loan			KPR Mortgage	Non KPR Non-Mortgage
	Korporasi Corporate	Ritel Retail	Menengah Middle	Kecil Small	Mikro Micro		
Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) (%) Cost of Fund Credit	2,68	2,68	N/A	N/A	2,68	2,68	2,68
Biaya Overhead (%) Overhead Cost	1,71	4,46	N/A	N/A	4,30	0,36	2,73
Margin Keuntungan (%) Profit Margin	3,13	3,13	N/A	N/A	3,13	3,13	3,13
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (%) (HPDK + Overhead + Margin) Prime Lending Rate (HPDK + Overhead + Margin)	7,52	10,27	N/A	N/A	10,11	6,17	8,54

Pengungkapan Secara Kuantitatif
Qualitative Disclosure

Kategori Category	Definisi Kategori Kredit Definition of Loan Category	Indikator/Kriteria dari Kategori Kredit Indicators/Criteria of Loan Category
Korporasi Corporate	KMK dan KI Non UMKM dan Non Ritel yang kriterianya sesuai dengan kebijakan BUK. KMK and KI Non-UMKM and Non-Retail whose criteria are in accordance with BUK policy.	1. Termasuk dalam kredit produktif Non UMKM. 2. KMK dan KI Non UMKM dengan Plafond diatas Rp25 Miliar 1. Included in non-UMKM productive loans. 2. KMK and KI Non-UMKM with a ceiling above Rp25 billion.
Ritel Retail	KMK dan KI Non UMKM dan Non Korporasi yang kriterianya sesuai dengan kebijakan BUK. KMK and KI Non-UMKM and Non-Retail whose criteria are in accordance with BUK policy.	1. Termasuk dalam kredit produktif Non UMKM. 2. KMK dan KI Non UMKM dengan Plafond diatas Rp25 Miliar 1. Included in non-UMKM productive loans. 2. KMK and KI Non-UMKM with a ceiling above Rp25 billion.

Keterangan:

- Informasi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) terlampir merujuk Peraturan OJK No. 13 Tahun 2024 dengan menggunakan basis data laporan Oktober 2024 sudah mempertimbangkan perkembangan suku bunga pasar. SBDK dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu.
- SBDK ditentukan Bank berdasarkan berbagai faktor yaitu suku bunga acuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, harga pokok dana untuk kredit (*cost of fund*), biaya *overhead*, *margin* keuntungan, dan perkembangan kondisi ekonomi.
- SBDK belum memperhitungkan komponen estimasi premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian Bank terhadap risiko untuk masing-masing debitur atau kelompok debitur.
- Informasi SBDK yang berlaku setiap saat dapat dilihat pada publikasi di setiap kantor Bank dan/atau *website* Bank.

Description:

- The attached information on the Base Credit Rate (BCR) refers to the OJK Regulation No. 13 of 2024 using the October 2024 report database, which has taken into account the market interest rate development. SBDK is subject to change at any time.
- SBDK is determined by the Bank on the basis of various factors, namely, the reference interest rate set by the competent authority, the cost of funds for lending (*cost of funds*), overheads, profit margins and developments in economic conditions.
- The SBDK does not take into account the estimated risk premium component, the amount of which depends on the Bank's assessment of the risk for each borrower or group of borrowers.
- The current version of the SBDK may be consulted in the publications available at the Bank's branches and/or on the Bank's website.

KOMITMEN DAN KONTIJENSI

Commitments and Contingencies

Bank BPD Bali melaporkan komitmen dan kontijensi sebagaimana yang disajikan pada laporan keuangan publikasi auditan tahun 2024 sebagai berikut:

Bank BPD Bali reports the following commitments and contingent liabilities as presented in the audited published financial statements 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah)/(Expressed in millions of Rupiah)			
No	Pos-Pos Accounts	31 Des 2024 Dec 31, 2024	31 Des 2023 Dec 31, 2023
I	Tagihan Komitmen Commitments Receivables		
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik <i>Undisbursed borrowings/financing facilities</i>	-	-
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi <i>spot</i> dan derivatif/ <i>forward</i> <i>Outstanding of foreign currency from spot and derivatives/forward (purchased)</i>	-	-
3.	Lainnya <i>Others</i>	-	-
II	Kewajiban Komitmen Commitment Payables	386.982	537.270
1.	Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik <i>Unused loan/financing facilities to debtors</i>	386.982	537.270
a.	<i>Committed</i>	-	-
b.	<i>Uncommitted</i>	386.982	537.270
2.	<i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan <i>Outstanding irrevocable L/C</i>	-	-
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi <i>spot</i> dan derivatif/ <i>forward</i> <i>Outstanding of foreign currency from spot and derivatives/forward (sold)</i>	-	-
4.	Lainnya <i>Others</i>	-	-
III	Tagihan Kontinjensi Contigent Receivables	636.325	613.520
1.	Garansi yang diterima <i>Guarantees received</i>	-	-
2.	Lainnya <i>Others</i>	636.325	613.520
IV	Kewajiban Kontinjensi Contingency Payables	104.919	177.581
1.	Garansi yang diberikan <i>Guarantees issued</i>	104.919	177.581
2.	Lainnya <i>Others</i>	-	-



TRANSAKSI SPOT DAN DERIVATIF

Spot and Derivative Transactions

Bank BPD Bali tidak membukukan transaksi *spot* dan derivatif baik yang terkait dengan nilai tukar dan suku bunga untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:

Bank BPD Bali has not recorded any spot and derivative transactions related to foreign exchange rates and interest rates for the periods ended December 31, 2024 and December 31, 2023 as shown in the table below:

Transaksi Transactions	Bank				
	Nilai Notional Notional Amount	Jenis Type		Tagihan dan Kewajiban Receivables and Payables	
		Trading	Hedging	Tagihan Receivables	Kewajiban Payables
A. Terkait dengan nilai tukar Exchange Rate Related					
1. Spot	-	-	-	-	-
2. Forward	-	-	-	-	-
3. Option	-	-	-	-	-
a. Jual - Sell	-	-	-	-	-
b. Beli - Buy	-	-	-	-	-
4. Future	-	-	-	-	-
5. Swap	-	-	-	-	-
6. Lainnya - Others	-	-	-	-	-
B. Terkait dengan suku bunga Interest Rate Related					
1. Spot	-	-	-	-	-
2. Forward	-	-	-	-	-
3. Option	-	-	-	-	-
a. Jual - Sell	-	-	-	-	-
b. Beli - Buy	-	-	-	-	-
4. Future	-	-	-	-	-
5. Swap	-	-	-	-	-
6. Lainnya - Others	-	-	-	-	-
C. Lainnya Others					
JUMLAH - TOTAL	-	-	-	-	-

INFORMASI KEUANGAN MATERIAL LAINNYA

Other Material Financial Information

Kemampuan Membayar Utang

Ability to Pay Debts

Kemampuan untuk memenuhi kewajiban dalam jangka panjang dan jangka pendek Bank BPD Bali dilakukan melalui perhitungan beberapa rasio, antara lain rasio likuiditas, rasio permodalan, dan rasio rentabilitas. Selain itu, kemampuan membayar utang juga diperkuat dari keikutsertaan Bank sebagai peserta program penjaminan pada Lembaga Penjaminan

The ability of Bank BPD Bali to meet its long term and short-term obligations is carried out through the calculation of a number of ratios, including the liquidity ratio, the capital ratio and the profitability ratio. The ability to pay debts is also strengthened by the Bank's participation in the Deposit Insurance Corporation's guaranteed program. The ability

Simpanan. Kemampuan membayar utang Bank BPD Bali juga terefleksi dari peringkat *General Obligation* idA+ dengan prospek stabil yang ditetapkan oleh Pefindo kepada Bank BPD Bali.

Mengacu kepada penyajian rasio keuangan Bank BPD Bali, tingkat likuiditas dan permodalan Bank BPD Bali masih terjaga dengan baik. Hal ini diperkuat dengan kemampuan Bank BPD Bali dalam memenuhi seluruh kewajiban jatuh tempo secara tepat waktu, baik terhadap pembayaran pokok utang ataupun beban bunganya.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek

Bank BPD Bali menggunakan parameter yang ditetapkan oleh OJK untuk mengukur kemampuan likuiditas dengan menggunakan rasio *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) yang dimonitor dan dilaporkan kepada manajemen secara berkala. LCR, sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/POJK.03/2015 tentang kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas bagi bank umum, adalah perbandingan antara *High Quality Liquid Asset* (HQLA) dengan total arus kas keluar bersih (*net cash outflow*) selama 30 (tiga puluh) hari kedepan dalam skenario *stres*. Rasio ini menggambarkan kecukupan Bank dalam memenuhi arus keluar setelah memperhitungkan suatu asumsi rasio keluar yang ditetapkan oleh *regulator* setelah dikurangi arus masuk dengan diskon tertentu dalam jangka waktu 30 hari dengan Alat Likuid (HQLA) yang dikelola.

Bank BPD Bali mampu memenuhi ketentuan OJK yang mewajibkan perbankan untuk menjaga batasan minimal 100% untuk LCR ini yang artinya Alat Likuid (HQLA) yang dimiliki dapat menutupi arus keluar bersih dalam kurun waktu 30 hari ke depan. Rasio LCR Bank masing-masing sebesar 751,07% dan 867,08% untuk tahun 2024 dan 2023.

Sementara itu, sebagaimana diatur dalam POJK No. 50/POJK.03/2017 tentang kewajiban pemenuhan rasio pendanaan stabil bersih bagi bank umum, Bank mengukur keseimbangan antara Aktiva dan Pasiva (termasuk Modal) dengan suatu rasio tertentu berdasarkan jangka waktu ataupun karakteristik dari masing-masing komponen baik di Aktiva maupun di Pasiva. Sebagaimana LCR, batasan minimal yang harus dipenuhi adalah 100% atau terdapat kesesuaian antara sumber dana dengan penyaluran dana. Bank BPD Bali melaporkan rasio NSFR sebesar 140,99% untuk tahun 2024 dan 137,31% untuk tahun 2023.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang

Bank BPD Bali memastikan bahwa permodalan yang dimiliki mampu memenuhi ketentuan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum KPMM yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Berdasarkan data tabel rasio sebelumnya, Bank BPD Bali mencatatkan rasio KPMM sebesar 27,45% dan 25,38% untuk tahun 2024 dan 2023. Capaian ini jauh lebih tinggi dibandingkan rasio KPMM sesuai profil risiko sebesar 9,21% untuk tahun 2024 dan 2023. Rasio KPMM Bank tahun 2024 tersebut juga lebih tinggi dibandingkan rata-rata industri sebesar 26,69%.

Perhitungan rasio keuangan lainnya dapat dilihat pada tabel rasio keuangan yang telah disajikan sebelumnya.

of Bank BPD Bali to pay its debts is also reflected in the General Obligation idA+ rating with a stable outlook that has been assigned to Bank BPD Bali by Pefindo.

With reference to the presentation of the financial ratios of Bank BPD Bali, the level of liquidity and capital of Bank BPD Bali continues to be well maintained. This is supported by Bank BPD Bali's ability to meet all maturing obligations on time, both for principal payments and interest expenses.

Short-Term Debt Repayment Capability

Bank BPD Bali uses the parameters set by the OJK to measure the liquidity adequacy through the Liquidity Coverage Ratio (LCR) and the Net Stable Funding Ratio (NSFR), which are monitored and reported to the management on a regular basis. The LCR, in accordance with POJK No. 42/POJK.03/2015 on the obligation to meet the liquidity coverage ratio for commercial banks, is a comparison between high quality liquid assets (HQLA) and the total net cash outflow for the next 30 (thirty) days in a stress scenario. This ratio illustrates the adequacy of the bank in meeting the outflows after taking into account the assumption of an outflow ratio set by the regulator after deducting the inflows with a certain discount within a period of 30 days with the High-Quality Liquid Assets (HQLA) under management.

Bank BPD Bali is able to comply with the OJK regulations which require banks to maintain a minimum limit of 100% for this LCR, which means that the liquid assets (HQLA) held can cover net outflows within the next 30 days. The bank's LCR ratios for 2024 and 2023 are 751.07% and 867.08% respectively.

Meanwhile, in accordance with POJK No. 50/POJK.03/2017 on the obligation to meet the net stable funding ratio for commercial banks, the Bank measures the balance between assets and liabilities (including capital) with a certain ratio based on the period or characteristics of each component, both in assets and liabilities. As with the LCR, the minimum limit that must be met is 100%, or there must be a match between the source of the funds and the distribution of the funds. Bank BPD Bali reported NSFR ratios of 140.99% and 137.31% for 2024 and 2023.

Ability to Pay Long-Term Debt

Bank BPD Bali ensures that its capital can meet the requirements of the Capital Adequacy Ratio (CAR), which includes credit risk, market risk and operational risk. Based on the previous financial ratio table data, Bank BPD Bali recorded a CAR ratio of 27.45% and 25.38% for 2024 and 2023, respectively. This performance is much higher than the risk profile CAR ratio of 9.21% for 2024 and 2023. The bank's KPMM ratio in 2024 is also above the industry average of 26.69%.

Please refer to the Financial Ratios table presented above for other financial ratio calculations.



Tingkat Kolektibilitas Kredit dan Analisis Kualitas Aset Produktif

Credit Collectibility Level and Productive Asset Quality Analysis

Dalam mengelola risiko kredit, Bank BPD Bali telah memiliki kerangka kerja yang lengkap, yang memuat panduan-panduan mengenai proses perencanaan dan implementasi serta melakukan penyempurnaan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) terus dilakukan sejalan dengan pedoman Bank Indonesia. fokus penyempurnaan adalah melakukan pemisahan proses keputusan kredit per masing-masing segmen debitur. Hal ini didukung pula oleh kajian berkala dari panduan-panduan tersebut, guna mencapai perbaikan yang berkesinambungan.

Sesuai dengan karakteristiknya, kredit yang ada di Bank saat ini terbagi dalam kredit produktif dan kredit konsumtif. Untuk mengelola risikonya, Bank mengukur risiko kredit dari portofolio yang ada baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Hal ini untuk memastikan kemungkinan kerugian dari tidak dibayarnya pinjaman yang diberikan menjadi seminimal mungkin, baik untuk debitur individual maupun secara keseluruhan.

Dalam rangka menerapkan prinsip pemberian kredit yang sehat, Bank menerapkan prinsip *Four Eyes* (pengambilan keputusan kredit yang dilakukan oleh dua orang atau lebih) pada setiap Kantor Cabang dengan penggunaan *Credit Scoring* dan *Credit Reviewer*.

Penerapan atas beragam kebijakan perkreditan tersebut mampu menghasilkan kualitas aset produktif yang lebih baik dengan capaian rasio NPL - bruto sebesar 0,92%; rasio NPL – neto sebesar 0,02%; dan rasio kualitas aset produktif sebesar 0.58% pada tahun 2024. Capaian ketiga rasio tersebut lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya masing-masing sebesar 1,29%; 0,02%; dan 0,83%. Rasio kualitas aset produktif merupakan rasio aset yang diklasifikasikan sebagai *non performing* dibandingkan dengan jumlah aset produktif.

Tabel berikut ini menjelaskan rincian pinjaman yang diberikan berdasarkan kualitas kredit untuk tahun 2024 dan 2023. Pinjaman yang berstatus *non performing* hanya sebesar 0,92% pada tahun 2024, lebih baik dibandingkan sebesar 1,29% pada tahun sebelumnya.

To manage credit risk, Bank BPD Bali has had a complete framework, which includes guidelines on planning and implementation process and continuously improve the Standard Operating Procedures (SOP) to be in line with the guidelines of Bank Indonesia. improvement focus is to conduct the separation process of decision loan for each segment. This is supported by periodic reviews of these policies to ensure continuous improvement.

In accordance with the loan characteristics, the Bank's loans are classified into productive loans and consumer loans. In order to manage the risk, the Bank measures credit risk arising from the existing portfolios quantitatively and qualitatively to ensure that the potential losses from default loans are minimized, both for individual borrowers and the overall portfolio.

To implement a healthy credit granting process, the Bank applies the Four Eyes Principle (credit decision-making by two people or more) at each branch office by using Credit Scoring and Credit Reviewer.

The implementation of various credit policies has resulted in improving the quality of productive assets by achieving a gross NPL ratio of 0.92%, a net NPL ratio of 0.02%, and a productive asset quality ratio of 0.58% in 2024. Achieving the three ratios is better than that achieved in the previous year, which was 1.29%, 0.02% and 0.83%, respectively. Earnings asset quality ratio is the ratio of assets classified as earning assets which classified - non performing to total earning assets.

The following table provides details of loans disbursed by credit quality for 2024 and 2023. Loans with non-performing status are only 0.92% in 2024. This is better than 1.29% in the previous year.

(Disajikan dalam jutaan Rupiah)/(Expressed in millions of Rupiah)

Kualitas	%	Portofolio Pinjaman yang diberikan <i>Loans Portfolio</i>	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai <i>Allowance for Impairment</i>	Quality
		Jumlah Pinjaman yang diberikan <i>Total Loans</i>	Jumlah Total	
Lancar	98.10%	22.395.257	940.707	<i>Current</i>
Dalam Perhatian Khusus	0.98%	224.852	159.331	<i>Special Mention</i>
Kurang Lancar	0.06%	14.638	9.622	<i>Substandard</i>
Diragukan	0.10%	21.976	21.976	<i>Doubtful</i>
Macet	0.76%	173.446	173.446	<i>Loss</i>
Jumlah	100.00%	22.830.169	1.305.082	Total

(Disajikan dalam jutaan Rupiah)/(Expressed in millions of Rupiah)

Kualitas	%	Portofolio Pinjaman yang diberikan Loans Portfolio	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Allowance for Impairment	Quality
		Jumlah Pinjaman yang diberikan Total Loans	Jumlah Total	
Lancar	98.26%	20.782.707	936.924	Current
Dalam Perhatian Khusus	0.45%	96.063	28.710	Special Mention
Kurang Lancar	0.06%	13.077	8.159	Substandard
Diragukan	0.08%	17.078	17.078	Doubtful
Macet	1.14%	241.657	241.657	Loss
Jumlah	100.00%	21.150.581	1.232.527	Total

PERJANJIAN SIGNIFIKAN

Significant Agreements

Bank BPD Bali melaporkan perjanjian yang signifikan dengan pihak ketiga dalam menjalankan kegiatan usahanya pada tahun 2024. Pada tanggal 1 Januari 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan LPD Desa Adat Beng terkait Sinergitas Sistem Pembayaran Menggunakan Layanan E-Link dan Akuisisi Merchant.

Bank BPD Bali has significant agreements with third parties in the conduct of its business activities for the period up to 2024. On January 1, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD Desa Adat Beng regarding the Synergy of Payment Systems Using E-Link Services and Merchant Acquisition.

Terdapat beragam perjanjian signifikan lainnya yang dilakukan oleh Bank BPD Bali untuk periode sebelum tahun 2024 yang dapat dilihat di catatan No. 47 dari laporan keuangan auditan Bank.

There are various other significant agreements that Bank BPD Bali has entered into for the period prior to 2024, which can be seen in note No. 47 of the audited financial statements of the Bank.

STRUKTUR PERMODALAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Capital Structure and Management Policy on Capital Structure

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Capital Structure Management Policy

Kebijakan Bank BPD Bali terkait pengelolaan modal adalah secara aktif memperkuat dan meningkatkan permodalan Bank secara berkelanjutan dengan penambahan modal yang disetor dari pemegang saham dan peningkatan pemupukan modal dari penyisihan laba yang ditempatkan dalam cadangan umum. Bank BPD Bali juga melakukan review kecukupan modal terhadap perkembangan usaha Bank.

Bank BPD Bali's capital management policy is to actively strengthen and sustainably increase the bank's capital through the addition of capital paid in by shareholders and the increase of capital accumulation from profit allocations placed in general reserves. Bank BPD Bali also conducts a review of capital adequacy for the bank's business development.

Kebijakan tersebut telah ditetapkan dalam target jangka pendek atau Rencana Bisnis Bank yang disusun setiap tahun dan target jangka

The policy has been set out in the short-term target or business plan of the Bank, which is prepared on an annual basis and the medium-term



menengah dalam 3 (tiga) tahun ke depan. Tujuan manajemen permodalan Bank adalah untuk mempertahankan posisi modal yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan mempertahankan investor, deposan, pelanggan dan kepercayaan pasar,

target in the next 3 (three) years. The Bank's capital management is aimed at maintaining a strong capital position to support the Bank's growing business and to maintain the confidence of investors, depositors, customers and the market.

Dasar Penetapan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Basis for Establishing Management Policy on Capital Structure

Bank BPD Bali dalam pengelolaan permodalan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh *regulator* (OJK). Salah satu ketentuan dari POJK No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum menetapkan bahwa Bank milik pemerintah daerah wajib memenuhi modal inti paling sedikit Rp3,00 triliun paling lambat tanggal 31 Desember 2024. Bank BPD Bali telah memenuhi ketentuan ini dengan modal inti mencapai Rp4,53 triliun per 31 Desember 2024 dan senilai Rp3,88 triliun per 31 Desember 2023.

Bank BPD Bali is guided by the regulations set by the regulatory body (OJK) in the management of its capital. One of the provisions is POJK No. 12/POJK.03/2020 on the Consolidation of Commercial Banks, which stipulates that banks owned by regional governments are required to meet a minimum core capital of Rp3.00 trillion no later than December 31, 2024. Bank BPD Bali is in compliance with this provision with a core capital of Rp4.53 trillion as of December 31, 2024 and a value of Rp3.88 trillion as of December 31, 2023.

Bank BPD Bali mengatur struktur modal dan membuat penyesuaian atas perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko kegiatannya. Dalam pengelolaan permodalan, Bank mempertimbangkan faktor-faktor, seperti: pengembalian modal yang optimal pada pemegang saham, menjaga keseimbangan antara keuntungan yang lebih tinggi dengan *gearing ratio* serta keamanan yang diberikan oleh posisi modal yang sehat.

Bank BPD Bali manages and adjusts its capital structure according to changing economic conditions and risk characteristics of its activities. The bank's capital management takes into account the optimal return on capital to shareholders, maintaining a balance between higher profits and leverage ratios, and the security offered by a healthy capital base.

Struktur Modal

Capital Structure

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang berlaku sejak 2 Februari 2016 dan sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 34/POJK.03/2016 menjelaskan bahwa modal bank terdiri dari modal inti (*Tier 1*) yang meliputi modal inti utama dan modal inti tambahan dan modal pelengkap.

Financial Services Authority Regulation No. 11 / POJK.03/2016 on the minimum capital requirement of commercial banks, effective from February 2, 2016, as amended by POJK No. 34 / POJK.03/2016, explains that bank capital consists of core capital (tier 1), which includes main core capital, additional core capital and supplementary capital.

Tabel berikut ini menjelaskan struktur modal Bank BPD Bali untuk tahun 2024 dan 2023.

The capital structure of Bank BPD Bali for 2024 and 2023 is presented in the following table.

Ringkasan Struktur Permodalan Bank BPD Bali Tahun 2024 dan 2023

Bank BPD Bali Capital Structure Summary 2024 and 2023

(Disajikan dalam jutaan Rupiah)/(Expressed in millions of Rupiah)

Permodalan	2024	2023	Capital
Modal Inti (Tier 1)	4.526.744	3.876.582	Core Capital (Tier 1)
Modal Pelengkap (Tier 2)	199.618	186.628	Supplementary Capital (Tier 2)
Jumlah Modal	4.726.362	4.063.210	Total capital
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Kredit	15.945.083	14.873.123	Credit Risk - Weighted Assets
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Operasional	1.238.086	1.114.397	Operational Risk - Weighted Assets
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Pasar	36.951	19.311	Market Risk - Weighted Assets

(Disajikan dalam jutaan Rupiah)/(Expressed in millions of Rupiah)

Permodalan	2024	2023	Capital
Jumlah ATMR untuk Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Pasar	17.220.120	16.006.831	Total Risk Weighted Assets for Credit Risk, Operational Risk, and Market Risk
Dengan memperhitungkan risiko kredit tetapi tanpa memperhitungkan risiko pasar dan risiko operasional	29,64%	27,32%	Calculating the credit risk but without market risk and operational risk
Dengan memperhitungkan risiko kredit dan risiko pasar tetapi tanpa memperhitungkan risiko operasional	29,57%	27,28%	Calculating the credit risk and market risk but without operational risk
Dengan memperhitungkan risiko kredit dan risiko operasional tetapi tanpa memperhitungkan risiko pasar	27,51%	25,41%	Calculating the credit risk and operational risk but without market risk
Dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional	27,45%	25,38%	Calculating the credit risk, market risk, and operational risk
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan oleh OJK:			The minimum capital requirement ratio required by OJL
Pilar 1	8,00%	8,00%	Tier 1
Pilar 2	9,21%	9,21%	Tier 2

Tabel Pengungkapan Kuantitatif Struktur Permodalan Bank Umum

Table on the disclosure of the quantitative structure of the capital of commercial banks

(Disajikan dalam jutaan Rupiah)/(Expressed in millions of Rupiah)

Permodalan	31-Des-24	31-Des-23	Capital
	Bank	Bank	
I. Modal Inti (Tier 1)	4.526.744	3.876.582	I. Core Capital (Tier 1)
1. Modal Inti Utama CET 1	4.526.744	3.876.582	1. Common Equity Tier 1 (CET 1)
1.1 Modal disetor (setelah dikurangi Treasury Stock)	2.407.177	2.050.257	1.1 Paid-in capital (net of Treasury Stock)
1.2 Cadangan Tambahan Modal	2.323.486	1.998.691	1.2 Disclosed Reserves
1.2.1 Faktor Penambah	2.323.923	1.999.128	1.2.1 Additional Factor
1.2.1.1 Pendapatan Komprehensif Lainnya	-	-	1.2.1.1 Other comprehensive income
1.2.1.1.1 Selisih lebih penjabaran laporan keuangan	-	-	1.2.1.1.1 Excess differences arising from translation of financial statement
1.2.1.1.2 Potensi Keuntungan dari Peningkatan Nilai Wajar Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk dijual	-	-	1.2.1.1.2 Potential gain of the increase in the fair value of financial assets available for sale
1.2.1.1.3 Saldo Surplus Revaluasi Aset Tetap	-	-	1.2.1.1.3 Surplus of fixed assets revaluation
1.2.1.2 Cadangan Tambahan Modal Lainnya	2.323.923	1.999.128	1.2.1.2 Other Disclosed Reserves
1.2.1.2.1 Agio	-	-	1.2.1.2.1 Agio
1.2.1.2.2 Cadangan Umum	1.445.457	1.260.900	1.2.1.2.2 General reserves
1.2.1.2.3 Laba Tahun-Tahun Lalu	-	-	1.2.1.2.3 Previous year profit
1.2.1.2.4 Laba Tahun Berjalan	878.466	738.228	1.2.1.2.4 Current year profit
1.2.1.2.5 Dana Setoran Modal	-	-	1.2.1.2.5 Funds for paid-in capital
1.2.1.2.6 Lainnya	-	-	1.2.1.2.6 Others
1.2.2 Faktor Pengurang	437	437	1.2.2 Deduction Factor



(Disajikan dalam jutaan Rupiah)/(Expressed in millions of Rupiah)

Permodalan	31-Des-24	31-Des-23	Capital
	Bank	Bank	
1.2.2.1Pendapatan Komprehensif Lainnya	-	-	1.2.2.1Other comprehensive income
1.2.2.1.1 Selisih Kurang Penjabaran Laporan Keuangan	-	-	1.2.2.1.1 Negative differences arising from translation of financial statement
1.2.2.1.2 Potensi Kerugian dari Penurunan Nilai Wajar AsetKeuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	-	-	1.2.2.1.2 Potential losses from the decrease in the fair value of financial assets available for sale
1.2.2.2 Cadangan Tambahan Modal Lainnya	437	437	1.2.2.2Other disclosed reserves
1.2.2.2.1 Disagio	-	-	1.2.2.2.1 Disagio
1.2.2.2.2 Rugi Tahun-Tahun Lalu	-	-	1.2.2.2.2 Previous year loss
1.2.2.2.3 Rugi Tahun Berjalan	-	-	1.2.2.2.3 Current year loss
1.2.2.2.4 Selisih Kurang antara Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas Aset Produkti	-	-	1.2.2.2.4 Negative difference in allowance for possible losses and allowance for impairment on earning assets
1.2.2.2.5 Selisih Kurang Jumlah Penyesuaian Nilai Wajar dari Instrumen Keuangan dalam Trading Book	-	-	1.2.2.2.5 Negative difference in adjusment amounts from fair value of financial assets in trading book
1.2.2.2.6 PPA Aset Non Produktif yang Wajib dibentuk	437	437	1.2.2.2.6 Required allowance for non earning asset
1.2.2.2.7 Lainnya	-	-	1.2.2.2.7 Others
1.3 Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan	-	-	1.3 Non controlling interest
1.4 Faktor Pengurang Modal Inti Utama	203.919	172.366	1.4 Deduction Factor of CET 1
1.4.1 Perhitungan Pajak Tangguhan	152.159	124.597	1.4.1 Deferred tax calculation
1.4.2 Goodwill	-	-	1.4.2 Goodwill
1.4.3Aset Tidak Berwujud Lainnya	51.760	47.769	1.4.3Other intangible assets
1.4.4 Penyertaan yang Diperhitungkan sebagai Faktor Pengurang	-	-	1.4.4Investments in share
1.4.5Kekurangan Modal pada Entitas Anak asuransi	-	-	1.4.5Shortfall of capital on insurance subsidiaries
1.4.6Eksposur Sekuritisasi	-	-	1.4.6Securitisation exposure
1.4.7Faktor Pengurang Modal Inti Utama Lainnya	-	-	1.4.7 Other deduction of CET 1
1.4.7.1 Penempatan Dana pada Instrumen AT 1 dan/atau Tier 2 pada Bank Lain	-	-	1.4.7.1 Placement of funds in instrumen AT 1 and/or Tier 2 to other bank

(Disajikan dalam jutaan Rupiah)/(Expressed in millions of Rupiah)

Permodalan	31-Des-24	31-Des-23	Capital
	Bank	Bank	
1.4.7.2Kepemilikan Silang pada Entitas Lain yang diperoleh Berdasarkan Peralihan karena Hukum, Hibah, atau Hibah Wasiat	-	-	1.4.7.2Cross-ownership in another entity acquired by the transition due to law, grants, or grants will
1.4.7.3Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Settlement (Settlement Risk) - Non Delivery Versus Payment	-	-	1.4.7.3Exposures that give rise to credit risk due the settlement risk (settlement risk) - Non Delivery Versus Payment
1.4.7.4Eksposur di Perusahaan Anak yang melakukan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah (Apabila ada)	-	-	1.4.7.4Exposures in Subsidiaries that do business activity based on shariapprinciples (if available)
2. Modal Inti Tambahan	-	-	2. Additional Tier 1 (AT 1)
2.1 Instrumen yang Memenuhi Persyaratan AT 1	-	-	2.1 Instrument which comply with AT 1 requirements
2.2 Agio/Disagio	-	-	2.2 Agio/Disagio
2.3 Faktor Pengurang Modal Inti Tambahan	-	-	2.3 Deduction factor of AT 1
2.3.1 Penempatan Dana pada Instrumen AT 1 dan/atau Tier 2 pada Bank Lain	-	-	2.3.1 Placement of funds in instrument AT 1 and/or Tier 2 to other bank
2.3.2Kepemilikan Silang pada Entitas Lain yang Diperoleh berdasarkan Peralihan karena Hukum, Hibah, atau Hibah Wasi	-	-	2.3.2Cross-ownership in another entity acquired by the transition due to law, grants, or grants will
II. Modal Pelengkap (Tier 2)	199.618	186.628	II Supplemental Capital (Tier 2)
1. Instrumen Modal dalam bentuk Saham atau Lainnya yang memenuhi Persyaratan Tier 2	-	-	1. Capital Instrument in the form of Stock or others which comply with Tier 2Requirements
2. Agio/Disagio	-	-	2. Agio/Disagio
3. Cadangan Umum PPA atas Aset Produktif yang Wajib dibentuk (PalingTinggi 1.25% ATMR Risiko Kredit)	199.618	186.628	3. General provison on earning assets (max. 1.25% credit risk - weighted assets)
4. Faktor Pengurang Modal Pelengkap	-	-	4. Deduction supplemental capital
4.1 Sinking Fund	-	-	4.1 Sinking Fund
4.2 Investasi pada Instrumen Tier 2 pada Bank Lain	-	-	4.2 Placement of funds in instrument AT 1 and/or Tier 2 to other bank
4.3 Kepemilikan Silang pada Entitas Lain yang Diperoleh berdasarkan Peralihan karena Hukum, Hibah, atau Hibah Wasiat	-	-	4.3 Cross-ownership in another entity acquired by the transition due to law, grants, or grants will
III. TOTAL MODAL (I+II)	4.726.362	4.063.210	TOTAL CORE AND SUPPLEMENTAL CAPITAL



IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Material Commitments for Capital Expenditures

Bank BPD Bali tidak memiliki ikatan material untuk investasi barang modal sehingga tidak menyediakan informasi terkait tujuan dari ikatan tersebut, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut, mata uang yang menjadi denominasi, dan langkah-langkah yang direncanakan Bank untuk melindungi risiko dari posisi mata uang terkait.

Bank BPD Bali has no material capital expenditure commitments and therefore does not provide information on the purpose of the commitment, the source of funds expected to meet the commitment, the currency in which it is denominated, and the steps the bank plans to take to hedge the related currency exposure.

PROPERTI INVESTASI

Investment Property

Bank BPD Bali tidak mempunyai properti investasi yang mampu menghasilkan pendapatan sewa sehingga informasi terkait hal tersebut tidak disajikan dalam laporan tahunan ini.

Bank BPD Bali does not have any investment properties that can generate rental income. Therefore, this information is not presented in this annual report.

INVESTASI BARANG MODAL YANG DIREALISASIKAN TAHUN BUKU TERAKHIR

Capital Expenditures Realized in the Last Fiscal Year

Jenis dan Nilai Investasi Barang Modal

Type and Value of Capital Expenditure

Bank BPD Bali melakukan investasi barang modal berupa aset tetap dalam bentuk tanah, bangunan, inventaris kelompok I, dan inventaris kelompok II. Penambahan investasi yang dilakukan oleh Bank untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Bank BPD Bali invests in fixed assets such as land, constructions, stock groups I and II. Additional investments made by the bank for 2024 and 2023 are as follows:

(Disajikan dalam jutaan Rupiah)/(Expressed in millions of Rupiah)

	2024	2023	
Aset Tetap			Fixed Assets
Tanah	-	3.182	Land
Bangunan	-	118	Buildings
Inventaris kelompok I	16.139	14.275	Fixture Group I
Inventaris kelompok II	2.244	4.566	Fixture Group II
Aset dalam Penyelesaian	17.295	27.289	Construction in Progress
Subtotal – Aset Tetap	35.677	49.430	Subtotal – Fixed Assets
Aset Takberwujud			Intangible Assets
Perangkat lunak komputer	3.991	6.137	Computer Software
Subtotal – Aset Takberwujud	3.991	6.137	Subtotal – Intangible Assets
TOTAL	39.668	55.567	TOTAL

Secara kumulatif, nilai investasi barang modal Bank BPD Bali mencapai Rp39.67 miliar pada tahun 2024 atau lebih rendah dibandingkan senilai Rp55.57 miliar pada tahun sebelumnya.

The cumulative value of capital expenditure of Bank BPD Bali in 2024 is Rp39.67 billion, down from Rp55.57 billion in the previous year.

Tujuan Investasi Barang Modal

Purpose of Capital Expenditure

Bank melakukan investasi barang modal untuk membeli sejumlah aset tetap atau menambah nilai aset tetap sehingga diharapkan mampu memberikan nilai manfaat di masa depan, mendukung kegiatan operasional termasuk di dalamnya untuk peningkatan layanan perbankan digital dan ekspansi bisnis secara berkelanjutan.

Bank BPD Bali menggunakan dana internal untuk investasi barang modal tersebut dan mengutamakan pengadaan dalam mata uang Rupiah sehingga diharapkan tidak dipengaruhi oleh fluktuasi mata uang asing.

The Bank invests in capital goods to acquire a set of fixed assets or increase the value of fixed assets, which are expected to provide benefits in the future, support operational activities, including the improvement of digital banking services and sustainable business expansion.

Bank BPD Bali uses internal funds to invest in fixed assets and prioritizes purchasing in Rupiah so that it is not expected to be affected by foreign exchange fluctuations.

KEBIJAKAN DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Dividend Policy and Distribution

Kebijakan Dividen

Dividend Policy

Pembagian dividen Bank BPD Bali berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selanjutnya, ketentuan lebih lanjut tentang penggunaan laba dan pembagian dividen diatur dalam Anggaran Dasar Bank.

Berdasarkan ketentuan internal Bank BPD Bali tersebut, laba bersih Bank dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. Penggunaan laba bersih Bank dan pembagiannya ditetapkan dalam RUPS.

The distribution of dividends by Bank BPD Bali is governed by Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, which is made on the basis of the decision of the General Meeting of Shareholders (GMS). In addition, further provisions regarding the use of profits and the distribution of dividends are regulated in the Articles of Association of the Bank.

In accordance with the internal regulations of Bank BPD Bali, the net profit of the Bank in a financial year, which is positive in accordance with the balance sheet and profit and loss account that has been approved by the General Meeting of Shareholders (GMS), shall be distributed in accordance with the method of appropriation determined by the GMS. The GMS determines the appropriation and distribution of the Bank's net profit.



Kronologis Pembagian Dividen

Chronology of Dividend Distribution

Adapun kronologis pembagian dividen yang dilakukan pada tahun 2024 dan perbandingan pembagian dividen selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

The chronology of dividends paid in 2024 and a comparison of dividends paid in the last three years are as follows

	2024	2023	2022
Dasar Hukum <i>Legal Basis</i>	Akta RUPS No. 41 tanggal 23 Februari 2024 <i>Deed of AGMS No. 41 dated February 23, 2024</i>	Akta RUPS No. 47 tanggal 22 Februari 2023 <i>Deed of AGMS No. 47 dated February 22, 2023</i>	Akta RUPS No. 54 tanggal 18 Februari 2023 <i>Deed of AGMS No. 54 dated February 18, 2023</i>
Tahun Buku <i>Fiscal Year</i>	Laporan keuangan audit tahun 2023 <i>2023 Audited Financial Report</i>	Laporan keuangan audit tahun 2022 <i>2022 Audited Financial Report</i>	Laporan keuangan audit tahun 2021 <i>2021 Audited Financial Report</i>
Laba Bersih (Rp) <i>Net Profit (Rp)</i>	738.228.309.317	603.516.277.496	549.153.066.294
Dividen Kas yang Dibagikan (Rp) <i>Distributed Cash Dividend (Rp)</i>	553.671.231.989	452.637.208.122	411.864.799.721
Jumlah Saham yang Berhak atas Dividen (lembar saham) <i>Number of Shares Entitled to Dividend (number of shares)</i>	2.407.177	2.050.257	1.938.200
Dividen per Saham (Rp) <i>Dividend per Share (Rp)</i>	411.318	366.234	321.772
Dividend Pay Out Ratio	75%	75%	75%
Tanggal Pengumuman <i>Announcement Date</i>	23 Februari 2024 <i>February 23, 2024</i>	22 Februari 2024 <i>February 22, 2024</i>	18 Februari 2024 <i>February 18, 2024</i>
Tanggal Pembayaran <i>Payment Date</i>	1 Maret 2024 <i>March 1, 2024</i>	1 Maret 2023 <i>March 1, 2023</i>	1 Maret 2022 <i>March 1, 2022</i>

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Realization of The Use of Proceeds from The Public Offering

Hingga periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Bank BPD Bali bukan merupakan Perusahaan Terdaftar yang telah melakukan penawaran umum saham dan melakukan penerbitan efek bersifat utang yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu, Bank tidak menyajikan informasi mengenai total perolehan dana; rencana penggunaan dana; rincian penggunaan dana; saldo dana; dan tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana.

Until the period ending December 31, 2024, Bank BPD Bali is not a publicly traded entity having conducted a public offering of shares and issued debt securities listed on the Indonesian Stock Exchange. Therefore, the Bank does not provide information on total funds raised; planned use of funds; details of use of funds; fund balance; and date of GMS/RUPO approval of changes in use of funds.

KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK

Tax Payment Compliance

Kebijakan Terkait Governansi, Pengelolaan, dan Pengendalian Aspek Perpajakan

Tax Governance, Management and Control Policies

Sistem pengendalian internal Bank BPD Bali pada aspek perpajakan fokus untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan serta kebijakan ketentuan internal Bank dan tersedianya informasi perpajakan yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu. Selain itu, hal-hal lain yang perlu dipastikan adalah efektivitas dan efisiensi dalam aktivitas perpajakan dan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Bank.

The internal control system of Bank BPD Bali in the area of taxation is focused on ensuring compliance with regulations and laws as well as the provisions of the Bank's internal policies and the availability of complete, accurate, adequate and timely tax information. It also aims to ensure the effectiveness and efficiency of tax activities and the effectiveness of the risk culture within the bank's organization.

Kebijakan Perpajakan yang diterapkan di Internal BPD Bali berpedoman pada Keputusan Direksi No. 0768/KEP/DIR/OKA/2024 tentang Buku Pedoman Perusahaan Perpajakan, dan Keputusan Direksi No. 0778/KEP/DIR/OKA/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Perpajakan.

The Tax Policy implemented in the Internal BPD Bali is guided by the Board of Directors' Resolution No. 0768/KEP/DIR/OKA/2024 on the Corporate Tax Guidelines and the Board of Directors' Resolution No. 0778/KEP/DIR/OKA/2024 on the Tax Standard Operating Procedures.

Rekam Jejak Putusan Pengadilan Pajak

Tax Court Decision Track Record

Bank BPD Bali tidak pernah memperoleh putusan bersalah dari Pengadilan Pajak tertinggi terkait masalah perpajakan selama tiga tahun terakhir.

Bank BPD Bali has never received a guilty verdict from the Supreme Tax Court in the last three years with respect to tax matters.

Pembayaran Pajak

Tax Payment

Pembayaran pajak yang dilakukan oleh Bank BPD Bali untuk tahun buku 2024 dan tahun buku 2023 sebagai perbandingan adalah sebagai berikut:

The tax payments made by Bank BPD Bali for the fiscal years 2024 and 2023 as a comparison are as follows:

(Disajikan dalam Rupiah)/(Expressed in Rupiah)

	2024	2023	Perubahan Change	
			Nominal	%
PPh Pasal 21 Income Tax Article 21	125.233.796.105	84.675.728.809	40.558.067.296	48%
PPh Pasal 23 Income Tax Article 23	3.033.263.107	3.016.362.990	16.900.117	0,56%
PPh Pasal 4 ayat 2 Income Tax Article 4 paragraph 2	137.301.891.669	112.743.308.537	24.558.583.132	22%
PPh Badan Corporate Income Tax	312.248.233.220	329.176.730.080	(16.928.496.860)	(5%)
Total	577.817.184.101	529.612.130.416		



INFORMASI TENTANG PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN (ESOP/MSOP)

Information on Employee and/or Management Stock Ownership Programs (ESOP/MSOP)

Sebagai sebuah perusahaan yang tidak mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dan kepemilikan saham Bank oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Kabupaten di Provinsi Bali, maka Bank BPD Bali tidak memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen (ESOP/MSOP).

As a non-listed company on the Indonesia Stock Exchange, Bank BPD Bali does not have an Employee and/or Management Share Ownership Program (ESOP/MSOP). The Bank's shares are owned by the Provincial, City and Regency Governments in Bali Province.

Terkait dengan hal tersebut, Bank tidak menyajikan informasi mengenai jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya; jangka waktu; persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan harga *exercise*.

Accordingly, the Bank does not provide information on the number of ESOP/MSOP shares and its implementation, duration, requirements for eligible employees and/or management, and exercise price.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Material Information and Events Subsequent to The Date of The Financial Statements

Bank BPD Bali menyatakan bahwa tidak terdapat peristiwa dan fakta material yang terjadi pada 31 Desember 2024 sampai dengan laporan keuangan tersebut dipublikasikan dengan mengacu pada laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Bali untuk tahun 2024 yang telah diaudit oleh KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo.

Bank BPD Bali, referring to the financial report of PT Bank Pembangunan Daerah Bali for 2024 audited by KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo, stated that there were no material events and facts that occurred as of December 31, 2024 until the financial report was published.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI, RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

Material Information Regarding Investment, Expansion, Divestment, Business Merger/Merger, Acquisition, Debt/Capital Restructuring

Bank BPD Bali tidak menyajikan informasi terkait tujuan, nilai transaksi, dan sumber dana atas aktivitas investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal untuk tahun buku 2024. Hal ini disebabkan karena Bank tidak melakukan kegiatan investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024.

Bank BPD Bali does not present any information related to the objectives, transaction values and sources of funds for investment activities, expansion, divestment, merger/amalgamation, acquisition, debt/capital restructuring for the financial year 2024. This is because Bank has not undertaken any investment, expansion, divestment, merger/amalgamation, acquisition, debt/capital restructuring activities for the period ending December 31, 2024.

INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN BERSIFAT LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

Financial Information Containing Extraordinary and Infrequent Events

Bank BPD Bali melaporkan tidak terdapat informasi keuangan yang mengandung kejadian bersifat luar biasa dan jarang terjadi mengacu kepada laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Bali untuk tahun 2024 yang telah diaudit oleh KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo.

Bank BPD Bali has reported that there is no financial information that contains extraordinary and infrequent events in reference to the financial report of PT Bank Pembangunan Daerah Bali for the year 2024, which has been audited by KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Material Transaction Information Involving Conflicts of Interest and/or Related Party Transactions

Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan

Material Transactions Involving Conflicts of Interest

Bank BPD Bali tidak memiliki transaksi material yang mengandung benturan kepentingan selama tahun 2024. Oleh karena itu, Bank tidak menyajikan informasi terkait nama pihak yang bertransaksi dan sifat

Bank BPD Bali did not have any material transactions involving conflicts of interest in 2024. Accordingly, the Bank does not provide information regarding the names of the parties to the transaction and the nature of



hubungan afiliasi; penjelasan mengenai kewajaran transaksi; alasan dilakukannya transaksi; realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir; kebijakan Bank terkait dengan mekanisme *review* atas transaksi; dan pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait.

the related party, the statement regarding the fairness of the transaction, the reasons for the transaction, the realization of the transaction in the last fiscal year period, the Bank's policy regarding the review mechanism for transactions, and compliance with related regulations and provisions.

Transaksi dengan Pihak Berelasi

Transaction with Related Parties

Dalam menjalankan usahanya, Bank melakukan transaksi dengan pihak- pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 224 (sebelumnya PSAK 7) tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi. Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat telah disepakati bersama.

In carrying out its business, the Bank conducts transactions with related parties as defined in SFAS 224 (previously SFAS 7) concerning Related Party Disclosures. Bank enter into certain transactions with parties which are related to the management and/or owned by the same ultimate shareholder. All transactions with related parties have met the agreed terms and conditions.

Rincian, jenis hubungan dan unsur terkait transaksi pihak berelasi Bank BPD Bali dijelaskan pada tabel berikut ini:

The following table provides details, types of relationships and elements related to Bank BPD Bali's related party transactions:

Pihak Berelasi Related Parties	Sifat dari Hubungan Nature of Relationship	Sifat dari Transaksi Nature of Transactions
Pemerintah Provinsi, Kota, dan Kabupaten se Wilayah Bali <i>Provincial, City, and Regency Governments of Bali Region</i>	Pemegang Saham <i>Shareholders</i>	Simpanan <i>Deposits</i>
Manajemen Kunci <i>Key Management</i>	Komisaris, Direktur dan Pejabat Eksekutif <i>Commissioners, Directors and Executive Officers</i>	Pinjaman yang Diberikan dan Simpanan <i>Loans and Deposits</i>
Perusahaan yang Dimiliki oleh Pemegang Saham <i>Ownership of Shareholders</i>	Pengendalian Bersama oleh Pemegang Saham <i>Joint Control by the Shareholders</i>	Pinjaman yang Diberikan dan Simpanan <i>Loans and Deposits</i>

Rincian Transaksi Pihak Berelasi

Details of Transactions with Related Parties

Dalam kegiatan usahanya, Bank juga mengadakan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi-transaksi pada saldo tersebut meliputi:

In the normal course of business, the Bank entered into certain transactions with related parties. The transactions in the balance consist of:

(Disajikan dalam jutaan Rupiah)/(Expressed in millions of Rupiah)

	31 Desember 2024 December 31, 2024	31 Desember 2023 December 31, 2023	
Keluarga Direksi dan Karyawan Kunci	26.419	25.561	Family Directors and Key Employees
Komisaris	3.214	151	Commissioner
Lainnya	2.589	1.729	Other
Jumlah Pinjaman yang Diberikan	32.222	27.442	Total Loans
Persentase terhadap Jumlah Aset	0,08%	0,08%	Percentage to Total Asset

(Disajikan dalam jutaan Rupiah)/(Expressed in millions of Rupiah)

	31 Desember 2024 December 31, 2024	31 Desember 2023 December 31, 2023	
Giro	540.226	126.573	Current accounts
Tabungan	25.296	16.378	Savings
Deposito	25.127	19.436	Time deposits
Jumlah Simpanan dari Nasabah	590.649	162.387	Total Deposits from Customers
Persentase terhadap Jumlah Liabilitas	1.76%	0.54%	Percentage to Total Liabilities

Penjelasan lebih lengkap terkait transaksi dengan pihak berelasi dapat dilihat di catatan No. 35 dari laporan keuangan audit tahun 2024.

Please refer to note 35 of the audited financial statements for a more detailed explanation of related party transactions.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PERUSAHAAN

Legislative Changes That Significantly Impact The Company

Terdapat peraturan baru atau perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama tahun 2024 dan berpengaruh terhadap industri perbankan dan kegiatan usaha Bank BPD Bali yang dijelaskan pada tabel berikut ini:

There are new regulations or changes in laws and regulations that have been applied during 2024 and affect the banking industry and the business of Bank BPD Bali, which are explained in the following table:

No.	No. Peraturan & Perihal No. Regulation & Subject	Mulai Berlaku Effective Date	Dampak Terhadap Bank Impact on Bank	Dampak Terhadap Laporan Keuangan Impact on Financial Reports
1	Peraturan Bank Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2023 <i>Bank Indonesia Regulation No. 1 of 2024 on the Amount and Nominal Value of Rupiah Currency Destroyed in 2023</i>	29 Januari 2024 <i>January 29, 2024</i>	-	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap LK periode berjalan atau periode sebelumnya. <i>No significant impact on current or prior period financial statements.</i>
2	PADG Nomor 2 Tahun 2024 tentang Dealer Utama <i>PADG Number 2 of 2024 on Main Dealers</i>	17 April 2024 <i>April 17, 2024</i>	-	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap LK periode berjalan atau periode sebelumnya. <i>No significant impact on current or prior period financial statements.</i>
3	PADG Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka <i>PADG No. 3 of 2024 on the Conduct of Open Market Operations</i>	17 April 2024 <i>April 17, 2024</i>	-	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap LK periode berjalan atau periode sebelumnya. <i>No significant impact on current or prior period financial statements.</i>



No.	No. Peraturan & Perihal No. Regulation & Subject	Mulai Berlaku Effective Date	Dampak Terhadap Bank Impact on Bank	Dampak Terhadap Laporan Keuangan Impact on Financial Reports
4	POJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum	27 Maret 2024	- Bank wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi Pemulihan kepada Otoritas Jasa Keuangan. - melakukan evaluasi dan pengujian (<i>stress testing</i>) Rencana Aksi Pemulihan secara berkala; dan - mengimplementasikan Rencana Aksi Pemulihan secara efektif dan tepat waktu.	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap LK periode berjalan atau periode sebelumnya.
	<i>POJK No. 5 of 2024 on Determination of Supervision Status and Handling of Commercial Bank Problems</i>	<i>March 27, 2024</i>	<i>Banks are required to prepare and submit a recovery action plan to the Financial Services Authority.</i> <i>Conduct periodic evaluation and stress testing of the recovery action plan; and</i> <i>Implement the recovery action plan effectively and on time.</i>	<i>No significant impact on current or prior period financial statements.</i>
5	PBI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber bagi Penyelenggaraan Sistem Pembayaran, Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing	22 April 2024	Penyampaian pelaporan pengawasan KKS pada Pelaporan tahunan pertama kali disampaikan kepada Bank Indonesia pada Januari 2026 untuk periode laporan tahun 2025.	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap LK periode berjalan atau periode sebelumnya.
	<i>PBI No. 2 of 2024 on Information System Security and Cyber Resilience for Payment System Implementation, Money Market Participants and Foreign Exchange Market</i>	<i>April 22, 2024</i>	<i>Submit KKS supervisory reporting in the first annual report to Bank Indonesia in January 2026 for the 2025 reporting period.</i>	<i>No significant impact on current or prior period financial statements.</i>
6	PBI Nomor 3 Tahun 2024 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan	14 Mei 2024	-	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap LK periode berjalan atau periode sebelumnya.
	<i>PADG No. 3 of 2024 on Alternative Dispute Resolution Institutions in the Financial Sector</i>	<i>May 14, 2024</i>		<i>No significant impact on current or prior period financial statements.</i>
7	PADG Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PADG Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pertauran Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial	01 Juni 2024	Mereview/menyesuaikan perhitungan KLM	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap LK periode berjalan atau periode sebelumnya.
	<i>PADG No. 4 of 2024 on Amendments to PADG No. 11 of 2023 on Implementing Rules for Macroprudential Liquidity Incentive Policies</i>	<i>June 01, 2024</i>	<i>Review/correction of KLM calculations</i>	<i>No significant impact on current or prior period financial statements.</i>
8	POJK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan	19 Februari 2024	Adanya Ruang Uji Coba/Pengembangan Inovasi yang selanjutnya disebut Sandbox adalah sarana dan mekanisme untuk memfasilitasi uji coba dan pengembangan inovasi yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menilai kelayakan dan keandalan ITSK.	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap LK periode berjalan atau periode sebelumnya.
	<i>POJK Number 3 of 2024 on the Implementation of Technological Innovation in the Financial Sector</i>	<i>February 19, 2024</i>	<i>The existence of the Innovation Trial/ Development Room, hereinafter referred to as Sandbox, is a means and mechanism to facilitate innovation trial and development provided by the Financial Services Authority to assess the feasibility and reliability of ITSK.</i>	<i>No significant impact on current or prior period financial statements.</i>

No.	No. Peraturan & Perihal No. Regulation & Subject	Mulai Berlaku Effective Date	Dampak Terhadap Bank Impact on Bank	Dampak Terhadap Laporan Keuangan Impact on Financial Reports
9	SEOJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Mekanisme Ruang Uji Coba dan Pengembangan Inovasi <i>SEOJK No. 5 of 2024 on Innovation Testing and Development Space Mechanism</i>	03 Juni 2024 <i>June 03, 2024</i>	Mekanisme Permohonan menjadi Peserta Ruang Uji Coba/Pengembangan Inovasi yang selanjutnya disebut <i>Sandbox</i> . <i>This is an application mechanism for participating in the Innovation Trial/Development Room, hereinafter referred to as the Sandbox.</i>	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap LK periode berjalan atau periode sebelumnya. <i>No significant impact on current or prior period financial statements.</i>
10	PADG Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PADG Nomor 21/12/PADG/2021 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia. <i>PADG No. 5 of 2024 on Amendments to PADG No. 21/12/PADG/2021 on Implementation of Scheduled Fund Transfers and Clearing by Bank Indonesia</i>	27 Juni 2024 <i>June 27, 2024</i>	Mereview ketentuan internal terkait Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal <i>Review of internal rules related to the execution of scheduled funds transfers and clearing</i>	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap LK periode berjalan atau periode sebelumnya. <i>No significant impact on current or prior period financial statements.</i>
11	SEOJK Nomor 6/SEOJK.07/2024 tentang Pendaftaran Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan <i>SEOJK Number 6/SEOJK.07/2024 on Registration of Financial Sector Technology Innovation Providers</i>	03 Juni 2024 <i>June 03, 2024</i>	Mekanisme Permohonan menjadi Peserta Ruang Uji Coba/Pengembangan Inovasi yang selanjutnya disebut <i>Sandbox</i> . <i>Application mechanism to become a participant in the Innovation Trial/Development Room, hereinafter referred to as the Sandbox.</i>	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap LK periode berjalan atau periode sebelumnya. <i>No significant impact on current or prior period financial statements.</i>
12	PBI Nomor 4 Tahun 2024 tentang Bauran Kebijakan Bank Indonesia <i>PBI No. 4 of 2024 on Bank Indonesia's Policy Mix</i>	10 Juli 2024 <i>July 10, 2024</i>	-	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap LK periode berjalan atau periode sebelumnya. <i>No significant impact on current or prior period financial statements.</i>
13	PBI Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing <i>PBI No. 6 of 2024 on Money and Foreign Exchange Market</i>	16 Juli 2024 <i>July 16, 2024</i>	-	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap LK periode berjalan atau periode sebelumnya. <i>No significant impact on current or prior period financial statements.</i>
14	PBI Nomor 5 Tahun 2024 tentang Standarisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran <i>PBI No. 5 of 2024 on the Standardization of Competences in the Field of Payment Systems</i>	16 Juli 2024 <i>July 16, 2024</i>	Memastikan SDM yang melaksanakan Kegiatan Sistem Pembayaran memiliki Sertifikat PBK Sistem Pembayaran dan/atau Sertifikat Kompetensi Sistem Pembayaran. <i>Ensure that personnel performing payment system activities have a Payment System PBK Certificate and/or a Payment System Competency Certificate.</i>	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap LK periode berjalan atau periode sebelumnya. <i>No significant impact on current or prior period financial statements.</i>
15	PADG Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil ekspor dan Devisa Pembayaran Impor <i>PADG Number 6 of 2024 on Amendments to the Regulation on Members of the Board of Governors Number 4 of 2023 on Foreign Exchange from Exports and Foreign Exchange from Import Payments</i>	01 Agustus 2024 <i>August 01, 2024</i>	-	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap LK periode berjalan atau periode sebelumnya. <i>No significant impact on current or prior period financial statements.</i>



No.	No. Peraturan & Perihal No. Regulation & Subject	Mulai Berlaku Effective Date	Dampak Terhadap Bank Impact on Bank	Dampak Terhadap Laporan Keuangan Impact on Financial Reports
16	POJK Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Bank <i>POJK Number 11 of 2024 on the Second Amendment to POJK Number 18/POJK.03/2017 on Reporting and Requesting Debtor Information through the Bank Service System</i>	31 Juli 2024 <i>July 31, 2024</i>	Bank menyusun/mereview ketentuan mengenai Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) <i>The Bank prepares/reviews regulations on reporting and requesting debtor information through the Financial Information Service System (SLIK).</i>	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap LK periode berjalan atau periode sebelumnya. <i>No significant impact on current or prior period financial statements.</i>
17	Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank <i>Bank Indonesia Regulation Number 7 of 2024 on the Bank's Foreign Funding Ratio</i>	01 Agustus 2024 <i>August 01, 2024</i>	-	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap LK periode berjalan atau periode sebelumnya. <i>No significant impact on current or prior period financial statements.</i>
18	PADG Nomor 7 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank <i>PADG Number 7 of 2024 on the Implementation Regulation of Bank Foreign Funding Ratio</i>	01 Agustus 2024 <i>August 01, 2024</i>	-	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap LK periode berjalan atau periode sebelumnya. <i>No significant impact on current or prior period financial statements.</i>
19	POJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan <i>POJK Number 12 of 2024 on the Implementation of Anti-Fraud Strategy for Financial Service Institutions</i>	31 Oktober 2024 <i>October 31, 2024</i>	Mereview ketentuan internal baik BPP/ SOP Strategi Anti Fraud. <i>Review of internal provisions of both BPP/SOP Anti-Fraud Strategy.</i> <i>Review/prepare internal regulations regarding SLIK</i> <i>Review the format and guidelines for preparing reports on financial literacy and financial inclusion plans and implementation.</i>	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap LK periode berjalan atau periode sebelumnya. <i>No significant impact on current or prior period financial statements.</i>
20	PADG Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas PADG Nomor 20/15/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement <i>PADG Number 8 of 2024 on the Sixth Amendment to PADG Number 20/15/PADG/2018 on the Implementation of Real-Time Fund Settlement by Bank Indonesia System - Real-Time Gross Settlement</i>	07 Agustus 2024 <i>August 07, 2024</i>	Mereview ketentuan internal mengenai RTGS. <i>Review of internal provisions regarding RTGS.</i>	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap LK periode berjalan atau periode sebelumnya. <i>No significant impact on current or prior period financial statements.</i>

No.	No. Peraturan & Perihal <i>No. Regulation & Subject</i>	Mulai Berlaku <i>Effective Date</i>	Dampak Terhadap Bank <i>Impact on Bank</i>	Dampak Terhadap Laporan Keuangan <i>Impact on Financial Reports</i>
21	Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit bagi Bank Umum Konvensional <i>Financial Services Agency Regulation Number 13 of 2024 concerning the transparency and publication of the base lending rate for conventional commercial banks</i>	12 Agustus 2024 <i>August 12, 2024</i>	• Bank wajib menyusun, mengumumkan, dan menyampaikan SBDK yang dilakukan melalui Laporan Publikasi SBDK dan Laporan Rincian SBDK secara berkala maupun koreksi. • Bank harus memerhatikan suku bunga acuan dari otoritas yang berwenang dan perkembangan kondisi ekonomi. • Mereview ketentuan internal mengenai SBDK. • <i>Banks are required to prepare, publish and submit SBDK, which is done through the SBDK Publication Report and SBDK Details Report periodically or with corrections.</i> • <i>Banks must pay attention to the reference interest rate of the competent authority and the development of economic conditions.</i> • <i>Review internal rules regarding SBDK.</i>	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap LK periode berjalan atau periode sebelumnya. <i>No significant impact on current or prior period financial statements.</i>
22	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.01/2024 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan <i>Financial Services Agency Circular Letter No. 11/SEOJK.01/2024 on Reporting and Requesting Debtor Information through the Financial Information Service System</i>	02 Oktober 2024 <i>October 02, 2024</i>	Mereview/menyusun ketentuan internal mengenai SLIK <i>Review/prepare internal regulations on SLIK</i>	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap LK periode berjalan atau periode sebelumnya. <i>No significant impact on current or prior period financial statements.</i>
23	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.08/2024 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Rencana dan Laporan Realisasi Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan <i>Financial Services Authority Circular Letter No. 13/SEOJK.08/2024 on the Preparation and Submission of Financial Literacy and Financial Inclusion Plan and Implementation Reports</i>	24 Oktober 2024 <i>October 24, 2024</i>	Mereview format dan pedoman penyusunan laporan rencana dan realisasi literasi keuangan dan inklusi keuangan. <i>Review format and guidelines for reporting on financial literacy and financial inclusion plans and implementation.</i>	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap LK periode berjalan atau periode sebelumnya. <i>No significant impact on current or prior period financial statements.</i>
24	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah <i>Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 47 of 2024 on Write-off of Bad Debts of Micro, Small and Medium Enterprises</i>	05 Nopember 2024 <i>November 05, 2024</i>	-	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap LK periode berjalan atau periode sebelumnya. <i>No significant impact on current or prior period financial statements.</i>



No.	No. Peraturan & Perihal No. Regulation & Subject	Mulai Berlaku Effective Date	Dampak Terhadap Bank Impact on Bank	Dampak Terhadap Laporan Keuangan Impact on Financial Reports
25	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan perizinan Terpadu Bank Indonesia Melalui Front Office Perizinan <i>Regulation of the Board of Governors Member No. 12 of 2024 on Implementing Regulations for Integrated Licensing of Bank Indonesia through the Licensing Front Office</i>	30 September 2024 <i>September 30, 2024</i>	-	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap LK periode berjalan atau periode sebelumnya. <i>No significant impact on current or prior period financial statements.</i>
26	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang <i>Regulation of Board of Governors Member No. 13 of 2024 on Money Market Transactions</i>	30 September 2024 <i>September 30, 2024</i>	-	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap LK periode berjalan atau periode sebelumnya. <i>No significant impact on current or prior period financial statements.</i>
27	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/16/PADG/2024 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Antara Indonesia dan Tiongkok menggunakan Rupiah dan Yuan Melalui Bank. <i>Regulation of the Member of the Board of Governors No. 15 of 2024 on Amendments to Regulation of the Member of the Board of Governors No. 23/16/PADG/2024 on Settlement of Bilateral Transactions between Indonesia and China Using Rupiah and Yuan Through Banks</i>	10 Oktober 2024 <i>October 10, 2024</i>	-	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap LK periode berjalan atau periode sebelumnya. <i>No significant impact on current or prior period financial statements.</i>
28	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/20/PADG/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Antara Indonesia dan Jepang menggunakan Rupiah dan Yen Melalui Bank. <i>Regulation of the Member of the Board of Governors No. 14 of 2024 on Amendments to Regulation of the Member of the Board of Governors No. 22/20/PADG/2020 on Settlement of Bilateral Transactions Between Indonesia and Japan Using Rupiah and Yen Through Banks.</i>	10 Oktober 2024 <i>October 10, 2024</i>	-	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap LK periode berjalan atau periode sebelumnya. <i>No significant impact on current or prior period financial statements.</i>
29	Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Premi Program Restrukturisasi Perbankan <i>Regulation of the Deposit Insurance Corporation No. 1 of 2024 on Premiums for the Bank Restructuring Program</i>	17 Mei 2024 <i>May 17, 2024</i>	Menyusun mekanisme perhitungan premi PRP. <i>Prepare PRP premium calculation mechanism</i>	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap LK periode berjalan atau periode sebelumnya. <i>No significant impact on current or prior period financial statements.</i>
30	Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum <i>Regulation of Deposit Insurance Corporation Number 2 of 2024 on Resolution Plans for Commercial Banks</i>	13 Agustus 2024 <i>August 13, 2024</i>	Menyusun Laporan Resolusi Plan <i>Prepare resolution plan report</i>	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap LK periode berjalan atau periode sebelumnya. <i>No significant impact on current or prior period financial statements.</i>

No.	No. Peraturan & Perihal No. Regulation & Subject	Mulai Berlaku Effective Date	Dampak Terhadap Bank Impact on Bank	Dampak Terhadap Laporan Keuangan Impact on Financial Reports
31	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank	09 Oktober 2024	- Bank wajib menyusun dan menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank; - Bank wajib memastikan penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank dengan menyediakan sistem informasi yang mendukung pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan; - Bank wajib membentuk unit kerja khusus yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan atau manipulasi dalam Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan Bank Umum	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap LK periode berjalan atau periode sebelumnya.
	Financial Services Agency Regulation No. 15 of 2024 on the Integrity of Bank Financial Reporting	October 09, 2024	- Banks are required to prepare and establish internal control policies and procedures in the bank's financial reporting process; - Banks must ensure the implementation of internal control policies and procedures in the bank's financial reporting process by providing an information system that supports financial reporting in accordance with accounting standards and Financial Services Authority financial transaction recording regulations; - Banks are required to form a special working unit responsible for preventing fraud or manipulation of financial information and/or financial reports of commercial banks.	No significant impact on current or prior period financial statements.
32	PADG Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran.	19 November 2024	Memastikan SDM yang melaksanakan Kegiatan Sistem Pembayaran memiliki Sertifikat PBK Sistem Pembayaran dan/ atau Sertifikat Kompetensi Sistem Pembayaran.	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap LK periode berjalan atau periode sebelumnya.
	PADG No. 17 of 2024 on the Implementation of Competency Standardization in the Payment System Sector.	November 19, 2024	Ensure that personnel involved in payment system activities hold a Payment System PBK Certificate and/or a Payment System Competency Certificate.	No significant impact on current or prior period financial statements.
33	PADG Nomor 18 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan.	26 November 2024	-	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap LK periode berjalan atau periode sebelumnya.
	PADG No. 18 of 2024 concerning the Implementation Rules for Alternative Dispute Resolution Institutions in the Financial Sector	November 26, 2024		No significant impact on current or prior period financial statements.



No.	No. Peraturan & Perihal No. Regulation & Subject	Mulai Berlaku Effective Date	Dampak Terhadap Bank Impact on Bank	Dampak Terhadap Laporan Keuangan Impact on Financial Reports
34	POJK Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan atas POJK Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (<i>Liquidity Coverage Ratio</i>) bagi Bank Umum.	08 November 2024	Mereview mekanisme perhitungan dan pelaporan LCR.	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap LK periode berjalan atau periode sebelumnya.
	<i>POJK No. 19 of 2024 on Amendments to POJK No. 42/POJK.03/2015 on the Obligation to Meet the Liquidity Coverage Ratio for Commercial Banks.</i>	<i>November 08, 2024</i>	<i>Review of LCR calculation and reporting mechanism</i>	<i>No significant impact on current or prior period financial statements.</i>
35	PLPS Nomor 3 Tahun 2024 tentang Laporan Bank Peserta Penjaminan Simpanan	16 Oktober 2024	Mereview tata cara/mekanisme pelaporan SCV	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap LK periode berjalan atau periode sebelumnya.
	<i>PLPS No. 3 of 2024 on Reports of Banks Participating in the Deposit Insurance System</i>	<i>October 16, 2024</i>	<i>Review of SCV reporting procedures/mechanisms</i>	<i>No significant impact on current or prior period financial statements.</i>
36	PLPS Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pelaporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah Bank.	16 Oktober 2024	Mereview tata cara/ mekanisme pelaporan SCV	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap LK periode berjalan atau periode sebelumnya.
	<i>PLPS No. 4 of 2024 on the Reporting of Deposit Insurance Data Based on Bank Customers</i>	<i>October 16, 2024</i>	<i>Review of SCV reporting procedures/mechanisms</i>	<i>No significant impact on current or prior period financial statements.</i>
37	SE LPS Nomor SE-3/ADK1/2024 Tahun 2024 tentang Pedoman dan Format Penyusunan serta Tata Cara Penyampaian, Perbaikan, dan Pemutakhiran Rencana Resolusi bagi Bank Umum.	25 Oktober 2024	Mereview Pedoman dan Format Penyusunan serta Tata Cara Penyampaian, Perbaikan, dan Pemutakhiran Rencana Resolusi bagi Bank Umum.	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap LK periode berjalan atau periode sebelumnya.
	<i>SE LPS No. SE-3/ADK1/2024 of 2024 on Guidelines and Format for Preparation and Procedures for Submission, Improvement and Updating of Resolution Plans for Commercial Banks.</i>	<i>October 25, 2024</i>	<i>Review of guidelines and format for preparation and procedures for submission, improvement and updating of resolution plans for commercial banks</i>	<i>No significant impact on current or prior period financial statements.</i>
38	SE LPS Nomor SE-4/ADK1/2024 Tahun 2024 tentang Format dan Panduan Tata Cara Perhitungan Premi Penjamin Simpanan.	19 November 2024	Mereview mekanisme tata cara perhitungan Premi LPS	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap LK periode berjalan atau periode sebelumnya.
	<i>SE LPS No. SE-4/ADK1/2024 of 2024 on the format and guidelines for the calculation of deposit insurance premiums.</i>	<i>November 19, 2024</i>	<i>Review of the LPS premium calculation mechanism</i>	<i>No significant impact on current or prior period financial statements.</i>
39	SE LPS Nomor SE-5/ADK1/2024 tentang Tata Cara Pembayaran Kontribusi Kepesertaan Premi Penjaminan Simpanan, dan Denda Kekurangan Dan/Atau Keterlambatan Pembayaran Premi Penjaminan Simpanan	19 November 2024	-	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap LK periode berjalan atau periode sebelumnya.
	<i>SE LPS No. SE-5/ADK1/2024 on procedures for payment of deposit insurance premium contributions and penalties for failure to pay and/or late payment of deposit insurance premiums.</i>	<i>November 19, 2024</i>		<i>No significant impact on current or prior period financial statements..</i>
40	SE LPS Nomor SE-6/ADK1/2024 tentang Format dan Panduan Tata Cara Perhitungan Premi Program Restrukturisasi Perbankan.	19 November 2024	Penyesuaian Format dan Panduan Tata Cara Perhitungan Premi Program Restrukturisasi Perbankan	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap LK periode berjalan atau periode sebelumnya.
	<i>SE LPS No. SE-6/ADK1/2024 on the Format and Guidelines for the Calculation of Premiums for the Banking Restructuring Program.</i>	<i>November 19, 2024</i>	<i>Adjustment of the format and guidelines for the calculation of premiums for bank restructuring programs</i>	<i>No significant impact on current or prior period financial statements.</i>

No.	No. Peraturan & Perihal No. Regulation & Subject	Mulai Berlaku Effective Date	Dampak Terhadap Bank Impact on Bank	Dampak Terhadap Laporan Keuangan Impact on Financial Reports
41	SE LPS Nomor SE-7/ADK1/2024 tentang Tata Cara Pembayaran Premi dan Denda atas Kekurangan dan/atau Keterlambatan Pembayaran Premi Program Restrukturisasi Perbankan <i>SE LPS No. SE-7/ADK1/2024 concerning procedures for payment of premiums and penalties for non-payment and/or late payment of premiums for the Banking Restructuring Program.</i>	19 November 2024 <i>November 19, 2024</i>	-	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap LK periode berjalan atau periode sebelumnya. <i>No significant impact on current or prior period financial statements.</i>
42	POJK Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas POJK Nomor 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Pendanaan Stabil Bersih (<i>Net Stable Funding Ratio</i>) bagi Bank Umum. <i>POJK Number 20 of 2024 concerning amendments to POJK Number 50/POJK.03/2017 concerning obligations to meet the net stable funding ratio for commercial banks.</i>	18 Desember 2024 <i>December 18, 2024</i>	Mereview mekanisme perhitungan dan pelaporan NSFR. <i>Revise the mechanism for calculating and reporting the NSFR.</i>	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap LK periode berjalan atau periode sebelumnya. <i>No significant impact on current or prior period financial statements.</i>
43	SEOJK Nomor 18/SEOJK.08/2024 tentang Penilaian Sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan <i>SEOJK No. 18/SEOJK.08/2024 on Self-Assessment of Compliance with Consumer and Community Protection Provisions in the Financial Services Sector</i>	10 Desember 2024 <i>December 10, 2024</i>	Menyusun ketentuan Pelindungan Konsumen dengan menambahkan pengaturan mengenai penilaian sendiri terhadap pemenuhan ketentuan perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan <i>Preparation of consumer protection provisions by adding provisions for self-assessment of compliance with consumer and community protection rules in the financial services sector.</i>	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap LK periode berjalan atau periode sebelumnya. <i>No significant impact on current or prior period financial statements.</i>
44	PADG Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas PADG Nomor 11 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial. <i>PADG No. 21 of 2024 on the Second Amendment to PADG No. 11 of 2023 on Implementing Rules for Macroprudential Liquidity Incentive Policy</i>	01 Januari 2025 <i>January 01, 2025</i>	Mereview/menyesuaikan perhitungan KLM <i>Review/adapt KLM calculations</i>	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap LK periode berjalan atau periode sebelumnya. <i>No significant impact on current or prior period financial statements.</i>
45	PADG Nomor 22 Tahun 2024 tentang Laporan Pelaksanaan Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran. <i>PADG No. 22 of 2024 on the Report on the Implementation of Standardization of Competencies in the Payment Systems Sector</i>	20 Desember 2024 <i>December 20, 2024</i>	-	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap LK periode berjalan atau periode sebelumnya. <i>No significant impact on current or prior period financial statements.</i>
56	POJK Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan. <i>PADG No. 26 of 2024 on the Expansion of Banking Activities</i>	13 Desember 2024 <i>December 13, 2024</i>	Bank menyusun/mereview ketentuan internal mengenai Bank Garansi, Pengalihan Piutang oleh Bank, SKBDN, dan KUPVA <i>Banks prepare/review internal rules on bank guarantees, transfer of receivables by banks, SKBDN and KUPVA.</i>	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap LK periode berjalan atau periode sebelumnya. <i>No significant impact on current or prior period financial statements.</i>



No.	No. Peraturan & Perihal No. Regulation & Subject	Mulai Berlaku Effective Date	Dampak Terhadap Bank Impact on Bank	Dampak Terhadap Laporan Keuangan Impact on Financial Reports
47	PADG Nomor 24 Tahun 2024 tentang Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber bagi Penyelenggara Sistem Pembayaran, Pelaku Pasar Uang dan Valuta Asing, serta Pihak Lain yang Diatur dan Diawasi Bank Indonesia <i>PADG No. 24 of 2024 on Information System Security and Cyber Resilience for Payment System Providers, Money and Foreign Exchange Market Participants, and Other Parties Regulated and Supervised by Bank Indonesia</i>	31 Desember 2024 <i>December 31, 2024</i>	Penyampaian pelaporan pengawasan KKS pada Pelaporan tahunan pertama kali disampaikan kepada Bank Indonesia pada Januari 2026 untuk periode laporan tahun 2025. <i>Submit the KKS supervision report in the first annual report submitted to Bank Indonesia in January 2026 for the 2025 reporting period.</i>	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap LK periode berjalan atau periode sebelumnya. <i>No significant impact on current or prior period financial statements.</i>
48	POJK Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Informasi Jejak Pelaku Melalui Sistem Informasi Pelaku di Sektor Jasa Keuangan <i>POJK Number 28 of 2024 on the Management of Criminal Trace Information through the Criminal Information System in the Financial Services Sector</i>	17 Desember 2024 <i>December 17, 2024</i>	Menyusun kebijakan dan prosedur terkait SIPELAKU. <i>Preparation of policies and procedures related to SIPELAKU.</i>	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap LK periode berjalan atau periode sebelumnya. <i>No significant impact on current or prior period financial statements.</i>
49	Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lalu Lintas Devisa <i>Bank Indonesia Regulation Number 9 of 2024 on Foreign Exchange Management</i>	23 Desember 2024 <i>December 23, 2024</i>	-	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap LK periode berjalan atau periode sebelumnya. <i>No significant impact on current or prior period financial statements.</i>
50	Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengendalian Moneter <i>Bank Indonesia Regulation Number 11 of 2024 on Monetary Control</i>	31 Desember 2024 <i>December 31, 2024</i>	Mereview mekanisme perhitungan GWM <i>Review GWM calculation mechanism</i>	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap LK periode berjalan atau periode sebelumnya. <i>No significant impact on current or prior period financial statements.</i>
51	Peraturan Bank Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kebijakan Data dan Informasi Bank Indonesia <i>Bank Indonesia Regulation Number 12 of 2024 on Data and Information Policy of Bank Indonesia</i>	31 Desember 2024 <i>December 31, 2024</i>	-	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap LK periode berjalan atau periode sebelumnya. <i>No significant impact on current or prior period financial statements.</i>
52	Peraturan Bank Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kebijakan Makroprudensial <i>Bank Indonesia Regulation Number 13 of 2024 on Macroprudential Policy</i>	31 Desember 2024 <i>December 31, 2024</i>	-	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap LK periode berjalan atau periode sebelumnya. <i>No significant impact on current or prior period financial statements.</i>
53	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2024 tentang Risalah Lelang <i>Minister of Finance Regulation Number 86 of 2024 Concerning Auction Minutes</i>	31 Desember 2024 <i>December 31, 2024</i>	-	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap LK periode berjalan atau periode sebelumnya. <i>No significant impact on current or prior period financial statements.</i>
54	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perintah tertulis <i>Financial Services Authority Regulation Number 31 of 2024 on Written Orders</i>	23 Desember 2024 <i>December 23, 2024</i>	-	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap LK periode berjalan atau periode sebelumnya. <i>No significant impact on current or prior period financial statements.</i>
55	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Rahasia Bank <i>Financial Services Authority Regulation No. 44 of 2024 on Bank Secrecy</i>	27 Desember 2024 <i>December 27, 2024</i>	Menyusun ketentuan internal terkait Rahasia Bank <i>Preparation of internal regulations related to bank secrecy</i>	Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap LK periode berjalan atau periode sebelumnya. <i>No significant impact on current or prior period financial statements.</i>

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN PERUSAHAAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

Changes in Accounting Policies Adopted by The Company During The Last Financial Year

Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Changes to Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards

Nomenklatur Standar Akuntansi Keuangan

Standar ini mengatur penomoran baru untuk standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Institut Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI"). Perubahan tersebut untuk membedakan penomoran PSAK dan ISAK yang merujuk pada IFRS Accounting Standards (diawali dengan angka 1 dan 2) dan tidak merujuk pada IFRS Accounting Standards (diawali dengan angka 3 dan 4). Perubahan ini berlaku efektif pada 1 Januari 2024.

Efektif tanggal 1 Januari 2024, Bank menerapkan PSAK baru yang berlaku efektif pada tanggal pelaporan. Perubahan kebijakan akuntansi Bank telah dibuat sesuai kebutuhan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar.

Penerapan standar baru dan amandemen yang relevan dengan operasi Bank adalah sebagai berikut:

Financial Accounting Standards Nomenclature

This standard regulates the new numbering for financial accounting standards applicable in Indonesia issued by the Financial Accounting Standards Board of The Indonesia Institute of Accountants ("DSAK-IAI"). The change is to distinguish the numbering of SFAS and IFAS that refer to IFRS Accounting Standards (beginning with numbers 1 and 2) and do not refer to IFRS Accounting Standards (beginning with numbers 3 and 4). This change is effective on January 1, 2024.

Effective January 1, 2024, the Bank adopted new SFAS that are effective for application from that date. Changes to the Bank's accounting policies have been made as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards.

The adoption of the following new standards and amendment which are relevant to the Bank's operations are follows:

No	Kebijakan Akuntansi Accounting Policies	Tentang About	Dampak dari Penerapan Standar Akuntansi Baru terhadap Laporan Keuangan Impact of Adoption These New Accounting Standards to Financial Statements
1	PSAK 116: Sewa (sebelumnya PSAK 37)	Sewa jual dan sewa-balik	DSAK IAI mengeluarkan keputusan agenda oleh Komite Interpretasi IFRS yang membahas bagaimana penjual-penyewa harus mengukur aset hak guna usaha yang timbul dari sewa-balik dan, sebagai akibatnya, bagaimana menentukan keuntungan atau kerugian dari transaksi jual dan sewa-balik di mana transaksi tersebut dikualifikasikan sebagai 'penjualan' menurut PSAK 115 dan pembayaran sewa termasuk pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau tingkat suku bunga. Meskipun keputusan agenda tersebut memberikan pendekatan untuk pengukuran awal aset hak guna usaha dan liabilitas sewa yang timbul dari sewa-balik, keputusan tersebut tidak membahas bagaimana liabilitas sewa akan diukur selanjutnya. Amandemen PSAK 116 yang diterbitkan pada bulan November 2022, bertujuan untuk mengatasi kesenjangan tersebut. PSAK 116 sekarang menetapkan bahwa, dalam mengukur liabilitas sewa selanjutnya, lessee menentukan 'pembayaran sewa' dan pembayaran sewa yang direvisi' dengan cara yang tidak mengakibatkan lessee mengakui jumlah keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak pakai yang masih dimilikinya. Dengan kata lain, tanpa amandemen ini, lessee penjual, yang menerapkan persyaratan pengukuran berikutnya untuk liabilitas sewa yang tidak terkait dengan transaksi jual dan sewa-balik, mungkin mengakui keuntungan atas hak pakai yang masih dimilikinya semata mata karena pengukuran kembali (misalnya, setelah modifikasi sewa atau perubahan masa sewa), meskipun tidak ada transaksi atau peristiwa yang terjadi yang menimbulkan keuntungan tersebut. <i>DSAK IAI issued agenda decision by the IFRS Interpretations Committee addressing how a seller-lessee should measure the right-of-use asset arising from the leaseback and, as a result, how it should determine the gain or loss on a sale and leaseback transaction where the transaction qualified as a 'sale' under SFAS 115 and lease payments include variable lease payments that do not depend on an index or rate. While the agenda decision provided an approach for the initial measurement of the right-of-use asset and the lease liability arising from the leaseback, it did not address how the lease liability would be subsequently measured.</i> <i>The amendments to SFAS 116 issued in November 2022, aim to address that gap. SFAS 116 now specifies that, in subsequently measuring the lease liability, the seller-lessee determines 'lease payments' and revised lease payments' in a way that does not result in the seller-lessee recognizing any amount of the gain or loss that is related to the right of use it retains.</i> <i>In other words, without these amendments, a seller-lessee, applying the subsequent measurement requirements for lease liabilities unrelated to a sale and leaseback transaction, might have recognized a gain on the right of use it retains solely because of a remeasurement (for example, following a lease modification or change in the lease term), even though no transaction or event would have occurred to give rise to that gain.</i>
	SFAS 116: Leases (previously SFAS 73)	Leases on sales and leaseback	



No	Kebijakan Akuntansi Accounting Policies	Tentang About	Dampak dari Penerapan Standar Akuntansi Baru terhadap Laporan Keuangan Impact of Adoption These New Accounting Standards to Financial Statements
2	PSAK 201 : Penyajian Laporan Keuangan (sebelumnya PSAK 1)	Liabilitas Tidak Lancar dengan Persyaratan	PSAK 201 'Penyajian laporan keuangan' mensyaratkan bahwa, agar entitas dapat mengklasifikasikan liabilitas sebagai tidak lancar, entitas harus memiliki hak pada tanggal pelaporan untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang kurangnya dua belas bulan setelah tanggal tersebut. Ketika entitas mengklasifikasikan liabilitas yang timbul dari perjanjian pinjaman sebagai tidak lancar dan liabilitas tersebut tunduk pada persyaratan yang harus dipenuhi oleh entitas dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan, maka entitas harus mengungkapkan informasi dalam catatan atas laporan keuangan yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk memahami risiko bahwa liabilitas tersebut akan dilunasi dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan, yang meliputi: nilai tercatat liabilitas; informasi mengenai perikatan-perikatan; fakta dan situasi, jika ada, yang mengindikasikan entitas mungkin mengalami kesulitan untuk memenuhi persyaratan yang diperjanjikan. Fakta dan keadaan tersebut juga dapat mencakup fakta bahwa entitas tidak akan mematuhi kovenan berdasarkan keadaannya pada akhir periode pelaporan. <i>SFAS 201 : Presentation of financial statements (previously SFAS 1)</i> <i>Non-current Liabilities with Covenants</i> <i>SFAS 201 'Presentation of financial statements' requires that, for an entity to classify a liability as non-current, the entity must have the right at the reporting date to defer settlement of the liability for at least twelve months after that date.</i> <i>An entity classifies a liability arising from a loan arrangement as non-current and that liability is subject to the covenants which an entity is required to comply with within twelve months of the reporting date, the entity shall disclose information in the notes that enables users of financial statements to understand the risk that the liability could become repayable within twelve months of the reporting period, including: the carrying amount of the liability; information about the covenants; facts and circumstances, if any, that indicate the entity may have difficulty complying with the covenants. Such facts and circumstances could also include the fact that the entity would not have complied with the covenants based on its circumstances at the end of the reporting period.</i>
3	PSAK 207 : Laporan arus kas (sebelumnya PSAK 2) dan PSAK 107. Instrumen keuangan:	Pengungkapan (sebelumnya PSAK 60)- Pengaturan keuangan pemasok. <i>Disclosure (previously SFAS 60)- Supplier finance arrangements.</i>	Pada tanggal 1 Desember 2023, DSAK IAI menerbitkan amandemen PSAK 207 dan PSAK 107 yang mensyaratkan pengungkapan spesifik mengenai <i>Supplier Finance Arrangements</i> (SFAs). Amandemen tersebut menanggapi investor yang mengatakan bahwa mereka sangat membutuhkan informasi lebih lanjut tentang SFAs untuk dapat menilai bagaimana pengaturan ini memengaruhi liabilitas, arus kas, dan risiko likuiditas entitas. Untuk memenuhi kebutuhan investor, pengungkapan baru ini akan memberikan informasi tentang: Syarat dan ketentuan SFAs. Nilai tercatat liabilitas keuangan yang merupakan bagian dari SFAs dan pos-pos di mana liabilitas tersebut disajikan. Nilai tercatat liabilitas keuangan dalam butir (2) yang telah diterima pembayarannya oleh pemasok dari penyedia keuangan. Kisaran tanggal jatuh tempo pembayaran untuk liabilitas keuangan yang merupakan bagian dari SFAs, dan utang usaha yang sebanding yang bukan merupakan bagian dari pengaturan tersebut. Perubahan non-kas atas nilai tercatat liabilitas keuangan dalam butir (2), serta Akses terhadap fasilitas SFAs dan konsentrasi risiko likuiditas pada penyedia pembiayaan. <i>On December 1, 2023, the DSAK IAI issued amendments to SFAS 207 and SFAS 107 to require specific disclosures about Supplier Finance Arrangements (SFAs). The amendments respond to investors that said they urgently need more information about SFAs to be able to assess how these arrangements affect an entity's liabilities, cash flows and liquidity risk. To meet investor's needs, the new disclosures will provide information about: The terms and conditions of SFAs. The carrying amount of financial liabilities that are part of SFAs and the line items in which those liabilities are presented. The carrying amount of the financial liabilities in (2) for which suppliers have already received payment from the finance providers. The range of payment due dates for both the financial liabilities that are part of SFAs, and comparable trade payables that are not part of such arrangements. Non-cash changes in the carrying amounts of financial liabilities in (2), and Access to SFAs facilities and concentration of liquidity risk with the finance providers.</i>

TINGKAT KESEHATAN BANK

Bank Health Level

Bank BPD Bali melakukan penilaian atas tingkat kesehatan Bank berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Pengukuran tingkat kesehatan Bank dilakukan berdasarkan risiko dan kinerja Bank, yang dijabarkan dalam 4 (empat) faktor, yaitu profil risiko, tata kelola perusahaan, rentabilitas, dan permodalan.

Laporan Tingkat Kesehatan Bank BPD Bali posisi Desember 2024 menunjukkan bahwa kondisi Bank secara umum sehat yang berperingkat 2 atau sehat. Penjelasan ringkas terkait tingkat Kesehatan Bank berdasarkan keempat faktor penilaian kesehatan Bank adalah sebagai berikut:

Profil Risiko

Profil Risiko Bank termasuk berperingkat 2 yang pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:

- Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank baik, sehingga kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko *Inherent* komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa mendatang; dan
- Kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit memadai, meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.

Tata Kelola

Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik yaitu pada peringkat 2. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Rentabilitas

Rentabilitas memadai yaitu pada peringkat 2. Laba melebihi target dan mendukung pertumbuhan permodalan Bank. Bank yang termasuk dalam peringkat 2 ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik berikut:

- Kinerja Bank dalam menghasilkan laba (rentabilitas) memadai.
- Sumber utama rentabilitas yang berasal dari *core earnings* dominan.
- Komponen-komponen yang mendukung *core earnings* stabil, dan
- Kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba di masa datang tinggi.

Bank BPD Bali assesses the Bank's health level in accordance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 4/POJK.03/2016 and the Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) No. 14/SEOJK.03/2017 on the assessment of the health level of general banks. The assessment of the bank's health level is based on the bank's risk and performance, which are described in 4 (four) factors, namely risk profile, corporate governance, profitability and capital.

The health level report of the bank, as of December 2024, indicates that the condition of the bank in general is healthy with a rating of 2 or healthy. A brief explanation of the Bank's health level based on the four factors of the Bank's health assessment is given below:

Risk Profile

The Bank's risk profile is ranked 2, which generally has the following characteristics:

- *Considering the bank's good business, the potential loss faced by the bank from inherent composite risk is relatively low for a given future period, and*
- *The quality of implementation of composite risk management is adequate, although there are minor weaknesses, However, these weaknesses require management attention.*

Governance

Indicates that the Bank's management has implemented governance that is generally good, with a score of 2. This reflects adequate compliance with governance principles. Where there are weaknesses in implementing the Governance Principles, these are generally less significant and can be addressed using normal management actions.

Profitability

Adequate Profitability, i.e. Rank 2. Profit exceeds the target and supports the growth of the bank's capital. Banks in Rank 2 meet all or most of the following characteristics:

- *The bank's performance in generating profit (profitability) is adequate.*
- *The main source of profitability from core earnings is dominant.*
- *The components that support core earnings are stable, and*
- *The ability of earnings to grow capital and earnings prospects in the future is high.*



Permodalan

Bank memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai yaitu pada peringkat 2 relatif terhadap profil risikonya yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Bank. Bank yang termasuk dalam peringkat 2 ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik berikut:

- Bank memiliki tingkat permodalan yang memadai dan dapat mengantisipasi hampir seluruh risiko yang dihadapi.
- Kualitas komponen permodalan pada umumnya baik, permanen, dapat menyerap kerugian.
- Bank telah melakukan *stress test* dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan memadai, dan
- Bank memiliki manajemen permodalan yang baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang baik.

Analisa Keseluruhan

Bank secara umum sehat yaitu pada peringkat 2, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya yang tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian antara lain profil risiko, tata kelola perusahaan, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. Apabila terdapat kelemahan, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.

Tingkat Kesehatan Bank BPD Bali untuk tahun 2024 dan 2023 sebagai perbandingan disajikan secara ringkas pada tabel berikut ini:

Faktor Penilaian Rating Factors	Peringkat Komposit Composite Rating	
	31 Desember 2024 December 31. 2024	31 Desember 2023 December 31. 2023
Profil Risiko Risk Profile	2	2
Tata Kelola Governance	2	2
Rentabilitas Profitability	2	2
Permodalan Capital	2	2
Peringkat Komposit Composite rating	2	2

Capitalization

The bank has adequate capital quality and adequacy, namely rank 2 relative to its risk profile, accompanied by strong capital management consistent with the bank's business characteristics, size, and complexity. Banks in Category 2 meet all or most of the following characteristics:

- The bank has an adequate level of capital and can anticipate almost all of the risks it faces.*
- The quality of capital components is generally good, durable, and capable of absorbing losses.*
- The bank has conducted stress tests with results that can adequately cover all the risks it faces, and*
- The bank has good capital management and/or a good capital adequacy assessment process.*

Overall Analysis

The Bank is generally sound, ranked 2, and is therefore considered capable of withstanding significant negative impacts from changing business conditions and other external factors, as reflected in the ranking of the assessment factors, including its risk profile, corporate governance, profitability, and capitalization, which are generally good. If there are weaknesses, they are generally less significant.

The health level of Bank BPD Bali for 2024 and 2023 is briefly presented in the following table for comparison:

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI 2024 SERTA PROYEKSI 2025

Comparison of 2024 Targets and Achievements and 2025 Projections

Bank BPD Bali telah menetapkan beberapa target dari aspek operasional dan keuangan serta sumber daya manusia yang telah ditetapkan pada awal tahun 2024. Adapun perbandingan antara target dan realisasi tahun 2024 dan proyeksi tahun 2025 adalah sebagai berikut:

In addition to the explanations of the audited financial statements above, the year-on-year performance of Bank BPD Bali is also presented through various financial ratios as follows:

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)/(Expressed in millions of Rupiah)

Indikator Indicator	2024			2025
	Target	Realisasi Realization	Pencapaian/Deviasi* (%) Achievement/Deviation* (%)	Target
Operasional dan Keuangan Operational & Financial				
Pinjaman yang diberikan Loans	22.842.627	22.830.169	99,95%	24.903.382
Jumlah Aset Total Assets	36.725.502	38.312.652	104,32%	40.419.455
Simpanan dari Nasabah Deposits from Customers	30.184.291	32.167.791	106,57%	33.233.251
Pendapatan bunga – bersih Net Interest Income	2.353.186	2.377.735	101,04%	2.707.433
Laba Tahun Berjalan Income for The Year	781.847	878.466	112,36%	935.346
Rasio Rentabilitas Profitability Ratio				
Marjin Bunga Bersih (NIM) Net Interest Margin (NIM)	6,82%	6,66%	(0,16%)	6,85%
Beban Operasional terhadap Penghasilan Operasional (BOPO) Operating Expenses Operating income	69,13%	66,85%	(2,28%)	68,48%
Imbal Hasil Aktiva (ROA) Return on Assets Ratio (ROA)	3,02%	3,20%	0,18%	3,13%
Imbal Hasil Aktiva (ROE) Return on Equity Ratio (ROE)	20,11%	21,68%	1,57%	21,27%
Rasio Likuiditas Liquidity Ratio				
Loan to Deposit Ratio (LDR)	75,68%	70,95%	(4,73%)	74,94%
Aset Produktif Productive Assets				
NPL - gross	1,75%	0,92%	(0,83%)	1,35%
NPL - net	0,04%	0,02%	(0,02%)	0,03%
Struktur Modal Capital Structure				
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Capital Adequacy Ratio	26,69%	27,45%	0,76%	25,87%
Dividen- Divident Pay Out Ratio	75,00%	75,00%	100,00%	75,00%
SDM				
Total Peserta Program Pendidikan dan Pelatihan Total training program participants	3.543	7.964	224%	3.214
Anggaran Program Pendidikan dan Pelatihan (Rpjuta) Budget of the education and training programs (Rp million)	21.904	21.528	91,84%	23.595



Secara umum, Bank BPD Bali berhasil membukukan kinerja keuangan yang solid lebih baik dari target yang ditetapkan. Bahkan beberapa capaian Bank BPD Bali mampu melebihi rata-rata bank BPD dan rata-rata industri. Pertumbuhan kredit Bank didukung oleh ketersediaan modal yang kuat dengan rasio KPMM sebesar 27,45%, yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata bank BPD sebesar 25,77% dan industri perbankan sebesar 26,69%.

Selain itu, dari sisi rentabilitas rasio NIM Bank sebesar 6,66% atau lebih tinggi dibandingkan rata-rata bank BPD dan industri perbankan masing-masing sebesar 5,24% dan 4,62%. Rasio lainnya adalah rasio BOPO Bank sebesar 66,85% yang lebih baik dibandingkan bank BPD sebesar 81,13% dan industri perbankan sebesar 81,30%. Rasio BOPO yang lebih efisien ini sejalan dengan Upaya Bank melakukan efisiensi biaya operasional terkait biaya umum dan administrasi.

Sejalan dengan capaian kedua rasio tersebut, rasio ROA Bank BPD Bali sebesar 3,20% juga lebih unggul dibandingkan rasio ROA bank BPD sebesar 1,76% dan rasio ROA industri perbankan sebesar 2,69%. Hal ini menunjukkan bahwa Bank mampu melakukan pengelolaan aset secara produktif dan efisien.

Selanjutnya, Bank BPD Bali juga mampu menunjukkan pengelolaan aktiva produktif yang lebih baik ditengah ekspansi bisnis selama tahun 2024. Hal ini ditunjukkan dengan rasio NPL bruto Bank sebesar 0,92% atau lebih baik dibandingkan rasio NPL bruto bank BPD dan industri perbankan masing-masing sebesar 2,48% dan 2,08%. Capaian NPL yang lebih baik ini didukung oleh berbagai upaya Bank antara lain melakukan ekspansi kredit secara hati-hati, pemberian restrukturisasi kepada debitur-debitur yang masih kooperatif, memiliki prospek dan masih memiliki kemampuan membayar, melakukan pemantauan atas pergeseran kualitas kredit secara harian, dan penagihan kredit-kredit NPL.

Sementara itu, realisasi pinjaman yang diberikan yang sedikit lebih rendah dari target yang ditetapkan diakibatkan oleh adanya penurunan baki debet kredit yang lebih besar dibandingkan dengan yang diperkirakan pada RBB Tahun 2024.

Untuk rasio NIM, capaian yang juga sedikit lebih rendah dari target disebabkan oleh realisasi aset produktif yang melampaui target dan pencapaian tersebut lebih besar dibandingkan pencapaian pendapatan bunga bersih. Pencapaian pendapatan bunga bersih dipengaruhi oleh realisasi beban bunga yang melampaui target sebagai dampak dari pencapaian Dana Pihak Ketiga yang diatas target.

Proyeksi Tahun 2025 dan Kebijakan Strategis

2025 Projection and Strategic Policy

Bank BPD Bali telah menetapkan target untuk tahun 2025 sebagaimana yang ditetapkan dalam RBB Bank. Beberapa parameter yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel di atas yang diharapkan dapat tercapai dengan mempertimbangkan capain kinerja Bank yang solid pada tahun 2024.

In general, Bank BPD Bali has managed to achieve a solid financial performance better than targeted. Bank BPD Bali even outperformed the average of BPD banks and the industry average in some of its performances. The bank's loan growth is supported by its strong capital adequacy. The bank's capital adequacy ratio (CAR) is 27.45%, higher than the BPD bank average of 25.77% and the banking industry average of 26.69%.

In addition, in terms of profitability the Bank has an NIM ratio of 6.66%, which is higher than the average of the BPD banks and the banking industry of 5.24% and 4.62% respectively. Another indicator is the Bank's BOPO ratio of 66.85%. This is better than the BPD banks' ratio of 81.13% and the banking industry's ratio of 81.30%. This more efficient BOPO ratio is in line with the Bank's efforts to improve the efficiency of its operating costs in terms of general and administrative expenses.

Consistent with the performance of these two ratios, Bank BPD Bali's ROA ratio of 3.20 percent is also better than BPD banks' ROA ratio of 1.76% and the banking industry's ROA ratio of 2.69%. This demonstrates the bank's ability to manage assets productively and efficiently.

Furthermore, Bank BPD Bali was also able to demonstrate better management of productive assets amidst expanding business in 2024. This is evidenced by the bank's gross NPL ratio of 0.92% or better than BPD banks' and banking industry's gross NPL ratio of 2.48% and 2.08% respectively. This improved NPL performance is supported by various efforts of the Bank. These include prudent credit expansion, offering restructuring to debtors who are still cooperative, have prospects, and are still able to pay, monitoring changes in credit quality on a daily basis, and recovering NPLs.

Mewanwhile, the loan realization was slightly lower than the target was due to the fact that the residual loan debit was reduced more than estimated in the RBB 2024.

The achievement of the NIM ratio was also slightly below target, This was due to the fact that the realization of productive assets exceeded the target, which was higher than the achievement of net interest income. Net interest income achievement was impacted by the realization of interest expense above target as an effect of third party funds achievement above target.

Bank BPD Bali set 2025 target as stipulated in the Bank's RBB. In the table above, several parameters are set which are expected to be achieved by considering the solid performance achievements of the Bank in 2024.

Untuk mencapai target tersebut, Bank BPD Bali telah menetapkan Arah Kebijakan Bank Tahun 2025 yang sejalan dengan rencana strategis Bank sebagai entitas bisnis yang kuat, kontributif, dan kompetitif sesuai dengan *Corporate Plan* Bank BPD Bali tahun 2021-2025. Arah Kebijakan Bank tersebut terdiri dari peningkatan ketahanan kelembagaan, peningkatan kemampuan sebagai *agent of regional development*, dan peningkatan daya saing. Selanjutnya, Bank BPD Bali akan melanjutkan langkah-langkah strategis manajemen Bank yang telah dijalankan pada tahun sebelumnya.

Langkah-langkah strategis Bank untuk meningkatkan ketahanan kelembagaan Bank adalah memperkuat dan meningkatkan permodalan Bank secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas pengelolaan *Governance, Risk Management, Compliance, dan Control*, serta mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank pada peringkat 2. Bank BPD Bali juga meningkatkan kualitas kredit melalui pengendalian *Non-Performing Loan (NPL)* dan menguatkan bisnis untuk mengoptimalkan rentabilitas secara berkelanjutan.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kemampuan sebagai *agent of regional development*, Bank BPD Bali mendorong pertumbuhan penghimpunan dana pihak ketiga dan mendorong pertumbuhan penyaluran kredit khususnya kredit produktif. Bank juga mendorong segmen UMKM sebagai salah satu motor penggerak perekonomian dan pembangunan daerah dengan mempertahankan *share* kredit UMKM sesuai target yang ditetapkan, dan meningkatkan sinergi dan kolaborasi ekosistem digital.

Terakhir, dalam rangka meningkatkan daya saing, Bank meningkatkan inovasi produk dan layanan dalam rangka penguatan loyalitas pelanggan, memperluas jangkauan layanan dan akses dengan memanfaatkan digitalisasi serta meningkatkan aliansi strategis dengan sejumlah mitra, dan memperkuat peran sebagai Bank Devisa dengan meningkatkan pertumbuhan pendapatan dari layanan Bank Devisa meningkatkan *Corporate Brand*. Bank BPD Bali juga memperkuat organisasi dan meningkatkan kapabilitas strategis SDM serta internalisasi budaya Perusahaan serta mengoptimalkan pemanfaatan digitalisasi sebagai *backbone* pelayanan kepada nasabah maupun pengelolaan internal.

To achieve this goal, in accordance with Bank BPD Bali's Corporate Plan for 2021-2025. Bank BPD Bali has set the Bank's Policy Direction for 2025, which is in line with the Bank's strategic plan as a strong, contributing and competitive entity. The Bank's strategic direction consists of increasing institutional resilience, enhancing capabilities as an agent of regional development, and increasing competitiveness. In addition, Bank BPD Bali will continue the Bank's strategic management steps which were implemented in the previous year.

The bank's strategic steps to improve the bank's institutional resilience are to strengthen and increase the bank's capital on a sustainable basis, improve the quality of governance, risk management, compliance, and supervision, and maintain the bank's health level at rank 2. Bank BPD Bali also improves credit quality by controlling nonperforming loans (NPL) and strengthening business to optimize profitability in a sustainable manner.

Furthermore, Bank BPD Bali encourages the growth of third party fund collection and the growth of credit distribution, especially productive credit, in order to improve its capacity as an agent of regional development. The bank also promotes the MSME segment as one of the driving forces of the economy and regional development by maintaining the MSME credit share in accordance with the set target, and increasing the synergy and cooperation of the digital ecosystem.

Finally, to enhance competitiveness, the bank will increase product and service innovation to strengthen customer loyalty, expand service coverage and access by leveraging digitalization and increasing strategic alliances with a number of partners. The bank will also strengthen its role as a foreign exchange bank by increasing revenue growth from foreign exchange banking services and enhancing the corporate brand. Bank BPD Bali also strengthens the organization and improves the strategic human resources capabilities and the internalization of the corporate culture and optimizes the use of digitalization as the backbone of customer service and internal management.



PROSPEK USAHA

Business Prospects

Pemerintah Indonesia menjelaskan outlook ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,1% pada tahun 2024 atau diperkirakan tidak berubah dibandingkan tahun sebelumnya yang sejalan dengan perlambatan perekonomian global. Adapun asumsi dasar outlook ekonomi 2024 dan RAPBN 2025 dari Kementerian Keuangan dijelaskan pada tabel berikut ini:

Indikator Indicator	Outlook 2024	RAPBN 2025
Pertumbuhan Ekonomi (%.yoy) Economic Growth (%.yoy)	5,1	5,2
Inflasi (%.yoy) Inflation (%.yoy)	2,7	2,5
Nilai Tukar (Rp/US\$) Exchange Rate (Rp/US\$)	16.000	16.100
Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun (%) 10-Year SUN Interest Rate (%)	6,9	7,1
Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barrel) Indonesian Crude Oil Price (US\$/barrel)	82	82
Lifting Minyak Mentah (ribu barrel per hari) Crude Oil Production (thousand barrels per day)	592	600
Lifting Gas (ribu barrel setara minyak per hari) Gas Lifting (thousand barrels of oil equivalent per day)	990	1.005

Sejalan dengan estimasi pertumbuhan ekonomi tersebut, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan memperkirakan pertumbuhan kredit pada tahun 2024 mencapai 10-12%. Selanjutnya, untuk tahun 2025, Bank Indonesia memproyeksikan kenaikan kredit sebesar 11-13% pada tahun 2025. Estimasi pertumbuhan kredit ini didukung oleh rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perbankan pada September 2024 tercatat sebesar 26,78% dan tergolong kuat dalam menyerap risiko serta mendukung pertumbuhan kredit.

Selain itu, menurut Bank Indonesia, terjaganya risiko kredit tecermin pula pada rasio *Loan at Risk* (LAR) yang terus menurun. Perbankan pada umumnya telah membuat Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang besar atas risiko kreditnya. Hasil *stress-test* menunjukkan ketahanan perbankan Indonesia yang kuat, tecermin pada ketahanan permodalan CAR yang masih di atas 25% pada berbagai skenario. Ketahanan permodalan dan likuiditas perbankan juga ditopang oleh kemampuan membayar atau *Interest Coverage Ratio* (ICR) dan profitabilitas korporasi yang terjaga yang sejalan dengan hasil *stress-test* perbankan terkini.

Di tahun mendatang, stabilitas sistem keuangan diharapkan akan tetap terjaga dengan semakin meningkatnya kinerja perekonomian nasional. Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

Di sisi lain, sebagai sebuah bank BPD yang beroperasi di provinsi Bali, prospek ekonomi Bali yang tumbuh lebih kuat menjadi salah satu katalis utama perbaikan kinerja Bank BPD Bali pada tahun mendatang. Bank

The Government of Indonesia has stated that the economic outlook for Indonesia in 2024 is estimated to grow by 5.1% or to remain unchanged compared to the previous year, in line with the global economic slowdown. The following table explains the basic assumptions of the Ministry of Finance's 2024 economic outlook and 2025 RAPBN:

In line with economic growth estimates, Bank Indonesia and the Financial Services Authority estimate that credit growth will be 10-12% in 2024. In addition, for 2025, Bank Indonesia projects that credit growth will reach 11-13 percent in 2025. This estimated credit growth is supported by the banks' capital adequacy ratio (CAR), which was recorded at 26.78% in September 2024. The CAR is considered strong in absorbing risks and supporting credit growth.

Moreover, according to Bank Indonesia, credit risk has been maintained. This is also reflected in the Loan at Risk (LAR) ratio, which continues to decline. In general, banks have set aside a large amount of allowance for credit losses (CKPN) for their credit risk. The stress test results show the strong resilience of Indonesian banks. This is reflected in the resilience of CAR capital, which remains above 25% in various scenarios. The resilience of bank capital and liquidity is also supported by the solvency or interest coverage ratio (ICR) and the maintenance of corporate profitability, which is in line with the results of the latest bank stress test.

Next year, financial system stability is expected to be maintained in line with the improvement in the performance of the national economy. Bank Indonesia will also continue to strengthen the policy synergy with the Financial System Stability Committee (KSSK) in order to maintain the stability of the financial system.

On the other hand, as a BPD bank operating in Bali Province, the prospect of a stronger Balinese economy is one of the most important catalysts for improving the performance of Bank BPD Bali in the coming year.

Indonesia memperkirakan perekonomian Bali tumbuh pada rentang 5.0%-5.8% pada tahun 2025. Sektor pariwisata masih menjadi andalan bagi ekonomi Bali disamping dukungan dari sektor lainnya yakni pertanian, konstruksi, Perkiraan perbaikan ekonomi Bali juga didukung oleh tingkat inflasi yang tetap terjaga pada rentang sasaran inflasi 2,5±1%.

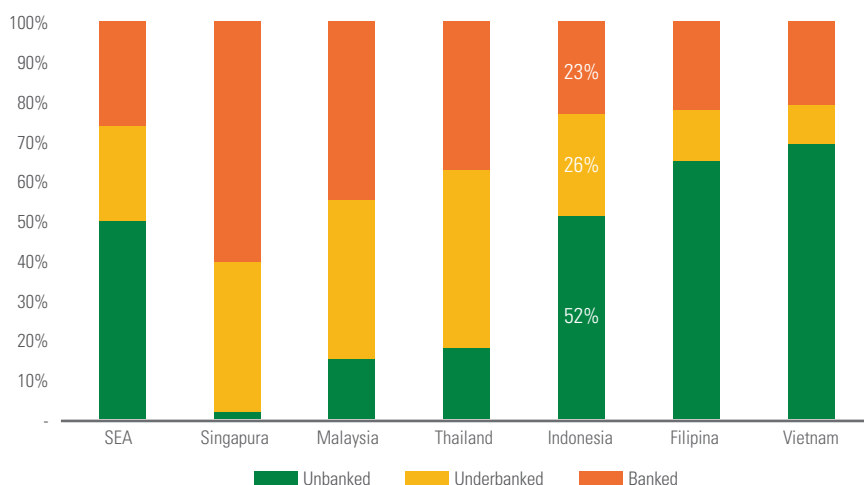
Selanjutnya, terkait dengan ekonomi digital di Indonesia, e-Conomy memperkirakan nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan akan mencapai *Gross Merchandise Value* (GMV) sebesar US\$200-360 miliar pada tahun 2030. Proyeksi GMV ini diperkuat dengan perkiraan kontribusi sektor *e-commerce* senilai US\$150 miliar, transportasi *online* sebesar US\$17 miliar, transportasi online dan pengiriman senilai US\$20 miliar, *online travel* senilai US\$17 miliar, dan media *online* sebesar US\$15 miliar pada tahun 2030.

Terakhir, penetrasi layanan perbankan yang masih rendah diharapkan mendukung pengembangan perbankan digital di Indonesia. Laporan Google, Temasek, dan Bain & Company tahun 2024 menjelaskan bahwa persentase *unbanked* dan *underbanked* masing-masing sebesar 51,00% dan 26,00% dari total populasi penduduk Indonesia berusia di atas 18 tahun sebanyak 181 juta. Dengan demikian, secara kumulatif terdapat 77% target pasar sebagai prospek pengembangan perbankan digital Bank khususnya yang berada di provinsi Bali dan sekitarnya.

Bank Indonesia's growth forecast for the Balinese economy is in the range of 5.0% to 5.8% in 2025. Tourism continues to be the mainstay of the Balinese economy, supported by other sectors, namely agriculture and construction. The estimated improvement in Bali's economy is also supported by inflation remaining within the target range of 2.5±1%.

Furthermore, in relation to Indonesia's digital economy, e-Conomy estimates that the value of Indonesia's digital economy will reach a Gross Merchandise Value (GMV) of US\$200-360 billion in 2030. This GMV projection is supported by the estimated contribution of the e-commerce sector at US\$150 billion. online transport at US\$17 billion. online transport and delivery at US\$20 billion. online travel at US\$17 billion. and online media at US\$15 billion in 2030.

Finally, the low penetration rate of banking services in Indonesia is expected to support the development of digital banking in the country. Google, Temasek, and Bain & Company's 2024 report explains that the unbanked and underbanked percentages are 51.00% and 26.00% respectively. of Indonesia's total population of 181 million aged 18+. Thus, cumulatively, there is 77% of the targeted market as a prospect for the Bank to develop digital banking especially in Bali province and its surroundings.



Sumber: Google, Temasek, dan Bain & Company

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

Business Continuity Information

Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha

Potential Significant Impact on Business Continuity

Selaras dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 4,8-5,6% pada tahun 2025 dan sebesar 4,9-5,7% pada tahun 2026. Ditengah tantangan daya beli masyarakat kelas menengah dan bawah yang melemah, BI memproyeksikan konsumsi dan investasi akan meningkat sedangkan ekspor masih cukup baik di tengah perlambatan ekonomi dunia. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti dengan proyeksi pertumbuhan kredit lebih tinggi sebesar 11-13% pada tahun 2025 dan 2026. Estimasi pertumbuhan kredit tersebut didukung oleh stabilitas sistem keuangan yang terjaga dengan baik diperkuat dengan hasil *stress-test* menunjukkan ketahanan dari dampak gejolak global.

Ekonomi provinsi Bali yang secara historis mampu tumbuh lebih tinggi dibandingkan perekonomian Indonesia diharapkan berlanjut pada tahun 2025. Perkiraan pertumbuhan ekonomi provinsi Bali sebesar 5,0%-5,8% pada tahun 2025 pada tahun mendatang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan berkelanjutan Bank BPD Bali di masa mendatang.

Selanjutnya, terkait layanan perbankan digital, Bank Indonesia memperkirakan *digital payment* tumbuh 48,7% *yoy* menjadi Rp105.664,7 triliun pada tahun 2025. Proyeksi *digital payment* ini terutama didukung oleh *internet banking* yang diproyeksikan tumbuh 46,1% *yoy* menjadi Rp66.293,0 triliun dan *mobile banking* dengan perkiraan pertumbuhan sebesar 53,6% *yoy* menjadi Rp37.612,9 triliun pada tahun 2025. Pembayaran non-tunai lainnya yakni QRIS juga diperkirakan BI tumbuh 14,7% menjadi Rp638,2 triliun.

In line with the Indonesian Government's projected economic growth, Bank Indonesia (BI) expects Indonesia's GDP to grow by 4.8-5.6% in 2025 and 4.9-5.7% in 2026. Amid the challenges of the weakening purchasing power of the middle and lower classes, BI expects that consumption and investment will increase, while exports will continue to be quite good in the midst of the global economic slowdown. Following the projected economic growth, credit is projected to grow at a higher rate of 11-13% in 2025 and 2026. The credit growth estimate is supported by the stability of the financial system, which has been well maintained and reinforced by stress test results showing resilience to the impact of global turmoil.

The economy of the province of Bali, which has been able to grow at a higher rate than the Indonesian economy in the past, is expected to continue in 2025. Bali Province's estimated economic growth of 5.0%-5.8% in 2025 next year is expected to drive sustainable growth for Bank BPD Bali in the future.

*Moreover, in terms of digital banking services, Bank Indonesia estimates that digital payments will grow by 48.7% *yoy* to Rp105.664.7 trillion in 2025. This digital payments projection is mainly supported by internet banking, which is expected to grow by 46.1% *yoy* to Rp66.293.0 trillion, and mobile banking, which is estimated to grow by 53.6% *yoy* to Rp37.612.9 trillion in 2025. Other non-cash payments, namely QRIS, will also have an estimated growth of 14.7% to Rp638.2 trillion by BI.*

Assessment Manajemen terhadap Faktor yang Mempengaruhi Kelangsungan Usaha

Management Assessment of Business Continuity Factors

Bank BPD Bali menilai kelangsungan usaha dan mengukur kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usaha. Hal ini dapat dilihat dari kekuatan yang dimiliki oleh Bank BPD Bali sebagai bank pemegang kas daerah yang mengelola ekosistem penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah serta mempunyai *captive market* Aparatur Sipil Negara (ASN), pensiunan ASN, dan pembiayaan proyek-proyek yang dibiayai dengan APBD/BUMD. Peran Bank dalam membangun daerah juga didukung oleh komitmen Pemerintah Daerah selaku pemilik Bank dalam penguatan ketahanan kelembagaan melalui dukungan setoran modal.

Bank BPD Bali juga memiliki jaringan kantor dan layanan yang tersebar di setiap kecamatan dengan *online real time*, termasuk jaringan agen Bank di seluruh Bali dan Lombok. Jaringan kantor dan layanan yang kuat ini didukung oleh ketersediaan produk dana dan kredit termasuk kredit UMKM yang beragam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

BPD Bali assesses business continuity and measures the bank's business continuity capability. This can be seen from the strength of Bank BPD Bali as a bank that holds regional cash, which manages the ecosystem of regional government revenues and expenditures, and has a captive market of the State Civil Apparatus (ASN), retired ASN, and the financing of projects financed by the APBD/BUMD. The Bank's role in the development of the region is also supported by the commitment of the Regional Government, as the Bank's owner, to strengthen institutional resilience through capital injection support.

Bank BPD Bali also has a network of offices and services spread across all sub-districts with real-time online, including a network of bank agents throughout Bali and Lombok. This strong network of offices and services is supported by the availability of financing and loan products including various MSME loans to meet the needs of the community.

Terakhir, penilaian internal Bank dan OJK atas Tingkat Kesehatan Bank yang berada pada peringkat 2 (dua) atau “sehat” dan penetapan *rating* Bank id/A+/stable outlook oleh pihak eksternal yakni Pefindo sebagai lembaga pemeringkat menunjukkan ekspektasi risiko *default* rendah. Hal ini juga akan mempengaruhi kelangsungan usaha Bank guna mendukung pengembangan produk, layanan dan/atau jasa serta aktivitas operasional Bank.

Finally, the Bank and OJK's internal assessment of the Bank's Health is rated 2 (two) or "healthy," and the determination of the bank's rating idA+/stable outlook by an external party, namely Pefindo as the rating agency, show low default risk expectations. This will also affect the continuity of the Bank's business to support the development of products, services, and/or services, as well as the bank's operational activities.

Asumsi yang Digunakan Manajemen dalam Melakukan Assessment

Assumptions Used by Management in Making Assessment

Bank BPD Bali memperhatikan beragam aspek penting dalam pengelolaan usaha seperti aspek permodalan kualitas aset produktif, rentabilitas, likuiditas, pendanaan, penyertaan modal, dan rencana permodalan. Bank juga mempertimbangkan rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia termasuk di dalamnya pengembangan sistem informasi manajemen. Selanjutnya, Bank BPD Bali juga memperhatikan aspek penerbitan produk dan aktivitas baru termasuk transformasi digital secara berkelanjutan disamping rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor dengan mengacu kepada Rencana Bisnis Bank (RBB).

Bank BPD Bali takes into account various important aspects in the management of the business such as capital, quality of productive assets, profitability, liquidity, funding, equity participation and capital plans. The Bank also considers organizational and human resource development plans including developing Management Information Systems. In addition, Bank BPD Bali also considers aspects related to the issuance of new products and activities, including sustainable digital transformation, as well as plans for the development and/or modification of office networks, with reference to the bank's business plan (RBB).

Beragam aspek penting tersebut selanjutnya dijabarkan dalam RBB dan menjadi parameter bagi Bank untuk mempertahankan kelangsungan usaha di industri perbankan nasional. Bank BPD Bali juga menjadikan berbagai aspek penting tersebut menjadi indikator evaluasi kinerja dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, Bank juga menerapkan aspek keuangan berkelanjutan dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan memperhatikan aspek lingkungan, aspek sosial dan tata kelola perusahaan yang baik.

These various important aspects are then described in the RBB and become the parameters for the bank to maintain the continuity of its business in the national banking industry. Bank BPD Bali also uses these various important aspects to measure and evaluate performance compared to previously set targets. In addition, the bank also applies sustainable financial aspects in conducting its business activities. It considers environmental aspects, social aspects, and good corporate governance.



INFORMASI PERMODALAN DAN EKSPOSURE RISIKO

Information on Capital and Exposure to Risk

Struktur Permodalan

Capital Structure

Kecukupan Permodalan

Tujuan manajemen permodalan Bank adalah untuk mempertahankan posisi modal yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan mempertahankan investor, deposan, pelanggan dan kepercayaan pasar. Dalam pengelolaan permodalan, Bank mempertimbangkan faktor-faktor, seperti: pengembalian modal yang optimal pada pemegang saham, menjaga keseimbangan antara keuntungan yang lebih tinggi dengan gearing ratio serta keamanan yang diberikan oleh posisi modal yang sehat.

Bank BPD Bali mengatur struktur modal dan membuat penyesuaian atas perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko kegiatannya. Tidak terdapat perubahan tujuan, kebijakan dan proses dari tahun sebelumnya.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Bank telah memenuhi semua persyaratan modal yang diwajibkan.

Rasio Liabilitas Penyediaan Modal Minimum

Rasio Liabilitas Penyediaan Modal Minimum *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio modal terhadap aset tertimbang menurut risiko *Risk-Weighted Assets* (RWA). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, jumlah modal untuk risiko kredit terdiri dari Modal Inti ("Tier I") dan Modal Pelengkap ("Tier II") dikurangi penyertaan pada Entitas Anak. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 dan Peraturan OJK No.34/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan Surat Edaran OJK No.9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional, sejak 1 Juli 2020, Cadangan Tujuan tidak dapat lagi diperhitungkan sebagai komponen Modal Bank.

Rasio kewajiban penyediaan modal minimum pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Capital Adequacy

The objective of the Bank's capital management is the maintenance of a strong capital position in order to support the growth of the business and to maintain the confidence of investors, depositors, customers and the market. In managing its capital, the Bank takes into account factors such as: the optimal return on capital to shareholders, the maintenance of a balance between higher profits and leverage ratios, and the security provided by a sound capital position.

Bank BPD Bali regulates its capital structure and makes adjustments in response to changes in the economic environment and in the risk characteristics of its business activities. There are no changes in the objectives, policies and processes from the previous year.

As of December 31, 2024 and 2023, the Bank is in compliance with all capital adequacy requirements.

Capital Adequacy Ratio

The Capital Adequacy Ratio (CAR) is the ratio of the capital to the risk weighted assets (RWA). Based on the regulation of the Financial Services Agency, the amount of capital for credit risk consists of core capital ("Tier I") and supplementary capital ("Tier II") less investments in subsidiaries. In accordance with OJK Regulation No. 11/POJK.03/2016 and OJK Regulation No. 34/POJK.03/2016 on the minimum capital adequacy ratio for commercial banks and OJK Circular Letter No. 9/SEOJK.03/2020 on the transparency and publication of reports of conventional commercial banks, as of July 1, 2020, the purpose reserve can no longer be calculated as a component of bank capital.

The minimum capital ratio as of December 31, 2024 and 2023 is as follows:

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)/(Expressed in millions of Rupiah)

	2024	2023	
Aset Tertimbang Menurut Risiko			Risk Weight Asset
Risiko Kredit	15.945.083	14.873.124	Credit Risk
Risiko Pasar	36.951	19.311	Market Risk
Risiko Operasional	1.238.086	1.114.397	Operational Risk
Modal			Capital
Modal Inti	4.526.744	3.687.582	Core Capital
Modal Pelengkap	199.618	186.628	Supplementary Capital
Jumlah Modal	4.726.362	4.054.210	Total Capital

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)/(Expressed in millions of Rupiah)

	2024	2023	
Dengan memperhitungkan risiko kredit tetapi tanpa memperhitungkan risiko pasar dan risiko operasional	29,64%	27,32%	Calculating the credit risk but without market risk and operational risk
Dengan memperhitungkan risiko kredit dan risiko pasar tetapi tanpa memperhitungkan risiko operasional	29,57%	27,28%	Calculating the credit risk and and market risk but without operational
Dengan memperhitungkan risiko kredit dan risiko operasional tetapi tanpa memperhitungkan risiko pasar	27,51%	25,41%	Calculating the credit risk and operational risk but without market risk
Dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional	27,45%	25,38%	Calculating the credit risk, market risk, and operational risk
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan			The minimum capital requirement ratio required by Financial
Pilar 1	8,00%	8,00%	Tier 1
Pilar 2	9,21%	9,21%	Tier 2

Pengungkapan Kuantitatif

Quantitative Disclosure

Permodalan	31-Des-24	31-Des-23	Capital
	Bank	Bank	
I. Modal Inti (Tier 1)	4.526.744	3.876.582	I. Core Capital (Tier 1)
1. Modal Inti Utama CET 1	4.526.744	3.876.582	1. Common Equity Tier 1 (CET 1)
1.1 Modal disetor (setelah dikurangi Treasury Stock)	2.407.177	2.050.257	1.1 Paid-in capital (net of Treasury Stock)
1.2 Cadangan Tambahan Modal	2.323.486	1.998.691	1.2 Disclosed Reserves
1.2.1 Faktor Penambah	2.323.923	1.999.128	1.2.1 Additional Factor
1.2.1.1 Pendapatan Komprehensif Lainnya	-	-	1.2.1.1 Other comprehensive income
1.2.1.1.1 Selisih lebih penjabaran laporan keuangan	-	-	1.2.1.1.1 Excess differences arising from translation of financial statement
1.2.1.1.2 Potensi Keuntungan dari Peningkatan Nilai Wajar Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk dijual	-	-	1.2.1.1.2 Potential gain of the increase in the fair value of financial assets available for sale
1.2.1.1.3 Saldo Surplus Revaluasi Aset Tetap	-	-	1.2.1.1.3 Surplus of fixed assets revaluat
1.2.1.2 Cadangan Tambahan Modal Lainnya	2.323.923	1.999.128	1.2.1.2 Other Disclosed Reserves
1.2.1.2.1 Agio	-	-	1.2.1.2.1 Agio
1.2.1.2.2 Cadangan Umum	1.445.457	1.260.900	1.2.1.2.2 General reserves
1.2.1.2.3 Laba Tahun-Tahun Lalu	-	-	1.2.1.2.3 Previous year profit
1.2.1.2.4 Laba Tahun Berjalan	878.466	738.228	1.2.1.2.4 Current year profit
1.2.1.2.5 Dana Setoran Modal	-	-	1.2.1.2.5 Funds for paid-in capital
1.2.1.2.6 Lainnya	-	-	1.2.1.2.6 Others
1.2.2 Faktor Pengurang	437	437	1.2.2 Deduction Factor
1.2.2.1 Pendapatan Komprehensif Lainnya	-	-	1.2.2.1 Other comprehensive income



Permodalan	31-Des-24	31-Des-23	Capital
	Bank	Bank	
1.2.2.1.1 Selisih Kurang Penjabaran Laporan Keuangan	-	-	1.2.2.1.1 Negative differences arising from translation of financial statement
1.2.2.1.2 Potensi Kerugian dari Penurunan Nilai Wajar Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	-	-	1.2.2.1.2 Potential losses from the decrease in the fair value of financial assets available for sale
1.2.2.2 Cadangan Tambahan Modal Lainnya	437	437	1.2.2.2 Other disclosed reserves
1.2.2.2.1 Disagio	-	-	1.2.2.2.1 Disagio
1.2.2.2.2 Rugi Tahun-Tahun Lalu	-	-	1.2.2.2.2 Previous year loss
1.2.2.2.3 Rugi Tahun Berjalan	-	-	1.2.2.2.3 Current year loss
1.2.2.2.4 Selisih Kurang antara Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas Aset Produktif	-	-	1.2.2.2.4 Negative difference in allowance for possible losses and allowance for impairment on earning assets
1.2.2.2.5 Selisih Kurang Jumlah Penyesuaian Nilai Wajar dari Instrumen Keuangan dalam Trading Book	-	-	1.2.2.2.5 Negative difference in adjustment amounts from fair value of financial assets in trading book
1.2.2.2.6 PPA Aset Non Produktif yang Wajib dibentuk	437	437	1.2.2.2.6 Required allowance for non earning asset
1.2.2.2.7 Lainnya	-	-	1.2.2.2.7 Others
1.3 Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan	-	-	1.3 Non controlling interest
1.4 Faktor Pengurang Modal Inti Utama	203.919	172.366	1.4 Deduction Factor of CET 1
1.4.1 Perhitungan Pajak Tangguhan	152.159	124.597	1.4.1 Deferred tax calculation
1.4.2 Goodwill	-	-	1.4.2 Goodwill
1.4.3 Aset Tidak Berwujud Lainnya	51.760	47.769	1.4.3 Other intangible assets
1.4.4 Penyertaan yang Diperhitungkan sebagai Faktor Pengurang	-	-	1.4.4 Investments in share
1.4.5 Kekurangan Modal pada Entitas Anak asuransi	-	-	1.4.5 Shortfall of capital on insurance subsidiaries
1.4.6 Eksposur Sekuritisasi	-	-	1.4.6 Securitisation exposure
1.4.7 Faktor Pengurang Modal Inti Utama Lainnya	-	-	1.4.7 Other deduction of CET 1
1.4.7.1 Penempatan Dana pada Instrumen AT 1 dan/atau Tier 2 pada Bank Lain	-	-	1.4.7.1 Placement of funds in instrumen AT 1 and/or Tier 2 to other bank
1.4.7.2 Kepemilikan Silang pada Entitas Lain yang diperoleh Berdasarkan Peralihan karena Hukum, Hibah, atau Hibah Wasiat	-	-	1.4.7.2 Cross-ownership in another entity acquired by the transition due to law, grants, or grants will

Permodalan	31-Des-24	31-Des-23	Capital
	Bank	Bank	
1.4.7.3Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan <i>Settlement (Settlement Risk) - Non Delivery Versus Payment</i>	-	-	1.4.7.3Exposures that give rise to credit risk due the settlement risk (<i>settlement risk</i>) - Non Delivery Versus Payment
1.4.7.4Eksposur di Perusahaan Anak yang melakukan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah (Apabila ada)	-	-	1.4.7.4Exposures in Subsidiaries that do business activity based on sharia principles (if available)
2. Modal Inti Tambahan	-	-	2. Additional Tier 1 (AT 1)
2.1 Instrumen yang Memenuhi Persyaratan AT 1	-	-	2.1 Instrument which comply with AT 1 requirements
2.2 Agio/Disagio	-	-	2.2 Agio/Disagio
2.3 Faktor Pengurang Modal Inti Tambahan	-	-	2.3 Deduction factor of AT 1
2.3.1 Penempatan Dana pada Instrumen AT 1 dan/atau Tier 2 pada Bank Lain	-	-	2.3.1 Placement of funds in instrument AT 1 and/or Tier 2 to other bank
2.3.2Kepemilikan Silang pada Entitas Lain yang Diperoleh berdasarkan Peralihan karena Hukum. Hibah. atau Hibah Wasi	-	-	2.3.2Cross-ownership in another entity acquired by the transition due to law. grants. or grants will
II. Modal Pelengkap (Tier 2)	199.618	186.628	II Supplemental Capital (Tier 2)
1. Instrumen Modal dalam bentuk Saham atau Lainnya yang memenuhi Persyaratan Tier 2	-	-	1. Capital Instrument in the form of Stock or others which comply with Tier 2Requirements
2. Agio/Disagio	-	-	2. Agio/Disagio
3. Cadangan Umum PPA atas Aset Produktif yang Wajib dibentuk (PalingTinggi 1.25% ATMR Risiko Kredit)	199.618	186.628	3. General provision on earning assets (max. 1.25% credit risk - weighted assets)
4. Faktor Pengurang Modal Pelengkap	-	-	4. Deduction supplemental capital
4.1 <i>Sinking Fund</i>	-	-	4.1 Sinking Fund
4.2 Investasi pada Instrumen Tier 2 pada Bank Lain	-	-	4.2 Placement of funds in instrument AT 1 and/or Tier 2 to other bank
4.3 Kepemilikan Silang pada Entitas Lain yang Diperoleh berdasarkan Peralihan karena Hukum. Hibah. atau Hibah Wasiat	-	-	4.3 Cross-ownership in another entity acquired by the transition due to law. grants. or grants will
III. TOTAL MODAL (I+II)	4.726.362	4.063.210	TOTAL CORE AND SUPPLEMENTAL CAPITAL

INFORMASI EKSPOSUR RISIKO

Risk Exposure Information

Pengungkapan Eksposur Risiko dan Penerapan Manajemen Risiko

Disclosure of Risk Exposures and Implementation of Risk Management

Risiko Kredit

Parameter Pendekatan

- a. Informasi mengenai penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit, termasuk organisasi manajemen risiko kredit, strategi manajemen risiko kredit untuk aktivitas yang memiliki eksposur risiko kredit yang signifikan, kebijakan pengelolaan risiko konsentrasi kredit, serta mekanisme pengukuran dan pengendalian risiko kredit;
 - Dalam pengelolaan risiko yang timbul dari kegiatan usaha, PT Bank Pembangunan Daerah Bali memerlukan suatu kebijakan, prosedur, dan metodologi guna mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan setiap jenis risiko yang melekat pada setiap kegiatan. PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah memiliki Komite Kebijakan Perkreditan sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor : 0156/KEP/DIR/KRD/2023 Tanggal 30 Maret 2023 tentang Struktur Keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang diketuai oleh Direktur Utama, Wakil Ketua Direktur Kredit, Sekretaris Kepala Divisi Kredit Korporasi, Anggota terdiri dari Direktur Operasional dan TI, Direktur Bisnis, Direktur Kepatuhan, Kepala Divisi Kredit Ritel dan Konsumer, Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepala Divisi Kepatuhan, Kepala SKAI & Anti Fraud, Kepala Divisi Operasional Keuangan dan Akutansi serta Koordinator SSG yaitu Kepala Divisi Kredit Ritel dan Konsumer yang didukung oleh staf *supporting group* memiliki fungsi :
 1. Memberi masukan dan saran dalam rangka penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
 2. Mengawasi dan memastikan kebijakan perkreditan Bank untuk dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapannya.
 3. Melakukan kajian berkala terhadap kebijakan perkreditan Bank dan memberikan saran kepada Direktur Utama apabila diperlukan perubahan atau perbaikan.
 4. Memantau dan Mengevaluasi :
 - Perkembangan dan kualitas seluruh portofolio perkreditan;
 - Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit;
 - Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu;
 - Kebenaran pelaksanaan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
 - Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit;
 - Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Memantau kewajiban Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Credit Risk

Parameters of Approach

- a. Information on the application of risk management for credit risk, including the organization for managing credit risk, the strategy for managing credit risk for activities with significant credit risk exposure, the policy for managing credit concentration risk, and the mechanisms for measuring and controlling credit risk;
 - In the management of risks arising from business activities, PT Bank Pembangunan Daerah Bali requires a policy, a procedure and a methodology for the identification, measurement, monitoring and control of each type of risk inherent in each type of activity. PT Bank Pembangunan Daerah Bali has established a Credit Policy Committee in accordance with Board of Directors' Resolution No: 0156/KEP/DIR/KRD/2023 dated March 30, 2023 on the Membership Structure of the Credit Policy Committee of PT Bank Pembangunan Daerah Bali, which is chaired by the President Director, Deputy Credit Director, Secretary to the Head of Corporate Credit Division, members consist of Director of Operations and IT, Director of Business, Compliance Division, Head of SKAI & Anti Fraud Division, Head of Finance and Accounting Operations Division, and the SSG Coordinator, namely the Head of Retail and Consumer Credit Division, supported by support group staff who have the following functions:
 1. To provide input and suggestions in the preparation of the Bank's credit policy, especially in the formulation of the principle of prudence in lending.
 2. To monitor and ensure that the Bank's credit policy can be implemented and executed in a consistent and uniform manner, and to formulate solutions in case of obstacles/ constraints in its implementation.
 3. To conduct periodic reviews of the Bank's credit policy and to make proposals to the President Director when changes or improvements are needed.
 4. To monitor and evaluate
 - Development and quality of the entire credit portfolio;
 - Correctness of the implementation of the credit decision authority;
 - Correctness of the process of granting, development and quality of loans granted to parties related to the Bank and certain large debtors;
 - Correctness of the implementation of the maximum credit limit (BMPK);
 - Compliance with laws and regulations and other rules in the implementation of credit;
 - Settlement of problem loans in accordance with applicable regulations;
 - Monitoring of the Bank's obligations in compliance with the adequacy of the provision for loan losses (CKPN);

- Bank telah melakukan kajian risiko kredit dari sisi kualitas kredit, yaitu NPL dan KAP dari masing-masing sektor ekonomi, portofolio, dan sumber dana, yang dapat digunakan sebagai sumber informasi potensi risiko kredit secara *bank wide* setiap bulan, untuk melakukan identifikasi terhadap konsentrasi risiko kredit. Bank juga telah memiliki ketentuan mengenai *Risk Acceptance Criteria* (RAC) yang digunakan sebagai *prescreening* dalam rangka penyaluran kredit.
 - Bank melakukan tindak lanjut atas perbaikan rasio NPL dengan melakukan ekspansi kredit secara hati-hati, penagihan, penyelamatan kredit/restrukturisasi, lelang hak tanggungan dan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI). Bank juga telah melakukan strategi perbaikan kualitas debitur diantaranya dengan penanganan kredit bermasalah melalui pelaksanaan restrukturisasi kredit terhadap debitur-debitur yang masih memiliki prospek usaha, kooperatif dan pengikatannya telah sempurna, dimana dimungkinkan untuk dilakukan restrukturisasi kepada debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunganya tanpa harus terlebih dahulu masuk kategori *non performing loan*, meningkatkan pemantauan terhadap kredit-kredit yang memiliki potensi risiko kredit bermasalah melalui pengetatan pemantauan kredit secara berkala, melakukan pembinaan kepada debitur-debitur bermasalah yang masih kooperatif dan ekspansi kredit yang memfokuskan penyaluran kredit dengan potensi risiko rendah.
- b. Definisi tagihan yang telah jatuh tempo dan tagihan yang mengalami penurunan nilai (*impairment*); dan
- Tagihan yang telah jatuh tempo adalah seluruh tagihan baik Tagihan Kepada Pemerintah, Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik, Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional, Tagihan Kepada Bank, Kredit Beragun Rumah Tinggal, Kredit Beragun Properti Komersial, Kredit Pegawai atau Pensiunan, Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel, dan Tagihan Kepada Korporasi yang telah jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, baik atas pembayaran pokok dan/atau pembayaran bunga. Tagihan yang telah mengalami penurunan nilai (*impairment*) merupakan tagihan yang mengalami penurunan nilai kredit ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan yang telah terjadi.
- c. Penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan untuk pembentukan CKPN individual dan kolektif, serta metode statistik yang digunakan dalam perhitungan CKPN.
- Pembentukan CKPN sebesar nilai tercatat kredit tidak semata merupakan penghentian pengakuan karena bank masih memiliki hak kontraktual atas penerimaan arus kas masa datang yang berasal dari kredit. Hal ini sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0736/KEP/DIR/OKA/2024 Tentang Standar Operasional Prosedur Akutansi, tanggal 19 Desember 2024. Perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu : pengelompokan kualitas/*stage* kredit menjadi 3 bagian terdiri
- *The Bank has conducted a credit risk study in terms of credit quality, i.e. NPL and KAP from each economic sector, portfolio and source of funds, which can be used as a source of information on potential credit risk on a bank-wide basis on a monthly basis in order to identify the concentration of credit risk. The Bank has also established Risk Acceptance Criteria (RAC), which are used as a pre-screening tool in the credit allocation process.*
 - *The Bank pursues the improvement of the NPL ratio through prudent credit expansion, collection, credit rescue/restructuring, auction of mortgage rights and coordination with the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia (KPK-RI). The Bank has also implemented strategies to improve the quality borrowers, including by addressing problem loans through the implementation of loan restructuring for borrowers who still have business prospects, are cooperative, and whose obligations have been perfected, where it is possible to implement restructuring for borrowers who have difficulty paying principal and/or interest without having to enter the NPL category first, strengthening monitoring of loans that have the potential for problematic credit risk by periodically tightening credit monitoring, providing guidance to problematic borrowers who are still cooperative, and credit expansion that focuses on the distribution of loans with low risk potential.*
- b. *Definition of Past Due and Impaired Exposures; and*
- *Past due loans and advances are all loans and advances, including loans and advances to the government, loans and advances to public sector entities, loans and advances to multilateral development banks and international institutions, loans and advances to banks, residential mortgages, commercial mortgages, loans and advances to employees or pensioners, loans and advances to microenterprises, small enterprises and retail portfolios, and loans and advances to corporates, that are past due for more than 90 (ninety) days with respect to both principal and/or interest payments. Impaired loans are loans that experience a decline in credit quality when one or more events have occurred that have an adverse effect on the estimated future cash flows of the financial assets.*
- c. *Explanation of the approach used to establish individual and collective CKPN and the statistical methods used to calculate CKPN.*
- *The establishment of CKPN at the recorded value of the loan is not a mere derecognition because the bank still has contractual rights to receive future cash flows from the loan. This is in line with the Board of Directors Resolution of PT Bank Pembangunan Daerah Bali No. 0736/KEP/DIR/OKA/2024 on Accounting Standard Operating Procedures dated December 19, 2024. The calculation of allowance for impairment losses is grouped into 2 (two), namely: Grouping of credit quality / stage into 3 parts consisting of 12-month expected credit and expected credit*

dari kredit ekspektasian 12 bulan dan kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang disebut (*stage 1*). Kerugian kredit yang dihasilkan dari seluruh kemungkinan peristiwa gagal bayar selama perkiraan umur dari instrument keuangan seluruhnya yang di sebut (*stage 2*) serta aset keuangan yang mengalami penurunan nilai kredit ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi (*stage 3*). Penetapan kategori kredit yang diberikan dalam aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komperhensif lain.

- d. Informasi mengenai kebijakan penggunaan peringkat dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit;
 - Penggunaan peringkat dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit mengacu pada SEOJK Nomor 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar sebagaimana diubah dengan SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan bagi Bank Umum
- e. Kategori portofolio yang menggunakan peringkat; dan Lembaga pemeringkat yang digunakan.
 - Kategori portofolio yang menggunakan peringkat adalah Portofolio Tagihan Kepada Pemerintah khususnya Tagihan kepada Pemerintah Indonesia berupa Penempatan pada Bank Indonesia dan Surat Berharga. Selain itu portofolio yang juga menggunakan peringkat yaitu Portofolio Tagihan kepada Bank, baik pada Tagihan Jangka Pendek berupa penempatan pada Bank lain, serta Tagihan Jangka Panjang berupa penempatan pada Bank lain dan surat berharga.
 - Lembaga pemeringkat yang digunakan yaitu Pefindo dan Fitch Indonesia.
- f. Informasi mengenai kebijakan Bank untuk jenis agunan utama yang diterima
 - Pemberian kredit yang dilaksanakan oleh Bank diatur dalam kebijakan dan prosedur perkreditan dimana untuk setiap jenis atau skema kredit telah ditentukan agunan minimal yang harus dipenuhi.
- g. Informasi kebijakan, prosedur dan proses untuk menilai dan mengelola agunan
 - Bank telah memiliki Standar Operasional Prosedur Perkreditan Perubahan ke-XIII (ketiga belas) Nomor 0137/KEP/DIR/KRD/2023 tanggal 27 Maret 2023 atas Keputusan Direksi Nomor 0230/KEP/DIR/KRD/2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan Buku III Analisa dan Penilaian Jaminan/ Agunan. Bank menetapkan jenis dan nilai agunan yang dijaminan sesuai skema kredit dan perkiraan tingkat risiko kredit dari *counterparty* sebagai *second way out* yang ditetapkan. Jenis dari agunan terdiri dari:
 1. *Physical Collateral*, berupa tanah dan bangunan.
 2. *Financial Collateral*, berupa simpanan (tabungan, giro dan deposito), surat berharga, dan lain-lain.
 3. Lainnya berupa garansi, lembaga penjamin, dan lain-lain.

throughout its life, which is called (stage 1). Credit losses resulting from all possible default events throughout the estimated life of the entire financial instrument, which is called (Level 2), and financial assets that experience credit impairment when one or more events that have an adverse impact on the estimated future cash flows of the financial asset have occurred (Level 3). Financial assets classified in the two categories are carried at amortized cost and measured at fair value through other comprehensive income.

- d. *Information on the Policy on the Use of Ratings in the Calculation of ATMR for Credit Risk;*
 - *The use of ratings in the calculation of ATMR for credit risk refers to SEOJK No. 42/SEOJK.03/2016 on Guidelines for the calculation of risk-weighted assets for credit risk using the standardised approach, as amended by SEOJK No. 24/SEOJK.03/2021 on the calculation of risk-weighted assets for credit risk using the approach for commercial banks.*
- e. *Portfolio categories using ratings and the rating agencies used.*
 - *The portfolio categories that use ratings are the portfolio of claims on the government, particularly claims on the Government of Indonesia in the form of placements with Bank Indonesia and securities. In addition, the portfolio that also uses ratings is the portfolio of claims on banks, both short-term claims in the form of placements with other banks and long-term claims in the form of placements with other banks and securities.*
 - *The rating agencies used are Pefindo and Fitch Indonesia.*
- f. *Information on the Bank's Policy on the Main Types of Collateral Accepted*
 - *The Bank's credit operations are governed by credit policies and procedures, which specify the minimum collateral requirements for each type of credit or credit scheme.*
- g. *Information on policies, procedures and processes for evaluating and managing collateral*
 - *The Bank has adopted a Credit Standard Operating Procedure Amendment to -XIII (thirteenth) Number 0137/KEP/DIR/KRD/2023 dated March 27, 2023 regarding the Board of Directors' Resolution Number 0230/KEP/DIR/KRD/2014 on the Credit Standard Operating Procedure (SOP) Book III Analysis and Evaluation of Collateral/ Security. The Bank determines the type and value of the collateral pledged in accordance with the credit scheme and the estimated level of credit risk of the counterparty as a second option, which has been determined. The types of collateral include*
 1. *Physical collateral in the form of land and buildings.*
 2. *Financial collateral, in the form of savings (savings, current accounts and deposits), securities, etc.*
 3. *Other, in the form of guarantees, guarantor institutions, etc.*

- Untuk segmen kredit komersial, sesuai dengan ketentuan perkreditan wajib dijamin oleh agunan yang memadai. Agunan dapat berupa *physical collateral*, *financial collateral* atau lainnya berupa tagihan usaha atau garansi. Untuk seluruh agunan khususnya *physical collateral* akan dilakukan retaksasi dimana nilai likuidasi atas agunan tersebut yang akan dipergunakan dalam menentukan kecukupan nilai agunan (*coverage ratio*). Penilaian agunan dilakukan oleh penilai intern untuk plafon kredit sampai dengan Rp10 miliar rupiah sedangkan untuk diatas plafon tersebut wajib menggunakan penilaian independen, namun demikian terhadap penilaian agunan untuk kepentingan Lelang atau AYDA penilaian wajib menggunakan penilaian independen (KJPP) hal tersebut tertuang dalam SOP Analisa Penilaian Agunan dan jaminan kredit Buku III Keputusan Direksi No. 0230/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 dan telah dilakukan beberapa perubahan sebagaimana perubahan Buku V Penanganan Kredit bermasalah sesuai Keputusan Direksi nomor :0575/KEP/DIR/KRD/2017 tanggal 30 Oktober 2017.
 - h. Pihak-pihak utama pemberi jaminan atau garansi dan kelayakan kredit dari pihak-pihak tersebut
 - Selain aspek agunan untuk meminimalkan risiko kredit, pemberian kredit oleh Bank selalu dilakukan berdasarkan evaluasi dan analisa kelayakan sehingga kemampuan pengembalian kredit (*first way out*) dapat dipastikan. Adanya keharusan bagi debitur untuk memenuhi agunan yang dipersyaratkan, evaluasi atas kelayakan kredit, pengikatan kredit secara legal dan prosedur *pre-screening* akan menurunkan *credit risk* eksposur Bank ke tingkat yang layak dan dapat diterima.
 - i. Informasi tingkat konsentrasi yang ditimbulkan dari penggunaan teknik mitigasi risiko kredit
 - Bank melakukan pengelolaan risiko konsentrasi kredit dengan melakukan pemantauan antara lain untuk eksposur sektor ekonomi kredit, portofolio kredit, kode produk kredit, jenis penggunaan kredit serta eksposur perorangan dan non perorangan. Sesuai dengan karakteristiknya, kredit yang ada di Bank saat ini terbagi dalam kredit produktif dan kredit konsumtif. Untuk mengelola risikonya, Bank mengukur risiko kredit dari portofolio yang ada baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Hal ini untuk memastikan kemungkinan kerugian dari tidak dibayarnya pinjaman yang diberikan menjadi seminimal mungkin, baik untuk debitur individu maupun secara keseluruhan.
- *For commercial loans, the terms of the loan must be secured by adequate collateral. Collateral may be in the form of physical collateral, financial collateral or other collateral in the form of commercial bills or guarantees. All collateral, especially physical collateral, is subject to revaluation, whereby the liquidation value of the collateral is used to determine the adequacy of the collateral value (coverage ratio). The valuation of collateral is carried out by an internal valuer for credit ceilings up to IDR 10 billion, while above the ceiling it is mandatory to use an independent assessment valuer, however, for the valuation of collateral for auction or AYDA purposes an independent valuer (KJPP) must be used, this is stated in the SOP for Collateral Valuation Analysis and Credit Guarantee Book III of Board of Directors' Decree No. 0230/KEP/DIR/KRD/2014 dated March 19, 2014 and several amendments have been made as amendments to Book V Handling of Problem Loans according to the Board of Directors' Decree No.: 0575/KEP/DIR/KRD/2017 dated October 30, 2017.*
 - h. *Main parties providing collateral or guarantees and their creditworthiness*
 - *In addition to the collateral aspect of minimizing credit risk, the Bank's provision of credit is always based on an assessment and analysis of feasibility to ensure the ability to return the credit (first way out). The Bank's exposure to credit risk is reduced to a reasonable and acceptable level by requiring debtors to provide the necessary collateral, by assessing creditworthiness, by making loans legally binding and by using pre-screening procedures.*
 - i. *Information on the level of concentration resulting from the use of techniques to mitigate the risk of credit concentration*
 - *The Bank manages credit concentration risk by, among other things, monitoring exposure to the credit industry, credit portfolio, credit product code, type of credit use, and individual and non-individual exposure. According to its characteristics, the credit currently available at the Bank is divided into productive credit and consumer credit. In order to manage its risk, the Bank measures the credit risk of the existing portfolio both quantitatively and qualitatively. The aim is to ensure that the possibility of losses due to non-payment of loans granted is minimized, both for individual debtors and as a whole.*



Pengungkapan Kuantitatif

Quantitative Disclosure

Risiko Kredit - Pengungkapan Kualitatif *Counterparty Credit Risk (CCRA)**Credit Risk - Counterparty Credit Risk (CCRA) Qualitative Disclosures*Analisis Kualitatif
Qualitative Analysis

Eksposur Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan *Counterparty Credit Risk (CCRA)* saat ini terdiri dari Repo/*Reverse Repo* yang berasal dari Kategori Portofolio Tagihan Kepada Pemerintah dan Tagihan Kepada Bank.

The current counterparty credit risk (CCRA) exposure consists of repo/reverse repo transactions originating from the portfolio categories of claims on the government and claims on banks.

Risiko Kredit - Analisis Eksposur *Counterparty Credit Risk (CCR1)**Credit Risk - Counterparty Credit Risk (CCRA) Qualitative Disclosures*

	a	b	c	d	e	f
	<i>Replacement cost (RC)</i>	<i>Potential future exposure (PFE)</i>	<i>EEPE</i>	Alpha digunakan untuk perhitungan <i>regulatory EAD</i> <i>Alpha is used for regulatory EAD Net Billings calculations.</i>	Tagihan Bersih <i>Net Receivables</i>	ATMR <i>RWA</i>
1 SA-CCR (untuk derivatif) <i>SA-CCR (for derivatives)</i>	0	0	0	1,4	0	0
2 Metode Internal Model (untuk derivatif dan SFT) <i>Internal Model Approach (for derivatives and SFTs)</i>	0	0	0	0	N/A	N/A
3 Pendekatan sederhana untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT) <i>A simple approach to credit risk mitigation (for SFTs)</i>	0	0	0	0	N/A	N/A
4 Pendekatan komprehensif untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT) <i>A comprehensive approach to credit risk mitigation (for SFTs)</i>	0	0	0	0	0	0
5 VaR untuk SFT <i>VaR for SFT</i>	0	0	0	0	N/A	N/A
6 Total <i>Total</i>						

Analisis Kualitatif
Qualitative Analysis

Bank tidak memiliki Eksposur *Counterparty Credit Risk (CCR1)*

The Bank has no exposure to counterparty credit risk (CCR 1)

		a	b
		Tagihan bersih Net bill N/A	ATMR N/A
Total portofolios berdasarkan Advanced CVA capital charge <i>Total portfolios based on Advanced CVA capital charge</i>		Net Receivables N/A	RWA N/A
1	(i) komponen VaR (termasuk 3x multiplier) <i>(i) VaR component (including 3x multiplier)</i>	0	N/A
2	(ii) komponen Stressed VaR (termasuk 3x multiplier) <i>(ii) Stressed VaR component (including 3x multiplier)</i>	0	N/A
3	Semua Portofolio sesuai Standardised CVA Capital Charge <i>All portfolios based on standardized CVA capital charge</i>	0	0
4	Total sesuai CVA Capital Charge <i>Total as per CVA capital charge</i>	0	0

Analisis Kualitatif
Qualitative analysis

Bank tidak memiliki Capital Charge untuk Credit Valuation Adjustment (CCR2)/
Bank has no capital charge for credit valuation adjustment (CCR2)

(Dalam jutaan Rupiah)/(In millions of Rupiah)

Risiko Kredit - Eksposur CCR berdasarkan Kategori Portofolio dan Bobot Risiko (CCR3)

Credit Risk - CCR Exposure by Portfolio Category and Risk Weight (CCR3)

Bobot Risiko Risk Weight	a	b	c	d	e	f	g	h	i
Kategori Portofolio Portfolio Category	0%	10%	20%	50%	75%	100%	150%	Lainnya Other	Total Tagihan Bersih Total Net Receivables
Tagihan kepada Pemerintah dan Bank Sentral <i>Receivables on Government and Central Bank</i>	-	-	-	-	-	-	-	3.877.737	3.877.737
Tagihan kepada Entitas Sektor Publik <i>Receivables on Public Sector Entities</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional <i>Receivables on Multilateral Development Banks and International Institutions</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan kepada Bank Lain <i>Receivables on Other Banks</i>	-	-	-	-	-	-	-	2.925.577	2.925.577
Tagihan kepada perusahaan sekuritas <i>Receivables on Securities Firms</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan kepada Korporasi <i>Receivables on Cooperatives</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel <i>Receivables on Micro, Small and Retail Portfolios</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset lainnya <i>Other Assets</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total <i>Total</i>	-	-	-	-	-	-	-	6.803.314	6.803.314

Risiko Kredit - Tagihan Bersih Derivatif Kredit (CCR6)
Credit Risk - Net Credit Derivatives Receivables (CCR6)

	a	b
	Proteksi yang dibeli (Protection bought)	Proteksi yang dijual (Protection sold)
Deskripsi <i>Description</i>		
Nilai Nasional <i>Notional Value</i>	0	0
Single-name credit default swaps	0	0
Index credit default swaps	0	0
Total return swaps	0	0
Credit options	0	0
Derivatif kredit lainnya	0	0
Total Nilai Nasional <i>Total Notional Value</i>	0	0
Nilai wajar <i>Fair Value</i>	0	0
Nilai wajar positif (aset) <i>Positive fair value (asset)</i>	0	0
Nilai wajar negatif (kewajiban) <i>Negative fair value (liability)</i>	0	0
Analisis Kualitatif <i>Qualitative Analysis</i>		

Bank tidak memiliki Tagihan Bersih Derivatif Kredit (CCR6)

The Bank has no Net Credit Derivative Claims (CCR6)

Risiko Pasar
Parameter Pendekatan

- Informasi mengenai penerapan manajemen risiko termasuk:
 - organisasi manajemen Risiko Pasar;
 - pengelolaan portofolio *trading book* dan *banking book*, serta metodologi valuasi yang digunakan; dan
 - mekanisme pengukuran Risiko Pasar untuk keperluan pemantauan risiko secara periodik maupun untuk perhitungan kecukupan modal, baik pada *trading book* maupun *banking book*.

Pengungkapan Kualitatif Umum

- Bank telah memiliki Komite ALCO (*Asset & Liability Committee*) yang memiliki tugas dan tanggung jawab melihat prakiraan dan proyeksi keadaan ekonomi, suku bunga nilai tukar untuk mengarahkan kebijakan yang ditetapkan, menetapkan petunjuk pengelolaan dan pengendalian risiko yang berdampak pada :
 - Risiko Likuiditas (*Liquidity Management*)
 - Risiko Suku bunga (*Gap Management*)
 - Risiko Valuta Asing (*Foreign Exchange Management*)
 - Risiko Portfolio (*Earnings & Investment Management*)

Market Risk
Parameters of Approach

- Information about the implementation of risk management, including
 - Market risk management organization;
 - the management of trading and banking book portfolios and the valuation methodology used; and
 - Market risk measurement mechanisms for periodic risk monitoring and capital adequacy calculations, both in the trading book and the banking book.

General Qualitative Disclosures

- The Bank has an ALCO (*Asset & Liability Committee*) whose duties and responsibilities include the review of forecasts and projections of economic conditions, interest rates and exchange rates in order to guide established policies, the establishment of risk management and control guidelines that have an impact:
 - Liquidity risk (*liquidity management*)
 - Interest rate risk (*gap management*)
 - Foreign exchange risk (*foreign exchange management*)
 - Portfolio risk (*income and investment management*)

- e. Me-review dan menetapkan suku bunga kredit dan dana pihak ketiga
 - f. Me-review dan menetapkan tarif layanan
 - g. Menetapkan harga transfer dana internal (*internal funds Transfer rate*) atau harga rekening Antar Kantor dalam memacu efisiensi pengelolaan Cabang Bank.
- 2) Bank saat ini belum memiliki eksposur dalam *trading book*. Sedangkan terkait dengan *banking book*, Bank melakukan pengelolaan *gap*/risiko suku bunga berupa profil maturitas yang memetakan asset dan kewajiban berdasarkan “*time bucket*” jatuh tempo. Di samping itu, juga telah melakukan pengelolaan *Foreign Exchange* yang tercermin dari adanya Laporan Posisi Devisa Neto (PDN).
- 3) Bank telah melakukan analisis, perhitungan, penyesuaian terhadap perubahan suku bunga baik suku bunga simpanan maupun perkreditan melalui Rapat ALCO, yang didasarkan atas pengukuran sensitivitas risiko terhadap perubahan suku bunga, berupa laporan *Gap Report* dan analisis risiko secara *bank wide* setiap bulan. Bank juga telah melakukan perhitungan PDN (Posisi Devisa Neto) secara berkala untuk mengetahui posisi apakah Bank berada dalam posisi *long* atau posisi *short*. Bank telah memiliki sistem informasi manajemen risiko pasar untuk kedepannya dapat mengukur sensitivitas risiko pasar, sehingga Bank masih tetap dapat melakukan proses manajemen risiko pasar secara memadai.
- b. Portofolio *trading book* dan *banking book* yang diperhitungkan dalam KPMM sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa keuangan mengenai pedoman penggunaan metode standar dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dengan memperhitungkan risiko pasar.

Bank dalam memperhitungkan KPMM terkait dengan perhitungan ATMR risiko pasar sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/SEOJK.03/2022 Tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Pasar bagi Bank Umum menggunakan pendekatan standar (*Standardized Approach*). Bank belum memiliki eksposur risiko pada *trading book*.

- c. Langkah-langkah dan rencana dalam mengantisipasi risiko pasar atas transaksi valuta asing baik karena perubahan kurs maupun fluktuasi suku bunga, termasuk penjelasan mengenai semua penyediaan dana dan ikatan tanpa proteksi atau lindung nilai, serta utang yang suku bunganya berfluktuasi atau yang tidak ditentukan terlebih dahulu.

Bank telah melakukan *review* terkait dengan penetapan suku bunga Dana Pihak ketiga dan Perkreditan secara berkala dengan memperhatikan posisi suku bunga acuan Bank Indonesia, melakukan *benchmarking* dengan suku bunga pesaing, dan diputuskan dalam rapat ALCO (*Assets and Liabilities Management Committee*) dan diimplementasikan melalui Keputusan Direksi tentang Ketentuan Suku Bunga Simpanan dan Perkreditan. Bank telah memiliki sistem informasi manajemen risiko pasar melalui sistem *treasury* untuk kedepannya dapat mengukur sensitivitas risiko pasar, sehingga Bank masih tetap dapat melakukan

- e. *Reviewing and setting interest rates on loans and third-party funds*
 - f. *Review and set service fees*
 - g. *Establishing internal transfer rates or interoffice account pricing to promote efficiency in the management of the Bank's branches.*
- 2) *The Bank currently has no exposure in the trading book. Meanwhile, with regard to the banking book, the Bank manages the interest rate gap/risk in the form of a maturity profile. This is a mapping of assets and liabilities based on the "time bucket" of maturity. In addition, it has also managed foreign exchange, as reflected in the Net Open Position (NOP) report.*
- 3) *The Bank has carried out analyses, calculations and adjustments to changes in interest rates, both deposit and lending rates, through ALCO meetings based on the measurement of risk sensitivity to changes in interest rates, in the form of monthly gap reports and bank-wide risk analysis. The Bank also calculates the Net Open Position (NOP) on a regular basis. The NOP is used to determine whether the Bank is long or short. The Bank has a market risk management information system through the Treasury system. This will enable the Bank to measure market risk sensitivity in the future, so that the market risk management process can continue to be carried out appropriately.*
- b. *Trading book and banking book portfolios calculated in CAR in accordance with the provisions of the Financial Services Agency's Guidelines on the Use of Standard Methods in the Calculation of the Minimum Capital Requirement of Commercial Banks by Taking into Account Market Risk.*

Banks in the calculation of CAR are related to the calculation of market risk ATMR in accordance with the Financial Services Authority Circular Letter No. 23/SEOJK.03/2022 concerning the calculation of risk-weighted assets for market risk for commercial banks using a standard approach (Standardized Approach). The Bank does not yet have any trading book exposure.

- c. *Measures and plans to anticipate market risks in foreign exchange transactions due to changes in exchange rates or interest rates, including explanation of all unprotected or unhedged funds and borrowings as well as floating or undetermined interest rate borrowings.*

The Bank has conducted a review related to the determination of interest rates on funds and loans from third parties on a regular basis by considering the position of Bank Indonesia's reference interest rate, benchmarking with competitive interest rates, and decided in an ALCO (Assets and Liabilities Management Committee) meeting and implemented through the Board of Directors Regulation on Interest Rates on Deposits and Loans. The Bank has a market risk management information system in place through the Treasury system to measure market risk sensitivity in the future. This will enable the Bank to continue to manage market

proses manajemen risiko pasar secara memadai. Terkait dengan lindung nilai, saat ini Bank belum terekspos lindung nilai. Terhadap transaksi *treasury* untuk di tahun 2025, telah terdapat ketentuan mengenai Limit Risiko Transaksi *Treasury* Tahun 2025.

Risiko Likuiditas

Pengungkapan Kualitatif

a. Tata Kelola Pengelolaan Risiko Likuiditas

- **Toleransi Risiko Likuiditas**
Bank menetapkan *risk tolerance* dan *risk appetite* likuiditas secara konsisten dan relevan dengan bisnis serta kompleksitas usaha, limit risiko likuiditas meliputi GWM Rupiah & Valas, PLM, Penempatan Pada Bank Lain, Penempatan Pada Bank Lain, Penempatan Pada Instrumen Keuangan, LDR, LCR, NSFR, dan PDN. Penetapan limit toleransi dilakukan agar Bank dapat mengelola likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Penetapan besarnya limit *risk appetite* dan *risk tolerance* diajukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan disetujui oleh Direksi melalui Komite Manajemen Risiko (KMR). Apabila terjadi pelampauan limit, maka SKMR akan berkoordinasi dengan Divisi *Treasury* terkait penyusunan *action plan*.
- **Struktur dan Tanggung Jawab Pengelolaan Risiko Likuiditas**
Bank menetapkan struktur organisasi, perangkat dan unit terkait dengan penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas yang sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Bank. Penanggung jawab dari pengelolaan likuiditas adalah Divisi *Treasury* yang aktivitasnya terekspose langsung risiko likuiditas. Divisi *Treasury* dibantu oleh SKMR dengan memberikan masukan dan analisa yang obyektif dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pelaporan risiko likuiditas. Direksi bertanggungjawab untuk memastikan bahwa penerapan manajemen risiko likuiditas. Direksi bertanggungjawab untuk memastikan bahwa penerapan manajemen risiko likuiditas sudah sesuai dengan tujuan strategis, dan memastikan integritas penerapan manajemen risiko likuiditas dan risiko-risiko lainnya yang berdampak pada posisi likuiditas Bank.
- **Pelaporan Likuiditas Internal & Strategi**
Bank memiliki Aplikasi *Risk Limit* untuk memantau pencapaian parameter yang telah ditetapkan *risk appetite* dan *risk tolerance*. Pelaporan terkait risiko yang terdiri dari: rasio-rasio likuiditas, arus kas, profil risiko, *stress testing*, dan informasi lainnya yang terkait dengan posisi likuiditas Bank dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur likuiditas. Rapat KMR dilakukan setiap penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance*. SKMR selanjutnya akan berkoordinasi dengan Divisi *Treasury* terkait pengelolaan risiko likuiditas jika terjadi pelampauan terhadap kebijakan maupun limit dan menyusun *action plan*.
- **Kebijakan & Praktek Risiko Likuiditas pada seluruh lini bisnis dengan Direksi**
Divisi *Treasury* yang terekspos oleh risiko likuiditas akan menyampaikan informasi mengenai kondisi indikator makro ekonomi dan proyeksi bisnis melalui rapat *Asset and Liability*

risk appropriately. As far as hedging is concerned, the Bank is currently not exposed to hedging. For 2025 treasury transactions, there are 2025 Treasury Transaction Risk Limit regulations.

Liquidity Risk

Qualitative Disclosure

a. Liquidity risk management governance

- **Liquidity Risk Tolerance**
The Bank determines the liquidity risk tolerance and risk appetite in a consistent manner and relevant to the business and business complexity, liquidity risk limits include Rupiah & Foreign Exchange GWM, PLM, placement with other bank, placement with other bank, placement in financial instrument, LDR, LCR, NSFR and PDN. Tolerance limits are set to enable the Bank to manage liquidity in normal and crisis conditions. The determination of risk appetite and risk tolerance limits is submitted by the Risk Management Department (SKMR). It is approved by the Board of Directors through the Risk Management Committee (KMR). If the limit is exceeded, SKMR coordinates with Treasury to prepare an action plan.
- **Liquidity Risk Management Structure and Responsibilities**
The Bank determines the organizational structure, instruments and units involved in implementing liquidity risk management according to the nature and complexity of the Bank's activities. The Treasury Division, whose activities are directly exposed to liquidity risk, is responsible for liquidity management. The Treasury Division is supported by the SKMR, which provides objective input and analysis in the process of identifying, measuring, monitoring and reporting liquidity risk. The Board of Directors is responsible for ensuring that liquidity risk management gets implemented. The Board of Directors is responsible for ensuring that the implementation of liquidity risk management is consistent with the strategic objectives and for ensuring the integrity of the implementation of liquidity risk management and other risks that impact the Bank's liquidity position.
- **Internal liquidity reporting and strategy**
The Bank has a risk limit application to monitor the achievement of established risk appetite and risk tolerance parameters. Risk related reporting consists of: liquidity ratios, cash flow, risk profiles, stress testing and other information related to the Bank's liquidity position and compliance with liquidity policies and procedures. KMR meetings are held each time risk appetite and risk tolerance are determined. The KMR then coordinates with the relevant Treasury department regarding liquidity risk management in the event of a policy or limit being exceeded, and prepares an action plan.
- **Liquidity Risk Policy & Practices in all Business Areas with the Board of Directors**
Treasury Divisions exposed to liquidity risk provide information on macroeconomic indicator conditions and business forecasts at Asset and Liability Committee (ALCO) meetings and may

Committee (ALCO) serta dapat mengajukan besaran limit dan toleransi risiko yang terkait dengan risiko likuiditas kepada SKMR untuk dikaji dan diajukan kepada KMR untuk mendapatkan persetujuan. Divisi Treasury juga menyusun action plan, menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang telah ditetapkan oleh Direksi. Selanjutnya Direksi akan memantau dan memastikan bahwa penerapan manajemen risiko telah berjalan sesuai dengan tujuan dan karakteristik Bank dengan dibantu SKMR.

b. Strategi Pendanaan

- Bank menyusun strategi pendanaan sebagai upaya pengendalian risiko likuiditas. Strategi tersebut mencakup sumber dan jangka waktu pendanaan yang dikaitkan dengan Rencana Bisnis Bank. Strategi pencapaian target pendanaan adalah dengan:
 - Peningkatan dana retail melalui penambahan fitur atau digitalisasi seperti QRIS untuk meningkatkan CASA
 - Meningkatkan dana korporasi melalui kerja sama dengan beberapa lembaga aset manajemen, LPD, dan BUMD
 - Meningkatkan promosi, aktivitas pemasar, kualitas, dan kuantitas tenaga pemasar

c. Mitigasi Risiko Likuiditas

- Mitigasi risiko likuiditas dengan cara memantau limit-limit risiko likuiditas yang telah ditetapkan oleh manajemen. Apabila mengalami pelampauan, maka SKMR berkoordinasi dengan Divisi Treasury untuk melakukan action plan.

d. Stress Test

- Stress Test dilakukan untuk mengetahui kemampuan Bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dalam kondisi krisis menggunakan skenario stress test dengan menggunakan beberapa asumsi.

e. Rencana Pendanaan Darurat

- Pengendalian likuiditas dalam kondisi krisis, dibentuk Tim Krisis Pendanaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan penyusunan strategi dan penanganan kondisi krisis. Selain membentuk Tim Krisis Pendanaan, Bank juga wajib mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan yang berasal dari Lembaga non Bank, perbankan dan dari Bank Indonesia berupa Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek. Rencana Pendanaan Darurat (Contingency Funding Plan) sesuai dengan Keputusan Direksi No. 0207/KEP/DIR/TRS/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Asset Liability Management.

submit the amount of risk limits and tolerances related to liquidity risk to SKMR to be reviewed and submitted to KMR for approval. The Treasury Department also prepares action plans and establishes risk management policies and procedures as approved by the Board of Directors. In addition, the Board of Directors, with the assistance of the SKMR, monitors and ensures that the implementation of risk management is carried out in accordance with the objectives and characteristics of the Bank.

b. Funding Strategy

- The Bank prepares a Funding Strategy to help manage liquidity risk. The strategy includes sources and terms of funding. It is linked to the Bank's business plan. The strategy for achieving funding targets is through:
 - Increasing retail funds by adding features or digitization such as QRIS to increase CASA.
 - Increasing corporate funds by collaborating with various asset management institutions, LPDs and BUMDs.
 - Increase promotions, marketing activities, quality and quantity of marketing staff.

c. Liquidity Risk Mitigation

- Mitigate liquidity risk by monitoring liquidity risk limits set by management. If limits are exceeded, SKMR coordinates with Treasury to implement an action plan.

d. Stress Test

- A stress test is conducted to determine the Bank's ability to meet liquidity needs under crisis conditions using a stress test scenario based on various assumptions.

e. Contingency Funding Plan

- A Funding Crisis Team is formed to manage liquidity in crisis conditions, with the role and responsibility of formulating strategies and managing crisis conditions. In addition to forming a Funding Crisis Team, the Bank is also required to optimize funding sources from non-bank institutions, banks and Bank Indonesia in the form of short-term liquidity loans. The Contingency Funding Plan is in accordance with the Board of Directors Resolution No. 0207/KEP/DIR/TRS/2023 on the Standard Operating Procedure for Asset Liability Management.

Risiko Operasional

Parameter Pendekatan

a. Organisasi Manajemen Risiko Operasional

- Bank telah memiliki ketentuan berupa SOP Business Continuity Plan yang mengatur mengenai penanganan bisnis pada saat kondisi darurat dimana pada ketentuan tersebut terdapat organisasi yaitu Crisis Management Team (CMT) yang dibentuk untuk menetapkan kebijakan, mengembangkan strategi dan membuat keputusan yang meminimalkan dampak dari gangguan usaha.
- Bank juga telah memiliki Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) yang dibentuk untuk memastikan penerapan sistem

Operational Risk

Parameters of Approach

a. Operational risk management organization

- The Bank has provisions in the form of SOP Business Continuity Plan that govern the handling of business in emergency conditions, where in these provisions there is an entity, namely the Crisis Management Team (CMT), which is formed to determine policies, develop strategies and make decisions that minimize the impact of business interruptions.
- The Bank also has an Information Technology Steering Committee (KPTI), which is formed to ensure the implementation of the

Teknologi Informasi (TI) sejalan dengan rencana strategis Bank dan memiliki misi untuk meningkatkan keunggulan bersaing Bank melalui pemanfaatan Teknologi Informasi yang tepat guna.

- Bank telah menetapkan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0424/KEP/DIR/RENSTRA/2024 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas, Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0438/KEP/DIR/RENSTRA/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Kantor Pusat dan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0460/KEP/DIR/RENSTRA/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Unit Kerja, dimana Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Bank disesuaikan menjadi 1 (satu) Buku Pedoman Perusahaan dan 2 (dua) Standar Operasional Prosedur dari sebelumnya hanya 1 (satu) Buku Pedoman Perusahaan.
 - Bank memiliki tim Pertimbangan Hukuman Jabatan (PHJ) yang bertugas memberikan pendapat, saran dan usulan kepada Direksi berkenaan dengan pemberlakuan sanksi administratif terhadap karyawan yang terbukti melakukan perbuatan pelanggaran dengan atau tanpa kewajiban membayar ganti kerugian dan pengajuan keberatan atas sanksi administrasi yang dikenakan kepada karyawan yang melakukan perbuatan pelanggaran serius dan memerlukan penanganan lebih mendalam.
 - Bank telah membentuk *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor: 0730/KEP/DIR/TIF/2024 tentang Bank BPD Bali *Computer Security Incident Response Team* (BPD BALI-CSIRT) *Computer Security Incident Response Team* (BPD BALI-CSIRT) untuk memastikan penanganan insiden siber yang tepat dan proaktif terhadap potensi insiden siber di masa depan.
- b. Mekanisme yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko operasional
- Bank memiliki SOP *Loss Event Database* (LED) yang mampu memetakan *event* (kejadian) risiko di masing-masing Cabang yang disebabkan oleh faktor SDM, faktor eksternal, faktor sistem & teknologi, dan proses internal.
 - Bank telah memiliki SOP *Key Risk Indicators* (KRI) yang dapat memberikan *early signal* mengenai isu risiko di unit kerja yang mendapatkan perhatian untuk segera ditangani yang mana indikator KRI ini terdiri dari peringkat kritis, dalam perhatian, dan normal.
 - Bank telah memiliki SOP Profil Risiko Cabang yang merupakan alat untuk mengevaluasi penerapan manajemen risiko di Kantor Cabang.
 - Bank telah memiliki SOP Profil Risiko Kantor Pusat yang memetakan risiko-risiko di kantor pusat yang tidak sebatas risiko operasional.
- c. Mekanisme untuk memitigasi risiko operasional
- Bank telah melakukan pemantauan terhadap profil para karyawannya melalui pengisian kuisioner *Know Your Employee*

Information Technology (IT) system in accordance with the Bank's Strategic Plan. The KPTI's mission is to increase the Bank's competitive advantage through the use of appropriate information technology.

- *The Bank has stipulated the Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Bali Number 0424/KEP/DIR/RENSTRA/2024 concerning the Company Guidelines for Organizational Structure and Job Descriptions, Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Bali Number 0438/KEP/DIR/RENSTRA/2024 concerning the Standard Operating Procedures for Organizational Structure and Job Descriptions of the Head Office and Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Bali Number 0460/KEP/DIR/RENSTRA/2024 concerning the Standard Operating Procedures for Organizational Structure and Job Descriptions of Work Units, where the Bank's Organizational Structure and Job Descriptions are adjusted to 1 (one) Company Guidelines and 2 (two) Standard Operating Procedures from previously only 1 (one) Company Guidelines.*
 - *The Bank has established a Position Punishment Consideration Team (PHJ) which is responsible for providing opinions, suggestions and proposals to the Board of Directors regarding the implementation of administrative sanctions against employees who are proven to have committed violations, with or without the obligation to pay compensation, and for filing objections against administrative sanctions imposed on employees who have committed serious violations that require more in-depth handling.*
 - *The Bank has established a Computer Security Incident Response Team (CSIRT) with the Resolution of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Bali No.: 0730/KEP/DIR/TIF/2024 regarding the Bank BPD Bali Computer Security Incident Response Team (BPD BALI-CSIRT) Computer Security Incident Response Team (BPD BALI-CSIRT) to ensure proper and proactive handling of cyber incidents against potential cyber incidents in the future.*
- b. *Mechanisms for Identifying and Measuring Operational Risk*
- *The Bank has a Loss Event Database (LED) SOP, which is able to map risk events in each branch caused by human factors, external factors, system & technology factors and internal processes.*
 - *The Bank has a Key Risk Indicators (KRI) SOP that can provide an early signal of risk issues in work units that require attention to be addressed immediately. The KRI indicators consist of critical, attention and normal ratings.*
 - *The Bank has a Branch Risk Profile SOP, which is a tool for the evaluation of the implementation of risk management in the branch offices.*
 - *The Bank has a Head Office Risk Profile SOP, which is a mapping of risks at Head Office that are not limited to operational risks.*
- c. *Operational risk mitigation mechanisms*
- *The Bank has been monitoring the profiles of its employees through the completion of the Know Your Employee (KYE)*

(KYE) oleh para pimpinan satuan kerja dan unit kerja. Penerapan KYE bertujuan untuk melakukan identifikasi, verifikasi dan pemantauan terhadap profil, karakter dan pola perilaku (kebiasaan) setiap karyawan. Diharapkan atasan dan pimpinan unit dapat mengambil langkah pencegahan melalui *coaching* dan konseling bila ditemukan adanya ketidaksesuaian atau hal-hal yang mengindikasikan adanya *fraud*.

- Peningkatan fungsi kontrol (*maker, checker dan approval*) dalam melakukan kegiatan operasional perbankan di setiap unit kerja Bank BPD Bali serta penetapan limit transaksi dan wewenang pejabat.
- Untuk memitigasi risiko operasional yang disebabkan oleh faktor manusia (SDM), maka dalam penerapan program kerja budaya kerja "CINTA" Bank BPD Bali telah dilakukan upaya-upaya untuk senantiasa mengarahkan dan membina karyawan (SDM) melalui:
 1. *Coaching & Counseling*.
 2. Meningkatkan pemahaman atas ketentuan intern dan ekstern dengan kegiatan *self learning* yang selanjutnya di evaluasi oleh kepala unitnya, serta membaca peraturan/ketentuan yang sesuai dengan bidang tugas masing-masing karyawan, khususnya bidang Perbankan yang sudah difasilitasi oleh *Compliance Management System* (CMS) sebagai media sosialisasi khususnya ketentuan internal dan eksternal.
 3. Menandatangani Komitmen *Anti Fraud Statement*, Kode Etik Bank dan Pakta Integritas yang telah dilakukan oleh seluruh karyawan & pengurus Bank.
 4. *Refreshment* Manajemen Risiko secara simultan diberikan kepada pemegang Sertifikat Manajemen Risiko.
 5. Pemberian pembinaan maupun sanksi kepada karyawan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Bank.
- Sistem penilaian kinerja karyawan dilaksanakan secara objektif dan transparan dalam rangka evaluasi terhadap pencapaian target kinerja karyawan sesuai periode penilaian sebagai berikut:
 1. Melalui penilaian kinerja interim yang dilakukan 1(satu) kali yaitu setiap awal bulan Juli tahun buku yang diperhitungkan.
 2. Periode penilaian kinerja karyawan secara interim dilakukan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni tahun buku yang diperhitungkan.
 3. Penilaian kinerja karyawan akhir dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode penilaian, yaitu awal bulan Januari tahun berikutnya.
 4. Periode penilaian kinerja karyawan akhir dilakukan dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun buku yang diperhitungkan.

Penilaian kinerja karyawan interim adalah proses evaluasi pencapaian kinerja yang dilaksanakan untuk menilai kinerja karyawan selama periode semester I pada tahun buku yang diperhitungkan dengan tujuan memberikan umpan balik kepada

questionnaire by the heads of work units and departments. The implementation of KYE aims to identify, verify and monitor the profile, character and behavioral patterns (habits) of each employee. It is expected that supervisors and unit managers will be able to take preventive measures through coaching and counseling in case of discrepancies or things that indicate fraud.

- *Improve the control functions (maker, checker and approval) in the performance of banking operational activities in each work unit of Bank BPD Bali, as well as the determination of transaction limits and authority of officials.*
- *In order to mitigate operational risks caused by human factors (HR), in the implementation of "CINTA" work culture program, Bank BPD Bali has made efforts to continuously guide and nurture employees (HR) by*
 1. *Coaching and counseling.*
 2. *Improving the understanding of internal and external regulations through self-learning activities, which are then evaluated by the head of the unit, as well as reading regulations/regulations in accordance with the field of duty of each employee, especially the banking sector, which has been facilitated by the Compliance Management System (CMS) as a socialization medium, especially internal and external regulations.*
 3. *Signing of the Anti-Fraud Statement Commitment, the Bank's Code of Ethics and the Integrity Pact, which have been carried out by all employees and the Bank's management.*
 4. *Simultaneous Risk Management Refreshment for Risk Management Certificate holders.*
 5. *Providing coaching or sanctions to employees who violate the Bank's rules.*
- *The employee performance evaluation system is implemented in an objective and transparent manner to evaluate the achievement of employee performance goals according to the following evaluation periods:*
 1. *Through an interim performance review conducted 1 (one) time, namely at the beginning of July of the fiscal year to be calculated.*
 2. *The interim performance review period shall be conducted from January 1 to June 30 of the fiscal year being calculated.*
 3. *The final employee performance review is conducted 1 (one) time in 1 (one) review period, namely at the beginning of January of the following year.*
 4. *The final employee performance review period is from January 1 to December 31 of the fiscal year being calculated.*

The Interim Employee Performance Review is a performance evaluation process conducted to assess the employee's performance during the first half of the fiscal year being calculated, with the objective of providing feedback to the

karyawan mengenai kinerja karyawan, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, serta memberikan kesempatan untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan sebelum penilaian kinerja karyawan akhir.

- Bank secara bertahap terkait penerapan manajemen SDM telah dilakukan perbaikan berupa peningkatan kompetensi dengan melakukan *assessment* dan sertifikasi sehingga diperoleh *talent pool* yang menjadi pertimbangan bagi manajemen dalam memilih kaderisasi yang efektif dan efisien.
- Dalam rangka mewujudkan penguatan Budaya Kerja CINTA telah dilakukan Revisit Budaya Kerja CINTA PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan telah dilakukan internalisasi dengan membuat artefak yang mencerminkan nilai-nilai untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Bank dan telah dilakukan *launching e-book* Budaya Kerja CINTA yang berguna sebagai acuan, persamaan pandangan terkait Budaya Kerja CINTA serta panduan bagi karyawan dalam bersikap dan berperilaku dalam lingkungan organisasi.
- Bank telah melakukan deteksi yang memuat perangkat dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan penyebab faktor eksternal yang mencakup kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit* dan *surveillance system*.
- Terkait *surveillance system* telah tertuang dalam laporan BCP (*Bussines Continuity Plan*) yang dilaporkan oleh Kantor Cabang di Triwulan IV tiap tahun. Terkait BCP, Bank telah memiliki ketentuan BCP (*Bussines Continuity Plan*) pada Divisi Manajemen Risiko. Bank telah melaksanakan proses *Bussiness Continuity Plan* dalam rangka memperkecil pengaruh bencana terhadap layanan Bank serta *stakeholder*.
- Salah satu cara untuk memitigasi risiko kejahatan ATM dan meningkatkan *risk awareness* adalah dengan menggunakan teknologi berbasis pendekatan *Internet of Things* yang dapat diimplementasikan dalam pengendalian vandalisme ATM, dimana dilakukan monitoring ATM melalui CCTV dengan pengelolaan yang terpusat melalui *server*.
- Seiring dengan meningkatnya *cyber threat*, layanan *Email Corporate* Bank BPD Bali yang dapat diakses oleh publik dilakukan pengamanan mengingat serangan dapat dilakukan kapan saja dengan frekuensi yang masif (melalui *spam/phishing*). Oleh karena itu, salah satu strategi pengamanan layanan tersebut adalah dengan melakukan *enhancement security* pada *Email* melalui implementasi *tool security* yang lebih komprehensif yaitu *Email Security Gateway*.
- Membangun fitur keamanan pada alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) dan *mobile banking* yaitu *Fraud Detection System* (FDS) untuk mendeteksi transaksi-transaksi yang bersifat anomali pada rekening nasabah dengan *rule* yang telah ditentukan.
- *Information Security Awareness* juga terus disosialisasikan kepada seluruh karyawan (termasuk pengurus Bank) dengan menerbitkan Buku Saku Elektronik Keamanan Informasi dan diedarkan kepada seluruh *stakeholder* Bank.
- Bank telah melakukan kaji ulang terkait *User Access Matrix* (UAM) dalam rangka pencegahan *internal fraud* akibat dari

employee regarding the employee's performance, identifying areas that need improvement, and providing an opportunity to make adjustments and improvements prior to the Final Employee Performance Review.

- *The Bank has gradually made improvements in the implementation of human resource management in the form of increasing competence by conducting assessments and certifications. In this way, a talent pool is obtained which is considered by the management in selecting effective and efficient cadres.*
- *In order to realize the strengthening of CINTA work culture, a revisit of CINTA work culture of PT Bank Pembangunan Daerah Bali has been carried out and internalization has been carried out through the creation of artifacts that reflect values to support the realization of the Bank's vision and mission and the launch of CINTA work culture e-book which is useful as a reference, a common view related to CINTA work culture and a guide for employees in behavior and action in the organizational environment.*
- *The Bank carried out a detection that includes whistleblowing policies and mechanisms, surprise audits and monitoring systems as tools to identify and find the causes of external factors.*
- *With respect to the monitoring system, it has been stated in the BCP (Business Continuity Plan) report submitted by the Branch in Q4 of each year. With regard to BCP, the Bank has BCP (Business Continuity Plan) provisions in the Risk Management Department. The Bank has implemented the Business Continuity Plan process to minimize the impact of disasters on the Bank's services and stakeholders.*
- *One way to mitigate the risk of ATM crime and increase risk awareness is the use of technology based on the Internet of Things approach, which can be implemented in the control of ATM vandalism, where ATM monitoring is carried out via CCTV with centralized management via a server.*
- *In line with the increasing cyber threat, Bank BPD Bali Corporate Email Service, which is accessible to the public, is secured considering that attacks can be carried out at any time with massive frequency (via spam/phishing). Therefore, one of the strategies to secure the service is to increase email security by implementing a more comprehensive security tool, namely the Email Security Gateway.*
- *Development of security features for card-based payment instruments (APMK) and mobile banking, in particular the Fraud Detection System (FDS) to detect anomalous transactions on customer accounts using pre-defined rules.*
- *Information security awareness is also continuously disseminated to all employees (including the Bank's management) through the publication of an electronic pocketbook on information security and its distribution to all the Bank's stakeholders.*
- *The Bank has conducted a review of the User Access Matrix (UAM) in order to prevent internal fraud through the misuse*

penyalahgunaan *user* dan wewenang. Selain itu kaji ulang juga telah dilakukan pada Prosedur Pengelolaan *User*.

- Bank melaksanakan *webinar Phishing dan Smishing Awareness* pada tanggal 16 Maret 2024, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan *social engineering test* yang telah dilaksanakan bulan Desember 2023 dengan mengikutsertakan seluruh perwakilan *stakeholder* Bank di tiap Unit Kerja dan Satuan Kerja dalam rangka menajamkan pengetahuan upaya *social engineering* khususnya pada *Email Phishing, Smishing, dan Quishing*.
- Setiap komputer yang terkoneksi dengan sistem Bank, telah dilakukan *update* untuk *operating system* yang telah *obsolete* dan telah terlindungi dengan Antivirus *Server* dan ter-*update* otomatis secara berkala. Penggunaan Antivirus *Server* tersebut untuk pengelolaan terpusat dalam rangka perlindungan *End Point* (PC/Laptop/Server) dari risiko *malware*, virus, Trojan, dan lain sebagainya.
- Bank telah melakukan pengujian *Disaster Recovery Planning* (DRP) pada tanggal 24-25 Februari yang dilanjutkan pada tanggal 14 Desember 2024 untuk menguji kehandalan DRC saat mengambil alih layanan DC saat terjadi kegagalan operasi. Pengujian *DRP* telah dilakukan dengan melibatkan Satuan Kerja terkait, Unit Kerja, serta Komite Pengarah TI, sesuai Berita Acara serta Laporan Uji Coba *DRP* terlampir dan telah memenuhi *SLA RPO (Recovery Point Objective) & RTO (Recovery Time Objective)* serta telah menguji Aplikasi yang bersifat *Critical* dan *Urgent* sesuai *BIA (Business Impact Analysis)* yang tercantum dalam Dokumen Rencana Pemulihan Bencana.
- Bank telah melakukan sertifikasi terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi *SNI ISO/IEC 27001:2013* pada ruang lingkup "*Information Security Management System applies to processes and activities of managing Data Center and Disaster Recovery Center*" oleh Badan Sertifikasi TUV Rheinland Indonesia sesuai nomor sertifikat: 82415322002.
- Atas kejadian *fraud* ekstern, Bank telah melakukan tindak lanjut sebagai berikut:
 1. Melakukan *hardening* pada mesin ATM Bank BPD Bali.
 2. Melakukan *assessment* terhadap mesin ATM merk lainnya yang dimiliki Bank terkait potensi-potensi kelemahan pengamanan *hardware* ataupun *software*, yang dapat dieksploitasi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk kasus-kasus serupa.
 3. Membuat pengaturan terkait mekanisme eskalasi pelaporan oleh satpam untuk setiap masalah/gangguan yang terjadi terhadap ATM dan monitor CCTV *centralized*.
 4. Bekerjasama dengan pihak berwajib dan media pers dalam upaya memperkuat koordinasi sehingga reputasi Bank dapat terjaga.
- Bank telah memiliki layanan *contact center 24* yang dapat diakses melalui berbagai media/kanal yang telah disediakan bank, Antara lain : telepon di nomor 1500844, *live chat* pada *website* Bank, email ke alamat bpdbalicare@bpd Bali.co.id, media sosial Bank (Instagram dan Facebook)

of users and privileges. A review of the User Management Procedure was also conducted.

- The Bank held a webinar on Phishing and Smishing Awareness on March 16, 2024, as a follow-up to the social engineering test conducted in December 2023, with the participation of all representatives of the Bank's stakeholders in each work unit and work area, in order to improve the knowledge of social engineering, especially email phishing, smishing and quishing.
- Each computer connected to the Bank's system has been upgraded to the latest operating system and has been protected by the Antivirus Server, which is automatically updated on a regular basis. Antivirus Server is used for centralized management to protect endpoints (PCs/laptops/servers) from the risk of malware, viruses, Trojans, etc.
- The Bank conducted a Disaster Recovery Planning (DRP) test on February 24 and 25, which was continued on December 14 to test the reliability of the DRC in taking over DC services in the event of an operational failure. The *DRP* test was conducted with the participation of relevant business units, work units and the IT Steering Committee according to the attached *DRP* test report and minutes and met the *SLA RPO (Recovery Point Objective) & RTO (Recovery Time Objective)* and tested critical and urgent applications according to the *BIA (Business Impact Analysis)* listed in the Disaster Recovery Plan document.
- The Bank has obtained the certification related to *SNI ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management System* in the scope of "*Information Security Management System applies to processes and activities of managing Data Center and Disaster Recovery Center*" by TUV-Rheinland Indonesia Certification Body according to the certificate number: 82415322002.
- In response to the external fraud incident, the Bank has taken the following follow-up actions:
 1. Hardening of Bank BPD Bali ATMs.
 2. Conduct assessments of other ATMs owned by the bank, for possible hardware or software vulnerabilities that irresponsible persons could exploit in similar incidents.
 3. Make arrangements regarding the escalation reporting mechanism by security guards for any problems/disruptions that occur at ATMs and central CCTV monitors.
 4. Cooperate with the authorities and the press in an effort to strengthen coordination so that the Bank's reputation can be maintained.
- The bank has a 24-hour contact center service that can be accessed through various media/channels provided by the bank, including: telephone at 1500844, live chat on the bank's website, email to bpdbalicare@bpd Bali.co.id, bank social media (Instagram and Facebook).

Risiko Hukum

Parameter Pendekatan

- a. Organisasi Manajemen Risiko Hukum
 - Bank telah memiliki unit Hukum Administrasi Kredit (HAK) di setiap Kantor Cabang yang salah satu tanggung jawab utamanya adalah mengawasi pelaksanaan dan prosedur operasional hukum perkreditan seperti:
 1. Memberikan pelayanan kepada nasabah untuk memberikan penjelasan mengenai proses akad kredit.
 2. Melakukan proses penilaian/*plotting* agunan kredit, proses pengikatan kredit, pengikatan agunannya dan memantau penyelesaiannya.
 3. Membuat dan mempersiapkan perjanjian kredit dibawah tangan atau dengan Akta Notaris termasuk dokumen pendukungnya.
 4. Menyiapkan kelengkapan proses pengikatan agunan dan memantau proses penyelesaiannya.
 5. Melayani nasabah dalam rangka penandatanganan/pencairan kredit dan memberikan penjelasan mengenai perjanjian kredit dan syarat kredit.
 6. Membuat surat royalti hak tanggungan atas agunan kredit yang telah dilunasi dan mencatat pada buku register agunan.
 7. Melakukan penyelesaian klaim asuransi yang diterima dari mitra Bank.
 - Bank telah membentuk unit kerja bagian hukum dalam susunan organisasi yang memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:
 1. Memberikan konsultasi dan/atau pendampingan hukum yang dibutuhkan kepada Karyawan, Direksi, Komisaris, mantan Karyawan, mantan Direksi dan mantan Komisaris dalam proses penyelidikan, penyidikan, sampai dengan proses berperkara di pengadilan dalam rangka terkait dengan operasional Bank, dan melakukan kontak secara intensif dengan pihak eksternal (Firma Hukum, Hakim, Kepolisian, Notaris, Pengacara dll) untuk berkoordinasi mengenai masalah hukum yang dihadapi Bank.
 2. Menetapkan strategi dan memberikan opini dan/atau advice hukum mengenai penanganan perkara dan penyelesaian permasalahan hukum, pemberian keterangan saksi/saksi ahli serta mengkoordinasikan dan memfasilitasi saksi ahli serta menindaklanjuti hasil investigasi untuk meningkatkan efektifitas dan kelancaran penyelesaian kasus hukum perusahaan.
 3. Memastikan hak hukum dan dokumentasi hukum lainnya yang diserahkan oleh pihak ketiga/nasabah sebagai bagian perjanjian hukum dengan Bank.
 4. Mengawasi dan menerima laporan perkembangan penyusunan kajian dan rekomendasi hukum untuk kepentingan Bank, baik yang melibatkan karyawan/pihak internal dan/atau pihak eksternal serta kajian dan rekomendasi atas berbagai kasus yang terjadi yang berhubungan dengan Peraturan perundang-undangan dan regulasi Perbankan.

Legal Risk

Parameters of Approach

- a. Legal Risk Management Organization
 - The Bank has a Credit Administration Law Department (HAK) in each branch, one of whose main tasks is to supervise the implementation and operational procedures of credit law, such as
 1. Providing services to clients to explain the credit agreement process.
 2. Carrying out the credit collateral assessment/planning process, the credit commitment process, the collateral commitment and monitoring its completion.
 3. Drafting and preparation of private or notarized credit agreement including supporting documents.
 4. Preparation of the collateralization process and supervision of its completion.
 5. Assisting clients in the process of loan signing/disbursement and explaining the loan agreement and terms.
 6. Drawing up a letter of mortgage rights for the paid credit collateral and its registration in the Collateral Register Book.
 7. Settlement of insurance claims received from the Bank's partners.
 - Within the organizational structure, the Bank has established a legal department with the following duties and responsibilities
 1. Providing the necessary advice and/or legal assistance to employees, directors, commissioners, former employees, former directors and former commissioners in the process of investigation, inquiry up to the process of litigation in court in relation to the Bank's operations, and maintaining intensive contact with external parties (law firms, judges, police, notaries, lawyers) to coordinate regarding legal problems faced by the Bank.
 2. Determining strategies and providing opinions and/or legal advice regarding the handling of cases and the resolution of legal problems, providing witness/expert testimony and coordinating and facilitating expert testimony, and following up on the results of investigations in order to improve the effectiveness and smoothness of the resolution of the Company's legal cases.
 3. Securing legal rights and other legal documents submitted by third parties/customers as part of the legal agreement with the Bank.
 4. Supervising and receiving reports on the progress of the preparation of legal studies and recommendations for the Bank's interests, both involving employees/internal parties and/or external parties, as well as studies and recommendations on various cases that arise in connection with banking laws and regulations.

5. Melakukan kajian terhadap kerjasama dalam pengembangan produk baru dan/atau aktivitas baru yang akan diterbitkan/dilaksanakan oleh Bank.
6. Mengajukan analisis dan merekomendasikan alternatif pelaksanaan penyusunan dan pengamanan kebijakan Direksi, mengajukan konsep opini dan/atau *advice* hukum untuk penyusunan dan pengamanan kebijakan Bank.
7. Mengajukan analisis dan kajian dan/atau menyusun masukan/rumusan, rancangan kebijakan dan prosedur yang terkait dengan tugas dan wewenang Bank.

Mekanisme Pengendalian Risiko Hukum

- Bank telah melakukan sosialisasi dan memberikan informasi produk hukum BPD Bali secara *online* dan melakukan addendum perjanjian antara Bank dengan pihak ketiga tentang pemberian pelayanan hukum yang mencakup pemberian pelayanan hukum kepada Bank dalam bidang perbankan melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan dengan jalan negosiasi.
- Bank telah melakukan audiensi mitigasi risiko hukum gugatan debitur dan penerapan APU-PPT dan PPPSPM dengan kesimpulan perlu dibuatkan format standar surat pernyataan penjualan agunan dibawah tangan sehingga terdapat keseragaman di Bagian Penyelamatan Kredit Bank BPD Bali.
- Bank telah melakukan kerjasama dengan tim kuasa hukum Bank untuk menangani potensi risiko hukum dari sisi litigasi.
- Sosialisasi *Antifraud* dengan SKAI & AF bersama Tim Pertimbangan Hukum Jabatan (PHJ).
- Sosialisasi/*gathering/focus group discussion* bersama-sama dengan Lembaga Penegak Hukum terkait permasalahan hukum yang dihadapi Bank.
- Memberikan Kajian Hukum dalam penyusunan kebijakan perkreditan dengan perkembangan kebijakan regulator dan persaingan pasar, penyusunan kebijakan pengembangan dan diversifikasi produk dan layanan dan penyusunan kebijakan terhadap pengembangan layanan *digital banking* terkait draf Keputusan Direksi, MoU dan/atau Perjanjian Kerjasama dengan Pihak lainnya.
- Terdapat layanan konsultasi "Hukum *Online*" yang menjadi salah satu pertimbangan sumber informasi Bank dalam rangka mengatasi potensi litigasi dan non litigasi.
- Bahwa dalam melaksanakan pendampingan hukum dan persidangan selalu mengacu pada aturan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0810/KEP/DIR/KPN/2016 tentang Standar Operasional Prosedur Bantuan Hukum yang telah diubah dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0166/KEP/DIR/KPN/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0810/KEP/DIR/KPN/2016 tentang Standar Operasional Prosedur Bantuan hukum, Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0284/KEP/DIR/KPN/2023 tentang Buku Pedoman Perusahaan Pelaksanaan

5. *Conducting studies on cooperation in the development of new products and/or new activities to be issued/implemented by the Bank.*
6. *Submitting analyses and recommending alternatives for the implementation of the preparation and safeguarding of the Board of Directors' policies, submitting draft opinions and/or legal advice for the preparation and safeguarding of the Bank's policies.*
7. *Submit analyses and studies and/or prepare input/formulations, draft policies and procedures related to the Bank's duties and powers.*

Legal Risk Control Mechanism

- *The Bank conducted socialization and provided information about the legal products of BPD Bali online and made a supplement to the agreement between the Bank and third parties regarding the provision of legal services, which includes the provision of legal services to the Bank in the banking sector through the courts or out of court through mediation.*
- *The Bank has conducted an audience for the mitigation of legal risk of debtor lawsuits and the implementation of APU-PPT and PPPSPM with the conclusion that it is necessary to create a standard format for a statement of collateral sales underhand so that there is uniformity in the credit rescue section of Bank BPD Bali.*
- *The Bank has worked with the Bank's legal team to address potential legal risks from the litigation side.*
- *Anti-Fraud Socialization with SKAI & AF together with the Legal Consideration Team (PHJ).*
- *Socialization/gathering/focus group discussion with law enforcement agencies on legal issues facing the Bank.*
- *Providing legal studies in the preparation of credit policies with the development of regulatory policies and market competition, the preparation of policies for the development and diversification of products and services, and the preparation of policies for the development of digital banking services in relation to draft Board of Directors' resolutions, MoUs and/or cooperation agreements with other parties.*
- *That there is an "Online Legal" consultation service, which is one of the sources of information of the Bank to deal with potential litigation and non-litigation.*
- *That in providing legal assistance and processes, the rules of the Regulation of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Bali No. 0810/KEP/DIR/KPN/2016 on Standard Operating Procedures for Legal Assistance, as amended by the Regulation of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Bali No. 0810/KEP/DIR/KPN/2016, shall always be referred to, of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Bali No. 0166/KEP/DIR/KPN/2021 on Amendments to Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Bali No. 0810/KEP/DIR/KPN/2016 on Standard Operating Procedures for Legal Aid, Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah*

Fungsi Kepatuhan dan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0424/KEP/DIR/RENSTRA/2024 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0438/KEP/DIR/RENSTRA/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Kantor Pusat dan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0460/KEP/DIR/RENSTRA/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Unit Kerja.

- Melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Kejaksaan Tinggi Bali tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Risiko Kepatuhan

Parameter Pendekatan

- Organisasi Manajemen Risiko Kepatuhan
Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0424/KEP/DIR/RENSTRA/2024 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas, Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0438/KEP/DIR/RENSTRA/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Kantor Pusat dan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0460/KEP/DIR/RENSTRA/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Unit Kerja. Terkait dengan risiko kepatuhan, Bank memiliki Satuan Kerja Kepatuhan yang berada di bawah Direktorat Kepatuhan. Bank telah menempatkan *Officer* Kepatuhan Divisi Kepatuhan yang ditugaskan di semua Cabang kecuali Cabang Mataram dan Cabang Seririt. Untuk pelaksanaan di Cabang Mataram masih dirangkap oleh *Officer* Kepatuhan yang bertugas di Kantor Pusat, sedangkan untuk Cabang Seririt dirangkap oleh *Officer* Kepatuhan yang ditugaskan di Cabang Singaraja. *Officer* kepatuhan bertugas untuk memastikan bahwa proses persetujuan perkreditan telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Strategi manajemen risiko dan efektivitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, terutama dalam rangka memastikan penyusunan kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan standar yang berlaku secara umum, ketentuan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - Terhadap penyusunan kebijakan dan prosedur telah dilakukan pengkajian dari sisi manajemen risiko dan kepatuhan sebelum dilakukan finalisasi melalui sisdur. Bank telah menginformasikan semua ketentuan-ketentuan baik eksternal maupun internal dalam aplikasi *Compliance Management System* (CMS) yang dapat diakses oleh semua karyawan melalui website intranet. Bank untuk kemudian unit operasional melakukan sharing session sehingga mengetahui segala ketentuan terbaru terkait dengan bidangnya masing-masing.

Bali No. 0284/KEP/DIR/KPN/2023 on Corporate Guidelines for the Implementation of Compliance Functions and Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Bali Number 0284/KEP/DIR/KPN/2023 concerning the Company Guidelines for the Implementation of Compliance Functions and Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Bali Number 0424/KEP/DIR/RENSTRA/2024 concerning the Company Guidelines for Organizational Structure and Job Descriptions, and Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Bali No. 0438/KEP/DIR/RENSTRA/2024 on Standard Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Bali No. 0460/KEP/DIR/RENSTRA/2024 concerning Standard Operating Procedures for Organizational Structure and Job Descriptions of the Head Office.

- Conclusion of a Cooperation Agreement with the Bali Supreme Public Prosecutor's Office regarding the handling of legal matters in civil and governmental administrative matters.

Compliance Risk

Parameters of Approach

- Compliance Risk Management Organization
Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Bali No. 0424/KEP/DIR/RENSTRA/2024 on the Guidelines for the Organizational Structure and Job Descriptions of the Company, Resolution of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Bali No. 0438/KEP/DIR/RENSTRA/2024 on the Company's Guidelines for Organizational Structure and Job Descriptions of the Head Office, and Resolution of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Bali No. 0460/KEP/DIR/RENSTRA/2024 on the Company's Guidelines for Organizational Structure and Job Descriptions of the Business Units. With regard to compliance risk, the Bank has a Compliance Work Unit under the Compliance Directorate. The Bank has appointed Compliance Officers from the Compliance Department who are assigned to all branches except Mataram Branch and Seririt Branch. For the implementation of the Mataram Branch, the Compliance Officer is still assigned to the Head Office, while for the Seririt Branch, the Compliance Officer is assigned to the Singaraja Branch. The Compliance Officer's role is to ensure that the credit approval process implements the principle of prudence and complies with applicable regulations.
- The risk management strategy and the effectiveness of implementing risk management for compliance risks, particularly to ensure that the policies and procedures drafted are consistent with generally accepted standards, rules and/or applicable laws and regulations.
 - The preparation of the policies and procedures was reviewed by the Risk Management and Compliance Departments before being finalized by the SIDUR. The Bank has published all external and internal regulations in the Compliance Management System (CMS) application, which is accessible to all employees via the Intranet website. The Bank then organizes a sharing session for the operational units so that they are aware of all the latest provisions related to their respective areas.

- Bank telah melakukan penyempurnaan terhadap BPP dan SOP Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan yaitu terkait pengelolaan Risiko Kepatuhan. Salah satu penyempurnaannya adalah terkait *Compliance Risk Assessment* sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai acuan untuk dapat melakukan pengendalian risiko kepatuhan dan dilakukan *Compliance Checklist* yang diharapkan dapat meminimalisir adanya temuan yang berulang setiap tahun.
 - c. Mekanisme pemantauan dan pengendalian risiko kepatuhan
 - Bank menerapkan prinsip *zero risk tolerance* secara konsisten, dan melaksanakan *reward and punishment* secara konsisten.
 - Bank telah memiliki *Code of Conduct* yang mengatur 12 kewajiban dan 11 larangan serta wajib dilaksanakan oleh seluruh karyawan.
 - Bank telah melakukan sosialisasi secara bertahap ke beberapa Kantor Cabang dalam rangka memastikan efektivitas manajemen risiko kepatuhan dan sosialisasi mengenai ketentuan dan budaya kepatuhan. Terkait PBI, POJK, dan ketentuan baru lainnya disosialisasikan kepada masing-masing unit operasional dengan tujuan dapat memperbaiki ketentuan internnya.
 - Pemantauan dilakukan dengan mengevaluasi pelaksanaan ketentuan pada semua aktivitas fungsional melalui kajian-kajian kepatuhan dan pemeriksaan auditor internal oleh SKAI dan *Anti Fraud*, dan eksternal dari BI, OJK, BPK, KAP, PPATK dan auditor independen.
 - Bank telah melakukan penyempurnaan SOP dan mekanisme uji kepatuhan yang mengatur bahwa kegiatan operasional dengan kriteria tertentu wajib melalui uji kepatuhan oleh Divisi Kepatuhan. Bank dalam upaya mencegah berulangnya pelanggaran tersebut dengan memberikan bimtek dan pelatihan terkait materi yang menjadi pelanggaran
 - Bank telah melakukan penyempurnaan BPP Penerapan Program APU & PPT sebagaimana sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Direksi No. 0600/KEP/DIR/KPN/2023 tentang Buku Pedoman Perusahaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
 - Bank telah melakukan langkah-langkah antisipasi terjadinya kesalahan ataupun keterlambatan dalam pelaporan APU, PPT dan PPPSPM sbb:
 1. Melakukan penyempurnaan ketentuan internal terkait penerapan program APU, PPT dan PPPSPM sebagaimana diamanatkan oleh POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.
 2. Meng-*update* database transaksi tunai yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan.
 3. Mengelola dan memperbaharui database Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSPM) secara berkala.
 4. Meng-*update* database calon nasabah dalam *core banking* yang terindikasi terkait Perjudian *Online* secara berkala.
 5. Melakukan sosialisasi/bimbingan teknis/*refreshment* kepada unit kerja terkait penerapan program APU, PPT dan PPPSPM.
- The Bank has made improvements to the BPP and SOP for the implementation of the compliance function, in particular with regard to compliance risk management. One of the improvements is related to the Compliance Risk Assessment, so that the results can be used as a reference to be able to control the compliance risk, and a compliance checklist is carried out, which is expected to minimize the recurring findings every year.
 - c. Compliance Risk Monitoring and Control Mechanism
 - The Bank consistently applies the principle of zero risk tolerance. It consistently implements rewards and punishments.
 - The Bank has a Code of Conduct which contains 12 obligations and 11 prohibitions to be implemented by all employees.
 - In order to ensure the effectiveness of compliance risk management and socialization of compliance rules and culture, the Bank has gradually socialized several branches. With regard to PBI, POJK and other new regulations, they are socialized to each operational unit with the aim of updating their internal regulations.
 - Monitoring is carried out by evaluating the implementation of provisions in all functional activities through compliance studies and internal audits by SKAI and Anti-Fraud and external audits by BI, OJK, BPK, KAP, PPATK and independent auditors.
 - The Bank has refined the SOP and compliance testing mechanism, which stipulates that operational activities with certain criteria must undergo compliance testing by the Compliance Department. The Bank, in an effort to prevent the recurrence of these violations, provides technical guidance and training related to the material that is the violation.
 - The Bank has refined the BPP for the implementation of the APU & PPT Program as specified in the Board of Directors' Resolution No. 0600/KEP/DIR/KPN/2023 on the Corporate Guidelines for the Implementation of the Program to Combat Money Laundering, the Financing of Terrorism and the Proliferation of Weapons of Mass Destruction.
 - The Bank has taken the following measures to prevent errors or delays in the reporting of APU, PPT and PPPSPM:
 1. Refining internal regulations related to the implementation of the APU, PPT, and PPPSPM programs in accordance with POJK No. 8 of 2023 on the Implementation of the Program to Combat Money Laundering, Prevent the Financing of Terrorism, and Prevent the Proliferation of Weapons of Mass Destruction in the Financial Services Sector.
 2. Updating the database of cash transactions exempt from reporting requirements.
 3. Maintain and periodically update the database of the List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations (DTTOT) and the List of Financing for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction (DPPSPM).
 4. Periodically update the Core Banking database of prospects suspected of being associated with online gambling.
 5. Conduct socialization/technical guidance/refreshment courses for work units related to the implementation of APU, PPT and PPPSPM programs.

6. Mengembangkan mekanisme untuk melakukan *screening* calon nasabah dan/atau nasabah dengan database DTTOT dan DPPSPM serta *database Politically Expose Person* (PEP) dari PPAK.
 7. Melakukan penegasan kepada unit kerja secara aktif dan berkala melakukan sosialisasi atau *sharing knowledge* atas kebijakan penerapan program APU, PPT dan PPPSPM.
- Bank telah melakukan penyempurnaan terhadap aplikasi penerapan APU, PPT dan PPPSPM, khususnya terkait implementasi pelaporan melalui aplikasi goAML oleh PPAK.
 - Melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap aplikasi *core banking* Bank agar dapat menentukan tingkat risiko nasabah terkait APU, PPT dan PPPSPM secara otomatis berdasarkan parameter-parameter yang telah ditentukan sesuai dengan *National Risk Assessment* (NRA) dan *Sectoral Risk Assessment* (SRA) di sektor jasa keuangan terkini.
 - Bank memiliki SOP Disiplin Karyawan, yang didalamnya diatur substansi pembebanan secara proporsional kepada PIC Pelaporan Bank atas pengenaan sanksi atau denda yang dialami Bank oleh *regulator* ketika terjadi keterlambatan dan kesalahan dalam melakukan pelaporan Bank.
 - Bank telah melakukan penyempurnaan terhadap BPP dan SOP Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dengan salah satu penyempurnaannya adalah terkait *Compliance Risk Assessment* sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai acuan untuk dapat melakukan pengendalian risiko kepatuhan dan dilakukan *Compliance Checklist* yang diharapkan dapat meminimalisir adanya temuan yang berulang setiap tahun.
 - Bank telah memiliki kebijakan yang mengatur tentang Pengendalian Gratifikasi, Pedoman Teknis Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Bank (LHKPN) mulai dari setingkat Kepala Bidang keatas.
 - Bank telah memiliki Tim *Monitoring* APU & PPT dalam rangka melakukan pemantauan atas Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di unit operasional.
 - Bank telah memiliki Ketentuan Pelaksanaan *Customer Identification File* (CIF). Bank telah menggunakan aplikasi ACL untuk dapat melakukan pemantauan terhadap CIF ganda ataupun CIF tidak lengkap secara berkala dengan lebih efektif dan efisien.
 - Bank telah menempatkan *Officer* Kepatuhan Divisi Kepatuhan yang ditugaskan di semua Cabang, kecuali Cabang Mataram, dengan tugas untuk memastikan bahwa proses persetujuan perkreditan telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Bank telah menambahkan mekanisme kajian risiko sebagai fungsi *second opinion* dan *four eyes principles* dalam rangka perhitungan GWM.
6. *Develop a mechanism for screening prospective clients and/or customers using the DTTOT and DPPSPM databases and the PPAK's Politically Exposed Person (PEP) database.*
 7. *Carry out the confirmation to the work units to actively and periodically carry out the socialization or knowledge sharing on the implementation of the policies of the APU, PPT and PPPSPM programs.*
- *The Bank has improved the application of APU, PPT and PPPSPM, especially related to implementing reporting through PPAK's goAML application.*
 - *Conducting evaluation and improvement of the Bank's core banking application so that it can automatically determine the level of customer risk related to APU, PPT and PPPSPM based on the parameters determined in accordance with the National Risk Assessment (NRA) and Sectoral Risk Assessment (SRA) in the current financial services sector.*
 - *The Bank has an Employee Discipline SOP which regulates the content of proportional burdens on the Bank's reporting PIC for the imposition of sanctions or fines experienced by the Bank by the regulator, if there are delays and errors in the Bank's reporting.*
 - *The Bank has made improvements to the BPP and SOP for the implementation of the Compliance Function, one of the improvements being related to the Compliance Risk Assessment, so that the results can be used as a reference to be able to control the compliance risk and a compliance checklist is carried out, which is expected to minimize the recurring findings each year.*
 - *The Bank has policies governing the control of gratification, technical guidelines for the Anti-Bribery Management System (SMAP) and the obligation to declare assets for the Board of Commissioners, Directors and Bank Officials (LHKPN) from the level of Head of Division and above.*
 - *The Bank has an APU & PPT Monitoring Team to monitor the implementation of APU, PPT and PPPSPM programs in the operational units.*
 - *The Bank has provisions for the implementation of the Customer Identification File (CIF). The Bank has used the ACL application to monitor duplicate CIFs or incomplete CIFs on a regular basis in a more effective and efficient manner.*
 - *The Bank has appointed Compliance Officers in the Compliance Department assigned to all branches except Mataram Branch to ensure that the credit approval process has implemented the principle of prudence and is in compliance with applicable regulations.*
 - *The Bank has introduced a risk review mechanism as a second opinion function and four-eyes principle in the calculation of GWM.*

Risiko Strategik

Parameter Pendekatan

- a. Organisasi Manajemen Risiko Strategik
 - Bank telah menetapkan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0424/KEP/DIR/RENSTRA/2024 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas, Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0438/KEP/DIR/RENSTRA/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Kantor Pusat dan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0460/KEP/DIR/RENSTRA/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Unit Kerja, dimana Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Bank disesuaikan menjadi 1 (satu) Buku Pedoman Perusahaan dan 2 (dua) Standar Operasional Prosedur dari sebelumnya hanya 1 (satu) Buku Pedoman Perusahaan, sehingga Bank dapat terus bertransformasi dan *agile* terhadap perubahan yang terjadi serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyusunan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Bank.
 - Bank juga telah memiliki tim penyusun Rencana Bisnis Bank setiap tahunnya yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi.
- b. Kebijakan yang memungkinkan Bank untuk dapat mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis, baik eksternal maupun internal
 - Bank memiliki Kebijakan Umum Direksi dimana dalam Kebijakan Umum Direksi tersebut tercantum analisis SWOT, visi dan misi Bank, arah kebijakan Bank, langkah-langkah strategik Bank.
 - Bank memiliki Rencana Bisnis Bank yang memuat visi dan misi Bank, analisa SWOT, kebijakan manajemen yang telah mengalami perubahan dengan memperhatikan faktor eksternal seperti faktor makroekonomi maupun faktor internal.
 - Bank memiliki *Corporate Plan* yang memuat visi misi, *value*, analisa kondisi lingkungan, analisa SWOT, sasaran strategis, peta strategi, sasaran strategi dan *action plan*.
 - Bank telah menetapkan tujuan strategik berdasarkan kebutuhan pasar. Pengembangan bisnis baru dilakukan mengikuti kebutuhan pasar yang dituangkan dalam Rencana Penyelenggaraan Produk Bank (RP2B).
 - Bank sudah memiliki ketentuan internal sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0133/KEP/DIR/RENSTRA/2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang Buku Pedoman Perusahaan Sistem Perencanaan, Anggaran dan Kinerja dan Keputusan Direksi Nomor 0144/KEP/DIR/RENSTRA/2023 tanggal 29 Maret 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan *Corporate Plan*, Rencana Bisnis Bank dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
- c. Mekanisme untuk mengukur kemajuan yang dicapai dari rencana bisnis yang ditetapkan

Bank telah melaksanakan rapat evaluasi kinerja yang dilaksanakan setiap bulan untuk mengevaluasi pencapaian kinerja Bank. Bank juga telah melakukan *monitoring* terhadap *Project* Korporasi secara mingguan berupa Laporan Rekapitulasi Proyek Korporasi. *Monitoring Project* Korporasi juga dilakukan melalui aplikasi IT PMO System.

Strategic Risk

Parameters of Approach

- a. Strategic Risk Management Organization
 - The Bank has adopted the Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Bali No. 0424/KEP/DIR/RENSTRA/2024 on the Company Guidelines for Organizational Structure and Job Descriptions, Order of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Bali No. 0438/KEP/DIR/RENSTRA/2024 concerning the Standard Operating Procedures for Organizational Structure and Job Descriptions of the Head Office and Order of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Bali No. 0460/KEP/DIR/RENSTRA/2024 concerning the Standard Operating Procedures for Organizational Structure and Job Descriptions of the Work Units, where the Bank's Organizational Structure and Job Descriptions are adjusted to 1 (one) Company Policy and 2 (two) Standard Operating Procedures from only 1 (one) Company Policy previously, so that the Bank can continue to transform and be agile to the changes that occur and increase effectiveness and efficiency in preparing the Bank's Organizational Structure and Job Descriptions.
 - The Bank also has a team that prepares the Bank's Business Plan every year, which is established by a Board of Directors' resolution.
- b. Policies enabling banks to identify and respond to changes in external and internal environment
 - The bank has a general policy of the Board of Directors that includes a SWOT analysis, the bank's vision and mission, the bank's policy direction, and the bank's strategic steps.
 - The bank has a bank business plan that includes the vision and mission of the bank, SWOT analysis, management policies that have changed by considering external factors such as macroeconomic factors and internal factors.
 - The bank has a corporate plan that includes vision and mission, values, environmental analysis, SWOT analysis, strategic goals, strategy maps, strategic objectives, and action plans.
 - The bank has set strategic goals based on market needs. New business development is carried out according to market needs as outlined in the Bank's Product Implementation Plan (RP2B).
 - The Bank already has internal regulations in accordance with the Board of Directors' Decision No. 0133/KEP/DIR/RENSTRA/2023 of March 27, 2023 on the Corporate Guidelines for Planning, Budgeting and Performance Systems and the Board of Directors' Decision No. 0144/KEP/DIR/RENSTRA/2023 of March 29, 2023 on the Standard Operating Procedures for the Preparation of Corporate Plans, Bank Business Plans and Sustainable Finance Action Plans.
- c. Mechanism for Measuring Progress Against the Established Business Plan

The Bank has conducted monthly performance review meetings to evaluate the Bank's performance. The Bank has also conducted weekly corporate project monitoring through Corporate Project Recapitulation Reports. The monitoring of corporate projects is also carried out through the IT PMO System application.

Risiko Reputasi

Parameter Pendekatan

- a. Organisasi manajemen Risiko Reputasi, termasuk pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko reputasi oleh unit-unit terkait (*corporate secretary*, humas, dan unit bisnis terkait);
 - Bank telah memiliki Komite Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 1. Menyusun sistem dan prosedur internal Bank yang mengatur mekanisme operasional pengaduan konsumen;
 2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen;
 3. Melakukan komunikasi yang lancar dan akurat secara sistem intern Bank tentang pengaduan konsumen;
 4. Memberikan masukan dan saran kepada unit operasional secara kontinyu mengenai seluruh aspek pengaduan konsumen;
 5. Memastikan seluruh pengaduan yang disampaikan oleh konsumen terselesaikan;
 6. Memonitor/melakukan pemantauan kegiatan unit pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen;
 7. Mengkompilasi seluruh laporan dan unit pelayanan pengaduan konsumen dan wajib menyampaikan laporan pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen secara triwulanan (3 bulanan) kepada Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
 8. Menyusun materi pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen yang akan dicantumkan dalam laporan tahunan, halaman (*website*), dan/atau media lain yang dikelola secara resmi;
 9. Menjadi penghubung pelayanan dan penyelesaian pengaduan yang disampaikan Konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau otoritas lainnya.
 - Bank memiliki Divisi Sekretaris Perusahaan sebagai unit yang mampu mengkomunikasikan kondisi perusahaan dengan pihak luar serta menjaga hubungan baik dengan para wartawan dan masyarakat Perbankan.
 - Bank telah memiliki Bagian Humas & Pelindungan Konsumen sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0424/KEP/DIR/RENSTRA/2024 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas, Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0438/KEP/DIR/RENSTRA/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Kantor Pusat dan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0460/KEP/DIR/RENSTRA/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Unit Kerja, yang memiliki tugas memberikan sosialisasi kepada seluruh karyawan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat.

Reputation Risk

Parameters of Approach

- a. *Reputational Risk Management Organization, including the implementation of reputational risk management by related units (Corporate Secretary, Public Relations, and related business units);*
 - *The Bank shall have a Consumer Complaint Handling and Resolution Committee with the following duties and responsibilities:*
 1. *To prepare the Bank's internal systems and procedures governing the operational mechanism for consumer complaints;*
 2. *To be responsible for the implementation of policies and procedures for handling and resolving consumer complaints;*
 3. *Ensure smooth and accurate communication through the Bank's internal system regarding consumer complaints;*
 4. *Provide input and suggestions to operational units on all aspects of consumer complaints on an ongoing basis;*
 5. *Ensure that all consumer complaints are resolved;*
 6. *Monitor/conduct oversight of the activities of the Consumer Complaint Service and Resolution Units;*
 7. *To compile all reports and consumer complaint service units and are required to submit quarterly (3-month) reports on the consumer complaint service and resolution to the Bank Indonesia (BI) and the Financial Services Authority (OJK);*
 8. *Prepare materials on consumer complaint service and resolution. These materials will be included in the annual report, website, and/or other media that are officially managed;*
 9. *To act as a liaison for serving and resolving complaints submitted by consumers to the Financial Services Authority (OJK) and/or other authorities.*
 - *The Bank has a Corporate Secretary Division as a unit capable of communication of the company's condition to external parties and maintenance of good relations with journalists and the banking community.*
 - *The Bank has a Public Relations and Consumer Protection Department in accordance with PT Bank Pembangunan Daerah Bali Board of Directors Order No. 0424/KEP/DIR/RENSTRA/2024 on Company's Organizational Structure Guidelines and Job Descriptions, Order of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Bali No. 0438/KEP/DIR/RENSTRA/2024 concerning the Standard Operating Procedures for Organizational Structure and Job Descriptions of the Head Office and Order of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Bali No. 0460/KEP/DIR/RENSTRA/2024 concerning the Standard Operating Procedures for Organizational Structure and Job Descriptions of the Work Units, which has the task of providing socialization to all employees regarding consumer and community protection.*

- Bank secara kontinyu melakukan pertemuan informal melalui *gathering*, mengikutsertakan dalam pemasangan iklan-iklan ucapan hari raya, neraca publikasi, dan pengumuman SBDK.
 - Dari pihak internal Bank juga telah memiliki media sendiri yang bernama BPD Bali News yang bertujuan mempublikasikan kinerja Bank serta memberikan informasi yang sesuai, baik untuk meng-*counter* pemberitaan negatif maupun memberikan edukasi kepada semua pihak.
- b. Kebijakan dan mekanisme dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengendalikan risiko reputasi
- Bank telah memiliki layanan *contact center* 24 yang dapat diakses melalui berbagai media/kanal yang telah disediakan bank, Antara lain : telepon di nomor 1500844, *live chat* pada *website* Bank, email ke alamat bpdbalicare@bpdbali.co.id, media sosial Bank (Instagram dan Facebook)
 - Bank telah melakukan pengembangan integrasi aplikasi *contact center omnichannel* dengan aplikasi *helpdesk* yang merupakan aplikasi *ticketing* internal Bank BPD Bali sehingga memudahkan pemantauan pengaduan yang diterima oleh unit kerja maupun *contact center* dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan nasabah dalam penanganan dan penyelesaian permasalahan khususnya pengaduan sehingga dapat memberikan informasi penyelesaian yang cepat, akurat dan terkini.
 - Bank telah memiliki Keputusan Direksi Nomor 0385/KEP/DIR/SEKPER/2024 tanggal 30 Juli 2024 tentang BPP Pelindungan Konsumen dan dalam proses penyempurnaan kebijakan berupa SOP Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
 - Bank telah memiliki BPP dan SOP pada Divisi Sekretaris Perusahaan yang digunakan dalam rangka mitigasi risiko serta BPP Perlindungan Konsumen dan SOP Perjanjian Baku. Bank telah memiliki Keputusan Direksi Nomor 0520/KEP/DIR/SEKPER/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Tata Kelola Pembuatan Iklan.
- c. Pengelolaan risiko reputasi pada saat krisis
- Bank telah melakukan penambahan jaringan komunikasi cadangan yang bersifat kritikal dan mempengaruhi operasional Bank di DRC meliputi jaringan komunikasi cadangan untuk layanan BI (RTGS, SKNBI, ETP, SSSS), Pajak (MPN G3 & Id Billing), ATM Bersama, Prima, Finnet, *E-Channel* (MB/IB, ATM, Laku Pandai) & *Core Banking* sehingga pelaksanaan uji DRP melalui *switch over* DC-DRC telah mencakup ruang lingkup tersebut di atas.
 - Bank telah melakukan peremajaan infrastruktur jaringan komunikasi & *Security Data Center* (DC) agar dapat memitigasi risiko keamanan layanan produk Bank BPD Bali yang berbasis IT khususnya layanan *E-Channel* yang dimiliki (ATM, CDM, MB/IB/IBB, Laku Pandai, E-Samsat dll) dan Peremajaan
- *The Bank holds informal meetings on an ongoing basis. It participates in the placement of holiday greeting advertisements, the publication of balance sheets and SBDK announcements.*
 - *From the internal side, the bank also has its own media called BPD Bali News, which has the aim to publish the bank's performance and provide appropriate information, both to counteract negative news and to provide education to all parties.*
- b. *Policies and Mechanisms to Improve the Quality of Service to Customers and Other Stakeholders to Control Reputational Risk*
- *The bank has a 24-hour contact center service that can be accessed through various media/channels provided by the bank, including: telephone at 1500844, live chat on the bank's website, email to bpdbalicare@bpdbali.co.id, bank social media (Instagram and Facebook).*
 - *The Bank has developed the integration of the omnichannel contact center application with the helpdesk application which is Bank BPD Bali's internal ticketing application to facilitate monitoring of complaints received by work units and contact centers in order to improve the quality of service and customer satisfaction in handling and resolving problems, especially complaints, so that they can provide fast, accurate and up-to-date resolution information.*
 - *The Bank has issued a Board of Directors' Decision No. 0385/KEP/DIR/SEKPER/2024 dated July 30, 2024 on BPP Consumer Protection and is in the process of perfecting the policy in the form of SOP for Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector.*
 - *The Bank has adopted a BPP and an SOP in the Corporate Secretary Division, which are used to mitigate risks, as well as the BPP Consumer Protection and Standard Agreement SOP. The Bank has issued a Board of Directors' Decree No. 0520/KEP/DIR/SEKPER/2024 dated September 20, 2024 on the Governance of Advertising Creation.*
- c. *Reputational risk management during a crisis*
- *The Bank has added critical backup communication networks affecting the Bank's operations in DRC including backup communication networks for BI services (RTGS, SKNBI, ETP, SSSS), Tax (MPN G3 & Id Billing), ATM Bersama, Prima, Finnet, E-Channel (MB/IB, ATM, Laku Pandai) & Core Banking so that the implementation of DRP test through DC-DRC switchover covered the above scope.*
 - *The Bank has rejuvenated the Communication Network Infrastructure & Security Data Center (DC) to mitigate the security risks of Bank BPD Bali's IT-based product services, especially the E-Channel services it has (ATM, CDM, MB/IB/IBB, Laku Pandai, E-Samsat etc.) and rejuvenated the*



Infrastruktur Jaringan Komunikasi & *Security Data Recovery Center* (DRC) agar dapat memitigasi risiko gangguan operasional *Data Center* sehingga layanan Bank berbasis IT dapat terjaga ketersediaan dan keandalannya.

- Bank telah menerapkan CCTV *monitoring* secara tersentralisasi melalui *Internet of Things* (IoT) sehingga risiko adanya upaya *fraud* (vandalisme, *skimming*, *call center* palsu, dll) di terminal ATM serta lingkungannya dapat dipantau dan diketahui lebih dini.
- Bank telah mengembangkan *Fraud Detection System*, termasuk pencegahannya dengan beberapa metode perlindungan terhadap rekening nasabah, serta telah melaksanakan *Penetration Testing* untuk menguji keamanan sistem Bank BPD Bali. Selain itu juga telah dilaksanakan penerapan *Security Operation Center* (SOC) yang memantau keamanan siber (*cyber security*) secara 24/7/365 pada jaringan Bank BPD Bali, dengan menggunakan orang, proses, dan teknologi untuk terus memantau dan meningkatkan postur keamanan organisasi untuk mencegah, mendeteksi, menganalisis, dan menanggapi insiden keamanan siber. Bank telah mengembangkan Aplikasi *Fraud Detection System* (FDS) dalam rangka pemantauan transaksi mencurigakan 24/7 pada layanan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan Non-APMK pada *channel Mobile Banking*, Uang Elektronik Balipay, BPD Bali *Merchant*, Agen Laku Pandai, *Internet Banking Business*, serta pemantauan pada *Dashboard FDS Partner* Artajasa dan Rintis
- Bank memiliki SOP Pembukaan, Perubahan Status, Pemindahan Alamat dan/atau Penutupan Jaringan Kantor.
- Bank memiliki SOP BCP yang mengatur prosedur *business continuity plan* baik di Kantor Pusat dan Kantor Cabang pada saat krisis.
- Pembentukan Bank BPD Bali *Computer Security Incident Response Team* (BPD BALI-CSIRT) untuk memastikan penanganan insiden siber yang tepat dan proaktif terhadap potensi insiden siber di masa depan.
- Bank telah melakukan pengujian *DRP* pada tanggal 24 – 25 Februari yang dilanjutkan pada tanggal 14 Desember 2024 untuk menguji keandalan DRC saat mengambil alih layanan DC saat terjadi kegagalan operasi dengan melibatkan Satuan Kerja terkait, Unit Kerja, serta Komite Pengarah TI
- Atas pemberitaan negatif telah disikapi dengan baik oleh Bank melalui langkah-langkah dengan melakukan koordinasi ke Pimpinan Redaksi dan *Marketing* Media Massa dan melakukan klarifikasi serta memberikan penjelasan memadai agar ke depannya bisa memberikan pemberitaan yang bersifat kritis

Communication Network Infrastructure & Security Data Recovery Center (DRC) to mitigate the risk of Data Center operational disruptions so that the IT-based Bank services can be maintained in terms of availability and reliability.

- *The Bank has implemented centralized video surveillance via the Internet of Things (IoT) to monitor and detect the risk of fraud attempts (vandalism, skimming, fake call centers, etc.) at ATMs and their surroundings.*
- *The Bank has developed a fraud detection system, including prevention with multiple methods to protect customer accounts, and has implemented penetration testing to test the security of Bank BPD Bali's system. The Bank has also implemented a Security Operation Center (SOC) which monitors the cyber security of Bank BPD Bali's network 24/7/365 using people, processes and technology to continuously monitor and improve the organization's security posture to prevent, detect, analyze and respond to cyber security incidents. The Bank has developed a Fraud Detection System (FDS) application to monitor suspicious transactions 24/7 on Card Payment Instrument (APMK) and Non-APMK services on Mobile Banking channel, Balipay Electronic Money, BPD Bali Merchant, Laku Pandai Agent, Internet Banking business and monitoring on FDS partner Artajasa and Rintis Dashboard.*
- *The Bank has an SOP for opening, change of status, change of address and/or closing of office networks.*
- *The Bank has a BCP SOP that regulates the Business Continuity Plan procedures both at the Head Office and at the Branches during a crisis.*
- *Established the Bank BPD Bali Computer Security Incident Response Team (BPD BALI-CSIRT) to ensure proper and proactive handling of cyber incidents to prevent potential cyber incidents in the future.*
- *The Bank conducted a *DRP* test on February 24 and 25, which was continued on December 14, to test the reliability of the *DRP* in taking over DC services in the event of an operational failure by involving relevant work units, business units and the IT Steering Committee.*
- *The Bank has responded well to negative news by taking steps by coordinating with the Editor-in-Chief and Marketing of the mass media and clarifying and providing adequate explanations so that in the future it can provide news that is constructively critical in a positive way, by meeting with journalists so that*

membangun secara positif, melalui *gathering* dengan wartawan sehingga mampu memberikan informasi memadai terkait Bank sehingga berita yang diterbitkan dapat memberikan informasi yang mendasar dan bersifat membangun serta melakukan pemberitaan positif ke media massa yang memiliki pengaruh besar karena dominan dibaca oleh khalayak ramai sehingga pencitraan positif Bank lebih efektif.

they are able to provide adequate information related to the Bank, so that the news published can provide basic and constructive information and provide positive news to the mass media, which has a great influence as it is mainly read by the general public, so that the positive image of the Bank is more effective.



06

Tata Kelola **PERUSAHAAN** *Corporate Governance*



KOMITMEN TATA KELOLA

Governance Commitment

Bank BPD Bali berkeyakinan bahwa implementasi tata kelola merupakan kebutuhan untuk terus menjaga kelangsungan usaha di masa mendatang. Bank juga memandang bahwa penerapan tata kelola secara konsisten dan berkesinambungan akan meningkatkan kinerja sehingga mampu mengoptimalkan kepercayaan masyarakat dan pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya.

Bank BPD Bali telah menempatkan implementasi tata kelola sebagai sebuah sistem pengelolaan perusahaan. Oleh karena itu, penerapan tata kelola yang efektif merupakan tantangan strategis yang harus senantiasa ditingkatkan dengan terus berbenah diri menuju suatu organisasi yang berkomitmen untuk melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG).

Implementasi GCG mengakomodir adanya perubahan yang dinamis dan terbuka terhadap konsep-konsep baru. Kredibilitas serta kepercayaan publik, pemegang saham, nasabah serta *stakeholders* lainnya merupakan faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan serta meningkatkan nilai-nilai Perusahaan. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Dewan Komisaris dan Direksi sebagai organ perusahaan berkomitmen untuk senantiasa menerapkan GCG sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan budaya perusahaan (*corporate culture*).

Komitmen tersebut diwujudkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang selalu mengacu kepada aturan yang berlaku dan menerapkan kebijakan nilai-nilai yang dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu standar perilaku yang diwajibkan bagi seluruh organ Perusahaan melalui perumusan dan pelaksanaan Kode Etika atau komitmen integritas.

Komitmen Bank BPD Bali dalam pelaksanaan tata kelola yang baik tersebut diwujudkan dalam berbagai aspek perusahaan sebagaimana yang terefleksi antara lain dalam visi dan misi, budaya kerja, kode etik, pedoman penerapan GCG, serta piagam Dewan Komisaris dan Direksi. Selain itu, implementasi dari komitmen GCG Bank dapat juga dilihat pedoman pengelolaan sumber daya manusia (SDM), sistem pelaporan, dan ketentuan-ketentuan lainnya sebagai panduan dalam penerapan GCG di setiap tingkatan organisasi.

Selanjutnya, komitmen penerapan GCG dibuktikan dengan pelaksanaan organ utama dan organ pendukung Bank BPD Bali beserta evaluasi atas penerapan GCG yang dilaksanakan 2 (dua) kali setahun sebagai praktik terbaik atas prinsip-prinsip GCG yang akan dijelaskan pada bab ini secara menyeluruh.

Bank BPD Bali believes that the implementation of good governance is a necessity in order to continue to maintain the continuity of its business in the future. We believe that consistent and ongoing implementation of good governance practices will improve performance and enhance public and shareholder confidence, while taking into account other stakeholders' interests.

Bank BPD Bali has positioned governance implementation as corporate management system. Therefore, the implementation of effective governance is a strategic challenge that must be continuously improved through self-improvement towards an organization that is committed to the implementation of Good Corporate Governance (GCG).

Implementing GCG embraces dynamic change and is open to new approaches. Credibility and trust of the public, shareholders, customers, and other stakeholders are very important for developing, sustaining, and increasing the value of the Company. With this in mind, the Board of Commissioners and the Board of Directors, as the corporate bodies, are committed to always implementing the GCG in accordance with the laws and regulations and the Company's culture (corporate culture).

The commitment is manifested in each activity implementation, which always refers to applicable regulations and implements a policy of values that are explicitly stated as a standard of behavior that is required for all company organs through the formulation and implementation of the Code of Ethics or Integrity Commitment.

Bank BPD Bali's commitment to the implementation of good governance is manifested in various aspects of the company, which are reflected in the vision and mission, work culture, code of ethics, GCG implementation guidelines, and the charter of the board of commissioners and directors. In addition, the Bank's commitment to GCG can also be seen in the Human Resources (HR) policies, reporting systems, and other provisions designed to guide the implementation of GCG at all levels of the organization.

In addition, the Bank's commitment to the implementation of the GCGs is demonstrated by the implementation of the duties of the main and supporting organs of Bank BPD Bali, as well as the evaluation of the implementation of the GCGs, which is conducted twice (twice) a year as a best practice for the principles of the GCGs, which is explained in detail in this chapter.

DASAR HUKUM PENERAPAN TATA KELOLA

Legal Basis for The Implementation of Governance

Penerapan GCG di lingkungan Bank BPD Bali berpedoman pada beragam ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sebagai *regulator* serta peraturan-peraturan lainnya antara lain sebagai berikut:

The implementation of the GCG in the environment of Bank BPD Bali is guided by various provisions set by the Government of Indonesia, the Financial Services Authority and Bank Indonesia as the regulatory authorities, as well as other regulations, including the following:

Dasar Hukum Legal Basis	Jenis Regulasi	Type of Regulations
Undang-Undang (UU) Republik Indonesia <i>Laws of the Republic of Indonesia (UU)</i>	- UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan; - UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; - UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; - UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.	- Law No. 7 of 1992 on Banks, as amended by Law No. 10 of 1998 on Banks; - Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies; - Law No. 27 of 2022 on the Protection of Personal Data; - Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) <i>Financial Services Authority Regulation (POJK)</i>	- POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bank Umum - POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum; - POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan - POJK No. 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum - POJK No. 43/POJK.03/2017 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Bank; - POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum; - POJK No. 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum; - POJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum; - POJK No. 12/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; - POJK No. 13 /POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum; - POJK No. 63/POJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; - POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum; - POJK No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum; - POJK No. 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum; - POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum; dan - POJK No. 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank.	- POJK No. 45/POJK.03/2015 on the Implementation of Governance in the Provision of Remuneration for Commercial Banks - POJK No. 18/POJK.03/2016 on the Implementation of Risk Management for Commercial Banks - POJK No. 27/POJK.03/2016 on Fit and Proper Assessment for Main Parties of Financial Services Institutions - POJK No. 38/POJK.03/2016 on the Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Commercial Banks - POJK No. 43/POJK.03/2017 on the Follow-up of the Implementation of Banking Supervision - POJK No. 46/POJK.03/2017 on Implementation of Compliance Function of Commercial Banks; - POJK No. 12/POJK.03/2018 on implementation of digital banking services by commercial banks; - POJK No. 1/POJK.03/2019 on Implementation of Internal Audit Function in Commercial Banks; - POJK No. 12/POJK.03/2019 on reporting by commercial banks through the reporting system of the Financial Services Authority; - POJK No. 13/POJK.03/2020 on Amendments to Financial Services Authority Regulation No. 38/POJK.03/2016 on Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Commercial Banks; - POJK No. 63/POJK.03/2020 on reporting by commercial banks through the Financial Services Authority's reporting system; - POJK No. 12/POJK.03/2021 on Commercial Banks; - POJK No. 11/POJK.03/2022 on the Implementation of Information Technology by Commercial Banks; - POJK No. 24 of 2022 on the Development of the Quality of Human Resources of Commercial Banks; - POJK No. 17 of 2023 on Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks; and - POJK No. 15 of 2024 on Integrity of Financial Reporting of Banks.



Dasar Hukum Legal Basis	Jenis Regulasi	Type of Regulations
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) <i>Financial Services Authority Circular (SEOJK)</i>	• SEOJK No. 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum; • SEOJK No. 40/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bank Umum; • SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum; • SEOJK No. 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum; • SEOJK No. 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan; • SEOJK No. 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum; • SEOJK No. 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan; • SEOJK No. 12/SEOJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam <i>Banking Book</i> bagi Bank Umum; • SEOJK No. 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional; • SEOJK No. 12/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum; • SEOJK No. 28/SEOJK.03/2022 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum; • SEOJK No. 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum; • SEOJK No. 24/SEOJK.03/2023 tentang Penilaian Tingkat Maturitas Digital Bank Umum.	• <i>SEOJK No. 34/SEOJK.03/2016 on the Implementation of Risk Management for Commercial Banks;</i> • <i>SEOJK No. 40/POJK.03/2016 on the Implementation of Governance in the Provision of Remuneration for Commercial Banks;</i> • <i>SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 on the Implementation of Governance for Commercial Banks</i> • <i>SEOJK No. 21/SEOJK.03/2017 on the Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Commercial Banks;</i> • <i>SEOJK No. 32/SEOJK.03/2017 on the Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Financing of Terrorism Programs in the Banking Sector;</i> • <i>SEOJK No. 35/SEOJK.03/2017 on Guidelines for Internal Control System Standards for Commercial Banks;</i> • <i>SEOJK No. 36/SEOJK.03/2017 on Procedures for the Use of Public Accounting Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities;</i> • <i>SEOJK No. 12/SEOJK.03/2018 on the Implementation of Risk Management and Risk Measurement of Standard Approaches for Interest Rate Risk in Banking Books for Commercial Banks;</i> • <i>SEOJK No. 9/SEOJK.03/2020 on Transparency and Publication of Conventional Commercial Bank Reports;</i> • <i>SEOJK No. 12/SEOJK.03/2021 on Business Plans of Commercial Banks;</i> • <i>SEOJK No. 28/SEOJK.03/2022 on Risk Management Certification for Human Resources of Commercial Banks;</i> • <i>SEOJK No. 29/SEOJK.03/2022 on Cyber Resilience and Security for Commercial Banks;</i> • <i>SEOJK No. 24/SEOJK.03/2023 on Assessment of Digital Maturity Level of Commercial Banks.</i>
Peraturan Bank Indonesia (PBI) <i>Bank Indonesia Regulation (PBI)</i>	• PBI No. 10 Tahun 2024 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pihak yang Diatur dan Diawasi oleh Bank Indonesia; • PBI No. 24 Tahun 2024 tentang Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber bagi Penyelenggara Sistem Pembayaran, Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, serta Pihak Lain yang Diatur dan Diawasi Bank Indonesia.	• <i>PBI No. 10 of 2024 on the Implementation of Anti-Money Laundering, Prevention of Financing of Terrorism, and Prevention of Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction for Parties Regulated and Supervised by Bank Indonesia;</i> • <i>PBI No. 24 of 2024 on Information System Security and Cyber Resilience for Payment System Providers, Money Market and Foreign Exchange Market Operators, and Other Participants Regulated and Supervised by Bank Indonesia.</i>
Lain-lain <i>Other Regulations</i>	• <i>ASEAN Corporate Governance Scorecard;</i> • <i>Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI);</i> • <i>Anggaran Dasar Perusahaan terakhir sebagaimana yang tertuang dalam Akta No. 78 tanggal 24 Desember 2024;</i> • <i>Buku Pedoman Perusahaan Penerapan Tata Kelola Bank BPD Bali yang disahkan oleh Direksi melalui Keputusan Direksi No. 401/KEP/DIR/KPN/2024 tanggal 5 Agustus 2024.</i>	• <i>ASEAN Corporate Governance Scorecard;</i> • <i>General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI);</i> • <i>The latest Articles of Association of the Company as stated in Deed No. 78 dated December 24, 2024;</i> • <i>The Company's Guidelines for the Implementation of Bank BPD Bali Governance approved by the Board of Directors through Board Resolution No. 401/KEP/DIR/KPN/2024 dated August 5, 2024.</i>

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GCG DAN IMPLEMENTASI GCG PERUSAHAAN TAHUN BUKU 2024

Application of The GCG Principles and Implementation of The GCG in The Company in Fiscal Year 2024

Bank BPD Bali telah memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang terakhir kali ditetapkan melalui Keputusan Direksi No. 401/KEP/DIR/KPN/2024 tanggal 5 Agustus 2024 tentang Buku Pedoman Perusahaan Penerapan Tata Kelola yang menggantikan ketentuan sebelumnya yang diterbitkan pada tahun 2017. Selain itu, Bank juga memiliki Standar Operasional Prosedur Penerapan Tata Kelola yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi No. 0581/KEP/DIR/KPN/2018 tanggal 2 November 2018.

Bank BPD Bali has a Corporate Governance Policy which was last established through the Decree of the Board of Directors No. 401/KEP/DIR/KPN/2024 dated August 5, 2024 on the Corporate Policy Book for the Implementation of Governance, which replaced the previous provisions issued in 2017. Furthermore, the Bank also has a Standard Operating Procedure for the Implementation of Government, established by Board of Directors' Decree No. 0581/KEP/DIR/KPN/2018 dated November 2, 2018.

Pedoman GCG ini memuat prinsip-prinsip yang berlaku bagi seluruh aktivitas Bank BPD Bali sehingga segenap karyawan Bank diharapkan mampu menerapkan standar kerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Penguatan penerapan GCG di lingkungan Bank merupakan salah satu elemen utama untuk meningkatkan daya saing dan akan berpengaruh positif terhadap kinerja Bank.

This GCG guideline contains principles that are applicable to all the activities of the Bank BPD Bali, so that all the employees of the Bank are expected to be able to apply the standards of work in accordance with the principles of good corporate governance. Strengthening the implementation of GCG in the Bank's environment is one of the key elements to increase competitiveness and will have a positive impact on the Bank's performance.

Penerapan Prinsip-Prinsip GCG *Implementation of GCG Principles*

Penerapan Tata Kelola yang Baik di lingkungan Bank BPD Bali senantiasa berdasarkan pada 5 (lima) prinsip dasar GCG yakni transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Pengertian dan contoh implementasi kelima prinsip GCG disajikan pada tabel berikut ini:

The implementation of good governance in the environment of the Bank is always based on 5 (five) basic principles of GCG, namely transparency, accountability, responsibility, independence and fairness. The following table provides the definition and examples of the implementation of the five GCG principles:

Prinsip-prinsip GCG GCG Principles	Penjelasan Description	Implementasi Implementation
Transparansi	Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.	- Bank BPD Bali mengungkapkan informasi secara jelas, akurat dan efektif serta dapat diakses oleh pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) sesuai dengan haknya seperti pengumuman terkait pengadaan barang dan jasa, tata cara penyampaian pengaduan nasabah, layanan <i>Contact Center</i> Bank BPD Bali, dan perkembangan Perusahaan. - Meski bukan sebuah perusahaan terbuka, Bank mengungkapkan informasi tata kelola Perusahaan antara lain terkait RUPS, dividen, laporan pelaksanaan GCG, kode etik dan budaya perusahaan. - Transparansi informasi keuangan juga dilakukan oleh Bank terkait beragam publikasi laporan keuangan yang dipersyaratkan oleh regulator termasuk laporan tahunan dan keberlanjutan disamping informasi perbankan untuk nasabah maupun calon nasabah.
<i>Transparency</i>	<i>Openness in the presentation of material and relevant information and openness in the implementation of the decision-making process.</i>	<i>Bank BPD Bali discloses information in a clear, accurate and effective manner, and stakeholders have access to it in accordance with their rights. Examples include notices related to the procurement of goods and services, procedures for submitting customer complaints, Contact Center Bank BPD Bali services, and corporate developments.</i> <i>Although the Bank is not a publicly listed company, it discloses information on corporate governance, including the GMS, dividends, reports on the implementation of the GCG, the Code of Ethics and the corporate culture.</i> <i>Transparency of financial information is also carried out by the Bank in relation to the various publications of financial reports required by the regulatory authorities, including the Annual Report and the Sustainability Report, in addition to banking information for customers and potential customers.</i>



Prinsip-prinsip GCG GCG Principles	Penjelasan Description	Implementasi Implementation
Akuntabilitas	Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.	- Bank BPD Bali melalui websitenya menjelaskan struktur organisasi yang memuat organ utama dan organ pendukung Bank sebagai bentuk kejelasan fungsi tugas dan tanggung jawab pengelolaan Bank. - Selanjutnya, sejauh mana pengelolaan Bank dapat dilihat dari capaian kinerja sebagaimana yang disajikan di laporan publikasi keuangan baik bulanan, triwulanan, dan tahunan beserta capaian rasio keuangan. - Capaian atas pengelolaan Bank dapat juga dilihat dari penghargaan yang diterima dari eksternal terkait pengelolaan Bank di <i>website</i> Bank BPD Bali.
Accountability	Clarity of function and accountability of the Bank's organs for effective management.	- Bank BPD Bali explains through its website the organizational structure that includes the main and supporting organs of the Bank as a way to clarify the functions of the tasks and responsibilities of the Bank's management. - The extent to which the Bank's management can be seen from the results achieved, as presented in the monthly, quarterly and annually published financial reports, together with the achievement of the financial ratios. - The performance of the bank's management can also be seen from the awards of external parties in relation to the bank's management on the website of Bank BPD Bali.
Pertanggungjawaban	Kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.	- Pengelolaan Bank BPD Bali senantiasa mengacu kepada ketentuan yang diatur oleh Pemerintah Indonesia dan <i>regulator</i> yang ditindaklanjuti dengan pembuatan ketentuan baru atau pembaruan ketentuan eksisting secara berkala sehingga mampu merespon dinamika yang terjadi di industri. - Pengelolaan atas Bank ditindaklanjuti dengan <i>self-assessment</i> atas pengelolaan tata kelola yang dilakukan 2 kali dalam setahun disamping penilaian atas kesehatan Bank dengan pendekatan sebagaimana yang ditetapkan oleh <i>regulator</i>. - Bank BPD Bali sebagai <i>good corporate citizen</i> peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara berkesinambungan.
Accountability	Bank management's compliance with laws, regulations and sound management principles.	- The management of Bank BPD Bali always refers to the regulations set by the Indonesian government and the regulatory authorities, which are followed up by the creation of new regulations or the updating of existing regulations on a regular basis in order to be able to respond to the dynamics that occur in the industry. - The Bank's management is followed up with a self-assessment of governance management, which is conducted twice a year, in addition to assessing the Bank's health using an approach set by the regulator. - As a good corporate citizen, Bank BPD Bali is concerned about the environment and carries out its social responsibility on an ongoing basis.
Independensi	Pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.	- Pengelolaan Bank BPD Bali dilakukan dengan menghindari potensi benturan kepentingan dan bebas dari pengaruh pihak manapun sebagaimana diatur dalam pedoman GCG dan kode etik. - Persyaratan independensi dan mendahulukan kepentingan Bank dibandingkan kepentingan pribadi bagi organ utama dan organ pendukung Bank ditetapkan dalam ketetapan internal. - Bank mengambil keputusan secara objektif dan bebas dari segala tekanan pihak manapun.
Independence	Management of the Bank in a professional manner without any influence or pressure from any party.	- The management of Bank BPD Bali is subject to the avoidance of potential conflicts of interest and is free from the influence of any party in accordance with the GCG guidelines and code of ethics. - The requirements of independence and priority of the bank's interests over personal interests for the bank's main organs and support organs are stipulated in the internal regulations. - The Bank makes its decisions in an objective manner and is free from any pressure from any party.
Kewajaran	Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.	- Bank BPD Bali peduli terhadap kepentingan seluruh <i>stakeholders</i> berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (<i>equal treatment</i>). - Bank juga memberikan kesempatan kepada seluruh <i>stakeholders</i> untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank Bali serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.
Fairness	Fairness and equity with respect to stakeholder rights under agreements and laws.	- Bank BPD Bali considers the interests of all stakeholders on the basis of the principles of equity and fairness. - The Bank also provides opportunities for all stakeholders to provide input and opinions for Bank Bali's interests and access to information according to the principle of openness.

Disamping kelima prinsip GCG tersebut, sejalan dengan Prinsip Governansi Korporat Indonesia, Bank BPD Bali juga menerapkan empat pilar governansi korporat sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI). Keempat pilar yang dimaksud terdiri dari perilaku beretika, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dimana pilar transparansi dan akuntabilitas telah dijelaskan pada kelima prinsip GCG di atas. Pilar perilaku beretika diterapkan dengan pendekatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta berinteraksi dengan stakeholders dan/atau konsumen yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan masyarakat.

Bank telah mengadopsi perilaku beretika tersebut sebagaimana yang dituangkan dalam Keputusan Direksi No. 0235/KEP/DIR/KPN/2023 tentang Kode Etik Bank BPD Bali. Kode etik Bank BPD Bali merupakan pedoman etika yang menjadi prinsip kepatutan dan kepatutan dan dasar yang memandu hubungan di antara Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan dengan *stakeholders* dan/atau konsumen dalam bertindak dan berperilaku secara profesional dan berintegritas untuk mewujudkan Visi dan Misi Bank BPD Bali sesuai dengan Budaya Kerja.

Terakhir, pilar keberlanjutan berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan. Pilar ini diantaranya diwujudkan melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Direksi No. 0812/KEP/DIR/UMS/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Buku pedoman Perusahaan *Corporate Social Responsibility* dan Keputusan Direksi No. 0229/KEP/DIR/UMS/2018 tanggal 23 Mei 2018 tentang Standar Operasional Prosedur *Corporate Social Responsibility*.

Selanjutnya, Bank BPD Bali juga telah menetapkan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang disusun setiap tahun sebagai bentuk kepatuhan Bank terhadap POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik. Pelaporan pelaksanaan TJSL sebagai bagian dari aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dapat dilihat di Laporan Keberlanjutan yang disajikan terpisah dari Laporan Tahunan ini.

In addition to the five GCG Principles, Bank BPD Bali, in line with the Indonesian Corporate Governance Principles, also implements four pillars of corporate governance as stipulated in the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI). These four pillars are: Ethical Conduct, Transparency, Accountability and Sustainability. The pillars of Transparency and Accountability are explained in the five GCG principles above. The pillars of ethical conduct are applied through an approach to the performance of duties and responsibilities and to interactions with stakeholders and/or consumers in the context of consumer and community protection.

The Bank has adopted this ethical conduct in accordance with the Board Resolution No. 0235/KEP/DIR/KPN/2023 on the Code of Ethics of Bank BPD Bali. The Code of Ethics of Bank BPD Bali is an ethical guideline that serves as a principle of correctness and propriety and a basis that guides the relationship between the Board of Directors, Directors, staff with stakeholders and/or consumers in acting and behaving professionally and with integrity to realize the vision and mission of Bank BPD Bali in accordance with the Work Culture.

Finally, the Sustainability Pillar is related to the implementation of responsibility towards society and the environment to contribute to sustainable development by working with all relevant stakeholders to improve their lives in a way that aligns with business interests and the sustainable development agenda. This pillar is realized through the implementation of social and environmental responsibility as stipulated in the Board of Directors' Decree No. 0812/KEP/DIR/UMS/2016 dated December 23, 2016 on Corporate Social Responsibility Guidelines and Board of Directors' Decree No. 0229/KEP/DIR/UMS/2018 dated May 23, 2018 on Standard Operating Procedures for Corporate Social Responsibility.

In addition, Bank BPD Bali has also established a Sustainable Finance Action Plan prepared annually as the Bank's form of compliance with POJK No. 51/POJK.03/2017 concerning the implementation of sustainable finance for financial service institutions, issuers and public companies. Please refer to the Sustainability Report, which is presented separately from this Annual Report, for reporting on the implementation of TJSL as part of the environmental, social, and governance aspects.

Implementasi GCG Bank Tahun Buku 2024

Implementation of GCG Bank for FY 2024

Bank BPD Bali telah menjalankan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan Tata Kelola Yang Baik berdasarkan prinsip-prinsip GCG dan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia di atas yang dapat diringkas sebagai berikut:

Bank BPD Bali has conducted various activities related to good governance implementation based on GCG principles and above General Guidelines for Indonesian Corporate Governance, which can be summarized as follows:

- Struktur tata kelola Bank BPD Bali yang terdiri dari Organ Utama dan Organ Pendukung yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank BPD Bali telah melakukan penyelarasan susunan organisasi beserta uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing Satuan Kerja dan Unit Kerja sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Direksi No. 0438/KEP/DIR/RENSTRA/2024 tanggal 15 Agustus 2024. Hal ini dilakukan dalam rangka merespon perkembangan kompleksitas usaha, persaingan dalam industri perbankan, persaingan dalam industri perbankan dan percepatan digitalisasi bisnis dan pertumbuhan bisnis Bank.
 - Penerbitan *soft structure* GCG berupa Buku Pedoman Perusahaan (BPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) baru serta melakukan pembaruan atas BPP dan SOP selama tahun 2024 dalam rangka memperkuat penerapan GCG dan merespon dinamika yang terjadi di industri perbankan dengan mengacu pada ketentuan *regulator*. Terdapat BPP baru dan BPP perubahan serta SOP baru dan SOP perubahan yang mencapai 75 (tujuh puluh lima) 62 (enam puluh dua) ketentuan yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi Bank BPD Bali.
 - Beberapa contoh BPP baru yang terkait langsung dengan *soft structure* GCG Bank BPD Bali antara lain adalah BPP Penerapan Tata Kelola, BPP Sekretaris Perusahaan, BPP Perlindungan Konsumen, dan BPP Susunan Organisasi dan Uraian Tugas. Selain itu beberapa SOP baru yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direksi adalah SOP Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal (PPSPM), SOP Strategi *Anti Fraud*, SOP Penilaian Kinerja Satuan Kerja dan Unit Kerja, serta SOP Penilaian Tingkat Kesehatan Bank. BPP baru dan SOP baru tersebut ditetapkan melalui Keputusan Direksi selama tahun 2024.
 - Secara kumulatif, Bank BPD Bali telah memiliki 175 ketentuan internal yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) Buku Pedoman Perusahaan (BPP) dan 148 Standar Operasional Prosedur (SOP) per 31 Desember 2024.
 - Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang terdiri dari RUPS Tahunan sebanyak 1 (satu) kali dan RUPS Luar Biasa secara sirkuler sebanyak 4 (empat) kali yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
 - Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali selama tahun 2024, lebih banyak dibanding ketentuan POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum yakni paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- *The management structure of Bank BPD Bali consists of the main organs and supporting organs in accordance with the applicable regulations. Bank BPD Bali has aligned the organizational structure with the description of the duties and responsibilities of each work unit and work unit as stipulated in the Board of Directors' Resolution No. 0438/KEP/DIR/RENSTRA/2024 dated August 15, 2024. This was done to respond to the development of business complexity, competition in the banking industry, competition in the banking industry, and accelerating the digitization of business and growing the Bank's business.*
 - *Issuance of the soft structure of the GCG in the form of a new business policy (BPP) and standard operating procedures (SOP), and the updating of the BPP and SOP during 2024, in order to strengthen the implementation of the GCG and respond to the dynamics that occur in the banking industry with reference to regulatory provisions. There are new BPPs and amended BPPs, and new SOP and amended SOP, reaching 75 (seventy-five) provisions set by the resolution of the Board of Directors of Bank BPD Bali.*
 - *Some examples of new BPPs are BPP on Governance Implementation, BPP on Corporate Secretary, BPP on Consumer Protection and BPP on Organizational Structure and Job Description which are directly related to the soft structure of GCG Bank BPD Bali. Furthermore, several new SOPs were issued by the Board of Directors, namely SOP on Implementation of Anti-Money Laundering Program (APU) and Prevention of Financing of Terrorism (PPT) and Proliferation of Weapons of Mass Destruction (PPSPM), SOP on Fraud Policy, SOP on Assessment of Work Units and Work Unit Effectiveness, and SOP on Assessment of Bank Health. The new BPP and the new SOPs will be established by Board of Directors' resolution during 2024.*
 - *Cumulatively, as of December 31, 2024, Bank BPD Bali has 175 internal regulations consisting of 27 (twenty-seven) Business Procedures (BPP) and 148 Standard Operating Procedures (SOP).*
 - *The holding of the General Meeting of Shareholders (GMS) consisting of 1 (one) Annual GMS and 4 (four) Extraordinary GMS in circular form has been in compliance with the applicable regulations.*
 - *The holding of the meeting of the Board of Commissioners 28 (twenty-eight) times during the year 2024, more than the provisions of the POJK No. 17 of 2023 concerning the implementation of the General Governance of the Bank, which is at least 1 (one) time in 2 (two) months.*

- Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali selama tahun 2024, di atas ketentuan POJK Penerapan Tata Kelola Bank Umum yakni paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
 - Pelaksanaan Rapat Direksi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali selama tahun 2024 lebih banyak dibanding ketentuan POJK Penerapan Tata Kelola Bank Umum yakni paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
 - Direksi Bank BPD Bali juga menyelenggarakan sejumlah rapat lainnya yakni Rapat Direksi dengan Satuan dan/atau Unit Kerja sebanyak 59 (lima puluh sembilan) kali, Rapat Direksi dengan Komite sebanyak 45 (empat puluh lima) kali, Rapat Direksi dengan Eksternal 46 (empat puluh enam) kali, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebanyak 5 (lima) kali.
 - Aktivitas Komite Dewan Komisaris, yakni:
 - a. Pelaksanaan Rapat Komite Audit sebanyak 17 (tujuh belas) kali, lebih banyak dibandingkan ketentuan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sebagaimana yang diatur dalam POJK Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum disertai pemenuhan tugas & tanggung jawab serta membina hubungan dan berkoodinasi dengan Direksi melalui SKAI & Anti Fraud, auditor eksternal dan antar komite serta unit kerja terkait lainnya sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Dewan Komisaris.
 - b. Penyelenggaraan Rapat Komite Pemantau Risiko sebanyak 16 (enam belas) kali, lebih banyak dibandingkan ketentuan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sebagaimana yang diatur dalam POJK Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum disertai pemenuhan tugas & tanggung jawab serta membina hubungan dan berkoodinasi dengan Direksi melalui komite manajemen risiko, satuan kerja manajemen risiko dan kepatuhan dan/atau Divisi Manajemen Risiko (MRO) dan Divisi Kepatuhan Bank BPD Bali, antar komite serta unit kerja terkait lainnya berpedoman pada Piagam Komite Dewan Komisaris.
 - c. Penyelenggaraan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 7 (tujuh) kali, lebih banyak dibandingkan ketentuan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sebagaimana yang diatur dalam POJK Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum disertai pemenuhan tugas & tanggung jawab serta membina hubungan dan berkoodinasi dengan Direksi melalui Divisi SDM, antar komite, dan unit kerja lainnya mengacu kepada Piagam Komite Dewan Komisaris.
 - d. Pemenuhan tugas Komite Direksi dengan menjalankan tugas dan kewajibannya beserta penyelenggaraan Rapat Komite Direksi yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank BPD Bali berpedoman pada POJK Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- *The meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors were held 12 (twelve) times in the year 2024, in accordance with the provisions of the POJK on the Implementation of General Bank Governance, namely at least 1 (one) time in 4 (four) months.*
 - *The Board of Directors Meeting was held 27 (twenty-seven) times in the year 2024, more than the POJK regulations on the implementation of the General Governance of the Bank, which is at least 1 (one) time in 1 (one) month.*
 - *The Board of Directors of Bank BPD Bali also held a number of other meetings, namely 59 (fifty-nine) Board of Directors Meetings with Units and/or Work Units, 45 (forty-five) Board of Directors Meetings with Committees, 46 (forty-six) Board of Directors Meetings with Outsiders, and 5 (five) General Meetings of Stockholders (GMS).*
 - *Activities of the Committee of the Board of Commissioners, namely*
 - a. *Conducting the Audit Committee meeting as many as 17 (seventeen) times, more than the provision of 1 (one) time in 1 (one) month as stipulated in the POJK on the Implementation of Governance for Commercial Banks accompanied by the fulfillment of duties and responsibilities and the maintenance of relations and coordination with the Board of Directors through SKAI & Anti Fraud, external auditors and between committees and other related work units as stipulated in the Board of Commissioners Committee Charter.*
 - b. *Conducting the Risk Monitoring Board Meeting as many as 16 (sixteen) times, more than the provision of 1 (one) time in 1 (one) month as stipulated in the POJK on the Implementation of Governance for Commercial Banks accompanied by the performance of duties & responsibilities and foster relationships and coordination with the Board of Directors through Risk Management Board, Risk Management and Compliance Work Unit and/or Risk Management Department (MRO) and Compliance Department of Bank BPD Bali, between Board Committees and other related work units as stipulated in the Board of Directors' Rules of Procedure.*
 - c. *Holding 7 (seven) meetings of the Remuneration and Nomination Committee, more than the provision of 1 (one) time in 3 (three) month as stipulated in the POJK on the Implementation of Governance for Commercial Banks, accompanied by the fulfillment of duties and responsibilities and the maintenance of relations and coordination with the Board of Directors through the HR Division, between committees and other related work units guided by the Board of Commissioners Committee Charter.*
 - d. *Fulfillment of the duties of the Board of Directors Committee by the fulfillment of its duties and responsibilities along with the holding of Board of Directors Committee meetings in accordance with the needs of Bank BPD Bali guided by the POJK on the implementation of governance for commercial banks.*

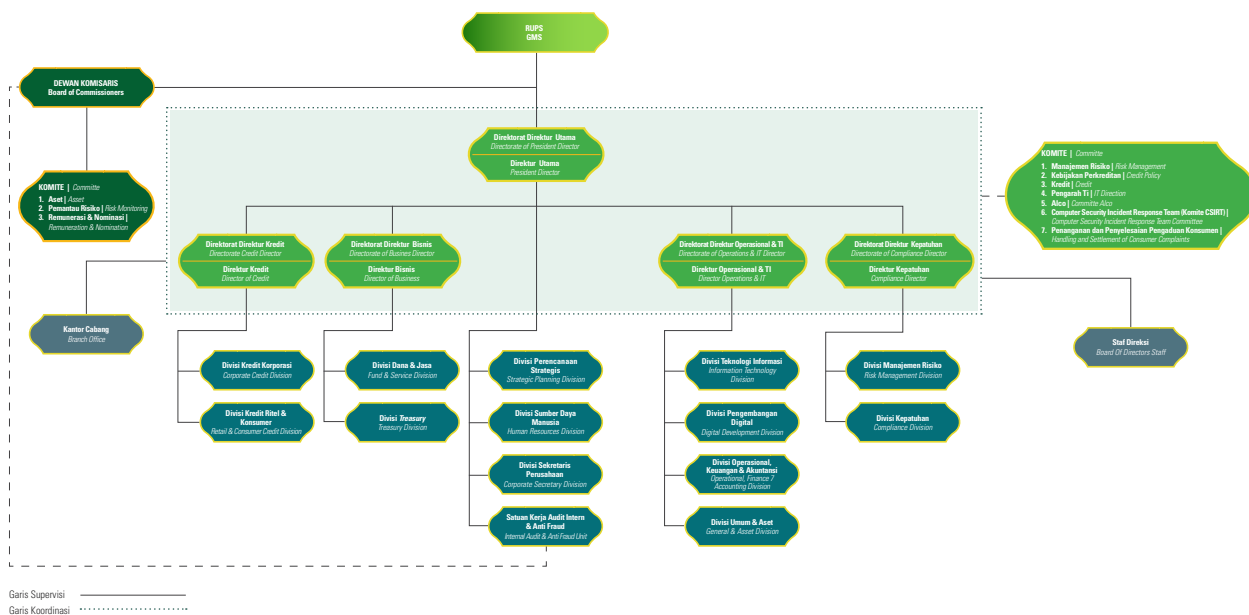
- Pemenuhan tugas dan tanggung jawab satuan kerja-satuan kerja di bawah Direksi dan Sekretaris Perusahaan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam pengelolaan Bank selama tahun 2024 sehingga turut berkontribusi positif terhadap capaian kinerja Bank BPD Bali yang lebih tinggi dibandingkan target dan diikuti dengan Penilaian atas Penerapan Tata Kelola Bank BPD Bali yang terjaga dengan baik dan Tingkat Kesehatan Bank.
 - Hasil *self-assessment* Tata Kelola Bank BPD Bali Semester I Tahun 2024 dan Semester II Tahun 2024 menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip pelaksanaan tata kelola Bank memperoleh nilai peringkat 2 (Baik). Artinya manajemen Bank BPD Bali telah melakukan penerapan GCG yang secara umum baik. Capaian ini antara lain didukung oleh aspek pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang berperingkat 1 (sangat baik), aspek pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dengan peringkat 2 (baik) serta kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite yang berperingkat 1 (sangat baik).
 - Hasil *self-assessment* dan penilaian OJK Tingkat Kesehatan Bank BPD Bali Semester I Tahun 2024 dan Semester II Tahun 2024 menunjukkan penilaian Tingkat Kesehatan Bank berada pada peringkat PK-2, dimana didalamnya terdapat penilaian Profil Risiko yaitu pada peringkat "LowMod" dengan Risiko *Inherent* pada peringkat "LowMod" dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) pada peringkat "Satisfactory".
 - Peringkat Tingkat Kesehatan Bank BPD Bali ini berarti bahwa dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank baik, sehingga kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko *Inherent* komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang; dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.
- *Fulfilling the duties and responsibilities of the working units under the Board of Directors and the Corporate Secretary in supporting the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors in managing the Bank during 2024 so that it contributes positively to achieving Bank BPD Bali's performance which is higher than the target and followed by an assessment of the implementation of Bank BPD Bali's Governance which is well maintained and the Bank's Health Level.*
 - *The results of Bank BPD Bali's Governance Self-Assessment for Semester I of 2024 and Semester II of 2024 show that the implementation of the Bank's Governance Implementation Principles received a rating of 2 (Good). This means that the management of Bank BPD Bali has achieved a generally good implementation of the GCG. This result is supported by aspects of the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, which received a rating of 1 (Very Good), aspects of the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors, which received a rating of 2 (Good), and the completeness and implementation of the duties of the Committees, which received a rating of 1 (Very Good).*
 - *The results of Bank BPD Bali's Health Level Self-Assessment and OJK assessment for Semester I 2024 and Semester II 2024 show that the Bank's Health Level assessment is at PK-2 level, which includes a risk profile assessment, namely at "LowMod" level with Inherent Risk at "LowMod" level and Quality of Risk Management Implementation (KPMR) at "Satisfactory" level.*
 - *This Health Level rating of Bank BPD Bali means that considering the business activity of the bank, the potential losses of the bank from the composite inherent risk are relatively low for a certain period of time in the future; and the quality of the implementation of the composite risk management is sufficient. Although there are minor weaknesses, these weaknesses require management attention.*

STRUKTUR TATA KELOLA

Governance Structure

Bank BPD Bali telah menetapkan struktur tata kelola sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 401/KEP/DIR/KPN/2024 tanggal 5 Agustus 2024 tentang Buku Pedoman Perusahaan Penerapan Tata Kelola. Susunan organisasi penerapan tata kelola Bank dijelaskan pada bagian berikut ini:

Bank BPD Bali has established a governance structure in accordance with the Resolution of the Board of Directors No. 401/KEP/DIR/KPN/2024 dated August 5, 2024 on the Corporate Governance Implementation Guidelines. The following chart explains the organizational structure of the Bank's governance implementation:



Secara kumulatif, berdasarkan Buku Pedoman Perusahaan Penerapan Tata Kelola tersebut, terdapat 18 komponen susunan organisasi penerapan tata kelola Bank BPD Bali. Selain tiga organ utama GCG yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi masih terdapat 15 komponen lain yang menjadi bagian dari susunan organisasi tersebut.

Cumulatively, based on the Company Guidelines for Implementing Governance, there are 18 components of the organizational structure for implementing the Governance of Bank BPD Bali. Apart from the three main organs of the GCG, namely the General Meeting of Stockholders, the Committee and the Board, there are 15 other components that are part of the organizational structure.

Selain Direktur Kepatuhan yang salah satu tugas dan tanggung jawabnya adalah menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank, ke-14 komponen lainnya merupakan organ pendukung GCG. Ke-14 komponen susunan organisasi penerapan tata kelola Bank BPD Bali terdiri dari Divisi Kepatuhan; Satuan Kerja Audit Intern & Anti-Fraud; Divisi Sumber Daya Manusia; Divisi Teknologi Informasi; Divisi Treasury; Divisi Perencanaan Strategis; Divisi Dana dan Jasa; Divisi Kredit Ritel dan Konsumen; Divisi Kredit Korporasi; Divisi Manajemen Risiko; Divisi Umum dan Aset; Divisi Operasional, Keuangan, dan Akuntansi; Divisi Pengembangan Digital; dan Divisi Sekretaris Perusahaan.

Apart from the Compliance Director, who is responsible, among other things, for establishing the compliance system and procedures for the preparation of the internal rules and regulations of the Bank, the other 14 components constitute the support organs of the Bank. The 14 components of the organizational structure for implementing the Corporate Governance of Bank BPD Bali consist of the Compliance Division; Internal Audit & Anti-Fraud Work Unit; Human Resources Division; Information Technology Division; Treasury Division; Strategic Planning Division; Funds and Services Division; Retail and Consumer Loan Division; Corporate Lending Division; Risk Management Division; General and Asset Division; Operations, Finance and Accounting Division; Digital Development Division; and Corporate Secretary Division.



Sebagai catatan, Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas pengelolaan Bank dan pemberian nasihat kepada Direksi dibantu oleh 3 (tiga) komite di bawah Dewan Komisaris. Ketiga komite yang dimaksud adalah Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi & Nominasi.

Sementara itu, Direksi selaku pengelola Bank dibantu oleh 7 (tujuh) komite di bawah Direksi yaitu Komite Manajemen Risiko, Komite Kebijakan Perkreditan, Komite Kredit, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite *Asset & Liability Committee* (ALCO), Komite CSIRT, serta Komite Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen.

Penjelasan lebih lengkap terkait organ utama GCG Bank dan organ pendukung GCG akan disajikan berikut ini.

It should be noted that the Board of Commissioners is assisted by 3 (three) committees reporting to the Board of Commissioners in performing its function of supervising the management of the Bank and advising the Board of Directors. These three committees are the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee and the Remuneration and Nomination Committee.

The Board of Directors, as the management of the Bank, is assisted by seven (7) committees under the Board of Directors, namely the Risk Management Committee, the Credit Policy Committee, the Credit Committee, the Information Technology Steering Committee, the Asset & Liability Committee (ALCO), the CSIRT Committee and the Consumer Grievance Handling and Resolution Committee.

A more detailed explanation of the Bank's main and supporting GCG organs is provided below.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

General Meeting of Shareholders (GMS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), berdasarkan Pedoman GCG Bank BPD Bali, merupakan organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau Anggaran Dasar Bank. Dalam pembahasan RUPS, Pemegang Saham melakukan pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan pengelolaan Bank BPD Bali, baik untuk kepentingan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka menengah.

The General Meeting of Shareholders (GMS), based on the GCG Guidelines of Bank BPD Bali, is an organ of the company that has powers that are not granted to the Board of Commissioners or the Board of Directors within the limits specified by the laws and/or the Bank's Articles of Association. In GMS, shareholders make important decisions regarding Bank BPD Bali's management, both for short, medium and long term interests.

Jenis RUPS

Types of GMS

Anggaran Dasar Bank BPD Bali membagi RUPS menjadi RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya atau RUPS Luar Biasa. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris menyampaikan laporan Pengawasan yang telah dilakukan, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Bank berakhir. Sementara itu, RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank.

The GMS is divided into Annual GMS and Other GMS or Extraordinary GMS according to the Articles of Association of Bank BPD Bali. In the Annual GMS, the Board of Directors submits the Annual Report that has been reviewed by the Board of Commissioners and the Board of Commissioners submits the Supervision Report that has been conducted, not later than 6 (six) months after the end of the Bank's financial year. Meanwhile, the Extraordinary General Meeting may be held at any time on the basis of the need for discussion and decision on the agenda of the meeting, taking into account the applicable laws and regulations and the Bank's Articles of Association.

Ketentuan Penyelenggaraan RUPS

GMS Holding Provisions

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Bank, RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan surat kabar. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan. Selanjutnya, RUPS diadakan di tempat kedudukan Bank atau di tempat kegiatan usaha Bank BPD Bali.

In accordance with the provisions of the Bank's Articles of Association, a General Meeting of Shareholders shall be held by first convening the shareholders by registered letter and/or by newspaper notice. The invitation to a GMS is issued not later than 14 (fourteen) days prior to the date of the GMS, excluding the day of convening the GMS and the day of holding the GMS. In addition, the GMS is held at the Bank's domicile or at the place of business of Bank BPD Bali.

Penyelenggaraan RUPST Tahun 2024 untuk Tahun Buku 2023

Implementation of AGMS in 2024 for Fiscal Year 2023

Bank BPD Bali menyelenggarakan RUPS Tahunan (RUPST) pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, pada pukul 09.00-12.00 WITA yang berlokasi di Ruang Wijaya Kusuma Lantai 3, Gedung Bank BPD Bali, Jl. Raya Puputan, Niti-Mandala Denpasar.

Bank BPD Bali held an Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on Friday, February 23, 2024, at 9:00 - 12:00 WITA at the Wijaya Kusuma Room, 3rd Floor, Bank BPD Bali Building, Jl. Raya Puputan, Niti-Mandala Denpasar.



Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang Hadir dalam Rapat

Daftar anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank BPD Bali yang menghadiri RUPST disajikan terpisah pada pembahasan Dewan Komisaris dan Direksi dari Bab GCG ini.

Kehadiran Pemegang Saham

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 2.050.257 saham atau 100,00% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Bank.

Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Mekanisme pengambilan Keputusan dalam Rapat adalah diadakan pembahasan-pembahasan seperlunya. Keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Pihak Independen Penghitung Suara

Penghitungan suara untuk dasar pengambilan keputusan Rapat dan validasinya dilakukan oleh I Made Widiada, S.H., Notaris di Denpasar, Bali.

Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat, serta Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat

Sesuai dengan acara Rapat, terdapat pengarahannya Pejabat Gubernur Bali dan tanya jawab dan arahan dari Pemegang Saham. Rapat dengan suara bulat menerima serta menyetujui agenda rapat dan untuk selanjutnya memutuskan keputusan Rapat.

Keputusan RUPST AGMS Decisions

Seluruh keputusan RUPST telah dimuat dalam Akta No. 41 tanggal 23 Februari 2024 yang dibuat oleh dan di hadapan I Made Widiada, S.H., Notaris di Denpasar, Bali.

Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company present at the Meeting

The list of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of Bank BPD Bali who attended the AGMS is presented separately in the discussion of the Board of Commissioners and the Board of Directors of this GCG Chapter.

Attendance of Shareholders

The shares present and/or represented at the Meeting amounted to 2,050,257, representing 100.00% of the total number of shares issued by the Bank and entitled to vote.

Meeting's Decision-Making Mechanism

The decision-making mechanism of the Meeting is to hold discussions as necessary. Decisions at the Meeting are made on the basis of deliberation for consensus.

Independent Party Vote Counting

The counting of votes for the basis of decision making at the Meeting and its validation shall be conducted by I Made Widiada, S.H., Notary Public in Denpasar, Bali.

Opportunity for Questions and/or Comments and Voting Results at the Meeting

In accordance with the agenda of the meeting, there was a briefing from the Acting Governor of Bali and questions and answers and instructions from the shareholders. The meeting unanimously accepted and approved the agenda of the meeting and then took the decisions of the meeting.

All decisions of the AGMS were stated in Deed No. 41 dated February 23, 2024, executed by and before I Made Widiada, S.H., Notary in Denpasar, Bali.

Adapun informasi lengkap terkait agenda dan keputusan RUPST tersebut adalah sebagai berikut:

The complete information regarding the agenda and resolutions of the AGMS is as follows:

Mata Acara Rapat Pertama	Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 dan Informasi Rencana Bisnis Bank Tahun 2024 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023.
<i>First Meeting Agenda</i>	<i>The Annual Report of the Company for the financial year 2023 and the information on the Business Plan of the Bank for the year 2024 and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year 2023.</i>
Keputusan Rapat	Menerima dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Bank dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Bank Tahun Buku 2023, serta selanjutnya (<i>Acquit Et Decharge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk Laporan Pertanggung Jawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Laporan Tahun Buku 2023.
<i>Meeting Decision</i>	<i>Received and ratified the Annual Report, the Financial Report of the Bank and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year 2023, and subsequently (Acquit Et Decharge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the Accountability Report of the Board of Directors and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year 2023.</i>
Status Pelaksanaan	Telah direalisasikan pada tahun 2024.
<i>Implementation Status</i>	<i>Implemented in 2024.</i>
Mata Acara Rapat Kedua	Penggunaan Laba Tahun Buku 2023: • Pembagian Dividen • Pemberian Bonus kepada Karyawan, Tantiem kepada Pengurus Bank.
<i>Second Meeting Agenda</i>	<i>Appropriation of earnings for fiscal year 2023:</i> • <i>Distribution of dividends</i> • <i>Provision of bonuses to employees, tantiem to bank management.</i>
Keputusan Rapat	Memberikan persetujuan: a. Pembagian laba tahun buku 2023 sebagai berikut: Pembagian laba bersih untuk tahun buku 2023 sebesar Rp738.228.309.317,- dengan perincian sebagai berikut: 1. Dividen sebesar 75% atau sebesar Rp553.671.231.987,75 2. Cadangan umum sebesar 25% atau sebesar Rp184.557.077.329,25 b. Pemberian bonus kepada karyawan dan tantiem kepada pengurus Bank mengacu kepada pembagian bonus dan tantiem tahun buku 2023, dengan komposisi masing-masing sebesar 17,30% untuk karyawan dan sebesar 4,05% untuk Pengurus Bank yang terdiri dari sebesar 2,70% untuk Direksi dan sebesar 1,35% untuk Dewan Komisaris. Pemberian bonus dan tantiem diatur dalam peraturan Bank.
<i>Meeting Decision</i>	<i>Granting Approval:</i> a. <i>Distribution of profit for the fiscal year 2023 as follows:</i> <i>To distribute the net profit for fiscal year 2023 amounting to Rp738,228,309,317, as follows:</i> 1. <i>Dividend of 75% or Rp553,671,231,987.75</i> 2. <i>General reserve of 25% or Rp184,557,077,329.25</i> b. <i>The provision for bonuses for employees and bonuses for Bank management refers to the distribution of bonuses for the financial year 2023, with a composition of 17.30% for employees and 4.05% for Bank management, consisting of 2.70% for the Board of Directors and 1.35% for the Board of Commissioners. The payment of bonuses is governed by the Bank's regulations.</i>
Status Pelaksanaan	Telah direalisasikan pada tahun 2024.
<i>Implementation Status</i>	<i>Implemented in 2024.</i>



Mata Acara Rapat Ketiga <i>Third Meeting Agenda</i>	Penetapan remunerasi Pengurus Bank Tahun 2024 <i>Determination of Bank Management Remuneration in 2024</i>
Keputusan Rapat	Menyetujui dan mengesahkan perubahan remunerasi kepada pengurus Bank BPD Bali
	Untuk Direksi - Gaji Direktur Utama sebesar Rp100.000.000,- per bulan dan gaji Direktur sebesar 90% dari gaji Direktur Utama atau sebesar Rp90.000.000,- per bulan. - Diberikan fasilitas dan bantuan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 93 tertanggal 27 Maret 2019, Akta No. 54 tertanggal 18 Februari 2022 dan Akta No. 27 tertanggal 13 Juli 2023. Untuk Dewan Komisaris - Honorarium Komisaris Utama sebesar 60% dari gaji Direktur Utama atau sebesar Rp60.000.000,- per bulan dan honorarium Komisaris sebesar 90% dari gaji Direktur Utama atau sebesar Rp54.000.000,- per bulan. - Diberikan fasilitas dan bantuan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 93 tertanggal 27 Maret 2019, Akta No. 54 tertanggal 18 Februari 2022 dan Akta No. 27 tertanggal 13 Juli 2023. Dengan adanya perubahan remunerasi bagi pengurus Bank BPD Bali sebagaimana dimaksud di atas, maka terhadap remunerasi bagi karyawan/karyawati Bank BPD Bali agar dilakukan penyesuaian mengacu pada kebijakan internal yang berlaku di Bank.
Meeting Decision	<i>Approved and ratified changes in the remuneration of the management of Bank BPD Bali</i> <i>For the Board of Directors</i> <i>President Director's salary of Rp100,000,000 per month and Director's salary of 90% of the President Director's salary or Rp90,000,000 per month.</i> <i>To be provided with facilities and support as stated in Deed No. 93 dated March 27, 2019, Deed No. 54 dated February 18, 2022 and Deed No. 27 dated July 13, 2023.</i> <i>For the Board of Commissioners</i> <i>Honorarium for the President Commissioner at 60% of the President Director's salary or Rp60,000,000 per month and honorarium for the Commissioners at 90% of the President Director's salary or Rp54,000,000 per month.</i> <i>Facilities and support are provided as stated in Deed No. 93 dated March 27, 2019, Deed No. 54 dated February 18, 2022 and Deed No. 27 dated July 13, 2023.</i> <i>With the aforementioned changes in the remuneration of the management of Bank BPD Bali, the remuneration of the employees of Bank BPD Bali shall be adjusted in accordance with the Bank's internal policies.</i>
Status Pelaksanaan <i>Implementation Status</i>	Telah direalisasikan pada tahun 2024. <i>Implemented in 2024.</i>

Penyelenggaraan RUPSLB Tahun Buku 2024

Implementation of EGMS for Fiscal Year 2024

Berbeda dengan penyelenggaraan RUPST, penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank BPD Bali sebanyak 4 (empat) kali selama tahun 2024 dilakukan secara sirkuler dan masing-masing dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham. Ketiga RUPSLB sirkuler yang dimaksud adalah sebagai berikut:

RUPSLB Tanggal 13 Mei 2024

Pada tanggal 13 Mei 2024, Bank BPD Bali mengadakan RUPSLB secara sirkuler dengan agenda penambahan setoran awal Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar. Hasil RUPSLB secara sirkuler tersebut selanjutnya dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Bank BPD Bali No. 15 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat di hadapan I Made Widiada, S.H., Notaris di Denpasar, Bali.

Contrary to the holding of the AGMS, the holding of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of Bank BPD Bali as many as 3 (three) times in the year 2024 was conducted in a circular manner and each of them was specified in the Deed of Statement of Shareholders' Resolutions. The three circular EGMS referred to are as follows:

EGMS dated May 13, 2024

On May 13, 2024, Bank BPD Bali held an EGMS with the agenda of increasing the initial deposit of Gianyar Regional Govt. The results of the EGMS were then recorded in the Certificate of Resolutions of the Shareholders of Bank BPD Bali No. 15 dated May 13, 2024, executed before I Widiada, S.H., Notary Public in Denpasar, Bali.

Keputusan RUPSLB Sirkuler telah ditandatangani oleh 2.050.257 lembar saham yang telah dikeluarkan sampai penyelenggaraan Rapat. Keputusan RUPSLB Sirkuler juga telah diambil sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank dan mempeunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil para pemegang saham dalam suatu RUPS Bank, dan bersifat sah dan mengikat.

Kuputusan yang diambil adalah sebagai berikut:

- Menyetujui penambahan setoran modal ke dalam Bank oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar sebanyak 70.396 lembar saham atau bernilai nominal seluruhnya Rp70.396.000.000,-, sehingga untuk selanjutnya jumlah keseluruhan modal yang telah disetor oleh para pemegang saham ke dalam Bank adalah sebanyak 2.120.653 lembar saham atau bernilai seluruhnya Rp2.120.653.000.000,- dengan susunan pemegang saham disajikan dalam tabel berikut ini:

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (sheets)	Nilai Nominal Saham (Rp) Nominal Value of Shares (Rp)
Pemerintah Provinsi Bali Bali Provincial Government	719.912	719.912.000.000
Pemerintah Kabupaten Badung Badung Regency Government	850.617	850.617.000.000
Pemerintah Kota Denpasar Denpasar City Government	214.476	214.476.000.000
Pemerintah Kabupaten Gianyar Gianyar Regency Government	100.000	100.000.000.000
Pemerintah Kabupaten Buleleng Buleleng Regency Government	80.000	80.000.000.000
Pemerintah Kabupaten Karangasem Karangasem Regency Government	42.550	42.550.000.000
Pemerintah Kabupaten Jembrana Jembrana Regency Government	37.092	37.092.000.000
Pemerintah Kabupaten Klungkung Klungkung Regency Government	31.423	31.423.000.000
Pemerintah Kabupaten Tabanan Tabanan Regency Government	31.006	31.006.000.000
Pemerintah Kabupaten Bangli Bangli Regency Government	13.577	13.577.000.000

Keputusan RUPSLB Sirkuler yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 15 tanggal 13 Mei 2024 tersebut telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-0091742.Ah.01.11. Tahun 2024 tanggal 14 Mei 2024.

Akta Risalah RUPSLB Sirkuler tersebut selanjutnya disampaikan 1 (satu) hari kerja ke OJK setelah penyelenggaraannya.

The Circular EGMS Decision has been signed by 2,050,257 shares issued until the meeting was held. The Circular EGMS Resolution was also adopted in accordance with the provisions of the Bank's Articles of Association and has the same legal force and effect as the resolutions adopted by the shareholders of a Bank GMS and is valid and binding.

The decisions made are as follows

- To approve the addition of capital contributions to the Bank by Gianyar Regional Government of 70,396 shares or a total nominal value of Rp70,396,000,000,- so that the total amount of capital contributed to the Bank by shareholders is 2,120,653 shares or a total value of Rp2,120,653,000,000,- with the composition of shareholders as shown in the following table:*

The Circular EGMS Resolutions set forth in Notarial Deed No. 15 dated May 13, 2024 have been notified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Letter No. AHU-0091742.Ah.01.11. Year 2024 dated May 14, 2024.

The Minutes of Circular EGMS was submitted to OJK on 1 (one) working day after its implementation.

**RUPSLB Tanggal 23 Juli 2024**

Bank BPD Bali menyelenggarakan RUPSLB secara sirkuler pada tanggal 23 Juli 2024 dengan agenda penambahan setoran modal Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem. Hasil RUPSLB secara sirkuler tersebut selanjutnya dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Bank BPD Bali No. 36 tanggal 23 Juli 2024 yang dibuat di hadapan I Made Widiada, S.H., Notaris di Denpasar, Bali.

Keputusan RUPSLB Sirkuler telah ditandatangani oleh 2.120.653 lembar saham yang telah dikeluarkan sampai penyelenggaraan Rapat. Keputusan RUPSLB Sirkuler juga telah diambil sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank dan mempeunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil para pemegang saham dalam suatu RUPS Bank, dan bersifat sah dan mengikat.

Kuputusan yang diambil adalah sebagai berikut:

- Menyetujui penambahan setoran modal ke dalam Bank oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem sebanyak 1.000 lembar saham atau bernilai nominal seluruhnya Rp1.000.000.000,-, sehingga untuk selanjutnya jumlah keseluruhan modal yang telah disetor oleh para pemegang saham ke dalam Bank adalah sebanyak 2.121.653 lembar saham atau bernilai seluruhnya Rp2.121.653.000.000,- dengan susunan pemegang saham disajikan dalam tabel berikut ini:

EGMS dated July 23, 2024

Bank BPD Bali had a circular EGM on July 23, 2024 for the increase of the capital deposit of the government of Karangasem Regency. The results of circular EGMS were then stated in the Deed of Statement of Shareholders' Resolutions of Bank BPD Bali No. 36 dated July 23, 2024 executed before I Made Widiada, S.H., Notary in Denpasar, Bali.

The Circular EGMS Decision has been signed by 2,120,653 shares issued until the meeting was held. The Circular EGMS Resolution was also adopted in accordance with the provisions of the Bank's Articles of Association and has the same legal force and effect as the resolutions adopted by the shareholders of a Bank GMS and is valid and binding.

The resolutions are as follows

- To approve the addition of capital contributions to the Bank by Karangasem Regional Government of 1,000 shares or a total nominal value of Rp1,000,000,000,- so that the total amount of capital contributed to the Bank by shareholders is 2,121,653 shares or a total value of Rp2,121,653,000,000,- with the composition of shareholders as shown in the following table:

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (sheets)	Nilai Nominal Saham (Rp) Nominal Value of Shares (Rp)
Pemerintah Provinsi Bali Bali Provincial Government	719.912	719.912.000.000
Pemerintah Kabupaten Badung Badung Regency Government	850.617	850.617.000.000
Pemerintah Kota Denpasar Denpasar City Government	214.476	214.476.000.000
Pemerintah Kabupaten Gianyar Gianyar Regency Government	100.000	100.000.000.000
Pemerintah Kabupaten Buleleng Buleleng Regency Government	80.000	80.000.000.000
Pemerintah Kabupaten Karangasem Karangasem Regency Government	43.550	43.550.000.000
Pemerintah Kabupaten Jembrana Jembrana Regency Government	37.092	37.092.000.000
Pemerintah Kabupaten Klungkung Klungkung Regency Government	31.423	31.423.000.000
Pemerintah Kabupaten Tabanan Tabanan Regency Government	31.006	31.006.000.000
Pemerintah Kabupaten Bangli Bangli Regency Government	13.577	13.577.000.000

Keputusan RUPSLB Sirkuler yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 36 tanggal 23 Juli 2024 tersebut telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-0149564.AH.01.11 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024.

Akta Risalah RUPSLB Sirkuler tersebut selanjutnya disampaikan 3 (tiga) hari kerja ke OJK setelah penyelenggaraannya.

RUPSLB Tanggal 23 Oktober 2024

Bank BPD Bali menyelenggarakan RUPSLB secara sirkuler pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan agenda penambahan setoran modal Pemerintah Daerah Kota Denpasar. Hasil RUPSLB secara sirkuler tersebut selanjutnya dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Bank BPD Bali No. 31 tanggal 23 Oktober 2024 yang dibuat dihadapan I Made Widiada, S.H., Notaris di Denpasar, Bali.

Keputusan RUPSLB Sirkuler telah ditandatangani oleh 2.121.653 lembar saham yang telah dikeluarkan sampai penyelenggaraan Rapat. Keputusan RUPSLB Sirkuler juga telah diambil sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil para pemegang saham dalam suatu RUPS Bank, dan bersifat sah dan mengikat.

Keputusan yang diambil adalah sebagai berikut:

- Menyetujui penambahan setoran modal ke dalam Bank oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar sebanyak 85.524 lembar saham atau bernilai nominal seluruhnya Rp85.524.000.000,-, sehingga untuk selanjutnya jumlah keseluruhan modal yang telah disetor oleh para pemegang saham ke dalam Bank adalah sebanyak 2.207.177 lembar saham atau bernilai seluruhnya Rp2.207.177.000.000,- dengan susunan pemegang saham disajikan dalam tabel berikut ini:

The Circular EGMS Resolutions set forth in Notarial Deed No. 36 dated July 23, 2024 have been notified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Letter No. AHU-0149564.AH.01.11 Year 2024 dated October 23, 2024.

The Minutes of Circular EGMS was submitted to OJK on 3 (three) working days after its implementation.

EGMS on October 23, 2024

Bank BPD Bali held a circular EGMS on October 23, 2024 with the agenda of increase of capital deposit of Denpasar City Government. The results of the EGM were then stated in the Certificate of Resolutions of Shareholders of Bank BPD Bali No. 31 dated October 23, 2014, executed in front of I Widiada, S.H., Notary Public in Denpasar, Bali.

The Circular EGMS Decision has been signed by 2,121,653 shares issued until the meeting was held. The Circular EGMS Resolution was also adopted in accordance with the provisions of the Bank's Articles of Association and has the same legal force and effect as the resolutions adopted by the shareholders of a Bank GMS and is valid and binding.

The resolutions are the following:

- To approve the addition of capital contributions to the Bank by the Denpasar City Regional Government of 85,524 shares or a total nominal value of Rp85,524,000,000,- so that the total amount of capital contributed to the Bank by shareholders is 2,207,177 shares or a total value of Rp2,207,177,000,000,- with the composition of shareholders as shown in the following table:*

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (sheets)	Nilai Nominal Saham (Rp) Nominal Value of Shares (Rp)
Pemerintah Provinsi Bali Bali Provincial Government	719.912	719.912.000.000
Pemerintah Kabupaten Badung Badung Regency Government	850.617	850.617.000.000
Pemerintah Kota Denpasar Denpasar City Government	300.000	300.000.000.000
Pemerintah Kabupaten Gianyar Gianyar Regency Government	100.000	100.000.000.000
Pemerintah Kabupaten Buleleng Buleleng Regency Government	80.000	80.000.000.000
Pemerintah Kabupaten Karangasem Karangasem Regency Government	43.550	43.550.000.000
Pemerintah Kabupaten Jembrana Jembrana Regency Government	37.092	37.092.000.000
Pemerintah Kabupaten Klungkung Klungkung Regency Government	31.423	31.423.000.000
Pemerintah Kabupaten Tabanan Tabanan Regency Government	31.006	31.006.000.000
Pemerintah Kabupaten Bangli Bangli Regency Government	13.577	13.577.000.000



Keputusan RUPSLB Sirkuler yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 31 tanggal 23 Oktober 2024 tersebut telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-0227294.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 23 Oktober 2024.

Akta Risalah RUPSLB Sirkuler tersebut selanjutnya disampaikan 5 (lima) hari kerja ke OJK setelah penyelenggaraannya.

RUPSLB Tanggal 24 Desember 2024

Bank BPD Bali menyelenggarakan RUPSLB secara sirkuler pada tanggal 24 Desember 2024 dengan agenda penambahan setoran modal Pemerintah Kabupaten Badung. Hasil RUPSLB secara sirkuler tersebut selanjutnya dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Bank BPD Bali No. 78 tanggal 24 Desember 2024 yang dibuat dihadapan di hadapan I Made Widiada, S.H., Notaris di Denpasar, Bali.

Keputusan RUPSLB Sirkuler telah ditandatangani oleh 2.207.177 lembar saham yang telah dikeluarkan sampai penyelenggaraan Rapat. Keputusan RUPSLB Sirkuler juga telah diambil sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil para pemegang saham dalam suatu RUPS Bank, dan bersifat sah dan mengikat.

Keputusan yang diambil adalah sebagai berikut:

- Menyetujui penambahan setoran modal ke dalam Bank oleh Pemerintah Kabupaten Badung sebanyak 200.000 lembar saham atau bernilai nominal seluruhnya Rp200.000.000.000,- sehingga untuk selanjutnya jumlah keseluruhan modal yang telah disetor oleh para pemegang saham ke dalam Bank adalah sebanyak 2.407.177 lembar saham atau bernilai seluruhnya Rp2.407.177.000.000,- dengan susunan pemegang saham disajikan dalam tabel berikut ini:

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (sheets)	Nilai Nominal Saham (Rp) Nominal Value of Shares (Rp)
Pemerintah Provinsi Bali Bali Provincial Government	719.912	719.912.000.000
Pemerintah Kabupaten Badung Badung Regency Government	1.050.617	1.050.617.000.000
Pemerintah Kota Denpasar Denpasar City Government	300.000	300.000.000.000
Pemerintah Kabupaten Gianyar Gianyar Regency Government	100.000	100.000.000.000
Pemerintah Kabupaten Buleleng Buleleng Regency Government	80.000	80.000.000.000
Pemerintah Kabupaten Karangasem Karangasem Regency Government	43.550	43.550.000.000
Pemerintah Kabupaten Jembrana Jembrana Regency Government	37.092	37.092.000.000
Pemerintah Kabupaten Klungkung Klungkung Regency Government	31.423	31.423.000.000
Pemerintah Kabupaten Tabanan Tabanan Regency Government	31.006	31.006.000.000
Pemerintah Kabupaten Bangli Bangli Regency Government	13.577	13.577.000.000

The Circular EGMS Resolutions set forth in Notarial Deed No. 31 dated October 23, 2024 have been notified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Letter No. AHU-0227294.AH.01.11. Year 2024 dated October 23, 2024.

The Circular EGMS Minutes Deed was then submitted to the OJK 5 (five) working days after its implementation.

EGMS on December 24, 2024

Bank BPD Bali held a circular EGMS on December 24, 2024 with the agenda to increase the capital deposit of the Government of the Regency of Badung. The results of the Circular EGMS were then recorded in Deed of Resolution of Shareholders of Bank BPD Bali No. 78 dated December 24, 2024 before I Made Widiada, S.H., Notary in Denpasar, Bali.

The Circular EGMS Resolution has been signed by 2,207,177 shares issued until the holding of the meeting. The Circular EGMS Resolution has also been adopted in accordance with the provisions of the Bank's Articles of Association and has the same legal force and effect as the resolutions adopted by the shareholders in the EGMS of a Bank and is valid and binding.

The resolutions adopted are as follows

- Approval of the addition of capital contributions to the Bank by the Badung Regency Government of 200,000 shares or a total nominal value of Rp200,000,000,000,- so that the total amount of capital contributed to the Bank by the shareholders is 2,407,177 shares or a total value of Rp2,407,177,000,000,- with the composition of the shareholders as shown in the following table:*

Keputusan RUPSLB Sirkuler yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 78 tanggal 24 Desember 2024 tersebut telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-0284083.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 27 Desember 2024.

Akta Risalah RUPSLB Sirkuler tersebut selanjutnya disampaikan 6 (enam) hari kerja ke OJK setelah penyelenggaraannya.

The Circular EGMS Resolutions set forth in Notarial Deed No. 78 dated December 24, 2024 have been notified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Letter No. AHU-0284083.AH.01.11. Year 2024 dated December 27, 2024

The Circular EGMS Minutes Deed was then be submitted to the OJK 6 (six) working days after its implementation.

Penyelenggaraan RUPST Tahun 2023 untuk Tahun Buku 2022 *Implementation of AGMS in 2023 for Fiscal Year 2022*

Bank BPD Bali menyelenggarakan RUPS Tahunan (RUPST) pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, pada pukul 10.00-11.30 WITA yang berlokasi di Ruang Wijaya Kusuma Lantai 3, Gedung Bank BPD Bali, Jl. Raya Puputan, Niti-Mandala Denpasar.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang Hadir dalam Rapat

Daftar anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank BPD Bali yang menghadiri RUPST disajikan terpisah pada pembahasan Dewan Komisaris dan Direksi dari Bab GCG ini.

Bank BPD Bali held an Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on Wednesday, February 22, 2023, at 10.00-11.30 WITA at the Wijaya Kusuma Room, 3rd Floor, Bank BPD Bali Building, Jl. Raya Puputan, Niti-Mandala Denpasar.

Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company present at the Meeting

The list of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of Bank BPD Bali who attended the AGMS is presented separately in the discussion of the Board of Commissioners and the Board of Directors of this GCG Chapter.

Kehadiran Pemegang Saham

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 1.938.200 saham atau 100,00% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Bank.

Attendance of Shareholders

The shares present and/or represented at the Meeting amounted to 1,938,200, representing 100.00% of the total number of shares issued by the Bank and entitled to vote.

Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Mekanisme pengambilan Keputusan dalam Rapat adalah diadakan pembahasan-pembahasan seperlunya. Keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Meeting's Decision-Making Mechanism

The decision-making mechanism of the Meeting is to hold discussions as necessary. Decisions at the Meeting are made on the basis of deliberation for consensus.

Pihak Independen Penghitung Suara

Penghitungan suara untuk dasar pengambilan keputusan Rapat dan validasinya dilakukan oleh I Made Widiada, S.H., Notaris di Denpasar, Bali.

Independent Party Vote Counting

The counting of votes for the basis of decision making at the Meeting and its validation shall be conducted by I Made Widiada, S.H., Notary Public in Denpasar, Bali.

Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat, serta Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat

Sesuai dengan acara Rapat, terdapat pengarahan Pejabat Gubernur Bali dan tanya jawab dan arahan dari Pemegang Saham. Rapat dengan suara bulat menerima serta menyetujui agenda rapat dan untuk selanjutnya memutuskan keputusan Rapat.

Opportunity for Questions and/or Comments and Voting Results at the Meeting

In accordance with the agenda of the meeting, there was a briefing from the Acting Governor of Bali and questions and answers and instructions from the shareholders. The meeting unanimously accepted and approved the agenda of the meeting and then took the decisions of the meeting.



Keputusan RUPST AGMS Decisions

Seluruh keputusan RUPST telah dimuat dalam Akta No. 47 tanggal 22 Februari 2023 yang dibuat oleh dan di hadapan I Made Widiada, S.H., Notaris di Denpasar, Bali. Adapun informasi lengkap terkait agenda dan keputusan RUPST tersebut adalah sebagai berikut:

All decisions of the AGMS were stated in Deed No. 47 dated February 22, 2023, executed by and before I Made Widiada, S.H., Notary in Denpasar, Bali. The complete information regarding the agenda and resolutions of the AGMS is as follows:

Mata Acara Rapat Pertama	Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 dan Informasi Rencana Bisnis Bank Tahun 2023 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022.
<i>First Meeting Agenda</i>	<i>The Annual Report of the Company for the financial year 2022 and the information on the Business Plan of the Bank for the year 2023 and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year 2022.</i>
Keputusan Rapat	Menerima dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Bank dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Bank Tahun Buku 2023, serta selanjutnya (<i>Acquit Et Decharge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk Laporan Pertanggung Jawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Laporan Tahun Buku 2022.
<i>Meeting Decision</i>	<i>Received and ratified the Annual Report, the Financial Report of the Bank and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year 2023, and subsequently (Acquit Et Decharge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the Accountability Report of the Board of Directors and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year 2022.</i>
Status Pelaksanaan	Telah direalisasikan pada tahun 2023.
<i>Implementation Status</i>	<i>Implemented in 2023.</i>
Mata Acara Rapat Kedua	Penggunaan Laba Tahun Buku 2022: • Pembagian Dividen • Pemberian Bonus kepada Karyawan, Tantiem kepada Pengurus Bank.
<i>Second Meeting Agenda</i>	<i>Appropriation of earnings for fiscal year 2022:</i> • <i>Distribution of dividends</i> • <i>Provision of bonuses to employees, tantiem to bank management.</i>
Keputusan Rapat	Memberikan persetujuan: a. Pembagian laba tahun buku 2022 sebagai berikut: Pembagian laba bersih untuk tahun buku 2022 sebesar Rp603.516.277.496,- dengan perincian sebagai berikut: 1. Dividen sebesar 75% atau sebesar Rp452.637.208.122,00 2. Cadangan umum sebesar 25% atau sebesar Rp150.879.069.374,00 b. Pemberian bonus kepada karyawan dan tantiem kepada pengurus Bank mengacu kepada pembagian bonus dan tantiem tahun buku 2021, dengan komposisi masing-masing sebesar 17,30% untuk karyawan dan sebesar 4,05% untuk Pengurus Bank yang terdiri dari sebesar 2,70% untuk Direksi dan sebesar 1,35% untuk Dewan Komisaris. Pemberian bonus dan tantiem diatur dalam peraturan Bank.
<i>Meeting Decision</i>	<i>Granting Approval:</i> a. <i>Distribution of profit for the fiscal year 2022 as follows:</i> <i>To distribute the net profit for fiscal year 2022 amounting to Rp603,516,277,496,-, as follows:</i> 1. <i>Dividend of 75% or Rp452.637.208.122,00</i> 2. <i>General reserve of 25% or Rp150.879.069.374,00</i> b. <i>The provision for bonuses for employees and bonuses for Bank management refers to the distribution of bonuses for the financial year 2021, with a composition of 17.30% for employees and 4.05% for Bank management, consisting of 2.70% for the Board of Directors and 1.35% for the Board of Commissioners. The payment of bonuses is governed by the Bank's regulations.</i>
Status Pelaksanaan	Telah direalisasikan pada tahun 2023.
<i>Implementation Status</i>	<i>Implemented in 2023.</i>

Mata Acara Rapat Ketiga

Third Meeting Agenda

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar

- Penambahan modal disetor oleh Pemerintah Provinsi Bali
- Perubahan Penyebutan Nama Jabatan Direksi

Approval of the amendment to the Articles of Association

- Additional paid-in capital from Bali Provincial Government
- Changes in the name of the directors

Keputusan Rapat

Perubahan Anggaran Dasar Bank yaitu tentang

- a. Persetujuan penambahan modal disetor oleh pemerintah Provinsi Bali sebanyak 750.000 lembar saham atau bernilai nominal sebesar Rp75.000.000.000,- sehingga sekarang menjadi sebanyak 719.912 lembar saham atau bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp719.912.000.000,- sehingga untuk selanjutnya jumlah keseluruhan modal yang telah disetor oleh para pemegang saham adalah sebanyak 2.013.200 atau bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.013.200.000.000 dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal Saham (Rp)
Pemerintah Provinsi Bali	719.912	719.912.000.000
Pemerintah Kabupaten Badung	850.617	850.617.000.000
Pemerintah Kota Denpasar	184.476	184.476.000.000
Pemerintah Kabupaten Buleleng	74.443	74.443.000.000
Pemerintah Kabupaten Karangasem	41.050	41.050.000.000
Pemerintah Kabupaten Jembrana	37.092	37.092.000.000
Pemerintah Kabupaten Klungkung	31.423	31.423.000.000
Pemerintah Kabupaten Tabanan	31.006	31.006.000.000
Pemerintah Kabupaten Gianyar	29.604	29.604.000.000
Pemerintah Kabupaten Bangli	13.577	13.577.000.000

- b. Memberikan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Bank tentang perubahan penyebutan nama jabatan Direksi sehingga untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut: Direktur Operasional menjadi Direktur Operasional dan Teknologi Informasi (TI) dan Direktur Bisnis Non kredit menjadi Direktur Bisnis. Untuk selanjutnya penyebutan nama jabatan Direksi menjadi: 1). Direktur Utama; 2). Direktur Operasional dan TI; 3). Direktur Kepatuhan; 4). Direktur Kredit; 5). Direktur Bisnis.

Selanjutnya melaporkan perubahan penyebutan nama jabatan Direksi tersebut kepada Otoritas Jasa keuangan. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk persetujuan apabila terjadi perubahan penyebutan nama jabatan Direksi di kemudian hari.

Meeting Decision

Amendments to the Bank's Articles of Association include the following:

- a. Approval by the Bali Provincial Government for additional paid-in capital of 750,000 shares, which amounts to a nominal value of Rp75,000,000,000. As a result, the total number of shares is now 719,912, with a total nominal value of Rp719,912,000,000. Consequently, the total amount of capital paid in by shareholders has increased to 2,013,200 shares, totaling Rp2,013,200,000,000. The shareholder composition is as follows:

Shareholders	Number of Shares (sheets)	Nominal Value of Shares (Rp)
Bali Provincial Government	719.912	719.912.000.000
Badung Regency Government	850.617	850.617.000.000
Denpasar City Government	184.476	184.476.000.000
Buleleng Regency Government	74.443	74.443.000.000
Karangasem Regency Government	41.050	41.050.000.000
Jembrana Regency Government	37.092	37.092.000.000
Klungkung Regency Government	31.423	31.423.000.000
Tabanan Regency Government	31.006	31.006.000.000
Gianyar Regency Government	29.604	29.604.000.000
Bangli Regency Government	13.577	13.577.000.000

- b. Approval of amendments to the Bank's Articles of Association to change the titles of certain director positions. The Director of Operations will now be referred to as the Director of Operations and Information Technology (IT), and the Director of Non-Credit Business will be changed to the Director of Business. The updated titles of the directors will be: 1). President Director; 2, Director of Operations and IT; 3). Director of Compliance; 4). Director of Credit; 5). Director of Business.

Furthermore, the changes in the board titles will be reported to the Financial Services Authority. The Board of Commissioners is authorized to approve any future changes to the titles of directors.

Status Pelaksanaan
Implementation Status

Telah direalisasikan pada tahun 2023.
Implemented in 2023.



Mata Acara Rapat Keempat <i>Fourth Meeting Agenda</i>	Persetujuan pembangunan gedung kantor Bank BPD Bali yang berlokasi di Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon Denpasar. <i>Approval for the construction of Bank BPD Bali office building located at Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon Denpasar.</i>
Keputusan Rapat <i>Meeting Decision</i>	Menyetujui pembangunan gedung kantor Bank BPD Bali yang berlokasi di Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon Denpasar. <i>Approved to construct Bank BPD Bali Office Building located at Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon Denpasar.</i>
Status Pelaksanaan <i>Implementation Status</i>	Telah direalisasikan pada tahun 2023. <i>Implemented in 2023.</i>

Mata Acara Rapat Kelima <i>Fifth Meeting Agenda</i>	Agenda Tambahan: - Penyampaian berakhirnya masa jabatan Dewan komisaris dan Direksi Bank BPD Bali. - Permohonan persetujuan atas 1). Sistem dan prosedur serta jadwal dan tahapan pemilihan Dewan Komisaris Bank BPD Bali, dan 2). Sistem dan prosedur serta jadwal dan tahapan pemilihan Direksi Bank BPD Bali. Additional Agenda: - Submission of the end of the term of office of the Board of Commissioners and Directors of Bank BPD Bali. - Request for approval of 1). The system and procedures as well as the schedule and stages of the election of the Board of Commissioners of Bank BPD Bali, and 2). The system and procedures as well as the schedule and stages of the election of the Board of Directors of Bank BPD Bali.
Keputusan Rapat	a. Penyampaian berakhirnya masa jabatan Dewan komisaris dan Direksi Bank BPD Bali. b. Menyetujui sistem dan prosedur pemilihan Dewan komisaris Bank BPD Bali. c. Menetapkan calon-calon Dewan Komisaris Bank Periode 2023-2027 sebagai berikut: - Tuan I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H., sebagai calon Komisaris Independen sekaligus sebagai calon Komisaris Utama - Tuan I Gede Darmawa, S.E., sebagai calon Komisaris Non Independen - Tuan Insinyur Gede Arimbawa sebagai calon Komisaris Independen - Tuan I Nyoman Suparsa Widana calon Komisaris Independen Untuk diajukan <i>Fit and Proper Test</i>, dan apabila disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan ditetapkan secara efektif sebagai dewan Komisaris sejak serah terima jabatan dan akan berakhir sampai dengan masa jabatan 4 (empat) tahun. d. Menetapkan dan memperpanjang jabatan Tuan Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H., sebagai Komisaris Non Independen Bank BPD Bali periode 13 Mei 2023 hingga 13 Mei 2027. e. Menugaskan Tuan Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H., untuk mengkoordinir pengurusan calon Dewan Komisaris yang baru kepada otoritas yang berwenang. f. Kepada Dewan Komisaris yang akan mengakhiri masa jabatan periode 2019-2023, diberikan hak-haknya sebagai Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran dasar Peseroan yang berlaku g. Memperhatikan aspek kinerja dan aspek lainnya, seluruh Direksi Bank BPD Bali saat ini, masa jabatannya diperpanjang Kembali untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan periode masing-masing yaitu: - Tuan I Nyoman Sudharma, S.H., M.H., sebagai Direktur Utama periode 14 Februari 2024 hingga 14 Februari 2029. - Tuan Ida Bagus Gede Setia Yasa selaku Direktur Operasional dan TI periode 22 Juni 2023 hingga 22 Juni 2028. - Tuan Drs. I Wayan Sutela Negara sebagai Direktur kepatuhan periode 22 Juni 2023 hingga 22 Juni 2028. - Tuan Made Lestara Widiatmika sebagai Direktur Kredit periode 14 Februari 2024 hingga 14 Februari 2029. - Tuan I Nyoman Sumanaya, S.E., M.M. sebagai Direktur Bisnis periode 20 Mei 2024 hingga 20 Mei 2029.
<i>Meeting Decision</i>	Dan kepada Direksi saat ini yang akan mengakhiri masa jabatannya, diberikan hak-haknya sebagai Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Bank yang berlaku. a. Notification of the end of the term of office of the Board of Commissioners and Directors of Bank BPD Bali b. Approval of the system and procedures for the election of the Board of Commissioners of Bank BPD Bali c. Determination of the candidates for the Board of Commissioners of the Bank for the period 2023-2027 as follows - Mr. I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H., as the candidate for Independent Commissioner and as the candidate for President Commissioner. - Mr. I Gede Darmawa, S.E., as a candidate for Non-Independent Commissioner - Mr. Insinyur Gede Arimbawa as a candidate for Independent Commissioner - Mr. I Nyoman Suparsa Widana, Candidate for Independent Commissioner To be submitted to a Fit and Proper Test, and if approved by the Financial Services Authority (OJK), will be effectively appointed as a member of the Board of Commissioners from the handover of office and will end with a term of 4 (four) years. d. To appoint and extend the term of Mr. Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H., as Non-Independent Commissioner of Bank BPD Bali for the period from May 13, 2023 to May 13, 2027. e. To appoint Mr. Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H., to coordinate the management of new candidates for the Board of Commissioners with the appropriate authorities. f. The Board of Commissioners who will end their term of office for the 2019-2023 period will be granted their rights as Board of Commissioners in accordance with the Company's Articles of Association in force. g. Considering the performance and other aspects, all current Directors of Bank BPD Bali, their terms of office are again extended for a period of 5 (five) years according to their respective periods, namely: - Mr. I. Nyoman Sudharma, S.H., M.H. as President Director for the period from February 14, 2024 to February 14, 2029. - Mr. Ida Bagus Gede Setia Yasa as Director of Operations and IT for the period from June 22, 2023 to June 22, 2028. - Mr. Drs. I Wayan Sutela Negara as Director of Compliance for the period from June 22, 2023 to June 22, 2028. - Mr. Made Lestara Widiatmika as Credit Director for the period from February 14, 2024 to February 14, 2029. - Mr. I Nyoman Sumanaya, S.E., M.M. as Business Director for the period from May 20, 2024 to May 20, 2029. The current directors who are at the end of their term of office shall have their rights as directors in accordance with the applicable articles of association of the Bank.
Status Pelaksanaan <i>Implementation Status</i>	Telah direalisasikan pada tahun 2023. <i>Implemented in 2023.</i>

Penyelenggaraan RUPSLB Tahun Buku 2023

Implementation of EGMS for Fiscal Year 2023

Berbeda dengan penyelenggaraan RUPST, penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank BPD Bali sebanyak 3 (tiga) kali selama tahun 2023 dilakukan secara sirkuler dan masing-masing dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham. Ketiga RUPSLB sirkuler yang dimaksud adalah sebagai berikut:

RUPSLB Sirkuler Tanggal 12 Mei 2023

Bank BPD Bali menyelenggarakan RUPSLB secara sirkuler pada tanggal 12 Mei 2023. Hasil RUPSLB secara sirkuler tersebut selanjutnya dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Bank BPD Bali No. 25 tanggal 12 Mei 2023 yang dibuat dihadapan di hadapan I Made Widiada, S.H., Notaris di Denpasar, Bali.

Keputusan RUPSLB Sirkuler telah ditandatangani oleh 2.013.200 lembar saham yang telah dikeluarkan sampai penyelenggaraan Rapat. Keputusan RUPSLB Sirkuler juga telah diambil sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil para pemegang saham dalam suatu RUPS Bank, dan bersifat sah dan mengikat.

Keputusan yang diambil adalah sebagai berikut:

Contrary to the holding of the AGMS, the holding of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of Bank BPD Bali as many as 3 (three) times in the year 2023 was conducted in a circular manner and each of them was specified in the Deed of Statement of Shareholders' Resolutions. The three circular EGMS referred to are as follows:

Circular EGMS dated May 12, 2023

Bank BPD Bali had a circular EGM on May 12, 2023. The results of circular EGMS were then stated in the Deed of Statement of Shareholders' Resolutions of Bank BPD Bali No. 25 dated May 12, 2023 executed before I Made Widiada, S.H., Notary in Denpasar, Bali.

The Circular EGMS Decision has been signed by 2,013,200 shares issued until the meeting was held. The Circular EGMS Resolution was also adopted in accordance with the provisions of the Bank's Articles of Association and has the same legal force and effect as the resolutions adopted by the shareholders of a Bank GMS and is valid and binding.

The resolutions are the following:

Mata Acara Rapat Pertama <i>First Meeting Agenda</i>	Pemberhentian dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan periode 2019-2023. <i>Honorable dismissal of all members of the Board of Commissioners of the Company for the term of office 2019-2023.</i>
Keputusan Rapat <i>Meeting Decision</i>	Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris perseroan untuk masa jabatan periode 2019-2023, dan untuk selanjutnya memberikan pembebasan sepenuhnya (<i>Acquit Et Decharge</i>) kepada seluruh Dewan Komisaris Perseroan atas tugas dan tanggung jawab pengawasan, serta Kepada Dewan Komisaris yang akan mengakhiri masa jabatan untuk periode tersebut diberikan hak-haknya sebagai Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan dan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku. <i>Dismiss with honor all the members of the Board of Commissioners of the Company for the term of office 2019-2023, and further grant to all the members of the Board of Commissioners of the Company a full discharge (Acquit Et Decharge) from their supervisory duties and responsibilities, and to the members of the Board of Commissioners who will end their term of office for the period, their rights as members of the Board of Commissioners of the Company in accordance with the provisions and the Articles of Association of the Company in force.</i>
Status Pelaksanaan <i>Implementation Status</i>	Telah direalisasikan pada tahun 2023. <i>Implemented in 2023.</i>
Mata Acara Rapat Kedua <i>Second Meeting Agenda</i>	Penetapan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan periode 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2027 <i>Determination of the Board of Directors of the Company for the term of office from May 13, 2023 to May 13, 2027</i>
Keputusan Rapat <i>Meeting Decision</i>	Menetapkan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan periode 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2027 yaitu sebagai berikut: - 1. Tuan I GEDE DARMAWA, Sarjana Ekonomi, sebagai Komisaris Non Independen. 2. Tuan Insinyur GEDE ARIMBAWA, sebagai Komisaris Independen. 3. Tuan I NYOMAN SUPARSA WIDANA, sebagai Komisaris Independen. <i>Determination of the Board of Commissioners of the Company for the term of office from May 13, 2023 to May 13, 2027, as follows: -</i> 1. <i>Mr. I. GEDE DARMAWA, bachelor of economics, as non-independent commissioner.</i> 2. <i>Mr. GEDE ARIMBAWA, Engineer, as Independent Commissioner.</i> 3. <i>Mr. I NYOMAN SUPARSA WIDANA as Independent Commissioner.</i>
Status Pelaksanaan <i>Implementation Status</i>	Telah direalisasikan pada tahun 2023. <i>Implemented in 2023.</i>



Mata Acara Rapat Ketiga <i>Third Meeting Agenda</i>	Penugasan Tuan WISNU BAWA TEMAJA, Sarjana Hukum, Magister Hukum, sebagai Pelaksana Tugas Sementara Komisaris Utama Perseroan sampai dengan ditetapkannya Komisaris Utama Perseroan yang definitif. <i>Appointment of Mr. WISNU BAWA TEMAJA, Bachelor of Law, Master of Law, as Acting President Commissioner of the Company until the appointment of a definitive President Commissioner of the Company.</i>
Keputusan Rapat <i>Meeting Decision</i>	Menugaskan Tuan WISNU BAWA TEMAJA, Sarjana Hukum, Magister Hukum, sebagai Pelaksana Tugas Sementara Komisaris Utama Perseroan sampai dengan ditetapkannya Komisaris Utama Perseroan yang definitive. Melanjutkan Permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) atas pencalonan I GUSTI NGURAH BAGUS ARTAWAN sebagai Komisaris Utama Independen untuk diajukan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah masa tunggu <i>colling off</i> berakhir, sesuai dengan Surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: SR-25/PB.021/2023, tertanggal 04 April 2023. <i>Appointment of Mr. WISNU BAWA TEMAJA, Bachelor of Law, Master of Law, as Acting President Commissioner of the Company until the appointment of a definitive President Commissioner of the Company. Continuation of the application for Fit and Proper Assessment (PKK) for the appointment of I GUSTI NGURAH BAGUS ARTAWAN as Independent President Commissioner to be resubmitted to the Financial Services Authority (OJK) after the expiration of the cooling off period, in accordance with the letter from the Financial Services Authority (OJK) no: SR-25/PB.021/2023 dated April 4, 2023.</i>
Status Pelaksanaan <i>Implementation Status</i>	Telah direalisasikan pada tahun 2023. <i>Implemented in 2023.</i>
Mata Acara Rapat Keempat <i>Fourth Meeting Agenda</i>	Penetapan kembali susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan <i>Re-establishment of the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company</i>
Keputusan Rapat <i>Meeting Decision</i>	Menetapkan kembali susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yaitu: - 1. Komisaris Non Independen dan Pelaksana Tugas Sementara Komisaris Utama : Tuan WISNU BAWA TEMAJA, Sarjana Hukum, Magister Hukum. 2. Komisaris Non Independen : I GEDE DARMAWA, Sarjana Ekonomi. 3. Komisaris Independen : Insinyur GEDE ARIMBAWA. 4. Komisaris Independen : I NYOMAN SUPARSA WIDANA. 5. Direktur Utama : I NYOMAN SUDHARMA, Sarjana Hukum, Magister Hukum. 6. Direktur Operasional dan TI : IDA BAGUS GEDE SETIA YASA. 7. Direktur Kepatuhan : Dokterandus I WAYAN SUTELA NEGARA NEGARA. 8. Direktur Kredit : MADE LESTARA WIDIATMIKA. 9. Direktur Bisnis : I NYOMAN SUMANAYA, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. <i>To re-establish the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company, namely -</i> 1. <i>Non-independent Commissioner and Acting President Commissioner: Mr. WISNU BAWA TEMAJA, Bachelor of Law, Master of Law.</i> 2. <i>Non-Independent Commissioner: Mr. I GEDE DARMAWA, Bachelor of Economics.</i> 3. <i>Independent Commissioner: Engineer GEDE ARIMBAWA.</i> 4. <i>Independent Commissioner: I NYOMAN SUPARSA WIDANA.</i> 5. <i>President Director: I NYOMAN SUDHARMA, Bachelor of Law, Master of Law.</i> 6. <i>Operations and IT Director: IDA BAGUS GEDE SETIA YASA.</i> 7. <i>Compliance Director: Dokterandus I WAYAN SUTELA NEGARA NEGARA.</i> 8. <i>Credit Director: MADE LESTARA WIDIATMIKA.</i> 9. <i>Business Director: I NYOMAN SUMANAYA, Bachelor of Economics, Master of Management.</i>
Status Pelaksanaan <i>Implementation Status</i>	Telah direalisasikan pada tahun 2023. <i>Implemented in 2023.</i>
Mata Acara Rapat Kelima <i>Fifth Meeting Agenda</i>	Persetujuan penambahan setoran modal kedalam perseroan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem <i>Approval of the Karangasem Regency Government to contribute additional capital to the Company</i>
Keputusan Rapat <i>Meeting Decision</i>	Menyetujui penambahan setoran modal kedalam perseroan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem sebanyak 1500 lembar saham atau bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.500.000.000,00,- sehingga untuk selanjutnya jumlah keseluruhan modal yang telah disetor oleh para pemegang saham ke dalam Perseroan adalah sebanyak 2.014.700 lembar saham, atau bernilai seluruhnya Rp2.014.700.000.000,- <i>Approved the additional capital deposit into the Company by the Karangasem Regency Government of 1,500 shares or with a total nominal value of Rp1,500,000,000.00,- so that the total amount of capital that has been deposited by shareholders into the Company is 2,014,700 shares or with a total value of Rp2,014,700,000,000.00,-</i>
Status Pelaksanaan <i>Implementation Status</i>	Telah direalisasikan pada tahun 2023. <i>Implemented in 2023.</i>

RUPSLB Sirkuler Tanggal 13 Juli 2023

Bank BPD Bali menyelenggarakan RUPSLB secara sirkuler pada tanggal 13 Juli 2023. Hasil RUPSLB secara sirkuler tersebut selanjutnya dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Bank BPD Bali No. 27 tanggal 13 Juli 2023 yang dibuat dihadapan di hadapan I Made Widiada, S.H., Notaris di Denpasar, Bali.

Keputusan RUPSLB Sirkuler telah ditandatangani oleh 2.014.700 lembar saham yang telah dikeluarkan sampai penyelenggaraan Rapat. Keputusan RUPSLB Sirkuler juga telah diambil sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank dan mempeunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil para Pemegang saham dalam suatu RUPS Bank, dan bersifat sah dan mengikat.

Keputusan yang diambil adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama <i>First Meeting Agenda</i>	Persetujuan penambahan setoran modal kedalam perseroan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng <i>Approval of the Buleleng Regency Government to contribute additional capital to the Company</i>
Keputusan Rapat <i>Meeting Decision</i>	Menyetujui penambahan setoran modal kedalam perseroan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng sebanyak 5.557 lembar saham atau bernilai nominal sebelumnya sebesar Rp5.557.000.000,00, sehingga untuk selanjutnya jumlah keseluruhan modal yang telah disetor oleh para pemegang saham ke dalam Perseroan adalah sebanyak 2.020.257 lembar saham, atau bernilai seluruhnya Rp2.020.257.000.000,- <i>Approved the additional capital deposit into the Company by the Buleleng Regency Government of 5,557 shares or with a total nominal value of Rp5,557,000,000.00 so that the total amount of capital that has been deposited by shareholders into the Company is 2,020,257 shares or with a total value of Rp2,014,700,000,000,-</i>
Status Pelaksanaan <i>Implementation Status</i>	Telah direalisasikan pada tahun 2023. <i>Implemented in 2023.</i>
Mata Acara Rapat Kedua <i>Second Meeting Agenda</i>	Persetujuan pemberian tambahan fasilitas kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan <i>Approval of the provision of additional facilities to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company</i>
Keputusan Rapat <i>Meeting Decision</i>	Terkait dengan fasilitas pakaian dinas dan tambahan penghasilan yang belum diatur didalam akta Nomor: 93 tertanggal 27 Maret 2019 dan Akta Nomor: 54 tertanggal 18 Februari 2022, para pemegang saham menyetujui memberikan tambahan fasilitas kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu berupa:- 1. Fasilitas pakaian dinas yang diatur dalam peraturan Perseroan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dengan memperhatikan asas transparansi dan akuntabel, dan kebijakan Perseroan tentang fasilitas pakaian dinas bagi karyawan. 2. Pemberian tambahan penghasilan atas pencapaian laba yang diatur dalam peraturan Perseroan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris yang pembayarannya memperhatikan dan mengikuti kebijakan Perseroan tentang pemberian tambahan penghasilan kepada karyawan. <i>With regard to uniform facilities and additional income not regulated in Deed Number: 93 of March 27, 2019 and Deed Number: 54 of February 18, 2022, the shareholders agree to provide additional facilities to the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, namely:-</i> 1. Uniform facilities regulated in the Company's regulations after obtaining the approval of the Board of Commissioners, taking into account the principles of transparency and accountability and the Company's policy on uniform facilities for employees. 2. Provision of additional income on the achievement of profits regulated in the Company's regulations after obtaining the approval of the Board of Commissioners, the payment of which takes into account and follows the Company's policy on the provision of additional income to employees.
Status Pelaksanaan <i>Implementation Status</i>	Telah direalisasikan pada tahun 2023. <i>Implemented in 2023.</i>

Circular EGMS dated July 13, 2023

Bank BPD Bali had a circular EGM on July 13, 2023. The results of circular EGMS were then stated in the Deed of Statement of Shareholders' Resolutions of Bank BPD Bali No. 27 dated July 13, 2023 executed before I Made Widiada, S.H., Notary in Denpasar, Bali.

The Circular EGMS Decision has been signed by 2,014,700 shares issued until the meeting was held. The Circular EGMS Resolution was also adopted in accordance with the provisions of the Bank's Articles of Association and has the same legal force and effect as the resolutions adopted by the shareholders of a Bank GMS and is valid and binding.

The resolutions are the following:

**RUPSLB Sirkuler Tanggal 20 November 2023**

Bank BPD Bali menyelenggarakan RUPSLB secara sirkuler pada tanggal 20 November 2023. Hasil RUPSLB secara sirkuler tersebut selanjutnya dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Bank BPD Bali No. 38 tanggal 22 November 2023 yang dibuat dihadapan di hadapan I Made Widiada, S.H., Notaris di Denpasar, Bali.

Keputusan RUPSLB Sirkuler telah ditandatangani oleh 2.020.257 lembar saham yang telah dikeluarkan sampai penyelenggaraan Rapat. Keputusan RUPSLB Sirkuler juga telah diambil sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil para pemegang saham dalam suatu RUPS Bank, dan bersifat sah dan mengikat.

Keputusan yang diambil adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama <i>First Meeting Agenda</i>	Persetujuan penambahan setoran modal kedalam perseroan oleh Pemerintah Kota Denpasar <i>Approval of the Denpasar City Government to contribute additional capital to the Company</i>
Keputusan Rapat <i>Meeting Decision</i>	Menyetujui penambahan setoran modal kedalam perseroan oleh Pemerintah Kota Denpasar sebanyak 30.000 lembar saham atau bernilai nominal sebelumnya sebesar Rp30.000.000.000,00, sehingga untuk selanjutnya jumlah keseluruhan modal yang telah disetor oleh para pemegang saham ke dalam Perseroan adalah sebanyak 2.050.257 lembar saham, atau bernilai seluruhnya Rp2.050.257.000.000,- <i>Approved the additional capital deposit into the Company by the Denpasar City Government of 30,000 shares or with a total nominal value of Rp30,000,000,000.00 so that the total amount of capital that has been deposited by shareholders into the Company is 2,050,257 shares or with a total value of Rp. 2,050,257,000,000.00.</i>
Status Pelaksanaan <i>Implementation Status</i>	Telah direalisasikan pada tahun 2023. <i>Implemented in 2023.</i>
Mata Acara Rapat Kedua <i>Second Meeting Agenda</i>	Penetapan Tuan I GUSTI NGURAH BAGUS ARTAWAN, Sarjana Hukum, sebagai Komisaris Utama Independen Perseroan <i>Appointment of Mr. I GUSTI NGURAH BAGUS ARTAWAN, Bachelor of Law, as Independent President Commissioner of the Company</i>
Keputusan Rapat <i>Meeting Decision</i>	Menetapkan Tuan I GUSTI NGURAH BAGUS ARTAWAN, Sarjana Hukum, sebagai Komisaris Utama Independen Perseroan PT Bank Pembangunan Daerah Bali untuk masa jabatan periode 21 November 2023 sampai dengan 13 Mei 2027 dan berlaku efektif sejak serah terima jabatan. <i>Appointment of Mr. I GUSTI NGURAH BAGUS ARTAWAN, Bachelor of Law, as an Independent President Commissioner of the Company PT Bank Pembangunan Daerah Bali for the term of office from November 21, 2023 to May 13, 2027 and effective from the handover of office.</i>
Status Pelaksanaan <i>Implementation Status</i>	Telah direalisasikan pada tahun 2023. <i>Implemented in 2023.</i>

Circular EGMS dated November 20, 2023

Bank BPD Bali held a circular EGMS on November 20, 2023. The results of the circular EGMS were then stated in the Deed of Statement of Decisions of Bank BPD Bali Shareholders No. 38 dated November 22, 2023, which was made before I Made Widiada, S.H., Notary in Denpasar, Bali.

The Circular EGMS Decision has been signed by 2,020,257 shares issued until the meeting was held. The Circular EGMS Resolution was also adopted in accordance with the provisions of the Bank's Articles of Association and has the same legal force and effect as the resolutions adopted by the shareholders of a Bank GMS and is valid and binding.

The resolutions are the following:

Mata Acara Rapat Ketiga	Pemberhentian dengan hormat Tuan WISNU BAWA TEMAJA Sarjana Hukum, Magister Hukum, sebagai Pelaksana Tugas Sementara Komisaris Utama Independen.
<i>Third Meeting Agenda</i>	<i>Honourable Dismissal of Mr. WISNU BAWA TEMAJA Bachelor of Law, Master of Law, as Temporary Acting Independent President Commissioner</i>
Keputusan Rapat	Memberhentikan dengan hormat Tuan WISNU BAWA TEMAJA Sarjana Hukum, Magister Hukum, sebagai Pelaksana Tugas Sementara Komisaris Utama Independen, selanjutnya memberikan pembebasan sepenuhnya (<i>Acquit Et Decharge</i>) kepada yang bersangkutan atas tugas-tugasnya sebagai pelaksana Tugas Sementara Komisaris Utama Independen. Atas pemberhentian tersebut yang bersangkutan telah mendapatkan segala hak dan kewajibannya sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
<i>Meeting Decision</i>	<i>Honourably dismissing Mr. WISNU BAWA TEMAJA Bachelor of Law, Master of Law, as Temporary Acting Independent President Commissioner, further granting full acquittal (Acquit Et Decharge) to the person concerned from his duties as Temporary Acting Independent President Commissioner. Upon such discharge, the person concerned shall have all his rights and obligations under the Articles of Association of the Company.</i>
Status Pelaksanaan	Telah direalisasikan pada tahun 2023.
<i>Implementation Status</i>	<i>Implemented in 2023.</i>
Mata Acara Rapat Keempat	Penetapan kembali susunan Dewan Komisaris
<i>Fourth Meeting Agenda</i>	<i>Re-establishment of the composition of the Board of Commissioners of the Company</i>
Keputusan Rapat	Menetapkan kembali susunan Dewan Komisaris Perseroan yaitu:- 1. Komisaris Utama Independen: I GUSTI NGURAH BAGUS ARTAWAN, Sarjana Hukum 2. Komisaris Non Independen: WISNU BAWA TEMAJA, Sarjana Hukum, Magister Hukum. 3. Komisaris Non Independen: I GEDE DARMAWA, Sarjana Ekonomi. 4. Komisaris Independen: Insinyur GEDE ARIMBAWA. 5. Komisaris Independen: I NYOMAN SUPARSA WIDANA.
<i>Meeting Decision</i>	<i>To re-establish the composition of the Board of Commissioners of the Company, namely:</i> 1. <i>Independent President Commissioner: I GUSTI NGURAH BAGUS ARTAWAN, Bachelor of Law.</i> 2. <i>Non-Independent Commissioner: WISNU BAWA TEMAJA, Bachelor of Law, Master of Law</i> 3. <i>Non-independent commissioner: I GEDE DARMAWA, Bachelor of Economics.</i> 4. <i>Independent Commissioner: Engineer GEDE ARIMBAWA.</i> 5. <i>Independent Commissioner: I NYOMAN SUPARSA WIDANA.</i>
Status Pelaksanaan	Telah direalisasikan pada tahun 2023.
<i>Implementation Status</i>	<i>Implemented in 2023.</i>

DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners

Berpedoman pada POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Dewan Komisaris adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Bank yang berbadan hukum perseroan terbatas, atau pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan bagi KCBLN.

Selaras dengan POJK tersebut Dewan Komisaris Bank BPD Bali merupakan organ Perusahaan yang bertugas secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan saran kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan tata kelola pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Based on POJK No. 17 of 2023 on the implementation of governance for commercial banks, the Board of Commissioners is a bank organ tasked to carry out general and/or specific supervision in accordance with the Articles of Association and provide advice to the Board of Directors for banks that are legal entities of limited liability companies or parties appointed to carry out supervisory functions for KCBLN.

In accordance with POJK, the Board of Commissioners of Bank BPD Bali is a corporate organ collectively tasked to perform supervision and advise the Board of Directors and ensure that the Bank has implemented governance at all levels or levels of organization.

Piagam Dewan Komisaris

Board of Commissioners Charter

Sebagai salah satu wujud dari praktik terbaik dari prinsip-prinsip GCG, Bank BPD Bali telah memiliki Piagam Dewan Komisaris sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris Bank BPD Bali No. 002/KEP/DK/BPD/2023 tanggal 29 Desember 2023. Keputusan Dewan Komisaris ini merupakan pembaruan atas Piagam Dewan Komisaris yang telah ditetapkan sebelumnya melalui Keputusan Dewan Komisaris Bank BPD Bali No. 001/KEP/DK/BPD/2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang pedoman dan Tata Terbib Kerja Dewan Komisaris.

Hal-hal penting yang diatur dalam Piagam Dewan Komisaris antara lain tugas, tanggung jawab, dan wewenang; pengaturan kewenangan dan prosedur keputusan; etika kerja; waktu kerja; pengaturan rapat dan pengambilan keputusan; larangan; dan evaluasi kinerja Dewan Komisaris.

As one of the best practices of GCG principles, Bank BPD Bali has a Board of Commissioners Charter as stipulated by Bank BPD Bali Board of Commissioners Decree No. 002/KEP/DK/BPD/2023 dated December 29, 2023. This Regulation of the Board of Commissioners is an update of the Charter of the Board of Commissioners as previously stipulated by the Regulation of the Board of Commissioners of Bank BPD Bali No. 001/KEP/DK/BPD/2021 dated December 27, 2021 on the Guidelines and Work Procedures of the Board of Commissioners.

Important matters regulated in the Board of Commissioners Charter are duties, responsibilities and authorities; regulation of authority and decision making procedures; work ethics; working hours; regulation of meetings and decision making; prohibitions; and evaluation of the performance of the Board of Commissioners.

Etika Kerja Dewan Komisaris

Board of Commissioners Work Ethics

Piagam Dewan Komisaris juga menetapkan pedoman etika kerja Dewan Komisaris yang mensyaratkan Dewan Komisaris untuk melaksanakan kode etik Bank BPD Bali; melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen; memegang teguh rahasia Bank dan/atau rahasia jabatan kepada siapapun; dan menjaga keamanan fisik dan personal dalam pelaksanaan tugas.

Selain itu, Dewan Komisaris dituntut untuk bekerja dengan jujur, tertib, cermat, berdedikasi dan loyalitas untuk kepentingan Bank; bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat dan perbankan; serta bekerja dengan sungguh-sungguh, mencurahkan segenap perhatian, waktu, tenaga, dan pikiran terhadap tugas yang sedang dilaksanakan.

Selanjutnya Dewan Komisaris Bank memelihara sikap saling menghormati antar Dewan Komisaris; dan tidak boleh menerima atau menikmati

The Charter of the Board of Commissioners also establishes the Board of Commissioners' Code of Ethics, which requires the Board of Commissioners to implement Bank BPD Bali's Code of Ethics, to perform duties and responsibilities independently, to maintain Bank secrets and/or official secrets from anyone, and to maintain physical and personal security in the performance of their duties.

In addition, the Board of Commissioners is required to work honestly, properly, diligently, devotedly and loyally for the interests of the Bank; to act and behave in accordance with the values, norms and culture of the local community and the Bank; and to work earnestly, devoting all attention, time, energy and thoughts to the tasks being performed.

In addition, the Bank's Board of Commissioners shall maintain an attitude of mutual respect among the Board of Commissioners; and shall not

suatu tanda terima kasih dalam kegiatan usaha Bank, seperti hadiah, sumbangan atau *entertainment*, pada suatu keadaan yang dapat dianggap sebagai perbuatan yang tidak patut.

accept or enjoy any token of gratitude in the Bank's business activities, such as gifts, donations or entertainment, in a situation that may be considered improper conduct.

Aspek Transparansi Dewan Komisaris

Transparency aspect of the Board of Commissioners

Sebagai bagian dari etika kerja tersebut di atas, Dewan Komisaris Bank wajib mengungkapkan dalam Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Bank beberapa hal penting yakni kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% atau lebih, baik pada Bank BPD Bali maupun pada bank dan/atau Perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; serta hubungan keluarga dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang pengendali Bank.

As part of the work ethics mentioned above, the Bank's Board of Commissioners is required to disclose in the Bank Governance Implementation Report several important matters, namely its shareholding of 5% or more, both in Bank BPD Bali and in other banks and/or companies domiciled in and outside the country; as well as family relationships and family relationships up to the second degree with other Board of Commissioners members, Board of Directors members and/or controlling shareholders of the Bank.

Selanjutnya, Dewan Komisaris wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain yang diterima sesuai dengan POJK mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi Bank Umum.

In addition, the Board of Commissioners is required to disclose the remuneration and other facilities received in accordance with the POJK on the Implementation of Governance in the Provision of Remuneration for Commercial Banks.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

Piagam Dewan Komisaris Bank menetapkan 26 (dua puluh enam) tugas Dewan Komisaris antara lain adalah melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab terhadap pengawasan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS; dan melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.

The Charter of the Bank's Board of Commissioners sets forth 26 (twenty-six) duties of the Board of Commissioners, including to supervise the policies and management of the Bank by the Board of Directors, to advise the Board of Directors, and to be responsible for the supervision of the Bank in accordance with the Bank's purpose and objectives as set forth in the provisions of laws and regulations, the Articles of Association, and the decisions of the GMS; and to perform the duties, powers, and responsibilities in good faith and with the principle of prudence.

Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS; melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank & AF, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain; serta melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

In exercising supervision, the Board of Commissioners shall direct, monitor, and evaluate the implementation of integrated governance, risk management, and compliance, as well as the strategic policies of the Bank, in accordance with the provisions of laws and regulations, the Articles of Association, and/or decisions of the GMS; supervise the Board of Directors' follow-up to audit findings or reviews and recommendations of the Bank's Internal Audit Department & AF, external auditors, the results of supervision by the Financial Services Authority, and/or the results of supervision by other authorities and institutions; and perform other supervisory duties as determined based on decisions of the GMS.

Selain tugas tersebut di atas, Dewan Komisaris juga memiliki 10 (sepuluh) tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Piagam Dewan Komisaris. Tanggung jawab yang dimaksud antara lain menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Bank BPD Bali sesuai dengan maksud dan tujuan Bank; membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyiapkan salinannya,

In addition to the above duties, the Board of Commissioners also has 10 (ten) responsibilities as stipulated in the Board of Commissioners Charter. These responsibilities include performing supervisory duties and providing advice to the Board of Directors for the interests of Bank BPD Bali in accordance with the Bank's intentions and objectives; taking minutes of the meetings of the Board of Commissioners and making



dan memberikan laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Tugas Dewan Komisaris lainnya adalah menyusun Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester, dan menyusun Laporan Manajemen dan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris yang disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.

copies thereof; and submitting reports to the GMS on the supervisory duties performed during the previous financial year.

Other duties of the Board of Commissioners are to prepare a report on supervision of the implementation of the Bank's business plan to the Financial Services Authority every semester, and to prepare a management report and supervision results of the Board of Commissioners to be submitted to Bank Indonesia not later than 4 (four) months after the end of the financial year.

Komposisi Dewan Komisaris

Composition of the Board of Commissioners

Anggaran Dasar dan Pedoman GCG Bank BPD Bali menetapkan bahwa anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Ketentuan ini selaras dengan POJK Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Anggota Dewan Komisaris terdiri atas Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen dimana jumlah Komisaris Independen paling sedikit 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

The Articles of Association and GCG Guidelines of Bank BPD Bali stipulate that the number of members of the Board of Commissioners shall be at least 3 (three) and at most equal to the number of members of the Board of Directors. This provision is in line with the POJK on the Implementation of Governance for Commercial Banks. The members of the Board of Commissioners are composed of Independent Commissioners and Non-Independent Commissioners, where the number of Independent Commissioners is at least 50% of the number of members of the Board of Commissioners.

Bank menetapkan dalam anggaran dasar mengenai periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 5 (lima) tahun untuk 1 (satu) periode masa jabatan yang dimulai sejak tanggal efektif pengangkatan anggota Dewan Komisaris oleh RUPS, serta menetapkan kondisi lain dalam pemenuhan jabatan anggota Dewan Komisaris.

The Bank shall determine in the Articles of Association the term of office of the members of the Board of Commissioners for a maximum of 5 (five) years for 1 (one) term from the effective date of the appointment of the members of the Board of Commissioners by the GMS and shall determine other conditions for the performance of the duties of the members of the Board of Commissioners.

Penjelasan lebih lengkap terkait dengan susunan Dewan Komisaris termasuk didalamnya informasi terkait dasar pengangkatan, masa jabatan, dan periode jabatan diringkas pada tabel berikut ini:

A more complete explanation of the composition of the Board of Commissioners, including information regarding basis of appointment, term and tenure, is summarized in the following table:

Susunan Dewan Komisaris Per 31 Desember 2024

Composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term	Periode Jabatan Tenure
I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.	Komisaris Utama	Keputusan RUPS Luar Biasa Sirkuler pada 22 November 2023 yang dikuatkan dalam Akta No. 38 tanggal 22 November 2023	22 November 2023 - RUPS 2027	Pertama
	<i>President Commissioner</i>	<i>Circular EGMS resolution on November 22, 2023, confirmed by Deed Number 38 on November 22, 2023</i>	<i>November 22, 2023 – GMS 2027</i>	<i>First</i>
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	Komisaris Non Independen	Keputusan RUPSLB Sirkuler pada 12 Mei 2023 yang dikuatkan dalam Akta Nomor 25 tanggal 12 Mei 2023	12 Mei 2023 - RUPS 2027	Keempat
	<i>Non Independent Commissioner</i>	<i>Circular EGMS resolution May 12, 2023 confirmed by Deed Number 25 on May 12, 2023</i>	<i>May 12, 2023 – GMS 2027</i>	<i>Fourth</i>
I Gede Darmawa, S.E., M.Si.	Komisaris Non Independen	Keputusan RUPSLB Sirkuler pada 12 Mei 2023 yang dikuatkan dalam Akta Nomor 25 tanggal 12 Mei 2023	12 Mei 2023 - RUPS 2027	Pertama
	<i>Non Independent Commissioner</i>	<i>Circular EGMS resolution May 12, 2023 confirmed by Deed Number 25 on May 12, 2023</i>	<i>May 12, 2023 – GMS 2027</i>	<i>First</i>

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term	Periode Jabatan Tenure
Insinyur Gede Arimbawa	Komisaris Independen	Keputusan RUPSLB Sirkuler pada 12 Mei 2023 yang dikukuhkan dalam Akta Nomor 25 tanggal 12 Mei 2023	12 Mei 2023 - RUPS 2027	Pertama
	<i>Independent Commissioner</i>	<i>Circular EGMS resolution May 12, 2023 confirmed by Deed Number 25 on May 12, 2023</i>	<i>May 12, 2023 – GMS 2027</i>	<i>First</i>
I Nyoman Suparsa Widana	Komisaris Independen	Keputusan RUPSLB Sirkuler pada 12 Mei 2023 yang dikukuhkan dalam Akta Nomor 25 tanggal 12 Mei 2023	12 Mei 2023 - RUPS 2027	Pertama
	<i>Independent Commissioner</i>	<i>Circular EGMS resolution May 12, 2023 confirmed by Deed Number 25 on May 12, 2023</i>	<i>May 12, 2023 – GMS 2027</i>	<i>First</i>

Penilaian Kelayakan dan Kepatutan Dewan Komisaris

Fit and Proper Assessment of the Board of Commissioners

OJK melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan (LJK) termasuk di dalamnya Dewan Komisaris sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Pedoman GGCG Bank BPD Bali menetapkan bahwa Anggota Dewan Komisaris merupakan orang perseorangan yang memenuhi persyaratan dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

OJK, as regulated by POJK No. 27/POJK.03/2016, conducts a fit and proper assessment for key parties of financial service institutions (LJK), including the Board of Commissioners. According to these regulations, the GGCG Guidelines of Bank BPD Bali stipulate that the members of the Board of Commissioners are persons who meet the requirements and have received approval from the Financial Services Authority.

Adapun tabel status uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilakukan oleh OJK terhadap Dewan Komisaris Bank yang menjabat hingga 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

The table of fit and proper test status conducted by OJK on the Bank's Board of Commissioners serving until December 31, 2024 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Status Kelulusan Graduation Status	Dasar Hukum Uji Kelayakan dan Kepatutan Legal Basis for the Fit and Proper Test
I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	Lulus <i>Passed</i>	Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEPR-125/D.03/2023 tanggal 9 Oktober 2023 <i>OJK Board of Commissioners Decree No. KEPR-125/D.03/2023 of October 9, 2023</i>
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	Komisaris Non Independen <i>Non Independent Commissioner</i>	Lulus <i>Passed</i>	Akta Nomor 47 (empat puluh tujuh) tanggal 22 Februari 2023 yang telah menetapkan dan memperpanjang masa jabatan Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H., sebagai Komisaris Non Independen PT Bank Pembangunan Daerah Bali periode 13 Mei 2023 sampai dengan 13 Mei 2027 dan surat Nomor S-25/KR.081/2023 tanggal 2 Mei 2023 Hal: Pengangkatan Kembali Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali. <i>Deed No. 47 (forty-seven) dated February 22, 2023 which determined and extended the term of office of Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H., as a Non-Independent Commissioner of PT Bank Pembangunan Daerah Bali for the period from May 13, 2023 to May 13, 2027 and Letter No. S-25/KR.081/2023 dated May 2, 2023 Subject: Re-appointment of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT Bank Pembangunan Daerah Bali.</i>
I Gede Darmawa, S.E., M.Si.	Komisaris Non Independen <i>Non Independent Commissioner</i>	Lulus <i>Passed</i>	Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEPR-27/D.03/2023 tanggal 4 Mei 2023 <i>OJK Board of Commissioners Decree No. KEPR-27/D.03/2023 of May 4, 2023</i>
Insinyur Gede Arimbawa	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Lulus <i>Passed</i>	Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK KEPR-28/D.03/2023 tanggal 4 Mei 2023 <i>OJK Board of Commissioners Decree No. KEPR-28/D.03/2023 of May 4, 2023</i>
I Nyoman Suparsa Widana	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Lulus <i>Passed</i>	Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEPR-26/D.03/2023 tanggal 4 Mei 2023 <i>OJK Board of Commissioners Decree No. KEPR-26/D.03/2023 of May 4, 2023</i>



Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama

Duties and Responsibilities of the President Commissioner

Komisaris Utama sebagai koordinator Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang dijelaskan di Anggaran Dasar. Komisaris Utama berhak dan berwenang bertindak dan atas nama Dewan Komisaris. Komisaris Utama juga berkewajiban memimpin rapat. Namun demikian, jika berhalangan hadir, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.

The President Commissioner, as the coordinator of the Board of Commissioners, shall have the duties and responsibilities set forth in the Articles of Incorporation. The President Commissioner has the right and authority to act on behalf of the Board of Commissioners. The President Commissioner is also required to preside at meetings. However, if the President Commissioner is unable to attend, the meeting shall be presided over by one of the other members of the Board of Commissioners.

Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Dewan Komisaris

Duties and Responsibilities of Each Commissioner

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Bank BPD Bali yang sesuai dengan maksud dan tujuan Bank. Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Each member of the Board of Commissioners shall act in good faith, prudence and responsibility in performing the duties of supervising and advising the Board of Directors for the interests of Bank BPD Bali in accordance with the Bank's purposes and objectives. The duties and responsibilities of each member of the Board of Commissioners are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Bidang Penugasan Field of Assignment
I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.	Komisaris Utama President Commissioner	Ketua Komite Audit, Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Chairman of the Audit Committee, Member of the Remuneration and Nomination Committee
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	Komisaris Non Independen Non Independent Commissioner	Anggota Komite Pemantau Risiko, Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Member of the Risk Monitoring Committee, Member of the Remuneration and Nomination Committee
I Gede Darmawa	Komisaris Non Independen Non Independent Commissioner	Anggota Komite Pemantau Risiko, Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Member of the Risk Monitoring Committee, Member of the Remuneration and Nomination Committee
Insinyur Gede Arimbawa	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ketua Komite Pemantau Risiko, Anggota Komite Audit, Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Chairman of the Risk Monitoring Committee, Member of the Audit Committee, Member of the Remuneration and Nomination Committee
I Nyoman Suparsa Widana	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi, Anggota Komite Audit Chairman of the Remuneration and Nomination Committee, Member of the Audit Committee

Sertifikasi Anggota Dewan Komisaris

Certification of the Members of the Board of Commissioners

Dewan Komisaris Bank BPD Bali dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas pengelolaan Bank serta pemberian nasehat kepada Direksi didukung oleh beragam sertifikasi yang dimiliki sebagai berikut:

The Board of Commissioners of Bank BPD Bali, in fulfilling its duties and responsibilities in supervising the Bank's management and advising the Board of Directors, is assisted by various certifications as listed below:

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Sertifikasi Certification Type	Tahun Perolehan Sertifikasi Year of Certification
I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.	Komisaris Utama President Commissioner	Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Kualifikasi 7 Banking Risk Management Level Qualification 7	2024
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	Komisaris Non Independen Non Independent Commissioner	Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 6 Tanpa Berjenjang Risk Management Certification Level 6 Fast Track	2024
I Gede Darmawa, S.E., M.Si.	Komisaris Non Independen Non Independent Commissioner	Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 6 Tanpa Berjenjang Risk Management Certification Level 6 Fast Track	2024
Insinyur Gede Arimbawa	Komisaris Independen Independent Commissioner	Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Kualifikasi 7 Banking Risk Management Level Qualification 7	2024
I Nyoman Suparsa Widana	Komisaris Independen Independent Commissioner	Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 6 Tanpa Berjenjang Risk Management Certification Level 6 Fast Track	2024

Jenis Keputusan yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris

Types of Decisions Requiring the Approval of the Board of Commissioners

Berpedoman pada Anggaran Dasar dan *Board Manual* Dewan Komisaris, Dewan Komisaris memberikan persetujuan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja Bank yang terdiri dari 1). Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP); 2). Rencana Bisnis Bank (RBB); 3). Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP); dan Rencana Kerja lainnya yang disiapkan oleh Direksi Perseroan. Dewan Komisaris juga meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.

Based on the Articles of Association and the Board of Commissioners' Manual, the Board of Commissioners approves and oversees the implementation of Bank's work plan, which consists of 1). Long Term Corporate Plan (RJPP); 2). The Bank's Business Plan (RBB); 3). The Bank's Work Plan and Budget (RKAP); and other work plans prepared by the Bank's Board of Directors. The Board of Commissioners also examines and reviews the Annual Report prepared by the Board of Directors and signs the Annual Report.

Dewan Komisaris juga memberikan persetujuan atas Buku Pedoman Perseroan (BPP) dan *Internal Audit Charter*. Selain itu, Dewan Komisaris juga memberikan pertimbangan, masukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Direksi (KUD).

The Audit Committee also approves the Company's policies (BPP) and the Internal Audit Charter. In addition, the Chairman's Committee provides considerations and input in the preparation of the Board of Directors' General Policy (KUD).

Rapat Dewan Komisaris

Meetings of the Board of Commissioners

Selaras dengan POJK Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Piagam Dewan Komisaris mewajibkan penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Komisaris Non Independen yang tidak dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris secara fisik dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi.

In accordance with POJK on the Implementation of Governance for Commercial Banks, the Board of Commissioners Charter requires the holding of regular meetings of the Board of Commissioners at least 1 (one) time in 2 (two) months. The implementation of the Board of Commissioners meeting must be physically attended by all members of the Board of Commissioners at least 2 (two) times in 1 (one) year. Non-Independent Commissioners who are unable to physically attend the Board of Commissioners meeting may attend the Board of Commissioners meeting in person using information technology.



Pemanggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama dengan mencantumkan acara/agenda, tanggal, waktu, dan tempat rapat. Materi rapat harus diberikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum rapat berlangsung sehingga memberikan kesempatan kepada Dewan Komisaris untuk menelaah informasi dan/atau meminta informasi tambahan sebelum rapat.

Rapat dinyatakan sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam rapat. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Tingkat kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam rapat internal Dewan Komisaris, RUPST, dan RUPSLB tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Notice of the Board of Commissioners meeting shall be given by the President Commissioner stating the event/agenda, date, time and place of the meeting. Meeting materials must be provided to the Board of Commissioners at least 2 (two) business days prior to the meeting to allow the Board of Commissioners to review the information and/or request additional information prior to the meeting.

The meeting shall be declared valid and have the right to make binding decisions if more than ½ (one half) of the total number of members of the Board of Commissioners are present or represented at the meeting. Each member of the Board of Commissioners is entitled to cast 1 (one) vote and to cast an additional 1 (one) vote for another member of the Board of Commissioners whom he represents.

Decision-making at the Board of Commissioners meeting must first be based on deliberation for consensus. If consensus cannot be reached, the decision of the Board of Commissioners shall be made by majority vote.

The level of participation of each member of the Board of Commissioners in the internal meetings of the Board of Commissioners, the AGMS, and the EGMS in 2024 shall be as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Internal Internal Meeting			RUPST 2024 2024 AGMS	RUPSLB 2024 2024 EGMS
		Jumlah Rapat Number of Meeting	Kehadiran Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Level	Kehadiran Attendance	Kehadiran Attendance
I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.	Komisaris Utama Independen President Commissioner and Independent Commissioner	28	28	100%	√	√
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	Komisaris Non Independen Non Independent Commissioner	28	27	96,43%	√	√
I Gede Darmawa	Komisaris Non Independen Non Independent Commissioner	28	28	100%	√	√
Insinyur Gede Arimbawa	Komisaris Independen Independent Commissioner	28	28	100%	√	√
I Nyoman Suparsa Widana	Komisaris Independen Independent Commissioner	28	28	100%	√	√
Rata-rata Kehadiran Average Attendance			27,80	99,29%		

Risalah Rapat Dewan Komisaris

Minutes of the Board of Commissioners Meetings

Pedoman GCG dan Piagam Dewan Komisaris Bank Bali mewajibkan Dewan Komisaris untuk membuat risalah rapat dewan Komisaris dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Risalah rapat tersebut mencakup segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris termasuk pendapat yang berbeda. Tabel berikut menjelaskan risalah rapat Dewan Komisaris selama tahun 2024:

The GCG Guidelines and the Charter of the Board of Commissioners of Bank Bali require the Board of Commissioners to take minutes of the meetings of the Board of Commissioners and to document them in accordance with the provisions of the law. Everything discussed and decided in the Board of Commissioners meeting, including dissenting opinions, is recorded in the minutes. The minutes of the Board of Commissioners meetings in 2024 are explained in the following table:

No	Tanggal Date	Agenda	Peserta Participants				
			IGNBA	WBT	IGD	IGA	INSW
1	23 Jan 2024 Jan 23, 2024	Pembahasan Kajian Remunerasi Pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2024. Discussion on the review of the remuneration of the Management of PT Bank Pembangunan Daerah Bali in 2024.	√	√	√	√	√
2	2 Feb 2024 Feb 2, 2024	Pembahasan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2023. Discussion on the Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners in 2023.	√	√	√	√	√
3	19 Feb 2024 Feb 19, 2024	Pembahasan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan kepada Pengurus dan Karyawan Bank BPD Bali. Discussion on the provision of religious holiday allowance to the management and employees of Bank BPD Bali.	√	√	√	√	√
4	7 Mar 2024 March 7, 2024	Pembahasan Pemberian Bonus Kepada Pihak Independen Komite Dewan Komisaris. Discussion on the provision of bonuses to independent parties of the Board of Commissioners Committee.	√	√	√	√	√
5	19 Mar 2024 March 19, 2024	Pembahasan Calon Kepala SKAI & Anti Fraud PT Bank Pembangunan Daerah Bali. Discussion on the candidates for Head of SKAI & Anti-Fraud of PT Bank Pembangunan Daerah Bali.	√	√	√	√	√
6	3 Apr 2024 Apr 3, 2024	Pembahasan Draft Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direksi Nomor 133/KEP/DIR/DJA/2013 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dana dan Jasa. Discussion on the draft of the third amendment to the Board of Directors' Regulation No. 133/KEP/DIR/DJA/2013 on the Business Policy (BPP) for Funds and Services.	√	√	√	√	√
7	19 Apr 2024 Apr 19, 2024	Pembahasan Penyesuaian Nilai Konjungtur Dalam Menyusun Perhitungan Gaji Karyawan Tahun 2024. Discussion of the adjustment of the conjunctive values in the calculation of employees' salaries in 2024.	√	√	√	√	√
8	7 Mei 2024 May 7, 2024	Pembahasan Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategi Divisi SDM. Discussion of the monitoring and evaluation of the Strategic Plan of the Human Resources Department.	√	-	√	√	√
9	4 Jun 2024 June 4, 2024	Pembahasan Evaluasi Struktur Keanggotaan Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali. Discussion on the evaluation of the membership structure of the Board of Commissioners Committee of PT Bank Pembangunan Daerah Bali.	√	√	√	√	√
10	20 Jun 2024 June 20, 2024	Pembahasan Pemberian Tambahan Penghasilan. Discussion of Additional Income Provision.	√	√	√	√	√



No	Tanggal Date	Agenda	Peserta Participants				
			IGNBA	WBT	IGD	IGA	INSW
11	29 Jul 2024 Jul 29, 2024	Pembahasan: 1. Draft Keputusan Direksi tentang Buku Pedoman Perusahaan Sekretaris Perusahaan. 2. Draft Keputusan Direksi tentang Buku Pedoman Perusahaan Pelindungan Konsumen. Discussion: 1. Draft decision of the Board of Directors on the Corporate Secretary's guidelines. 2. Draft Resolution of the Board of Directors on the Corporate Policy on Consumer Protection.	√	√	√	√	√
12	31 Jul 2024 Jul 31, 2024	Pembahasan: 1. Laporan Penilaian Hasil Maturitas Digital Bank BPD Bali Tahun 2023. 2. Draft Keputusan Direksi tentang Buku Pedoman Perusahaan Penerapan Tata Kelola. Discussion: 1. Report on Assessment of Digital Maturity Results of Bank BPD Bali in 2023. 2. Draft Decision of the Board of Directors on Corporate Guidelines for Implementation of Corporate Governance.	√	√	√	√	√
13	15 Agu 2024 Aug 15, 2024	Pembahasan Draft Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank Semester I Tahun 2024. Discussion on the Draft Report on Supervision of the Bank's Business Plan for Semester I of 2024.	√	√	√	√	√
14	23 Agu 2024 Aug 23, 2024	Pembahasan Draft Keputusan Direksi tentang Buku Pedoman Perusahaan Prekredit. Discussion of the Draft Decision of the Board of Directors on the Corporate Guidelines on Precredit.	√	√	√	√	√
15	27 Agu 2024 Aug 27, 2024	Pembahasan Evaluasi/penilaian kinerja dan perilaku kerja Anggota Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali. Discussion on the Evaluation/Assessment of the Performance and Work Behavior of the Members of the Board of Commissioners Committee of PT Bank Pembangunan Daerah Bali.	√	√	√	√	√
16	18 Sep 2024 Sep 18, 2024	Pembahasan: 1. Kebijakan Umum Direksi (KUD) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025. 2. Pemberian Fasilitas Pakaian Dinas Pengurus Tahun 2025. Discussion: 1. General Policy of the Board of Directors (KUD) of PT Bank Pembangunan Daerah Bali in 2025. 2. Provision of Official Uniform Facilities for the 2025 Management.	√	√	√	√	√
17	3 Okt 2024 Oct 3, 2024	Pembahasan pencapaian kinerja Bank BPD Bali dan hal-hal strategis lainnya. Discussion on the performance achievements of Bank BPD Bali and other strategic matters.	√	√	√	√	√
18	11 Okt 2024 Oct 11, 2024	Pembahasan Draft Keputusan Direksi tentang Buku Pedoman Perusahaan Audit Berbasis Risiko dan Strategi Anti Fraud. Discussion on the draft of the Board of Directors' decision on the risk-based audit firm policy and anti-fraud strategy.	√	√	√	√	√
19	22 Okt 2024 Oct 22, 2024	Pembahasan Simulasi Perhitungan Peningkatan Manfaat Pensiun. Discussion on simulation of calculation of increased pension benefits.	√	√	√	√	√

No	Tanggal Date	Agenda	Peserta Participants				
			IGNBA	WBT	IGD	IGA	INSW
20	31 Okt 2024	Pembahasan Evaluasi/Penilaian Kinerja dan Perilaku Kerja Anggota Komite Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali.	√	√	√	√	√
	Oct 31, 2024	Discussion on the performance evaluation/assessment and work conduct of the members of the Board of Commissioners Committee of PT Bank Pembangunan Daerah Bali.					
21	12 Nov 2024	Pembahasan: 1. Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025-2027. 2. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025-2029.	√	√	√	√	√
	Nov 12, 2024	Discussion: 1. Bank Business Plan of PT Bank Pembangunan Daerah Bali for 2025-2027. 2. Sustainable Financial Action Plan of PT Bank Pembangunan Daerah Bali for 2025-2029.					
22	13 Nov 2024	Pembahasan: 1. Persetujuan Draft Keputusan Direksi tentang Buku Pedoman Perusahaan Pedoman Penyusunan Peraturan Perusahaan. 2. Persetujuan Draft Keputusan Direksi tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0680/KEP/DIR/TIF/2023 tentang Buku Pedoman Perusahaan Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi.	√	√	√	√	√
	Nov 13, 2024	Discussion: 1. Approval of the Draft Decision of the Board of Directors on the Company Guidelines for the Preparation of Company Regulations. 2. Approval of the Draft Resolution of the Board of Directors on the Amendments to the Resolution of the Board of Directors No. 0680/KEP/DIR/TIF/2023 on the Company					
23	19 Nov 2024	Pembahasan Persetujuan Dokumen Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan Pedoman Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) PT Bank Pembangunan Daerah Bali.	√	√	√	√	√
	Nov 19, 2024	Discussion on Approval of Recovery Plan Document of PT Bank Pembangunan Daerah Bali and Recovery Plan Guidelines of PT Bank Pembangunan Daerah Bali.					
24	9 Des 2024	Pembahasan Persetujuan Pemberian Tambahan Penghasilan Momen Akhir Tahun.	√	√	√	√	√
	Dec 9, 2024	Discussion on the approval of the Additional Income Provision at the End of the Year.					
25	9 Des 2024	Pembahasan Persetujuan Draft Keputusan Direksi tentang Buku Pedoman Perusahaan Pedoman Penyusunan Peraturan Perusahaan.	√	√	√	√	√
	Dec 9, 2024	Discussion on the approval of the draft resolution of the Board of Directors on the Company Guidelines for the Preparation of Company Regulations.					
26	17 Des 2024	Pembahasan Draft Keputusan Direksi tentang Buku Pedoman Perusahaan Akuntansi.	√	√	√	√	√
	Dec 17, 2024	Discussion of the Draft Decision of the Board of Directors on the Company's Accounting Guidelines.					
27	27 Des 2024	Pembahasan Program Kerja Dewan Komisaris dan Komite PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025.	√	√	√	√	√
	Dec 27, 2024	Discussion on the Work Program of the Board of Commissioners and Committees of PT Bank Pembangunan Daerah Bali in 2025.					
28	30 Des 2024	Pembahasan Persetujuan Draft Keputusan Direksi tentang Buku Pedoman Perusahaan Perpajakan.	√	√	√	√	√
	Dec 30, 2024	Discussion on the approval of the draft resolution of the Board of Directors on the Corporate Taxation Guidelines.					



Program Orientasi Dewan Komisaris

Board of Commissioners Orientation Program

Bank belum memiliki Program Pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat. Namun demikian, Bank BPD Bali berkomitmen untuk mempersiapkan dokumen tersebut dalam rangka perbaikan penerapan Tata Kelola Bank.

The Bank does not yet have an orientation program for the newly appointed members of the Board of Commissioners. However, BPD Bali is committed to prepare the document to improve Bank Governance implementation.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Training and Competency Development of the Board of Commissioners

Bank BPD Bali memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris untuk mengikuti *workshop*, seminar, dan penyegaran (*refreshment*) yang diselenggarakan oleh BSMR/LSPS untuk kelulusan Sertifikasi Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan.

Bank BPD Bali provides opportunities for the members of the Board of Commissioners to attend workshops, seminars and refreshments organized by BSMR/LSPS for the completion of the Risk Management Certification in accordance with the regulations.

Anggota dewan Komisaris berkomitmen mengikuti beragam fasilitas pengembangan kompetensi yang disediakan oleh Bank sebagaimana yang ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Members of the Board of Commissioners are required to participate in various skill development facilities provided by the Bank as shown in the table below:

Pelatihan & Pengembangan Kompetensi Training and Competency Development		
Nama Name	Tempat & Waktu Place & Time	Penyelenggara Organizer
I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H. Komisaris Utama Independen <i>President Commissioner and Independent Commissioner</i>		
<i>Webinar Start Strong 2024 "Proven Strategis to Early Start and Achieve Your First Semester"</i>	Bali, 14 Jan 2024	Bank BPD Bali
Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 <i>Risk Management Recertification Briefing Level 7</i>	Zoom Meeting, 6 dan 7 Mar 2024	Leadership Nasional Asia (LNA)
<i>Workshop Business Management Executive Review</i>	Denpasar, 10 May 2024	Sinergi Indonesia Pintar (SIP)
Workshop "Membangun Sinergi Unit Kerja APU-PPT & Manajemen Risiko: Implementasi Risk Assessment dalam Penerapan APU-PPT <i>Workshop "Building Synergy of APU-PPT & Risk Management Work Units Implementing Risk Assessment in APU-PPT Implementation</i>	Jakarta, 30-31 May 2024	Learning Media Indonesia (LMI)
Penyetaraan dan Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 <i>Equalization and Alignment of Risk Management Certification Level 7</i>	Jakarta, 11 -13 Jun 2024	BSMR
Seminar Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris atas Program APU, PPT & PPPSPM (Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal) <i>Seminar on the Implementation of the Board of Commissioners' Oversight Function for the APU, PPT & PPPSPM Programs (Anti-Money Laundering, Prevention of Financing of Terrorism and Proliferation of Weapons of Mass Destruction)</i>	Batam, 18 Jul 2024	FKDK BPDSI
<i>Focus Group Discussion (FGD) dengan Kejaksaan Tinggi Bali & BAS LAW FIRM tentang;</i> 1. <i>Fraud Dalam Dunia Perbankan.</i> 2. <i>Permasalahan dalam implementasi alih media dari Sertifikat Hak Milik (SHM) konvensional menjadi sertifikat elektronik pada Perjanjian Kredit oleh BAS LAW FIRM</i>	Bali, 25 Jul 2024	Bank BPD Bali
<i>Focus Group Discussion (FGD) with Bali Attorney General's Office & BAS LAW FIRM on</i> 1. <i>Fraud in the banking world.</i> 2. <i>Problems in the implementation of media transfer from conventional Certificate of Ownership (SHM) to electronic certificates in credit agreements by BAS LAW FIRM</i>		

Pelatihan & Pengembangan Kompetensi Training and Competency Development		
Nama Name	Tempat & Waktu Place & Time	Penyelenggara Organizer
Workshop Business and Economic Outlook 2025	Surabaya, 26 Jul 2024	Infobank Institute
Workshop Strategi Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi untuk Mensukseskan Transformasi Digital Bank	Bali, 21 Sep 2024	Bisaacademy / Solmit Akademi
Workshop on Information Technology Governance Implementation Strategy for Success in Bank Digital Transformation		
Seminar Nasional yang di selenggarakan oleh FKDK BPDSI) yang membahas: 1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2027, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 dan Optimalisasi Kas Daerah di BPD. 2. Pembahasan POJK Nomor 5 Tahun 2024 (Kewajiban Perbankan Untuk Menyusun <i>Recovery Plan</i>) dan PLPS Nomor 1 Tahun 2021 serta Nomor 2 Tahun 2024 (Kewajiban Perbankan Menyusun <i>Resolution Plan</i>).	Bali, 9 Oct 2024	FKDK BPDSI
National Seminar organized by FKDK BPDSI), which discussed: 1. Implementation of Government Regulation No. 54 of 2027, Regulation of the Minister of the Interior No. 37 of 2018 and optimization of regional cash in BPD. 2. Discussion of POJK Number 5 of 2024 (banking obligations to prepare a recovery plan) and PLPS Number 1 of 2021 and Number 2 of 2024 (banking obligations to prepare a resolution plan).		
Workshop dan Lokakarya Strategi Implementasi POJK Nomor 17 Tahun 2023 dan POJK Nomor 5 Tahun 2024 Implementation Strategy Workshop of POJK Number 17 of 2023 and POJK Number 5 of 2024	Mataram, 24 Oct 2024	FKDK BPDSI Wilayah Timur
Seminar Ekonomi Outlook 2025 dan Disiplin Eksekusi atas Rencana Bisnis Bank Berbasis Risiko Seminar on Economic Outlook 2025 and Disciplined Execution of Risk-Based Bank Business Plans	Surabaya, 23 Nov 2024	Infobank Institute
Mengikuti Seminar: 1. Implementasi <i>Market Conduct</i> Dalam Rangka Perlindungan Konsumen BPDSI. 2. Leadership Program bagi Dewan Komisaris BPDSI.	Jawa Tengah, 5 Dec 2024	FKDK BPDSI
Participation in seminars: 1. Implementation of Market Conduct under BPDSI Consumer Protection. 2. Leadership Program for BPDSI Board of Commissioners.		
Presentasi dari Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan terkait Integritas Pelaporan Keuangan Bank (POJK Nomor 15 Tahun 2024) Presentation by Auditing Firm Heliantono & Rekan on Integrity of Bank Financial Reporting (POJK No. 15 of 2024)	Bali, 23 Dec 2024	Bank BPD Bali
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H. Komisaris Non Independen Non Independent Commissioner		
Webinar Start Strong 2024 "Proven Strategies to Early Start and Achieve Your First Semester"	Bali, 14 Jan 2024	Bank BPD Bali
Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 Equivalence and Alignment of Level 6 Risk Management Certification	Zoom Meeting, 20 & 21 Feb 2024	Leadership Nasional Asia (LNA)
Penyetaraan dan Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 Risk Management Certification Level 6 Equivalence and Alignment	Jakarta, 28-31 May 2024	BSMR
Workshop "Strategi Implementasi POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum"	Manado, 5 Jul 2024	FKDK BPDSI Wilayah Timur
Workshop "Implementation Strategy of POJK Number 17 of 2023 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks"		

**Pelatihan & Pengembangan Kompetensi**
Training and Competency Development

Nama Name	Tempat & Waktu Place & Time	Penyelenggara Organizer
<i>Focus Group Discussion (FGD) dengan Kejaksaan Tinggi Bali & BAS LAW FIRM tentang;</i> <i>Fraud Dalam Dunia Perbankan.</i> <i>Permasalahan dalam implementasi alih media dari Sertifikat Hak Milik (SHM) konvensional menjadi sertifikat elektronik pada Perjanjian Kredit oleh BAS LAW FIRM</i> <i>Focus Group Discussion (FGD) with Bali Attorney General's Office & BAS LAW FIRM on</i> <i>Fraud in the banking world.</i> <i>Problems in the implementation of media transfer from conventional Certificate of Ownership (SHM) to electronic certificates in credit agreements by BAS LAW FIRM</i>	Bali, 25 Jul 2024	Bank BPD Bali
<i>Workshop Business and Economic Outlook 2025</i>	Surabaya, 26 Jul 2024	Infobank Institute
<i>Workshop Strategi Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi Untuk Mensukseskan Transformasi Digital Bank</i>	Bali, 21 Sep 2024	Bisaacademy / Solmit Akademi
<i>Workshop on Information Technology Governance Implementation Strategy for Success in Bank Digital Transformation</i>		
Seminar Nasional yang di selenggarakan oleh FKDK BPDSI) yang membahas: - Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2027, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 dan Optimalisasi Kas Daerah di BPD. - Pembahasan POJK Nomor 5 Tahun 2024 (Kewajiban Perbankan Untuk Menyusun <i>Recovery Plan</i>) dan PLPS Nomor 1 Tahun 2021 serta Nomor 2 Tahun 2024 (Kewajiban Perbankan Menyusun <i>Resolution Plan</i>). <i>National Seminar organized by FKDK BPDSI), which discussed:</i> <i>Implementation of Government Regulation No. 54 of 2027, Regulation of the Minister of the Interior No. 37 of 2018 and optimization of regional cash in BPD.</i> <i>Discussion of POJK Number 5 of 2024 (Obligations of banks to prepare a recovery plan) and PLPS Number 1 of 2021 and Number 2 of 2024 (Obligations of banks to prepare a resolution plan).</i>	Bali, 9 Oct 2024	FKDK BPDSI
<i>Workshop dan Lokakarya Strategi Implementasi POJK Nomor 17 Tahun 2023 dan POJK Nomor 5 Tahun 2024 Implementation Strategy Workshop of POJK Number 17 of 2023 and POJK Number 5 of 2024</i>	Mataram, 24 Oct 2024	FKDK BPDSI Wilayah Timur
<i>Seminar Ekonomi Outlook 2025 dan Disiplin Eksekusi atas Rencana Bisnis Bank Berbasis Risiko Seminar on Economic Outlook 2025 and Disciplined Execution of Risk-Based Bank Business Plans</i>	Surabaya, 23 Nov 2024	Infobank Institute
Mengikuti Seminar: - Implementasi <i>Market Conduct</i> dalam Rangka Perlindungan Konsumen BPDSI. <i>Leadership Program</i> bagi Dewan Komisaris BPDSI. <i>Participation in seminars:</i> <i>Implementation of Market Conduct under BPDSI Consumer Protection.</i> <i>Leadership Program for BPDSI Board of Commissioners.</i>	Jawa Tengah, 5 Dec 2024	FKDK BPDSI
<i>Workshop Penerapan POJK Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank Workshop on Implementation of POJK Number 15 of 2024 Concerning Integrity of Bank Financial Reporting</i>	Bali, 20 Dec 2024	Bank BPD Bali
<i>Presentasi dari Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan terkait Integritas Pelaporan Keuangan Bank (POJK Nomor 15 Tahun 2024).</i>	Bali, 23 Dec 2024	Bank BPD Bali
<i>Presentation by Auditing Firm Heliantono & Rekan on Integrity of Bank Financial Reporting (POJK No. 15 of 2024).</i>		
I Gede Darmawa Komisaris Non Independen Non Independent Commissioner		
<i>Webinar Start Strong 2024 "Proven Strategies to Early Start and Achieve Your First Semester"</i>	Bali, 14 Jan 2024	Bank BPD Bali
<i>Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 Risk Management Recertification Training Level 6</i>	<i>Zoom Meeting</i> , 20 & 21 Feb 2024	Leadership Nasional Asia (LNA)
<i>Penyetaraan dan Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 Risk Management Certification Level 6 Equivalence and Alignment</i>	Jakarta, 28-31 May 2024	BSMR
<i>Workshop" Strategi Implementasi POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum".</i> <i>Workshop "Implementation Strategy of POJK Number 17 of 2023 on the Implementation of Governance for Commercial Banks".</i>	Manado, 5 Jul 2024	FKDK BPDSI Wilayah Timur

Pelatihan & Pengembangan Kompetensi Training and Competency Development		
Nama Name	Tempat & Waktu Place & Time	Penyelenggara Organizer
Workshop Business and Economic Outlook 2025	Surabaya, 26 Jul 2024	Infobank Institute
Workshop Strategi Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi Untuk Mensukseskan Transformasi Digital Bank	Bali, 21 Sep 2024	Bisaacademy / Solmit Akademi
Workshop on Information Technology Governance Implementation Strategy for Success in Bank Digital Transformation		
Seminar Nasional yang di selenggarakan oleh FKDK BPDSI) yang membahas: 1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2027, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 dan Optimalisasi Kas Daerah di BPD. 2. Pembahasan POJK Nomor 5 Tahun 2024 (Kewajiban Perbankan Untuk Menyusun <i>Recovery Plan</i>) dan PLPS Nomor 1 Tahun 2021 serta Nomor 2 Tahun 2024 (Kewajiban Perbankan Menyusun <i>Resolution Plan</i>).	Bali, 9 Oct 2024	FKDK BPDSI
National Seminar organized by FKDK BPDSI), which discussed: 1. Implementation of Government Regulation No. 54 of 2027, Regulation of the Minister of the Interior No. 37 of 2018 and optimization of regional cash in BPD. 2. Discussion of POJK Number 5 of 2024 (Obligations of banks to prepare a recovery plan) and PLPS Number 1 of 2021 and Number 2 of 2024 (Obligations of banks to prepare a resolution plan).		
Workshop dan Lokakarya Strategi Implementasi POJK Nomor 17 Tahun 2023 dan POJK Nomor 5 Tahun 2024 Implementation Strategy Workshop of POJK Number 17 of 2023 and POJK Number 5 of 2024	Mataram, 24 Oct 2024	FKDK BPDSI Wilayah Timur
Workshop Penerapan POJK Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank Workshop on Implementation of POJK Number 15 of 2024 Concerning Integrity of Bank Financial Reporting	Bali, 20 Dec 2024	Bank BPD Bali
Presentasi dari Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan terkait Integritas Pelaporan Keuangan Bank (POJK Nomor 15 Tahun 2024).	Bali, 23 Dec 2024	Bank BPD Bali
Presentation by Auditing Firm Heliantono & Rekan on Integrity of Bank Financial Reporting (POJK No. 15 of 2024).		
Insinyur Gede Arimbawa Komisaris Independen Independent Commissioner		
Webinar Start Strong 2024 "Proven Strategies to Early Start and Achieve Your First Semester"	Bali, 14 Jan 2024	Bank BPD Bali
Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Equalization and Alignment of Risk Management Certification Level 7	Zoom Meeting, 6 & 7 Mar2024	Leadership Nasional Asia (LNA)
Workshop "Membangun Sinergi Unit Kerja APU-PPT & Manajemen Risiko: Implementasi Risk Assessment dalam Penerapan APU-PPT	Jakarta, 30-31 May 2024	Learning Media Indonesia (LMI)
Workshop "Building Synergy of AML-CFT Work Units & Risk Management: Implementation of Risk Assessment in AML-CFT Implementation		
Penyetaraan dan Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 Equalization and Alignment of Risk Management Certification Level 7	Jakarta, 11 s.d 13 Jun 2024	BSMR
Seminar Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris atas Program APU, PPT & PPPSPM (Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorismen dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal)	Batam, 18 Jul 2024	FKDK BPDSI
Seminar on the Implementation of the Board of Commissioners' Oversight Function for the APU, PPT & PPPSPM Programs (Anti-Money Laundering, Prevention of Financing of Terrorism and Proliferation of Weapons of Mass Destruction)		

**Pelatihan & Pengembangan Kompetensi**
Training and Competency Development

Nama Name	Tempat & Waktu Place & Time	Penyelenggara Organizer
<i>Focus Group Discussion (FGD) dengan Kejaksaan Tinggi Bali & BAS LAW FIRM tentang;</i> <i>Fraud dalam Dunia Perbankan.</i> <i>Permasalahan dalam implementasi alih media dari Sertifikat Hak Milik (SHM) konvensional menjadi sertifikat elektronik pada Perjanjian Kredit oleh BAS LAW FIRM</i> <i>Focus Group Discussion (FGD) with Bali Attorney General's Office & BAS LAW FIRM on</i> <i>Fraud in the banking world.</i> <i>Problems in the implementation of media transfer from conventional Certificate of Ownership (SHM) to electronic certificates in credit agreements by BAS LAW FIRM</i>	Bali, 25 Jul 2024	Bank BPD Bali
<i>Workshop Business and Economic Outlook 2025</i>	Surabaya, 26 Jul 2024	Infobank Institute
<i>Workshop Strategi Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi untuk Mensukseskan Transformasi Digital Bank.</i> <i>Workshop on Information Technology Governance Implementation Strategy for Success in Bank Digital Transformation.</i>	Bali, 21 Sep 2024	Bisaacademy / Solmit Akademi
Seminar Nasional yang di selenggarakan oleh FKDK BPDSI) yang membahas: - Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2027, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 dan Optimalisasi Kas Daerah di BPD. - Pembahasan POJK Nomor 5 Tahun 2024 (Kewajiban Perbankan Untuk Menyusun <i>Recovery Plan</i>) dan PLPS Nomor 1 Tahun 2021 serta Nomor 2 Tahun 2024 (Kewajiban Perbankan Menyusun <i>Resolution Plan</i>). <i>National Seminar organized by FKDK BPDSI), which discussed:</i> <i>Implementation of Government Regulation No. 54 of 2027, Regulation of the Minister of the Interior No. 37 of 2018 and optimization of regional cash in BPD.</i> <i>Discussion of POJK Number 5 of 2024 (Obligations of Banks to Prepare Recovery Plans) and PLPS Number 1 of 2021 and Number 2 of 2024 (Obligations of Banks to Prepare Resolution Plans).</i>	Bali, 9 Oct 2024	FKDK BPDSI
<i>Workshop Penerapan POJK Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank.</i> <i>Workshop on the Implementation of POJK Number 15 of 2024 on Integrity of Financial Reporting of Banks.</i>	Bali, 20 Dec 2024	Bank BPD Bali
Presentasi dari Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan terkait Integritas Pelaporan Keuangan Bank (POJK Nomor 15 Tahun 2024). <i>Presentation by Auditing Firm Heliantono & Rekan on Integrity of Bank Financial Reporting (POJK No. 15 of 2024).</i>	Bali, 23 Dec 2024	Bank BPD Bali
I Nyoman Suparsa Widana Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>		
<i>Webinar Start Strong 2024 "Proven Strategies to Early Start and Achieve Your First Semester"</i>	Bali, 14 Jan 2024	Bank BPD Bali
Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 <i>Risk Management Recertification Training Level 6</i>	Zoom Meeting, 20 dan 21 Feb 2024	Leadership Nasional Asia (LNA)
Penyetaraan dan Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 <i>Equalization and Alignment of Risk Management Certification Level 7</i>	Jakarta, 28 s.d 31 May 2024	BSMR
Seminar Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris atas Program APU, PPT & PPPSPM (Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorismen dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal). <i>Seminar on the Implementation of the Board of Commissioners' Oversight Function for the APU, PPT & PPPSPM Programs (Anti-Money Laundering, Prevention of Financing of Terrorism and Proliferation of Weapons of Mass Destruction).</i>	Batam, 18 Jul 2024	FKDK BPDSI

Pelatihan & Pengembangan Kompetensi Training and Competency Development		
Nama Name	Tempat & Waktu Place & Time	Penyelenggara Organizer
<i>Focus Group Discussion (FGD) dengan Kejaksaan Tinggi Bali & BAS LAW FIRM tentang:</i> <i>Fraud dalam Dunia Perbankan.</i> <i>Permasalahan dalam implementasi alih media dari Sertifikat Hak Milik (SHM) konvensional menjadi sertifikat elektronik pada Perjanjian Kredit oleh BAS LAW FIRM</i> <i>Focus Group Discussion (FGD) with Bali Attorney General's Office & BAS LAW FIRM on</i> <i>Fraud in the banking world.</i> <i>Problems in the implementation of media transfer from conventional Certificate of Ownership (SHM) to electronic certificates in credit agreements by BAS LAW FIRM</i>	Bali, 25 Jul 2024	Bank BPD Bali
<i>Workshop Business and Economic Outlook 2025</i>	Surabaya, 26 Jul 2024	Infobank Institute
<i>Workshop Strategi Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi untuk Mensukseskan Transformasi Digital Bank.</i> <i>Workshop on Information Technology Governance Implementation Strategy for Success in Bank Digital Transformation.</i>	Bali, 21 Sep 2024	Bisaacademy / Solmit Akademi
Seminar Nasional yang di selenggarakan oleh FKDK BPDSI) yang membahas: - Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2027, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 dan Optimalisasi Kas Daerah di BPD. - Pembahasan POJK Nomor 5 Tahun 2024 (Kewajiban Perbankan Untuk Menyusun <i>Recovery Plan</i>) dan PLPS Nomor 1 Tahun 2021 serta Nomor 2 Tahun 2024 (Kewajiban Perbankan Menyusun <i>Resolution Plan</i>). <i>National Seminar organized by FKDK BPDSI), which discussed:</i> <i>Implementation of Government Regulation No. 54 of 2027, Regulation of the Minister of the Interior No. 37 of 2018 and optimization of regional cash in BPD.</i> <i>Discussion of POJK Number 5 of 2024 (Obligations of Banks to Prepare Recovery Plans) and PLPS Number 1 of 2021 and Number 2 of 2024 (Obligations of Banks to Prepare Resolution Plans).</i>	Bali, 9 Oct 2024	FKDK BPDSI
<i>Workshop dan Lokakarya Strategi Implementasi POJK Nomor 17 Tahun 2023 dan POJK Nomor 5 Tahun 2024.</i> <i>Workshop and Implementation Strategy Workshop of POJK Number 17 of 2023 and POJK Number 5 of 2024.</i>	Mataram, 24 Oct 2024	FKDK BPDSI Wilayah Timur
<i>Workshop Penerapan POJK Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank.</i> <i>Workshop on the Implementation of POJK Number 15 of 2024 on Integrity of Financial Reporting of Banks.</i>	Bali, 20 Dec 2024	Bank BPD Bali
Presentasi dari Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan terkait Integritas Pelaporan Keuangan Bank (POJK Nomor 15 Tahun 2024). <i>Presentation by Auditing Firm Heliantono & Rekan on Integrity of Bank Financial Reporting (POJK No. 15 of 2024).</i>	Bali, 23 Dec 2024	Bank BPD Bali

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Tahun 2024

Implementation of the Duties of the Board of Commissioners in 2024

Dewan Komisaris Bank BPD Bali telah menjalankan fungsi pengawasan atas pengelolaan Bank sebagaimana yang diatur dalam Piagam Dewan Komisaris. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- Pengawasan atas kinerja Direksi tahun 2024 dengan memperhatikan beberapa capaian kinerja Bank antara lain terkait penyaluran kredit, pertumbuhan kredit dan aset, kinerja rentabilitas dan rasio-rasio keuangan yang secara umum menunjukkan kinerja yang lebih baik pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.
- Penerapan atas tata kelola Bank yang mencakup 3 (tiga) aspek penilaian yakni *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome* dengan hasil *self assessment* GCG Bank memperoleh peringkat komposit "2" (Baik) yang mencerminkan dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip tata kelola.
- Pengawasan terhadap manajemen risiko Bank dengan perolehan nilai nilai komposit adalah 2 "*LowMod*", risiko *Inherent* memiliki nilai agregat "*LowMod*" dan kualitas penerapan manajemen risiko memiliki nilai agregat "Satisfactory" untuk tahun 2024 dengan memberikan masukan terkait pengelolaan SDM, IT dan frekuensi & materialitas *fraud* intern maupun ekstren dan mengakomodir penilaian OJK searah dengan SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk meningkatkan ketahanan dan keamanan siber Bank, meningkatkan *risk awareness* di segenap jajaran karyawan pada semua jenjang/tingkatan melalui program *risk culture* yang terstruktur dan berkesinambungan, karena hal tersebut menjadi kunci penting dalam pengendalian risiko melalui penerapan kontrol yang efektif.
- Pengawasan atas sistem pengendalian intern Bank dan dinyatakan memadai berdasarkan hasil penilaian Sistem Pengendalian Internal oleh SKAI & *Anti-Fraud* dengan memperhatikan 5 (lima) komponen pokok yakni Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian, Identifikasi dan Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi, Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan/Kelemahan. Dewan Komisaris mendorong agar sistem pengendalian berfungsi dengan baik perlu dilakukan peningkatan pada aspek Fungsi Kepatuhan, Fungsi Audit Internal, Rekomendasi Audit Eksternal, Penerapan Strategi *Anti-Fraud*, dan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPPSPM).

The Board of Commissioners of Bank BPD Bali has performed its supervisory function over the management of the Bank as stipulated in the Charter of the Board of Commissioners. The supervisory activities performed by the Board of Commissioners are as follows

- *Supervising the performance of the Board of Directors in 2024 by considering various performance results of the Bank, including loan distribution, loan and asset growth, profitability performance and financial ratios, which generally showed better performance in 2024 compared to the previous year.*
- *The implementation of the Bank's governance, which includes 3 (three) assessment aspects, namely governance structure, governance process and governance outcome, with the results of the Bank's GCG self-assessment achieving a composite rating of "2" (Good), reflecting an adequate fulfillment of governance principles.*
- *Supervision of the Bank's risk management with a composite value of 2 "LowMod", inherent risk with a composite value of "LowMod", and the quality of risk management implementation with a composite value of "Satisfactory" for 2024 by providing inputs related to human resources management, IT, and frequency and materiality of internal and external fraud, as well as the OJK's assessment in accordance with SEOJK No. 14 / SEOJK.03 / 2017 regarding the assessment of the health level of commercial banks. The Committee encourages the Board of Directors to improve the Bank's cyber resilience and security, and increase risk awareness among all employees at all levels / levels through a structured and sustainable risk culture program, as this is an important key to controlling risks through the implementation of effective controls.*
- *Monitor the Bank's Internal Control System and to declare it adequate based on the results of the Internal Control System Assessment by SKAI & Anti-Fraud, taking into account 5 (five) key components, namely, management oversight and control culture, risk identification and assessment, control activities and segregation of duties, accounting systems, information and communication, and monitoring and corrective actions for deviations/weaknesses. The Board of Commissioners notes that for the control system to function properly, improvements need to be made in the areas of compliance function, internal audit function, external audit recommendations, implementation of the anti-fraud strategy, and implementation of anti-money laundering, combating the financing of terrorism, and preventing the proliferation of weapons of mass destruction (APU, PPT, and PPPSPM).*

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris Beserta Dasar Penilaiannya

Assessment of the Performance of the Committees under the Board of Commissioners and the Basis for the Assessment

Berpedoman pada Pedoman GCG Bank BPD Bali dan Piagam Dewan Komisaris, dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terhadap jalannya operasional Bank, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Dewan Komisaris menyatakan bahwa Komite Dewan Komisaris telah melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja Komite dan hasilnya telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris setiap triwulan.

Komite Audit telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit untuk menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 17 (tujuh belas) kali, melakukan pertemuan dengan SKAI & AF sebanyak 7 (tujuh) kali dan pertemuan dengan KAP sebanyak 3 (tiga) kali, serta telah melakukan kajian sebanyak 63 (enam puluh tiga) kali laporan hasil audit internal dan audit eksternal selama tahun 2024. Realisasi jumlah rapat Komite Audit tersebut lebih banyak dibandingkan ketentuan yakni 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk komite tersebut.

Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan berbagai kegiatan antara lain evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan kebijakan Bank, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko, dan penerapan manajemen risiko terkait *country risk* dan *transfer risk*. Komite ini telah mengadakan rapat sebanyak 16 (enam belas) kali, dan melakukan kajian sebanyak 85 (delapan puluh lima) kali laporan terkait dengan manajemen risiko. Realisasi jumlah rapat Komite Pemantau Risiko tersebut lebih banyak dibandingkan ketentuan yakni 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk komite tersebut.

Komite Remunerasi dan Nominasi telah menjalankan tugasnya antara lain melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi, menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi. Komite ini juga menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta menyusun mekanisme dan melakukan penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris. Komite Remunerasi dan Nominasi tahun 2024 telah mengadakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali dan telah melakukan kajian sebanyak 11 (sebelas) kali terkait remunerasi dan nominasi. Realisasi jumlah rapat Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut lebih banyak dibandingkan ketentuan yakni 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk komite tersebut.

In accordance with the GCG Guidelines of Bank BPD Bali and the Charter of the Board of Commissioners, the Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee and the Remuneration and Nomination Committee in the performance of its duties and functions in the supervision of the Bank's operations. The Board of Commissioners notes that the Audit Committee has carried out its activities in accordance with the Committee's work plan and that the results have been reported to the Board of Commissioners on a quarterly basis.

The Audit Committee has fulfilled its duties and responsibilities to oversee and evaluate the planning and conduct of audits and to oversee the follow-up of audit results to assess the adequacy of internal control, including the adequacy of the financial reporting process. In order to carry out these duties and responsibilities, the Audit Committee held 17 (seventeen) meetings, 7 (seven) meetings with SKAI & AF and 3 (three) meetings with KAP. The Audit Committee also reviewed 63 (sixty-three) internal and external audit reports during the year under review. The actual number of Audit Committee meetings is greater than the provision of 1 (one) time in 1 (one) month for the Committee.

The Risk Monitoring Committee has carried out various activities, including evaluating the compliance of risk management policies with the implementation of the Bank's policies, monitoring and evaluating the implementation of the tasks of the Risk Management Committee and the Risk Management Department, and the implementation of risk management related to country and transfer risks. This Committee held 16 (sixteen) meetings and reviewed 85 (eighty-five) reports related to risk management. The realization of the number of meetings of the Risk Monitoring Committee is more than the provisions, namely 1 (one) time in 1 (one) month for the Committee.

The Remuneration and Nomination Committee has performed its duties, including evaluation of the remuneration policy, submission of evaluation results and recommendations to the Board of Commissioners, ensuring that the remuneration policy is in accordance with applicable regulations, and periodic evaluation of the implementation of the remuneration policy. This committee also prepares and makes recommendations regarding the system and procedures for selecting and/or replacing members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, as well as preparing mechanisms and conducting performance evaluations of the Board of Directors and the Board of Commissioners. The Remuneration and Nomination Committee held 7 (seven) meetings in 2024 and conducted 11 (eleven) studies related to remuneration and nomination. The realization of the number of meetings of the Remuneration and Nomination Committee is more than the provision, namely 1 (one) time in 3 (three) months for the Committee.

Komisaris Independen *Independent Commissioners*

Sejalan dengan POJK Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Pedoman GCG Bank BPD Bali menetapkan bahwa Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

Persyaratan Komisaris Independen

Pedoman GCG Bank BPD Bali mensyaratkan calon Komisaris Independen memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatan sebagai Komisaris Independen dan pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan.

Jumlah dan Komposisi Komisaris Independen

Pedoman GCG Bank BPD Bali menetapkan bahwa Komisaris Independen wajib paling sedikit berjumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Bank BPD Bali telah memenuhi ketentuan tersebut yang sama dengan yang ditetapkan oleh regulator dimana dari jumlah anggota Dewan Komisaris Bank adalah sebanyak 5 (lima) orang, 3 (tiga) diantaranya adalah Komisaris Independen.

Anggota Komisaris Independen Bank BPD Bali adalah I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H., sebagai Komisaris Utama yang merangkap sebagai Komisaris Independen disamping 2 (dua) Komisaris Independen lainnya, yakni Insinyur Gede Arimbawa dan I Nyoman Suparsa Widana.

Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Komisaris Independen Bank BPD Bali telah memenuhi persyaratan independensi sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar. Pernyataan independensi masing-masing Komisaris Independen selaras dengan aspek independensi yang diatur dalam POJK Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, sebagai berikut:

In accordance with the POJK on the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks, Bank BPD Bali GCG Guidelines stipulate that Independent Commissioners are members of the Board of Commissioners who do not have any financial relationship, influence, shareholding and/or family relationship with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners and/or controlling shareholders, or any relationship with the Bank that may affect the person's ability to act independently.

Requirements for Independent Commissioners

The Bank BPD Bali GCG Guidelines require that prospective Independent Commissioners have an appropriate level of knowledge in the banking sector that is relevant to the position of an Independent Commissioner and have experience in the banking and/or financial sector. Former members of the Board of Directors or Executive Officers, or parties who have relationships with the Bank that may affect the person's ability to act independently, are required to complete a cooling off period of at least 1 (one) year before becoming an Independent Commissioner of the relevant Bank.

Number and Composition of Independent Commissioners

Bank BPD Bali's GCG Guidelines stipulate that Independent Commissioners shall constitute at least 50% (fifty percent) of the total number of members of the Board of Commissioners. Bank BPD Bali has complied with the provisions which are the same as those stipulated by the Regulatory Authority where of the total number of members of the Bank's Board of Commissioners, 5 (five) persons, 3 (three) of whom are Independent Commissioners.

The Independent Commissioners of Bank BPD Bali are I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H., as the President Commissioner who also serves as an Independent Commissioner in addition to 2 (two) other Independent Commissioners, namely Insinyur Gede Arimbawa and I Nyoman Suparsa Widana.

Statement of Independence of the Independent Commissioners

The Independent Commissioners of Bank BPD Bali have met the requirements of independence as set out in the Articles of Association of the Bank. The Declaration of Independence of each Independent Commissioner is in accordance with the independence aspects stipulated in the POJK on the Implementation of Governance for Commercial Banks, as follows:

Persyaratan Independensi <i>Independence Requirement</i>	IGNBA	GA	INSW
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank. <i>Have no direct or indirect shareholding in the Bank.</i>	√	√	√
Tidak saling memiliki hubungan keuangan, dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. <i>Have no financial relationship with other Directors and/or other members of the Board of Commissioners and/or controlling shareholders or any relationship with the Bank that may affect their ability to act independently.</i>	√	√	√
Tidak saling memiliki hubungan kepengurusan, dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. <i>Do not have any management relationship with other members of the Board of Directors and/or other members of the Board of Commissioners and/or controlling shareholders or any relationship with the Bank that may impair their ability to act independently.</i>	√	√	√
Tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. <i>Have no family relationship up to the second degree with other members of the Board of Directors and/or other members of the Board of Commissioners and/or controlling shareholders or any relationship with the Bank that may impair their ability to act independently.</i>	√	√	√

DIREKSI

Board of Directors

Direksi, menurut Pedoman GCG Bank BPD Bali yang selaras dengan POJK Penerapan Tata kelola bagi Bank Umum, adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank. Direksi juga bertanggung jawab untuk mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Board of Directors, in accordance with the Bank BPD Bali GCG Guidelines, which are in compliance with the POJK on the Implementation of Governance for Commercial Banks, is the Bank's body that is authorized and fully responsible for managing the Bank for the Bank's interests, in accordance with the Bank's purpose and objectives. The Board of Directors is also responsible for representing the Bank in and out of court in accordance with the provisions of the Bank's Articles of Association and applicable laws and regulations.

Piagam Direksi

Board of Directors' Charter

Sebagai salah satu wujud dari praktik terbaik dari prinsip-prinsip GCG, Bank BPD Bali telah memiliki Piagam Direksi sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direksi Bank BPD Bali No. 0698/KEP/DIR/SEKPER/2023 tanggal 29 Desember 2023. Keputusan Dewan Komisaris ini merupakan pembaruan atas Piagam Dewan Komisaris yang telah ditetapkan sebelumnya melalui Keputusan Direksi Bank BPD Bali No. 0750/KEP/DIR/UMS/2019 tentang pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.

As one of the manifestations of the best practices of the GCG principles, Bank BPD Bali has a Board of Directors Charter as stipulated by the Board of Directors Resolution of Bank BPD Bali No. 0698/KEP/DIR/SEKPER/2023 dated December 29, 2023. This Board of Directors Charter is an update of the Board of Directors Charter previously stipulated through the Decree of the Board of Directors of Bank BPD Bali No. 0750/KEP/DIR/UMS/2019 on the Guidelines and Operating Rules of the Board of Directors.

Hal-hal penting yang diatur dalam Piagam Direksi antara lain struktur dan komposisi; kewajiban; pembagian tugas dan tanggung jawab; etika kerja; waktu kerja; cuti Direksi; dan rapat Direksi. Hal penting lainnya yang diatur adalah hubungan tata kerja Direksi dan Komisaris.

The important things that are regulated in the Board of Directors Charter include the structure and composition, duties, division of duties and responsibilities, work ethics, working hours, leave of the Board of Directors, and meetings of the Board of Directors. Another important issue is the working relationship between the Board and the Commissioners.

Etika Kerja Direksi

Board of Directors' Work Ethics

Piagam Direksi juga menetapkan etika kerja Direksi yang mensyaratkan bahwa dalam menjalankan pengurusan Bank, Direksi wajib dengan iktikad baik menerapkan manajemen risiko, melaksanakan prinsip-prinsip GCG, prinsip kehati-hatian, kode etik profesi, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk regulasi yang ditetapkan oleh otoritas perbankan dan ketentuan lainnya dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

The Board of Directors' Charter also establishes the Board of Directors' Code of Ethics, which provides that in the conduct of the Bank's business, the Board of Directors shall, in good faith, apply risk management, implement the GCG Principles, the Prudential Principles, the Code of Professional Ethics, and comply with applicable laws and regulations, including regulations issued by banking authorities and other provisions, in any of the Bank's business activities at all levels or levels of the organization.

Direksi juga diwajibkan untuk mengikuti pedoman etika dan perilaku Bank, dan melaksanakan tindakan pengurusan Bank dengan mengutamakan kepentingan Bank di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi yang mempunyai benturan kepentingan tersebut tidak diperkenankan turut serta dalam pengambilan keputusan, dengan menyebutkan alasannya.

The Board of Directors is also required to comply with the Bank's ethical and conduct guidelines and to conduct the Bank's business by placing the Bank's interests above personal and/or group interests. In the event of a conflict of interest, the Director(s) with such a conflict shall not participate in the decision-making process and shall explain the reasons.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Duties and Responsibilities of the Board of Directors

Pedoman GCG Bank Bali menetapkan 13 (tiga belas) tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi. Tugas dan tanggung jawab Direksi yang dimaksud antara lain menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.

Direksi juga wajib menerapkan Tata Kelola yang Baik pada Bank, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang disesuaikan dengan perkembangan ekosistem perbankan terkini serta didukung dengan digitalisasi dan inovasi teknologi. Dalam penerapan GCG pada Bank tersebut, Direksi diwajibkan paling sedikit membentuk satuan kerja audit intern dan *anti fraud* (SKAI & AF), satuan kerja manajemen risiko, dan satuan kerja kepatuhan serta satuan kerja lain yang diwajibkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Selanjutnya, Direksi juga wajib untuk menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan Lembaga lain. Direksi bank BPD Bali wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan internal Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.

Bank Bali's GCG Guidelines provide 13 (thirteen) duties, responsibilities and powers of the Board of Directors. The duties and responsibilities of the Board of Directors include conducting and being responsible for the management of the Bank in the interest of the Bank in accordance with the Bank's purpose and objectives as set forth in the law, the Articles of Association, and the GMS resolutions.

The Board of Directors is also required to implement good governance at the Bank, risk management, and compliance in an integrated manner that is adapted to the latest developments in the banking ecosystem and supported by digitalization and technological innovation. In order to implement GCG at the Bank, the Board of Directors is required to establish at least an Internal Audit and Anti-Fraud Department, a Risk Management Department and a Compliance Department, as well as other departments required by the Financial Services Authority Regulations.

In addition, the Board of Directors is required to follow up on the results of audits or reviews and recommendations of the Bank's Internal Audit Department, external auditors, the results of supervision by the Financial Services Authority and/or the results of supervision by other authorities and institutions. The Board of Directors of Bank BPD Bali is required to disclose to employees regarding the Bank's internal policies that are strategic in the field of human resources, and to be accountable for the implementation of duties to shareholders through the GMS.

Komposisi Direksi

Composition of the Board of Directors

Anggaran Dasar dan Pedoman GCG Bank BPD Bali menetapkan bahwa Bank BPD Bali diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia. Ketentuan kedua ketentuan internal Bank tersebut selaras dengan yang diatur dalam POJK Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Mayoritas Direksi tersebut wajib memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif Bank.

Bank menetapkan dalam anggaran dasar mengenai periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 5 (lima) tahun untuk 1 (satu) periode masa jabatan yang dimulai sejak tanggal efektif pengangkatan anggota Dewan Komisaris oleh RUPS, serta menetapkan kondisi lain dalam pemenuhan jabatan anggota Dewan Komisaris. Direktur Utama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali. Independensi Direktur Utama dapat dipenuhi dalam hal yang bersangkutan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali Bank.

The Articles of Association and Corporate Governance Guidelines of Bank BPD Bali provide that Bank BPD Bali is managed and directed by a Board of Directors consisting of at least 3 persons, one of whom is appointed as the President Director, and all members of the Board of Directors must reside in Indonesia. The provisions of the two internal regulations of the Bank are in line with the provisions of the POJK on the Implementation of Governance for Commercial Banks. The majority of directors must have at least 5 (five) years of operational experience as executive officers of the Bank.

The Bank stipulates in the Articles of Association regarding the term of office of the members of the Board of Directors a maximum of 5 (five) years for 1 (one) term from the effective date of the appointment of the members of the Board of Commissioners by the GMS and stipulates other conditions for the performance of the position of the members of the Board of Commissioners. The President Director must be from a party independent of the controlling shareholder. The independence of the President Director can be met if the person concerned does not have a financial, managing, ownership and/or family relationship with the controlling shareholder of the Bank.



Penjelasan lebih lengkap terkait dengan susunan Direksi termasuk didalamnya informasi terkait dasar pengangkatan, masa jabatan, dan periode jabatan diringkas pada tabel berikut ini:

A more detailed description of the composition of the Board of Directors, including information on the basis of appointment, term and tenure, is set out in the following table:

Susunan Direksi Per 31 Desember 2024

Board of Directors Composition as of December 31, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term	Periode Jabatan Tenure
I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.	Direktur Utama	- Keputusan RUPST pada 14 Februari 2019 yang dikukuhkan dalam Akta Nomor 28 tanggal 14 Februari 2019 - Keputusan RUPST pada 22 Februari 2023 yang dikukuhkan dalam Akta Nomor 47 tanggal 22 Februari 2023	14 Februari 2019 – 14 Februari 2024 14 February 2024 - 14 Februari 2029	Kedua
	<i>President Director</i>	- AGMS resolution Februari 14, 2019, confirmed by Deed Number 28 on February 14, 2019 - AGMS resolution February 22, 2023, confirmed by Deed Number 47 on February 22, 2023	February 14, 2019 – February 14, 2024 February 14, 2024 – February 14, 2029	<i>Second</i>
Ida Bagus Gede Setia Yasa	Direktur Operasional & TI	- Keputusan RUPST pada 22 Juni 2018 yang dikukuhkan dalam Akta Nomor 36 tanggal 22 Juni 2018 - Keputusan RUPST pada 22 Februari 2023 yang dikukuhkan dalam Akta Nomor 47 tanggal 22 Februari 2023	22 Juni 2018 – 22 Juni 202 22 Juni 2023 – 22 Juni 2028	Kedua
	<i>Director of Operational & TI</i>	- AGMS resolution on June 22, 2018, confirmed by Deed Number 36 on June 22, 2018 - AGMS resolution February 22, 2023, confirmed by Deed Number 47 on February 22, 2023	June 22, 2018 – June 22, 2023 June 22, 2023 – June 22, 2028	<i>Second</i>
I Nyoman Sumanaya, S.E., M.M.	Direktur Bisnis	- Keputusan RUPST pada 20 Mei 2019 yang dikukuhkan dalam Akta Nomor 37 tanggal 20 Mei 2019 - Keputusan RUPST pada 22 Februari 2023 yang dikukuhkan dalam Akta Nomor 47 tanggal 22 Februari 2023	20 Mei 2019 – 20 Mei 2024 20 Mei 2024 – 20 Mei 2029	Kedua
	<i>Director of Business Non Loan</i>	- AGMS resolution May 20, 2019, confirmed by Deed Number 37 on May 20, 2019 - AGMS resolution February 22, 2023, confirmed by Deed Number 47 on February 22, 2023	May 20, 2019 – May 20, 2024 May 20, 2024 – May 20, 2029	<i>Second</i>
Made Lestara Widiatmika	Direktur Kredit	- Keputusan RUPST pada 14 Februari 2019 yang dikukuhkan dalam Akta Nomor 28 tanggal 14 Februari 2019 - Keputusan RUPST pada 22 Februari 2023 yang dikukuhkan dalam Akta Nomor 47 tanggal 22 Februari 2023	14 Februari 2019 – 14 Februari 2024 14 February 14, 2024 - 14 Februari 2029	Kedua
	<i>Director of Loan</i>	- AGMS resolution Februari 14, 2019, confirmed by Deed Number 28 on February 14, 2023 - AGMS resolution February 22, 2023, confirmed by Deed Number 47 on February 22, 2023	February 14, 2019 – February 14, 2024 February 14, 2024 – February 14, 2029	<i>Second</i>
Drs. I Wayan Sutela Negara	Direktur Kepatuhan	- Keputusan RUPST pada 22 Juni 2018 yang dikukuhkan dalam Akta Nomor 36 tanggal 22 Juni 2018 - Keputusan RUPST pada 22 Februari 2023 yang dikukuhkan dalam Akta Nomor 47 tanggal 22 Februari 2023	22 Juni 2018 – 22 Juni 2023 22 Juni 2023 – 22 Juni 2028	Kedua
	<i>Director of Compliance</i>	- AGMS resolution on June 22, 2018, confirmed by Deed Number 47 on June 22, 2018 - AGMS resolution February 22, 2023, confirmed by Deed Number 47 on February 22, 2023	June 22, 2018 – June 22, 2023 June 22, 2023 – June 22, 2028	<i>Second</i>

Penilaian Kelayakan dan Kepatutan Direksi

Fit and Proper Assessment of the Board of Directors

OJK melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan (LJK) termasuk di dalamnya Direksi sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Pedoman GGCG Bank BPD Bali menetapkan bahwa Anggota Direksi merupakan orang perseorangan yang memenuhi persyaratan dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Adapun tabel status uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilakukan oleh OJK terhadap Direksi Bank yang menjabat hingga 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

OJK, as regulated by POJK No. 27/POJK.03/2016, conducts a fit and proper assessment for key parties of financial service institutions (LJK), including the Board of Directors. In accordance with these regulations, the GGCG Guidelines of Bank BPD Bali stipulate that the members of the Board of Commissioners are persons who meet the requirements and have received approval from the Financial Services Authority.

The table of fit and proper test status conducted by OJK on the Bank's Board of Directors serving until December 31, 2024 is as follows:

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Status Kelulusan <i>Status</i>	Dasar Hukum Uji Kelayakan dan Kepatutan <i>Legal Basis for the Fit and Proper Test</i>
I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.	Direktur Utama <i>President Director</i>	Lulus <i>Passed</i>	Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-18/D.03/2019 Tanggal 31 Januari 2019 <i>Decree of the OJK Board of Commissioners No. KEP-18/D.03/2019 Dated January 31, 2019</i>
Ida Bagus Gede Setia Yasa	Direktur Operasional & TI <i>Director of Operational & TI</i>	Lulus <i>Passed</i>	Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-101/D.03/2018 Tanggal 25 Mei 2018 <i>Decree of the OJK Board of Commissioners No. KEP-101/D.03/2018 of May 25, 2018</i>
I Nyoman Sumanaya	Direktur Bisnis <i>Director of Business Non Loan</i>	Lulus <i>Passed</i>	Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-80/D.03/2019 Tanggal 14 Mei 2019 <i>Decree of the OJK Board of Commissioners No. KEP-80/D.03/2019 Dated May 14, 2019</i>
Made Lestara Widiatmika, S.E.	Direktur Kredit <i>Director of Loan</i>	Lulus <i>Passed</i>	Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-19/D.03/2019 Tanggal 31 Januari 2019 <i>Decree of the OJK Board of Commissioners No. KEP-19/D.03/2019 Dated January 31, 2019</i>
Drs. I Wayan Sutela Negara	Direktur Kepatuhan <i>Director of Compliance</i>	Lulus <i>Passed</i>	Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-99/D.03/2018 Tanggal 25 Mei 2018 <i>Decree of the OJK Board of Commissioners No. KEP-99/D.03/2018 Dated May 25, 2018</i>

Nama Name	Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duty and Responsibility
I Nyoman Sumanaya, S.E., M.M.	Direktur Bisnis	- Direktur Bisnis mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas di bidang perbankan dan Anggaran dasar serta uraian tugas sebagaimana Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Bank BPD Bali; - Dalam hal Direktur lain berhalangan, Direktur Bisnis dapat menggantikan tugas dan tanggung jawab Direktur tersebut sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Direktur yang digantikannya; - Dalam hal Direktur Bisnis berhalangan, Direktur lain kecuali Direktur Kepatuhan dapat menggantikan hal Direktur Utama dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya; - Selain tugas-tugas di atas, Direktur Bisnis melakukan supervise terhadap unit kerja di bawahnya yang ditaur dengan Keputusan Direksi tersendiri.
	Director of Business Non Loan	- The Director of Business Non Loan has duties and responsibilities in accordance with laws and regulations, including regulations issued by banking sector authorities, and the Articles of Association and job descriptions as stated in Bank BPD Bali's Organizational Structure and Job Descriptions; - In the event that another Director is unable to perform his/her duties, the Director of Business Non Loan may substitute the duties and responsibilities of the Director in accordance with the duties and responsibilities of the Director he/she is replacing, except for the Compliance Director; - In the event the Director of Business Non Loan is unable to perform his duties, another Director, except the Compliance Director, may replace the Director of Business Non Loan with the duties and responsibilities set forth in the foregoing; - In addition to the above duties, the Director of Business Non Loan supervises subordinate work units as regulated by a separate Board resolution.
Made Lestara Widiatmika	Direktur Kredit	- Direktur Kredit mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas di bidang perbankan dan Anggaran dasar serta uraian tugas sebagaimana Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Bank BPD Bali; - Dalam hal Direktur lain berhalangan, Direktur Kredit dapat menggantikan tugas dan tanggung jawab Direktur tersebut sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Direktur yang digantikannya; - Dalam hal Direktur Kredit berhalangan, Direktur lain kecuali Direktur Kepatuhan dapat menggantikan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya; - Selain tugas-tugas di atas, Direktur Kredit melakukan supervise terhadap unit kerja di bawahnya yang ditaur dengan Keputusan Direksi tersendiri.
	Director of Loan	- The Director of Loan has duties and responsibilities in accordance with laws and regulations, including regulations issued by banking sector authorities, and the Articles of Association and job descriptions as stated in Bank BPD Bali's Organizational Structure and Job Descriptions; - In the event that another Director is unable to perform his/her duties, the Director of Loan may substitute the duties and responsibilities of the Director in accordance with the duties and responsibilities of the Director he/she is replacing, except for the Compliance Director; - In the event the Director of Loan is unable to perform his duties, another Director, except the Compliance Director, may replace the Director of Loan with the duties and responsibilities set forth in the foregoing; - In addition to the above duties, the Director of Loan supervises subordinate work units as regulated by a separate Board resolution.



Nama Name	Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duty and Responsibility
Drs. I Wayan Sutela Negara	Direktur Kepatuhan	- Direktur Kepatuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas di bidang perbankan dan Anggaran dasar serta uraian tugas sebagaimana Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Bank BPD Bali; - Dalam hal Direktur lain berhalangan, Direktur Kepatuhan dilarang menggantikan tugas dan tanggung jawab Direktur tersebut; - Dalam hal Direktur Kepatuhan berhalangan berhalangan sementara sehingga tidak dapat menjalankan tugas jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut, pelaksanaan tugas yang bersangkutan wajib digantikan sementara oleh Direktur lain sampai dengan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat menjalankan tugas jabatannya kembali; - Dalam hal Direktur Kepatuhan berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau habis masa jabatannya, Bank wajib segera mengangkat pengganti Direktur Kepatuhan, paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepatuhan berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau habis masa jabatannya. - Direktur lain yang menggantikan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan wajib melepaskan tugas dan tanggung jawabnya; - Dalam hal Direktur Kepatuhan berhalangan tetap, Direktur lain setelah memenuhi prosedur yang berlaku dapat menggantikan Direktur Kepatuhan dengan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan perundang-undangan; - Penggantian sementara Direktur Kepatuhan wajib dilaporkan kepada OJK; - Selain tugas-tugas di atas, Direktur Kepatuhan melakukan supervise terhadap unit kerja di bawahnya yang ditaura dengan Keputusan Direksi tersendiri.
	Director of Compliance	- The Compliance Director has duties and responsibilities in accordance with laws and regulations, including regulations issued by banking authorities, and the Articles of Association and job descriptions specified in Bank BPD Bali's Organizational Structure and Job Descriptions; - In the event that another director is prevented from performing his duties, the Compliance Director is prohibited from substituting the duties and responsibilities of the director; - In the event that the Compliance Director is temporarily prevented from performing his duties for more than 7 (seven) consecutive working days, the implementation of the relevant duties must be temporarily replaced by another Director until the Director in charge of the Compliance Function can perform his duties again; - In the event that the Compliance Director is permanently prevented from performing his duties, resigns or his term of office expires, the Bank shall immediately appoint a replacement for the Compliance Director, not later than 6 (six) months after the Compliance Director is permanently prevented from performing his duties, resigns or his term of office expires. - Any other member of the Board of Directors who replaces the duties and responsibilities of the Compliance Director must also relinquish his or her duties and responsibilities; - In the event of permanent incapacity of the Compliance Director, another director may, after following the applicable procedures, replace the Compliance Director with his or her duties and responsibilities in accordance with the law; - The temporary replacement of the Compliance Director must be reported to the OJK; - In addition to the above duties, the Compliance Director shall supervise the work units under him/her, as regulated by a separate regulation of the Board of Directors.

Sertifikasi Anggota Direksi

Certification of the members of the Board of Directors

Direksi Bank BPD Bali dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Bank didukung oleh beragam sertifikasi yang dimiliki sebagai berikut:

The Board of Directors of Bank BPD Bali is supported in the performance of its duties and responsibilities in the management of the Bank by various certifications as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Sertifikasi Certification Type	Tahun Perolehan Sertifikasi Year of Certification
I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.	Direktur Utama	- Sertifikasi Mangement Risiko Jenjang 7 - TRS Dealer Jenjang 7	11 Jul 2024
	President Director	- Risk Management Level 7 Certification - TRS DealerLevel 7	Jul 11, 2024
Ida Bagus Gede Setia Yasa	Direktur Operasional & TI Director of Operational & TI	Sertifikasi Mangement Risiko Jenjang 7 Risk Management Level 7 Certification	24 Oct 2024 Oct 24, 2024
I Nyoman Sumanaya, S.E., M.M.	Direktur Bisnis	- Sertifikasi Mangement Risiko Jenjang 7 - TRS Dealer Jenjang 7	11 Jul 2024
	Director of Business Non Loan	- Risk Management Level 7 Certification - TRS DealerLevel 7	Jul 11, 2024
Made Lestara Widiatmika	Direktur Kredit Director of Loan	Sertifikasi Mangement Risiko Jenjang 7 Risk Management Level 7 Certification	10 Oct 2024 Oct 10, 2024
Drs. I Wayan Sutela Negara	Direktur Kepatuhan Director of Compliance	Sertifikasi Mangement Risiko Jenjang 7 Risk Management Level 7 Certification	11 Jul 2024 Jul 11, 2024

Jenis Keputusan yang Memerlukan Persetujuan Direksi

Types of Decisions Requiring the Approval of the Board of Directors

Berpedoman pada Anggaran Dasar dan *Board Manual* Direksi, Direksi Bank BPD Bali menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan (RKAP) dan menyampaikan nya kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun anggaran berikutnya dimulai untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Direksi juga menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

Based on the Articles of Association and the Board Manual, the Board of Directors of Bank BPD Bali prepares the Company's Annual Work Plan and Budget (RKAP) and submits it to the Board of Commissioners at least 30 (thirty) days prior to the beginning of the next fiscal year for approval by the Board of Commissioners. The Board of Directors shall also prepare the Company's Long Term Plan (RJPP) for approval by the Board of Commissioners.

Selanjutnya, Direksi Bank memberikan pertanggungjawaban terkait Laporan Keuangan, baik dalam bentuk Laporan Tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya. Direksi Bank juga menetapkan susunan organisasi, pedoman dan tata tertib kerja Bank lengkap dengan perincian tugasnya.

In addition, the Bank's Board of Directors is responsible for financial reporting, both in the form of an annual report and in the form of other periodic reports. The Bank's Board of Directors also determines the Bank's organizational structure, policies and operating procedures, including details of its duties.



Rapat Direksi

Board of Directors Meeting

Berpedoman pada Pedoman GCG Bank BPD Bali, Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan. Rapat tersebut diselenggarakan jika dihadiri lebih dari 50% anggota Direksi. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan secara tertulis atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili, surat elektronik atau sarana tercepat lainnya oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Bank dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat, dan menyertakan bahan rapat.

Penyelenggaraan rapat tersebut dapat dilakukan secara terjadwal dan/atau setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seseorang atau lebih anggota Direksi, atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris. Direksi Bank dapat menyelenggarakan Rapat Direksi secara *online*, *hybrid*, dan *offline*/tatap muka yang diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan atau di tempat wilayah Republik Indonesia. Keputusan rapat melalui *online*, *hybrid*, dan *offline*/tatap muka mempeunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

Direksi Bank Bank BPD Bali menyelenggarakan sejumlah rapat yang terdiri dari Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris sebanyak 12 (dua belas) kali, Rapat Koordinasi antar Direksi sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali, Rapat Direksi dengan Satuan dan/atau Unit Kerja sebanyak 59 (lima puluh sembilan) kali, Rapat Direksi dengan Komite sebanyak 45 (empat puluh lima) kali, Rapat Direksi dengan Eksternal 46 (empat puluh enam) kali, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebanyak 5 (lima) kali.

Based on the Bank BPD Bali GCG Guidelines, the Board of Directors is required to hold a Board Meeting periodically at least 1 (one) time per month. The meeting shall be held if more than 50% of the members of the Board of Directors are present. Notice of a meeting of the Board of Directors shall be given in writing or by courier service or by telex, facsimile, electronic mail or any other rapid means by a member of the Board of Directors authorized to represent the Bank and shall be delivered no later than 3 (three) calendar days prior to the date of the meeting. The notice of a meeting of the Board of Directors shall state the agenda, date, time and place of the meeting and shall include the meeting materials.

The meeting may be held on a scheduled basis and/or at any time if deemed necessary at the request of one or more members of the Board of Directors or at the written request of one or more members of the Board of Commissioners. The Board of Directors of the Bank may hold online, hybrid and offline/face-to-face meetings of the Board of Directors at the registered office of the Company or at the place of business of the Company or in the territory of the Republic of Indonesia. The resolutions of online, hybrid and offline/face-to-face meetings shall have the same legal force and effect and shall be binding.

The Board of Directors of Bank BPD Bali held a number of meetings consisting of 12 (twelve) Board meetings with the Board of Commissioners, 33 (thirty three) coordination meetings between the Board of Directors, 59 (fifty-nine) Board meetings with the Units and/or Work Units, 45 (forty-five) Board meetings with the Committee, 46 (forty-six) Board meetings with the External and 5 (five) General Meetings of Shareholders (GMS).

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Internal Internal Meeting			RUPST 2024 2024 AGMS	RUPS LB 2024 2024 EGMS
		Jumlah Rapat Number of Meeting	Kehadiran Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Level	Kehadiran Attendance	Kehadiran Attendance
I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.	Direktur Utama President Director	33	33	100,00%	√	√
Ida Bagus Gede Setia Yasa	Direktur Operasional & TI Director of Operational & TI	33	31	93,90%	√	√
I Nyoman Sumanaya, S.E., M.M.	Direktur Bisnis Director of Business Non Loan	33	31	93,90%	√	√
Made Lestara Widiatmika	Direktur Kredit Director of Loan	33	31	93,90%	√	√
Drs. I Wayan Sutela Negara	Direktur Kepatuhan Director of Compliance	33	33	100,00%	√	√
Rata-rata Kehadiran Average Attendance			32	96,34%		

Risalah Rapat Dewan Direksi

Minutes of the Board of Directors Meeting

Pedoman GCG dan Piagam Direksi Bank Bali mewajibkan segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi dibuat Risalah Rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Hal ini disebabkan karena risalah Rapat Direksi merupakan bukti sah untuk para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. Divisi Sekretaris Perusahaan atau satuan kerja lain bertugas sebagai Notulis dalam rapat Direksi sesuai dengan agenda/materi yang dibahas dalam Rapat Direksi.

Bank Bali's GCG Guidelines and Board of Directors Charter require that everything discussed and decided in a Board of Directors meeting shall be recorded in the minutes of the meeting, signed by all directors present, and submitted to all members of the Board of Directors. This is because the minutes of the meeting of the Board of Directors are valid evidence for the members of the Board of Directors, the members of the Board of Commissioners and third parties of the decisions taken at the meeting in question. The Corporate Secretary Department or other departments act as a notary at Board of Directors meetings in accordance with the agenda/material discussed at the Board of Directors meeting.

Tabel berikut menjelaskan risalah rapat Direksi selama tahun 2024:

The following table explains the minutes of the Board of Directors meetings during 2024:

No	Tanggal Date	Agenda	Peserta Participants				
			INS	IBGSY	INS	MLW	IWSN
1	02 Jan 2024	Rapat Direksi Khusus terkait SDM <i>Meeting focused on Human Resources matters.</i>	√	√	√	√	√
2	24 Jan 2024	Rapat Direksi Khusus dengan Divisi SDM <i>Coordination meeting with the HR Division.</i>	√	√	√	√	√
3	05 Feb 2024	Rapat Koordinasi Direksi terkait Pencapaian Target Bisnis <i>Meeting to discuss strategies for achieving business targets.</i>	√	√	√	√	√
4	13 Feb 2024	Rapat Direksi Khusus terkait Rekrutmen SDM <i>Focused session on recruitment processes within HR.</i>	√	√	√	√	√
5	13 Feb 2024	Rapat Direksi Khusus terkait KPI <i>Meeting dedicated to Key Performance Indicators (KPIs).</i>	√	√	√	√	√
6	23 Feb 2024	Rapat Direksi Khusus terkait Pengisian Jabatan Kosong <i>Discussion on the process for filling vacant positions</i>	√	√	√	√	√
7	26 Feb 2024	Rapat Direksi dengan agenda Pembahasan Finalisasi Draft Rencana Bisnis Bank (Penyesuaian) Bank BPD Bali Tahun 2024-2026 <i>Board of Directors' meeting to finalize the adjusted business plan draft for Bank BPD Bali for the years 2024-2026.</i>	√	√	√	√	√
8	07 Mar 2024	Rapat Direksi Khusus terkait KPI dengan Divisi SDM <i>Special meeting to address KPIs in collaboration with the HR Division.</i>	√	√	√	√	√
9	14 Mar 2024	Rapat Direksi Khusus terkait Rekrutmen Karyawan <i>Special Board of Directors Meeting related to HR Recruitment</i>	√	√	√	√	√
10	19 Mar 2024	Rapat Direksi Khusus terkait Pengisian Jabatan Kosong <i>Special Board of Directors Meeting related to Filling Vacant Positions</i>	√	√	√	√	√
11	28 Mar 2024	Rapat Direksi Khusus terkait Rekrutmen Karyawan dan Remunerasi Karyawan <i>Special Board of Directors Meeting related to Employee Recruitment and Employee Remuneration</i>	√	√	√	√	√
12	02 Apr 2024	Rapat Koordinasi Direksi <i>Board of Directors Coordination Meeting</i>	√	√	√	√	√
13	26 Apr 2024	Rapat Direksi Khusus terkait Penerimaan Karyawan <i>Special Board of Directors Meeting related to Employee Recruitment</i>	√	√	√	√	√
14	02 Mei 2024	Rapat Direksi Khusus dengan Agenda Pengisian Jabatan Karyawan <i>Special Board of Directors Meeting with Employee Position Filling Agenda</i>	√	-	√	√	√
15	03 Jun 2024	Rapat Koordinasi Direksi <i>Board of Directors Coordination Meeting</i>	√	√	√	√	√



No	Tanggal Date	Agenda	Peserta Participants				
			INS	IBGSY	INS	MLW	IWSN
16	11 Jun 2024	Rapat Direksi Khusus dengan Agenda Pembahasan Tamsil <i>Special Board of Directors Meeting with Discussion Agenda Tamsil</i>	√	√	√	√	√
17	11 Jun 2024	Rapat Direksi Khusus dengan Agenda Pengisian Jabatan Karyawan <i>Special Board of Directors Meeting with Employee Position Filling Agenda</i>	√	√	√	√	√
18	24 Jun 2024	Rapat Direksi Khusus terkait Pengisian Jabatan Kosong <i>Special Board of Directors Meeting related to Filling Vacant Positions</i>	√	√	√	√	√
19	09 Jul 2024	Rapat Koordinasi Direksi <i>Board of Directors Coordination Meeting</i>	√	√	√	√	√
20	15 Juli 2024	Rapat Evaluasi Pencapaian Kinerja <i>Performance Achievement Evaluation Meeting</i>	√	√	-	√	√
21	29 Juli 2024	Rapat Direksi Khusus terkait Penetapan OJT dan Pengangkatan Karyawan <i>Special Board of Directors Meeting related to Determination of OJT and Employee Appointment</i>	√	√	√	√	√
22	05 Aug 2024	Rapat Koordinasi Direksi <i>Board of Directors Coordination Meeting</i>	√	√	√	√	√
23	12 Aug 2024	Rapat Direksi Khusus terkait KPI <i>Special Board of Directors Meeting related to KPI</i>	√	√	√	√	√
24	03 Sep 2024	Rapat Direksi Khusus terkait SDM <i>Special Board of Directors Meeting related to HR</i>	√	√	√	-	√
25	04 Oct 2024	Rapat Antar Direksi <i>Inter-Board of Directors Meeting</i>	√	√	√	√	√
26	23 Oct 2024	Rapat Direksi Khusus dengan Agenda Pengisian Jabatan Karyawan <i>Special Board of Directors Meeting with Employee Position Filling Agenda</i>	√	-	√	√	√
27	30 Oct 2024	Rapat Direksi Khusus dengan Agenda Pembahasan Penerimaan Karyawan <i>Special Board of Directors Meeting with Employee Recruitment Discussion Agenda</i>	√	√	√	√	√
28	01 Nov 2024	Rapat Antar Direksi terkait RBB, RAKB dan RPPB <i>Inter-Board of Directors Meeting related to RBB, RAKB and RPPB</i>	√	√	√	√	√
29	12 Nov 2024	Rapat Koordinasi Direksi <i>Board of Directors Coordination Meeting</i>	√	√	√	√	√
30	21 Nov 2024	Rapat Direksi Khusus dengan Agenda Pengisian Jabatan Karyawan <i>Special Board of Directors Meeting with Employee Position Filling Agenda</i>	√	√	√	√	√
31	04 Dec 2024	Rapat Direksi Khusus terkait SDM <i>Special Board of Directors Meeting related to HR</i>	√	√	-	√	√
32	18 Dec 2024	Rapat Direksi Khusus dengan Agenda Pengisian Jabatan Kabag CSR Divisi UMA <i>Special Board of Directors Meeting with Agenda to Fill the Position of Head of CSR Division of UMA</i>	√	√	√	-	√
33	30 Dec 2024	Rapat Direksi Khusus terkait Pembahasan Penerimaan Karyawan <i>Special Board of Directors Meeting related to Employee Recruitment Discussion</i>	√	-	√	√	√

Program Orientasi Direksi

Board of Directors Orientation Program

Bank belum memiliki Program Pengenalan bagi anggota Direksi yang baru diangkat. Namun demikian, Bank BPD Bali berkomitmen untuk mempersiapkan dokumen tersebut dalam rangka perbaikan penerapan Tata Kelola Bank.

The Bank does not yet have an orientation program for the newly appointed members of the Board of Directors. However, BPD Bali is committed to prepare the document to improve Bank Governance implementation.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Direksi

Training and Competency Development of the Board of Directors

Bank BPD Bali memberikan kesempatan kepada anggota Direksi untuk mengikuti *workshop*, seminar, dan penyegaran (*refreshment*) yang diselenggarakan oleh BSMR/LSP untuk kelulusan Sertifikasi Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan.

Bank BPD Bali provides opportunities for the members of the Board of Commissioners to attend workshops, seminars and refreshments organized by BSMR/LSP for the completion of the Risk Management Certification in accordance with the regulations.

Anggota Direksi berkomitmen mengikuti beragam fasilitas pengembangan kompetensi yang disediakan oleh Bank sebagaimana yang ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Members of the Board of Directors are required to participate in various skill development facilities provided by the Bank as shown in the table below:

Pelatihan & Pengembangan Kompetensi Training and Competency Development		
Nama Name	Tempat & Waktu Place & Time	Penyelenggara Organizer
I Nyoman Sudharma, S.H., M.H. Direktur Utama President Director		
<i>Workshop UU Perlindungan Data Pribadi Batch 1</i> Privacy Law Workshop Batch 1	02 Jul 2024	PT Azecotama
Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification	11 Jul 2024	BSMR dan IRPA
Seminar <i>Digital Innovation Strengthens Regional Performance</i> Digital Innovation Strengthens Regional Performance Seminar	24 Jul 2024	LPPI
<i>Business and Economic Outlook 2025</i>	26 Jul 2024	Sinergi Indonesia Pintar
Konsinyering Implementasi dan Tata Kelola <i>Artificial Intelligence</i> Artificial Intelligence Implementation and Governance Consignment	20 Aug 2024	OJK
Optimalisasi Sistem Pengendalian Internal Bank sebagai Penerapan Strategi <i>Anti Fraud</i> Optimizing the Bank's Internal Control System as an Implementation of the Anti-Fraud Strategy	9-10 Sep 2024	Sinergi Indonesia Pintar
<i>Workshop Strategi Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi</i> Information Technology Governance Implementation Strategy Workshop	21 Sep 2024	PT Solmit Bangun Indonesia
Studi Komparatif dalam Rangka Pelaksanaan <i>Review Peraturan Dana Pensiun BPD Bali</i> Comparative Study for the Implementation of the BPD Bali Pension Fund Regulation Review	27 Sep 2024	Bank Jateng
Seminar <i>Memerangi Judi Online dan Kejahatan Baru Era Ekonomi Digital 5.0</i> Seminar on Combating Online Gambling and New Crimes in the Digital Economy Era 5.0	19 Nov 2024	OVO
Pembekalan Sertifikasi WPPE bagi Pejabat Provision of WPPE Certification for Officials	21 Nov 2024	PT Leadership Nasional
<i>Seminar Economic Outlook 2025</i>	23 Nov 2024	Infobank Institute
<i>Workshop Incident Awareness & Table Top Exercise</i>	26 Nov 2024	Badan Siber dan Sandi Negara
<i>Workshop Penyusunan Kebijakan Internal POJK Nomor 20 Tahun 2023</i> Internal Policy Preparation Workshop POJK No. 20 of 2023	28 Dec 2024	Divisi Kredit Ritel & Konsumer BPD Bali
Ida Bagus Gede Setia Yasa Direktur Operasional & TI Director of Operational & TI		
<i>Workshop UU Perlindungan Data Pribadi Batch 1</i> Privacy Law Workshop Batch 1	02 Jul 2024	PT Azecotama
<i>Sharing Knowledge Icon Plus & Praktisi Keamanan Siber</i>	19-20 Jul 2024	PLN Icon Plus
<i>Business and Economic Outlook 2025</i>	26 Jul 2024	Sinergi Indonesia Pintar
<i>Enhancing Fraud Detection System to Strengthen Cybersecurity Resilience in the Payment System Industry</i>	26 Aug 2024	Bank Indonesia

**Pelatihan & Pengembangan Kompetensi**
Training and Competency Development

Nama Name	Tempat & Waktu Place & Time	Penyelenggara Organizer
Optimalisasi Sistem Pengendalian Internal Bank sebagai Penerapan Strategi <i>Anti Fraud</i> <i>Optimizing the Bank's Internal Control System as an Implementation of the Anti-Fraud Strategy</i>	9-10 Sep 2024	Sinergi Indonesia Pintar
Workshop Strategi Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi <i>Information Technology Governance Implementation Strategy Workshop</i>	21 Sep 2024	PT Solmit Bangun Indonesia
Cybersecurity Roadshow: Meningkatkan Wawasan Cybersecurity dalam Menghadapi Ancaman Siber <i>Cybersecurity Roadshow: Improving Cybersecurity Insight to Address Cyber Threats</i>	9 Oct 2024	Fortinet
Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi Jenjang 7 <i>Delivery of the Risk Management Certification Level 7 Qualification</i>	11 Oktober 2024	Leadership Nasional
Penyelerasan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 bagi Direksi <i>Alignment of Level 7 Risk Management Certification for Directors</i>	23 Oct 2024	BSMR dan IRPA
Workshop Transformasi Digital dalam Industri Perbankan, Fokus: Inovasi, Layanan, dan Keamanan <i>Seminar Economic Outlook 2025</i>	14 Nov 2024 23 Nov 2024	ASBANDA Infobank Institute
Workshop Incident Awareness & Table Top Exercise	26 Nov 2024	Badan Siber dan Sandi Negara
I Nyoman Sumanaya, S.E., M.M. Direktur Bisnis <i>Director of Business</i>		
Workshop UU Perlindungan Data Pribadi Batch 1 <i>Privacy Law Workshop Batch 1</i>	02 Jul 2024	PT Azecotama
Sertifikasi Manajemen Risiko <i>Risk Management Certification</i>	10-11 Jul 2024	BSMR dan IRPA
Optimalisasi Sistem Pengendalian Internal Bank sebagai Penerapan Strategi <i>Anti Fraud</i> <i>Optimizing the Bank's Internal Control System as an Implementation of the Anti-Fraud Strategy</i>	9-10 Sep 2024	Sinergi Indonesia Pintar
Sosialisasi Implementasi Opsen Pajak Daerah <i>Socialization of Regional Tax Option Implementation</i>	5 Sep 2024	ASBANDA
Workshop Strategi Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi <i>Information Technology Governance Implementation Strategy Workshop</i>	21 Sep 2024	PT Solmit Bangun Indonesia
Pembekalan Sertifikasi WPPE bagi Pejabat <i>Provision of WPPE Certification for Officials</i>	21 Nov 2024	PT Leadership Nasional
<i>Seminar Economic Outlook 2025</i>	23 Nov 2024	Infobank Institute
Workshop Incident Awareness & Table Top Exercise	26 Nov 2024	Badan Siber dan sandi negara
Workshop Penyusunan Kebijakan Internal POJK Nomor 15 Tahun 2023 <i>Internal Policy Preparation Workshop POJK No. 15 of 2023</i>	20 Dec 2024	PT Azecotama
Workshop Penyusunan Kebijakan Internal POJK Nomor 20 Tahun 2023 <i>Internal Policy Preparation Workshop POJK No. 20 of 2023</i>	28 Dec 2024	Divisi Kredit Ritel dan Konsumer BPD Bali
Made Lestara Widiatmika Direktur Kredit <i>Director of Loan</i>		
Workshop UU Perlindungan Data Pribadi Batch 1 <i>Privacy Law Workshop Batch 1</i>	02 Jul 2024	PT Azecotama
Sosialisasi dan Rapat Direktur Utama dan Direksi BPD <i>Socialization and Meeting of the Main Director and BPD Board of Directors</i>	15 Jul 2024	ASBANDA
<i>Business and Economic Outlook 2025</i>	26 Jul 2024	Sinergi Indonesia Pintar
<i>Indonesia Insurance Summit 2024</i>	22-23 Agustus 2024	OJK
Optimalisasi Sistem Pengendalian Internal Bank sebagai Penerapan Strategi <i>Anti Fraud</i> <i>Optimizing the Bank's Internal Control System as an Implementation of the Anti-Fraud Strategy</i>	9-10 Sep 2024	Sinergi Indonesia Pintar

Pelatihan & Pengembangan Kompetensi Training and Competency Development		
Nama Name	Tempat & Waktu Place & Time	Penyelenggara Organizer
Workshop Strategi Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi Information Technology Governance Implementation Strategy Workshop	21 Sep 2024	PT Solmit Bangun Indonesia
Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification Briefing	27 Sep 2024	PT Leadership Nasinal
Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 bagi Direksi Risk Management Certification Alignment Level 7 for Directors	09 Oct 2024	BSMR
Diseminasi dan FGD Mendorong Pemulihan Sektor Padat Karya untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dan Inklusif Dissemination and FGD Promotion of recovery of labor-intensive sectors to support sustainable and inclusive economic growth	25 Oct 2024	Bank Indonesia
Sosialisasi Permenko & FGD Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran KUR Tahun 2024 Socialization of Coordinating Ministerial Regulation & FGD Evaluation of KUR Distribution Implementation in 2024	14 Nov 2024	Kemendagri Bidang Perekonomian RI
FGD Langkah-Langkah Kebijakan Akhir Tahun 2024 dan Arah Kebijakan KUR Tahun 2025 FGD on end-of-year policy steps in 2024 and KUR policy direction in 2025	15 Nov 2024	Kemendagri Bidang Perekonomian RI
Seminar Economic Outlook 2025	23 Nov 2024	Infobank Institute
Workshop Incident Awareness & Table Top Exercise	26 Nov 2024	Badan Siber dan Sandi Negara
Workshop Kajian KPK RI: Pemetaan Risiko Korupsi pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam Penyaluran Kredit/Pembiayaan Bermasalah KPK RI Study Workshop: Corruption Risk Mapping at Regional Development Banks (BPD) in Disbursement of Problematic Loans/Financing	09 Dec 2024	ASBANDA
Workshop Penyusunan Kebijakan Internal POJK Nomor 15 Tahun 2023 Internal Policy Preparation Workshop POJK No. 15 of 2023	20 Dec 2024	Divisi Kredit Ritel & Konsumer BPD Bali
Drs. I Wayan Sutela Negara Direktur Kepatuhan Director of Compliance		
Workshop UU Perlindungan Data Pribadi Batch 1 Privacy Law Workshop Batch 1	02 Jul 2024	PT Azecotama
Business and Economic Outlook 2025	26 Jul 2024	ASBANDA
Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification	11 Jul 2024	Sinergi Indonesia Pintar
Optimalisasi Sistem Pengendalian Internal Bank sebagai Penerapan Strategi Anti Fraud Optimizing the Bank's Internal Control System as an Implementation of the Anti-Fraud Strategy	9-10 Sep 2024	Sinergi Indonesia Pintar
Workshop Strategi Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi Information Technology Governance Implementation Strategy Workshop	21 Sep 2024	PT Solmit Bangun Indonesia
FGD Persamaan Persepsi Perizinan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) Kepengurusan dan Kepemilikan Bank Umum FGD on Perception of Licensing for Capability and Proper Assessment (PKK) of Management and Ownership of Commercial Banks	08 Oct 2024	OJK
Seminar Memerangi Judi Online dan Kejahatan Baru Era Ekonomi Digital 5.0 Seminar on Combating Online Gambling and New Crimes in the Digital Economy Era 5.0	19 Nov 2024	OVO
Seminar Economic Outlook 2025	23 Nov 2024	Infobank Institute
Workshop Incident Awareness & Table Top Exercise	26 Nov 2024	Badan Siber dan Sandi Negara
Workshop Penyusunan Kebijakan Internal POJK Nomor 15 Tahun 2023 Internal Policy Preparation Workshop POJK No. 15 of 2023	20Dec 2024	PT Azecotama
Workshop Penyusunan Kebijakan Internal POJK Nomor 20 Tahun 2023 Internal Policy Preparation Workshop POJK No. 20 of 2023	28 Dec 2024	Divisi Kredit Ritel & Konsumer BPD Bali



Pelaksanaan Tugas Direksi Tahun 2024

Implementation of the Board of Directors' Duties in 2024

Direksi Bank BPD Bali telah menjalankan fungsi pengelolaan Bank sebagaimana yang diatur dalam Piagam Direksi. Kegiatan pengelolaan yang dilakukan oleh Direksi adalah sebagai berikut:

- Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit eksternal dan internal selama tahun 2024. Selama semester I 2024, dari total hasil audit internal & eksternal yaitu sebanyak 673 temuan, sudah tuntas ditindaklanjuti sebanyak 664 temuan atau 99,49%. Selanjutnya, untuk semester II 2024, dari total hasil audit internal & eksternal yaitu sebanyak 983 temuan, sudah tuntas ditindaklanjuti sebanyak 978 temuan atau 99,49%.
- Penyampaian laporan data dan informasi yang meliputi neraca, rasio keuangan, laporan tugas dan tanggung jawab Direksi (triwulan dan semesteran) kepada Dewan Komisaris secara lengkap, akurat dan tepat waktu
- Mengkomunikasikan kepada pegawai tentang arah bisnis Bank dalam rangka pencapaian visi dan misi Bank
- Peningkatan kualitas kinerja Bank sesuai dengan Rencana Bisnis Bank dan beragam penghargaan yang telah diterima Bank atas capaian tersebut sebagaimana dijelaskan pada Bab pendahuluan.
- Terakhir, Direksi Bank telah memiliki 27 (dua puluh tujuh) Buku Pedoman Perusahaan (BPP) dan 148 Standar Operasional Prosedur (SOP) atau telah memiliki 175 ketentuan internal sampai dengan akhir bulan Desember 2024. Adapun Keputusan Direksi Tentang BPP baru dan BPP perubahan serta SOP baru dan SOP perubahan selama periode Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

The Board of Directors of Bank BPD Bali has performed the management functions of the Bank as stipulated in the Board of Directors' Charter. The management activities carried out by the Board of Directors include the following

- *Monitoring the follow-up of external and internal audit results during 2024. In the first half of 2024, out of a total of 673 internal and external audit findings, 664 findings or 99.49% were followed up. Furthermore, for the second half of 2024, out of the total internal & external audit findings of 983 findings, 978 findings or 99.49% have been followed up.*
- *Submitting data and information reports, including balance sheets, financial ratios, reports on the duties and responsibilities of the Board of Directors (quarterly and semi-annually) to the Board of Commissioners in a complete, accurate and timely manner.*
- *Communicate the Bank's business direction to employees in order to achieve the Bank's vision and mission*
- *Improve the quality of the Bank's performance in accordance with the Bank's Business Plan and the Bank's various awards for performance as described in the Introduction.*
- *Finally, by the end of December 2024, the Bank's Board of Directors has adopted 27 (twenty-seven) Business Procedures (BPP) and 148 Standard Operating Procedures (SOP) or 175 internal regulations. The decisions of the Board of Directors with regard to new BPPs and amendments to BPPs, as well as new SOPs and amendments to SOPs during the period up to 2024, are as follows:*

No.	Nomor Keputusan Decree Number	Tanggal Date	Tentang About
1	0046/KEP/DIR/TRS/2024	01/02/2024	Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0466/KEP/DIR/TRS/2022 Tentang SOP Counterparty Limit <i>Amendment to the Board of Directors' Directive No. 0466/KEP/DIR/TRS/2022 on Counterparty Limit SOP</i>
2	0060/KEP/DIR/SDM/2024	07/02/2024	SOP Penghargaan Karyawan <i>Employee Compensation SOP</i>
3	0118/KEP/DIR/TIF/2024	8/03/2024	SOP Pengelolaan Teknologi Informasi MAILAKU <i>MAILAKU Information Technology Management SOP</i>
4	0149/KEP/DIR/TIF/2024	25/03/2024	SOP Pengelolaan User <i>User Management SOP</i>
5	0156/KEP/DIR/OKA/2024	25/03/2024	SOP Penyelenggaraan Bank Indonesia-Fast Payment <i>Bank Indonesia Fast Payment Implementation SOP</i>
6	0178/KEP/DIR/SDM/2024	16/04/2024	BPP Sumber Daya Manusia <i>Human Resources BPP</i>
7	0187/KEP/DIR/SDM/2024	19/04/2024	SOP Sistem Penggajian Karyawan <i>Employee Payroll System SOP</i>
8	0188/KEP/DIR/KPN/2024	19/04/2024	SOP Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal <i>SOP for Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Financing of Terrorism and Proliferation of Weapons of Mass Destruction Programs</i>

No.	Nomor Keputusan Decree Number	Tanggal Date	Tentang About
9	0192/KEP/DIR/DJA/2024	22/04/2024	Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direksi Nomor 133/KEP/DIR/DJA/2013 tentang BPP Dana dan Jasa <i>Third Amendment to the Board of Directors' Regulation No. 133/KEP/DIR/DJA/2013 on BPP Funds and Services</i>
10	0327/KEP/DIR/DJA/2023	07/05/2024	Standar Operasional Prosedur Kartu Co-branding Bank BPD Bali BCA Flazz <i>Standard Operating Procedure for BPD Bali BCA Flazz Co-branded Cards</i>
11	0401/KEP/DIR/KPN/2024	08/05/2024	BPP Penerapan Tata Kelola <i>BPP for the implementation of governance</i>
12	0250/KEP/DIR/SDM/2024	03/06/2024	Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0187/KEP/DIR/SDM/2024 tentang SOP Sistem Penggajian Karyawan <i>Amendment to Board Resolution No. 0187/KEP/DIR/SDM/2024 on SOP for Employee Payroll System</i>
13	0284/KEP/DIR/TRS/2024	19/06/2024	SOP Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek <i>SOP for Short Term Liquidity Loans</i>
14	0297/KEP/DIR/TRS/2024	24/06/2024	SOP Perantara Pedagang Efek Untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk (PPE EBUS) <i>SOP for Securities Brokers for Debt Securities and Sukuk (PPE EBUS)</i>
15	0410/KEP/DIR/KPN/2024	08/07/2024	SOP Bali Dwipa Remittance <i>SOP Bali Dwipa Remittance</i>
16	0379/KEP/DIR/TIF/2024	29/07/2024	SOP Penggunaan End Point Protection <i>Endpoint Protection Usage SOP</i>
17	0384/KEP/DIR/SEKPER/2024	30/07/2024	BPP Sekretaris Perusahaan <i>BPP Corporate Secretary</i>
18	0385/KEP/DIR/SEKPER/2024	30/07/2024	BPP Pelindungan Konsumen <i>BPP Consumer Protection</i>
19	0390/KEP/DIR/DJA/2024	30/07/2024	Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 0360/KEP/DIR/DJA/2016 tentang SOP Direct Debit <i>Amendment to Board of Directors' Decree No. 0360/KEP/DIR/DJA/2016 on Direct Debit SOP</i>
20	0393/KEP/DIR/TRS/2024	31/07/2024	SOP Penjualan Surat Berharga Negara (SBN) Ritel di Pasar Perdana <i>SOP for Retail Sales of Government Securities (SBN) in the Primary Market</i>
21	0394/KEP/DIR/DJA/2024	31/07/2024	Perubahan Kelima Atas Keputusan Direksi Nomor 0670/KEP/DIR/DJA/2017 tentang SOP MAILAKU Bank BPD Bali <i>Fifth Amendment to Board Resolution No. 0670/KEP/DIR/DJA/2017 on SOP for MAILAKU Bank BPD Bali</i>
22	0400/KEP/DIR/DJA/2024	5/08/2024*	SOP Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen <i>SOP for Handling and Resolution of Consumer Complaints</i>
23	0411/KEP/DIR/OKA/2024	8/08/2024	SOP MPN G-3
24	0416/KEP/DIR/DJA/2024	12/08/2024*	SOP Layanan Contact Center <i>SOP Contact Center Services</i>
25	0417/KEP/DIR/DJA/2024	12/08/2024	Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0713A/KEP/DIR/DJA/2019 Tentang SOP Co-Branding BRIZZI Bank BPD Bali <i>Amendment to Board of Directors' Resolution No. 0713A/KEP/DIR/DJA/2019 regarding BRIZZI Bank BPD Bali Co-Branding SOP</i>
26	0418/KEP/DIR/DJA/2024	12/08/2024	Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi Nomor 0494/KEP/DIR/DJA/2014 tentang SOP E-Money <i>Second Amendment to Board of Directors' Resolution No. 0494/KEP/DIR/DJA/2014 regarding E-Money SOP</i>
27	0419/KEP/DIR/DJA/2024	12/08/2024	Perubahan atas Keputusan Direksi No 0413/KEP/DIR/DJA/2022 tentang SOP Anjungan Tunai Mandiri atau Cash Recycle Machine dan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu <i>Amendment to Board of Directors' Decree No. 0413/KEP/DIR/DJA/2022 regarding SOP for ATMs or Cash Recycling Machines and Card Payment Instruments</i>
28	0420/KEP/DIR/DJA/2024	12/08/2024	Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi No 0521/KEP/DIR/DJA/2021 tentang SOP Giro <i>Second Amendment to the Board of Directors' Decree No. 0521/KEP/DIR/DJA/2021 on Giro SOP</i>



No.	Nomor Keputusan Decree Number	Tanggal Date	Tentang About
29	0421/KEP/DIR/DJA/2024	12/08/2024	Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 0545/KEP/DIR/DJA/2022 tentang SOP Tabungan <i>Amendment to Board of Directors' Decree No. 0545/KEP/DIR/DJA/2022 on Savings SOP</i>
30	0422/KEP/DIR/DJA/2024	12/08/2024	Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi Nomor 0310/KEP/DIR/DJA/2022 Tentang SOP Deposito <i>Second Amendment to Board of Directors' Decision No. 0310/KEP/DIR/DJA/2022 on Deposit SOP</i>
31	0424/KEP/DIR/RENSTRA/2024	13/08/2024	BPP Susunan Organisasi & Uraian Tugas <i>BPP Organizational Structure & Job Description</i>
32	0425/KEP/DIR/SEKPER/2024	13/08/2024	SOP Perjanjian Baku <i>Standard SOP Agreement</i>
33	0435/KEP/DIR/TRS/2024	15/08/2024	SOP Money Transfer Western Union <i>Western Union Money Transfer SOP</i>
34	0436/KEP/DIR/TRS/2024	15/08/2024	SOP APEX BPR <i>BPR APEX SOP</i>
35	0438/KEP/DIR/RENSTRA/2024	15/08/2024	SOP Susunan Organisasi & Uraian Tugas Kantor Pusat <i>Head Office Organizational Structure & Job Descriptions</i>
36	0446/KEP/DIR/RENSTRA/2024	19/08/2024	SOP Sistem Penilaian Kinerja Satuan Kerja dan Unit Kerja <i>SOP for Work Unit and Work Unit Performance Assessment System</i>
37	0460/KEP/DIR/RENSTRA/2024	27/08/2024	SOP Susunan Organisasi & Uraian Tugas Unit Kerja <i>SOP for Organizational Structure & Work Unit Job Description</i>
38	0473/KEP/DIR/TRS/2024	04/09/2024	Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0297/KEP/DIR/TRS/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Perantara Pedagang Efek Untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk (PPE-EBUS) <i>Amendment to the Board of Directors Resolution No. 0297/KEP/DIR/TRS/2024 on Standard Operating Procedures for Securities Dealer Intermediaries for Debt Securities and Sukuk (PPE-EBUS)</i>
39	0502/KEP/DIR/MRO/2024	17/09/2024	SOP ATMR Kredit <i>SOP for Credit RWA</i>
40	0510/KEP/DIR/TIF/2024	19/09/2024	SOP Penilaian Tingkat Maturitas Digital <i>SOP for Digital Maturity Assessment</i>
41	0542/KEP/DIR/MRO/2024	04/10/2024	Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direksi Nomor 0737/KEP/DIR/MRO/2018 tentang SOP Selera Risiko (<i>Risk Appetite</i>), Toleransi Risiko (<i>Risk Tolerance</i>), Limit Risiko (<i>Risk Limit</i>) <i>Third Amendment to Board of Directors' Regulation No. 0737/KEP/DIR/MRO/2018 on SOP for Risk Appetite, Risk Tolerance, Risk Limit</i>
42	0553/KEP/DIR/DJA/2024	10/10/2024	SOP Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kab/Kota secara <i>online</i> <i>SOP for Receipt of Payments of Regional Taxes and Regional Returns for Regency/City Online</i>
43	0554/KEP/DIR/OKA/2024	10/10/2024	Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0175/KEP/DIR/OKA/2022 tentang SOP Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia <i>Amendment to Board Resolution No. 0175/KEP/DIR/OKA/2022 on SOP for Organizing Scheduled Fund Transfers and Clearing by Bank Indonesia</i>
44	0582/KEP/DIR/SAF/2024	21/10/2024	BPP Audit Berbasis Risiko dan Strategi <i>Anti Fraud</i> <i>BPP Risk Based Audit and Anti-Fraud Strategy</i>
45	0587/KEP/DIR/SDM/2024	21/10/2024	Perubahan Atas Keputusan Direksi No 0701/KEP/DIR/SDM/2023 tentang SOP Penilaian Kinerja Karyawan <i>Amendment to Board Resolution No. 0701/KEP/DIR/SDM/2023 on SOP for Employee Performance Assessment</i>
46	0588/KEP/DIR/MRO/2024	21/10/2024	SOP Penilaian Tingkat Kesehatan Bank <i>SOP for Bank Health Level Assessment</i>
47	0598/KEP/DIR/TRS/2024	28/10/2024	SOP <i>Treasury</i> <i>SOP for Treasury</i>

No.	Nomor Keputusan Decree Number	Tanggal Date	Tentang About
48	0609/KEP/DIR/DJA/2024	30/10/2024	Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direksi 0017A/KEP/DIR/DJA/2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Pemrosesan Transaksi QRIS Bank BPD Bali <i>Third Amendment to Board Resolution No. 0017A/KEP/DIR/DJA/2020 on Standard Operating Procedures for QRIS Transaction Processing of Bank BPD Bali</i>
49	0617/KEP/DIR/DJA/2024	31/10/2024	Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direksi Nomor 0310/KEP/DIR/DJA/2022 Tentang SOP Deposito <i>Third Amendment to Board of Directors' Resolution No. 0310/KEP/DIR/DJA/2022 on SOP for Deposits</i>
50	0625/KEP/DIR/SDM/2024	05/11/2024	SOP Masa Bebas Tugas dan Dana Pensiun Karyawan PT Bank Pembangunan Daerah Bali <i>SOP for Free Duty Period and Employee Pension Fund of PT Bank Pembangunan Daerah Bali</i>
51	0628/KEP/DIR/SAF/2024	05/11/2024	SOP Strategi Anti Fraud <i>SOP for Anti-Fraud Strategy</i>
52	0666/KEP/DIR/MRO/2024	18/11/2024	SOP Proses Perhitungan Kecukupan Modal Secara Internal (<i>Internal Capital Adequacy Assessment Process</i>) <i>SOP for Internal Capital Adequacy Assessment Process</i>
53	0678/KEP/DIR/TIF/2024	21/11/2024	Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0680/KEP/DIR/TIF/2023 tentang BPP TKMTI <i>Amendment to Board of Directors' Regulation No. 0680/KEP/DIR/TIF/2023 on BPP TKMTI</i>
54	0689/KEP/DIR/TIF/2024	26/11/2024	Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 0689/KEP/DIR/TIF/2023 tentang SOP Pengamanan Informasi <i>Amendment to Board of Directors' Decision No. 0689/KEP/DIR/TIF/2023 concerning SOP for Information Security</i>
55	0695/KEP/DIR/SAF/2024	26/11/2024	SOP Audit Berbasis Risiko <i>SOP for Risk Based Audit</i>
56	0724/KEP/DIR/KPN/2024	16/12/2024	BPP Pedoman Penyusunan Peraturan Perusahaan <i>BPP Guidelines for Drafting Company Regulations</i>
57	0723/KEP/DIR/SDM/2024	16/12/2024	SOP Status Karyawan <i>SOP for Employee Status</i>
58	0727/KEP/DIR/OKA/2024	17/12/2024	Buku Pedoman Perusahaan Akuntansi <i>Accounting Company Manual</i>
59	0728/KEP/DIR/DJA/2024	17/12/2024	Perubahan Atas Kepdir No 0043/KEP/DIR/DJA/2015 tentang SOP Payment Point <i>Amendment to Decision of the Board of Directors No. 0043/KEP/DIR/DJA/2015 on SOP for Payment Agent</i>
60	0736/KEP/DIR/OKA/2024	19/12/2024	SOP Akuntansi <i>Accounting SOP</i>
61	0737/KEP/DIR/OKA/2024	19/12/2024	SOP Mekanisme Pelaporan Bank Umum Terintegrasi <i>SOP Integrated General Bank Reporting Mechanism</i>
62	0738/KEP/DIR/OKA/2024	19/12/2024	SOP Chart Of Account (COA) <i>SOP Chart of Accounts (COA)</i>



Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi Beserta Dasar Penilaiannya

Performance Assessment of the Board Committees and Basis for Assessment

Berpedoman pada Pedoman GCG Bank BPD Bali dan Piagam Direksi, dalam menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan Bank, Direksi dibantu oleh Komite Manajemen Risiko, Komite Kebijakan Perkreditan, Komite Kredit, *Asset and Liability Management* (ALCO), Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT), dan Komite Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen. Direksi menyatakan bahwa Komite Dewan Komisaris telah melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja Komite dan hasilnya telah dilaporkan kepada Direksi.

Komite Manajemen Risiko telah menjalankan tugas dan kewajibannya terkait dengan penyusunan kebijakan, dan pedoman risiko beserta pelaksanaannya serta menyelenggarakan rapat sebanyak 7 (tujuh) selama tahun 2024. Komite Kebijakan Perkreditan telah menjalankan tugas dan kewajibannya terkait penyusunan Kebijakan Perkreditan beserta implementasinya dan melaksanakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali.

Komite Kredit telah menjalankan tugas dan kewajibannya terkait dengan rekomendasi dan/atau persetujuan kredit disamping evaluasi dan menganalisa permohonan kredit serta penyelenggaraan 7 (tujuh) rapat pada tahun 2024. Komite *Asset and Liability Management* (ALCO) telah menjalankan tugas dan kewajibannya terkait dengan pengelolaan aset dan liabilitas Bank yang sesuai dengan tujuan dan perkembangan Bank. Komite ALCO melaksanakan 13 (tiga belas) kali selama tahun 2024.

Komite Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen yang telah menjalankan tugas dan kewajibannya terkait dengan pengelolaan pengaduan konsumen dari penyusunan sistem dan prosedur internal Bank hingga penyelesaian pengaduan konsumen tersebut. Komite ini juga telah mengadakan 4 (empat) kali rapat pada tahun 2024.

Komite Pengarah Teknologi Informasi telah menjalankan tugas dan kewajibannya terkait dengan pengelolaan rencana, kebijakan, dan implementasi teknologi informasi Bank. Komite *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) telah menjalankan tugas dan kewajibannya

In accordance with the GCG Guidelines of Bank BPD Bali and the Board Charter, the Board of Directors is assisted by the Risk Management Committee, Credit Policy Committee, Credit Committee, Asset and Liability Management (ALCO) Committee, Information Technology Steering Committee, Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Consumer Complaints Handling and Resolution Committee, in the performance of its duties and functions in managing the Bank. The Board notes that the Committee of the Board of Directors has carried out its activities in accordance with the Committee's work plan and that the results have been reported to the Board of Directors.

The Risk Management Committee has fulfilled its duties and responsibilities related to the preparation of policies and risk guidelines and their implementation and held 7 (seven) meetings in 2024. The Credit Policy Committee fulfilled its duties and obligations related to the preparation of credit policies and their implementation with 8 (eights) meetings.

The Credit Committee has fulfilled its duties and obligations related to credit recommendations and/or approvals, in addition to the evaluation and analysis of credit applications as well as 7 (seven) meetings in 2024. The Asset and Liability Management (ALCO) Committee has performed its duties and obligations related to the management of the Bank's assets and liabilities in accordance with the Bank's objectives and developments. The ALCO Committee held 13 meetings in 2024.

The Consumer Complaints Handling and Resolution Committee, which has performed its duties and obligations related to managing consumer complaints from preparing the Bank's internal systems and procedures to resolving consumer complaints. This committee also held 4 (four) meetings in 2024.

The Information Technology Steering Committee has fulfilled its duties and obligations related to the management of the Bank's information technology plans, policies and implementation. The Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Committee has performed its duties

terkait dengan pengelolaan pelaksanaan BPD Bali CSIRT dan metodologi penanganan insiden siber, dan supervisi terhadap penanganan dan penanggulangan insiden siber yang sedang dihadapi. Komite CSIRT menyelenggarakan rapat sebanyak 5 (lima) kali pada tahun 2024.

Komite Tim Tanggap Insiden Siber telah menjalankan tugas dan kewajibannya untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan BPD Bali CSIRT dan metodologi penanganan insiden siber, dan supervisi terhadap penanganan dan penanggulangan insiden siber yang sedang dihadapi. Komite ini melaksanakan 3 (tiga) kali rapat selama tahun 2024.

and obligations related to the management of the implementation of the BPD Bali CSIRT and the methodology for handling cyber incidents, as well as the supervision of the handling and management of cyber incidents currently faced. The CSIRT Committee organized 5 (five) meetings in 2024.

The Cyber Incident Response Team Committee has performed its duties and obligations to manage the implementation of BPD Bali CSIRT and the methodology for handling cyber incidents, and to supervise the handling and management of cyber incidents currently faced. This committee held 3 (three) meetings during 2024

TRANSPARANSI INFORMASI TERKAIT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Transparency of Information Related to The Board of Commissioners and Board of Directors

Kriteria, Seleksi dan Nominasi Serta Masa Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi

Criteria, Selection and Nomination and Term of Office of The Board of Commissioners and Board of Directors

Kriteria Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Anggaran Dasar Bank telah menetapkan syarat untuk menjadi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank BPD Bali baik persyaratan umum maupun persyaratan lainnya. Diantara persyaratan umum yang penting adalah tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan negara atau Tindakan-tindakan yang tercela di bidang perbankan. Selain syarat lainnya adalah tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan lainnya dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan serta lulus *fit and proper test* sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, persyaratan lainnya antara lain Direktur Utama harus berasal dari pihak yang independent terhadap pemegang saham pengendali, dan memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif Bank. Selanjutnya, antara sesama anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping serta anggota Direksi dilarang secara sendiri-sendiri atau Bersama-sama memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada perusahaan lain.

Mekanisme Seleksi dan Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi

Komite Remunerasi dan Nominasi menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Masa Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi

Pedoman GCG Bank BPD Bali menetapkan bahwa periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 5 (lima) tahun untuk 1 (satu) periode masa jabatan yang dimulai sejak tanggal efektif pengangkatan anggota Direksi oleh RUPS, serta menetapkan kondisi lain dalam pemenuhan jabatan anggota Direksi. Pemberhentian atau penghentian anggota Direksi wajib mengedepankan kepentingan utama dari Bank.

Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota Direksi berakhir wajib memperhatikan paling sedikit:

Criteria for Members of the Board of Commissioners and Directors

The Articles of Association of the Bank have set out the requirements to become a member of the Board of Commissioners and the Board of Directors of Bank BPD Bali, both general requirements and other requirements. Among the important general requirements are never having performed activities that are harmful to the state or reprehensible actions in the banking sector. In addition, other requirements are never having been declared bankrupt or being a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners who has been found guilty of causing a company to be declared bankrupt, and never having been convicted of committing a crime that is detrimental to state finances and/or related to other financial sectors within 5 (five) years prior to appointment, and passing a fit and proper test in accordance with applicable laws.

Meanwhile, other requirements include the President Director must come from a party that is independent of the controlling shareholder and have 5 (five) years of experience in the operational field as an executive officer of the bank. In addition, there may be no vertical or horizontal family relationship up to the third degree between Directors and between Directors and members of the Board of Commissioners, and Directors may not individually or jointly own shares in other companies in excess of 25% of the paid-up capital.

Selection and Appointment Mechanism of the Board of Commissioners and the Board of Directors

The Remuneration and Nomination Committee prepares and makes recommendations to the Board of Commissioners regarding the system and procedures for the selection and/or replacement of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners to be submitted to the GMS.

Term of office of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Bank BPD Bali's GCG Guidelines stipulate that the term of office of the members of the Board of Directors shall be a maximum of 5 (five) years for 1 (one) term of office from the effective date of the appointment of the members of the Board of Directors by the GMS, and stipulate other conditions in fulfilling the position of members of the Board of Directors. Dismissal or termination of the members of the Board of Directors must be in the best interests of the Bank.

Dismissal or replacement of members of the Board of Directors prior to the expiration of the term of office of members of the Board of Directors must at least take into account the interests of the Bank:

- Anggota Direksi dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan strategi Bank yang sehat;
- Tidak didasarkan atas penilaian subyektif dari pemegang saham, namun didasarkan dari penilaian yang obyektif terkait pengelolaan Bank;
- Telah melalui perencanaan dan mekanisme yang berlaku, yang paling sedikit memperhatikan penilaian dari komite yang menjalankan fungsi nominasi dan telah diagendakan dalam RUPS;
- Tidak mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam pengorganisasian dan kegiatan usaha Bank;
- Mengedepankan pola komunikasi yang baik dari berbagai pihak terkait;
- Dilakukan dengan mengedepankan penerapan GCG pada Bank dan aspek kehati-hatian.

Sementara itu, setiap usulan dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada RUPS wajib memperhatikan rekomendasi komite yang menjalankan fungsi nominasi. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

- *The members of the Board of Directors are considered incapable of fulfilling their duties and responsibilities in the management and implementation of a sound bank strategy;*
- *Not based on subjective assessments by shareholders, but on objective assessments related to the management of the bank;*
- *Has gone through applicable planning and mechanisms that at least take into account the assessment of the committee that performs the nomination function and has been scheduled in the GMS;*
- *Does not cause problems in the organization and business activities of the Bank;*
- *Prioritize good communication patterns from various related parties;*
- *Conducted by prioritizing the implementation of GCG in the Bank and the aspect of prudence.*

Meanwhile, any nomination and/or appointment of members of the Board of Commissioners to the GMS must take into account the recommendations of the committee that performs the nomination function. When replacing and/or appointing members of the Board of Commissioners, priority shall be given to the professional composition, independence, suitability of competence and attention to diversity that are reasonably necessary to carry out the duties and responsibilities of the Board of Commissioners.

HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Working Relationship Between The Board of Commissioners and The Board of Directors

Piagam Dewan Komisaris Bank BPD Bali mewajibkan hubungan yang harmonis dalam Tata Kelola Bank dengan menerapkan prinsip-prinsip kepatutan, keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajiban Hubungan yang dimaksud antara lain:

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank BPD Bali;
2. Direksi wajib mengelola Bank BPD Bali sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar;
3. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar;
4. Direksi wajib menindaklanjuti saran/rekomendasi dari Dewan Komisaris yang telah disepakati;
5. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi dimaksud bertindak bertentangan dengan kepentingan perseroan dan/atau anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menyebutkan alasannya;
6. Pemberhentian tugas sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya;
7. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri;
8. Mekanisme dan prosedur pemberhentian dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar;
9. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen;
10. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Bank BPD Bali sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar;
11. Dewan Komisaris memantau tindak lanjut Direksi atas saran/rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi.

The Charter of the Board of Commissioners of Bank BPD Bali requires a harmonious relationship in bank governance by implementing the principles of propriety, openness, accountability, responsibility, independence and fairness, responsibility, independence and fairness. These relationships include:

1. *The Board of Directors is fully responsible for the conduct of the management of Bank BPD Bali;*
2. *The Board of Directors is obliged to manage Bank BPD Bali in accordance with its authority and responsibility based on laws and regulations and the Articles of Association;*
3. *The Board of Directors is obliged to provide accurate, relevant and timely data and information to the Board of Commissioners in accordance with laws and regulations and the Articles of Association;*
4. *The Board of Directors is obligated to follow the suggestions/recommendations of the Board of Commissioners, which have been agreed upon;*
5. *The Board of Commissioners has the right to temporarily remove one or more members of the Board of Directors at any time, if the members of the Board of Directors in question act contrary to the interests of the Company and/or the Articles of Association and/or applicable laws and regulations, stating the reasons;*
6. *Temporary termination of duties must be communicated to the individual, along with the reasons for the termination;*
7. *Within a maximum period of 30 (thirty) days after the temporary termination, the Board of Commissioners shall hold a GMS to decide whether the Director concerned shall be permanently dismissed or returned to his/her original position, while the Director temporarily dismissed shall be given the opportunity to attend and defend himself/herself;*
8. *The mechanism and procedure for removal shall be carried out in accordance with laws and regulations and/or the Articles of Incorporation;*
9. *The Board of Directors shall perform its duties and responsibilities independently;*
10. *Each member of the Board of Commissioners is required to perform supervisory duties and provide advice to the Board of Directors in the interest of Bank BPD Bali in accordance with the intent and purpose as determined in the Basic Regulations;*
11. *The Board of Commissioners shall supervise the follow-up of the Board of Directors on the advice/recommendations of the Board of Commissioners to the Board of Directors.*

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Diversity in The Composition of The Board of Commissioners and The Board of Directors

Anggaran Dasar Bank BPD Bali telah menetapkan persyaratan umum dan persyaratan lainnya untuk calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Dengan ketentuan tersebut, maka komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Bank BPD Bali disusun sedemikian rupa dalam rangka pengambilan keputusan dapat diambil secara efektif dan akurat serta diperkaya dengan beragam sudut pandang dan latar belakang serta

The Articles of Association of Bank BPD Bali have set out the general requirements and other requirements for the prospective members of the Board of Commissioners and the Board of Directors. These requirements are designed to ensure that the composition of the Board of Directors and the Supervisory Board of Bank BPD Bali are effective and accurate, and are enriched by diverse perspectives, backgrounds, experience and

pengalaman dan keahlian. Meski demikian, komposisi Dewan Komisaris dan Direksi tersebut disusun dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh *regulator* yakni POJK Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

expertise. However, the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors is arranged while complying with the regulatory provisions, namely POJK on Implementation of Governance for Commercial Banks.

Tabel berikut ini menjelaskan keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat hingga 31 Desember 2024.

The following table illustrates the diversity of the Board of Commissioners and the Board of Directors with term of office until December 31, 2024.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris <i>Diversity of the Composition of the Board of Commissioners</i>	
Riwayat pendidikan	Kapabilitas anggota Dewan Komisaris Bank BPD Bali didukung dengan latar belakang pendidikan yang terdiversifikasi dari hukum, peternakan, ekonomi, akuntansi, manajemen, keuangan, dan akuntansi pemerintahan atau pengawas keuangan negara dari level S1 hingga S2. Gelar akademik tersebut diperoleh dari berbagai universitas di dalam negeri. Keberagaman latar belakang tersebut sangat diperlukan dalam menjalankan fungsi pengawasan atas pengelolaan Bank oleh Dewan Komisaris sehingga mampu menghasilkan berbagai sudut pandang.
<i>Educational background</i>	<i>The capabilities of the members of the Board of Directors of Bank BPD Bali are supported by a diverse educational background in law, livestock, economics, accounting, management, finance, and government accounting or government financial supervision from S1 to S2 level. These academic degrees have been obtained from a variety of universities in the country. This diversity is necessary for the Bank's Board of Directors to exercise its oversight function over the Bank's management and to provide a variety of perspectives.</i>
Usia	Anggota Dewan Komisaris Bank berusia antara 55-68 tahun pada akhir tahun buku 2024. Cakupan umur tersebut menunjukkan kematangan dan rekam jejak profesional khususnya di industri perbankan Indonesia yang sangat dibutuhkan oleh Bank untuk menjaga kelangsungan bisnis dan meraih pertumbuhan berkelanjutan di masa mendatang.
<i>Age</i>	<i>The members of the Bank's Board of Commissioners are aged 55-68 at the end of FY 2024. This age range shows the maturity and professional track record, especially in the Indonesian banking industry, which is very much needed by the Bank in order to maintain the continuity of its business and to achieve sustainable growth in the future.</i>
Karir dan pengalaman	Semua anggota Dewan Komisaris Bank memiliki rekam jejak karir dan pengalaman kerja di industri perbankan dan sebagian besar pernah bekerja di Bank BPD Bali. Hal ini sangat diperlukan untuk pengawasan atas implementasi strategi Bank sekaligus menjaga implementasi strategi Bank.
<i>Career and Experience</i>	<i>All members of the Bank's Board of Commissioners have professional track record and work experience in the banking industry. Most of them have worked at Bank BPD Bali. This is very necessary for the oversight of the implementation of the Bank's strategy while maintaining the implementation of Bank's strategy.</i>
Keahlian	Selain berlatar pendidikan yang beragam, keahlian anggota Dewan Komisaris juga didukung kepemilikan sertifikasi manajemen risiko oleh semua anggota Dewan Komisaris. Keahlian anggota Dewan Komisaris ini sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan Bank oleh Direksi.
<i>Expertise</i>	<i>In addition to the diverse educational background, the expertise of the members of the Board of Commissioners is also supported by the fact that all members of the Board of Commissioners hold the Risk Management Certification. The expertise of the members of the Board of Commissioners is essential to support the Board's oversight of the Bank's management.</i>
Jenis Kelamin	Meskipun dalam susunan anggota Dewan Komisaris Bank berjenis kelamin laki-laki, Bank BPD Bali tetap mengakomodir kesetaraan gender dengan tetap mempertahankan kualitas dan kapabilitas individu. Hal ini dapat dilihat dari profil beberapa pejabat eksekutif yang berjenis kelamin perempuan.
<i>Gender</i>	<i>Although the composition of the Board of Commissioners of the Bank is male, the Bank BPD Bali still takes gender equality into account by maintaining the quality and skills of the individuals. This can be seen from the profiles of several female executive officers.</i>

**Keberagaman Komposisi Direksi**

Riwayat pendidikan	Kapabilitas anggota Direksi Bank BPD Bali diperkuat dengan latar belakang pendidikan yang terdiversifikasi dari hukum, teknik komputer, ekonomi, dan manajemen, dari level S1 hingga S2 yang diperoleh dari berbagai universitas di dalam negeri. Diversifikasi latar belakang tersebut sangat diperlukan dalam menjalankan pengelolaan Bank oleh Direksi sesuai dengan visi dan misi Bank.
Educational background	<i>The capabilities of the members of the Board of Directors of Bank BPD Bali are strengthened by a diverse educational background from law, computer engineering, economics and management, from undergraduate to postgraduate level, obtained from various universities in the country. This diversification of backgrounds is very necessary for the Board of Directors to manage the Bank in accordance with the Bank's vision and mission.</i>
Usia	Anggota Direksi Bank berusia 51-61 tahun pada akhir tahun buku 2024. Rentang umur tersebut menunjukkan pengalaman profesional dan rekam jejak yang panjang di industri perbankan dan mengetahui seluk beluk Bank BPD Bali secara mendalam. Hal ini sangat dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan bisnis dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan.
Age	<i>The members of the Board of Directors of the Bank are between 51 and 61 years old at the end of the fiscal year 2024. This age range shows professional experience and a long track record in the banking industry. It also shows a deep understanding of the ins and outs of Bank BPD Bali. This is much needed to ensure business continuity and sustainable growth.</i>
Karir dan pengalaman	Semua anggota Direksi Bank memiliki rekam jejak karir dan pengalaman kerja di industri perbankan dan semua merupakan talenta terbaik yang dihasilkan oleh Bank. Hal ini sangat diperlukan untuk implementasi strategi Bank sekaligus menjaga kesinambungan bisnis Bank di masa mendatang.
Career and Experience	<i>All the members of the Board of Commissioners of the Bank have a career track record and work experience in the banking industry and are all the best talents that have been produced by the Bank. This is essential for the implementation of the Bank's strategy while ensuring the continuity of the Bank's business in the future.</i>
Keahlian	Selain berlatar pendidikan yang beragam, keahlian anggota Direksi diperkuat dengan kepemilikan sertifikasi manajemen risiko oleh semua anggota Direksi. Selain sertifikasi manajemen risiko, sebagian anggota Direksi juga memiliki sertifikasi TRS Dealer. Keahlian anggota Direksi ini sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan Bank oleh Direksi.
Expertise	<i>In addition to the diverse educational background, the expertise of the members of the Board of Directors is strengthened by the fact that all members of the Board of Directors hold a risk management certification. In addition to the Risk Management certification, some members of the Board of Directors also hold the TRS Dealer certification. The expertise of the members of the Board of Commissioners is much needed to support the implementation of the supervision of the Bank's management by the Board of Directors.</i>
Jenis Kelamin	Meskipun dalam susunan anggota Direksi Bank berjenis kelamin laki-laki, Bank BPD Bali tetap mengakomodir kesetaraan gender dengan tetap mempertahankan kualitas dan kapabilitas individu. Bank BPD Bali mengangkat beberapa pejabat eksekutif di bawah Direksi yang berjenis kelamin perempuan sebagai <i>key person</i> di Bank BPD Bali.
Gender	<i>Although the composition of the Bank's Board of Directors is male, Bank BPD Bali still considers gender equality while maintaining the quality and skills of individuals. Bank BPD Bali has appointed several executive officers under the Board of Directors who are female as key persons in Bank BPD Bali.</i>

Penanganan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris dan Direksi*Dealing with Conflicts of Interest Between The Board of Commissioners and The Board of Directors*

Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Komite Bank, Pejabat Eksekutif, Pegawai Bank, dan/atau pihak terkait dengan Bank.

A conflict of interest is a difference between the economic interests of the Bank and the personal economic interests of shareholders, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, members of the Bank's Committee, executive officers, employees of the Bank and/or parties related to the Bank.

Pedoman GCG Bank menekankan anggota Direksi dan Dewan Komisaris menghindari segala bentuk benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengawasan Bank. Dalam hal terjadi benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan dan dilarang mengambil tindakan yang berpotensi merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank. Penanganan benturan kepentingan anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

The Bank's GCG Guidelines emphasize that the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners avoid any form of conflict of interest when managing and supervising the Bank. In the event of a conflict of interest, they are prohibited from taking any action that may harm the Bank or reduce its profits. Conflicts of interest of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors shall be handled as follows:

- a. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu kegiatan yang diusulkan, terkait transaksi, maupun dalam hal pembuatan perjanjian hal mana Bank menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingannya tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris dan Direksi serta tidak berhak ikut serta dalam mengambil keputusan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan yang diusulkan, terkait transaksi, maupun dalam hal pembuatan perjanjian tersebut yang merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
 - b. Pengungkapan benturan kepentingan wajib dicantumkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris dan Direksi yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.
 - c. Risalah rapat Dewan Komisaris dan Direksi tersebut wajib didokumentasikan dengan baik dan perbedaan pendapat yang terjadi dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- a. Any member of the Board of Commissioners and the Board of Directors who has a personal interest in any way, either directly or indirectly, in a proposed activity, in a transaction, or in the conclusion of an agreement to which the Bank is a party, shall declare the nature of his interest at the meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors and shall not be entitled to participate in making decisions on matters related to the proposed activity, in the transaction, or in the conclusion of the agreement that may harm the Bank or reduce its profits.
 - b. Disclosure of conflicts of interest shall be made in the minutes of the meetings of the committee and the board of directors and shall include, at a minimum, the names of the parties having a conflict of interest, the principal issues involved in the conflict of interest, and the basis for consideration of the decision.
 - c. The minutes of the meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors shall be properly documented, and disagreements that arise at the meetings of the Board of Commissioners shall be clearly stated in the minutes of the meeting, along with the reasons for the disagreement.

Pengungkapan Hubungan Afiliasi Antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali

Disclosure of Affiliations Between The Board of Directors, The Board of Commissioners and Major and/or Controlling Shareholders

Salah satu persyaratan lain dari calon Direksi dan Dewan Komisaris adalah antara sesama anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping serta anggota Direksi dilarang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada perusahaan lain.

Sementara itu, hubungan keuangan menurut Pedoman GCG Bank BPD Bali adalah seseorang yang menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Bank, Perusahaan yang pemegang saham pengendalinya adalah anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Bank; dan/atau; peemgang saham pengendali dan/atau pemegang saham pengendali terakhir Bank.

Tabel dibawah ini menunjukkan bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga dan keuangan dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

One of the other requirements for candidates for the Board of Directors and the Board of Commissioners is that there must be no family relationship up to the third degree, either vertically or horizontally, between members of the Board of Directors and between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, and that members of the Board of Directors may not individually or jointly hold shares in another company in excess of 25% of the paid-up capital.

Meanwhile, financial relations according to the GCG Guidelines of Bank BPD Bali are someone who receives income, financial assistance or loan from members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners of the Bank, a company whose controlling shareholders are members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners of the Bank; and/or; controlling shareholders and/or the ultimate controlling shareholders of the Bank.

The table below shows that the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors have no family or financial relationships with other members of the Board of Directors and/or other members of the Board of Commissioners and/or controlling shareholders or with the Bank that could impair their ability to act independently.



Nama Name	Posisi Position	Hubungan Keluarga dan Keuangan (Afiliasi) dengan Family and Financial Relationships (Affiliation) with		
		Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders
Dewan Komisaris Board of Commissioners				
I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.	Komisaris Utama Independen President Commissioner and Independent Commissioner	-	-	-
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	Komisaris Non Independen Non Independent Commissioner	-	-	-
I Gede Darmawa, S.E., M.Si.	Komisaris Non Independen Non Independent Commissioner	-	-	-
Insinyur Gede Arimbawa	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-	-
I Nyoman Suparsa Widana, S.E., M.M.	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-	-
Direksi Board of Directors				
I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.	Direktur Utama President Director	-	-	-
Ida Bagus Gede Setia Yasa	Direktur Operasional & TI Director of Operational & TI	-	-	-
I Nyoman Sumanaya, S.E., M.M.	Direktur Bisnis Director of Business	-	-	-
Made Lestara Widiatmika	Direktur Kredit Director of Loan	-	-	-
Drs. I Wayan Sutela Negara	Direktur Kepatuhan Director of Compliance	-	-	-

Pengungkapan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi

Disclosure of Concurrent Positions Held by The Board of Commissioners and The Board of Directors

Pedoman GCG Bank menetapkan bahwa anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai berikut:

- Sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pejabat eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik bank maupun bukan bank;
- Sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pejabat eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga atau Perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
- Pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
- Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris; dan/atau
- Pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

The GCG Guidelines of the Bank stipulate that the members of the Board of Commissioners are prohibited from holding concurrent positions in the following ways

- As a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners, or an executive officer of any financial institution or financial company, whether bank or non-bank;
- As a director, commissioner or officer of more than one (1) non-financial institution or company, whether located in the country or abroad;
- In the field of functional duties in a financial institution and/or non-bank financial institution, whether domiciled in the country or abroad;
- In any other position that may give rise to a conflict of interest in the performance of duties as a member of the Board of Commissioners; and/or
- Hold any other position as required by law or regulation.

Pedoman GCG Bank juga menetapkan bahwa anggota Direksi dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai berikut:

- Sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pejabat eksekutif pada bank, Perusahaan, dan/atau Lembaga lain;
- Pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
- Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi; dan/atau
- Pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dewan Komisaris dan Direksi Bank BPD Bali telah memenuhi kualifikasi tidak melakukan rangkap jabatan sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan di atas sebagai berikut:

The GCG Guidelines of the Bank also provide that members of the Board of Directors are prohibited from holding any position at the same time as follows

- As a director, commissioner or officer of any bank, corporation and/or other entity;
- In the field of functional duties in a financial institution and/or non-banking financial institution, domiciled in the country or abroad;
- In other positions that may be a conflict of interest with the performance of duties as a member of the Board of Directors; and/or
- Hold any other position as required by law or regulation.

The members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of Bank BPD Bali have met the qualifications for holding no concurrent positions as set forth in the above provisions as follows:

Nama Name	Posisi Position	Kepengurusan pada Perusahaan/Institusi Lain Management in Other Companies/Institutions		
		Sebagai Anggota Dewan Komisaris As a Member of the Board of Commissioners	Sebagai Anggota Direksi As a Member of the Board of Directors	Jabatan Lainnya Other Positions
Dewan Komisaris Board of Commissioners				
I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.	Komisaris Utama Independen President Commissioner and Independent Commissioner	-	-	-
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	Komisaris Non Independen Non Independent Commissioner	-	-	-
I Gede Darmawa, S.E., M.Si.	Komisaris Non Independen Non Independent Commissioner	-	-	-
Insinyur Gede Arimbawa	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-	-
I Nyoman Suparsa Widana, S.E., M.M.	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-	-
Direksi Board of Directors				
I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.	Direktur Utama President Director	-	-	-
Ida Bagus Gede Setia Yasa	Direktur Operasional & TI Director of Operational & TI	-	-	-
I Nyoman Sumanaya, S.E., M.M.	Direktur Bisnis Director of Business	-	-	-
Made Lestara Widiatmika	Direktur Kredit Director of Loan	-	-	-
Drs. I Wayan Sutela Negara	Direktur Kepatuhan Director of Compliance	-	-	-



Pengungkapan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Disclosure of Shareholdings of The Board of Commissioners and Directors

Ketentuan Kepemilikan Saham

Dewan Komisaris dan Direksi, sebagaimana yang ditetapkan dalam Pedoman GCG Bank, memiliki kewajiban untuk mengungkapkan kepemilikan saham 5% atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan, maupun pada bank dan/atau Perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Selain itu, Direksi dilarang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada perusahaan lain.

Semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank BPD Bali tidak ada yang memiliki saham pada Bank, Lembaga Keuangan non Bank dan Perusahaan Lain sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini:

Share Ownership Rules

The Board of Commissioners and Directors must disclose 5% or more shareholdings, either in the Bank or other banks and/or companies domiciled in the country or abroad, as stipulated in the Bank's GCG Guidelines. In addition, members of the Board of Directors may not individually or collectively own shares in excess of 25% of the paid-up capital of other companies.

All the members of the Board of Commissioners and the Directors of Bank BPD Bali do not hold any shares in banks, non-bank financial institutions and other companies as shown in the table below:

Nama Name	Posisi Position	Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi Shareholdings of members of the Board of Directors and Commissioners		
		BPD Bali	Bank Lain Other Banks	Perusahaan Lain dan Lembaga Keuangan Non Bank Other Companies and Non-Bank Financial Institutions
Dewan Komisaris Board of Commissioners				
I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.	Komisaris Utama Independen President Commissioner and Independent Commissioner	-	-	-
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	Komisaris Non Independen Non Independent Commissioner	-	-	-
I Gede Darmawa, S.E., M.Si.	Komisaris Non Independen Non Independent Commissioner	-	-	-
Insinyur Gede Arimbawa	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-	-
I Nyoman Suparsa Widana, S.E., M.M.	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-	-
Direksi Board of Directors				
I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.	Direktur Utama President Director	-	-	-
Ida Bagus Gede Setia Yasa	Direktur Operasional & TI Director of Operational & TI	-	-	-
I Nyoman Sumanaya, S.E., M.M.	Direktur Bisnis Director of Business	-	-	-
Made Lestara Widiatmika	Direktur Kredit Director of Loan	-	-	-
Drs. I Wayan Sutela Negara	Direktur Kepatuhan Director of Compliance	-	-	-

Rapat Gabungan

Joint Meeting

Ketentuan dan Penyelenggaraan Rapat Gabungan POJK Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum mewajibkan Direksi untuk menyelenggarakan rapat Direksi bersama dengan dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Selaras dengan ketentuan POJK tersebut, Pedoman GCG Bank juga menetapkan ketentuan yang sama terkait rapat Direksi dengan Dewan Komisaris antara lain dalam rangka Direksi memohon arahan atau petunjuk, atau melaporkan jalan pengurusan Bank BPD Bali kepada Dewan Komisaris.

Selanjutnya, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 50% dari jumlah anggota Direksi atau wakilnya yang sah dan juga dihadiri oleh lebih dari 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau wakilnya yang sah.

Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris Bank Bali diselenggarakan sebanyak 12 (dua belas) kali atau lebih banyak dibandingkan ketentuan yang berlaku selama tahun 2024 sebagaimana yang dijelaskan pada tabel berikut ini:

POJK on the Implementation of Governance for Commercial Banks requires the Board of Directors to hold regular meetings of the Board of Directors together with the Board of Commissioners at least 1 (one) time every 4 (four) months. In line with the provisions of the POJK, the Bank's GCG Guidelines provide the same provisions regarding meetings of the Board of Directors with the Board of Directors, inter alia, in order for the Board of Directors to request directions or instructions or to report to the Board of Commissioners on the management of Bank BPD Bali.

Furthermore, a meeting of the Board of Directors with the Board of Commissioners is valid and entitled to make binding decisions if it is attended by more than 50% of the total number of members of the Board of Directors or their authorized representatives and also attended by more than 50% of the total number of members of the Board of Commissioners or their authorized representatives.

The meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners of Bank BPD Bali have been held 12 (twelve) times or more as compared to the provisions in force during the year 2024, as explained in the following table:

Nama Name	Posisi Position	Rapat Gabungan Joint Meetings		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate (%)
Dewan Komisaris Board of Commissioners				
I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.	Komisaris Utama Independen President Commissioner and Independent Commissioner	12	12	100,00%
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	Komisaris Non Independen Non Independent Commissioner	12	12	100,00%
I Gede Darmawa, S.E., M.Si.	Komisaris Non Independen Non Independent Commissioner	12	11	91,67%
Insinyur Gede Arimbawa	Komisaris Independen Independent Commissioner	12	12	100,00%
I Nyoman Suparsa Widana, S.E., M.M.	Komisaris Independen Independent Commissioner	12	12	100,00%
Direksi Board of Directors				
I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.	Direktur Utama President Director	12	12	100,00%
Ida Bagus Gede Setia Yasa	Direktur Operasional & TI Director of Operational & TI	12	12	100,00%
I Nyoman Sumanaya, S.E., M.M.	Direktur Bisnis Director of Business	12	11	91,67%
Made Lestara Widiatmika	Direktur Kredit Director of Loan	12	12	100,00%
Drs. I Wayan Sutela Negara	Direktur Kepatuhan Director of Compliance	12	12	100,00%
Rata-rata kehadiran Average Attendance			11,80	99,07%



Risalah Rapat Gabungan

Minutes of the Joint Meeting

Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris dibuat Risalah Rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menandatangani Risalah Rapat Direksi sebagai bukti turut mengetahui atas hal-hal yang dibicarakan yang dibubuhkan pada lembar penandatanganan tersendiri. Ringkasan risalah rapat gabungan disajikan pada tabel berikut ini:

All matters discussed and decided at the joint meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall be recorded in the minutes of the meeting, signed by the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners present, and submitted to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners. The Board of Commissioners shall sign the Board minutes as evidence of their knowledge of the matters discussed, which shall be on a separate signature sheet. The following table summarizes the minutes of the joint meetings:

No	Tanggal Date	Agenda	Peserta Participants
1	22/01/2024	Pembahasan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 dan hal-hal strategis lainnya <i>Discussion of the Annual General Meeting for FY 2023 and other strategic issues</i>	Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris <i>All Directors and Commissioners</i>
2	07/02/2024	Presentasi Hasil Penyusunan <i>Basic Design</i> Pembangunan Gedung Kantor Pusat Bank BPD Bali <i>Presentation of the Results of the Preparation of the Basic Design for the Construction of the Head Office Building of Bank BPD Bali</i>	Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris <i>All Directors and Commissioners</i>
3	22/02/2024	Pembahasan Kajian Remunerasi Pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2024 <i>Discussion of the Study on the Remuneration of the Management of PT Bank Pembangunan Daerah Bali in 2024</i>	Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris <i>All Directors and Commissioners</i>
4	30/04/2024	Pembahasan Pencapaian Kinerja Bank BPD Bali dan hal-hal strategis lainnya <i>Discussion on the performance of Bank BPD Bali and other strategic matters</i>	Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris <i>All Directors and Commissioners</i>
5	21/05/2025	Pembahasan: 1. Perkembangan dalam penyelesaian proses Kepailitan PT Karya Cipta Putera Pratama (dalam Pailit) 2. Evaluasi target dan pencapaian kredit Semester I Tahun 2024 <i>Discussion:</i> 1. Developments in the settlement of the bankruptcy proceedings of PT Karya Cipta Putera Pratama (in bankruptcy) 2. Evaluation of targets and credit performance for Semester I of 2024	Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris <i>All Directors and Commissioners</i>
6	26/07/2024	Pembahasan Pencapaian Kinerja Bank BPD Bali dan hal-hal strategis lainnya <i>Discussion of the performance achievements of Bank BPD Bali and other strategic matters</i>	Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris <i>All Directors and Commissioners</i>
7	01/08/2024	Pembahasan Perkembangan Penyelesaian PT KCPP (dalam pailit) <i>Discussion on the progress of the settlement of PT KCPP (in bankruptcy)</i>	Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris <i>All Directors and Commissioners</i>
8	06/08/2024	Pembahasan Strategi Ketahanan Siber dan Pengamanan Data Nasabah <i>Discussion on cyber resilience strategy and customer data security</i>	Direktur Operasional & TI bersama seluruh Dewan Komisaris <i>Director of Operations & IT together with the full Board of Commissioners</i>
9	21/08/2024	Pembahasan: 1. Penerapan APU, PPT & PPPSPM 2. Mitigasi dalam rangka Pemilu 2024 3. Mitigasi atas maraknya Judi <i>Online</i> <i>Discussion:</i> 1. Implementation of APU, PPT & PPPSPM 2. Mitigation related to 2024 Regional Elections 3. Mitigation the rise of online gambling	Direktu Kepatuhan bersama Dewan Komisaris sedangkan 1 (satu) Komisaris yaitu I Gede Darwana tidak mengikuti rapat <i>Director of Compliance together with the Board of Commissioners, while 1 (one) Commissioner, I Gede Darwana, did not attend the meeting</i>
10	07/10/2024	Pembahasan Pencapaian Kinerja Bank BPD Bali dan hal-hal strategis lainnya <i>Discuss the performance of Bank BPD Bali and other strategic matters</i>	Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris <i>All Directors and Commissioners</i>
11	30/10/2024	Pembahasan Perubahan Peraturan Dana Pensiun <i>Discussion of changes to the pension fund regulations</i>	Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris <i>All Directors and Commissioners</i>
12	30/12/2024	Presentasi Laporan Akhir Rancangan Detail (<i>Detail Engineering Design (DED)</i>) Pembangunan Gedung Kantor Pusat Bank BPD Bali <i>Presentation of the Final Report of the Detailed Engineering Design (DED) for the construction of Bank BPD Bali Head Office Building</i>	Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris <i>All Directors and Commissioners</i>

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Performance Assessment of The Board of Commissioners and Board of Directors

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Berpedoman pada Standar Operasional Prosedur Penerapan Tata Kelola Bank BPD Bali, penilaian kinerja Dewan Komisaris sebagai salah satu struktur Tata Kelola Bank adalah melalui penilaian *self-assessment* GCG dimana Dewan Komisaris merupakan salah satu komponen *governance structure*.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Self-assessment GCG termasuk aspek penilaian Dewan Komisaris sebagai salah satu komponen *governance structure* dilakukan setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember.

Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris merupakan salah satu aspek penilaian *self-assessment* GCG yang selanjutnya aspek penilaiannya dikategorikan menjadi *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.

- Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.
- Penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.
- Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil penerapan prinsip Tata Kelola yang baik serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank.

Penilaian *governance structure* selanjutnya diturunkan menjadi aspek 16 (enam belas) kategori penilaian, *governance process* terdiri 17 (tujuh belas) kategori penilaian, dan *governance outcome* terdiri 6 (enam) kategori penilaian.

Penetapan peringkat faktor Tata Kelola dikategorikan ke dalam 5 (lima) peringkat: Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5. Urutan peringkat faktor Tata Kelola yang lebih kecil mencerminkan penerapan Tata Kelola yang lebih baik.

Performance Assessment of the Board of Commissioners

Based on the Standard Operating Procedure for the Implementation of Bank BPD Bali's Governance, the performance assessment of the Board of Commissioners as one of the Bank's governance structures is done through a GCG Self-Assessment where the Board of Commissioners is one of the components of the governance structure.

Procedure for the performance assessment of the Board of Commissioners

The GCG self-assessment, including the evaluation aspect of the Board of Commissioners as one of the components of the governance structure, is conducted each semester for positions at the end of June and end of December.

Criteria for evaluating the performance of the Board of Commissioners

The performance of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners is one aspect of the GCG self-assessment, which is then categorized into *governance structure*, *governance process*, and *governance outcome*.

- The *governance structure* assessment aims to evaluate the adequacy of the Bank's governance structure and infrastructure so that the process of implementing good governance principles produces results that are consistent with the expectations of the Bank's stakeholders.
- The *governance process* assessment aims to evaluate the effectiveness of the process of implementing good governance principles, supported by the adequacy of the Bank's governance structure and infrastructure, so that it produces results that meet the expectations of the Bank's stakeholders.
- The *governance results* assessment aims to evaluate the quality of the results that meet the expectations of the Bank's stakeholders as a result of the implementation of good governance principles supported by the adequacy of the Bank's governance structure and infrastructure.

The *governance structure* assessment is further divided into 16 (sixteen) assessment categories, the *governance process* assessment consists of 17 (seventeen) assessment categories, and the *governance result* assessment consists of 6 (six) assessment categories.

The determination of the Governance Factor rankings is divided into 5 (five) ranks: Rank 1, Rank 2, Rank 3, Rank 4, and Rank 5. A lower ranking on the Governance factor reflects a better implementation of governance practices.



No	Kriteria Criteria	Skor Penilaian Assessment Skor	
		Juni June	Desember December
Governance Structure			
1	Jumlah Anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah Anggota Direksi. <i>The number of members of the Board of Commissioners shall be at least 3 (three) persons and shall not exceed the number of members of the Board of Directors.</i>	1	1
2	Paling sedikit 1 (satu) Anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia. <i>At least 1 (one) member of the Board of Commissioners shall be a resident of Indonesia.</i>	1	1
3	Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. <i>At least 50% (fifty percent) of the total number of members of the Board of Commissioners shall be Independent Commissioners.</i>	1	1
4	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam POJK Penerapan Tata Kelola Bank Umum, yaitu : a) merangkap jabatan sebagai Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada satu lembaga atau perusahaan bukan lembaga keuangan; atau b) merangkap jabatan sebagai Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan bukan lembaga keuangan anak bukan Bank yang dikendalikan Bank; c) Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari Pemegang Saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau d) Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba. <i>The Board of Commissioners shall not hold concurrent positions, except for matters specified in the POJK on the Implementation of General Bank Governance, namely</i> a) <i>holding concurrent positions as a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners, or an executive officer in an institution or company that is not a financial institution; or</i> b) <i>holding concurrent positions as a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, or executive officer performing supervisory functions in 1 (one) non-financial institution company that is a non-bank subsidiary controlled by the Bank;</i> c) <i>Non-independent members of the Board of Commissioners perform functional duties for the Bank's shareholders in the form of legal entities in the Bank's group of companies; and/or</i> d) <i>Members of the Board of Commissioners hold positions in non-profit organizations or institutions.</i>	1	1
5	Komisaris Independen dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 2 (dua) Komite pada Bank yang sama. <i>Independent Commissioners may simultaneously hold the position of Committee Chairperson in a maximum of 2 (two) Committees of the same Bank.</i>	1	1
6	Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris. <i>The majority of the members of the Board of Commissioners are not related within the second degree to members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.</i>	1	1
7	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat. <i>The Board of Commissioners has policies and operating procedures, including work ethics, working hours and meetings.</i>	1	1
8	Seluruh Anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. <i>All members of the Board of Commissioners shall be of sufficient integrity, competence and financial standing.</i>	1	1
9	Komisaris Independen yang berasal dari mantan Anggota Direksi Bank atau mantan Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen, dan tidak melakukan fungsi pengawasan serta berasal dari Bank yang bersangkutan, telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling singkat selama 1 (satu) tahun. <i>Independent Commissioners who are former members of the Bank's Board of Directors or former executive officers of the Bank, or who have a relationship with the Bank that may affect their ability to act independently, and who do not perform supervisory functions and come from the Bank concerned, have had a cooling off period of at least 1 (one) year.</i>	1	1
10	Komisaris Independen yang berasal dari Komisaris Non Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling singkat selama 6 (enam) bulan, dan telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. <i>Independent Commissioners who become Non-Independent Commissioners after fulfilling the requirements to become Independent Commissioners have undergone a cooling off period of at least 6 (six) months and have received approval from the Financial Services Authority.</i>	1	1

No	Kriteria Criteria	Skor Penilaian Assessment Skor	
		Juni June	Desember December
11	Komisaris Independen yang diangkat kembali setelah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut telah ditetapkan dalam rapat Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tetap dapat bertindak Independen, dan Dewan Komisaris Independen yang bersangkutan telah menyatakan mengenai independensinya dalam RUPS. <i>Independent Commissioners who are reappointed after serving 2 (two) consecutive terms have been determined by a meeting of the Board of Commissioners to still be able to act independently, and the Independent Commissioner has declared his or her independence in the GMS.</i>	1	1
12	Seluruh Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen. <i>All Independent Commissioners have no financial, managerial, ownership or family relationships with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or controlling shareholders, or with the Bank, that may impair their ability to act independently.</i>	1	1
13	Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. <i>All members of the Board of Commissioners have passed the Fit and Proper Test and have received a letter of approval from the Financial Services Authority.</i>	1	1
14	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. <i>The members of the Board of Commissioners have competencies appropriate and relevant to their positions to perform their duties and responsibilities and are able to apply their competencies in the performance of their duties and responsibilities.</i>	1	1
15	Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. <i>The members of the Board of Commissioners shall have the willingness and ability to engage in continuous learning in order to increase their knowledge of banking and the latest developments in the financial sector or other fields that support the performance of their duties and responsibilities.</i>	1	1
16	Komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik. <i>The composition of the Board of Commissioners does not meet the requirements due to the intervention of the owner.</i>	1	1
Governance Process			
1	Penggantian dan/atau pengangkatan Anggota Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS. <i>The replacement and/or appointment of Commissioners has taken into account the recommendations of the Nomination Committee or the Remuneration and Nomination Committee and has been approved by the GMS.</i>	1	1
2	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas untuk memastikan terselenggaranya penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. <i>The Board of Commissioners has carried out its duties to ensure the implementation of good governance principles in all of the Bank's business activities at all levels of the organization.</i>	1	1
3	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi. <i>The Board of Commissioners has periodically and at all times monitored and advised the Board of Directors on the performance of its duties and responsibilities.</i>	1	1
4	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. <i>In carrying out its supervisory duties, the Board of Commissioners has directed, monitored and evaluated the implementation of the Bank's strategic policies.</i>	1	1



No	Kriteria Criteria	Skor Penilaian Assessment Skor	
		Juni June	Desember December
5	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. <i>The Board of Commissioners is not involved in decisions concerning the operational activities of the Bank, except in relation to the provision of funds to related parties and in such matters as are provided for in the Bank's Articles of Association and/or laws and regulations for the exercise of its supervisory function.</i>	1	1
6	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya. <i>The Board of Commissioners has ensured that the Board of Directors has followed up on the audit findings and recommendations of the Bank's Internal Audit Department (SKAI), the external auditors, the results of supervision by the Financial Services Authority and/or the results of supervision by other authorities.</i>	2	2
7	Dewan Komisaris memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, serta keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. <i>The Board of Commissioners notifies the Financial Supervisory Authority no later than 7 (seven) working days after the discovery of violations of laws and regulations in the financial and banking sector, as well as conditions or estimated conditions that may endanger the continuity of the Bank's business. The Board of Commissioners has performed its duties and responsibilities independently.</i>	1	1
8	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. <i>The Board of Commissioners has carried out its duties and responsibilities independently.</i>	1	1
9	Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi. <i>The Board of Commissioners has established an Audit Committee, a Risk Monitoring Committee and a Remuneration and Nomination Committee.</i>	1	1
10	Pengangkatan anggota Komite-Komite telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. <i>The Board of Directors has appointed the members of the Committees based on the decision of the Board of Commissioners.</i>	1	1
11	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif. <i>The Board of Commissioners has ensured that the established committees have performed their duties effectively.</i>	1	1
12	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. <i>The Board of Commissioners has allocated sufficient time for the optimal performance of its duties and responsibilities.</i>	1	1
13	Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat dan diselenggarakan secara berkala, paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun, serta dihadiri secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun, atau melalui teknologi telekonferensi bagi Komisaris Non Independen dalam hal Komisaris Non Independen tidak dapat menghadiri rapat secara fisik. <i>The Board of Commissioners shall discuss matters in accordance with the meeting agenda and shall meet regularly, at least four (4) times a year, and shall participate physically at least two (2) times a year, or via teleconference technology for Non-Independent Commissioners who are unable to physically attend the meeting.</i>	1	1
14	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat. <i>Decisions of the Board of Commissioners shall be made by consensus or, in the absence of consensus, by majority vote. Members of the Board of Commissioners shall not use the Bank for personal, family, and/or other party interests that may harm or reduce the Bank's profits.</i>	1	1
15	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. <i>Members of the Board of Commissioners do not take and/or receive personal benefits from the Bank other than remuneration and other facilities determined by the GMS.</i>	1	1
16	Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. <i>The Owner shall not interfere with the performance of the duties of the Board of Commissioners in a manner that may disrupt the Bank's operations, reduce the Bank's profits and/or cause losses to the Bank.</i>	1	1

No	Kriteria Criteria	Skor Penilaian Assessment Skor	
		Juni June	Desember December
17	Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank. <i>The owner interferes with the performance of the duties of the Board of Commissioners, which disrupts the operational activities of the Bank, resulting in a reduction of the Bank's profits and/or causing losses to the Bank.</i>	1	1
Governance Outcome			
1	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi secara jelas. <i>The results of the meeting of the Board of Commissioners have been recorded in the minutes of the meeting and are well documented, including any dissenting opinions that clearly arise.</i>	1	1
2	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh Anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait. <i>The results of the meetings of the Board of Commissioners have been distributed to all members of the Board of Commissioners and related parties.</i>	1	1
3	Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi. <i>The results of the Board of Commissioners meeting are recommendations and/or policies that can be implemented by the GMS and/or the Board.</i>	1	1
4	Dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola, Anggota Dewan Komisaris paling sedikit telah mengungkapkan : - kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; - hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris lain dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank; - remunerasi dan fasilitas lain; - opsi saham (<i>shares option</i>) yang dimiliki Dewan Komisaris. <i>In the Governance Implementation Report, the members of the Board of Commissioners have disclosed at least the following</i> <i>Shareholdings of 5% (five percent) or more in the Bank concerned or in other banks and companies domiciled in the country or abroad;</i> <i>Financial and family relationships with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners and/or controlling shareholders of the Bank;</i> <i>Compensation and other benefits;</i> <i>stock options held by the Board of Commissioners.</i>	1	1
5	Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan. Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Dewan Komisaris. <i>To enhance the knowledge, expertise and skills of the members of the Board of Commissioners in the oversight of the Bank, as evidenced, inter alia, by the improvement of the Bank's performance, the resolution of issues facing the Bank and the achievement of results in line with the expectations of stakeholders. Strengthening the culture of continuous learning in order to increase the knowledge of banking and the latest developments related to the financial sector or other fields that support the performance of the duties and responsibilities of the members of the Board of Commissioners.</i>	1	1
6	Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. <i>The operational activities of the Bank are disrupted and/or provide unfair benefits to the owner, with the effect of reducing the Bank's profits and/or causing losses to the Bank, due to the owner's intervention in the composition and/or implementation of the duties of the Board of Commissioners.</i>	1	1



Pihak yang Melakukan Penilaian

Dewan Komisaris melakukan penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola secara berkala, yang dilakukan paling sedikit setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember dengan menggunakan kertas kerja penilaian sendiri yang diatur dalam SOP Penerapan Tata Kelola Bank BPD Bali.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Adapun capaian kinerja Dewan Komisaris berdasarkan hasil *Self-assessment* GCG untuk aspek pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disajikan pada tabel berikut ini:

Parties Conducting Assessments

The Board of Commissioners periodically conducts its own assessment of the implementation of governance, which is conducted at least every six months for the positions at the end of June and the end of December, using the self-assessment worksheets regulated in the SOP for the Implementation of Governance at Bank BPD Bali.

Results of the Performance Assessment of the Board of Commissioners

The performance results of the Board of Commissioners, based on the results of the GCG self-assessment for the aspects of the implementation of the duties and responsibilities, are presented in the following table:

Hasil Penilaian Sendiri (Self-Assessment) Penerapan Tata Kelola Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Self-Assessment Results of Governance Implementation of the Board of Commissioners duties and responsibilities		
	Peringkat Rating	Definisi Peringkat Rating Definition
Individu Individual	1	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank. <i>Reflects that the Bank's management has implemented generally very good governance. This is reflected in the very adequate compliance with the Governance Principles. In the case of weaknesses in the implementation of the Governance Principles, these weaknesses are generally not of a significant nature and can be corrected without delay by the management of the Bank.</i>
Konsolidasi Consolidation	-	-
Analisis Analysis		

A. Governance Structure

- Faktor-faktor positif aspek *governance structure* Bank adalah:
 - Komposisi dan eksistensi Dewan Komisaris telah sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Integritas, kompetensi dan reputasi keuangan anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Faktor-faktor negatif aspek *governance structure* Bank adalah tidak ada faktor-faktor negatif signifikan yang mempengaruhi aspek *governance structure*.

B. Governance Process

- Faktor-faktor positif aspek *governance process* Bank adalah:
 - Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola, telah berjalan secara efektif, dan Dewan Komisaris terus berkomitmen untuk melakukan penyempurnaan.
 - Aspek transparansi dan akuntabilitas anggota Dewan Komisaris baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku.
- Faktor-faktor negatif aspek *governance process* Bank adalah Tidak ada faktor-faktor negatif signifikan yang mempengaruhi aspek *governance process*.

C. Governance Outcome

- Faktor-faktor positif aspek *governance outcome* Bank adalah: Rekomendasi Dewan Komisaris yang disampaikan kepada Direksi telah ditindaklanjuti dan memberikan manfaat bagi kelangsungan pertumbuhan Bank.
- Faktor-faktor negatif aspek *governance outcome* Bank adalah Tidak ada faktor-faktor negatif signifikan yang mempengaruhi aspek *governance outcome*.

A. Governance Structure

- Positive factors of the Bank's governance structure aspect are*
 - The composition and existence of the Board of Commissioners are in accordance with the Articles of Association and applicable laws and regulations.*
 - The integrity, competence and financial reputation of the members of the Board of Commissioners are commensurate with the size and complexity of the Bank's business and have complied with applicable regulations.*
- There are no significant negative factors affecting the Bank's governance structure.*

B. Governance Process

- Positive factors of the Bank's governance process aspect are*
 - The implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners has fully complied with the principles of governance, has been operating effectively, and the Board of Commissioners remains committed to making improvements.*
 - The transparency and accountability aspects of the members of the Board of Commissioners are good and have never violated any applicable provisions/regulations.*
- Negative factors of the Bank's governance process aspect are that there are no significant negative factors affecting the governance process aspect.*

C. Governance Outcome

- Positive factors of the Bank's governance outcome aspect are* The recommendations of the Board of Commissioners to the Board of Directors have been followed up and are beneficial to the continued growth of the Bank.
- Negative factors of the Bank's governance outcome aspect are* There are no significant negative factors affecting the governance outcome aspect.

Penilaian Kinerja Direksi

Berpedoman pada Standar Operasional Prosedur Penerapan Tata Kelola Bank BPD Bali, penilaian kinerja Direksi sebagai salah satu struktur Tata Kelola Bank adalah melalui penilaian *self-assessment* GCG dimana Direksi merupakan salah satu komponen *governance structure*.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi

Self-assessment GCG termasuk aspek penilaian Direksi sebagai salah satu komponen *governance structure* dilakukan setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember.

Kriteria Evaluasi Kinerja Direksi

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi merupakan salah satu aspek penilaian *Self-assessment* GCG yang selanjutnya aspek penilaiannya dikategorikan menjadi *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.

- Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.
- Penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.
- Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil penerapan prinsip Tata Kelola yang baik serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank.

Penilaian *governance structure* selanjutnya diturunkan menjadi aspek 16 (enam belas) kategori penilaian, *governance process* terdiri 14 (empat belas) kategori penilaian, dan *governance outcome* terdiri 10 (sepuluh) kategori penilaian.

Penetapan peringkat faktor Tata Kelola dikategorikan ke dalam 5 (lima) peringkat: Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5. Urutan peringkat faktor Tata Kelola yang lebih kecil mencerminkan penerapan Tata Kelola yang lebih baik.

Performance Assessment of the Board of Directors

Based on the Standard Operating Procedure for the Implementation of Bank BPD Bali's Governance, the performance assessment of the Board of Directors as one of the Bank's governance structures is done through a GCG Self-Assessment where the Board of Directors is one of the components of the governance structure.

Procedure for the performance assessment of the Board of Directors

The GCG self-assessment, including the evaluation aspect of the Board of Directors as one of the components of the governance structure, is conducted each semester for positions at the end of June and end of December.

Criteria for evaluating the performance of the Board of Directors

The performance of the duties and responsibilities of the Board of Directors is one aspect of the GCG self-assessment, which is then categorized into governance structure, governance process, and governance outcome.

- *The governance structure assessment aims to evaluate the adequacy of the Bank's governance structure and infrastructure so that the process of implementing good governance principles produces results that are consistent with the expectations of the Bank's stakeholders.*
- *The governance process assessment aims to evaluate the effectiveness of the process of implementing good governance principles, supported by the adequacy of the Bank's governance structure and infrastructure, so that it produces results that meet the expectations of the Bank's stakeholders.*
- *The governance results assessment aims to evaluate the quality of the results that meet the expectations of the Bank's stakeholders as a result of the implementation of good governance principles supported by the adequacy of the Bank's governance structure and infrastructure.*

The governance structure assessment is further divided into 16 (sixteen) assessment categories, the governance process assessment consists of 14 (fourteen) assessment categories, and the governance result assessment consists of 10 (ten) assessment categories with the following ranking of assessment results:

The determination of the Governance Factor rankings is divided into 5 (five) ranks: Rank 1, Rank 2, Rank 3, Rank 4, and Rank 5. A lower ranking on the Governance factor reflects a better implementation of governance practices.



No	Kriteria Criteria	Skor Penilaian Assessment Skor	
		Juni June	Desember December
Governance Structure			
1	Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang. The number of members of the Board of Directors is at least 3 (three) persons.	1	1
2	Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia. All members of the Board of Directors are resident in Indonesia.	1	1
3	Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank, kecuali untuk Bank Syariah (minimal 2 (dua) tahun). The majority of the members of the Board of Directors have at least 5 (five) years of operational experience as bank executive officers, except for Shariah Banks (at least 2 (two) years).	1	1
4	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam POJK Tata Kelola bagi Bank Umum yaitu menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank. Members of the Board of Directors shall not hold concurrent positions as members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or executive officers in banks, companies and/or other institutions, except for matters specified in the POJK on Governance for Commercial Banks, namely, becoming a member of the Board of Commissioners to perform supervisory duties over the participation in non-bank subsidiaries controlled by the Bank.	1	1
5	Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. The members of the Board of Directors shall not, individually or collectively, own shares exceeding 25% (twenty-five percent) of the paid-up capital of any other company.	1	1
6	Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris. The majority of the members of the Board of Directors do not have family relationships up to the second degree with other members of the Board of Directors and/or with members of the Board of Commissioners.	1	1
7	Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi. When replacing and/or appointing members of the Board of Directors, the recommendations of the Nomination Committee or the Remuneration and Nomination Committee are taken into account.	1	1
8	Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat. The Board of Directors has a set of Guidelines and Regulations for the Board of Directors, including rules on work ethics, working hours and meetings.	1	1
9	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus. The Board does not use individual consultants and/or professional services as advisors, except for special projects, which are based on a clear contract covering the scope of work, responsibilities, time and cost, and the consultant is an independent party with the qualifications to work on special projects.	1	1
10	Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. All board members are of integrity, competence and financial standing.	1	1
11	Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga. The President or Principal Director is from a party that is independent of the controlling shareholder, i.e. has no financial, managerial, shareholding or family ties.	1	1

No	Kriteria Criteria	Skor Penilaian Assessment Skor	
		Juni June	Desember December
12	Seluruh anggota Direksi telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. <i>All members of the Board of Directors have passed a fit and proper assessment and have received a letter of approval from the Financial Services Authority.</i>	1	1
13	Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. <i>The members of the Board of Directors are sufficiently competent and relevant to their position to perform their duties and responsibilities and are able to apply their competence in the performance of their duties and responsibilities.</i>	1	1
14	Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. <i>The members of the Board of Directors have the willingness and ability to engage in continuous learning to enhance their knowledge of banking and the latest developments in the financial sector/other areas that support the performance of their duties and responsibilities.</i>	1	1
15	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. <i>The Board of Directors cultivates continuous learning in order to improve knowledge about banking and the latest developments related to the financial sector/other fields that support the implementation of duties and responsibilities at all levels or levels of the organization.</i>	1	1
16	Komposisi Direksi tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik. <i>The composition of the Board of Directors does not meet the requirements due to the intervention of the owner.</i>	1	1
Governance Process			
1	Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris. <i>The Board of Directors has appointed the members of the Committee based on the decision of the Board of Directors meeting.</i>	1	1
2	Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. <i>The members of the Board of Directors do not grant general powers to other parties that result in the transfer of duties and functions of the Board of Directors.</i>	1	1
3	Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank. <i>The Board of Directors is fully responsible for the management of the Bank.</i>	1	1
4	Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. <i>The Board of Directors manages the Bank in accordance with the powers and responsibilities set forth in the Articles of Association and the laws and regulations.</i>	1	1
5	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap pemegang saham. <i>The Board has performed its duties and responsibilities independently of the shareholders.</i>	1	1
6	Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. <i>The Board of Directors has implemented the principles of good governance in all of the Bank's business activities at all levels of the organization.</i>	1	1
7	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), auditor eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. <i>The Board of Directors has followed the audit findings and recommendations of the Internal Audit Department (SKAI), the external auditors and the results of supervision by the Financial Services Authority and/or the results of supervision by other authorities.</i>	2	2



No	Kriteria Criteria	Skor Penilaian Assessment Skor	
		Juni June	Desember December
8	Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. <i>The Board of Directors has provided the Board of Commissioners with complete, accurate, current and timely data and information.</i>	1	1
9	Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat. <i>Decisions of the Board of Directors were made by consensus or, in the absence of consensus, by majority vote.</i>	1	1
10	Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku. <i>Each decision made by the Board is actionable and consistent with applicable policies, guidelines and operating procedures.</i>	1	1
11	Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi. <i>The Board has established policies and strategic decisions through the Board meeting mechanism.</i>	1	1
12	Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. <i>The Board of Directors shall not use the Bank for personal, family and/or other party interests that may harm or reduce the Bank's profits.</i>	1	1
13	Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). <i>The Board of Directors does not take and/or receive personal benefits from the Bank other than remuneration and other facilities determined by the General Meeting of Shareholders (GMS).</i>	1	1
14	Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank. <i>The owner interferes with the performance of the duties of the Board of Directors, which disrupts the operational activities of the Bank, resulting in reduced profits and/or losses for the Bank.</i>	1	1
Governance Outcome			
1	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. <i>The Board is accountable to shareholders for the performance of its duties through the GMS.</i>	1	1
2	Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh pemegang saham melalui RUPS. <i>The accountability of the Board of Directors for the performance of its duties is accepted by the shareholders through the GMS.</i>	1	1
3	Direksi telah mengungkapkan kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai. <i>The Board of Directors has communicated the Bank's strategic human resources policies to employees through media that are easily accessible to employees.</i>	2	2
4	Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis bank dalam rangka pencapaian misi dan visi bank. <i>The Board of Directors has communicated to employees the direction of the Bank's business in order to achieve the Bank's mission and vision.</i>	2	2
5	Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam rapat Direksi. <i>The results of the Board of Directors' meetings are recorded in the minutes of the meetings and are well documented, including a clear disclosure of dissenting opinions that have arisen in the Board of Directors' meetings.</i>	2	2

No	Kriteria Criteria	Skor Penilaian Assessment Skor	
		Juni June	Desember December
6	Dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola, seluruh anggota Direksi paling kurang telah mengungkapkan: a) kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; b) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank; c) remunerasi dan fasilitas lain; d) opsi saham (<i>share option</i>) yang dimiliki Direksi. <i>In the governance implementation report, all members of the Board of Directors have disclosed at least the following:</i> a) <i>Shareholdings of 5% (five percent) or more in the bank concerned or in other banks and companies domiciled in the country or abroad;</i> b) <i>Financial and family relationships with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and/or controlling shareholders of the Bank;</i> c) <i>Compensation and other benefits;</i> d) <i>Stock options held by members of the Board of Directors.</i>	1	1
7	Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan Bank. <i>To increase the knowledge, expertise and ability of the members of the Board of Directors in managing the Bank, as evidenced by, among other things, improving the performance of the Bank, solving the problems faced by the Bank, and achieving results in accordance with the expectations of the Bank's stakeholders.</i>	2	2
8	Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawab. <i>Increasing the knowledge, expertise and skills of all Bank staff at all levels or parts of the organization, as evidenced by, among other things, increasing individual performance in accordance with roles and responsibilities.</i>	2	2
9	Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan keikutsertaan karyawan Bank dalam sertifikasi perbankan dan/atau pendidikan atau pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu. <i>Strengthening the culture of continuous learning to increase the knowledge of banking and the latest developments related to the financial sector or other fields that support the implementation of duties and responsibilities at all levels or parts of the organization, as evidenced by, among other things, increasing the participation of the Bank's employees in banking certification and/or education or training to develop individual quality.</i>		2
10	Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi. <i>The operational activities of the Bank are disrupted and/or provide undue benefits to the owner, which has the effect of reducing the Bank's profits and/or causing losses to the Bank, due to the owner's intervention in the composition and/or implementation of the duties of the Board of Directors.</i>		1

Pihak yang Melakukan Penilaian

Direksi melakukan penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola secara berkala, yang dilakukan paling sedikit setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember dengan menggunakan kertas kerja penilaian sendiri yang diatur dalam SOP Penerapan Tata Kelola Bank BPD Bali.

Parties Conducting Assessments

The Board of Directors periodically conducts its own assessment of the implementation of governance, which is conducted at least every six months for the positions at the end of June and the end of December, using the self-assessment worksheets regulated in the SOP for the Implementation of Governance at Bank BPD Bali.



Hasil Penilaian Kinerja Direksi

Adapun capaian kinerja Direksi berdasarkan hasil *Self-assessment* GCG untuk aspek pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disajikan pada tabel berikut ini:

Results of the Performance Assessment of the Board of Commissioners

The performance results of the Board of Directors, based on the results of the GCG self-assessment for the aspects of the implementation of the duties and responsibilities, are presented in the following table:

Hasil Penilaian Sendiri (Self-Assessment) Penerapan Tata Kelola Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Self-Assessment Results of Governance Implementation Implementation of the Board of Directors' duties and responsibilities		
	Peringkat Rating	Definisi Peringkat Rating Definition
Individu Individual	2	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan indakan normal oleh manajemen Bank. <i>Reflects that the management of the Bank has put in place governance practices that are generally good. This is reflected in adequate compliance with the Governance Principles. Where there are weaknesses in the implementation of governance principles, these are generally of a minor nature and can be addressed through normal management actions.</i>
Konsolidasi Consolidation	-	-

Analisis Analysis	
A. <i>Governance Structure</i> 1. Faktor-faktor positif aspek <i>governance structure</i> Bank adalah Bank memiliki 5 (lima) orang Direksi yang ditetapkan berdasarkan RUPS Luar Biasa, dimana seluruh anggota Direksi berdomisili di Provinsi Bali. Seluruh Direksi telah memiliki pengalaman di bidang operasional lebih dari 5 (lima) tahun serta telah lulus <i>Fit and Proper Test</i> dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi telah memiliki pedoman tata tertib kerja Direksi. Setiap anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lainnya dan/atau Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Direksi tidak pernah menunjuk penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan. Direksi telah menetapkan arah perencanaan dan pengembangan SDM yang jelas dan terarah sesuai dengan <i>Blueprint</i> SDM. 2. Faktor-faktor negatif aspek <i>governance structure</i> Bank adalah tidak ada. B. <i>Governance Process</i> 1. Faktor-faktor positif aspek <i>governance process</i> Bank adalah Direksi telah memiliki dan menunjuk Komite Manajemen Risiko, Komite Kebijakan Perkreditan, Komite Kredit, ALCO, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Tim Tanggap Insiden Siber, dan Komite Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen sekaligus telah menetapkan anggota Komite dibawah Dewan Komisaris berdasarkan persetujuan rapat Dewan Komisaris. Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Direksi telah melaksanakan tugas sesuai dengan prinsip – prinsip tata kelola yang baik. Direksi telah menetapkan kebijakan umum Direksi dan melaksanakan keputusan yang bersifat strategis. Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan pemeriksaan ekstern dan intern yang dilaksanakan sampai Semester II tahun 2024. Seluruh pengambilan Keputusan Direksi telah dilakukan secara musyawarah mufakat dan dapat diimplementasikan. Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pemegang Saham tidak pernah melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank. 2. Faktor-faktor negatif aspek <i>governance process</i> Bank adalah tidak ada. C. <i>Governance Outcome</i> 1. Faktor-faktor positif aspek <i>governance outcome</i> Bank adalah Direksi telah memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Direksi Tahun Buku 2023 kepada Pemegang Saham dan Otoritas Jasa Keuangan. Pemegang Saham telah menerima pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2024 yang telah tertuang sesuai dengan Akta Nomor 41 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis bank dalam rangka pencapaian misi dan visi bank. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat sebagai dokumen perusahaan. Setiap anggota Direksi telah menandatangani Pakta integritas serta Direksi tidak pernah mendapat intervensi dari pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank atau menyebabkan kerugian Bank. 2. Faktor-faktor negatif aspek <i>governance outcome</i> Bank adalah tidak ada. A. <i>Governance Structure</i> 1. <i>The Bank has 5 (five) Directors appointed on the basis of the Extraordinary GMS, where all members of the Board of Directors reside in the Province of Bali, which is a positive aspect of the Bank's governance structure. All Directors have more than 5 (five) years of operational experience and have passed the Fit and Proper Test and have been approved by the Financial Services Authority. In the performance of its duties and responsibilities, the Board of Directors has in place a Board of Directors Procedure Manual. Each member of the Board of Directors does not have any financial, managerial, shareholding and/or family relationship up to the second degree with other members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners, controlling shareholders or relationships with the Bank that could affect their ability to act independently. The Board of Directors has never hired or retained any individual and/or professional services to advise or consult with the Bank. The Board of Directors has established a clear and focused direction for the planning and development of human resources in accordance with the HR Blueprint. 2.</i> 2. <i>There are no negative aspects of the Bank's governance structure.</i>	

Analisis Analysis

B. Governance Process

1. Positive factors of the Bank's governance process aspect are that the Board of Directors has established and appointed a Risk Management Committee, Credit Policy Committee, Credit Committee, ALCO, Information Technology Steering Committee, Cyber Incident Response Team Committee and Consumer Complaint Handling and Resolution Committee. The Board of Directors has also appointed the members of the Committee under the Board of Commissioners based on the approval of the Board of Commissioners meeting. The Board of Directors does not grant any general authority to any other party that may result in delegating any of the duties and functions of the Board of Directors. The Board of Directors has performed its duties in accordance with the principles of good governance. The Board of Directors has established the general policy of the Company and has implemented strategic decisions. The Board of Directors has been in compliance with all findings of external and internal audits up to the second half of the year. All decisions of the Board of Directors have been taken by consensus and can be put into effect. The members of the Board of Directors do not accept and/or receive any personal benefits from the Bank other than the remuneration and other facilities as determined by the General Meeting of Shareholders (GMS). The shareholders have never intervened in the execution of the duties of the Board of Directors in a way that has disrupted the operational activities of the Bank, resulting in a reduction in the Bank's profits and/or the Bank's losses.
2. There are no negative factors of the Bank's governance process aspect.

C. Governance Outcome

1. The positive factors of the Bank's governance outcome aspect are that the Board of Directors has submitted an accountability report to the shareholders and the Financial Services Authority on the performance of the Board of Directors' duties for the fiscal year 2023. The shareholders have accepted the accountability of the Board of Directors' duties in the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2023, which was held on February 23, 2024, and which has been recorded in accordance with Deed No. 41 on the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders. The Board of Directors has communicated with the employees regarding the direction of the Bank's business in order to achieve the Bank's mission and vision. The results of the Board of Directors' meetings have been recorded in the minutes of the Board of Directors' meetings as a corporate document. Each member of the Board of Directors has signed an Integrity Pact, and the Board of Directors has never received any intervention from the owner that has the effect of reducing the Bank's profits or causing losses to the Bank.
2. There are no negative factors in the Bank's governance outcome aspect.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remuneration of The Board of Commissioners and The Board of Directors

RUPS Tahunan menetapkan besaran remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

The Annual General Meeting determines the amount of the remuneration and other facilities to be provided to the Board of Commissioners and the Board of Directors, taking into account the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

POJK Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum mewajibkan perbankan untuk menerapkan tata kelola dalam pemberian remunerasi. Bank Umum wajib memiliki kebijakan remunerasi secara tertulis bagi Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas syariah, dan pegawai. Terkait dengan hal tersebut, Bank BPD Bali telah memiliki ketentuan yang dimaksud sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Direksi No. 0329/KEP/DIR/SDM/2023 tentang Remunerasi Pengurus Bank yang menggantikan ketentuan sebelumnya yakni Keputusan Direksi No. 0556/KEP/DIR/SDM/2019.

Procedure for Determining the Remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors

The POJK on the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks requires the banks to implement corporate governance in the provision of remuneration. Commercial banks are required to have a written remuneration policy for the Board of Directors, the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board and the employees. In this regard, Bank BPD Bali has the aforementioned provisions as stipulated in the Board of Directors' Decree No. 0329/KEP/DIR/SDM/2023 on Remuneration of Bank Management, which replaces the previous provisions, namely the Board of Directors' Decree No. 0556/KEP/DIR/SDM/2019.

Struktur Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Keputusan Direksi No. 0329/KEP/DIR/SDM/2023 tentang Remunerasi Pengurus Bank tersebut, struktur remunerasi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Remuneration Structure for Members of the Board of Commissioners and Board of Directors

In accordance with the Board of Directors' Resolution No. 0329/KEP/DIR/SDM/2023 on the Remuneration of the Bank's Management, the remuneration structure for the members of the Board of Commissioners is as follows:



Tabel Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Tabel Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Types of Remuneration and Other Facilities	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors	
	Jumlah yang Diterima Dalam 1 Tahun Amount Received in 1 Year		Jumlah yang Diterima Dalam 1 Tahun Amount Received in 1 Year	
	Orang Person	Rp (Juta) Rp (Million)	Orang Person	Rp (Juta) Rp (Million)
Remunerasi (gaji, honorarium, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) Remuneration (salary, honorarium, bonus, routine allowance, tantiem, and other benefits in kind)	5	16.103	5	65.298
Fasilitas lain dalam bentuk natura (transportasi, asuransi kesehatan) yang :				
a) dapat dimiliki	5	135	5	216
b) tidak dapat dimiliki	5	618	5	668
Other benefits in kind (transportation, health insurance) that				
a) can be owned				
b) cannot be owned				
Jumlah Total		16.856		66.182

Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut:

The annual compensation is grouped into income levels as follows:

Jumlah Remunerasi Dalam Setahun Total Remuneration in a Year	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Diatas di atas Rp2 miliar Above Above Rp2 billion	4	5
Diatas di atas Rp1 miliar s.d Rp2 miliar Above Above Rp1 billion to Rp2 billion	1	-
Diatas di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar Above Above Rp500 million to Rp1 billion	-	-
Rp500 juta ke bawah Below Rp500 million	-	-

Rasio Gaji/Honorarium Salary/Honorarium Ratio

Informasi mengenai rasio gaji Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan Perusahaan untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Salary ratio information for the Company's Board of Commissioners, Directors and employees for 2024 and 2023 is as follows:

Perihal Regarding	2024	2023
Direktur Utama terhadap Direktur President Director to Director	1 : 0,9	1 : 0,9
Komisaris Utama terhadap Anggota Dewan Komisaris President Commissioner to Member of the Board of Commissioners	1 : 0,9	1 : 0,9
Direktur Utama terhadap Komisaris Utama President Director to President Commissioner	1 : 0,6	1 : 0,6

ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

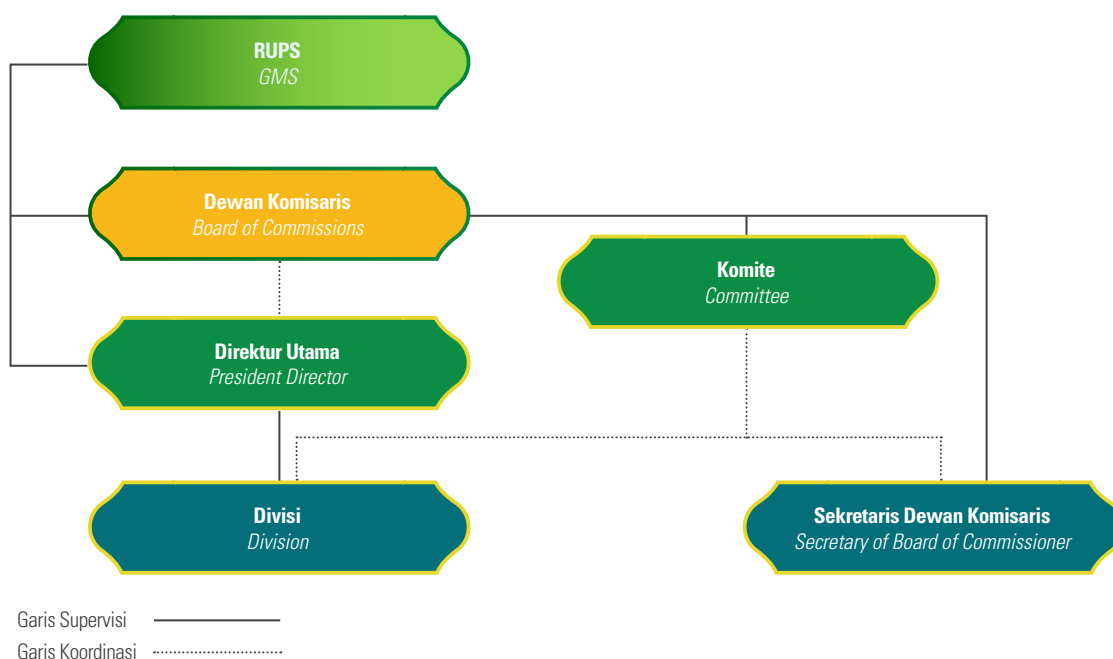
Organ Pendukung Dewan Komisaris

Sebagaimana diatur dalam Pedoman GCG Bank Bali, Dewan Komisaris memiliki kewajiban untuk membentuk komite yang paling sedikit terdiri atas Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Pemantau Risiko. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Dewan Komisaris wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Selanjutnya, Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku.

Tujuan pembentukan ketiga Komite Dewan Komisaris adalah memastikan penerapan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; dan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. Hal ini sejalan dengan bagan organisasi berikut ini:

In accordance with the Bank Bali GCG Guidelines, the Board of Commissioners is required to form a committee consisting of at least an Audit Committee, a Remuneration and Nomination Committee and a Risk Monitoring Committee. The appointment and dismissal of the members of the committee of the Board of Commissioners must be made by the Board of Directors based on the decision of the meeting of the Board of Commissioners. In addition, the Board is required to evaluate the performance of these committees at least at the end of each fiscal year.

The purpose of establishing the three Committees of the Board of Commissioners is to ensure the implementation of good governance in the conduct of the Bank's business activities at all levels or levels of the organization, in accordance with the provisions of laws and regulations; to oversee the performance of the duties and responsibilities of the Board of Directors and to provide advice to the Board of Directors; and to direct, monitor and evaluate the implementation of the Bank's strategic policies. This is in accordance with the following organizational chart:



Wewenang Komite Dewan Komisaris

Authority of the Board of Commissioners Committee

Bank BPD Bali telah memiliki Piagam Komite Dewan Komisaris yang terakhir kali ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 003/KEP/BPD/2023 tanggal 29 Desember 2023. Piagam Komite Dewan Komisaris terbaru sekaligus menggantikan Pedoman dan Tata Kerja Komite Bank BPD Bali yang ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 002/KEP/BPD/2021 tanggal 27 Desember 2021. Piagam Komite Dewan Komisaris mengatur beragam hal termasuk di dalamnya terkait wewenang Komite Dewan Komisaris.

Bank BPD Bali has a Board of Commissioners Committee Charter which was last established by Board of Commissioners Decree No. 003/KEP/BPD/2023 dated December 29, 2023. The latest Board of Commissioners Committee Charter also replaces the Guidelines and Working Procedures of the Bank BPD Bali Committee which was established by the Board of Commissioners Decree No. 002/KEP/BPD/2021 dated December 27, 2021. The Board of Commissioners Committee Charter regulates various matters including those related to the powers of the Board of Commissioners Committee.

Komite Dewan Komisaris berwenang melakukan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite. Anggota komite Dewan Komisaris dari Pihak Independen wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan berintegritas, independen, memiliki kompetensi, serta menjaga reputasi.

Selanjutnya, wewenang lain yang dimiliki Dewan Komisaris adalah mengakses data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan mekanisme dan etika kerja yang berlaku, mengadakan rapat koordinasi dengan unit kerja terkait. Wewenang komite tersebut dapat dilakukan setelah mendapat penugasan Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners Committee has the authority to perform activities in carrying out the duties and responsibilities of the Committee. Independent Committee members are required to perform their duties, responsibilities and powers with integrity, independence and competence and to maintain their reputation.

In addition, other powers of the Committee are to access data and information required in accordance with applicable mechanisms and work ethics, to hold coordination meetings with related work units. The powers of the Committee may be exercised upon receipt of a mandate from the Board of Commissioners.

Mekanisme Kerja Komite Dewan Komisaris

Working Mechanism of the Board of Commissioners Committee

Berpedoman pada Piagam Komite Dewan Komisaris Bank BPD Bali, dalam melaksanakan tugasnya, komite-komite membina hubungan kerja yang efektif serta berkoordinasi dengan unit-unit kerja terkait antara lain:

- Komite Audit membina hubungan dan berkoordinasi dengan Direksi melalui SKAI & *Anti-Fraud*, auditor eksternal dan antar komite serta unit kerja terkait lainnya;
- Komite Pemantau Risiko membina hubungan dan berkoordinasi dengan Direksi melalui komite manajemen risiko, satuan kerja manajemen risiko dan kepatuhan dan/atau Divisi Manajemen Risiko (MRO) dan Divisi Kepatuhan Bank BPD Bali, antar komite serta unit kerja terkait lainnya; dan
- Komite Remunerasi dan Nominasi membina hubungan dan berkoordinasi dengan Direksi melalui Divisi SDM, antar komite, serta unit kerja terkait lainnya.

Based on the Charter of the Board of Commissioners Committee of Bank BPD Bali, in performing their duties, the committees maintain effective working relationships and coordinate with related work units, including:

- *The Audit Committee fosters relationships and coordinates with the Board of Directors through the SKAI & Anti-Fraud, the external auditors, and between the committees and other related work units;*
- *The Risk Oversight Committee fosters relationships and coordinates with the Board of Directors through the Risk Management Committee, Risk Management and Compliance Work Unit and/or Risk Management Division (MRO) and Compliance Division of Bank BPD Bali, between committees and other related work units; and*
- *The Remuneration and Nomination Committee shall maintain working relationship and coordination with the Board of Directors through the Human Resources Division, between committees and other related work units.*

Dalam hal melaksanakan hubungan kerja dan koordinasi dengan unit-unit kerja terkait, komite-komite tersebut wajib mendapat penugasan dari Dewan Komisaris.

Regarding the implementation of working relationships and coordination with related work units, these committees must receive instructions from the Board of Directors.

Etika Komite Dewan Komisaris

Ethics of the Board of Commissioners Committee

Anggota komite dalam melaksanakan tugasnya, mengacu pada Piagam Komite Dewan Komisaris Bank BPD Bali, menyesuaikan dengan tata tertib dan etika kerja yang berlaku pada Bank sebagai berikut:

- Patuh dan taat pada ketentuan perundangan dan peraturan yang berlaku serta tidak menyiasati aturan untuk kepentingan pribadi;
- Menghargai eksistensi dan wewenang pimpinan secara proporsional, mengembangkan pada prinsip positif kepada orang lain serta menghargai apa yang dikerjakan orang lain;

In the performance of their duties, the members of the Committee refer to the Charter of the Board of Commissioners Committee of Bank BPD Bali, in accordance with the rules and work ethics applicable to the Bank, as follows

- *Comply with and abide by the provisions of applicable laws and regulations and not to manipulate the rules for personal gain;*
- *Respect the existence and authority of the leadership in a proportionate manner, develop positive principles towards others and respect what others are doing;*

- Menghindarkan diri dari keterlibatan pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan;
- Menjaga kerahasiaan informasi dengan memegang teguh rahasia jabatan dan mematuhi ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban menjaga informasi rahasia;
- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka menjaga kredibilitas Bank.

Selanjutnya, setiap Komite Dewan Komisaris sebagai organ penunjang yang berada di bawah Dewan Komisaris membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang dijelaskan sebagai berikut:

KOMITE AUDIT

Audit Committee

Komite Audit Bank BPD Bali memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit untuk menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

- Avoid participating in decision-making when there is a conflict of interest;
- Maintain the confidentiality of information by preserving the secrets of the office and complying with the rules governing the obligation to maintain confidential information;
- Improve knowledge and skills to maintain the Bank's credibility.

In addition, each committee of the Board of Commissioners, as a supporting organ under the Board of Commissioners, assists and supports the Board of Commissioners in carrying out its duties and responsibilities, which are described below:

Piagam Komite Audit

Audit Committee Charter

Bank BPD Bali telah memiliki Piagam Komite Audit sebagaimana yang tertuang dalam Piagam Komite Dewan Komisaris yang terakhir kali ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 003/KEP/BPD/2023 tanggal 29 Desember 2023. Hal-hal penting yang diatur dalam Piagam Komite Audit antara lain tugas dan tanggung jawab; keanggotaan; rapat; masa tugas; mekanisme evaluasi kinerja Komite Audit.

Bank BPD Bali berkomitmen melakukan reviu terhadap Piagam Komite Audit sebagai bagian dari Piagam Komite Dewan Komisaris secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

Bank BPD Bali has an Audit Committee Charter as stated in the Committee Charter of the Board of Commissioners, which was last established by the Decree of the Board of Commissioners No. 003/KEP/BPD/2023 dated December 29, 2023. Important matters regulated in the Audit Committee Charter include, but not limited to, duties and responsibilities, membership, meetings, term of office, and mechanism for evaluating the performance of the Audit Committee.

Bank BPD Bali is committed to review the Audit Committee Charter as part of the Committee Charter of the Board of Commissioners on a regular basis, at least 1 (one) time in 3 (three) years.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

Piagam Komite Audit menjelaskan tugas dan tanggung jawab Komite Audit antara lain sebagai berikut:

1. Bertugas dan bertanggung jawab melakukan pemantauan dan evaluasi atas Perencanaan dan pelaksanaan audit; Pemantauan tindak lanjut hasil audit, untuk menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan; dan Implementasi penerapan strategi *anti-fraud*.

The Audit Committee Charter sets forth, among other things, the duties and responsibilities of the Audit Committee as follows

1. *To have the authority and responsibility to oversee and evaluate the planning and conduct of audits; to oversee the follow-up of audit results to assess the adequacy of internal control, including the adequacy of the financial reporting process; and to oversee the application of anti-fraud policies.*

2. Melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit terhadap Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI & AF); Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku; Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain; Laporan keuangan dan non keuangan yang dikeluarkan Bank baik rencana maupun realisasinya; Ketaatan bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan Pengaduan dan keluhan-keluhan yang berkaitan dengan citra bank.
 3. Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
 4. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 5. Membuat laporan atas segala pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris setiap 3 (tiga) bulan dan setiap akhir tahun buku;
 6. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditugaskan Dewan Komisaris yang berhubungan dengan ruang lingkup tugas komite audit;
 7. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, komite audit antara lain bertanggung jawab untuk memantau dan mengkaji efektifitas pelaksanaan audit intern Bank; mengevaluasi kinerja SKAI & AF; memastikan SKAI & AF melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, auditor ekstern, dan Otoritas Jasa Keuangan; memastikan SKAI & AF bekerja secara independen; memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran SKAI & AF; dan memberikan rekomendasi rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
2. Conduct monitoring and evaluation of at least the implementation of the duties of the Internal Audit Work Unit (SKAI & AF); compliance of the conduct of audits by the Public Accounting Firm with applicable auditing standards; compliance of financial reports with applicable accounting standards; Implementation of follow-up actions by the Board of Directors on the findings of the Bank's internal work unit, external auditors, the results of supervision by the Financial Services Authority and/or the results of supervision by other authorities and institutions; financial and non-financial reports issued by the Bank, both planned and realized; the Bank's compliance with applicable laws and regulations; and complaints and grievances related to the Bank's image.
 3. The results of monitoring and evaluation shall be used to make recommendations to the Board of Commissioners;
 4. Make recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of Public Accountants and Public Accounting Firms (KAP) for submission to the GMS;
 5. Report to the Board of Commissioners every 3 (three) months and at the end of each fiscal year on the overall performance of its duties;
 6. Perform such other duties as may be assigned by the Board of Commissioners within the scope of the duties of the Audit Committee;
 7. In the implementation of the internal audit function, the Audit Committee is responsible for, among other things, monitoring and reviewing the effectiveness of the implementation of the Bank's internal audit function; evaluating the performance of SKAI & AF; ensuring that SKAI & AF communicates with the Board of Directors, the Board of Commissioners, the external auditors and the Financial Services Authority; Ensuring that SKAI & AF operates independently; making recommendations to the Board of Commissioners regarding the preparation of SKAI & AF's audit plan, scope and budget; and making recommendations regarding the annual audit plan and budget allocation for the implementation of the internal audit function as approved by the President Director and the Board of Commissioners.

Pembagian Tugas Antar Anggota Komite Audit

Allocation of duties among the members of the Audit Committee

Dari minimal 3 (tiga) anggota Komite Audit termasuk Ketua Komite, anggota Komite Audit lain lainnya adalah pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi. Satu orang anggota lainnya adalah pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan. Keahlian Pihak Independen dibuktikan paling sedikit dengan kepemilikan sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite.

Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite Audit wajib menandatangani laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank dan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;

Of the at least 3 (three) members of the Audit Committee, including the Chairman of the Committee, the other members of the Audit Committee shall be independent parties with expertise in finance or accounting. One additional member shall be an independent party with expertise in law or banking. The expertise of the independent party shall be evidenced by, at a minimum, possession of a certificate of competence that supports the implementation of the Committee's functions and responsibilities.

The Independent Commissioner who becomes the Chairman of the Audit Committee shall sign a special report on any internal audit findings that are deemed to jeopardize the continuity of the Bank's business, as well as the implementation report and the main points of the internal audit findings submitted to the Financial Services Authority;

Dalam menjalankan tugasnya Komite Audit dapat bekerja sama dengan mitra kerjanya seperti berkoordinasi dengan Direksi melalui SKAI & Anti-Fraud, auditor eksternal dan antar komite serta unit kerja terkait lainnya sebagai sebuah mekanisme kerja.

In performing its duties, the Audit Committee may cooperate with its partners, such as coordination with the Board of Directors through SKAI & Anti-Fraud, external auditors, and between committees and other related work units as a working mechanism.

Masa Jabatan Komite Audit

Term of office of the Audit Committee

Berdasarkan Piagam Kerja Komite Audit, masa tugas anggota komite dari pihak independen 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Based on the Audit Committee Working Charter, the term of office of the independent Committee members is 1 (one) year and is renewable.

Jumlah, Komposisi dan Susunan Komite Audit

Number, composition and structure of the Audit Committee

Berpedoman pada Keputusan Direksi Bank No. 0603B/KEP/DIR/SDM/2024 tanggal 28 Agustus 2024 tentang Struktur Keanggotaan Komite Dewan Komisaris Bank BPD Bali, anggota Komite Audit berjumlah 5 (lima) orang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Based on the Resolution of the Board of Directors of the Bank No. 0603B/KEP/DIR/SDM/2024 dated August 28, 2024 regarding the composition of the Board of Commissioners of Bank BPD Bali, the Audit Committee consists of 5 (five) persons with the following composition:

Nama Name	Jabatan Position
Menjabat hingga akhir tahun buku 2024 <i>Serving until end of fiscal 2024</i>	
I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.	Ketua merangkap Anggota <i>Chairman and Member</i>
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	Anggota <i>Member</i>
I Gede Darmawa, S.E., M.Si.	Anggota <i>Member</i>
Insinyur Gede Arimbawa	Anggota (Pihak Independen) <i>Member (Independent Party)</i>
I Nyoman Suparsa Widana, S.E., M.M.	Anggota (Pihak Independen) <i>Member (Independent Party)</i>

Profil Ketua Komite Audit yang berasal dari anggota Dewan Komisaris yakni I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H., Insinyur Gede Arimbawa, dan I Nyoman Suparsa Widana, S.E., M.M. dapat dilihat di bab Profil Perusahaan dari laporan tahunan ini. Sementara itu, profil anggota Komite Audit beserta sertifikasi keahlian yang dimiliki adalah sebagai berikut:

The profile of the Chairman of the Audit Committee, who is composed of the members of the Board of Commissioners, namely I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H., Insinyur Gede Arimbawa and I Nyoman Suparsa Widana, S.E., M.M., is provided in the Company Profile section of this Annual Report. Meanwhile, the profiles of the members of the Audit Committee and their professional qualifications are as follows:



Nama <i>Name</i>	I Dewa Gede Putra Yustina, S.H.	
Posisi <i>Position</i>	Anggota Komite Audit	<i>Audit Committee Member</i>
Domisili <i>Domicile</i>	Tabanan, Lingkungan Banjar Samsam	<i>Tabanan, Lingkungan Banjar Samsam</i>
Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia	
Usia <i>Age</i>	64 tahun	<i>64 years</i>
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal basis for appointment</i>	Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0466A/KEP/DIR/SDM/2024 tanggal 28 Agustus 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pihak Independen Dewan Komisaris Atas Nama I Dewa Gede Putra Yustina, S.H., dan Perjanjian Kerja Khusus Nomor 1031/SPK/DIR/SDM/2024 tanggal 28 Agustus 2024.	
Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	S 1 (Hukum Keperdataan)	<i>S 1 (Civil Law)</i>
Sertifikasi <i>Certification</i>	Sertiifikasi Manajemen Risiko Perbankan Kualifikasi 7	<i>Banking Risk Management Certification Qualification 7</i>
Pengalaman Kerja <i>Work Experience</i>	Tahun 2014 s.d 2016 pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Administrasi Umum Bank BPD Bali	<i>From 2014 to 2016, he served as Head of General Administration Department of Bank BPD Bali</i>
Rangkap Jabatan <i>Concurrent Positions</i>	Tidak ada	<i>None</i>

Nama <i>Name</i>	Drs. Ec. I Wayan Sugiarta, M.M.	
Posisi <i>Position</i>	Anggota Komite Audit	<i>Audit Committee Member</i>
Domisili <i>Domicile</i>	Tabanan, Bali	<i>Tabanan, Bali</i>
Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia	
Usia <i>Age</i>	61 tahun	<i>61 years old</i>
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal basis for appointment</i>	Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali No. 0623/KEP/DIR/SDM/2024 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pihak Independen Dewan Komisaris tanggal 1 November 2024.	
Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	• Sarjana Manajemen Keuangan, Sekolah Tinggi Ekonomi Artha Baodhi Iswara, Surabaya (1986). • Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Ekonomi Artha Baodhi Iswara, Surabaya (2006).	• <i>Bachelor of Financial Management, Artha Baodhi Iswara School of Economics, Surabaya (1986).</i> • <i>Master of Management, Artha Baodhi Iswara School of Economics, Surabaya (2006).</i>
Sertifikasi <i>Certification</i>	Sertiifikasi Manajemen Risiko Perbankan Kualifikasi 6	<i>Banking Risk Management Certification Qualification 6</i>
Pengalaman Kerja <i>Work Experience</i>	Bekerja di berbagai posisi di Bank BPD Bali sejak Desember 1990 hingga Oktober 2018 dengan posisi terakhir sebagai Wakil Kepala SKAI dan mendapatkan penugasan sebagai Kepala Cabang Utama Denpasar pada bulan Maret – September 2017 dan bulan Agustus 2018.	<i>Professional experience includes various positions held at Bank BPD Bali from December 1990 to October 2018. The most recent position was as Deputy Head of the Internal Audit Division (SKAI). Additionally, he served as the Head of the Denpasar Main Branch during the periods of March to September 2017 and August 2018.</i>
Rangkap Jabatan <i>Concurrent Positions</i>	Tidak ada	<i>None</i>

Independensi Komite Audit

Independence of the Audit Committee

Sejalan dengan POJK Pedoman Tata Kelola bagi Bank Umum, Piagam Komite Dewan Komisaris mensyaratkan persyaratan independensi dan telah dipenuhi oleh anggota Komite Audit Bank sebagaimana dijelaskan berikut ini:

In accordance with the POJK Guidelines for Governance of Commercial Banks, the Charter of the Committee of the Board of Commissioners sets out independence requirements, which have been met by the members of the Bank's Audit Committee, as explained below:

Aspek Independensi <i>Independence Aspect</i>	Menjabat hingga akhir tahun buku 2024 <i>Serving until end of fiscal 2024</i>				
	I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.	Insinyur Gede Arimbawa	I Nyoman Suparsa Widana, S.E., M.M.	I Dewa Gede Putra Yustina, S.H.	Drs. EC. I Wayan Sugiarta, M.M.
Merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank BPD Bali dalam waktu enam bulan terakhir. <i>A person who works or has the authority and responsibility for planning, directing, monitoring or supervising the activities of Bank BPD Bali in the last six months.</i>	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak
<i>Yes</i>	<i>Yes</i>	<i>Yes</i>	<i>Yes</i>	<i>No</i>	<i>No</i>
Memiliki saham Bank BPD Bali, baik langsung maupun tidak langsung. <i>Owns, directly or indirectly, shares in Bank BPD Bali.</i>	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>
Memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama/Pengendali. <i>Has an affiliate relationship with members of the Board of Commissioners, members of the Board, or major/controlling stockholders.</i>	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>
Memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank BPD Bali. <i>Has a business relationship, either directly or indirectly, that is related to the business activities of Bank BPD Bali</i>	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>
Merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit, non-audit, atau jasa konsultan lainnya kepada Bank BPD Bali dalam waktu enam bulan terakhir. <i>Person in accounting firm providing audit, non-audit or other consulting services to Bank BPD Bali in the last six months.</i>	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>

Rapat Komite Audit

Audit Committee Meeting

Sejalan dengan POJK Tata Kelola bagi Bank Umum, Piagam Komite Audit Bank BPD Bali menetapkan bahwa Rapat Komite Audit diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank dan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat Komite Audit diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota komite. Komite mempersiapkan agenda dan bahan rapat untuk disampaikan kepada seluruh peserta rapat.

Rapat Komite dipimpin oleh ketua komite. Pengambilan Keputusan rapat Komite harus memenuhi kuorum yang ditetapkan, yaitu dihadiri oleh paling kurang 51% dari jumlah anggota komite. Keputusan rapat Komite terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat sebagaimana tersebut diatas, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;

Penjelasan terkait kehadiran anggota Komite dalam Rapat Komite Audit disajikan dalam tabel berikut ini:

In accordance with the POJK on Governance for Commercial Banks, the Audit Committee Charter of Bank BPD Bali stipulates that the Audit Committee Meeting shall be held according to the Bank's needs and at least 1 (one) time in 1 (one) month. The Audit Committee meeting is held when the majority of the Committee members are present. The Committee shall prepare the agenda and meeting materials to be distributed to all meeting participants.

The Committee meeting shall be chaired by the Committee Chairperson. A quorum is defined as at least 51% of the total number of Committee members. Decisions at the Committee Meeting are initially made on the basis of deliberation for consensus. In the event that consensus is not reached as described above, decisions shall be made on the basis of a majority vote;

Explanations regarding the attendance of the Committee members at the Audit Committee meeting are shown in the following table:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	Kehadiran Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Level
Menjabat hingga akhir tahun buku 2024 <i>Serving until end of fiscal 2024</i>				
I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.	Ketua merangkap Anggota <i>Chairman and Member</i>	17	16	94,12%
Insinyur Gede Arimbawa	Anggota <i>Member</i>	17	17	100,00%
I Nyoman Suparsa Widana, S.E., M.M	Anggota <i>Member</i>	17	17	100,00%
I Dewa Gede Putra Yustina, S.H.	Anggota (Pihak Independen) <i>Member (Independent Party)</i>	17	17	100,00%
Drs. EC. I Wayan Sugiarta, M.M.	Anggota (Pihak Independen) <i>Member (Independent Party)</i>	17	17	100,00%
Rata-rata kehadiran <i>Average attendance</i>			16,80	98,82%

Risalah Rapat Komite Audit

Minutes of Audit Committee Meetings

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap Piagam Kerja Komite Audit, hasil rapat komite dituangkan dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbedaan pendapat, yang terjadi dalam rapat komite dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. Selanjutnya, risalah rapat ditanda tangan oleh ketua komite dan notulis.

As a form of compliance with the Audit Committee Charter, the results of the Committee meetings are recorded in the minutes of the meetings and documented in accordance with legal and regulatory requirements. Disagreements that arise in the Committee meeting are clearly stated in the minutes of the meeting, together with the reasons for the disagreement. In addition, the minutes of the meeting are signed by the Chairman of the Committee and the notary.

Ringkasan risalah Rapat Komite Audit disajikan dalam tabel berikut ini:

A summary of the minutes of the Audit Committee meeting is presented in the table below:

No	Tanggal Date	Agenda	Peserta Participants				
			IGNBA	IGA	INSW	IDGPY	IWS
1	12 Jan 24	Exit Meeting General Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 Exit Meeting General Audit Financial Report Fiscal Year 2023	-	√	√	√	√
2	18 Jan 24	Pembahasan: - Hasil Pemeriksaan Umum PT Bank Pembangunan Daerah Bali 2023. - Laporan Hasil Audit Khusus atas Kejadian Transaksi Ilegal pada Rekening Tabungan Nasabah. Discussion: - General Audit Results of PT Bank Pembangunan Daerah Bali 2023. - Special Audit Result Report on Illegal Transaction Incidents in Customer Savings Accounts.	√	√	√	√	√
3	29 Jan 24	Pembahasan Draft Laporan Pelaksanaan & Pokok-Pokok Hasil Audit Intern PT Bank Pembangunan Daerah Bali Semester II Tahun 2023. Discussion on Draft Report on Implementation & Main Points of Internal Audit Results of PT Bank Pembangunan Daerah Bali Semester II of 2023.	√	√	√	√	√
4	19 Feb 24	Rapat Koordinasi dengan Direktur Kepatuhan dan Kepala SKAI & AF yang membahas: 1. Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & AF Periode Triwulan IV Tahun 2023. Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & AF Periode Triwulan IV Tahun 2023. 2. Tindak lanjut audit intern dan ekstern tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian yaitu: a. Apa yang menjadi hambatan atas audit khusus adanya indikasi <i>fraud intern</i> di Kantor Cabang Negara yang dimulai tanggal 26 Juni 2023 s/d bulan Desember 2023 belum selesai. b. Apa yang menjadi hambatan atas audit pendalaman proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Kantor Capem Sasetan yang dimulai tanggal 6 Juni 2023 s/d bulan Desember 2023 belum selesai. c. Minta penjelasan pasca lelang tanggal 13 Desember 2023 terhadap Debitur PT KCPP (dalam pailit). d. Terhadap hasil temuan baik internal dan eksternal yang terus mengalami perpanjangan komitmen agar diberikan waktu penyelesaian yang tegas dan terbatas (Kekurangan penilaian tingkat maturitas keamanan siber posisi tahun 2023 dengan komitmen minggu I Januari 2024 (temuan OJK), Pemantauan KPR, Penyelesaian klaim asuransi, pengelolaan jaminan/ agunan, komitmen 31 Januari 2024 (temuan BPK RI). Coordination meeting with the Director of Compliance and Head of SKAI & AF to discuss: 1. Report on the Progress of PKAT Implementation and SKAI & AF Performance for the Fourth Quarter of 2023. Report on the progress of PKAT implementation and SKAI & AF performance for the fourth quarter of 2023. 2. Follow up on internal and external audits in 2023 that require attention, namely: a. What are the impediments to the special audit on indications of internal fraud at the Negara Branch Office, which began on June 26, 2023 to December 2023, has not been completed. b. What are the obstacles to the in-depth audit of the People's Business Credit (KUR) provision process at the Sasetan Sub-District Office which began on June 6, 2023 until December 2023 has not been completed. c. Request for an explanation after the auction on December 13, 2023 for the debtor PT KCPP (in bankruptcy). d. Regarding the findings, both internal and external, which continue to experience an extension of the commitment to be given a fixed and limited completion time (lack of assessment of the level of cybersecurity maturity in the position of 2023 with a commitment of the first week of January 2024 (findings of OJK), KPR monitoring, settlement of insurance claims, management of guarantees / collateral, commitment of January 31, 2024 (findings of BPK RI).	√	√	√	√	√
5	27 Mar 24	Evaluasi terhadap pelaksanaan Audit Umum atas Laporan Keuangan dan Evaluasi Kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2023. Evaluation of the Implementation of the General Audit of the Financial Report and Performance Evaluation of PT Bank Pembangunan Daerah Bali for the Fiscal Year 2023.	√	√	√	√	√



No	Tanggal Date	Agenda	Peserta Participants				
			IGNBA	IGA	INSW	IDGPY	IWS
6	18 Apr 24	Pembahasan Laporan Hasil Audit Umum PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Klungkung Tahun 2024. <i>Discussion on the General Audit Results Report of PT Bank Pembangunan Daerah Bali Klungkung Branch Office in 2024.</i>	√	√	√	√	√
7	29 Apr 24	Pembahasan: - Laporan Hasil Audit Pendalaman Atas Proses Pemberian Kredit KUR Kantor Capem Sesetan Tahun 2023. - Laporan Hasil Audit Khusus atas Adanya Indikasi <i>Fraud</i> pada Kantor Cabang Negara Tahun 2023 <i>Discussion:</i> <i>Special Audit Results Report on KUR Loan Granting Process of Sesetan Capem Branch Office in 2023.</i> <i>Special Audit Results Report on Indications of Fraud at Negara Branch Office in 2023</i>	√	√	√	√	√
8	15 May 24	Rapat Koordinasi dengan Direktur Kepatuhan dan Kepala SKAI & AF yang membahas: Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & AF Periode Triwulan I Tahun 2024, <i>Progress Tindak Lanjut Audit Khusus</i> adanya indikasi <i>fraud</i> Kantor Cabang Negara dan Audit Pendalaman Proses Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kantor Cabang Pembantu Sesetan serta Tindak lanjut audit intern dan ekstern 2022 s.d 2024 yang masih tersisa. <i>Coordination meeting with Director of Compliance and Head of SKAI & AF to discuss Report on the Progress of PKAT Implementation and SKAI & AF Performance for the First Quarter of 2024, Progress of Special Audit Follow-up on Indications of Fraud at the Negara Branch Office and In-depth Audit of the People's Business Credit (KUR) Provision Process at the Sesetan Assistant Branch Office as well as the Remaining Follow-up of Internal and External Audits from 2022 to 2024.</i>	√	√	√	√	√
9	25 Jun 24	Pembahasan Laporan Hasil Audit Umum PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Tabanan Tahun 2024. <i>Discussion on the General Audit Report of PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tabanan Branch Office in 2024.</i>	√	√	√	√	√
10	23 Jul 24	Pembahasan proses penyelesaian kredit PT KCPP yang perlu mendapat perhatian. <i>Discussion on the loan settlement process of PT KCPP that needs attention.</i>	√	√	√	√	√
11	20 Aug 24	Rapat Koordinasi dengan Direktur Kepatuhan, Kepala SKAI & AF dan Kepala Divisi Kepatuhan yang membahas: Pembahasan Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & AF Periode Triwulan II Tahun 2024, <i>Progress Tindak Lanjut Hasil Audit Intern dan Ekstern Tahun 2022 s.d Juni 2024</i> yang masih tersisa, Temuan yang terus berulang dibidang pelaporan Antasena, SLIK dan APU-PPT dan <i>Surprise Audit</i> dilakukan terhadap aktivitas berisiko tinggi atau rawan terjadinya <i>fraud</i> . <i>Coordination meeting with the Director of Compliance, Head of SKAI & AF and Head of Compliance Division to discuss: Discussion of the progress report on the implementation of PKAT and SKAI & AF performance for the second quarter of 2024, progress on the follow-up of the internal and external audit results for 2022 to June 2024 that are still outstanding, repeated findings in the area of Antasena, SLIK and APU-PPT reporting, and surprise audits conducted on high-risk or fraud-prone activities.</i>	√	√	√	√	√
12	10 Sep 24	Pembahas Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Umum PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Pusat dan Kantor Cabang Renon posisi 30 April 2024. <i>Discussion on the follow-up of the findings of the general audit results of PT Bank Pembangunan Daerah Bali Head Office and Renon Branch Office as of April 30, 2024.</i>	√	√	√	√	√

No	Tanggal Date	Agenda	Peserta Participants				
			IGNBA	IGA	INSW	IDGPY	IWS
13	21 Oct 24	Pembahasan: - Laporan Hasil Audit Khusus Atas Adanya Indikasi <i>Fraud</i> pada Kantor Capem Pasar Buleleng Tahun 2024. - Laporan Kejadian Penipuan <i>Online & Phishing</i>. Discussion: <i>Special Audit Result Report on Indications of Fraud at Pasar Buleleng Sub-District Office in 2024.</i> <i>Report on online fraud and phishing incidents.</i>	√	√	√	√	√
14	31 Oct 24	Kick Off Meeting Audit PT Bank Pembangunan Daerah Bali 31 Desember 2024. <i>Kick-off Meeting of the Audit of PT Bank Pembangunan Daerah Bali on December 31, 2024.</i>	√	√	√	√	√
15	18 Nov 24	Rapat Koordinasi dengan Direktur Kepatuhan dan Kepala SKAI & AF yang membahas: - Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & AF Periode Triwulan III Tahun 2024. - Hasil Audit Tematik <i>Single Customer View</i> (SCV) Bank BPD Bali Tahun 2024, dan hal-hal lainnya. Coordination meeting with Director of Compliance and Head of SKAI & AF to discuss: <i>Report on the progress of PKAT implementation and SKAI & AF performance for the third quarter of 2024.</i> <i>Results of the Single Customer View (SCV) Thematic Audit of Bank BPD Bali in 2024 and other matters.</i>	√	√	√	√	√
16	11 Dec 24	Progres Audit PT Bank Pembangunan Daerah Bali 31 Desember 2024. <i>Audit Progress of PT Bank Pembangunan Daerah Bali as of December 31, 2024.</i>	√	√	√	√	√
17	12 Dec 24	Pembahasan Persetujuan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) SKAI & AF Tahun 2025. <i>Discussion on the approval of the Annual Audit Work Program (PKAT) of SKAI & AF in 2025.</i>	√	√	√	√	√

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Audit Committee Competency Training and Development

Bank BPD Bali memberikan kesempatan kepada anggota Komite Audit untuk mengikuti *workshop*, seminar, dan sertifikasi sesuai dengan ketentuan.

Anggota Komite Audit berkomitmen mengikuti beragam fasilitas pengembangan kompetensi yang disediakan oleh Bank. Pelatihan dan pengembangan yang diikuti anggota Komite Audit yang menjadi anggota Dewan Komisaris dapat dilihat di bagian Dewan Komisaris dari bab ini. Sedangkan Pelatihan dan pengembangan yang diikuti oleh anggota Komite Audit dari pihak independen disajikan dalam tabel berikut:

Bank BPD Bali provides audit committee members with opportunities for participation in workshops, seminars and certifications in accordance with regulations.

Audit Committee members are required to attend various competency development facilities provided by the Bank. The training and development attended by the Audit Committee members who are members of the Board of Commissioners are listed in the Board of Commissioners section of this chapter. Meanwhile, the training and development attended by the Audit Committee members who are independent parties is shown in the table below:



Pelatihan & Pengembangan Kompetensi Training and Competency Development		
Nama Name	Tempat & Waktu Place & Time	Penyelenggara Organizer
I Dewa Gede Putra Yustina, S.H. Anggota (Pihak Independen) Member (Independent Party)		
Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 <i>Risk Management Re-Certification Briefing - Level 7</i>	Zoom meeting, 6 Maret dan 7 Maret 2024 <i>Zoom meeting, March 6 & 7, 2024</i>	Leadership Nasional Asia (LNA)
Fokus Group Discussion (FGD) Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan sesuai POJK No. 22 Tahun 2023 <i>Focus Group Discussion (FGD) on Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector in accordance with POJK No. 22 of 2023</i>	Bali, 21 Pebruari 2024 <i>Bali, February 21, 2024</i>	Bank BPD Bali
Uji Kompetensi Manajemen Risiko Re-Sertifikasi Jenjang Kualifikasi 7 <i>Risk Management Competency Test Re-certification Qualification Level 7</i>	Jakarta, 29 Mei 2024 <i>Jakarta, May 29, 2024</i>	BSMR
Workshop dan Lokakarya Strategi Implementasi POJK Nomor 17 Tahun 2023 dan POJK Nomor 5 Tahun 2024 <i>Workshop and Implementation Strategy of POJK No. 17 of 2023 and POJK No. 5 of 2024</i>	Mataram, 24 Oktober 2024 <i>Mataram, October 24, 2024</i>	FKDK BPDSI Wilayah Timur
Workshop Penerapan POJK Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank <i>Workshop on Implementation of POJK No. 15 of 2024 on Integrity of Financial Reporting of Banks</i>	Bali, 20 Desember 2024 <i>Bali, December 20, 2024</i>	Bank BPD Bali
Drs. EC. I Wayan Sugiarta, M.M. Anggota (Pihak Independen) Member (Independent Party)		
Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 <i>Risk Management Recertification Briefing Level 6</i>	Zoom Meeting, 20 dan 21 Pebruari 2024 <i>Zoom Meeting, 20 & 21, 2024</i>	Leadership Nasional Asia (LNA)
Uji Kompetensi Manajemen Risiko Re-Sertifikasi Jenjang Kualifikasi 6 <i>Risk Management Competency Test Recertification Level 6</i>	Jakarta, 29 Mei 2024 <i>Jakarta, May 29, 2024</i>	BSMR
Workshop Penerapan POJK Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank <i>Workshop on Implementation of POJK Number 15 of 2024 on Integrity of Bank Financial Reporting</i>	Bali, 20 Desember 2024 <i>Bali, December 20, 2024</i>	Bank BPD Bali
Presentasi dari Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan terkait Integritas Pelaporan Keuangan Bank (POJK Nomor 15 Tahun 2024) <i>Presentation by Audit Firm Heliantono & Rekan on Integrity of Bank Financial Reporting (POJK Number 15 of 2024)</i>	Bali, 23 Desember 2024 via zoom meeting <i>Bali, December 23, 2024 via zoom meeting</i>	Bank BPD Bali

Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Komite Audit

Implementation of Duties and Activities of the Audit Committee

Selama tahun 2024 Komite Audit telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan beragam kegiatan sebagai berikut:

- Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Tugas-tugas Komite Audit telah dilaksanakan yang tercermin dari Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit periode Triwulan I, II, III, dan IV tahun 2024 yaitu:
 - Untuk perencanaan audit SKAI & AF Tahun 2024, komite audit telah melakukan evaluasi *Draft Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) SKAI & Anti Fraud* Tahun 2024 tanggal 12 Desember 2023 beserta tindak lanjutnya;

During 2024, the Audit Committee performed its duties and responsibilities with various activities as follows:

- Monitored and evaluated the planning and conduct of audits and monitored the follow-up of audit results to assess the adequacy of internal control, including the adequacy of the financial reporting process. The duties of the Audit Committee have been carried out as reflected in the Audit Committee's Report on the Implementation of Duties for the periods of Quarters I, II, III and IV in 2024, namely:
 - In order to plan the audit of SKAI & AF in 2024, the Audit Committee has evaluated the *Draft Annual Audit Work Program (PKAT) of SKAI & Anti-Fraud* in 2024 dated December 12, 2023 and its follow-up;

- b. Untuk perencanaan audit SKAI & AF Tahun 2025, komite audit telah melakukan evaluasi *Draft* Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) SKAI & *Anti Fraud* Tahun 2025 tanggal 26 Nopember 2024 beserta tindak lanjutnya.
 2. Kaji ulang (*review*) terhadap evaluasi hasil audit SKAI & *Anti Fraud*. Tercatat terdapat 36 (tiga puluh enam) evaluasi hasil audit yang dikaji oleh Komite Audit selama tahun 2024.
 3. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku. Dalam rangka *review* kesesuaian audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku, Komite Audit telah melaksanakan kegiatan antara lain evaluasi terhadap pelaksanaan Audit Umum atas Laporan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Bank BPD Bali Tahun Buku 2023 dan pembahasan atas penyampaian progres Audit BPD Bali 31 Desember 2024.
 4. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku melalui kegiatan Komite Audit berupa evaluasi Perkembangan Neraca dan Laba Rugi untuk periode triwulan IV tahun 2023 hingga triwulan III tahun 2024 beserta tindak lanjutnya.
 5. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI & *Anti-Fraud*, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam rangka evaluasi pelaksanaan tindak lanjut, Komite Audit telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain rapat yang membahas hasil pemeriksaan umum Bank dan laporan hasil audit khusus; evaluasi Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & *Anti-Fraud* Triwulan IV; evaluasi terhadap pelaksanaan Audit Umum atas Laporan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Bank tahun 2023.
 6. Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024.
 7. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang di tugaskan oleh Dewan Komisaris sebanyak 32 (tiga puluh dua) aktivitas antara lain laporan pemeriksaan umum Bank, laporan kegiatan Komite Audit triwulan I-IV tahun 2023, dan evaluasi laporan hasil program CSR triwulan IV tahun 2023.
- b. For the 2025 SKAI & AF audit planning, the Audit Committee conducted an evaluation of the *Draft* Annual Audit Work Program (PKAT) for SKAI & *Anti-Fraud* for 2025 dated November 26, 2024 and its follow-up.
 2. Conducted a review of the SKAI & *Anti-Fraud* Audit Result Evaluation. It was noted that the Audit Committee reviewed 36 (thirty-six) audit result evaluations in 2024.
 3. Conformity of the Conduct of the Audit by the Audit Firm (KAP) with Applicable Auditing Standards In order to review the compliance of the audit conducted by the KAP with applicable auditing standards, the Audit Committee conducted activities including an evaluation of the conduct of the general audit of the financial statements and performance evaluation of Bank BPD Bali for the fiscal year 2023 and a discussion of the submission of the progress report of the audit of BPD Bali on December 31, 2024.
 4. Compliance of the financial statements with the applicable accounting standards through the activities of the Audit Committee in the form of an evaluation of the development of the balance sheet and profit and loss for the period from the fourth quarter of 2023 to the third quarter of 2024 along with its follow-up.
 5. Implementation of follow-up actions by the Board of Directors on the findings of SKAI & *Anti-Fraud*, Public Accountants and the results of supervision by the Financial Services Authority. In order to evaluate the implementation of follow-up, the Audit Committee conducted various activities, including meetings to discuss the results of the Bank's General Audit and Special Audit Reports; evaluation of the progress report on the implementation of PKAT and the performance of SKAI & *Anti-Fraud* for the fourth quarter; evaluation of the implementation of the General Audit of the Financial Statements; and evaluation of the Bank's performance in 2023.
 6. To make recommendations to the GMS through the Board of Commissioners for the appointment of Auditors and Audit Firms in accordance with applicable regulations for the fiscal year 2024.
 7. To carry out other tasks assigned by the Board of Commissioners, including the General Audit Report of the Bank, the Activity Report of the Audit Committee for Quarters I-IV of 2023, and the evaluation of the CSR Program Results Report for Quarter IV of 2023.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Risk Monitoring Committee

Komite Pemantau Risiko Bank BPD Bali memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan kebijakan Bank, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan penerapan manajemen risiko terkait *country risk* dan *transfer risk*.

The Risk Monitoring Committee of Bank BPD Bali has the duty and responsibility to evaluate the conformity between the risk management policy and the implementation of the Bank's policies. It also monitors and evaluates the implementation of the duties of the Risk Management Committee and the Risk Management Work Unit, as well as the implementation of risk management related to country risk and transfer risk.

Piagam Komite Pemantau Risiko

Risk Monitoring Committee Charter

Bank BPD Bali telah memiliki Piagam Komite Pemantau Risiko sebagaimana yang tertuang dalam Piagam Komite Dewan Komisaris yang terakhir kali ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 003/KEP/BPD/2023 tanggal 29 Desember 2023. Hal-hal penting yang diatur dalam Piagam Komite Pemantau Risiko antara lain tugas dan tanggung jawab; keanggotaan; rapat; masa tugas; mekanisme evaluasi kinerja Komite Pemantau Risiko.

Bank BPD Bali berkomitmen melakukan reviu terhadap Piagam Komite Pemantau Risiko sebagai bagian dari Piagam Komite Dewan Komisaris secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

Bank BPD Bali has Risk Monitoring Committee Charter as stated in the Committee Charter of the Board of Commissioners, which was last established by the Decree of the Board of Commissioners No. 003/KEP/BPD/2023 dated December 29, 2023. Important matters regulated in the Risk Monitoring Committee Charter include, but not limited to, duties and responsibilities, membership, meetings, term of office, and mechanism for evaluating the performance of the Risk Monitoring Committee.

Bank BPD Bali is committed to review the Risk Monitoring Committee Charter as part of the Committee Charter of the Board of Commissioners on a regular basis, at least 1 (one) time in 3 (three) years.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

Piagam Komite Pemantau Risiko menjelaskan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

1. Evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan kebijakan Bank yang mencakup pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi, kecukupan kebijakan prosedur dan penetapan limit, kecukupan proses identifikasi, pengukuran serta sistem pengendalian manajemen risiko yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis dan risiko kepatuhan, dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
3. Penerapan manajemen risiko terkait *country risk* dan *transfer risk* wajib melakukan paling sedikit evaluasi strategi dan kebijakan terkait *country risk* dan *transfer risk* yang ditetapkan oleh Direksi; dan evaluasi pertanggung jawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas penerapan kebijakan terkait *country risk* dan *transfer risk* secara berkala;
4. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan kebijakan dan strategi manajemen risiko;
5. Mengevaluasi Laporan Profil Risiko triwulanan dan pelaksanaan proses manajemen risiko, untuk selanjutnya memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi oleh Bank serta usulan langkah-langkah untuk mitigasi atas risiko-risiko tersebut, apabila dipandang perlu Dewan Komisaris dapat memberikan masukan untuk langkah perbaikan kepada Direksi dan jajarannya;
6. Memantau dan mengevaluasi kepatuhan sehubungan dengan pelaksanaan manajemen risiko terhadap perjanjian dan komitmen yang dibuat Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak-pihak terkait lainnya;

The Risk Monitoring Committee Charter sets forth, among other things, the duties and responsibilities of the Risk Monitoring Committee as follows

1. *Evaluate the adequacy of the Bank's risk management policies and their implementation, including active oversight by the Board of Commissioners and the Board of Directors, the adequacy of policies, procedures and limits, the adequacy of the identification, measurement and control system for risk management, including credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, reputational risk, strategic risk and compliance risk, and a comprehensive internal control system.*
2. *Monitoring and evaluating the performance of the duties of the Risk Management Committee and the Risk Management Work Unit in order to make recommendations to the Board of Directors;*
3. *The implementation of risk management related to country risk and transfer risk shall at least conduct an evaluation of the strategy and policies related to country risk and transfer risk determined by the Board of Directors; and evaluate the accountability of the Board of Directors and provide a means of improvement for the implementation of policies related to country risk and transfer risk periodically;*
4. *Monitor and evaluate the performance of the duties of the Risk Management Committee and the Risk Management and Compliance Work Unit to determine their compliance with the risk management policy and strategy;*
5. *Evaluate the Quarterly Risk Profile Report and the implementation of the risk management process in order to provide input to the Board of Commissioners on the risk conditions faced by the Bank and proposed steps to mitigate these risks, and, if deemed necessary, provide input to the Board of Directors and its staff for corrective actions;*
6. *Monitor and evaluate compliance with agreements and commitments made by the Board of Directors to the Financial Services Authority and other related parties with respect to the implementation of risk management;*

7. Menganalisa/mengevaluasi setiap surat/memo yang diterima/ masuk terkait dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya, baik dari intern maupun ekstern dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris;
8. Membuat laporan atas segala pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris setiap 3 (tiga) bulan dan setiap akhir tahun buku; dan
9. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditugaskan Dewan Komisaris yang berhubungan dengan ruang lingkup tugas komite pemantau risiko.

7. Analyze/evaluate any letter/memo received/incoming in relation to its area of duties and responsibilities, both internally and externally, and report the results to the Board of Commissioners;
8. Report to the Board of Commissioners every 3 (three) months and at the end of each fiscal year on the overall performance of its duties; and
9. Perform such other duties as may be assigned by the Board of Commissioners in connection with the Risk Oversight Committee's scope of duties.

Masa Jabatan Komite Pemantau Risiko

Term of office of the Risk Monitoring Committee

Berdasarkan Piagam Kerja Komite Pemantau Risiko, masa tugas anggota komite dari pihak independen 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Based on the Risk Monitoring Committee Working Charter, the term of office of the independent Committee members is 1 (one) year and is renewable.

Jumlah, Komposisi dan Susunan Komite Pemantau Risiko

Number, composition and structure of the Risk Monitoring Committee

Selaras dengan POJK Penerapan Tata Kelola yang Baik bagi Bank Umum, Piagam Komite Pemantau Risiko menetapkan anggota komite ini beranggotakan paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris Independen; 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang manajemen risiko; dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan, bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Keahlian Pihak Independen tersebut dibuktikan dengan sertifikat manajemen risiko sebagaimana yang berlaku bagi Direksi; dan sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite.

In accordance with the POJK on the Implementation of Good Governance for Commercial Banks, the Charter of the Risk Monitoring Committee provides that this Committee shall be composed of at least 1 (one) Independent Commissioner; 1 (one) Independent Party with expertise in the field of risk management; and 1 (one) Independent Party with expertise in the field of finance, for banks engaged in conventional business activities. The expertise of the Independent Party is evidenced by a Risk Management Certificate, as applicable to the Board of Directors; and a Competency Certificate, which supports the implementation of the functions and responsibilities of the Committee.

Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko. Selanjutnya, mayoritas anggota Komite Pemantau Risiko terdiri atas Komisaris Independen dan Pihak Independen.

The Risk Monitoring Committee is chaired by an Independent Director who is also a member of the Committee. Members of the Board of Directors are prohibited from serving on the Risk Monitoring Committee. In addition, the majority of the members of the Risk Monitoring Committee are Independent Commissioners and Independent Parties.

Berpedoman pada Keputusan Direksi Bank No. 0209/KEP/DIR/SDM/2024 tanggal 21 Juni 2024 tentang Struktur Keanggotaan Komite Dewan Komisaris Bank BPD Bali, anggota Komite Pemantau Risiko berjumlah 5 (lima) orang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Based on the Resolution of the Board of Directors of the Bank No. 0209/KEP/DIR/SDM/2024 dated June 21, 2024 regarding the composition of the Board of Commissioners of Bank BPD Bali, the Risk Monitoring Committee consists of 5 (five) persons with the following composition:



Nama Name	Jabatan Position
Menjabat hingga akhir tahun buku 2024 <i>Serving until end of fiscal 2024</i>	
Insinyur Gede Arimbawa	Ketua merangkap Anggota <i>Chairman and Member</i>
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	Anggota <i>Member</i>
I Gede Darmawa, S.E.	Anggota <i>Member</i>
I Nengah Dana Wirawan, S.E.	Anggota (Pihak Independen) <i>Member (Independent Party)</i>
I Made Artawa, S.E.	Anggota (Pihak Independen) <i>Member (Independent Party)</i>
Digantikan sebelum tahun buku 2024 berakhir <i>Replaced before fiscal 2024 ends</i>	
GDE Winata, S.E., M.M.*	Anggota (Pihak Independen) <i>Member (Independent Party)</i>

* Digantikan oleh I Made Artawa, S.E., pada 28 Agustus 2024
Replaced by I Made Artawa, S.E., on August 28, 2024

Profil Ketua Komite Pemantau Risiko yang berasal dari anggota Dewan Komisaris yakni Insinyur Gede Arimbawa, Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H., dan I Gede Darmawa, S.E. dapat dilihat di bab Profil Perusahaan dari laporan tahunan ini. Sementara itu, profil anggota Komite Pemantau Risiko dari pihak independen beserta sertifikasi keahlian yang dimiliki adalah sebagai berikut:

The profile of the Chairman of the Risk Monitoring Committee from the members of the Board of Commissioners, namely Engineer Gede Arimbawa, Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H., and I Gede Darmawa, S.E. can be seen in the Company Profile chapter of this annual report. Meanwhile, the profile of the members of the Risk Monitoring Committee from independent parties along with the expertise certifications they have are as follows:

Nama <i>Name</i>	I Nengah Dana Wirawan, S.E.	
Posisi <i>Position</i>	Anggota Komite Pemantau Risiko	<i>Risk Monitoring Committee Member</i>
Domisili <i>Domicile</i>	Banjar Dinas Cepak, Desa Jegu Kecamatan Penebel Tabanan	<i>Banjar Dinas Cepak, Desa Jegu Kecamatan Penebel Tabanan</i>
Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia	<i>Indonesia</i>
Usia <i>Age</i>	63	<i>63</i>
Dasar Hukum Pengangkatan <i>Legal basis for appointment</i>	Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0241A/KEP/DIR/SDM/2024 tanggal 21 Mei 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pihak Independen Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali Atas Nama I Nengah Dana Wirawan, S.E., dan Perjanjian Kerja Khusus Nomor 0597/SPK/DIR/SDM/2024 tanggal 21 Mei 2024	
	<i>Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Bali No. 0241A/KEP/DIR/SDM/2024 dated May 21, 2024 on the Appointment of the Members of the Independent Party Committee of the Board of Commissioners of PT Bank Pembangunan Daerah Bali on behalf of I Nengah Dana Wirawan, S.E., and Special Employment Contract No. 0597/SPK/DIR/SDM/2024 dated May 21, 2024</i>	
Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	S1 (Ekonomi Manajemen)	<i>S1 (Business Management)</i>
Sertifikasi <i>Certification</i>	Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Kualifikasi 7	<i>Banking Risk Management Certification Qualification 7</i>
Pengalaman Kerja <i>Work Experience</i>	2 Oktober 2015 s.d 20 Oktober 2017 pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Dana dan Jasa Bank BPD Bali	<i>October 2, 2015 to October 20, 2017 Served as Head of Funds and Services Division of Bank BPD Bali</i>
Rangkap Jabatan <i>Concurrent Positions</i>	Tidak ada	<i>None</i>

Nama Name	I Made Artawa, S.E.	
Posisi Position	Anggota Komite Pemantau Risiko	Audit Committee Member
Domisili Domicile	Jl. Jepun Pipil Gang VIII Nomor 11, Denpasar	Jl. Jepun Pipil Gang VIII Nomor 11, Denpasar
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	Indonesia
Usia Age	57	57
Dasar Hukum Pengangkatan Legal basis for appointment	Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0622/KEP/DIR/SDM/2024 tanggal 1 Nopember 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pihak Independen Dewan Komisaris Atas Nama I Made Artawa, S.E., dan Perjanjian Kerja Khusus Nomor 1299/SPK/DIR/SDM/2024 tanggal 1 Nopember 2024.	Resolution of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Bali No. 0622/KEP/DIR/SDM/2024 dated November 1, 2024 appointing the members of the Independent Party Committee of the Board of Directors in the name of I Made Artawa, S.E., and Special Employment Contract No. 1299/SPK/DIR/SDM/2024 dated November 1, 2024.
Riwayat Pendidikan Educational Background	S1 (Ekonomi Pembangunan)	S1 (Development Economics)
Sertifikasi Certification	Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Kualifikasi 6	Banking Risk Management Certification Qualification 6
Pengalaman Kerja Work Experience	13 Januari 2020 s.d 3 Juli 2023 pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Kepatuhan Bank BPD Bali	January 13, 2020 to July 3, 2023 Formerly Head of Compliance Department of Bank BPD Bali
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak ada	None

Nama Name	GDE Winata, S.E., M.M.	
Posisi Position	Anggota Komite Pemantau Risiko	Audit Committee Member
Domisili Domicile	Jl. Permata Gatsu II, Denpasar	Jl. Permata Gatsu II, Denpasar
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	Indonesia
Usia Age	61	61
Dasar Hukum Pengangkatan Legal basis for appointment	Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0266/KEP/DIR/SDM/2024 tanggal 7 Juni 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pihak Independen Atas Nama GDE Winata, S.E., M.M., dan Addendum II Perjanjian Kerja Khusus Nomor 0203/SPK/DIR/SDM/2024 tanggal 7 Juni 2024.	Resolution of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Bali No. 0266/KEP/DIR/SDM/2024 dated June 7, 2024 on the Appointment of the Members of the Independent Party Committee on behalf of GDE Winata, S.E., M.M., and Addendum II to the Special Employment Contract No. 0203/SPK/DIR/SDM/2024 dated June 7, 2024.
Riwayat Pendidikan Educational Background	S2 (Manajemen Sumber Daya Manusia)	S2 (Human Resource Management)
Sertifikasi Certification	Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Kualifikasi 6	Banking Risk Management Certification Qualification 6
Pengalaman Kerja Work Experience	Tahun 2018 s.d Tahun 2020 menjabat sebagai Pimpinan Wilayah Kantor BRI Papua dan Papua Barat	In 2018 to 2020 Served as Regional Head of BRI Papua and West Papua Offices
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak ada	None



Independensi Komite Pemantau Risiko

Independence of the Risk Monitoring Committee

Sejalan dengan POJK Pedoman Tata Kelola bagi Bank Umum, Piagam Komite Dewan Komisaris mensyaratkan persyaratan independensi dan telah dipenuhi oleh anggota Komite Pemantau Risiko Bank sebagaimana dijelaskan berikut ini:

In accordance with the POJK Guidelines for Governance of Commercial Banks, the Charter of the Committee of the Board of Commissioners sets out independence requirements, which have been met by the members of the Bank's Risk Monitoring Committee, as explained below:

Aspek Independensi	Menjabat hingga akhir tahun buku 2024 <i>Serving until end of fiscal 2024</i>					Digantikan sebelum tahun buku 2024 berakhir <i>Replaced before fiscal 2024 ends</i>
	Insinyur Gede Arimbawa	Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	I Gede Darmawa, S.E.	I Nengah Dana Wirawan, S.E.	I Made Artawa, S.E.	GDE Winata, S.E., M.M.
Merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank BPD Bali dalam waktu enam bulan terakhir. <i>A person who works or has the authority and responsibility for planning, directing, monitoring or supervising the activities of Bank BPD Bali in the last six months.</i>	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
<i>Yes</i>	<i>Yes</i>	<i>Yes</i>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>
Memiliki saham Bank BPD Bali, baik langsung maupun tidak langsung. <i>Owns, directly or indirectly, shares in Bank BPD Bali.</i>	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>
Memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama/Pengendali. <i>Has an affiliate relationship with members of the Board of Commissioners, members of the Board, or major/controlling stockholders.</i>	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>
Memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank BPD Bali. <i>Has a business relationship, either directly or indirectly, that is related to the business activities of Bank BPD Bali</i>	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>
Merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit, non-audit, atau jasa konsultan lainnya kepada Bank BPD Bali dalam waktu enam bulan terakhir. <i>Person in accounting firm providing audit, non-audit or other consulting services to Bank BPD Bali in the last six months.</i>	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>

Rapat Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee Meeting

Sejalan dengan POJK Tata Kelola bagi Bank Umum, Piagam Komite Pemantau Risiko Bank BPD Bali menetapkan bahwa Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank dan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota komite. Komite mempersiapkan agenda dan bahan rapat untuk disampaikan kepada seluruh peserta rapat.

Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite. Pengambilan keputusan rapat Komite harus memenuhi kuorum yang ditetapkan, yaitu dihadiri oleh paling kurang 51% dari jumlah anggota komite. Keputusan rapat Komite terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat sebagaimana tersebut diatas, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;

Penjelasan terkait kehadiran anggota Komite dalam Rapat Komite Pemantau Risiko disajikan dalam tabel berikut ini:

In accordance with the POJK on Governance for Commercial Banks, the Risk Monitoring Committee Charter of Bank BPD Bali stipulates that the Risk Monitoring Committee Meeting shall be held according to the Bank's needs and at least 1 (one) time in 1 (one) month. The Risk Monitoring Committee meeting is held when the majority of the Committee members are present. The Committee shall prepare the agenda and meeting materials to be distributed to all meeting participants.

The Committee meeting shall be chaired by the Committee Chairperson. A quorum is defined as at least 51% of the total number of Committee members. Decisions at the Committee Meeting are initially made on the basis of deliberation for consensus. In the event that consensus is not reached as described above, decisions shall be made on the basis of a majority vote;

Explanations regarding the attendance of the Committee members at the Risk Monitoring Committee meeting are shown in the following table:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	Kehadiran Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Level
Menjabat hingga akhir tahun buku 2024 <i>Serving until end of fiscal 2024</i>				
Insinyur Gede Arimbawa	Ketua merangkap Anggota <i>Chairman and Member</i>	16	16	100%
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	Anggota <i>Member</i>	16	15	93,75%
I Gede Darmawa, S.E.	Anggota <i>Member</i>	16	15	93,75%
I Nengah Dana Wirawan, S.E.	Anggota (Pihak Independen) <i>Member (Independent Party)</i>	16	14	87,50%
I Made Artawa, S.E.	Anggota (Pihak Independen) <i>Member (Independent Party)</i>	16	11	68,75%
Digantikan sebelum tahun buku 2024 berakhir <i>Replaced before fiscal 2024 ends</i>				
GDE Winata, S.E., M.M.*	Anggota (Pihak Independen) <i>Member (Independent Party)</i>	5	5	100%
Rata-rata kehadiran <i>Average attendance</i>			14,20	88,75%



Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko

Minutes of Risk Monitoring Committee Meetings

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap Piagam Kerja Komite Pemantau Risiko, hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbedaan pendapat, yang terjadi dalam rapat komite dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. Selanjutnya, risalah rapat ditanda tangan oleh ketua komite dan notulis.

As a form of compliance with the Risk Monitoring Committee Charter, the results of the Committee meetings are recorded in the minutes of the meetings and documented in accordance with legal and regulatory requirements. Disagreements that arise in the Committee meeting are clearly stated in the minutes of the meeting, together with the reasons for the disagreement. In addition, the minutes of the meeting are signed by the Chairman of the Committee and the notary.

Ringkasan risalah Rapat Komite Pemantau Risiko disajikan dalam tabel berikut ini:

A summary of the minutes of the Risk Monitoring Committee meeting is presented in the table below:

No	Tanggal Date	Agenda	Peserta Participants					
			IGA	WBT	IGD	INDW	IMA	GW
1	30 Jan 24	Pembahasan Evaluasi Aktivitas Perdagangan <i>Banknotes</i> , <i>Remittance</i> , dan <i>Money Transfer</i> Western Union Triwulan IV Tahun 2023. <i>Discussion of the assessment of the banknote, remittance and Western Union money transfer business activities for Quarter IV of 2023.</i>	√	√	√	√	√	-
2	16 Feb 24	Pembahasan <i>Draft</i> Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank Semester II Tahun 2023. <i>Discussion of the draft report on supervision of the Bank's business plans for Semester II of 2023.</i>	√	√	√	√	√	-
3	22 Mar 24	Pembahasan Laporan Tingkat Kesehatan Bank. <i>Discussion of the report on the state of health of the Bank.</i>	√	√	√	-	√	-
4	3 Apr 24	Pembahasan <i>Draft</i> Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direksi Nomor 133/KEP/DIR/DJA/2013 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dana dan Jasa. <i>Discussion of the Draft Third Amendment to the Board of Directors' Decree No. 133/KEP/DIR/DJA/2013 on the Business Policy Manual (BPP) for Funds and Services.</i>	√	√	√	-	√	-
5	22 May 24	Pembahasan: • Laporan Profil Risiko <i>Bank Wide</i> . • Laporan Rekomendasi Kajian 8 (delapan) Risiko. Laporan <i>Stress Testing</i> Permodalan posisi Maret 2024. <i>Discussion:</i> • <i>Bank-wide Risk Profile Report.</i> • <i>Report on Recommendations for the Study of 8 (eight) Risks.</i> <i>Report on stress testing of capital position in March 2024.</i>	√	√	√	√	√	-
6	20 Jun 24	Pembahasan <i>Draft</i> Kode Etik Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk (PPE-EBUS). <i>Discussion on the draft Code of Ethics for Debt and Sukuk Dealers (PPE-EBUS).</i>	√	-	√	√	-	√
7	8 Jul 24	Pembahasan Laporan Penilaian Risiko TPPU/TPPT/PPSPM Tahun 2024. <i>Discussion on TPPU/TPPT/PPSPM Risk Assessment Report in 2024.</i>	√	√	√	√	-	√

No	Tanggal Date	Agenda	Peserta Participants					
			IGA	WBT	IGD	INDW	IMA	GW
8	29 Jul 24	Pembahasan: - Draft Keputusan Direksi tentang Buku Pedoman Perusahaan Sekretaris Perusahaan. - Draft Keputusan Direksi tentang Buku Pedoman Perusahaan Pelindungan Konsumen. Discussion: - Draft Board of Directors' Resolution on the Corporate Secretary's Policy Manual. - Discussion on the draft Board of Directors' Resolution on the Company Guidelines Book for Consumer Protection.	√	√	√	√	-	√
9	31 Jul 24	Pembahasan: - Laporan Penilaian Hasil Tingkat Maturitas Digital Bank BPD Bali Tahun 2023. - Draft Keputusan Direksi tentang Buku Pedoman Perusahaan Penerapan Tata Kelola. Discussion: - Report on the Assessment of the Results of the Digital Maturity Level of Bank BPD Bali in 2023. - Draft Decision of the Board of Directors on the Corporate Guidelines for the Implementation of Corporate Governance.	√	√	√	√	-	√
10	12 Aug 24	Pembahasan Draft Keputusan Direksi tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas. Discussion of the Draft Board of Directors' Decision on the Company Guidelines on Organizational Structure and Job Descriptions.	√	√	√	√	-	√
11	11 Sep 24	Pembahasan Kebijakan Umum Direksi (KUD) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2025. Discussion on the General Policy (KUD) of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Bali in 2025.	√	√	-	√	√	-
12	10 Oct 24	Pembahasan Draft Keputusan Direksi tentang Buku Pedoman Perusahaan Audit Berbasis Risiko dan Strategi Anti Fraud. Discussion on the Draft Resolution of the Board of Directors on the Company Policy on Risk-Based Audit and Anti-Fraud Strategy.	√	√	√	√	√	-
13	13 Nov 24	Pembahasan: - Draft Keputusan Direksi tentang Buku Pedoman Perusahaan Pedoman Penyusunan Peraturan Perusahaan. - Draft Keputusan Direksi tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0680/KEP/DIR/TIF/2023 tentang Buku Pedoman Perusahaan Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi Discussion: - Discussion on the draft resolution of the Board of Directors on the Company Guidelines for the Preparation of Company Regulations. - Draft Decision of the Board of Directors on Amendments to the Decision of the Board of Directors No. 0680/KEP/DIR/TIF/2023 on the Corporate Guidelines for Governance and Information Technology Management	√	√	√	√	√	-
14	19 Nov 24	Pembahasan Dokumen Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan Pedoman Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan)/PT Bank Pembangunan Daerah Bali. Discussion of the Recovery Plan Document for PT Bank Pembangunan Daerah Bali and the Recovery Plan Guidelines for PT Bank Pembangunan Daerah Bali.	√	√	√	√	√	-
15	17 Dec 24	Pembahasan Draft Keputusan Direksi tentang Buku Pedoman Perusahaan Akuntansi. Discussion of the draft Board of Directors' Resolution on the Company's Accounting Policies.	√	√	√	√	√	-
16	30 Dec 24	Pembahasan Draft Keputusan Direksi tentang Buku Pedoman Perusahaan Perpajakan. Discussion on the draft Board of Directors' resolution on the Company's Taxation Policy.	√	√	√	√	√	-



Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

Risk Monitoring Committee Competency Training and Development

Bank BPD Bali memberikan kesempatan kepada anggota Komite Pemantau Risiko untuk mengikuti *workshop*, seminar, dan sertifikasi sesuai dengan ketentuan.

Bank BPD Bali provides Risk Monitoring Committee members with opportunities for participation in workshops, seminars and certifications in accordance with regulations.

Anggota Komite Pemantau Risiko berkomitmen mengikuti beragam fasilitas pengembangan kompetensi yang disediakan oleh Bank. Pelatihan dan pengembangan yang diikuti anggota Komite Pemantau Risiko yang menjadi anggota Dewan Komisaris dapat dilihat di bagian Dewan Komisaris dari bab ini. Sedangkan Pelatihan dan pengembangan yang diikuti oleh anggota Komite Pemantau Risiko dari pihak independen disajikan dalam tabel berikut:

Risk Monitoring Committee members are required to attend various competency development facilities provided by the Bank. The training and development attended by the Risk Monitoring Committee members who are members of the Board of Commissioners are listed in the Board of Commissioners section of this chapter. Meanwhile, the training and development attended by the Risk Monitoring Committee members who are independent parties is shown in the table below:

Pelatihan & Pengembangan Kompetensi Training and Competency Development		
Nama Name	Tempat & Waktu Place & Time	Penyelenggara Organizer
I Nengah Dana Wirawan, S.E. Anggota (Pihak Independen) <i>Member (Independent Party)</i>		
Fokus Group Discussion (FGD) Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan sesuai POJK No. 22 Tahun 2023 <i>Focus Group Discussion (FGD) on Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector Pursuant to POJK No. 22 of 2023</i>	Zoom Meeting, 21 Feb 2024	Bank BPD Bali
Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 <i>Provision for Risk Management Re-Certification Level 7</i>	Zoom Meeting, 6 & 7 Mar 2024	Leadership Nasional Asia (LNA)
Uji Kompetensi Manajemen Risiko Re-Sertifikasi Jenjang Kualifikasi 7 <i>Risk Management Competency Test for Level 7 Re-Certification</i>	Jakarta, 9 May 2024	BSMR
Workshop dan Lokakarya Strategi Implementasi POJK Nomor 17 Tahun 2023 dan POJK Nomor 5 Tahun 2024 <i>Strategy Implementation Workshop of POJK No. 17 of 2023 and POJK No. 5 of 2024</i>	Mataram, 24 Oct 2024	FKDK BPDSI Wilayah Timur
Workshop Penerapan POJK Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank <i>Workshop on the implementation of POJK No. 15 of 2024 on Integrity of Bank Financial Reporting</i>	Bali, 20 Dec 2024	Bank BPD Bali
Presentasi dari Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan terkait Integritas Pelaporan Keuangan Bank (POJK Nomor 15 Tahun 2024) <i>Presentation by Heliantono & Rekan Audit Firm on Integrity of Bank Financial Reporting (POJK Number 15 of 2024)</i>	Zoom Meeting, 23 Dec 2024	Bank BPD Bali
I Made Artawa, S.E. Anggota (Pihak Independen) <i>Member (Independent Party)</i>		
Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 <i>Risk Management Recertification Training Level 6</i>	Zoom Meeting, 20 & 21 Feb 2024	Leadership Nasional Asia (LNA)
Uji Kompetensi Manajemen Risiko Re-Sertifikasi Jenjang Kualifikasi 6 <i>Risk Management Competency Test Re-Certification Qualification Level 6</i>	Jakarta, 29 Mei 2024	BSMR
Workshop Penerapan POJK Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank <i>Workshop on the Implementation of POJK No. 15 of 2024 on the Integrity of Bank Financial Reporting</i>	Bali, 20 Dec 2024	Bank BPD Bali
Presentasi dari Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan terkait Integritas Pelaporan Keuangan Bank (POJK Nomor 15 Tahun 2024) <i>Workshop on the implementation of POJK No. 15 of 2024 on Integrity of Bank Financial Reporting</i>	Zoom Meeting, 23 Dec 2024	Bank BPD Bali

Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Komite Pemantau Risiko

Implementation of Duties and Activities of the Risk Monitoring Committee

Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sesuai dengan Piagam Komite dan Program Kerja Komite, Komite Pemantau Risiko memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:

1. Komite Pemantau Risiko telah mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko secara optimal dan berkala terkait 17 (tujuh belas) evaluasi permohonan persetujuan kebijakan beragam kebijakan internal Bank BPD Bali antara lain berupa Keputusan Direksi, Rencana Bisnis Bank (RBB), dan Perubahan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) serta terkait 50 (lima puluh) pelaksanaan kebijakan diantaranya laporan kegiatan Komite Pemantau Risiko, Laporan Aktivitas *Treasury*, Laporan Realisasi RBB, dan Laporan Tugas Pengawasan dewan Komisaris.
2. Komite Pemantau Risiko telah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko secara optimal melalui evaluasi Pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) termasuk pelaksanaan tugas Fungsi Kepatuhan secara rutin mulai dari organisasi manajemen risiko dan Fungsi Manajemen Risiko dalam rangka efektivitas pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang tercermin dalam laporan profil risiko yang meliputi 4 (empat) evaluasi terkait pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko; 18 (delapan belas) evaluasi terkait pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan 6 (enam) evaluasi terkait pelaksanaan tugas Satuan Kerja Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan.

In order to make recommendations to the Board of Commissioners in accordance with the Committee Charter and the Committee's work program, the Risk Oversight Committee shall make recommendations to the Board of Commissioners in accordance with applicable regulations, namely

1. *The Risk Monitoring Committee has optimally and periodically evaluated the policies and implementation of risk management in relation to 17 (seventeen) evaluations of requests for approval of various internal policies of Bank BPD Bali, including in the form of decisions of the Board of Directors, Bank Business Plans (RBB), and amendments to the Company's policies (BPP), and in relation to 50 (fifty) policy implementations, including the Risk Monitoring Committee Activity Report, Treasury Activity Report, RBB Realization Report, and the Board of Commissioners Supervisory Task Report.*
2. *The Risk Monitoring Committee has monitored and evaluated the implementation of the duties of the Risk Management Committee in an optimal manner through evaluations of the implementation of the duties of the Risk Management Committee (KMR) and the Risk Management Work Unit (SKMR), including the implementation of the duties of the Compliance Function, routinely starting from the Risk Management Organization and the Risk Management Function, in order to ensure the effectiveness of the implementation of the risk management process and system, as reflected in the Risk Profile Report, which includes 4 (four) evaluations related to the implementation of the duties of the Risk Management Committee; 18 (eighteen) evaluations related to the implementation of the duties of the Risk Management Work Unit and 6 (six) evaluations related to the implementation of the duties of the Compliance Work Unit and Compliance Function.*

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Remuneration and Nomination Committee

Komite Remunerasi dan Nominasi Bank BPD Bali menjalankan tugasnya antara lain melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi, menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi. Komite ini juga menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta menyusun mekanisme dan melakukan penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris.

The Remuneration and Nomination Committee of Bank BPD Bali performs its duties including evaluating the remuneration policy, submitting the evaluation results and recommendations to the Board of Commissioners, ensuring that the remuneration policy is in compliance with the applicable regulations, and conducting periodic evaluations of the implementation of the remuneration policy. This committee also prepares and makes recommendations on the system and procedures for selecting and/or replacing members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, and prepares mechanisms and conducts performance evaluations of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi

Remuneration and Nomination Committee Charter

Bank BPD Bali telah memiliki Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana yang tertuang dalam Piagam Komite Dewan Komisaris yang terakhir kali ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 003/KEP/BPD/2023 tanggal 29 Desember 2023. Hal-hal penting yang diatur dalam Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi antara lain tugas dan tanggung jawab; keanggotaan; rapat; masa tugas; mekanisme evaluasi kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi.

Bank BPD Bali berkomitmen melakukan *review* terhadap Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai bagian dari Piagam Komite Dewan Komisaris secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Bank BPD Bali has Remuneration and Nomination Committee Charter as stated in the Committee Charter of the Board of Commissioners, which was last established by the Decree of the Board of Commissioners No. 003/KEP/BPD/2023 dated December 29, 2023. Important matters regulated in the Remuneration and Nomination Committee Charter include, but not limited to, duties and responsibilities, membership, meetings, term of office, and mechanism for evaluating the performance of the Remuneration and Nomination Committee.

Bank BPD Bali is committed to review the Remuneration and Nomination Committee Charter as part of the Committee Charter of the Board of Commissioners on a regular basis, at least 1 (one) time in 3 (three) month.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi menjelaskan tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai berikut:

1. Terkait dengan kebijakan remunerasi:
 - a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank pada masa yang akan datang;
 - b. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
 - Kebijakan remunerasi bagi karyawan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 - c. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - d. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.
2. Terkait dengan kebijakan nominasi:
 - a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - b. Mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi mengenai calon anggota anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit, serta anggota Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris;

The Remuneration and Nomination Committee Charter sets forth, among other things, the duties and responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee as follows:

1. *With respect to remuneration policy:*
 - a. *Evaluate the compensation policy based on performance, risk, peer comparability, goals and the Bank's long-term strategy, compliance with legal and regulatory reserves, and the Bank's potential future earnings;*
 - b. *Presenting the results of the evaluation and recommendations to the Board of Directors with respect to*
 - *Remuneration policy for the Board of Directors and the Board of Commissioners to be submitted to the GMS; and*
 - *Remuneration policy for all employees to be presented to the Board.*
 - c. *Ensure that the compensation policy complies with applicable regulations; and*
 - d. *Periodically evaluate the implementation of the compensation policy.*
2. *With respect to the Nomination Policy:*
 - a. *Prepare and make recommendations to the Board of Commissioners regarding the system and procedures for selecting and/or replacing members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners for submission to the GMS;*
 - b. *Identify and make recommendations to the GMS regarding nominees for members of the Board of Directors and/or nominees for members of the Board of Commissioners;*
 - c. *Make recommendations to the Board regarding independent parties to serve on the Audit Committee and any members of the Risk Oversight Committee to the Board;*

- d. Menyusun mekanisme dan melakukan penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris;
- e. Menganalisa/mengevaluasi setiap surat/memo yang diterima/masuk terkait dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya, baik dari intern maupun ekstern dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris;
- f. Membuat laporan atas segala pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris setiap 3 (tiga) bulan dan setiap akhir tahun buku;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditugaskan Dewan Komisaris yang berhubungan dengan ruang lingkup tugas komite remunerasi dan nominasi;
- h. Memberikan rekomendasi atas setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada RUPS;
- i. Memberikan penilaian atas pemberhentian atau penggantian anggota Direksi yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota Direksi berakhir yang telah melalui perencanaan dan mekanisme yang berlaku;
- j. Anggota komite yang menjalankan fungsi nominasi yang memiliki benturan kepentingan dengan usulan yang direkomendasikan terkait penggantian dan latar pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada RUPS wajib mengungkapkan dalam usulan yang direkomendasikan.

- d. Prepare mechanisms and conduct performance evaluations of the Board of Directors and the Board of Commissioners;
- e. Analyze/evaluate any letter/memo received/incoming related to the field of duties and responsibilities, both internally and externally and report the results to the Board of Commissioners;
- f. Report to the Board of Commissioners every 3 (three) months and at the end of each fiscal year on the performance of all duties;
- g. Perform such other duties as may be assigned by the Board of Directors in connection with the scope of the duties of the Compensation and Nominating Committee;
- h. To make recommendations to the GMS on any proposal to replace and/or appoint members of the Board of Directors and the Board of Commissioners;
- i. Provide an assessment of the dismissal or replacement of members of the Board of Directors, carried out before the end of the term of office of the members of the Board of Directors, which has gone through the applicable planning and mechanisms;
- j. Members of the Committee who perform the nomination function who have a conflict of interest with the recommended proposal related to the replacement and/or appointment of members of the Board of Commissioners to the GMS are required to disclose in the recommended proposal.

Masa Jabatan Komite Remunerasi dan Nominasi

Term of Office of the Remuneration and Nomination Committee

Berdasarkan Piagam Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi, masa tugas anggota komite dari pihak independen 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Based on the Remuneration and Nomination Committee Working Charter, the term of office of the independent Committee members is 1 (one) year and is renewable.

Jumlah, Komposisi dan Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi

Number, Composition and Structure of the Remuneration and Nomination Committee

Selaras dengan POJK Penerapan Tata Kelola yang Baik bagi Bank Umum, Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi menetapkan anggota komite ini beranggotakan paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris Independen; 1 (satu) orang Komisaris Non Independen; dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif Bank yang membawahkan fungsi sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai Bank. Dalam hal anggota komite remunerasi dan nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.

In accordance with the POJK on the Implementation of Good Governance for Commercial Banks, the Charter of the Remuneration and Nomination Committee stipulates that the members of this Committee shall be composed of at least 1 (one) independent member, 1 (one) non-independent member and 1 (one) executive officer of the Bank in charge of human resources or 1 (one) representative of the Bank's employees. In the event that the members of the Remuneration and Nomination Committee are determined to be more than 3 (three) persons, the Independent Commissioners must be at least 2 (two) persons.

Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

The Remuneration and Nomination Committee is chaired by an independent director who is also a member of the the Compensation and Nomination Committee.



Berpedoman pada Keputusan Direksi Bank No. 0603B/KEP/DIR/SDM/2024 tanggal 28 Agustus 2024 tentang Struktur Keanggotaan Komite Dewan Komisaris Bank BPD Bali, anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berjumlah 7 (tujuh) orang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Based on the Resolution of the Board of Directors of the Bank No. 0603B/KEP/DIR/SDM/2024 dated August 28, 2024 regarding the composition of the Board of Commissioners of Bank BPD Bali, the Remuneration and Nomination Committee consists of 7 (seven) persons with the following composition:

Nama Name	Jabatan Position
Menjabat hingga akhir tahun buku 2024 <i>Serving until end of fiscal 2024</i>	
I Nyoman Suparsa Widana	Ketua merangkap Anggota <i>Chairman and Member</i>
I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H	Anggota <i>Member</i>
Wisnu Bawa Temaja, S.H, M.H	Anggota <i>Member</i>
I Gede Darmawa, S.E	Anggota <i>Member</i>
Insinyur Gede Arimbawa	Anggota <i>Member</i>
Kepala Divisi Sumber Daya Manusia	Anggota <i>Member</i>
I Made Artawa, S.E.*	Anggota (Pihak Independen) <i>Member (Independent Party)</i>

* Merangkap anggota Komite Pemantau Risiko
Concurrent position as a member of the Risk Monitoring Committee

Profil Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari anggota Dewan Komisaris yakni I Nyoman Suparsa Widana, I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H., Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H., dan Insinyur Gede Arimbawa dapat dilihat di bab Profil Perusahaan dari laporan tahunan ini. Sementara itu, profil anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dari pihak independen dapat dilihat di Komite Pemantau Risiko. Adapun profil anggota komite yang berasal dari Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dapat dilihat di bab Profil Perusahaan.

The profile of the Chairman of the Remuneration and Nomination Committee from the members of the Board of Commissioners, namely I Nyoman Suparsa Widana, I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H., Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H., and Engineer Gede Arimbawa can be seen in the Company Profile chapter of this annual report. Meanwhile, the profile of the members of the Remuneration and Nomination Committee from independent parties can be seen in the Risk Monitoring Committee. The profile of the committee members from the Head of the Human Resources Division can be seen in the Company Profile chapter.

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi *Independence of the Remuneration and Nomination Committee*

Sejalan dengan POJK Pedoman Tata Kelola bagi Bank Umum, Piagam Komite Dewan Komisaris mensyaratkan persyaratan independensi dan telah dipenuhi oleh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank sebagaimana dijelaskan berikut ini:

In accordance with the POJK Guidelines for Governance of Commercial Banks, the Charter of the Committee of the Board of Commissioners sets out independence requirements, which have been met by the members of the Bank's Remuneration and Nomination Committee, as explained below:

Aspek Independensi	Menjabat hingga akhir tahun buku 2024 <i>Serving until end of fiscal 2024</i>							Digantikan sebelum tahun buku 2024 berakhir <i>Replaced before fiscal 2024 ends</i>
	I Nyoman Suparsa Widana, S.E., M.M.	I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H	Wisnu Bawa Temaja, S.H, M.H	I Gede Darmawa, S.E., M.Si.	Insinyur Gede Arimbawa	Kepala Divisi SDM	I Made Artawa, SE	
Merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank BPD Bali dalam waktu enam bulan terakhir. <i>A person who works or has the authority and responsibility for planning, directing, monitoring or supervising the activities of Bank BPD Bali in the last six months.</i>	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No	No
Memiliki saham Bank BPD Bali, baik langsung maupun tidak langsung. <i>Owns, directly or indirectly, shares in Bank BPD Bali.</i>	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
	No	No	No	No	No	No	No	No
Memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama/Pengendali. <i>Has an affiliate relationship with members of the Board of Commissioners, members of the Board, or major/controlling stockholders.</i>	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
	No	No	No	No	No	No	No	No
Memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank BPD Bali. <i>Has a business relationship, either directly or indirectly, that is related to the business activities of Bank BPD Bali</i>	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
	No	No	No	No	No	No	No	No
Merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit, non-audit, atau jasa konsultan lainnya kepada Bank BPD Bali dalam waktu enam bulan terakhir. <i>Person in accounting firm providing audit, non-audit or other consulting services to Bank BPD Bali in the last six months.</i>	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
	No	No	No	No	No	No	No	No



Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Remuneration and Nomination Committee Meeting

Sejalan dengan POJK Tata Kelola bagi Bank Umum, Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi Bank BPD Bali menetapkan bahwa Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank dan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Rapat komite remunerasi dan nominasi diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota komite, termasuk kehadiran 1 (satu) orang Komisaris Independen; dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai Bank.

Rapat Komite dipimpin oleh ketua komite. Pengambilan Keputusan rapat Komite harus memenuhi kuorum yang ditetapkan, yaitu dihadiri oleh paling kurang 51% dari jumlah anggota komite. Keputusan rapat Komite terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat sebagaimana tersebut diatas, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Penjelasan terkait kehadiran anggota Komite dalam Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi disajikan dalam tabel berikut ini:

In accordance with the POJK on Governance for Commercial Banks, the Remuneration and Nomination Committee Charter of Bank BPD Bali stipulates that the Remuneration and Nomination Committee Meeting shall be held according to the Bank's needs and at least 1 (one) time in 3 (three) months.

Meetings of the Compensation and Nomination Committee shall be deemed quorate if the majority of the members of the Committee are present, including the presence of 1 (one) independent director and 1 (one) executive officer in charge of human resources functions or 1 (one) representative of the Bank's employees.

The Committee meeting shall be chaired by the Committee Chairperson. A quorum is defined as at least 51% of the total number of Committee members. Decisions at the Committee Meeting are initially made on the basis of deliberation for consensus. In the event that consensus is not reached as described above, decisions shall be made on the basis of a majority vote.

Explanations regarding the attendance of the Committee members at the Remuneration and Nomination Committee meeting are shown in the following table:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meeting	Kehadiran Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Level
Menjabat hingga akhir tahun buku 2024 <i>Serving until end of fiscal 2024</i>				
I Nyoman Suparsa Widana, S.E., M.M.	Ketua merangkap Anggota <i>Chairman and Member</i>	7	7	100,00%
I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H	Anggota <i>Member</i>	7	7	100,00%
Wisnu Bawa Temaja, S.H, M.H	Anggota <i>Member</i>	7	7	100,00%
I Gede Darmawa, S.E., M.Si.	Anggota <i>Member</i>	7	6	85,71%
Insinyur Gede Arimbawa	Anggota <i>Member</i>	7	7	100,00%
Kepala Divisi Sumber Daya Manusia	Anggota <i>Member</i>	7	5	71,43%
I Made Artawa, S.E.*	Anggota (Pihak Independen) <i>Member (Independent Party)</i>	4	4	100,00%
Rata-rata kehadiran <i>Average attendance</i>			6,50	92,86%

* Merangkap anggota Komite Pemantau Risiko
Concurrent position as a member of the Risk Monitoring Committee

Risalah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Minutes of Remuneration and Nomination Committee Meetings

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap Piagam Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi, hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbedaan pendapat, yang terjadi dalam rapat komite dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. Selanjutnya, risalah rapat ditanda tangan oleh ketua komite dan notulis.

As a form of compliance with the Remuneration and Nomination Committee Charter, the results of the Committee meetings are recorded in the minutes of the meetings and documented in accordance with legal and regulatory requirements. Disagreements that arise in the Committee meeting are clearly stated in the minutes of the meeting, together with the reasons for the disagreement. In addition, the minutes of the meeting are signed by the Chairman of the Committee and the notary.

Ringkasan risalah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi disajikan dalam tabel berikut ini:

A summary of the minutes of the Remuneration and Nomination Committee meeting is presented in the table below:

No	Tanggal Date	Agenda	Peserta Participants						
			INSW	IGNBA	WBT	IGD	GA	Kepala SDM	IMA
1	23 Jan 24	Pembahasan Kajian Remunerasi Pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2024. <i>Discussion on the study on the remuneration of the management of PT Bank Pembangunan Daerah Bali in 2024.</i>	√	√	√	√	√	√	-
2	19 Feb 24	Pembahasan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan kepada Pengurus dan Karyawan Bank BPD Bali. <i>Discussion on the provision of religious holiday allowance for the management and employees of Bank BPD Bali.</i>	√	√	√	√	√	√	-
3	19 Apr 24	Pembahasan Penyesuaian Nilai Konjungtur Dalam Menyusun Perhitungan Gaji Karyawan Tahun 2024. <i>Discussion on the adjustment of conjunctive values in compiling the calculation of employee salaries in 2024.</i>	√	√	√	√	√	√	-
4	20 Jun 24	Pembahasan Pemberian Tambahan Penghasilan. <i>Discussion on the provision of additional income.</i>	√	√	√	√	√	-	√
5	23 Jul 24	Pembahasan Penyusunan Mekanisme dan Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris. <i>Discussion on the preparation of mechanisms and performance evaluation of the Board of Directors and the Board of Commissioners.</i>	√	√	√	-	√	√	√
6	30 Sep 24	Pembahasan Hasil Studi Komparatif terkait Penyusunan Mekanisme dan Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris. <i>Discussion of the results of comparative studies related to the preparation of mechanisms and performance evaluation of the Board of Directors and the Board of Commissioners.</i>	√	√	√	√	√	√	√
7	9 Des 24	Pembahasan Pemberian Tambahan Penghasilan Momen Akhir Tahun. <i>Discussion of the provision of additional income at the end of the year.</i>	√	√	√	√	√	-	√



Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Remuneration and Nomination Committee Competency Training and Development

Bank BPD Bali memberikan kesempatan kepada anggota Komite Remunerasi dan Nominasi untuk mengikuti *workshop*, seminar, dan sertifikasi sesuai dengan ketentuan.

Bank BPD Bali provides Remuneration and Nomination Committee members with opportunities for participation in workshops, seminars and certifications in accordance with regulations.

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berkomitmen mengikuti beragam fasilitas pengembangan kompetensi yang disediakan oleh Bank. Pelatihan dan pengembangan yang diikuti anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang menjadi anggota Dewan Komisaris dapat dilihat di bagian Dewan Komisaris dari bab ini. Sedangkan Pelatihan dan pengembangan yang diikuti oleh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dari pihak independen disajikan di bagian Komite Pemantau Risiko.

Remuneration and Nomination Committee members are required to attend various competency development facilities provided by the Bank. The training and development attended by the Remuneration and Nomination Committee members who are members of the Board of Commissioners are listed in the Board of Commissioners section of this chapter. Meanwhile, the training and development attended by the Remuneration and Nomination Committee members who are independent parties is shown in the table below:

Pelatihan & Pengembangan Kompetensi <i>Training and Competency Development</i>		
Nama <i>Name</i>	Tempat & Waktu <i>Place & Time</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>
GDE Winata, S.E., M.M. Anggota (Pihak Independen) <i>Member (Independent Party)</i>		
Seminar <i>Start Strong 2024 "Proven Strategies to Early Start and Achieve Your First Semester"</i> <i>Start Strong 2024 Seminar "Proven Strategies for Starting Early and Achieving Your First Semester"</i>	Zoom Meeting, 14 Jan 2024	Bank BPD Bali
Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 <i>Risk Management Re-Certification Briefing Level 6</i>	Zoom Meeting, 20 & 21 Feb 2024	Leadership Nasional Asia (LNA)
Uji Kompetensi Manajemen Risiko Re-Sertifikasi Jenjang Kualifikasi 6 <i>Risk Management Competency Test Re-Certification Qualification Level 6</i>	Jakarta, 29 May 2024	BSMR
I Made Artawa, S.E. Anggota (Pihak Independen) <i>Member (Independent Party)</i>		
<i>Workshop dan Lokakarya Strategi Implementasi POJK Nomor 17 Tahun 2023 dan POJK Nomor 5 Tahun 2024</i> <i>Implementation Strategy Workshop of POJK Number 17 of 2023 and POJK Number 5 of 2024</i>	Mataram, 24 Oct 2024	FKDK BPDSI Wilayah Timur
<i>Workshop Penerapan POJK Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank</i> <i>Workshop on implementation of POJK No. 15 of 2024 on Integrity of Financial Reporting of Banks</i>	Bali, 20 Dec 2024	Bank BPD Bali
Presentasi dari Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan terkait Integritas Pelaporan Keuangan Bank (POJK Nomor 15 Tahun 2024)	Zoom Meeting, 23 Dec 2024	Bank BPD Bali
<i>Presentation by Heliantono & Rekan Audit Firm on Integrity of Bank Financial Reporting (IPOJK Number 15 of 2024)</i>		

Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi

Implementation of Duties and Activities of the Remuneration and Nomination Committee

Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sesuai dengan Piagam Komite dan Program Kerja Komite, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris yang meliputi:

In order to make recommendations to the Board of Directors in accordance with the Committee Charter and the Committee's work program, the Compensation and Nominating Committee shall have the duty and responsibility to make recommendations to the Board of Directors, which shall include the following

1. Komite Remunerasi telah mengevaluasi 5 (lima) kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris dan telah mendapat persetujuan RUPS; b) mengevaluasi 11 (sebelas) kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan karyawan, dan telah disampaikan kepada Direksi;
2. Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris sebagai berikut:
 - Pada tahun 2024 Komite Remunerasi dan Nominasi tidak ada memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota komite kepada Dewan Komisaris mengingat Struktur Keanggota Komite telah terpenuhi.

1. The Compensation Committee has evaluated and received approval from the GMS of 5 (five) compensation policies for the Board of Directors and the Board of Commissioners; b) evaluated and received approval from the GMS of 11 (eleven) compensation policies for executive officers and employees;
2. The Remuneration and Nomination Committee has made recommendations to the Board of Commissioners for independent candidates to become members of the Committee as follows:
 - The Compensation and Nomination Committee did not make any recommendations to the Board of Commissioners for Independent Party candidates to become Committee members, as the Committee membership structure was met.

Penilaian Komite Dewan Komisaris Board of Commissioners Committee Assessment

Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris

Penilaian kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite juga sebagai salah satu aspek penilaian dalam *Self-assessment* GCG Bank BPD Bali. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian Dewan Komisaris dan Direksi, penilaian kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite juga mencakup *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.

Penilaian *governance structure* selanjutnya diturunkan menjadi aspek 10 (sepuluh) kategori penilaian, *governance process* terdiri 4 (empat) kategori penilaian, dan *governance outcome* terdiri 2 (dua) kategori penilaian dengan skor penilaian sebagai berikut:

Assessment of the Performance of the Board of Commissioners Committee

The assessment of the completeness and implementation of the committee's duties is also one of the assessment aspects in the self-assessment of GCG Bank BPD Bali. As explained in the section on the Board of Commissioners and Directors, the assessment of the completeness and implementation of the committee's duties also includes governance structure, governance process, and governance outcome.

The assessment of the governance structure is further divided into 10 (ten) assessment categories, the governance process consists of 4 (four) assessment categories and the governance result consists of 2 (two) assessment categories with the following assessment results:

No	Kriteria Criteria	Skor Penilaian Assessment Score	
		Juni June	Desember December
Governance Structure			
1	Komite Audit Audit Committee		
a	Anggota Komite Audit paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan. The Audit Committee consists of at least one Independent Commissioner, one Independent Party who is a financial or accounting expert and one Independent Party who is a legal or banking expert.	1	1
b	Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen The Audit Committee shall be chaired by an Independent Commissioner.	1	1
c	Paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen. At least 51% (fifty one percent) of the members of the Audit Committee shall be Independent Commissioners and Independent Parties.	1	1
d	Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. The members of the Audit Committee shall be of good integrity, morals and ethics.	1	1



No	Kriteria Criteria	Skor Penilaian Assessment Score	
		Juni June	Desember December
2	Komite Pemantau Risiko <i>Risk Monitoring Committee</i>		
a	Anggota Komite Pemantau Risiko paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko. <i>The members of the Risk Monitoring Committee shall consist of at least one Independent Commissioner, one Independent Party who is an expert in finance and one Independent Party who is an expert in risk management.</i>	1	1
b	Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen. <i>The Risk Monitoring Committee shall be chaired by an Independent Commissioner.</i>	1	1
c	Paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen. <i>At least 51% (fifty one percent) of the members of the Risk Monitoring Committee shall be Independent Commissioners and Independent Parties.</i>	1	1
d	Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. <i>The members of the Risk Monitoring Committee shall be of good integrity, morals and ethics.</i>	1	1
3	Komite Remunerasi dan Nominasi		
a	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris Non Independen dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai. <i>The members of the Remuneration and Nomination Committee shall include at least one independent member, one non-independent member and an executive officer in charge of human resources or an employee representative.</i>	1	1
b	Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi (<i>succession plan</i>) Bank. <i>The executive or employee representative member of the Committee must have knowledge and understanding of the provisions of the remuneration and/or nomination system and the Bank's succession plan.</i>	1	1
c	Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen. <i>The Remuneration and Nomination Committee shall be chaired by an independent member.</i>	1	1
d	Dalam hal jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang. <i>In the event that the number of members of the Remuneration and Nomination Committee is determined to be more than 3 (three) persons, the members of the Independent Commissioner must be at least 2 (two) persons.</i>	1	1
e	Dalam hal Bank membentuk Komite tersebut secara terpisah, maka: 1. Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank; dan 2. Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan rencana suksesi (<i>succession plan</i>) Bank. <i>In the event that the Bank forms the Committee separately, then:</i> 1. <i>The executive or employee representative member of the Remuneration Committee must have knowledge of the Bank's remuneration system; and</i> 2. <i>The executive member of the Nomination Committee shall have knowledge of the Bank's nomination system and succession plan.</i>	1	1
4	Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain. <i>Members of the Audit Committee and the Risk Monitoring Committee shall not be members of the Board of Directors of the same bank or of other banks.</i>	1	1

No	Kriteria Criteria	Skor Penilaian Assessment Score	
		Juni June	Desember December
5	Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. <i>Concurrent positions of independent parties in the same bank, other banks and/or other companies have been considered in terms of competence, independence criteria, confidentiality, code of ethics and implementation of duties and responsibilities.</i>	1	1
6	Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. <i>All Independent Parties who are members of the Committee do not have any financial, managerial, ownership and/or family relationship with the Board of Directors, the Committee and/or controlling shareholders or any relationship with the Bank that may affect their ability to act independently.</i>	1	1
7	Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang bersangkutan dan tidak melakukan fungsi pengawasan atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) selama 6 (enam) bulan. <i>All Independent Parties who are former members of the Board of Directors or Executive Officers of the Bank concerned and who do not perform supervisory functions, or other parties who have relationships with the Bank that may affect their ability to act independently, have completed a cooling-off period of 6 (six) months.</i>	1	1
8	Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling sedikit dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen. <i>Meetings of the Audit Committee and the Risk Monitoring Committee are attended by at least 51% (fifty-one percent) of the total number of members, including independent members and independent parties.</i>	1	1
9	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, paling sedikit dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai. <i>Meetings of the Remuneration and Nomination Committee are attended by at least 51% (fifty-one percent) of the total members, including one independent director and one executive or employee representative.</i>	1	1
10	Komposisi Komite tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik. <i>The composition of the Committee does not meet the requirements due to owner intervention.</i>	1	1
Governance Process			
1	Komite Audit <i>Audit Committee</i>		
	Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: <i>To provide recommendations to the Board of Commissioners:</i>		
a	Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. <i>The Audit Committee has monitored and evaluated the planning and implementation of audits and monitored the follow-up of audit results in order to assess the adequacy of internal control including the adequacy of the financial reporting process.</i>	1	1



No	Kriteria Criteria	Skor Penilaian Assessment Score	
		Juni June	Desember December
b	Komite Audit telah melakukan kaji ulang (<i>review</i>) terhadap : (1) pelaksanaan tugas SKAI (2) kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku; (3) kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan (4) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan <i>The Audit Committee has conducted a review of:</i> (1) <i>implementation of SKAI duties</i> (2) <i>conformity of audit implementation by the Public Accounting Firm (KAP) with applicable audit standards;</i> (3) <i>conformity of financial reports with applicable accounting standards; and</i> (4) <i>Implementation of follow-up by the Board of Directors on the findings of SKAI, Public Accountants and the results of supervision by the Financial Services Authority</i>	1	1
c	Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris. <i>The Audit Committee has provided recommendations for the appointment of Public Accountants and Public Accounting Firms in accordance with applicable provisions to the GMS through the Board of Commissioners.</i>	1	1
d	Tugas-tugas lainnya <i>Other tasks</i>	1	1
2	Komite Pemantau Risiko <i>Risk Oversight Committee</i>		
	Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: <i>To make recommendations to the Board of Commissioners:</i>		
a	Komite Pemantau Risiko mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko; <i>The Risk Monitoring Committee evaluates the risk management policy and its implementation;</i>	1	1
b	Komite Pemantau Risiko memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). <i>The Risk Monitoring Committee monitors and evaluates the implementation of the tasks of the Risk Management Committee and the Risk Management Work Unit (SKMR).</i>	1	1
3	Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Remuneration and Nomination Committee</i>		
	Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: <i>To make recommendations to the Board of Commissioners:</i>		
a	Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi : (1) Direksi dan Dewan Komisaris, dan telah disampaikan kepada RUPS; (2) Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi. <i>The Remuneration Committee has evaluated the remuneration policies for:</i> (1) <i>The Board of Directors and the Board of Commissioners and reported to the GMS;</i> (2) <i>Executive officers and employees, and reported to the Board.</i>	1	1
b	Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. <i>With respect to the Nomination Policy, the Committee has developed a system and procedures for the selection and/or replacement of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, which has been submitted to the GMS.</i>	1	1
c	Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. <i>The Nomination Committee has made recommendations for candidates for the Board of Directors and/or the Board of Commissioners to be submitted to the GMS.</i>	1	1

No	Kriteria Criteria	Skor Penilaian Assessment Score	
		Juni June	Desember December
d	Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris. <i>The Nomination Committee has made recommendations to the Board of Commissioners for independent candidates who may become members of the Committee.</i>		
4	Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank. <i>Meetings of the Committee are held as required by the Bank.</i>		
a	Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat. <i>Decisions are taken by consensus or, in the absence of consensus, by majority vote.</i>	1	1
b	Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris. <i>The results of the Committee meetings are recommendations that can be optimally used by the Board of Commissioners.</i>	1	1
c	Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Komite, seperti misalnya terkait rekomendasi pemberian remunerasi yang tidak wajar kepada pihak terkait pemilik, rekomendasi calon Anggota Direksi atau calon Anggota Dewan Komisaris yang tidak sesuai dengan prosedur pemilihan dan/atau penggantian yang telah ditetapkan. <i>The owner intervenes in the implementation of the Committee's tasks, such as recommendations for inappropriate compensation to parties related to the owner, recommendations for candidates for the Board of Directors or candidates for the Board of Commissioners that do not comply with the established selection and/or replacement procedures</i>	1	1
Governance Outcome			
1	Pembuatan risalah rapat, termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) secara jelas didokumentasikan dengan baik. <i>The preparation of meeting minutes, including the disclosure of dissenting opinions, is clearly and well documented.</i>	1	1
2	Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan seperti misalnya pemberian rekomendasi sesuai tugas kepada Dewan Komisaris. <i>Each committee has performed its functions as required, such as making recommendations to the Board of Commissioners in accordance with its terms of reference.</i>	1	1



ORGAN PENDUKUNG DIREKSI

Board of Directors' Supporting Organs

POJK Penerapan Tata Kelola yang Baik bagi Bank Umum menetapkan Direksi untuk membentuk Komite Direksi dalam rangka membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Selaras dengan ketentuan tersebut, Pedoman GCG Bank BPD Bali telah membentuk 7 (tujuh) Komite Direksi yakni Komite Manajemen Risiko, *Asset & Liability Committee*, Komite Kebijakan Perkreditan, Komite Kredit, Komite Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen, Komite Pengarah Teknologi Informasi, dan Komite Tim Tanggap Insiden Siber.

Dengan kewenangan yang dimilikinya, Direksi dapat membentuk komite lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kompleksitas Bank. Selanjutnya, Direksi berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku.

Penjelasan lebih mendalam terkait Komite-Komite Direksi Bank BPD Bali adalah sebagai berikut:

The POJK Good Governance Implementation for Commercial Banks stipulates that the Board of Directors shall form a Board of Directors Committee to assist and support the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors. In accordance with these provisions, the Bank BPD Bali GCG Guidelines have formed 7 (seven) Board Committees, namely Risk Management Committee, Asset & Liability Committee, Credit Policy Committee, Credit Committee, Consumer Complaint Handling and Resolution Committee, Information Technology Steering Committee and Cyber Incident Response Team Committee.

The Board of Directors, with the authority vested in it, may set up other committees that are adapted to the needs and/or the complexity of the Bank. In addition, the Board is required to evaluate the performance of the Committee at least at the end of each fiscal year.

A more detailed explanation of the committees of the Board of Directors of Bank BPD Bali can be found in the following section:

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Risk Management Committee

Bank BPD Bali telah membentuk Komite Manajemen Risiko sesuai dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas serta kemampuannya untuk melaksanakan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif.

Berpedoman pada Keputusan Direksi No.0678/KEP/DIR/MRO/2023 Tentang Piagam Komite Manajemen Risiko Bank BPD Bali, susunan organisasi Komite Manajemen Risiko Bank adalah sebagai berikut:

Bank BPD Bali has established a Risk Management Committee according to the Bank's objectives and policies, size and complexity, and its ability to implement effective risk management processes and systems.

The organizational structure of the Risk Management Committee of Bank BPD Bali in accordance with the Board of Directors' Resolution No. 0678/KEP/DIR/MRO/2023 on the Charter of the Risk Management Committee of Bank BPD Bali is as follows:

Posisi <i>Position</i>	Jabatan	Designation
Ketua I merangkap Anggota	: Direktur Kepatuhan <i>Director of Compliance</i>	<i>Chairman I concurrent member</i>
Ketua II merangkap Anggota	: Direktur Operasional & TI <i>Director of Operational & TI</i>	<i>Chairman II concurrent member</i>
Sekretaris merangkap Anggota	: Kepala Divisi Manajemen Risiko (MRO) <i>Head of Risk Management Division (MRO)</i>	<i>Secretary concurrent member</i>

Posisi Position	Jabatan	Designation
Anggota Member	1. Direktur Kredit 2. Direktur Bisnis 3. Kepala Divisi Kepatuhan 4. Kepala SKAI & Anti Fraud 5. Kepala Divisi Perencanaan Strategis 6. Kepala Divisi Teknologi Informasi 7. Kepala Divisi Operasional, Keuangan & Akuntansi 8. Kepala Divisi Sumber Daya Manusia 9. Kepala Divisi <i>Tresury</i> 10. Kepala Divisi Dana dan Jasa 11. Kepala Divisi Kredit Ritel & Konsumer 12. Kepala Divisi Kredit Korporasi 13. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan 14. Kepala Divisi Umum & Aset 15. Kepala Divisi Pengembangan Digital	1. <i>Director of Loan</i> 2. <i>Director of Commercial</i> 3. <i>Head of Compliance</i> 4. <i>Head of SKAI & Anti Fraud</i> 5. <i>Head of Strategic Planning Department</i> 6. <i>Head of Information Technology Division</i> 7. <i>Head of Operations, Finance & Accounting</i> 8. <i>Head of Human Resources</i> 9. <i>Head of Treasury Division</i> 10. <i>Head of Funds and Services Department</i> 11. <i>Head of Retail and Consumer Banking</i> 12. <i>Head of Corporate Banking</i> 13. <i>Head of Corporate Secretary Department</i> 14. <i>Head of General & Asset Department</i> 15. <i>Head of Digital Development Department</i>

Tugas dan Tanggung Jawab *Duties and Responsibilities*

Berpedoman pada Piagam Komite Manajemen Risiko, tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko;
2. Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko; dan
3. Penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.

Based on the Risk Management Committee Charter, the duties and responsibilities of the Risk Management Committee are as follows:

1. *To formulate policies, strategies and guidelines for the implementation of risk management;*
2. *Improving or refining the implementation of risk management based on the results of the evaluation of the implementation of risk management; and*
3. *Determining issues related to business decisions that deviate from normal procedures.*

Rapat Komite *Committee Meeting*

POJK Penerapan Tata Kelola yang Baik bagi Bank Umum menetapkan penyelenggaraan Rapat Komite Direksi sesuai dengan kebutuhan Bank. Terkait dengan hal tersebut, selama tahun 2024, Komite Manajemen Risiko melakukan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali dengan realisasi program kerja sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

The POJK on the Implementation of Good Governance for Commercial Banks provides for the holding of the meeting of the Committee of the Board of Directors in accordance with the needs of the Bank. Accordingly, the Risk Management Committee held 7 (seven) meetings in 2024 with the realization of the work program as presented in the table below.

Hasil rapat Komite Manajemen Risiko dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat jika terjadi dalam rapat.

The results of the meetings of the Risk Management Committee are recorded in the minutes of the meetings, which are well documented, including dissenting opinions, if they arise during the meeting.

No	Tanggal Date	Keterangan Remarks
1	22 Jan 24	Rapat Pembahasan Laporan Tingkat Kesehatan Bank Posisi Desember 2023. <i>Meeting to discuss the Bank Health Report for December 2023.</i>
2	1 Apr 24	Rapat Pembahasan Perubahan <i>Risk Appetite</i> , <i>Risk Tolerance</i> , dan <i>Risk Limit</i> Tahun 2024. <i>Meeting to discuss changes in risk appetite, risk tolerance and risk limit in 2024.</i>



No	Tanggal Date	Keterangan Remarks
3	22 Apr 24	Rapat Pembahasan Laporan Profil Risiko Bank Posisi Maret 2024. <i>Meeting to discuss the Bank's Risk Profile Report for March 2024.</i>
4	29 Jul 24	Rapat Pembahasan Laporan Tingkat Kesehatan Bank Posisi Juni 2024. <i>Meeting to discuss the Bank Health Level Report for June 2024.</i>
5	6 Oct 24	Rapat Pembahasan Laporan Profil Risiko Bank Posisi September 2024. <i>Meeting to discuss the Bank's Risk Profile Report for September 2024.</i>
6	18 Nov 24	Rapat Pembahasan Laporan Rencana Aksi Pemulihan Tahun 2024. <i>Meeting to discuss the Recovery Action Plan Report for 2024.</i>
7	16 Dec 24	Rapat Pembahasan Penetapan <i>Risk Appetite</i> , <i>Risk Tolerance</i> dan <i>Risk Limit</i> Tahun 2025. <i>Meeting to discuss the determination of risk appetite, risk tolerance and risk limit for 2025.</i>

ASSET & LIABILITY COMMITTEE (ALCO)

Asset & Liability Committee (ALCO)

Bank BPD Bali telah membentuk *Asset and Liability Committee* (ALCO) dalam rangka untuk mengelola seluruh risiko bisnis Bank secara sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan.

Bank BPD Bali has established an Asset and Liability Committee (ALCO) to manage all business risks of the Bank in a systematic, integrated and sustainable manner.

Berpedoman pada Keputusan Direksi No. 0644/KEP/DIR/TRS/2023 tanggal 14 Desember 2023 tentang Piagam *Asset and Liability Management Committee* (ALCO), proses pelaksanaan *asset* dan *liability* Bank diperkuat dengan susunan organisasi ALCO sebagai berikut:

In accordance with the Board of Directors' Resolution No. 0644/KEP/DIR/TRS/2023 dated December 14, 2023 on the Asset and Liability Management Committee (ALCO) Charter, the process of implementation of the bank's asset and liability management is strengthened by the following ALCO organizational structure:

Posisi Position	Jabatan	Designation
Ketua I merangkap Anggota	: Direktur Utama <i>President Director</i>	<i>Chairman I concurrent member</i>
Ketua II merangkap Anggota	: Direktur Bisnis <i>Director of Business</i>	<i>Chairman II concurrent member</i>
Ketua III merangkap Anggota	: Direktur Kredit <i>Director of Loan</i>	<i>Chairman III concurrent member</i>
Ketua IV merangkap Anggota	: Direktur Operasional & TI <i>Director of Operational & IT</i>	<i>Chairman IV concurrent member</i>
Sekretaris I merangkap Anggota	: Kepala Divisi <i>Treasury</i> <i>Head of Treasury Division</i>	<i>Secretary I concurrent member</i>
Sekretaris II merangkap Anggota	: Kepala Divisi Perencanaan Strategis <i>Head of Strategic Planning Division</i>	<i>Secretary II concurrent member</i>
Anggota	: 1. Kepala Divisi Dana dan Jasa 2. Kepala Divisi Kredit Korporasi 3. Kepala Divisi Kredit Retail & Konsumer 4. Kepala Divisi Teknologi Informasi 5. Kepala Divisi Pengembangan Digital 6. Kepala Divisi Operasional, Keuangan & Akuntansi 7. Kepala Divisi Manajemen Risiko	1. <i>Head of Fund and Services Division</i> 2. <i>Head of Corporate Loan Division</i> 3. <i>Head of Retail & Consumer Loan Division</i> 4. <i>Head of Information Technology Division</i> 5. <i>Head of Digital Development Division</i> 6. <i>Head of Operations, Finance & Accounting Division</i> 7. <i>Head of Risk Management Division</i>

Tugas dan Tanggung Jawab *Duties and Responsibilities*

Piagam *Asset and Liability Committee* menetapkan tugas dan tanggung jawab komite ini sebagai berikut:

1. Meninjau dan mengkaji apakah pedoman dan kebijakan bank telah disusun secara berkesinambungan dalam lingkup pengelolaan Aset dan Liabilitas sesuai dengan tujuan bank dan perkembangan perbankan.
2. Meninjau kembali struktur neraca dan mengkaji risiko dan eksposur *Asset and Liability Management*.
3. Melihat prakiraan dan proyeksi keadaan ekonomi, suku bunga serta nilai tukar untuk mengarahkan kebijakan yang ditetapkan.
4. Menetapkan petunjuk pengelolaan dan pengendalian risiko yang berdampak pada:
 - a. Risiko Likuiditas (*Liquidity Management*).
 - b. Risiko Suku Bunga (*Gap Management*).
 - c. Risiko Valuta Asing (*Foreign Exchange Management*).
 - d. Risiko Portofolio (*Earnings dan Investment Management*).
 - e. Me-reviu dan menetapkan suku bunga kredit dan dana pihak ketiga.
 - f. Me-reviu dan menetapkan tarif layanan.
 - g. Menetapkan harga transfer dana internal (*Internal Funds Transfer Rate*) atau harga Rekening Antar Kantor dalam memacu efisiensi pengelolaan cabang bank.
5. Meninjau kembali *performance*, rasio keuangan sesuai ketentuan & rencana bisnis bank, posisi kekayaan dan kewajiban keuangan bank guna mengkaji dampak keputusan ALCO terhadap tujuan bank dan terhadap kepatuhan peraturan internal bank maupun terhadap kepatuhan regulasi.
6. Mengadakan penyesuaian strategi, batasan-batasan dan petunjuk pelaksanaan serta kebijakan dalam rangka mencapai tujuan ALCO dan tujuan bank.
7. Melakukan *review* terhadap pedoman dan tata tertib kerja komite ALCO secara berkala.

The Charter of the Asset and Liability Committee sets forth the duties and responsibilities of the Committee as follows:

1. *To review and assess whether the Bank's asset and liability management guidelines and policies have been developed on an ongoing basis in accordance with the Bank's objectives and banking developments.*
2. *Reviewing the balance sheet structure and assessing the risks and exposures of Asset and Liability Management.*
3. *Reviewing forecasts and projections of economic conditions, interest rates and exchange rates in order to guide the policies established.*
4. *Establish guidelines for risk management and control that impact:*
 - a. *Liquidity risk (liquidity management).*
 - b. *Interest rate risk (gap management).*
 - c. *Foreign exchange risk (foreign exchange management).*
 - d. *Portfolio risk (income and investment management).*
 - e. *Review and set interest rates on loans and third-party funds.*
 - f. *Review and determination of service charges.*
 - g. *Establishing the internal funds transfer rate or interoffice account price to increase the efficiency of branch management.*
5. *Reviewing the performance, financial ratios in accordance with the Bank's policies and business plans, and the position of the Bank's financial assets and liabilities to assess the impact of ALCO decisions on the Bank's objectives and compliance with the Bank's internal policies and regulatory requirements.*
6. *Adjustments to strategies, limits and implementing instructions and policies to achieve ALCO's objectives and the Bank's goals.*
7. *Periodically review the ALCO Committee's policies and procedures.*

Rapat Komite *Committee Meeting*

POJK Penerapan Tata Kelola yang Baik bagi Bank Umum menetapkan penyelenggaraan Rapat Komite Direksi sesuai dengan kebutuhan Bank. Terkait dengan hal tersebut, selama tahun 2024, ALCO melakukan rapat sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan realisasi program kerja sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Hasil rapat ALCO dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat jika terjadi dalam rapat.

The POJK on the Implementation of Good Governance for Commercial Banks provides for the holding of the meeting of the Committee of the Board of Directors in accordance with the needs of the Bank. Accordingly, ALCO held 13 (thirteen) meetings in 2024 with the realization of the work program as presented in the table below.

The results of the meetings of ALCO are recorded in the minutes of the meetings, which are well documented, including dissenting opinions, if they arise during the meeting.



No	Tanggal Date	Keterangan Remarks
1	24 Jan 24	<i>Review Suku Bunga Perkreditan</i> <i>Loan Interest Rate Review</i>
2	26 Feb 24	<i>Review Suku Bunga, suku bunga khusus dan modal kerja kas harian</i> <i>Review of Interest Rate, Special Interest Rate and Daily Cash Working Capital</i>
3	25 Mar 24	<i>Review Suku Bunga dan Tarif layanan Kredit dan review Suku Bunga dan Tarif Layanan dalam rangka promo HUT ke 62.</i> <i>Review of Interest Rate and Credit Service Rates and Review of Interest Rate and Service Rate in the framework of 62nd Anniversary Promo</i>
4	25 Apr 24	<i>Review Suku Bunga dan Tarif layanan Kredit dan review Suku Bunga dan Tarif Layanan dalam rangka promo HUT ke 62.</i> <i>Review of Interest Rate and Credit Service Rates and Review of Interest Rate and Service Rate in the framework of the 62nd Anniversary Promo</i>
5	27 May 24	<i>Review Suku Bunga perkreditan dan review kewenangan negosiasi suku bunga simpanan khususnya untuk fresh money.</i> <i>Review of the Credit Interest Rate and review of the authority to negotiate savings interest rates, especially for fresh money.</i>
6	25 Juni 24	<i>Review Suku Bunga Perkreditan dan review tarif kartu co-branding BPD Bali Flazz.</i> <i>Review of Credit Interest Rate and review of BPD Bali Flazz co-branding card rates.</i>
7	30 Jul 24	<i>Penetapan suku bunga dan tarif layanan untuk kredit baru (KMG Peralihan Plus), review suku bunga deposito dan kewenangan negosiasi suku bunga deposito.</i> <i>Set interest rates and service charges for new loans (KMG Transition Plus), review deposit rates and authority to negotiate deposit rates.</i>
8	28 Aug 2024	<i>Review tarif layanan dan modal kerja kas harian</i> <i>Review service rates and daily cash working capital</i>
9	30 Sep 24	<i>Penetapan Pedoman Teknis Penyusunan, Pengumuman dan Penyampaian Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dan review Suku Bunga perkreditan</i> <i>Determining technical guidelines for the preparation, announcement and submission of base lending rates (SBDK) and reviewing lending rates</i>
10	04 Oct 24	<i>Penetapan hasil perhitungan SBDK sesuai POJK Nomor 13 Tahun 2024</i> <i>Determination of SBDK calculation results according to POJK No. 13 of 2024</i>
11	06 Nov 24	<i>Penetapan hasil perhitungan SBDK sesuai POJK Nomor 13 Tahun 2025 untuk dilakukan publikasi untuk pertama kali</i> <i>Determination of SBDK calculation results according to POJK No. 13 of 2025 to be published for the first time</i>
12	25 Nov 24	<i>Review dan stress test likuiditas akhir tahun 2024, persiapan Akhir Tahun 2024</i> <i>Review and stress test of liquidity at the end of 2024, preparation for the end of 2024</i>
13	24 Dec 24	<i>Review POJK terkait rasio LCR, NSFR, insentif GWM dan stress test rasio keuangan Bank.</i> <i>Review of POJK related to LCR ratio, NSFR, GWM incentives and stress test of the Bank's financial ratios.</i>

KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Credit Policy Committee

Bank BPD Bali telah membentuk Komite Kebijakan Perkreditan dalam rangka untuk menjalankan tugas dan kewajibannya terkait penyusunan Kebijakan Perkreditan beserta implementasinya.

Berpedoman pada Keputusan Direksi No. 0676/KEP/DIR/KRK/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Piagam Komite Kebijakan Perkreditan (KKP), susunan organisasi Komite Kebijakan Perkreditan adalah sebagai berikut:

Bank BPD Bali has established a Credit Policy Committee to perform its duties and obligations related to preparing and implementing its Credit Policy.

Pursuant to the Board Resolution No. 0676/KEP/DIR/KRK/2023 dated December 28, 2023 on the Charter of the Credit Policy Committee (KKP), the organizational structure of the Credit Policy Committee is as follows:

Posisi Position	Jabatan	Designation
Ketua I merangkap Anggota <i>Chairman I concurrently serves as Member</i>	: Direktur Utama <i>President Director</i>	<i>Chairman I concurrent member</i>
Ketua II merangkap Anggota <i>Chairman II concurrently serves as Member</i>	: Direktur Kredit <i>Director of Loan</i>	<i>Chairman II concurrent member</i>
Ketua III merangkap Anggota <i>Chairman III concurrently serves as Member</i>	: Direktur Bisnis <i>Director of Business</i>	<i>Chairman III concurrent member</i>
Ketua IV merangkap Anggota <i>Chairman IV concurrently serves as Member</i>	: Direktur Operasional & TI <i>Director of Operational & IT</i>	<i>Chairman IV concurrent member</i>
Sekretaris I merangkap Anggota <i>Secretary I concurrently serves as Member</i>	: Kepala Divisi Kredit Korporasi <i>Head of Corporate Loan Division</i>	<i>Secretary I concurrent member</i>
Sekretaris II merangkap Anggota <i>Secretary II concurrently serves as Member</i>	: Kepala Divisi Kredit Ritel & Konsumer <i>Head of Retail & Consumer Loan Division</i>	<i>Secretary II concurrent member</i>
Anggota <i>Member</i>	: 1. Direktur Kepatuhan 2. Kepala Divisi Manajemen Risiko 3. Kepala Divisi Kepatuhan 4. Kepala SKAI dan Anti Fraud 5. Kepala Divisi Operasional Keuangan & Akuntansi	1. <i>Director of Compliance</i> 2. <i>Head of Risk Management</i> 3. <i>Head of Compliance</i> 4. <i>Head of SKAI and Anti-Fraud</i> 5. <i>Head of Finance & Accounting Operations Division</i>

Tugas dan Tanggung Jawab

Duties and Responsibilities

Piagam Komite Kebijakan Perkreditan menetapkan tugas dan tanggung jawab komite ini sebagai berikut:

1. Meninjau dan mengkaji apakah kebijakan Bank telah disusun secara berkesinambungan sesuai dengan tujuan dalam lingkup pengelolaan kredit sesuai dengan tujuan Bank dan Perkembangan perbankan;
2. Memberikan masukan dan saran dalam rangka penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;
3. Mengawasi dan memastikan Kebijakan Perkreditan Bank untuk dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan solusi apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapannya;
4. Memantau dan mengevaluasi:
 - a. Perkembangan dan kualitas seluruh portofolio perkreditan;
 - b. Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit;
 - c. Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu;
 - d. Kebenaran pelaksanaan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
 - e. Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit;
 - f. Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. Memantau kewajiban Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian (CKKE);

The Charter of the Credit Policy Committee sets forth the duties and responsibilities of the Committee as follows:

1. *To review and assess whether the Bank's credit management policies have been developed on an ongoing basis in accordance with the Bank's objectives and banking developments;*
2. *To provide input and suggestions within the framework of the preparation of the Bank's credit policy, especially those related to the formulation of the principle of prudence in credit;*
3. *To monitor and ensure that the Bank's Credit Policy can be implemented and executed in a consistent and uniform manner, and to formulate solutions in case of obstacles/constraints in its implementation;*
4. *Monitoring and evaluation:*
 - a. *The development and quality of the overall credit portfolio;*
 - b. *Correct implementation of the credit decision authority;*
 - c. *Correctness of the process of granting, development and quality of loans to related parties and certain major debtors;*
 - d. *The correctness of the implementation of the provisions of the Maximum Credit Limit (BMPK);*
 - e. *Comply with the provisions of laws and other regulations in the conduct of the business of lending;*
 - f. *Handling problem loans in accordance with applicable regulations;*
 - g. *Monitoring the Bank's obligations to maintain the adequacy of the provision for expected credit losses (CKKE);*

5. Menyampaikan laporan tertulis secara triwulanan paling lambat disampaikan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan; dan
 - b. Hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang dimaksud dalam ayat (1) huruf d (sesuai SK Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kebijakan Perkreditan).
6. Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang terkait dengan ayat (1) huruf e (sesuai SK Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kebijakan Perkreditan);

5. *Provide quarterly written reports, no later than the 10th (tenth) of the following month, to the Board of Directors, with a copy to the Board of Commissioners, regarding:*
 - a. *The results of monitoring the application and implementation of the Credit Policy; and*
 - b. *The results of the monitoring and evaluation with respect to the matters referred to in paragraph (1), letter d) (in accordance with the Rules of Procedure of the Credit Policy Committee).*
6. *Proposing corrective actions to the Board of Directors, with a copy to the Board of Commissioners, regarding matters referred to in paragraph (1)(e) (in accordance with the Decree on Guidelines and Working Rules of the Credit Policy Committee);*

Rapat Komite

Meeting of the Committee

POJK Penerapan Tata Kelola yang Baik bagi Bank Umum menetapkan penyelenggaraan Rapat Komite Direksi sesuai dengan kebutuhan Bank. Terkait dengan hal tersebut, selama tahun 2024, Komite Kebijakan Perkreditan melakukan rapat sebanyak 8 (delapan) kali dengan realisasi program kerja sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

The POJK on the Implementation of Good Governance for Commercial Banks provides for the holding of a meeting of the Committee of the Board of Directors in accordance with the needs of the Bank. In this regard, the Credit Policy Committee held 8 (eight) meetings in 2024 with the implementation of the work program as presented in the table below.

Hasil rapat Komite Kebijakan Perkreditan dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat jika terjadi dalam rapat.

The results of the meetings of the Credit Policy Committee are recorded in the minutes of the meeting, which are well documented, including the dissenting opinions, if they arise in the meeting.

No	Tanggal Date	Keterangan Remarks
1	29 Jan 24	1. <i>Draft Keputusan Direksi tentang SKIM Pemberian Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (KUA).</i> 2. <i>Draft Keputusan Direksi tentang SKIM Pemberian Kredit Prioritas Sektor Pertanian Bank BPD Bali (KPSP-Bank BPD Bali).</i> 1. <i>Draft Decision of the Board of Directors on SKIM for the provision of business credit for agricultural equipment and machinery (KUA).</i> 2. <i>Draft Decision of the Board of Directors on the SKIM for the provision of priority credit for the agricultural sector of Bank BPD Bali (KPSP-Bank BPD Bali).</i>
2	24 Mar 24	<i>Draft Perlakuan Khusus Terhadap Kredit yang Terkena Dampak Bencana.</i> <i>Draft of Special Treatment for Loans Affected by Disasters.</i>
3	26 Feb 24	<i>Draft Keputusan Direksi tentang SKIM Pemberian Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (KUA)</i> <i>Draft of the Board of Directors' Decision on the SKIM for the Provision of Agricultural Equipment and Machinery Business Credit (KUA)</i>
4	13 Mar 24	Penyelesaian Debitur ASPAN <i>Settlement of ASPAN debtors</i>
5	20 May 24	1. <i>Pembahasan Surat Edaran Direksi tentang Penyaluran Kredit sisi kumbara (Subsidi Kredit Usaha Mikro Badung Sejahtera)</i> 2. <i>Tindaklanjut Draft SOP Kredit Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota</i> 3. <i>Tindaklanjut Draft SOP Kredit Multiguna Peralihan Plus dan skema grace period.</i> 1. <i>Discussion of the Board of Directors' Circular on the Distribution of Sidi Kumbara Credit (Badung Sejahtera Micro Business Credit Subsidy)</i> 2. <i>Follow-up on the draft SOP for credit for members of the Provincial/District/City DPRD</i> 3. <i>Follow-up on the Draft SOP for Multipurpose Credit for Transition Plus and Grace Period Scheme.</i>
6	12 Aug 24	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. <i>Financial Services Authority Regulation No. 22 of 2023 on Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector</i>

No	Tanggal Date	Keterangan Remarks
7	23 Dec 24	Pembahasan POJK Nomor 20 Tahun 2023 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan Produk <i>Suretyship</i> atau <i>Suretyship</i> Syariah dalam rangka penyamaan persepsi atas penyesuaian pertanggungan asuransi kredit yang disalurkan. <i>Discussion of POJK No. 20 of 2023 on insurance products related to Shari'ah credit or financing and surety products or Shari'ah surety in order to harmonize perceptions on adjustments to distributed loan insurance coverage.</i>
8	24 Dec 24	- Pembahasan POJK Nomor 20 Tahun 2023 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan Produk <i>Suretyship</i> atau <i>Suretyship</i> Syariah dalam rangka penyamaan persepsi atas penyesuaian pertanggungan asuransi kredit yang disalurkan. - Perubahan ke XV (Kelima Belas) Standar Operasional Prosedur Perkreditan Bank BPD Bali dalam rangka mengakomodir analis dapat melakukan appraisal agunan dan perubahan persentase CEF untuk agunan tanah. <i>1. Discussion of POJK Number 20 of 2023 concerning Insurance Products Linked to Sharia Credit or Financing and Suretyship Products or Sharia Suretyship to align considerations regarding adjustments to distributed credit insurance coverage.</i> <i>2. Amendments to XV (Fifteenth) of Bank BPD Bali Credit Standard Operating Procedures to allow analysts to conduct collateral valuations and changes to the CEF percentage for land collateral.</i>

KOMITE KREDIT

Credit Committee

Bank BPD Bali telah membentuk Komite Kredit dalam rangka untuk menjalankan tugas dan kewajibannya memberikan rekomendasi dan/atau persetujuan kredit disamping evaluasi dan menganalisa permohonan kredit.

Bank BPD Bali has formed a Credit Committee to carry out its duties and obligations to make recommendations and/or credit approvals in addition to the evaluation and analysis of credit applications.

Berpedoman pada Keputusan Direksi No. 0677/KEP/DIR/KRK/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Piagam) Komite Kredit (KK), susunan organisasi Komite Kredit adalah sebagai berikut:

Pursuant to the Board Resolution No. 0677/KEP/DIR/KRK/2023 dated December 28, 2023 on the Guidelines and Work Regulations (Charter) of the Credit Committee (KKP), the organizational structure of the Credit Committee is as follows:

Posisi Position	Jabatan	Designation
Kelompok Pemutus <i>Decision Group</i>	: 1. Direktur Utama (Ketua KK); 2. Direktur Kredit (Wakil Ketua KK) 3. Direktur Operasional dan TI (Anggota KK); 4. Direktur Bisnis (Anggota KK).	<i>President Director (KK)</i> <i>Director of Loan (KK Vice Chairman)</i> <i>Director of Operational & IT</i> <i>Director of Business</i>
Kelompok Pengusul <i>Proposing Group</i>	: 1. Kepala Divisi Kredit Korporasi (Sekretaris KK); 2. Kepala Bagian Kredit Korporasi (Anggota KK); 3. <i>Account Officer</i> (AO) dan/atau <i>Relationship Manager</i> (RM) bagian Kredit Korporasi pada Divisi Kredit Korporasi (Anggota KK); dan 4. Kepala Bagian Pengembangan Produk dan Administrasi (Anggota KK).	1. <i>Head of Corporate Loan Department (KK Secretary);</i> 2. <i>Head of Corporate Loan Department (KK member);</i> 3. <i>Account Officer (AO) and/or Relationship Manager (RM) of Corporate Loan Section in Corporate Credit Division (KK member); and</i> 4. <i>Head of Product Development and Administration Section</i>
Kelompok Kajian atau <i>Non Voting Member</i>	: 1. Direktur Kepatuhan 2. Kepala Divisi Manajemen Risiko 3. Kepala Divisi Kepatuhan	1. <i>Director of Compliance</i> 2. <i>Head of Risk Management Division</i> 3. <i>Head of Compliance</i>

Tugas dan Tanggung Jawab

Duties and Responsibilities

Piagam Komite Kredit menetapkan tugas dan tanggung jawab Komite Kredit sebagai berikut:

1. Tugas dan Tanggung Jawab Kelompok Pemutus :
 - a. Memberikan rekomendasi dan/atau persetujuan atas permohonan kredit baru ataupun permohonan penambahan fasilitas kredit, berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, obyektif, cermat, konsekuen dan konsisten;
 - b. Menolak permintaan dan/atau pengaruh pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit, untuk memberikan persetujuan kredit yang hanya bersifat formalitas.
2. Tugas dan Tanggung Jawab Kelompok Pengusul :
 - a. Mengevaluasi dan menganalisis permohonan kredit ataupun permohonan penambahan fasilitas kredit secara komprehensif dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;
 - b. Mempersiapkan permohonan kajian kepada Kelompok Kajian, dan mempersiapkan permohonan persetujuan pemberian kredit kepada Kelompok Pemutus;
 - c. Mempersiapkan bahan tayang (presentasi) yang mencakup minimal mengenai *company profile* calon debitur, rencana penggunaan kredit, manajemen, sumber pengembalian utama (kondisi keuangan), sumber pengembalian kedua (agunan), profile risiko, dan rancangan penetapan struktur fasilitas kredit.
 - d. Melakukan koordinasi dengan *Assets and Liabilities Committee* (ALCO) dalam aspek pendanaan kredit;
 - e. Menolak permintaan dan/atau pengaruh pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit, yang hanya bersifat formalitas;
 - f. Merangkum hasil keputusan rapat KK yang dituangkan dalam bentuk berita acara rapat atau notulen rapat.
3. Tugas dan Tanggung Jawab Kelompok Kajian atau *Non Voting Member*:
 - a. Melakukan kajian risiko dan kepatuhan terhadap usulan pemberian/pengusulan kredit baru ataupun tambahan fasilitas kredit secara komprehensif;
 - b. Memberikan rekomendasi dan/atau pendapat atas hasil kajian risiko dan kepatuhan secara independen berdasarkan kemahiran profesionalnya secara jujur, obyektif, cermat, konsekuen dan konsisten.

The Credit Committee Charter sets forth the duties and responsibilities of the Credit Committee as follows:

1. *Duties and Responsibilities of the Decision-Making Group:*
 - a. *To recommend and/or approve new credit applications or requests for additional credit facilities in an honest, objective, diligent, consistent and reasoned manner based on its professional expertise;*
 - b. *Reject requests and/or influence from parties interested in the credit applicant to provide credit approval that is a mere formality.*
2. *Duties and Responsibilities of the Proposing Group:*
 - a. *Comprehensively evaluate and analyze credit applications or requests for additional credit facilities, exercising prudence;*
 - b. *Prepare a study request to the study group and a credit approval request to the decision group;*
 - c. *Prepare presentation materials that include, at a minimum, the prospective borrower's corporate profile, proposed use of credit, management, primary source of return (financial position), secondary source of return (collateral), risk profile, and draft determination of the credit facility structure.*
 - d. *Coordinate with the Assets and Liabilities Committee (ALCO) with respect to loan financing;*
 - e. *Rejecting requests from interested parties and/or exerting influence on credit applicants that are merely formal;*
 - f. *Summarizing the results of the decisions taken at the meetings of the CC, which are recorded in the form of minutes of the meetings or minutes of the meetings.*
3. *Duties and Responsibilities of the Study Group or Non-Voting Member*
 - a. *Conduct comprehensive risk and compliance studies on proposals to grant/propose new or additional credit facilities;*
 - b. *To provide recommendations and/or opinions on the results of the independent risk and compliance studies based on their professional expertise in an honest, objective, diligent, consistent and unbiased manner.*

Rapat Komite

Meeting of the Committee

POJK Penerapan Tata Kelola yang Baik bagi Bank Umum menetapkan penyelenggaraan Rapat Komite Direksi sesuai dengan kebutuhan Bank. Terkait dengan hal tersebut, selama tahun 2024, Komite Kredit melakukan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali dengan realisasi program kerja sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

The POJK on the Implementation of Good Governance for Commercial Banks provides for the holding of a meeting of the Committee of the Board of Directors in accordance with the needs of the Bank. In this regard, the Credit Committee held 7 (seven) meetings in 2024 with the implementation of the work program as presented in the table below.

Hasil rapat Komite Kredit dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat jika terjadi dalam rapat.

The results of the meetings of the Credit Committee are recorded in the minutes of the meeting, which are well documented, including the dissenting opinions, if they arise in the meeting.

KOMITE PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN

Consumer Complaint Handling and Resolution Committee

Bank BPD Bali telah membentuk Komite Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen dalam rangka untuk menjalankan tugas dan kewajibannya melakukan pengelolaan pengaduan konsumen dari penyusunan sistem dan prosedur internal Bank hingga penyelesaian pengaduan konsumen tersebut.

Bank BPD Bali has established a Customer Complaint Handling and Settlement Committee to perform its duties and obligations in handling consumer complaints, starting from preparing the Bank's internal systems and procedures to resolving consumer complaints.

Berpedoman pada Keputusan Direksi No. 0550/KEP/DIR/DJA/2024 tanggal 9 oktober 2024 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Bank BPD Bali, susunan organisasi Komite Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen adalah sebagai berikut:

Pursuant to the Board of Directors' Resolution No. 0550/KEP/DIR/DJA/2024 dated October 9, 2024 concerning the Guidelines and Work Rules of the Consumer Complaints Handling and Resolution Committee of Bank BPD Bali, the organizational structure of the Customer Complaint Handling and Settlement Committee is as follows:

Posisi Position	Jabatan	Designation
Ketua Chairman	: Direktur Utama	President Director
Wakil Ketua Vice Chairman	: Direktur Bisnis Direktur Kredit Direktur Operasional & TI Direktur Kepatuhan	Director of Commercial Director of Loan Director of Operational & IT Director of Compliance
Sekretaris merangkap Anggota Secretary concurrently member	: Kepala Divisi Dana dan Jasa Kepala Divisi Kredit Korporasi Kepala Divisi Kredit Ritel & Konsumer	Head of Funds & Services Division Head of Corporate Credit Division Head of Retail & Consumer Credit Division
Anggota Member	: Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Kepala Divisi Treasury Kepala Divisi Teknologi & Informasi Kepala Divisi Operasional, Keuangan & Akuntansi Kepala Divisi Manajemen Risiko Kepala Divisi Kepatuhan Kepala Divisi Pengembangan Digital Kepala Bagian Service Quality & Card Center (Divisi Dana dan Jasa) Officer Service Quality & Contact Center (Divisi Dana dan Jasa)	Head of Corporate Secretary Division Head of Treasury Division Head of Technology & Information Division Head of Operations, Finance & Accounting Division Head of Risk Management Division Head of Compliance Division Head of Digital Development Division Head of Service Quality & Card Center (Fund and Services Division) Officer Service Quality & Contact Center Head of Service Quality & Card Center (Fund and Services Division)

Tugas dan Tanggung Jawab

Duties and Responsibilities

Komite Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen menetapkan tugas dan tanggung jawab Komite Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen sebagai berikut:

1. Menyusun sistem dan prosedur internal bank yang mengatur mekanisme operasional pengaduan Konsumen;
2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan prosedur penanganan dan penyelesaian pengaduan Konsumen;

The Consumer Complaint Handling and Resolution Committee sets forth the duties and responsibilities of the Consumer Complaint Handling and Resolution Committee as follows:

1. Preparation of the Bank's internal systems and procedures regulating the operational mechanism for consumer complaints;
2. To be responsible for the implementation of policies and procedures for handling and resolving consumer complaints;

3. Melakukan komunikasi yang lancar dan akurat secara sistem intern bank tentang pengaduan Konsumen; 4. Memberikan masukan dan saran kepada unit operasional secara kontinyu mengenai seluruh aspek pengaduan Konsumen; 5. Memastikan seluruh pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen terselesaikan; 6. Melakukan <i>monitoring</i>/pemantauan kegiatan Unit Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen; 7. Mengkompilasi seluruh laporan dari unit Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen dan wajib menyampaikan laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen secara triwulan (3 bulanan) kepada Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK); 8. Menyusun Materi Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen yang akan dicantumkan dalam laporan tahunan, halaman (<i>website</i>), dan/atau media lain yang dikelola secara resmi; 9. Menjadi penghubung penanganan dan penyelesaian pengaduan yang disampaikan Konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau otoritas lainnya; 10. Melakukan evaluasi kinerja Komite Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen; 11. Melakukan peninjauan/reviu atas pedoman dan tata tertib kerja Komite Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen secara berkala yang paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.	3. <i>Ensure smooth and accurate communication through the Bank's internal system regarding consumer complaints;</i> 4. <i>Provide input and suggestions to the operational units on all aspects of consumer complaints on an ongoing basis;</i> 5. <i>Ensure that all consumer complaints are resolved;</i> 6. <i>Oversee the activities of the Customer Handling and Settlement Unit.</i> 7. <i>Compile all reports from the Consumer Complaint Handling and Resolution Unit and must submit quarterly (3-monthly) consumer complaint handling and resolution reports to Bank Indonesia (BI) and the Financial Services Authority (OJK);</i> 8. <i>Prepare consumer complaint handling and resolution materials to be included in the annual report, website and/or other officially managed media;</i> 9. <i>Become a liaison for handling and resolving complaints submitted by consumers to the Financial Services Authority (OJK) and/or other authorities;</i> 10. <i>Evaluate the performance of the Consumer Complaint Handling and Resolution Committee;</i> 11. <i>Conduct a review of the policies and operating procedures of the Consumer Complaint Handling and Resolution Committee on a regular basis, at least once every 3 (three) years.</i>

Rapat Komite

Meeting of the Committee

POJK Penerapan Tata Kelola yang Baik bagi Bank Umum menetapkan penyelenggaraan Rapat Komite Direksi sesuai dengan kebutuhan Bank. Terkait dengan hal tersebut, selama tahun 2024, Komite Komite Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen melakukan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan realisasi program kerja sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

The POJK on the Implementation of Good Governance for Commercial Banks provides for the holding of Board Committee Meetings in accordance with the needs of the Bank. In this regard, the Consumer Complaint Handling and Resolution Committee held 4 (fourth) meetings in 2024 with the implementation of the work program as shown in the table below.

Hasil rapat Komite Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat jika terjadi dalam rapat.

The results of the meetings of the Consumer Complaint Handling and Resolution Committee shall be set forth in well-documented minutes of the meeting, including any dissenting opinions that may arise during the meeting.

No	Tanggal Date	Keterangan Remarks
1	08 Jan 24	Rapat Komite Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pembahasan Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Triwulan IV tahun 2023, jumlah pengaduan Triwulan IV tahun 2023 adalah 267 pengaduan, sesuai surat undangan nomor B-0209/DIR/DJA/2024 tanggal 05 Januari 2024 dan notulen rapat terlampir. <i>Consumer Complaint Handling and Resolution Committee Meeting to discuss the Report on Handling and Resolution of Consumer Complaints for Quarter IV of 2023, the number of complaints for Quarter IV of 2023 was 267 complaints, according to the invitation letter number B-0209/DIR/DJA/2024 dated January 5, 2024 and the attached minutes of the meeting.</i>
2	05 Apr 24	Rapat Komite Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pembahasan Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Triwulan I tahun 2024, jumlah pengaduan Triwulan I tahun 2024 adalah 350 pengaduan, sesuai surat undangan nomor B-4088/DIR/DJA/2024 tanggal 04 April 2024 dan notulen rapat terlampir. <i>Consumer Complaint Handling and Resolution Committee Meeting to discuss the Report on Handling and Resolution of Consumer Complaints for Quarter I of 2024, the number of complaints for Quarter I of 2024 was 350 complaints, according to the invitation letter number B-4088/DIR/DJA/2024 dated April 4, 2024 and the attached minutes of the meeting.</i>

No	Tanggal Date	Keterangan Remarks
3	08 Jul 24	Rapat Komite Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pembahasan Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Triwulan II tahun 2024, jumlah pengaduan Triwulan II tahun 2024 adalah 198 pengaduan, sesuai surat undangan nomor B-7760/DIR/DJA/2024 tanggal 03 Juli 2024 dan notulen rapat terlampir. <i>Meeting of the Consumer Complaint Handling and Resolution Committee to discuss the Report on Handling and Resolution of Consumer Complaints for Quarter II of 2024, the number of complaints for Quarter II of 2024 is 198 complaints, according to the invitation letter number B-7760/DIR/DJA/2024 dated July 3, 2024 and the attached meeting minutes.</i>
4	08 Oct 24	Rapat Komite Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pembahasan Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Triwulan III tahun 2024, jumlah pengaduan Triwulan III tahun 2024 adalah 368 pengaduan, sesuai surat undangan nomor B-12021/DIR/DJA/2024 tanggal 04 Oktober 2024 dan notulen rapat terlampir. <i>Meeting of the Committee for Handling and Resolution of Consumer Complaints to discuss the Report on Handling and Resolution of Consumer Complaints for Quarter III of 2024, the number of complaints for Quarter III of 2024 is 368 complaints, according to invitation letter number B-12021/DIR/DJA/2024 dated October 4, 2024 and the attached meeting minutes.</i>

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Information Technology Steering Committee

Bank BPD Bali telah membentuk komite-komite Pengarah Teknologi Informasi dalam rangka untuk menjalankan tugas dan kewajibannya melakukan pengelolaan-pengelolaan rencana, kebijakan, dan implementasi teknologi informasi.

Bank BPD Bali has formed an Information Technology Steering Committee in order to fulfill its duties and obligations in the management of information technology plans, policies and implementation.

Berpedoman pada Keputusan Direksi No. 0415/KEP/DIR/TIF/2023 tanggal 1 September 2023 tentang Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi Bank BPD Bali, susunan organisasi Komite Pengarah Teknologi Informasi:

Pursuant to the Resolution of the Board of Directors No. 0415/KEP/DIR/TIF/2023 dated September 1st, 2023 on the Charter of Information Technology Steering Committee of Bank BPD Bali, the organizational structure of the Information Technology Steering Committee has been established:

Posisi Position	Jabatan	Designation
Ketua I Chairman I	: Direktur Operasional dan TI	Director of Operational & IT
Ketua II Chairman II	: Direktur Kepatuhan	Director of Compliance
Anggota Member	: 1. Kepala Divisi Teknologi Informasi 2. Kepala Divisi Manajemen risiko 3. Kepala Divisi Kepatuhan 4. Kepala Divisi Perencanaan Strategis 5. Kepala SKAI dan Anti Fraud 6. Kepala Divisi Umum dan Aset 7. Kepala Divisi Sumber Daya Manusia 8. Kepala Divisi Dana dan Jasa 9. Kepala Divisi Treasury 10. Kepala Divisi Operasional, Keuangan dan Akuntansi 11. Kepala Divisi Pengembangan Digital 12. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan 13. Kepala Divisi Kredit Korporasi 14. Kepala Divisi Kredit Ritel & Konsumer.	1. Head of Information Technology 2. Head of Risk Management 3. Head of Compliance 4. Head of Strategic Planning 5. Head of SKAI and Anti-Fraud 6. Head of General and Asset Division 7. Head of Human Resources Department 8. Head of Funds and Services Department 9. Head of Treasury Division 10. Head of Operations, Finance and Accounting Department 11. Head of Digital Development Department 12. Head of Corporate Secretary Department 13. Head of Corporate Credit Department 14. Head of Retail & Consumer Credit Department

Tugas dan Tanggung Jawab

Duties and Responsibilities

Komite Pengarah Teknologi Informasi Bank BPD Bali memiliki tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi paling sedikit terkait dengan:

1. Rencana Strategis Teknologi Informasi agar sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank;
2. Perumusan kebijakan, standar, dan prosedur Teknologi Informasi yang utama;
3. Kesesuaian antara proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi;
4. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek (*project charter*) yang disepakati dalam *Service Level Agreement* (SLA) dan hasil analisis dari proyek Teknologi Informasi yang utama sehingga memungkinkan Direksi untuk mengambil keputusan secara efisien;
5. Kesesuaian antara Teknologi Informasi dengan kebutuhan Sistem Informasi Manajemen (SIM) agar dapat mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank;
6. Efektifitas langkah-langkah untuk meminimalisasi risiko atas investasi Bank pada Teknologi Informasi agar investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank;
7. Pemantauan kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatan kinerja Teknologi Informasi melalui deteksi keusangan Teknologi Informasi dan mengukur efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan Teknologi Informasi;
8. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh Satuan Kerja pengguna dan Satuan Kerja penyelenggara Teknologi Informasi;
9. Kecukupan dan alokasi Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi yang dimiliki Bank agar dapat mengoptimalkan penyelenggaraan Teknologi Informasi.

The Information Technology Steering Committee of Bank BPD Bali shall be responsible for making recommendations to the Board of Directors on at least the following matters:

1. *Information Technology Strategic Plan to be consistent with the Bank's Strategic Business Plan;*
2. *Formulation of key information technology policies, standards and procedures;*
3. *Ensure that approved information technology projects are consistent with the information technology strategic plan;*
4. *Conformity between the implementation of information technology projects and the project plan (project charter) agreed in the Service Level Agreement (SLA) and the results of the analysis of the main information technology projects, in order to enable the Board of Directors to make efficient decisions;*
5. *Conformity between Information Technology and the needs of the Management Information System (MIS) to support the management of the Bank's business activities;*
6. *Effectiveness of measures to minimize the risk of the Bank's investment in information technology so that the investment contributes to the achievement of the Bank's business objectives;*
7. *Monitoring information technology performance and efforts to improve information technology performance by identifying information technology obsolescence and measuring the effectiveness and efficiency of implementing information technology security policies;*
8. *Efforts to resolve various Information Technology related issues that cannot be resolved by the User Work Unit and the Information Technology Implementation Work Unit;*
9. *Adequacy and allocation of Information Technology human resources owned by the Bank in order to optimize the implementation of Information Technology.*

Rapat Komite

Committee Meetings

POJK Penerapan Tata Kelola yang Baik bagi Bank Umum menetapkan penyelenggaraan Rapat Komite Direksi sesuai dengan kebutuhan Bank. Terkait dengan hal tersebut, selama tahun 2024, Komite Pengarah Teknologi Informasi melakukan rapat sebanyak 5 (lima) kali dengan realisasi program kerja sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Hasil rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat jika terjadi dalam rapat.

The POJK on the Implementation of Good Governance for Commercial Banks provides for the holding of Board of Directors' Committee Meetings in accordance with the Bank's needs. In this regard, the Information Technology Steering Committee held 5 (five) meetings in 2024 with the implementation of the work program as presented in the table below.

The results of the Information Technology Steering Committee meetings are recorded in the minutes of the meeting, which are well documented, including dissenting opinions, if they arise during the meeting.

No	Tanggal Date	Keterangan Remarks
1	25 Apr 24	1. <i>Review</i> tata kelola proyek pengembangan berbasis IT, baik proyek Divisi TI maupun Divisi lainnya. 2. <i>Review</i> penggunaan RBB dan perubahan <i>Framework</i> kerja sama pelayanan eksternal 3. <i>Review</i> pengelolaan <i>system E-Ticketing</i> 4. <i>Review</i> perizinan SNAP BI dan implementasi QRIS Tuntas dan QRIS <i>Cross Border</i>. 5. <i>Review</i> optimasi <i>End Of Day</i> (EOD) 6. <i>Review</i> perapan DPO dalam hal implementasi UU PDP 7. <i>Review</i> progress pengembangan <i>New MB 3.0</i> 1. <i>Review the governance of IT-based development projects, both IT and nonIT projects.</i> 2. <i>Review the use of RBB and changes to the framework for working with external services.</i> 3. <i>Review the management of the e-ticketing system</i> 4. <i>Review SNAP BI licensing and implementation of QRIS Tuntas and QRIS Cross Border.</i> 5. <i>Review End of Day (EOD) Optimization</i> 6. <i>Review of DPO implementation with respect to PDP law implementation</i> 7. <i>Review progress of new MB 3.0 developmen</i>
2	26 Jun 24	1. Pembahasan hasil penilaian Tingkat Maturitas Digital. 2. <i>Review</i> hasil <i>Cyber Security Maturity Assessment</i> 3. Evaluasi pengelolaan Balipay 1. <i>Discuss the results of the Digital Maturity Level assessment.</i> 2. <i>Review the results of the Cyber Security Maturity Assessment.</i> 3. <i>Balipay Management Assessment</i>
3	4 Sep 24	1. Pembahasan terkait penyusunan <i>Enterprise Architecture</i> (EA). 2. Penyusunan Rencana Pengembangan Teknologi Informasi (RPTI). 3. <i>Review</i> layanan TI yang masih beroperasi secara <i>Cross-Site</i>. 4. Pembahasan terkait Tanggapan surat BI terkait <i>Cyber Patrol</i>. 5. Pembahasan <i>Issue Live Aplikasi Mobile</i> di <i>Playstore</i> Android. 6. <i>Review</i> SK CSIRT & TTIS. 1. <i>Discussion on the preparation of the Enterprise Architecture (EA).</i> 2. <i>Preparation of the Information Technology Development Plan (ITDP).</i> 3. <i>Review of IT services that are still cross-site.</i> 4. <i>Discuss BI's response to the Cyber Patrol letter.</i> 5. <i>Discussion of the mobile application live issue on the Android Playstore.</i> 6. <i>Review of SK CSIRT & TTIS.</i>
4	11 Nov 24	1. Pembahasan terkait Rencana Pengembangan Teknologi Informasi (RPTI) Tahun 2025. 2. Pembahasan terkait penggunaan <i>Enterprise Architecture</i> (EA) dalam tata kelola proses <i>Fraud Detection System</i> (FDS). 3. <i>Review</i> pengelolaan Tata Kelola TI. 4. <i>Review</i> hasil Audit TI. 1. <i>Discussion on Information Technology Development Plan 2025 (RPTI).</i> 2. <i>Discussion related to the use of Enterprise Architecture (EA) in the governance of the Fraud Detection System (FDS) process.</i> 3. <i>Reviewed IT governance management.</i> 4. <i>Review IT audit results.</i>
5	19 Dec 24	1. Pembahasan terkait <i>Cyber Security</i> dan <i>risk management</i>. 2. <i>Review</i> penguatan tata kelola FDS dan <i>issue E Link</i>. 3. Pelaksanaan <i>Table Top Exercise</i>. 4. Rapat tinjauan manajemen terkait ISO/IEC 27001. 5. <i>Review</i> kebijakan dan Tata Kelola TI. 6. Pembahasan terkait migrasi <i>New Samsat</i>. 1. <i>Discuss cybersecurity and risk management.</i> 2. <i>Reviewed the strengthening of FDS governance and E-Link issues.</i> 3. <i>Conduct table top exercise.</i> 4. <i>Management review meeting on ISO/IEC 27001.</i> 5. <i>Review IT policies and governance.</i> 6. <i>Discussion on migration to New Samsat.</i>



KOMITE TIM TANGGAP INSIDEN SIBER

Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Committee

Bank BPD Bali telah membentuk Komite Tim Tanggap Insiden Siber dalam rangka untuk menjalankan tugas dan kewajibannya melakukan pengelolaan pelaksanaan BPD Bali CSIRT dan metodologi penanganan insiden siber, dan supervisi terhadap penanganan dan penanggulangan insiden siber yang sedang dihadapi.

Bank BPD Bali has formed a Computer Security Incident Response Team Committee to fulfill its duties and obligations, manage the implementation of BPD Bali CSIRT and Cyber Incident Handling Methodology, and oversee the handling and management of current cyber incidents.

Berpedoman pada Keputusan Direksi No. 0539A/KEP/DIR/TIF/2023 tanggal 27 Oktober 2023 tentang Piagam Komite Tim Tanggap Insiden Siber Bank BPD Bali, susunan organisasi Komite Tim Tanggap Insiden Siber:

The organizational structure of the Computer Security Incident Response Team Committee is governed by the Resolution of the Board of Directors No. 0539A/KEP/DIR/TIF/2023 dated October 27, 2023 regarding the Charter of the Bank BPD Bali Cyber Incident Response Team Committee:

Posisi Position	Jabatan	Designation
Pengarah	: Direktur Utama	President Commissioner
Ketua Chairman	: Direktur Operasional dan TI	Director of Operational & IT
Wakil Ketua Vice Chairman	: 1. Direktur Bisnis 2. Direktur Kredit	Director of Business Director of Loan
Sekretaris merangkap Anggota Secretary concurrently member	Kepala Divisi Teknologi Informasi	Head of Information Technology
Anggota Member	: 1. Kepala Divisi Manajemen risiko 2. Kepala Divisi Kepatuhan 3. Kepala Divisi Perencanaan Strategis 4. Kepala SKAI dan Anti Fraud 5. Kepala Divisi Umum dan Aset 6. Kepala Divisi Sumber Daya Manusia 7. Kepala Divisi Dana dan Jasa 8. Kepala Divisi Treasury 9. Kepala Divisi Operasional, Keuangan dan Akuntansi 10. Kepala Divisi Pengembangan Digital 11. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan 12. Kepala Divisi Kredit Korporasi 13. Kepala Divisi Kredit Ritel & Konsumer.	1. Head of Risk Management Division 2. Head of Compliance Division 3. Head of Strategic Planning Division 4. Head of SKAI and Anti Fraud 5. Head of General and Asset Division 6. Head of Human Resources Division 7. Head of Fund and Services Division 8. Head of Treasury Division 9. Head of Operations, Finance and Accounting Division 10. Head of Digital Development Division 11. Head of Corporate Secretary Division 12. Head of Corporate Credit Division 13. Head of Retail & Consumer Credit Division.

Tugas dan Tanggung Jawab

Duties and Responsibilities

Berpedoman pada Piagam Komite Tim Tanggap Insiden Siber Bank BPD Bali, Komite Tim Tanggap Insiden Siber memiliki tugas dan tanggung jawab:

1. Bertanggungjawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Melakukan evaluasi pelaksanaan BPD Bali-CSIRT dan metodologi penanganan insiden siber;
3. Memberikan arahan strategis terhadap penanganan insiden siber kepada BPD Bali-CSIRT;
4. Melakukan supervisi terhadap penanganan dan penanggulangan insiden siber yang sedang dihadapi;

Pursuant to the Charter of the Computer Security Incident Response Team Committee of Bank BPD Bali, the Computer Security Incident Response Team Committee shall have the following responsibilities:

1. To be accountable to the Board of Directors and the Board of Commissioners;
2. Evaluate the implementation of BPD Bali CSIRT and the methodology for handling cyber incidents;
3. Provide strategic direction to BPD Bali-CSIRT for handling cyber incidents;
4. Oversee the handling and resolution of cyber incidents faced;

5. Menetapkan hal-hal terkait identifikasi adanya penyimpangan-penyimpangan dari prosedur normal;
6. Memberikan keputusan dan/atau rekomendasi strategis dan bisnis baik materiil dan non materiil bagi Bank terhadap penanganan dan penanggulangan terhadap insiden siber yang dihadapi berdasarkan laporan dan penyajian data dari BPD Bali-CSIRT.

5. *Determine matters related to the identification of deviations from normal procedures;*
6. *Making strategic and business decisions and/or recommendations, both material and non-material, to the Bank regarding the handling and management of cyber incidents faced, based on reports and data presentation from BPD Bali-CSIRT.*

Rapat Komite

Meeting of the Committee

POJK Penerapan Tata Kelola yang Baik bagi Bank Umum menetapkan penyelenggaraan Rapat Komite Direksi sesuai dengan kebutuhan Bank. Terkait dengan hal tersebut, selama tahun 2024, Komite Tim Tanggap Insiden Siber melakukan rapat sebanyak 5 (lima) kali.

The POJK on the Implementation of Good Governance for Commercial Banks provides for the holding of a meeting of the Committee of the Board of Directors in accordance with the needs of the Bank. In this regard, the Cyber Incident Response Team Committee held 5 (five) meetings in 2024.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan Bank BPD Bali adalah fungsi yang bertugas mengarahkan dan memimpin pengelolaan sekretariat korporat, komunikasi pemasaran, dan institusi Bank dalam rangka meningkatkan *corporate image* yang positif di masyarakat dan khalayak internal Bank sehingga memberi kontribusi bagi kinerja Perusahaan.

The Corporate Secretary of Bank BPD Bali is a function that is tasked with directing and leading the management of the corporate secretariat, marketing communications, and the bank's institutions in order to improve a positive corporate image in the community and the bank's internal audience so as to contribute to the company's performance.

Piagam Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary Charter

Meski bukan sebuah Perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), Bank BPD Bali memiliki komitmen yang tinggi terhadap praktik terbaik atas penerapan prinsip-prinsip GCG yang salah satunya diwujudkan dengan pembentukan Sekretaris Perusahaan sebagai salah satu organ pendukung Direksi.

Although Bank BPD Bali is not a public company listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), Bank BPD Bali has a strong commitment to best practices in the implementation of GCG principles, one of which is realized through the establishment of a Corporate Secretary as one of the support organs of the Board of Directors.

Bank BPD Bali telah memiliki Buku Pedoman Perusahaan Sekretaris Perusahaan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Bank BPD Bali No. 0384/KEP/DIR/SEKPER/2024 tanggal 30 Juli 2024. Hal-hal penting yang diatur dalam Piagam Sekretaris Perusahaan antara lain susunan organisasi, fungsi, sistem pengendalian intern dan sistem informasi manajemen & sumber daya manusia, serta pelaporan dan penataan dokumen.

Bank BPD Bali has a Corporate Secretary Charter which is established based on the Resolution of the Board of Directors of Bank BPD Bali No. 0384/KEP/DIR/SEKPER/2024 dated July 30, 2024. The Corporate Secretary Company Guidelines Book regulates the organizational structure, functions, internal control systems, management information systems and personnel, reporting and documentation.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary

Sebagaimana diatur dalam Piagam Sekretaris Perusahaan, tugas dan tanggungjawab Sekretaris Perusahaan melekat pada fungsi Sekretaris Perusahaan itu sendiri. Secara umum, kesekretariatan Bank BPD Bali dibagi ke dalam beberapa fungsi, antara lain fungsi kesekretariatan & protokol, fungsi humas, *corporate communication* dan perlindungan konsumen, serta fungsi hukum. Dalam kaitannya dengan fungsi kesekretariatan & protokol mencakup kesekretariatan & protokol Direksi serta Dewan Komisaris.

The duties and responsibilities of the Corporate Secretary are inherent in the function of the Corporate Secretary itself as stipulated in the Corporate Secretary Charter. Generally, Bank BPD Bali's secretariat is divided into several functions, including secretarial & protocol, public relations, corporate communications and consumer protection, and legal. In relation to the secretariat & protocol function, it includes the secretariat & protocol of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

Terkait dengan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab dalam mengkoodinir pelaksanaan RUPS tersebut, termasuk menyiapkan bahan-bahan RUPS yang diperlukan, bertindak sebagai notulen rapat, dan mendokumentasikan risalah RUPS tersebut. Selain itu, terkait dengan Rapat Dewan Komisaris, kesekretariatan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk membantu mengatur dan mempersiapkan rapat, menyiapkan dan membagikan agenda rapat dan materi rapat yang diperlukan, bertindak sebagai notulen rapat, dan mendokumentasikan rapat Dewan Komisaris.

With respect to the annual GMS and other GMS, the Corporate Secretary is responsible for coordinating the conduct of the GMS, including preparing the necessary GMS materials, taking the minutes of the meetings, and documenting the minutes of the GMS. In addition, with respect to the Board of Commissioners meeting, the Board of Commissioners Secretary is responsible for assisting in the organization and preparation of the meeting, preparing and distributing the meeting agenda and necessary meeting materials, taking the minutes of the meeting, and documenting the Board of Commissioners meeting.

Selanjutnya, Divisi Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab mengelola kebijakan terkait dengan setoran modal dari pemegang saham dan pembagian dividen kepada pemegang saham, dan membantu penyusunan kebijakan terkait dengan setoran modal dari pemegang saham dan

In addition, the Corporate Secretary Division is responsible for the management of policies related to capital contributions from shareholders and dividend distributions to shareholders, and assists in the preparation of policies related to capital contributions from shareholders and dividend

pembagian dividen kepada pemegang saham, termasuk tanggung jawab memperbaharui. Sekretaris Perusahaan juga merupakan penanggung jawab protokoler *Corporate Event*, pendampingan Direksi/Dewan Komisaris dalam berbagai *event* dan protokol kunjungan Direksi/Dewan Komisaris ke daerah.

Terkait dengan fungsi humas dan *corporate communication*, Divisi Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengelolaan media komunikasi, baik media elektronik maupun cetak, sehingga integritas dan kredibilitas atas informasi Bank BPD Bali kepada masyarakat dapat dijaga. Divisi Sekretaris Perusahaan juga terlibat dalam mengelola hubungan dan komunikasi dengan pihak luar yang terkait dengan pemenuhan tugas audit yang dilakukan otoritas baik nasional maupun internasional.

distributions to shareholders, including responsibility for updating. The Corporate Secretary is also responsible for the corporate event protocol, assisting the Board of Directors/Board of Commissioners in various events, and protocols for visits by the Board of Directors/Board of Commissioners to the regions.

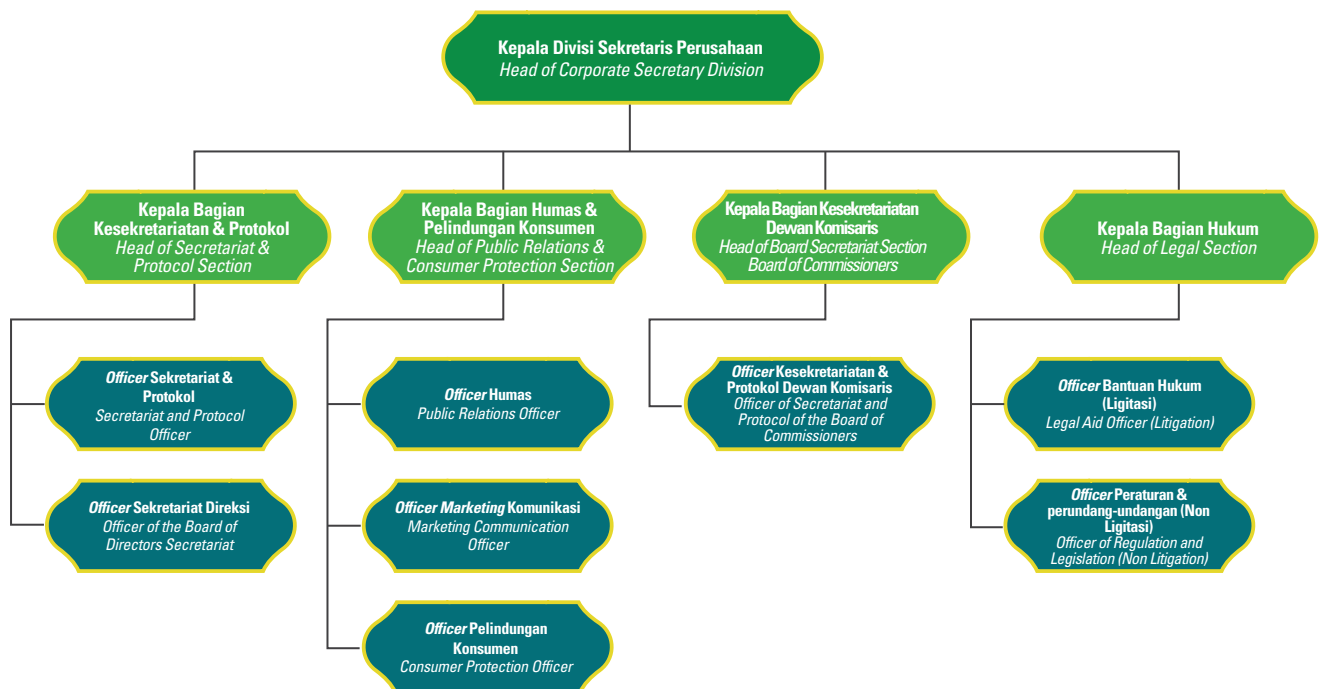
In relation to the Public Relations and Corporate Communications functions, the Corporate Secretary Division is responsible for coordinating the management of communication media, both electronic and print, so that the integrity and credibility of Bank BPD Bali's information to the public can be maintained. The Corporate Secretary Division is also involved in the management of relations and communication with external parties related to the fulfillment of audit duties carried out by both national and international authorities.

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary Organizational Structure

Berpedoman pada Piagam Sekretaris Perusahaan Bank BPD Bali, susunan organisasi Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Based on Bank BPD Bali Corporate Secretary Charter, Corporate Secretary's organizational structure is as follows:



Sejalan dengan fungsi Divisi Sekretaris Perusahaan yang dijelaskan sebelumnya, terdapat 4 (empat) kepala bagian yang mendukung pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan. Keempat kepala bagian yang dimaksud adalah Kepala Bagian Kesekretariatan & Protokol, Kepala Bagian Humas & Perlindungan Konsumen, Kepala Bagian Kesekretariatan Dewan komisaris, dan Kepala Bagian Hukum.

In accordance with the functions of the Corporate Secretary Division as explained above, there are 4 (four) Section Heads who assist the Corporate Secretary in the performance of his duties. These four Section Heads are the Head of Secretariat & Protocol Section, the Head of Public Relations & Consumer Protection Section, the Head of Board Secretariat Section and the Head of Legal Section.



Profil Sekretaris Perusahaan

Profile of the Corporate Secretary

Kepala Divisi *Corporate Secretary* dijabat oleh Ida Bagus Gd. Ary Wijaya Guntur, S.E., M.M yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi No. 0267/KEP/DIR/SDM/2023 tanggal 27 Juni 2023. Profil ringkas Sekretaris Perusahaan dan sertifikasi yang dimiliki dapat dilihat di bab Profil Perusahaan dari laporan tahunan ini.

The Corporate Secretary Division is headed by Ida Bagus Gd. Ary Wijaya Guntur, S.E., M.M., who was appointed pursuant to the Board of Directors' Resolution No. 0267/KEP/DIR/SDM/2023 dated June 27, 2023. A brief profile of the Corporate Secretary and the certifications he holds can be found in the Corporate Profile chapter of this Annual Report.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary Competency Development

Bank BPD Bali memberikan kesempatan kepada Divisi *Corporate Secretary* untuk mengikuti program pelatihan dan pengembangan kompetensi, baik yang diselenggarakan oleh internal Bank atau yang diselenggarakan oleh pihak eksternal. Program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Divisi *Corporate Secretary* adalah sebagai berikut:

Bank BPD Bali provides the Corporate Secretary Division with the opportunity to participate in training and skills development programs, both internally organized by the Bank and externally organized. The training and competency development programs attended by the Corporate Secretary Division are as follows:

Jenis Pelatihan Type of Training	Penyelenggara Organizer	Tanggal Date
<i>Webinar Connecting the Dots</i>	OJK	11/01/2024
<i>Start Strong 2024 "Proven Strategies to Early Start and Achieve Your First Semester"</i>	Sinergi Indonesia Pintar	14/01/2024
Re-Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 <i>Re-Certification of Risk Management Level 5</i>	Leadership Nasional	15/01/2024
<i>Sharing Session Elevating Organisational Excellence</i>	Charindo	19/01/2024
Budayakan K3 Sehat dan Selamat dalam Bekerja Terjaga Keberlangsungan Usaha <i>Cultivate Healthy and Safe K3 at Work Maintain Business Continuity</i>	Disnaker	24/01/2024
Seminar <i>Motivation Training</i> <i>Motivation Training Seminar</i>	ASKRIDA	26/01/2024
Ujian Re-sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi Jenjang 5 <i>Risk Management Re-Certification Test Qualification Level 5</i>	BSMR	04/02/2024
<i>Effective Communication Skill & Etika di Media Sosial serta Pelindungan Konsumen dan Masyarakat</i> <i>Effective Communication Skills & Ethics in Social Media and Consumer and Community Protection</i>	ASBANDA	06/02/2024
Pedoman dan Tata Cara Melakukan Pemeriksaan dan Penerimaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi <i>Guidelines and Procedures for Conducting Inspections and Acceptance of Construction Work Procurement</i>	LEMIKNAS	16/02/2024
<i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 & 5 <i>Risk Management Certification Refresher Level 4 & 5</i>	Leadership Nasional	19/02/2024
FGD Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan <i>Roundtable on Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector</i>	Sinergi Indonesia Pintar	21/02/2024
Sosialisasi Pelaksanaan Bye Laws <i>Socialization of the implementation of the Bye Laws</i>	Perbanas	23/02/2024
Penanganan Kejahatan Perbankan dengan Berlakunya UU P2SK & POJK 16 Tahun 2023 <i>Handling of Banking Crimes with the Enactment of the P2SK Law & POJK 16 of 2023</i>	FKDKP	29/02/2024
Pembekalan Re-Sertifikasi <i>General Banking 2</i> <i>General Banking Re-Certification Briefing 2</i>	PT Azecotama	14/03/2024
Webinar <i>Phising & Smishing Awareness</i> <i>Phishing & Smishing Awareness Webinar</i>	PT Spentera	16/03/2024
<i>Sharing Session - Elevating Organisational Excellence</i> untuk Kepala Bagian <i>Sharing Session - Elevating Organizational Excellence for Department Heads</i>	Charindo	18/03/2024

Jenis Pelatihan Type of Training	Penyelenggara Organizer	Tanggal Date
<i>Integrated High Impact Action Training Batch 3</i>	Sembaga Berdikari Konsultan	05/04/2024
APU PPT dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Tingkat Eksekutif <i>APU PPT and Preventing the Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction at the Executive Level</i>	Mitra Bisnis Strategis	06/05/2024
<i>General Banking</i>	Mitra Bisnis Strategis	13/05/2024
<i>Arbitrator Talks LAPS SJK</i>	ASBANDA	21/05/2024
Peluang dan Tantangan Pelindungan Data Pribadi dalam Transaksi di Era Digital <i>Opportunities and challenges of personal data protection in transactions in the digital era</i>	OJK	30/05/2024
<i>Sharing Session Pajak Perbankan</i> <i>Sharing Session Banking Tax</i>	Mitra Nata Cendikia	11/06/2024
Peningkatan Perlindungan Konsumen sesuai POJK <i>Enhancing Consumer Protection under POJK</i>	Infobank	25/06/2024
<i>Workshop UU Perlindungan Data Pribadi Batch 1</i> <i>Workshop on Personal Data Protection Law Batch 1</i>	PT Azecotama	02/07/2024
<i>Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4</i> <i>Refresher of Risk Management Certification Level 4</i>	Learning Media Indonesia	09/07/2024
<i>MC, Ceremonial & Etiquette: The Art of Courtesy and Formal Behaviour</i>	ASBANDA	10/07/2024
<i>Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5</i> <i>Refresher for Risk Management Certification Level 5</i>	Learning Media Indonesia	10/07/2024
<i>MC, Ceremonial & Etiquette: The Art of Courtesy and Formal Behaviour</i>	ASBANDA	10/07/2024
<i>Workshop Teknik Penyusunan Catatan Aktivitas Pengolahan Data Pribadi (ROPA)</i> <i>Workshop on Preparation Techniques for the Record of Personal Data Processing Activities (ROPA)</i>	PT Azecotama	14/07/2024
Webinar Menjaga Kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam Mendukung Ekonomi Inklusif melalui Pengawasan, Edukasi Keuangan, dan	FKDKP	15/07/2024
<i>Webinar on Maintaining Compliance of Financial Services Business Actors in Supporting an Inclusive Economy through Supervision, Financial Education and Financial Literacy</i>		
FGD Evaluasi Pelaksanaan Tata Naskah Dinas <i>FGD Evaluation of the Implementation of Official Documents</i>	ANRI	20/07/2024
<i>Business and Economic Outlook 2025</i>	Sinergi Indonesia Pintar	26/07/2024
<i>Workshop Budaya Risiko, Budaya Kepatuhan, dan Fraud Awareness</i> <i>Workshop on risk culture, compliance culture and fraud awareness</i>	Leadership Nasional	27/07/2024
FGD Penyusunan SOP Pelindungan Konsumen <i>FGD on preparation of SOP on consumer protection</i>	Sinergi Indonesia Pintar	29/07/2024
<i>Arbitrator Talks</i>	LAPS SJK	06/08/2024
<i>Workshop Privacy Policy and Privacy Notice dalam Implementasi UU PDP</i> <i>Workshop on Privacy Policy and Privacy Notice in the Implementation of the PDP Law</i>	PT Azecotama	08/08/2024
<i>Effective Sales and Marketing Strategy</i>	Torres Consulting	10/08/2024
<i>Workshop Penyusunan Kebijakan Implementasi dan Laporan Recovery Plan bagi Bank Umum</i> <i>Workshop on Preparation of Implementation Policy and Recovery Plan Report for Commercial Banks</i>	PT Azecotama	10/08/2024
Aspek Hukum Perkreditan dan Sertifikat Elektronik dalam Transaksi Digital <i>Legal aspects of credit and electronic certificates in digital transactions</i>	Infobank	06/09/2024
Optimalisasi Sistem Pengendalian Internal Bank sebagai Penerapan Strategi Anti Fraud <i>Optimization of Bank Internal Control Systems as an Implementation of Anti-Fraud Strategy</i>	Sinergi Indonesia Pintar	09/09/2024
<i>Climate Risk Management & Scenario Analysis Strategy</i>	Leadership Nasional	13/09/2024
<i>Data Protection Impact Assessment (DPIA)</i> <i>Data Protection Impact Assessment (DPIA)</i>	PT Azecotama	21/09/2024
<i>Workshop Strategi Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi</i> <i>Information Technology Governance Implementation Strategy Workshop</i>	PT Solmit Bangun Indonesia	21/09/2024
<i>Data Protection Impact Assessment (DPIA)</i>	PT Azecotama	21/09/2024



Jenis Pelatihan Type of Training	Penyelenggara Organizer	Tanggal Date
Studi Komparatif dalam Rangka Pelaksanaan <i>Review</i> Peraturan Dana Pensiun BPD Bali <i>Comparative study in the framework of the implementation of the review of the BPD Bali Pension Fund Regulations</i>	Bank Jateng	27/09/2024
FGD Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Hasil Kinerja Berkelanjutan Berbasis ESG dalam Bisnis Bank <i>FGD on the preparation of annual financial reports and sustainable performance reports based on ESG in the banking sector</i>	Sinergi Indonesia Pintar	10/10/2024
Sharing Session Cessie Ayda dan Novasi <i>Sharing Session Cessie Ayda and Novasi</i>	PT Paragon Bintang Properti	15/10/2024
Pelatihan dan Awareness ISO 27001:2022 <i>ISO 27001:2022 Training and Awareness</i>	Robere Manajemen Indonesia	17/10/2024
Workshop dan Lokakarya FKDK BPDSI Wilayah Timur <i>Workshop FKDK BPDSI East Region</i>	FKDK BPDSI	24/10/2024
Project Management Office	Infobank	06/11/2024
Pembekalan Sertifikasi WPPE bagi Pejabat <i>Provision of WPPE certification for officials</i>	PT Leadership Nasional	21/11/2024
Inspiring Change	Charindo	23/11/2024
Seminar Economic Outlook 2025	Infobank Institute	23/11/2024
Workshop Incident Awareness & Table Top Exercise <i>Incident Awareness & Table Top Exercise Workshop</i>	Badan Siber dan Sandi Negara	26/11/2024
Inspiring Change	Charindo	07/12/2024
Inspiring Change	Charindo	07/12/2024
On Collaboration	Charindo	10/12/2024
Workshop Penerapan POJK Nomor 15 Tahun 2024 <i>Workshop on the Implementation of POJK No. 15 of 2024</i>	PT Azecotama	20/12/2024
Asesmen Manajemen Risiko <i>Risk Management Assessment</i>	PT Leadership Nasional	23/12/2024
Workshop Penyusunan Kebijakan Internal POJK Nomor 20 Tahun 2023 <i>Workshop on Internal Policy Preparation of POJK No. 20 of 2023</i>	Divisi Kredit Ritel & Konsumer BPD Bali	28/12/2024

Hubungan Investor

Investor Relations

Hubungan Investor atau *Investor Relation* (IR) merupakan salah satu fungsi yang ada di Sekretaris Perusahaan Bank BPD Bali. Dalam hal ini, ruang lingkup IR adalah selaras dengan Fungsi Humas dan *Corporate Communication* sebagaimana yang diatur dalam Piagam Sekretaris Perusahaan. Dalam hal ini, IR menjalankan komunikasi dengan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya. Bank berkomitmen untuk menjalankan kebijakan pengungkapan komunikasi yang wajar dengan memperhatikan prinsip kesetaraan dan transparansi.

Investor Relations (IR) is one of the functions of the Corporate Secretary of Bank BPD Bali. In this case, the scope of IR is in line with the public relations and corporate communication functions as stipulated in the Corporate Secretary Charter. In this case, IR carries out communication with shareholders and other stakeholders. The Bank is committed to implementing an appropriate communication disclosure policy, paying attention to the principles of equality and transparency.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2024

Implementation of Corporate Secretary Duties in 2024

Selaras dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Piagam Sekretaris Perusahaan, Sekretaris Perusahaan telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- Mengevaluasi kebijakan serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Divisi Sekretaris Perusahaan;
- Mengelola pelaksanaan dan penggunaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Divisi Sekretaris Perusahaan;
- Mereview laporan atas realisasi Rencana Kerja dan penggunaan Anggaran Divisi Sekretaris Perusahaan secara periodik.

In accordance with the provisions of the Corporate Secretary Charter, the Corporate Secretary has performed his duties and responsibilities as follows:

- *Evaluate the policies and annual work plan and budget of the Corporate Secretary Division;*
- *Manage the implementation and utilization of the annual work plan and budget of the Corporate Secretary Division;*
- *Review reports on the implementation of the work plan and utilization of the budget of the Corporate Secretary Division on a regular basis.*

SATUAN KERJA AUDIT INTERN & ANTI FRAUD (SKAI & AF)

Internal Audit & Anti Fraud Work Unit (SKAI & AF)

Penerapan tata kelola yang baik memerlukan fungsi audit intern yang independen serta memiliki kewenangan, sumber daya yang kompeten, dan akses yang memadai agar fungsi audit intern dapat dilaksanakan secara efektif. Pelaksanaan audit intern yang efektif memberikan jaminan kepada Bank BPD Bali terkait kualitas dan efektivitas sistem pengendalian intern, manajemen risiko, serta proses dan sistem tata kelola untuk melindungi organisasi dan reputasi Bank.

Implementing good governance requires that the internal audit function is independent, empowered, adequately resourced, and has appropriate access to enable the internal audit function to be effective. The conduct of effective internal audits provides Bank BPD Bali with assurance on the quality and effectiveness of the internal control system, risk management and governance processes and systems to protect the organization and the Bank's reputation.

Satuan Kerja Audit Intern & Anti-Fraud (SKAI & AF) Bank BPD Bali tersebut menjalankan fungsi intern termasuk struktur, wewenang, dan tugas pokok satuan kerja audit intern serta aspek lain dalam penerapan fungsi audit intern dilaksanakan sesuai dengan POJK mengenai penerapan fungsi audit intern pada Bank Umum. Bank BPD Bali melakukan komunikasi dengan OJK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

The Internal Audit & Anti-Fraud Work Unit (SKAI & AF) of Bank BPD Bali performs internal functions, including the structure, authority and main duties of the Internal Audit Work Unit and other aspects in the implementation of the internal audit function are carried out in accordance with the POJK on the Implementation of the Internal Audit Function in Commercial Banks. Bank BPD Bali communicates with the OJK at least 1 (one) time in 1 (one) year.

Piagam Audit Intern

Internal Audit Charter

Bank BPD Bali telah memiliki Piagam Audit Intern yang terakhir kali ditetapkan melalui Keputusan Direksi No. 626/KEP/DIR/SAF/2024 tanggal 5 November 2024 tentang Piagam Audit Intern. Dokumen ini merupakan pembaruan atas Piagam Audit Intern sebelumnya yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi pada tahun 2021. Piagam Audit Intern juga disusun dengan berpedoman pada POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dan POJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.

Bank BPD Bali has an Internal Audit Charter which was last established by the Board of Directors Resolution No. 626/KEP/DIR/SAF/2024 dated November 5, 2024 on the Internal Audit Charter. This document is an update of the previous Internal Audit Charter that was stipulated by a Board of Directors Decree in 2021. The Internal Audit Charter was also prepared on the basis of POJK No. 56/POJK.04/2015 concerning the establishment and guidelines for the preparation of internal audit unit charters and POJK No. 1/POJK.03/2019 concerning the implementation of internal audit functions in commercial banks.

Hal-hal penting yang diatur dalam Piagam Audit Intern Bank BPD Bali antara lain struktur organisasi dan kedudukan, tugas dan tanggung jawab serta hubungan dengan unit kerja yang melakukan fungsi

Important matters regulated in the Internal Audit Charter of Bank BPD Bali include the organizational structure and position, duties and responsibilities and relationships with work units performing other

pengendalian lain, wewenang, kode etik, persyaratan auditor intern, independensi, serta tanggung jawab dan akuntabilitas Kepala SKAI & AF.

Selain Piagam Audit Intern, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, SKAI & AF dilengkapi pedoman dan prosedur lainnya seperti Keputusan Direksi Nomor 0582/KEP/DIR/SAF/2024 tentang Buku Pedoman Perusahaan Audit Berbasis Risiko dan Strategi *Anti Fraud*; Keputusan Direksi Nomor 0628/KEP/DIR/SAF/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Strategi *Anti Fraud*; dan Keputusan Direksi Nomor 0695/KEP/DIR/SAF/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Audit Berbasis Risiko.

control functions, authority, code of ethics, requirements for internal auditors, independence, and responsibilities and accountability of the Head of SKAI & AF.

In addition to the Internal Audit Charter, SKAI & AF is equipped with other policies and procedures in the performance of its duties and responsibilities, such as the Board of Directors' Resolution No. 0582/KEP/DIR/SAF/2024 on the Company's Risk-Based Audit Policy and Anti-Fraud Strategy; Board of Directors' Resolution No. 0628/KEP/DIR/SAF/2024 on the Standard Operating Procedures for Anti-Fraud Strategy; and Board of Directors' Resolution No. 0695/KEP/DIR/SAF/2024 on the Standard Operating Procedures for Risk-Based Audit.

Tugas dan Tanggung Jawab SKAI & AF

Duties and Responsibilities of SKAI & AF

Piagam Audit Intern Bank BPD Bali menetapkan tugas dan tanggung jawab SKAI antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern serta memastikan pelaksanaannya sesuai dengan rencana audit intern;
2. Menguji dan mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Bank;
3. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit;
4. Membuat pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya melalui pelaksanaan audit.
5. Memastikan setiap pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan Standar Profesional Audit Intern dan Kode Etik Audit Intern;
6. Menyusun dan menerapkan Strategi *Anti Fraud*;
7. Bekerjasama dengan Satuan Kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain pada Bank (seperti Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan) dengan mengedepankan efektivitas fungsi pengendalian, tanpa menyebabkan pengalihan tanggung jawab masing-masing unit kerja dalam fungsi pengendalian.

The Internal Audit Charter of Bank BPD Bali defines the duties and responsibilities of SKAI, among others, as follows

1. *To prepare the annual audit work program (PKAT) and budget allocation for the implementation of the internal audit function and to ensure its implementation in accordance with the internal audit plan;*
2. *Reviewing and evaluating the adequacy and effectiveness of the internal control system and risk management system in accordance with the Bank's policies;*
3. *Assist the President, the Director and the Board of Commissioners in the exercise of supervision by describing in operational terms both the planning, conduct and monitoring of audit results;*
4. *Conduct reviews and evaluations of the efficiency and effectiveness of finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology, and other activities through the performance of audits.*
5. *Ensure that each performance of the internal audit function is in accordance with the Internal Audit Professional Standards and the Internal Audit Code of Ethics;*
6. *Develop and implement an anti-fraud strategy;*
7. *Cooperate with work units performing other control functions in the Bank (such as the Risk Management Department and the Compliance Department) by prioritizing the effectiveness of the control function, without causing a shift in the responsibilities of each work unit in the control function.*

Kewenangan SKAI & AF

Authority of SKAI & AF

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, SKAI & AF berwenang untuk memiliki akses penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap semua catatan, dokumen, data, dan fisik aset Bank, termasuk sistem manajemen informasi, risalah pertemuan manajemen dan informasi yang relevan terkait tugas dan fungsinya. Piagam Audit Intern

In carrying out its duties and responsibilities, SKAI & AF is authorized to have full, free, and unrestricted access to all records, documents, data, and physical assets of the Bank, including information management systems, minutes of management meetings, and relevant information related to its duties and functions. The Internal Audit Charter also

juga memberikan wewenang SKAI untuk melakukan komunikasi secara langsung dan melaksanakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.

SKAI juga melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor eksternal dan mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara.

authorizes SKAI to communicate directly with the Board of Directors, the Board of Commissioners and/or the Audit Committee and to hold regular and ad hoc meetings.

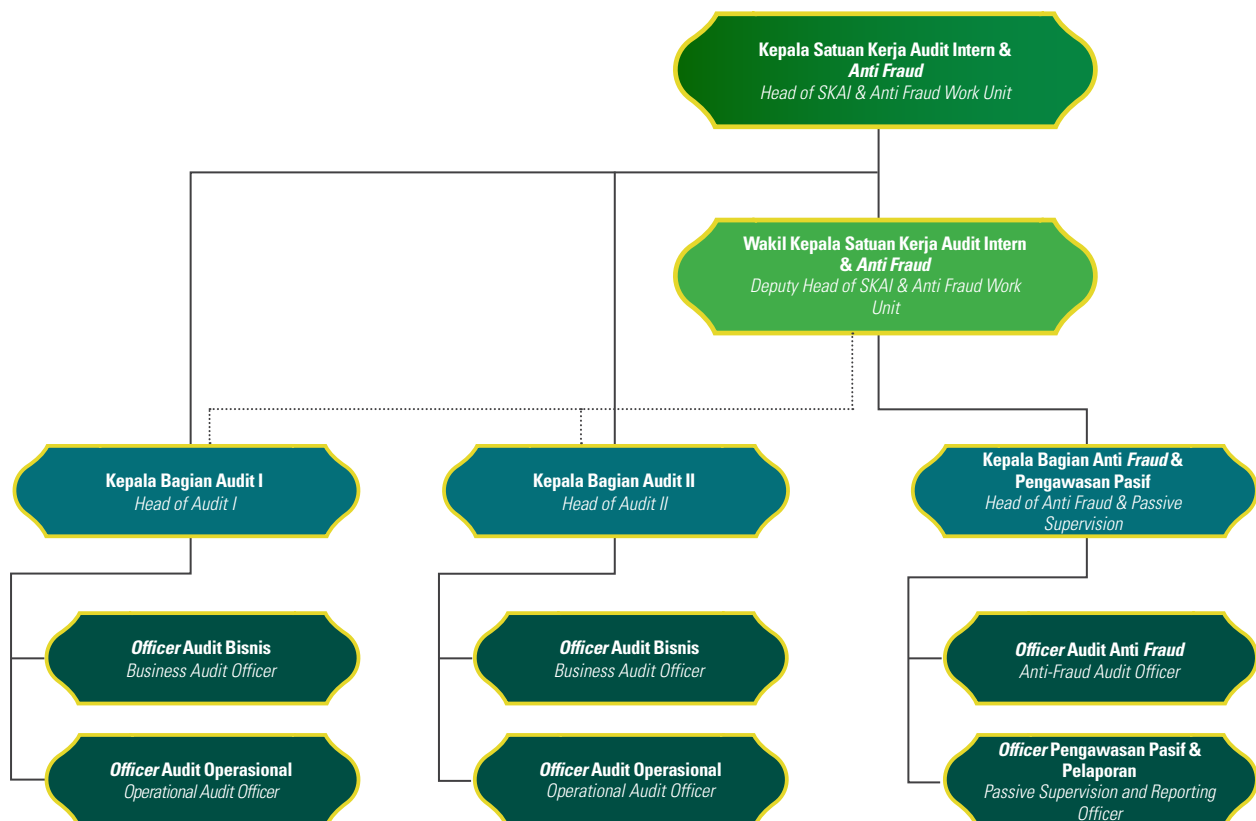
SKAI also coordinates activities with external auditors and attends strategic meetings without having the right to vote.

Struktur Organisasi SKAI & AF

SKAI & AF Organizational Structure

Struktur organisasi SKAI & AF Bank berpedoman pada susunan organisasi dan uraian tugas kantor pusat Bank BPD Bali yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direksi No. 0438/KEP/DIR/RENSTRA/2024 tanggal 15 Agustus 2024 sebagai berikut:

The organizational structure of the Bank's SKAI & AF is based on the organizational structure and job descriptions of the Bank's Head Office BPD Bali, which have been established by the Decree of the Board of Directors No. 0438/KEP/DIR/RENSTRA/2024 dated August 15, 2024 as follows:



Fungsi audit internal yang dilaksanakan oleh SKAI & AF dipimpin oleh Kepala SKAI & AF yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Kepala SKAI & AF tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit dan dilaporkan kepada OJK.

The internal audit function carried out by the SKAI & AF is headed by the Head of the SKAI & AF, who is directly responsible to the President Director. The Head of SKAI & AF is appointed and dismissed by the President Director after obtaining the Board of Commissioners' approval by considering the Audit Committee's recommendations and reporting to the OJK. Head of SKAI & AF.



SKAI & AF dapat berkomunikasi dan berkoordinasi langsung dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Kepala SKAI & AF dalam organisasi mensupervisi langsung Wakil Kepala SKAI & AF, bagian Audit I dan bagian Audit II serta pelaksanaan koordinasi dengan bagian Anti Fraud & Pengawasan Pasif.

SKAI & AF may have direct communication and coordination with the Board of Commissioners through the Audit Committee. The Head of SKAI & AF in the organization directly supervises the Deputy Head of SKAI & AF, the Audit Section I and the Audit Section II as well as the implementation of the coordination with the Anti-Fraud Section and the Passive Supervision Section.

Profil Kepala SKAI & AF

Profile of the Head of SKAI & AF

Kepala SKAI & AF Bank BPD Bali dijabat oleh I Komang Wiratna Jaya, S.T., M.M., QIA yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi No. 0140/KEP/DIR/SDM/2024 tanggal 22 Maret 2024. Profil ringkas Kepala SKAI & AF Bank BPD Bali beserta sertifikasi yang dimiliki dapat dilihat di Bab Profil Perusahaan dari Laporan Tahunan ini.

The position of Head of SKAI & AF of Bank BPD Bali is held by I Komang Wiratna Jaya, S.T., M.M., QIA who was appointed based on the Board of Directors' Resolution No. 0140/KEP/DIR/SDM/2024 dated March 22, 2024. Please refer to the Company Profile chapter of this Annual Report for a brief profile of the Head of SKAI & AF of Bank BPD Bali along with the certifications held.

Sertifikasi Profesi Personil SKAI & AF

Professional Certification of SKAI & AF Staff

SKAI & AF Bank BPD Bali didukung oleh tenaga audit profesional yang telah bersertifikasi guna mendukung pelaksanaan beragam tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana ditetapkan dalam Piagam Audit Intern. Daftar sertifikasi yang dimiliki personal SKAI & AF Bank per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

The SKAI & AF of Bank BPD Bali is supported by professional audit personnel who have been certified to assist in the implementation of the various tasks and responsibilities as set forth in the Internal Audit Charter. As of December 31, 2024, the list of certifications held by SKAI & AF Bank personnel is as follows:

No	Jenis Sertifikasi Type of Certification	Jumlah Sertifikasi yang dimiliki (Keseluruhan) s.d 31 des 2024 Number of Certifications held (Total) until Dec 31, 2024
1	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Risk Management Certification Level 4	12
2	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 Risk Management Certification Level 5	4
3	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 Risk Management Certification Level 6	1
4	Sertifikasi General Banking 2 General Banking Certification Level 2	2
5	Sertifikasi Qualified Internal Auditor Tingkat Dasar Basic Qualified Internal Auditor Certification	7
6	Sertifikasi Qualified Internal Auditor Tingkat Lanjutan Advanced Qualified Internal Auditor Certification	5
7	Sertifikasi Qualified Internal Auditor Qualified Internal Auditor Certification	5

Independensi SKAI & AF

Independence of SKAI & AF

Bank BPD Bali menetapkan aspek independensi SKAI & AF dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya antara lain manajemen memberikan dukungan penuh kepada SKAI & AF sehingga ada jaminan bagi Auditor Intern dalam melaksanakan tugasnya terbebas dari pengaruh maupun tekanan dari manajemen dan/atau pihak lain yang terkait maupun tidak terkait dengan obyek yang diaudit.

Dalam melaksanakan tugas audit, Auditor Intern diberikan kebebasan dalam mengungkapkan pandangan, pemikiran dan pendapatnya secara obyektif sesuai dengan tanggung jawab profesinya dan standar audit yang berlaku. Auditor Intern juga diberikan kebebasan menetapkan metode, cara, Teknik, dan pendekatan audit.

Auditor Intern juga wajib melakukan analisis secara cermat dan akurat, memberikan pendapat yang tidak memihak, bebas dari pengaruh pihak lain serta tidak berprasangka terhadap objek yang diaudit yang tercermin dari pelaporan hasil audit yang lengkap dan informatif. Selanjutnya, dalam memberikan layanan konsultasi kepada pihak intern Bank, terdapat pemisahan antara anggota SKAI & AF yang memberikan jasa konsultasi atas suatu kebijakan dengan anggota SKAI & AF yang melakukan audit terhadap kebijakan yang dimaksud dan terdapat pengungkapan bahwa hasil konsultasi tidak memengaruhi obyektivitas SKAI & AF.

Bank BPD Bali determines the independence aspect of SKAI & AF in carrying out its duties and responsibilities, including management's full support to SKAI & AF, so as to ensure that Internal Auditors are free from influence or pressure from management and/or other parties related or unrelated to the audited object in carrying out their duties.

In performing their audit duties, Internal Auditors are given the freedom to express their views, thoughts, and opinions objectively in accordance with their professional responsibilities and applicable auditing standards. Internal auditors are also free to determine audit methods, procedures, techniques, and approaches.

Internal auditors are also required to make careful and accurate analyses, to express impartial opinions, to be free from the influence of other parties, and not to be biased against the audited entity, which is reflected in the complete and informative reporting of audit findings. In addition, when providing consulting services to the Bank's internal parties, there is a separation between SKAI & AF members who provide consulting services on a policy and SKAI & AF members who conduct audits of the policy in question, and there is disclosure that the results of the consulting services do not affect the objectivity of SKAI & AF.

Rapat SKAI & AF

SKAI & AF Meetings

Secara kumulatif, SKAI & AF menyelenggarakan rapat sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali selama tahun 2024 dengan rincian agenda rapat SKAI dengan Direksi sebanyak 30 (tiga puluh) dan rapat SKAI dengan Komite Audit sebanyak 7 (tujuh) kali sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini:

Cumulatively, SKAI & AF held 37 (thirty-seven) meetings in 2024, consisting of SKAI meeting with the Board of Directors as many as 30 (thirty) times and SKAI meeting with the Audit Committee as many as 7 (seven) times, as shown in the following table:

No	Tanggal Date	Agenda
Rapat SKAI dengan Direksi <i>SKAI Meeting with the Board of Directors</i>		
1	29 Jan 2024	<i>Exit Meeting Hasil Audit KAP atas Evaluasi Kinerja Bank BPD Bali Tahun Buku 2023</i> <i>Exit Meeting of Audit Results of KAP on Performance Evaluation of Bank BPD Bali for Fiscal Year 2023</i>
2	01 Feb 2024	<i>Exit Meeting Audit Umum Cabang Mangupura</i> <i>Exit Meeting of General Audit of Mangupura Branch</i>
3	02 Feb 2024	<i>Exit Meeting Audit SP FMI & KPDHN Tahun 2023</i> <i>Exit Meeting of SP FMI & KPDHN Audit for 2023</i>
4	19 Apr 2024	<i>Exit Meeting Kantor Cabang Seririt</i> <i>Exit meeting of Seririt Branch</i>
5	20 May 2024	<i>Exit Meeting Kantor Cabang Tabanan</i> <i>Tabanan Branch Exit Meeting</i>
6	21 May 2024	<i>Exit Meeting Kantor Cabang Badung</i> <i>Exit Meeting of Badung Branch</i>



No	Tanggal Date	Agenda
7	19 Jun 2024	<i>Entry Meeting</i> Pemeriksaan Umum OJK Provinsi Bali Tahun 2024 <i>Entry Meeting of OJK General Audit of Bali Province for 2024</i>
8	25 Jun 2024	<i>Exit Meeting</i> BPKP MRPN <i>Exit Meeting of BPKP MRPN</i>
9	01 Jul 2024	<i>Exit Meeting</i> Audit Umum Kantor Cabang Utama Denpasar <i>Exit Meeting of General Audit of Denpasar Head Office</i>
10	17 Jul 2024	<i>Exit Meeting</i> Joint Audit TI <i>Exit Meeting of Joint Audit TI</i>
11	22 Jul 2024	<i>Entry Meeting</i> OJK Pemeriksaan Khusus Market Conduct <i>Entry Meeting of OJK Special Audit of Market Conduct</i>
12	24 Jul 2024	<i>Entry Meeting</i> BI Pemeriksaan Khusus RPIM <i>Entry Meeting of BI Special Audit of RPIM</i>
13	25 Jul 2024	<i>Exit Meeting</i> Audit Tematik CKKE <i>Exit Meeting of Thematic Audit of CKKE</i>
14	01 August 2024	<i>Exit Meeting</i> BI Pemeriksaan Khusus RPIM <i>Exit meeting of BI Special Audit of RPIM</i>
15	05 August 2024	<i>Exit Meeting</i> Audit Umum Kantor Cabang Karangasem <i>Exit Meeting of General Audit of Karangasem Branch</i>
16	09 August 2024	<i>Exit Meeting</i> Acquirer Debet Bank BPD Bali <i>Exit Meeting of Acquirer Debit of Bank BPD Bali</i>
17	12 August 2024	<i>Entry Meeting</i> Evaluasi GRC dan Kinerja Bank BPD Bali <i>Entry Meeting of GRC Evaluation and Performance of Bank BPD Bali</i>
18	27 August 2024	<i>Exit Meeting</i> Evaluasi GRC dan Kinerja Bank BPD Bali <i>Exit Meeting of GRC Evaluation and Performance of Bank BPD Bali</i>
19	17 Sep 2024	<i>Exit Meeting</i> Audit Tematik Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM) <i>Exit Meeting of Thematic Audit of Implementation of Anti-Money Laundering Program, Prevention of Financing of Terrorism and Prevention of Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction (APU, PPT and PPPSPM)</i>
20	19 Sep 2024	<i>Exit Meeting</i> Audit Umum Kantor Pusat <i>Exit Meeting General Audit of Headquarters</i>
21	23 Oct 2024	<i>Kick Off Meeting</i> General Audit atas Laporan Keuangan Tahunan dan Evaluasi Kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2024 <i>Kick-off Meeting General Audit of Annual Financial Report and Performance Evaluation of PT Bank Pembangunan Daerah Bali for FY 2024</i>
22	23 Oct 2024	<i>Exit Meeting</i> Audit Single Customer View (SCV) <i>Exit Meeting Single Customer View (SCV) Audit</i>
23	25 Oct 2024	<i>Entry Meeting</i> atas Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi atas Sistem Pembayaran Tahun 2024 <i>Entry Meeting Implementation of Information Technology Audit of Payment System in 2024</i>
24	20 Nov 2024	<i>Exit Meeting</i> Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi atas Sistem Pembayaran Tahun 2024 <i>Exit Meeting Implementation of Information Technology Audit of Payment System in 2024</i>
25	26 Nov 2024	<i>Exit Meeting</i> Audit Tematik Pelindungan Konsumen <i>Exit Meeting Thematic Audit of Consumer Protection</i>
26	12 Dec 2024	<i>Exit Meeting</i> Audit Teknologi Informasi Pengembangan Produk Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah untuk Transaksi Online Payment dengan Metode Tokenisasi (<i>Customer Present Token Secure</i>) <i>Exit Meeting Information Technology Audit of Development of Indonesian Credit Card Product Government Segment for Online Payment Transactions with Tokenization Method (Customer Present Token Secure)</i>
27	17 Dec 2024	<i>Exit Meeting</i> atas Penilaian Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri dan Identifikasi Risiko pada Program Substitusi Impor dalam Kerangka Pengawasan Program P3DN pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bali. <i>Exit Meeting on Compliance Assessment of Domestic Product Purchasing and Risk Identification in Import Substitution Program under P3DN Program Supervision at PT Bank Pembangunan Daerah Bali by BPKP Representative from Bali Province.</i>
28	18 Dec 2024	<i>Exit Meeting</i> Audit Produk Quick Response Code Indonesian Standard Customer Presented Mode (QRIS CPM) pada Uang Elektronik Server Based Balipay. <i>Exit Meeting Audit of Quick Response Code Indonesian Standard Customer Presented Mode (QRIS CPM) product on server-based e-money Balipay.</i>

No	Tanggal Date	Agenda
29	19 Dec 2024	<i>Exit Meeting Audit Tematik Pemberian Kredit SIKUM Tahun 2024</i> <i>Exit Meeting Thematic Audit of SIKUM Credit Granting in 2024</i>
30	19 Dec 2024	<i>Exit Meeting Review Terhadap Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) sesuai dengan Standar ISO/IEC 27001:2022 pada Pengelolaan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2024</i> <i>Exit Meeting Review of Information Security Management System (ISMS) Implementation according to ISO/IEC 27001:2022 Standard in Data Center (DC) and Disaster Recovery Center (DRC) Management of PT Bank Pembangunan Daerah Bali in 2024</i>
Rapat SKAI dengan Komite Audit <i>SKAI Meeting with Audit Committee</i>		
1	19 Feb 2024	<i>Rapat Evaluasi Pelaksanaan PKAT Triwulan IV Tahun 2023</i> <i>Evaluation Meeting of PKAT Implementation for Quarter IV of 2023</i>
2	15 May 2024	<i>Rapat Evaluasi Pelaksanaan PKAT Triwulan I Tahun 2024</i> <i>Evaluation Meeting of PKAT Implementation for Quarter I of 2024</i>
3	20 Agust 2024	<i>Rapat Evaluasi Pelaksanaan PKAT Triwulan II Tahun 2024</i> <i>Evaluation Meeting of PKAT Implementation for Quarter II of 2024</i>
4	18 Nov 2024	<i>Rapat Evaluasi Pelaksanaan PKAT Triwulan III Tahun 2024</i> <i>Evaluation Meeting of PKAT Implementation for Quarter III of 2024</i>
5	15 Oct 2024	<i>Draft Keputusan Direksi tentang Buku Pedoman Perusahaan Audit Berbasis Risiko dan Strategi Anti Fraud</i> <i>Draft decision of the Board of Directors on risk-based audit firm policies and anti-fraud strategy</i>
6	29 Oct 2024	<i>Draft Keputusan Direksi atas Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter)</i> <i>Draft Board Decision on the Internal Audit Charter</i>
7	13 Dec 2024	<i>Draft Program Kerja Audit Intern (PKAT) Tahun 2025</i> <i>Draft Internal Audit Work Program (PKAT) for 2025</i>

Pengembangan Kompetensi SKAI & AF

SKAI & AF Competency Development

Bank BPD Bali memberikan kesempatan kepada SKAI & AF untuk mengikuti program pelatihan dan pengembangan kompetensi, baik yang diselenggarakan oleh internal Bank atau yang diselenggarakan oleh pihak eksternal. Tabel berikut ini menjelaskan program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang diikuti oleh SKAI selama tahun 2024:

The Bank BPD Bali provides the SKAI & AF with the opportunity to participate in training and competency development programs, both of which are organized internally by the Bank as well as by external parties. The following table explains the training and competency development programs that SKAI will participate in during 2024:

Jenis Pelatihan Type of Training	Penyelenggara Organizer	tanggal Date
Re-Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 <i>Risk Management Level 4 Re-Certification</i>	Leadership Nasional	09/01/2024
Webinar Connecting the Dots <i>Connecting the Dots Webinar</i>	OJK	11/01/2024
Start Strong 2024 Proven Strategies to Early Start and Achieve Your First Semester	Sinergi Indonesia Pintar	14/01/2024
Re-Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 <i>Risk Management Re-Certification Level 5</i>	Leadership Nasional	15/01/2024
Sharing Session Elevating Organisational Excellence	Charindo	19/01/2024
Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 <i>Risk Management Re-Certification Level 6</i>	Leadership Nasional	23/01/2024
Implementasi terkait Penerapan Pasal 21/26 berdasarkan PP 58 Tahun 2023 yang berlaku mulai masa Januari 2024 <i>Implementation related to the application of Article 21/26 based on PP 58 of 2023, which will be effective from January 2024</i>	ASBANDA	24/01/2024



Jenis Pelatihan Type of Training	Penyelenggara Organizer	tanggal Date
Sosialisasi MPAK Pengendalian Kecurangan <i>Socialization of MPAK Fraud Control</i>	BPKP	24/01/2024
Ujian Re-sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi Jenjang 4 <i>Risk Management Re-Certification Audit Level 4</i>	BSMR	28/01/2024
Pedoman dan Tata Cara Melakukan Pemeriksaan dan Penerimaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi <i>Policies and procedures for conducting inspections and acceptance of construction work procurement</i>	LEMIKNAS	16/02/2024
Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK <i>Reporting and requesting debtor information via SLIK</i>	PT Azecotama	17/02/2024
Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 & 5 <i>Risk Management Certification Refresher Level 4 & 5</i>	Leadership Nasional	19/02/2024
FGD Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan <i>FGD Consumer and community protection in the financial services sector</i>	Sinergi Indonesia Pintar	21/02/2024
Penanganan Kejahatan Perbankan dengan Berlakunya UU P2SK & POJK 16 Tahun 2023 <i>Dealing with banking crimes with the enactment of the P2SK Law & POJK 16 of 2023</i>	FKDKP	29/02/2024
Pembekalan Re-Sertifikasi General Banking 2 <i>General Banking Re-Certification Briefing 2</i>	PT Azecotama	14/03/2024
Webinar Phising & Smishing Awareness	PT Spentera	16/03/2024
Sharing Session - Elevating Organisational Excellence untuk Kepala Bagian <i>Sharing Session - Elevating Organizational Excellence for Head of Department</i>	Charindo	18/03/2024
FGD PSAK 71 Tahun 2024 <i>FGD PSAK 71 Year 2024</i>	KAP Heliantono & Rekan	18/03/2024
FGD PSAK 71 Tahun 2024 <i>FGD PSAK 71 Year 2024</i>	KAP Heliantono & Rekan	19/03/2024
Sertifikasi General Banking Level 2 SKKNI <i>General Banking Level 2 SKKNI Certification</i>	LSPP	22/03/2024
APU PPT dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Tingkat Eksekutif <i>APU PPT and Prevention of Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction at Executive Level</i>	Mitra Bisnis Strategis	06/05/2024
Integrated Governance, Risk & Compliance (GRC) menuju Era Digital <i>Integrated Governance, Risk & Compliance (GRC) for the Digital Era</i>	ASBANDA	06/05/2024
APU PPT dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal <i>APU PPT and Preventing the Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction</i>	Mitra Bisnis Strategis	07/05/2024
Great by a Choice Batch 1	Charindo	10/05/2024
General Banking	Mitra Bisnis Strategis	13/05/2024
FGD Roadmap Penguatan BPD <i>FGD Roadmap to Strengthen BPD</i>	OJK	27/05/2024
Webinar Membangun Kepercayaan Stakeholder Melalui Implementasi GRC dan UU Pelindungan Data Pribadi <i>Webinar Building Stakeholder Trust Through GRC Implementation and Personal Data Protection Act</i>	Veda Praxis	29/05/2024
Peluang dan Tantangan Pelindungan Data Pribadi dalam Transaksi di Era Digital <i>Opportunities and challenges of protecting personal data in transactions in the digital age</i>	OJK	30/05/2024
Focus Group Discussion FKDKP - Kesiapan Industri Perbankan dalam Implementasi UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi <i>Focus Group Discussion FKDKP - Readiness of the Banking Industry in the Implementation of Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection</i>	FKDKP	05/06/2024
Forum Penguatan GRC Kolaborasi OJK dengan Kementerian, Lembaga, dan Asosiasi "Diseminasi Standar Audit Internal Terkini" <i>GRC Strengthening Forum OJK Collaboration with Ministries, Institutions, and Associations "Dissemination of Latest Internal Audit Standards"</i>	OJK	07/06/2024
Sharing Session Pajak Perbankan <i>Banking Tax Sharing Session</i>	Mitra Nata Cendikia	11/06/2024
Webinar Financial Inclusion and Tech Talk (FITT) <i>Financial Inclusion and Tech Talk (FITT) Webinar</i>	ASBANDA	12/06/2024
Fraud Risk Management Framework and Bank Crime <i>Fraud Risk Management Framework and Banking Crime</i>	Infobank	20/06/2024

Jenis Pelatihan Type of Training	Penyelenggara Organizer	tanggal Date
Seminar <i>Mitigating Cyber Risk and Building a Trust</i> <i>Seminar on Cyber Risk Mitigation and Trust Building</i>	LPPI	27/06/2024
Workshop UU Perlindungan Data Pribadi Batch 1 <i>Workshop on Personal Data Protection Law Batch 1</i>	PT Azecotama	02/07/2024
Talkshow Strategi Anti Fraud <i>Anti-Fraud Strategy Talkshow</i>	OJK	04/07/2024
Workshop Penyusunan <i>Resolution Plan</i> bagi Bank Umum <i>Workshop on the preparation of resolution plans for commercial banks</i>	PT Azecotama	06/07/2024
Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 <i>Level 4 Risk Management Certification Refresher</i>	Learning Media Indonesia	09/07/2024
<i>Elevating Internal Audit as Value Driver: Achieving Business Resilience in the Era of Digitalization</i> <i>Elevating Internal Audit as a Value Driver: Achieving Business Resilience in the Digital Age</i>	YPIA	10/07/2024
Konferensi Auditor Internal 2024 <i>2024 Internal Audit Conference</i>	YPIA	11/07/2024
Workshop Teknik Penyusunan Catatan Aktivitas Pengolahan Data Pribadi (ROPA) <i>Workshop on Preparation Techniques for the Record of Personal Data Processing Activities (ROPA)</i>	PT Azecotama	14/07/2024
Sertifikasi <i>Qualified Internal Auditor</i> Tingkat Dasar <i>Qualified Internal Auditor Basic Level Certification</i>	YPIA	15-27/07/2024
FGD Evaluasi Pelaksanaan Tata Naskah Dinas <i>FGD on evaluating the implementation of official documents</i>	ANRI	20/07/2024
FGD dengan Kejati Bali dan BAS <i>Law Firm</i> Alih Media atau Konversi Sertipikat Hak Atas Tanah berbentuk Analog (Kertas) menjadi Sertipikat Elektronik (<i>Sertipikat-el</i>) & <i>Fraud</i> Dalam Dunia Perbankan <i>FGD with Bali High Prosecutor's Office and BAS Law Firm Transfer of Media or Conversion of Analog (Paper) Land Title Certificates to Electronic Certificates (e-Certificates) & Fraud in the Banking World</i>	Kejaksanaan Tinggi Bali dan BAS <i>Law Firm</i>	25/07/2024
<i>Business and Economic Outlook 2025</i>	Sinergi Indonesia Pintar	26/07/2024
Workshop Budaya Risiko, Budaya Kepatuhan, dan <i>Fraud Awareness</i> <i>Workshop on risk culture, compliance culture and fraud awareness</i>	Leadership Nasional	27/07/2024
FGD Penyusunan SOP Pelindungan Konsumen <i>FGD on Preparation of Consumer Protection SOPs</i>	Sinergi Indonesia Pintar	29/07/2024
Sertifikasi <i>Qualified Internal Auditor</i> Tingkat Dasar <i>Basic Qualified Internal Auditor Certification</i>	YPIA	05/08/2024
Workshop <i>Privacy Policy and Privacy Notice</i> dalam Implementasi UU PDP <i>Workshop on Privacy Policy and Privacy Notice in the Implementation of the PDP Law</i>	PT Azecotama	08/08/2024
Workshop Rencana Aksi <i>Recovery Plan</i> <i>Recovery Plan Action Plan Workshop</i>	PT Azecotama	10-11/08/2024
Webinar Membangun Kepemimpinan Berbasis Spiritual: Pendekatan Holistik untuk Pertumbuhan dan Keberlanjutan Bisnis <i>Webinar Building Spiritual-Based Leadership: A Holistic Approach to Business Growth and Sustainability</i>	OJK	22/08/2024
Webinar Meningkatkan GRC melalui <i>Quality Management System</i> Terintegrasi <i>Webinar on Improving GRC through an Integrated Quality Management System</i>	Veda Praxis	28/08/2024
Sertifikasi <i>Qualified Internal Auditor</i> Tingkat Lanjutan <i>Advanced Qualified Internal Auditor Level Certification</i>	YPIA	02/09/2024
<i>Joint Planning Session (JPS)</i>	Profis Solusindo	04/09/2024
Aspek Hukum Perkreditan dan Sertifikat Elektronik dalam Transaksi Digital <i>Legal aspects of credit and electronic certificates in digital transactions</i>	Infobank	06/09/2024
Optimalisasi Sistem Pengendalian Internal Bank sebagai Penerapan Strategi <i>Anti Fraud</i> <i>Optimizing Internal Control Systems in Banks as an Implementation of Anti-Fraud Strategies</i>	Sinergi Indonesia Pintar	09/09/2024
Sertifikasi <i>Qualified Internal Auditor</i> Tingkat Lanjutan <i>Advanced Qualified Internal Auditor Certification</i>	YPIA	17/09/2024
<i>Data Protection Impact Assessment (DPIA)</i>	PT Azecotama	21/09/2024
Workshop Strategi Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi <i>Information Technology Governance Implementation Strategy Workshop</i>	PT Solmit Bangun Indonesia	21/09/2024



Jenis Pelatihan Type of Training	Penyelenggara Organizer	tanggal Date
Data Protection Impact Assessment (DPIA)	PT Azecotama	21/09/2024
Konvensi Nasional Rancangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (RKKNI) Bidang Audit Intern Bank National Convention on the Draft of the Indonesian National Qualification Framework (SKKNI) for Bank Internal Audit	OJK	02/10/2024
FGD Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Hasil Kinerja Berkelanjutan Berbasis ESG dalam Bisnis Bank FGD on the preparation of annual financial reports and ESG-based sustainable performance reports in the banking sector	Sinergi Indonesia Pintar	10/10/2024
FGD terkait Penerbitan Sertifikat Tanah Elektronik dan Pelaksanaannya dalam Bisnis Perbankan FGD on Electronic Land Certificate Issuance and Its Implementation in Banking Business	Pusat Data dan Informasi Pertanahan Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, KPKNL Denpasar, dan Notaris rekanan Bank BPD Bali	14/10/2024
Pelatihan dan Awareness ISO 27001:2022 ISO 27001:2022 Training and Awareness	Robere Manajemen Indonesia	17/10/2024
Pelatihan Professional Recognition Program for Qualified Internal Auditor (QIA) Certification Professional Recognition Program Qualified Internal Auditor (QIA) Certification Training	YPIA	18/10/2024
Pelatihan QA Audit QA Audit Training	Robere Manajemen Indonesia	18/10/2024
Forum Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Sektor Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata Computer Security Incident Response Team Forum (CSIRT for the financial, trade and tourism sectors)	Badan Siber dan Sandi Negara	25/10/2024
Sosialisasi KASPI Tentang Penanganan Transaksi Transfer Dana Antar Penyelenggara Sistem Pembayaran Terhadap Rekening/Akun Pengguna Jasa Yang Terindikasi Fraud KASPI Socialization Regarding Handling of Fund Transfer Transactions Between Payment System Providers for User Accounts/Accounts That Are Indicated as Fraud	Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia	28/10/2024
Sosialisasi Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) Modul Laporan Strategi Anti Fraud Socialization of OJK Online Reporting Application (APOLO) Anti-Fraud Strategy Report Module	OJK	28/10/2024
Pelatihan dan Sertifikasi Certified Anti Fraud Manager (CAFM) Certified Anti Fraud Manager (CAFM) Training and Certification	Asia Anti Fraud (AAF)	30/10/2024
Project Management Office	Infobank	06/11/2024
Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK Reporting and requesting debtor information via SLIK	Nukreasi Karya Nusantara	13/11/2024
Pembekalan Sertifikasi WPPE bagi Pejabat Provision of WPPE certification for civil servants	PT Leadership Nasional	21/11/2024
Seminar Economic Outlook 2025 Economic Outlook 2025 Seminar	Infobank Institute	23/11/2024
Workshop Incident Awareness & Table Top Exercise Incident Awareness & Table Top Exercise Workshop	Badan Siber dan Sandi Negara	26/11/2024
Risk & Governance Summit 2024 "Strengthening the GRC Ecosystem in the Financial Sector to Support the Golden Indonesia 2045 Vision"	OJK	26/11/2024
Pelatihan Incident Awareness & Table Top Exercise Tanggap Insiden Siber Incident Awareness Training & Table Top Exercise Cyber Incident Response	Badan Siber dan Sandi Negara	26/11/2024
Sosialisasi Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK) Sistem Pembayaran dan Financial Market Infrastructure Bank Indonesia Socialization of Compliance Assessment Report (LHPK) for Bank Indonesia Payment System and Financial Market Infrastructure	Bank Indonesia	28/11/2024
Pelatihan Perhitungan LCR & NSFR LCR & NSFR Calculation Training	Banking Finance Development Center	28/11/2024
Guide to CAFM Certification & CAFM Examination	Asia Anti Fraud Management (AAFM)	02/12/2024

Jenis Pelatihan Type of Training	Penyelenggara Organizer	tanggal Date
Seminar Nasional Internal Audit (SNIA) dan Wisuda QIA Tahun 2024 <i>National Seminar for Internal Auditors (SNIA) and QIA Certification in 2025 2024</i>	YPIA	04/12/2024
<i>Inspiring Change</i>	Charindo	07/12/2024
<i>On Collaboration</i>	Charindo	10/12/2024
Workshop "Menguatkan Tata Kelola, Meningkatkan Kinerja: BUMD, BLUD Kesehatan, dan BUMDesa untuk Daerah Bali" <i>Workshop "Strengthening Governance, Improving Performance: BUMD, BLUD Health, and BUMDesa for the Bali Region"</i>	BPKP	11/12/2024
Refreshment Pajak Perbankan <i>Banking Tax Refresher</i>	Mitra Nata Cendikia	14/12/2024
Penguatan Internalisasi Budaya Kerja <i>Strengthening Internalization of Work Culture</i>	Divisi SDM Bank BPD Bali	17/12/2024
FGD terkait Penerapan Pengendalian Internal dalam Proses Pelaporan Keuangan Bank <i>FGD on the Implementation of Internal Control in the Bank's Financial Reporting Process</i>	OJK	18/12/2024
Workshop Penerapan POJK Nomor 15 Tahun 2024 <i>Workshop on Implementation of POJK No. 15 of 2024</i>	PT Azecotama	20/12/2024

Rencana Kerja SKAI & AF Tahun 2024

SKAI & AF Work Plan for 2024

Rencana Kerja SKAI & AF Bank BPD Bali telah tertuang dalam Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Tahun 2024 Nomor: B-1140/SAF/AU1/2023 tanggal 18 Desember 2023 dan telah mendapat persetujuan Direktur Utama dan Komisaris Utama.

The SKAI & AF Work Plan for Bank BPD Bali has been stated in the Annual Audit Work Program 2024 (PKAT) number: B-1140/SAF/AU1/2023 dated December 18, 2023 and has been approved by the President Director and the President Commissioner.

Pelaksanaan Tugas SKAI & AF Tahun 2024

Implementation of SKAI & AF Duties in 2024

Dalam pelaksanaan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) untuk Tahun 2024, SKAI & AF telah melakukan Audit Umum (*General Audit*), Audit Bidang Tertentu, *Surprise Audit*, *Review*, Audit Khusus, Pendampingan, Kegiatan Sosialisasi dan Pengawasan Pasif dengan perincian sebagai berikut:

- Audit Umum beserta penyampaian hasil audit telah dilakukan terhadap 8 (delapan) kantor cabang dan 1 (satu) kantor pusat.
- Audit Khusus terkait *Fraud* Intern beserta penyampaian hasil audit telah dilakukan terhadap 1 (satu) kantor cabang dan 3 (tiga) kantor cabang pembantu.
- Audit Khusus terkait *Fraud* Ekstern beserta penyampaian hasil audit telah dilakukan terhadap 2 (dua) kantor cabang pembantu dan 1 (satu) kantor cabang.
- Audit tematik beserta penyampaian hasil audit telah dilakukan terhadap 7 (tujuh) tematik yakni Sistem Pembayaran dan *Financial Market Infrastructure* Bank Indonesia (SP & FMI BI) serta KPDHN, Teknologi Informasi, Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian (CKKE), APU, PPT dan PPPSPM, *Single Customer View* (SCV), Pelindungan Konsumen dan Pemberian Kredit SIDI KUMBARA.

SKAI & AF has conducted General Audit, Specific Field Audit, Surprise Audit, Review, Special Audit, Mentoring, Socialization Activities and Passive Supervision in the implementation of the Annual Audit Work Program (PKAT) for 2024 with the following details:

- General Audit along with submission of audit results was conducted on 8 (eight) branches and 1 (one) head office.
- Special Audit related to Internal Fraud along with submission of audit results was conducted on 1 (one) branch office and 3 (three) sub-branch offices.
- Special audit related to external fraud along with submission of audit results was conducted on 2 (two) sub-branches and 1 (one) branch.
- Thematic audit with submission of audit results was conducted on 7 (seven) topics, namely Bank Indonesia's Payment System and Financial Market Infrastructure; Information Technology; Expected Credit Loss Provision (CKKE); APU, PPT, and PPPSPM; Single Customer View; and SIDI KUMBARA Credit Provision.



- *Surprise Audit* beserta penyampaian hasil audit telah dilakukan terhadap pengelolaan kas; pelaksanaan tata kelola teknologi informasi; pengamanan terminal ATM, dan pengelolaan kas ATM.
- Audit lainnya berupa Audit Pendalaman beserta penyampaian hasil audit telah dilakukan terhadap proses pemberian KUR 1 (satu) kantor cabang pembantu.
- Audit lainnya berupa Audit *Review* beserta penyampaian hasil audit telah dilakukan terhadap 16 (enam belas) topik.
- Audit lainnya berupa *Probity* Audit beserta penyampaian hasil audit telah dilakukan terhadap tahapan pengadaan gedung kantor sebuah kantor cabang pembantu.
- Audit lainnya berupa *Surveillance System* beserta penyampaian hasil audit telah dilakukan terhadap pengisian kas/uang tunai ATM, dan pengelolaan kas pada brankas di kantor cabang pembantu kelas 1-4.

Selain kegiatan audit tersebut di atas, SKAI & AF juga melakukan Pemantauan & Konsultasi beserta penyampaian hasilnya terhadap kegiatan operasional dan layanan kantor cabang pembantu kelas 5 di bawah supervisi 2 (dua) kantor cabang. Kegiatan Pendampingan beserta penyampaian hasilnya juga telah dilakukan oleh SKAI & AF sebanyak 16 (enam belas) kegiatan selama tahun 2024.

Selanjutnya, SKAI & AF melaporkan kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Pasif beserta penyampaian hasilnya terhadap 14 (empat belas) kantor cabang. Pelaksanaan Pengawasan Pasif Bank BPD Bali untuk triwulan IV tahun 2023, triwulan I-III 2024 juga beserta penyampaian hasilnya juga telah dilaksanakan.

Terakhir, SKAI & AF melakukan sosialisasi strategi *Anti-Fraud* beserta penyampaian hasilnya terhadap 15 (lima belas) jaringan kantor baik kantor pusat, kantor cabang utama, maupun kantor cabang.

- *Surprise Audit* with submission of audit results was conducted on Cash Management; Implementation of Information Technology Governance; ATM Terminal Security and ATM Cash Management.
- Other audits in the form of In-depth Audit along with submission of audit results were conducted on KUR provisioning process of 1 (one) sub-branch.
- Other audits in the form of Audit Review with submission of audit results were conducted on 16 (sixteen) topics.
- Other audits in the form of Probity Audit along with submission of audit results were conducted on the procurement stages of one office building of one sub-branch.
- Other audits in the form of Surveillance System along with submission of audit results were conducted on ATM cash/cash replenishment and cash management in safes at class 1-4 sub-branches.

In addition to the audit activities mentioned above, SKAI & AF also conducts monitoring & consultation along with the delivery of its results on the operational activities and services of Class 5 sub-branches under the supervision of 2 (two) branches. Mentoring activities along with the delivery of its results have also been carried out by SKAI & AF for 16 (sixteen) activities during 2024.

Furthermore, SKAI & AF reported on the implementation of Passive Supervision activities along with the delivery of its results for 14 (fourteen) branch offices. The implementation of Bank BPD Bali passive supervision for the fourth quarter of 2023, the first-third quarter of 2024 along with the delivery of its results was also carried out.

Finally, SKAI & AF conducted the socialization of the Anti-Fraud Strategy along with the delivery of its results to 15 (fifteen) office networks, both head offices, main branches and branch offices.

Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit Intern & Ekstern

Internal & External Audit Result Follow-up Report

Laporan hasil Audit dan realisasi kegiatan Audit SKAI & *Anti-Fraud* disampaikan kepada Direktur Utama dan tembusan disampaikan kepada Dewan Komisaris, Direktur Kepatuhan dan Komite Audit. Dewan Komisaris dan Direksi memantau dan memastikan pihak yang di Audit (*Auditee*) telah mengambil langkah-langkah konkret atas hasil temuan Audit. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, Bank telah menindaklanjuti sebesar 978 temuan atau sebesar 99,49% dari total sebanyak 983 temuan. Masih terdapat 5 (lima) temuan yang masih dalam proses tindak lanjut.

Dalam melakukan Audit, SKAI & *Anti-Fraud* bertindak secara objektif tanpa terpengaruh oleh pihak lain sebagaimana tertuang dalam Piagam Audit Intern.

The Audit Result Report and realization of SKAI & Fraud Audit activities are submitted to the President Director and a copy is submitted to the Board of Commissioners, Compliance Director and Audit Committee. The Board of Commissioners and the Board of Directors monitor and ensure that the auditee takes action on the results of the audit. As of December 31, 2024, the Bank has followed up on 978 findings. This represents 99.49% of the total of 983 findings. There are still 5 (five) findings that are still being followed up.

As stated in the Internal Audit Charter, SKAI & Anti-Fraud acts objectively and without being influenced by any other party in performing the audit.

Kejadian Intern *Fraud* Internal Fraud Incidents

Bank BPD Bali melaporkan kejadian internal *fraud* selama tahun 2024 yang disajikan pada tabel berikut ini:

Bank BPD Bali reported internal fraud incidents in 2024, which are presented in the table below:

Intern Fraud dalam 1 tahun Internal fraud in 1 year	Tahun 2024 Year 2024					
	Pengurus Management		Karyawan Employee		Karyawan Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya Temporary and outsourced workers	
	Tahun Sebelumnya Previous year	Tahun Berjalan Current year	Tahun Sebelumnya Previous year	Tahun Berjalan Current year	Tahun Sebelumnya Previous year	Tahun Berjalan Current year
Total Fraud Total Fraud	-	-	2	3	-	-
Telah terselesaikan Resolved	-	-	1	4	-	-
Dalam Proses Penyelesaian di Intern Bank In process of being resolved internally	-	-	1	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Resolution not yet attempted	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti melalui Proses Hukum Followed up through the legal process	-	-	-	-	-	-

Bank BPD Bali berkomitmen menyelesaikan setiap permasalahan terkait dengan penyimpangan intern yang merugikan PT Bank Pembangunan Daerah Bali secara adil melalui mekanisme penegakan ketentuan Intern dan mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola.

Bank BPD Bali is committed to fairly resolve any issues related to internal deviations that are detrimental to PT Bank Pembangunan Daerah Bali through the mechanism of enforcing internal regulations and prioritizing governance principles.

FUNGSI KEPATUHAN Compliance Function

Kompleksitas kegiatan usaha di industri perbankan di Indonesia semakin meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan integrasi pasar keuangan. Selain itu, kompleksitas kegiatan usaha Bank BPD Bali memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang dihadapi sehingga diperlukan upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usahanya. Terkait dengan hal tersebut, Bank BPD Bali menyadari pentingnya kepatuhan terhadap beragam ketentuan perbankan yang berlaku sehingga potensi risiko usaha Bank dapat diantisipasi lebih dini.

The complexity of business activities in the Indonesian banking industry has been increasing with the development of information technology, globalization and financial market integration. In addition, the complexity of Bank BPD Bali's business activities has a great impact on the risk exposure it faces. Therefore, efforts are needed to mitigate the risks of its business activities. In this regard, Bank BPD Bali is aware of the importance of complying with the various applicable banking regulations so that the potential risk of the Bank's business activities can be anticipated at an early stage.



Bank BPD Bali telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan/Divisi Kepatuhan dalam rangka melaksanakan fungsi kepatuhan. Divisi ini dibentuk dalam rangka membantu Direksi menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank. Hal ini sejalan dengan POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank Umum.

Bank BPD Bali has established a Compliance Work Unit/Compliance Division to perform the compliance function. This department was established to assist the Board of Directors in developing and implementing a culture of compliance at all levels of the Bank's organization and business activities. This is in accordance with POJK No. 46/POJK.03/2017 on the implementation of the compliance function of commercial banks.

Piagam Fungsi Kepatuhan

Compliance Function Charter

Bank BPD Bali telah memiliki Piagam Fungsi Kepatuhan sebagaimana yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi No. 0284/KEP/DIR/KPN/2023 tanggal 4 Juli 2023 tentang Buku Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan. Dokumen ini merupakan pembaruan atas Piagam Fungsi Kepatuhan sebelumnya yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi pada tahun 2021.

Bank BPD Bali has a Compliance Function Charter stipulated by the Board of Directors Decree No. 0284/KEP/DIR/KPN/2023 dated July 4, 2023 on the Company's Compliance Function Implementation Guidelines. This document updates the previous Compliance Function Charter, which was established by the Board of Directors' Decree dated 2021.

Hal-hal penting yang diatur dalam Piagam Fungsi Kepatuhan antara lain susunan organisasi divisi kepatuhan, pelaksanaan fungsi kepatuhan, hubungan divisi kepatuhan dengan satuan kerja dan unit kerja, sistem pengendalian intern dan sistem informasi manajemen & sumber daya manusia, serta administrasi dan pelaporan direktur kepatuhan.

The organizational structure of the Compliance Division, the implementation of the Compliance Function, the relationship between the Compliance Department and the business units, the internal control systems and the management information systems and human resources, as well as the management and reporting of the Compliance Director are among the important matters regulated in the Compliance Function Charter.

Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan

Roles and Responsibilities of the Compliance Function

Berpedoman pada Piagam Fungsi Kepatuhan Bank BPD Bali, Fungsi Kepatuhan Bank memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank dan mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.

The Bank's Compliance Function has the duties and responsibilities to realize the implementation of compliance culture at all levels of the Bank's organization and business activities and to manage the compliance risks faced by the Bank, based on the Bank BPD Bali Compliance Function Charter.

Selain itu, Fungsi Kepatuhan memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

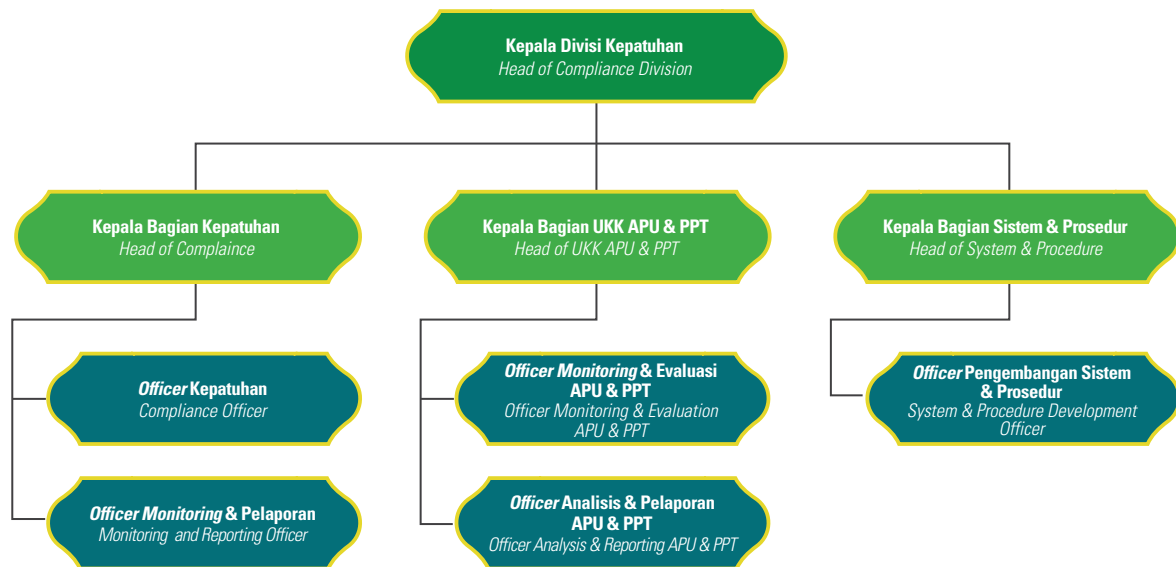
In addition, the Compliance Function ensures that the Bank's policies, rules, systems, procedures, and business activities comply with the provisions of the OJK and other laws and regulations. The Compliance Function also ensures that the Bank complies with its commitments to the Financial Services Authority and/or other authorized regulatory authorities.

Struktur Organisasi Fungsi Kepatuhan

Organizational Structure of the Compliance Function

Struktur organisasi Fungsi Kepatuhan Bank berpedoman pada susunan organisasi dan uraian tugas kantor pusat Bank BPD Bali yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direksi No. 0438/KEP/DIR/RENSTRA/2024 tanggal 15 Agustus 2024 sebagai berikut:

The organizational structure of the Bank's Compliance Function is based on the organizational structure and job descriptions of the Head Office of Bank BPD Bali as established by the Board of Directors Decree No. 0438/KEP/DIR/RENSTRA/2024 dated August 15, 2024 as follows:



Kepala Divisi Kepatuhan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan serta mempunyai peran jabatan antara lain mengorganisir Kepatuhan dengan Peraturan Bank Indonesia, OJK, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku, mengorganisir dan mengarahkan pengembangan, penerapan serta mempertahankan kerangka kerja, kebijakan dan proses yang tepat guna memastikan semuanya sesuai dengan persyaratan regulasi perbankan yang berlaku.

The Head of Compliance Division reports to the Director of Compliance and is responsible for organizing compliance with Bank Indonesia regulations, OJK and other applicable laws and regulations, organizing and directing the development, implementation and maintenance of the right framework, policies and processes to ensure that everything is in compliance with applicable banking regulatory requirements.

Kepala Divisi Kepatuhan juga mengelola pelaksanaan fungsi tata kelola yang baik sesuai ketentuan berlaku dan memberikan pengarahan, pendendalian, serta pengawasan dalam pelaksanaan, penyusunan, perumusan, dan pengembangan Kebijakan dan Prosedur (BPP dan SOP). Selanjutnya, Kepala Divisi Kepatuhan bertanggung jawab terhadap penyusunan, perumusan, pengembangan dan review kebijakan dan prosedur pada divisi KPN serta mensosialisasikan kepada Divisi dan Kantor Cabang.

The Head of Compliance Division also manages the implementation of good governance functions in accordance with applicable regulations and provides direction, control and supervision in the implementation, preparation, formulation and development of policies and procedures (BPP and SOP). Furthermore, the Head of Compliance is responsible for the preparation, formulation, development and review of policies and procedures in the KPN division and their socialization to the divisions and branches.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Kepala Divisi Kepatuhan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Bagian yakni Kepala Bagian Kepatuhan, Kepala Bagian UKK APU & PPT, dan Kepala Bagian Sistem & Prosedur. Masing-masing Kepala Bagian tersebut dibantu oleh beberapa officer di bawahnya.

In carrying out his duties and obligations, the Head of Compliance is assisted by 3 (three) section heads, namely the Head of Compliance, the Head of UKK APU & PPT and the Head of Systems & Procedures. Each Head of Department is assisted by several subordinate officers.

Profil Kepala Fungsi Kepatuhan

Profile of the Head of Compliance Function

Kepala Divisi Kepatuhan Bank BPD Bali dijabat oleh Ida Bagus Nyoman Ari Suryantara, S.H., M.M., yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi No. 0271/KEP/DIR/SDM/2023. Profil ringkas Kepala SKAI & AF Bank BPD Bali beserta sertifikasi yang dimiliki dapat dilihat di Bab Profil Perusahaan dari Laporan Tahunan ini.

The Head of Compliance Division of Bank BPD Bali is Ida Bagus Nyoman Ari Suryantara, S.H., M.M., who was appointed based on the Board of Directors' Resolution No. 0271/KEP/DIR/SDM/2023. Please refer to the Company Profile chapter of this Annual Report for a brief profile of the Head of SKAI & AF Bank BPD Bali and the certifications he holds.



Independensi Direktur Kepatuhan

Independence of Compliance Director

Berpedoman pada POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Direktur Kepatuhan Bank BPD Bali yang bertanggung jawab atas pengelolaan fungsi kepatuhan telah memenuhi kriteria independensi sebagai berikut:

The Compliance Director of Bank BPD Bali, who is responsible for the management of the compliance function, meets the following independence criteria based on POJK No. 46/POJK.03/2017 on the implementation of the compliance function of commercial banks:

No	Kriteria Independensi Independence Criteria	√ atau x
1	Tidak rangkap jabatan dan hubungan afiliasi. <i>No concurrent positions and affiliations.</i>	√
2	Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham pengendali. <i>Has no financial, management, shareholding and/or family relationships with members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the controlling shareholders.</i>	√
3	Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tidak membawahkan fungsi: <i>The Director of Compliance shall not perform any of the following functions:</i>	√
a.	Bisnis dan operasional <i>Business and Operations</i>	√
b.	Manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan bagi kegiatan usaha Bank. <i>Risk Management, which makes decisions for the Bank's business activities.</i>	√
c.	<i>Treasury</i> <i>Treasury</i>	√
d.	Keuangan dan Akuntansi <i>Finance and Accounting</i>	√
e.	Logistik dan pengadaan barang dan jasa. <i>Logistics and procurement of goods and services</i>	√
f.	Teknologi dan informasi. <i>Technology and Information.</i>	√
g.	Audit Intern <i>Internal Audit</i>	√

Sertifikasi Profesi Fungsi Kepatuhan

Professional Certification of the Compliance Function

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Fungsi Kepatuhan Bank BPD Bali didukung oleh tenaga *professional* yang telah bersertifikasi. Daftar sertifikasi yang dimiliki personal Fungsi Kepatuhan Bank per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

In performing its duties and responsibilities, the Compliance Function of Bank BPD Bali is supported by certified professionals. As of December 31, 2024, the list of certifications held by the Bank's Compliance Function personnel is as follows:

No	Jenis Sertifikasi Certification Type	Jumlah Personil Fungsi Kepatuhan Number of Compliance Function Personnel
1	Sertifikasi Kepatuhan Level I <i>Level I Compliance Certificate</i>	10
2	Sertifikasi Kepatuhan Level II <i>Level II Compliance Certificate</i>	3
3	Sertifikasi Kepatuhan Level III <i>Level II Compliance Certificate</i>	1

Pengembangan Kompetensi Fungsi Kepatuhan

Compliance Function Competency Development

Bank BPD Bali juga memberikan kesempatan kepada Fungsi Kepatuhan untuk mengikuti program pelatihan dan pengembangan kompetensi, baik yang diselenggarakan oleh internal Bank atau yang diselenggarakan oleh pihak eksternal. Selama tahun 2024, program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Fungsi Kepatuhan adalah sebagai berikut:

Bank BPD Bali also provides opportunities for the Compliance Function to participate in training and skills development programs, both organized by internal or external entities of the Bank. During 2024, the compliance function's participation in training and competency development programs is as follows:

Jenis Pelatihan Type of Training	Penyelenggara Organizer	Tanggal Date
Re-Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 <i>Risk Management Level 4 Re-Certification</i>	Leadership Nasional	09/01/2024
Webinar Connecting the Dots	OJK	11/01/2024
Start Strong 2024 Proven Strategies to Early Start and Achieve Your First Semester	Sinergi Indonesia Pintar	14/01/2024
Sharing Session Elevating Organisational Excellence	Charindo	19/01/2024
Ujian Re-sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi Jenjang 4 <i>Risk Management Re-Certification Exam Level 4 Qualification</i>	BSMR	28/01/2024
Pedoman dan Tata Cara Melakukan Pemeriksaan dan Penerimaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi <i>Guidelines and Procedures for Conducting Inspections and Acceptance of Construction Procurement</i>	LEMIKNAS	16/02/2024
Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK <i>Reporting and Requesting Debtor Information via SLIK</i>	PT Azecotama	17/02/2024
Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 & 5 <i>Refresher course on Risk Management Certification Levels 4 & 5</i>	Leadership Nasional	19/02/2024
FGD Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan <i>FGD on consumer and community protection in the financial services sector</i>	Sinergi Indonesia Pintar	21/02/2024
Indonesia GCG Training 2024	Economic Review	22/02/2024
Sosialisasi Pelaksanaan Bye Laws <i>Socialization of Bye Law Implementation</i>	Perbanas	23/02/2024
Penanganan Kejahatan Perbankan dengan Berlakunya UU P2SK & POJK 16 Tahun 2023 <i>Handling of Banking Crimes with the Enactment of P2SK Law & POJK 16 of 2023</i>	FKDKP	29/02/2024
Sosialisasi Kepatuhan Bank Tahun 2024 <i>Socialization of Bank Compliance in 2024</i>	Divisi Kepatuhan	14/03/2024
Pembekalan Re-Sertifikasi General Banking 2 <i>Provision of general re-certification of banks 2</i>	PT Azecotama	14/03/2024
Sosialisasi Kepatuhan Bank Tahun 2024 <i>Socialization of Banking Compliance in 2024</i>	Divisi Kepatuhan	14/03/2024
Webinar Phishing & Smishing Awareness <i>Phishing & Smishing Awareness Webinar</i>	PT Spentera	16/03/2024
APU PPT dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Batch 1 <i>APU PPT and Prevention of Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction Batch 1</i>	PT Azecotama	16/03/2024
Sharing Session - Elevating Organisational Excellence untuk Kepala Bagian <i>Sharing Session - Elevating Organizational Excellence for Head of Section</i>	Charindo	18/03/2024
FGD PSAK 71 Tahun 2024 <i>FGD PSAK 71 Year 2024</i>	KAP Heliantono & Rekan	18/03/2024
Integrated High Impact Action Training Batch 1	Sembaga Berdikari Konsultan	03/04/2024
Inspiring Leadership Batch 1 & 2	Charindo	17/04/2024
Webinar Paylater: Solusi Keuangan atau Sumber Masalah Baru <i>Webinar Paylater: Financial solution or new source of problems</i>	LPPI	26/04/2024
ASWIFTINDO Sharing Knowledge RMA Portal SWIFT & Basic Treasury	ASWIFTINDO	04/05/2024
APU PPT dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Tingkat Eksekutif <i>AML PPT and Proliferation Prevention WMD Financing Executive Level</i>	Mitra Bisnis Strategis	06/05/2024



Jenis Pelatihan Type of Training	Penyelenggara Organizer	Tanggal Date
<i>Great by a Choice Batch 1</i>	Charindo	10/05/2024
Identifikasi dan Analisis Transaksi Keuangan bagi BPD <i>Transaction Identification and Analysis Funding for BPD</i>	PPATK	20/05/2024
<i>Arbitrator Talks LAPS SJK</i>	ASBANDA	21/05/2024
Peluang dan Tantangan Pelindungan Data Pribadi dalam Transaksi di Era Digital <i>Opportunities and challenges of protecting personal data in transactions in the digital age</i>	OJK	30/05/2024
FGD Kesiapan Industri Perbankan dalam Implementasi UU & PP Perlindungan Data Pribadi <i>FGD Readiness of Banking Industry in Implementing Law & PP on Personal Data Protection</i>	FKDKP	05/06/2024
Transaksi Keuangan Mencurigakan & Penentuan Tindak Pidana Asal <i>Suspicious Financial Transactions & Predicate Crime Identification</i>	FKDKP	12/06/2024
<i>Banking Quality Assurance</i> sebagai Penerapan Sistem Pengendalian Internal Sejalan dengan POJK dan SEOJK <i>Banking Quality Assurance as the Implementation of Internal Control Systems in Accordance with POJK and SEOJK</i>	Sinergi Indonesia Pintar	20/06/2024
<i>Workshop in Assistance in the Implementation of Risk - Based AML/CFT/CFP Program and Virtual Assets in Financial Sector 2024</i>	OJK	27/06/2024
<i>Workshop on Assisting in the Implementation of Risk-Based AML/CFT/CFP Program and Virtual Assets in the Financial Sector 2024</i>		
<i>Workshop UU Perlindungan Data Pribadi Batch 1</i> <i>Workshop on Personal Data Protection Law Batch 1</i>	PT Azecotama	02/07/2024
<i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 <i>Refresher of Risk Management Certification Level 4</i>	Learning Media Indonesia	09/07/2024
<i>Workshop Teknik Penyusunan Catatan Aktivitas Pengolahan Data Pribadi (ROPA)</i> <i>Personal Data Processing Activity Record Preparation Technique (ROPA) Workshop</i>	PT Azecotama	14/07/2024
Webinar Menjaga Kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam Mendukung Ekonomi Inklusif melalui Pengawasan, Edukasi Keuangan <i>Webinar Maintaining Compliance of Financial Services Business Actors in Supporting an Inclusive Economy through Supervision, Financial Education, and Financial Literacy</i>	FKDKP	15/07/2024
FGD Evaluasi Pelaksanaan Tata Naskah Dinas <i>FGD Assessment of the Implementation of Official Documents</i>	ANRI	20/07/2024
<i>Business and Economic Outlook 2025</i>	Sinergi Indonesia Pintar	26/07/2024
<i>Workshop Budaya Risiko, Budaya Kepatuhan, dan Fraud Awareness</i> <i>Workshop on risk culture, compliance culture and fraud awareness</i>	Leadership Nasional	27/07/2024
FGD Penyusunan SOP Pelindungan Konsumen <i>FGD on preparation of consumer protection SOPs</i>	Sinergi Indonesia Pintar	29/07/2024
<i>Workshop Privacy Policy and Privacy Notice</i> dalam Implementasi UU PDP <i>Workshop on Privacy Policy and Privacy Notice in the Implementation of the PDP Law</i>	PT Azecotama	08/08/2024
<i>Workshop Penyusunan Kebijakan Implementasi dan Laporan Recovery Plan</i> bagi Bank Umum <i>Workshop on Preparation of Implementation Policies and Recovery Plan Reports for Commercial Banks</i>	PT Azecotama	10/08/2024
Membangun Kepemimpinan Berbasis Spiritual: Pendekatan Holistik untuk Pertumbuhan dan Keberlanjutan Bisnis <i>Building Spiritual Leadership: A Holistic Approach to Business Growth and Sustainability</i>	OJK	22/08/2024
Webinar Meningkatkan GRC melalui <i>Quality Management System Terintegrasi</i> <i>Webinar Improving GRC through an Integrated Quality Management System</i>	Veda Praxis	28/08/2024
Penilaian Risiko APU PPT dan PPPSM terhadap Produk, Praktik Usaha, dan Teknologi Baru serta Tipologi TPPU terkait Indikasi Judi <i>AML PPT and PPPSM Risk Assessment of Products, Business Practices and New Technologies and TPPU Typology Related to Gambling Indications</i>	PT Calamus Rotana Cattail	29/08/2024
<i>Joint Planning Session (JPS)</i>	Profis Solusindo	04/09/2024
Aspek Hukum Perkreditan dan Sertifikat Elektronik dalam Transaksi Digital <i>Legal aspects of credit and electronic certificates in digital transactions</i>	Infobank	06/09/2024
Optimalisasi Sistem Pengendalian Internal Bank sebagai Penerapan Strategi <i>Anti Fraud</i> <i>Optimization of Bank Internal Control Systems as an Implementation of Anti-Fraud Strategy</i>	Sinergi Indonesia Pintar	09/09/2024
<i>Climate Risk Management & Scenario Analysis Strategy</i>	Leadership Nasional	13/09/2024

Jenis Pelatihan Type of Training	Penyelenggara Organizer	Tanggal Date
Workshop Strategi Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi Information Technology Governance Implementation Strategy Workshop	PT Solmit Bangun Indonesia	21/09/2024
Data Protection Impact Assessment (DPIA)	PT Azecotama	21/09/2024
Workshop Penyusunan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Workshop on the preparation of recovery plans	ASBANDA	02/10/2024
FGD Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Hasil Kinerja Berkelanjutan Berbasis ESG dalam Bisnis Bank FGD on preparation of annual financial reports and ESG-based sustainable performance reports in the banking business	Sinergi Indonesia Pintar	10/10/2024
Pelatihan dan Awareness ISO 27001:2022 ISO 27001:2022 Training and Awareness	Robere Manajemen Indonesia	17/10/2024
Inspiring Leadership	Charindo	17/10/2024
Project Management Office	Infobank	06/11/2024
Sosialisasi Ketentuan Perbankan Socialization of banking regulations	OJK	07/11/2024
Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Provision of Level 4 Risk Management Certification	PT Leadership Nasional	11/11/2024
Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK Reporting and requesting debtor information via SLIK	Nukreasi Karya Nusantara	14/11/2024
Seminar Memerangi Judi Online dan Kejahatan Baru Era Ekonomi Digital 5.0 Seminar on Combating Online Gambling and New Crimes in the Digital Economy 5.0 Era	OVO	19/11/2024
Pembekalan Sertifikasi WPPE bagi Pejabat Provision of WPPE certification for officials	PT Leadership Nasional	21/11/2024
Workshop Pembekalan Praktik PDP di Sektor Privat Workshop on Provision of PDP Practices in the Private Sector	Kominfo RI	21/11/2024
Tipologi, Indikator, dan Penulisan LTKM Tindak Pidana Asal (TPA) Perjudian dan TPA Lainnya bagi Bank Umum Typology, Indicators and Writing of LTKM for Predicate Crimes (TPAs) Gambling and Other TPAs for Commercial Banks	Citra Prestasi Gemilang	22/11/2024
Seminar Economic Outlook 2025 Economic Outlook 2025 Seminar	Infobank Institute	23/11/2024
Inspiring Change	Charindo	23/11/2024
Workshop Incident Awareness & Table Top Exercise	Badan Siber dan Sandi Negara	26/11/2024
Sosialisasi Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK) Sistem Pembayaran dan Financial Market Infrastructure Bank Indonesia Socialization of Compliance Assessment Results Report (LHPK) Payment System and Financial Market Infrastructure Bank Indonesia	Bank Indonesia	28/11/2024
Sosialisasi Pengembangan Sistem Informasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (SIGAP) Tahun 2024 Socialization of Development of Information System for Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorist Financing Program (SIGAP) in 2024	OJK	04/12/2024
Inspiring Change	Charindo	07/12/2024
Workshop Kajian KPK RI: Pemetaan Risiko Korupsi pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam Penyaluran Kredit/Pembiayaan Bermasal Workshop on KPK RI Study: Corruption Risk Mapping in Regional Development Banks (BPD) in Lending/Mass Financing	ASBANDA	09/12/2024
On Collaboration	Charindo	10/12/2024
Workshop Penerapan POJK Nomor 15 Tahun 2024 Workshop on Implementation of POJK No. 15 of 2024	PT Azecotama	20/12/2024
Financial Planning dan Pencegahan Fraud Perbankan Financial Planning and Bank Fraud Prevention	Mitra Bisnis Strategis	21/12/2024
Workshop Penyusunan Kebijakan Internal POJK Nomor 20 Tahun 2023 Workshop on Internal Policy Preparation of POJK No. 20 of 2023	Divisi Kredit Ritel & Konsumer BPD Bali	28/12/2024

Blueprint Kepatuhan Bank BPD Bali Tahun 2019-2024

BPD Bank Bali Compliance Blueprint 2019-2024

Bank BPD Bali telah memiliki Blueprint Kepatuhan BPD Bank Bali Tahun 2019-2024 sebagaimana yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi No. 0764/KEP/DIR/KPN/2019 tanggal 03 Desember 2019. *Blueprint* Kepatuhan tersebut terdiri dari 3 (tiga) tahapan untuk kemudahan implementasi dan sekaligus disinkronisasi dengan tahapan transformasi BPD Jilid II sebagai berikut:

- Tahap I, Desember Tahun 2019 - Desember Tahun 2020, dengan tema: "Memperkuat Fondasi". Arah dari tahap I ini fokus pada perbaikan internal, memperkuat basis organisasi Divisi Kepatuhan, meningkatkan peran Divisi Kepatuhan dalam penentuan *risk appetite* Kepatuhan, dan memperkuat budaya kepatuhan sebagai bagian budaya perusahaan;
- Tahap II, Januari Tahun 2021 - Desember Tahun 2022, dengan tema: "Seimbang - Proaktif - Terukur", dengan fokus pada arah perubahan untuk penguatan peran dan fungsi Divisi Kepatuhan dalam pengelolaan risiko kepatuhan yang mendukung pencapaian target bisnis selalu dalam koridor prinsip prudential dan ketentuan yang berlaku, mendukung optimalisasi budaya kepatuhan sebagai keunggulan perusahaan;
- Tahap III, Januari Tahun 2023 - Desember Tahun 2024, dengan tema: "Stabilisasi, Meningkatkan Dan Melanjutkan". Arahnya dilakukan dengan meneruskan, menguatkan dan stabilisasi peran serta fungsi Divisi Kepatuhan secara Pro-Aktif, Seimbang dan Terukur melalui penerapan 4 (empat) pilar kepatuhan yaitu supervisi, kajian, konsultasi dan regulasi serta optimalisasi budaya kepatuhan sebagai keunggulan perusahaan, melalui Moto: "BERANI, JUJUR DAN PATUH".

Dan sesuai sifat *Blueprint* Kepatuhan Bank BPD Bali Tahun 2019-2024 yang "high level" dan "living document" maka implementasinya bisa dinamis dan disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi yang dihadapi Bank BPD Bali.

Bank BPD Bali has a BPD Bank Bali Compliance Blueprint 2019-2024 as prescribed by the Board of Directors' Resolution No. 0764/KEP/DIR/KPN/2019 dated December 3, 2019. The Compliance Blueprint consists of 3 (three) stages for ease of implementation and at the same time synchronized with the stages of BPD Transformation Volume II as follows:

- Stage I, December 2019 - December 2020, with the theme: "Strengthening the Foundation". The direction of this Stage I is focused on internal improvements, strengthening the organizational foundation of the Compliance Department, increasing the role of the Compliance Division in determining the compliance risk appetite, and strengthening the culture of compliance as part of the corporate culture;
- Phase II, January 2021 - December 2022, with the theme: "Balanced - Proactive - Measurable", focusing on the direction of change to strengthen the role and function of the Compliance Division in managing compliance risks that support the achievement of business objectives, always within the corridor of prudential principles and applicable regulations, supporting the optimization of compliance culture as a business asset;
- Phase III, January 2023 - December 2024, with the theme: "Stabilization, Improvement and Continuation". The direction will be carried out by continuing, strengthening and stabilizing the role and function of the Compliance Division in a proactive, balanced and measurable manner through the implementation of 4 (four) pillars of compliance, namely, monitoring, reviewing, consulting and regulating, and optimizing the compliance culture as a corporate asset, through the motto: "COURAGEOUS, HONEST AND COMPLIANT".

And in accordance with the nature of the 2019-2024 Bank BPD Bali Compliance Blueprint, which is "high level" and "living document", its implementation can be dynamic and adapted to the needs and situations of Bank BPD Bali.

Tahap I	Desember 2019 - Desember 2020 <i>December 2019 - December 2020</i>	Memperkuat Fondasi <i>Strengthening the Foundation</i>
Tahap II	Januari 2021 - Desember 2022 <i>January 2021 - December 2022</i>	Seimbang - Proaktif - Terukur <i>Balanced - Proactive - Measurable</i>
Tahap III	Januari 2023 - Desember 2024 <i>January 2023 - December 2024</i>	Stabilisasi, Meningkatkan Dan Melanjutkan <i>Stabilization, Improvement and Continuation</i>

Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2024

Compliance Function Work Program in 2024

Program Kerja Fungsi Kepatuhan Bank BPD Bali tahun 2024 meliputi:

- Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank pada peringkat 2 dengan meningkatkan kualitas pengelolaan Tata Kelola/GCG, Profil Risiko, *Earning* dan *Capital*;
- Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM untuk mendukung penerapan *Governance*, *Risk Management*, *Compliance*, dan *Control*;

Bank BPD Bali's Compliance Function Work Program in 2024 includes

- Maintain the Bank's health level at rank 2 by improving the quality of management of governance/GCG, risk profile, earnings and capital;
- Improve the quality and competence of human resources to support the implementation of governance, risk management, compliance and control;

3. Meningkatkan kualitas standarisasi dan pengelolaan BPP/SOP yang terintegrasi dengan aspek risiko dan *compliance* serta me-review kebijakan dan prosedur sesuai dengan perkembangan kebijakan regulator dan persaingan pasar;
4. Meningkatkan penerapan program APU PPT & PPSPM dengan menetapkan rating *Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing (FIR on ML/TF)* minimal sebesar 8,90;
5. Meningkatkan penerapan Kode Etik, Budaya Kepatuhan, dan Budaya Risiko serta memantau kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Bank kepada KPK;
6. Meningkatkan produktivitas karyawan dengan memberikan pelatihan, sosialisasi, kepada seluruh Satuan Kerja dan Unit Kerja Bank BPD Bali sehingga Risiko Kepatuhan dapat dihindari demi terwujudnya Budaya Kepatuhan di Bank BPD Bali;
7. Melakukan *Assesment CRA (Compliance Risk Assesment)* pada unit Operasional sehingga diperoleh gambaran tingkat dan tren eksposur risiko yang relevan dalam rangka mengelola risiko kepatuhan;
8. Melaporkan *Know Your Employee (KYE)* ke SKAI & AF setiap awal bulan.

Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepatuhan

Implementation of the Duties of the Compliance Function

Selama Tahun 2024 Direktur Kepatuhan telah melaksanakan fungsi kepatuhan yang termuat di dalam laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan yang mencakup:

1. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepatuhan:
 - a. Laporan Pengujian Rancangan Kepatuhan dan Hukum;
 - b. Laporan Pengujian Rancangan Keputusan Pengendalian Risiko dan Sistem dan Prosedur;
 - c. Laporan Pengujian Rancangan Keputusan Pemberian Kredit/ Bank Garansi;
 - d. Laporan Pengujian Rancangan Keputusan Penyelesaian Kredit Bermasalah;
 - e. Laporan Pengujian Rancangan Keputusan Penempatan Dana/ Transaksi Surat Berharga;
 - f. Laporan Pemantauan Kepatuhan Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Bank;
 - g. Laporan Pelaksanaan Penerapan Program APU dan PPT;
 - h. Laporan Pemantauan Pelaksanaan Perjanjian dan Komitmen dengan Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan, Pihak Ekstern, dan Pihak Intern;
 - i. Laporan Pemantauan Kepatuhan Pelaporan ke Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan;
 - j. Laporan Pengujian Rancangan Keputusan dengan *Dissenting Opinion* dari Direktur Kepatuhan;
 - k. Laporan Pelaksanaan Fungsi Sosialisasi Ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, Buku Pedoman Perusahaan dan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.

During 2024, the Director of Compliance will have implemented the compliance function contained in the Report on the Implementation of the Duties and Responsibilities of the Director of Compliance, which includes:

1. *Implementation of Compliance Function Duties and Responsibilities:*
 - a. *Reviewing the compliance and legal drafting report;*
 - b. *Audit report on the risk control and systems and procedures decision draft;*
 - c. *Audit report on the credit approval/bank guarantee decision draft;*
 - d. *Audit report on the draft decision on the settlement of problem loans;*
 - e. *Review Report on the Draft Fund Placement / Securities Transaction Decision;*
 - f. *Monitoring Report on Compliance with the Implementation of Banking Supervision Principles;*
 - g. *Report on the implementation of the APU and PPT programs;*
 - h. *Monitoring Report on the Implementation of Agreements and Commitments with Bank Indonesia / Financial Services Authority, External Parties and Internal Parties;*
 - i. *Compliance Monitoring Report on reporting to Bank Indonesia / Financial Services Authority;*
 - j. *A draft of the Decision Review Report with a dissenting opinion from the Director of Compliance;*
 - k. *Report on the implementation of the socialization function of Bank Indonesia/Financial Services Authority regulations, company policies and implementation of compliance functions.*



2. Risiko Kepatuhan yang dihadapi;
3. Potensi Risiko Kepatuhan yang diperkirakan akan dihadapi kedepan;
4. Mitigasi risiko kepatuhan yang telah dilaksanakan.

Selama Tahun 2024 Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan kajian kepatuhan sebanyak 204 (dua ratus empat) kajian yang terdiri dari Rancangan Keputusan Pengendalian Risiko dan Sistem & Perosedur sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) kajian, Rancangan Keputusan Pemberian Kredit/Bank Garansi sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) kajian, Rancangan Keputusan Penyelesaian Kredit Bermasalah tidak ada 0 (nihil) kajian, Rancangan Keputusan Penempatan Dana/Transaksi Surat Berharga sebanyak 15 (lima belas) kajian.

2. *Compliance risks faced;*
3. *Potential compliance risks expected to be faced in the future;*
4. *Compliance risk mitigation measures implemented.*

In 2024, the Compliance Department conducted 204 (two hundred and four) compliance studies, including 87 (eighty-seven) draft decisions on Risk Control and Systems & Procedures, 89 (eighty-nine) draft decisions on Loans/Bank Guarantees, 0 (zero) draft decisions on Resolution of Problem Loans, 15 (fifteen) draft decisions on Placement of Funds/Securities Transactions.

Penilaian Maturitas Kepatuhan Bank dan Penilaian Budaya Kepatuhan

Bank Compliance Maturity Assessment and Compliance Culture Assessment

Bank BPD Bali belum memiliki penilaian Maturitas Kepatuhan Bank dan Penilaian Budaya Kepatuhan dalam rangka mengukur tingkat kematangan dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan. Namun demikian, Bank BPD Bali berkomitmen terhadap penerapan kepatuhan dan internalisasi budaya di lingkungan Bank.

Bank BPD Bali has not yet conducted a Bank Compliance Maturity Assessment and a Compliance Culture Assessment in order to measure the level of maturity in the implementation of the compliance function. However, Bank BPD Bali is committed to the implementation of the compliance function and the internalization of the compliance culture within the bank.

Evaluasi Efektivitas Fungsi Kepatuhan

Evaluation of Compliance Function Effectiveness

Direksi melakukan penilaian atas kecukupan implementasi Fungsi Kepatuhan Bank BPD Bali secara berkala melalui Laporan Fungsi Kepatuhan yang secara semesteran juga disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan Laporan tersebut, secara ringkas, Direksi menilai bahwa efektivitas Fungsi kepatuhan di Bank BPD Bali telah berjalan dengan baik.

The Board of Directors evaluates the adequacy of the implementation of the Compliance Function of Bank BPD Bali on a regular basis through the Compliance Function Report, which is also submitted to the Financial Services Authority on a semi-annual basis. Based on the Report, the Board of Directors concludes that the effectiveness of Bank BPD Bali's Compliance Function meets has worked well.

SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO

Risk Management Work Unit

Lingkungan eksternal dan internal perbankan mengalami perkembangan pesat yang diikuti oleh semakin kompleksnya risiko bagi kegiatan usaha perbankan. Hal ini menunjukkan kebutuhan pentingnya penerapan tata kelola yang baik dengan peran manajemen risiko yang mampu menjalankan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko perbankan.

The external and internal environment in which banks operate has evolved rapidly, resulting in more complex risks associated with banking activities. This shows the importance of implementing good governance with the role of risk management capable of performing the functions of identification, measurement, monitoring and control of banking risks.

Piagam Manajemen Risiko

Risk Management Charter

Bank BPD Bali telah memiliki Buku Pedoman Manajemen Risiko yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi No. 0633/KEP/DIR/MRO/2017 tanggal 24 Nopember 2017 tentang Buku Pedoman Manajemen Risiko Bank BPD Bali. Penyusunan piagam ini selaras dengan POJK No. 18/POJK.03/2016 dan SEOJK No. 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum sebagai pedoman bagi Bank untuk membentuk satuan manajemen risiko.

Bank BPD Bali has a risk management charter, which was established by the Board of Directors' Resolution No. 0633/KEP/DIR/MRO/2017 dated November 24, 2017 on the Risk Management Charter of Bank BPD Bali. The preparation of this charter is in accordance with POJK No. 18/POJK.03/2016 and SEOJK No. 34/SEOJK.03/2016 concerning the implementation of risk management for commercial banks, as a guideline for banks to form a risk management unit.

Hal-hal penting yang diatur dalam Piagam Manajemen Risiko antara lain ruang lingkup penerapan manajemen risiko; pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris; kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko; proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko; organisasi dan fungsi manajemen risiko; dan pelaporan.

Important matters regulated in the Risk Management Charter include the scope of implementation of risk management, active supervision by the Board of Directors and the Board of Commissioners, risk management policies and procedures and determination of risk limits, risk identification, measurement, monitoring and control processes, risk management organization and functions, and reporting.

Tugas dan Tanggung Jawab

Duties and Responsibilities

Manajemen risiko Bank BPD Bali berfungsi sebagai alat pengendali risiko dan juga sebagai alat untuk mendukung kegiatan usaha Bank. Pengembangan manajemen risiko guna mendukung kegiatan usaha dapat dilakukan melalui pengembangan kemampuan kompetensi karyawan manajemen risiko dan unit bisnis.

Bank BPD Bali's risk management functions as a risk control tool and also as a tool in support of the bank's business activities. The development of risk management to support business activities can be done through the development of competency capabilities of risk management staff and business units.

Berpedoman pada Piagam Manajemen Risiko, tugas dan tanggung jawab Divisi Manajemen Risiko yang disesuaikan dengan tujuan usaha, kompleksitas usaha, dan kemampuan Bank BPD Bali adalah:

Based on the Risk Management Charter, the roles and responsibilities of the Risk Management Department, which are adapted to the business objectives, business complexity and capabilities of Bank BPD Bali, are as follows:

1. Pemantauan pelaksanaan strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh Direksi;
2. Pemantauan posisi risiko secara keseluruhan (*composite*), per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi Risiko dan limit yang ditetapkan serta melakukan *stress testing*;
3. Kaji ulang secara berkala terhadap proses manajemen risiko antara lain dilakukan berdasarkan temuan audit intern dan/atau perkembangan praktek-praktek manajemen risiko yang berlaku secara internasional;

1. *Oversee the implementation of risk management strategies approved by the Board of Directors;*
2. *Monitoring the overall risk position (composite), per type of risk and per type of functional activity, including monitoring compliance with established risk tolerance and limits and conducting stress tests;*
3. *Periodic reviews of the risk management process based on, among other things, internal audit findings and/or developments in international risk management practices;*

4. Pengkajian usulan aktivitas dan/atau produk baru berupa penilaian kemampuan Bank untuk melakukan aktivitas dan/atau produk baru dan kajian usulan perubahan sistem dan prosedur;
5. Evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur Risiko, bagi Bank yang menggunakan model untuk keperluan intern (*internal model*);
6. Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional (*risk-taking unit/satuan kerja bisnis*) dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki, antara lain memuat rekomendasi yang terkait dengan besaran atau maksimum eksposur Risiko yang wajib dipelihara oleh Bank; dan
7. Menyusun dan menyampaikan Laporan Profil Risiko yang merupakan gambaran secara menyeluruh atau besarnya potensi risiko yang melekat pada seluruh portofolio atau eksposur Bank kepada Direktur Utama atau Direktur Kepatuhan dan Komite Manajemen Risiko secara berkala atau paling sedikit secara triwulanan.

Struktur Organisasi Divisi Manajemen Risiko

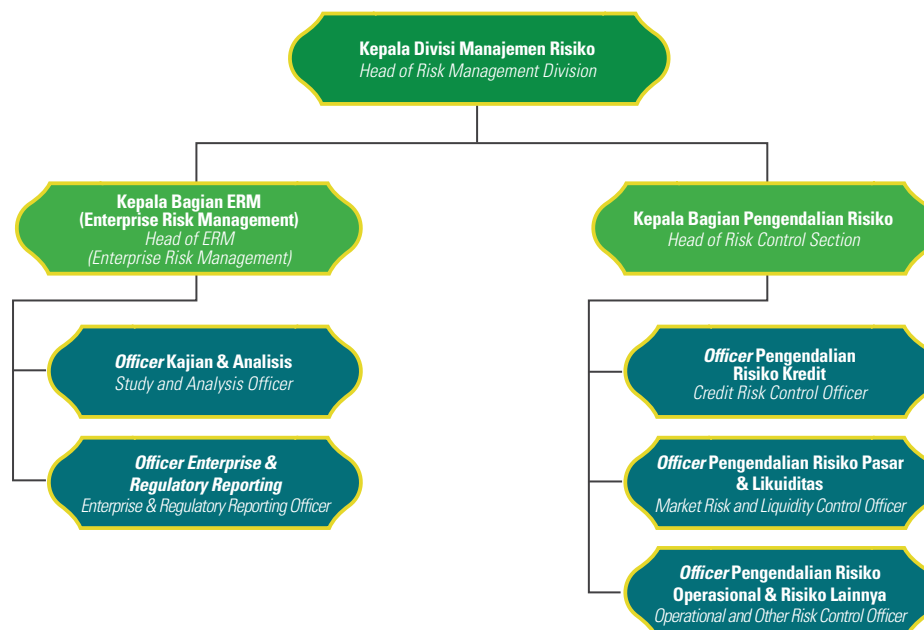
Risk Management Department Organizational Structure

Struktur organisasi Divisi Manajemen Risiko Bank BPD Bali disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas Bank serta risiko yang melekat pada Bank, agar Bank BPD Bali dapat menentukan susunan organisasi yang tepat dan sesuai dengan kondisi Bank, termasuk kemampuan keuangan dan sumber daya manusia.

Divisi Manajemen Risiko harus independen terhadap semua satuan kerja operasional dan terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern. Divisi Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Berikut ini adalah bagan susunan organisasi Divisi Manajemen Risiko:

The organizational structure of the Risk Management Department of Bank BPD Bali shall be adapted to the size and complexity of the Bank and the risks inherent in the Bank, allowing Bank BPD Bali to determine the appropriate organizational structure and according to the circumstances of the Bank, including financial capabilities and human resources.

The Risk Management Department must be independent of all operational work units and work units performing internal control functions. The Risk Management Department reports directly to the Director of Compliance. The organizational structure of the Risk Management Department is shown below:



Hubungan satuan kerja operasional dengan Divisi Manajemen Risiko diwujudkan dengan melalui penyampaian informasi eskposur risiko yang melekat pada satuan kerja yang bersangkutan kepada Divisi Manajemen Risiko secara berkala. Frekuensi penyampaian informasi eskposur risiko disesuaikan dengan karakteristik jenis risiko. Termasuk dalam satuan kerja operasional antara lain divisi yang membidangi perkreditan, tresuri, dan pendanaan.

The relationship between the operational business unit and the Risk Management Department is realized through the regular submission of risk exposure information specific to the respective business unit to the Risk Management Division. The frequency of submission of risk exposure information is adjusted to the characteristics of the type of risk. The operational work unit includes the credit, treasury and funding departments.

Profil Kepala Divisi Manajemen Risiko

Profile of the Head of Risk Management

Kepala Divisi Manajemen Risiko Bank BPD Bali dijabat oleh Ni Nyoman Sri Utari Tresna, S.E. yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi No. 0643/KEP/DIR/SDM/2023. Profil ringkas Kepala Divisi Manajemen Risiko beserta sertifikasi yang dimiliki dapat dilihat di Bab Profil Perusahaan dari Laporan Tahunan ini.

The Head of the Risk Management Department of Bank BPD Bali is Ni Nyoman Sri Utari Tresna, S.E., who was appointed on the basis of the Board of Directors' Resolution No. 0643/KEP/DIR/SDM/2023. A brief profile of the Head of Risk Management and the certifications she holds can be found in the Company Profile section of this Annual Report.

Kebijakan Manajemen Risiko

Risk Management Policy

Piagam Manajemen Risiko Bank BPD Bali menjelaskan kebijakan manajemen risiko ditetapkan antara lain dengan cara menyusun strategi manajemen risiko untuk memastikan bahwa Bank tetap mempertahankan eskposur risiko sesuai kebijakan dan prosedur intern Bank dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain dan dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keahlian di bidang manajemen risiko sesuai kompleksitas usaha Bank BPD Bali.

The Risk Management Charter of Bank BPD Bali explains that the risk management policy is established by, among other things, formulating risk management strategies to ensure that the bank manages risk exposure in accordance with the bank's internal policies and procedures, laws and regulations and other provisions, and is managed by human resources who have knowledge, experience and expertise in the field of risk management according to the complexity of Bank BPD Bali's business.

Kebijakan manajemen risiko serta penetapan limit risiko Bank BPD Bali paling sedikit memuat penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan; penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko; penentuan limit dan penetapan toleransi risiko; dan penetapan penilaian peringkat risiko.

Bank BPD Bali's risk management policy and risk limit setting include, at a minimum, the identification of risks associated with banking products and transactions, the determination of the use of measurement methods and risk management information systems, the determination of limits and the determination of risk tolerance, and the determination of risk rating assessments.

Prosedur Manajemen Risiko

Risk Management Process

Prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko Bank BPD Bali disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) terhadap risiko Bank. Tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) memperhatikan pengalaman yang dimiliki Bank dalam mengelola risiko. Prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko paling sedikit memuat akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas; pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau frekuensi yang lebih tinggi, sesuai jenis risiko, kebutuhan, dan perkembangan Bank.

*Bank BPD Bali's risk management procedure and determination of risk limits are adjusted to the level of risk to be taken (*risk appetite*) in relation to the Bank's risk. The level of risk to be taken (*risk appetite*) takes into account the Bank's experience in managing risk. The risk management process and the determination of risk limits shall include, as a minimum, clear accountability and levels of delegation of authority; conducting periodic reviews of the risk management process and the determination of risk limits at least 1 (one) time in 1 (one) year or higher frequency, depending on the type of risk, needs and development of the Bank.*

Selain itu, prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko juga memuat dokumentasi prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko secara memadai yaitu dokumentasi yang tertulis, lengkap, dan memudahkan untuk dilakukan jejak audit (*audit trail*) untuk keperluan pengendalian intern Bank. Penetapan limit risiko Bank BPD Bali mencakup limit secara keseluruhan, limit per jenis risiko, dan limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur risiko.

In addition, the risk management process and the determination of risk limits shall also include adequate documentation of the risk management process and the determination of risk limits, namely written, complete documentation and easily conducted audit trails for the purposes of the Bank's internal control. Bank BPD Bali's risk limit setting includes overall limits, limits per type of risk, and limits per specific functional activity that has risk exposure.

Pelaksanaan Tugas Manajemen Risiko

Implementation of Risk Management Duties

Pelaksanaan tugas Divisi Manajemen Risiko yang bertanggung jawab kepada Direksi selama tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

The implementation of the duties of the Risk Management Division, which reports directly to the Director in 2024, can be explained as follows:

Direksi dengan dukungan Divisi Manajemen Risiko telah menyusun kebijakan manajemen risiko dalam Kebijakan Umum Direksi Tahun 2024 dan Rencana Bisnis Bank Tahun 2024-2026 yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam beberapa Keputusan Direksi.

The Director, with the support of the Risk Management Division, has prepared a risk management policy in the General Policy 2024 of the Board of Directors and in the Bank's Business Plan 2024-2026, which has been approved by the Board of Commissioners, as stipulated in several decisions of the Board of Directors.

Direksi juga telah menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, *memonitor*, dan mengendalikan risiko yaitu antara lain Aplikasi *Loss Event Database* (LED) untuk mengidentifikasi Risiko Operasional, Aplikasi Profil Risiko Cabang untuk mengidentifikasi dan mengukur tingkat risiko yang ada di Kantor Cabang, Aplikasi *Stress Testing* Permodalan, dan Aplikasi *Key Risk Indicators* (KRI).

The Director has also prepared, defined and updated procedures and tools to identify, measure, monitor and control risks, including the Loss Event Database (LED) application to identify operational risks, the Branch Risk Profile application to identify and measure the level of risk in branches, the Capital Stress Testing application, and the Key Risk Indicators (KRI) application.

Selain itu, dilakukan penyusunan dan penetapan mekanisme persetujuan transaksi termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan yang tercantum pada BPP dan SOP masing-masing unit operasional. Pada SOP *Counterparty limit* telah diatur kewenangan memutuskan dilakukan oleh Komite *Counterparty limit* yang merupakan keputusan mutlak secara tertulis yang dituangkan dalam lembar disposisi & keputusan oleh min 3 (tiga) Direksi termasuk Direktur Utama.

In addition, the preparation and determination of the mechanisms for the approval of transactions, including those exceeding the limits and authorities for each level of the office, listed in the BPP and the SOP of each operational unit are carried out. The Counterparty Limit SOP regulates the authority to set counterparty limits per job level.

Direksi telah mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi dan kerangka Manajemen Risiko pada saat penilaian Profil Risiko Bank dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank (*Risk Based Bank Rating*) melalui keputusan Komite Manajemen Risiko dengan memperhatikan kegiatan usaha bank, eksposur risiko dan juga profil risiko yang ditetapkan melalui beberapa Keputusan Direksi.

The Directorate has evaluated and/or updated the risk management policies, strategies and frameworks during the assessment of the Bank's risk profile and the Bank Health Level Report (Risk Based Bank Rating) by the decision of the Risk Management Committee, taking into account the Bank's business activities, risk exposure and also the risk profile established by several decisions of the Board of Directors.

Direksi telah melaksanakan langkah-langkah perbaikan atas temuan SKAI dan Anti *Fraud* yang dimonitor melalui rapat evaluasi yang dihadiri oleh seluruh Direksi dan Kepala Divisi dan Kepala Cabang. Terhadap temuan hasil audit SKAI dan Anti *Fraud*, Direksi telah meminta Divisi dan Kantor Cabang untuk melakukan langkah perbaikan dan tindak lanjut atas temuan audit.

The Directorate has implemented corrective actions for the findings of SKAI and Anti-Fraud, which are monitored through evaluation meetings attended by all Directors and Division and Branch Managers. Regarding the findings of SKAI and Anti-Fraud, the Board of Directors has requested the Division and Branch Office to take corrective measures and follow up on the audit findings.

Pengelolaan dan Pengungkapan Risiko

Risk Management and Disclosure

Piagam Manajemen Risiko Bank BPD Bali juga mengatur penerapan manajemen risiko untuk masing-masing risiko yang secara ringkas dijelaskan pada tabel berikut:

The Bank BPD Bali Risk Management Charter also governs the implementation of risk management for each risk, which are briefly explained in the following table:

Jenis Risiko Type of Risks	Definisi Risiko Risk Definition	Upaya Mitigasi Risiko Risk Mitigation Efforts
Risiko Kredit	Risiko kerugian akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya. Termasuk dalam risiko kredit yaitu risiko kredit akibat dari kegagalan debitur, terkonsentrasinya penyediaan dana (risiko konsentrasi kredit), risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (<i>counterparty credit risk</i>), risiko kredit akibat kegagalan <i>settlement</i> (<i>settlement risk</i>), dan risiko kredit akibat <i>country risk</i> .	- Memastikan bahwa satuan kerja perkreditan dan satuan kerja lainnya yang melakukan transaksi yang terekspos Risiko Kredit telah berfungsi secara memadai dan eksposur Risiko Kredit dijaga tetap konsisten dengan <i>limit</i> yang ditetapkan serta memenuhi standar kehati-hatian. - Mitigasi Risiko, pengelolaan posisi dan Risiko portofolio secara aktif, penetapan target batasan Risiko konsentrasi dalam rencana tahunan Bank, penetapan tingkat kewenangan dalam proses persetujuan penyediaan dana, dan analisis konsentrasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. - Memiliki sistem yang efektif untuk mendeteksi kredit bermasalah. Selain itu, Bank memisahkan fungsi penyelesaian kredit bermasalah tersebut dengan fungsi yang memutuskan penyaluran kredit.
Credit Risk	<i>The risk of loss resulting from the failure of another party to meet its obligations. Credit risk includes credit risk due to debtor default, credit concentration risk, counterparty credit risk, settlement risk and country risk.</i>	<i>Ensure that credit and other units that execute transactions exposed to credit risk function appropriately and that credit risk exposure is maintained within established limits and in compliance with regulatory standards.</i> <i>Risk mitigation, active management of positions and portfolio risk, setting target limits for concentration risk in the Bank's annual plan, setting the level of authority in the process of approving the provision of funds, and periodic concentration analysis at least 1 (one) time in 1 (one) year.</i> <i>Have an effective system for identifying problem loans. In addition, the bank separates the function of resolving problem loans from deciding on credit allocation.</i>
Risiko Pasar	Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga <i>option</i> .	- Rekonsiliasi posisi yang dikelola dan dicatat dalam sistem informasi manajemen; dan pengendalian terhadap akurasi laba dan rugi serta kepatuhan pada ketentuan termasuk standar akuntansi. - Melakukan kaji ulang secara berkala terhadap kondisi, kredibilitas, dan kemampuan membayar kembali penerbit surat berharga dan obligasi. Kaji ulang tersebut harus didokumentasikan dan dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan. - Terhadap surat berharga dan obligasi yang terdaftar atau diperdagangkan di pasar modal, dilakukan pemantauan secara ketat atas credit spread surat berharga dan obligasi tersebut
Market Risk	<i>Exposure of balance sheet positions and administrative accounts, including derivative transactions, to general changes in market conditions, including option pricing risk.</i>	<i>The reconciliation of the positions managed and recorded in the management information system and the control of the accuracy of the profit and loss statement and the compliance with the regulations, including the accounting standards.</i> <i>Conduct periodic reviews of the condition, credibility and repayment ability of issuers of securities and bonds. The review must be documented and conducted at least every 6 (six) months.</i> <i>For securities and bonds registered or traded on the capital market, the credit spread of the securities and bonds will be closely monitored.</i>
Risiko Likuiditas	Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari <i>asset</i> likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.	Strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas harian, pengelolaan posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas intra grup, pengelolaan aset likuid yang berkualitas tinggi, dan rencana pendanaan darurat.
Liquidity Risk	<i>The risk arising from the Bank's inability to meet its maturing obligations from cash flow funding sources and/or from high quality liquid assets that can be pledged without disrupting the Bank's operations and financial position.</i>	<i>Funding strategy, daily liquidity position management and liquidity risk, intra-group liquidity position management and liquidity risk, management of high quality liquid assets and contingency funding plan.</i>



Jenis Risiko Type of Risks	Definisi Risiko Risk Definition	Upaya Mitigasi Risiko Risk Mitigation Efforts
Risiko Operasional	Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.	- Mengembangkan program untuk memitigasi Risiko Operasional antara lain pengamanan proses teknologi informasi dan asuransi. - Memastikan tingkat keamanan dari pemrosesan data elektronik. - Kaji ulang secara berkala terhadap prosedur, dokumentasi, sistem pemrosesan data, rencana kontinjensi, dan praktek operasional lainnya guna mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan manusia.
Operational Risk	Risks arising from inadequate and/or failed internal processes, human error, system failures and/or external events that affect the Bank's operations.	- Develop programs to mitigate operational risks, including securing information technology processes and insurance. - Ensure the level of security of electronic data processing. - Conduct periodic reviews of procedures, documentation, data processing systems, contingency plans, and other operational practices to reduce the possibility of human error.
Risiko Hukum	Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.	- Kaji ulang secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian antara Bank dengan pihak lain, antara lain dengan cara melakukan penilaian kembali terhadap efektivitas proses <i>enforceability</i> guna mengecek validitas hak dalam kontrak dan perjanjian tersebut. - Penerbitan garansi seperti <i>netting agreement</i>, <i>collateral pledges</i>, dan <i>margin calls</i> maka hal tersebut harus didukung dengan dokumen hukum yang efektif dan <i>enforceable</i>.
Legal Risk	Risks arising from litigation and/or weaknesses in legal aspects.	- Periodically review contracts and agreements between the Bank and other parties, including reassessing the effectiveness of the <i>enforceability</i> process to verify the validity of the rights in the contracts and agreements. - Issuance of guarantees such as <i>netting agreements</i>, <i>collateral pledges</i> and <i>margin calls</i> must be supported by valid and enforceable legal documents.
Risiko Strategik	Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.	Memiliki sistem dan pengendalian untuk memantau kinerja termasuk kinerja keuangan dengan cara membandingkan hasil aktual dengan hasil yang diharapkan untuk memastikan bahwa Risiko yang diambil masih dalam batas toleransi dan melaporkan deviasi yang signifikan kepada Direksi.
Strategic Risk	Risk due to inaccuracy in making and/or implementing a strategic decision and failure to anticipate changes in the business environment.	Have a system and control in place to monitor performance, including financial performance, by comparing the actual results with the expected results to ensure that the risk taken is still within the tolerance limits and to report significant deviations to the Board of Directors.
Risiko Kepatuhan	Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.	Memiliki Satuan Kerja Kepatuhan yang berada di bawah Direktorat Kepatuhan dan menempatkan <i>Officer</i> Kepatuhan di Kantor Cabang untuk memastikan proses persetujuan perkreditan telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank juga memastikan kebijakan dan prosedur Bank telah sesuai dengan standar yang berlaku umum, ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki mekanisme pemantauan dan pengendalian Risiko Kepatuhan.
Compliance Risk	Risks arising from the Bank's failure to comply with and/or implement laws and regulations.	Have a Compliance Work Unit under the Compliance Directorate and placing Compliance Officers in Branch Offices to ensure that the credit approval process has implemented the principle of prudence and is in accordance with applicable provisions. The Bank also ensures that the Bank's policies and procedures are in accordance with generally applicable standards, provisions and/or applicable laws and regulations and has a Compliance Risk monitoring and control mechanism.
Risiko Reputasi	Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank	- Menindaklanjuti dan mengatasi adanya keluhan nasabah dan gugatan hukum yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Reputasi. - Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan untuk pemberdayaan masyarakat dan komunikasi atau edukasi secara rutin kepada pemangku kepentingan.
Reputational Risk	Risk of loss of stakeholder confidence due to negative perceptions of the bank.	- Follow-up and resolution of customer complaints and lawsuits that may increase the bank's exposure to reputational risk. - Implementing corporate social responsibility to empower the community and communicate or educate stakeholders on a regular basis.

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Review of the Effectiveness of the Risk Management System

Dalam hal kecukupan kebijakan, prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko, Bank BPD Bali telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai, melekat pada BPP dan SOP masing-masing unit kerja antara lain:

Concerning the adequacy of policies, risk management procedures and determination of risk limits, Bank BPD Bali had adequate policies, procedures and determination of risk limits, which were attached to the BPP and SOP of each work unit, including the following

No.	Divisi Division	Jumlah Ketentuan Number of regulation	
		BPP	SOP
1	Divisi Kepatuhan Compliance Division	4	4
2	Divisi Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary Division	2	3
3	Divisi Dana dan Jasa Fund and Services Division	1	34
4	Divisi Pengembangan Digital Digital Development Division	0	0
5	Divisi Umum & Aset General & Asset Division	5	5
6	Divisi Teknologi Informasi Information Technology Division	1	28
7	Divisi Operasional, Keuangan dan Akuntansi Operational, Finance and Accounting Division	5	11
8	Divisi Sumber Daya Manusia Human Resources Division	1	10
9	Divisi Manajemen Risiko Risk Management Division	1	14
10	Satuan Kerja Audit Intern dan Anti Fraud Internal Audit and Anti-Fraud Work Unit	1	2
11	Divisi Perencanaan Strategis Strategic Planning Division	2	7
12	Divisi Treasury Treasury Division	1	17
13	Divisi Kredit Ritel dan Konsumer Retail and Consumer Credit Division	0	12
14	Divisi Kredit Korporasi Corporate Credit Division	3	1
Jumlah Total		27	148

Terkait dengan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko Bank BPD Bali antara lain dapat dilihat dari

- Kajian risiko kredit dari sisi kualitas kredit, yaitu NPL dan KAP dari masing-masing sektor ekonomi, portofolio, dan sumber dana, yang dapat digunakan sebagai sumber informasi potensi risiko kredit secara *bank wide* setiap bulan, untuk melakukan identifikasi terhadap konsentrasi risiko kredit.

Regarding the adequacy of identification, measurement, monitoring and control of risk processes and risk management information system of Bank BPD Bali, among others, can be seen from

- *Credit risk assessment in terms of credit quality, i.e. NPLs and KAPs from each economic sector, portfolio and funding source, which can be used as a source of information on potential credit risk throughout the Bank on a monthly basis to identify the concentration of credit risk.*



- Pembentukan CKKE secara bertahap sesuai dengan kemampuan Laba Tahun Berjalan mengacu pada Rencana Bisnis Bank Tahun 2024-2026;
- Kepemilikan sistem informasi manajemen risiko pasar melalui sistem *treasury* untuk kedepannya dapat mengukur sensitivitas risiko pasar, sehingga Bank masih tetap dapat melakukan proses manajemen risiko pasar secara memadai;
- Penggunaan Sistem Aplikasi *Treasury* untuk transaksi *treasury*, yaitu *money market*, *fix income* dan *repo/reverse repo*. Dengan sistem tersebut maka transaksi dilakukan secara STP (*Straight Through Processing*), pendapatan Bank dari transaksi *treasury* dapat dilihat secara harian, Divisi Manajemen Risiko dapat melakukan pemantauan secara *real time* terhadap penggunaan limit transaksi, dan Divisi Operasional, Keuangan dan Akuntansi dapat melakukan penyelesaian transaksi segera.
- Kepemilikan aplikasi Profil Risiko Kantor Pusat, Profil Risiko Kantor Cabang dan KRI sebagai alat ukur dalam penerapan manajemen risiko yang memadai.

Selanjutnya, Bank BPD Bali meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko dengan memenuhi ketentuan Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK Nomor 28/SEOJK.03/2022 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum. Pencapaian Bank dalam penerapan manajemen risiko ditandai dengan berhasilnya program sertifikasi terkait manajemen risiko di Bank, dengan hasil sebagai berikut:

- *The gradual formation of CKKE in accordance with the ability of the current year's profit in relation to the Bank's business plan for 2024-2026;*
- *Possessing a market risk management information system through the treasury system for the future can measure the sensitivity of market risk, so that the Bank can continue to carry out the market risk management process appropriately;*
- *Use of the Treasury Application System for treasury transactions, namely money market, fixed income and repo/reverse repo. With this system, transactions are executed using STP (Straight Through Processing), Bank income from treasury transactions can be viewed daily, the Risk Management Division can monitor the use of transaction limits in real time, and the Financial, Operations, Accounting Division can settle transactions immediately.*
- *Ownership of the Head Office Risk Profile application, Branch Office Risk Profile and KRI as a measurement tool to implement appropriate risk management.*

In addition, Bank BPD Bali is improving the quality of risk management implementation by fulfilling the provisions of Risk Management Certification for Human Resources of Commercial Banks as stipulated in OJK Circular Letter No. 28/SEOJK.03/2022 on Risk Management Certification for Human Resources of Commercial Banks. The Bank's achievements in risk management implementation are characterized by the success of the Bank's risk management certification program with the following results:

No	Jenis Sertifikasi Certification Type	Jumlah Personil Number of employees
1	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 1 <i>Risk Management Certification Level 1</i>	129
2	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 2 <i>Risk Management Certification Level 2</i>	40
3	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 3 <i>Risk Management Certification Level 3</i>	
4	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 <i>Risk Management Certification Level 4</i>	146
5	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 <i>Risk Management Certification Level 5</i>	103
6	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 <i>Risk Management Certification Level 6</i>	18
7	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 <i>Risk Management Certification Level 7</i>	9
Jumlah		445

Penilaian Risiko Tahun 2024

Risk Assessment in 2024

Berdasarkan hasil penilaian sendiri dan penilaian OJK, Tingkat Kesehatan Bank BPD Bali posisi Desember 2024 dengan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (TKB) Posisi Semester II Tahun 2024 PT BPD Bali, berada pada peringkat PK-2, dimana didalamnya terdapat penilaian Profil Risiko yaitu pada peringkat "LowMod" dengan Risiko Inherent pada peringkat "LowMod" dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) pada peringkat "Satisfactory" sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini:

Based on the results of the Self-Assessment and OJK assessment, the Health Level of Bank BPD Bali in December 2024 with the Bank Health Level Assessment (TKB) in Term II of 2024 PT BPD Bali, is ranked PK-2, which includes a Risk Profile Evaluation, namely at the "LowMod" rank with Internal Risk at the "LowMod" rank and Quality of Risk Management Execution (KPMR) at the "Satisfactory" rank as explained in the following table:

No	Jenis Risiko Type of Risks	Inherent Risk	KPMR	Komposit Composite
1	Risiko Kredit Credit Risk	LowMod 2	Satisfactory 2	LowMod 2
2	Risiko Pasar Market Risk	LowMod 2	Satisfactory 2	LowMod 2
3	Risiko Likuiditas Liquidity Risk	LowMod 2	Satisfactory 2	LowMod 2
4	Risiko Operasional Operational Risk	Moderate 3	Satisfactory 2	LowMod 2
5	Risiko Hukum Legal Risk	LowMod 2	Satisfactory 2	LowMod 2
6	Risiko Strategik Strategic Risk	LowMod 2	Satisfactory 2	LowMod 2
7	Risiko Kepatuhan Compliance Risk	LowMod 2	Satisfactory 2	LowMod 2
8	Risiko Reputasi Reputational Risk	LowMod 2	Satisfactory 2	LowMod 2
Peringkat Rasio Agregat Aggregate Ratio Rating		LowMod 2	Satisfactory 2	LowMod 2

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Komite Audit Atas kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Statement of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners or the Audit Committee on the Adequacy of the Risk Management System

Dewan Komisaris dan Direksi memiliki tanggung jawab atas penerapan manajemen risiko di lingkungan Bank BPD Bali. Selain menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif, termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko baik Risiko secara keseluruhan (*composite*), per jenis Risiko, maupun per aktivitas fungsional, Direksi juga bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan. Sementara itu, Dewan Komisaris berwenang dan bertanggung jawab menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko.

The Board of Commissioners and the Board of Directors are responsible for the implementation of risk management within Bank BPD Bali. In addition to the preparation of written and comprehensive risk management policies and strategies, including the determination and approval of risk limits both for overall risk (*composite*), per type of risk and per functional activity, the Board of Directors is also responsible for the implementation of risk management policies and risk exposures incurred by the Bank as a whole. Meanwhile, the Board of Commissioners has the authority and responsibility to approve and evaluate risk management policies.



Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris meliputi antara lain memahami sifat dan tingkat risiko yang dihadapi Bank, menilai kecukupan kualitas manajemen risiko, dan mengaitkan tingkat risiko dengan kecukupan modal yang dimiliki Bank. Penilaian kecukupan modal meliputi antara lain proses yang mengkaitkan tingkat risiko dengan tingkat kecukupan modal Bank dengan mempertimbangkan strategi dan rencana bisnis Bank.

Kecukupan sistem manajemen risiko Bank BPD Bali telah berjalan dengan memadai selama tahun 2024 berdasarkan penilaian Dewan Komisaris dan Direksi terhadap sistem manajemen risiko.

Active oversight by the Board of Directors and the Board of Commissioners includes, but is not limited to, understanding the nature and extent of the Bank's risk exposures, assessing the adequacy of the quality of risk management, and linking the level of risk to the adequacy of the Bank's capital. The assessment of capital adequacy includes, inter alia, the process of linking the level of risk to the Bank's capital adequacy by taking into account the Bank's strategy and business plan.

The adequacy of Bank BPD Bali's risk management system has been adequate during 2024 based on the assessment of the risk management system by the Board of Commissioners and the Board of Directors.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Internal Control System

Pengendalian intern merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen bank secara berkesinambungan antara lain dalam rangka mengurangi dampak keuangan atau dampak kerugian, penyimpangan termasuk *fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya. Terkait dengan hal tersebut, Bank BPD Bali telah memiliki sistem pengendalian intern untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional Bank pada seluruh jenjang organisasi Bank.

Internal control is a supervisory mechanism established by the Bank's management on an ongoing basis in order to, among other things, reduce financial impact or losses, deviations including fraud, and violations of regulatory aspects, and to increase organizational effectiveness and cost efficiency. In this regard, Bank BPD Bali has established an internal control system to support the implementation of the business and operational activities of the Bank at all levels of the organization of the Bank.

Pedoman Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System Guidelines

Pedoman Sistem pengendalian Internal Bank BPD Bali berpedoman pada Surat edaran Otoritas Jasa Keuangan No.35/SEOJK.03/2017 tentang pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum tanggal 07 Juli 2017.

Bank BPD Bali's internal control system guidelines are guided by the Financial Services Authority's Circular Letter No. 35/SEOJK.03/2017 on the Internal Control System Standards Guidelines for Commercial Banks, dated July 7, 2017.

Sistem Pengendalian Intern yang dimaksud dalam POJK tersebut mencakup 5 (lima) komponen utama yang saling berkaitan yaitu: pengawasan oleh manajemen dan budaya pengendalian; identifikasi dan penilaian risiko; kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi; sistem akuntansi, Informasi dan komunikasi; serta kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan.

The internal control system referred to in the POJK includes 5 (five) main components that are interrelated, namely: management oversight and control culture, risk identification and assessment, control activities and segregation of functions, accounting systems, information and communication, and monitoring activities and corrective actions for deviations.

Sejalan dengan ketentuan OJK tersebut di atas, berdasarkan Piagam Manajemen Risiko Bank BPD Bali yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi No. 0633/KEP/DIR/MRO/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Manajemen Risiko, Bank BPD Bali telah memiliki kebijakan Sistem Pengendalian Intern. Pelaksanaan sistem pengendalian intern paling sedikit mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi.

In accordance with the above provisions of the OJK, Bank BPD Bali has an internal control system policy based on the Bank BPD Bali Risk Management Charter established by the Board of Directors Resolution No. 0633/KEP/DIR/MRO/2017 dated July 24, 2017 on the Company Guidelines (BPP) for Risk Management. The implementation of the Internal Control System is, at a minimum, able to detect weaknesses and deviations that occur in a timely manner.

Sistem pengendalian intern Bank BPD Bali memastikan:

- kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan serta kebijakan atau ketentuan intern Bank;
- tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan.
- efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional, yang diperlukan untuk melindungi aset dan sumber daya Bank lainnya dari Risiko terkait; dan
- efektivitas budaya Risiko (*risk culture*) pada organisasi Bank secara menyeluruh, dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada pada Bank secara berkesinambungan.

The Internal Control System of Bank BPD Bali ensures that

- Compliance with regulations and laws as well as the Bank's internal policies or regulations;*
- The availability of complete, accurate, relevant and timely financial and management information required to make appropriate and accountable decisions and to report to interested parties.*
- The effectiveness and efficiency of operational activities necessary to protect the Bank's assets and other resources from related risks; and*
- The effectiveness of the risk culture throughout the Bank's organization to identify weaknesses and deviations earlier and to reassess the adequacy of the Bank's existing policies and procedures on an ongoing basis.*

Sistem Pengendalian Intern dalam Penerapan Manajemen Risiko

Internal Control System in the Implementation of Risk Management

Sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko Bank BPD Bali paling sedikit mencakup:

- Kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank;
- Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko;
- Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian;
- Susunan organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha Bank;
- Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;
- Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan;
- Kaji ulang yang efektif, independen, dan obyektif terhadap prosedur penilaian
- Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi Manajemen
- Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan, dan temuan audit, serta tanggapan pengurus Bank berdasarkan hasil audit; dan
- Verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan Bank yang bersifat material dan tindakan pengurus Bank untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.

Penilaian terhadap sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko wajib dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern & Anti Fraud. Dalam rangka pelaksanaan penilaian terhadap sistem pengendalian internal dalam penerapan manajemen risiko mengacu pada BPP Audit Berbasis Risiko dan BPP Audit Intern TI.

The internal control system in the implementation of risk management of Bank BPD Bali shall include at least the following

- The suitability of the internal control system to the type and level of risk inherent in the business activities of the Bank;*
- Determination of authority and responsibility for monitoring compliance with risk management policies and procedures, and setting risk limits;*
- Establishing reporting lines and clear segregation of functions from operational work units to work units performing control functions*
- An organizational structure that clearly describes the bank's business activities;*
- Accurate and timely financial and operational reporting;*
- Adequacy of procedures to ensure compliance by the Bank;*
- Effective, independent and objective review of valuation procedures*
- Adequate testing and review of management information systems*
- Complete and adequate documentation of operational procedures, scope, and audit findings, as well as management's responses to audit findings; and*
- Periodic and ongoing verification and review of the Bank's handling of material weaknesses and management's actions to correct any deviations that occur.*

The assessment of the internal control system in the implementation of risk management shall be carried out by the Internal Audit & Anti-Fraud Department. In order to carry out the assessment of the internal control system in the implementation of risk management, it refers to BPP Risk-Based Audit and BPP IT Internal Audit.

Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Kesesuaian dengan COSO – Internal Control Framework

Implementation of Internal Control System and Compliance with COSO - Internal Control Framework

Bank BPD Bali juga mengadopsi sistem pengendalian Intern yang mengacu pada COSO (*Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) – *Internal Control Integrated Framework* dalam menyusun kerangka kerja pengendalian intern yang memastikan kecukupan pengendalian operasional maupun finansial, pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Sistem pengendalian intern Bank telah sesuai dengan *Internal Control Integrated Framework* yang dikembangkan oleh *the Committee of Sponsoring organization of the treadway Commission* (COSO). Tujuan pengendalian intern berdasarkan COSO mencakup tujuan operasional, tujuan pelaporan dan tujuan kepatuhan.

Bank BPD Bali also adopts an internal control system that refers to COSO (Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) - Internal Control Integrated Framework in the establishment of an internal control framework that ensures the adequacy of operational and financial controls, financial reporting, operational effectiveness and efficiency, and compliance with applicable laws and regulations.

The Internal Control Integrated Framework developed by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) is the basis for the Bank's internal control system. Internal control objectives based on COSO include operational, reporting and compliance objectives.

Tujuan operasional berkaitan dengan efektivitas efisiensi operasi. Tujuan pelaporan berkaitan dengan kepentingan pelaporan keuangan yang memenuhi kriteria andal, tepat waktu, transparan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh regulator maupun Bank. Sedangkan tujuan kepatuhan berkaitan dengan kepatuhan Bank terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

COSO menjelaskan bahwa pengendalian internal merupakan sistem atau proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Direksi, manajemen serta pekerja dalam sebuah perusahaan, untuk menyediakan jaminan yang memadai demi tercapainya tujuan pengendalian. Menurut COSO, unsur unsur pengendalian intern meliputi komponen-komponen Lingkungan Pengendalian; Penilaian Risiko; Kegiatan Pengendalian; Informasi dan Komunikasi; dan Kegiatan Pemantauan.

Selanjutnya, penerapan Sistem Pengendalian Intern Bank BPD Bali dan kesesuaian dengan COSO – *Internal Control Framework* dapat dilihat bagian berikut ini terkait dengan evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Bank.

Operational objectives relate to the effectiveness and efficiency of operations. Reporting objectives relate to the interest in financial reporting that meets the criteria of reliability, timeliness, transparency and other requirements set by regulators and the Bank. Compliance objectives relate to the bank's compliance with laws and regulations.

COSO explains that internal control is a system or process implemented by an entity's board of directors, management, and employees to provide reasonable assurance of achieving control objectives. According to COSO, the elements of internal control include the control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring activities.

Furthermore, the implementation of the internal control system of Bank BPD Bali and its compliance with the COSO - Internal Control Framework can be seen in the following section related to the evaluation of the implementation of the Bank's internal control system.

Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Internal

Evaluation of Internal Control Implementation

SKAI & *Anti-Fraud* telah melakukan evaluasi atas sistem pengendalian intern Bank BPD Bali untuk tahun buku 2024. Hasil evaluasi menunjukkan sistem pengendalian intern Bank yang “Memadai” dengan mempertimbangkan 5 unsur penilaian ditunjukkan tabel berikut ini sekaligus menunjukkan kesesuaiannya dengan COSO.

SKAI & Anti-Fraud has conducted an evaluation of the internal control system of Bank BPD Bali for the financial year 2024. The evaluation results show that the Bank's Internal Control System is "Adequate", considering the 5 assessment elements shown in the following table, while also showing that it conforms to COSO.

Unsur Penilaian Assessment Elements	Penjelasan Explanation
Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian <i>Management Oversight and Control Culture</i>	Kegiatan manajemen telah memenuhi tanggungjawabnya yaitu: - Memastikan pelaksanaan pengendalian intern terhadap kegiatan operasional dan kecukupan organisasi; - Berupaya meningkatkan etika kerja dan integritas serta menciptakan suatu kultur organisasi yang menekankan kepada seluruh karyawan mengenai pentingnya pengendalian intern; - Memelihara suatu struktur organisasi yang mencerminkan kewenangan, tanggung jawab dan hubungan pelaporan yang jelas; - Mampu mengelola sumber daya manusia yang ada di bawah pengawasannya. <i>The management activities have fulfilled their responsibilities, which are</i> - Ensure the implementation of internal control over operational activities and organizational adequacy; - Striving to improve work ethics and integrity and create an organizational culture that emphasizes the importance of internal control to all employees; - Maintain an organizational structure that reflects clear lines of authority, responsibility and reporting; - The ability to manage human resources under its supervision.
Identifikasi dan Penilaian Risiko <i>Risk Identification and Assessment</i>	Manajemen telah melakukan kegiatan sebagai berikut: - Mengidentifikasi jenis risiko yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan operasional; - Mengidentifikasi, menganalisa dan menilai risiko yang dihadapi Bank. <i>Management has performed the following activities:</i> - Identified the types of risks faced in carrying out operational activities; - Identification, analysis and evaluation of the risks faced by the Bank.



Unsur Penilaian Assessment Elements	Penjelasan Explanation
Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi <i>Control Activities and Separation of Functions</i>	Manajemen telah melakukan pengendalian risiko dan pemisahan fungsi dengan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain: 1. Menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur telah secara konsisten dipatuhi; 2. Meliputi kebijakan, prosedur dan praktek yang memberikan keyakinan pejabat dan pegawai Bank bahwa arahan Dekom dan Direksi telah dilaksanakan secara efektif; 3. Adanya pemisahan fungsi dan menghindari pemberian wewenang dan tanggung jawab yang dapat menimbulkan berbagai benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>); 4. Menempatkan pegawainya sedemikian rupa sehingga setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya (<i>Four-Eyes Principle</i>). <i>Management has implemented risk control and segregation of duties by considering several things, including:</i> 1. <i>Establishing control policies and procedures and early verification processes to ensure that policies and procedures are consistently followed;</i> 2. <i>Including policies, procedures and practices that provide assurance to Bank officers and employees that the directives of the Board of Commissioners and the Board of Directors have been effectively implemented;</i> 3. <i>Separation of functions and avoidance of delegations of authority and responsibility that may give rise to various conflicts of interest;</i> 4. <i>Placement of employees in such a way that no one in his position has the opportunity to make and conceal mistakes or deviations in the performance of his duties (four-eyes principle).</i>
Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi <i>Accounting, Information and Communication Systems</i>	Pelaksanaan sistem akuntansi, informasi dan komunikasi yang telah dilakukan antara lain: 1. Mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing; 2. Memastikan bahwa proses akuntansi telah berjalan dengan baik, akurat, konsisten dan sesuai dengan norma-norma akuntansi yang berlaku 3. Laporan keuangan telah mencerminkan kegiatan usaha Bank dan kondisi keuangan, serta penerapan manajemen risiko 4. Mampu memberikan komunikasi yang efektif dan informatif kepada pihak internal (seluruh pejabat/pegawai Bank) maupun eksternal (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan nasabah) atau pihak yang berkepentingan. <i>The implementation of accounting, information and communication systems that have been carried out include the following:</i> 1. <i>Identifying problems that may arise and using them as a means of exchanging information to perform tasks in accordance with their respective responsibilities;</i> 2. <i>Ensuring that the accounting process is performed well, accurately, consistently and in accordance with applicable accounting standards.</i> 3. <i>The financial reports have reflected the business activities and financial conditions of the Bank, as well as the implementation of risk management.</i> 4. <i>Ability to provide effective and informative communication to internal parties (all Bank officials/employees) and external parties (Bank Indonesia, Financial Services Authority and customers) or interested parties.</i>
Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan/Kelemahan <i>Monitoring and Corrective Action for Deviations/Weaknesses</i>	Kegiatan yang telah dilakukan manajemen terhadap pemantauan dan koreksi penyimpangan adalah sebagai berikut: 1. Melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan sistem pengendalian intern dan atas kelemahan sistem pengendalian intern yang ditemukan telah dilakukan tindakan koreksi atau penyempurnaan; 2. Melaporkan tindak lanjut yang dilakukan oleh <i>auditee</i> terhadap setiap adanya kelemahan dalam pengendalian intern yang harus segera diselesaikan. Pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal maupun eksternal sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2024 yaitu dari 983 (sembilan ratus delapan puluh tiga) temuan, telah ditindaklanjuti sebanyak 978 (sembilan ratus tujuh puluh delapan) temuan atau 99,49%, dan telah melampaui target 80% tuntas. <i>Actions taken by management to monitor and correct deviations include</i> 1. <i>Ongoing monitoring of the effectiveness of the entire internal control system, and taking corrective or remedial action to address identified weaknesses in the internal control system;</i> 2. <i>Reporting on the follow-up actions taken by the auditee for internal control weaknesses that require immediate remediation.</i> <i>As of December 31, 2024, out of 983 (nine hundred and eighty-three) findings, 978 (nine hundred and seventy-eight) findings or 99.49% have been followed up, exceeding the target of 80% completion.</i>

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan komisaris Atas Kecukupan Sistem Pengadilarn Intern *Statement by the Board of Directors and/or the Board of Commissioners on the Adequacy of the Internal Control System*

Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern secara umum, termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian intern tersebut, demi terselenggaranya sistem pengendalian intern yang handal dan efektif.

Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa sistem pengendalian intern Bank BPD Bali telah memadai untuk tahun buku 2024. Hal ini didasarkan pada hasil penilaian Sistem Pengendalian Internal oleh SKAI & Anti Fraud di atas yang dinyatakan "Memadai" yang tercermin dari 5 (lima) unsur penilaian yang dijelaskan pada evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Internal.

The Board of Commissioners is responsible for the supervision of the implementation of internal control in general, including the Board of Directors' policies that establish such internal control, in order to have a reliable and effective internal control system.

The Board of Commissioners and the Board of Directors declare that the internal control system of Bank BPD Bali is adequate for the financial year 2024. This is based on the results of the assessment of the Internal Control System by SKAI & Anti Fraud above, which was stated as "Adequate" as reflected in the 5 (five) assessment elements explained in the Evaluation of the Implementation of Internal Control.

AKUNTAN PUBLIK *Public Accountant*

Kantor Akuntan Publik (KAP), menurut OJK, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Akuntan Publik. Sementara itu, Akuntan Publik (AP) adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Akuntan Publik. KAP dan AP berperan dalam penerapan GCG di lingkungan Bank BPD Bali melalui penyajian informasi keuangan yang berkualitas sebagai cerminan penerapan tata kelola yang baik dengan penyelenggaraan fungsi audit eksternal oleh akuntan publik dan kantor akuntan publik yang independen.

A public accounting firm (KAP), according to the OJK, is a business entity that is established on the basis of the provisions of laws and regulations and obtains a business license as referred to in the Law concerning Public Accountants. Meanwhile, a public accountant (AP) is a person who has obtained a license to provide services as referred to in the Law on Public Accountants. KAP and AP play a role in implementing GCG in the environment of Bank BPD Bali by presenting quality financial information as a reflection of implementing good governance with the implementation of external audit functions by public accountants and independent public accounting firms.

Kebijakan Penunjukan Akuntan Publik *Public Accountant Appointment Policy*

Penunjukan Akuntan Publik oleh Bank BPD Bali berpedoman pada POJK No. 9 Tahun 2023 yang menggantikan POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan POJK No. 30 Tahun 2023 tentang pengkomunikasian hal audit utama dalam laporan akuntan publik atas laporan keuangan yang diaudit di pasar modal.

Secara internal, kebijakan penunjukan AP telah ditetapkan dalam Pedoman GCG dan Anggaran Dasar. Pedoman GCG Bank BPD Bali menyatakan bahwa dalam menyediakan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, Bank menggunakan penyelenggaraan fungsi audit ekstern oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang

The appointment of public accountants by Bank BPD Bali is guided by POJK No. 9 of 2023, which replaces POJK No. 13/POJK.03/2017 on the use of public accountant services and public accounting firms in financial services activities and POJK No. 30 of 2023 on the communication of key audit matters in the public accountant's report on audited financial statements to the capital market.

Internally, the policy for the appointment of APs is set out in the GCG Guidelines and the Articles of Association. The GCG Policy of Bank BPD Bali states that in providing transparent and high quality financial information, the Bank utilizes the implementation of external audit functions by public accountants and/or public accounting firms in



sesuai dengan ketentuan OJK. Sementara itu, Anggaran Dasar Bank BPD Bali secara eksplisit menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menetapkan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bank atas usul Dewan Komisaris menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

accordance with OJK regulations. Meanwhile, Bank BPD Bali's Articles of Association explicitly state that the General Meeting of Shareholders (GMS), upon the recommendation of the Board of Commissioners, shall appoint the auditor to conduct an audit of the Bank's financial report in accordance with applicable laws and regulations.

Persyaratan Auditor Ekstern

External Auditor Requirements

Penyelenggaraan fungsi audit ekstern oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik Bank BPD Bali sesuai dengan ketentuan OJK. Adapun penentuan syarat AP dan KAP berpedoman pada No. 9 Tahun 2023 pasal 2 mewajibkan pelaku industri perbankan di Indonesia wajib menggunakan AP dan KAP yang tercatat pada OJK, tercatat dalam daftar AP dan KAP yang aktif pada OJK; dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Bank BPD Bali.

The implementation of the external audit functions by public accountants and/or public accounting firms of Bank BPD Bali is in accordance with the regulations of the OJK. The determination of AP and KAP requirements is guided by No. 9 of 2023, Article 2, which requires banking industry participants in Indonesia to use AP and KAP registered with the OJK, to be included in the list of active AP and KAP with the OJK, and to have competencies in accordance with the complexity of Bank BPD Bali's business.

Terkait dengan hal tersebut, Bank BPD Bali menetapkan persyaratan AP dan KAP yang terdaftar pada OJK, tercatat dalam daftar AP dan KAP yang aktif pada OJK, dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Bank .

In this regard, Bank BPD Bali has determined the requirements for AP and KAP registered with OJK, recorded in the list of active AP and KAP at OJK, and have competencies in accordance with the complexity of the Bank's business.

Proses Penunjukan Auditor Eksternal

External Auditor Appointment Process

Dalam kaitan penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Keuangan Tahunan:

1. Berdasarkan akta Nomor 85 tanggal 25 Mei 2010, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menyetujui memberikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada pengurus Bank sesuai Undang-Undang.
2. Dewan Komisaris melalui surat Nomor 209/DK/BPD/2024 tanggal 21 Mei 2024 perihal Pengadaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melaksanakan Pemeriksaan Umum (*General Audit*) atas Laporan Keuangan Tahunan dan Evaluasi Kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2024, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit melakukan penunjukan kembali kepada KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo untuk melaksanakan Pemeriksaan Umum (*General Audit*) atas Laporan Keuangan Tahunan dan Evaluasi Kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2024.
3. Proses pengadaan dilaksanakan pada bagian Pengadaan Barang & Jasa sesuai dengan ketentuan Pengadaan Barang & Jasa serta memperhatikan prinsip tata kelola yang baik. Berdasarkan hasil proses pengadaan barang & jasa menetapkan KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo sesuai perjanjian kerja/kontrak Nomor 1213/SPK/DIR/UMA/2024 [PPP] atau 1265/GN/WEL/HHES/X/24 [Penyedia] tanggal 15 Oktober 2024.

Concerning the Appointment of Public Accountants (AP) and Public Accounting Firms (KAP) for the Audit of the Annual Financial Report

1. *The General Meeting of Shareholders (GMS), in its Resolution No. 85 of May 25, 2010, approved the granting to the Bank's Management of the authority to appoint Auditors (AP) and Audit Firms (KAP) in accordance with the Law.*
2. *The Board of Commissioners by letter No. 209/DK/BPD/2024 dated May 21, 2024 regarding the appointment of Public Accountant (AP) and Public Accounting Firm (KAP) to perform a General Audit of the Annual Financial Report and Performance Evaluation of PT Bank Pembangunan Daerah Bali for the financial year 2024, Considering the recommendations of the Audit Committee, to re-appoint KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo to conduct a General Audit of the Annual Financial Report and Performance Evaluation of PT Bank Pembangunan Daerah Bali for the Financial Year 2024.*
3. *The procurement process will be conducted in the Procurement of Goods & Services Section in accordance with the provisions of the Procurement of Goods & Services and with due regard to the principles of good governance. Based on the results of the Procurement of Goods & Services, KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo has been appointed in accordance with the Work Agreement/ Contract No. 1213/SPK/DIR/UMA/2024 [PPP] or 1265/GN/WEL/HHES/X/24 [Provider] dated October 15, 2024.*

Ruang Lingkup, Opini, dan KAP & AP

Scope, Opinion and KAP & AP

Bank BPD Bali melakukan penunjukan KAP untuk melakukan audit dengan ruang lingkup tugas auditor eksternal adalah melaksanakan audit laporan keuangan. Opini audit yang diperoleh adalah wajar tanpa kecualian dalam lima tahun terakhir.

Bank BPD Bali appointed KAP to conduct the audit, the scope of the external auditor's duties being to conduct audits of financial statements. The audit opinion has been unqualified for the last five years.

Tahun Year	KAP			AP			
	Nama Name	Izin KAP KAP Licence	Periode Ke Period	Nama Name	Izin AP AP Licence	Periode Ke Period	Nilai Jasa (Rp) Value (Rp)
2024	KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (A member of Kreston Global)	No. 678/KM.1/2017	5	Welly Adrianto, CPA	AP0060	4	814.042.000
2023	KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (A member of Kreston Global)	No. 678/KM.1/2017	4	Iskariman Supardjo, CPA	AP0336	1	881.007.500
2022	KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (A member of Kreston Global)	No. 678/KM.1/2017	3	Welly Adrianto, CPA	AP0060	3	713.732.000
2021	KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (A member of Kreston Global)	No. 678/KM.1/2017	2	Welly Adrianto, CPA	AP0060	2	670.120.000
2020	KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (A member of Kreston Global)	No. 678/KM.1/2017	1	Welly Adrianto, CPA	AP0060	1	648.000.000

Jasa Lain yang Diberikan Kantor Akuntan Publik

Other Services Provided by the Audit Firm

Selain jasa audit keuangan, KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (A member of Kreston Global) tidak memberikan jasa lain kepada Bank BPD Bali selama periode penugasan sebagai KAP.

KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (a member of Kreston Global) did not provide any other services to Bank BPD Bali other than financial audit services during its engagement as KAP.

KODE ETIK

Code of Ethics

POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan (POJK) untuk memiliki dan menerapkan kode etik perlindungan konsumen dan masyarakat yang telah ditetapkan oleh masing-masing PUJK. Terkait dengan hal tersebut, Bank BPD Bali telah memiliki dan menerapkan Kode Etik untuk implementasi GCG pada setiap tingkatan organisasi Bank. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan visi Bank BPD Bali yakni Menjadi Bank yang Kuat, Berdaya Saing Tinggi, dan Berkemuka dalam Melayani UMKM serta Berkontribusi bagi Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan.

POJK No. 22 of 2023 on the Protection of Consumers and Communities in the Financial Services Sector requires financial services business operators (POJK) to have and implement a Code of Ethics for the Protection of Consumers and Communities, which has been determined by each POJK. In this regard, Bank BPD Bali has adopted and implemented a Code of Ethics for the implementation of GCG at all levels of the Bank's organization. This is done in order to realize Bank BPD Bali's vision of becoming a strong, highly competitive and leading bank in serving MSMEs and contributing to sustainable regional economic growth.

Kebijakan Kode Etik

Code of Ethics Policy

Bank BPD Bali telah memiliki kebijakan Kode Etik sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 0235/KEP/DIR/KPN/2023 tanggal 12 Juni 2023 tentang Kode Etik. Dokumen ini merupakan pembaruan atas Kode Etik Bank BPD Bali sebelumnya yang juga ditetapkan melalui Keputusan Direksi pada tahun 2015.

Bank BPD Bali has a Code of Ethics Policy as stipulated in the Board of Directors' Resolution No. 0235/KEP/DIR/KPN/2023 dated June 12, 2023 on the Code of Ethics. This document is an update of the previous Bank BPD Bali Code of Ethics, which was also established by a Board of Directors' Decree in 2015.

Hal-hal penting yang diatur dalam Kode Etik tersebut antara lain maksud dan tujuan; kode etik Bank; benturan kepentingan; prinsip perlindungan konsumen, dan sanksi. Kode Etik Bank BPD Bali adalah pedoman etika yang menjadi prinsip kepatutan dan kepatutan dan dasar yang memandu hubungan di antara Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan dengan stakeholders dan/atau konsumen dalam bertindak dan berperilaku secara profesional dan berintegritas untuk mewujudkan Visi dan Misi Bank BPD Bali sesuai dengan Budaya Kerja.

Important matters regulated in the Code of Ethics include the intent and purpose, the Bank's Code of Ethics, conflict of interest, consumer protection principles and sanctions. The Code of Ethics of Bank BPD Bali is an ethical guideline that serves as a principle of propriety and appropriateness and a basis that guides the relationship between the Board of Commissioners, Directors, Employees with stakeholders and/or consumers in acting and behaving professionally and with integrity to realize the vision and mission of Bank BPD Bali in accordance with the work culture.

Selain itu, Kode Etik menjadi acuan dasar bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta berinteraksi dengan *Stakeholders* dan/atau Konsumen yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan masyarakat.

In addition, the Code of Ethics is a basic reference for the Board of Commissioners, Directors and Employees in carrying out their duties and responsibilities and interacting with stakeholders and/or consumers in relation to consumer and community protection.

Sosialisasi dan Penandatanganan Kode Etik

Socialization and signing of the Code of Ethics

Bank BPD Bali telah melaksanakan sosialisasi Kode Etik Bank BPD Bali kepada seluruh karyawan yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh setiap karyawan, serta seluruh karyawan pada awal tahun menandatangani Formulir Pernyataan Sikap.

Bank BPD Bali has implemented the socialization of the Bank BPD Bali Code of Ethics to all employees, which must be understood and implemented by each employee, and all employees signed the attitude statement form at the beginning of the year.

Pernyataan Kode Etik Berlaku Bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan

Statement of the Code of Ethics Applicable to the Board of Commissioners, Directors and Employees

Bank BPD Bali telah menetapkan Pernyataan Kepatuhan Terhadap Kode Etik yang berlaku bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Karyawan Bank dalam rangka meningkatkan kualitas menjadi bankir profesional yang beretika. Poin-poin Pernyataan Kepatuhan Terhadap Kode Etik Bank BPD Bali adalah sebagai berikut:

1. Telah menerima dan memahami isi Buku Kode Etika Bank BPD Bali,
2. Bersedia secara bersungguh-sungguh dan dengan penuh kesadaran untuk melaksanakan komitmen yang tercantum dalam Kode Etik Bank BPD Bali,
3. Apabila saya mengingkarinya, maka saya bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan peraturan dan kebijakan Perusahaan yang berlaku di Bank BPD Bali.

Sebagai catatan, seluruh karyawan Bank BPD Bali telah melakukan penandatanganan Pernyataan Kepatuhan Terhadap Kode Etik pada tanggal 2 Januari 2024 untuk tahun buku 2024 melalui Surat Pernyataan Sikap yang dikelola oleh Divisi Sumber Daya Manusia.

Bank BPD Bali has prepared a Statement of Compliance with the Code of Ethics Applicable to the Board of Directors, Board of Commissioners and Employees of the Bank in order to improve the quality of becoming professional bankers with ethics. The points of the Statement of Compliance with the Code of Ethics of Bank BPD Bali are as follows

1. *Received and understood the contents of the Bank BPD Bali Code of Ethics Book,*
2. *Willing to seriously and with full awareness to carry out the commitments stated in the Bank BPD Bali Code of Ethics,*
3. *If I deny it, I am willing to accept the consequences in accordance with the regulations and policies of the company in effect at Bank BPD Bali.*

It should be noted that all employees of Bank Bhd Bali have signed the Declaration of Compliance with the Code of Ethical Conduct on January 2, 2014 for the financial year 2014 through the Declaration of Compliance managed by the HR Department.

Penerapan dan Penegakan Kode Etik

Implementation and Enforcement of the Code of Ethics

Kode Etik Bank BPD Bali berlaku untuk setiap karyawan Bank, baik dari Dewan Komisaris, Direksi, karyawan dan individu lain yang terkait dengan bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Bali. Keberhasilan penerapan Kode Etik merupakan tanggung jawab dari seluruh pimpinan di lingkungan unit kerja masing-masing.

Oleh karena itu, segenap pimpinan unit memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman penerapan Kode Etik kepada karyawan di lingkungan unit kerja masing-masing. Setiap karyawan Bank memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan penerapan Kode Etik dalam aktivitas sehari-hari. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah menyangkut kesediaan karyawan-karyawati untuk melaporkan setiap tindakan yang diyakini merupakan suatu pelanggaran Kode Etik dan menyampaikan setiap fakta penyimpangan yang diketahuinya melalui mekanisme *whistleblowing system*.

Bank BPD Bali senantiasa terus mengingatkan kepada segenap karyawan Bank mengenai Kode Etik melalui kegiatan *wake up morning call* maupun *sharing session* yang rutin dilaksanakan setiap minggu di masing-masing unit kerja.

The Bank BPD Bali Code of Ethics applies to every employee of the Bank, both from the Board of Commissioners, Directors, Employees and other individuals related to the business of PT Bank Pembangunan Daerah Bali. The successful implementation of the Code of Ethics is the responsibility of all managers in their respective work units.

Therefore, all unit managers have the responsibility to ensure that the employees in their respective work units understand the implementation of the Code of Ethics. Each employee of the Bank is responsible for the successful implementation of the Code of Ethics in his or her daily activities. One form of responsibility is the willingness of employees to report any actions that they believe to be a violation of the Code of Ethics and to communicate any facts of deviation that they know through the mechanism of the Whistleblowing System.

Bank BPD Bali always reminds all employees of the Code of Ethics through morning wake-up calls and sharing sessions that are routinely held every week in each work unit.

Sanksi dan Jumlah Pelanggaran Kode Etik

Sanctions and Number of Code of Ethics Violations

Bank BPD Bali memberikan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran Kode Etik. Segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi beserta sanksinya berpedoman pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar yang berlaku. Sedangkan terkait pengenaan sanksi terhadap karyawan dilakukan sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku.

Selama Tahun 2024 tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Komisaris ataupun Direksi. Selama Tahun 2024 Bank mencatat adanya pelanggaran Kode Etik sebanyak 3 (tiga) pelanggaran.

Bank BPD Bali applies strict and consistent sanctions for violating the Code of Ethics. All forms of violations committed by the Board of Commissioners and the Board of Directors as well as their sanctions are guided by the applicable Limited Liability Company Law and the Articles of Association. Meantime, the imposition of sanctions on employees is carried out in accordance with the applicable personnel regulations.

During 2024, there were no violations committed by the Board of Commissioners or the Board of Directors. During 2024, the Bank recorded 3 (three) violations of the Code of Ethics.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Whistleblowing System

Kegiatan usaha perbankan dapat terpapar risiko operasional yang salah satunya dari *fraud*. Untuk meminimalisasi terjadinya *fraud* diperlukan penguatan sistem pengendalian intern berupa strategi *anti-fraud* oleh perbankan dimana salah satunya dilaksanakan melalui penerapan kebijakan pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing*).

Banking activities may be exposed to operational risks, one of which is fraud. In order to minimize the occurrence of fraud, it is necessary to strengthen the internal control system in the form of an anti-fraud strategy of banks, one of which is implemented through the implementation of a whistleblowing policy.

Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*)

Whistleblowing System Policy

Kebijakan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) ditujukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian *fraud* dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan. Bank BPD Bali memiliki Aplikasi *Anti Fraud Awareness* (AFS) dimana di dalamnya telah dilengkapi dengan menu *whistleblowing* sebagai salah satu media pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) dan telah dikelola dengan baik. Sebagai media pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*), melalui Aplikasi *Anti Fraud Awareness* (AFS) Bank memperoleh informasi awal atas adanya tindakan kecurangan (*fraud*) berdasarkan atas adanya pengaduan maupun sumber informasi lainnya.

The Whistleblowing Reporting Policy is intended to increase the effectiveness of the implementation of the fraud control system by emphasizing the disclosure of complaints. Bank BPD Bali has an Anti Fraud Awareness (AFS) application which is equipped with a whistleblowing menu as one of the media for reporting violations (whistleblowing) and has been well managed. As a medium for reporting violations (whistleblowing), the Anti Fraud Awareness (AFS) application provides the Bank with initial information on fraudulent actions based on complaints or other sources of information.

Kebijakan terkait Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) yang dimiliki Bank BPD Bali tertuang dalam Standar Operasional Prosedur Strategi Anti-Fraud yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi No. 0628/KEP/DIR/SAF/2024 tanggal 5 November 2024. Dokumen ini menggantikan Standar Operasional Prosedur Strategi *Anti-Fraud* sebelumnya yang ditetapkan pada tahun 2019 dan merupakan penyesuaian atas perubahan ketentuan otoritas.

Bank BPD Bali's Whistleblowing Reporting Policy is stated in the Standard Operating Procedure for Anti-Fraud Strategy, which is established by the Board of Directors Resolution No. 0628/KEP/DIR/SAF/2024 dated November 5, 2024. This document replaces the previous Standard Operating Procedure for the Anti-Fraud Strategy, which was established in 2019, and is an adjustment to the changes in the provisions of the authority.

Sosialisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) *Whistleblowing System Socialization*

Sosialisasi Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) Bank BPD Bali dilakukan secara berkelanjutan selama tahun 2024 melalui Sosialisasi Strategi *Anti Fraud* pada seluruh Kantor Cabang dan Kantor Pusat Bank BPD Bali.

Socialization of Violation Reporting (Whistleblowing) Bank BPD Bali is carried out continuously throughout 2024 through the socialization of anti-fraud strategy in all branches and head office of Bank BPD Bali..

Prosedur Penyampaian dan Media Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) *Procedure for Submitting and Media for Reporting the Whistleblowing System*

Mekanisme penyampaian pengaduan pelanggaran mengacu pada mekanisme pelaporan melalui aplikasi *Anti Fraud Awareness* (AFS) dan mekanisme pelaporan pengaduan melalui media lainnya. Pelapor dari pihak internal Bank dapat menyampaikan informasi awal adanya Tindakan pelanggaran melalui aplikasi *Anti Fraud Awareness* (AFS) tersebut yang dapat diakses melalui website pada jaringan intranet Bank. Pelapor dapat menyampaikan informasi secara *anonym* atau *login* ke aplikasi dengan *user* dan *password* yang telah dimiliki.

The mechanism for the submission of complaints of violations refers to the reporting mechanism through the Anti-Fraud Awareness (AFS) application and the complaint reporting mechanism through other media. Reporters from within the Bank can submit initial information about violations through the Anti Fraud Awareness (AFS) application. The AFS application can be accessed through the website on the Bank's intranet network. Reporters can submit information anonymously. Alternatively, they can log in to the application using their existing user name and password.

Pelaporan pengaduan dapat juga dilakukan melalui media lainnya. Penyampaian informasi awal indikasi *fraud* melalui media lainnya dapat dilakukan dengan surat dinas dari satuan kerja/unit kerja untuk pelapor internal. Selain itu, pengaduan oleh konsumen dapat dilakukan melalui media/kanal penyampaian pengaduan antara lain:

Complaints may also be submitted through other media. The submission of initial information on indications of fraud through other media can be done with an official letter from the work unit/department for internal reporters. In addition, complaints from consumers can be made through e-mail, Bank BPD Bali Contact Center, Customer Service and letters for external reporters.

a. Media Lisan

Menghubungi *Call Center* resmi Bank BPD Bali (BPD *Call*) di Nomor 1500844

a. Verbal Media

Contact the official *Call Center* of Bank BPD Bali (BPD *Call*) at Number 1500844

b. Media Tertulis

1. Mengunjungi unit kerja Bank terdekat (*Walk in*)
2. Mengirimkan surat resmi ke Bank
3. Mengirimkan surat elektronik (*e-mail*) ke alamat bpdbalicare@bpdbali.co.id
4. Media sosial resmi yang dikelola oleh Bank
5. *Live Chat* pada *website* Bank (www.bpdbali.co.id)

b. Written Media

1. Visit the nearest Bank work unit (*Walk in*)
2. Send an official letter to the Bank
3. Send an electronic letter (*e-mail*) to the address bpdbalicare@bpdbali.co.id
4. Official social media managed by the Bank
5. Live Chat on the Bank's website (www.bpdbali.co.id)



Media Lisan Verbal Media	Media Tertulis Written Media				
Contact Center	Customer Service	Surat Resmi Official letter	Surat Elektronik Email	Media Sosial Social Media	Live Chat
BPD Bali Call Nomor 1500844	Mengunjungi Unit Kerja BPD Bali terdekat (<i>walk in</i>) <i>Visit the nearest BPD Bali work unit (walk-in)</i>	Secara tertulis dalam amplop tertutup yang ditujukan kepada Direktur Utama dan diterima oleh Divisi Sekretaris Perusahaan (jika surat dari pihak luar). <i>Written in a sealed envelope addressed to the President and received by Corporate Secretary (if the letter is from an outside party).</i>	Melalui email ke: By email to: bpdbalicare@bpdbali.co.id	Media sosial resmi yang dikelola oleh Bank <i>Official social media managed by the Bank</i>	<i>Live Chat pada website Bank Live Chat on the Bank website www.bpdbali.co.id</i>

Kriteria Pelaporan *Whistleblowing System*

Whistleblowing System Reporting Criteria

Indikasi pelanggaran wajib disampaikan oleh pelapor secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan paling tidak mencakup: jenis pengaduan; identitas terlapor mencakup nama, jabatan, dan unit kerja; pihak yang terlibat; tempat dan waktu kejadian; uraian pengaduan; dan potensi kerugian finansial.

Indications of violations must be clearly communicated by the reporter and must include, at a minimum, the following: nature of the complaint; identity of the reported party, including name, position and work unit; parties involved; location and time of the incident; description of the complaint; and potential financial loss.

Perlindungan bagi Pelapor

Protection for Whistleblowers

Bank BPD Bali telah mengimplementasikan pelaporan *fraud* melalui aplikasi pelaporan yang telah disiapkan sebagai bentuk komitmen Bank untuk meningkatkan komunikasi dalam rangka pelaporan *fraud*. Bank BPD Bali juga menjamin kerahasiaan identitas pelapor *fraud* dimana dalam melakukan pelaporan, dimungkinkan secara anonim. Dalam pelaksanaan penyelidikan dan pengungkapan laporan, identitas pelapor *fraud* tidak diungkapkan.

Bank BPD Bali has implemented fraud reporting through a reporting application that has been prepared as a form of the bank's commitment to improve communication related to fraud reporting. Bank BPD Bali also guarantees the confidentiality of the identity of the fraud reporter, where it is possible to make the report anonymously. In conducting the investigation and disclosure of the report, the identity of the fraud reporter will not be disclosed.

Bank BPD Bali memberikan hadiah penghargaan kepada pelapor *fraud* yang laporannya terbukti benar dan didukung bukti yang memadai. Mekanisme pemberian hadiah penghargaan tersebut diatur dalam Keputusan Direksi tersendiri.

Bank BPD Bali provides rewards to fraud reporters whose reports are proven to be true and supported by adequate evidence. The mechanism for providing rewards is governed by a separate Board of Directors' Regulation.

Penanganan Pengaduan Complaints Handling

Bank BPD Bali telah menetapkan mekanisme penanganan laporan WBS mengacu pada SOP Penerapan Strategi *Anti Fraud* dan SOP Audit Berbasis Risiko untuk pengaduan kejadian terindikasi *fraud* melalui aplikasi *Anti Fraud Awareness* (AFS) serta SOP Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen untuk pengaduan yang melalui media lainnya.

Bank BPD Bali has established a mechanism for handling WBS reports referring to the SOP for Implementation of Anti-Fraud Strategies and the SOP for Risk Based Audits for complaints of suspected fraud incidents through the Anti-Fraud Awareness (AFS) application and the SOP for Handling and Resolving Consumer Complaints for complaints through other media.

Pihak Pengelola Whistleblowing System The Whistleblowing System Manager

Satuan Kerja Audit Intern & *Anti-Fraud* (SKAI & AF) sebagai pengelola WBS khususnya aplikasi *Anti Fraud Awareness* (AFS) dan menjalankan tugasnya sebagai penanggung jawab aplikasi *Anti Fraud Awareness* (AFS).

The Internal Audit & Anti-Fraud Work Unit (SKAI & AF) as the manager of the WBS, in particular the Anti-Fraud Awareness (AFS) application, and performs its duties as the person in charge of the Anti-Fraud Awareness (AFS) application.

Selanjutnya, pengelola aplikasi *Anti Fraud Awareness* (AFS) tersebut dibantu oleh bagian *Anti Fraud* & Pengawasan Pasif yang mempunyai kompetensi dan integritas yang memadai untuk menjalankan aktivitas harian aplikasi *Anti Fraud Awareness* (AFS).

In addition, the manager of the Anti-Fraud Awareness (AFS) application is assisted by the Anti-Fraud and Passive Monitoring Section, which has sufficient competence and integrity to perform the daily activities of the Anti-Fraud Awareness (AFS) application.

Pengaduan WBS Tahun 2024 WBS Complaints in 2024

Tabel berikut ini menjelaskan jumlah pengaduan yang tercatat dalam WBS khususnya aplikasi *Anti Fraud Awareness* (AFS) selama tahun 2024 dan status penyelesaiannya.

The number of complaints recorded in the WBS, in particular in the Anti Fraud Awareness (AFS) application, in 2024 and their resolution status are shown in the following table.

Jumlah Pengaduan Number of Complaints	Klasifikasi Category	Status Tindak Lajut Follow-up Status	
		Dalam Proses In Process	Selesai Completed
2 (dua) 2 (two)	Indikasi <i>fraud</i> internal Internal fraud indication	-	2 (dua) 2 (two)



AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Access to Company Information and Data

Bank BPD Bali telah menyediakan beragam informasi baik keuangan maupun non-keuangan serta informasi terkini Bank yang dapat diakses publik melalui beragam media antara lain situs *website* dan sosial media Bank sebagai berikut:

Bank BPD Bali has provided various financial and non-financial information, as well as the latest information of the Bank, which can be accessed by the public through various media, including the Bank's website and social media, as follows:

**PT Bank Pembangunan Daerah Bali**

Jalan Raya Puputan Niti Mandala Denpasar 80235 Bali
Telpon : +62 361 223301 ext. 5

**Layanan Contact Center Bank BPD Bali****1500-844****Email Bank BPD Bali****bpdbalicare@bpd Bali.co.id**

Melalui *website*-nya, Bank BPD Bali juga menyediakan informasi kepada para pemangku kepentingan berupa pengumuman dan berita dengan perincian sebagai berikut:

Through its website, Bank BPD Bali also provides information to its stakeholders in the form of announcements and news with the following details as follows:

Jenis Informasi Type of Information	Kategori Category	Jumlah Number
Berita News	Perjanjian Kerja Sama (PKS) Cooperation Agreement (PKS)	5
	Penghargaan Awards	6
	Corporate Social Responsibility (CSR) Corporate Social Responsibility (CSR)	4
	Inovasi Layanan Service Innovation	1
	Customer Gathering Customer Gathering	1
	Kinerja Performance	3
	Edukasi Nasabah Customer Education	1

Jenis Informasi Type of Information	Kategori Category	Jumlah Number
Pengumuman <i>Announcement</i>	Pengadaan <i>Procurement</i>	59
	Pemenang Tender <i>Tender Winners</i>	29
	KURS	200
	Laporan Bulanan <i>Monthly Report</i>	12
	Laporan Triwulan <i>Quarterly Report</i>	6
	Laporan Tahunan <i>Annual Report</i>	1
	Laporan Keuangan <i>Financial Report</i>	46
	Laporan Manajemen <i>Management Report</i>	1
	Laporan Keberlanjutan <i>Sustainability Report</i>	1
	Laporan Tata Kelola <i>Governance Report</i>	1
	RUPS	1
	SBDK	9
	Pemenang Undian <i>Lucky Winner</i>	2
	Maintenance	48
	Produk <i>Product</i>	94
Jumlah <i>Total</i>		531

Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di industri perbankan, Bank BPD Bali juga menyediakan informasi keuangan yang terdiri dari info kurs, tarif layanan, suku bunga simpanan, dan penyesuaian tarif layanan yang dapat diakses di *website* Bank.

Selanjutnya, untuk laporan publikasi, Bank BPD Bali menyediakan informasi terkait Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK); Laporan Keuangan Bulanan; Laporan Keuangan Triwulanan; Kuantitatif Eksposur Risiko; Eksposur Risiko & Permodalan; Laporan Keuangan Auditan; Laporan Tata Kelola, Laporan Tahunan, Laporan Berkelanjutan; Laporan Manajemen; Rasio LCR dan NSFR; dan Penanganan Pengaduan Nasabah.

As a company engaged in the banking industry, Bank BPD Bali also provides financial information consisting of exchange rate information, service rates, deposit interest rates, and service rate adjustments, which can be accessed on the Bank's website.

In addition, for disclosure reports, Bank BPD Bali provides information related to base lending rate (SBDK); monthly financial reports; quarterly financial reports; quantitative risk exposure; risk and capital exposure; audited financial reports; governance reports; annual reports; sustainability reports; management reports; LCR and NSFR ratios; and handling of customer complaints.

PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG (APU), PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (PPSPM)

Anti-Money Laundering (APU), Prevention of the Financing of Terrorism (PPT), and Prevention of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction (PPSPM) Program

Bank BPD Bali senantiasa mendukung upaya yang dilakukan OJK untuk mencegah tindak pidana pencucian uang (TPPU), tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT), dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (PPSPM) serta untuk mewujudkan integritas di sektor jasa keuangan. Dukungan tersebut diwujudkan tidak hanya direalisasi berupa ketentuan internal tetapi juga beragam aksi nyata untuk mencegah terjadinya TPPU, TPPT, dan PPSPM di lingkungan Bank BPD Bali.

Bank BPD Bali always supports OJK's efforts to prevent money laundering (TPPU), terrorist financing (TPPT) and proliferation financing (PPSPM) and to achieve integrity in the financial services sector. This support is manifested not only in the form of internal regulations, but also in various real measures to prevent TPPU, TPPT and PPSPM in the environment of the Bank BPD Bali.

Kebijakan Pencegahan TPPU, TPPT, dan PPSPM

TPPU, TPPT and PPSPM Prevention Policy

POJK No. 8 Tahun 2023 yang diterbitkan oleh pada 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) menjadi pedoman bagi Bank BPD Bali untuk menetapkan ketentuan internal terkait hal tersebut.

POJK No. 8 of 2023 issued on June 14, 2023 on the Implementation of the Program for Prevention of Money Laundering (APU), Prevention of Terrorist Financing (PPT), and Prevention of Proliferation of Weapons of Mass Destruction (PPSPM) is a guideline for Bank BPD Bali to determine the internal provisions related to this matter.

Bank BPD Bali telah memiliki ketentuan internal berupa Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Penerapan Program APU, PPT, dan PPSPM sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 0600/KEP/DIR/KPN/2023 tanggal 23 Nopember 2023. Selain itu, ketentuan internal lainnya yang diterbitkan untuk memperkuat pelaksanaan program APU, PPT, dan PPSPM adalah penerbitan Standard Operasional Prosedur (SOP) Penerapan Program APU, PPT, dan PPSPM berdasarkan Keputusan Direksi No. 0188/KEP/DIR/KPN/2024 tanggal 19 April 2024. SOP terbaru ini sekaligus menggantikan SOP sebelumnya yang diterbitkan pada tahun 2022 dan 2023.

Bank BPD Bali has internal regulations in the form of a Company Policy Manual (BPP) for the implementation of APU, PPT, and PPSPM programs as stipulated in the Board of Directors' Decree No. 0600/KEP/DIR/KPN/2023 dated November 23, 2023. In addition, other internal regulations issued to strengthen the implementation of the APU, PPT and PPSPM Programs are the issuance of Standard Operating Procedures (SOP) for the Implementation of the APU, PPT and PPSPM Programs based on the Board of Directors' Decree No. 0188/KEP/DIR/KPN/2024 dated April 19, 2024. This latest SOP also replaces the previous SOPs issued in 2022 and 2023.

Ketentuan penting yang diatur dalam BPP Penerapan Program APU, PPT, dan PPSPM antara lain tentang kewajiban penerapan; pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris; susunan organisasi; pengendalian intern, sistem informasi manajemen, sumber daya manusia, dan pelatihan; dan kewajiban pelaporan. Sementara itu, SOP Penerapan Program APU, PPT, dan PPSPM mengatur lebih lanjut terkait ketentuan umum, dan prosedur administratif dan teknis.

Important provisions in the SOP for the implementation of APU, PPT and PPSPM programs include the commitment to implementation, active supervision by the Board of Directors and the Board of Commissioners, organizational structure, internal control, management information systems, human resources and training, and reporting requirements. Meanwhile, the SOP for the Implementation of the APU, PPT and PPSPM Programs further regulates general provisions and administrative and technical procedures.

Pengelola APU, PPT dan PPSPM

APU, PPT and PPSPM Management

Pengelolaan APU, PPT dan PPSPM di lingkungan Bank BPD Bali dilakukan oleh Unit Kerja Khusus (UKK) dan/atau menunjuk pejabat sebagai penanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPSPM pada Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu. Bagian

APU, PPT and PPSPM management within Bank BPD Bali is carried out by the Special Work Unit (UKK) and/or appointing officials as the persons responsible for the implementation of APU, PPT and PPSPM programs at Head Office, Branch Offices and Assistant Branch Offices.

Kerja Khusus APU & PPT melalui Kepala Divisi Kepatuhan di bawah supervisi Direktur Kepatuhan sebagai penanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM di Bank BPD Bali.

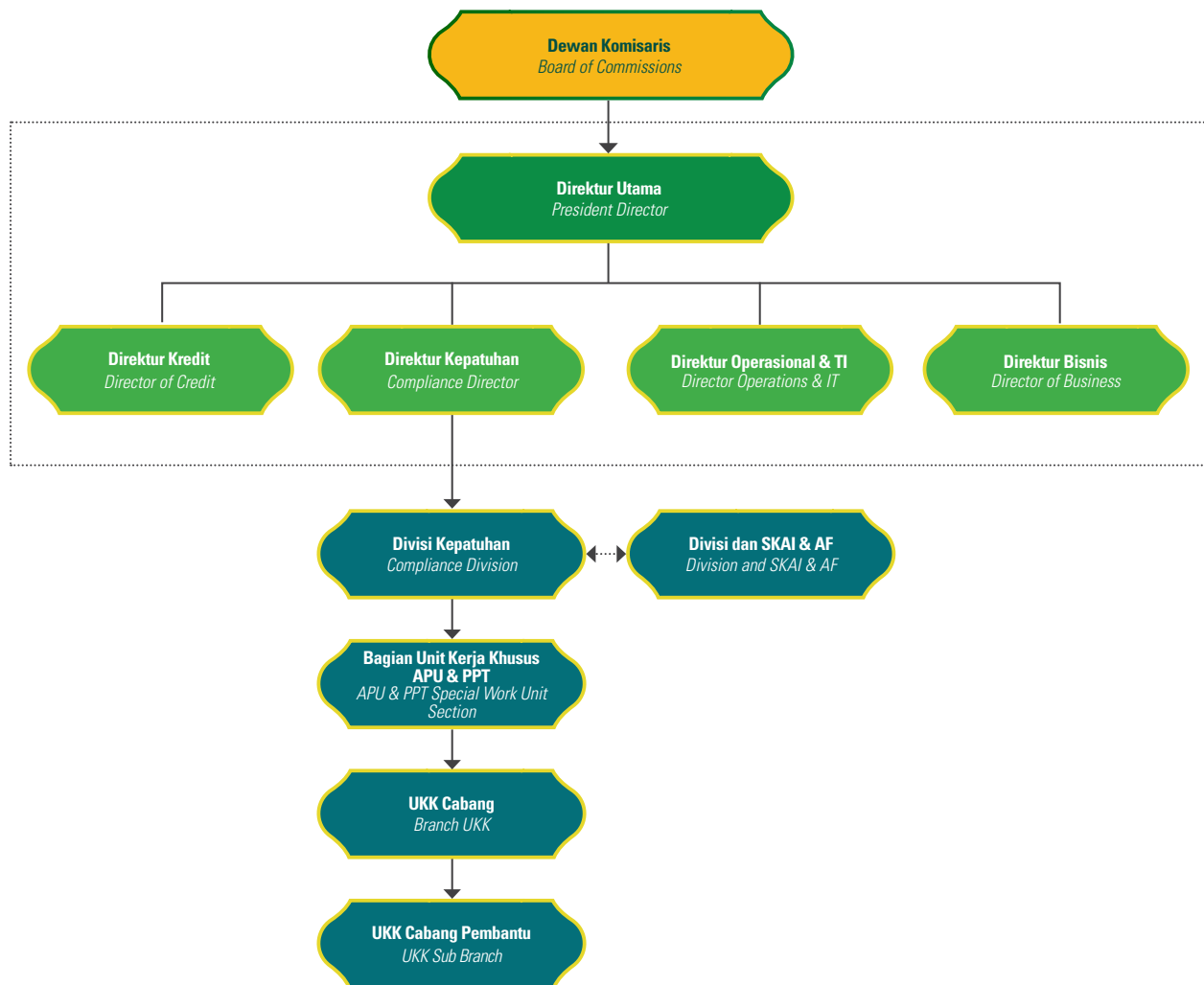
The APU & PPT Special Work Section through the Head of Compliance Division under the supervision of the Director of Compliance as the person responsible for the implementation of APU, PPT and PPPSPM programs at Bank BPD Bali.

Sementara itu, untuk level Kantor Cabang, Kantor Cabang pembantu beserta Kantor-Kantor yang berada di bawahnya, Wakil Cabang Bisnis pada Kantor Cabang kelas 1 dan Kelas 2, Wakil Cabang Bisnis pada Kantor Cabang kelas 3 dan Kelas 4 serta Kepala Cabang Pembantu dengan supervise Kepala Cabang sebagai penanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.

Meanwhile, for the Branch Office level, Assistant Branch Offices and offices under them, Deputy Branch Offices at Class 1 and Class 2 Branch Offices, Deputy Branch Offices at Class 3 and Class 4 Branch Offices, and the Head of Assistant Branch Offices under the supervision of the Head of Branch Office as the person responsible for implementing the APU, PPT, and PPPSPM programs.

Adapun struktur organisasi penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM di Bank BPD Bali adalah sebagai berikut:

The organizational structure for the implementation of APU, PPT and PPPSPM programs at Bank BPD Bali is as follows:



Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola APU, PPT dan PPPSPM

Duties and Responsibilities of APU, PPT and PPPSPM Managers

Tugas dan tanggung jawab UKK terkait dengan penerapan program APU, PPT dan PPPSPM Kantor Pusat antara lain adalah menganalisis secara berkala penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM terkait dengan nasabahnya, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Tugas selanjutnya adalah memastikan adanya sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh nasabah; memantau rekening nasabah dan pelaksanaan transaksi nasabah.

UKK APU, PPT dan PPPSPM juga melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi nasabah untuk memastikan ada atau tidaknya Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri; serta menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi.

Adapun UKK APU, PPT dan PPPSPM Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu antara lain bertugas memastikan adanya mekanisme dan koordinasi yang baik dari setiap Unit Kerja terkait seperti UKK dan/atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap program APU, PPT dan PPPSPM dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan anti *Tipping-Off*. Tugas lainnya adalah Menyusun Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan menyampaikan laporan dimaksud kepada UKK Kantor Pusat apabila terdapat transaksi yang memenuhi kriteria sebagai transaksi mencurigakan yang terjadi pada Unit Kerjanya.

UKK's duties and responsibilities with respect to the implementation of the APU, PPT and PPPSPM programs at Head Office include the periodic analysis of the TPPU, TPPT and/or PPSPM risk assessments with respect to its customers, countries or geographical areas, products, services, transactions or distribution networks on an annual basis. The next task is to ensure that there is a system that can identify, analyze, monitor and provide effective reports on the profile, characteristics or transaction patterns of customers; monitor customer accounts and the execution of customer transactions.

UKK APU, PPT and PPPSPM shall also evaluate the results of the monitoring and analysis of customer transactions to ensure that there are no suspicious financial transactions, cash financial transactions and/or financial transactions involving the transfer of funds to and from abroad; and shall manage the results of the monitoring and evaluation.

The UKK APU, PPT and PPPSPM Branch Offices and Assistant Branch Offices are tasked with ensuring that there is a good mechanism and coordination from each related work unit such as UKK and/or officials responsible for the APU, PPT and PPPSPM programs by maintaining the confidentiality of information and paying attention to the Anti-Tipping-Off provisions. Another task is to prepare a Suspicious Financial Transaction Report (LTKM) and submit the report to the UKK Central Office when a transaction that meets the criteria of a suspicious transaction occurs in their work unit.

Internalisasi APU, PPT dan PPPSPM

Internalization of APU, PPT and PPPSPM

Untuk meningkatkan pemahaman karyawan terhadap penerapan APU, PPT, dan PPPSPM pada Bank BPD Bali. Bank selama tahun 2024 telah melakukan internalisasi dalam bentuk sosialisasi ke seluruh unit/satuan kerja dalam bentuk pelatihan kepada *front liner* dan supervisinya, termasuk juga kepada pejabat eksekutif dan non eksekutif, sosialisasi dan bimbingan teknis kepada seluruh unit kerja.

To improve the understanding of the employees on the implementation of APU, PPT and PPPSPM in the Bank BPD Bali. In the year 2024, the Bank conducted internalization in the form of socialization to all work units/departments in the form of training for frontline managers and their supervisors, including executive and non-executive officers, socialization and technical guidance to all work units.

Pelaksanaan Program APU, PPT dan PPPSPM Tahun 2024

Implementation of APU, PPT and PPPSPM programs in 2024

Unit Kerja Khusus (UKK) telah melaksanakan Program APU, PPT dan PPPSPM selama tahun 2024 yang dapat diringkas sebagai berikut:

- Pemenuhan kewajiban dalam melakukan pelaporan penilaian risiko TPPU/TPPT/PPSPM (Laporan *Individual Risk Assessment/IRA*) kepada OJK untuk pertama kali sesuai POJK 8 Tahun 2023.

The UKK has implemented the APU, PPT and PPPSPM programs in 2024, which can be summarized as follows

- *Fulfillment of obligations in reporting TPPU/TPPT/PPSPM risk assessments (Individual Risk Assessment/IRA Report) to OJK for the first time in accordance with POJK 8 of 2023.*

- Pemantauan terhadap transaksi nasabah khususnya transaksi yang dilakukan oleh nasabah berisiko tinggi untuk mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan. Selama tahun 2024 Bank telah menyampaikan 29 laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), 2.052 LTKT dan 2.026 LTKL serta memberikan *feedback* atas 1.320 permintaan data dari pihak eksternal.
- Pengkinian data nasabah sebanyak 378.500 CIF atau sebesar 171% dari target yang telah direncanakan untuk tahun 2024 sebagaimana yang tertuang pada Laporan Rencana Pengkinian Data Nasabah Tahun 2024 yang telah disampaikan kepada OJK.
- Pemenuhan kewajiban dalam melakukan pelaporan pengguna jasa baru pada SIPESAT kepada PPATK sesuai ketentuan yang berlaku.
- Pemantauan terhadap DTTOT, DPPSPM serta *watch list* SIPENDAR.
- Evaluasi dan pengembangan sistem informasi dengan melakukan perpanjangan kontrak *maintenance* aplikasi IFTI (*International Fund Transfer Intruction*) untuk pemantauan dan pelaporan LTKL, *maintenance* aplikasi goAML untuk pemantauan dan pelaporan LTKM dan LTKT, *maintenance* aplikasi PEP untuk membantu Unit Kerja dalam memverifikasi calon nasabah terutamanya calon nasabah yang tergolong PEP/*high risk* serta melakukan perpanjangan lisensi aplikasi *Audit Command Language* (ACL) untuk pemantauan CIF ganda.
- Pengembangan untuk otomatisasi penentuan tingkat risiko calon nasabah/nasabah pada *core banking system*.
- Pemberantasan judi *online*, dengan melakukan pemadanan atas nama-nama pihak yang diduga terkait dengan judi *online* dengan data nasabah Bank, memasukan daftar nama pihak-pihak yang diduga terkait dengan judi *online* kedalam *watch list* sehingga bisa dilakukan *screening* dengan calon nasabah maupun nasabah *existing*, melakukan pemantauan yang lebih ketat terhadap transaksi-transaksi yang diindikasikan terkait dengan judi *online*, serta melakukan sosialisasi kepada Unit Kerja terkait dengan modus-modus ataupun pola-pola transaksi yang diduga terkait dengan judi *online*.
- *Monitoring of customer transactions, especially those of high-risk customers, in order to identify suspicious financial transactions. In 2024, the Bank submitted 29 reports on suspicious financial transactions (LTKM), 2,052 LTKT and 2,026 LTKL, and provided feedback on 1,320 data requests from external parties.*
- *Updated customer data of 378,500 CIF or 171% of the target for 2024 as stated in the 2024 Customer Data Update Plan Report submitted to the OJK.*
- *Fulfillment of obligations in reporting new service users on SIPESAT to PPATK in accordance with applicable regulations.*
- *Monitor the DTTOT, DPPSPM and SIPENDAR watch lists.*
- *Evaluation and development of information systems through the extension of the maintenance contract for the International Fund Transfer Instruction (IFTI) application for monitoring and reporting of LTKL, maintenance of the goAML application for monitoring and reporting of LTKM and LTKT, maintenance of the PEP application to assist the Work Unit in the screening of prospects, in particular prospects classified as PEP/high risk, and the extension of the license for the Audit Command Language (ACL) application for the monitoring of multiple CIFs.*
- *Development of an automated process for determining the risk level of prospects/customers in the core banking system.*
- *Eradication of online gambling by comparing the names of parties suspected of being involved in online gambling with the Bank's customer data, entering the list of names of parties suspected of being involved in online gambling into the watch list so that screening of prospective and existing customers can be conducted, conducting stricter monitoring of transactions indicated as being involved in online gambling, and conducting socialization with related work units regarding modes or patterns of transactions suspected of being involved in online gambling.*

Penilaian *Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing* (FIR on ML/TF) *Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing (FIR on ML/TF) Assessment*

Seluruh rangkaian kegiatan *Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing* (FIR on ML/TF) Tahun 2024 telah terlaksana dengan baik dan lancar. Pengukuran nilai FIR on ML/TF dilakukan terhadap 3 Dimensi. Dimensi 1 untuk mengukur tingkat komitmen Pihak Pelapor dalam mendukung PPATK dan Aparat Penegak Hukum (Apgakum) dalam penelusuran transaksi keuangan terkait indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPU/TPPT).

Dimensi 2 untuk mengukur tingkat implementasi tata kelola pelaporan APUPPT yang dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) dan pedoman pelaporan dari PPATK. Dimensi 3 untuk mengukur tingkat kepatuhan Pihak Pelapor

The entire series of Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing (FIR on ML/TF) activities in 2024 have been carried out well and smoothly. The measurement of FIR on ML/TF value is carried out on 3 dimensions. Dimension 1 is to measure the level of commitment of the Reporting Party in assisting PPATK and Law Enforcement Officers (Apgakum) in tracing financial transactions related to indications of money laundering and terrorist financing crimes (TPPU/TPPT).

Dimension 2 is to measure the level of implementation of APUPPT reporting governance carried out by the Reporting Party in accordance with the provisions of the Supervisory and Regulatory Agency (LPP) and the reporting guidelines of the PPATK. Dimension 3 is to measure the



terhadap kewajiban pelaporan APUPPT kepada PPATK serta kualitas formil dan materil atas keseluruhan laporan yang telah disampaikan sesuai dengan Peraturan PPATK.

Untuk tahun 2024 Bank BPD Bali kembali mempertahankan penilaian FIR on ML/TF pada predikat SANGAT BAIK. Ini berarti, Bank BPD Bali secara berturut-turut dalam 2 tahun terakhir mampu mempertahankan predikat sangat baik, dimana dalam penilaian FIR on ML/TF tahun 2024 ini, mengalami peningkatan nilai yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yakni sebesar 8,86 (predikat Sangat Baik) di tahun 2023 menjadi 9,15 (predikat Sangat Baik). Nilai FIR on ML/TF tahun ini juga melampaui nilai FIR on ML/TF rata-rata nasional sebesar 6,42, nilai FIR on ML/TF rata-rata PJK Bank sebesar 8,10 serta nilai FIR on ML/TF rata-rata KBMI 1 sebesar 8,28, KBMI 2 sebesar 8,43, KBMI 3 sebesar 8,82 dan KBMI 4 sebesar 9,00.

level of compliance of the Reporting Party with the obligation to report APUPPT to the PPATK, as well as the formal and material quality of the entire report submitted in accordance with the PPATK regulations.

For 2024, Bank BPD Bali again maintained the FIR on ML/TF assessment at the VERY GOOD predicate. This means that Bank BPD Bali has been able to maintain the Very Good Predicate for the last 2 years in a row, where in the FIR on ML/TF assessment in 2024 there was a significant increase in value from the previous year, namely 8.86 (Very Good Predicate) in 2023 to 9.15 (Very Good Predicate). This year's FIR on ML/TF score also exceeds the national average FIR on ML/TF score of 6.42, the average FIR on ML/TF score of PJK Bank of 8.10, and the average FIR on ML/TF score of KBMI 1 of 8.28, KBMI 2 of 8.43, KBMI 3 of 8.82, and KBMI 4 of 9.00.

PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Public Official Asset Declaration (LHKPN) Management

Dengan mempertimbangkan posisi Bank BPD Bali sebagai sebuah Bank Pembangunan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Bali, maka Bank mematuhi peraturan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) berdasarkan ketentuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi GCG di lingkungan Bank BPD Bali.

Considering Bank BPD Bali's position as a regional development bank owned by the Provincial Government of Bali and the City/Regional Governments in Bali Province, the Bank complies with the Public Officials' Asset Declaration (LHKPN) regulations based on the provisions of the Corruption Eradication Commission (KPK). This step is taken to improve the quality of GCG implementation within Bank BPD Bali.

Kebijakan Pelaporan Harta Kekayaan Asset Declaration Policy

Berpedoman pada beragam regulasi terutama Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No. 2 Tahun 2020 tentang Tata cara pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara, Bank BPD Bali telah memiliki ketentuan internal tentang Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Bank yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi No. 556/KEP/DIR/KPN/2020 tanggal 16 Desember 2020.

Based on various regulations, in particular the Corruption Eradication Commission (KPK) Regulation No. 2 of 2020 on Procedures for Registration, Announcement and Verification of Wealth Reports of Public Officials, Bank BPD Bali has internal regulations regarding the obligation to report wealth for the Board of Commissioners, Directors and Bank Officers, which are regulated by the Board of Directors' Resolution No. 556/KEP/DIR/KPN/2020 dated December 16, 2020.

Hal-hal penting yang diatur dalam ketentuan internal Bank tersebut anatar lain terkait Unit Pengelola LHKPN; penyampaian LHKPN; pemantauan penyampaian LHKPN; dan sanksi.

Important issues regulated by the Bank's internal regulations include the LHKPN Management Unit, the filing of the LHKPN, the monitoring of the filing of the LHKPN, and sanctions.

Pengelola LHKPN LHKPN Manager

Unit Pengelola LHKPN berfungsi utama untuk melakukan pengelolaan LHKPN di lingkungan Bank BPD Bali yang terdiri dari penanggung jawab, koordinator data, admin instansi, dan koordinator bidang pengawasan. Admin instansi wajib mengisi formulir permohonan aktivasi penggunaan aplikasi *e-Registration* LHKPN dan diserahkan kepada KPK untuk mendapatkan modul dan menu *e-Registration*.

The main function of the LHKPN Management Unit is to manage the LHKPN within Bank BPD Bali, consisting of a person in charge, a data coordinator, an agency admin, and a supervisory coordinator. Agency Admins are required to complete the application form to activate the use of the LHKPN e-Registration application and submit it to the KPK in order to obtain the e-Registration module and menu.

Penyampaian LHKPN Submission of LHKPN

Penyampaian LHKPN Bank BPD Bali dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat Bank. Dewan Komisaris dan Direksi menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat pengangkatan sebagai Dewan Komisaris dan Direksi pada saat pertama kali menjabat; berakhirnya masa jabatan; Dewan Komisaris dan Direksi; pengangkatan Kembali sebagai Dewan Komisaris dan Direksi setelah berakhirnya masa jabatan; dan selama menjabat sebagai Dewan Komisaris dan Direksi.

Submission of LHKPN of Bank BPD Bali is done by the Board of Commissioners, Directors and Bank Officers. The Board of Commissioners and Directors submit LHKPN to the KPK upon appointment as Board of Commissioners and Directors when first serving, upon expiration of term as Board of Commissioners and Directors, upon reappointment as Board of Commissioners and Directors after expiration of term, and during the term as Board of Commissioners and Directors.

Sedangkan untuk Pejabat Bank, penyampaian LHKPN dilakukan pada saat pengangkatan sebagai pejabat Bank pada saat pertama kali menjabat; berakhirnya masa jabatan atau pensiun; dan selama menjabat sebagai Pejabat Bank.

Meanwhile, for bank officials, the filing of LHKPN is done upon appointment as a bank official upon initial appointment; upon termination of term of office or retirement; and during term of office as a bank official.



Bank BPD Bali telah menyampaikan laporan LHKP untuk periode tahun 2023 yang dilaporkan pada tahun 2024 sebagai berikut:

Bank BPD Bali has submitted LHKP reports for the period 2023, which were reported in 2024 as follows:

Wajib Laporkan LHKPN LHKPN Reporting Mandatory		Telah Melaporkan LHKPN Has Submitted LHKPN		Telah Melaporkan LHKPN Has Submitted LHKPN	
Jabatan Position	Jumlah Number	Jabatan Position	Jumlah Number	Jabatan Position	%
Dewan Komisaris Board of Commissioners	5	Dewan Komisaris Board of Commissioners	5	Dewan Komisaris Board of Commissioners	100%
Direksi Board of Directors	5	Direksi Board of Directors	5	Direksi Board of Directors	100%
Pejabat Bank Bank Officers	159	Pejabat Bank Bank Officers	159	Pejabat Bank Bank Officers	100%
Jumlah Total	169	Jumlah Total	169	Jumlah Total	100%

PERKARA HUKUM DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Legal Cases and Administrative Sanctions

Perkara Hukum

Legal Cases

Bank BPD Bali menghadapi perkara hukum sebanyak 17 kasus baik perdata maupun pidana selama tahun 2024 dengan perincian sebagai berikut:

In 2024, Bank BPD Bali faced 17 lawsuits, both civil and criminal, as follows

Perkara Hukum	Jumlah Total	
	Perdata Civil	Pidana Criminal
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) Completed (has permanent legal effect)	10	1
Dalam proses penyelesaian In process of being resolved	6	0
Jumlah Total	16	1

Perkara hukum yang dihadapi Bank BPD Bali selama tahun 2024 dijelaskan
adalah sebagai berikut

The legal cases facing Bank BPD Bali in 2024 are explained as follows

No	Perkara Case	Status	Risiko/Nominal Gugatan Risk/Litigation	Sanksi yang Dikenakan Sanctions Imposed	Pengaruhnya Terhadap Kondisi Bank Effect on Bank Conditions
Perkara Perdata <i>Civil Cases</i>					
1.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 138/Pdt.G/2019/ PN. Jkt.Sel Bank BPD Bali – Turut Tergugat PT Bank Negara Indonesia (Persero) – Penggugat	Telah diputus oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 25 Juli 2024 dengan Putusan Tolak. (Inkracht)	Terhadap Bank BPD Bali tidak ada tuntutan pada gugatan, hanya sebagai pihak Turut Tergugat yang saat itu menempatkan dana sebesar Rp195.000.000.000,- dalam bentuk <i>Deposit on Call</i> . Dalam artian permasalahan terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat.	Tidak ada (karena perkara dimenangkan Bank)	Tidak ada
	South Jakarta District Court No. 138/Pdt.G/2019/PN. Jkt.Sel Bank BPD Bali - co- defendant PT Bank Negara Indonesia (Persero) - Plaintiff	<i>It was decided by the Supreme Court of the Republic of Indonesia on July 25, 2024 with a decision to reject. (Inkracht)</i>	<i>There is no claim against Bank BPD Bali in the lawsuit, only as a co-defendant who at that time placed funds of Rp 195,000,000,000,- in the form of deposit on demand. In the sense that the problem occurred between the plaintiff and the defendants.</i>	<i>None (because the case was won by the Bank)</i>	<i>None</i>
2.	Pengadilan Negeri Amlapura No. 89/Pdt.G/2022/PN Amp Bank BPD Bali – Tergugat I I Gede Munggha dkk. (Para Penggugat)	Sesuai dengan Risalah Pemberitahuan Putusan Kasasi Perkara No. 4622 K/PDT/2023 Jo 89/Pdt.G/2022/PN Amp tanggal 26 April 2024 disampaikan "Mahkamah Agung Republik Indonesia Menolak Permohonan Kasasi I Gede Munggha dkk.	Bank dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan lelang terhadap jaminan/ objek sengketa tanpa adanya Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dari orang yang berhak.	Tidak ada (karena perkara dimenangkan Bank)	Tidak ada
	Amlapura District Court No. 89/Pdt.G/2022/PN Amp Bank BPD Bali - Defendant I I Gede Munggha et al. (Plaintiffs)	<i>According to the Minutes of the Notification of the Cassation Decision for Case No. 4622 K/ PDT/2023 Jo 89/Pdt.G/2022/PN Amp dated April 26, 2024, it was stated "The Supreme Court of the Republic of Indonesia Rejects the Cassation Application of I Gede Munggha et al.</i>	<i>The bank was declared to have committed an unlawful act because it auctioned the collateral/ disputed object without any power of attorney to charge mortgage rights from the entitled person.</i>	<i>None (because the case was won by the Bank)</i>	<i>None</i>



No	Perkara Case	Status	Risiko/Nominal Gugatan Risk/Litigation	Sanksi yang Dikenakan Sanctions Imposed	Pengaruhnya Terhadap Kondisi Bank Effect on Bank Conditions
3.	Pengadilan Negeri Gianyar No. 169/Pdt.G/2022/PN Gin Bank BPD Bali – Turut Tergugat I I Wayan Sedantha, Dkk- Penggugat	Perkara telah diputus Mahkamah Agung RI No. 4774 K/Pdt/2023 dengan putusan Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon/ Penggugat	Bank BPD Bali Capem Sukawati diminta menyerahkan sisa hasil lelang jaminan	Tidak ada (karena perkara dimenangkan Bank)	Tidak ada
	Gianyar District Court No. 169/Pdt.G/2022/PN Gin Bank BPD Bali - Co-Defendant I I Wayan Sedantha et al- Plaintiffs	<i>The case has been decided by the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 4774 K/Pdt/2023 with a decision to reject the cassation application of the applicant/plaintiff.</i>	<i>Bank BPD Bali Capem Sukawati was ordered to hand over the remaining proceeds from the auction of the collateral.</i>	<i>None (because the case was won by the Bank)</i>	<i>None</i>
4.	Pengadilan Negeri Gianyar No. 275/Pdt.G/2022/PN Gin Bank BPD Bali – Tergugat I dan Tergugat II I Wayan Artawan, Dkk – Penggugat	Sesuai dengan Risalah Pemberitahuan Putusan Kasasi Perkara No. 4115 K/PDT/2024 Jo 263/Pdt/2023/PT.Dps. Jo 275/Pdt.G/2022/PN Gin tanggal 20 Desember 2024 disampaikan "Mahkamah Agung Republik Indonesia MENOLAK Permohonan Kasasi I Wayan Artawan dkk.	Bank dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena melaksanakan lelang Eksekusi Hak Tanggungan	Tidak ada (karena perkara dimenangkan Bank)	Tidak ada
	Gianyar District Court No. 275/Pdt.G/2022/PN Gin Bank BPD Bali - Respondent I and Respondent II I Wayan Artawan, et al - Plaintiffs	<i>According to the record of the notification of the cassation decision for Case No. 4115 K/PDT/2024 Jo 263/Pdt/2023/PT.Dps. Jo 275/Pdt.G/2022/PN Gin dated December 20, 2024, it is stated that "The Supreme Court of the Republic of Indonesia DENIES the cassation petition of I Wayan Artawan and others.</i>	<i>The bank was declared to have committed an unlawful act by conducting a foreclosure auction of mortgage rights.</i>	<i>None (because the case was won by the Bank)</i>	<i>None</i>
5.	Pengadilan Negeri Denpasar No. 145/Pdt.G/2023/PN Dps Bank BPD Bali – Tergugat I I Nyoman Suweca – Penggugat	Sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Putusan Kasasi Perkara No. 2943 K/PDT/2023 Jo No.145/Pdt.G/2023/PN.Dps tanggal 16 Oktober 2024 disampaikan Mahkamah Agung Republik Indonesia MENOLAK Permohonan Kasasi I Nyoman Suweca.	Bank dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan lelang eksekusi terhadap agunan penggugat karena Penggugat masih membayar angsuran kredit.	Tidak ada (karena perkara dimenangkan Bank)	Tidak ada
	Denpasar District Court No. 145/Pdt.G/2023/PN Dps Bank BPD Bali - Respondent I I Nyoman Suweca - Plaintiff	<i>In accordance with the Release of Notification of Cassation Decision for Case No. 2943 K/PDT/2023 Jo No.145/Pdt.G/2023/PN.Dps dated October 16, 2024, it was stated that "The Supreme Court of the Republic of Indonesia REJECTS the Cassation Application of I Nyoman Suweca.</i>	<i>The bank was declared to have committed an unlawful act by conducting a foreclosure sale of the plaintiff's collateral because the plaintiff was still paying loan installments.</i>	<i>None (because the case was won by the Bank)</i>	<i>None</i>

No	Perkara Case	Status	Risiko/Nominal Gugatan Risk/Litigation	Sanksi yang Dikenakan Sanctions Imposed	Pengaruhnya Terhadap Kondisi Bank Effect on Bank Conditions
6.	Pengadilan Negeri Singaraja No. 431/Pdt.G/2023/PN Sgr Bank BPD Bali – Tergugat I Ni Luh Senti dan Made Selamat –Penggugat Singaraja District Court No. 431/Pdt.G/2023/PN Sgr Bank BPD Bali - Respondent I Ni Luh Senti and Made Selamat - Plaintiffs	Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 15 Februari 2024 menyatakan “Gugatan Penggugat Tidak diterima”. <i>The decision of the Singaraja District Court dated February 15, 2024 stated that "the plaintiff's suit is not accepted".</i>	Bank dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena menetapkan harga lelang tidak sesuai dengan nilai pasar <i>The bank was declared to have committed an unlawful act by setting an auction price that did not correspond to the market value.</i>	Tidak ada (karena perkara dimenangkan Bank) <i>None (because the case was won by the Bank)</i>	Tidak ada <i>None</i>
7	Pengadilan Negeri Amlapura No. 264/Pdt.G/2023/PN.Amp Bank BPD Bali – Tergugat I Nengah Gitar – Penggugat Amlapura District Court No. 264/Pdt.G/2023/PN.Amp Bank BPD Bali - Respondent I Nengah Gitar - Plaintiff	Menunggu Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia <i>Awaiting the cassation decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia</i>	Bank dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi ketentuan/klausula pada Pasal 18 Perjanjian Kredit. <i>The bank was declared to have committed an unlawful act for failing to comply with the provisions/clauses of Article 18 of the credit agreement.</i>	Apabila Kasasi diterima maka tuntutan yang dikabulkan pengadilan harus dilaksanakan Penggugat <i>If the appeal is granted, the plaintiff must carry out the demands granted by the court.</i>	Tidak ada pengaruh terhadap Bank sebelum ada putusan tetap. <i>There is no effect on the Bank until a final decision is made.</i>
8	Pengadilan Negeri Amlapura No. 251/Pdt.G/2023/PN.Amp Bank BPD Bali – Tergugat Ni Kadek Arie Sulestarini- Penggugat Amlapura District Court No. 251/Pdt.G/2023/PN.Amp Bank BPD Bali - Defendant Ni Kadek Arie Sulestarini- Plaintiff	Mediasi berhasil mencapai kesepakatan para pihak berperkara (tercapai perdamaian) <i>Mediation successfully reached an agreement between the parties to the case (peace was achieved)</i>	Bank dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagaimana pasal 1320 KUHPdt. <i>The bank was declared to have committed an unlawful act because the credit agreement signed by the plaintiff did not comply with the formal requirements set forth in Article 1320 of the Civil Code.</i>	Tidak ada (karena perkara dimenangkan Bank) <i>None (because the case was won by the Bank)</i>	Tidak ada <i>None</i>
9	Pengadilan Negeri Bangli No. 162/Pdt.G/2023/PN.Bli Bank BPD Bali-Tergugat I Nengah Artha-Penggugat Bangli District Court No. 162/Pdt.G/2023/PN.Bli Bank BPD Bali - Defendant I Nengah Artha - Plaintiff	Mediasi berhasil mencapai kesepakatan para pihak berperkara (tercapai perdamaian) <i>Mediation successfully reached an agreement between the parties to the case (peace was achieved)</i>	Bank dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena menetapkan nilai <i>limit</i> jaminan tidak sesuai dengan nilai pasar. <i>The bank was declared to have committed an illegal act because it did not set the collateral limit in accordance with the market value.</i>	Tidak ada (karena perkara dimenangkan Bank) <i>None (because the case was won by the Bank)</i>	Tidak ada <i>None</i>



No	Perkara Case	Status	Risiko/Nominal Gugatan Risk/Litigation	Sanksi yang Dikenakan Sanctions Imposed	Pengaruhnya Terhadap Kondisi Bank Effect on Bank Conditions
10	Pengadilan Negeri Denpasar No. 63/Pdt.G/2024/PN.Dps Bank BPD Bali – Tergugat I Ni Ketut Suartini- Penggugat <i>Denpasar District Court No. 63/Pdt.G/2024/PN.Dps</i> Bank BPD Bali- Respondent I Ni Ketut Suartini - Plaintiff	Putusan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 19 Agustus 2024 menyatakan Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya. <i>The Denpasar District Court Decision dated August 19, 2024 stated that it rejected the plaintiff's claim in its entirety.</i>	Bank dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena : - melakukan lelang tanpa melakukan restrukturisasi terlebih dahulu; - melakukan lelang tidak sesuai dengan harga pasar. <i>The bank was declared to have committed an unlawful act because it</i> - <i>Conducted an auction without prior restructuring;</i> - <i>conducting an auction that was not in line with the market price.</i>	Tidak ada (karena perkara dimenangkan Bank) <i>None (because the case was won by the Bank)</i>	Tidak ada <i>None</i>
11	Pengadilan Negeri Amlapura No. 41/Pdt.G/2023/PN.Amp Bank BPD Bali – Tergugat II I Gede Rai R. – Penggugat <i>Amlapura District Court No. 41/Pdt.G/2023/PN.Amp</i> Bank BPD Bali - Respondent II I Gede Rai R. - Plaintiff	Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar (Banding) tanggal 12 November 2024 menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan "Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya." <i>The Denpasar High Court Decision (Appeal) dated November 12, 2024 stated that it upheld the Denpasar District Court Decision which stated that it "denied the Plaintiff's claim in its entirety".</i>	Bank dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena melelang semua jaminan Tergugat I/Debitur termasuk jaminan milik penggugat. <i>The bank was declared to have committed an unlawful act because it auctioned all the collateral of Defendant I/Debtor, including the plaintiff's collateral.</i>	Apabila diajukan Kasasi maka Bank akan melakukan perlawanan <i>If cassation is granted, the Bank will appeal</i>	Tidak ada pengaruh terhadap Bank sebelum ada putusan tetap. <i>There is no effect on the Bank until a final decision is made.</i>
12	Pengadilan Negeri Singaraja No. 211/Pdt.Bth/2024/PN.Sgr. Bank BPD Bali-Terbantah Wajan Budiarsa-embantah <i>Singaraja District Court No. 211/Pdt.Bth/2024/PN.Sgr.</i> Bank BPD Bali-Rejected Wajan Budiarsa-Defendant	Pembantah/Penggugat menyatakan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 12 November 2024 yang menyatakan Gugatan Pembantah tidak dapat diterima (<i>niet ontvankelijke verklaard</i>). <i>The Defendant/Claimant filed an appeal against the decision of the Singaraja District Court dated November 12, 2024, which stated that the Defendant's claim was inadmissible (niet ontvankelijke verklaard).</i>	Bank dinyatakan tidak beritikad baik karena menetapkan harga lelang tidak sesuai pasar dan memohon pembatalan harga lelang. <i>The bank was declared to have acted in bad faith for setting an auction price that was not in line with the market and for requesting the cancellation of the auction price.</i>	Belum ada karena masih menunggu Putusan Banding <i>Not yet, because it is still waiting for the appeal decision</i>	Tidak ada pengaruh terhadap Bank sebelum ada putusan tetap. <i>There is no effect on the Bank until a final decision is made.</i>
13	Pengadilan Negeri Denpasar No. 885/Pdt.G/2024/PN.Dps Bank BPD Bali – Tergugat Ahmad Ase – Penggugat <i>Denpasar District Court No. 885/Pdt.G/2024/PN.Dps</i> Bank BPD Bali - Defendant Ahmad Ase - Plaintiff	Penggugat menyatakan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 November 2024 yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (<i>niet ontvankelijke verklaard</i>). <i>The Defendant filed an appeal against the Denpasar District Court's decision dated November 25, 2024, which found the Plaintiff's claim inadmissible (niet ontvankelijke verklaard).</i>	Bank dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan lelang jaminan milik Penggugat. <i>The bank was declared to have committed an unlawful act by auctioning the plaintiff's collateral.</i>	Belum ada karena masih menunggu Putusan Banding <i>Not yet, because it is still waiting for the appeal decision</i>	Tidak ada pengaruh terhadap Bank sebelum ada putusan tetap. <i>There is no effect on the Bank until a final decision is made.</i>

No	Perkara Case	Status	Risiko/Nominal Gugatan Risk/Litigation	Sanksi yang Dikenakan Sanctions Imposed	Pengaruhnya Terhadap Kondisi Bank Effect on Bank Conditions
14	Pengadilan Negeri Denpasar No. 978/Pdt.G/2024/PN.Dps Bank BPD Bali – Tergugat I Mohammad Ridwan dkk-Para Penggugat Denpasar District Court No. 978/Pdt.G/2024/PN.Dps Bank BPD Bali-Respondent I / Mohammad Ridwan et al-Plaintiffs	Penggugat mencabut gugatannya pada persidangan tanggal 21 Oktober 2024 <i>The defendant withdrew his claim at the hearing on October 21, 2024.</i>	Bank dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena : - melakukan lelang tanpa melakukan restrukturisasi terlebih dahulu; - melakukan lelang tidak sesuai dengan harga pasar. <i>The bank was declared to have committed an unlawful act because it</i> - <i>Conducted an auction without prior restructuring;</i> - <i>conducting an auction that did not correspond to the market price.</i>	Tidak ada (karena perkara dimenangkan Bank) <i>None (because the case was won by the Bank)</i>	Tidak ada <i>None</i>
15	Pengadilan Negeri Negara No. 209/Pdt.G/2024/PN.Nga Bank BPD Bali-Tergugat I H. Saleh, dkk-Para Penggugat Negara District Court No. 209/Pdt.G/2024/PN.Nga Bank BPD Bali-Defendant I H. Saleh et al-Plaintiffs	Proses menunggu pembacaan putusan tanggal 5 Februari 2025 <i>Awaiting the reading of the judgment on February 5, 2025</i>	Bank dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena : -- melakukan lelang tanpa pemberitahuan kepada Debitur; <i>The bank was declared to have committed an unlawful act because it</i> - <i>Conducted an auction without notifying the debtor;</i>	Belum ada karena masih menunggu Putusan Pengadilan Negeri Negara <i>Not yet, because it is still waiting for the appeal decision</i>	Tidak ada pengaruh terhadap Bank sebelum ada putusan tetap. <i>There is no effect on the Bank until a final decision is made.</i>
16	Pengadilan Negeri Negara No. 4/Pdt.Eks/2024/PN.Nga Bank BPD Bali – Pemohon Eksekusi Yardita-Termohon Eksekusi Negara District Court No. 4/Pdt.Eks/2024/PN.Nga Bank BPD Bali - Plaintiff Yardita-Defendant	Proses Penilaian Jaminan oleh Kantor Jasa Penilai Publik <i>The process of the valuation of the collateral by the Public Valuation Office</i>	Nilai jaminan yang dilakukan pelelangan Fiat Pengadilan sejumlah Rp6.140.460.826,76 (enam miliar seratus empat puluh juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah tujuh puluh enam sen) <i>The value of the collateral auctioned by the Court Fiat amounted to Rp6,140,460,826.76 (six billion one hundred forty million four hundred sixty thousand eight hundred twenty six rupiah and seventy six cents).</i>	Tidak ada, karena Bank yang melakukan pelelangan Fiat Pengadilan <i>None, because the bank is the one conducting the court fiat auction.</i>	Proses Penilaian Jaminan oleh Kantor Jasa Penilai Publik <i>Collateral Valuation Process by Public Valuation Services Office</i>
Perkara Kepailitan Bankruptcy Cases					
1.	10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Sby., tertanggal 19 Nopember 2015	Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.10/PKPU/2015/PN.NIAGA. SBY tanggal 15 Agustus 2016 yang menyatakan : "Termohon PT. Karya Cipta Putera Pratama berkedudukan di Jalan Kutisari Indah Utara IV/72, Surabaya berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya." Saat ini Kurator yang baru sedang melakukan pemberesan boedel pailit.	Masih dalam proses penyelesaian boedel pailit oleh Kurator	Tidak ada, karena Bank adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara kepailitan ini.	Berpengaruh pada tidak sepenuhnya diperoleh nilai kredit yang telah dikeluarkan karena dari hasil penyelesaian boedel pailit akan dilakukan pembagian terlebih dahulu untuk, pembayaran pajak yang tertunggak, pihak Pengadilan, Kurator, Bank BPD Bali, dan kreditor lainnya.



No	Perkara Case	Status	Risiko/Nominal Gugatan Risk/Litigation	Sanksi yang Dikenakan Sanctions Imposed	Pengaruhnya Terhadap Kondisi Bank Effect on Bank Conditions
		Decision of the Commercial Court at the Surabaya District Court No. 10/PKPU/2015/PN.NIAGA. SBY dated August 15, 2016, which states: "Respondent PT. Karya Cipta Putera Pratama located at Jalan Kutisari Indah Utara IV/72, Surabaya is in a state of bankruptcy with all legal consequences." Currently, the new trustee is in the process of settling the bankruptcy estate.	Still in the process of resolving the bankruptcy estate by the curator	None, because the bank is a party to the bankruptcy.	Affects the credit value issued is not fully obtained because the results of bankruptcy settlement will be divided first for, payment of tax arrears, the court, the curator, Bank BPD Bali, and other creditors.
2.	21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby., tertanggal 5 Mei 2023	Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby., tertanggal 5 Mei 2023 yang menyatakan : "Termohon PT Hakadikon Beton Pratama dan Herman Sudarta berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya." Saat ini Kurator sedang melakukan pencatatan daftar piutang para Debitor. Decision of the Commercial Court at the Surabaya District Court 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby. dated May 5, 2023, which states: "Defendant PT Hakadikon Beton Pratama and Herman Sudarta are in a state of bankruptcy with all legal consequences". Currently, the Curator is recording the list of debtors' claims.	Masih dalam proses penyelesaian boedel pailit oleh Kurator Still in the process of resolving the bankruptcy estate by the curator	Tidak ada, karena Bank adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara kepailitan ini. None, because the bank is a party to the bankruptcy.	Berpengaruh pada tidak sepenuhnya diperoleh nilai kredit yang telah dikeluarkan karena dari hasil penyelesaian boedel pailit akan dilakukan pembagian terlebih dahulu untuk, pembayaran pajak yang tertunggak, pihak Pengadilan, Kurator, Bank Danamon, BNI 46 dan Bank BPD Bali selaku kreditur konkuren. Affects the credit value issued is not fully obtained because the results of bankruptcy settlement will be divided first for, payment of tax arrears, the Court, Curator, Bank Danamon, BNI 46 and Bank BPD Bali as concurrent creditors.

No	Kasus Case	Unit Kerja Working Unit	Keterangan Remarks
1	Perkara Pidana No. 199/Pid.Sus/2024/PN Dps, dengan terdakwa Giri Hendrayana <i>Criminal Case No. 199/Pid.Sus/2024/PN Dps, with defendant Giri Hendrayana,</i>	Bank BPD Bali Kantor Pusat	Putusan Kasasi tanggal 15 November 2024 menyatakan "Menjatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan". <i>The Cassation Decision dated November 15, 2024 stated "Sentencing the defendant to 1 (one) year and 6 (six) months in prison and a fine of Rp. 50,000,000 (fifty million rupiah) with the provision that if the fine is not paid, it will be replaced with imprisonment for 3 (three) months".</i>



Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang Sedang Menjabat *Legal Issues Currently Facing Board and Directors*

Bank BPD Bali melaporkan tidak terdapat permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat untuk tahun buku 2024.

Bank BPD Bali reported that there have been no legal issues currently facing the Board of Commissioners and Incumbent Directors for the financial year 2024.

Sanksi Administratif *Administrative Sanctions*

Bank BPD Bali mendapatkan 6 sanksi/denda dari Regulator pada tahun 2024. Namun demikian sanksi administratif tersebut bersifat non material, sehingga tidak memberikan dampak terhadap kinerja keuangan maupun kinerja operasional Bank. Bank BPD Bali berkomitmen untuk memenuhi segala bentuk regulasi dan penyampaian laporan secara tepat waktu.

Bank BPD Bali has received 6 (six) administrative sanctions from the Regulator in 2024. However, these administrative sanctions are immaterial and therefore do not have any impact on the financial or operational performance of the Bank. Bank BPD Bali is committed to comply with all forms of regulations and submit reports in a timely manner.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK LAINNYA *Other Good Corporate Governance Practices*

Pengungkapan Pengendalian Gratifikasi *Gratification Control Disclosure*

Kebijakan Pengendalian Gratifikasi

Bank BPD Bali mendukung upaya pemberantasan korupsi mellaui pembentukan unit pengendali gratifikasi. Selain itu, Keputusan Direksi No.0428/KEP/DIR/KPN/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebagaimana diubah dengan Keputusan Direksi No.0432/KEP/DIR/KPN/2023 tanggal 11 September 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi No.0428/KEP/DIR/KPN/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

Hal-hal penting yang diatur dalam pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Bank BPD Bali adalah kewajiban penolakan gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya antara lain seperti terkait dengan: pemberian layanan pada masyarakat di luar penerimaan yang sah; proses penyusunan anggaran di luar penerimaan yang sah; proses promosi/mutasi pejabat/karyawan; dan akibat dari perjanjian kerja sama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain.

Selain itu, setiap pengurus dan karyawan wajib melaporkan gratifikasi kepada KPK atau melalui Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) selambat-lambatnya 7 hari sejak penerimaan gratifikasi dengan pengecualian

Gratification Control Policy

Bank BPD Bali supports efforts to eradicate corruption by establishing a gratification control unit. In addition, Board of Directors Decree No. 0428/KEP/DIR/KPN/2019 dated July 31, 2019 concerning Gratification Control within PT Bank Pembangunan Daerah Bali as amended by Board of Directors Decree No. 0432/KEP/DIR/KPN/2023 dated September 11, 2023 concerning Amendments to Board of Directors Decree No. 0428/KEP/DIR/KPN/2019 dated July 31, 2019 concerning Gratification Control within PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

Important matters regulated in the gratification control guidelines within Bank BPD Bali are the obligation to refuse gratification that is known from the outset to be related to one's position and contrary to one's duties and obligations, including those related to: providing services to the community outside of legitimate income; the budget preparation process outside of legitimate income; the process of promoting/transferring officials/employees; and the consequences of cooperation agreements/contracts/agreements with other parties.

In addition, every manager and employee is obliged to report gratification to the KPK or through the Gratification Control Unit (UPG) no later than 7 days from the receipt of the gratification, with the exceptions stipulated

yang diatur dalam ketentuan tersebut. Penyampaian gratifikasi disampaikan secara tertulis dengan menggunakan sarana elektronik atau non-elektronik dengan mengisi formulir pelaporan gratifikasi yang telah ditetapkan. Pelapor gratifikasi berhak mendapatkan perlindungan Bank BPD Bali dan tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif karena melaporkan gratifikasi.

Pengelolaan pengendalian gratifikasi dilaksanakan oleh UPG yang berada di bawah Divisi Kepatuhan dengan fungsi utama melakukan pengendalian gratifikasi di lingkungan Bank BPD Bali.

Kebijakan pengendalian gratifikasi ini diperkuat dengan Pedoman Teknis Sistem Anti Penyuapan yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0128/KEP/DIR/KPN/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Pedoman Teknis Sistem Manajemen Anti Penyuapan sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0433/KEP/DIR/KPN/2023 tanggal 11 September 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 0128/KEP/DIR/KPN/2023 tentang Pedoman Teknis Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Kebijakan ini memberikan acuan kepada satuan kerja dan unit kerja agar memiliki *risk awareness* dalam pelaksanaan pencegahan penyuapan pada setiap tahapan proses.

Pelaporan Gratifikasi

Bank BPD Bali melaporkan selama tahun 2024 tidak ada laporan terkait penerimaan gratifikasi dari pengurus dan karyawan. Bank BPD Bali juga telah mengikuti survei yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui media aplikasi Panduan Cegah Korupsi (PanCEK) dimana hasil verifikasi Implementasi Panduan Cegah Korupsi Bank BPD Bali pada Verifikasi 1 tahun 2023 memperoleh nilai 74,70 dan tahun 2024 Bank BPD Bali melakukan Verifikasi 2 memperoleh nilai 85,54 (pencapaian yang baik). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan apresiasi kepada Bank BPD Bali yang telah sangat konsisten dan berkomitmen dalam mengimplementasikan Panduan Cegah Korupsi.

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik Funding for Social and Political Activities

Bank BPD Bali menyatakan tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan politik selama tahun 2024. Kebijakan internal Bank BPD Bali melarang keterlibatan Bank termasuk pekerja dalam kegiatan politik, termasuk memberikan dana untuk kepentingan politik. Independensi dan profesionalisme Bank dan pekerja penting dijaga dalam menjalankan kegiatan operasional Bank BPD Bali.

Terkait dengan kegiatan sosial, Bank BPD Bali memiliki kebijakan terkait penyaluran dana untuk kegiatan sosial yang berdampak positif kepada publik dan memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkesinambungan. Pelaksanaan kegiatan sosial akan diinformasikan di dalam pembahasan Bab Keberlanjutan dalam Laporan Tahunan ini.

in the regulations. The gratification is reported in writing using electronic or non-electronic means by filling in the established gratification reporting form. The gratification reporter has the right to receive protection from Bank BPD Bali and will not receive discriminatory treatment for reporting gratification.

The management of gratification control is carried out by the UPG, which is under the Compliance Department with the main function of controlling gratification within the environment of Bank BPD Bali.

This gratification control policy is reinforced by the Technical Guidelines for the Anti-Bribery System, established by the Board of Directors' Decree of PT Bank Pembangunan Daerah Bali Number 0128/KEP/DIR/KPN/2023 dated March 20, 2023 concerning Technical Guidelines for the Anti-Bribery Management System as amended by Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Bali Number 0433/KEP/DIR/KPN/2023 dated September 11, 2023 concerning Amendments to Decree of the Board of Directors Number 0128/KEP/DIR/KPN/2023 concerning Technical Guidelines for the Anti-Bribery Management System. This policy is a reference for the business units and work units to be aware of the risks in implementing the prevention of bribery at each stage of the process.

Gratification Reporting

Bank BPD Bali has reported that during the year 2024, there have been no reports related to the receipt of gratification from managers and employees. Bank BPD Bali also participated in a survey conducted by the Corruption Eradication Commission through the application media of the Corruption Prevention Guide (PanCEK) where the results of the verification of the implementation of the Corruption Prevention Guide for Bank BPD Bali in Verification 1 in 2023 received a score of 74.70 and in 2024 Bank BPD Bali conducted Verification 2 received a score of 85.54 (good performance). The Corruption Eradication Commission (KPK) expressed its appreciation to Bank BPD Bali for being very consistent and committed in implementing the Corruption Prevention Guide.

Bank BPD Bali stated that no funds were provided for political activities in 2024. Bank BPD Bali's internal policy prohibits the involvement of the Bank, including its employees, in political activities, including the provision of funds for political interests. The independence and professionalism of the Bank and its employees must be maintained in the conduct of Bank BPD Bali's operational activities.

With regard to social activities, Bank BPD Bali has a policy on the distribution of funds for social activities that have a positive impact on the public and are of benefit to the community on an ongoing basis. The implementation of social activities is discussed in the sustainability chapter of this annual report.



Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Related Party Financing and Large Exposures

Kebijakan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Bank BPD Bali telah memiliki pedoman untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi Nomor 0455/KEP/DIR/KPI/2024 tanggal 26 Agustus 2024 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan.

Berpedoman pada kebijakan tersebut, Bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyediaan dana kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan independen tanpa ada intervensi dari pihak terkait atau pihak lainnya.

Pelaksanaan penyediaan dana tersebut berpedoman pada kebijakan dan prosedur tentang Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan/atau Penyediaan Dana Besar yang diatur dalam BPP Perkreditan. Bank BPD Bali telah menyampaikan Laporan Penyediaan Dana dimaksud kepada OJK secara berkala, tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaporan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Penyediaan dana kepada Debitur Bank BPD Bali per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut ini

No	Penyediaan Dana Provision of Funds	Jumlah Debitur Number of Debtors	Jumlah Nominal (RpJuta) Nominal Amount (Rp Million)
1	Kepada pihak terkait Related party	163	32.221
2	Kepada debitur inti To core debtors		
	1. Individu/Individuals	23	309.592
	2. Group	103	1.071.607

Policy on Related Parties Financing and Large Exposures

Bank BPD Bali has a policy on related parties financing and large exposures as stipulated in the Board of Directors' Resolution No. 0455/KEP/DIR/KPI/2024 dated August 26, 2024 on the Company Policy Book (BPP) for Credit.

Guided by this policy, the Bank has implemented the principles of prudence and risk management in the provision of funds, especially the provision of funds to related parties and/or the provision of large funds in accordance with the provisions of Bank Indonesia concerning the Maximum Credit Limit (BMPK) and independently without any intervention from related parties or other parties.

The implementation of the provision of funds is guided by the policies and procedures regarding the provision of funds to related parties and/or the provision of large funds as stipulated in the BPPK for credit. Bank BPD Bali has submitted the Provision of Funds Report to the OJK on a regular basis, in a timely manner and in accordance with the applicable regulations.

Reporting on Related Parties Financing and Large Exposures

The provision of funds to debtors of Bank BPD Bali as of December 31, 2024 is presented in the following table

Pengungkapan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Disclosure of Conflict of Interest Transactions

Kebijakan Penyelesaian Mengenai Benturan Kepentingan

Bank BPD Bali telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan karyawan yang dimuat dalam Keputusan Direksi No. 0401/KEP/DIR/KPN/2024 tanggal 08 Mei 2024 tentang Buku Pedoman Perusahaan Penerapan Tata Kelola PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

Conflict of Interest Resolution Policy

Bank BPD Bali has a conflict of interest policy, system and procedure that is binding on each officer and employee as stated in the Board of Directors' Resolution No. 0401/KEP/DIR/KPN/2024 dated May 8, 2024 on the Company Guidelines for the Implementation of Governance of PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

Kebijakan benturan kepentingan mengatur antara lain, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan Karyawan Bank BPD Bali dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan setiap keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan wajib diungkapkan dalam notulen rapat. Penyusunan kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bank bagi Bank Umum.

Penanganan benturan kepentingan juga diatur dalam pedoman kerja pada Divisi Umum dan Kesekretariatan (Keputusan Direksi No. 0079/KEP/DIR/UMS/2021 tanggal 18 Pebruari 2021 tentang BPP Pengadaan Barang / Jasa), Divisi Kredit (Keputusan Direksi No. 0734/KEP/DIR/KRD/2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Perubahan Ke XIV atas Keputusan Direksi No. 0230/KEP/DIR/KRD/2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan) dan pada Divisi Sumber Daya Manusia (Keputusan Direksi Nomor 0302/KEP/DIR/SDM/2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Direksi Nomor 0349/KEP/DIR/SDM/2014 tanggal 23 Mei 2014 tentang SOP Disiplin Karyawan).

Pelaporan Transaksi Benturan Kepentingan

Bank BPD Bali menyatakan tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama Tahun 2024 sehingga tidak ada kerugian atau hal yang mengurangi keuntungan Bank.

The Conflict of Interest Policy provides, among other things, that members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, officers and employees of Bank BPD Bali are prohibited from taking any action that may harm or reduce the profits of the Bank and that any transaction decision involving a conflict of interest shall be disclosed in the minutes of the meeting. The preparation of this policy refers to the Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 on the Implementation of Bank Governance for Commercial Banks.

The handling of conflicts of interest is also regulated in the work guidelines of the General and Secretariat Department (Board of Directors' Decision No. 0079/KEP/DIR/UMS/2021 of February 18, 2021 on the BPP Procurement of Goods/Services), the Credit Department (Board of Directors' Decision No. 0734/KEP/DIR/KRD/2024 of December 19, 2024 on Amendment XIV to the Board of Directors' Decision No. 0230/KEP/DIR/KRD/2014 concerning Credit Standard Operating Procedures (SOP) and in the Human Resources Department (Board of Directors' Resolution No. 0302/KEP/DIR/SDM/2021 dated June 22, 2021 concerning the Fourth Amendment to Board of Directors' Resolution No. 0349/KEP/DIR/SDM/2014 dated May 23, 2014 concerning Employee Discipline SOP).

Reporting of Conflict of Interest Transactions

Bank BPD Bali stated that there were no transactions involving conflict of interest in 2024, so there were no losses or things that reduced the bank's profits.

Pengungkapan Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan *Transparency Disclosure of Financial and Non-Financial Conditions*

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank BPD Bali mengacu dan tunduk pada ketentuan dan peraturan perbankan yang berlaku, dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati-hatian melalui prinsip mengenal nasabah maupun pengelolaan risiko operasional, risiko hukum dan risiko reputasi sesuai peraturan dan pedoman yang telah dimiliki Bank.

Bank BPD Bali telah mengungkapkan kondisi keuangan dan non keuangan secara lengkap dalam Laporan Publikasi dan Laporan tahunan maupun laporan lainnya. Bank telah melakukan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.

The financial and non-financial conditions of Bank BPD Bali are disclosed in accordance with and subject to the applicable banking rules and regulations, considering and implementing the principle of prudence through the principle of knowing your customer and managing operational risk, legal risk and reputational risk in accordance with the Bank's regulations and policies.

Bank BPD Bali has disclosed complete financial and non-financial conditions in the publication report and annual report and other reports. The Bank has conducted transparency of financial and non-financial conditions to stakeholders and submitted to related parties in accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 37/POJK.03/2019 on Transparency and Disclosure of Bank Reporting and Financial Services Authority Circular No. 9/SEOJK.03/2020 on Transparency and Disclosure of Conventional Commercial Bank Reporting.



Pengungkapan Rencana Strategis Bank

Disclosure of The Bank's Strategic Plan

Rencana strategis Bank BPD Bali disusun dalam bentuk rencana korporasi yang menggambarkan rencana strategis jangka panjang (lima tahun). Terakhir kali, Bank telah menyusun Perubahan *Corporate Plan* Bank BPD Bali Tahun 2021-2025 yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi Nomor 0556/KEP/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 25 Nopember 2022.

Bank juga telah menyusun Rencana Bisnis Bank Tahun 2024-2026 sesuai Keputusan Direksi Nomor 0598/KEP/DIR/RENSTRA/2023 tanggal 23 November 2023 tentang Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2024-2026 dan telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank BPD Bali Tahun 2024-2026 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank BPD Bali Tahun 2024-2028.

Rencana Bisnis Bank tersebut disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur serta memperhatikan prinsip kehati-hatian serta responsif terhadap perubahan Intern dan Ekstern. Selanjutnya Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada pemegang saham, regulator dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank BPD Bali.

Penjelasan ringkas terkait Rencana Bisnis Bank dapat dilihat di bab Pembahasan dan Analisa Manajemen dari Laporan Tahunan ini.

Bank BPD Bali's Strategic Plan is prepared in the form of a Corporate Plan which describes a long-term strategic plan (five years). Recently, the Bank has prepared the amendments to Bank BPD Bali's Corporate Plan for 2021-2025, which was approved by the Board of Directors' Resolution No. 0556/KEP/DIR/RENSTRA/2022 dated November 25, 2022.

The Bank has also prepared the Bank's Business Plan for 2024-2026 in accordance with the Board of Directors' Resolution No. 0598/KEP/DIR/RENSTRA/2023 dated November 23, 2023 regarding the Bank Business Plan of PT Bank Pembangunan Daerah Bali for 2024-2026 and has been submitted to the Financial Services Authority regarding the submission of Bank BPD Bali's Business Plan for 2024-2026 and Bank BPD Bali's Sustainable Financial Action Plan for 2024-2028.

The Bank's Business Plan is prepared in a realistic, comprehensive and measurable manner, taking into account the principle of prudence and responsiveness to internal and external changes. In addition, the Board of Directors has communicated the Bank's Business Plan to shareholders, regulators and all levels of Bank BPD Bali's organization.

Please refer to the Management Discussion and Analysis section of this Annual Report for a brief explanation of the Bank's Business Plan.

KEBIJAKAN PENDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK LAINNYA

Other Supporting Policies for the Implementation of Good Corporate Governance

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Policy on Procurement of Goods and Services

Bank BPD Bali telah memiliki kebijakan pengadaan barang/jasa sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direksi No. 0079/KEP/DIR/UMS/2021 Tanggal 18 Februari 2021 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pengadaan Barang/Jasa. Kebijakan pengadaan barang/jasa sebagaimana yang tertuang dalam BPP meliputi meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa; melaksanakan pengadaan barang/jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif; serta memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa di lingkungan Bank BPD Bali.

Kebijakan pengadaan barang/jasa lainnya juga meliputi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik; mendorong pelaksanaan industry kreatif; dan melaksanakan pengadaan berkelanjutan. Bank BPD Bali juga menerapkan prinsip pengadaan barang/jasa yakni

Bank BPD Bali has a policy for procurement of goods/services as stipulated in the Board of Directors' Resolution No. 0079/KEP/DIR/UMS/2021 dated February 18, 2021 on the Company Policy (BPP) for Procurement of Goods/Services. The policy for the procurement of goods/services as stated in the BPP includes the improvement of the quality of planning for the procurement of goods/services, the implementation of the procurement of goods/services that are more transparent, open and competitive, and the strengthening of the institutional capacity and human resources for the procurement of goods/services within Bank BPD Bali.

Other procurement policies are also the use of information and communication technology and electronic transactions, the promotion of the implementation of creative industries, and the implementation of sustainable procurement. Bank BPD Bali also applies the following principles in the procurement of goods and services, namely

1. Efisien

Pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan.

2. Efektif

Pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

3. Transparan

Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

4. Terbuka

Pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

5. Bersaing

Pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan.

6. Adil

Perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu.

7. Akuntabel

Harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa tersebut, Bank BPD Bali juga memiliki ketentuan lainnya salah satunya terkait dengan Kewenangan Memutus Pengadaan Barang/Jasa yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direksi No. 0125/KEOP/DIR/UMS/2021 tanggal 10 Maret 2021.

1. Efficiency

Procurement of goods/services must be attempted using minimum resources and power to achieve quality and objectives within the specified time.

2. Effective

Procurement of goods/services must be consistent with established needs and objectives and provide the greatest possible value.

3. Transparent

All rules and information regarding the procurement of goods/services are clear and can be widely known by interested suppliers of goods/services and by the public in general.

4. Open

The procurement of goods/services is open to all suppliers of goods/services who meet certain requirements based on clear rules and procedures.

5. Competitive

Procurement of goods/services must be conducted through healthy competition among as many suppliers of goods/services as possible that are equal and meet the requirements.

6. Fairness

Equal treatment of all prospective suppliers of goods/services and not biased in favor of any particular party.

7. Accountable

Must be in accordance with the rules and regulations related to the procurement of goods/services so that it can be accounted for.

In order to strengthen the implementation of the goods/services procurement policy, Bank BPD Bali also has other provisions, one of which is related to the authority to decide on the procurement of goods/services, which has been stipulated in the Board of Directors' Resolution No. 0125/KEOP/DIR/UMS/2021 dated March 10, 2021.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen

Guidelines and Work Rules of the Consumer Complaints Handling and Resolution Committee

Bank BPD Bali berkomitmen terhadap perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Komitmen tersebut salah satunya dituangkan melalui penetapan kebijakan tentang Komite Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen berdasarkan Keputusan Direksi No. 0550/KEP/DIR/DJA/2024 tanggal 9 Oktober 2024. Komite Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen tersebut diketuai oleh Direktur Utama dan 4 (empat) Direksi lainnya sebagai Wakil Ketua yang didukung oleh berbagai Kepala Divisi sebagai Sekretaris dan Anggota.

Bank BPD Bali is committed to the protection of consumers and the community in the financial services sector. One of the commitments is expressed by establishing a Consumer Complaint Handling and Settlement Committee Policy based on the Board of Directors Resolution No. 0550/KEP/DIR/DJA/2024 dated October 9, 2024. The Consumer Complaint Handling and Settlement Committee shall be chaired by the President Director and 4 (four) other Directors as Vice Chairmen, assisted by various Department Heads as Secretaries and Members.



Adapun tujuan pembentukan komite tersebut adalah membantu Bank BPD Bali dalam rangka menjaga reputasi Bank dengan berperan sebagai wadah yang melakukan serangkaian proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan kegiatan Unit Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen secara terus menerus atas layanan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen.

The purpose of establishing the Committee is to assist Bank BPD Bali in maintaining the reputation of the Bank by acting as a forum that carries out a number of planning, organizing, and monitoring the activities of the Consumer Complaint Handling and Settlement Unit continuously for consumer complaint handling and settlement services.

Ketentuan Baru dan Pembaruan Ketentuan untuk Mendukung Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

New and Updated Provisions to Support Good Corporate Governance Implementation

Bank BPD Bali berkomitmen terhadap penerapan GCG di segenap tingkatan atau jenjang organisasi Bank dan di seluruh aspek operasional. Terkait dengan hal tersebut, Bank BPD Bali telah memiliki Buku Pedoman Perusahaan (BPP) baru dan BPP perubahan serta Standar Operasional Prosedur (SOP) baru dan SOP perubahan yang diterbitkan selama tahun 2024.

Bank BPD Bali is committed to the implementation of GCG at all levels of the Bank's organization and in all operational aspects. In this regard, Bank BPD Bali has issued a new Company Manual (BPP) and a revised BPP as well as new Standard Operating Procedures (SOPs) and revised SOPs during the year 2024, as shown in the table below.

Secara kumulatif, Bank BPD Bali telah memiliki 27 (dua puluh tujuh) Buku Pedoman Perusahaan (BPP) dan 148 Standar Operasional Prosedur (SOP) atau telah memiliki 175 ketentuan internal per 31 Desember 2024 guna mendukung penerapan terbaik atas prinsip-prinsip GCG di lingkungan Bank.

Cumulatively, as of December 31, 2024, Bank BPD Bali will have 27 (twenty-seven) Company Manuals (BPP) and 148 Standard Operating Procedures (SOPs) or will have 175 internal regulations in place to support the best possible implementation of the GCG principles within the Bank.

Tabel di bawah ini menjelaskan BPP baru dan BPP perubahan serta SOP baru dan SOP perubahan terpilih yang diterbitkan selama tahun 2024 dan terkait langsung dengan bab Tata Kelola yang Baik bagi Perusahaan ini.

The following table describes the new BPPs and amended BPPs and selected new SOPs and amended SOPs that were issued during the year 2024 and that are directly related to this chapter on good corporate governance.

No.	Keputusan Direksi <i>Board of Directors Decision</i>	Tanggal <i>Date</i>	Tentang <i>About</i>
1	0178/KEP/DIR/SDM/2024	16/04/2024	BPP Sumber Daya Manusia <i>Human Resources BPP</i>
2	0187/KEP/DIR/SDM/2024	19/04/2024	SOP Sistem Penggajian Karyawan <i>Employee Payroll System SOP</i>
3	0188/KEP/DIR/KPN/2024	19/04/2024	SOP Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal <i>SOP for Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Financing of Terrorism and Proliferation of Weapons of Mass Destruction Programs</i>
5	0250/KEP/DIR/SDM/2024	03/06/2024	Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0187/KEP/DIR/SDM/2024 tentang SOP Sistem Penggajian Karyawan <i>Amendment to Board Resolution No. 0187/KEP/DIR/SDM/2024 on SOP for Employee Payroll System</i>
6	0384/KEP/DIR/SEKPER/2024	30/07/2024	BPP Sekretaris Perusahaan <i>BPP Corporate Secretary</i>
7	0385/KEP/DIR/SEKPER/2024	30/07/2024	BPP Pelindungan Konsumen <i>BPP Consumer Protection</i>
8	0400/KEP/DIR/DJA/2024	5/08/2024*	SOP Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen <i>SOP for Handling and Resolving Consumer Complaints</i>

No.	Keputusan Direksi Board of Directors Decision	Tanggal Date	Tentang About
4	0401/KEP/DIR/KPN/2024	08/05/2024	BPP Penerapan Tata Kelola <i>BPP for the implementation of governance</i>
9	0416/KEP/DIR/DJA/2024	12/08/2024*	SOP Layanan <i>Contact Center</i> <i>SOP for Contact Center Services</i>
10	0424/KEP/DIR/RENSTRA/2024	13/8/2024	BPP Susunan Organisasi & Uraian Tugas <i>BPP Organizational Structure & Job Descriptions</i>
11	0438/KEP/DIR/RENSTRA/2024	15/8/2024	SOP Susunan Organisasi & Uraian Tugas Kantor Pusat <i>SOP for Organizational Structure & Job Descriptions of the Head Office</i>
12	0446/KEP/DIR/RENSTRA/2024	19/08/2024	SOP Sistem Penilaian Kinerja Satuan Kerja dan Unit Kerja <i>SOP for Performance Assessment System for Work Units and Work Units</i>
13	0460/KEP/DIR/RENSTRA/2024	27/08/2024	SOP Susunan Organisasi & Uraian Tugas Unit Kerja <i>SOP for Organizational Structure & Job Descriptions of Work Units</i>
14	0542/KEP/DIR/MRO/2024	04/10/2024	Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direksi Nomor 0737/KEP/DIR/MRO/2018 tentang SOP Selera Risiko (<i>Risk Appetite</i>), Toleransi Risiko (<i>Risk Tolerance</i>), Limit Risiko (<i>Risk Limit</i>) <i>Third Amendment to the Decree of the Board of Directors Number 0737/KEP/DIR/MRO/2018 concerning SOP for Risk Appetite, Risk Tolerance, Risk Limit</i>
15	0582/KEP/DIR/SAF/2024	21/10/2024	BPP Audit Berbasis Risiko dan Strategi <i>Anti Fraud</i> <i>BPP Risk-Based Audit and Anti-Fraud Strategy</i>
16	0587/KEP/DIR/SDM/2024	21/10/2024	Perubahan Atas Keputusan Direksi No 0701/KEP/DIR/SDM/2023 tentang SOP Penilaian Kinerja Karyawan <i>Amendment to the Decree of the Board of Directors No. 0701/KEP/DIR/SDM/2023 concerning SOP for Employee Performance Assessment</i>
17	0588/KEP/DIR/MRO/2024	21/10/2024	SOP Penilaian Tingkat Kesehatan Bank <i>SOP for Bank Health Level Assessment</i>
18	0628/KEP/DIR/SAF/2024	05/11/2024	SOP Strategi <i>Anti Fraud</i> <i>SOP for Anti-Fraud Strategy</i>
19	0689/KEP/DIR/TIF/2024	26/11/2024	Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 0689/KEP/DIR/TIF/2023 tentang SOP Pengamanan Informasi <i>Amendment to the Decree of the Board of Directors Number 0689/KEP/DIR/TIF/2023 on Information Security SOP</i>
20	0695/KEP/DIR/SAF/2024	26/11/2024	SOP Audit Berbasis Risiko <i>Risk-Based Audit SOP</i>
21	0723/KEP/DIR/SDM/2024	16/12/2024	SOP Status Karyawan <i>Employee Status SOP</i>
22	0724/KEP/DIR/KPN/2024	16/12/2024	BPP Pedoman Penyusunan Peraturan Perusahaan <i>BPP Guidelines for Drafting Company Regulations</i>
23	0737/KEP/DIR/OKA/2024	19/12/2024	SOP Mekanisme Pelaporan Bank Umum Terintegrasi <i>Integrated Commercial Bank Reporting Mechanism SOP</i>

SELF ASSESSMENT PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Self Assessment on Corporate Governance Implementation

Penilaian *Self-Assessment Good Corporate Governance* Bank BPD Bali dilakukan dalam rangka pemenuhan salah satu parameter penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Di sisi lain, *Self-Assessment GCG* Bank juga merupakan manifestasi komitmen Bank BPD Bali untuk menerapkan praktik terbaik penerapan GCG di setiap jenjang organisasi. *Self-Assessment GCG* secara konsisten dilakukan setiap tahun untuk mengetahui tingkat kecukupan penerapan GCG di lingkungan Bank. Penilaian yang dilakukan oleh Bank menggunakan berbagai acuan standar praktik terbaik (*best practices*) yang berlaku dengan mengacu pada Kertas Kerja *Self-Assessment* Penerapan Tata Kelola sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerapan Tata Kelola Bank BPD Bali.

Bank BPD Bali's GCG Self-Assessment was conducted to meet one of the parameters for assessing the bank's health level. On the other hand, the bank's GCG self-assessment is also a manifestation of Bank BPD Bali's commitment to the implementation of best practices for GCG implementation at all levels of the organization. The GCG Self-Assessment is conducted annually to determine the adequacy of GCG implementation within the Bank. The assessment conducted by the Bank uses various references to applicable best practice standards by referring to the Self-Assessment Working Paper for Governance Implementation as stipulated in the Standard Operating Procedure (SOP) for Governance Implementation of the Bank BPD Bali.

Dasar Hukum SA-GCG

Legal Basis for the SA-GCG

Self-Assessment GCG Bank BPD Bali dilakukan dengan berpedoman pada beberapa ketentuan OJK dan ketentuan internal Bank sebagai berikut:

- POJK No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum,
- SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum,
- POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum,
- Surat Keputusan Direksi No. 0581/KEP/DIR/KPN/2018 tentang Standar Operasional Prosedur Penerapan Tata Kelola Bank BPD Bali,
- Surat Keputusan Direksi No. 0401/KEP/DIR/KPN/2024 tentang Buku Pedoman Perusahaan Penerapan Tata Kelola

The GCG Self-Assessment of Bank BPD Bali was conducted on the basis of several provisions of the OJK and the Bank's internal regulations as follows

- *POJK No. 4/POJK.03/2016 on the assessment of the health level of commercial banks,*
- *SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 on the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks,*
- *POJK No. 17 of 2023 on the Implementation of Governance for Commercial Banks,*
- *Decree of the Board of Directors No. 0581/KEP/DIR/KPN/2018 on the Standard Operating Procedure for the Implementation of Governance for Bank BPD Bali,*
- *Decree of the Board of Directors No. 0401/KEP/DIR/KPN/2024 on the Corporate Guidelines for the Implementation of Governance.*

Berpedoman beragam ketentuan tersebut, Bank BPD Bali melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) secara komprehensif dan berkala agar dapat menetapkan rencana tindak lanjut yang meliputi tindakan korektif (bila diperlukan) dengan memperhatikan 11 (sebelas) faktor penilaian yaitu:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
- d. Penanganan benturan kepentingan.
- e. Penerapan fungsi kepatuhan Bank.
- f. Penerapan fungsi audit intern.
- g. Penerapan fungsi audit ekstern.
- h. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
- i. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana berskala besar (*large exposures*).
- j. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Intern.
- k. Rencana Strategis Bank.

Guided by various regulations, Bank BPD Bali conducts comprehensive and periodic self-assessment to determine a follow-up plan including corrective actions (if necessary) by considering 11 (eleven) assessment factors, namely

- a. *Implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors.*
- b. *Performance of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners.*
- c. *Completion and implementation of the duties of the Committee.*
- d. *Management of conflicts of interest.*
- e. *Implementation of the Bank's compliance function.*
- f. *Implementation of the internal audit function.*
- g. *Implementation of the external audit function.*
- h. *Implementation of risk management, including the internal control system.*
- i. *Provision of funds to related parties and provision of large exposures.*
- j. *Transparency of the Bank's financial and non-financial conditions, governance implementation report and internal reporting.*
- k. *The Bank's strategic plan.*

Penyelenggaraan *Self-Assessment GCG*, sebagaimana di atur dalam ketentuan OJK tersebut, paling sedikit dilakukan setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

The implementation of the GCG Self-Assessment in accordance with the regulations of the Financial Supervision Authority is carried out at least every semester for the positions at the end of June and the end of December in accordance with the regulations of the Financial Supervision Authority on the assessment of the health level of commercial banks.

Hasil *Self-Assessment GCG* Semester I *Semester I GCG Self-Assessment Results*

Berikut adalah hasil *Self-Assessment GCG* Bank BPD Bali Periode Semester I Tahun 2024:

Below are Bank BPD Bali's GCG Self-Assessment results for Semester I 2024:

Hasil Penilaian Sendiri Tata Kelola <i>Governance Self-Assessment Outcomes</i>		
	Peringkat <i>Rating</i>	Definisi Peringkat <i>Rating Definition</i>
Konsolidasi <i>Consolidation</i>	2	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank. <i>The text indicates that the Bank's management has generally implemented effective governance practices, as evident in their adequate adherence to governance principles. Any weaknesses identified in the implementation of these principles are typically minor and can be addressed through standard actions taken by the Bank's management.</i>

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator terhadap penilaian penerapan Tata Kelola di Bank BPD Bali pada Semester I (Januari 2024 – Juni 2024) dan Semester II (Juli 2024 – Desember 2024) dapat disimpulkan bahwa peringkat faktor penerapan Tata Kelola Bank BPD Bali adalah 2 (BAIK).

Based on the analysis of all criteria/indicators for the assessment of the implementation of Governance at Bank BPD Bali in Semester I (January 2024 - June 2024) and Semester II (July 2024 - December 2024), it can be concluded that the rating of the factor Implementation of Governance at Bank BPD Bali is 2 (GOOD).

1. *Governance Structure*

Faktor-faktor positif aspek *Governance Structure* Bank adalah:

- Bank memiliki 5 (lima) orang Direksi yang ditetapkan berdasarkan RUPS Luar Biasa, dimana seluruh anggota Direksi berdomisili di Provinsi Bali. Seluruh Direksi telah memiliki pengalaman di bidang operasional lebih dari 5 (lima) tahun serta telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi telah memiliki pedoman tata tertib kerja Direksi. Setiap anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lainnya dan/atau Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Direksi tidak pernah menunjuk penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan. Direksi telah menetapkan arah perencanaan dan pengembangan SDM yang jelas dan terarah sesuai dengan *Blueprint* SDM.
- Komposisi dan eksistensi Dewan Komisaris telah sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Integritas, kompetensi dan reputasi keuangan anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Kompetensi anggota komite-komite sudah memadai sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.
- Bank telah memiliki pedoman tersendiri mengenai penanganan benturan kepentingan.

1. *Governance Structure*

The positive factors in the Bank's Governance Structure aspect are:

- The Bank has 5 (five) directors appointed on the basis of the Extraordinary GMS where all directors are residents of Bali Province. All Directors have more than 5 (five) years of operational experience and have passed the Fit and Proper Test and have been approved by the Financial Services Authority. In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors has a Board Procedure Manual. Each member of the Board of Directors does not have any financial, managerial, shareholding and/or family relationship up to the second degree with other members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners, controlling shareholders or with the Bank that could impair their ability to act independently. The Board of Directors has never appointed individual consultants and/or professional services as advisors. The Board of Directors has established a clear and focused direction for human resources planning and development in accordance with the HR Blueprint.*
- The composition and existence of the Board of Directors are in compliance with the Articles of Incorporation and applicable laws and regulations.*
- The integrity, competence and financial reputation of the members of the Committee are commensurate with the size and complexity of the Bank's business and comply with applicable regulations.*
- The competence of the members of the Committee is commensurate with the size and complexity of the Bank's business.*
- The bank has its own conflict of interest policy.*

Hasil Penilaian Sendiri Tata Kelola Governance Self-Assessment Outcomes

	Peringkat Rating	Definisi Peringkat Rating Definition
f) Bank telah memiliki Divisi Kepatuhan dan bekerja tanpa pengaruh dari satuan kerja atau unit kerja lain serta memiliki akses lain yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.		f) The Bank has a Compliance Department that operates without influence from other business units and has other access that is directly responsible to the Compliance Director.
g) Bank telah menetapkan Keputusan Direksi Nomor 0235/KEP/DIR/KPN/2023 tanggal 12 Juni 2023 tentang Kode Etik PT Bank Pembangunan Daerah Bali.		g) The Bank has established the Board of Directors Resolution No. 0235/KEP/DIR/KPN/2023 dated June 12, 2023 on the Code of Ethics of PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
h) Bank telah menetapkan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0284/KEP/DIR/KPN/2023 tentang Buku Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan tanggal 04 Juli 2023, serta Keputusan Direksi Nomor 0653/KEP/DIR/KPN/2021 tentang SOP Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan tanggal 08 Desember 2021.		h) The Bank has established the Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Bali No. 0284/KEP/DIR/KPN/2023 on the Company Guidelines for the Implementation of Compliance Functions dated July 4, 2023 and the Resolution of the Board of Directors No. 0653/KEP/DIR/KPN/2021 on the SOP for the Implementation of Compliance Functions dated December 8, 2021.
i) Bank telah menetapkan Keputusan Direksi Nomor 0600/KEP/DIR/KPN/2023 tanggal 23 November 2023 tentang Buku Pedoman Perusahaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal serta Keputusan Direksi Nomor 0188/KEP/DIR/KPN/2024 tanggal 19 April 2024 tentang Standar Operasional Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.		i) The Bank has adopted the Board of Directors' Resolution No. 0600/KEP/DIR/KPN/2023 of November 23, 2023 on the Corporate Guidelines for the Implementation of Programs to Combat Money Laundering and Terrorist Financing and to Prevent the Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction, and the Board of Directors' Resolution No. 0188/KEP/DIR/KPN/2024 of April 19, 2024 on the Standard Operating Procedure for the Implementation of Programs to Combat Money Laundering and Financing of Terrorism and to Prevent the Proliferation of Weapons of Mass Destruction.
j) Satuan Kerja Audit Intern & Anti <i>Fraud</i> (SKAI & AF) yang bersifat independen terhadap satuan kerja operasional, serta memiliki pedoman dan prosedur untuk mendukung pelaksanaan audit internal yaitu BPP Audit Berbasis Risiko, SOP Audit Berbasis Risiko, Piagam Audit Intern dan Kode Etik Auditor Intern.		j) Internal Audit & Anti-Fraud Work Unit (SKAI & AF) which is independent of operational work units, and has guidelines and procedures to support the implementation of internal audits, namely the Risk-Based Audit BPP, Risk-Based Audit SOP, Internal Audit Charter and Internal Auditor Code of Ethics.
k) Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Tahun 2024 yang didasarkan pada hasil penilaian risiko.		k) An annual audit work program (PKAT) for 2024 based on the results of the risk assessment.
l) SDM yang memadai untuk melaksanakan tugas audit dan senantiasa meningkatkan kualitas SDM audit secara berkelanjutan.		l) Adequate human resources to perform audit tasks and continuous improvement of the quality of audit human resources on an ongoing basis.
m) Aspek penugasan audit kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik telah sesuai, baik dari segi kapasitas KAP yang ditunjuk, legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional Akuntan Publik, komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dan lain-lain yang telah tertuang dalam perjanjian kerja yang telah disepakati oleh KAP dan PT Bank Pembangunan Daerah Bali.		m) The audit assignment aspect to the Audit Firm (KAP) and the Auditor was appropriate, both in terms of the capacity of the appointed KAP, the legality of the engagement letter, the scope of the audit, the professional standards of the Auditor, the communication with the Financial Services Authority with the KAP, and other matters that were specified in the engagement letter agreed upon by the KAP and PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
n) Bank telah memiliki struktur organisasi, kebijakan dan prosedur yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern.		n) The Bank has adequate organizational structure, policies and procedures to implement risk management and internal control.
o) Bank sudah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai dan dilakukan review secara berkelanjutan sesuai peraturan perundang-undangan maupun kebutuhan bisnis.		o) The Bank has adequate written policies, systems and procedures that are reviewed on an ongoing basis in accordance with laws and regulations and business needs.
p) Bank telah memiliki pedoman dan standar prosedur yang cukup dalam penerapan transparansi publikasi keuangan dan non keuangan bank, termasuk penyelesaian pengaduan konsumen Bank. Penerapan transparansi publikasi keuangan dan non keuangan bank telah didukung oleh infrastruktur yang memadai yaitu <i>website</i> Bank BPD Bali yang beralamat di www.bpd Bali.co.id .		p) The bank has adequate policies and standard procedures to implement transparency of the bank's financial and non-financial disclosures, including the resolution of complaints from bank customers. The implementation of transparency of financial and non-financial publications of the Bank is supported by an adequate infrastructure, namely the website of Bank BPD Bali at www.bpd Bali.co.id .
q) Bank telah memiliki <i>Corporate Plan</i> dan <i>Business Plan</i> .		q) The Bank has a corporate plan and a business plan.
r) Rencana strategis bank didukung sepenuhnya oleh pemilik yang tercermin dari komitmen dan upaya pemilik memperkuat permodalan melalui tambahan setoran modal dan pemupukan modal dari penyisihan laba yang ditempatkan pada Cadangan Umum sebesar 25% dari Pembagian Laba Tahun Buku 2023 sesuai Akta Nomor 41 tanggal 23 Februari 2024 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan adanya tambahan setoran modal sesuai Akta Nomor 15 tanggal 13 Mei 2024 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Bali.		r) The strategic plan of the Bank is fully supported by the Owner, which is reflected in the Owner's commitment and efforts to strengthen the capital through additional capital contribution and capital fertilization from the profit allocations placed in the general reserve of 25% of the profit distribution for the fiscal year 2023 pursuant to Deed No. 41 dated February 23, 2024 concerning the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Pembangunan Daerah Bali, 2024 on the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Pembangunan Daerah Bali and the additional capital contribution pursuant to Deed No. 15 dated May 13, 2024 on the Statement of Meeting Decisions of PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
s) Bank sudah memiliki Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas; BPP Sistem Perencanaan, Anggaran, Dan Kinerja; Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Penilaian Kinerja Satuan Kerja Dan Unit Kerja; SOP Penyusunan Corporate Plan, Rencana Bisnis Bank, Dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan; SOP Jaringan Kantor Dan Terminal Perbankan Elektronik (TPE); SOP Standarisasi Kantor Cabang Dan Kantor Cabang Pembantu; serta SOP Project Management sehingga dapat mendukung operasional Bank.		s) The Bank has already established the Organizational Structure and Job Descriptions (BPP); Planning, Budgeting and Performance System (BPP); Standard Operating Procedure (SOP) for Work Unit and Work Unit Performance Assessment System; SOP for Preparing Corporate Plans, Bank Business Plans and Sustainable Financial Action Plans; SOP for Office Networks and Electronic Banking Terminals (TPE); SOP for Standardization of Branches and Sub-Branches; and SOP for Project Management to support the Bank's operations.

Hasil Penilaian Sendiri Tata Kelola Governance Self-Assessment Outcomes		
	Peringkat Rating	Definisi Peringkat Rating Definition
2. Governance Process Faktor-faktor positif aspek <i>Governance Process</i> Bank adalah:		2. Governance Process <i>The positive factors in the Bank's Governance Process aspect are:</i>
a) Direksi telah memiliki dan menunjuk Komite Manajemen Risiko, Komite Kebijakan Perkreditan, Komite Kredit, ALCO, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Tim Tanggap Insiden Siber, dan Komite Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen sekaligus telah menetapkan anggota Komite dibawah Dewan Komisaris berdasarkan persetujuan rapat Dewan Komisaris. Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Direksi telah melaksanakan tugas sesuai dengan prinsip - prinsip tata kelola yang baik. Direksi telah menetapkan kebijakan umum Direksi dan melaksanakan keputusan yang bersifat strategis. Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan pemeriksaan ekstern dan intern yang dilaksanakan sampai Semester II tahun 2023. Seluruh pengambilan Keputusan Direksi telah dilakukan secara musyawarah mufakat dan dapat diimplementasikan. Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pemegang Saham tidak pernah melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.		a) <i>The Board of Directors has established and appointed a Risk Management Committee, a Credit Policy Committee, a Credit Committee, an ALCO, an Information Technology Steering Committee, a Cyber Incident Response Team Committee and a Consumer Complaint Handling and Resolution Committee. The Board of Directors does not grant any general authority to other parties that may result in the delegation of the duties and functions of the Board of Directors. The Board of Directors has performed its duties in accordance with the principles of good governance. The Board of Directors has established the general policies of the Company and has implemented strategic decisions. The Board of Directors followed up on all findings of external and internal audits carried out up to the second half of 2023. All decisions of the Board of Directors have been taken by consensus and can be implemented. The Board of Directors does not accept and/or receive any personal benefits from the Bank other than the remuneration and other facilities determined by the General Meeting of Shareholders (GMS). The shareholders have never intervened in the performance of the duties of the Board of Directors, which has disrupted the operational activities of the Bank, resulting in a reduction of the Bank's profits and/or causing losses to the Bank.</i>
b) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola, telah berjalan secara efektif, dan Dewan Komisaris terus berkomitmen untuk melakukan penyempurnaan.		b) <i>The performance of the duties and responsibilities of the Board of Directors has been fully in line with the principles of good governance, has been effective, and the Board of Directors continues to be committed to making improvements.</i>
c) Aspek transparansi dan akuntabilitas anggota Dewan Komisaris baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku.		c) <i>The aspects of transparency and accountability of the members of the Board of Commissioners are good and have never violated the applicable rules/regulations.</i>
d) Pelaksanaan tugas-tugas komite dalam membantu pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris telah berjalan efektif.		d) <i>The Committee's role in assisting the Board of Commissioners in fulfilling its oversight responsibilities has been effective.</i>
e) Penyelenggaraan rapat - rapat Komite telah berjalan secara efektif sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite.		e) <i>The meetings of the Committee were effectively conducted in accordance with the Committee's policies and procedures.</i>
f) Tidak terdapat benturan kepentingan pada periode Januari 2024 sampai dengan Juni 2024.		f) <i>There were no conflicts of interest during the period from January 2024 to June 2024.</i>
g) Bank telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian rencana kerja kepatuhan yang tertuang dalam Program Kerja dan Anggaran Rencana Bisnis Bank tahun 2024.		g) <i>The Bank has taken the necessary steps, taking into account the principle of prudence, in the compliance work plan as set out in the Bank's 2024 Business Plan Work Program and Budget.</i>
h) Direksi telah bertanggungjawab atas terciptanya struktur pengendalian intern dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan audit intern sesuai kebijakan dan arahan Dewan Komisaris.		h) <i>The Board of Directors has been responsible for establishing an internal control structure and ensuring the implementation of the internal audit function at all levels of management and the follow-up of internal audit findings in accordance with the policies and instructions of the Board of Commissioners.</i>
i) Bank telah menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.		i) <i>The Bank has effectively implemented an internal audit function over all aspects and elements of its activities that are deemed to have a direct impact on the interests of the Bank and the community.</i>
j) Bank telah melakukan kaji ulang atas kinerja SKAI & Anti Fraud setiap 2 (dua) tahun sekali.		j) <i>The Bank has conducted a review of the performance of SKAI & Anti Fraud every 2 (two) years.</i>
k) Rencana pemeriksaan, kecukupan ruang lingkup serta kedalaman pemeriksaan telah dituangkan di dalam Program Kerja Audit Tahunan yang didasarkan pada hasil penilaian risiko.		k) <i>The audit plan and the adequacy of the scope and depth of the audit have been specified in the Annual Audit Work Program based on the results of the risk assessment.</i>
l) Bank telah memiliki SDM yang memadai untuk melaksanakan tugas audit dan senantiasa meningkatkan kualitas SDM audit secara berkelanjutan.		l) <i>The Bank has adequate human resources to carry out the audit tasks and continuously improves the quality of the audit staff on an ongoing basis.</i>
m) SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit yang paling sedikit meliputi penilaian kecukupan sistem pengendalian intern; efektivitas sistem pengendalian intern Bank dan kualitas kinerja serta selanjutnya melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan ditimbulkkan kepada Direktur Kepatuhan, Komite Audit dan <i>auditee</i> .		m) <i>The SKAI has performed its independent supervisory function with an appropriate scope of duties and in accordance with the planning, execution, and monitoring of the audit results, which at least include the assessment of the adequacy of the internal control system, the effectiveness of the internal control system, and the quality of the Bank's performance, and then reports all audit findings to the President Director and the Board of Commissioners, with copies to the Compliance Director, the Audit Committee, and the auditee.</i>
n) SKAI telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern secara berkala.		n) <i>The SKAI has established and periodically updates working guidelines and systems and procedures for the performance of internal audit functions.</i>



Hasil Penilaian Sendiri Tata Kelola Governance Self-Assessment Outcomes

	Peringkat Rating	Definisi Peringkat Rating Definition
o) Telah dilakukannya audit keuangan tahunan bank oleh pihak independen dimana mekanisme pengajuan dan pemilihan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen untuk audit tahunan Bank, baik di bidang kinerja maupun di bidang keuangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.		o) The annual audit of the Bank has been carried out by an independent party, whereby the mechanism for submitting and selecting an independent auditor and auditing company for the annual audit of the Bank, both in the performance and financial fields, has been carried out in accordance with the applicable laws and regulations.
p) Komisaris telah melakukan tugas untuk menyetujui kebijakan Manajemen Risiko sesuai RBB, mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko melalui evaluasi Laporan Profil Risiko, mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala melalui Rapat Evaluasi dan Evaluasi Laporan Keuangan. Direksi telah melakukan tugas menyusun kebijakan Manajemen Risiko melalui KUD dan RBB, menetapkan prosedur identifikasi berupa aplikasi <i>Loss Event Database</i> , Profil Risiko Cabang, Tingkat Kesehatan Bank, Profil Risiko Kantor Pusat, KRI dan ICAAP, Penilaian Tingkat Kematangan Budaya Risiko, menetapkan mekanisme kebijakan melalui BPP dan SOP, melakukan evaluasi pada RBB, Laporan Profil Risiko dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank, menetapkan struktur organisasi dan uraian tugas, bertanggungjawab terhadap kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko melalui Komite Manajemen Risiko, melakukan perbaikan melalui tindak lanjut hasil temuan SKAI dan Anti Fraud, menetapkan program pelatihan dan mengalokasi anggaran dan SDM serta menetapkan SKMR dan SKAI dan <i>Anti Fraud</i> yang independen.		p) The Commissioner has performed the task of approving the Risk Management Policy in accordance with the RBB, evaluating the Risk Management Policy and the Risk Management Strategy through the evaluation of the Risk Profile Report, evaluating the accountability of the Board of Directors and providing directions for improvements in the implementation of the Risk Management Policy periodically through the Evaluation Meeting and the evaluation of financial reports. The Board of Directors has carried out the task of compiling risk management policies through KUD and RBB, establishing identification procedures in the form of Loss Event Database applications, Branch Risk Profiles, Bank Health Levels, Head Office Risk Profiles, KRI and ICAAP, Risk Culture Maturity Level Assessments, establishing policy mechanisms through BPP and SOP, conducting evaluations on RBB, Risk Profile Reports and Bank Health Level Reports, establish organizational structures and job descriptions, be accountable for policies, strategies and risk management frameworks through the Risk Management Committee, make improvements by following up on findings from SKAI and Anti-Fraud, establish training programs and allocate budgets and human resources, and establish independent SKMR and SKAI and Anti-Fraud.
q) Sebelum menjalankan kebijakan, sistem dan prosedur tertulis tersebut, Bank selalu mensosialisasikan dan dalam pelaksanaannya dipantau serta tetap memberikan bimbingan teknis dan evaluasi secara rutin.		q) Prior to the implementation of the written policies, systems and procedures, the Bank always socializes and monitors their implementation and continues to provide technical guidance and evaluations on a regular basis.
r) Bank telah menyusun laporan-laporan terkait publikasi keuangan dan non keuangan bank sesuai dengan cakupan yang tertuang di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. Penyampaian laporan tersebut telah dilaksanakan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga-lembaga lainnya. Bank juga telah menindaklanjuti semua pengaduan konsumen dengan berdasarkan pada mekanisme operasional pengaduan Konsumen dan dilaporkan setiap triwulan.		r) The Bank has prepared reports related to the Bank's financial and non-financial publications in accordance with the scope specified in the Financial Services Authority Regulation on Transparency and Publication of Bank Reports. These reports were submitted to the Financial Services Authority (OJK) and other institutions in a timely manner. The Bank has also followed up on all consumer complaints based on the Consumer Complaint Operational Mechanism and reported quarterly.
s) Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank secara realistis, komprehensif, terukur (<i>achievable</i>) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.		s) The Bank has prepared a business plan for the Bank which is realistic, comprehensive, measurable (<i>achievable</i>) by paying attention to the principle of prudence, and responsive to the internal and external changes.
t) Rencana Bisnis Bank disetujui oleh Dewan Komisaris.		t) The Bank's business plan has been approved by the Board of Commissioners.
u) Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada pemegang saham Bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.		u) The Board of Directors has communicated the Bank's Business Plan to the Bank's shareholders and to all levels of the Bank's organization.
v) Direksi telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank secara efektif dan melakukan evaluasi melalui:		v) The Board of Directors has effectively implemented and evaluated the Bank's Business Plan by
1) Penyampaian Evaluasi Rencana Bisnis Bank Triwulan IV Tahun 2023 tanggal 15 Januari 2024;		1) Submitting the evaluation of the Bank's Business Plan for the fourth quarter of 2023, dated January 15, 2024;
2) Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank, Laporan Realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan, serta Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Transformasi Periode 31 Desember 2024 tanggal 29 Januari 2024;		2) The Report on the Implementation of the Bank's Business Plan, the Report on the Implementation of Activities to Improve Financial Literacy and Inclusion, and the Report on the Progress of the Implementation of the Transformation Program for the Period ending December 31, 2024, dated January 29, 2024;
3) Penyampaian Laporan <i>Monthly Review</i> Periode 31 Januari 2024 tanggal 23 Februari 2024;		3) Submission of the Monthly Review Report for the period ended January 31, 2024, dated February 23, 2024;
4) Penyampaian Laporan <i>Monthly Review</i> Periode 29 Februari 2024 tanggal 6 Maret 2024;		4) Submission of the Monthly Review Report for the period ending February 29, 2024, dated March 6, 2024;
5) Penyampaian Evaluasi Rencana Bisnis Bank Triwulan I Tahun 2024 tanggal 17 April 2024;		5) Submission of the Evaluation of the Bank's Business Plan for Quarter I of 2024 dated April 17, 2024;
6) Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank, Laporan Realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan, serta Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Transformasi Periode 31 Maret 2024 tanggal 26 April 2024;		6) Report on the Implementation of the Bank's Business Plan, Report on the Implementation of Activities to Improve Financial Literacy and Inclusion, and Report on the Progress of the Implementation of the Transformation Program for the Period ending March 31, 2024, dated April 26, 2024;
7) Penyampaian Laporan <i>Monthly Review</i> Periode 30 April 2024 tanggal 15 Mei 2024;		7) Submission of the Monthly Review Report for the period ending April 30, 2024, dated May 15, 2024;
8) Penyampaian Laporan <i>Monthly Review</i> Periode 31 Mei 2024 tanggal 11 Juni 2024.		8) Submission of the Monthly Review Report for the period ending May 31, 2024, dated June 11, 2024.

Hasil Penilaian Sendiri Tata Kelola Governance Self-Assessment Outcomes		
	Peringkat Rating	Definisi Peringkat Rating Definition
w) Dalam penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis Bank berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana Bisnis Bank, dan Bank telah memperhatikan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank; prinsip kehati-hatian; penerapan manajemen risiko; dan asas perbankan yang sehat. x) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB) melalui: Surat Dewan Komisaris Nomor 206/DK/BPD/2024 tanggal 21 Mei 2024 perihal Evaluasi Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank, Realisasi Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan, serta Perkembangan Pelaksanaan Program Transformasi Periode 31 Maret 2024. y) Pemilik telah menunjukkan keseriusan dalam mengambil langkah-langkah dalam mendukung rencana strategis Bank dengan melakukan penyeteroran modal.		w) In preparing and submitting the Bank's Business Plan, the Bank has been guided by the provisions of the Financial Services Authority regarding the Bank's Business Plan, and the Bank has taken into account the external and internal factors that may affect the Bank's business continuity, the principle of prudence, the implementation of risk management, and the principles of sound banking. x) The Board of Commissioners has supervised the implementation of the Bank's Business Plan (RBB) by Letter from the Board of Commissioners No. 206/DK/BPD/2024 dated May 21, 2024, concerning the evaluation of the Bank's Business Plan Implementation Report, the implementation of activities within the framework of increasing financial literacy and inclusion, and the development of the implementation of the Transformation Program for the period ending March 31, 2024. y) The Owner has shown seriousness in taking steps to support the Bank's strategic plan through capital contributions.
3. Governance Outcome Faktor-faktor positif aspek Governance Outcome Bank adalah:		
a) Direksi telah memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Direksi Tahun Buku 2023 kepada Pemegang Saham dan Otoritas Jasa Keuangan. Pemegang Saham telah menerima pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2024 yang telah tertuang sesuai dengan Akta Nomor 41 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis bank dalam rangka pencapaian misi dan visi bank. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat sebagai dokumen perusahaan. Setiap anggota Direksi telah menandatangani Pakta integritas serta Direksi tidak pernah mendapat intervensi dari pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank atau menyebabkan kerugian Bank. b) Rekomendasi Dewan Komisaris yang disampaikan kepada Direksi telah ditindaklanjuti dan memberikan manfaat bagi kelangsungan pertumbuhan Bank. c) Rekomendasi komite-komite digunakan sebagai pertimbangan Dewan Komisaris untuk perbaikan kinerja Direksi, dan telah ditindaklanjuti oleh Direksi. d) Tidak terdapat benturan kepentingan serta tidak terdapat intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya dalam kegiatan operasional Bank selama periode Bulan Januari 2024 sampai dengan Bulan Juni 2024. e) Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. f) Direksi bertanggung jawab atas tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS. g) Bank telah melakukan audit intern di unit kerja secara objektif yang didasarkan pada tingkat risiko serta penyelesaian atas tindak lanjut hasil audit intern mencapai ketuntasan 96,19%. Atas perkembangan tindak lanjut hasil audit intern dan ekstern telah dilaporkan secara berkala setiap bulan, triwulan dan semesteran, dengan progress pemenuhan tindak lanjut temuan audit intern maupun ekstern per 30 Juni 2024 telah mencapai 98,66%. h) Pemenuhan kualitas Auditor Intern, telah tertuang dalam PKAT tahun 2024, dimana pelaksanaannya berkesinambungan menyesuaikan dengan kebutuhan dan jadwal pemeriksaan. i) Hasil dari audit telah mencakup ruang lingkup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menggambarkan permasalahan Bank yang signifikan. j) Profil Risiko Bank masih berada pada peringkat 2 (PK2), Komisaris dan Direksi telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko dan bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan.		a) The Board of Directors has submitted to the shareholders and the Financial Services Authority an accountability report on the performance of the duties of the Board of Directors for the fiscal year 2023. The shareholders have accepted the accountability for the implementation of the Board of Directors' duties at the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2023 held on February 23, 2024, which was stated in accordance with Deed No. 41 on the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders. The Board of Directors has communicated with the employees regarding the direction of the Bank's business in order to achieve the Bank's mission and vision. The results of the Board of Directors' meetings are recorded in the minutes of the Board of Directors' meetings as a corporate document. Each member of the Board of Directors has signed an Integrity Pact, and the Board of Directors has never received any intervention from the owner that has the effect of reducing the Bank's profits or causing losses to the Bank. b) The recommendations of the Committees submitted to the Board of Directors have been acted upon and have contributed to the further growth of the Bank. c) The recommendations of the Committees are used by the Board of Commissioners to improve the performance of the Board of Directors and have been acted upon by the Board of Directors. d) There is no conflict of interest and no intervention by the owner/related party/other party in the operational activities of the Bank during the period from January 2024 to June 2024. e) The Bank has submitted a basic report on the implementation of the duties and responsibilities of the Compliance Director. f) The Board of Directors is responsible for ensuring that reports on the implementation of the Bank's internal audit function are available to the GMS. g) The Bank has conducted internal audits in work units objectively based on the level of risk, and the completion of follow-up of internal audit results has reached 96.19% completeness. The progress of follow-up of internal and external audit results has been reported periodically on a monthly, quarterly and semi-annual basis, and the progress of completion of follow-up of internal and external audit results as of June 30, 2024 has reached 98.66%. h) Fulfillment of the quality of internal auditors has been stated in the PKAT 2024, where its implementation is continuous in accordance with the needs and schedule of the audit. i) The results of the audit have covered the scope in accordance with the applicable regulations and have described the significant problems of the Bank. j) The Bank's risk profile is still at the level 2 (PK2), the Commissioners and Directors have monitored the implementation of the risk management policies and strategies, and the Bank does not engage in business activities that exceed its capital capacity.

Hasil Penilaian Sendiri Tata Kelola Governance Self-Assessment Outcomes

	Peringkat Rating	Definisi Peringkat Rating Definition
k)		Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2024 masih terjaga seperti capaian kuartal I 2024. Faktor fundamental cenderung membaik pada kuartal kedua tahun ini. Peningkatan indeks penjualan riil masyarakat pada Mei-Juni 2024 yang menunjukkan pulihnya konsumsi. <i>Confidence</i> masyarakat, konsumsi semen, konsumsi listrik, PMI semuanya masih dalam relatif terjaga dan ini menjadi pondasi yang cukup baik untuk memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di kuartal II ini yang masih terjaga seperti yang terjadi di kuartal I. Naiknya kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi turut mempengaruhi resiliensi pertumbuhan ekonomi di kuartal II. Tercatat, pertumbuhan kredit mencapai 12,3 persen dan Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 8,1 persen. Ini menggambarkan fungsi intermediasi perbankan juga mengalami hal yang positif atau meningkat cukup baik. Defisit fiskal tetap baik. Pemerintah mematok defisit anggaran maksimal sebesar 2,8 persen tahun ini. APBN 2024, akan tetap dikelola secara hati-hati. Akan terus memonitor beberapa komponen bergerak seperti kurs rupiah, harga minyak, dan imbal hasil (<i>yield</i>) Surat Berharga Negara (SBN) untuk mengantisipasi implikasi naiknya pembiayaan. Pembiayaan dijaga baik menggunakan sisa anggaran lebih atau SAL tahun lalu yang mencapai Rp 100 triliun, digunakan untuk menurunkan kebutuhan pembiayaan melalui market. Dan ini bisa menjaga <i>yield</i> SBN pada level meskipun mengalami kenaikan masih tetap terjaga baik.
l)		Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah untuk memitigasi dampak risiko masih tingginya ketidakpastian global. Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) ditempuh melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal juga diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan momentum pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha.
m)		Ketidakpastian pasar keuangan global tetap tinggi di tengah prospek perekonomian dunia yang lebih kuat. Pertumbuhan ekonomi global pada 2024 diprakirakan mencapai 3,2%, lebih tinggi dari prakiraan awal, terutama dengan lebih baiknya pertumbuhan India dan Tiongkok. Ekonomi Amerika Serikat (AS) tumbuh kuat ditopang oleh perbaikan permintaan domestik dan peningkatan ekspor dengan penurunan inflasi AS yang masih berjalan lambat. Kondisi ini mendorong <i>Fed Fund Rate</i> (FFR) diprakirakan baru akan turun pada akhir tahun 2024. Sementara itu, <i>European Central Bank</i> (ECB) telah menurunkan suku bunga kebijakan moneternya lebih cepat sejalan dengan tekanan inflasi yang lebih rendah. Divergensi kebijakan moneter negara maju ini serta masih tingginya ketegangan geopolitik menyebabkan ketidakpastian pasar keuangan global tetap tinggi. Berbagai perkembangan tersebut, dan dengan tingginya <i>yield US treasury</i>, menyebabkan menguatnya nilai tukar dolar AS sehingga meningkatkan tekanan pelemahan nilai tukar berbagai mata uang dunia dan menahan aliran masuk modal asing ke negara berkembang. Ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi ini memerlukan respons kebijakan yang kuat untuk memitigasi dampak negatif dari rambatan ketidakpastian global tersebut terhadap perekonomian di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
k)		<i>Indonesia economic growth projection for Q2-2024 remains unchanged from Q1-2024. The fundamental factors tend to improve in the second quarter of this year. The increase in the Community Real Sales Index in May-June 2024 indicates a recovery in consumption. Public confidence, cement consumption, electricity consumption, PMI are all still relatively maintained, and this is a good enough foundation to project economic growth in the second quarter, which is still maintained as in the first quarter. The increase in investment credit, working capital credit and consumer credit also influenced the resilience of economic growth in the second quarter. It was recorded that the credit growth reached 12.3 percent and third party funds (DPK) increased by 8.1 percent. This shows that the banking intermediation function also experienced something positive or increased quite well. The budget deficit remains good. The government has set a maximum budget deficit of 2.8 percent this year. The 2024 state budget will continue to be carefully managed. It will continue to monitor various moving components such as the rupiah exchange rate, oil prices, and government bond (SBN) yields to anticipate the impact of rising financing. Financing is well maintained by using the remaining budget surplus or SAL last year which reached IDR 100 trillion to reduce financing needs through the market. And this can keep the SBN yield at a level that is still well maintained despite the increase.</i>
l)		<i>Bank Indonesia continues to strengthen policy coordination with the government to mitigate the impact of the risk of still high global uncertainty. Policy coordination with the government (central and regional) is carried out through the National Food Inflation Control Program (GNPIP) in various regions in the Central and Regional Inflation Control Teams (TPIP and TPID). Monetary and Fiscal Policy Coordination is also strengthened to help maintain macroeconomic stability and keep the economy growing at a high pace. Bank Indonesia continues to strengthen policy synergy with Financial System Stability Committee (KSSK) to maintain financial system stability and promote corporate credit/financing.</i>
m)		<i>Global financial market uncertainty remains high amid a stronger global economic outlook. Global economic growth is forecast to reach 3.2% in 2024, higher than initial estimates, mainly due to better growth in India and China. The United States (US) economy is growing strongly, supported by improving domestic demand and rising exports with a slow decline in US inflation. This condition has pushed the Fed Fund Rate (FFR) to be predicted to fall only at the end of 2024. Meanwhile, the European Central Bank (ECB) has lowered its policy rate at a faster pace in line with lower inflationary pressures. Divergent monetary policies in the developed world and continued high geopolitical tensions have kept global financial market uncertainty high. These developments, together with the high level of US Treasury yields, have strengthened the US dollar exchange rate, increasing pressure on the weakening exchange rates of various world currencies and discouraging foreign capital inflows to developing countries. This high level of global financial market uncertainty requires a strong policy response to mitigate the negative impact of the spillover of global uncertainty on the economies of developing countries, including Indonesia.</i>

Hasil Penilaian Sendiri Tata Kelola Governance Self-Assessment Outcomes		
	Peringkat Rating	Definisi Peringkat Rating Definition
n) Sebagai langkah antisipasi, Bank tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian. Bank secara konsisten telah meningkatkan kompetensi SDM dan <i>risk awareness</i> dalam mengatasi dinamika bisnisnya. Bank telah memiliki strategi bisnis dengan sensitifitas memadai dalam mempertahankan pertumbuhan kredit dengan karakteristik risiko rendah pada kondisi makro ekonomi yang ekstrim sehingga perolehan Laba Bank tetap terjaga. Perimbangan antara kemampuan Laba Tahun Berjalan dengan pembentukan CKKE yang bertahap mengacu pada RBB tahun 2024 yang telah mendapatkan persetujuan OJK. Bank dalam melakukan perhitungan pembentukan CKKE, disamping berdasarkan pada Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0528/KEP/DIR/OKA/2023 tentang Pedoman Operasional Dalam Rangka Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 71 (PSAK 71), Bank juga mendasarkan pada Keputusan Direksi Nomor 0529/KEP/DIR/MRO/2023 tentang Penyesuaian Penambahan Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian (CKKE) Terhadap Kredit Restrukturisasi. o) Bank BPD Bali sangat mendukung program Pemerintah dalam mengedepankan UMKM sebagai penggerak perekonomian daerah, dimana Bank BPD Bali telah menyalurkan kredit kepada UMKM sampai dengan periode 28 Juni 2024 mencapai 51% dari total kredit. Hal ini jauh melampaui ketentuan sebagaimana diatur pada PBI Nomor 17/12/PBI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bahwa kredit kepada UMKM sejak tahun 2018 sudah harus mencapai rasio 20% Pertumbuhan dan kualitas kredit sudah sesuai dengan target RBB. p) Bank telah menyampaikan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), Laporan Publikasi Bulanan, Laporan Publikasi Triwulanan, Laporan Auditor Independen, Laporan Kuantitatif Eksposur Risiko dan Permodalan, dan Laporan Publikasi Tahunan Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, secara tepat waktu dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemegang Saham dan melalui website Bank. q) Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. r) Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank beserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank. s) Rencana Bisnis Bank telah menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan dan menghasilkan kinerja yang semakin membaik. t) Pertumbuhan Bank memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi pemangku kepentingan berupa dividen serta berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. u) Rencana Bisnis Bank telah dibuat secara komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman yang diawali dengan penyusunan Kebijakan Umum Direksi yang telah memperhatikan hasil analisa SWOT. v) Rencana strategis Bank sudah didukung dengan penyiapan infrastruktur yang memadai antara lain SDM, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur, serta Bank telah memiliki <i>Corporate Plan</i>, Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia, Rencana Strategis Teknologi Informasi (<i>Information Technology Strategic Planning</i>), Blueprint Manajemen Risiko, Blueprint Kepatuhan dan Cetak Biru (<i>Blueprint</i>) Bisnis <i>Treasury</i>. w) Pembagian keuntungan Bank telah memperhatikan upaya pemupukan modal untuk mendukung rencana strategis Bank. x) Pemilik mampu mengatasi kondisi permodalan Bank sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur kewajiban penyediaan modal minimum dengan tetap melakukan penyeteroran modal.		n) <i>The Bank continues to adhere to the principle of prudence as an anticipatory measure. The Bank has consistently improved its human resource competence and risk awareness in dealing with the dynamics of its business. The Bank has a business strategy with sufficient sensitivity to maintain credit growth with low risk characteristics in extreme macroeconomic conditions, so that the Bank's profit acquisition is maintained. The balance between the ability of the current year's profit and the gradual formation of CKKE refers to the 2024 RBB, which has been approved by the OJK. In calculating the formation of CKKE, the Bank is based not only on the Board of Directors' Resolution No. 0528/KEP/DIR/OKA/2023 on Operational Guidelines in the Framework of Implementing Financial Accounting Standards Statement 71 (PSAK 71), but also on the Board of Directors' Resolution No. 0529/KEP/DIR/MRO/2023 on Adjustments to the Addition of Expected Credit Loss Reserves (CKKE) for Restructuring Loans.</i> o) <i>Bank BPD Bali strongly supports the government's program in prioritizing MSMEs as the drivers of the regional economy, where Bank BPD Bali has distributed credit to MSMEs until the period of June 28, 2024 reaching 51% of the total credit. This far exceeds the provisions as stipulated in PBI No. 17/12/PBI/2015 on Amendments to Bank Indonesia Regulation No. 14/22/PBI/2012 on the Provision of Credit or Financing by Commercial Banks and Technical Assistance in the Framework of Development of Micro, Small and Medium Enterprises that credit to MSMEs must reach a ratio of 20% since 2018.</i> p) <i>The Bank has timely prepared and made available to the Financial Supervisory Authority (OJK) and the shareholders as well as on the Bank's website the basic credit interest rate (SBDK), the monthly publication report, the quarterly publication report, the independent auditor's report, the quantitative risk exposure and capital report and the Bank's annual publication report in accordance with the Financial Supervisory Authority's Regulation on Transparency and Publication of Bank Reports.</i> q) <i>The Corporate Plan and the Business Plan of the Bank shall be prepared by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners.</i> r) <i>The Corporate Plan and the Bank's Business Plan, as well as their implementation, have been communicated by the Board of Directors to the Controlling Shareholders and to all levels of the Bank's organization.</i> s) <i>The Bank's business plan has been the basis for the Bank's sustainable growth and increasingly better performance.</i> t) <i>The Bank's growth contributes to sustainable economic growth and regional development, and provides economic and non-economic benefits to stakeholders in the form of dividends.</i> u) <i>The Bank's Business Plan has been comprehensively prepared by considering the Bank's business opportunities and strengths and identifying weaknesses and threats, which started with the preparation of the Board's General Policy, which took into account the results of the SWOT analysis.</i> v) <i>The Bank's strategic plan has been supported by the preparation of an adequate infrastructure, including human resources, office networks, policies and procedures, and the Bank has a corporate plan, a human resources development blueprint, an information technology strategic plan, a risk management blueprint, a compliance blueprint, and a treasury business blueprint.</i> w) <i>The bank's profit-sharing plan has taken into account capital accumulation efforts to support the bank's strategic plan.</i> x) <i>The owner has the ability to override the bank's capital requirements in accordance with the Financial Services Authority's regulations on minimum capital requirements while still being able to make capital contributions.</i>



Hasil Self-Assessment GCG Semester II

Semester II GCG Self-Assessment Results

Berikut adalah hasil SA-GCG Bank BPD Bali Periode Semester II Tahun 2024:

Below are Bank BPD Bali's GCG Self-Assessment results for Semester II 2024:

Hasil Penilaian Sendiri Tata Kelola Governance Self-Assessment Outcomes		
	Peringkat Rating	Definisi Peringkat Rating Definition
Konsolidasi <i>Consolidation</i>	2	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank. <i>The text indicates that the Bank's management has generally implemented effective governance practices, as evident in their adequate adherence to governance principles. Any weaknesses identified in the implementation of these principles are typically minor and can be addressed through standard actions taken by the Bank's management.</i>

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator terhadap penilaian penerapan Tata Kelola di Bank BPD Bali pada Semester I (Januari 2024 – Juni 2024) dan Semester II (Juli 2024 – Desember 2024) dapat disimpulkan bahwa peringkat faktor penerapan Tata Kelola Bank BPD Bali adalah 2 (BAIK).

Based on the analysis of all criteria/indicators for the assessment of the implementation of Governance at Bank BPD Bali in Semester I (January 2024 - June 2024) and Semester II (July 2024 - December 2024), it can be concluded that the rating of the factor Implementation of Governance at Bank BPD Bali is 2 (GOOD).

1. Governance Structure

Faktor-faktor positif aspek *Governance Structure* Bank adalah:

- Bank memiliki 5 (lima) orang Direksi yang ditetapkan berdasarkan RUPS Luar Biasa, dimana seluruh anggota Direksi berdomisili di Provinsi Bali. Seluruh Direksi telah memiliki pengalaman di bidang operasional lebih dari 5 (lima) tahun serta telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi telah memiliki pedoman tata tertib kerja Direksi. Setiap anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lainnya dan/atau Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Direksi tidak pernah menunjuk penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan. Direksi telah menetapkan arah perencanaan dan pengembangan SDM yang jelas dan terarah sesuai dengan *Blueprint* SDM.
- Komposisi dan eksistensi Dewan Komisaris telah sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Integritas, kompetensi dan reputasi keuangan anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Kompetensi anggota komite-komite sudah memadai sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.
- Bank telah memiliki pedoman tersendiri mengenai penanganan benturan kepentingan.
- Bank telah memiliki Divisi Kepatuhan dan bekerja tanpa pengaruh dari satuan kerja atau unit kerja lain serta memiliki akses lain yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.
- Bank telah menetapkan Keputusan Direksi Nomor 0235/KEP/DIR/KPN/2023 tanggal 12 Juni 2023 tentang Kode Etik PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
- Bank telah menetapkan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0284/KEP/DIR/KPN/2023 tentang Buku Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan tanggal 04 Juli 2023, serta Keputusan Direksi Nomor 0653/KEP/DIR/KPN/2021 tentang SOP Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan tanggal 08 Desember 2021.

1. Governance Structure

The positive factors in the Bank's Governance Structure aspect are:

- The Bank has 5 (five) directors appointed on the basis of the Extraordinary GMS where all directors are residents of Bali Province. All Directors have more than 5 (five) years of operational experience and have passed the *Fit and Proper Test* and have been approved by the Financial Services Authority. In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors has a Board Procedure Manual. Each member of the Board of Directors does not have any financial, managerial, shareholding and/or family relationship up to the second degree with other members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners, controlling shareholders or with the Bank that could impair their ability to act independently. The Board of Directors has never appointed individual consultants and/or professional services as advisors. The Board of Directors has established a clear and focused direction for human resources planning and development in accordance with the *HR Blueprint*.
- The composition and existence of the Board of Directors are in compliance with the Articles of Incorporation and applicable laws and regulations.
- The integrity, competence and financial reputation of the members of the Committee are commensurate with the size and complexity of the Bank's business and comply with applicable regulations.
- The competence of the members of the Committee is commensurate with the size and complexity of the Bank's business.
- The Bank has its own conflict of interest policy.
- The Bank has a Compliance Department that operates without influence from other business units and has other access that is directly responsible to the Compliance Director.
- The Bank has established the Board of Directors Resolution No. 0235/KEP/DIR/KPN/2023 dated June 12, 2023 on the Code of Ethics of PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
- The Bank has established the Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Bali No. 0284/KEP/DIR/KPN/2023 on the Company Guidelines for the Implementation of Compliance Functions dated July 4, 2023 and the Resolution of the Board of Directors No. 0653/KEP/DIR/KPN/2021 on the SOP for the Implementation of Compliance Functions dated December 8, 2021.

Hasil Penilaian Sendiri Tata Kelola Governance Self-Assessment Outcomes		
	Peringkat Rating	Definisi Peringkat Rating Definition
i) Bank telah menetapkan Keputusan Direksi Nomor 0600/KEP/DIR/KPN/2023 tanggal 23 November 2023 tentang Buku Pedoman Perusahaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal serta Keputusan Direksi Nomor 0188/KEP/DIR/KPN/2024 tanggal 19 April 2024 tentang Standar Operasional Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. j) Satuan Kerja Audit Intern & <i>Anti Fraud</i> (SKAI & AF) yang bersifat independen terhadap satuan kerja operasional, serta memiliki pedoman dan prosedur untuk mendukung pelaksanaan audit internal yaitu Piagam Audit Intern, BPP Audit Berbasis Risiko, SOP Audit Berbasis Risiko, SOP Audit Teknologi Informasi dan SOP Probity Audit. k) Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Tahun 2024 yang didasarkan pada hasil penilaian risiko. l) SDM audit yang memadai untuk melaksanakan tugas audit dan senantiasa meningkatkan kualitas SDM audit secara berkelanjutan. m) Aspek penugasan audit kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik telah sesuai, baik dari segi kapasitas KAP yang ditunjuk, legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional Akuntan Publik, komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dan lain-lain yang telah tertuang dalam perjanjian kerja yang telah disepakati oleh KAP dan PT Bank Pembangunan Daerah Bali. n) Bank telah memiliki struktur organisasi, kebijakan dan prosedur yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern. o) Bank sudah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai dan dilakukan <i>review</i> secara berkelanjutan sesuai peraturan perundang-undangan maupun kebutuhan bisnis. p) Bank telah memiliki pedoman dan standar prosedur yang cukup dalam penerapan transparansi publikasi keuangan dan non keuangan bank, termasuk penyelesaian pengaduan konsumen Bank. Penerapan transparansi publikasi keuangan dan non keuangan bank telah didukung oleh infrastruktur yang memadai yaitu website Bank BPD Bali yang beralamat di www.bpd Bali.co.id. q) Bank telah memiliki <i>Corporate Plan</i> dan <i>Business Plan</i>. r) Rencana strategis bank didukung sepenuhnya oleh pemilik yang tercermin dari komitmen dan upaya pemilik memperkuat permodalan melalui tambahan setoran modal dan pemupukan modal dari penyisihan laba yang ditempatkan pada Cadangan Umum sebesar 25% dari Pembagian Laba Tahun Buku 2023 sesuai Akta Nomor 41 tanggal 23 Februari 2024 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan adanya tambahan setoran modal sesuai Akta Nomor 15 tanggal 13 Mei 2024 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Bali, Akta Nomor 36 tanggal 23 Juli 2024 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Bali, Akta Nomor 31 tanggal 23 Oktober 2024 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Bali serta Akta Nomor 78 tanggal 24 Desember 2024 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Bali. s) Bank sudah memiliki Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas; BPP Sistem Perencanaan, Anggaran, Dan Kinerja; Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Penilaian Kinerja Satuan Kerja Dan Unit Kerja; SOP Penyusunan <i>Corporate Plan</i>, Rencana Bisnis Bank, dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan; SOP Jaringan Kantor dan Terminal Perbankan Elektronik (TPE); SOP Standarisasi Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu; <i>SOP Project Management</i>, SOP Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Kantor Pusat serta SOP Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Unit Kerja sehingga dapat mendukung operasional Bank.		i) <i>The Bank has adopted the Board of Directors' Resolution No. 0600/KEP/DIR/KPN/2023 of November 23, 2023 on the Corporate Guidelines for the Implementation of Programs to Combat Money Laundering and Terrorist Financing and to Prevent the Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction, and the Board of Directors' Resolution No. 0188/KEP/DIR/KPN/2024 of April 19, 2024 on the Standard Operating Procedure for the Implementation of Programs to Combat Money Laundering and Financing of Terrorism and to Prevent the Proliferation of Weapons of Mass Destruction.</i> j) <i>Internal Audit & Anti-Fraud Work Unit (SKAI & AF), which is independent of the operational work unit and has policies and procedures to support the conduct of internal audits, namely the Internal Audit Charter, the Risk-Based Audit BPP, the Risk-Based Audit SOP, the Information Technology Audit SOP, and the Probity Audit SOP.</i> k) <i>An annual audit work program (PKAT) for 2024 based on the results of the risk assessment.</i> l) <i>Adequate human resources to perform audit tasks and continuous improvement of the quality of audit human resources on an ongoing basis.</i> m) <i>The audit assignment aspect to the Audit Firm (KAP) and the Auditor was appropriate, both in terms of the capacity of the appointed KAP, the legality of the engagement letter, the scope of the audit, the professional standards of the Auditor, the communication with the Financial Services Authority with the KAP, and other matters that were specified in the engagement letter agreed upon by the KAP and PT Bank Pembangunan Daerah Bali.</i> n) <i>The Bank has adequate organizational structure, policies and procedures to implement risk management and internal control.</i> o) <i>The Bank has adequate written policies, systems and procedures that are reviewed on an ongoing basis in accordance with laws and regulations and business needs.</i> p) <i>The bank has adequate policies and standard procedures to implement transparency of the bank's financial and non-financial disclosures, including the resolution of complaints from bank customers. The implementation of transparency of financial and non-financial publications of the Bank is supported by an adequate infrastructure, namely the website of Bank BPD Bali at www.bpd Bali.co.id.</i> q) <i>The bank has a corporate plan and a business plan.</i> r) <i>The strategic plan of the Bank is fully supported by the Owner, which is reflected in the Owner's commitment and efforts to strengthen the capital through additional capital contributions and capital fertilization from the profit allocations placed in the General Reserve of 25% of the Profit Distribution for Fiscal Year 2023 pursuant to Deed No. 41 dated February 23, 2024 concerning the Minutes of the General Meeting of Shareholders of PT Bank Pembangunan Daerah Bali and the additional capital contribution pursuant to Deed No. 15 dated May 13, 2024 concerning the Minutes of the General Meeting of Shareholders of PT Bank Pembangunan Daerah Bali, 2024 concerning the Statement of Meeting Resolutions of PT Bank Pembangunan Daerah Bali, Deed Number 36 dated July 23, 2024 concerning the Statement of Meeting Resolutions of PT Bank Pembangunan Daerah Bali, Deed Number 31 dated October 23, 2024 concerning the Statement of Meeting Resolutions of PT Bank Pembangunan Daerah Bali and Deed Number 78 dated December 24, 2024 concerning the Statement of Meeting Resolutions of PT Bank Pembangunan Daerah Bali.</i> s) <i>The Bank already has a Business Policy Manual (BPP) Organizational Structure and Job Descriptions; BPP Planning, Budget and Performance Systems; Standard Operating Procedure (SOP) for Work Unit and Work Unit Performance Evaluation System; SOP for Compilation of Corporate Plan, Bank Business Plan and Sustainable Finance Action Plan; SOP for Office Network and Electronic Banking Terminal (TPE); SOP for Standardization of Branches and Sub-Branche; SOP for Project Management; SOP for Organizational Structure and Job Description of Head Office and SOP for Organizational Structure and Job Description of Work Units so that they can support the Bank's operations.</i>



Hasil Penilaian Sendiri Tata Kelola Governance Self-Assessment Outcomes

	Peringkat Rating	Definisi Peringkat Rating Definition
2. Governance Process Faktor-faktor positif aspek <i>Governance Process</i> Bank adalah:		2. Governance Process The positive factors in the Bank's Governance Process aspect are:
a) Direksi telah memiliki dan menunjuk Komite Manajemen Risiko, Komite Kebijakan Perkreditan, Komite Kredit, ALCO, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Tim Tanggap Insiden Siber, dan Komite Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen sekaligus telah menetapkan anggota Komite dibawah Dewan Komisaris berdasarkan persetujuan rapat Dewan Komisaris. Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Direksi telah melaksanakan tugas sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Direksi telah menetapkan kebijakan umum Direksi dan melaksanakan keputusan yang bersifat strategis. Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan pemeriksaan ekstern dan intern yang dilaksanakan sampai Semester II tahun 2023. Seluruh pengambilan Keputusan Direksi telah dilakukan secara musyawarah mufakat dan dapat diimplementasikan. Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pemegang Saham tidak pernah melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.		a) <i>The Board of Directors has established and appointed a Risk Management Committee, a Credit Policy Committee, a Credit Committee, an ALCO, an Information Technology Steering Committee, a Cyber Incident Response Team Committee and a Consumer Complaint Handling and Resolution Committee. The Board of Directors does not grant any general authority to other parties that may result in the delegation of the duties and functions of the Board of Directors. The Board of Directors has performed its duties in accordance with the principles of good governance. The Board of Directors has established the general policies of the Company and has implemented strategic decisions. The Board of Directors followed up on all findings of external and internal audits carried out up to the second half of 2023. All decisions of the Board of Directors have been taken by consensus and can be implemented. The Board of Directors does not accept and/or receive any personal benefits from the Bank other than the remuneration and other facilities determined by the General Meeting of Shareholders (GMS). The shareholders have never intervened in the performance of the duties of the Board of Directors, which has disrupted the operational activities of the Bank, resulting in a reduction of the Bank's profits and/or causing losses to the Bank.</i>
b) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola, telah berjalan secara efektif, dan Dewan Komisaris terus berkomitmen untuk melakukan penyempurnaan.		b) <i>The performance of the duties and responsibilities of the Board of Directors has been fully in line with the principles of good governance, has been effective, and the Board of Directors continues to be committed to making improvements.</i>
c) Aspek transparansi dan akuntabilitas anggota Dewan Komisaris baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku.		c) <i>The aspects of transparency and accountability of the members of the Board of Commissioners are good and have never violated the applicable rules/regulations.</i>
d) Pelaksanaan tugas-tugas komite dalam membantu pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris telah berjalan efektif.		d) <i>The Committee's role in assisting the Board of Commissioners in fulfilling its oversight responsibilities has been effective.</i>
e) Penyelenggaraan rapat - rapat Komite telah berjalan secara efektif sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite.		e) <i>The meetings of the Committee were effectively conducted in accordance with the Committee's policies and procedures.</i>
f) Tidak terdapat benturan kepentingan pada periode Januari 2024 sampai dengan Juni 2024.		f) <i>There were no conflicts of interest during the period from January 2024 to June 2024.</i>
g) Bank telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian rencana kerja kepatuhan yang tertuang dalam Program Kerja dan Anggaran Rencana Bisnis Bank tahun 2024.		g) <i>The Bank has taken the necessary steps, taking into account the principle of prudence, in the compliance work plan as set out in the Bank's 2024 Business Plan Work Program and Budget.</i>
h) Direksi telah bertanggungjawab atas terciptanya struktur pengendalian intern dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan audit intern sesuai kebijakan dan arahan Dewan Komisaris.		h) <i>The Board of Directors has been responsible for establishing an internal control structure and ensuring the implementation of the internal audit function at all levels of management and the follow-up of internal audit findings in accordance with the policies and instructions of the Board of Commissioners.</i>
i) Bank telah menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.		i) <i>The Bank has effectively implemented an internal audit function over all aspects and elements of its activities that are deemed to have a direct impact on the interests of the Bank and the community.</i>
j) Bank telah melakukan kaji ulang atas kinerja SKAI & Anti Fraud secara berkala.		j) <i>The Bank has conducted a review of the performance of SKAI & Anti Fraud periodically.</i>
k) Rencana pemeriksaan, kecukupan ruang lingkup serta kedalaman pemeriksaan telah dituangkan di dalam Program Kerja Audit Tahunan yang didasarkan pada hasil penilaian risiko.		k) <i>The audit plan and the adequacy of the scope and depth of the audit have been specified in the Annual Audit Work Program based on the results of the risk assessment.</i>
l) Bank telah memiliki SDM yang memadai untuk melaksanakan tugas audit dan senantiasa meningkatkan kualitas SDM audit secara berkelanjutan.		l) <i>The Bank has adequate human resources to carry out the audit tasks and continuously improves the quality of the audit staff on an ongoing basis.</i>
m) SKAI & Anti-Fraud telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit yang paling sedikit meliputi penilaian kecukupan sistem pengendalian intern; efektivitas sistem pengendalian intern Bank dan kualitas kinerja serta selanjutnya melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan ditembuskan kepada Direktur Kepatuhan, Komite Audit dan <i>auditee</i> .		m) <i>The SKAI & Anti Fraud has performed its independent supervisory function with an appropriate scope of duties and in accordance with the planning, execution, and monitoring of the audit results, which at least include the assessment of the adequacy of the internal control system, the effectiveness of the internal control system, and the quality of the Bank's performance, and then reports all audit findings to the President Director and the Board of Commissioners, with copies to the Compliance Director, the Audit Committee, and the auditee.</i>
n) SKAI & Anti-Fraud telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern secara berkala.		n) <i>The SKAI & Anti Fraud has established and periodically updates working guidelines and systems and procedures for the performance of internal audit functions.</i>

Hasil Penilaian Sendiri Tata Kelola Governance Self-Assessment Outcomes		
	Peringkat Rating	Definisi Peringkat Rating Definition
o) Telah dilakukannya audit keuangan tahunan bank oleh pihak independen dimana mekanisme pengajuan dan pemilihan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen untuk audit tahunan Bank, baik di bidang kinerja maupun di bidang keuangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. p) Komisaris telah melakukan tugas untuk menyetujui kebijakan Manajemen Risiko sesuai RBB, mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko melalui evaluasi Laporan Profil Risiko, mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala melalui Rapat Evaluasi dan Evaluasi Laporan Keuangan. Direksi telah melakukan tugas menyusun kebijakan Manajemen Risiko melalui KUD dan RBB, menetapkan prosedur identifikasi berupa aplikasi <i>Loss Event Database</i>, Profil Risiko Cabang, Tingkat Kesehatan Bank, Profil Risiko Kantor Pusat, KRI dan ICAAP, Penilaian Tingkat Kematangan Budaya Risiko, menetapkan mekanisme kebijakan melalui BPP dan SOP, melakukan evaluasi pada RBB, Laporan Profil Risiko dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank, menetapkan struktur organisasi dan uraian tugas, bertanggungjawab terhadap kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko melalui Komite Manajemen Risiko, melakukan perbaikan melalui tindak lanjut hasil temuan SKAI dan <i>Anti Fraud</i>, menetapkan program pelatihan dan mengalokasi anggaran dan SDM serta menetapkan SKMR dan SKAI dan <i>Anti Fraud</i> yang independen. q) Sebelum menjalankan kebijakan, sistem dan prosedur tertulis tersebut, Bank selalu mensosialisasikan dan dalam pelaksanaannya dipantau serta tetap memberikan bimbingan teknis dan evaluasi secara rutin. r) Bank telah menyusun laporan-laporan terkait publikasi keuangan dan non keuangan bank sesuai dengan cakupan yang tertuang di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. Penyampaian laporan tersebut telah dilaksanakan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga-lembaga lainnya. Bank juga telah menindaklanjuti semua pengaduan konsumen dengan berdasarkan pada mekanisme operasional pengaduan Konsumen dan dilaporkan setiap triwulan. s) Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank secara realistis, komprehensif, terukur (<i>achievable</i>) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. t) Rencana Bisnis Bank disetujui oleh Dewan Komisaris. u) Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada pemegang saham Bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank. v) Direksi telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank secara efektif dan melakukan evaluasi melalui: 1) Penyampaian Evaluasi Rencana Bisnis Bank Triwulan II Tahun 2024 tanggal 16 Juli 2024; 2) Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank, Laporan Realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan, serta Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Transformasi Periode 30 Juni 2024 tanggal 30 Juli 2024; 3) Penyampaian Laporan <i>Monthly Review</i> Periode 31 Juli 2024 tanggal 19 Agustus 2024; 4) Penyampaian Laporan <i>Monthly Review</i> Periode 31 Agustus 2024 tanggal 24 September 2024; 5) Penyampaian Evaluasi Rencana Bisnis Bank Triwulan III Tahun 2024 tanggal 22 Oktober 2024; 6) Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank, Laporan Realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan, serta Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Transformasi Periode 30 September 2024 tanggal 24 Oktober 2024; 7) Penyampaian Laporan <i>Monthly Review</i> Periode 31 Oktober 2024 tanggal 15 November 2024; 8) Penyampaian Laporan <i>Monthly Review</i> Periode 30 November 2024 tanggal 13 Desember 2024.		o) The annual audit of the Bank has been carried out by an independent party, whereby the mechanism for submitting and selecting an independent auditor and auditing company for the annual audit of the Bank, both in the performance and financial fields, has been carried out in accordance with the applicable laws and regulations. p) The Commissioner has performed the task of approving the Risk Management Policy in accordance with the RBB, evaluating the Risk Management Policy and the Risk Management Strategy through the evaluation of the Risk Profile Report, evaluating the accountability of the Board of Directors and providing directions for improvements in the implementation of the Risk Management Policy periodically through the Evaluation Meeting and the evaluation of financial reports. The Board of Directors has carried out the task of compiling risk management policies through KUD and RBB, establishing identification procedures in the form of Loss Event Database applications, Branch Risk Profiles, Bank Health Levels, Head Office Risk Profiles, KRI and ICAAP, Risk Culture Maturity Level Assessments, establishing policy mechanisms through BPP and SOP, conducting evaluations on RBB, Risk Profile Reports and Bank Health Level Reports, establish organizational structures and job descriptions, be accountable for policies, strategies and risk management frameworks through the Risk Management Committee, make improvements by following up on findings from SKAI and Anti-Fraud, establish training programs and allocate budgets and human resources, and establish independent SKMR and SKAI and Anti-Fraud. q) Prior to the implementation of the written policies, systems and procedures, the Bank always socializes and monitors their implementation and continues to provide technical guidance and evaluations on a regular basis. r) The Bank has prepared reports related to the Bank's financial and non-financial publications in accordance with the scope specified in the Financial Services Authority Regulation on Transparency and Publication of Bank Reports. These reports were submitted to the Financial Services Authority (OJK) and other institutions in a timely manner. The Bank has also followed up on all consumer complaints based on the Consumer Complaint Operational Mechanism and reported quarterly. s) The Bank has prepared a business plan for the Bank which is realistic, comprehensive, measurable (<i>achievable</i>) by paying attention to the principle of prudence, and responsive to the internal and external changes. t) The Bank's business plan has been approved by the Board of Commissioners. u) The Board of Directors has communicated the Bank's Business Plan to the Bank's shareholders and to all levels of the Bank's organization. v) The Board of Directors has effectively implemented and evaluated the Bank's Business Plan through: 1) Submission of the evaluation of the Bank's business plan for the second quarter of 2024, dated July 16, 2024; 2) Report on the Implementation of the Bank's Business Plan, Report on the Implementation of Activities to Increase Financial Literacy and Inclusion, and Report on the Progress of the Implementation of the Transformation Program for the Period ending June 30, 2024, dated July 30, 2024; 3) Submission of the Monthly Review Report for the period ending July 31, 2024, dated August 19, 2024; 4) Submission of the Monthly Review Report for the period ending August 31, 2024, dated September 24, 2024; 5) Submission of the Bank's Business Plan Evaluation for Quarter III of 2024 dated October 22, 2024; 6) Report on the Implementation of the Bank's Business Plan, Report on the Implementation of Activities to Increase Financial Literacy and Inclusion, and Report on the Progress of the Implementation of the Transformation Program for the Period ending September 30, 2024, dated October 24, 2024; 7) Submission of the Monthly Review Report for the period ending October 31, 2024, dated November 15, 2024; 8) Submission of the Monthly Review Report for the period ending November 30, 2024, dated December 13, 2024.

**Hasil Penilaian Sendiri Tata Kelola**
Governance Self-Assessment Outcomes

	Peringkat Rating	Definisi Peringkat Rating Definition
w) Dalam penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis Bank berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana Bisnis Bank, dan Bank telah memperhatikan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank; prinsip kehati-hatian; penerapan manajemen risiko; dan asas perbankan yang sehat.		w) In preparing and submitting the Bank's Business Plan, the Bank has been guided by the provisions of the Financial Services Authority regarding the Bank's Business Plan, and the Bank has taken into account the external and internal factors that may affect the Bank's business continuity, the principle of prudence, the implementation of risk management, and the principles of sound banking.
x) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB) melalui: Surat Dewan Komisaris Nomor 370/DK/BPD/2024 tanggal 2 September 2024 perihal Realisasi Rencana Bisnis Bank dan Perkembangan Pelaksanaan Program Transformasi Periode 30 Juni 2024 serta Surat Dewan Komisaris Nomor 0489/DK/BPD/2024 tanggal 11 November 2024 perihal Realisasi Rencana Bisnis Bank dan Perkembangan Pelaksanaan Program Transformasi Periode 30 September 2024.		x) The Board of Commissioners has supervised the implementation of the Bank's Business Plan (RBB) through Letter from the Board of Commissioners No. 370/DK/BPD/2024 dated September 2, 2024 concerning the implementation of the Bank's Business Plan and the development of the implementation of the Transformation Program for the period ending June 30, 2024 and Letter from the Board of Commissioners No. 0489/DK/BPD/2024 dated November 11, 2024 concerning the implementation of the Bank's Business Plan and the development of the implementation of the Transformation Program for the period ending September 30, 2024.
y) Pemilik telah menunjukkan keseriusan dalam mengambil langkah-langkah dalam mendukung rencana strategis Bank dengan melakukan penyeteroran modal.		y) The Owner has shown seriousness in taking steps to support the Bank's strategic plan by making capital contributions.

3. Governance Outcome	3. Governance Outcome
Faktor-faktor positif aspek Governance Outcome Bank adalah:	The positive factors in the Bank's Governance Outcome aspect are:
a) Direksi telah memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Direksi Tahun Buku 2023 kepada Pemegang Saham dan Otoritas Jasa Keuangan. Pemegang Saham telah menerima pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2024 yang telah tertuang sesuai dengan Akta Nomor 41 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis bank dalam rangka pencapaian misi dan visi bank. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat sebagai dokumen perusahaan. Setiap anggota Direksi telah menandatangani Pakta integritas serta Direksi tidak pernah mendapat intervensi dari pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank atau menyebabkan kerugian Bank.	a) The Board of Directors has submitted to the shareholders and the Financial Services Authority an accountability report on the performance of the duties of the Board of Directors for the fiscal year 2023. The shareholders have accepted the accountability for the implementation of the Board of Directors' duties at the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2023 held on February 23, 2024, which was stated in accordance with Deed No. 41 on the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders. The Board of Directors has communicated with the employees regarding the direction of the Bank's business in order to achieve the Bank's mission and vision. The results of the Board of Directors' meetings are recorded in the minutes of the Board of Directors' meetings as a corporate document. Each member of the Board of Directors has signed an Integrity Pact, and the Board of Directors has never received any intervention from the owner that has the effect of reducing the Bank's profits or causing losses to the Bank.
b) Rekomendasi Dewan Komisaris yang disampaikan kepada Direksi telah ditindaklanjuti dan memberikan manfaat bagi kelangsungan pertumbuhan Bank.	b) The recommendations of the Committees submitted to the Board of Directors have been acted upon and have contributed to the further growth of the Bank.
c) Rekomendasi komite-komite digunakan sebagai pertimbangan Dewan Komisaris untuk perbaikan kinerja Direksi, dan telah ditindaklanjuti oleh Direksi.	c) The recommendations of the Committees are used by the Board of Commissioners to improve the performance of the Board of Directors and have been acted upon by the Board of Directors.
d) Tidak terdapat benturan kepentingan serta tidak terdapat intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya dalam kegiatan operasional Bank selama periode Bulan Juli 2024 sampai dengan Bulan Desember 2024.	d) There is no conflict of interest and no intervention by the owner/related party/other party in the operational activities of the Bank during the period from July 2024 to December 2024.
e) Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.	e) The Bank has submitted a basic report on the implementation of the duties and responsibilities of the Compliance Director.
f) Direksi bertanggung jawab atas tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS.	f) The Board of Directors is responsible for ensuring that reports on the implementation of the Bank's internal audit function are available to the GMS.
g) Bank telah melakukan audit intern di unit kerja secara objektif yang didasarkan pada tingkat risiko serta penyelesaian atas tindak lanjut hasil audit intern mencapai ketuntasan 99,74%. Atas perkembangan tindak lanjut hasil audit intern dan ekstern telah dilaporkan secara berkala setiap bulan, triwulan dan semesteran, dengan progress pemenuhan tindak lanjut temuan audit intern maupun ekstern per 31 Desember 2024 telah mencapai 99,49%.	g) The Bank has conducted internal audits in work units objectively based on the level of risk, and the completion of follow-up of internal audit results has reached 99.74% completeness. The progress of follow-up of internal and external audit results has been reported periodically on a monthly, quarterly and semi-annual basis, and the progress of completion of follow-up of internal and external audit results as of December 31, 2024 has reached 99.49%.
h) Hasil dari audit telah mencakup ruang lingkup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menggambarkan permasalahan Bank yang signifikan.	h) The results of the audit have covered the scope in accordance with the applicable regulations and have described the significant problems of the Bank.
i) Profil Risiko Bank masih berada pada peringkat 2 (PK2), Komisaris dan Direksi telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko dan bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan.	i) The Bank's risk profile is still at the level 2 (PK2), the Commissioners and Directors have monitored the implementation of the risk management policies and strategies, and the Bank does not engage in business activities that exceed its capital capacity.

Hasil Penilaian Sendiri Tata Kelola Governance Self-Assessment Outcomes		
	Peringkat Rating	Definisi Peringkat Rating Definition
j) Sebagai langkah strategis dalam memenuhi persyaratan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pelaporan dampak risiko iklim yang pertama kali diwajibkan pada Juli 2025, Bank secara proaktif menyinergikan prinsip <i>Governance, Risk, and Compliance</i> (GRC) dengan <i>Environmental, Social, and Governance</i> (ESG). Sebagai bagian dari komitmennya, Bank mendukung penerapan kebijakan penetapan harga karbon dan strategi dekarbonisasi bagi debitur serta membantu transisi menuju infrastruktur hijau. Selain itu, Bank terus mengembangkan produk dan layanan berbasis lingkungan, seperti memperkuat kebijakan kredit berkelanjutan dan memperluas investasi pada teknologi rendah karbon. Bank berfokus pada penerapan standar global dalam pengelolaan risiko iklim dan pembuatan produk hijau untuk mendukung netralitas karbon. Bank juga menciptakan <i>Business Continuity Plan</i> (BCP) yang berfokus pada mitigasi risiko iklim untuk memenuhi regulasi OJK dan memperkuat posisinya sebagai lembaga yang berkomitmen terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan. k) Sebagai langkah strategis dalam memenuhi persyaratan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pelaporan dampak risiko iklim yang pertama kali diwajibkan pada Juli 2025, Bank secara proaktif menyinergikan prinsip <i>Governance, Risk, and Compliance</i> (GRC) dengan <i>Environmental, Social, and Governance</i> (ESG). Sebagai bagian dari komitmennya, Bank mendukung penerapan kebijakan penetapan harga karbon dan strategi dekarbonisasi bagi debitur serta membantu transisi menuju infrastruktur hijau. Selain itu, Bank terus mengembangkan produk dan layanan berbasis lingkungan, seperti memperkuat kebijakan kredit berkelanjutan dan memperluas investasi pada teknologi rendah karbon. Bank berfokus pada penerapan standar global dalam pengelolaan risiko iklim dan pembuatan produk hijau untuk mendukung netralitas karbon. Bank juga menciptakan <i>Business Continuity Plan</i> (BCP) yang berfokus pada mitigasi risiko iklim untuk memenuhi regulasi OJK dan memperkuat posisinya sebagai lembaga yang berkomitmen terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan. l) Bank telah melaporkan untuk pertama kali untuk posisi Tahun 2024, rencana resolusi dalam rangka implementasi Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Resolusi Bank Umum. m) Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen pelaku usaha terhadap prinsip keuangan berkelanjutan. Bank dalam rangka mendukung hal tersebut diatas telah melakukan hal-hal sebagai berikut: (1) Unit Kerja Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu wajib melakukan kampanye/promosi/branding bahwa Bank BPD Bali memiliki produk kredit yang mendukung keuangan berkelanjutan. (2) Dalam pelaksanaan, unit kerja wajib memberikan bibit pohon/tanaman pada debitur pertama yang merealisasikan produk kredit: (a) Kredit Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. (b) SKIM Pemberian Kredit Prioritas Sektor Pertanian Bank BPD Bali (KPSP-Bank BPD Bali). (c) Penyaluran Kredit Konsumtif Perumahan. (3) Bibit tanaman/pohon yang diberikan memiliki manfaat langsung kepada debitur maupun dalam mengatasi perubahan iklim seperti: (a) Tanaman yang memiliki kadar air yang banyak dan dapat menyerap panas serta polutan (lidah buaya, palem bambo). (b) Tanaman obat - obatan (yang bermanfaat dalam kehidupan keseharian debitur temulawak, jahe, jeruk nipis, dll). (c) Tanaman yang mampu menyerap karbondioksida (lidah mertua). (d) Tanaman/pohon yang dapat memberikan pendapatan tambahan (pohon mangga, jeruk, sawo, alpukat, kelapa, bunga cempaka, kenanga). (e) Dan tanaman/pohon lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.		j) As a strategic step towards meeting the requirements of the Financial Services Authority (OJK) on climate risk impact reporting, which will become mandatory for the first time in July 2025, the Bank proactively synergizes the principles of Governance, Risk and Compliance (GRC) with Environmental, Social and Governance (ESG). As part of its commitment, the Bank supports the implementation of carbon pricing policies and decarbonization strategies for borrowers, as well as the transition to green infrastructure. In addition, the Bank continues to develop environment-related products and services, such as strengthening sustainable lending policies and expanding investments in low-carbon technologies. The Bank is focusing on implementing global standards in climate risk management and green product manufacturing to support carbon neutrality. The Bank also established a Business Continuity Plan (BCP) focusing on climate risk mitigation to comply with OJK regulations and strengthen its position as an institution committed to sustainability and environmental responsibility. k) As a strategic step to meet the OJK's climate risk impact reporting requirements, which will be required for the first time in July 2025, the Bank is proactively synergizing Governance, Risk, and Compliance (GRC) principles with Environmental, Social, and Governance (ESG) principles. As part of its commitment, the Bank supports the implementation of carbon pricing policies and decarbonization strategies for borrowers, as well as the transition to green infrastructure. In addition, the Bank continues to develop environment-related products and services, such as strengthening sustainable lending policies and expanding investments in low-carbon technologies. The Bank is focusing on the implementation of global standards in climate risk management and the development of green products in support of carbon neutrality. The Bank also created a Business Continuity Plan (BCP) focused on climate risk mitigation to comply with OJK regulations and strengthen its position as an institution committed to sustainability and environmental responsibility. l) The Bank has reported, for the first time for the 2024 position, the resolution plan within the framework of the implementation of the Regulation of the Deposit Insurance Corporation (LPS) Number 2 of 2024 concerning the General Bank Resolution Plan. m) Referring to the Regulation of the Financial Services Authority (OJK) Number 51/POJK.03/2017 concerning the implementation of sustainable finance for financial services institutions, issuers and public companies with the aim of increasing the awareness and commitment of economic agents to the principles of sustainable finance. In support of the above, the Bank has implemented the following: (1) Branch Office Work Units and Assistant Branch Offices are required to conduct campaigns/promotion/branding that Bank BPD Bali has credit products that support sustainable finance. (2) In the implementation, the work unit is required to provide tree/plant seedlings to the first borrower who realizes the credit product: (a) Battery-Based Electric Motor Vehicle Credit. (b) SKIM priority loan for the agricultural sector of Bank BPD Bali (KPSP-Bank BPD Bali). (c) Distribution of Housing Consumer Credit. (3) The plant/tree seedlings provided have direct benefits to the debtor and in overcoming climate change, such as (a) Plants that have a high water content and can absorb heat and pollutants (aloe vera, bamboo palm). (b) Medicinal plants (useful in the debtor's daily life, temulawak, ginger, lime, etc.). (c) Plants that can absorb carbon dioxide (mother-in-law's tongue). (d) Plants/trees that can provide additional income (mango, orange, sapodilla, avocado, coconut, cempaka flowers, kenanga). (e) And other plants/trees adapted to the needs of each region.

Hasil Penilaian Sendiri Tata Kelola Governance Self-Assessment Outcomes

	Peringkat Rating	Definisi Peringkat Rating Definition
(4) Pemberian bibit pohon/tanaman diatas diberikan pada debitur pertama yang merealisasikan produk kredit yang mendukung keuangan berkelanjutan di seluruh unit kerja Kantor Cabang dan Kantor Capem. (5) Selain Pemberian bibit pohon/tanaman, kepada 10 debitur setiap harinya yang merealisasikan kredit baik produktif maupun konsumtif dibagikan pula sticker visual promo (pemilihan debitur diserahkan sepenuhnya pada unit kerja) sebagai penanda keikutsertaan debitur binaan Bank BPD Bali dalam melestarikan bumi, yang mana sticker dapat dipasang pada kendaraan, rumah masing-masing dan selanjutnya dibuatkan promo berkelanjutan. (6) Sticker visual promo yang digunakan yaitu:		(4) The provision of the above tree/plant saplings will be given to the first borrower who implements credit products that support sustainable finance in all working units of the branch and sub-district offices. (5) In addition to providing tree/plant seedlings, visual promo stickers are also distributed daily to 10 debtors who realize productive or consumptive credit (debtor selection is entirely up to the work unit) as a sign of the participation of Bank BPD Bali's sponsored debtors in preserving the earth, where the stickers can be attached to vehicles, their respective homes and then made into ongoing promos. (6) The visual promo stickers used are:
(7) Sebagai tahap awal realisasi pada tahun 2024, kegiatan ini wajib dilakukan sejak bulan September sampai dengan Desember. (8) Kantor Cabang secara konsolidasi wajib melaporkan dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan ke Kantor Pusat Divisi Kredit Ritel dan Konsumer setiap bulannya maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. n) Bank tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian. Bank secara konsisten telah meningkatkan kompetensi SDM dan <i>risk awareness</i> dalam mengatasi dinamika bisnisnya. Bank telah memiliki strategi bisnis dengan sensitifitas memadai dalam mempertahankan pertumbuhan kredit dengan karakteristik risiko rendah pada kondisi makro ekonomi yang ekstrim sehingga perolehan Laba Bank tetap terjaga. Perimbangan antara kemampuan Laba Tahun Berjalan dengan pembentukan CKKE yang bertahap mengacu pada RBB tahun 2024 yang telah mendapatkan persetujuan OJK. o) Bank BPD Bali sangat mendukung program Pemerintah dalam mengedepankan UMKM sebagai penggerak perekonomian daerah, dimana Bank BPD Bali telah menyalurkan kredit kepada UMKM sampai dengan periode 31 Desember 2024 mencapai 51,20 % dari total kredit. Hal ini jauh melampaui ketentuan sebagaimana diatur pada PBI Nomor 17/12/PBI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bahwa kredit kepada UMKM tahun 2024 sudah harus mencapai rasio 50% Pertumbuhan dan kualitas kredit sudah sesuai dengan target RBB.		(7) As an initial stage of realization in 2024, this activity must be carried out from September to December. (8) Branches on a consolidated basis are required to report and document the implementation of activities to the Head Office of the Retail and Consumer Credit Division on a monthly basis, not later than the 15th of the following month. n) The Bank continues to adhere to the principle of prudence. The Bank has consistently improved its human resource competence and risk awareness in dealing with the dynamics of its business. The Bank has a business strategy with sufficient sensitivity to maintain credit growth with low risk characteristics in extreme macroeconomic conditions so that the Bank's profit is maintained. The balance between the ability of current year profit and the gradual formation of CKKE refers to the 2024 RBB which has received OJK approval. o) Bank BPD Bali strongly supports the government's program in prioritizing MSMEs as the drivers of the regional economy, where Bank BPD Bali has distributed credit to MSMEs until the period of December 31, 2024 reaching 51.20% of the total credit. This far exceeds the provisions as stipulated in PBI Number 17/12/PBI/2015 on Amendments to Bank Indonesia Regulation Number 14/22/PBI/2012 on the Provision of Credit or Financing by Commercial Banks and Technical Assistance in the Framework of the Development of Micro, Small and Medium Enterprises that credit to MSMEs in 2024 must reach a ratio of 50%.

Hasil Penilaian Sendiri Tata Kelola Governance Self-Assessment Outcomes		
	Peringkat Rating	Definisi Peringkat Rating Definition
p) Bank telah menyampaikan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), Laporan Publikasi Bulanan, Laporan Publikasi Triwulanan, Laporan Auditor Independen, Laporan Kuantitatif Eksposur Risiko dan Permodalan, dan Laporan Publikasi Tahunan Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, secara tepat waktu dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemegang Saham dan melalui website Bank.		p) The Bank has timely prepared and made available to the Financial Supervisory Authority (OJK) and the shareholders as well as on the Bank's website, the basic credit interest rate (SBDK), the monthly publication report, the quarterly publication report, the independent auditor's report, the quantitative risk exposure and capital report and the Bank's annual publication report in accordance with the Financial Supervisory Authority's Regulation on Transparency and Publication of Bank Reports.
q) Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.		q) The Corporate Plan and the Bank Business Plan shall be prepared by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners.
r) Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank beserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.		r) The Corporate Plan and the Bank's Business Plan, together with their implementation, have been communicated by the Board of Directors to the Controlling Shareholders and to all levels of the Bank's organization.
s) Rencana Bisnis Bank telah menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan dan menghasilkan kinerja yang semakin membaik.		s) The Bank's Business Plan has described the Bank's sustainable growth and has resulted in increasingly better performance.
t) Pertumbuhan Bank memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi pemangku kepentingan berupa dividen serta berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.		t) The Bank's growth provides economic and non-economic benefits to stakeholders in the form of dividends and contributes to sustainable economic growth and regional development.
u) Rencana Bisnis Bank telah dibuat secara komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman yang diawali dengan penyusunan Kebijakan Umum Direksi yang telah memperhatikan hasil analisa SWOT.		u) The Bank's Business Plan has been prepared comprehensively by considering the Bank's business opportunities and strengths, and identifying weaknesses and threats, which began with the preparation of the Board of Directors' General Policy, which took into account the results of the SWOT analysis.
v) Rencana strategis Bank sudah didukung dengan penyiapan infrastruktur yang memadai antara lain SDM, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur, serta Bank telah memiliki <i>Corporate Plan</i> , Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia, Rencana Strategis Teknologi Informasi (<i>Information Technology Strategic Planning</i>), <i>Blueprint</i> Manajemen Risiko, <i>Blueprint</i> Kepatuhan dan Cetak Biru (<i>Blueprint</i>) Bisnis <i>Treasury</i> .		v) The Bank's strategic plan has been supported by the preparation of an adequate infrastructure, including human resources, office networks, policies and procedures, and the Bank has a corporate plan, a human resources development blueprint, an information technology strategic plan, a risk management blueprint, a compliance blueprint, and a treasury business blueprint.
w) Pembagian keuntungan Bank telah memperhatikan upaya pemupukan modal untuk mendukung rencana strategis Bank.		w) The bank's profit-sharing plan has taken into account capital accumulation efforts to support the bank's strategic plan.
x) Pemilik mampu mengatasi kondisi permodalan Bank sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur kewajiban penyediaan modal minimum dengan tetap melakukan penyeteroran modal.		x) The Owner is able to meet the Bank's capital requirements in accordance with the provisions of the Financial Services Authority which regulate the obligation to provide minimum capital while still making capital contributions.

PEDOMAN UMUM GOVERNANSI KORPORAT INDONESIA (PUGKI)

General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI)

Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Roles and Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners					
1.1 Peran dan Tanggung Jawab Direksi <i>Roles and Responsibilities of the Board of Director</i>	1.1.1	Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi sebagai berikut: a. berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang; b. beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis; c. berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan; serta d. berkemampuan dalam bertahan dan bertumbuh (<i>corporate resilience</i>)	1.1.1	<i>To achieve sustainable value creation, the Board of Directors carries out its leadership role and seeks to achieve the following governance outcomes:</i> a. <i>to be competitive and focused on long-term performance;</i> b. <i>to be ethical and responsible in conducting business;</i> c. <i>to have positive contributions to the community and the environment; as well as</i> d. <i>to be able to survive and grow (corporate resilience)</i>	Diterapkan: - Pengelolaan Bank berpedoman pada RBB, RKAB dan RJPP dengan mengedepankan aspek keberlanjutan dan memenuhi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST). - Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencana tahunan dan jangka menengah selaras dengan RJPP dan mengoptimalkan inovasi teknologi. - Implementasi Sistem Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal yang selaras dengan strategi Bank BPD Bali dan ketentuan yang berlaku; - Peran Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, dan Internal Audit dalam proses audit yang melibatkan auditor eksternal mampu menghasilkan laporan keuangan audit yang tepat waktu dan sesuai dengan standard akuntansi dan ketentuan OJK; - Pemanfaatan teknologi untuk mendukung bisnis inti diperkuat dengan tata kelola teknologi informasi yang telah ditetapkan; - Board Charter Direksi telah memuat ketentuan pembagian tugas dan mekanisme pengunduran diri akibat kejahatan keuangan dan pelanggaran ketentuan yang berlaku.
	1.1.2	Direksi harus memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencana tahunan dan jangka menengah korporasi konsisten dengan tujuan jangka panjang, dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif.	1.1.2	<i>The Board of Directors must ensure that the corporate mission, vision, goals, objectives, strategies, as well as annual and mid-term plans are consistent with long-term goals, by effectively utilizing innovation and technology.</i>	
	1.1.3	Direksi memastikan bahwa korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.	1.1.3	<i>The Board of Directors ensures that the corporation implements an appropriate and effective risk management and internal control system that is aligned with the corporate vision, mission, goals, objectives and strategies, as well as complying with applicable laws and regulations and standards.</i>	
	1.1.4	Direksi memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai korporasi.	1.1.4	<i>The Board of Directors ensures that the integrity of the corporate accounting and financial reporting system and the timely and accurate disclosure of all material information about the corporation.</i>	
	1.1.5	Direksi memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya.	1.1.5	<i>The Board of Directors ensures that sustainability reporting has been prepared properly.</i>	
	1.1.6	Direksi membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) korporasi yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporasi, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung tujuan dan strategi korporasi.	1.1.6	<i>The Board of Directors builds a framework for corporate information technology (IT) governance that is aligned with corporate business needs and priorities, drives business opportunities and performance, strengthens risk management, as well as supports corporate goals and strategies.</i>	
	1.1.7	Bagi korporasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, Direksi perlu memastikan kewenangan dan ketersediaan perangkat pendukung yang memadai agar Dewan Pengawas Syariah dapat menjalankan perannya dengan efektif.	1.1.7	<i>For corporations conducting business activities based on Sharia principles, the Board of Directors needs to ensure the authority and availability of adequate supporting tools, allowing the Sharia Supervisory Board to carry out its role effectively.</i>	
					Applied: - The management of the Bank is guided by the principles set forth in the RBB, RKAB, and RJPP, emphasizing sustainability and adherence to environmental, social, and governance (ESG) criteria. - Our vision, mission, objectives, and strategies align with the RJPP, ensuring we leverage technological innovation to its fullest potential through our annual and medium-term plans. - We also implement risk management and an internal control system that align with Bank BPD Bali's strategic framework and comply with relevant regulations. - The Board of Commissioners, the Board of Directors, the Audit Committee, and Internal Audit play crucial roles in the auditing process, working collaboratively with external auditors to produce timely and compliant financial reports that meet accounting standards and OJK regulations.

Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris						
Roles and Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners						
		1.1.8	Piagam Direksi secara periodik ditinjau. Piagam mencakup antara lain pembagian peran Direktur secara individual dapat diatur di Piagam Direksi atau dengan surat keputusan Direksi.	1.1.8	<i>The Board of Directors' Charter is periodically reviewed. The Charter includes, among others, the delegation of roles for the Directors individually, which can be regulated in the Board of Directors' Charter or by a decision letter of the Board of Directors.</i>	- Additionally, we enhance our core business operations through robust information technology governance, further supported by a dedicated focus on technology utilization. - The Board of Directors' Charter clearly delineates responsibilities and outlines procedures for resignation in cases of financial misconduct or breaches of applicable regulations.
		1.1.9	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan.	1.1.9	<i>The Board of Directors has a policy regarding the resignation of members of the Board of Directors if they are involved in a financial crime and are proven to have made a mistake.</i>	
1.2	Penilaian Kinerja - Direksi dan Anggotanya <i>Performance Assessment – Board of Directors and its Members</i>	1.2.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu Direktur.	1.2.1	<i>The Board of Commissioners conducts an annual formal evaluation in an objective and independent manner to determine the effectiveness of the Board of Directors and each individual Director.</i>	Diterapkan: - Telah ditetapkan mekanisme dan parameter penilaian kinerja Direksi - Evaluasi tahunan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dengan melibatkan Komite Nominasi dan Remunerasi
		1.2.2	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi, bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi kinerja dan menilai kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya.	1.2.2	<i>The Board of Commissioners, with due observance of the Nomination and Remuneration Committee, is responsible for determining performance assessment criteria and assessing the performance of the President Director and other members of the Board of Directors.</i>	Applied: - The framework and criteria for assessing the performance of the Board of Directors have been set in place. - Each year, the Board conducts evaluations, collaborating closely with the Nomination and Compensation Committee in the process.
1.3	Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris <i>Roles and Responsibilities of the Board of Commissioners</i>	1.3.1	Dewan Komisaris merevisi strategi korporasi paling tidak setiap tahun dan menyetujui misi, visi dan strategi korporasi yang dirumuskan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga merevisi, memberikan saran dan menyetujui rencana bisnis dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek korporasi. Dewan Komisaris memberikan advis dan melakukan pemantauan kepada Direksi atas pengelolaan implementasinya. Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam keputusan yang sangat penting bagi korporasi, diatur dalam anggaran dasar korporasi.	1.3.1	<i>The Board of Commissioners reviews the corporate strategy at least annually and approves the corporate mission, vision and strategy formulated by the Board of Directors. The Board of Commissioners also reviews, provides advice, and approves long term business and financial plans and Bank BPD Bali's short-term financial plans. The Board of Commissioners provides advice and monitors the Board of Directors on the management of its implementation. The Board of Directors and Board of Commissioners are involved in decisions that are very important for the corporation, as regulated in the articles of association of Bank BPD Bali.</i>	Diterapkan: - Implementasi fungsi pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi atas pengelolaan Bank yang dilakukan Dewan Komisaris antara lain melalui rapat gabungan. - Keputusan rapat-rapat tersebut telah dibuat risalah rapat; - Laporan tahunan telah menjelaskan jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris . - Komite Remunerasi dan Nominasi telah menjalankan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait remunerasi nominasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi disamping membantu Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan berjalan secara formal dan transparan. - Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai remunerasi dan nominasi anggota Dewan Komisaris serta Direksi. Selain itu, mereka juga berperan dalam memastikan bahwa proses pencalonan dan pemilihan dilakukan secara formal dan transparan.
		1.3.2	Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris harus diungkapkan dalam laporan tahunan.	1.3.2	<i>The types of decisions that require the approval of the Board of Commissioners must be disclosed in the annual report.</i>	

Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris
Roles and Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners

1.3.3	Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan, Dewan Komisaris mengusulkan kepada, dan untuk diputuskan Remunerasi oleh, RUPS pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam mengusulkan hal di atas, Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, unsur nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan gender. Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah formal dan transparan.	1.3.3	<i>Taking into account the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee, the Board of Commissioners proposes to, and to be resolved by, the GMS the appointment and/or dismissal of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. In proposing the above, the Board of Commissioners takes into account the diversity, non-discriminatory elements, as well as provides equal opportunities regardless of ethnicity, religion, race, class and gender. The Board of Commissioners ensures a formal and transparent selection and nomination process for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.</i>	• Pengawasan oleh Dewan Komisaris terhadap pengelolaan Bank BPD Bali mencakup perhatian terhadap aspek pengelolaan risiko, integritas akuntansi, dan sistem pelaporan keuangan korporat. Mereka juga memastikan independensi fungsi audit internal dan eksternal, serta kepatuhan pelaporan laporan keuangan dengan standar akuntansi dan peraturan yang berlaku, di samping penyajian laporan tahunan sesuai dengan ketentuan regulator. • <i>Board Charter</i> diperbaharui secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan peraturan serta dinamika industri dan bisnis Bank BPD Bali, sekaligus menjelaskan berbagai ketentuan terkait Dewan Komisaris. Hal ini termasuk kebijakan pengunduran diri, rapat, dan peran penting Komisaris Utama.
1.3.4	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. Setiap tahun Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Direktur Utama.	1.3.4	<i>The Board of Commissioners or Committees conducting the nomination function formulate a succession policy in the process of nominating members of the Board of Directors. Every year, the Board of Commissioners reviews the report on the implementation of the development and succession plans submitted by the President Director.</i>	Applied: • The Board of Commissioners plays a crucial role in overseeing the Bank's management and providing guidance to the Board of Directors, particularly through joint meetings. • The outcomes of these meetings are meticulously documented in the minutes.
1.3.5	Dewan Komisaris a). mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite yang menjalankan fungsi remunerasi, besaran remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang korporasi dan pemegang saham; b). secara berkala merevisi sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris	1.3.5	<i>The Board of Commissioners a). submit to the GMS, which may be preceded by recommendation from Committees conducting the remuneration function, the amount of remuneration for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, in line with sustainable corporate development and the long-term interests of the corporation and shareholders; b). periodically reviewing the remuneration system for the Board of Directors and Board of Commissioners.</i>	• The annual report details the types of decisions that require the Board of Commissioners' approval. • Furthermore, the Remuneration and Nomination Committee has actively delivered recommendations to the Board of Commissioners concerning the remuneration and nomination of both the Board of Commissioners and the Board of Directors.
1.3.6	Dewan Komisaris mengawasi efektivitas kebijakan governansi korporat dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan.	1.3.6	<i>The Board of Commissioners oversees the effectiveness of corporate governance policies and the implementation, as well as proposing changes if necessary.</i>	• They also ensure that the nomination and election processes are conducted in a formal and transparent manner.
1.3.7	Dewan Komisaris memantau dan mengarahkan agar korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan, kode perilaku dan standar yang berlaku.	1.3.7	<i>The Board of Commissioners monitors and directs Bank BPD Bali to implement the appropriate and effective risk management and internal control systems that are aligned with the corporate goals, objectives and strategies as well as complying with laws and regulations, codes of conduct, and applicable standards.</i>	• The Board of Commissioners plays a crucial role in overseeing the management of Bank BPD Bali, focusing on key areas such as risk management, the integrity of accounting practices, and the effectiveness of the company's financial reporting systems. They also work to ensure the independence of both internal and external audit functions, ensuring that financial reports comply with relevant accounting standards and regulations, and that annual reports meet all regulatory requirements.

Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris
Roles and Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners

		1.3.8	Dewan Komisaris mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal.	1.3.8	<i>The Board of Commissioners supervises and directs the integrity of the corporate accounting and financial reporting system, as well as the independence of the internal and external audit functions.</i>	Additionally, the Board Charter is updated regularly to reflect changes in regulations and the evolving landscape of Bank BPD Bali's industry and operations. This document clarifies various provisions related to the Board of Commissioners, including policies on resignation, meeting protocols, and the pivotal role of the President Commissioner.
		1.3.9	Dewan Komisaris memantau, mereview dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Korporasi serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian korporasi.	1.3.9	<i>The Board of Commissioners monitors, reviews, and approves the annual report and sustainability report of Bank BPD Bali, and ensures their integrity, as well as oversees Bank BPD Bali's disclosure and communication process.</i>	
		1.3.10	Piagam Dewan Komisaris secara periodik ditinjau.	1.3.10	<i>The charter of the Board of Commissioners is periodically reviewed.</i>	
		1.3.11	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan.	1.3.11	<i>The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners if they are involved in financial crimes and are proven to have made a mistake.</i>	
		1.3.12	Komisaris independen sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam diskusi yang jujur, obyektif, aktif dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris.	1.3.12	<i>Independent commissioners are highly expected to be able to contribute to honest, objective, active, and constructive discussions at meetings of the Board of Commissioners.</i>	
		1.3.13	Komisaris Utama berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Komisaris Utama mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasi penetapan agenda rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Selain itu, juga harus ada kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior.	1.3.13	<i>The President Commissioner acts as the coordinator of the Board of Commissioners and ensures its effectiveness. The President Commissioner promotes a culture of transparency and constructive dialogue that allows a variety of views to be expressed, including coordinating the setting of appropriate board meeting agendas and ensuring sufficient time is available to discuss all agenda items. In addition, there should also be opportunities for the Board of Commissioners to meet with the Board of Directors and senior management.</i>	
1.4	Pembentukan Komite <i>Establishment of Committees</i>	1.4.1	Korporasi memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Manajemen Risiko.	1.4.1	<i>The Corporation has committees under the Board of Commissioners, consisting of at least: the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, and Risk Management Monitoring Committee.</i>	Diterapkan: - Dewan Komisaris Bank BPD Bali telah memiliki ketiga komite yang dimaksud dan memastikan independensi dan wewenang dari semua anggota Komite Dewan Komisaris telah yang diatur dalam piagam Komite Dewan Komisaris. - Ketua Komite Audit dijabat oleh Komisaris Independen dan anggota Komite Dewan Komisaris telah memiliki sertifikasi yang diperlukan untuk mendukung fungsi pengawasan Bank yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.
		1.4.2	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen, serta semua anggota komite memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independen.	1.4.2	<i>The Board of Commissioners ensures that all members of the Audit Committee are independent and the majority of other committees established by the Board of Commissioners are independent parties, and all members of the committee are competent, committed, and have sufficient authority to perform their roles in an effective and independent manner.</i>	

Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris
Roles and Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners

1.5	Penilaian Kinerja - Dewan Komisaris dan Anggotanya <i>Performance Assessment - Board of Commissioners and its Members</i>	1.4.3	Untuk memastikan pemantauan atas pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan obyektif dan independen, Komisaris Utama tidak boleh menjadi ketua Komite Audit, kecuali dalam keadaan luar biasa yang harus dijelaskan dalam laporan tahunan.	1.4.3	<i>To ensure the monitoring on the implementation of duties of the Audit Committee is carried out in an objective and independent manner, the President Commissioner is not allowed to be the chairman of the Audit Committee, except in extraordinary circumstances, which must be explained in the annual report.</i>	Applied: - The Board of Commissioners at Bank BPD Bali has formed the three committees mentioned earlier and is committed to ensuring the independence and authority of all members of the Board of Commissioners Committee, as outlined in the committee's charter. - The Audit Committee is led by an independent commissioner, and all members of the Board of Commissioners Committee possess the relevant certifications to effectively support the supervisory responsibilities carried out by the Board.
		1.5.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif untuk menentukan efektivitas Dewan, komitennya, dan setiap individu Komisaris.	1.5.1	<i>The Board of Commissioners conducts an annual formal evaluation objectively to determine the effectiveness of the Board, its committees, and each individual Commissioner.</i>	Diterapkan: Dewan Komisaris telah melakukan penilaian terhadap pencapaian kinerja secara formal setiap tahun disamping melakukan penilaian terhadap komite di bawahnya. Penjelasan terkait hal tersebut dijelaskan di bab GCG. Applied: <i>The Board of Commissioners has undertaken a formal evaluation of performance on an annual basis, in addition to evaluating the performance of the committees subordinate to it. Further details are available in the Governance, Compliance, and Governance (GCG) chapter.</i>
1.6	Benturan Kepentingan <i>Conflict of Interest</i>	1.6.1	Anggota Direksi yang mempunyai rangkap jabatan di luar korporasi, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Seorang Komisaris memberi tahu Dewan Komisaris dan ketua komite yang menjalankan fungsi nominasi, sebelum menerima penunjukan baru sebagai Direktur atau Komisaris dari korporasi terbuka, jabatan Direktur lainnya atau posisi lain dengan komitmen waktu yang signifikan.	1.6.1	<i>Members of the Board of Directors with concurrent positions outside the corporation must obtain approval from the Board of Commissioners. A Commissioner notifies the Board of Commissioners and the chairman of the committee carrying out the nomination function, prior to accepting a new appointment as Director or Commissioner of a public company, other Director positions or other positions with a significant time commitment.</i>	Diterapkan: Laporan tahunan ini menyajikan secara rinci mengenai ketentuan rangkap jabatan serta kepemilikan saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Informasi terkait implementasi atas ketentuan-ketentuan tersebut dapat ditemukan pada bagian Transparansi Informasi Terkait Dewan Komisaris dan Direksi di bab GCG. Applied: <i>This annual report thoroughly details the regulations regarding concurrent positions and share ownership for both the Board of Commissioners and the Board of Directors. For further information on the implementation of these regulations, please refer to the Transparency of Information Related to the Board of Commissioners and Board of Directors section in the GCG chapter.</i>
		1.6.2	Dewan Komisaris memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset korporasi dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemantauan dan pengambilan keputusan atas potensi benturan kepentingan yang melibatkan Komisaris atau afiliasi Komisaris yang bersangkutan.	1.6.2	<i>The Board of Commissioners monitors and manages potential conflicts of interest for management, members of the Board of Directors, Board of Commissioners and shareholders, including misuse of corporate assets and misuse in related party transactions. Commissioners with conflicts of interest do not participate in monitoring and making decisions on potential conflicts of interest involving the Commissioners or affiliates of the Commissioners concerned.</i>	

Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Roles and Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners

1.7 Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris <i>Competency Improvement of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners</i>	1.7.1 Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran dan tanggung jawab mereka, karakteristik dan operasi korporasi, peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan serta kewajiban lain yang berlaku. Direksi melalui sekretaris korporasi mendukung semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbarui dan menyegarkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka di Dewan.	1.7.1 <i>The Board of Commissioners ensures that members of the Board of Directors and Board of Commissioners understand their roles and responsibilities, characteristics and operations of the corporation, relevant laws and regulations and other applicable standards and obligations. The Board of Directors through the corporate secretary supports all members of the Board of Directors and Board of Commissioners in updating and refreshing the required skills and knowledge to carry out their roles on the Board.</i>	Diterapkan: Bank BPD Bali telah menerapkan kebijakan untuk meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi. Penjabaran mengenai penerapan kebijakan ini, serta partisipasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dapat ditemukan di Bab GCG yang membahas tentang mereka. Applied: <i>Bank BPD Bali has instituted a policy aimed at enhancing the competencies of both the Board of Commissioners and the Board of Directors. A detailed account of the implementation of this policy, along with the involvement of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, is available in the chapter on Good Corporate Governance (GCG) that addresses these matters.</i>

Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Composition and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners

2.1 Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris <i>Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners</i>	2.1.1 Dalam menentukan kandidat calon Direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau pemegang saham mayoritas. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat.	2.1.1 <i>In determining prospective candidates for Directors, the Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee does not only rely on recommendations from the Board of Commissioners, management or majority shareholders. The Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee can use independent sources to determine qualified candidates.</i>	Diterapkan: - Bank BPD Bali dalam melaksanakan proses seleksi anggota Dewan Komisaris mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh OJK serta regulasi internal, termasuk Anggaran Dasar, Pedoman <i>Good Corporate Governance</i> (GCG), dan Board Manual untuk Dewan Komisaris dan Direksi. - Untuk informasi yang lebih detail mengenai kriteria Dewan Komisaris dan Direksi, serta peran Komite Remunerasi dalam proses seleksi, dapat ditemukan pada bagian Transparansi Informasi Terkait Dewan Komisaris dan Direksi dalam bab GCG. - Selanjutnya, rincian mengenai aspek keahlian, sertifikasi, komposisi, pembagian tugas, dan keberagaman yang dibutuhkan dari Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota telah dijelaskan dalam bagian Transparansi Informasi Terkait Dewan Komisaris serta pada bagian Dewan Komisaris dan Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
	2.1.2 Dewan Komisaris memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi.	2.1.2 <i>The Board of Commissioners ensures that the criteria for selecting members of the Board of Directors include at least the required knowledge, abilities, and expertise to properly meet the role of the Board of Directors and takes into account the fulfilment of the diversity of the Board of Directors.</i>	
	2.1.3 Kebijakan korporasi tentang keberagaman pada, Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan.	2.1.3 <i>The corporate policy regarding diversity among the Board of Directors and Board of Commissioners is disclosed in the Annual Report.</i>	
	2.1.4 Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris adalah jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan komposisi Dewan yang diinginkan. Dewan Komisaris menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat.	2.1.4 <i>The Board of Commissioners ensures that the policies and procedures for the selection and nomination of Commissioners are clear and transparent in order to produce the desired Board composition. The Board of Commissioners uses independent sources to determine qualified candidates.</i>	

Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Composition and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners

2.1.5 Dewan Komisaris/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi.

2.1.5 The Board of Commissioners/Committee that performs the nomination function establishes nomination procedures and criteria that are consistent with the Board of Commissioners' expertise matrix, which has been approved by the Board of Commissioners and ensures that the candidate profile meets the established requirements in the expertise matrix and nomination criteria.

Applied:

- Bank BPD Bali, in executing the selection process for members of the Board of Commissioners, adheres to the regulations established by the Financial Services Authority (OJK) as well as its internal policies, which encompass the Articles of Association, the Good Corporate Governance (GCG) Guidelines, and the Board Manual applicable to both the Board of Commissioners and the Board of Directors.
- For further detailed information concerning the criteria applicable to the Board of Commissioners and the Board of Directors, in addition to the role of the Remuneration Committee within the selection process, please refer to the section entitled "Transparency of Information Related to the Board of Commissioners and Board of Directors" within the GCG chapter.
- Moreover, comprehensive information regarding the requisite aspects of expertise, certification, composition, division of tasks, and diversity for members of both the Board of Commissioners and the Board of Directors, as they fulfill their duties and responsibilities, is provided in the section on "Transparency of Information Related to the Board of Commissioners" as well as in the respective sections dedicated to the Board of Commissioners and the Board of Directors in this Annual Report.

2.1.6 Komposisi Dewan Komisaris harus dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan gender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Dewan Komisaris.

2.1.6 The composition of the Board of Commissioners must be formed in such a way that its members as a group reflect the diversity in terms of abilities, skills, knowledge, experience, age, cultural background, and gender needed to properly fulfil the role of the Board of Commissioners.

2.1.7 Untuk memampukan Dewan Komisaris dalam memberikan advis dan supervisi secara independen kepada Direksi dan untuk peran-peran yang terdapat potensi benturan kepentingan, Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen yang cukup jumlahnya, dengan masa jabatan yang dibatasi dan terdapat pengungkapan jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris serta independensi mereka dari sudut pandang korporasi.

2.1.7 To enable the Board of Commissioners to provide independent advice and supervision to the Board of Directors and for roles with potentials for conflicts of interest, the Board of Commissioners consists of a sufficient number of Independent Commissioners, with a limited term of office and there is disclosure of the term of membership of the Board of Commissioners and their independence from a corporate perspective.

2.1.8 Untuk memfasilitasi fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

2.1.8 To facilitate the effective function of the Board of Directors and Board of Commissioners and to increase investor and stakeholder confidence, the Nomination and Remuneration Committee ensures that there is a formal, rigorous, and transparent process for the selection and appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners.

2.2	Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris	<i>Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners</i>	2.2.1	Kebijakan remunerasi anggota Direksi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Remunerasi Direksi harus diusulkan, dapat dengan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Direksi dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi.	2.2.1	The remuneration policy for members of the Board of Directors consists of a remuneration structure that is oriented towards sustainable corporate development and encourages the achievement of long-term goals. The Board of Directors' remuneration must be proposed, through the Nomination and Remuneration Committee, by the Board of Commissioners to be resolved by the GMS. The amount of remuneration proposed to the GMS is determined by taking into account the role of each member of the Board of Directors and the economic situation as corporate performance.	Diterapkan:
							- Bank BPD Bali telah menetapkan prosedur terkait remunerasi, termasuk struktur remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi. Ketentuan tersebut ditetapkan melalui keputusan Direksi. - Implementasi dari berbagai aspek remunerasi ini dapat ditemukan secara lengkap dalam bagian Transparansi Informasi Terkait Dewan Komisaris dan Direksi.

Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Composition and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners

2.2.2	Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Jumlah remunerasi yang diusulkan Dewan Komisaris kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Dewan Komisaris dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. Di samping itu juga harus dipertimbangkan posisinya sebagai Komisaris Utama dan ketua serta keanggotaannya dalam komite-komite.	2.2.2	<i>The remuneration policy for members of the Board of Commissioners consists of a remuneration structure that is oriented towards sustainable corporate development and encourages the achievement of long-term goals. The amount of remuneration proposed by the Board of Commissioners to the GMS is determined by taking into account the role of each member of the Board of Commissioners and the economic situation as well as corporate performance. In addition, consideration should also be given to his/her position as President Commissioner and chairman as well as membership in committees.</i>	Applied: - Bank BPD Bali has implemented formal procedures pertaining to the remuneration framework, inclusive of the remuneration structures for both the Board of Commissioners and the Board of Directors. These provisions are established through a resolution passed by the Board of Directors. - A comprehensive description of the various elements associated with this remuneration can be located in the section entitled "Transparency of Information Related to the Board of Commissioners and Board of Directors."
2.2.3	Untuk memastikan bahwa paket remunerasi ditentukan berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi Direktur dan Komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi, kinerja individu dan kondisi pasar, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.	2.2.3	<i>To ensure that the remuneration package is determined based on the achievements, qualifications, and competencies of the Directors and Commissioners by taking into account the performance of corporate operations, individual performance, and market conditions, the Nomination and Remuneration Committee ensures that there are fair and transparent procedures for establishing remuneration policies for members of the Board of Directors and Board of Commissioners.</i>	

Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris Work Relationship between the Board of Directors and Board of Commissioners

3.1	Sifat Hubungan Kerja <i>Nature of Work Relationship</i>	3.1.1	Terdapat diskusi yang terbuka antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta di antara para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris. Namun, tetap penting menjaga kerahasiaan informasi agar tidak terjadi kebocoran informasi rahasia.	3.1.1	<i>There are open discussions between the Board of Directors and the Board of Commissioners and between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. However, it is still important to maintain the confidentiality of information to ensure that confidential information does not leak.</i>	Diterapkan: - Bank BPD Bali telah menetapkan kebijakan spesifik yang mengatur hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk di dalamnya pengelolaan data dan informasi. - Penyelenggaraan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi, yang mencakup agenda rapat, kehadiran, serta risalah, diungkapkan dalam laporan tahunan ini. Rapat gabungan tersebut didukung oleh peran Sekretaris Bank BPD Bali dalam meningkatkan komunikasi yang efektif antara Dewan Komisaris dan Direksi, untuk membahas implementasi strategi Bank BPD Bali yang dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi Bank BPD Bali.
		3.1.2	Sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, Direksi bekerja sama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi korporasi dan secara reguler membahas pengimplementasiannya.	3.1.2	<i>In accordance with their respective duties and roles, the Board of Directors cooperates with the Board of Commissioners in formulating the corporate missions, visions and strategies, and regularly discusses the implementation.</i>	
		3.1.3	Sekretaris Korporasi memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris, mendorong implementasi praktek governansi korporat yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.	3.1.3	<i>The Corporate Secretary has a crucial role in supporting the effectiveness of the working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners, encouraging the implementation of good corporate governance practices, including effective communication with shareholders and other stakeholders.</i>	

Applied:

- Bank BPD Bali has established comprehensive policies that govern the professional relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors, encompassing the management of data and information.

Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris
Work Relationship between the Board of Directors and Board of Commissioners

- This annual report includes details regarding the joint meetings conducted between the Board of Commissioners and the Board of Directors, specifying the meeting agendas, attendance records, and minutes. The effectiveness of communication between these two bodies is further enhanced by the role of the Secretary of Bank BPD Bali, facilitating discussions on the implementation of strategies aligned with the vision and mission of Bank BPD Bali.

3.2	Akses informasi Dewan Komisaris <i>Access to Information for the Board of Commissioners</i>	3.2.1	Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris sendiri memastikan bahwa ia memperoleh informasi yang memadai. Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris secara teratur, tanpa penundaan dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan korporasi. Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan.	3.2.1	<i>The Board of Directors is responsible for ensuring that the Board of Commissioners has access to accurate, relevant, and timely information. The Board of Commissioners itself ensures that it obtains sufficient information. The Board of Directors provides information to the Board of Commissioners regularly, without delay, and comprehensively on all matters relevant to the corporation. The Board of Commissioners may at any time request additional information to the Board of Directors.</i>	Diterapkan: Dalam Bab GCG ini, hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi diatur dengan jelas. Salah satu fokus utama adalah penyediaan data dan informasi yang relevan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan. Setelah itu, Direksi akan menindaklanjuti rekomendasi yang telah disepakati bersama dengan Dewan Komisaris. Applied: <i>This chapter on Good Corporate Governance outlines the relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors. A key emphasis is placed on the Board of Directors' responsibility to provide pertinent data and information to the Board of Commissioners, thereby facilitating effective oversight. Subsequently, the Board of Directors will take action on the recommendations agreed upon with the Board of Commissioners.</i>
	Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur <i>Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners on Impacts of the Structure</i>	3.3.1	Dampak struktur kepemilikan terhadap korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi yang mungkin berdampak terhadap pengelolaan dan operasi korporasi.	3.3.1	<i>The impact of the ownership structure on the corporation. The Board of Directors and the Board of Commissioners consider their responsibilities in the context of the shareholding structure and relationships between corporate shareholders, which may have an impact on corporate management and operations.</i>	Diterapkan: Dewan Komisaris dan Direksi, dalam melaksanakan tugas mereka terkait pengawasan dan pengelolaan Bank BPD Bali, senantiasa mengutamakan prinsip independensi serta berkomitmen untuk menghindari benturan kepentingan, termasuk dalam hal pengungkapan kepemilikan saham. Applied: <i>The Board of Commissioners and the Board of Directors of Bank BPD Bali are dedicated to their responsibilities in overseeing and managing the institution. They consistently uphold the principle of independence and are committed to preventing conflicts of interest, particularly regarding the disclosure of share ownership.</i>

Perilaku Etis dan Bertanggung jawab Ethical and Responsible Conduct

4.1	Pedoman Etika dan Perilaku <i>Code of Conduct</i>	4.1.1 Pernyataan ini dituangkan dalam Pedoman Perilaku dan Etika Usaha yang harus secara jelas mengungkapkan harapan korporasi bahwa setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan akan: - Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi; - Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi; - Bersikap independen dan bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian; - Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi korporasi dan operasinya; - Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan pedoman etika korporasi; - Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apa pun yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan terbaik korporasi atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi korporasi; - Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi yang dimiliki korporasi, kepemilikan aset lainnya atau pelanggannya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi korporasi dan pelanggannya. - Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi; - Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran, gratifikasi atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang menimbulkan benturan kepentingan/memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-undangan; - Menghormati perbedaan pendapat dan hak-hak setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan; - Memastikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan korporasi kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya;	4.1.1 <i>This statement is set forth in the Code of Conduct and Business Ethics, which must clearly state the corporate expectation that each member of the Board of Directors and Board of Commissioners and employees will:</i> <i>Act in the best interests of the corporation;</i> <i>Act honestly and with a high standard of integrity;</i> <i>Be independent and act based on complete information, in good faith, with due diligence and prudence;</i> <i>Comply with laws and regulations that apply to the corporation and its operations;</i> <i>Avoiding actions that violate laws and regulations or unethical actions based on corporate ethics guidelines;</i> <i>Not involved or participating in any activities that will create a conflict of interest with the best interests of the corporation or which will have a negative impact on the reputation of the corporation;</i> <i>Do not take advantage of property or information owned by the corporation, ownership of other assets or its customers for personal gain or which causes harm to the corporation and its customers.</i> <i>Does not take advantage of the position or opportunities generated by the position for personal gain;</i> <i>Avoiding the act of asking for or receiving from third parties' payments, gratuities, or other benefits for themselves or for other people that will lead to conflicts of interest/provide benefits to third parties by violating the laws and regulations;</i> <i>Respect differences of opinion and the rights of each member of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees;</i> <i>Ensuring full, fair, accurate, timely, and understandable disclosure in reports and documents submitted by the corporation to regulators and in other public communications;</i>	Diterapkan: - Penjelasan terkait <i>Code of Conduct</i> telah disajikan secara lengkap di laporan tahunan ini, bab GCG bagian <i>Code of Conduct</i>. <i>Code of Conduct</i> ini berlaku bagi Dewan Komisaris, Direksi dan segenap karyawan Bank BPD Bali. Beragam hal penting yang diatur dalam <i>Code of Conduct</i> menjadi acuan bagi segenap karyawan dalam menerapkan GCG di semua tingkat atau jenjang organisasi Bank BPD Bali. - Kode Etik Bank BPD Bali adalah pedoman etika yang menjadi prinsip kepatutan dan kepastian dan dasar yang memandu hubungan di antara Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan dengan <i>stakeholders</i>. Ketentuan terkait benturan kepentingan juga diatur dalam kode etik tersebut. Applied: - The Code of Conduct is thoroughly detailed in Chapter GCG, Section Code of Conduct of this Annual Report. This Code is applicable to the Board of Commissioners, Directors, and all employees of Bank BPD Bali. It addresses several crucial aspects that serve as a reference for employees at every level, ensuring the effective implementation of Good Corporate Governance (GCG) throughout the organization. - Furthermore, the Bank BPD Bali Code of Ethics provides essential ethical guidelines that emphasize propriety and appropriateness. It lays the foundation for the relationships among the Board of Commissioners, Directors, Employees, and Stakeholders, while also addressing potential conflicts of interest.

**Perilaku Etis dan Bertanggung jawab**
Ethical and Responsible Conduct

4.1.2 Direksi menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, antikorupsi, antikecurangan (*antifraud*), keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti pencucian uang, anti suap, antikorupsi, antikecurangan atau standar terkait lainnya.

4.1.2 *The Board of Directors establishes policies and practices on anti-money laundering and financing of terrorism, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud, political involvement with reference to the national or international standards regarding anti-money laundering, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud or other related standards.*

Diterapkan:

- Bank BPD Bali telah memiliki SOP Strategi Anti Fraud yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi dengan berpedoman dengan ketentuan OJK. Selain itu, Bank juga telah memiliki ketentuan internal berupa Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi pada tahun 2023.
- Kebijakan ini diperkuat dengan SOP Penerapan Program APU, PPT, dan PPSPM yang berpedoman pada ketentuan regulator dalam rangka Penerapan Program APU, PPT, dan PPSPM yang terakhir kali ditetapkan pada tahun 2024.

Applied:

- *Bank BPD Bali has an anti-fraud strategy SOP, which is stipulated in the Board of Directors' resolution and is guided by OJK regulations. In addition, the Bank also has internal regulations in the form of a Business Policy Manual (BPP) for the implementation of Anti-Money Laundering (APU), Prevention of Terrorist Financing (PPT), and Prevention of Proliferation of Weapons of Mass Destruction Financing (PPSPM) as stipulated in the Board of Directors' Decree in 2023.*
- *This policy is reinforced by the SOP for the Implementation of APU, PPT, and PPSPM Programs, which are guided by regulatory provisions related to the implementation of APU, PPT, and PPSPM Programs, most recently established in 2024.*

Perilaku Etis dan Bertanggung jawab Ethical and Responsible Conduct

4.2	Nilai-nilai dan Budaya Organisasi <i>Corporate Values and Culture</i>	4.2.1	Korporasi mengartikulasikan, menumbuhkan dan mengungkapkan budaya dan nilai-nilai korporasi	4.2.1	<i>The corporation articulates, fosters, and discloses corporate culture and values</i>	Diterapkan: Bank BPD Bali telah memiliki budaya perusahaan sebagaimana dijelaskan di Bab Profil Perusahaan dan telah menjadi bagian yang melekat dari kegiatan operasional sehari-hari. Budaya Perusahaan tersebut terakhir kali ditetapkan melalui SK Direksi tahun 2023. Applied: <i>Bank BPD Bali possesses a corporate culture, as detailed in the Company Profile section, which has become an essential component of its daily operational activities. This corporate culture was most recently instituted by a resolution of the Board of Directors in 2023.</i>
4.3	Penegakan dan Komunikasi Pedoman Etika, Nilai-nilai dan Budaya <i>Enforcement and Communication of the Code of Ethics, Values, and Culture</i>	4.3.1	Pedoman perilaku dan kode etik korporasi dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan, diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi korporasi termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditegakkan.	4.3.1	<i>The corporate code of conduct and code of ethics are communicated effectively to the Board of Directors, Board of Commissioners and all employees, integrated into corporate strategy and operations, including risk management system and remuneration structure, as well as being enforced.</i>	Diterapkan Sosialisasi <i>Code of Conduct</i> telah dilakukan ke manajemen dan seluruh karyawan serta jaringan kantor beserta ketentuan untuk menandatangani formulir pernyataan sikap. Applied <i>The Code of Conduct has been disseminated to management, all employees, and office networks, accompanied by the requisite provisions for signing a commitment form.</i>

Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan Risk Management, Internal Control, and Compliance

5.1	Pengendalian Internal dan Kepatuhan <i>Internal Control and Compliance</i>	5.1.1	Direksi melakukan reviu secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan korporasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil reviu kepada para pemegang saham melalui laporan tahunan Korporasi.	5.1.1	<i>The Board of Directors periodically reviews the accuracy of designs and operational effectiveness of the governance system, risk management, internal control, and corporate compliance and reports the implementation and results of the review to shareholders through the annual report of the Corporation.</i>	Diterapkan Dewan Komisaris dan Direksi berperan aktif dalam mengkaji pengendalian internal, di antaranya melalui penyelenggaraan rapat-rapat dengan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). Selain itu, juga dilakukan penilaian terkait kecukupan implementasi fungsi kepatuhan Bank yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana diuraikan dalam Bab Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG). Applied <i>The Board of Commissioners and the Board of Directors are actively involved in reviewing internal controls, including through meetings with SKAI. Additionally, an assessment of the effectiveness of the Bank's compliance function is conducted and submitted to the OJK, as detailed in the GCG chapter.</i>

Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan
Risk Management, Internal Control, and Compliance

5.2 Manajemen Risiko <i>Risk Management</i>	5.2.1	Strategi dan risiko merupakan satu kesatuan, diungkapkan secara transparan, masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta dalam diskusi di rapat Dewan Komisaris dan Direksi.	5.2.1	<i>Strategy and risk is a unity, disclosed in a transparent manner, included in the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners, as well as in discussions at the meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors.</i>	Diterapkan - Rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi membahas berbagai aspek strategis Bank, termasuk strategi yang terkait dengan pencapaian target kinerja serta mitigasi risiko. - Pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko telah diuraikan secara rinci pada bagian yang membahas Komite Dewan Komisaris dalam bab GCG.
	5.2.2	Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan manajemen risiko korporasi.	5.2.2	<i>The Risk Management Oversight Committee assists the implementation of the duties of the Board of Commissioners by creating a transparent, focused, and independent mechanism for oversight of corporate risk management.</i>	
5.3 Integrasi Governansi, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan <i>Integration of Governance, Risk Management, and Compliance</i>	5.3.1	Direksi membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya.	5.3.1	<i>The Board of Directors establishes an integrated governance, risk management and compliance (GRC) system, by handling various uncertainties in an integrated manner and with high integrity, to ensure that the corporation can achieve its objectives.</i>	Diterapkan - Direksi membangun komunikasi yang efektif dengan Dewan Komisaris, yang didukung oleh organ-organ pendukung di bawahnya, sebagai upaya untuk menerapkan Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) di seluruh lapisan organisasi. - Direktur Kepatuhan telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), khususnya terkait dengan independensi, dengan tidak menjalankan fungsi-fungsi yang diatur dalam ketentuan tersebut.
	5.3.2	Direksi memastikan bahwa bagian yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.	5.3.2	<i>The Board of Directors ensures that the division in charge of the compliance function does not concurrently carry out functions that have the potential to cause a conflict of interest.</i>	
					Applied <i>The Board of Directors establishes effective communication with the Board of Commissioners, supported by the subordinate entities within the organization, as part of its commitment to implementing the Principles of Good Corporate Governance (GCG) at all levels.</i> <i>The Compliance Director has adhered to the stipulations set forth in the Financial Services Authority Regulation (POJK), particularly concerning independence, by refraining from engaging in the functions delineated in the relevant provisions.</i>

Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan Risk Management, Internal Control, and Compliance

5.4	Audit Internal <i>Internal Audit</i>	5.4.1	Dewan Komisaris melalui Komite Audit memantau dan memastikan bahwa fungsi audit internal membantu korporasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan governansi korporat.	5.4.1	<i>The Board of Commissioners through the Audit Committee oversees and ensures that the internal audit function assists the corporation in achieving its goals through an objective and disciplined approach in order to evaluate and improve the effectiveness of risk management, internal control, and corporate governance.</i>	Diterapkan Pelaksanaan tugas Komite Audit bertujuan untuk memastikan bahwa fungsi audit berjalan dengan baik, termasuk efektivitas manajemen risiko, yang telah diuraikan dalam bagian Komite Dewan Komisaris pada bab Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG).
						Applied The execution of the Audit Committee's responsibilities is intended to ensure the effective operation of the audit function, which encompasses the efficacy of risk management. This aspect has been detailed in the Board of Commissioners Committee section within the GCG chapter.

Pengungkapan dan Transparansi Disclosure and Transparency

6.1	Kebijakan Pengungkapan <i>Policy on Disclosure</i>	6.1.1	Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia korporasi.	6.1.1	<i>The corporation has disclosure and transparency policies and procedures that ensure the disclosure of material information and safeguard sensitive information as well as corporate secrets.</i>	Diterapkan Bank BPD Bali telah melaksanakan keterbukaan informasi yang disajikan melalui situs resmi Bank BPD Bali, yang dapat diakses oleh seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan setiap saat.
		6.1.2	Hak pemegang saham untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang korporasi harus dipenuhi.	6.1.2	<i>Shareholders' right to obtain regularly and timely relevant material information regarding the corporation must be met.</i>	
6.2	Laporan Keuangan dan Keberlanjutan <i>Financial and Sustainability Reports</i>	6.2.1	Korporasi mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat.	6.2.1	<i>The corporation discloses systems and procedures to ensure that interim financial reports that are not materially audited or reviewed by external auditors are accurate, complete, and provide investors with the right information to make the right investment decisions.</i>	Diterapkan - Penyajian laporan keuangan interim disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). - Peran Komite Audit dalam proses audit yang dilaksanakan oleh akuntan publik dijelaskan dalam laporan tahunan ini untuk memastikan mutu laporan keuangan yang telah diaudit.
		6.2.2	Komite Audit memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal.	6.2.2	<i>The Audit Committee ensures the quality of audits on financial report carried out by external auditors. This activity includes recommending the appointment, reappointment and, if necessary, the termination and remuneration of the external auditor.</i>	
		6.2.3	Laporan keberlanjutan harus disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional.	6.2.3	<i>The sustainability report shall be prepared and disclosed accurately and in accordance with national or international sustainability reporting frameworks.</i>	

Pengungkapan dan Transparansi Disclosure and Transparency

		6.2.4	Korporasi menerbitkan laporan tahunan secara terintegrasi yang menempatkan kinerja historis ke dalam konteks dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek korporasi di masa depan, sehingga membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan.	6.2.4	<i>The corporation issues an integrated annual report that places historical performance into context and describes the risks, opportunities, and prospects of the corporation in the future, which will subsequently assist shareholders and stakeholders to understand the strategic goals of the corporation and its progress in creating sustainable value.</i>	Furthermore, this annual report provides an explanation of the Audit Committee's role in the audit process executed by public accountants, with the objective of ensuring the integrity and quality of the audited financial statements.
6.3	Diseminasi Informasi <i>Dissemination of Information</i>	6.3.1	Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna.	6.3.1	<i>Channels for the dissemination of information should provide users with equitable, timely, and relatively inexpensive access to relevant information.</i>	Diterapkan - Sebagai Perusahaan non-publik, Bank BPD Bali melakukan distribusi informasi penting melalui <i>website</i> Bank BPD Bali, sehingga diharapkan dapat diakses oleh pemegang saham dan berbagai pemangku kepentingan. Applied - As a privately held company, Bank BPD Bali disseminates essential information via its official website, thereby ensuring accessibility for shareholders and various stakeholders.
		6.3.2	Korporasi memastikan bahwa pernyataan tahunan terhadap penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia, termasuk penjelasan atas penerapan atas masing-masing Rekomendasi dan Panduan tersedia di situs web selama jangka waktu minimal lima tahun.	6.3.2	<i>The corporation ensures that an annual statement on the implementation of the Indonesian General Guidelines for Corporate Governance, including an explanation on the implementation of each Recommendation and Guideline is available on the website for a minimum period of five years</i>	
		6.3.3	Untuk korporasi yang terdaftar di pasar modal di yurisdiksi selain yurisdiksi asal, peraturan perundang-undangan atas governansi korporat yang berlaku harus diungkapkan dengan jelas. Dalam hal cross listing, kriteria dan prosedur cross listing, kriteria dan prosedur untuk mengakui persyaratan listing untuk listing utama harus transparan dan didokumentasikan	6.3.3	<i>For corporations listed on the capital market in jurisdictions other than the jurisdiction of origin, applicable laws and regulations on corporate governance must be clearly disclosed. In the case of cross listing, the criteria and procedures for cross listing, criteria and procedures for recognizing the listing requirements for the primary listing must be transparent and documented</i>	

Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham Protection of the Rights of Shareholders

7.1	Hak Pemegang Saham <i>Rights of Shareholders</i>	7.1.1	Korporasi memiliki suatu kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor.	7.1.1	<i>The corporation has a communication policy that facilitates and encourages shareholder or investor participation.</i>	Diterapkan - Penyelenggara RUPS dan penyajian informasi di situs Bank BPD Bali diharapkan mampu meningkatkan partisipasi pemegang saham dan investor. - Implementasi GCG dilakukan secara menyeluruh. Selain itu, Bank BPD Bali telah memiliki ketentuan terkait aksi korporasi dan pelaporannya yang disampaikan kepada OJK <i>website</i> Bank. Applied - The organizer of the GMS and the presentation of information on the Bank BPD Bali website are expected to be able to increase the participation of shareholders and investors. - The implementation of GCG is carried out comprehensively. In addition, Bank BPD Bali has provisions related to corporate actions and their reporting submitted to the OJK and the Bank's website.
		7.1.2	Korporasi yang merupakan entitas induk memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas anak dan entitas sependangali yang di dalamnya investasi korporasi adalah signifikan.	7.1.2	<i>Corporations that are parent entities ensure that their corporate governance policies apply to subsidiaries and entities under common control in which their investment is significant.</i>	
		7.1.3	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambilalihan, dan transaksi luar biasa seperti <i>merger</i> dan penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya.	7.1.3	<i>Corporations have rules and procedures that govern acquisitions, takeovers, and extraordinary transactions, such as mergers and sales of substantial corporate assets to ensure the transactions occur in a transparent manner and under reasonable conditions as well as protecting the rights of all shareholders according to class.</i>	

Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham Protection of the Rights of Shareholders

7.2	Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham <i>Fair Treatment of Shareholders</i>	7.2.1	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan a). semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham harus diperlakukan setara, b). pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya.	7.2.1	<i>Corporations have rules and procedures that ensure a). all shareholders of the same series in one class of shares must be treated equally, b). disclosure of said rules and procedures, as well as disclosure of capital structure and arrangements that allow certain shareholders to gain influence or control that is disproportionate to their share ownership.</i>	Diterapkan - Kebijakan penyelenggaraan RUPS yang transparan dan memenuhi ketentuan <i>regulator</i> serta penyediaan akses informasi penting oleh semua pemegang saham antara lain melalui <i>website</i> Bank BPD Bali adalah contoh perlakuan setara bagi pemegang saham. - Keterbukaan informasi terkait transaksi pihak berelasi disajikan di laporan tahunan ini dan catatan laporan keuangan audit. <i>Insider trading</i> tidak relevan mengingat Bank BPD Bali bukanlah sebuah perusahaan publik.
		7.2.2	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat, dan melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham.	7.2.2	<i>The corporation has rules and procedures that ensure related party transactions are approved and carried out in such a way as to ensure that conflicts of interest are properly managed, and protect the interests of the corporation and shareholders.</i>	
		7.2.3	Korporasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> . Korporasi memiliki aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun dalam saham korporasi yang dilakukan oleh Direktur, Komisaris dan orang dalam untuk memastikan bahwa siapa pun tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/belum tersedia di pasar.	7.2.3	<i>The corporation has established and discloses policies to prevent insider trading. The corporation has clear rules regarding any trading in corporate shares carried out by Directors, Commissioners, and insiders to ensure that no one can benefit directly or indirectly from information that is not yet available on the market.</i>	
7.3	Rapat Umum Pemegang Saham <i>General Meeting of Shareholders</i>	7.3.1	Korporasi melakukan panggilan RUPS dengan agenda dan materi RUPS selengkap dan sedini mungkin (paling lambat 28 hari sebelum RUPS) untuk memberikan waktu dan materi yang cukup bagi pemegang saham untuk mempelajari dengan baik agenda rapat. Undangan rapat dan seluruh informasi RUPS diungkapkan melalui sarana elektronik seperti melalui situs web korporasi.	7.3.1	<i>The corporation implement the notice for GMS with the agenda and materials for the GMS as completely and as early as possible (no later than 28 days prior to the GMS) to provide sufficient time and material for shareholders to properly study the meeting agenda. Meeting invitations and all GMS information are disclosed through electronic means, such as through the corporate website.</i>	Diterapkan - Bank BPD Bali menyajikan informasi terkait kronologi penyelenggaraan RUPS tahun 2024 dan 2023 beserta realiasi penyelenggaraan RUPS yang mendukung partisipasi aktif pemegang saham dengan tetap comply dengan peraturan yang berlaku melalui penyajian informasi terkait risalah RUPS di <i>website</i> Bank BPD Bali dan laporan tahunan ini. - Transparansi dan akuntabilitas auditor eksternal dilakukan oleh Bank BPD Bali dengan berpedoman pada ketentuan internal Bank yang sejalan dengan ketentuan <i>regulator</i> dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik berpedoman kepada POJK No. 9 Tahun 2023.
		7.3.2	Korporasi memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS.	7.3.2	<i>The corporation has established and disclosed rules and procedures that facilitate shareholders to participate and vote effectively at the GMS.</i>	
		7.3.3	Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.	7.3.3	<i>Shareholders participate effectively to determine the appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners.</i>	
		7.3.4	Korporasi memastikan transparansi dan akuntabilitas auditor eksternal di RUPS.	7.3.4	<i>The corporation ensures the transparency and accountability of the external auditor at the GMS.</i>	



Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham Protection of the Rights of Shareholders

		7.3.5	Penyampaian hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS secara lengkap diumumkan ke publik pada hari kerja berikutnya	7.3.5	Submission of voting results and a complete summary of the minutes of the GMS will be announced to the public on the following working day.	Applied - Bank BPD Bali presents information related to the chronology of the implementation of the 2024 and 2023 GMS along with the realization of the implementation of the GMS that supports active participation of shareholders while remaining compliant with applicable regulations through the presentation of information related to the minutes of the GMS on the Bank BPD Bali website and this annual report. - Transparency and accountability of external auditors are carried out by Bank BPD Bali by referring to the Bank's internal provisions which are in line with the provisions of the regulator in appointing Public Accountants guided by POJK No. 9 of 2023.

Penghargaan terhadap Pemangku Kepentingan Appreciation for Stakeholders

8.1	Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kunci <i>Stakeholder engagement</i>	8.1.1	Korporasi melalui Sekretaris Bank BPD Bali melaksanakan komunikasi yang regular, transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan kunci serta melibatkan mereka untuk memahami harapan dan keluhan mereka serta dampak korporasi terhadap mereka.	8.1.1	The corporation through the Corporate Secretary carries out regular, transparent, and effective communication with key stakeholders as well as involves them to understand their hopes and complaints as well as the impact of the corporation on them.	Diterapkan - Laporan keberlanjutan yang disajikan terpisah dari laporan tahunan ini menyajikan informasi mengenai partisipasi aktif Bank BPD Bali terhadap berbagai pemangku kepentingan, serta keterlibatan mereka dalam kegiatan yang diinisiasi oleh Bank BPD Bali, yang pada gilirannya memberikan dampak positif bagi pemangku kepentingan tersebut. Applied - The sustainability report, which is presented separately from this annual report, provides detailed information regarding Bank BPD Bali's active engagement with various stakeholders. It also highlights the bank's involvement in initiatives that it has launched, which in turn contribute positively to these stakeholders.

Penghargaan terhadap Pemangku Kepentingan Appreciation for Stakeholders

8.2 Integrasi Keberlanjutan dalam Model Bisnis <i>Integration of Sustainability in Business Models</i>	8.2.1 Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab, akuntabel dan transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris memasukkan pertimbangan keberlanjutan ketika menjalankan perannya, termasuk antara lain dalam pengembangan dan implementasi strategi korporasi, rencana bisnis, rencana aksi utama dan manajemen risiko.	8.2.1 <i>The Board of Commissioners together with the Board of Directors are responsible, accountable and transparent for sustainability governance, including in terms of establishing corporate sustainability strategies, priorities and targets. The Board of Directors and Board of Commissioners incorporate sustainability considerations when carrying out their roles, including by developing and implementing corporate strategies, business plans, main action plans, and risk management.</i>	Diterapkan - Direksi memastikan bahwa strategi, prioritas dan target keberlanjutan Bank serta kinerja terhadap target dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan. Direksi dan Dewan Komisaris Bank BPD Bali senantiasa mengikuti dan memahami masalah keberlanjutan yang relevan bagi Bank. Applied - The Board of Directors ensures that the Bank's sustainability strategies, priorities, and targets, as well as performance against targets, are communicated to stakeholders. The Board of Directors and the Board of Commissioners of Bank BPD Bali consistently monitor and understand sustainability issues relevant to the Bank.
8.3 Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan <i>Protection for Stakeholders</i>	8.3.1 Direksi memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi korporasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh korporasi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan.	8.3.1 <i>The Board of Directors ensures and discloses that corporate operations reflect the application of high standards of ethics, social and environmental responsibility throughout the corporation and ensures that appropriate policies and procedures are implemented to respect and comply with the rights of stakeholders.</i>	Diterapkan - Partisipasi aktif karyawan ditunjukkan sebagaimana yang dilaporkan di laporan keberlanjutan Applied - Active employee participation is demonstrated as reported in the Sustainability Report.
	8.3.2 Direksi mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang korporasi dan mengedepankan keberlanjutan.	8.3.2 <i>The Board of Directors encourages employees to work for the long-term interests of the corporation and prioritizes sustainability</i>	



PENERAPAN ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARDS

Implementation of Asean Corporate Governance Scorecards

Prinsip Principle	Kriteria	Criteria	Halaman Page
A: Hak dan Perlakuan yang Adil terhadap Pemegang Saham <i>Rights and Equitable Treatment of Shareholders</i>			
A.1 Hak-Hak Dasar Pemegang Saham <i>Basic Shareholder Rights</i>	A.1.1 Bank BPD Bali melakukan pembagian dividen (interim dan final/tahunan) secara adil dan tepat waktu, yaitu seluruh pemegang saham diperlakukan sama dan dividen dibayarkan dalam kurun waktu 30 hari sejak (i) pengumuman dividen interim dan (ii) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) menyetujui pembagian dividen final.	A.1.1 <i>Does Bank BPD Bali pay (interim and final/annual) dividends in an equitable and timely manner; that is, all shareholders are treated equally and paid within 30 days after being (i) declared for interim dividends and (ii) approved by shareholders at general meetings for final dividends? In case Bank BPD Bali has offered Scrip dividend, did Bank BPD Bali paid the dividend within 60 days.</i>	Bank BPD Bali melakukan pembayaran dividen mengacu kepada ketentuan yang berlaku. Bab MDNA (hal. 253-254) <i>Bank BPD Bali makes dividend payments in accordance with applicable regulations. MDNA Chapter (pp. 253-254)</i>
A.2 Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham dan harus diberitahu tentang peraturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham <i>Right to participate effectively in and vote in general shareholder meetings and should be informed of the rules, including voting procedures, that govern general shareholder meetings</i>	A.2.1 Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham dan harus diberitahu tentang peraturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham. A.2.2 Apakah Bank BPD Bali memberikan hak kepada pemegang saham non-pengendali untuk mencalonkan kandidat direksi/komisaris? A.2.3 Apakah Bank BPD Bali mengizinkan pemegang saham untuk memilih direktur/komisaris secara individu? A.2.4 Apakah Bank BPD Bali mengungkapkan prosedur pemungutan suara yang digunakan sebelum dimulainya rapat? A.2.5 Apakah notulen RUPST terakhir mencatat bahwa para pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pertanyaan yang diajukan oleh para pemegang saham dan jawaban yang diberikan dicatat? A.2.6 Apakah Bank BPD Bali mengungkapkan hasil pemungutan suara termasuk suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk semua resolusi/tiap mata acara RUPST terakhir? A.2.7 Apakah Bank BPD Bali mengungkapkan daftar anggota dewan yang menghadiri RUPST terakhir? A.2.8 Apakah Bank BPD Bali mengungkapkan bahwa semua anggota dewan dan CEO (jika dia bukan anggota dewan) menghadiri RUPST terakhir? A.2.9 Apakah Bank BPD Bali mengizinkan pemungutan suara secara in absentia?	A.2.1 <i>Do shareholders have the opportunity, evidenced by an agenda item, to approve remuneration (fees, allowances, benefit-in-kind and other emoluments) or any increases in remuneration for the non-executive directors/commissioners?</i> A.2.2 <i>Does Bank BPD Bali provide non-controlling shareholders a right to nominate candidates for board of directors/commissioners?</i> A.2.3 <i>Does Bank BPD Bali allow shareholders to elect directors/commissioners individually?</i> A.2.4 <i>Does Bank BPD Bali disclose the voting procedures used before the start of meeting?</i> A.2.5 <i>Do the minutes of the most recent AGM record that the shareholders were given the opportunity to ask questions and the questions raised by shareholders and answers given recorded?</i> A.2.6 <i>Does Bank BPD Bali disclose the voting results including approving, dissenting, and abstaining votes for all resolutions/each agenda item for the most recent AGM?</i> A.2.7 <i>Does Bank BPD Bali disclose the list of board members who attended the most recent AGM?</i> A.2.8 <i>Does Bank BPD Bali disclose that all board members and the CEO (if he is not a board member) attended the most recent AGM?</i> A.2.9 <i>Does Bank BPD Bali allow voting in absentia?</i>	Penyelenggaraan RUPS (Bab GCG, hal. 321-337) menjelaskan bagian tersebut. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS (hal. 344, 366). <i>The implementation of the GMS as detailed in Chapter GCG (pages 321-337), clarifies this section. It also addresses the presence of the board of commissioners and directors at the GMS (pages 344, 366).</i>

Prinsip Principle	Kriteria	Criteria	Halaman Page
	A.2.10 Apakah Bank BPD Bali melakukan pemungutan suara melalui jajak pendapat (bukan dengan mengacungkan tangan) untuk semua resolusi pada RUPST terakhir?	A.2.10 Did Bank BPD Bali vote by poll (as opposed to by show of hands) for all resolutions at the most recent AGM?	
	A.2.11 Apakah Bank BPD Bali mengungkapkan bahwa Bank BPD Bali telah menunjuk pihak independen (pengawas/pemeriksa) untuk menghitung dan/atau memvalidasi suara pada RUPST?	A.2.11 Does Bank BPD Bali disclose that it has appointed an independent party (scrutineers/inspectors) to count and/or validate the votes at the AGM?	
	A.2.12 Apakah Bank BPD Bali menyediakan kepada publik pada hari kerja berikutnya hasil pemungutan suara yang diambil dalam RUPST/RUPSLB terakhir untuk semua resolusi?	A.2.12 Does Bank BPD Bali make publicly available by the next working day the result of the votes taken during the most recent AGM/EGM for all resolutions?	
	A.2.13 Apakah Bank BPD Bali memberikan pemberitahuan setidaknya 21 hari sebelumnya untuk semua RUPST dan RUPSLB?	A.2.13 Does Bank BPD Bali provide at least 21-day notice for all AGMs and EGMs?	
	A.2.14 Apakah Bank BPD Bali memberikan alasan dan penjelasan untuk setiap mata acara yang memerlukan persetujuan pemegang saham dalam pemberitahuan RUPST/surat edaran dan/atau pernyataan yang menyertainya?	A.2.14 Does Bank BPD Bali provide the rationale and explanation for each agenda item which require shareholders' approval in the notice of AGM/circulars and/or the accompanying statement?	
	A.2.15 Apakah Bank BPD Bali memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk memasukkan item-item dalam agenda rapat umum dan/atau meminta rapat umum dengan persentase tertentu?	A.2.15 Does Bank BPD Bali give the opportunity for shareholders to place item/s on the agenda of general meetings and/or to request for general meetings subject to a certain percentage?	
A.3 Pasar untuk kontrol Bank BPD Bali harus diizinkan untuk berfungsi dengan cara yang efisien dan transparan <i>Markets for corporate control should be allowed to function in an efficient and transparent manner</i>	A.3.1 Dalam kasus merger, akuisisi dan/atau pengambilalihan yang memerlukan persetujuan pemegang saham, apakah direksi/komisaris Bank BPD Bali menunjuk pihak independen untuk mengevaluasi kewajaran harga transaksi?	A.3.1 In cases of mergers, acquisitions and/or takeovers requiring shareholders' approval, does the board of directors/commissioners of Bank BPD Bali appoint an independent party to evaluate the fairness of the transaction price?	Tidak melakukan aksi korporasi yang dimaksud pada tahun 2024, (Bab MDNA, hal. 257). <i>No corporate action in 2024 (MDNA chapter, p. 257).</i>
A.4 Pelaksanaan hak kepemilikan oleh semua pemegang saham, termasuk investor institusional, harus difasilitasi <i>The exercise of ownership rights by all shareholders, including institutional investors, should be facilitated</i>	A.4.1 Apakah Bank BPD Bali mengungkapkan praktik-praktiknya untuk mendorong para pemegang saham untuk terlibat dengan Bank BPD Bali di luar rapat umum?	A.4.1 Does Bank BPD Bali disclose its practices to encourage shareholders to engage with Bank BPD Bali beyond general meetings?	• Penyelenggaraan RUPS tahun 2024 (Bab GCG, hal. 321-337) • Penyediaan akses Informasi dan data Perusahaan yang dapat diakses setiap saat (hal. 504-505). • Holding the 2024 GMS (GCG section, pp. 321-337) • Provide ready access to corporate information and data (pp. 504-505).



Prinsip Principle		Kriteria		Criteria	Halaman Page
A.5	Saham dan hak suara <i>Shares and voting rights</i>	A.5.1	Jika Bank BPD Bali memiliki lebih dari satu kelas saham, apakah Bank BPD Bali mempublikasikan hak suara yang melekat pada setiap kelas saham (misalnya, melalui situs web Bank BPD Bali/laporan/bursa efek/situs <i>web regulator</i>)?	A.5.1 <i>Where Bank BPD Bali has more than one class of shares, does Bank BPD Bali publicise the voting rights attached to each class of shares (e.g., through Bank BPD Bali website / reports/ the stock exchange/ the regulator's website)?</i>	- Bank BPD Bali hanya memiliki 1 (satu) kelas saham. (Bab Profil Perusahaan, hal. 128) - Hak suara dijelaskan di penyelenggaraan RUPS (Bab GCG, hal. 321-337) selain di <i>website</i>. - Bank BPD Bali has only 1 (one) class of shares. (Company Profile Chapter, page 128) - Voting rights are explained in the implementation of the GCG (GCG Chapter, pages 321-337) in the website.
		A.6	Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan <i>Notice of AGM</i>	A.6.1 <i>Does each of the resolutions tabled at the most recent annual general meeting deal with only one item, i.e., there is no bundling of several items into the same resolution?</i>	Penyelenggaraan RUPS (Bab GCG, hal. 321-337) menjelaskan bagian tersebut. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS (hal. 344 dan 366). <i>The implementation of the GMS as detailed in Chapter GCG (pages 321-337), clarifies this section. It also addresses the presence of the board of commissioners and directors at the GMS (pages 344 and 366).</i>
		A.6.2	Apakah pemberitahuan RUPST/ sirkular terbaru Bank BPD Bali sepenuhnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan diterbitkan pada tanggal yang sama dengan versi bahasa lokal?	A.6.2 <i>Are Bank BPD Bali's notice of the most recent AGM/circulars fully translated into English and published on the same date as the local-language version?</i>	
		A.6.3	Apakah pemberitahuan RUPST/ sirkuler memiliki rincian sebagai berikut:	A.6.3 <i>Does the notice of AGM/circulars have the following details:</i>	
		A.6.4	Apakah profil direktur/komisaris (setidaknya usia, kualifikasi akademis, tanggal pengangkatan pertama, pengalaman, dan jabatan direktur di Bank BPD Bali terbuka lainnya) yang akan mencalonkan diri untuk dipilih/dipilih kembali telah dicantumkan?	A.6.4 <i>Are the profiles of directors/ commissioners (at least age, academic qualification, date of first appointment, experience, and directorships in other listed companies) in seeking election/ re-election included?</i>	
		A.6.5	Apakah auditor yang mengajukan penunjukan/penunjukan kembali diidentifikasi dengan jelas? Apakah dokumen kuasa tersedia dengan mudah?	A.6.5 <i>Are the auditors seeking appointment/ re-appointment clearly identified? Were the proxy documents made easily available?</i>	
A.7	Perdagangan orang dalam dan perdagangan sendiri yang kejam harus dilarang <i>Insider trading and abusive self-dealing should be prohibited</i>	A.7.1	Apakah direktur/komisaris diwajibkan untuk melaporkan transaksi mereka dalam saham Bank BPD Bali dalam waktu 3 hari kerja?	A.7.1 <i>Are the directors / commissioners required to report their dealings in company shares within 3 business days?</i>	Manajemen tidak ada memiliki saham Bank BPD Bali. Transparansi Informasi Terkait Dewan Komisaris dan Direksi (hal. 386). <i>Management does not hold any shares in Bank BPD Bali. Transparency of information about the Board of Commissioners and Directors (p. 386).</i>

Prinsip Principle	Kriteria	Criteria	Halaman Page
A.8 Transaksi pihak terkait oleh direktur dan eksekutif kunci <i>Related party transactions by directors and key executives</i>	A.8.1 Apakah Bank BPD Bali memiliki kebijakan yang mewajibkan komite yang terdiri dari direktur/komisaris independen untuk meninjau RPT yang bersifat material untuk menentukan apakah RPT tersebut sesuai dengan kepentingan Bank BPD Bali dan pemegang saham?	A.8.1 <i>Does Bank BPD Bali have a policy requiring a committee of independent directors/commissioners to review material RPTs to determine whether they are in the best interests of Bank BPD Bali and shareholders?</i>	Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, (bab GCG hal. 339-340, 358-359) <i>Duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Directors (GCG chapter, p.339-340, 358-359)</i>
	A.8.2 Apakah Bank BPD Bali memiliki kebijakan yang mengharuskan anggota dewan (direktur/komisaris) untuk tidak berpartisipasi dalam diskusi dewan mengenai agenda tertentu ketika mereka memiliki konflik kepentingan?	A.8.2 <i>Does Bank BPD Bali have a policy requiring board members (directors/commissioners) to abstain from participating in the board discussion on a particular agenda when they are conflicted?</i>	Aspek transparansi dari Dewan Komisaris dan Direksi (bab GCG, hal. 382-383) <i>Transparency aspects of the Board of Commissioners and the Board of Directors (GCG chapter, pp. 382-383)</i>
	A.8.3 Apakah Bank BPD Bali memiliki kebijakan tentang pinjaman kepada direktur dan komisaris yang melarang praktik ini atau memastikan bahwa pinjaman tersebut dilakukan atas dasar kewajaran dan dengan harga pasar?	A.8.3 <i>Does Bank BPD Bali have policies on loans to directors and commissioners either forbidding this practice or ensuring that they are being conducted at arm's length basis and at market rates?</i>	<i>Board Manual</i> /Dewan Komisaris (bab GCG, hal. 338) dan Direksi (hal. 358). <i>Board Manual for the Board of Commissioners (GCG chapter, p. 338) and the Board of Directors (p. 358).</i>
A.9 Melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan-tindakan yang tidak semestinya <i>Protecting minority shareholders from abusive actions</i>	A.9.1 Apakah Bank BPD Bali mengungkapkan bahwa RPT dilakukan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa mereka adil dan terbuka?	A.9.1 <i>Does Bank BPD Bali disclose that RPTs are conducted in such a way to ensure that they are fair and at arms' length?</i>	Transaksi dengan pihak afiliasi dan kewajiban transaksi dengan afiliasi (Bab MDNA, hal. 257-259) <i>Related Party Transactions and Fairness of transactions with affiliates (MDNA chapter, p. 257-259)</i>
	A.9.2 Dalam hal transaksi pihak terkait yang memerlukan persetujuan pemegang saham, apakah keputusan diambil oleh pemegang saham yang tidak berkepentingan?	A.9.2 <i>In case of related party transactions requiring shareholders' approval, is the decision made by disinterested shareholders?</i>	
C: Sustainability and Resilience			
C.1 Pengungkapan terkait keberlanjutan harus konsisten, dapat dibandingkan, dan dapat diandalkan, serta mencakup informasi material retrospektif dan berwawasan ke depan yang dianggap penting oleh investor yang masuk akal dalam membuat keputusan investasi atau pengambilan suara. <i>Sustainability-related disclosure should be consistent, comparable, and reliable, and include retrospective and forward-looking material information that a reasonable investor would consider important in making an investment or voting decision.</i>	C.1.1 Informasi material terkait Keberlanjutan harus disebutkan secara spesifik Apakah Bank BPD Bali mengidentifikasi/melaporkan topik-topik ESG yang penting bagi strategi organisasi?	C.1.1 <i>Material Sustainability-related information should be specified Does Bank BPD Bali identify/report ESG topics that are material to the organization's strategy?</i>	Laporan Keberlanjutan Hal. 22-23 <i>Sustainability Report p. 22-23</i>
	C.1.1 Informasi material terkait Keberlanjutan harus disebutkan secara spesifik Apakah Bank BPD Bali mengidentifikasi/melaporkan topik-topik ESG yang penting bagi strategi organisasi?	C.1.1 <i>Material Sustainability-related information should be specified Does Bank BPD Bali identify/report ESG topics that are material to the organization's strategy?</i>	Laporan Keberlanjutan Hal. 22-23 <i>Sustainability Report p. 22-23</i>
	C.1.2 Apakah Bank BPD Bali mengidentifikasi perubahan iklim sebagai sebuah isu?	C.1.2 <i>Does Bank BPD Bali identify climate change as an issue?</i>	Laporan Keberlanjutan Hal. 24 dan 50 <i>Sustainability Report p. 24 and 50</i>
	C.1.3 Apakah Bank BPD Bali mengadopsi kerangka kerja atau standar pelaporan yang diakui secara internasional untuk keberlanjutan (misalnya, GRI, Pelaporan Terpadu, SASB, Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS)?	C.1.3 <i>Does Bank BPD Bali adopt an internationally recognized reporting framework or standard for sustainability (i.e., GRI, Integrated Reporting, SASB, IFRS Sustainability Disclosure Standards)?</i>	Tidak mengadopsi kerangka kerja atau standar pelaporan yang dimaksud pada 2024. Laporan Keberlanjutan Hal. 8 <i>Not adopt the intended reporting frameworks or standards in 2024. Sustainability Report p. 8</i>



Prinsip Principle	Kriteria	Criteria	Halaman Page
	C.1.4 Apakah Bank BPD Bali mengungkapkan target keberlanjutan kuantitatif?	C.1.4 Does Bank BPD Bali disclose quantitative sustainability target?	Laporan Keberlanjutan Hal. 30 Sustainability Report p. 30
	C.1.5 Apakah Bank BPD Bali mengungkapkan kemajuan kinerja terkait keberlanjutan sehubungan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya?	C.1.5 Does Bank BPD Bali disclose sustainability-related performance progress in relation to its previously set targets?	Laporan Keberlanjutan Hal. 13 Sustainability Report p. 13
	C.1.6 Apakah Bank BPD Bali mengkonfirmasi bahwa Laporan Keberlanjutan/ Pelaporannya ditinjau dan/atau disetujui oleh Dewan atau Komite Dewan?	C.1.6 Does Bank BPD Bali confirm that its Sustainability Report / Reporting is reviewed and /or approved by the Board or Board Committee?	Laporan Keberlanjutan Hal. 52 Sustainability Report p. 52
C.2 Kerangka kerja tata kelola Bank BPD Bali harus memungkinkan dialog antara Bank BPD Bali, pemegang saham, dan pemangku kepentingan untuk bertukar pandangan mengenai masalah-masalah keberlanjutan <i>Corporate governance frameworks should allow for dialogue between a company, its shareholders, and stakeholders to exchange views on sustainability matters</i>	C.2.1 Apakah Bank BPD Bali melibatkan pemangku kepentingan internal untuk bertukar pandangan dan mengumpulkan umpan balik mengenai hal-hal keberlanjutan yang penting bagi bisnis Bank BPD Bali?	C.2.1 Does Bank BPD Bali engage internal stakeholders to exchange views and gather feedback on sustainability matters that are material to the business of Bank BPD Bali?	Laporan Keberlanjutan Hal. 92-93 Sustainability Report p. 92-93
	C.2.2 Apakah Bank BPD Bali melibatkan pemangku kepentingan eksternal untuk bertukar pandangan dan mengumpulkan umpan balik mengenai hal-hal keberlanjutan yang penting bagi bisnis Bank BPD Bali?	C.2.2 Does Bank BPD Bali engage external stakeholders to exchange views and gather feedback on sustainability matters that are material to the business of Bank BPD Bali?	Laporan Keberlanjutan Hal. 92-93 Sustainability Report p. 92-93
C.3 Kerangka kerja tata kelola Bank BPD Bali harus memastikan bahwa dewan direksi secara memadai mempertimbangkan risiko dan peluang keberlanjutan yang material ketika memenuhi fungsi utama mereka dalam meninjau, memantau, dan memandu praktik tata kelola, pengungkapan informasi, strategi, manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal, termasuk sehubungan dengan risiko fisik dan transisi yang berkaitan dengan iklim. <i>The corporate governance framework should ensure that boards adequately consider material sustainability risks and opportunities when fulfilling their key functions in reviewing, monitoring and guiding governance practices, disclosure, strategy, risk management and internal control systems, including with respect to climate-related physical and transition risks.</i>	C.3.1 Apakah Bank BPD Bali mengungkapkan bahwa dewan komisaris dan direksi meninjau setiap tahun apakah struktur modal dan utang Bank BPD Bali sudah sesuai dengan tujuan strategis Bank BPD Bali dan <i>risk appetite</i> yang terkait?	C.3.1 Does Bank BPD Bali disclose that the board reviews on an annual basis that Bank BPD Bali's capital and debt structure is compatible with its strategic goals and its associated risk appetite?	Laporan Keberlanjutan Hal. 25 dan 44 Sustainability Report p. 25 and 44

Prinsip Principle	Kriteria	Criteria	Halaman Page
C.4 Kerangka kerja tata kelola Bank BPD Bali harus mengakui hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh hukum atau melalui kesepakatan bersama dan mendorong kerja sama aktif antara Bank BPD Bali dan pemangku kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan keberlanjutan Bank BPD Bali yang sehat secara finansial. <i>The corporate governance framework should recognise the rights of stakeholders established by law or through mutual agreements and encourage active cooperation between corporations and stakeholders in creating wealth, jobs, and the sustainability of financially sound enterprises.</i>	Apakah Bank BPD Bali mengungkapkan kebijakan dan praktik yang membahas:	<i>Does Bank BPD Bali disclose a policy and practices that address:</i>	
	C.4.1 Keberadaan dan cakupan upaya Bank BPD Bali untuk menangani kesejahteraan pelanggan?	C.4.1 <i>The existence and scope of Bank BPD Bali's efforts to address customers' welfare?</i>	Laporan Keberlanjutan Hal. 107-108 <i>Sustainability Report p. 107-108</i>
	C.4.2 Prosedur pemilihan pemasok/kontraktor?	C.4.2 <i>Supplier/contractor selection procedures?</i>	Laporan Keberlanjutan Hal. 106-107 <i>Sustainability Report p. 106-107</i>
	C.4.3 Upaya Bank BPD Bali untuk memastikan bahwa rantai nilainya ramah lingkungan atau konsisten dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan?	C.4.3 <i>Bank BPD Bali's efforts to ensure that its value chain is environmentally friendly or is consistent with promoting sustainable development?</i>	Laporan Keberlanjutan Hal. 25-29 <i>Sustainability Report p. 25-29</i>
	C.4.4 Upaya Bank BPD Bali untuk berinteraksi dengan masyarakat di mana mereka beroperasi?	C.4.4 <i>Bank BPD Bali's efforts to interact with the communities in which they operate?</i>	Laporan Keberlanjutan Hal. 88 <i>Sustainability Report p. 88</i>
	C.4.5 Program dan prosedur anti-korupsi Bank BPD Bali?	C.4.5 <i>Bank BPD Bali's anti-corruption programmes and procedures?</i>	Laporan Keberlanjutan Hal. 94 dan 96 <i>Sustainability Report p. 94 and 96</i>
	C.4.6 Bagaimana hak-hak kreditur dilindungi?	C.4.6 <i>How are creditors' rights safeguarded?</i>	
C.5 Ketika kepentingan pemangku kepentingan dilindungi oleh hukum, pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka <i>Where stakeholder interests are protected by law, stakeholders should have the opportunity to obtain effective redress for violation of their rights</i>	C.4.7 Apakah Bank BPD Bali memiliki laporan/bagian terpisah yang membahas upaya-upaya Bank BPD Bali dalam isu-isu lingkungan/ekonomi dan sosial	C.4.7 <i>Does Bank BPD Bali have a separate report/section that discusses its efforts on environment/economy and social issues?</i>	Laporan Keberlanjutan Hal. 30-40 <i>Sustainability Report p. 30-40</i>
	C.5.1 Apakah Bank BPD Bali menyediakan rincian kontak melalui situs web Bank BPD Bali atau Laporan Tahunan yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan (misalnya, pelanggan, pemasok, masyarakat umum, dll.) untuk menyuarakan keprihatinan dan/atau pengaduan atas kemungkinan pelanggaran hak-hak mereka?	C.5.1 <i>Does Bank BPD Bali provide contact details via Bank BPD Bali's website or Annual Report which stakeholders (e.g., customers, suppliers, general public etc.) can use to voice their concerns and/or complaints for possible violation of their rights?</i>	Laporan Keberlanjutan Hal. 9 dan 56 <i>Sustainability Report p. 9 and 56</i>
C.6 Mekanisme untuk partisipasi karyawan harus diizinkan untuk berkembang <i>Mechanisms for employee participation should be permitted to develop</i>	C.6.1 Apakah Bank BPD Bali secara eksplisit mengungkapkan kebijakan dan praktik kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan karyawannya?	C.6.1 <i>Does Bank BPD Bali explicitly disclose the policies and practices on health, safety, and welfare for its employees?</i>	Laporan Keberlanjutan Hal. 134-135 <i>Sustainability Report p. 134-135</i>
	C.6.2 Apakah Bank BPD Bali secara eksplisit mengungkapkan kebijakan dan praktik-praktik program pelatihan dan pengembangan bagi karyawannya?	C.6.2 <i>Does Bank BPD Bali explicitly disclose the policies and practices on training and development programmes for its employees?</i>	Laporan Keberlanjutan Hal. 132-133 <i>Sustainability Report p. 132-133</i>
	C.6.3 Apakah Bank BPD Bali memiliki kebijakan penghargaan/kompensasi yang memperhitungkan kinerja Bank BPD Bali di luar ukuran keuangan jangka pendek?	C.6.3 <i>Does Bank BPD Bali have a reward/compensation policy that accounts for the performance of Bank BPD Bali beyond short-term financial measures?</i>	Laporan Keberlanjutan Hal. 129-130 <i>Sustainability Report p. 129-130</i>

Prinsip Principle	Kriteria	Criteria	Halaman Page
C.7 Pemangku kepentingan termasuk karyawan perorangan dan badan perwakilan mereka, harus dapat secara bebas mengkomunikasikan keprihatinan mereka tentang praktik ilegal atau tidak etis kepada dewan dan hak-hak mereka tidak boleh dikompromikan untuk melakukan hal ini <i>Stakeholders including individual employee and their representative bodies, should be able to freely communicate their concerns about illegal or unethical practices to the board and their rights should not be compromised for doing this</i>	C.7.1 Apakah Bank BPD Bali memiliki kebijakan <i>whistleblowing</i> yang mencakup prosedur pengaduan oleh karyawan dan pemangku kepentingan lainnya mengenai dugaan perilaku ilegal dan tidak etis dan memberikan rincian kontak melalui situs web Bank BPD Bali atau laporan tahunan?	C.7.1 Does Bank BPD Bali have a <i>whistle blowing policy</i> which includes <i>procedures for complaints</i> by <i>employees and other stakeholders concerning alleged illegal and unethical behaviour</i> and provide <i>contact details</i> via Bank BPD Bali's <i>website or annual report</i>	Laporan Keberlanjutan Hal. 96-97 <i>Sustainability Report p. 96-97</i>
	C.7.2 Apakah Bank BPD Bali memiliki kebijakan atau prosedur untuk melindungi karyawan/orang yang mengungkapkan dugaan perilaku ilegal/tidak etis dari tindakan pembalasan?	C.7.2 Does Bank BPD Bali have a <i>policy or procedures to protect an employee/ person who reveals alleged illegal/ unethical behaviour from retaliation?</i>	Tidak memiliki kebijakan atau prosedur yang dimaksud. <i>No established policies or procedures as referenced.</i>
D: Pengungkapan dan Transparansi <i>Disclosure and Transparency</i>			
D.1 Struktur kepemilikan yang transparan <i>Transparent ownership structure</i>	D.1.1 Apakah informasi mengenai kepemilikan saham mengungkapkan identitas pemilik manfaat, yang memiliki kepemilikan saham 5% atau lebih?	D.1.1 Does the information on <i>shareholdings</i> reveal the <i>identity of beneficial owners, holding 5% shareholding or more?</i>	Penjelasan lengkap terkait kepemilikan saham (Bab Profil Perusahaan, hal. 128-130) <i>A comprehensive overview of share ownership (Company Profile chapter, pp. 128-130)</i>
	D.1.2 Apakah Bank BPD Bali mengungkapkan kepemilikan saham langsung dan tidak langsung (dianggap) dari pemegang saham utama dan/atau substansial?	D.1.2 Does Bank BPD Bali disclose the <i>direct and indirect (deemed) shareholdings of major and/or substantial shareholders?</i>	
	D.1.3 Apakah Bank BPD Bali mengungkapkan kepemilikan saham langsung dan tidak langsung (dianggap) dari para direktur (komisaris)?	D.1.3 Does Bank BPD Bali disclose the <i>direct and indirect (deemed) shareholdings of directors (commissioners)?</i>	
	D.1.4 Apakah Bank BPD Bali mengungkapkan kepemilikan saham langsung dan tidak langsung (dianggap) dari manajemen senior?	D.1.4 Does Bank BPD Bali disclose the <i>direct and indirect (deemed) shareholdings of senior management?</i>	
	D.1.5 Apakah Bank BPD Bali mengungkapkan rincian Bank BPD Bali induk/induk, anak Bank BPD Bali, Bank BPD Bali asosiasi, Bank BPD Bali patungan, dan Bank BPD Bali/Bank BPD Bali dengan tujuan khusus (SPE) atau <i>special purpose vehicle</i> (SPV)?	D.1.5 Does Bank BPD Bali disclose details of the <i>parent/holding company, subsidiaries, associates, joint ventures and special purpose enterprises/ vehicles (SPEs)/ (SPVs)?</i>	Bab Profil Perusahaan (hal. 130) <i>Company profile chapter (p. 130)</i>
D.2 Kualitas Laporan Tahunan <i>Quality of Annual Report</i>	Apakah laporan tahunan Bank BPD Bali mengungkapkan hal-hal berikut:		Does Bank BPD Bali's annual report disclose the following items:
	D.2.1 Tujuan Bank BPD Bali	D.2.1 Corporate objectives	Visi dan Misi Bank BPD Bali (Bab Profil Perusahaan, hal. 55) <i>Bank BPD Bali's Vision and Mission (Company Profile chapter, page 55)</i>
	D.2.2 Indikator kinerja keuangan	D.2.2 Financial performance indicators	

Prinsip Principle		Kriteria		Criteria		Halaman Page
		D.2.3	Indikator kinerja non-keuangan	D.2.3	Non-financial performance indicators	Bab Ikhtisar Utama (Hal. 37) Performance Highlights Chapter (pp. 37)
		D.2.4	Kebijakan dividen	D.2.4	Dividend policy	Bab MDNA (Hal. 253-254) MDNA Chapter (pp. 253-254)
		D.2.5	Rincian biografi (setidaknya usia, kualifikasi akademis, tanggal pengangkatan pertama, pengalaman yang relevan, dan jabatan direktur lainnya di Bank BPD Bali terbuka) dari semua direktur/komisaris	D.2.5	Biographical details (at least age, academic qualifications, date of first appointment, relevant experience, and any other directorships of listed companies) of all directors/commissioners	Bab Profi Perusahaan (hal. 78-83 dan 84-91) Company Profile chapter (pp. 78-83 and 84-91)
		D.2.6	Pernyataan Konfirmasi Tata Kelola Bank BPD Bali Apakah Laporan Tahunan memuat pernyataan yang mengkonfirmasi kepatuhan penuh Bank BPD Bali terhadap kode tata kelola Bank BPD Bali dan jika terdapat ketidakpatuhan, identifikasi dan jelaskan alasan untuk setiap masalah tersebut?	D.2.6	Corporate Governance Confirmation Statement Does the Annual Report contain a statement confirming Bank BPD Bali's full compliance with the code of corporate governance and where there is non-compliance, identify and explain reasons for each such issue?	Penyajian Laporan Tahunan berpedoman pada ketentuan yang berlaku (hal. 3); dan Komitmen GCG (Bab GCG, hal. 310) Presentation of the annual report in accordance with applicable regulations (p. 3); and GCG Commitment (GCG chapter, p.310)
D.3	Remunerasi Anggota Dewan dan Eksekutif Kunci Remuneration of Members of the Board and Key Executives	D.3.1	Apakah ada pengungkapan struktur biaya untuk direktur/komisaris non-eksekutif?	D.3.1	Is there disclosure of the fee structure for non-executive directors/commissioners?	Penyajian remunerasi secara lengkap di bagian Transparansi Informasi Terkait Dewan Komisaris dan Direksi (Bab GCG, hal. 401-402) Complete disclosure of compensation is provided in the section titled "Transparency of Information Concerning the Board of Commissioners and Directors," (GCG chapter, pp. 401-402).
		D.3.2	Apakah Bank BPD Bali mengungkapkan secara terbuka [yaitu, laporan tahunan atau dokumen lain yang diungkapkan kepada publik] rincian remunerasi setiap direktur/komisaris non-eksekutif?	D.3.2	Does Bank BPD Bali publicly disclose [i.e., annual report or other publicly disclosed documents] details of remuneration of each non-executive director/commissioner?	
		D.3.3	Apakah Bank BPD Bali mengungkapkan kebijakan/praktik remunerasi (biaya, tunjangan, tunjangan natura dan emolumen lainnya) untuk direktur eksekutif dan CEO (misalnya penggunaan insentif jangka pendek dan jangka panjang serta ukuran kinerja)?	D.3.3	Does Bank BPD Bali disclose its remuneration (fees, allowances, benefit-in-kind and other emoluments) policy/practices (i.e., the use of short term and long term incentives and performance measures) for its executive directors and CEO?	
		D.3.4	Apakah Bank BPD Bali mengungkapkan kepada publik [yaitu, laporan tahunan atau dokumen lain yang diungkapkan kepada publik] rincian remunerasi masing-masing direktur eksekutif dan CEO [jika dia bukan anggota Dewan]?	D.3.4	Does Bank BPD Bali publicly disclose [i.e., annual report or other publicly disclosed documents] the details of remuneration of each of the executive directors and CEO [if he/she is not a member of the Board]?	
D.4	Pengungkapan transaksi pihak-pihak berelasi (RPT) Disclosure of related party transactions (RPT)	D.4.1	Apakah Bank BPD Bali mengungkapkan kebijakannya yang mencakup tinjauan dan persetujuan atas RPT yang material?	D.4.1	Does Bank BPD Bali disclose its policy covering the review and approval of material RPTs?	Transaksi berelasi dan kewajiban atas transaksi tersebut (Bab MDNA, hal. 257-259) dan catatan laporan keuangan auditan No. 35. Related Transactions and Their Fairness (MDNA Chapter, pages 257-259) as well as Audited Financial Statement Note No. 35.
		D.4.2	Apakah Bank BPD Bali mengungkapkan nama, hubungan, sifat, dan nilai untuk setiap RPT yang material?	D.4.2	Does Bank BPD Bali disclose the name, relationship, nature and value for each material RPTs?	



Prinsip Principle	Kriteria	Criteria	Halaman Page
D.5 Transaksi direktur dan komisaris dalam saham Bank BPD Bali <i>Directors and commissioners dealings in shares of Bank BPD Bali</i>	D.5.1 Apakah Bank BPD Bali mengungkapkan perdagangan saham Bank BPD Bali oleh orang dalam?	D.5.1 Does Bank BPD Bali disclose trading in Bank BPD Bali's shares by insiders?	Pengungkapan kepemilikan saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi (Bab Profil Perusahaan, hal. 130). <i>Disclosure of share ownership by the Board of Commissioners and Directors (Company Profile Chapter, p. 130).</i>
D.6 Auditor Eksternal dan Laporan Auditor <i>External auditor and Auditor Report</i>	D.6.1 Apabila Bank BPD Bali audit yang sama digunakan untuk layanan audit dan non-audit	D.6.1 Where the same audit firm is engaged for both audit and non-audit services	Penyajian informasi tentang Kantor Akuntan Publik dan Auditor (Bab GCG, hal. 495-497)
	D.6.2 Apakah biaya audit dan non-audit diungkapkan?	D.6.2 Are the audit and non-audit fees disclosed?	Presentation of information on public accounting firms and auditors (GCG chapter, pp. 495-497)
	D.6.3 Apakah biaya non-audit melebihi biaya audit?	D.6.3 Does the non-audit fee exceed the audit fees?	
D.7 Media Komunikasi <i>Medium of communications</i>	Apakah Bank BPD Bali menggunakan mode komunikasi berikut ini?	Does Bank BPD Bali use the following modes of communication?	
	D.7.1 Pelaporan triwulanan	D.7.1 Quarterly reporting	Pelaporan laporan keuangan publikasi bulanan dan kuartalan dapat diakses di website Bank BPD Bali. <i>Monthly and quarterly financial reports are available on the Bank BPD Bali website.</i>
	D.7.2 Situs web Bank BPD Bali	D.7.2 Company website	Website Bank BPD Bali (Bab Profil Perusahaan, hal. 47 dan Bab GCG, hal. 504) <i>Bank BPD Bali website (Company profile chapter, page 47 and GCG chapter, page 504)</i>
	D.7.3 Pengarahan analis	D.7.3 Analyst's briefing	Pelaksanaan tugas Investor Relation (Bab GCG, hal. 459) dan Siaran Pers & transparansi informasi Bank BPD Bali (Bab GCG. 504-505)
	D.7.4 Pengarahan media/konferensi pers	D.7.4 Media briefings /press conferences	Implementation of the duties of the Corporate Secretary, who also oversees investor relations and press releases & transparency of Bank BPD Bali information (GCG chapter, pp. 459, 504-505)
D.8 Pengajuan/penerbitan laporan tahunan/keuangan yang tepat waktu <i>Timely filing/release of annual/financial reports</i>	D.8.1 Apakah laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dirilis dalam waktu 120 hari sejak akhir tahun keuangan?	D.8.1 Are the audited annual financial report/statement released within 120 days from the financial year end?	LK auditan tahun 2024 diterbitkan tanggal 10 Januari 2025. <i>The Audited Financial Statements for 2024 were released on January 10, 2025.</i>
	D.8.2 Apakah laporan tahunan diterbitkan dalam waktu 120 hari sejak akhir tahun keuangan?	D.8.2 Is the annual report released within 120 days from the financial year end?	Diterbitkan kurang dari 1 bulan setelah akhir tahun buku 2024 atau memenuhi ketentuan regulator. <i>Published less than one months after the conclusion of the 2024 financial year and in compliance with regulatory requirements.</i>

Prinsip Principle	Kriteria	Criteria	Halaman Page
	D.8.3 Apakah kebenaran dan kewajaran/keadilan dari laporan keuangan tahunan ditegaskan oleh dewan direksi/komisaris dan/atau pejabat Bank BPD Bali yang relevan?	D.8.3 <i>Is the true and fairness/fair representation of the annual financial statement/reports affirmed by the board of directors/commissioners and/or the relevant officers of Bank BPD Bali?</i>	Disajikan di halaman awal dari Laporan Keuangan Auditan 2024 yang dilampirkan di laporan tahunan ini. <i>These statements are featured on the first page of the 2024 Audited Financial Statements included in this annual report.</i>
D.9 Situs web Bank BPD Bali <i>Company website</i>	Apakah Bank BPD Bali memiliki situs web yang mengungkapkan informasi terkini mengenai hal-hal berikut ini:	<i>Does Bank BPD Bali have a website disclosing up-to-date information on the following:</i>	Informasi untuk pemegang saham dan stakeholders yang memuat beragam informasi penting tersebut dapat diakses melalui https://www.bpd Bali.co.id/page/read/33
	D.9.1 Laporan keuangan/laporan (triwulanan terbaru)	D.9.1 <i>Financial statements/reports (latest quarterly)</i>	
	D.9.2 Materi yang diberikan dalam pengarahannya kepada analis dan media	D.9.2 <i>Materials provided in briefings to analysts and media</i>	Information for Shareholders and Stakeholders, which contains a variety of important information, is available at https://www.bpd Bali.co.id/page/read/33
	D.9.3 Laporan tahunan yang dapat diunduh	D.9.3 <i>Downloadable annual report</i>	
	D.9.4 Pemberitahuan RUPST dan/atau RUPSLB	D.9.4 <i>Notice of AGM and/or EGM</i>	
	D.9.5 Risalah RUPST dan/atau RUPSLB	D.9.5 <i>Minutes of AGM and/or EGM</i>	
	D.9.6 Konstitusi Bank BPD Bali (anggaran dasar, memorandum, dan anggaran rumah tangga Bank BPD Bali)	D.9.6 <i>Company's constitution (company's by-laws, memorandum, and articles of association)</i>	
D.10 Hubungan investor <i>Investor relations</i>	D.10.1 Apakah Bank BPD Bali mengungkapkan rincian kontak (mis. telepon, faks, dan email) dari petugas/kantor yang bertanggung jawab atas hubungan investor?	D.10.1 <i>Does Bank BPD Bali disclose the contact details (e.g., telephone, fax, and email) of the officer / office responsible for investor relations?</i>	Sekretaris Perusahaan & Investor Relation (Bab Profil Perusahaan, hal. 47) <i>Corporate Secretary & Investor Relations (Corporate Profile section, p. 47)</i>
E: Tugas dan Tanggung Jawab Dewan <i>Board Duties and Responsibilities</i>			
E.1 Tanggung jawab dewan direksi dan kebijakan tata kelola Bank BPD Bali yang jelas <i>Clearly defined board responsibilities and corporate governance policy</i>	E.1.1 Apakah Bank BPD Bali mengungkapkan kebijakan tata kelola Bank BPD Bali/piagam dewan?	E.1.1 <i>Does Bank BPD Bali disclose its corporate governance policy/board charter?</i>	Board Manual/Dewan Komisaris (Bab GCG, hal. 338), Board Manual/Direksi (hal. 358) <i>Board Manual for the Board of Commissioners (GCG Chapter, p. 338) and Board Manual for the Board of Directors (p. 358).</i>
	E.1.2 Apakah jenis-jenis keputusan yang memerlukan persetujuan dewan direksi/komisaris diungkapkan?	E.1.2 <i>Are the types of decisions requiring board of directors/commissioners' approval disclosed?</i>	Keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan Direksi (Bab GCG, hal. 358 dan 365). <i>Decisions that require the approval of the Board of Commissioners and the Board of Directors (Chapter of the GCG, pp. 358 and 365).</i>
	E.1.3 Apakah peran dan tanggung jawab dewan direksi/dewan komisaris dinyatakan dengan jelas?	E.1.3 <i>Are the roles and responsibilities of the board of directors/commissioners clearly stated?</i>	Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi (Bab GCG, hal. 339-340; dan 358-359). <i>Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners and Directors (GCG chapter, pp. 339-340; and 358-359).</i>



Prinsip Principle		Kriteria		Criteria	Halaman Page
		Visi/Misi Bank BPD Bali		Corporate Vision/Mission	
	E.1.4	Apakah Bank BPD Bali memiliki pernyataan visi dan misi yang diperbarui?	E.1.4	Does Bank BPD Bali have an updated vision and mission statement?	Visi dan Misi yang telah diperbarui (Bab Profil, hal. 55) <i>Updated vision and mission (Profile chapter, p. 55)</i>
	E.1.5	Apakah dewan direksi memainkan peran utama dalam proses pengembangan dan peninjauan strategi Bank BPD Bali setidaknya setiap tahun?	E.1.5	Does the board of directors play a leading role in the process of developing and reviewing Bank BPD Bali's strategy at least annually?	Peran Dewan Komisaris dalam pengawasan implementasi startegi (Bab Laporan Manajemen, hal. 148-149); Peran Direksi dalam perumusan strategi (hal. 162) <i>The role of the Board of Directors in overseeing the implementation of the strategy (Management Report chapter, pages 148-149); The role of the Board of Directors in formulating the strategy (pages 162)</i>
	E.1.6	Apakah dewan direksi memiliki proses untuk meninjau, memantau, dan mengawasi pelaksanaan strategi Bank BPD Bali?	E.1.6	Does the board of directors have a process to review, monitor and oversee the implementation of the corporate strategy?	Peran Dewan Komisaris dalam pengawasan implementasi startegi (Bab Laporan Manajemen, hal. 148-149); Peran Direksi dalam perumusan strategi (hal. 162) <i>The role of the Board of Directors in overseeing the implementation of the strategy (Management Report chapter, pages 148-149); The role of the Board of Directors in formulating the strategy (pages 162)</i>
E.2	Struktur Dewan Board structure	Kode Etik atau Perilaku		Code of Ethics or Conduct	
	E.2.1	Apakah rincian kode etik atau perilaku diungkapkan?	E.2.1	Are the details of the code of ethics or conduct disclosed?	Pengungkapan kode etik secara lengkap dari kebijakan kode etik, sosialisasi, pernyataan kode etik, upaya kepatuhan kode etik (Bab GCG, hal. 498-500) <i>Full disclosure of the Code of Ethics from the Code of Ethics Policy, Socialization, Code of Ethics Statement, Code of Ethics Compliance Efforts (GCG Chapter, pp. 498-500)</i>
	E.2.2	Apakah semua direktur/komisaris, manajemen senior dan karyawan diwajibkan untuk mematuhi kode etik tersebut?	E.2.2	Are all directors/commissioners, senior management and employees required to comply with the code/s?	
	E.2.3	Apakah Bank BPD Bali memiliki proses untuk menerapkan dan memantau kepatuhan terhadap kode etik atau perilaku?	E.2.3	Does Bank BPD Bali have a process to implement and monitor compliance with the code/s of ethics or conduct?	
		Struktur & Komposisi Dewan		Board Structure & Composition	
	E.2.4	Apakah direktur/komisaris independen terdiri dari setidaknya 50% dari dewan direksi/komisaris?	E.2.4	Do independent directors/ commissioners make up at least 50% of the board of directors/ commissioners?	- Komposisi Dewan Komisaris yang terdiri dari Non-Independen dan Independen (Bab GCG, hal. 340-341) - Komposisi Direksi (Bab GCG, hal. 359-360) - Penjelasan masa jabatan (Bab GCG, hal. 378) <i>Composition of the Board of Commissioners Consisting of Non-Independent and Independent (GCG Chapter, pp. 340-341)</i> <i>Composition of the Board of Directors (GCG Chapter, pp. 359-360)</i> <i>Explanation of the term of office (GCG Chapter, p. 378)</i>
	E.2.5	Apakah Bank BPD Bali memiliki batas masa jabatan sembilan tahun atau kurang atau 2 kali masa jabatan masing-masing lima tahun untuk direktur/komisaris independen?	E.2.5	Does Bank BPD Bali have a term limit of nine years or less or 2 terms of five years ¹ each for its independent directors/ commissioners?	
	E.2.6	Apakah Bank BPD Bali telah menetapkan batas lima kursi dewan yang dapat dijabat oleh seorang direktur/komisaris independen/non-eksekutif secara bersamaan?	E.2.6	Has Bank BPD Bali set a limit of five board seats that an individual independent/non-executive director/ commissioner may hold simultaneously?	
	E.2.7	Apakah Bank BPD Bali memiliki direktur eksekutif yang menjabat di lebih dari dua dewan direksi di Bank BPD Bali terbuka di luar grup?	E.2.7	Does Bank BPD Bali have any executive directors who serve on more than two boards of listed companies outside of the group?	

Prinsip Principle	Kriteria	Criteria	Halaman Page
Komite Nominasi		Nominating Committee	
E.2.8	Apakah Bank BPD Bali memiliki Komite Nominasi?	E.2.8 Does Bank BPD Bali have a Nominating Committee?	Penjelasan lengkap terkait Komite Remunerasi dan Nominasi dari aspek Pedoman Kerja Komite, tugas & tanggung jawab, pembagian tugas, masa jabatan, komposisi & profil, independensi, rapat dan kehadiran beserta risalah rapat, pengembangan kompetensi, dan pelaksanaan tugas serta penilaian kinerja Komite (Bab GCG, hal. 425-437) Complete explanation regarding the Remuneration and Nomination Committee from the aspects of the Committee's Work Guidelines, duties & responsibilities, division of duties, term of office, composition & profile, independence, meetings and attendance along with meeting minutes, competency development, and implementation of duties and assessment of the Committee's performance (GCG Chapter, pp. 425-437)
E.2.9	Apakah Komite Nominasi terdiri dari mayoritas direktur/komisaris independen?	E.2.9 Is the Nominating Committee comprised of a majority of independent directors/commissioners?	
E.2.10	Apakah ketua Komite Nominasi adalah direktur/komisaris independen?	E.2.10 Is the chairman of the Nominating Committee an independent director/commissioner?	
E.2.11	Apakah Bank BPD Bali mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/piagam Komite Nominasi?	E.2.11 Does Bank BPD Bali disclose the terms of reference/ governance structure/charter of the Nominating Committee?	
E.2.12	Apakah kehadiran rapat Komite Nominasi diungkapkan dan jika ya, apakah Komite Nominasi bertemu setidaknya dua kali dalam setahun?	E.2.12 Is the meeting attendance of the Nominating Committee disclosed and if so, did the Nominating Committee meet at least twice during the year?	
Komite Remunerasi		Remuneration Committee	
E.2.13	Apakah Bank BPD Bali memiliki Komite Remunerasi?	E.2.13 Does Bank BPD Bali have a Remuneration Committee?	Penjelasan lengkap terkait Komite Pemantau Risiko dari aspek Pedoman Kerja Komite, tugas & tanggung jawab, pembagian tugas, masa jabatan, komposisi & profil, independensi, rapat dan kehadiran beserta risalah rapat, pengembangan kompetensi, dan pelaksanaan tugas serta penilaian kinerja Komite (Bab GCG, hal. 415-425 dan 433-437) A comprehensive explanation of the Risk Monitoring Committee is provided, encompassing various aspects including the Committee's operational guidelines, duties and responsibilities, division of responsibilities, term of office, composition and profile, standards of independence, meeting protocols and attendance records along with meeting minutes, competency development initiatives, execution of duties, and the evaluation of the Committee's performance, as outlined in the GCG Chapter, pp. 415-425 and 433-437.
E.2.14	Apakah Komite Remunerasi seluruhnya terdiri dari direktur/komisaris non-eksekutif dengan mayoritas direktur/komisaris independen?	E.2.14 Is the Remuneration Committee comprised entirely of non-executive directors/commissioners with a majority of independent directors/commissioners?	
E.2.15	Apakah ketua Komite Remunerasi adalah direktur/komisaris independen?	E.2.15 Apakah ketua Komite Remunerasi adalah direktur/komisaris independen?	
E.2.16	Apakah Bank BPD Bali mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/piagam Komite Remunerasi?	E.2.16 Does Bank BPD Bali disclose the terms of reference/ governance structure/charter of the Remuneration Committee?	
E.2.17	Apakah kehadiran rapat Komite Remunerasi diungkapkan dan, jika ya, apakah Komite Remunerasi mengadakan rapat setidaknya dua kali dalam setahun?	E.2.17 Is the meeting attendance of the Remuneration Committee disclosed and, if so, did the Remuneration Committee meet at least twice during the year?	



Prinsip Principle	Kriteria	Criteria	Halaman Page
	Komite Audit	Audit Committee	
	E.2.18 Apakah Bank BPD Bali memiliki Komite Audit?	E.2.18 Does Bank BPD Bali have an Audit Committee?	Penjelasan lengkap terkait Komite Audit dari aspek Pedoman Kerja Komite, tugas & tanggung jawab, pembagian tugas, masa jabatan, komposisi & profil, independensi, rapat dan kehadiran beserta risalah rapat, pengembangan kompetensi, dan pelaksanaan tugas serta penilaian kinerja Komite (Bab GCG, hal. 405-415 dan 433-437)
	E.2.19 Apakah Komite Audit seluruhnya terdiri dari direktur/komisaris non-eksekutif dengan mayoritas direktur/komisaris independen?	E.2.19 Is the Audit Committee comprised entirely of non-executive directors/commissioners with a majority of independent directors/commissioners?	
	E.2.20 Apakah ketua Komite Audit adalah direktur/komisaris independen?	E.2.20 Is the chairman of the Audit Committee an independent director/commissioner?	
	E.2.21 Apakah Bank BPD Bali mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/piagam Komite Audit?	E.2.21 Does Bank BPD Bali disclose the terms of reference/governance structure/charter of the Audit Committee?	
	E.2.22 Apakah setidaknya salah satu direktur/komisaris independen komite memiliki keahlian akuntansi (kualifikasi atau pengalaman akuntansi)?	E.2.22 Does at least one of the independent directors/commissioners of the committee have accounting expertise (accounting qualification or experience)?	
	E.2.23 Apakah kehadiran rapat Komite Audit diungkapkan dan, jika ya, apakah Komite Audit mengadakan rapat setidaknya empat kali dalam setahun?	E.2.23 Is the meeting attendance of the Audit Committee disclosed and, if so, did the Audit Committee meet at least four times during the year?	
	E.2.24 Apakah Komite Audit memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan rekomendasi mengenai penunjukan dan pemberhentian auditor eksternal?	E.2.24 Does the Audit Committee have primary responsibility for recommendation on the appointment, and removal of the external auditor?	
E.3	Rapat dan Kehadiran Dewan Direksi	Board Meetings and Attendance	
	E.3.1 Apakah rapat direksi dijadwalkan sebelum dimulainya tahun keuangan?	E.3.1 Are the board of directors meeting scheduled before the start of financial year?	Ketentuan penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris (Bab GCG, hal 343-344) Penyelenggaraan rapat & kehadiran Dewan Komisaris (Bab GCG, hal 344) Guidelines for Conducting Board of Commissioners Meetings (GCG Chapter, pp. 343-344)
	E.3.2 Apakah dewan direksi/komisaris mengadakan rapat setidaknya enam kali dalam setahun?	E.3.2 Does the board of directors/commissioners meet at least six times during the year?	
	E.3.3 Apakah setiap direktur/komisaris menghadiri setidaknya 75% dari semua rapat dewan yang diadakan sepanjang tahun?	E.3.3 Has each of the directors/commissioners attended at least 75% of all the board meetings held during the year?	Organization and Attendance for Board of Commissioners Meetings (GCG Chapter, p. 344)
	E.3.4 Apakah Bank BPD Bali mensyaratkan kuorum minimal 2/3 untuk pengambilan keputusan dewan?	E.3.4 Does Bank BPD Bali require a minimum quorum of at least 2/3 for board decisions?	Ketentuan penyelenggaraan rapat Direksi (Bab GCG, hal 366) Penyelenggaraan rapat & kehadiran Direksi (Bab GCG, hal 366)
	E.3.5 Apakah direktur/komisaris non-eksekutif Bank BPD Bali mengadakan rapat secara terpisah setidaknya satu kali dalam setahun tanpa dihadiri oleh para eksekutif?	E.3.5 Did the non-executive directors/commissioners of Bank BPD Bali meet separately at least once during the year without any executives present?	Regulations for Conducting Board of Directors Meetings (GCG Chapter, p. 366) Organization and Attendance for Board Meetings (GCG Chapter, p.366)
			Ketentuan penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris dan Direksi – Rapat gabungan (Bab GCG, hal 387) Penyelenggaraan rapat & kehadiran rapat Gabungan (Bab GCG, hal 387) Regulations for Joint Meetings of Board of Directors and Commissioners (GCG Chapter, p. 387) Organization and Attendance for Joint Meetings (GCG Chapter, p. 387)

Prinsip Principle	Kriteria	Criteria	Halaman Page
Akses ke Informasi		Access to Information	
	E.3.6 Apakah risalah rapat dewan direksi/ dewan komisaris diberikan kepada dewan direksi/dewan komisaris setidaknya lima hari kerja sebelum rapat dewan direksi/dewan komisaris?	E.3.6 Are the minutes of the board of directors/committees provided to the board of directors/committees at least five business days prior to the board of directors/committee meeting?	Ketentuan & realisasi risalah rapat: Risalah rapat Dewan Komisaris (Bab GCG, hal. 345-347) Risalah rapat Direksi (Bab GCG, hal. 367-368) Risalah rapat Gabungan (Bab GCG, hal. 388) Documentation and Recording of Meeting Minutes: Minutes from the Board of Commissioners Meeting (GCG Chapter, pp345-347) Minutes from the Board Meeting (GCG Chapter, pp. 367-368) Minutes from the Joint Meeting (GCG Chapter, pp 388)
	E.3.7 Apakah sekretaris Bank BPD Bali memainkan peran penting dalam mendukung dewan dalam melaksanakan tanggung jawabnya?	E.3.7 Does Bank BPD Bali secretary play a significant role in supporting the board in discharging its responsibilities?	Penjelasan terkait tugas & tanggung jawab, struktur organisasi, profil, pengembangan kompetensi, dan pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan (Bab GCG, hal. 454-458)
	E.3.8 Apakah sekretaris Bank BPD Bali terlatih dalam bidang hukum, akuntansi, atau praktik kesekretariatan Bank BPD Bali dan selalu mengikuti perkembangan yang relevan?	E.3.8 Does Bank BPD Bali secretary play a significant role in supporting the board in discharging its responsibilities?	An overview of the roles and responsibilities, organizational structure, profile, competency development, and execution of duties for the Corporate Secretary (GCG Chapter, pp. 454-458).
Penunjukan dan Pemilihan Ulang Dewan Komisaris dan Direksi		Board Appointments and Re-Election	
	E.3.9 Apakah Bank BPD Bali mengungkapkan kriteria yang digunakan dalam memilih direktur/komisaris baru?	E.3.9 Does Bank BPD Bali disclose the criteria used in selecting new directors/commissioners?	Penjelasan komprehensif terkait kriteria, mekanisme seleksi dan nominasi, masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi (Bab GCG, hal. 378-379)
	E.3.10 Apakah Bank BPD Bali menjelaskan proses yang diikuti dalam menunjuk direktur/komisaris baru?	E.3.10 Did Bank BPD Bali describe the process followed in appointing new directors/commissioners?	A detailed overview of the criteria, selection and nomination processes, and the terms of office for the Board of Commissioners and Directors (GCG Chapter, pp. 378-379).
	E.3.11 Apakah semua direktur/komisaris dapat dipilih kembali setiap 3 tahun; atau 5 tahun untuk Bank BPD Bali yang terdaftar di negara yang undang-undangnya menetapkan masa jabatan 5 tahun?	E.3.11 Are all directors/commissioners subject to re-election every 3 years; or 5 years for listed companies in countries whose legislation prescribes a term of 5 years each?	
Masalah Remunerasi		Remuneration Matters	
	E.3.12 Apakah pemegang saham atau Dewan Direksi menyetujui remunerasi direktur eksekutif dan/atau eksekutif senior?	E.3.12 Do the shareholders or the Board of Directors approve the remuneration of the executive directors and/or the senior executives?	Keputusan RUPST tanggal 23 Februari 2024 (bab GCG, hal. 312) Resolution of the AGM dated 23 February 2024 (GCG chapter, page 312)
	E.3.13 Apakah Bank BPD Bali memiliki standar yang terukur untuk menyelaraskan remunerasi berbasis kinerja direktur eksekutif dan eksekutif senior dengan kepentingan jangka panjang Bank BPD Bali, seperti ketentuan claw back dan bonus yang ditangguhkan?	E.3.13 Does Bank BPD Bali have measurable standards to align the performance-based remuneration of the executive directors and senior executives with long-term interests of Bank BPD Bali, such as claw back provision and deferred bonuses?	Penjelasan lengkap terkait remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi (Bab GCG, hal. 401-402) Full Explanation of the Compensation of the Board of Commissioners and Directors (GCG Chapter, pp. 401-402)



Prinsip Principle	Kriteria	Criteria	Halaman Page
	Audit Internal	Internal Audit	
	E.3.14 Apakah Bank BPD Bali memiliki fungsi audit internal yang terpisah?	E.3.14 Does Bank BPD Bali have a separate internal audit function?	Penjelasan terkait Sistem Pengendalian internal (Bab GCG, 491-495).
	E.3.15 Apakah kepala audit internal diidentifikasi atau, jika dialihdayakan, apakah nama Bank BPD Bali eksternal diungkapkan?	E.3.15 Is the head of internal audit identified or, if outsourced, is the name of the external firm disclosed?	Explanation of the internal control system (GCG chapter, 491-495).
	E.3.16 Apakah penunjukan dan pemberhentian auditor internal memerlukan persetujuan Komite Audit?	E.3.16 Does the appointment and removal of the internal auditor require the approval of the Audit Committee?	
	Pengawasan Risiko	Risk Oversight	
	E.3.17 Apakah Bank BPD Bali menetapkan prosedur pengendalian internal/kerangka kerja manajemen risiko yang baik dan secara berkala meninjau efektivitas kerangka kerja tersebut?	E.3.17 Does Bank BPD Bali establish a sound internal control procedures/risk management framework and periodically review the effectiveness of that framework?	Uraian lengkap tentang manajemen risiko Bank BPD Bali yang mencakup kriteria-kriteria yang dimaksud (Bab GCG, 481-489).
	E.3.18 Apakah Laporan Tahunan/Laporan CG Tahunan mengungkapkan bahwa dewan direksi/komisaris telah melakukan tinjauan atas pengendalian material Bank BPD Bali (termasuk pengendalian operasional, keuangan, dan kepatuhan) dan sistem manajemen risiko?	E.3.18 Does the Annual Report/Annual CG Report disclose that the board of directors/commissioners has conducted a review of Bank BPD Bali's material controls (including operational, financial and compliance controls) and risk management systems?	A complete description of the risk management of Bank BPD Bali, including the criteria mentioned (GCG ch. 481-489).
	E.3.19 Apakah Bank BPD Bali mengungkapkan risiko-risiko utama yang secara material dihadapi Bank BPD Bali (misalnya risiko keuangan, operasional termasuk TI, lingkungan, sosial, ekonomi)?	E.3.19 Does Bank BPD Bali disclose the key risks to which Bank BPD Bali is materially exposed to (i.e. financial, operational including IT, environmental, social, economic)?	
	E.3.20 Apakah Laporan Tahunan/Laporan CG Tahunan memuat pernyataan dari dewan direksi/komisaris atau Komite Audit yang mengomentari kecukupan pengendalian internal/sistem manajemen risiko Bank BPD Bali?	E.3.20 Does the Annual Report/Annual CG Report contain a statement from the board of directors/commissioners or Audit Committee commenting on the adequacy of Bank BPD Bali's internal controls/risk management systems?	
	Ketua Dewan	Board Chairman	
E.4 Anggota Dewan People on the Board	E.4.1 Apakah ada orang yang berbeda yang berperan sebagai ketua dan CEO?	E.4.1 Do different persons assume the roles of chairman and CEO?	Profil Dewan Komisaris (Bab Profil Perusahaan, hal. 78-83) Komposisi Dewan Komisaris (Bab GCG, hal. 340-341)
	E.4.2 Apakah ketua merupakan direktur/komisaris independen?	E.4.2 Is the chairman an independent director/commissioner?	Board of Commissioners Profile (Company Profile Chapter, pages 78-83) Board of Commissioners Composition (GCG Chapter, pages 340-341)
	E.4.3 Apakah ada direktur yang merupakan mantan CEO Bank BPD Bali dalam 2 tahun terakhir?	E.4.3 Is any of the directors a former CEO of Bank BPD Bali in the past 2 years?	Profil Direksi (Bab Profil Perusahaan, hal. 84-91) Komposisi Direksi (Bab GCG, hal. 359-360) Board of Directors Profile (Company Profile Chapter, pages 84-91) Board of Directors Composition (GCG Chapter, page 359-360)

Prinsip Principle	Kriteria	Criteria	Halaman Page
	E.4.4 Apakah peran dan tanggung jawab ketua diungkapkan?	E.4.4 Are the roles and responsibilities of the chairman disclosed?	Tugas & tanggung jawab Komisaris Utama (Bab GCG, hal. 342) Tugas & tanggung jawab Direktur Utama (Bab GCG, hal. 362) Duties & responsibilities of the President Commissioner (GCG Chapter, p. 342) Duties & responsibilities of the President Director (GCG Chapter, p. 362)
	Direktur Independen Utama	Lead Independent Director	
	E.4.5 Jika Ketua tidak independen, apakah Dewan telah menunjuk seorang Direktur Independen Utama/Senior dan apakah perannya telah didefinisikan?	E.4.5 If the Chairman is not independent, has the Board appointed a Lead/Senior Independent Director and has his/her role been defined?	Komposisi Dewan Komisaris (Bab GCG, hal. 340-341) Board of Commissioners Composition (GCG Chapter, pages 340-341) Komposisi Direksi (Bab GCG, hal. 359-360) Board of Directors Composition (GCG Chapter, page 359-360)
	Keterampilan dan Kompetensi	Skills and Competencies	
	E.4.6 Apakah setidaknya satu direktur/komisaris non-eksekutif memiliki pengalaman kerja sebelumnya di sektor utama yang dijalankan Bank BPD Bali?	E.4.6 Does at least one non-executive director/commissioner have prior working experience in the major sector that Bank BPD Bali is operating in?	Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi termasuk didalamnya pengalaman kerja (Bab GCG, hal. 381-382) Diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors, including professional experience (GCG chapter, pp. 381-382)
E.5 Kinerja Dewan Direksi Board Performance	Pengembangan Direksi	Directors Development	
	E.5.1 Apakah Bank BPD Bali memiliki program orientasi untuk direktur/komisaris baru?	E.5.1 Does Bank BPD Bali have orientation programmes for new directors/commissioners?	Program orientasi Dewan Komisaris dan Direksi (Bab GCG, hal. 348 dan 368) Orientation Program for the Board of Commissioners and Directors (GCG Chapter, pp. 348 and 368)
	E.5.2 Apakah Bank BPD Bali memiliki kebijakan dan praktik nyata serta program yang mendorong direktur/komisaris untuk menghadiri program pendidikan profesional yang sedang berlangsung atau berkelanjutan?	E.5.2 Does Bank BPD Bali have a policy and actual practice and programs that encourages directors/commissioners to attend on-going or continuous professional education programmes?	Program pengembangan kompetensi dewan Komisaris dan Direksi (Bab GCG, hal. 348-353; dan 368-371) Competency Development Program for the Board of Commissioners and Directors (GCG Chapter, pp. 348-353; and 368-371)
	Penunjukan dan Kinerja CEO/Manajemen Eksekutif	CEO/Executive Management Appointments and Performance	
	E.5.3 Apakah Bank BPD Bali mengungkapkan proses tentang bagaimana dewan direksi/komisaris merencanakan suksesi CEO/Direktur Utama/Presiden dan manajemen kunci?	E.5.3 Does Bank BPD Bali disclose the process on how the board of directors/commissioners plans for the succession of the CEO/Managing Director/President and key management?	Mekanisme suksesi Dewan Komisaris dan Direksi (Bab GCG, hal. 378-379) Succession Mechanism of the Board of Commissioners and Directors (GCG Chapter, pp. 378-379)
	E.5.4 Apakah dewan direksi/komisaris melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap CEO/Direktur Utama/Presiden?	E.5.4 Does the board of directors/commissioners conduct an annual performance assessment of the CEO/Managing Director/President?	Penilaian kinerja Direksi Utama (Bab GCG, hal. 395-401) Performance assessment of the President Directors (GCG Chapter, pp. 395-401)



Prinsip Principle	Kriteria	Criteria	Halaman Page
	Penilaian Dewan	Board Appraisal	
	E.5.5 Apakah Bank BPD Bali melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap dewan direksi/komisaris dan mengungkapkan kriteria dan proses yang diikuti untuk penilaian tersebut?	E.5.5 Did Bank BPD Bali conduct an annual performance assessment of the board of directors/commissioners and disclose the criteria and process followed for the assessment?	Penilaian kinerja Dewan Komisaris (Bab GCG, hal. 389-394) Performance assessment of the Board of Commissioners (GCG Chapter, pp. 389-394)
	Penilaian Direktur	Board Appraisal	
	E.5.6 Apakah Bank BPD Bali melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap masing-masing direktur/komisaris dan mengungkapkan kriteria dan proses yang diikuti untuk penilaian tersebut?	E.5.6 Did Bank BPD Bali conduct an annual performance assessment of the individual directors/commissioners and disclose the criteria and process followed for the assessment?	Penilaian kinerja Direksi (Bab GCG, hal. 395-401) Performance assessment of the Board of Directors (GCG Chapter, pp. 395-401)
	Penilaian Komite	Committee Appraisal	
	E.5.7 Apakah Bank BPD Bali melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap komite-komite dewan dan mengungkapkan kriteria dan proses yang diikuti untuk penilaian tersebut?	E.5.7 Did Bank BPD Bali conduct an annual performance assessment of the board committees and disclose the criteria and process followed for the assessment?	Penilaian Komite Dewan Komisaris (Bab GCG, hal. 355) Penjelasan Komite Dewan Komisaris (Bab GCG, hal. 405-437) Assessment of the Board of Commissioners Committee (GCG Chapter, p. 355) Explanation of the Board of Commissioners Committee (GCG Chapter, p. 405-437) Penilaian Komite Direksi (Bab GCG, hal. 376-377) Penjelasan Komite Direksi (Bab GCG, hal. 438-453) Assessment of the Board of Directors Committee (GCG Chapter, pp. 376-377) Explanation of the Board of Directors Committee (GCG Chapter, p. 438-453)

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank



PERNYATAAN AKUNTABILITAS LAPORAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Statement of Accountability Over The Report of Board of Commissioners and Board of Directors

Laporan Tahunan ini berikut laporan keuangan dan informasi lain yang terkait merupakan tanggung jawab Manajemen Bank BPD Bali dan telah disetujui oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan membubuhkan tanda tangannya masing-masing di bawah ini.

This Annual report and Financial Statement as well as other related information are responsibility Bank BPD Bali and have been agreed by all member of Board Comissioners and Directors by giving their signature below.

Denpasar, 15 April 2025

Denpasar, April 15, 2025

PT Bank Pembangunan Daerah Bali

I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.

Komisaris Utama Independen

Independent President Commissioner

Insinyur Gede Arimbawa

Komisaris Independen

Independent Commissioner

I Nyoman Suparsa Widana, S.E., M.M.

Komisaris Independen

Independent Commissioner

Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.

Komisaris Non Independen

Non Independent Commissioner

I Gede Darmawa, S.E., M.Si.

Komisaris Non Independen

Non Independent Commissioner

Denpasar, 15 April 2025
Denpasar, April 15, 2025

PT Bank Pembangunan Daerah Bali



I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.

Direktur Utama
President Director



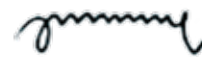
Ida Bagus Gede Setia Yasa

Direktur Operasional & TI
Director of Operational & TI



Made Lestara Widiatmika

Direktur Kredit
Director of Loan



I Nyoman Sumanaya, S.E., M.M.

Direktur Bisnis
Director of Business



Drs. I Wayan Sutela Negara

Direktur Kepatuhan
Director of Compliance



07

KEBERLANJUTAN

Sustainability





Mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, Bank BPD Bali juga menerbitkan sebuah Laporan Keberlanjutan. Laporan ini diterbitkan dalam buku yang terpisah dari Laporan Tahunan, namun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan Tahunan.

Laporan Keberlanjutan Bank BPD Bali memberikan gambaran menyeluruh mengenai upaya dan pencapaian Bank dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Selain itu, laporan keberlanjutan Bank BPD Bali juga mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek operasionalnya, serta dampak positif yang dihasilkan bagi masyarakat dan lingkungan.

With reference to the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 51/POJK.03/2017 on the implementation of sustainable finance for financial services institutions, issuers and public companies and the Financial Services Authority Circular (SEOJK) No. 16/SEOJK.04/2021 on the form and content of annual reports of issuers or public companies, Bank BPD Bali also publishes a Sustainability Report. This report is published in a separate book from the annual report, but it is an integral part of the annual report.

The Sustainability Report of Bank BPD Bali provides a comprehensive overview of the efforts and achievements of the Bank in conducting sustainable and responsible business. In addition, Bank BPD Bali's Sustainability Report also integrates the principles of sustainability in every aspect of its business operations, as well as the positive impacts that are generated for the society and the environment.

ASPEK LINGKUNGAN, SOSIAL, DAN TATA KELOLA

Environmental, Social and Governance Aspects

Bank BPD Bali berusaha untuk mengintegrasikan dan mengelola faktor Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) dalam menjalankan kegiatan usaha di industri perbankan di Indonesia dalam rangka menciptakan nilai bagi pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya. Sehubungan dengan faktor LST tersebut, Bank BPD Bali telah menerapkan sejumlah strategi yang melibatkan berbagai aspek:

1. Efisiensi Sumber Daya, Khususnya Energi

Bank BPD Bali memberikan fokus pada efisiensi penggunaan sumber daya, terutama energi, sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi dampak lingkungan.

2. Menerapkan Kriteria Beyond Compliance

Bank BPD Bali tidak hanya mematuhi peraturan yang berlaku, akan tetapi juga menerapkan kriteria di luar standar kepatuhan, mencerminkan komitmen pada praktik-praktik berkelanjutan yang melebihi kewajiban hukum.

3. Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dan Mencapai Kemandirian

Bank BPD Bali aktif dalam pemberdayaan masyarakat untuk menjaga kualitas layanan dan mencapai kemandirian, serta menciptakan nilai bersama melalui pendekatan *Creating Shared Value* (CSV).

Implementasi yang efektif dan tepat sasaran atas ketiga strategi tersebut mampu menghasilkan kinerja sebagai berikut:

Bank BPD Bali strives to integrate and manage environmental, social and governance (ESG) factors in the conduct of its business activities in the banking industry in Indonesia. The aim is to create value for shareholders and other stakeholders. Bank BPD Bali has implemented a number of strategies covering various aspects of these ESG factors:

1. Resource efficiency, especially energy

Bank BPD Bali focuses on the efficiency of resource use, especially energy, as part of its efforts to reduce its environmental impact.

2. Implementation beyond compliance criteria

Bank BPD Bali not only complies with applicable regulations, but also applies criteria beyond compliance standards. This reflects a commitment to sustainable practices that go beyond legal obligations.

3. Strengthening Community Health and Achieving Independence

Bank BPD Bali is actively engaged in empowering the communities to maintain the quality of services and to achieve independence, as well as to create shared value through the Creating Shared Value (CSV) approach.

Through the effective and focused implementation of the three strategies, the bank is able to achieve the following results:

Pembiayaan Berkelanjutan

Sustainable Financing

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)/(Expressed in millions of Rupiah)

Keterangan Description	2024	2023	2022
Mikro Micro	3.089.813	1.862.070	1.419.939
Usaha Kecil dan Menengah Small and Medium Enterprises	8.599.606	8.405.441	7.856.442
Pembiayaan Berwawasan Lingkungan Environmental Financing	864.138	512.960	178.603

Kinerja Lingkungan

Environmental Performance

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)/(Expressed in millions of Rupiah)

Keterangan Description	2024	2023	2022
Konsumsi Listrik Energy Consumption	8.334	7.394	6.974
Konsumsi Air Water Consumption	318	333	269
Biaya BBM Operasional Kantor Pusat Operational Fuel Fee in Head Office	4.626	4.365	3.678
Penggunaan kertas Kantor Pusat Paper use in Head Office	1.869	1.703	1.669
Dana lingkungan Environmental Budget	808	2.166	1.585

Kinerja Sosial

Social Performance

Keterangan Description	Satuan Unit	2024	2023	2022
Jumlah Total Pegawai Total Employees	Orang People	1.298	1.327	1.374
Jumlah Pegawai Wanita Total Female Employees	Orang People	570	578	588
Turnover Pegawai Employee Turnover	Orang People	6	6 (karyawan mengundurkan diri) (resigned employee)	10 (karyawan mengundurkan diri) (resigned employee)
Peserta pelatihan keuangan berkelanjutan Sustainable finance training participants	Orang People	44	52	75
Dana CSR/PKBL CSR/Community Development Program Budget	Rp IDR	15.227.359.885	14.727.808.442	13.624.778.139,00

Penjelasan lebih lengkap terkait Bab Keberlanjutan untuk tahun 2024 dapat dibaca pada Laporan keberlanjutan Bank BPD Bali yang dapat diakses melalui <https://www.bpd Bali.co.id/page/read/178>.

Please refer to the Bank BPD Bali Sustainability Report, available at <https://www.bpd Bali.co.id/page/read/178>, for a more detailed explanation of the sustainability chapter for 2024.



08

Laporan **KEUANGAN** *Financial Report*





BANK BPD BALI



BANK BPD BALI

LAPORAN KEUANGAN

FINANCIAL STATEMENT

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024**



	<u>Halaman/ Pages</u>	
Daftar Isi		<i>Table of Contents</i>
Surat Pernyataan Direksi		<i>Director's Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Keuangan		<i>Financial Statements</i>
Laporan Posisi Keuangan	1- 2	<i>Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3	<i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas	4 - 5	<i>Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas	6	<i>Statement of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan	7 - 97	<i>Notes to the Financial Statements</i>



SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2024
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

*DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO
THE RESPONSIBILITY ON THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2024
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI*

Yang bertanda tangan di bawah ini */We, the undersigned :*

Nama/ <i>Name</i>	: I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.
Alamat Kantor/ <i>Office address</i>	: Jl. Raya Puputan, Niti Mandala, Renon, Denpasar, Bali
Jabatan/ <i>Position</i>	: Direktur Utama/ <i>President Director</i>

Menyatakan bahwa :

State that :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Entitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024;	1. <i>We are responsible for preparation and presentation of the Entity financial statements for the year ended December 31, 2024;</i>
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;	2. <i>The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;</i>
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;	3. a. <i>All information contained in the financial statements is complete and correct;</i>
b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;	b. <i>The financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts;</i>
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Bank.	4. <i>We are responsible for the Bank's internal control system.</i>

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Denpasar, 10 Januari/January 10, 2025

Atas nama dan mewakili Direksi/*For and on behalf of the Directors*


I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.
Direktur Utama/*President Director*


Ida Bagus Gede Setia Yasa
Direktur Operasional & TI/*Director Operational & IT*



Laporan Auditor Independen
Independent Auditor's Report

No/Ref. : 00002/2.1127/AU.1/07/0060-4/1/I/2025

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan
Direksi
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI**

***To the Shareholders, Boards of Commissioners and
Directors
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI***

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Bali ("Bank"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Bank berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opinion

We have audited the financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Bali (the "Bank"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2024, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Bank as of December 31, 2024, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Bank in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan dan dalam merumuskan opini audit kami atas laporan keuangan terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini audit terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang dijelaskan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal audit utama yang dikomunikasikan di bawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang dirancang untuk merespons penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan terlampir. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespons hal audit utama di bawah ini, memberikan dasar bagi opini audit kami atas laporan keuangan terlampir.

Penjelasan atas Hal Audit Utama:

Cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan

Pada tanggal 31 Desember 2024, pinjaman yang diberikan mencerminkan 56% dari jumlah aset. Bank membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan sebesar Rp139.150.563.768 (Catatan 10) dengan akumulasi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp1.305.082.017.392 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi ditentukan oleh Bank berdasarkan Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE") berdasarkan PSAK 109, "Instrumen Keuangan" ("PSAK 109").

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our audit opinion thereon, and we do not provide a separate audit opinion on these matters. For the key audit matters below, our description of how our audit addressed such matter is provided in such context.

We have fulfilled the responsibilities described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report, including in relation to key audit matters communicated below. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the accompanying financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the key audit matters below, provide the basis for our audit opinion on the accompanying financial statements.

Description of the Key Audit Matter:

Allowance for impairment credit loss attributable to loans

As of December 31, 2024, the loans represent 56% of the total assets. The Bank provides an allowance for impairment losses on loans amounting to Rp139,150,563,768 (Note 10) with an accumulated allowance for impairment losses of Rp1,305,082,017,392 for the year ended December 31, 2024.

These allowance for impairment losses for loans measured at amortized cost are determined by the Bank based on the Expected Credit Losses ("ECL") framework under SFAS 109, "Financial Instruments" ("SFAS 109").

Halaman 3

Page 3

Sesuai yang diungkapkan pada Catatan 3 di laporan keuangan, penilaian ini melibatkan pertimbangan manajemen dan estimasi yang signifikan. Bank menghitung KKE dengan menggunakan beberapa parameter seperti *probability of default*, *loss given default*, *exposure at default* dan tingkat diskonto. Bank juga menggunakan asumsi dalam menentukan exposure seperti arus kas masa depan yang diharapkan dan faktor makro ekonomi masa akan datang, beberapa skenario probabilitas tertimbang dan penyesuaian *overlay* KKE yang dibuat, mengingat ketidakpastian ekonomi yang timbul di masa yang akan datang.

Pengungkapan Bank mengenai cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan dijelaskan pada Catatan 2d dan 10 atas laporan keuangan.

Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama

Prosedur audit kami untuk mengatasi risiko salah saji material yang berkaitan dengan Cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan, sebagai berikut:

- Kami telah melaksanakan prosedur dengan memahami dan mengevaluasi desain dan implementasi dari pengendalian internal Bank yang relevan atas identifikasi aset keuangan yang mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan atau bukti objektif penurunan nilai, melalui pengujian atas pengendalian penetapan rating internal dan melakukan pemeriksaan secara sampling atas dokumen pinjaman.
- Kami memeriksa sampel atas aset keuangan yang diidentifikasi oleh Bank memiliki kualitas kredit yang lebih rendah dan direstrukturisasi, dan membuat penilaian independen kami apakah ada peningkatan risiko kredit secara signifikan atau terdapat bukti objektif penurunan nilai.

As disclosed in Note 3 to the financial statements, this assessment involves significant management judgment and estimation. The Bank calculates ECL using several parameters such as the probability of default, loss given default, exposure at default and discount rate. The Bank also uses assumptions in determining exposures such as expected future cash flows and future macroeconomic factors, several weighted probability scenarios and ECL overlay adjustments made, given the economic uncertainties that arise in the future.

The Bank's disclosures regarding allowance for impairment losses on loans are explained in Notes 2d and 10 to the financial statements.

How our audit addressed this Key Audit Matter

Our audit procedures to address the risk of material misstatement relating allowance for impairment credit loss attributable to loans, include the following:

- *We have carried out procedures by understanding and evaluating the design and implementation of Bank relevant internal controls for the identification of financial assets with significantly increased credit risk or objective evidence of impairment, through testing of internal rating determination controls and conducting sampling examinations of loan documents.*
- *We examined samples of financial assets identified by the Bank as having lower credit quality and restructured, and formed our own independent judgment as to whether there was a significant increase in credit risk or any objective evidence of impairment.*

- Kami mengevaluasi keakuratan, kelengkapan data dan asumsi pemodelan signifikan yang digunakan dalam model KKE, termasuk penentuan *probability of default*, *loss given default* dan *exposure at default*, yang diterapkan terhadap persyaratan PSAK 109. Kami juga mengevaluasi kewajaran prakiraan ekonomi makro Indonesia.
- Kami memeriksa keakuratan data dan perhitungan jumlah KKE, dengan melakukan perhitungan ulang atas keseluruhan portofolio yang penurunan nilainya dinilai secara kolektif dan melakukan perhitungan ulang atas penurunan nilainya dinilai secara individual berdasarkan sampel.
- Kami juga menilai apakah pengungkapan laporan keuangan secara memadai dan Bank eksposur mencerminkan tepat terhadap risiko kredit.

Penjelasan atas Hal Audit Utama:

Penilaian atas imbalan kerja dan kerugian komprehensif lain

Bank telah mengakui beban atas imbalan kerja sebesar Rp43.148.062.936 dan kerugian komprehensif lainnya sebesar Rp14.981.663.737 pada tanggal 31 Desember 2024. Beban atas imbalan kerja dan asumsi yang mendasar penilaian kerugian aktuarial merupakan hal penting, dan juga subjektif, pertimbangan karena saldo tidak stabil dan mempengaruhi komponen ekuitas lainnya Bank. Manajemen telah memperoleh saran dari ahli aktuarial untuk menghitung aktuarial ini. Penilaian aktuarial ini sensitif terhadap asumsi utama seperti tingkat diskonto, tingkat inflasi dan tingkat kematian. Mengingat pertimbangan diperlukan oleh Bank dalam menetapkan asumsi ini, volatilitas dapat diakibatkan oleh perubahan asumsi dan signifikansi saldo terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Informasi terperinci mengenai hal ini disajikan dalam Catatan 21 pada laporan keuangan.

- *We evaluate the accuracy, completeness of data and significant modeling assumptions used in the ECL model, including the determination of the probability of default, loss given default and exposure at default, which are applied to the requirements of SFAS 109. We also evaluate the reasonableness of Indonesia's macroeconomic forecasts.*
- *We checked the accuracy of data and calculation of the ECL amount, by recalculating the collective impairment assessment for the portfolio and recalculating the individual impairment assessment on a sample basis.*
- *We also assessed whether the financial statement disclosures adequately and appropriately reflect the Bank's exposures to credit risk.*

Description of the Key Audit Matter:

Valuation of post-employment benefit and other comprehensive loss

Bank's has recognized the post employment benefit expense of Rp43,148,062,936 and other comprehensive loss amounting to Rp14,981,663,737 as of December 31, 2024. The employee benefit expense and assumptions that underpin the valuation of the actuarial loss are important, and also subjective, judgments as the balance is volatile and affects Bank's other equity component. Management has obtained advice from actuarial specialists in order to calculate this actuarial amount. These actuarial valuations are sensitive to key assumptions such as discount rates, inflation rates and mortality rates. Given the judgment required by Bank's in setting these assumptions, the volatility can result from changes in assumptions and the significance of the balances to the financial statements as a whole. Detailed information pertaining to this is presented in Note 21 to the financial statements.

Halaman 5**Page 5**

Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama

How our audit addressed this Key Audit Matter

Prosedur audit kami untuk mengatasi risiko salah saji material yang berkaitan dengan Penilaian atas imbalan kerja dan kerugian komprehensif lain, sebagai berikut:

Our audit procedures to address the risk of material misstatement relating valuation of post-employment benefit and other comprehensive loss, include the following:

Kami mengevaluasi penilaian Bank atas asumsi yang digunakan dalam penilaian kerugian aktuarial yang dilaporkan di penghasilan komprehensif lainnya termasuk informasi yang terkandung dalam laporan penilaian aktuarial untuk setiap program.

We evaluated Bank's assessment of the assumptions used in the valuation of actuarial loss reported in other comprehensive loss including the information contained within the actuarial valuation reports for each plan.

Kami mereviu ruang lingkup penilaian yang dilakukan dan kami mengevaluasi keahlian dan independensi aktuaris Bank. Ini termasuk penilaian dan penyelidikan untuk asumsi utama yang diterapkan, *benchmarking*, tingkat diskonto, inflasi, dan tingkat kematian, terhadap data eksternal jika tersedia dan membentuk ekspektasi independen kami sendiri berdasarkan pengetahuan kami tentang praktik pasar lokal.

We reviewed the scope of valuations performed and we evaluated the expertise and independence of Bank's actuary. This included assessment and inquiry for the key assumptions applied, benchmarking, discount rates, inflation, and mortality rates, against external data where available and forming our own independent expectations based on our knowledge of local market practices.

Kami juga menilai kecukupan dan kelengkapan pengungkapan imbalan kerja terkait dalam laporan keuangan.

We also assessed the adequacy and completeness of the related post employment benefit disclosures in the financial statements.

Informasi lain***Other information***

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the financial statement and our auditors' report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakakuratan material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Bank dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Bank atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Bank.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the Standard on Auditing will always detect a material misstatement when it exists.

Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Bank.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern.*

Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Bank tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.



HENDRAWINATA HANNY ERWIN & SUMARGO

Welly Adrianto
**HENDRAWINATA HANNY
ERWIN & SUMARGO**
Registered Public Accountants
Welly Adrianto, CPA

No. Ijin Akuntan Publik / Public Accountant License Number: AP. 0060

Jakarta, 10 Januari 2025/January 10, 2025

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS OF DECEMBER 31, 2024
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	31 Desember 2024 / December 31, 2024	31 Desember 2023 / December 31, 2023	
ASET				ASSETS
Kas	4	580.735.597.835	569.570.584.235	Cash
Giro Pada Bank Indonesia	5	2.694.875.382.728	2.393.875.393.891	Current Accounts with Bank Indonesia
Giro Pada Bank Lain	6			Current Accounts with Other Banks
- Pihak Berelasi		--	--	Related Parties -
- Pihak Ketiga		45.119.172.455	70.100.633.360	Third Parties -
Jumlah Giro Pada Bank Lain		45.119.172.455	70.100.633.360	Total Current Accounts with Other Banks
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(32.035.380)	(19.246.250)	Less: Allowance for Impairment Losses
		45.087.137.075	70.081.387.110	
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	7			Placements with Bank Indonesia and Other Banks
- Pihak Berelasi		--	--	Related Parties -
- Pihak Ketiga		3.144.937.358.091	2.528.810.312.334	Third Parties -
Jumlah Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lainnya		3.144.937.358.091	2.528.810.312.334	Total Placements with Bank Indonesia and Other Banks
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(1.778.693.256)	(2.062.877.735)	Less: Allowance for Impairment Losses
		3.143.158.664.835	2.526.747.434.599	
Efek - Efek	8			Securities
- Pihak Berelasi		--	--	Related Parties -
- Pihak Ketiga		9.760.077.271.692	4.356.036.203.645	Third Parties -
Jumlah Efek - Efek		9.760.077.271.692	4.356.036.203.645	Total Securities
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		-	(28.500.000)	Less: Allowance for Impairment Losses
		9.760.077.271.692	4.356.007.703.645	
Efek - Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	9			Marketable Securities Purchased Under Resale Agreement
- Pihak Berelasi		--	--	Related Parties -
- Pihak Ketiga		--	3.965.877.652.040	Third Parties -
Total Efek - Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali		--	3.965.877.652.040	Total Marketable Securities Purchased Under Resale Agreement
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		--	--	Less: Allowance for Impairment Losses
		--	3.965.877.652.040	
Pinjaman yang Diberikan	10			Loans
- Pihak Berelasi		32.221.984.154	27.441.865.094	Related Parties -
- Pihak Ketiga		22.797.947.429.290	21.123.139.140.393	Third Parties -
Total Pinjaman yang Diberikan		22.830.169.413.444	21.150.581.005.487	Total Loans
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(1.305.082.017.392)	(1.232.527.296.112)	Less: Allowance for Impairment Loss
		21.525.087.396.052	19.918.053.709.375	
Aset Tetap	11	388.131.366.573	354.229.899.644	Fixed Assets
Dikurangi : Akumulasi Penyusutan		(258.497.766.049)	(230.787.039.690)	Less: Accumulated Depreciation
		129.633.600.524	123.442.859.954	
Aset Takberwujud	12	51.760.428.880	47.769.374.582	Intangible Assets
Dikurangi: Akumulasi Amortisasi		(44.300.181.485)	(39.561.514.110)	Less: Accumulated Amortization
		7.460.247.395	8.207.860.472	
Aset Hak Guna	13	82.819.125.696	75.524.319.101	Right-of-Use Assets
Dikurangi : Akumulasi Penyusutan		(38.048.572.569)	(34.506.384.099)	Less: Accumulated Depreciation
		44.770.553.127	41.017.935.002	
Aset Lain - lain	14	229.637.221.111	213.233.323.524	Other Assets
Aset Pajak Tangguhan - Bersih	19d	152.158.565.329	124.596.517.717	Deferred Tax Assets - Net
TOTAL ASET		38.312.681.637.703	34.310.712.361.564	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

	Catatan / Notes	31 Desember 2024 / December 31, 2024	31 Desember 2023 / December 31, 2023	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas Segera	15	74.679.631.081	103.394.989.302	Liabilities Due Immediately
Simpanan dari Nasabah	16a			Deposits from Customers
- Pihak Berelasi		590.707.387.143	162.498.501.657	Related Parties -
- Pihak Ketiga		31.577.083.821.666	27.785.918.801.211	Third Parties -
		<u>32.167.791.208.809</u>	<u>27.948.417.302.868</u>	
Simpanan dari Bank Lain	17a			Deposits from Other Banks
- Pihak Berelasi		--	--	Related Parties -
- Pihak Ketiga		661.691.987.042	1.550.582.212.168	Third Parties -
		<u>661.691.987.042</u>	<u>1.550.582.212.168</u>	
Pinjaman yang Diterima	18	24.433.647.846	66.730.442.083	Borrowings
Utang Pajak	19a	69.106.199.029	117.286.572.343	Taxes Payable
Beban yang Masih Harus Dibayar	20	22.595.470.132	20.024.705.770	Accrued Expense
Liabilitas Imbalan Kerja	21	265.776.646.490	232.261.218.444	Post-Employment Benefit Obligation
Liabilitas Sewa	22	15.056.560.942	13.576.233.846	Lease Liabilities
Liabilitas Lain - lain	23	351.353.237.757	268.269.989.232	Other Liabilities
TOTAL LIABILITAS		33.652.484.589.128	30.320.543.666.056	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal Saham				Share Capital
nilai nominal Rp1.000.000				Rp1,000,000 (full amount)
(nilai penuh) per saham				par value per share
Modal Dasar :				Authorized Capital :
4.000.000 saham				4,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh:	24			Issued and fully paid capital:
- 2024 : 2.407.177 saham		2.407.177.000.000	--	2024 : 2,407,177 shares -
- 2023 : 2.050.257 saham		--	2.050.257.000.000	2023 : 2,050,257 shares -
Tambahan Modal Disetor	25	1.881.882	2.340.338	Additional Paid-In Capital
Pengukuran Kembali atas				Remeasurement of Post-Employment
Imbalan Pasca Kerja		(70.904.900.061)	(59.219.202.346)	Benefit Obligation
Saldo laba				Retained Earnings
- Telah Ditentukan Penggunaannya		1.445.457.325.528	1.260.900.248.199	Appropriated -
- Belum Ditentukan Penggunaannya		878.465.741.226	738.228.309.317	Unappropriated -
		<u>4.660.197.048.575</u>	<u>3.990.168.695.508</u>	
TOTAL EKUITAS		4.660.197.048.575	3.990.168.695.508	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		38.312.681.637.703	34.310.712.361.564	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	Tahun yang Berakhir pada Tanggal		
		31 Desember 2024 / December 31, 2024	31 Desember 2023 / December 31, 2023	
PENDAPATAN BUNGA				INTEREST INCOME
Pendapatan Bunga	27	3.347.855.439.821	3.100.965.514.184	Interest Income
Beban Bunga	28	(970.120.006.452)	(859.296.954.147)	Interest Expense
Jumlah Pendapatan Bunga Bersih		2.377.735.433.369	2.241.668.560.037	Net Interest Income
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA				OTHER OPERATING INCOME
Pendapatan Operasional	29	215.885.835.798	171.571.821.970	Operating Income
Provisi dan Komisi	29	9.767.737.892	8.763.715.438	Provision and Commission
Lainnya	29	1.085.572.298	988.475.730	Others
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya		226.739.145.988	181.324.013.138	Total Other Operating Income
PEMULIHAN (PEMBENTUKAN) PENYISIHAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI				RECOVERY (PROVISION) FOR IMPAIRMENT LOSSES
Aset Keuangan	30	(148.944.965.537)	(338.266.108.566)	Financial Assets
Transaksi Rekening Administratif	23	3.029.469.404	3.632.610.096	Transactions of Administrative Accounts
Jumlah Pembentukan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai		(145.915.496.133)	(334.633.498.470)	Total Provision for Impairment Losses
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA				OTHER OPERATING EXPENSES
Gaji dan Tunjangan Karyawan	31	(857.370.759.001)	(648.632.271.633)	Salaries and Employee Benefits
Umum dan Administrasi	32	(372.758.501.000)	(341.057.663.712)	General and Administrative
Beban Modifikasi		(44.540.916.125)	(25.032.450.991)	Modification Expenses
Jumlah Beban Operasional Lainnya		(1.274.670.176.126)	(1.014.722.386.336)	Total Other Operating Expenses
LABA OPERASIONAL		1.183.888.907.098	1.073.636.688.369	OPERATING INCOME
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL				NON-OPERATING INCOME (EXPENSE)
Pendapatan Non Operasional	33	55.191.460.239	5.323.370.621	Non-Operating Income
Beban Non Operasional	33	(41.081.119.538)	(10.803.762.142)	Non-Operating Expenses
Jumlah Pendapatan Non Operasional		14.110.340.701	(5.480.391.521)	Total Non Operating Income
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK		1.197.999.247.799	1.068.156.296.848	INCOME BEFORE TAX EXPENSE
MANFAAT PAJAK PENGHASILAN (BEBAN)				INCOME TAX (EXPENSE) BENEFIT
Kini	19b	(343.799.588.163)	(346.242.424.844)	Current Tax
Tangguhan	19d	24.266.081.590	16.314.437.313	Deferred Tax
Jumlah Beban Pajak		(319.533.506.573)	(329.927.987.531)	Total Tax Expense
LABA TAHUN BERJALAN		878.465.741.226	738.228.309.317	INCOME FOR THE YEAR
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laporan Laba Rugi				Items That Will Not Be Reclassified to Profit or Loss
- Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	21	(14.981.663.737)	1.725.689.570	Remeasurement of Post - Employment Benefit Obligation
- Pajak Penghasilan Terkait	19d	3.295.966.022	(379.651.705)	Related Income Tax -
Jumlah Pendapatan Komprehensif Lain		(11.685.697.715)	1.346.037.865	Total Other Comprehensive Income
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		866.780.043.511	739.574.347.182	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA PER SAHAM	45	411.318	366.234	EARNINGS PER SHARE

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

	Saldo Laba / Retained Earnings						Jumlah Ekuitas/ Total Equity	
	Catatan/ Notes	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh / Issued and Fully Paid-up Capital	Tambahan Modal Disetor / Additional Paid-in Capital	Pengukuran Kembali Imbalan Kerja Setelah Pajak/ Remeasurement of post employment benefit Obligation- After Tax	Telah Ditetapkan penggunaannya/ Appropriated			Belum Ditetapkan Penggunaannya/ Unappropriated
					Cadangan Umum/ General Reserve	Cadangan Tujuan/ Specific Reserve		
Saldo 1 Januari 2024 / Balance as of January 1, 2024		2.050.257.000.000	2.340.338	(59.219.202.346)	1.260.900.248.199	--	738.228.309.317	3.990.168.695.508
Laba tahun berjalan/ Profit for the year		--	--	--	--	--	878.465.741.226	878.465.741.226
Penilaian Kembali Imbalan Kerja Setelah Pajak/ Remeasurement of post employment benefit obligation	21	--	--	(11.685.697.715)	--	--	--	(11.685.697.715)
Seloran modal/ Issuance of share capital	25	356.920.000.000	(458.456)	--	--	--	--	356.919.541.544
Pembagian laba/ Distribution of net income :		--	--	--	184.557.077.329	--	(184.557.077.329)	--
Cadangan umum/ General reserve	26	--	--	--	--	--	(553.671.231.988)	(553.671.231.988)
Dividen / Dividends	26	--	--	--	--	--	--	--
Saldo 31 Desember 2024 / Balance as of December 31, 2024		2.407.177.000.000	1.881.882	(70.904.900.061)	1.445.457.325.528	--	878.465.741.226	4.660.197.048.575

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

The original financial statements included herein are in the Indonesian Language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

	Saldo Laba / Retained Earnings						Jumlah Ekuitas/ Total Equity	
	Catatan/ Notes	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh / Issued and Fully Paid-up Capital	Tambahan Modal Disetor / Additional Paid-in Capital	Pengukuran Kembali Imbalan Kerja Setelah Pajak/ Remeasurement of post employment benefit Obligation- After Tax	Telah Ditetapkan penggunaanannya/ Appropriated			
					Cadangan Umum/ General Reserve	Cadangan Tujuan/ Specific Reserve		Belum Ditetukan Penggunaannya/ Unappropriated
Saldo 1 Januari 2023 / Balance as of January 1, 2023		1.938.200.000.000	2.340.338	(60.565.240.211)	1.110.021.178.825	-	603.516.277.496	3.591.174.556.448
Laba tahun berjalan/ Profit for the year		--	--	--	--	--	738.228.309.317	738.228.309.317
Penilaian Kembali Imbalan Kerja Setelah Pajak/ Remeasurement of post employment benefit obligation	21	--	--	1.346.037.865	--	--	--	1.346.037.865
Setoran modal/ Issuance of share capital	25	112.057.000.000	--	--	--	--	--	112.057.000.000
Pembagian laba/ Distribution of net income :								
Cadangan umum/ General reserve	26	--	--	--	150.879.069.374	--	(150.879.069.374)	--
Dividen / Dividends	26	--	--	--	--	--	(452.637.208.122)	(452.637.208.122)
Saldo 31 Desember 2023/ Balance as of December 31, 2023		2.050.257.000.000	2.340.338	(59.219.202.346)	1.260.900.248.199	--	738.228.309.317	3.990.168.695.508

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal			
	Catatan / Notes	31 Desember 2024 / December 31, 2024	31 Desember 2023 / December 31, 2023	
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI				OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari Pendapatan Bunga, Provisi, dan Komisi		3.325.426.375.190	3.100.642.282.763	Receipts from Interest Income, Fee and Commissions
Pembayaran Bunga		(967.549.242.090)	(861.473.298.751)	Payments of Interest Expense
Pembayaran Beban Tenaga Kerja		(735.821.419.561)	(785.985.321.725)	Payments of Employee Expense
Pembayaran Beban Umum dan Adminitrasi		(335.377.771.154)	(297.711.053.041)	Payments of General and Administrative Expense
Penerimaan dari Pendapatan Operasional dan Non Operasional Lainnya		224.163.788.099	177.340.033.780	Receipts from Other Operating Income and Other Non-Operating Income
Pembayaran Beban Non Operasional		(41.081.119.538)	(10.803.762.141)	Non Operating Expense Paid
Arus Kas Sebelum Perubahan Pada				Cash Flows Before Changes to
Aset dan Liabilitas Operasi		1.469.760.610.946	1.322.008.880.885	Operating Assets and Liabilities
(Kenaikan) / Penurunan dalam Aset Operasi				(Increase) / Decrease In Operating Assets
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	7	28.800.004.297	(9.105.092.751)	Placements with Bank Indonesia and other Banks
Efek-Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	9	3.965.877.652.040	1.289.300.188.115	Marketable Securities Purchased Under Resale Agreement
Pinjaman yang Diberikan	10	(1.797.174.407.778)	(1.309.647.005.243)	Loans
Aset Lain-lain	14	6.501.624.333	(19.686.608.175)	Other Assets
Kenaikan / (Penurunan) Liabilitas Operasi				(Increase) / Decrease In Operating Liabilities
Liabilitas Segera	15	(28.715.358.221)	(93.463.577.986)	Liabilities Due Immediately
Simpanan Nasabah	16	4.219.373.905.941	1.495.420.720.665	Deposits from Customers
Simpanan dari Bank Lain	17	(888.890.225.126)	436.684.639.956	Deposits from Other Banks
Liabilitas Lain-lain	23	(20.547.913.112)	169.042.729.268	Other Liabilities
Utang Pajak	19	(51.713.374.301)	65.698.690.769	Taxes Payable
Pembayaran Pajak Penghasilan	19	(340.266.587.176)	(345.636.302.720)	Payment of Income Tax
Penerimaan Pengembalian Pajak	19	57.677.097.293	-	Tax Refund
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		<u>6.620.683.029.136</u>	<u>3.000.617.262.783</u>	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS INVESTASI				INVESTING ACTIVITIES
Pembelian Efek-efek	8	(5.404.041.068.047)	(1.599.124.895.834)	Acquisition from Marketable Securities
Penyertaan Saham		-	799.291.000	Proceeds from Investment in Shares
Pembelian Aset Tetap	11	(35.677.351.024)	(49.430.211.986)	Acquisitions of Fixed Assets
Penjualan Aset Tetap	11	-	246.918.650	Proceeds from Sale of Fixed Assets
Pembelian Aset Takberwujud	12	(3.991.054.298)	(6.136.598.840)	Acquisitions of Intangible Assets
Pembayaran Aset Hak Guna		(5.814.479.499)	(17.721.922.512)	Payment of Right-of-Use Assets
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		<u>(5.449.523.952.868)</u>	<u>(1.671.367.419.522)</u>	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penambahan Setoran Modal	24,25	356.919.541.544	112.057.000.000	Proceeds from Issuance of Share Capital
Penerimaan Pinjaman yang Diterima	18	-	10.000.000.000	Receipt of Borrowings
Pembayaran Pinjaman yang Diterima	18	(42.296.794.237)	(485.998.049)	Payments of Borrowings
Pembayaran Dividen	26	(553.671.231.989)	(452.637.208.122)	Dividend Paid
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan		<u>(239.048.484.682)</u>	<u>(331.066.206.171)</u>	Net Cash Used in Financing Activities
Kenaikan Bersih Kas dan				Net Increase Cash and
Setara Kas		932.110.591.586	998.183.637.090	Cash Equivalents
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun		5.533.556.919.523	4.535.373.282.433	Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun		6.465.667.511.109	5.533.556.919.523	Cash and Cash Equivalents at End of the Year
Komponen Kas dan Setara Kas:				Components of Cash and Cash Equivalents:
Kas	4	580.735.597.835	569.570.584.235	Cash
Giro pada Bank Indonesia	5	2.694.875.382.728	2.393.875.393.891	Current Account with Bank Indonesia
Giro pada Bank Lain	6	45.119.172.455	70.100.633.360	Current Account with Other Banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain - Jangka Waktu Jatuh Tempo Tiga Bulan atau Kurang Sejak Tanggal Perolehan	7	3.144.937.358.091	2.500.010.308.037	Placement with Bank Indonesia and Other Banks - Maturing within Three Months Since Acquisition Date
Jumlah Kas dan Setara Kas		6.465.667.511.109	5.533.556.919.523	Total Cash and Cash Equivalents

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Bank Pembangunan Daerah Bali ("Bank") didirikan berdasarkan akta No.131 tanggal 5 Juni 1962 yang dibuat dihadapan Ida Bagus Ketut Rurus, Sekretaris Daerah Tingkat I Bali merangkap Notaris.

Dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 No. 59, Tambahan Lembaran Negara No. 2490), Pemerintah Provinsi Bali menetapkan perubahan status hukum Bank dari Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Daerah melalui Surat No. 6/DPRDGR tanggal 9 Februari 1965 dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam keputusannya No. Des.9/21/28-128 tanggal 14 Juli 1965. Setelah itu diterbitkan ijin usaha Bank BPD Bali melalui Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Negara Indonesia No.Kep.110/025/65 pada tanggal 2 November 1965.

Bank kembali mengubah bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT). Perubahan badan hukum Bank ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum BPD Bali dari PD menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Bali ("Bank BPD Bali") yang diundangkan pada tanggal 5 Maret 2002 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2002 No. 6 Seri D No. 3).

Penyesuaian bentuk badan hukum Bank menjadi Perseroan Terbatas dinyatakan dalam akta notaris No. 7 tanggal 12 Mei 2004, yang dibuat di hadapan Notaris Ida Bagus Alit Sudiatmika, S.H., yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. C-12858 HT.01.01.TH. 2004 tanggal 21 Mei 2004 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 22 Juni 2004, Tambahan No. 6004.

Melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.6/26/KEP.DGS/2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Bali menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali, telah disetujui pengalihan izin usaha Bank dari Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Bali kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali.

Pada tanggal 11 November 2004, Bank telah memperoleh izin beroperasi sebagai Bank Umum Devisa sesuai dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 6/32/KEP.DGS/2004 tentang Penunjukkan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai Bank Umum Devisa.

Anggaran Dasar Bank telah beberapa kali mengalami perubahan, antara lain dengan akta No. 25 tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan I Made Widiada, S.H., mengenai penyesuaian dan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar sesuai dengan Akta Nomor 78 tanggal 24 Desember 2024 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang dibuat oleh I Made Widiada, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, dan telah dicatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum Nomor: AHU-AH.01.03-0228472 tanggal 27 Desember 2024.

Pemegang saham pengendali dari Bank adalah Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Badung.

b. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Bank, maksud dan tujuan Bank adalah berusaha di bidang perbankan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha Bank Umum Pemerintah Daerah Devisa (Kelompok ini mencakup kegiatan bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang undangan yang berlaku dan memperoleh surat penunjukan Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam Valuta Asing dan /atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak luar negeri) yang kegiatan usaha utamanya adalah sebagai berikut:

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Bank Pembangunan Daerah Bali (The "Bank") was established based on deed No.131 dated June 5, 1962 by Ida Bagus Ketut Rurus, as Secretary of the Government of Bali and Notary.

In relation to the amendment of Law No. 13 year 1962 regarding the Basic regulation of the Regional Development Banks (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1962 No. 59, Supplement to State Gazette No. 2490), the Provincial Government of Bali set a change of legal status of the Bank of Limited Liability Company into Region through Letter No. 6/DPRDGR dated February 9, 1965 and approved by the Ministry of Internal Affairs in its decision No. Des.9/21/28-128 dated July 14, 1965. After that, a business license was issued for Bank BPD Bali through the Decree of the Minister of Central Bank Affairs/Governor of Bank Negara Indonesia No. Kep.110/025/65 on November 2, 1965.

The Bank has changed its legal form from Regional Companies into a Limited Liability Company (PT). Changes in legal entities established in the Provincial Government of Bali Regulation No.2 year 2002 regarding Changes Legal Entity BPD Bali from "PD" to Limited Liability Company (PT) Bank Pembangunan Daerah Bali ("Bank BPD Bali") which was promulgated on March 5, 2002 (Bali Provincial Gazette 2002 No. 6 Series D No. 3).

Changes to the Bank's legal form into a Limited Liability Company as stated in notarial deed No. 7 dated May 12, 2004, made before Notary Ida Bagus Alit Sudiatmika, S.H., which has been approved by the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia under the Decree of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic Indonesia by Decree No. C-12858 HT.01.01.TH. 2004 dated May 21, 2004 and published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 50 dated June 22, 2004, Supplement No. 6004.

Through Letter of Decree of Senior Deputy Governor Bank Indonesia No.6/26/KEP.DGS/2004 dated July 19, 2004 regarding Corporate Entity Change from "Perusahaan Daerah" Bank Pembangunan Daerah to "Perseroan Terbatas" Bank Pembangunan Daerah Bali, has approved the transfer of the business license of Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Bali to Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali.

On November 11, 2004, the Bank has obtained a license to operate as a Foreign Exchange Bank in accordance with the Letter of Decree of Senior Deputy Governor Bank Indonesia No. 6/32/KEP.DGS/2004 on the appointment of the Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali as a Foreign Exchange Bank.

The Bank's Articles of Association have amended several times, among other, by deed No. 25 dated August 8, 2008, Notary I Made Widiada, S.H., regarding the adjustment and amendment Bank's Articles by Law No. 40 year 2007 concerning Limited Liability Companies.

The latest amendment to the Articles of Association is in accordance with Deed Number 78 dated December 24, 2024 concerning Statement of Meeting Decisions of PT Bank Pembangunan Daerah Bali which was made by I Made Widiada, Bachelor of Laws, Notary in Denpasar, and has been recorded in the Legal Entity Administration System Number: AHU-AH. 01.03-0228472 dated December 27, 2024.

The controlling shareholder of the Bank is Provincial Government of Bali and Badung Regency Governments.

b. Purpose and Objectives

Based on Article 3 of the Bank's Articles of Association, the purpose and objective of the Bank is to do business in the banking sector. In order to achieve the aforementioned aims and objectives, the Company may carry out the business activities of Regional Government Foreign Exchange Commercial Banks (This group includes the activities of banks whose capital is wholly or substantially owned by the Regional Government as stated in the applicable laws and regulations and obtain a letter of appointment of Bank Indonesia to be able to conducting banking business activities in foreign currencies and/or conducting banking transactions with foreign parties) whose main business activities are as follows:

- To collect third-party funds in the form of demand deposits, time deposits, certificates of deposits, savings and/or other similar forms;

1. UMUM (LANJUTAN)

b. Maksud dan Tujuan (Lanjutan)

- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang;
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko maupun kepentingan dan atas perintah nasabahnya yaitu berupa surat-surat wesel termasuk yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud, surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud, kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Obligasi, surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan surat berharga lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Menempatkan dana, meminjam dana dari/atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan/atau antar pihak ketiga;
- h. Menyediakan tempat untuk penyimpanan barang dan surat berharga;
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek;
- k. Membeli agunan, baik sebagian maupun seluruhnya melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- m. Melakukan kegiatan dalam perdagangan Valuta Asing dan/atau sebagai Bank Devisa dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang jasa keuangan lainnya atau mendirikan perusahaan baru sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- o. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus Dana Pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- p. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Jaringan Kantor, Terminal Perbankan Elektronik (TPE) dan Kegiatan/Aktivitas Lainnya

Bank berkantor pusat di Jalan Raya Puputan, Niti Mandala, Denpasar. Bank mengklasifikasikan jaringan kantor menjadi Kantor Pusat, Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang, dan Kantor Cabang Pembantu. Selain itu Bank memiliki Terminal Perbankan Elektronik (TPE) berupa Anjungan Tunai Mandiri (ATM), ATM Setor Tarik Tunai (CRM) dan Sistem Pembayaran Elektronik (EDC) serta kegiatan/aktivitas lainnya. Jumlah jaringan kantor, Terminal Perbankan Elektronik (TPE) dan kegiatan/aktivitas lainnya pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

	2024
Kantor Pusat	1
Kantor Cabang Utama	1
Kantor Cabang	13
Kantor Cabang Pembantu	88
Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	215
ATM Setor Tarik Tunai (CRM)	26
Sistem Pembayaran Elektronik (EDC)	103
Kegiatan/Aktivitas Lainnya	57
	504

Sesuai POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, jaringan kantor Bank terdiri dari Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Fungsional, dan Kantor di Luar Negeri. Untuk memperluas layanan kepada nasabah, Bank dapat menyediakan Terminal Perbankan Elektronik (TPE).

1. GENERAL (CONTINUED)

b. Purpose and Objectives (Continued)

- b. To grant loans;
- c. Issuing a letter of acknowledgment of debt;
- d. Buying, selling or guaranteeing at risk or interest and at the behest of its customers, namely in the form of bills of exchange including those accepted by the bank whose validity period is no longer than the custom in trading of said letters, debt acknowledgments and other trade papers whose validity period is not longer than is customary in trading such documents, state treasury papers and government guarantee letters, Bank Indonesia Certificates (SBI), Bonds, trade papers with a maturity in accordance with applicable laws and regulations and other securities in accordance with laws and regulations applicable;
- e. Transferring money both for its own interests and for the benefit of customers;
- f. To put placement, obtain borrowings from/or provide financing to other banks, either by letter, telecommunication facilities, sight letter of credit (L/C), cheque or other facilities;
- g. Receive payments from bills on securities and perform calculations with/or between third parties;
- h. Provide a place for storage of goods and securities;
- i. Carry out custodial activities for the benefit of other parties based on a contract;
- j. Placing funds from customers to other customers in the form of securities listed on the stock exchange
- k. Purchasing collateral, either in part or in whole through an auction or in other ways in the event that the debtor does not fulfill his obligations to the bank, provided that the collateral purchased must be disbursed as soon as possible in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations;
- l. Performing factoring activities, credit card business and trustee activities;
- m. Carrying out activities in Foreign Exchange trading and/or as a Foreign Exchange Bank by complying with the provisions of the applicable laws and regulations;
- n. To conduct investment activities through share participation in banks or other financial institution in accordance with the prevailing regulation;
- o. Act as the founder and administrator of the Pension Fund in accordance with the applicable laws and regulations;
- p. Carry out other activities commonly carried out by commercial banks as long as they do not conflict with the applicable laws and regulations.

c. Office Network, Electronic Banking Terminal (TPE), and other events/activities.

The Bank's head office is located at Jalan Raya Puputan, Niti Mandala, Denpasar. The Bank classifies the office network into Head Office, Main Branch Office, Branch Offices, and Sub-Branch Offices. In addition, the Bank has an Electronic Banking Terminal (TPE) in the form of Automated Teller Machines (ATM), ATM Cash Withdrawals (CRM) and Electronic Payment System (EDC) as well as other events/activities. The number of office networks, Electronic Banking Terminals (TPE) and other events/activities as of December 31, 2024 and 2023 (unaudited) are as follows:

	2023	
	1	Main Office
	1	Main Branch Office
	13	Branch Office
	88	Sub Branch Office
	212	Automated Teller Machines
	26	Cash Recycling Machines
	153	Electronic Data Captures
	59	Other Events/ Activities
	553	

In accordance with the Financial Services Authority Regulation Number POJK No. 12/POJK.03/2021 concerning Commercial Banks, the Bank's office network consists of the Head Office, Regional Offices, Branch Offices, Sub-Branch Offices, Functional Offices, and Overseas Offices. To expand services to customers, the Bank can provide Electronic Banking Terminal (TPE).

1. UMUM (LANJUTAN)

c. Jaringan Kantor, Terminal Perbankan Elektronik (TPE) dan Kegiatan/Aktivitas Lainnya (Lanjutan)

Sesuai pengumuman OJK tanggal 27 April 2022 melalui aplikasi APOLO-Jaringan Kantor, untuk *Payment Point* dan *Kas Keliling* tidak dilaporkan sebagai jaringan kantor Bank namun dicatatkan sebagai kegiatan/aktivitas lainnya karena merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Bank dan berada di bawah supervisi Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu.

d. Organisasi dan Struktur Manajemen

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham No. 47 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 22 Februari 2023 dibuat oleh Notaris I Made Widiada, S.H., Akta Rapat Umum Pemegang Saham No. 25 tentang Pernyataan Keputusan Rapat dibuat oleh Notaris I Made Widiada, S.H., tanggal 12 Mei 2023 dan Akta No. 38 tentang Pernyataan Keputusan Rapat dibuat oleh Notaris I Made Widiada, S.H. tanggal 22 November 2023 serta Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali No. 0607/KEP/DIR/SDM/2023 tanggal 26 November 2023 tentang Struktur Keanggotaan Komite, serta Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 21 yang berita acaranya dibuat oleh Notaris I Made Widiada, S.H., tanggal 13 Mei 2019 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/KEP/DK/BPD/2022 tanggal 1 November 2022, Pada 31 Desember 2024 dan 2023 susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Anggota Komite adalah sebagai berikut :

1. GENERAL (CONTINUED)

c. Office Network, Electronic Banking Terminal (TPE), and other events/activities (Continued)

In accordance with the OJK announcement dated April 27, 2022 through the APOLO-Office Network application, *Payment Points* and *Mobile Cash* are not reported as the Bank's office network but are listed as other events/activities because they are part of an organizational unit within the Bank and are under the supervision of a Branch Office or Office, Sub Branch.

d. Organizational and Management Structure

Based on the Deed of General Meeting of Shareholders No. 47 concerning Minutes of Shareholders' Meeting dated February 22, 2023 drawn up by Notary I Made Widiada, S.H., Deed of General Meeting of Shareholders No. 25 concerning Statement of Meeting Resolutions made by Notary I Made Widiada, S.H., dated May 12, 2023 and Deed No. 38 concerning Statement of Meeting Decisions made by Notary I Made Widiada, S.H. dated November 22, 2023 and Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Bali Number: 0607/KEP/DIR/SDM/2023 dated November 26, 2023 concerning Committee Membership Structure, and the deed of extraordinary general meeting of shareholder No. 21, the minutes of which were also prepared by Notary I Made Widiada, S.H., dated May 13, 2019 and Decree of the Board of Commissioners No. 001/KEP/DK/BPD/2022 dated November 1, 2022, as of December 31, 2024 and 2023 the composition of the Board of Commissioners, Directors and Committee Members is as follows:

31 Desember 2024 / December 31, 2024

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Non Independen
Komisaris Non Independen

I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.
Ir.Gede Arimbawa
I Nyoman Suparsa Widana
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.
I Gede Darmawa

Board of Commissioners

President Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Non Independent Commissioner
Non Independent Commissioner

Direksi

Direktur Utama
Direktur Operasional & TI
Direktur Bisnis
Direktur Kredit
Direktur Kepatuhan

I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.
Ida Bagus Gede Setia Yasa.
I Nyoman Sumanaya, S.E., M.M.
Made Lestara Widiatmika.
Drs. I Wayan Sutela Negara.

Board of Directors

President Director
Director of Operational & IT
Director of Business
Director of Loan
Director of Compliance

Komite Audit

Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.
Ir.Gede Arimbawa
I Nyoman Suparsa Widana, S.E., M.M.
I Dewa Gede Putra Yustina, S.H.
Drs. Ec. I Wayan Sugiarta, MM

Audit Committee

Chairman
Member
Member
Member
Member

Komite Pemantau Risiko

Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

Ir.Gede Arimbawa.
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.
I Gede Darmawa, S.E., M.Si
I Nengah Dana Wirawan, S.E.
I Made Artawa, SE

Risk Monitoring Committee

Chairman
Member
Member
Member
Member

Komite Remunerasi dan Nominasi

Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

I Nyoman Suparsa Widana, S.E., M.M.
I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.
Wisnu Bawa Temaja, SH., MH
I Gede Darmawa, S.E., M.Si
Ir Gede Arimbawa
Ida Ayu Putri Yuniawati, S.E
I Made Artawa, SE

Remuneration and Nomination Committee

Chairman
Member
Member
Member
Member
Member
Member

1. UMUM (LANJUTAN)

1. GENERAL (CONTINUED)

31 Desember 2023 / December 31, 2023		
Dewan Komisaris		Board of Commissioners
Komisaris Utama	I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.	President Commissioner
Komisaris Independen	Ir. Gede Arimbawa	Independent Commissioner
Komisaris Independen	I Nyoman Suparsa Widana	Independent Commissioner
Komisaris Non Independen	Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	Non Independent Commissioner
Komisaris Non Independen	I Gede Darmawa	Non Independent Commissioner
Direksi		Board of Directors
Direktur Utama	I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.	President Director
Direktur Operasional & TI	Ida Bagus Gede Setia Yasa.	Director of Operational & IT
Direktur Bisnis	I Nyoman Sumanaya, S.E., M.M.	Director of Business
Direktur Kredit	Made Lestara Widiatmika.	Director of Loan
Direktur Kepatuhan	Drs. I Wayan Sutela Negara.	Director of Compliance
Komite Audit		Audit Committee
Ketua	I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.	Chairman
Anggota	Ir. Gede Arimbawa	Member
Anggota	I Nyoman Suparsa Widana, S.E., M.M.	Member
Anggota	I Dewa Gede Putra Yustina, S.H.	Member
Anggota	Drs. Ec. I Wayan Sugiarta, MM	Member
Komite Pemantau Risiko		Risk Monitoring Committee
Ketua	Ir. Gede Arimbawa.	Chairman
Anggota	Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	Member
Anggota	I Gede Darmawa, S.E., M.Si	Member
Anggota	I Nengah Dana Wirawan, S.E.	Member
Anggota	I Made Artawa, SE	Member
Komite Remunerasi dan Nominasi		Remuneration and Nomination Committee
Ketua	I Nyoman Suparsa Widana, S.E., M.M.	Chairman
Anggota	I Gusti Ngurah Bagus Artawan, S.H.	Member
Anggota	Wisnu Bawa Temaja, SH., MH	Member
Anggota	I Gede Darmawa, S.E., M.Si	Member
Anggota	Ir Gede Arimbawa	Member
Anggota	A. A. Istri Eka Parwita Dewi, S.E., M.M.	Member
Anggota	GDE Winata, S.E., MM	Member

Pada tanggal 31 Desember 2024, Kepala Satuan Kerja Audit Internal dan Anti Fraud Bank adalah I Komang Wiratna Jaya, S.T., M.M., QIA. sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 0140/KEP/DIR/SDM/2024 tanggal 22 Maret 2024 dan pada tanggal 31 Desember 2023, Kepala Satuan Kerja Audit Internal dan Anti Fraud Bank adalah I.A.Sri Wahyuni Darmawati, S.E., M.M., QIA. sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 0147/KEP/DIR/SDM/2023 tanggal 29 Maret 2023.

As of December 31, 2024, the Head of the Bank's Internal Audit and Anti-Fraud Work Unit was I Komang Wiratna Jaya, S.T., M.M., QIA. in accordance with Directors' Decree No. 0140/KEP/DIR/SDM/2024 dated March 22, 2024 and on December 31, 2023, the Head of the Bank's Internal Audit and Anti-Fraud Work Unit is I.A.Sri Wahyuni Darmawati, S.E., M.M., QIA. in accordance with Directors' Decree No. 0147/KEP/DIR/SDM/2023 dated March 29, 2023.

Sekretaris Perusahaan tanggal 31 Desember 2024 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 0267/KEP/DIR/SDM/2023 tanggal 27 Juni 2023 dan Surat Keputusan Direksi No. 0338/KEP/DIR/SDM/2018 tanggal 27 Juli 2018 adalah I.B.Gd. Ary Wijaya Guntur, S.E., M.M.

The Corporate Secretary as of December 31 2024 based on the Decision Letter Board of Directors No.0267/KEP/DIR/SDM/2023 dated June 27, 2023 and on the Decision Letter Board of Directors No.0338/KEP/DIR/SDM/2018 dated July 27, 2018 is I.B.Gd. Ary Wijaya Guntur, S.E., M.M.

Jumlah pegawai Bank adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

The number of employees of the Bank are as follows (unaudited):

	Tetap/ Permanent	Tidak Tetap/ Non-Permanent	Jumlah/ Total	
2024	1.264	34	1.298	2024
2023	1.210	117	1.327	2023

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Kebijakan akuntansi yang penting yang diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan Bank telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI").

Laporan keuangan juga disusun dan disajikan sesuai dengan Buku Panduan Akuntansi Perbankan (BPAK) sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/SEOJK.03/2021 tentang Buku Panduan Akuntansi Perbankan Bagi Bank Umum Konvensional.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan PSAK 201 (sebelumnya PSAK 1), "Penyajian Laporan Keuangan". Laporan keuangan disusun atas basis akrual dengan menggunakan konsep nilai historis, kecuali jika standar akuntansi mensyaratkan pengukuran nilai wajar.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk keperluan laporan arus kas, yang termasuk kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dan Sertifikat Bank Indonesia, yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp). Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dalam Rupiah penuh.

c. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Nomenklatur Standar Akuntansi Keuangan

Standar ini mengatur penomoran baru untuk standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Institut Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI").

Perubahan tersebut untuk membedakan penomoran PSAK dan ISAK yang merujuk pada IFRS Accounting Standards (diawali dengan angka 1 dan 2) dan tidak merujuk pada IFRS Accounting Standards (diawali dengan angka 3 dan 4). Perubahan ini berlaku efektif pada 1 Januari 2024.

Efektif tanggal 1 Januari 2024, Bank menerapkan PSAK baru yang berlaku efektif pada tanggal pelaporan. Perubahan kebijakan akuntansi Bank telah dibuat sesuai kebutuhan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar.

Penerapan standar baru dan amendemen yang relevan dengan operasi Bank adalah sebagai berikut:

- PSAK 116 : Sewa (sebelumnya PSAK 73) - Sewa jual dan sewa-balik;
- PSAK 201 : Penyajian Laporan Keuangan (sebelumnya PSAK 1) - Liabilitas Tidak Lancar dengan Persyaratan;
- PSAK 207 : Laporan arus kas (sebelumnya PSAK 2) dan PSAK 107, Instrumen keuangan: Pengungkapan (sebelumnya PSAK 60) - Pengaturan keuangan pemasok.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

The significant accounting policies that are consistently applied in the preparation of the financial statements are as follows:

a. Statement of Compliance

The financial statements of the Bank have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("IFAS") which comprise the Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("ISFAS") issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI).

The Financial statements of the Bank have also been prepared and presented in accordance with the Banking Accounting Guidebook (BPAK) in accordance with the Circular Letter of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 34/SEOJK.03/2021 concerning the Banking Accounting Guidebook for Conventional Commercial Banks.

b. Basis for Preparation of the Financial Statements

The financial statements have been prepared in accordance with SFAS 201 (previously SFAS 1), "Presentation of Financial Statement". The financial statements have been prepared on the accrual basis using the historical cost concept, except where the accounting standards require fair value measurement.

The statements of cash flows are prepared using the direct method with cash flows classified into operating, investing and financing activities. Cash and cash equivalents consist of cash, current accounts with Bank Indonesia and current accounts with other banks, placements with other banks and Certificates of Bank Indonesia maturing within 3 months from the date of acquisition, as long as they are not pledged as a collateral for borrowings nor restricted.

The reporting currency used for the financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp). Unless otherwise stated, all figures presented in the financial statements are in full amount of Rupiah.

c. Changes to Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards

Financial Accounting Standards Nomenclature

This standard regulates the new numbering for financial accounting standards applicable in Indonesia issued by the Financial Accounting Standards Board of The Indonesia Institute of Accountants ("DSAK-IAI").

The change is to distinguish the numbering of SFAS and IFAS that refer to IFRS Accounting Standards (beginning with numbers 1 and 2) and do not refer to IFRS Accounting Standards (beginning with numbers 3 and 4). This change is effective on January 1, 2024.

Effective January 1, 2024, the Bank adopted new SFAS that are effective for application from that date. Changes to the Bank's accounting policies have been made as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards.

The adoption of the following new standards and amendment which are relevant to the Bank's operations are follows:

- SFAS 116 : Leases (previously SFAS 73) – Leases on sales and leaseback;
- SFAS 201 : Presentation of financial statements (previously SFAS 1) - Non current Liabilities with Covenants;
- SFAS 207 : Cash flow statements (previously SFAS 2) and SFAS 107, Financial instrument: Disclosure (previously SFAS 60) – Supplier finance arrangements.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

c. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (lanjutan)

Dampak dari penerapan standar akuntansi baru ini adalah sebagai berikut:

PSAK 116 : Sewa (sebelumnya PSAK 73) - Sewa jual dan sewa-balik;

DSAK IAI mengeluarkan keputusan agenda oleh Komite Interpretasi IFRS yang membahas bagaimana penjual-penyewa harus mengukur aset hak guna usaha yang timbul dari sewa-balik dan, sebagai akibatnya, bagaimana menentukan keuntungan atau kerugian dari transaksi jual dan sewa-balik di mana transaksi tersebut dikualifikasikan sebagai 'penjualan' menurut PSAK 115 dan pembayaran sewa termasuk pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau tingkat suku bunga. Meskipun keputusan agenda tersebut memberikan pendekatan untuk pengukuran awal aset hak guna usaha dan liabilitas sewa yang timbul dari sewa-balik, keputusan tersebut tidak membahas bagaimana liabilitas sewa akan diukur selanjutnya.

Amandemen PSAK 116 yang diterbitkan pada bulan November 2022, bertujuan untuk mengatasi kesenjangan tersebut. PSAK 116 sekarang menetapkan bahwa, dalam mengukur liabilitas sewa selanjutnya, lessee menentukan 'pembayaran sewa' dan pembayaran sewa yang direvisi dengan cara yang tidak mengakibatkan lessee mengakui jumlah keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak pakai yang masih dimilikinya.

Dengan kata lain, tanpa amandemen ini, lessee penjual, yang menerapkan persyaratan pengukuran berikutnya untuk liabilitas sewa yang tidak terkait dengan transaksi jual dan sewa-balik, mungkin mengakui keuntungan atas hak pakai yang masih dimilikinya semata mata karena pengukuran kembali (misalnya, setelah modifikasi sewa atau perubahan masa sewa), meskipun tidak ada transaksi atau peristiwa yang terjadi yang menimbulkan keuntungan tersebut.

PSAK 201, Penyajian Laporan Keuangan (sebelumnya PSAK 1) - Liabilitas Tidak Lancar dengan Persyaratan;

PSAK 201 'Penyajian laporan keuangan' mensyaratkan bahwa, agar entitas dapat mengklasifikasikan liabilitas sebagai tidak lancar, entitas harus memiliki hak pada tanggal pelaporan untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah tanggal tersebut.

Ketika entitas mengklasifikasikan liabilitas yang timbul dari perjanjian pinjaman sebagai tidak lancar dan liabilitas tersebut tunduk pada persyaratan yang harus dipenuhi oleh entitas dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan, maka entitas harus mengungkapkan informasi dalam catatan atas laporan keuangan yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk memahami risiko bahwa liabilitas tersebut akan dilunasi dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan, yang meliputi:

- nilai tercatat liabilitas;
- informasi mengenai perkiraan-perkiraan;
- fakta dan situasi, jika ada, yang mengindikasikan entitas mungkin mengalami kesulitan untuk memenuhi persyaratan yang diperjanjikan. Fakta dan keadaan tersebut juga dapat mencakup fakta bahwa entitas tidak akan mematuhi kovenan berdasarkan keadaannya pada akhir periode pelaporan.

PSAK 207, Laporan arus kas (sebelumnya PSAK 2) dan PSAK 107, Instrumen keuangan: Pengungkapan (sebelumnya PSAK 60) - Pengaturan keuangan pemasok;

Pada tanggal 1 Desember 2023, DSAK IAI menerbitkan amandemen PSAK 207 dan PSAK 107 yang mensyaratkan pengungkapan spesifik mengenai *Supplier Finance Arrangements* (SFAs). Amandemen tersebut menanggapi investor yang mengatakan bahwa mereka sangat membutuhkan informasi lebih lanjut tentang SFAs untuk dapat menilai bagaimana pengaturan ini memengaruhi liabilitas, arus kas, dan risiko likuiditas entitas.

Untuk memenuhi kebutuhan investor, pengungkapan baru ini akan memberikan informasi tentang:

- Syarat dan ketentuan SFAs.
- Nilai tercatat liabilitas keuangan yang merupakan bagian dari SFAs dan pos-pos di mana liabilitas tersebut disajikan.
- Nilai tercatat liabilitas keuangan dalam butir (2) yang telah diterima pembayarannya oleh pemasok dari penyedia keuangan.
- Kisaran tanggal jatuh tempo pembayaran untuk liabilitas keuangan yang merupakan bagian dari SFAs, dan utang usaha yang sebanding yang bukan merupakan bagian dari pengaturan tersebut.
- Perubahan non-kas atas nilai tercatat liabilitas keuangan dalam butir (2).
- Akses terhadap fasilitas SFAs dan konsentrasi risiko likuiditas pada penyedia pembiayaan.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

c. Changes to Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards (continued)

Impact of adoption these new accounting standards are follows:

SFAS 116 : Leases (previously SFAS 73) – Leases on sales and leaseback;

DSAK IAI issued agenda decision by the IFRS Interpretations Committee addressing how a seller-lessee should measure the right-of-use asset arising from the leaseback and, as a result, how it should determine the gain or loss on a sale and leaseback transaction where the transaction qualified as a 'sale' under SFAS 115 and lease payments include variable lease payments that do not depend on an index or rate. While the agenda decision provided an approach for the initial measurement of the right-of-use asset and the lease liability arising from the leaseback, it did not address how the lease liability would be subsequently measured.

The amendments to SFAS 116 issued in November 2022, aim to address that gap. SFAS 116 now specifies that, in subsequently measuring the lease liability, the seller-lessee determines 'lease payments' and revised lease payments' in a way that does not result in the seller-lessee recognising any amount of the gain or loss that is related to the right of use it retains.

In other words, without these amendments, a seller-lessee, applying the subsequent measurement requirements for lease liabilities unrelated to a sale and leaseback transaction, might have recognised a gain on the right of use it retains solely because of a remeasurement (for example, following a lease modification or change in the lease term), even though no transaction or event would have occurred to give rise to that gain.

SFAS 201, Presentation of financial statements (previously SFAS 1) - Non current Liabilities with Covenants;

SFAS 201 'Presentation of financial statements' requires that, for an entity to classify a liability as non-current, the entity must have the right at the reporting date to defer settlement of the liability for at least twelve months after that date.

An entity classifies a liability arising from a loan arrangement as non-current and that liability is subject to the covenants which an entity is required to comply with within twelve months of the reporting date, the entity shall disclose information in the notes that enables users of financial statements to understand the risk that the liability could become repayable within twelve months of the reporting period, including:

- the carrying amount of the liability;
- information about the covenants;
- facts and circumstances, if any, that indicate the entity may have difficulty complying with the covenants. Such facts and circumstances could also include the fact that the entity would not have complied with the covenants based on its circumstances at the end of the reporting period.

SFAS 207, Cash flow statements (previously PSAK 2) and SFAS 107, Financial instrument: Disclosure (previously SFAS 60) – Supplier finance arrangements;

On December 1, 2023, the DSAK IAI issued amendments to SFAS 207 and SFAS 107 to require specific disclosures about Supplier Finance Arrangements (SFAs). The amendments respond to investors that said they urgently need more information about SFAs to be able to assess how these arrangements affect an entity's liabilities, cash flows and liquidity risk.

To meet investor's needs, the new disclosures will provide information about:

- The terms and conditions of SFAs.
- The carrying amount of financial liabilities that are part of SFAs and the line items in which those liabilities are presented.
- The carrying amount of the financial liabilities in (2) for which suppliers have already received payment from the finance providers.
- The range of payment due dates for both the financial liabilities that are part of SFAs, and comparable trade payables that are not part of such arrangements.
- Non-cash changes in the carrying amounts of financial liabilities in (2).
- Access to SFAs facilities and concentration of liquidity risk with the finance providers.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

c. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (lanjutan)

Standar dan interpretasi standar akuntansi baru tertentu telah dikeluarkan tetapi tidak wajib diterapkan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan belum diterapkan secara dini oleh Perusahaan, di diskusikan di Catatan 49.

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

- i) Klasifikasi
Bank mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori pengukuran berikut:
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
 - Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
 - Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan diklasifikasikan menjadi kategori tersebut di atas berdasarkan model bisnis dimana aset keuangan tersebut dimiliki dan karakteristik arus kas kontraktualnya. Model bisnis merefleksikan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Aset keuangan dapat diukur dengan biaya perolehan diamortisasi hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk tujuan mendapatkan arus kas kontraktual (*held to collect*); dan
- Kriteria kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Suatu instrumen utang diukur pada FVOCI, hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuan tercapai dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan (*held to collect and sell*);
- Kriteria kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awal, Bank dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk diperdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Seluruh aset keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI sebagaimana ketentuan di atas diukur dengan FVTPL.

Aset dapat dijual dari portofolio *held to collect* ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

Laba rugi yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai FVOCI ditangguhkan di pendapatan komprehensif lain sampai aset tersebut dihentikan.

Pada pengakuan awal, Bank dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laporan laba rugi, jika penentuan tersebut menghilangkan atau secara signifikan mengurangi pengukuran atau pengakuan inkonsistensi (kadang-kadang disebut sebagai "accounting mismatch").

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

c. Changes to Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards (continued)

Certain new accounting standards and interpretations have been published that are not mandatory for the year ended December 31, 2024 and have not been early adopted by the Company, are discussed in Note 49.

d. Financial Assets and Liabilities

- i) Classification
The Bank classifies its financial assets in the following measurement categories:
- Financial assets measured at fair value through profit or loss;
 - Financial assets measured at fair value through other comprehensive income;
 - Financial assets measured at amortized cost.

Financial assets are classified into these categories based on the business model within which they are held and their contractual cash flow characteristics. The business model reflects how groups of financial assets are managed to achieve a particular business objective.

A financial asset is measured at amortised cost only if it meets both of the following conditions and it is not designated as at FVTPL:

- The financial assets is held within a business model whose objective is to hold the asset to collect contractual cash flows (*held to collect*); and
- Its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.

A debt instruments measured at FVOCI, only if it meets both of the following conditions and is not designated as at FVTPL:

- The financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling the financial asset (*held to collect and sell*);
- Its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

At initial recognition, the Bank may make an irrevocable choice to present equity instruments that are not held for trading at fair value through other comprehensive income.

All financial assets not classified as measured at amortized cost or FVOCI as described above are measured at FVTPL.

Assets may be sold out of hold to collect portfolios where there is an increase in credit risk. Disposals for other reasons are permitted but such sales should be insignificant in value or infrequent in nature.

Unrealized gains or losses of financial assets held at FVOCI deferred in other comprehensive income until the asset is derecognised.

At initial recognition, the Bank can make an irrevocable determination to measure assets that meet the requirements to be measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income at fair value through profit or loss, if the determination eliminates or significantly reduces the measurement or recognition inconsistencies (sometimes referred to as "accounting mismatch").

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

i) Klasifikasi (Lanjutan)

Penilaian model bisnis

Model bisnis mengacu pada bagaimana aset keuangan dikelola bersama untuk menghasilkan arus kas untuk Bank. Arus kas mungkin dihasilkan dengan menerima arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya. Model bisnis ditentukan pada tingkat agregasi di mana kelompok aset dikelola bersama untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak bergantung pada niat manajemen pada instrumen individual.

Bank menilai model bisnis pada aset keuangan setidaknya pada tingkat lini bisnis atau pada di mana terdapat variasi mandat/tujuan dalam lini bisnis, pada lini bisnis produk atau pada tingkat *desk* yang lebih granular (misalnya sub-portfolio atau sub-lini bisnis).

Penentuan model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan semua bukti relevan yang tersedia pada tanggal penilaian. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- bagaimana kinerja bisnis dan aset keuangan yang ada di dalam unit bisnis itu dievaluasi dan dilaporkan kepada manajemen. Tingkat pemisahan yang diidentifikasi untuk klasifikasi PSAK 109 (sebelumnya PSAK 71) harus konsisten dengan bagaimana portofolio aset dipisahkan dan dilaporkan kepada manajemen;
- risiko yang mempengaruhi kinerja unit bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam unit bisnis itu dan khususnya bagaimana risiko itu dikelola; dan
- bagaimana manajer unit bisnis dikompensasi (misalnya, apakah kompensasi didasarkan pada nilai wajar dari aset yang dikelola atau pada arus kas kontraktual yang dikumpulkan).

Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dikelola dan penilaian kinerjanya berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Derivatif juga dikategorikan dalam klasifikasi ini kecuali ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Penentuan model bisnis dilakukan berdasarkan skenario yang diperkirakan akan terjadi oleh Bank dan tidak dalam kondisi sangat tertekan atau 'kondisi terburuk'. Jika aset dijual dalam kondisi yang tidak diharapkan oleh Bank untuk berlaku ketika aset diakui, klasifikasi aset keuangan yang ada dalam portofolio tidak disajikan secara tidak akurat, tetapi kondisi tersebut harus dipertimbangkan untuk aset yang diperoleh di masa mendatang.

Perubahan pada model bisnis atau pengenalan model bisnis baru ditentukan melalui proses persetujuan unit bisnis baru.

Bank dapat mereklasifikasi seluruh aset keuangan yang terpengaruh jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Penilaian apakah arus kas kontraktual hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga semata

Untuk tujuan penilaian ini, 'pokok' didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal. 'Bunga' didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan untuk risiko kredit yang terkait dengan jumlah pokok yang terutang selama periode waktu tertentu dan untuk risiko dan biaya pinjaman dasar lainnya (misalnya risiko likuiditas dan biaya administrasi), serta margin keuntungan.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

d. Financial Assets and Liabilities (Continued)

i) Classification (Continued)

Business model assessment

Business model refers to how financial assets are managed together to generate cash flows for the Bank. This may be collecting contractual cash flows, selling financial assets or both. Business models are determined at a level of aggregation where groups of assets are managed together to achieve a particular objective and do not depend on management's intentions for individual instruments.

The Bank assesses the business model of financial assets at least at business line level or where there are varying mandates or objectives within a business line, at a more granular product business line or desk level (i.e. sub-portfolios or sub-business lines).

Business model determinations are made considering all relevant evidence that is available at the date of the assessment. This includes, but is not limited to:

- how the performance of the business and the financial assets held within that business unit are evaluated and reported to management. The level of segregation identified for SFAS 109 (previously SFAS 71) classification should be consistent with how asset portfolios are segregated and reported to senior management;
- the risks that affect the performance of the business unit and the financial assets held within that business unit and in particular the way those risks are managed; and
- how managers of the business unit are compensated (for example, whether the compensation is based on the fair value of the assets managed or on the contractual cash flows collected).

Financial assets held for trading or managed and which performance appraisals based on fair value are measured at fair value through profit or loss.

Derivatives are also categorized under this classification unless they are designated as effective hedging instruments.

Business model determinations are made on the basis of scenarios that the Bank reasonably expects to occur and not under highly stressed or 'worst case' conditions. Where assets are disposed of under conditions that the Bank did not reasonably expect to prevail when the assets were recognised, the classification of existing financial assets in the portfolio are not rendered inaccurate but the conditions in question should be considered for any assets acquired going forward.

Changes to business models or the introduction of new business models are determined through the new business unit approval process.

The Bank can reclassify all of its financial assets when and only, its business model for managing those financial assets changes.

Assessment of whether contractual cash flows are solely payments of principal and interest

For the purposes of this assessment, 'principal' is defined as the fair value of the financial asset on initial recognition. 'Interest' is defined as consideration for the time value of money and for the credit risk associated with the principal amount outstanding during a particular period of time and for other basic lending risks and costs (e.g. liquidity risk and administrative costs), as well as profit margin.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

i) Klasifikasi (Lanjutan)

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual adalah *Solely Payments of Principal and Interest (SPPI)*, Bank mempertimbangkan ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Hal ini termasuk menilai apakah aset keuangan mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual sehingga tidak memenuhi kondisi ini. Dalam melakukan penilaian, Bank mempertimbangkan:

- Kejadian kontinjensi yang akan mengubah jumlah dan waktu arus kas;
- Fitur *leverage*;
- Persyaratan pelunasan dipercepat dan perpanjangan fasilitas;
- Ketentuan yang membatasi klaim Bank atas arus kas dari aset tertentu (seperti pinjaman *non-recourse*); dan
- Fitur yang memodifikasi imbalan dari nilai waktu atas uang (seperti penetapan ulang suku bunga berkala).

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori berikut pada saat pengakuan awal:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) subklasifikasi, yaitu subklasifikasi yang ditetapkan pada saat pengakuan awal dan subklasifikasi yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan;
- Liabilitas keuangan lainnya. Liabilitas keuangan lainnya berkaitan dengan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi pada saat pengakuan liabilitas.

ii) Pengakuan awal

Bank pada awalnya mengakui Pinjaman yang diberikan dan simpanan pada tanggal perolehan.

Semua aset dan liabilitas keuangan lainnya pada awalnya diakui pada tanggal perdagangan dimana Bank menjadi suatu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

- a. Pembelian dan penjualan aset keuangan yang lazim (reguler) diakui pada tanggal perdagangan dimana Bank memiliki komitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.
- b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya. Untuk aset atau liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajarnya ditambahkan/dikurangi dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan aset atau liabilitas keuangan.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan.

Bank pada saat pengakuan awal, dapat menetapkan aset dan liabilitas keuangan tertentu, pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar hanya diterapkan jika kondisi berikut terpenuhi:

- a. penerapan opsi nilai wajar mengurangi atau menghilangkan ketidaksesuaian akuntansi yang mungkin timbul; atau
- b. aset dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan, yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen utama berdasarkan nilai wajar; atau
- c. aset dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah.

Untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada pengakuan awal liabilitas. Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari beban bunga.

iii) Pengukuran setelah pengakuan awal

Aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya. Aset keuangan kelompok biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

d. Financial Assets and Liabilities (Continued)

i) Classification (Continued)

In assessing whether the contractual cash flows are *Solely Payments of Principal and Interest (SPPI)*, the Bank considers the contractual terms of the instrument. This includes assessing whether the financial asset contains a 'contractual term that could change the timing or amount of contractual cash flows such that it would not meet this condition. In making the assessment, the Bank considers:

- Contingent events that would change the amount and timing of cash flows;
- Leverage features;
- Prepayment and extension terms;
- Terms that limit the Bank's claim to cash flows from specified assets (e.g. non-recourse loans); and
- Features that modify consideration of the time value of money (e.g. periodical reset of interest rates).

Financial liabilities are classified into the following categories at initial recognition:

- Financial liabilities at fair value through profit or loss, which has 2 (two) sub-classifications, i.e. those designated as such upon initial recognition and those classified as held for trading;
- Other financial liabilities. Other financial liabilities pertain to financial liabilities that are not held for trading nor designated as at fair value through profit or loss upon recognition of the liability.

ii) Initial recognition

The Bank initially recognises loans and deposits on the date of origination.

All other financial assets and liabilities are initially recognised on the trade date at which the Bank becomes a party to the contractual provisions of the instruments.

- a. Regular way purchases and sales of financial assets are recognised on the trade date at which the Bank commits to purchase or sell those assets.
- b. Financial assets and financial liabilities are initially recognized at fair value. For those financial assets or financial liabilities not classified as fair value through profit or loss, the fair value is added/deducted with directly attributable transaction costs to the issuance of financial assets or liabilities.

Transaction costs include only those costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability and are incremental costs that would not have been incurred if the instrument had not been acquired or issued.

The Bank, upon initial recognition, may designate certain financial assets and liabilities, at fair value through profit or loss (fair value option). The fair value option is only applied when the following conditions are met:

- a. the application of the fair value option reduces or eliminates an accounting mismatch that would otherwise arise; or
- b. the financial assets and liabilities are part of a portfolio of financial instruments, the risks of which are managed and reported to key management on a fair value basis; or
- c. the financial assets and liabilities consist of a host contract and an embedded derivative that must be bifurcated, but are unable to measure the embedded derivative separately.

For financial liabilities, transaction costs are deducted from the amount of debt initially recognised. Such transactions costs are amortised over the terms of the instruments based on the effective interest rate method and are recorded as part of interest expense.

iii) Subsequent measurement

Financial assets at fair value through other comprehensive income and financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss are measured at fair value. Financial assets classified as amortized cost and other financial liabilities measured at amortized cost using the effective interest rate method.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

iv) Penghentian pengakuan

Bank menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kedaluwarsa, atau Bank mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana Bank secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak atau liabilitas atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Bank diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

Dalam transaksi dimana Bank secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, Bank menghentikan pengakuan aset tersebut jika Bank tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan kewajiban yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas. Dalam transfer dimana pengendalian atas aset masih dimiliki, Bank tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan berkelanjutan, dimana tingkat keberlanjutan Bank dalam aset yang ditransfer adalah sebesar perubahan nilai aset yang ditransfer.

Bank menghapusbukukan aset keuangan dan cadangan kerugian penurunan nilai terkait, pada saat Bank menentukan bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih seluruhnya. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan informasi seperti telah terjadinya perubahan signifikan pada posisi keuangan debitur/penerbit aset keuangan sehingga debitur/penerbit aset keuangan tidak lagi dapat melunasi kewajibannya, atau hasil penjualan agunan tidak akan cukup untuk melunasi seluruh eksposur Pinjaman yang diberikan.

v) Pengakuan pendapatan dan beban

a. Pendapatan dan beban bunga atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diakui dalam laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Nilai tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan penyisihan penurunan nilai. Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, suku bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto suatu aset (bila aset tersebut bukan merupakan aset keuangan yang mengalami penurunan nilai) atau pada biaya perolehan diamortisasi suatu liabilitas.

b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain diakui secara langsung dalam pendapatan komprehensif lain (sebagai bagian dari ekuitas), sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau diturunkan nilainya, kecuali keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai tukar untuk instrumen utang. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

vi) Reklasifikasi aset keuangan

Bank mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk mengelola aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan diamortisasi ke nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat sebesar nilai wajar. Selisih antara nilai tercatat dan nilai wajar diakui dalam laba rugi pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke biaya perolehan diamortisasi dicatat sebesar nilai wajar pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dikeluarkan dari ekuitas dan disesuaikan dengan nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari nilai wajar melalui laporan laba rugi ke nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari nilai wajar melalui laporan laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan diamortisasi dicatat sebesar nilai wajar.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

d. Financial Assets and Liabilities (Continued)

iv) Derecognition

The Bank derecognises a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or when it transfers the rights to receive the contractual cash flows on the financial asset in a transaction in which substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred. Any interest in transferred financial assets that is created or retained by the Bank is recognised as a separate asset or liability.

In transactions in which the Bank neither retains nor transfers substantially all the risks and rewards of ownership of a financial asset, the Bank derecognises the asset if it does not retain control over the asset. The rights and obligations retained in the transfer are recognised separately as assets and liabilities as appropriate. In transfers in which control over the asset is retained, the Bank continues to recognise the asset to the extent of its continuing involvement, determined by the extent to which it is exposed to changes in the value of the transferred asset.

The Bank writes off a financial asset and any related allowance for impairment losses, when the Bank determines that the financial asset is completely uncollectible. This determination is reached after considering information such as the occurrence of significant changes in the financial position of borrower/financial asset's issuer such that the borrower/financial asset's issuer can no longer pay the obligation, or that proceeds from collateral will not be sufficient to pay back the entire exposure.

v) Income and expense recognition

a. Interest income and expense on financial assets measured at fair value through other comprehensive income as well as financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost are recognized in the statement of profit or loss using the effective interest rate method.

The gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for allowance for impairment. In calculating interest income and expenses, the effective interest rate is applied to the gross carrying amount of an asset (when the asset is not a deteriorated financial asset) or to the amortized cost of a liability.

b. Gains and losses arising from changes in the fair value of financial assets fair value through other comprehensive income are recognized directly in other comprehensive income (as part of equity), until the financial asset is derecognized or impaired, except gain or loss arising from changes in exchange rate for debt instrument. When a financial asset is derecognized or impaired, the cumulative gains or losses previously recognized in equity are recognized in profit or loss.

vi) Reclassification of financial assets

The Bank reclassifies financial assets if and only if, the business model for managing financial assets changes.

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value through profit or loss are recorded at fair value. The difference between the recorded value and fair value is recognized in profit or loss on the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value classifications through other comprehensive are recorded at their fair values.

Reclassification of financial assets from fair value through other comprehensive income to fair value through profit or loss is recorded at fair value. Unrealized gains or losses are reclassified to profit or loss.

Reclassification of financial assets from fair value through other comprehensive income to the amortized cost is recorded at fair value at the date of reclassification. Unrealized gains or losses is removed from equity and is adjusted against the fair value.

Reclassifications on financial assets from fair value through profit or loss to fair value through other comprehensive income are recorded at fair value.

Reclassification of financial assets from fair value through profit or loss to amortized cost classification is recorded at fair value.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

vii) Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Bank atau pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

viii) Pengukuran biaya perolehan amortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal, dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya dan dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Kerugian penurunan nilai pada laporan keuangan dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok biaya perolehan diamortisasi, dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai kerugian penurunan nilai aset keuangan.

Tingkat suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi arus kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih pada saat pengakuan awal. Pada saat menghitung tingkat suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang.

Perhitungan suku bunga efektif mencakup biaya transaksi dan seluruh imbalan/provisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

ix) Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan di terima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transaction*) antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Bank memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Bank mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Suatu pasar dianggap aktif jika transaksi atas aset dan liabilitas terjadi dengan frekuensi dan *volume* yang memadai untuk menyediakan informasi penentuan harga secara berkelanjutan.

Jika harga kuotasi tidak tersedia di pasar aktif, Bank menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan *input* yang dapat diobservasi dan relevan serta meminimalkan penggunaan *input* yang tidak dapat diobservasi. Teknik penilaian yang dipilih menggabungkan semua faktor yang diperhitungkan oleh pelaku pasar dalam penentuan harga transaksi.

Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau di terima. Jika Bank menetapkan bahwa nilai wajar pada pengakuan awal berbeda dengan harga transaksi dan nilai wajar tidak dapat dibuktikan dengan harga kuotasi di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi, maka nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal disesuaikan untuk menanggukuhkan perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, perbedaan tersebut diakui dalam laba rugi berdasarkan umur dari instrumen tersebut namun tidak lebih lambat dari saat penilaian tersebut didukung sepenuhnya oleh data pasar yang dapat diobservasi atau saat transaksi ditutup.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

d. Financial Assets and Liabilities (Continued)

vii) Offsetting

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default in solvency or bankruptcy of the Bank or the counterparty.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by accounting standards.

viii) Amortised cost measurement

The amortised cost of a financial asset or financial liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, less principal repayments, plus or less the cumulative amortisation using the effective interest method of any difference between the initial amount recognised and the maturity amount and minus any allowance for impairment losses.

The impairment losses on financial assets is reported as a deduction from the carrying value of the financial assets classified as amortised cost and recognised in the statement of profit or loss as impairment losses on financial assets.

The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash flows through the expected life of the financial asset or financial liability (or, where appropriate, a shorter period) to the net carrying amount at initial recognition. When calculating the effective interest rate, the Bank estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, but does not consider any future credit losses.

The calculation of the effective interest rate includes transaction costs and all fees and provisions paid or received that are an integral part of the effective interest rate.

ix) Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Bank has access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

When available, the Bank measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument. A market is regarded as active if transactions for the asset or liability take place with sufficient frequency and volume to provide pricing information on an ongoing basis.

If there is no quoted price in an active market, then the Bank uses valuation techniques that maximize the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs. The chosen valuation technique incorporates all of the factors that market participants would take into account in pricing a transaction.

The best evidence of the fair value of a financial instrument at initial recognition is normally the transaction price, i.e., the fair value of the consideration given or received. If the Bank determines that the fair value at initial recognition differs from the transaction price and the fair value is evidenced neither by a quoted price in an active market for an identical asset or liability nor based on a valuation technique that uses only data from observable markets, then the financial instrument is initially measured at fair value, adjusted to defer the difference between the fair value at initial recognition and the transaction price. Subsequently, that difference is recognised in profit or loss on an appropriate basis over the life of the instrument but no later than when the valuation is wholly supported by observable market data or the transaction is closed out.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

ix) Pengukuran nilai wajar (Lanjutan)

Jika aset atau liabilitas yang diukur pada nilai wajar memiliki harga penawaran dan harga permintaan, maka Bank mengukur aset dan posisi *long* berdasarkan harga penawaran dan mengukur liabilitas dan posisi *short* berdasarkan harga permintaan.

Portfolio aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar, yang terekspos risiko pasar dan risiko kredit yang dikelola oleh Bank berdasarkan eksposur netonya baik terhadap risiko pasar ataupun risiko kredit, diukur berdasarkan harga yang akan diterima untuk menjual posisi *net long* (atau dibayar untuk mengalihkan posisi *net short*) untuk eksposur risiko tertentu. Penyesuaian pada level kelompok tersebut dialokasikan pada aset dan liabilitas individual berdasarkan penyesuaian risiko relatif dari masing-masing instrumen individual di dalam *portfolio*.

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat diklasifikasikan dalam tingkat hierarki nilai wajar, berdasarkan tingkat berikut:

- Level 1: Harga yang dikutip (tidak disesuaikan) di pasar aktif untuk aset atau kewajiban yang identik.
- Level 2: Input selain harga kuotasi yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (sebagai harga) atau tidak langsung (sebagai turunan dari harga).
- Level 3: Input untuk aset atau liabilitas berdasarkan input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas.

x) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan

PSAK 109 mengharuskan cadangan kerugian diakui sebesar kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*12-month ECL*) atau kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan (*lifetime ECL*). *Lifetime ECL* adalah kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari semua kemungkinan kejadian gagal bayar sepanjang umur ekspektasian suatu instrumen keuangan, sedangkan *ECL 12 bulan* adalah porsi dari kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari kemungkinan kejadian gagal bayar dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kerugian kredit ekspektasian atau *Expected Credit Losses (ECL)* diakui untuk seluruh instrumen utang keuangan, komitmen pinjaman dan jaminan keuangan yang diklasifikasikan sebagai *hold to collect/ hold to collect and sell* dan memiliki arus kas *Solely Payments of Principal and Interest (SPPI)*. Kerugian kredit ekspektasian tidak diakui untuk instrumen ekuitas yang ditetapkan sebagai *Fair Value through Other Comprehensive Income (FVOCI)*.

Bank menggunakan model yang kompleks yang menggunakan matriks *Probability of Default (PD)*, *Loss Given Default (LGD)* dan *Exposure at Default (EAD)*, yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif.

- **Probability of Default (PD)**
Probabilitas yang timbul di suatu waktu dimana debitur mengalami gagal bayar, dikalibrasikan sampai dengan periode 12 bulan dari tanggal laporan (*Stage 1*) atau sepanjang umur (*Stage 2 dan 3*) dan digabungkan pada dampak asumsi ekonomi masa depan yang memiliki risiko kredit. PD diestimasi pada *point in time* dimana hal ini berfluktuasi sejalan dengan siklus ekonomi.
- **Loss Given Default (LGD)**
Kerugian yang diperkirakan akan timbul dari debitur yang mengalami gagal bayar dengan menggabungkan dampak dari asumsi ekonomi masa depan yang relevan (jika ada) dimana hal ini mewakili perbedaan antara arus kas kontraktual yang akan jatuh tempo dengan arus kas yang diharapkan untuk diterima. Bank mengestimasi LGD berdasarkan data historis dari tingkat pemulihan dan memperhitungkan pemulihan yang berasal dari jaminan terhadap aset keuangan dengan mempertimbangkan asumsi ekonomi di masa depan jika relevan.
- **Exposure at Default (EAD)**
Perkiraan nilai eksposur neraca pada saat gagal bayar dengan mempertimbangkan bahwa perubahan ekspektasi yang diharapkan selama masa eksposur. Hal ini menggabungkan dampak penarikan fasilitas yang *committed* pembayaran pokok dan bunga, amortisasi dan pembayaran dipercepat, bersama dengan dampak asumsi ekonomi masa depan jika relevan.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

d. Financial Assets and Liabilities (Continued)

ix) Fair value measurement (Continued)

If an asset or a liability measured at fair value has a bid price and an ask price, then the Bank measures assets and long positions at a bid price and liabilities and short positions at an ask price.

Portfolios of financial assets and financial liabilities measured at fair value, that are exposed to market risk and credit risk that are managed by the Bank on the basis of the net exposure to either market or credit risk, are measured on the basis of a price that would be received to sell a net long position (or paid to transfer a net short position) for a particular risk exposure. Those portfolio-level adjustments are allocated to the individual assets and liabilities on the basis of the relative risk adjustment of each of the individual instruments in the portfolio.

All assets and liabilities which fair value is measured or disclosed in the financial statements can be classified in fair value hierarchy levels, based on following level:

- Level 1: Quoted price (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
- Level 2: Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (as a price) or indirectly (as derived from price).
- Level 3: Input for asset or liabilities based on unobservable inputs for the asset or liability.

x) Allowance for Impairment Losses on Financial Assets

SFAS 109 requires a loss allowance to be recognised at an amount equal to either 12-month expected credit losses (ECL) or lifetime ECLs. Lifetime ECLs are the ECLs that result from all possible default events over the expected life of a financial instrument, whereas 12-month ECLs are the portion of ECLs that result from default events that are possible within the 12 months after reporting date.

Expected Credit Losses (ECL) are recognized for all financial debt instruments, loan commitments and financial guarantees that are classified as hold to collect/hold to collect and sell and have cash flows that are Solely Payments of Principal and Interest (SPPI). Expected credit losses are not recognized for equity instruments designated at Fair Value through Other Comprehensive Income (FVOCI).

The Bank primarily uses sophisticated models that utilize the Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD) and Exposure at Default (EAD) metrics, discounted using the effective interest rate.

- **Probability of Default (PD)**
The probability at a point in time that a counterparty will default, calibrated over up to 12 months from the reporting date (*Stage 1*) or over the lifetime of the product (*Stage 2 and 3*) and incorporating the impact of forward-looking economic assumptions that have an effect on credit risk. PD is estimated at a point in time that means it will fluctuate in line with the economic cycle.
- **Loss Given Default (LGD)**
The loss that is expected to arise on default, incorporating the impact of relevant forward looking economic assumptions (if any), which represents the difference between the contractual cash flows due and those that the Bank expects to receive. The Bank estimates LGD based on the historical recovery rates and considers the recovery of any collateral that is integral to the financial assets, taking into account forward looking economic assumptions if relevant.
- **Exposure at Default (EAD)**
The expected balance sheet exposure at the time of default, taking into account that expected change in exposure over the lifetime of the exposure. This incorporates the impact of drawdowns of committed facilities, repayments of principal and interest, amortization and prepayments, together with the impact of forward looking economic assumptions where relevant.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

x) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan (Lanjutan)

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (Stage 1)

ECL diakui pada saat pengakuan awal instrumen keuangan dan merepresentasikan kekurangan kas sepanjang umur aset yang timbul dari kemungkinan gagal bayar di masa yang akan datang dalam kurun waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. ECL terus ditentukan oleh dasar ini sampai timbul peningkatan risiko kredit yang signifikan pada instrumen tersebut atau instrumen tersebut telah mengalami penurunan nilai kredit. Jika suatu instrumen tidak lagi dianggap menunjukkan peningkatan risiko kredit yang signifikan, maka ECL dihitung kembali berdasarkan basis dua belas bulan.

Peningkatan risiko kredit yang signifikan (Stage 2)

Jika aset keuangan mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan (SICR) sejak pengakuan awal, kerugian kredit ekspektasian diakui atas kejadian gagal bayar yang mungkin terjadi sepanjang umur aset. Peningkatan signifikan dalam risiko kredit dinilai dengan membandingkan risiko gagal bayar atas eksposur pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar saat pengakuan awal (setelah memperhitungkan perjalanan waktu dari akun tersebut). Signifikan tidak berarti signifikan secara statistik, juga tidak dinilai dalam konteks perubahan dalam ECL. Perubahan atas risiko gagal bayar dinilai signifikan atau tidak, dinilai menggunakan faktor kuantitatif. Aset keuangan dengan tunggakan 30 hari atau lebih dan tidak mengalami penurunan nilai akan selalu dianggap telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan.

Eksposur yang mengalami penurunan nilai kredit atau gagal bayar (Stage 3)

Aset keuangan yang mengalami penurunan nilai (atau gagal bayar) merupakan aset yang setidaknya telah memiliki tunggakan lebih dari 90 hari atas pokok dan/atau bunga. Aset keuangan juga dianggap mengalami penurunan nilai kredit dimana debitur kemungkinan besar tidak akan membayar dengan terjadinya satu atau lebih kejadian yang teramati yang memiliki dampak menurunkan jumlah estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan tersebut. Cadangan kerugian penurunan nilai terhadap aset keuangan yang mengalami penurunan nilai ditentukan berdasarkan penilaian terhadap arus kas yang dapat dipulihkan berdasarkan sejumlah skenario, termasuk realisasi jaminan yang dimiliki jika memungkinkan. ECL akan mencerminkan rata-rata tertimbang dari skenario berdasarkan probabilitas dari skenario yang relevan untuk terjadi. Cadangan kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang diperkirakan akan dipulihkan, didiskontokan pada suku bunga efektif awal, dan nilai tercatat bruto instrumen sebelum penurunan nilai kredit.

Periode yang diperhitungkan ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian adalah periode yang lebih pendek antara umur ekspektasian dan periode kontrak aset keuangan. Umur ekspektasian dapat dipengaruhi oleh pembayaran dimuka dan periode kontrak maksimum melalui opsi perpanjangan kontrak. Untuk *portfolio revolving* tertentu, umur ekspektasian dinilai sepanjang periode dimana Bank terekspos dengan risiko kredit (berdasarkan durasi waktu yang dibutuhkan untuk fasilitas kredit ditarik), bukan sepanjang periode kontrak.

Untuk aset yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, saldo di neraca mencerminkan aset bruto dikurangi kerugian kredit ekspektasian. Untuk instrumen utang dalam kategori FVOCI, saldo di neraca mencerminkan nilai wajar dari instrumen, dengan cadangan kerugian kredit ekspektasian dibukukan terpisah sebagai cadangan pada pendapatan komprehensif lain.

Untuk menentukan kerugian kredit ekspektasian komponen-komponen ini akan diperhitungkan secara bersama-sama dan didiskontokan ke tanggal laporan keuangan menggunakan diskonto berdasarkan suku bunga efektif. Dasar *input*, asumsi dan teknik estimasi diungkapkan dalam Catatan 3.

Ketika ada sejumlah kewajiban debitur yang dianggap tidak bisa diselesaikan, maka cadangan kerugian penurunan nilai kredit Stage 3 akan dibuat. Cadangan kerugian penurunan nilai Stage 3 ini adalah selisih antara jumlah pinjaman yang tercatat dan probabilitas tertimbang nilai sekarang dari estimasi arus kas masa depan yang telah dihitung menggunakan tiga skenario (antara lain dari hasil penyelesaian terbaik, terburuk atau yang paling mungkin) dimana Bank akan memberikan bobot probabilitas individu untuk setiap skenario pemulihan yang diidentifikasi berdasarkan rencana *workout* untuk masing-masing debitur individu.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

d. Financial Assets and Liabilities (Continued)

x) Allowance for Impairment Losses on Financial Assets (Continued)

12-month expected credit losses (Stage 1)

ECL are recognised at the time of initial recognition of a financial instrument and represent the lifetime cash shortfalls arising from possible default events up to twelve months into the future from the reporting date. ECL continue to be determined on this basis until there is either a significant increase in the credit risk of an instrument or the instrument becomes credit-impaired. If an instrument is no longer considered to exhibit a significant increase in credit risk, ECL will revert to being determined on a twelve month basis.

Significant increase in credit risk (Stage 2)

If a financial asset experiences a significant increase in credit risk (SICR) since initial recognition, an expected credit loss provision is recognised for default events that may occur over the lifetime of the asset. Significant increase in credit risk is assessed by comparing the risk of default of an exposure at the reporting date to the risk of default at origination (after taking into account the passage of time). Significant does not mean statistically significant nor is it assessed in the context of changes in ECL. Whether a change in the risk of default is significant or not is assessed using quantitative factors. Financial assets that are 30 or more days past due and not credit impaired will always be considered to have experienced a significant increase in credit risk.

Credit impaired (or defaulted) exposures (Stage 3)

Financial assets that are credit impaired (or in default) represent those that are at least 90 days past due in respect of principal and/or interest. Financial assets are also considered to be credit impaired where the debtors are unlikely to pay on the occurrence of one or more observable events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of the financial asset. Loss provisions against credit impaired financial assets are determined based on an assessment of the recoverable cash flows under a range of scenarios, including the realisation of any collateral held where appropriate. The ECL will reflect weighted average of the scenarios based on the probability of the relevant scenario to occur. The loss provisions held represent the difference between the present value of the cash flows expected to be recovered, discounted at the instrument's original effective interest rate, and the gross carrying value of the instrument prior to any credit impairment.

The period considered when measuring expected credit loss is the shorter of the expected life and the contractual term of the financial asset. The expected life may be impacted by prepayments and the maximum contractual term by extension options. For certain revolving portfolios, including credit cards, the expected life is assessed over the period that the Bank is exposed to credit risk (which is based on the length of time it takes for credit facilities to be withdrawn) rather than the contractual term.

For assets measured at amortised cost, the statement of financial position amount reflects the gross asset less the expected credit losses. For debt instruments held at FVOCI, the statement of financial position amount reflects the instrument's fair value, with the expected credit loss allowance held as a separate reserve within other comprehensive income.

To determine the expected credit loss, these components are multiplied together and discounted to the statement of financial position date using the effective interest rate as the discount rate. The basis of inputs, assumptions and estimation technique are disclosed in Note 3.

Where any amount is considered irrecoverable, a Stage 3 credit impairment provision is raised. This Stage 3 provision is the difference between the loan carrying amount and the probability weighted present value of estimated future cash flows, reflecting minimum 3 scenarios (among others typically the best, worst or most likely recovery outcomes) where the Bank assigns individual probability weighting for each recovery scenario that has been identified based on the workout plan for each individual debtors.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

x) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan (Lanjutan)

Proyeksi arus kas juga mencakup jaminan yang dapat direalisasi, nilai-nilai yang digunakan akan memperhitungkan dampak dari informasi ekonomi di masa mendatang (*forward looking*). Keadaan dari masing-masing debitur secara individu dipertimbangkan ketika memperkirakan arus kas masa depan dan kapan penyelesaian kewajiban diterima dengan memasukkan unsur pertimbangan yang signifikan.

Kerugian kredit ekspektasian atas komitmen Pinjaman yang diberikan dan jaminan keuangan diakui pada liabilitas lain-lain. Jika instrumen keuangan mencakup komponen aset keuangan dan komitmen yang belum ditarik dan tidak dapat dipisahkan atas kerugian kredit ekspektasian pada komponen ini, jumlah kerugian kredit atas komitmen tersebut diakui bersamaan dengan kerugian kredit atas aset keuangan. Dalam kondisi jumlah kerugian kredit ekspektasian gabungan melebihi jumlah tercatat bruto dari aset keuangan, maka kerugian kredit ekspektasian diakui sebagai liabilitas lain-lain.

Pemulihan aset keuangan yang dihapuskan

Ketika pinjaman tidak tertagih, pinjaman tersebut dihapuskan terhadap cadangan kerugian penurunan nilai yang terkait. Pinjaman tersebut dihapusbukan setelah semua prosedur yang diperlukan telah diselesaikan dan jumlah kerugian telah ditentukan. Pemulihan aset keuangan yang telah dihapusbukan pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukan dari tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain pendapatan bunga.

e. Transaksi dalam Mata Uang Asing dan Penjabaran

Mata Uang Pelaporan

Bank menyelenggarakan pembukuannya dalam mata uang Rupiah (Rp). Transaksi dalam mata uang selain Rupiah yang terjadi di sepanjang tahun dicatat dengan nilai kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi yang bersangkutan.

Transaksi dan Saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs penutup. Kurs yang digunakan sebagai acuan adalah kurs yang dikeluarkan oleh Reuters. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui didalam laporan laba rugi, kecuali jika ditanggihkan di dalam ekuitas sebagai lindung nilai arus kas dan lindung nilai investasi bersih yang memenuhi syarat.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang berhubungan dengan pinjaman, serta kas dan setara kas disajikan pada laporan laba rugi sebagai "penghasilan atau biaya keuangan". Keuntungan atau kerugian neto selisih kurs lainnya disajikan pada laporan laba rugi sebagai "kerugian/(keuntungan) lain-lain-neto".

Perubahan nilai wajar efek moneter yang didenominasikan dalam mata uang asing yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual dianalisa antara selisih pejabaran yang timbul dari perubahan nilai tercatat efek lainnya. Selisih penjabaran terkait dengan perubahan biaya perolehan diamortisasi diakui di dalam laporan laba rugi, dan perubahan nilai tercatat lainnya diakui pada laba komprehensif lainnya.

Selisih penjabaran aset dan liabilitas keuangan non-moneter yang dicatat pada nilai wajar diakui sebagai bagian keuntungan atau kerugian perubahan nilai wajar. Sebagai contoh, selisih penjabaran aset dan liabilitas keuangan non-moneter seperti ekuitas yang dimiliki dan dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba-rugi sebagai bagian keuntungan atau kerugian nilai wajar dan selisih penjabarannya pada aset non-moneter seperti tersedia ekuitas yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

d. Financial Assets and Liabilities (Continued)

x) Allowance for Impairment Losses on Financial Assets (Continued)

The cash flows projection include realisable collateral, the values used will incorporate the impact of forward looking economic information. The individual circumstances of each debtor are considered when estimates future cash flows and timing of future recoveries which involve significant judgment.

Expected credit loss on loan commitments and financial guarantees is recognised as other liabilities. Where a financial instrument includes both financial asset and an undrawn commitment and it is not possible to separately identify the expected credit loss on these components, expected credit loss amounts on the loan commitment are recognised together with expected credit loss amounts on the financial asset. To the extent the combined expected credit loss exceeds the gross carrying amount of the financial asset, the expected credit loss is recognised as other liabilities.

Recoveries of written-off financial assets

When a loan is uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment loss. Such loans are written off after all the necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined. The recoveries of written-off financial assets in the current year are credited by adjusting the allowance for impairment losses accounts. Recoveries of written-off financial assets from previous years are recorded as operational income other than interest income.

e. Foreign Currency Transaction and Translations

Reporting Currency

The Bank maintains their accounting records in Indonesian Rupiah (Rp). Transactions during the year involving currencies other than Rupiah are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions were made.

Transactions and balances

Foreign currency transactions are translated into Rupiah using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. At each reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are translated into Rupiah using the closing exchange rate. Exchange rate used as benchmark is the rate which is issued by Reuters. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at period-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in the profit or loss, except when deferred in equity as qualifying cash flow hedges and qualifying net investment hedges.

Foreign exchange gains and losses that relate to borrowings and cash and cash equivalents are presented in the profit or loss within "finance income or costs". All other net foreign exchange gains and losses are presented in the profit or loss within "other (losses)/gains - net".

Changes in the fair value of monetary securities denominated in foreign currency classified as available-for-sale are analysed between translation differences resulting from changes in the amortised cost of the security and other changes in the carrying amount of the security. Translation differences related to changes in amortised cost are recognised in profit or loss, and other changes in carrying amount are recognised in other comprehensive income.

Translation differences on non-monetary financial assets and liabilities carried at fair value are reported as part of the fair value gain or loss. For example, translation differences on non-monetary financial assets and liabilities such as equities held at fair value through profit or loss are recognised in profit or loss as part of the fair value gain or loss and translation differences on non-monetary assets such as equities classified as available-for-sale financial assets are recognised in other comprehensive income.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

e. Transaksi dalam Mata Uang Asing dan Penjabaran (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 menggunakan kurs tengah Reuters pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat, kurs mata uang asing yang digunakan untuk penjabaran mata uang asing terhadap Rupiah adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Dolar Amerika Serikat	16.095	15.397

f. Giro Wajib Minimum

Bank dipersyaratkan untuk memiliki Giro Wajib Minimum (GWM) dalam mata uang Rupiah dalam kegiatannya sebagai bank umum serta GWM dalam mata uang asing dalam kegiatannya melakukan transaksi mata uang asing. GWM disimpan dalam bentuk giro pada Bank Indonesia.

g. Giro pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Lihat catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

h. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain terdiri dari Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI), *interbank call money*, tabungan, *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD), dan deposito berjangka.

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Lihat catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

i. Efek-efek

Efek-efek yang dimiliki terdiri dari Surat Utang Negara (SUN), obligasi bank, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang diperdagangkan di bursa efek.

Efek-efek pada awalnya disajikan sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi dan setelah pengakuan awal dicatat sesuai dengan klasifikasi sebagai dimiliki hingga jatuh tempo.

Setelah pengakuan awal, efek-efek untuk tujuan investasi diukur sesuai dengan klasifikasinya sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penyisihan kerugian wajib diakui sesuai dengan pedoman dari Bank Indonesia dan disajikan sebagai pengurang saldo investasi pada efek-efek.

Lihat catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

j. Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali (Repo) dan Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (Reverse Repo)

Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*) disajikan sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar harga pembelian kembali yang disepakati dikurangi selisih antara harga jual dan harga pembelian kembali yang disepakati. Selisih antara harga jual dan harga pembelian kembali yang disepakati tersebut diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif sebagai beban bunga selama jangka waktu sejak surat berharga tersebut dijual hingga saat dibeli kembali.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

e. Foreign Currency Transaction and Translations (Continued)

As of December 31, 2024 and 2023 using the Reuters' middle rates at 16:00 Western Indonesian Time, the foreign currency rates used for translations of foreign currencies to Rupiah are as follows:

	2024	2023	United States Dollar (USD)
Dolar Amerika Serikat	16.095	15.397	

f. The Minimum Statutory Reserve

The Bank is required to maintain statutory reserves (GWM) in Rupiah for conventional banking and statutory reserves in foreign currencies for foreign exchange transactions. The statutory reserves are maintained in the form of current accounts with Bank Indonesia.

g. Current accounts with Bank Indonesia and Other Banks

Current account with Bank Indonesia and Other Bank are stated at amortized cost using the effective interest rate method less allowance for impairment losses.

Refer to note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

h. Placements with Bank Indonesia and Other Banks

Placements with Bank Indonesia and other banks consists of Bank Indonesia Deposit Facility, *interbank call money*, saving, *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD), and time deposit.

Placements with Bank Indonesia and other banks are initially measured at fair value plus incremental direct transaction costs, and subsequently measured at their amortized cost using the effective interest rate method less allowance for impairment losses.

Refer to note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

i. Securities

Securities owned consist of Government Debt Securities (SUN), bank bonds, Bank Indonesia Rupiah Securities (SRBI) which are traded on the stock exchange.

Marketable securities are initially measured at fair value plus transaction costs and subsequently accounted for in accordance with their classification as held to maturity.

Subsequently accounted for, securities for investment purposes are measured according to their classification as measured at amortized cost using the effective interest rate method.

Allowance for possible losses are recognized in accordance with the guidelines of Bank Indonesia and are stated as a deduction of investments in marketable securities.

Refer to note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

j. Marketable Securities Sold Under Repurchase Agreement (Repo) and Marketable Securities Purchased Under Resale Agreement (Reverse Repo)

Marketable securities sold under repurchased agreements (*repo*) are presented as liabilities in the statement of financial position at the agreed repurchase price less the difference between the selling price and agreed repurchase price. The difference between the selling price and agreed repurchase price is amortised using effective interest method as interest expense over the period commencing from the selling date to the repurchase date.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

j. Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali (Repo) dan Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (Reverse Repo) (Lanjutan)

Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

Surat berharga yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali disajikan sebagai aset dalam laporan posisi keuangan sebesar harga beli ditambah dengan pendapatan bunga yang sudah diakui tetapi belum diterima, dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai, jika diperlukan.

Pada pengukuran awal, surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) disajikan sebesar nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

Lihat catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

k. Instrumen Keuangan Derivatif

Dalam melakukan usaha bisnisnya, Bank melakukan transaksi instrumen keuangan derivatif seperti kontrak berjangka mata uang asing, swap mata uang asing, swap atas suku bunga, dan transaksi spot untuk mengelola eksposur pada risiko pasar seperti risiko mata uang dan risiko tingkat suku bunga.

Instrumen keuangan derivatif diakui di laporan posisi keuangan pada nilai wajar. Setiap kenaikan nilai wajar kontrak derivatif dicatat sebagai aset apabila memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas apabila memiliki nilai wajar negatif.

Tagihan dan liabilitas derivatif diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Keuntungan atau kerugian yang terjadi dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi.

Nilai wajar instrumen derivatif ditentukan berdasarkan diskonto arus kas dan model penentu harga atau harga yang diberikan oleh broker (quoted price) atas instrumen lainnya yang memiliki karakteristik serupa.

Kontrak berjangka mata uang asing, swap mata uang asing dan cross currency swap dan tingkat suku bunga swap dilakukan untuk tujuan pendanaan dan perdagangan.

l. Pinjaman yang Diberikan

Pinjaman yang diberikan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat disetarakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utang dan bunganya setelah jangka waktu tertentu, dan tagihan yang berasal dari transaksi perdagangan yang telah jatuh tempo yang belum diselesaikan dalam waktu 15 (lima belas) hari.

Pinjaman yang diberikan diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi

Pinjaman yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai.

Pinjaman sindikasi dan pinjaman penerusan dicatat sesuai dengan porsi pinjaman yang risikonya ditanggung oleh Bank.

Lihat catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

Setelah pengakuan awal, Pinjaman yang diberikan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar sesuai dengan klasifikasinya masing-masing. Untuk Pinjaman yang diberikan yang diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi, setelah pengakuan awal diukur menggunakan suku bunga efektif. Sedangkan untuk Pinjaman yang diberikan yang diklasifikasikan sebagai FVTPL, setelah pengakuan awal diukur pada nilai wajar dimana keuntungan atau kerugian atas perubahan nilai wajar dicatat pada pendapatan transaksi perdagangan-bersih.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

j. Marketable Securities Sold Under Repurchase Agreement (Repo) and Marketable Securities Purchased Under Resale Agreement (Reverse Repo) (Continued)

Marketable securities sold under repurchased agreement are classified as amortized cost.

Marketable securities purchased under resale agreements are presented as an asset in the statement of financial position at the purchase price added with interest income recognised but not yet received, less allowance for impairment losses, where appropriate.

Marketable securities purchased under resale agreement (reverse repo) are initially measured at fair value plus directly attributable transaction costs.

Marketable securities purchased under resale agreement (reverse repo) are classified as amortized cost.

Refer to note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

k. Derivative Financial Instruments

In the normal course of its business, the Bank enters into transactions involving derivative financial instruments such as foreign currency forward contracts, foreign currency swaps, interest rate swaps, and spot transactions to manage exposures on market risk, such as currency risk and interest rate risk.

Derivatives financial instruments are recognized in the statement of financial position at fair value. Each increase in fair value derivative contract is carried as asset when the fair value is positive and as liability when the fair value is negative.

Derivatives receivable and payable are classified as financial assets and liabilities at fair value through profit or loss.

Gains or losses resulting from fair value changes are recognized in the statement of profit or loss.

The fair value of derivative instruments is determined based on discounted cash flows and pricing models or quoted prices from brokers of other instruments with similar characteristics.

Foreign currency forward contracts, foreign currency swaps, and cross currency and interest rate swaps are for funding and trading purposes.

l. Loans

Loans represent funds provided or receivables that can be considered as equivalents, based on agreements or financing contracts with borrowers, where borrowers are required to repay their debts with its interest after a specified period of time, and receivables from trading of financial instruments that already at maturity which have not been settled within 15 (fifteen) days.

Loans are classified as amortized cost

Loans given which are initially measured at fair value plus its transaction costs that are directly attributable and additional costs to obtain the financial assets, and after the initial measurement at cost to be amortized using the effective interest rate method less allowance for impairment losses.

Syndicated loans and two step loans are recorded according to the proportion of risks borne by the Bank.

Refer to note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

Subsequent to initial recognition, loans are measured at amortised cost or fair value depending on the respective classification. For loan which classified as amortised cost is subsequently measured using the effective interest method. While for loans which classified as fair value through profit or loss are subsequently carried at fair value, with gains or losses arising from changes in fair value are recorded in net trading income.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

I. Pinjaman yang Diberikan (Lanjutan)

Bank mencatat restrukturisasi kredit bermasalah berdasarkan jenis restrukturisasi.

Dalam restrukturisasi kredit bermasalah yang dilakukan dengan penerimaan aset (termasuk kepentingan ekuitas debitur), Bank mencatat aset tersebut (termasuk kepentingan ekuitas) sebesar nilai wajarnya pada saat restrukturisasi. Kelebihan nilai tercatat pinjaman yang diberikan diatas nilai wajar aset yang diterima setelah dikurangi estimasi biaya untuk menjual aset tersebut, diakui sebagai kerugian dalam laba rugi tahun berjalan.

Hanya dalam restrukturisasi kredit yang bermasalah melibatkan modifikasi persyaratan kredit, akun bank untuk efek restrukturisasi prospektif dan tidak mengubah nilai buku kredit pada saat restrukturisasi, kecuali jumlahnya melebihi nilai sekarang dari total penerimaan kas masa depan yang ditentukan dalam kebijakan baru.

Jika nilai sekarang dari total penerimaan kas masa depan yang ditentukan dalam persyaratan baru lebih rendah dari nilai tercatat pinjaman sebelum restrukturisasi, Bank mengurangi saldo pinjaman dengan jumlah yang sama dengan nilai sekarang dari total penerimaan kas masa depan. Jumlah pengurangan tersebut diakui sebagai cadangan kerugian penurunan nilai.

Saat arus kas kontraktual atas aset keuangan direnegosiasi atau dimodifikasi dan renegotiasi atau modifikasi tersebut tidak menghasilkan penghentian pengakuan aset keuangan, Bank menghitung ulang jumlah tercatat bruto aset keuangan dan mengakui keuntungan atau kerugian yang timbul dari modifikasi dalam laporan laba rugi pada akun pendapatan bunga dan beban modifikasi yang disajikan secara terpisah. Jumlah tercatat bruto aset keuangan dihitung ulang sebagai nilai kini dari arus kas kontraktual yang telah direnegosiasi atau dimodifikasi yang didiskontokan dengan suku bunga efektif awal aset keuangan. Biaya atau pendapatan jasa yang terjadi mengubah jumlah tercatat aset keuangan yang telah dimodifikasi dan diamortisasi selama sisa jangka waktu aset keuangan modifikasian tersebut.

m. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Dalam menjalankan usahanya, Bank melakukan transaksi dengan pihak - pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 224 (sebelumnya PSAK 7) tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", antara lain:

- Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan sesama entitas anak saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
 - Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan. (Catatan 35).

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

I. Loans (Continued)

The Bank accounts for troubled debt restructuring in accordance with the type of restructuring.

In troubled debt restructuring which involves a repossession of assets (including an equity interest of the debtor), the Bank records those assets (including an equity interest) at their fair values at the time of restructuring. The excess of the carrying amount of the loans over the fair value of assets received less estimated costs to sell, is recognised as a loss in the current year profit or loss.

In troubled debt restructuring which only involves modification of the credit terms, the Bank accounts for the restructuring effect prospectively and does not change the carrying amount of the loans at the time of restructuring, unless the amount exceeds the present value of the total future cash receipts specified in the new terms.

If the present value of the total future cash receipts specified in the new terms is lower than the carrying amount of the loans prior to restructuring, the Bank reduces the loans balance to the amount equal to the present value of the total future cash receipts. The amount of the reduction is recognised as allowance for impairment losses.

When the contractual cash flows of a financial asset are renegotiated or otherwise modified and the renegotiation or modification does not result in the derecognition of that financial asset, the Bank recalculates the gross carrying amount of financial assets and recognizes the gain or loss arising from the modification in the profit or loss account in the interest income and modification expense accounts which are presented separately. The gross carrying amount of the financial asset shall be recalculated as the present value of the renegotiated or modified contractual cash flows that are discounted at the financial asset's original effective interest rate. Any costs or fees incurred adjust the carrying amount of the modified financial asset and are amortised over the remaining term of the modified financial asset.

m. Transaction with Related Parties

In carrying out its business, the Bank conducts transactions with related parties as defined in SFAS 224 (previously SFAS 7) concerning "Related Party Disclosures", among others:

- A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:
 - has control or joint control over the reporting entity;
 - has significant influence over the reporting entity; or
 - is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
 - The entity, and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
 - One entity is an associate or joint venture of another entity (or an associate or joint venture that is a member of a business group of which the other entity is a member).
 - Both entities are joint ventures of the same third party.
 - One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
 - The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
 - The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
 - A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).
 - The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the financial statements. (Note 35).

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

n. Penyertaan Saham

Penyertaan saham merupakan penanaman dana dalam bentuk saham pada perusahaan non publik yang bergerak di bidang jasa keuangan yang tidak melalui pasar modal untuk tujuan jangka panjang.

Investasi dengan persentase kepemilikan di bawah 20% dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dicatat dengan nilai wajar dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Investasi saham ini diklasifikasikan sebagai Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain dengan pemilihan yang tidak dapat dibatalkan jika tidak diperdagangkan di bursa efek.

Penyertaan sementara pada perusahaan debitur timbul akibat konversi pinjaman yang diberikan menjadi saham. Pada saat pengakuan awal, saham yang diterima diakui dengan nilai wajar. Selanjutnya, saham tersebut dinilai menggunakan metode ekuitas apabila Bank memiliki pengaruh signifikan terhadap investees dan nilai wajar apabila Bank BPD Bali tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap investees. Kerugian penurunan nilai diakui apabila terdapat penurunan permanen atas penyertaan sementara dengan menggunakan metode *individual assessment*.

Penyertaan sementara dihapuskan dari laporan posisi keuangan apabila telah melampaui jangka waktu 5 tahun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum" yang berlaku sejak 1 Januari 2020. Sebelumnya, Bank mengikuti Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum" dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

o. Aset Tetap

1) Kepemilikan Langsung

Aset tetap disusutkan, kecuali tanah, dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai (jika ada).

Aset tetap, kecuali tanah dan bangunan, disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun ganda (*double-declining balance method*). Bangunan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*). Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan mengalokasikan harga perolehan sepanjang estimasi masa manfaatnya sebagai berikut:

	Metode / Method	Tarif / Rate	Tahun / Years	
Bangunan				Buildings
Permanen	Garis Lurus/	5%	20	Permanent
Bukan Permanen	Straight Line	10%	10	Non Permanent
Perlengkapan				Fixtures
Kelompok 1		50%	4	Cluster 1
Kelompok 2	Saldo Menurun Berganda /	25%	8	Cluster 2
Kelompok 3	Double Declining	12,5%	16	Cluster 3
Kelompok 4		10%	20	Cluster 4

Tanah dinyatakan berdasarkan harga perolehan dan tidak disusutkan.

Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap, saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat perbaikan yang signifikan dilakukan, biaya perbaikan itu diakui ke dalam jumlah tercatat (*carrying amount*). Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

2) Aset dalam Penyelesaian

Akumulasi biaya konstruksi aset tetap dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi selesai dan aset tetap siap untuk digunakan. Penyusutan mulai dibebankan pada tanggal yang sama.

Bank memilih untuk menggunakan metode biaya untuk mengukur aset tetapnya.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

n. Investment In Shares

Investments in shares represent investments in non publicly listed companies engaged in the financial services industry held for long term purposes.

Investment with an ownership interest below 20% and have no significant influence are carried at fair value reduced by an allowance for impairment losses.

These investment in shares are classified as Fair Value through OCI by irrevocable election if they are not trade in the stock exchange.

Temporary investments in debtor companies arise from conversion of loans to shares/ equity. At initial recognition, shares received were recognized at fair value. Subsequently, the shares are recognized using equity method if Bank has significant influence over the investees or at fair value if Bank does not have significant influence over the investees. Loss from permanent decline in investment values of temporary investment are recognized using the individual assessment method.

Temporary investment is written-off from the statement of financial position if it is held for more than 5 years in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 40/POJK.03/2019 dated December 19, 2019 on "Asset Quality Ratings for Commercial Banks" which was effective on January 1, 2020. Previously, the Bank follows Bank Indonesia Regulation No. 14/15/PBI/2012 dated October 24, 2012 regarding "Asset Quality Rating for Commercial Banks" and Circular Letter of Bank Indonesia No.15/28/DPNP dated July 31, 2013 regarding Asset Quality Ratings for Commercial Banks.

o. Fixed Assets

1) Direct Ownership

Fixed assets depreciation, except land, are recorded at cost less accumulated depreciation and impairment loss (if any).

Fixed assets, except land and building, is calculated using the double declining balance method. The building is calculated using the straight line method. Fixed assets, except land, depreciation over their estimated useful lives as follows:

Land is recorded at cost and not depreciated.

Acquisition cost includes the cost of replacing a part of the fixed assets when that cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in profit or loss incurred.

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in profit or loss in the year the asset is derecognized.

2) Construction in Progress

The accumulated costs of the construction of fixed assets are capitalized as assets under construction. These costs are reclassified to the appropriate fixed asset account when the construction is completed and the asset is ready to use. Depreciation is charged from this date.

The Bank has chosen the cost model for the valuation of its fixed assets.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

o. Aset Tetap (Lanjutan)

PSAK No. 236 (sebelumnya PSAK 48) tentang "Penurunan Nilai Aset" mensyaratkan bahwa nilai tercatat aset tetap dikaji ulang setiap tanggal laporan posisi keuangan untuk menilai apakah aset tetap tersebut nilai tercatatnya lebih tinggi dari jumlah yang dapat diperoleh kembali (*recoverable amount*) dari aset tetap tersebut. Jika nilai tercatat aset melebihi taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset tetap tersebut.

Maka nilai tercatat aset tetap harus diturunkan menjadi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tetap tersebut, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual bersih dan nilai pakai.

Klasifikasi Hak Guna Bangunan tergantung pada substansi transaksi, dan bukan pada bentuk hukumnya. Akibatnya, jika suatu kontrak memberikan sesuatu yang secara substansi merupakan pembelian aset tetap, maka hak tersebut memenuhi definisi aset tetap dan dicatat sesuai dengan PSAK 216 (sebelumnya PSAK 16) Aset Tetap.

Oleh karena itu, pengalihan pengendalian atas aset yang mendasarinya menjadi pertimbangan utama dalam menentukan apakah transaksi tersebut merupakan pembelian aset tetap berdasarkan PSAK 216, atau transaksi sewa sesuai PSAK 116 (sebelumnya PSAK 73).

Bank menyimpulkan bahwa hak guna bangunan yang dimilikinya diklasifikasikan sebagai aset tetap berdasarkan PSAK 216 karena Bank memperoleh kendali atas hak guna tanah setelah memperoleh hak guna bangunan (HGB) sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 115 (sebelumnya PSAK 72) Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan.

p. Aset Takberwujud

Perangkat lunak yang dibeli oleh Bank dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai (jika ada).

Perangkat lunak komputer yang diperoleh dikapitalisasi sebesar biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan membuat piranti lunak tersebut siap untuk digunakan. Perangkat lunak komputer diamortisasi dengan menggunakan metode saldo menurun ganda (*double-declining balance method*) selama 4 (empat) tahun.

Biaya yang berhubungan dengan pengembangan atau pemeliharaan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada periode terjadinya.

q. Penurunan Nilai Aset Non - Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Bank menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Bank akan membuat estimasi atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

Nilai tercatat aset non-keuangan ditelaah untuk penurunan nilai apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat suatu aset tidak dapat dipulihkan. Jika ada indikasi seperti itu dan nilai tercatat suatu aset melebihi taksiran jumlah terpulihkan, aset atau unit penghasil kas diturunkan nilainya ke jumlah terpulihkan. Taksiran jumlah terpulihkan aset adalah yang lebih tinggi dari nilai wajar aset dan nilai pakai.

Nilai wajar adalah nilai yang diperoleh dari penjualan aset dalam transaksi yang wajar dikurangi biaya penjualan sedangkan nilai pakai adalah nilai kini dari estimasi arus kas masa mendatang yang diharapkan muncul dari penggunaan aset secara terus menerus dan dari penjualannya pada akhir masa pakainya. Untuk aset yang tidak menghasilkan arus kas masuk independen yang besar, jumlah terpulihkan ditentukan untuk unit penghasil kas terkait aset tersebut. Rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi.

Dalam membuat taksiran nilai pakai, estimasi arus kas masa mendatang didiskontokan ke nilai sekarang dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar saat ini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik untuk aset.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

o. Fixed Assets (Continued)

SFAS No. 236 (previously SFAS 48), "Impairment of Assets" required the carrying amount of the fixed asset have to review at each statement of financial position date to assess whether the carrying amount is more than recoverable amount from the fixed assets. If the carrying amount is more than recoverable amount.

The carrying amount had to decrease into recoverable amount from its, determined using more than amount between the net sold pricing and used value.

Classifying land use rights depends on the substance of the transaction, and not on its legal form. Consequently, if a contract provides something that in substance represents the purchase of fixed assets, then the rights meet the definition of fixed assets and are recorded in accordance with SFAS 216 (previously SFAS 16) Property, Plant and Equipment.

Accordingly, the transfer of control over underlying assets becomes the main consideration in determining whether the transaction is a purchase of fixed assets under SFAS 216, or a lease transaction under SFAS 116 (previously SFAS 73).

The Bank has concluded that the land use rights it holds are classified as fixed assets under SFAS 216 as it obtains control of the land use rights (HGB) as defined under SFAS 115 (previously SFAS 72) Revenue from contracts with customers.

p. Intangible Assets

Software acquired by Bank is stated at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses (if any).

Acquisition of the software in capitalized as at cost incurred to acquired and make the software ready for use. The software is amortized using the double declining balance method over 4 (four) years.

Cost of development and maintenance program software is recognized as at the transaction date.

q. Impairment of Non - Financial Assets

The Bank assesses at each annual reporting period whether there is an indication that an asset may impaired. If any such indication exists, Bank makes an estimate of the asset's recoverable amount.

The carrying values of non-financial assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of an asset may not be recoverable. If such indication exists and where the carrying amount of an asset exceeds the estimated recoverable amount, the assets or cash-generating units are written down to their recoverable amount. The estimated recoverable amount of an asset is the higher of an asset's fair value and value-in-use.

The fair value is the amount obtainable from the sale of an asset in an arm's length transaction less costs of disposal while value-in-use is the present value of estimated future cash flows expected to arise from the continuing use of an asset and from its disposal at the end of its useful life. For an asset that does not generate largely independent cash inflows, the recoverable amount is determined for the cash-generating unit to which the asset belongs. Impairment losses are recognised in profit or loss.

In assessing value-in-use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

q. Penurunan Nilai Aset Non - Keuangan (Lanjutan)

Untuk aset non-keuangan tidak termasuk aset takberwujud dengan masa manfaat tidak terbatas, penilaian dilakukan pada setiap tanggal pelaporan, apakah ada indikasi bahwa kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui mungkin tidak lagi ada atau mungkin telah menurun. Jika indikasi tersebut terjadi, jumlah terpulihkan diperkirakan. Rugi penurunan nilai yang diakui sebelumnya dibalik hanya jika telah terjadi perubahan dalam estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika ini kasusnya, jumlah tercatat aset meningkat menjadi jumlah terpulihkan tersebut. Jumlah peningkatan tersebut tidak dapat melebihi nilai tercatat yang telah ditentukan, setelah dikurangi penyusutan atau amortisasi, sehingga seolah-olah kerugian penurunan nilai yang diakui untuk aset tahun-tahun sebelumnya tidak pernah terjadi.

Pembalikan tersebut diakui dalam laporan laba rugi kecuali aset dicatat pada nilai revaluasi, yang mana pembalikan diperlakukan sebagai peningkatan revaluasi. Setelah pembalikan itu, beban penyusutan atau amortisasi disesuaikan dalam tahun-tahun mendatang untuk mengalokasikan jumlah revisi nilai tercatat aset, dikurangi nilai sisa, secara sistematis atas sisa manfaatnya.

Aset takberwujud dengan masa manfaat tidak terbatas diuji untuk penurunan nilai setiap tahun baik secara individu maupun di tingkat unit penghasil kas mana yang sesuai dan ketika keadaan mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin mengalami penurunan nilai.

r. Aset Lain-lain

Aset lain-lain terdiri dari pendapatan bunga yang masih akan diterima, tagihan, pajak dibayar dimuka, biaya dibayar dimuka, agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, dan beban yang ditangguhkan.

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

Agunan yang diambil alih (AYDA) adalah aset yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank. AYDA merupakan jaminan Pinjaman yang diberikan yang telah diambil alih sebagai bagian dari penyelesaian Pinjaman yang diberikan dan disajikan pada "Aset lain-lain".

AYDA disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasi adalah nilai wajar agunan yang diambil alih dikurangi dengan estimasi biaya untuk menjual AYDA tersebut.

Kelebihan saldo Pinjaman yang diberikan yang belum dilunasi oleh peminjam di atas nilai dari AYDA, dibebankan terhadap cadangan kerugian penurunan nilai Pinjaman yang diberikan. Selisih antara nilai bersih yang dapat direalisasi dengan hasil penjualan AYDA diakui sebagai keuntungan atau kerugian tahun berjalan pada saat dijual.

Beban-beban yang berkaitan dengan pemeliharaan AYDA dibebankan ke laporan laba rugi tahun berjalan pada saat terjadinya.

Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan.

s. Liabilitas Segera

Liabilitas segera dicatat pada saat liabilitas kepada masyarakat maupun kepada Bank lain timbul.

Akun ini diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain dan dihitung berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

Lihat Catatan 2d untuk kebijakan atas aset dan liabilitas keuangan.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

q. Impairment of Non - Financial Assets (Continued)

For non-financial assets excluding intangible assets with indefinite useful life, an assessment is made at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognised impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated. A previously recognised impairment loss is reversed only if there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognised. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. That increased amount cannot exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation or amortisation, had no impairment loss been recognised for the asset in prior years.

Such reversal is recognised in profit or loss unless the asset is carried at revalued amount, in which case the reversal is treated as a revaluation increase. After such a reversal, the depreciation or amortisation expense is adjusted in future years to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

Intangible assets with indefinite useful lives are tested for impairment annually either individually or at the cash generating unit level as appropriate and when circumstances indicate that the carrying value may be impaired.

r. Other Assets

Other assets include interests receivable, receivables, prepaid tax, prepaid expenses, foreclosed asset, abandoned properties, and deferred expense.

Prepaid expenses are amortized during the useful life of each cost using the straight line method.

Foreclosed assets is the Bank's assets acquired, either through auction or outside the auction based on voluntary submission by the owner or on the power scheme to sell outside the auction of the scheme owner in the event the debtor does not fulfill its obligations to the Bank. Foreclosed assets is given credit guarantees have been taken over as part of the solution given and presented in "Other Assets".

Foreclosed assets are stated at net realizable value. Net realizable value is the fair value of foreclosed asset reduced by the estimated costs to sell these foreclosed asset.

Excess balances of loans that have not been repaid by the borrower on the value of foreclosed asset, charged against loss reserves decline in the value of loans. The difference between the net realizable value with foreclosed asset proceeds is recognized as a gain or loss on current year at the time of sale.

Expenses related to foreclosed asset maintenance are charged to current year income statement as incurred.

In the event of permanent impairment, the carrying value is reduced to recognize the decline and losses charged to current year income statement.

s. Liabilities Due Immediately

Liabilities due immediately are recorded at the time liabilities to public customers or other Banks arise.

This account is classified as other financial liabilities and is measured at amortized cost.

Refer to Note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

t. Simpanan dari Nasabah

Simpanan dari nasabah adalah dana yang ditempatkan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Termasuk dalam akun ini adalah giro, tabungan, deposito berjangka, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

Giro merupakan simpanan nasabah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui cek, kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), atau dengan cara pemindahbukuan dengan bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya.

Tabungan merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati.

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan Bank.

Simpanan nasabah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan nasabah dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

Lihat Catatan 2d untuk kebijakan atas aset dan liabilitas keuangan.

u. Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari Bank lain terdiri dari liabilitas terhadap Bank lain, dalam bentuk giro, *inter-bank call money* dengan periode jatuh tempo menurut perjanjian kurang dari atau 90 hari, deposito berjangka dan sertifikat deposito.

Simpanan dari Bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif. Biaya tambahan yang jumlahnya signifikan dan dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan dari Bank lain dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

Lihat Catatan 2d untuk kebijakan atas aset dan liabilitas keuangan.

v. Pinjaman yang Diterima

Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima dari pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman diterima diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal pinjaman diterima dan biaya transaksi merupakan bagian tidak terpisahkan dari metode suku bunga efektif.

Lihat Catatan 2d untuk kebijakan atas aset dan liabilitas keuangan.

w. Perpajakan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode posisi keuangan untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan. Namun, liabilitas pajak penghasilan tangguhan tidak diakui jika berasal dari pengakuan awal *goodwill* atau pada saat pengakuan awal aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi dan laba rugi kena pajak. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

t. Deposits from Customers

Deposits from customers are the funds placed by customers (excluding banks) with the Bank based on fund deposit agreements. Included in this account are current accounts, saving accounts, time deposits, and other forms which are similar.

Current accounts represent customers' funds which can be used as payment instruments, and which can be withdrawn by the depositors at any time through cheque, Automatic Teller Machine card (ATM) or transfers between accounts using bill and other orders of payment or transfer.

Savings account represent customers' funds, which can only be withdrawn by the depositors under certain conditions.

Time deposits represent customers' funds, which can only be withdrawn by the depositors at specific maturities, based on the agreement between the depositor and Bank.

Deposits from customers are classified as financial liabilities and measured at amortized cost using the effective interest rate. Incremental costs that can be attributed directly to the acquisition of deposits from customers are deducted from total deposits received.

Refer to Note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

u. Deposits from Other Banks

Deposits from other Banks represent liabilities to other Banks, in the form of current accounts, inter-bank call money with original maturities of 90 days or less, time deposits and certificates of deposits.

Deposits from other Banks are classified as financial liabilities and measured at amortized cost using the effective interest rate. Incremental costs that can be attributed directly to the acquisition of deposits from other Banks are deducted from the total deposits received.

Refer to Note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

v. Borrowings

Borrowings are funds received from another party liability repayment in accordance with the requirements of the loan agreement.

Borrowings are initially recognized at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition of borrowings and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate method.

Refer to Note 2d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

w. Taxation

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax are recognised in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the reporting date. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Deferred income tax is recognised, using the balance sheet method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognised if they arise from the initial recognition of goodwill and deferred income tax is not accounted for if it arises from initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted as at reporting period and is expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

w. Perpajakan (Lanjutan)

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat Surat Ketetapan Pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

x. Pendapatan dan Beban Bunga

Pendapatan bunga atas aset keuangan baik yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau biaya perolehan diamortisasi dan beban bunga atas seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laba rugi berdasarkan suku bunga efektif.

Pendapatan bunga atas aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau biaya diamortisasi yang mengalami penurunan nilai setelah pengakuan awal (Stage 3) diakui berdasarkan suku bunga efektif kredit yang disesuaikan. Tingkat bunga ini dihitung dengan cara yang sama dalam perhitungan suku bunga efektif kecuali bahwa cadangan kerugian kredit ekspektasian dimasukkan dalam arus kas ekspektasian. Oleh karenanya, pendapatan bunga diakui atas aset keuangan dalam klasifikasi biaya perolehan diamortisasi termasuk kerugian kredit ekspektasian. Dalam kondisi risiko kredit atas aset keuangan Stage 3 mengalami perbaikan sehingga aset keuangan tidak lagi dipertimbangkan mengalami penurunan nilai, pengakuan pendapatan bunga dihitung berdasarkan nilai tercatat bruto aset keuangan.

y. Provisi dan Komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang jumlahnya signifikan serta berkaitan langsung dengan kegiatan pinjaman, atau pendapatan dan beban provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan suku bunga efektif. Untuk pinjaman yang dilunasi sebelum jatuh temponya, saldo pendapatan atau beban provisi dan komisi ditanggihkan diakui pada saat pinjaman dilunasi. Pendapatan dan beban provisi dan komisi lainnya diakui pada saat terjadinya transaksi.

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan dengan kredit diakui sebagai bagian dari pendapatan bunga.

z. Transaksi Sewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Bank menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Bank dapat memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk:

- Sewa jangka-pendek; dan
- Sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi, Bank harus menilai apakah:

- Bank memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasi; dan
- Bank memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi. Bank memiliki hak ini ketika Bank memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
 1. Bank memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
 2. Bank telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

w. Taxation (Continued)

Deferred tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.

Corrections to taxation liabilities are recorded when an assessment is received or, if appealed against, when the appeal has been decided.

x. Interest Income and Expense

Interest income for financial assets held at either fair value through other comprehensive income or amortised cost and interest expense on all financial liabilities held at amortised cost are recognised in profit or loss using the effective interest method.

Interest income for financial assets that are either held at fair value through other comprehensive income or amortised cost that have become credit impaired subsequent to initial recognition (Stage 3) is recognised using the credit adjusted effective interest rate. This rate is calculated in the same manner as the effective interest rate except that expected credit losses are included in the expected cash flows. Interest income is therefore recognised on the amortised cost of the financial asset including expected credit losses. Should the credit risk on a Stage 3 financial asset improve such that the financial asset is no longer considered credit impaired, interest income recognition reverts to a computation based on the rehabilitated the carrying value of the financial asset gross.

y. Fees and Commission

Significant fees and commission income directly related to lending activities, or fees and commission income which relate to a specific period, are amortized over the term of the underlying contract using effective interest rate. Unamortized fees and commission income relating to loans settled prior to maturity are recognized at the settlement date. Other fees and commission income are recognized at the transaction date.

Fees and commission income related to lending activities are recognized as part of interest income.

z. Lease Transactions

At the inception of a contract, the Bank assesses whether the contract is or contains a leases. A contract is or contains a leases if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration. The Bank can choose not to recognise the right-of-use asset and lease liabilities for:

- Short term lease; and
- Low value asset

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Bank shall assess whether:

- The Bank has the right to obtain substantially all the economic benefit from use of the asset throughout the period of use; and
- The Bank has the right to direct the use of the asset. The Bank has described when it has a decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined:
 1. The Bank has the right to operate the asset;
 2. The Bank has designed the asset in a way that predetermine how and for what purpose it will be used.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

z. Transaksi Sewa (Lanjutan)

Pada tanggal permulaan sewa, Bank mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima dan didiskontokan menggunakan suku bunga awal. Aset hak guna diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang jangka waktu sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Bank menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Bank pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Bank akan mengeksekusi opsi beli, maka Bank menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Bank menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Modifikasi sewa

Bank mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih;
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan - harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

aa. Imbalan Kerja

Bank menerapkan PSAK 219 (sebelumnya PSAK 24), "Imbalan Kerja"

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terhutang kepada karyawan berdasarkan metode akrual.

Imbalan kerja jangka pendek seperti gaji, tunjangan, insentif, dan imbalan non-moneter lainnya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan kerja jangka pendek diukur sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Program Imbalan Pasti dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Imbalan pasca-kerja dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai yang menjadi peserta program pensiun Bank. Imbalan kerja ditentukan berdasarkan peraturan Bank dan persyaratan minimum Undang-undang Cipta Kerja No. 11/2020, mana yang lebih tinggi.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

z. Lease Transactions (Continued)

The Bank recognises a right-of-use asset and a leases liability at the leases commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the leases liability adjusted for any leases payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the leases, less any leases incentives received and discounted using incremental borrowing rate at the date of initial application. The right-of-use asset is amortized over the straight line method throughout the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Bank uses its incremental borrowing rate as a discount rate.

Each lease's payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease's period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

If the leases transfers ownership of the underlying asset to the Bank by the end of the leases term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Bank will exercise a purchase option, the Bank depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Bank depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the leases term.

Lease modification

The Bank accounts for a leases modification as a separate leases if both:

- the modification increases the scope of the leases by adding the right to use one or more underlying assets;
- the consideration for the leases increases by an amount commensurate with the standalone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that standalone price to reflect the circumstances of the particular contract.

aa. Employee Benefits

Bank apply SFAS 219 (previously SFAS 24), "Employee Benefits".

Short-term Employee Benefit

Short term employee benefits are recognized when payable to the employee based on accrual basis.

Short term employee benefits such as wages, benefit, incentive, and other non monetary benefits are recognized during the period when services have been rendered. Short term employee benefits are measured using undiscounted amount.

Defined Benefit Plan and Other Long-term Employee Benefits

The post-employment benefits are accrued and recognized as expense when service have been rendered by qualified Bank's employees. The benefits are determined based on the Bank regulations and the minimum requirements of Omnibus Law No. 11/2020 whichever is higher.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

aa. Imbalan Kerja (Lanjutan)

Program Imbalan Pasti dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Pada bulan April 2022, DSAK IAI (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia) menerbitkan materi penjelasan melalui siaran pers atas persyaratan pengatribusian imbalan pada periode jasa sesuai PSAK 219: Imbalan Kerja yang diadopsi dari IAS 19 *Employee Benefits*. Materi penjelasan tersebut menyampaikan informasi bahwa pola fakta umum dari program pensiun berbasis Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia saat ini memiliki pola fakta serupa dengan yang ditanggapi dan disimpulkan dalam *IFRS Interpretation Committee* ("IFRIC") Agenda Decision *Attributing Benefit to Periods of Service* (IAS 19).

Imbalan pasca-kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya secara aktuaris ditentukan berdasarkan metode *Projected Unit Credit*.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai komprehensif lain, terdiri atas :

- Keuntungan dan kerugian aktuaris.
- Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).
- Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya.

Untuk imbalan kerja jangka panjang lain atas biaya jasa kini, biaya bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, dan pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto langsung diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode berjalan.

Biaya jasa lalu diakui sebagai beban pada tanggal yang lebih awal antara ketika amandemen atau kurtailmen program terjadi, dan ketika biaya restrukturisasi atau pesangon diakui, sehingga biaya jasa lalu yang belum *vested* tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode *vesting* masa depan.

Program Imbalan Pasca Kerja Lainnya

Di luar program pensiun imbalan pasti, Bank juga memberikan imbalan pasca kerja lainnya, yaitu meliputi uang penggantian hak, uang pisah, sumbangan kematian, penghargaan masa bakti proporsional, dan penghargaan dalam rangka pensiun.

Sama seperti imbalan pensiun, liabilitas dan beban pendanaan penghargaan masa bakti, penghargaan masa bakti proporsional, cuti besar, dan uang duka dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*.

Bonus dan Tantiem

Bank juga memberikan bonus kepada karyawan serta tantiem kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Estimasi besarnya cadangan tersebut ditentukan berdasarkan pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya, dengan memperhatikan kemampuan keuangan Bank, dan kemudian dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Jika terdapat selisih antara jumlah bonus dan tantiem yang dicadangkan dengan realisasinya, maka selisih tersebut dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.

Uang Penghargaan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Bank memberikan uang penghargaan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Bank pada setiap akhir masa jabatannya. Besarnya uang penghargaan Direksi secara bersama-sama ditetapkan sebesar 3,5% dari laba bersih setelah pajak tahun buku sebelum berakhirnya masa jabatan. Besarnya uang penghargaan bagi Dewan Komisaris secara bersama-sama ditetapkan sebesar 1,25% dari laba bersih setelah pajak tahun buku sebelum berakhirnya masa jabatan. Uang penghargaan tersebut dicadangkan secara proporsional tiap tahun selama masa jabatan, yang diakui sebagai beban pada tahun berjalan.

ab. Modal Saham

Biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada penerbitan saham biasa atau opsi disajikan pada ekuitas sebagai pengurang penerimaan, setelah dikurangi pajak.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

aa. Employee Benefit (Continued)

Defined Benefit Plan and Other Long-term Employee Benefits

In April 2022, DSAK IAI (Institute of Indonesia Chartered Accountants' Accounting Standard Board) issued an explanatory material through a press release regarding attribution of benefits to periods of service in accordance with SFAS 219: *Employment Benefits* which was adopted from IAS 19 *Employee Benefits*. The explanatory material conveyed the information that the fact pattern of the pension program based on the Labor Law currently enacted in Indonesia is similar to those responded and concluded in the *IFRS Interpretation Committee* ("IFRIC") Agenda Decision *Attributing Benefit to Periods of Service* (IAS 19).

The post-employment benefits and other long-term employee benefits are actuarially determined using *Projected Unit Credit Method*.

Remeasurement of net defined benefit liabilities (assets), which is recognized as other comprehensive income, consist of:

- Actuarial gains and losses.
- Return on plan assets, excluding amounts that included in net interest on liabilities (assets).
- The changes in the impact of the asset ceiling, excluding amounts that included in net interest on liabilities (assets).

Remeasurement of net defined benefit liabilities (assets), which is recognized as other comprehensive income are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

For other long-term employee benefits over the current service cost, net interest on net defined benefit liabilities (assets), and the remeasurement of net defined benefit liability (asset) obligations are recognized immediately in the current statement of profit or loss and other comprehensive income.

All past service costs are recognised at the earlier of when the amendment or curtailment occurs, and when the related restructuring or termination costs are recognized, as a result, unvested past service cost can no longer be deferred and recognised over the future vesting period.

Other Long-term Post-Employment Benefit

Other than pension benefits, the Bank also provides other long-term post-employment benefits, such as compensation pay, separation pay, death allowance, proportional service award for pension, and award for pension.

Similar to pension benefits, service reward benefits, service reward benefits proportional, long service leave, and death allowance liabilities and expenses are calculated by independent actuaries using the *Projected Unit Credit Method*.

Bonus and Tantiem

Banks also provide bonus to the employees and tantiem to the Board of Commissioners and Directors. Estimated the amount of the reserve is determined based on the experiences of the previous year, taking into account the financial ability of the Bank, and then requested approval of the General Meeting of Shareholders. If there is a difference between the amount of bonus and tantiem that are reserved to the realization, then the excess is charged to the profit and loss for the year.

Service Awards Benefit for the Board of Directors and Commissioners

The Bank provides services awards benefit to the Bank's Board of Directors and Commissioners at each end of his tenure. The amount of services awards benefit of the Board of Directors simultaneously set 3.5% of profit after tax before the end of the fiscal year tenure. The amount of services awards benefit for the Board of Commissioners simultaneously set 1.25% of profit after tax before the end of the fiscal year tenure. Services awards benefit was reserved proportionally during the term of office, which is recognized as an expense in the current year.

ab. Share Capital

Incremental costs directly attributable to the issue of new ordinary shares or options are shown in equity as a deduction, net of tax, from the proceeds.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)

ab. Modal Saham (lanjutan)

Ketika entitas membeli modal saham ekuitas Bank (saham treasury), imbalan yang dibayar, termasuk biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan (dikurangi pajak penghasilan) dikurangkan dari ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik ekuitas entitas sampai saham tersebut dibatalkan atau diterbitkan kembali. Ketika saham biasa tersebut selanjutnya diterbitkan kembali, imbalan yang diterima, dikurangi biaya tambahan transaksi yang terkait dan dampak pajak penghasilan yang terkait dimasukkan pada ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik ekuitas Bank.

ac. Laba Bersih per Saham

Sesuai dengan PSAK 233 (sebelumnya PSAK 56), laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang ditempatkan dan disetor penuh selama tahun yang bersangkutan.

ad. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan pada tanggal dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham.

ae. Liabilitas dan Aset Kontinjensi

Liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan tetapi diungkapkan kecuali jika kemungkinan terjadi kecil. Aset kontinjensi tidak diakui namun diungkapkan dalam laporan keuangan ketika adanya kemungkinan untuk mendapatkan manfaat ekonomi.

af. Segmen Operasi

Segmen operasi adalah komponen dari Bank yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain Bank, dimana hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh Direksi Bank untuk membuat keputusan mengenai sumber daya yang akan dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya, serta tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Hasil segmen yang dilaporkan kepada Direksi Bank meliputi komponen-komponen yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen dan komponen-komponen yang dapat dialokasikan dengan dasar yang wajar. Komponen yang tidak dapat dialokasikan terutama terdiri dari aset dan liabilitas pajak penghasilan, termasuk pajak kini dan pajak tangguhan serta aset tetap.

Bank telah mengidentifikasi dan mengungkapkan informasi keuangan berdasarkan kegiatan bisnis utama (segmen usaha) berdasarkan segmen geografis.

Segmen geografis meliputi penyediaan jasa di dalam lingkungan ekonomi tertentu yang memiliki risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen operasi lainnya yang berada dalam lingkungan ekonomi lain.

ag. Provisi

Provisi diakui ketika Bank memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Bank diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas (ketika pengaruh nilai waktu uang bersifat material).

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

ah. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

Peristiwa setelah tanggal neraca yang menyediakan informasi tambahan tentang posisi Bank pada tanggal pelaporan (peristiwa penyesuaian) disajikan dalam laporan keuangan jika material. Peristiwa setelah tanggal neraca yang bukan merupakan peristiwa penyesuaian diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan apabila material.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

ab. Share Capital (Continued)

Where any company purchases the Bank's equity share capital (treasury shares), the consideration paid, including any directly attributable incremental costs (net of income taxes) is deducted from equity attributable to the company's equity holders until the shares are cancelled or reissued. Where such ordinary shares are subsequently reissued, any consideration received, net of any directly attributable incremental transaction costs and the related income tax effects, is included in equity attributable to the Bank's equity holders.

ac. Earnings per Share

In accordance with SFAS 233 (previously SFAS 56), basic earnings per share is computed by dividing net income for the current year attributable to equity holders of the parent entity with the weighted average number of outstanding issued and fully paid-up ordinary shares during the year.

ad. Dividend

Dividends distribution to the shareholders is recognized as a liability in the financial statements at the date when the dividend is approved by the shareholders.

ae. Contingent Liabilities and Assets

Contingent liabilities are not recognized in the financial statements but are disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote. Contingent assets are not recognized but are disclosed in the financial statement when an inflow of economic benefits are probable.

af. Operating Segments

An operating segment is a component of the Bank that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses, including revenues and expenses that related to transactions with any of the Banks other components, whose operating results are reviewed regularly by the Bank Board of Directors to make decisions about resources allocated to the segment and assess its performance and for which discrete financial information is available. Segment results that are reported to the Bank's Board Director include items directly attributable to a segment, as well as those that can be allocated on a reasonable basis. Unallocated items mainly comprise of income tax assets and liabilities, including current and deferred taxes and fixed assets.

The Bank has identified and disclosed financial information by major business activities (business segment) based on geographical segments.

A geographical segment includes the provision of services within a particular economic environment that is subject to risks and returns that are different from other operating segments that are in other economic environments.

ag. Provision

Provisions are recognized when the Bank has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Bank will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows (when the effect of time value of money is material).

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

ah. Events After the Reporting Period

Post year-end events that provide additional information about the Bank positions at the reporting date (adjusting events) are reflected in the financial statements when material. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to the financial statements when material.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan dimana dibutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun kedepan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh PSAK adalah estimasi terbaik yang didasarkan pada standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Informasi mengenai asumsi dan ketidakpastian estimasi dijelaskan di bawah ini dan pada catatan 21 - pengukuran liabilitas imbalan pascakerja: asumsi-asumsi aktuarial.

Pertimbangan profesional dan estimasi signifikan dalam menentukan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Usaha yang berkelanjutan

Manajemen Bank telah melakukan penilaian atas kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

Nilai wajar atas instrumen keuangan

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika statistik. Masukan (*input*) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti tingkat pelunasan dipercepat dan asumsi tingkat gagal bayar.

Aset keuangan tanpa harga kuotasi dalam pasar aktif

Bank mengklasifikasikan aset keuangan dengan mengevaluasi, antara lain, apakah aset memiliki harga kuotasi atau tidak dalam pasar aktif. Termasuk dalam evaluasi apakah aset keuangan memiliki kuotasi pasar dalam pasar aktif adalah penentuan apakah harga yang dikuotasi tersedia sewaktu-waktu dan apakah harga tersebut merepresentasikan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar.

Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan

Kondisi spesifik *counterparty* yang mengalami penurunan nilai dalam pembentukan cadangan kerugian atas aset keuangan dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan tentang situasi keuangan *counterparty* dan nilai realisasi bersih dari setiap agunan. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada, dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima.

Perhitungan cadangan penurunan nilai kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat dalam portofolio aset keuangan dengan karakteristik ekonomi yang sama ketika terdapat bukti objektif penurunan nilai terganggu, tetapi penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas kredit dan jenis produk. Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, manajemen membuat asumsi untuk menentukan kerugian yang melekat, dan untuk menentukan parameter *input* yang diperlukan, berdasarkan pengalaman masa lalu dan kondisi ekonomi saat ini. Keakuratan penyesuaian tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan untuk cadangan *counterparty* tertentu dan asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.

3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS

Certain estimates and assumptions are made in the preparation of the financial statements these require management judgement in determining the appropriate methodology for valuation of assets and liabilities.

Management makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial year. All estimates and assumptions required in conformity with SFAS are best estimates undertaken in accordance with the applicable standard. Estimates and judgements are evaluated on a continuous basis, and are based on past experiences and other factors, including expectations with regards to future events.

Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

Information about the assumptions and estimation uncertainties is set out below and in the following Note 21 - measurement of obligation for postemployment benefits: actuarial assumptions.

Significant accounting judgments and estimates that affect the reported amounts of financial statement, are as follows:

Going concern

The Bank's management has assessed the Bank's ability to continue as a going concern and believes that the Bank has the resources to continue its business in the future. In addition to that, management is not aware of any material uncertainty that may cast significant doubt to the Bank's ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements have been prepared on going concern basis.

Fair value of financial instruments

If the fair value of financial assets and financial liabilities recorded in the financial statements of financial position is not available in an active market, the fair value is determined using various valuation techniques including the use of statistical mathematical model. The input for this model comes from observable market data. When observable market data are not available, management considers necessary inputs and assumptions to determine the fair value. Considerations include considerations such as liquidity and volatility feedback model, the level of early payment and the level of default assumption.

Financial assets not quoted in an active market

Bank classifies financial assets by evaluating, among others, whether the asset is quoted or not in an active market. Included in the evaluation on whether a financial asset is quoted in an active market is the determination on whether quoted prices are readily and regularly available and whether those prices represent actual and regularly occurring market transaction in arm's length basis.

Allowance for impairment losses of financial assets

In the calculation of allowance for impairment losses of financial assets, the specific condition of impaired counterparty is individually evaluated based on management's best estimate of the present value of the expected cash flows to be received. In estimating these cash flows, management makes judgements about the counterparty's financial situation and the net realizable value of any underlying collateral. Each impaired asset is assessed on its merits, and the workout strategy and estimated cash flows considered recoverable.

Collectively assessed impairment allowances cover credit losses inherent in portfolios of financial assets with similar economic characteristics when there is objective evidence to suggest that they contain impaired financial assets, but the individual impaired items cannot yet be identified. In assessing the need for collective allowances, management considers factors such as credit quality and type of product. In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modelled and to determine the required input parameters, based on historical experiences and current economic conditions. The accuracy of the allowances depends on how well are the estimated future cash flows for specific counterparty allowances and the model assumptions and parameters used in determining collective allowances.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Bank mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Penentuan provisi untuk pajak penghasilan badan memerlukan pertimbangan yang signifikan dari manajemen. Ada transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya tidak pasti selama kegiatan usaha biasa. Bank mengakui liabilitas atas masalah pajak penghasilan badan yang diharapkan berdasarkan estimasi apakah tambahan pajak penghasilan badan akan terutang. Jika hasil pajak final dari hal-hal tersebut berbeda dari jumlah yang pada awalnya dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan pada periode di mana penentuan tersebut dibuat.

Pengakuan pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh saldo rugi fiskal dan perbedaan temporer sampai pada batas adanya kemungkinan bahwa keuntungan yang dikenai pajak akan tersedia dimana kerugian dapat dimanfaatkan.

Pertimbangan manajemen yang signifikan juga diperlukan untuk menentukan jumlah dari aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan waktu yang mungkin terjadi dan tingkatan dari keuntungan yang dikenakan pajak di masa yang akan datang bersama dengan strategi perencanaan pajak di masa yang akan datang.

Nilai sekarang dari kewajiban pensiun

Biaya untuk program pensiun manfaat pasti dan imbalan pasca kerja ditentukan menggunakan penilaian aktuarial. Penilaian aktuarial melibatkan pembuatan asumsi mengenai tingkat diskonto, tingkat pengembalian dari aset yang diharapkan, peningkatan gaji di masa depan, tingkat kematian, dan peningkatan jumlah pensiun di masa depan. Karena sifat jangka panjang rencana-rencana ini, estimasi memiliki ketidakpastian yang signifikan.

Present value atas imbalan kerja karyawan tergantung dari banyaknya faktor yang dipertimbangkan oleh aktuaris berdasarkan beberapa asumsi. Perubahan atas asumsi-asumsi tersebut akan mempengaruhi *carrying amount* atas imbalan kerja karyawan.

Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya atau pendapatan untuk imbalan kerja termasuk tingkat diskonto. Bank menentukan tingkat diskonto yang tepat pada setiap akhir tahun. Ini merupakan tingkat suku bunga yang digunakan untuk menentukan nilai kini atas arus kas masa depan yang diestimasi akan digunakan untuk membayar imbalan kerja. Dalam menentukan tingkat diskonto yang tepat, Bank mempertimbangkan tingkat suku bunga atas Obligasi Pemerintah yang mempunyai jatuh tempo yang menyerupai jangka waktu imbalan kerja karyawan.

Asumsi kunci liabilitas pensiun lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Bank mengevaluasi penurunan nilai aset apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tidak dapat dipulihkan kembali. Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan penelaahan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- Performa yang tidak tercapai secara signifikan terhadap ekspektasi historis atau proyeksi hasil operasi di masa yang akan datang;
- Perubahan yang signifikan dalam cara penggunaan aset atau strategi bisnis secara keseluruhan; dan
- Industri atau tren ekonomi yang secara signifikan bernilai negatif.

Bank mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat atas aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakai aset (atau unit penghasil kas). Jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual atau, jika tidak memungkinkan, untuk unit penghasil kas yang mana aset tersebut merupakan bagian daripada unit tersebut.

3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS (CONTINUED)

Income tax

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Bank recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

Determining provision for corporate income tax requires significant judgment by management. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Bank recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amount that are initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

Recognition of deferred taxes

Deferred tax assets are recognized for all unused tax losses and temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the losses can be utilized.

Significant management judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

Present value of post-employment benefit obligation

The cost of defined benefit retirement plan and other post employment benefits is determined using actuarial valuations. The actuarial valuation involves making assumptions about discount rates, expected rates of return on assets, future salary increases, mortality rates, and future pension increases. Due to the long term nature of these plans, such estimates are subject to significant uncertainty.

The present value of the employee benefits obligation depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of employee benefit obligations.

Assumptions used in determining the cost or income for employee benefits include the discount rate. The Bank determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate used to determine the present value of estimated future cash flows that will be used to pay employee benefits. In determining the appropriate discount rate, the Bank considers the interest rates on Government Bonds that have a maturity that resembles the period of employee employee benefits.

Other key assumptions for pension obligations are partly based on current market conditions.

Impairment of Non-Financial Assets

The Bank evaluates the decline in asset value if there are events or changes in circumstances that indicate that the carrying value of an asset cannot be recovered. Important factors that can cause a review of impairment are as follows:

- *Performance that is not achieved significantly against historical expectations or projections of future operating results;*
- *Significant changes in the way the asset is used or the overall business strategy; and*
- *Industry or economic trends that are significantly negative.*

The Bank recognizes an impairment loss if the carrying amount of the asset exceeds the recoverable value. The recoverable amount is a higher value between fair value less costs to sell and the value of use of the asset (or cash-generating unit). The recoverable amount is estimated for individual assets or, if not possible, for the cash generating unit for which the asset is part of the unit.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (LANJUTAN)

Estimasi Masa Sewa

Dalam mengestimasi masa sewa dari masing-masing perjanjian sewa, manajemen mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang memberikan insentif ekonomik untuk mengeksekusi opsi perpanjangan, atau untuk tidak mengeksekusi opsi penghentian, termasuk perubahan fakta atau keadaan yang diekspektasi dari tanggal permulaan hingga tanggal eksekusi opsi. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian) hanya diperhitungkan dalam masa sewa jika sewa cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan).

Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional dari Bank adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi.

Bank mempertimbangkan beberapa faktor dalam menentukan mata uang fungsionalnya seperti mata uang yang mempengaruhi pendapatan, biaya dan aktivitas pendanaan serta mata uang yang mana penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya dipertahankan.

Berdasarkan substansi ekonomis dari kondisi yang sesuai dengan Bank, mata uang fungsional telah ditentukan berupa Rupiah Indonesia (IDR), karena hal ini berkaitan dengan fakta bahwa mayoritas bisnis Bank dipengaruhi oleh penetapan harga dengan lingkungan ekonomis lokal.

Provisi dan Kontinjensi

Bank dalam kegiatan usaha normal, menjalankan sesuai ketentuan untuk kewajiban hukum maupun konstruktif, jika ada, sesuai dengan kebijakan pada ketentuan dan kontinjensi. Dalam pengakuan dan pengukuran ketentuan, manajemen mengambil pertimbangan risiko dan ketidakpastian.

3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS (CONTINUED)

Estimation of Lease Term

When estimating the lease term of the respective lease arrangement, management considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not to exercise a termination option, including any expected changes in facts and circumstances from the commencement date until the exercise date of the option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated).

Functional Currency

The functional currency of the Bank is the currency of the primary economic environment in which each entity operates.

The Bank considers some factors in determining its functional currency, among others, the currency that mainly influences the revenue, cost and financing activities, and the currency in which receipts from operating activities are usually retained.

Based on the economic substance of the underlying circumstances relevant to the Bank, the functional currency has been determined to be Indonesian Rupiah (IDR), as this reflected the fact that majority of the Bank's operational businesses are influenced by pricing in local economic environment.

Provisions and Contingencies

The Bank in the ordinary course of business, sets up appropriate provisions for its present legal or constructive obligations, if any, in accordance with its policies on provisions and contingencies. In recognizing and measuring provisions, management takes risk and uncertainties in to account.

4. KAS

	31 Desember 2024 December 31, 2024
Rupiah	
Kas	463.250.063.085
Kas ATM	117.133.199.105
Sub Jumlah	580.383.262.190
Dolar Amerika Serikat	
Kas	352.335.645
Sub Jumlah	352.335.645
Jumlah	580.735.597.835

Saldo kas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dimiliki oleh Bank.

4. CASH

	31 Desember 2023 December 31, 2023	
Rupiah		Rupiah
Cash	464.709.326.200	Cash
Cash In ATM	103.865.226.105	Cash In ATM
Sub Total	568.574.552.305	Sub Total
United States Dollar		United States Dollar
Cash	996.031.930	Cash
Sub Total	996.031.930	Sub Total
Total	569.570.584.235	Total

The Cash as of December 31, 2024 and 2023 is owned by the Bank.

5. GIRO PADA BANK INDONESIA

	31 Desember 2024 December 31, 2024
Rupiah	2.694.046.490.228
Dolar Amerika Serikat	828.892.500
Jumlah	2.694.875.382.728

Bank dipersyaratkan untuk memiliki Giro Wajib Minimum (GWM) dalam mata uang Rupiah dalam kegiatannya sebagai bank umum serta GWM dalam mata uang asing dalam kegiatannya melakukan transaksi mata uang asing. GWM disimpan dalam bentuk Giro pada Bank Indonesia.

5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA

	31 Desember 2023 December 31, 2023	
Rupiah	2.393.082.448.391	Rupiah
United States Dollar	792.945.500	United States Dollar
Total	2.393.875.393.891	Total

The Bank is required to maintain Minimum Statutory Reserves (GWM) in Rupiah for conventional banking and statutory reserves in foreign currencies for foreign exchange transactions. The statutory reserves are maintained in the form of current accounts with Bank Indonesia.

5. GIRO PADA BANK INDONESIA (LANJUTAN)

Pada 31 Desember 2024 dan 2023, Giro Wajib Minimum (GWM) Bank telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/3/PBI/2018, telah diubah beberapa kali dengan PBI No.22/3/PBI/2020 tanggal 24 Maret 2020, PBI No. 22/10/PBI/2020 tanggal 28 Juli 2020, PBI No. 23/16/PBI/2021 tanggal 17 Desember 2021 serta PBI No. 24/4/PBI/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Dan dijelaskan dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 24/8/PADG/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah telah diubah beberapa kali dengan PADG No. 2 Tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023 serta PADG Nomor 12 Tahun 2023 tanggal 27 September 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Syariah.

Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) Bank telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/4/PBI/2018 tanggal 3 April 2018, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PBI No. 21/12/PBI/2019 tanggal 2 Desember 2019, PBI No. 22/17/PBI/2020 tanggal 1 Mei 2020, PBI No. 23/17/PBI/2021 tanggal 17 Desember 2021 serta PBI No. 24/16/PBI/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Dan dijelaskan dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.21/22/PADG/2019 tanggal 28 Nopember 2019 sebagaimana diubah tujuh kali dengan PADG No. 18 Tahun 2023 tanggal 29 Nopember 2023 Perubahan Ketujuh atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

Berdasarkan surat dari Bank Indonesia No.26/ /DKMP/Srt/B pada Bulan Desember 2024 dan merujuk pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kebijakan Likuiditas Makroprudensial dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial, Bank BPD Bali telah memperoleh insentif atas KLM periode tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 3,80%.

Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Giro Wajib Minimum:	
GWM Rupiah	9,00%
Harian	0,00%
Rata-rata	9,00%
PLM	5,00%
GWM Valas	4,00%
Harian	2,00%
Rata-rata	2,00%

Giro Wajib Minimum yang selanjutnya disingkat GWM adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank Umum Konvensional atau Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUK atau DPK BUS dan UUS.

Penyangga Likuiditas Makroprudensial yang selanjutnya disingkat PLM adalah cadangan likuiditas minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh BUK dalam bentuk surat berharga yang memenuhi persyaratan tertentu, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUK dalam Rupiah.

5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA (CONTINUED)

As of December 31, 2024 and 2023, the Bank's Minimum Statutory Reserve (GWM) is in accordance with Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 20/3/PBI/2018, has been amended several times with PBI No.22/3/PBI/2020 dated March 24, 2020, PBI No. 22/10/PBI/2020 dated July 28, 2020, PBI No. 23/16/PBI/2021 dated December 17, 2021 and PBI No. 24/4/PBI/2022 dated February 25, 2022 concerning the Fourth Amendment to Bank Indonesia Regulation Number 20/3/PBI/2018 concerning Minimum Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Currency for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. And explained in the Regulation of Members of the Board of Governors (PADG) No. 24/8/PADG/2022 dated June 30, 2022 concerning Implementing Regulations for Fulfillment of Mandatory Minimum Reserves in Rupiah and Foreign Currency for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units has been amended several times with PADG No. 2 of 2023 dated March 24, 2023 and PADG Number 12 of 2023 dated September 27, 2023 concerning the second amendment to the Regulation of Members of the Board of Governors Number 24/8/PADG/2022 concerning Implementation Regulations for Fulfilling the Minimum Statutory Reserve in Rupiah and Foreign Currency for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks and Sharia Units.

The Bank's Macroprudential Liquidity Buffer (PLM) is in accordance with Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 20/4/PBI/2018 dated April 3, 2018, as amended several times by PBI No. 21/12/PBI/2019 dated December 2, 2019, PBI No. 22/17/PBI/2020 dated May 1, 2020, PBI No. 23/17/PBI/2021 dated December 17, 2021 and PBI No. 24/16/PBI/2022 dated October 31, 2022 concerning the Fourth Amendment to Bank Indonesia Regulation Number 20/4/PBI/2018 concerning Macroprudential Intermediation Ratios and Macroprudential Liquidity Buffers for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. And explained by Regulation of Members of the Board of Governors (PADG) No.21/22/PADG/2019 dated November 28, 2019 as amended seven times by PADG No. 18 of 2023 dated November 29, 2023 Seventh Amendment to Regulation of Members of the Board of Governors Number 21/22/PADG/2019 concerning Macroprudential Intermediation Ratios and Macroprudential Liquidity Buffers for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

Based on a letter from Bank Indonesia No. 26/ /DKMP/Srt/B in December 2024 and referring to Bank Indonesia Regulation Number 11 of 2023 concerning Macroprudential Liquidity Policy and Regulation of Members of the Board of Governors Number 4 of 2024 concerning Amendments to Regulations of Members of the Board of Governors Number 11 of 2023 concerning Implementation Regulations for Macroprudential Liquidity Incentive Policies, Bank BPD Bali has received incentives for KLM for the period December 1, 2024 to December 31, 2024 is 3.80%.

The Minimum Statutory Reserve (GWM) ratio required by Bank Indonesia on December 31, 2024 and 2023 is as follows:

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	Minimum Required Account
		GWM Rupiah
	9,00%	Daily
	0,00%	Average
	9,00%	PLM
	5,00%	GWM Foreign Exchange
	4,00%	Daily
	2,00%	Average

Minimum Statutory Reserves, hereinafter abbreviated as GWM, is the minimum amount of funds that must be maintained by Conventional Commercial Banks or Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units, the amount of which is determined by Bank Indonesia in the amount of a certain percentage of DPK BUK or DPK BUS and UUS.

Macroprudential Liquidity Buffer, hereinafter abbreviated as PLM is a minimum liquidity reserve in rupiahs that must be maintained by BUK in the form of securities that meet certain requirements, the amount of which is determined by Bank Indonesia at a certain percentage of BUK Deposits in Rupiah.

5. GIRO PADA BANK INDONESIA (LANJUTAN)

Rasio GWM Bank pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Giro Wajib Minimum:	
GWM Rupiah	5,29%
Harian	0,00%
Rata-rata	5,29%
PLM	27,96%
GWM Valas	21,22%
Harian	2,00%
Rata-rata	19,22%

Bank telah memenuhi Giro Wajib Minimum (GWM) yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA (CONTINUED)

The Statutory Reserves Ratios as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	
		Minimum Required Account:
		GWM Rupiah
		Daily
		Average
		PLM
		GWM Foreign Exchange
		Daily
		Average

The Bank has met the Statutory Reserve Requirement required by Bank of Indonesia as of December 31, 2024 and 2023.

6. GIRO PADA BANK LAIN

a. Berdasarkan Mata Uang

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Rupiah	14.552.351.435
Dolar Amerika Serikat	30.566.821.020
Jumlah	45.119.172.455
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(32.035.380)
Jumlah bersih	45.087.137.075

b. Berdasarkan Hubungan

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Pihak Ketiga:	
Rupiah	14.552.351.435
Dolar Amerika Serikat	30.566.821.020
Jumlah	45.119.172.455
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(32.035.380)
Jumlah bersih	45.087.137.075

c. Berdasarkan Bank

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Rupiah	
Bank Pemerintah Daerah	
PT Bank DKI	8.973.507
Bank Umum	
PT Bank Central Asia Tbk	7.519.318.751
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	2.100.828.988
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	4.805.467.717
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	117.762.471
Sub - Jumlah	14.552.351.434
Dolar Amerika Serikat	
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	18.764.278.977
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	11.802.542.044
Sub - Jumlah	30.566.821.021
Jumlah	45.119.172.455
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(32.035.380)
Jumlah bersih	45.087.137.075

6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS

a. By Currency

	31 Desember 2023 / December 31, 2023
Rupiah	49.858.800.714
United States Dollar	20.241.832.646
Total	70.100.633.360
Allowance for Impairment Losses	(19.246.250)
Net	70.081.387.110

b. By Relationship

	31 Desember 2023 / December 31, 2023
Rupiah	49.858.800.714
United States Dollar	20.241.832.646
Total	70.100.633.360
Allowance for Impairment Losses	(19.246.250)
Net	70.081.387.110

c. By Bank

	31 Desember 2023 / December 31, 2023
Rupiah	
Local Government Bank	
PT Bank DKI	11.015.097
Commercial Bank	
PT Bank Central Asia Tbk	46.706.536.915
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	2.168.641.164
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	851.523.288
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	121.084.250
Sub - Total	49.858.800.714
United States Dollar	
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	11.604.716.283
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	8.637.116.363
Sub - Total	20.241.832.646
Total	70.100.633.360
Allowance for Impairment Losses	(19.246.250)
Net	70.081.387.110

6. GIRO PADA BANK LAIN (LANJUTAN)

d. Tingkat Suku Bunga Rata-rata per Tahun

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Rupiah	0,00% - 2,00%
Dolar Amerika Serikat	0,00%

e. Perubahan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

	31 Desember 2024 / December 31, 2024			
	Dalam Ribuan Rupiah/ In Thousand Rupiah			
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Jumlah/Amount
Saldo awal tahun	19.246	--	--	19.246
Perubahan selama periode berjalan	12.789	--	--	12.789
Saldo akhir periode	32.035	--	--	32.035

	31 Desember 2023 / December 31, 2023			
	Dalam Ribuan Rupiah/ In Thousand Rupiah			
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Jumlah/Amount
Saldo awal tahun	17.233	--	--	17.233
Perubahan selama periode berjalan	2.013	--	--	2.013
Saldo akhir periode	19.246	--	--	19.246

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas telah memadai.

f. Berdasarkan Kualitas Aset

Bank melakukan penilaian atas penurunan nilai pada giro pada bank lain secara individual dengan adanya bukti objektif penurunan nilai.

Seluruh giro pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 diklasifikasikan lancar.

Kualitas giro pada bank lain adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Lancar	45.119.172.455
Jumlah	45.119.172.455
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(32.035.380)
Jumlah bersih	45.087.137.075

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat saldo giro pada bank lain yang digunakan sebagai agunan.

6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (CONTINUED)

d. Average Interest Rate per Annum

	31 Desember 2023 / December 31, 2023
	0,00% - 1,25%
	0,00%

Rupiah
United States Dollar

e. Movements in the Allowance for Impairment Losses

	31 Desember 2024 / December 31, 2024			
	Dalam Ribuan Rupiah/ In Thousand Rupiah			
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Jumlah/Amount
Balance, beginning of year	19.246	--	--	19.246
Movement during current period	12.789	--	--	12.789
Balance, end of period	32.035	--	--	32.035

	31 Desember 2023 / December 31, 2023			
	Dalam Ribuan Rupiah/ In Thousand Rupiah			
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Jumlah/Amount
Balance, beginning of year	17.233	--	--	17.233
Movement during current period	2.013	--	--	2.013
Balance, end of period	19.246	--	--	19.246

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate.

f. By Asset Quality

The Bank assessed impairment in current accounts with other bank individually based on whether an objective evidence of impairment exists.

All current accounts with other banks as of December 31, 2024 and 2023 were classified as current.

The quality of current account with other banks are as follows :

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	
	70.100.633.360	Current
	70.100.633.360	Total
	(19.246.250)	Allowance for Impairment Losses
	70.081.387.110	Net

As of December 31, 2024 and 2023, there are no current account with other banks which are used as collateral.

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN

a. Berdasarkan Jenis dan Hubungan

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	31 Desember 2023 / December 31, 2023
Pihak Ketiga		
Fasilitas Penyimpanan		
Bank Indonesia	600.000.000.000	100.000.000.000
Diskonto yang Belum di Amortisasi	(87.474.487)	(14.574.831)
Sub - Jumlah	599.912.525.513	99.985.425.169
Interbank Call Money		
Bank Umum		
PT Bank CIMB Niaga, Tbk	300.000.000.000	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	-	350.000.000.000
PT Bank Maybank Indonesia	-	300.000.000.000
Bank Pemerintah Daerah		
PT BPD BJB	400.000.000.000	-
PT BPD Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat	310.000.000.000	275.000.000.000
PT BPD DKI	300.000.000.000	300.000.000.000
PT BPD Sumsel Babel	150.000.000.000	150.000.000.000
PT BPD Sulawesi Tenggara	100.000.000.000	100.000.000.000
PT BPD Papua	100.000.000.000	-
PT BPD Kalimantan Selatan	100.000.000.000	-
PT BPD Lampung	100.000.000.000	50.000.000.000
PT BPD Maluku Maluku	75.000.000.000	100.000.000.000
PT BPD Jambi	60.000.000.000	-
PT BPD NTT	50.000.000.000	-
PT BPD Kalimantan Tengah	50.000.000.000	25.000.000.000
PT BPD DIY	50.000.000.000	100.000.000.000
PT BPD Jawa Timur, Tbk	-	300.000.000.000
PT BPD Kalimantan Barat	-	150.000.000.000
PT BPD Sumatera Utara	-	200.000.000.000
Sub - Jumlah	2.145.000.000.000	2.400.000.000.000
Tabungan		
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	24.832.578	24.882.868
Sub - Jumlah	24.832.578	24.882.868
Deposit On Call		
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	400.000.000.000	-
Sub - Jumlah	400.000.000.000	-
Deposito		
Negotiable Certificate of Deposit	-	28.500.004.297
Deposit Berjangka	-	300.000.000
Sub - Jumlah	-	28.800.004.297
Jumlah	3.144.937.358.091	2.528.810.312.334
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.778.693.256)	(2.062.877.735)
Jumlah bersih	3.143.158.664.835	2.526.747.434.599

b. Tingkat Suku Bunga Rata-rata per Tahun

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	31 Desember 2023 / December 31, 2023
Rupiah	0,00% - 6,57%	0,00% - 6,60%

c. Perubahan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

	31 Desember 2024 / December 31, 2024			
	Dalam Ribuan Rupiah/ In Thousand Rupiah			
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Jumlah/Amount
Saldo awal tahun	2.062.878	--	--	2.062.878
Perubahan selama periode berjalan	(284.184)	--	--	(284.184)
Saldo, akhir periode	1.778.694	--	--	1.778.694

7. PLACEMENT WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS

a. By Type and Relationship

Third Parties	
Saving Facility	
Bank Indonesia	
Unamortized	
Discount	
Sub - Total	
Interbank Call Money	
Commercial Bank	
PT Bank CIMB Niaga, Tbk	
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	
PT Bank Maybank Indonesia	
Local Government Bank	
PT BPD BJB	
PT BPD Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat	
PT BPD DKI	
PT BPD Sumsel Babel	
PT BPD Sulawesi Tenggara	
PT BPD Papua	
PT BPD Kalimantan Selatan	
PT BPD Lampung	
PT BPD Maluku Maluku	
PT BPD Jambi	
PT BPD NTT	
PT BPD Kalimantan Tengah	
PT BPD DIY	
PT BPD Jawa Timur, Tbk	
PT BPD Kalimantan Barat	
PT BPD Sumatera Utara	
Sub - Total	
Saving	
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	
Sub - Total	
Deposit On Call	
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	
Deposito	
Negotiable Certificate of Deposit	
Time Deposit	
Sub - Total	
Total	
Allowance for Impairment Losses	
Net	

b. Average Interest Rate per Annum

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	31 Desember 2023 / December 31, 2023
Rupiah	0,00% - 6,57%	0,00% - 6,60%

c. Movements in the Allowance for Impairment Losses

Balance, beginning of year
Movement during current period
Balance, end of period

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (LANJUTAN)

c. Perubahan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (Lanjutan)

	31 Desember 2023 / December 31, 2023			
	Dalam Ribuan Rupiah/ In Thousand Rupiah			
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Jumlah/Amount
Saldo awal tahun	378.944	--	--	378.944
Perubahan selama periode berjalan	1.683.934	--	--	1.683.934
Saldo, akhir periode	2.062.878	--	--	2.062.878

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas telah memadai.

d. Berdasarkan Kualitas Aset

Kualitas Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	31 Desember 2023 / December 31, 2023	
Lancar	3.144.937.358.091	2.528.810.312.334	Current
Jumlah	3.144.937.358.091	2.528.810.312.334	Total
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.778.693.256)	(2.062.877.735)	Allowance for Impairment Losses
Jumlah bersih	3.143.158.664.835	2.526.747.434.599	Net

e. Berdasarkan Sisa Umur sampai dengan saat Jatuh Tempo

Nilai tercatat penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang dimiliki hingga jatuh tempo berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh temponya adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024		31 Desember 2023 / December 31, 2023		
	Jangka Waktu / Period	Jumlah / Total	Jangka Waktu / Period	Jumlah / Total	
Deposito	< 1 tahun/year	-	< 1 tahun/year	28.800.004.297	Deposits
Interbank Call Money	< 1 bulan/month	2.145.000.000.000	< 1 bulan/month	2.400.000.000.000	Interbank Call Money
Fasilitas Penyimpanan	< 1 bulan/month	599.912.525.513	< 1 bulan/month	99.985.425.169	Savings Facility
Tabungan	> 1 bulan/month	24.832.578	> 1 bulan/month	24.882.868	Savings
Deposito On Call	< 1 bulan/month	400.000.000.000	< 1 bulan/month	-	Deposit On Call
		3.144.937.358.091		2.528.810.312.334	

f. Informasi Lain

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang digunakan sebagai jaminan. Manajemen yakin bahwa seluruh dana yang ditempatkan akan diterima kembali.

7. PLACEMENT WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS (CONTINUED)

c. Movements in the Allowance for Impairment Losses (Continued)

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	
	Dalam Ribuan Rupiah/ In Thousand Rupiah	
	Stage 1	Stage 2
Balance, beginning of year	378.944	--
Movement during current period	1.683.934	--
Balance, end of period	2.062.878	--

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate.

d. By Asset Quality

The quality of Placement with Bank Indonesia and other banks are as follows:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	31 Desember 2023 / December 31, 2023	
Lancar	3.144.937.358.091	2.528.810.312.334	Current
Jumlah	3.144.937.358.091	2.528.810.312.334	Total
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.778.693.256)	(2.062.877.735)	Allowance for Impairment Losses
Jumlah bersih	3.143.158.664.835	2.526.747.434.599	Net

e. By Remaining Period to Maturity Date

The carrying value for placement on the Bank Indonesia and other banks that are held to maturity by remaining period to maturity date are as follows:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024		31 Desember 2023 / December 31, 2023		
	Jangka Waktu / Period	Jumlah / Total	Jangka Waktu / Period	Jumlah / Total	
Deposito	< 1 tahun/year	-	< 1 tahun/year	28.800.004.297	Deposits
Interbank Call Money	< 1 bulan/month	2.145.000.000.000	< 1 bulan/month	2.400.000.000.000	Interbank Call Money
Fasilitas Penyimpanan	< 1 bulan/month	599.912.525.513	< 1 bulan/month	99.985.425.169	Savings Facility
Tabungan	> 1 bulan/month	24.832.578	> 1 bulan/month	24.882.868	Savings
Deposito On Call	< 1 bulan/month	400.000.000.000	< 1 bulan/month	-	Deposit On Call
		3.144.937.358.091		2.528.810.312.334	

f. Other Information

As of December 31, 2024 and 2023, there were no placements with Bank Indonesia and other banks pledged as cash collateral. Management believes that all funds are placed to be reaccepted.

8. EFEK - EFEK

a. Berdasarkan Jenis dan Hubungan

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	31 Desember 2023 / December 31, 2023	
Biaya Perolehan diamortisasi Pihak Ketiga			Amortized Cost Third Parties
Surat Utang Negara (SUN)			Government Bonds
(setelah dikurangi/ditambah diskonto/premi yang diamortisasi pada Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp15.017.757.895 dan Rp18.386.502.601	3.277.824.242.105	2.789.455.497.399	(net of unamortized discount or premium of the year 2024 and 2023 of Rp15,017,757,895 and Rp18,386,502,601
Sub - Jumlah	3.277.824.242.105	2.789.455.497.399	Sub - Total
Obligasi Bank	366.000.000.000	376.000.000.000	Bank Bonds
Sub - Jumlah	366.000.000.000	376.000.000.000	Sub - Total
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)	6.116.253.029.587	1.190.580.706.246	Securities Bank Indonesia Rupiah (SRBI)
Sub - Jumlah	6.116.253.029.587	1.190.580.706.246	Sub - Total
Jumlah	9.760.077.271.692	4.356.036.203.645	Total
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-	(28.500.000)	Allowance for Impairment Losses
Jumlah Bersih	9.760.077.271.692	4.356.007.703.645	Net

8. SECURITIES

a. By Type and Relationship

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	31 Desember 2023 / December 31, 2023	
Biaya Perolehan diamortisasi Pihak Ketiga			Amortized Cost Third Parties
Surat Utang Negara (SUN)			Government Bonds
(setelah dikurangi/ditambah diskonto/premi yang diamortisasi pada Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp15.017.757.895 dan Rp18.386.502.601	3.277.824.242.105	2.789.455.497.399	(net of unamortized discount or premium of the year 2024 and 2023 of Rp15,017,757,895 and Rp18,386,502,601
Sub - Jumlah	3.277.824.242.105	2.789.455.497.399	Sub - Total
Obligasi Bank	366.000.000.000	376.000.000.000	Bank Bonds
Sub - Jumlah	366.000.000.000	376.000.000.000	Sub - Total
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)	6.116.253.029.587	1.190.580.706.246	Securities Bank Indonesia Rupiah (SRBI)
Sub - Jumlah	6.116.253.029.587	1.190.580.706.246	Sub - Total
Jumlah	9.760.077.271.692	4.356.036.203.645	Total
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-	(28.500.000)	Allowance for Impairment Losses
Jumlah Bersih	9.760.077.271.692	4.356.007.703.645	Net

8. EFEK - EFEK (LANJUTAN)

8. SECURITIES (CONTINUED)

b. Berdasarkan Penerbit

b. By Issuer

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	31 Desember 2023 / December 31, 2023
Pemerintah		
SUN Seri FR 0090	800.334.000.000	800.334.000.000
SUN Seri FR 0081	800.000.000.000	800.000.000.000
SUN Seri FR 0086	500.000.000.000	500.000.000.000
SUN Seri FR 0101	300.000.000.000	-
SUN Seri FR 0095	230.000.000.000	230.000.000.000
SUN Seri VR 0033	214.698.000.000	214.698.000.000
SUN Seri FR 0084	212.810.000.000	212.810.000.000
SUN Seri FR 0104	185.000.000.000	-
SUN Seri FR 0045	30.000.000.000	30.000.000.000
SUN Seri FR 0042	20.000.000.000	20.000.000.000
Diskonto yang belum Diamortisasi	(15.017.757.895)	(18.386.502.601)
Sub - Jumlah	3.277.824.242.105	2.789.455.497.399
Bank		
PT Bank Mandiri, Tbk	115.000.000.000	115.000.000.000
PT Bank Negara Indonesia, Tbk	75.000.000.000	75.000.000.000
PT Bank Tabungan Negara, Tbk	70.000.000.000	70.000.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk	50.000.000.000	50.000.000.000
PT Bank BTPN, Tbk	33.000.000.000	-
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk	23.000.000.000	23.000.000.000
PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	-	30.000.000.000
PT Bank Mantap	-	13.000.000.000
Sub - Jumlah	366.000.000.000	376.000.000.000
SRBI		
SRBI Seri IDSR010825364S	500.000.000.000	-
SRBI Seri IDSR020525364S	500.000.000.000	-
SRBI Seri IDSR040425364S	500.000.000.000	-
SRBI Seri IDSR040725364S	500.000.000.000	-
SRBI Seri IDSR051225364S	500.000.000.000	-
SRBI Seri IDSR071125364S	500.000.000.000	-
SRBI Seri IDSR080925367S	500.000.000.000	-
SRBI Seri IDSR101025364S	500.000.000.000	-
SRBI Seri IDSR110625364S	500.000.000.000	-
SRBI Seri IDSR141125364S	500.000.000.000	-
SRBI Seri IDSR310125364S	500.000.000.000	-
SRBI Seri IDSR280225364S	400.000.000.000	-
SRBI Seri IDSR170125364S	200.000.000.000	-
SRBI Seri IDSR240125364S	100.000.000.000	-
SRBI Seri IDSR100125364S	73.578.000.000	-
SRBI Seri IDSR030125364S	60.526.000.000	-
SRBI Seri IDSR041224364S	-	200.000.000.000
SRBI Seri IDSR011124364S	-	100.000.000.000
SRBI Seri IDSR151124364S	-	100.000.000.000
SRBI Seri IDSR221124364S	-	100.000.000.000
SRBI Seri IDSR271124364S	-	100.000.000.000
SRBI Seri IDSR131224364S	-	100.000.000.000
SRBI Seri IDSR181224364S	-	100.000.000.000
SRBI Seri IDSR201224364S	-	100.000.000.000
SRBI Seri IDSR271224364S	-	100.000.000.000
SRBI Seri IDSR081124364S	-	63.397.000.000
SRBI Seri IDSR190424182S	-	50.000.000.000
SRBI Seri IDSR181024364S	-	50.000.000.000
SRBI Seri IDSR231024364S	-	50.000.000.000
SRBI Seri IDSR251024364S	-	50.000.000.000
Diskonto yang belum Diamortisasi	(217.850.970.413)	(72.816.293.754)
Sub - Jumlah	6.116.253.029.587	1.190.580.706.246
Jumlah	9.760.077.271.692	4.356.036.203.645
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-	(28.500.000)
Jumlah Bersih	9.760.077.271.692	4.356.007.703.645

Government

SUN Seri FR 0090
SUN Seri FR 0081
SUN Seri FR 0086
SUN Seri FR 0101
SUN Seri FR 0095
SUN Seri VR 0033
SUN Seri FR 0084
SUN Seri FR 0104
SUN Seri FR 0045
SUN Seri FR 0042
Unamortized
discount
Sub - Total

Bank

PT Bank Mandiri, Tbk
PT Bank Negara Indonesia, Tbk
PT Bank Tabungan Negara, Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk
PT Bank BTPN, Tbk
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk
PT BPD Sulawesi Selatan and
Sulawesi Barat
PT Bank Mantap
Sub - Total

SRBI

SRBI Seri IDSR010825364S
SRBI Seri IDSR020525364S
SRBI Seri IDSR040425364S
SRBI Seri IDSR040725364S
SRBI Seri IDSR051225364S
SRBI Seri IDSR071125364S
SRBI Seri IDSR080925367S
SRBI Seri IDSR101025364S
SRBI Seri IDSR110625364S
SRBI Seri IDSR141125364S
SRBI Seri IDSR310125364S
SRBI Seri IDSR280225364S
SRBI Seri IDSR170125364S
SRBI Seri IDSR240125364S
SRBI Seri IDSR100125364S
SRBI Seri IDSR030125364S
SRBI Seri IDSR041224364S
SRBI Seri IDSR011124364S
SRBI Seri IDSR151124364S
SRBI Seri IDSR221124364S
SRBI Seri IDSR271124364S
SRBI Seri IDSR131224364S
SRBI Seri IDSR181224364S
SRBI Seri IDSR201224364S
SRBI Seri IDSR271224364S
SRBI Seri IDSR081124364S
SRBI Seri IDSR190424182S
SRBI Seri IDSR181024364S
SRBI Seri IDSR231024364S
SRBI Seri IDSR251024364S

Unamortized
discount
Sub - Total

Total

Allowance for Impairment
Losses
Net

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)
AS OF DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

8. SECURITIES (CONTINUED)

c. *Bv Rating*

Bond ratings classified by the rating institution assessment as of December 31, 2024 and 2023 were as follows:

- 41 -

8. EFEK - EFEK (LANJUTAN)

8. SECURITIES (CONTINUED)

31 Desember 2023 / December 31, 2023				
Pemeringkat / Agencies	Peringkat / Rating	Nilai Wajar / Fair Value		
Perbankan				Banking
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	Pefindo	115.000.000.000		PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	Pefindo	75.000.000.000		PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	Fitch	70.000.000.000		PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	Pefindo	50.000.000.000		PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	Pefindo	30.000.000.000		PT BPD Sulawesi Selatan and Barat
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk	Pefindo	23.000.000.000		PT Bank Maybank Indonesia, Tbk
PT Bank Mantap	Fitch	13.000.000.000		PT Bank Mantap
Sub-Jumlah		376.000.000.000		Sub-Total
Pemerintah				Government
SUN Seri FR 0090	-	800.334.000.000		SUN Seri FR 0090
SUN Seri FR 0081	-	800.000.000.000		SUN Seri FR 0081
SUN Seri FR 0086	-	500.000.000.000		SUN Seri FR 0086
SUN Seri FR 0095	-	230.000.000.000		SUN Seri FR 0095
SUN Seri VR 0033	-	214.698.000.000		SUN Seri VR 0033
SUN Seri FR 0084	-	212.810.000.000		SUN Seri FR 0084
SUN Seri FR 0045	-	30.000.000.000		SUN Seri FR 0045
SUN Seri FR 0042	-	20.000.000.000		SUN Seri FR 0042
SUN Seri FR 0046	-	-		SUN Seri FR 0046
Diskonto yang belum diamortisasi	-	(18.386.502.601)		Unamortized discount
Bank Indonesia				Bank Indonesia
SRBI Seri				SRBI Seri
IDSR041224364S	-	200.000.000.000		IDSR041224364S
IDSR151124364S	-	100.000.000.000		IDSR151124364S
IDSR221124364S	-	100.000.000.000		IDSR221124364S
IDSR271124364S	-	100.000.000.000		IDSR271124364S
IDSR131224364S	-	100.000.000.000		IDSR131224364S
IDSR181224364S	-	100.000.000.000		IDSR181224364S
IDSR201224364S	-	100.000.000.000		IDSR201224364S
IDSR271224364S	-	100.000.000.000		IDSR271224364S
IDSR011124364S	-	100.000.000.000		IDSR011124364S
IDSR081124364S	-	63.397.000.000		IDSR081124364S
IDSR190424182S	-	50.000.000.000		IDSR190424182S
IDSR181024364S	-	50.000.000.000		IDSR181024364S
IDSR231024364S	-	50.000.000.000		IDSR231024364S
IDSR251024364S	-	50.000.000.000		IDSR251024364S
Diskonto yang belum diamortisasi	-	(72.816.293.754)		Unamortized discount
Jumlah		4.356.036.203.645		Total
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(28.500.000)		Allowance for Impairment Losses
Jumlah Bersih		4.356.007.703.645		Net

8. EFEK - EFEK (LANJUTAN)

d. Berdasarkan Jangka Waktu

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Kurang dari 1 tahun	-
1 sampai dengan 5 tahun	6.696.951.029.587
Lebih dari 5 tahun	3.063.126.242.105
Jumlah	9.760.077.271.692

e. Berdasarkan Sisa Umur Jatuh Tempo

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Kurang dari 1 tahun	7.365.110.829.414
1 sampai dengan 5 tahun	2.179.860.628.175
Lebih dari 5 tahun	215.105.814.103
Jumlah	9.760.077.271.692

f. Tingkat Suku Bunga Rata-rata per Tahun

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Efek - efek	5,125% - 10,25%

g. Perubahan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

	31 Desember 2024 / December 31, 2024				
	Dalam Ribuan Rupiah/ In Thousand Rupiah				
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Jumlah/Amount	
Saldo awal tahun	28.500	--	--	28.500	Balance, beginning of year
Perubahan selama periode berjalan	(28.500)	--	--	(28.500)	Movement during current period
Saldo, akhir periode	-	--	--	-	Balance, end of period

	31 Desember 2023 / December 31, 2023				
	Dalam Ribuan Rupiah/ In Thousand Rupiah				
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Jumlah/Amount	
Saldo awal tahun	235.314	--	--	235.314	Balance, beginning of year
Perubahan selama periode berjalan	(206.814)	--	--	(206.814)	Movement during current period
Saldo, akhir periode	28.500	--	--	28.500	Balance, end of period

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas telah memadai.

h. Berdasarkan Kualitas Aset

Kualitas efek-efek adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Lancar	9.760.077.271.692
Jumlah	9.760.077.271.692
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-
Jumlah bersih	9.760.077.271.692

8. SECURITIES (CONTINUED)

d. By Period

	31 Desember 2023 / December 31, 2023
--	--
4.094.057.571.679	4.094.057.571.679
261.950.131.966	261.950.131.966
4.356.007.703.645	4.356.007.703.645

Less than 1 year
1 to 5 years
More than 5 years
Total

e. By Maturity

	31 Desember 2023 / December 31, 2023
1.233.552.206.246	1.233.552.206.246
3.092.801.430.220	3.092.801.430.220
29.654.067.179	29.654.067.179
4.356.007.703.645	4.356.007.703.645

Less than 1 year
1 to 5 year
More than 5 year
Total

f. Average Interest Rate per Annum

	31 Desember 2023 / December 31, 2023
5,125% - 10,25%	5,125% - 10,25%

Marketable Securities

g. Movements in the Allowance for Impairment Losses

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate.

h. By Asset Quality

The quality of Marketable Securities are as follows :

	31 Desember 2023 / December 31, 2023
4.356.036.203.645	4.356.036.203.645
4.356.036.203.645	4.356.036.203.645
(28.500.000)	(28.500.000)
4.356.007.703.645	4.356.007.703.645

Current
Total
Allowance for
Impairment Losses
Net

9. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI

9. MARKETABLE SECURITIES PURCHASED UNDER RESALE AGREEMENTS

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Marketable securities purchased under resale agreements as of December 31, 2024 and 2023 are as follows :

a. Berdasarkan Penerbit

a. By Issuer

31 Desember 2024 / December 31, 2024

Pihak Penerbit / Counterparties	Jangka Waktu Hari / Tenor Days	Tanggal Jual Kembali / Resale Date	Nilai Nominal / Nominal Amount	Nilai Jual Kembali / Resale Amount	Pendapatan yang Belum Realisasi / Unrealized Interest	Nilai Tercatat / Carrying Value
Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
Jumlah / Total			-	-	-	-

31 Desember 2023 / December 31, 2023

Pihak Penerbit / Counterparties	Jangka Waktu Hari / Tenor Days	Tanggal Jual Kembali / Resale Date	Nilai Nominal / Nominal Amount	Nilai Jual Kembali / Resale Amount	Pendapatan yang Belum Realisasi / Unrealized Interest	Nilai Tercatat / Carrying Value
Bank Indonesia						
VR0034	7	3-Jan-24	750.000.000.000	719.061.627.650	239.507.603	718.822.120.047
VR0054	7	4-Jan-24	300.000.000.000	287.335.837.810	123.558.300	287.212.279.510
FR0080	364	5-Jan-24	200.000.000.000	205.433.704.884	117.588.423	205.316.116.461
VR0063	364	16-Aug-24	200.000.000.000	204.610.185.151	7.892.165.717	196.718.019.434
VR0071	364	2-Aug-24	200.000.000.000	203.392.849.226	7.372.328.908	196.020.520.318
VR0080	364	12-Apr-24	200.000.000.000	198.833.288.738	3.493.827.226	195.339.461.512
VR0070	364	26-Jan-24	100.000.000.000	101.867.838.399	457.573.406	101.410.264.993
VR0048	364	9-Feb-24	100.000.000.000	101.892.780.909	713.090.705	101.179.690.204
VR0046	364	22-Mar-24	100.000.000.000	102.555.930.798	1.442.411.522	101.113.519.276
VR0046	364	22-Mar-24	100.000.000.000	102.507.280.485	1.431.055.477	101.076.225.008
VR0043	364	21-Jun-24	100.000.000.000	102.724.617.943	3.003.467.539	99.721.150.404
VR0080	364	16-Feb-24	100.000.000.000	100.229.907.744	826.834.406	99.403.073.338
VR0083	364	2-Feb-24	100.000.000.000	99.951.840.017	573.488.701	99.378.351.316
VR0068	364	19-Jan-24	100.000.000.000	99.584.224.343	321.340.559	99.262.883.784
VR0094	364	23-Feb-24	100.000.000.000	99.802.062.545	947.993.688	98.854.068.857
VR0094	364	12-Jan-24	100.000.000.000	98.945.546.470	194.955.294	98.750.591.176
VR0064	364	19-Jul-24	100.000.000.000	101.735.851.033	3.445.360.515	98.290.490.518
VR0071	364	5-Jul-24	100.000.000.000	101.129.945.234	3.188.923.910	97.941.021.324
VR0084	364	8-Mar-24	100.000.000.000	98.905.178.566	1.186.144.041	97.719.034.525
VR0085	364	1-Mar-24	100.000.000.000	98.764.759.494	1.061.377.949	97.703.381.545
VR0085	364	1-Apr-24	100.000.000.000	99.194.929.013	1.563.299.906	97.631.629.107
VR0093	364	24-May-24	100.000.000.000	99.595.986.065	2.472.996.844	97.122.989.221
VR0094	364	17-May-24	100.000.000.000	99.462.693.363	2.354.531.246	97.108.162.117
VR0073	364	3-May-24	100.000.000.000	99.162.596.642	2.110.115.750	97.052.480.892
VR0077	367	10-May-24	100.000.000.000	99.253.656.829	2.224.314.910	97.029.341.919
VR0077	364	26-Apr-24	100.000.000.000	98.978.234.850	1.984.607.180	96.993.627.670
VR0037	364	14-Jun-24	100.000.000.000	99.101.498.524	2.781.282.461	96.320.216.063
VR0072	364	12-Jul-24	100.000.000.000	98.616.508.501	3.229.567.000	95.386.941.501
Jumlah / Total			4.050.000.000.000	4.022.631.361.226	56.753.709.186	3.965.877.652.040

Tidak terdapat efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) dengan pihak berelasi.

There were no marketable securities purchased under resale agreement with related parties.

Seluruh efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali dalam mata uang Rupiah.

All marketable securities purchased under resale agreement are stated in Rupiah.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 lokasi penyimpanan efek-efek jaminan tanpa warkat (scriptless) dicatat pada sistem BI - SSSS Bank Indonesia.

As of December 31, 2024 and 2023, the scriptless collateral securities were custodied in BI- SSSS system of Bank Indonesia.

b. Tingkat Suku Bunga Rata-rata per Tahun

b. Average Interest Rate per Annum

31 Desember 2024 /
December 31, 2024

31 Desember 2023 /
December 31, 2023

Efek - efek yang Dibeli dengan Janji
Dijual Kembali

-

6,00% - 6,70%

Marketable Securities Purchased under
Resale Agreements

9. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI (LANJUTAN)

c. Berdasarkan Kualitas Aset

Kualitas Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	31 Desember 2023 / December 31, 2023	
Lancar	-	3.965.877.652.040	Current
Jumlah	-	3.965.877.652.040	Total

Manajemen berpendapat bahwa tidak perlu cadangan kerugian penurunan nilai pada efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada 31 Desember 2024 dan 2023.

9. MARKETABLE SECURITIES PURCHASED UNDER RESALE AGREEMENTS (CONTINUED)

c. By Asset Quality

The quality of Marketable Securities Purchased under Resale Agreements are as follows:

Management believes that there were no allowance for impairment losses on securities purchased under resale agreements to be recognized as of December 31, 2024 and 2023.

10. PINJAMAN YANG DIBERIKAN

a. Berdasarkan Jenis dan Hubungan

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	31 Desember 2023 / December 31, 2023	
Pihak Berelasi			Related Parties
Konsumsi	25.594.538.599	22.217.699.744	Consumer
Investasi	3.072.625.561	3.685.406.048	Investment
Modal kerja	3.554.819.994	1.538.759.302	Working Capital
Sub - Jumlah	32.221.984.154	27.441.865.094	Sub - Total
Pihak Ketiga			Third Parties
Konsumsi	9.845.952.811.271	9.635.059.636.867	Consumer
Investasi	10.148.113.997.612	8.575.658.340.281	Investment
Modal kerja	2.396.466.231.441	2.477.263.420.809	Working Capital
Sindikasi	407.414.388.966	435.157.742.436	Syndication
Sub - Jumlah	22.797.947.429.290	21.123.139.140.393	Sub - Total
Total	22.830.169.413.444	21.150.581.005.487	Total
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.305.082.017.392)	(1.232.527.296.112)	Allowance for Impairment Losses
Jumlah bersih	21.525.087.396.052	19.918.053.709.375	Net

Rincian Pinjaman yang diberikan berdasarkan kualitas kredit adalah sebagai berikut:

Loans based on quality are as follows :

31 Desember 2024 / December 31, 2024				
Kualitas	Portofolio Pinjaman yang diberikan/ Loans Portfolio		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / Allowance for Impairment	
	%	Jumlah Pinjaman yang diberikan / Total Loans	Jumlah / Total	
Lancar	98,10%	22.395.257.413.275	940.706.643.862	Current
Dalam Perhatian Khusus	0,99%	224.851.683.887	159.330.794.433	Special Mention
Kurang Lancar	0,06%	14.637.833.507	9.622.096.322	Substandard
Diragukan	0,10%	21.976.355.246	21.976.355.246	Doubtful
Macet	0,76%	173.446.127.529	173.446.127.529	Loss
Jumlah	100,00%	22.830.169.413.444	1.305.082.017.392	Total
31 Desember 2023 / December 31, 2023				
Kualitas	Portofolio Pinjaman yang diberikan/ Loans Portfolio		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / Allowance for Impairment	
	%	Jumlah Pinjaman yang diberikan / Total Loans	Jumlah / Total	
Lancar	98,26%	20.782.707.325.503	936.923.855.371	Current
Dalam Perhatian Khusus	0,46%	96.062.513.003	28.709.969.683	Special Mention
Kurang Lancar	0,06%	13.076.642.629	8.158.946.716	Substandard
Diragukan	0,08%	17.077.928.202	17.077.928.202	Doubtful
Macet	1,14%	241.656.596.150	241.656.596.140	Loss
Jumlah	100,00%	21.150.581.005.487	1.232.527.296.112	Total

10. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (LANJUTAN)

10. LOANS (CONTINUED)

b. Berdasarkan Sektor Ekonomi

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	31 Desember 2023 / December 31, 2023
Rumah Tangga	9.871.547.349.870	9.657.277.336.611
Perdagangan Besar dan Eceran	6.048.280.146.621	5.556.217.159.030
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.716.940.863.965	1.549.325.580.520
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	1.866.187.420.441	1.393.961.438.603
Konstruksi	765.664.443.315	770.169.343.970
Aktivitas Penyewaan dan Sewa		
Guna Usaha Tanpa Hak Opsi		
Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	294.141.437.592	244.126.384.601
Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	550.346.330.047	463.955.670.331
Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	15.732.497.986	15.275.532.311
Industri Pengolahan	502.656.383.479	393.938.227.613
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial wajib	-	240.048.753
Real Estate	14.999.773.035	19.241.195.939
Informasi dan Komunikasi	13.156.692.643	23.817.247.162
Pengangkutan dan Pergudangan	143.605.037.883	138.321.804.815
Aktivitas Keuangan dan Asuransi	55.378.760.635	62.259.131.314
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/ Air Panas dan Udara Dingin	8.035.714.286	18.750.000.000
Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah dan Aktivitas aktivitas Remediasi	109.221.071.358	113.593.609.205
Pendidikan	67.617.717.247	49.497.037.853
Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	9.214.338.501	12.182.520.773
Pertambangan dan Penggalan	76.889.421	76.889.421
Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	85.142.737.675	77.773.911.488
Aktivitas Jasa Lainnya	692.223.807.444	590.580.935.174
Jumlah	22.830.169.413.444	21.150.581.005.487
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.305.082.017.392)	(1.232.527.296.112)
Jumlah bersih	21.525.087.396.052	19.918.053.709.375

Household
Wholesale and Retail Trade
Agriculture, forestry and Fishery
Accommodation and culinary supplying
Construction
Leasing and Leasing Activities Without Employment Options
Travel Agencies and Other Business Support
Human Health Activities And Social activity
Arts, Entertainment and Recreation
Processing Industry
Government administration defense and social welfare
Real Estate
Information and Communication
Transportation and Warehousing
Financial and Insurance Activities
Procurement of Electricity, Gas, Steam/ Hot Water and Cold Air
Water Management, Wastewater Management Waste Management and Recycling and Remediation activities
Education
Household Activities as Employer Activities That Produce Goods and Services By Households Used to Fulfill Own Needs
Mining and Excavation
Professional, Scientific and Technical Activities
Other Service Activities
Total
Allowance for Impairment Losses
Total - net

c. Berdasarkan Periode Sisa Jatuh Tempo

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	31 Desember 2023 / December 31, 2023
Kurang dari atau sama dengan 1 tahun	1.491.057.519.439	1.570.042.647.178
Lebih dari 1 tahun sampai 2 tahun	795.348.645.455	800.227.217.913
Lebih dari 2 tahun sampai 5 tahun	6.038.368.724.587	5.095.662.194.842
Lebih dari 5 tahun	14.505.394.523.963	13.684.648.945.554
Jumlah	22.830.169.413.444	21.150.581.005.487
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.305.082.017.392)	(1.232.527.296.112)
Jumlah bersih	21.525.087.396.052	19.918.053.709.375

c. By Remaining Period to Maturity
Less or equal to 1 year
More than 1 year to 2 years
More than 2 year to 5 years
More than 5 years
Total
Allowance for Impairment Losses
Net

10. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (LANJUTAN)

10. LOANS (CONTINUED)

d. Berdasarkan Jangka Waktu Perjanjian Kredit

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	31 Desember 2023 / December 31, 2023
Lebih dari 5 tahun	15.696.379.339.786	15.181.785.360.225
Lebih dari 2 tahun sampai 5 tahun	5.737.465.031.701	4.665.052.662.913
Lebih dari 1 tahun sampai 2 tahun	900.440.979.155	133.044.716.126
Kurang dari atau sama dengan 1 tahun	495.884.062.802	1.170.698.266.223
Jumlah	22.830.169.413.444	21.150.581.005.487
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.305.082.017.392)	(1.232.527.296.112)
Jumlah bersih	21.525.087.396.052	19.918.053.709.375

More than 5 years
More than 2 years to 5 years
More than 1 year
to 2 years
Less than or equal
to 1 year
Total
Allowance for Impairment
Losses
Net

e. Berdasarkan Pihak Berelasi

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	31 Desember 2023 / December 31, 2023
Keluarga Direksi dan Karyawan kunci	26.419.046.747	25.561.390.510
Komisaris	3.214.217.807	151.067.630
Lainnya	2.588.719.600	1.729.406.954
Jumlah	32.221.984.154	27.441.865.094

Director's family and Key
Employees
Commissioners
Others
Total

f. Berdasarkan Stage

f. By Stage

	31 Desember 2024 / December 31, 2024 (Dalam Ribuan Rupiah/ In Thousand of Rupiah)			
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Jumlah/Total
Saldo awal	20.724.188.158	67.243.126	339.149.721	21.150.581.005
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (Stage 2)	(65.543.364)	69.396.084	(3.852.720)	-
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (Stage 3)	(213.042.911)	(24.945.697)	237.988.608	-
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (Stage 1)	40.104.144	(28.595.767)	(11.508.377)	-
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali	1.883.898.368	(27.983.110)	(176.326.850)	1.679.588.408
Saldo akhir	22.369.604.395	75.114.636	385.450.382	22.830.169.413

Beginning balance
Transfer to lifetime
expected credit losses
(Stage 2)
Transfer to credit
impaired (Stage 3)
Transfer to 12 month
expected credit losses (Stage 1)
Net change in exposure
and remeasurement
Ending balance

	31 Desember 2023 / December 31, 2023 (Dalam Ribuan Rupiah/ In Thousand of Rupiah)			
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Jumlah/Total
Saldo awal	18.632.215.938	341.390.257	1.094.722.725	20.068.328.920
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (Stage 2)	(46.990.333)	64.084.680	(17.094.347)	--
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (Stage 3)	(57.039.598)	(53.543.972)	110.583.570	--
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (Stage 1)	654.980.741	(200.184.240)	(454.796.501)	--
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali	1.541.021.410	(64.503.599)	(394.265.726)	1.082.252.085
Saldo akhir	20.724.188.158	67.243.126	339.149.721	21.150.581.005

Beginning balance
Transfer to lifetime
expected credit losses
(Stage 2)
Transfer to credit
impaired (Stage 3)
Transfer to 12 month
expected credit losses (Stage 1)
Net change in exposure
and remeasurement
Ending balance

g. Tingkat Suku Bunga per Tahun

g. Annual Interest Rates

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	31 Desember 2023 / December 31, 2023
Pinjaman yang diberikan	2,00% - 16,00%	2,00% - 16,00%

Loans

10. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (LANJUTAN)

10. LOANS (CONTINUED)

h. Ikhtisar Kredit Bermasalah Berdasarkan Sektor Ekonomi

h. Non-Performing Loans by Economic Sector

31 Desember 2024 / December 31, 2024		31 Desember 2023 / December 31, 2023	
Kredit bermasalah/ Non Performing Loan		Cadangan Kerugian/ Allowance for Impairment Losses	
Rumah Tangga	42.717.013.859	39.813.809.031	Household
Perdagangan Besar dan Eceran	111.605.129.728	111.006.072.842	Wholesale and Retail Trade
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	19.016.465.069	18.559.785.813	Agriculture, forestry and Fishery
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	11.469.393.901	10.909.251.701	Accommodation and culinary supplying
Konstruksi	8.241.780.167	8.241.780.167	Construction
Aktivitas Penyewaan dan Sewa			Leasing and Leasing Activities
Guna Usaha Tanpa Hak Opsi			Without Employment Options
Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	867.869.508	812.498.227	Travel Agencies and Other Business Support
Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	2.489.505.436	2.489.505.436	Human Health Activities and Social activity
Industri Pengolahan	3.035.956.300	2.634.242.542	Processing Industry
Informasi dan Komunikasi	390.082.990	390.082.990	Information and Communication
Aktivitas Keuangan dan Asuransi	2.569.787.975	2.569.787.975	Financial and Insurance Activities
Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah			Water Management, Wastewater
Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah			Management, Waste
dan Aktivitas aktivitas Remediasi	98.500.000	98.500.000	Management and Recycling and Remediation activities
Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	850.993	850.993	Household Activities as Employer Activities That Produce Goods and Services By Households Used to Fulfill Own Needs
Pertambangan dan Penggalian	76.889.421	76.889.421	Mining and Excavation
Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	497.084.585	475.217.126	Professional, Scientific and Technical Activities
Aktivitas Jasa Lainnya	6.984.006.350	6.966.304.833	Other Service Activities
Jumlah	210.060.316.282	205.044.579.097	Total

31 Desember 2023 / December 31, 2023		31 Desember 2023 / December 31, 2023	
Kredit bermasalah/ Non Performing Loan		Cadangan Kerugian/ Allowance for Impairment Losses	
Rumah Tangga	50.626.126.602	48.318.086.591	Household
Perdagangan Besar dan Eceran	158.187.131.343	156.138.281.018	Wholesale and Retail Trade
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	32.240.512.114	32.113.867.427	Agriculture, forestry and Fishery
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	9.251.338.921	9.024.659.164	Accommodation and culinary supplying
Konstruksi	6.412.804.913	6.412.804.913	Construction
Aktivitas Penyewaan dan Sewa			Leasing and Leasing Activities
Guna Usaha Tanpa Hak Opsi			Without Employment Options
Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	959.293.342	959.293.342	Travel Agencies and Other Business Support
Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	1.386.117.320	1.386.117.319	Human Health Activities And Social activity
Industri Pengolahan	2.997.871.816	2.925.276.414	Processing Industry
Real Estate	412.638.895	412.638.895	Real Estate
Informasi dan Komunikasi	71.588.942	71.588.942	Information and Communication
Aktivitas Keuangan dan Asuransi	2.276.184.042	2.276.184.041	Financial and Insurance Activities
Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah			Water Management, Wastewater
Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah			Management, Waste
dan Aktivitas aktivitas Remediasi	98.500.000	98.500.000	Management and Recycling and Remediation activities
Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	89.002.901	80.217.526	Household Activities as Employer Activities That Produce Goods and Services By Households Used To Fulfill Own Needs
Pertambangan dan Penggalian	76.889.421	76.889.421	Mining and Excavation
Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	1.950.636.058	1.950.636.058	Professional, Scientific and Technical Activities
Pengangkutan dan Perdagangan	9.583.333	42.385	Transport and trade
Aktivitas Jasa Lainnya	4.764.947.018	4.648.387.602	Other Service Activities
Jumlah	271.811.166.981	266.893.471.058	Total

10. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (LANJUTAN)

10. LOANS (CONTINUED)

h. Ikhtisar Kredit Bermasalah Berdasarkan Sektor Ekonomi (Lanjutan)

Rasio kredit bermasalah - kotor terhadap jumlah kredit adalah 0,92% dan 1,29% masing-masing untuk tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Rasio kredit bermasalah - bersih terhadap jumlah kredit adalah 0,02% dan 0,02% masing-masing untuk tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

i. Kredit Sindikasi

Kredit sindikasi merupakan Pinjaman yang diberikan kepada debitur berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama (sindikasi) dengan bank-bank lain. Jumlah kredit sindikasi sebesar Rp407.414.388.966 dan Rp435.157.742.436 masing-masing untuk tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Keikutsertaan Bank dalam kredit sindikasi sebagai anggota sebesar 0,69% - 5,75% pada 31 Desember 2024 dan 0,69% - 5,75% pada 31 Desember 2023 dari masing - masing fasilitas pinjaman.

j. Perubahan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Perubahan dalam penyisihan kerugian Pinjaman yang diberikan adalah sebagai berikut:

h. Non-Performing Loans by Economic Sector (Continued)

Non performing loan ratio - gross to total loan was 0.92% and 1.29% as of December 31, 2024 and 2023, respectively.

Non performing loan ratio - net to total loan was 0.02% and 0.02% as of December 31, 2024 and 2023, respectively.

i. Syndicated Loans

Syndicated loans represent loans provided to debtors under syndication agreements with other banks. Total syndicated loans amounted to Rp407,414,388,966 and Rp435,157,742,436 as of December 31, 2024 and 2023, respectively.

The participation of the Bank as a member of syndications is between 0.69% - 5.75% as at December 31, 2024 and 0.69% - 5.75% as at December 31, 2023 of each syndicated loan facility.

j. Movements in the Allowance for Impairment Losses

The movement of Allowance for impairment losses is as follows:

31 Desember 2024 / December 31, 2024 (Dalam Ribuan Rupiah/ In Thousand of Rupiah)					
Stage 1	Stage 2	Stage 3	Jumlah/Total		
Saldo, awal tahun	846.818.858	53.581.614	332.126.824	1.232.527.296	Balance, beginning of year
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (Stage 2)	(21.198.002)	24.386.597	(3.188.595)	-	Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (Stage 3)	(98.672.351)	(17.228.563)	115.900.914	-	Transfer to credit impaired (Stage 3)
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (Stage 1)	27.616.163	(17.314.060)	(10.302.103)	-	Transfer to 12 month expected credit losses (Stage 1)
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali	131.770.115	(5.082.249)	12.462.698	139.150.564	Net change in exposure and remeasurement
Penghapusan	-	-	(66.595.843)	(66.595.843)	Written-off
Saldo, akhir tahun	886.334.783	38.343.339	380.403.895	1.305.082.017	Balance, end of year
31 Desember 2023 / December 31, 2023 (Dalam Ribuan Rupiah/ In Thousand of Rupiah)					
Stage 1	Stage 2	Stage 3	Jumlah/Total		
Saldo, awal tahun	126.797.582	179.387.498	799.120.375	1.105.305.455	Balance, beginning of year
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (Stage 2)	(850.804)	12.485.540	(11.634.736)	--	Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (Stage 3)	(2.639.985)	(35.174.145)	37.814.130	--	Transfer to credit impaired (Stage 3)
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (Stage 1)	336.824.899	(103.865.622)	(232.959.277)	--	Transfer to 12 month expected credit losses (Stage 1)
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali	387.122.457	1.673.382	(51.933.863)	336.861.976	Net change in exposure and remeasurement
Penghapusan	(435.291)	(925.039)	(208.279.805)	(209.640.135)	Written-off
Saldo, akhir tahun	846.818.858	53.581.614	332.126.824	1.232.527.296	Balance, end of year

Sebelum tanggal 24 Maret 2024, *rating* tidak sepenuhnya mencerminkan kualitas kredit karena manajemen melakukan penyesuaian *rating* dalam rangka mitigasi risiko kredit sebagaimana surat OJK S-7/D.03/2020 tanggal 14 April 2020 perihal Penerapan PSAK 109 (sebelumnya PSAK 71) dan PSAK 113 (sebelumnya PSAK 68) dalam Kondisi Pandemi Covid-19 serta sesuai POJK No. 19 tanggal 28 Oktober 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana, dimana berakhir pada 24 Maret 2024. Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas telah memadai.

Before March 24, 2024, *rating* does not fully reflect credit quality because management has made rating adjustments in order to mitigate credit risk as stated in OJK Letter S-7/D.03/2020 dated April 14, 2020 concerning Application of SFAS 109 (previously SFAS 71) and SFAS 113 (previously SFAS 68) in the Covid-19 Pandemic Conditions and in accordance with POJK No. 19 dated 28 October 2022 concerning Special Treatment for Financial Services Institutions in Certain Regions and Sectors in Indonesia Affected by Disasters, which end on March 24, 2024. Management believes that the allowance for impairment losses is adequate.

10. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (LANJUTAN)

k. Informasi Pokok Lainnya Sehubungan dengan Pinjaman yang Diberikan

- Pinjaman yang diberikan pada umumnya dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan, fidusia, deposito berjangka atau jaminan lain yang dapat diterima oleh bank.
- Kredit konsumsi terdiri dari kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, kredit multiguna lainnya, kredit multiguna perorangan dan kredit konsumtif perorangan lainnya.
- Kredit Program Pemerintah terdiri dari kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit modal kerja lainnya dimana Pemerintah dapat menyediakan sebagian dan/atau keseluruhan dananya.
- Kredit karyawan adalah Pinjaman yang diberikan kepada karyawan untuk membeli kendaraan, rumah, atau keperluan lainnya dengan tingkat bunga sesuai tujuan kredatnya.
- 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat pelanggaran ataupun pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada pihak ketiga dan pihak berelasi serta sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan Bank Indonesia.
- Saldo kredit yang dihapus buku selama periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp66.595.842.488 dan Rp209.640.134.712. Penghapusbukuan kredit ini bukan merupakan hapus tagih, sehingga upaya penagihan tetap dilakukan.
- Simpanan dari nasabah yang diblokir dan dijadikan jaminan atas Pinjaman yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing - masing sebesar Rp310.567.943.916 dan Rp99.486.855.342 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Deposito berjangka	297.184.669.764
Tabungan	13.383.274.152
Jumlah	310.567.943.916

- Tagihan/piutang yang ada saat ini dan/atau akan melekat dikemudian hari, termasuk hak agunan yang melekat padanya dijadikan jaminan atas pinjaman yang diterima dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

l. Kredit yang Direstrukturisasi

Berikut ini adalah jenis dan jumlah Pinjaman yang diberikan yang telah direstrukturisasi per 31 Desember 2024 dan 2023:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Perpanjangan Jangka waktu	
Kredit dan Skema Lain	829.510.069.105
Perpanjangan Jangka waktu Kredit	135.571.462.723
Perpanjangan Waktu dengan Penyesuaian Suku Bunga	622.232.802
Jumlah	965.703.764.630

Kredit yang direstrukturisasi berdasarkan kualitas kredit adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Lancar	685.917.877.420
Dalam Perhatian Khusus	146.584.482.438
Kurang Lancar	8.533.158.716
Diragukan	8.947.689.713
Macet	115.720.556.343
Jumlah	965.703.764.630

10. LOANS (CONTINUED)

k. Other Significant Information Related to Loans

- Loans are generally secured by pledged collateral, fiduciary rights, time deposits or other collateral accepted by Bank.
- Consumption loans consist of home ownership loans, motor vehicle loans, other multipurpose loans, individual multipurpose loans and other individual consumer loans.
- Government Loan Program consists of investment loans, working capital loan and other working capital loans which the Government provide partial and/or all of their funds.
- Loans to Employee are loans given to employees to buy vehicles, houses, or other purposes with an interest rate according to the purpose of the credit
- December 31, 2024 and 2023, there were no violations or exceeding the Legal Lending Limit (LLL) for third parties and related parties and in accordance with regulations established by Bank Indonesia.
- Credit balances written off during the period December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp66,595,842,488 and Rp209,640,134,712. Write-off credit is not a write-off, so that the billing attempt is still being done.
- Deposits from customer which are blocked and pledged as loan collateral as of December 31, 2024 and 2023, amounting to Rp310,567,943,916 and Rp99,486,855,342 respectively, are follows:

	31 Desember 2023 / December 31, 2023
	96.507.192.307
	2.979.663.035
Jumlah	99.486.855.342

Time Deposit
Savings

Total

- Mortgage bills/debts that are present and/or will be attached later, including the right collateral attached to it are pledged as loan collateral from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

l. Restructured Loans

Below is the type and amount of restructured loans as of December 31, 2024 and 2023:

	31 Desember 2023 / December 31, 2023
Perpanjangan Jangka waktu	
Kredit dan Skema Lain	1.397.367.237.502
Perpanjangan Jangka waktu Kredit	196.966.794.188
Perpanjangan Waktu dengan Penyesuaian Suku Bunga	7.323.401.712
Jumlah	1.601.657.433.402

Extension of Loan Period
and Other Schemes
Extension of
Loan Period
Extension of Loan Period and
Interest Rate Adjustment

Total

Restructured loans by quality are as follows:

	31 Desember 2023 / December 31, 2023
Lancar	1.411.578.890.793
Dalam Perhatian Khusus	20.488.034.484
Kurang Lancar	4.466.195.928
Diragukan	6.491.527.037
Macet	158.632.785.160
Jumlah	1.601.657.433.402

Current
Special Mention
Substandard
Doubtful
Loss
Total

11. ASET TETAP

11. FIXED ASSETS

Berikut ini adalah aset tetap kepemilikan langsung yang dimiliki oleh Bank:

The following is the direct ownership of fixed assets by the Bank:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024				
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance
Harga Perolehan/ Acquisition Cost					
Tanah/Land	16.224.955.805	-	-	-	16.224.955.805
Bangunan/Buildings	110.772.189.606	-	866.787.950	13.529.446.782,00	123.434.848.438
Inventaris kelompok I/ Fixture Group I	163.307.763.912	16.138.655.507	762.905.651	17.289.478.680	195.972.992.448
Inventaris kelompok II/ Fixture Group II	46.193.793.226	2.243.596.891	146.190.495	-	48.291.199.622
	336.498.702.549	18.382.252.398	1.775.884.096	30.818.925.462	383.923.996.313
Aset dalam Penyelesaian/ Construction in Progress	17.731.197.095	17.295.098.626	-	(30.818.925.462)	4.207.370.259
Jumlah/Total	354.229.899.644	35.677.351.024	1.775.884.096	-	388.131.366.573
Akumulasi Penyusutan/ Accumulated Depreciation					
Bangunan/Buildings	55.612.666.014	4.833.044.458	522.256.195	-	59.923.454.277
Inventaris kelompok I/ Fixture Group I	140.216.307.648	21.032.568.126	746.177.664	-	160.502.698.110
Inventaris kelompok II/ Fixture Group II	34.958.066.028	3.234.261.417	120.713.783	-	38.071.613.662
	230.787.039.690	29.099.874.001	1.389.147.642	-	258.497.766.049
Nilai Buku Bersih/ Net Book Value	123.442.859.954				129.633.600.524
	31 Desember 2023 / December 31, 2023				
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance
Harga Perolehan/ Acquisition Cost					
Tanah/Land	13.042.730.805	3.182.225.000	--	--	16.224.955.805
Bangunan/Buildings	97.791.816.613	117.974.000	133.249.745	12.995.648.738	110.772.189.606
Inventaris kelompok I/ Fixture Group I	163.441.105.713	14.275.111.354	15.453.596.485	1.045.143.330	163.307.763.912
Inventaris kelompok II/ Fixture Group II	41.917.895.108	4.565.893.915	1.147.999.208	858.003.411	46.193.793.226
	316.193.548.239	22.141.204.269	16.734.845.438	14.898.795.479	336.498.702.549
Aset dalam Penyelesaian/ Construction in Progress	5.340.984.857	27.289.007.717	--	(14.898.795.479)	17.731.197.095
Jumlah/Total	321.534.533.096	49.430.211.986	16.734.845.438	--	354.229.899.644
Akumulasi Penyusutan/ Accumulated Depreciation					
Bangunan/Buildings	51.308.210.984	4.437.704.765	133.249.735	--	55.612.666.014
Inventaris kelompok I/ Fixture Group I	140.960.145.385	14.711.704.775	15.455.542.512	--	140.216.307.648
Inventaris kelompok II/ Fixture Group II	33.082.066.154	3.019.477.956	1.143.478.082	--	34.958.066.028
	225.350.422.523	22.168.887.496	16.732.270.329	--	230.787.039.690
Nilai Buku Bersih/ Net Book Value	96.184.110.573				123.442.859.954

Jumlah penyusutan yang dibebankan pada beban operasional lain sebesar Rp29.099.874.001 dan Rp22.168.887.496 masing-masing pada 31 Desember 2024 dan 2023 (catatan 32).

Total depreciation expense charged to other operating expenses amounted to Rp29,099,874,001 and Rp22,168,887,496 in December 31, 2024 and 2023, respectively (note 32).

Persentase tingkat penyelesaian aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2024 berkisar antara 4% sampai dengan 95%. Estimasi penyelesaian yaitu pada tahun 2025.

The percentage level of completion of assets in progress on December 31 2024 ranges from 4% to 95%. Estimated completion is in 2025.

Bank telah mengasuransikan aset tetap untuk menutupi kemungkinan kerugian terhadap risiko kebakaran, pencurian, dan bencana alam dengan nilai pertanggungan asuransi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp349.721.418.610 dan Rp339.195.735.383 pada PT Asuransi Bangun Askrida.

The Bank has insured fixed assets to cover possible losses against the risk of fire, theft and natural disasters with insurance coverage values as of December 31, 2024 and 2023 amounting to Rp349,721,418,610 and Rp339,195,735,383 respectively at PT Asuransi Bangun Askrida .

11. ASET TETAP (LANJUTAN)

Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan asuransi tersebut telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian yang terjadi atas aset tetap yang dipertanggungkan pada 31 Desember 2024 dan 2023.

Penjualan dan penghapusan aset tetap adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Harga Jual	-
Nilai Buku	386.736.454
Labu (Rugi) Penjualan/Penghapusan (Catatan 33)	(386.736.454)

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 Bank memiliki 52 dan 52 bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik sejumlah 1 unit dan 1 unit, Sertifikat Hak Pakai (SHP) sejumlah 2 unit dan 2 unit, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) sejumlah 49 unit dan 49 unit yang mempunyai masa manfaat 30 (tiga puluh) tahun. Masa berlaku Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) berakhir antara tahun 2037 sampai dengan 2042. Seluruh sertifikat tanah adalah atas nama Bank. Manajemen berpendapat tidak terdapat masalah dengan perpanjangan hak atas tanah karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti kepemilikan yang memadai.

Tidak terdapat aset tetap yang dijaminkan oleh Bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Manajemen berpendapat tidak terdapat indikasi penurunan nilai permanen atas aset tetap yang dimiliki Bank.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 harga perolehan dari aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah masing-masing sebesar Rp156.773.671.263 dan Rp133.096.419.575.

11. FIXED ASSETS (CONTINUED)

Management is of the opinion that the amount of insurance coverage is sufficient to cover possible losses occurring on the insured fixed assets on December 31, 2024 and 2023.

Details of sale and disposal of property and equipment are as follows :

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	
Selling Price	246.918.650	
Book Value	2.575.109	
Gain (Loss) on Sale/Disposal (Note 33)	244.343.541	

As of December 31, 2024 and 2023, the Bank owns 52 and 52 plots of land with Certificates of Ownership Rights of 1 unit and 1 unit, Certificates of Right to Use (SHP) of 2 units and 2 units, and Certificates of Building Use Rights (HGB) of 49 units and 49 units which have a useful life of 30 (thirty) years. The validity period of the Building Use Rights Certificate (HGB) ends between 2037 and 2042. All land certificates are in the name of the Bank. Management is of the opinion that there is no problem with the extension of land rights because all land was obtained legally and supported by adequate proof of ownership.

There are no fixed assets pledged by the Bank as of December 31, 2024 and 2023.

Management believes that there is no indication of permanent impairment losses on fixed assets.

As of December 31, 2024 and 2023 the cost of fully depreciated fixed asset that are still in use amounted to Rp156,773,671,263 and Rp133,096,419,575.

12. ASET TAKBERWUJUD

Rincian aset takberwujud adalah sebagai berikut:

12. INTANGIBLE ASSETS

The details of intangible assets are as follows:

31 Desember 2024 / December 31, 2024					
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Saldo akhir/ Ending balance		
Nilai Perolehan				Acquisition Cost	
Perangkat lunak komputer	47.769.374.582	3.991.054.298	--	51.760.428.880	Computer Software
Jumlah	47.769.374.582	3.991.054.298	--	51.760.428.880	Total
Akumulasi amortisasi				Accumulated Amortization	
Perangkat lunak komputer	39.561.514.110	4.738.667.375	--	44.300.181.485	Computer Software
Jumlah	39.561.514.110	4.738.667.375	--	44.300.181.485	Total
Nilai Buku Bersih	8.207.860.472			7.460.247.395	Net Intangible Assets
31 Desember 2023 / December 31, 2023					
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Saldo akhir/ Ending balance		
Nilai Perolehan				Acquisition Cost	
Perangkat lunak komputer	41.632.775.742	6.136.598.840	--	47.769.374.582	Computer Software
Jumlah	41.632.775.742	6.136.598.840	--	47.769.374.582	Total
Akumulasi amortisasi				Accumulated Amortization	
Perangkat lunak komputer	35.819.694.171	3.741.819.939	--	39.561.514.110	Computer Software
Jumlah	35.819.694.171	3.741.819.939	--	39.561.514.110	Total
Nilai Buku Bersih	5.813.081.571			8.207.860.472	Net book value

Jumlah amortisasi yang dibebankan pada beban operasional lain sebesar Rp4.738.667.375 dan Rp3.741.819.939 masing-masing pada 31 Desember 2024 dan 2023 (catatan 32).

Total amortization expense charged to other operating expenses amounted to Rp4,738,667,375 and Rp3,741,819,939 in December 31, 2024 and 2023, respectively (note 32).

13. ASET HAK GUNA

13. RIGHT-OF-USE ASSET

31 Desember 2024 / December 31, 2024					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga Perolehan					Acquisition Cost
Gedung	45.504.975.154	10.952.916.833	7.906.465.922	48.551.426.065	Building
Tanah	3.311.826.599	111.000.000	--	3.422.826.599	Land
ATM	19.951.635.192	8.746.308.217	3.885.932.386	24.812.011.023	ATM
Kendaraan	4.716.881.605	347.912.433	1.285.330.385	3.779.463.653	Vehicle
Gedung Bukan Kantor	2.039.000.551	933.587.805	719.190.000	2.253.398.356	Non-Office Building
Total	75.524.319.101	21.091.725.288	13.796.918.693	82.819.125.696	Total
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Gedung	20.643.471.120	8.503.546.519	7.906.465.922	21.240.551.717	Building
Tanah	338.021.690	187.816.444	--	525.838.134	Land
ATM	10.754.614.557	6.497.357.633	3.885.932.386	13.366.039.804	ATM
Kendaraan	1.418.980.372	1.253.472.999	1.285.330.385	1.387.122.986	Vehicle
Gedung Bukan Kantor	1.351.296.360	896.913.568	719.190.000	1.529.019.928	Non-Office Building
Total	34.506.384.099	17.339.107.163	13.796.918.693	38.048.572.569	Total
Nilai buku bersih	41.017.935.002			44.770.553.127	Net book value

31 Desember 2023 / December 31, 2023					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga Perolehan					Acquisition Cost
Gedung	42.223.320.959	6.914.271.289	3.632.617.094	45.504.975.154	Building
Tanah	785.718.980	2.526.107.619	--	3.311.826.599	Land
ATM	21.669.395.823	1.227.936.394	2.945.697.025	19.951.635.192	ATM
Kendaraan	10.378.877.686	3.257.276.402	8.919.272.483	4.716.881.605	Vehicle
Hardware	1.859.192.045	--	1.859.192.045	-	Hardware
Gedung Bukan Kantor	1.048.440.000	1.158.760.551	168.200.000	2.039.000.551	Non-Office Building
Total	77.964.945.493	15.084.352.255	17.524.978.647	75.524.319.101	Total
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Gedung	16.117.703.518	8.158.384.696	3.632.617.094	20.643.471.120	Building
Tanah	211.890.980	126.130.710	--	338.021.690	Land
ATM	8.831.566.225	4.868.745.357	2.945.697.025	10.754.614.557	ATM
Kendaraan	7.391.790.175	2.946.462.680	8.919.272.483	1.418.980.372	Vehicle
Hardware	1.394.394.029	464.798.016	1.859.192.045	-	Hardware
Gedung Bukan Kantor	648.114.583	871.381.777	168.200.000	1.351.296.360	Non-Office Building
Total	34.595.459.510	17.435.903.236	17.524.978.647	34.506.384.099	Total
Nilai buku bersih	43.369.485.983			41.017.935.002	Net book value

Jumlah penyusutan yang dibebankan pada beban operasional lain sebesar Rp17.339.107.163 dan Rp17.435.903.236 masing-masing pada 31 Desember 2024 dan 2023 (catatan 32).

Total depreciation expense charged to other operating expenses amounted to Rp17,339,107,163 and Rp17,435,903,237 in December 31, 2024 and 2023, respectively (note 32).

14. ASET LAIN-LAIN

14. OTHER ASSETS

Seluruh aset lain-lain dalam mata uang Rupiah.

All other assets are stated in Rupiah.

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	31 Desember 2023 / December 31, 2023	
Bunga yang Akan Diterima	138.390.842.458	124.776.601.141	Accrued Interest receivable
Tagihan Switching Antar Bank & GPN	50.147.958.932	24.900.073.043	Interbank Switching Bills & GPN
Rupa-rupa Dalam Penyelesaian	17.066.850.692	16.302.732.582	Other Advances
Beban yang Ditangguhkan	11.691.500.199	15.741.254.220	Deferred Costs
Biaya Dibayar Dimuka	4.745.379.742	4.719.116.980	Prepaid Expense
Setoran Jaminan	2.548.430.545	2.109.686.109	Security Deposit
Tagihan lainnya	2.523.574.279	13.182.871.397	Other Bills
Persediaan Barang Cetakan	1.423.900.863	1.450.567.749	Printing Supplies
Tagihan Kiriman Uang			Money bills transfer
Western Union	592.531.600	295.487.900	Western Union
Properti Terbengkalai	436.651.800	436.651.800	Abandoned Property
Lainnya	69.600.000	27.000.000	Others
Uang Muka Pajak	-	9.291.280.603	Tax Advance
Jumlah	229.637.221.111	213.233.323.524	Total

14. ASET LAIN-LAIN (LANJUTAN)

a. Bunga yang akan diterima terdiri dari:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Pinjaman yang diberikan	90.229.057.889
Efek-efek dan Penempatan Pada Bank Lain	48.161.784.569
Jumlah	138.390.842.458

b. Biaya dibayar dimuka terdiri dari:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Sewa	2.153.088.414
Asuransi	2.589.540.145
Lain-Lain	2.751.183
Jumlah	4.745.379.742

c. Uang muka pajak

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Pajak Badan (Catatan 19)	-
PPN (Catatan 19)	-
Dikurangi:	-
Penyisihan cadangan kerugian	-
Jumlah	-

Cadangan kerugian ekspektasian atas uang muka pajak adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Saldo awal tahun	48.424.954.723
Pemulihan tahun berjalan	(48.424.954.723)
Jumlah	-

Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak oleh Kantor Pajak, pada tanggal 7 Desember 2020, Bank telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPh Badan untuk tahun fiskal 2016 No. 00096/206/16/904/20 sebesar Rp59.074.459.024 dimana yang disetujui oleh Bank hanya sebesar Rp1.516.356.854 dan dicatat sebagai beban pajak kini - tahun sebelumnya di laporan laba rugi tahun 2020. Pada tanggal 4 Januari 2021, Bank telah melakukan pembayaran atas seluruh SKPKB PPh Badan dan telah mengajukan surat keberatan atas SKPKB PPh Badan yang tidak disetujui sebesar Rp57.558.102.170 ke Kantor Pajak pada tanggal 26 Februari 2021.

Pada tanggal 14 Desember 2020, Bank juga menerima SKPKB atas PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp242.949.390 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berikut Surat Tagihan Pajak (STP) sebesar Rp158.133.156 untuk tahun fiskal 2016. Pada tanggal 4 Januari 2021, Bank telah melakukan pembayaran atas seluruh SKPKB tersebut dan telah mengajukan surat keberatan atas SKPKB PPh 4 ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke Kantor Pajak pada tanggal 26 Februari 2021.

Jumlah pembayaran atas SKPKB yang tidak disetujui diatas sebesar Rp57.959.184.716 dimana Bank telah mengajukan keberatan dan dicatat sebagai uang muka pajak pada tanggal 31 Desember 2021.

Pada tanggal 13 Januari 2022 Bank menerima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-00001/KEB/PJ/WPJ.17/2022, KEP-00002/KEB/PJ/WPJ.17/2022, dan KEP-00003/KEB/PJ/WPJ.17/2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dimana Direktorat Jenderal Pajak menetapkan menolak keberatan Wajib Pajak dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak.

Selanjutnya, Bank memutuskan untuk mengajukan permohonan Banding yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Pajak yang berkedudukan di Jakarta sesuai Surat Nomor : R-1692/DIR/OKA/2022 dan R-1693/DIR/OKA/2022 tanggal 1 April 2022 perihal Permohonan Banding terhadap Keputusan Direktorat Jenderal Pajak atas keputusan penolakan keberatan dimaksud.

14. OTHER ASSETS (CONTINUED)

a. Accrued interests receivables are as follows:

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	
	85.380.049.578	Loans
	39.396.551.563	Securities and Placement with Other Banks
Total	124.776.601.141	Total

b. Prepaid expenses:

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	
	2.163.848.570	Rental
	2.553.717.793	Insurance
	1.550.617	Others
Total	4.719.116.980	Total

c. Tax advance

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	
	57.558.102.170	Corporate income tax (Note 19)
	158.133.156	VAT (Note 19)
	57.716.235.326	
Dikurangi:		Less:
Penyisihan cadangan kerugian	(48.424.954.723)	Allowance for impairment losses
Jumlah	9.291.280.603	Total

Expected credit losses on transactions of tax advance are as follows:

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	
	48.424.954.723	Balance, beginning of year
	-	Recovery during the year
Total	48.424.954.723	Total

Based on the results of the tax audit by the Tax Office, on December 7, 2020, the Bank has received an Underpaid Tax Assessment Letter (SKPKB) on Corporate Income Tax for the 2016 fiscal year No. 00096/206/16/904/20 amounting to Rp59,074,459,024 of which the Bank approved only Rp1,516,356,854 and was recorded as current tax expense - the previous year in the 2020 income statement. On January 4, 2021, the Bank has made payments for all SKPKB of Corporate Income Tax and has submitted an objection letter for the SKPKB of Corporate Income Tax which was not approved in the amount of Rp57,558,102,170 to the Tax Office on February 26, 2021.

On December 14, 2020, the Bank also received SKPKB for Income Tax Article 4 (2) amounting to Rp242,949,390 and Value Added Tax (VAT) and Tax Collection Letter (STP) amounting to Rp158,133,156 for the 2016 fiscal year. On January 4, 2021, the Bank has made payments for all of the said SKPKB and has submitted an objection letter to the SKPKB Tax Article 4 (2) and Value Added Tax (PPN) to the Tax Office on February 26, 2021.

The total payment for the SKPKB that was not approved above amounted to Rp57,959,184,716 where the Bank has filed an objection, which was recorded as a tax advance as of December 31, 2021.

On January 13, 2022, the Bank received the Decree of the Director General of Taxes Number: KEP-00001/KEB/PJ/WPJ.17/2022, KEP-00002/KEB/PJ/WPJ.17/2022, and KEP-00003/KEB/PJ /WPJ.17/2022 concerning Taxpayer's Objection to the Underpaid Tax Assessment Letter where the Directorate General of Taxes determines to reject the Taxpayer's objection and maintains the amount of tax still to be paid by the Taxpayer.

Subsequently, the Bank decided to submit an appeal application addressed to the Head of the Tax Court domiciled in Jakarta in accordance with Letters Number: R-1692/DIR/OKA/2022 and R-1693/DIR/OKA/2022 dated April 1, 2022 regarding the Application for Appeal against the Decision of the Directorate General of Taxes on the decision to reject the objection.

14. ASET LAIN-LAIN (LANJUTAN)

c. Uang muka pajak (Lanjutan)

Pada tanggal 8 Desember 2023, Bank menjalani persidangan ke-8 dengan agenda Pemberitahuan Sidang Pengucapan Putusan terkait permohonan Banding terhadap Keputusan Direktorat Jenderal Pajak atas keputusan penolakan keberatan dimaksud. Adapun hasil persidangan ke-8 adalah :

- a. No. Putusan : PUT-003579.15/2022/PP/M.IIIA Tahun 2023
Jenis Putusan : Mengabulkan Seluruhnya
b. No. Putusan : PUT-003580.16/2022/PP/M.IIIA Tahun 2023
Jenis Putusan : Mengabulkan Sebagian

Pada tanggal 2 April 2024, Bank mengakui pendapatan atas penyelesaian sengketa pajak tahun buku 2016 sebesar Rp48.385.816.690.

d. Tagihan Switching Antar Bank & GPN

Tagihan ATM merupakan tagihan yang terkait dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui jaringan ATM Bersama dan ATM Prima.

e. Tagihan Lainnya

Tagihan lainnya merupakan tagihan kepada PT Arindo Pratama atas dana talangan pembayaran ke PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
PT Arindo Pratama	12.617.871.397
	12.617.871.397
Dikurangi:	
Penyisihan cadangan kerugian	(10.094.297.118)
Jumlah	2.523.574.279

Cadangan kerugian ekspektasian atas tagihan lainnya adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Saldo awal tahun	-
Penyisihan tahun berjalan	10.094.297.118
Jumlah	10.094.297.118

14. OTHER ASSETS (CONTINUED)

c. Tax advance (Continued)

On December 8, 2023, the Bank underwent its 8th trial with the agenda of Notification of Decision Pronunciation Hearing regarding the appeal against the Directorate General of Taxes' decision regarding the decision to reject the objection in question. The results of the 8th trial are :

- a. No. Decision : PUT-003579.15/2022/PP/M.IIIA Tahun 2023
Type of Decision : Grant it all
b. No. Decision : PUT-003580.16/2022/PP/M.IIIA Tahun 2023
Type of Decision : Partially Grant it

On April 2, 2024, the Bank recognized income from the resolution of tax disputes for the 2016 financial year amounting to Rp48,385,816,690.

d. Interbank Switching Bills & GPN

ATM receivables is customers' transactions conducted through ATM Bersama and ATM Prima network.

e. Other Bills

The other bill is a bill to PT Arindo Pratama for the bailout funds paid to PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	
	13.182.871.397	PT Arindo Pratama
	13.182.871.397	
	-	Less:
	-	Allowance for impairment losses
Total	13.182.871.397	Total

Expected credit losses on transactions of other bills are as follows:

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	
	-	Balance, beginning of year
	-	Provision during the year
Total	-	Total

15. LIABILITAS SEGERA

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Titipan Kewajiban	
Switching Antar Bank & GPN	36.320.864.633
Beban yang Masih Harus Dibayar	29.346.716.695
Titipan Pembayaran Kredit	2.564.310.481
Titipan Gaji Tabungan	1.734.534.418
Rekening Titipan	13.555.343
Bunga Deposito Jatuh Tempo	33.238.125
Lain-lain	4.666.411.386
Jumlah	74.679.631.081

Rekening titipan merupakan hasil dari uang titipan yang diterima Bank atas transaksi pembayaran dari nasabah yang akan disetorkan pihak bank ke rekening tujuan. Seluruh transaksi liabilitas segera dalam bentuk Rupiah.

15. LIABILITIES DUE IMMEDIATELY

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	
	60.762.574.411	Interbank Switching & GPN
	31.134.273.345	Obligation
	5.684.116.214	Accrued payable
	993.364.792	Deposit of credit payment
	269.827.055	Temporary salary savings account
	7.056.667	Temporary account
	4.543.776.818	Interest of time deposit fall due
	-	Others
Total	103.394.989.302	Total

Temporary account were payment transactions received from customer by the Bank as collecting agent before deposit to destination account. All liability transactions are immediately in Rupiah.

16. SIMPANAN DARI NASABAH

a. Berdasarkan Jenis, Mata Uang dan Hubungan

	31 Desember 2024 / December 31, 2024			
	Pihak Berelasi / Related Parties	Pihak Ketiga / Third Parties	Jumlah / Total	
Rupiah				Rupiah
Giro	540.226.399.665	4.422.522.692.658	4.962.749.092.323	Current Account
Tabungan	25.296.065.082	17.785.814.256.618	17.811.110.321.700	Savings
Deposito Berjangka	25.126.901.368	9.364.956.646.192	9.390.083.547.560	Time Deposit
Sub - Jumlah	590.649.366.115	31.573.293.595.468	32.163.942.961.583	Sub - Total
Dollar Amerika Serikat				United States Dollar
Giro	--	76.629.583	76.629.583	Current Account
Tabungan	58.021.028	1.270.375.615	1.328.396.643	Savings
Deposito Berjangka	--	2.443.221.000	2.443.221.000	Time Deposit
Sub - Jumlah	58.021.028	3.790.226.198	3.848.247.226	Sub - Total
Jumlah	590.707.387.143	31.577.083.821.666	32.167.791.208.809	Total

16. DEPOSITS FROM CUSTOMERS

a. By Type, Currency, and Relationship

16. SIMPANAN DARI NASABAH (LANJUTAN)

16. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (CONTINUED)

a. Berdasarkan Jenis, Mata Uang dan Hubungan (Lanjutan)

a. By Type, Currency, and Relationship (Continued)

31 Desember 2023 / December 31, 2023				
	Pihak Berelasi / Related Parties	Pihak Ketiga / Third Parties	Jumlah / Total	
Rupiah				Rupiah
Giro	126.572.763.689	4.374.119.370.599	4.500.692.134.288	Current Account
Tabungan	16.377.822.782	15.458.494.649.570	15.474.872.472.352	Savings
Deposito Berjangka	19.436.223.037	7.950.715.894.666	7.970.152.117.703	Time Deposit
Sub - Jumlah	162.386.809.508	27.783.329.914.835	27.945.716.724.343	Sub - Total
Dollar Amerika Serikat				United States Dollar
Giro	--	75.329.053	75.329.053	Current Account
Tabungan	111.692.149	812.188.823	923.880.972	Savings
Deposito Berjangka	--	1.701.368.500	1.701.368.500	Time Deposit
Sub - Jumlah	111.692.149	2.588.886.376	2.700.578.525	Sub - Total
Jumlah	162.498.501.657	27.785.918.801.211	27.948.417.302.868	Total

b. Deposito Berjangka Berdasarkan Jangka Waktu

b. Time Deposits Based on Contractual Period

31 Desember 2024 / December 31, 2024		31 Desember 2023 / December 31, 2023		
Rupiah				Rupiah
1 bulan	2.076.722.845.920	2.093.234.497.988	1 Month	
3 bulan	2.711.192.774.899	2.071.826.697.962	3 Months	
6 bulan	1.682.379.230.831	1.532.219.426.764	6 Months	
12 bulan	2.872.085.822.201	2.254.377.491.390	12 Months	
24 bulan	47.702.873.708	18.494.003.599	24 Months	
Sub - Jumlah	9.390.083.547.560	7.970.152.117.703	Sub - Total	
Dollar Amerika Serikat				United States Dollar
1 bulan	1.665.832.500	1.593.589.500	1 Month	
3 bulan	112.665.000	107.779.000	3 Months	
6 bulan	257.520.000	--	6 Months	
12 bulan	407.203.500	--	12 Months	
Sub - Jumlah	2.443.221.000	1.701.368.500	Sub - Total	
Jumlah	9.392.526.768.560	7.971.853.486.203	Total	

c. Deposito Berjangka Berdasarkan Sisa Umur Sampai dengan Saat Jatuh Tempo

c. Classification Time Deposits Based on Remaining Maturity

31 Desember 2024 / December 31, 2024		31 Desember 2023 / December 31, 2023		
Rupiah				Rupiah
Kurang atau sama dengan 1 bulan	3.632.783.007.524	3.204.857.257.396	Less or equal to 1 month	
Lebih dari 1 sampai dengan 3 bulan	2.742.694.647.670	2.321.999.970.970	More than 1 month to 3 months	
Lebih dari 3 sampai dengan 6 bulan	1.440.106.331.270	1.223.792.287.017	More than 3 months to 6 months	
Lebih dari 6 sampai dengan 12 bulan	1.541.258.687.389	1.203.410.602.320	More than 6 months to 12 months	
Lebih dari 12 bulan	33.240.873.707	16.092.000.000	More than 12 months	
Sub - Jumlah	9.390.083.547.560	7.970.152.117.703	Sub - Total	
Dolar Amerika Serikat				United States Dollar
Kurang atau sama dengan 1 bulan	1.923.352.500	1.593.589.500	Less or equal to 1 month	
Lebih dari 1 sampai dengan 3 bulan	112.665.000	107.779.000	More than 1 month to 3 months	
Lebih dari 3 sampai dengan 6 bulan	-	--	More than 3 month to 6 months	
Lebih dari 6 sampai dengan 12 bulan	407.203.500	--	More than 6 month to 12 months	
Sub - Jumlah	2.443.221.000	1.701.368.500	Sub - Total	
Jumlah	9.392.526.768.560	7.971.853.486.203	Total	

d. Kisaran Suku Bunga per Tahun

d. Interest Range per Annum

31 Desember 2024 / December 31, 2024		31 Desember 2023 / December 31, 2023		
Rupiah				Rupiah
Giro	0,00% - 1,90%	0,00% - 1,90%	Current Account	
Tabungan	0,00% - 3,50%	0,00% - 3,50%	Savings	
Deposito berjangka	2,90% - 4,00%	2,90% - 4,00%	Time Deposit	
Dolar Amerika Serikat				United States Dollar
Giro	0,00% - 0,15%	0,00% - 0,15%	Current Account	
Tabungan	0,00% - 0,20%	0,00% - 0,20%	Savings	
Deposito berjangka	0,20%	0,20%	Time Deposit	

16. SIMPANAN DARI NASABAH (LANJUTAN)

e. Simpanan Diblokir dan Dijadikan Jaminan atas Pinjaman yang Diberikan:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Deposito berjangka	297.184.669.764
Tabungan	13.383.274.152
Jumlah	310.567.943.916

17. SIMPANAN DARI BANK LAIN

Seluruh simpanan dari bank lain dalam mata uang Rupiah.

a. Berdasarkan Jenis dan Hubungan

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Pihak Ketiga	
Deposito berjangka	258.016.962.310
Giro	182.539.682.452
Tabungan	221.135.342.280
Interbank Call Money	-
Jumlah	661.691.987.042

b. Deposito Berjangka Berdasarkan Jangka Waktu

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
1 bulan	88.255.000.000
3 bulan	149.111.962.310
6 bulan	7.550.000.000
12 bulan	13.100.000.000
Jumlah	258.016.962.310

c. Deposito Berjangka Berdasarkan Sisa Umur Sampai dengan Saat Jatuh Tempo

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Kurang atau sama dengan 1 bulan	113.555.000.000
Lebih dari 1 sampai dengan 3 bulan	128.811.962.310
Lebih dari 3 sampai dengan 6 bulan	4.550.000.000
Lebih dari 6 sampai dengan 12 bulan	11.100.000.000
Jumlah	258.016.962.310

d. Tingkat Suku Bunga per Tahun

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Giro	0,00% - 1,90%
Tabungan	0,00% - 3,50%
Deposito berjangka	2,90% - 4,00%
Interbank Call Money	-

e. Tidak terdapat simpanan dari bank lain yang diblokir atau dijadikan jaminan atas kredit yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

16. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (CONTINUED)

e. Blocked Savings Account and Pledged as Collateral for Loans:

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	
	96.507.192.307	Time deposit
	2.979.663.035	Savings
	99.486.855.342	Total

17. DEPOSITS FROM OTHER BANKS

All deposit with other banks are stated in Rupiah.

a. By Type and Relationship

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	
	285.721.962.310	Third parties
	188.759.149.804	Time deposits
	238.101.100.054	Current account
	838.000.000.000	Savings
	1.550.582.212.168	Interbank Call Money
		Total

b. Time Deposits Based on Contractual Period

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	
	113.460.000.000	1 Month
	146.611.962.310	3 Months
	10.550.000.000	6 Months
	15.100.000.000	12 Months
	285.721.962.310	Total

c. Classification Time Deposits Based on Remaining Maturity

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	
	152.060.000.000	Less or equal to 1 month
	111.511.962.310	More than 1 to 3 month
	10.050.000.000	More than 3 to 6 month
	12.100.000.000	More than 6 to 12 month
	285.721.962.310	Total

d. Interest Rate per Annum

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	
	0,00% - 1,90%	Current account
	0,00% - 3,50%	Savings
	2,90% - 4,00%	Time deposits
	6,15% - 6,45%	Interbank Call Money

e. There are no deposits from other banks that are blocked or used as collateral for loans granted on December 31, 2024 and 2023.

18. PINJAMAN YANG DITERIMA

Tidak terdapat pinjaman yang diterima dari pihak berelasi.
 Seluruh pinjaman yang diterima dalam mata uang Rupiah.

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Pinjaman PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	20.000.000.000
Pinjaman KPR	
Sejahtera tapak	3.583.537.129
KLBI KUT MT Tahun 1998/1999	466.213.822
Pinjaman KPR	
Sejahtera tapak Porsi 75	223.427.566
KLBI KUT MT Tahun 1999	160.469.329
Jumlah	24.433.647.846

Pinjaman PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Bank memperoleh fasilitas pinjaman lagi dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) untuk menggantikan sumber pendanaan atas Pinjaman Kredit Homestay (ASN, Pegawai BUMN, BUMD, PPPK) yang telah disalurkan sebesar Rp10.000.000.000 jangka waktu 1 tahun dengan tingkat bunga 6,50% sesuai dengan PKS No. 071/PP/SMF-BPD.BALI/2023 tanggal 8 Mei 2023. Pinjaman ini sudah dilunasi pada tanggal 8 Mei 2024.

Bank memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) untuk menggantikan sumber pendanaan atas KPR yang telah disalurkan sebesar Rp32.000.000.000 jangka waktu 3 tahun dengan tingkat bunga 5,80% sesuai dengan PKS No. 247/PP/SMF-BPD.BALI/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021. Pinjaman ini sudah dilunasi pada tanggal 20 Desember 2024.

Bank memperoleh fasilitas pinjaman lagi dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) untuk menggantikan sumber pendanaan atas Pinjaman Kredit Multiguna Perumahan (ASN, Pegawai BUMN, BUMD, PPPK) yang telah disalurkan sebesar Rp20.000.000.000 jangka waktu 5 tahun dengan tingkat bunga 6,75% sesuai dengan PKS No. 189/PP/SMF-BPD.BALI/VII/2022 tanggal 3 Agustus 2022.

Selama masa pinjaman, Bank memiliki kewajiban untuk memenuhi persyaratan antara lain:

- memberikan data laporan keuangan audited yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik paling lambat 120 hari sejak ditutupnya tahun buku;
- memberikan data laporan keuangan interim yang ditandatangani pejabat berwenang paling lambat 15 hari sesudah berakhirnya setiap triwulan;
- memberikan keterangan mengenai keadaan keuangan dan kegiatan usaha dan tidak terbatas pada isi laporan keuangan;
- memberikan dokumen dokumen lainnya;
- memberikan laporan secara periodik;
- mematuhi semua tuntutan hukum;
- menyediakan akses data/informasi atas Jaminan;
- memperkenankan SMF untuk melakukan verifikasi atas agunan, dan dokumen jaminan;
- memberitahukan secara tertulis setiap perkara/tuntutan/gugatan material yang dihadapi Bank;
- memberitahukan apabila terjadi Tindakan:
 - Adanya suatu pemberitahuan perkara
 - Perkara/tuntutan/gugatan dengan nilai 30% atau kolektif 50% dari ekuitas
 - Jika kalah perkara dan mempengaruhi kelangsungan usaha
- bertanggung jawab dalam menyimpan dokumen jaminan;
- mengasuransikan aset asetnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan;
- memperoleh persetujuan SMF dalam tindakan:
 - Menjual atau melepaskan harta kekayaan diluar kegiatan usaha sehari-hari
 - Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, likuidasi
 - Menjaminkan tagihan kredit KMG kepada pihak lain
 - Mengubah anggaran dasar yang terkait dengan penurunan modal disetor, maksud dan tujuan Bank serta kegiatan usaha.

18. BORROWINGS

There were no borrowings from related parties.
 All borrowings are stated in Rupiah.

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	
	62.000.000.000	Borrowing from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
		Borrowings from KPR
	3.863.302.860	Sejahtera tapak
	466.213.822	KLBI KUT MT Year 1998/1999
		Borrowings from KPR
	240.456.072	Sejahtera tapak Portion 75
	160.469.329	KLBI KUT MT Year 1999
Total	66.730.442.083	

Borrowing from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

The Bank obtained another loan facility from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) to replace the funding source for Homestay Loan (ASN, BUMN Employees, BUMD, PPPK) which had been disbursed in the amount of Rp10,000,000,000 for a period of 1 years with an interest rate of 6.50% according to PKS No. 071/PP/SMF-BPD.BALI/2023 dated May 8, 2023. This loan has been paid on May 8, 2024.

The Bank obtained loan facility from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) to replace the funding source for the KPR that had been disbursed in the amount of Rp32,000,000,000 for a period of 3 years with an interest rate of 5.80% in accordance with PKS No. 247/PP/SMF-BPD.BALI/XII/2021 dated December 17, 2021. This loan has been paid on December 20, 2024.

The Bank obtained another loan facility from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) to replace the funding source for Multipurpose Housing Loans (ASN, BUMN Employees, BUMD, PPPK) which had been disbursed in the amount of Rp20,000,000,000 for a period of 5 years with an interest rate of 6.75% according to PKS No. 189/PP/SMF-BPD.BALI/VII/2022 dated August 3, 2022.

During the loan period, the Bank has an obligation to fulfill the following requirements:

- provide audited financial report data that has been checked by a Public Accountant no later than 120 days since the closing of the financial year;
- provide interim financial report data signed by the authorized official no later than 15 days after the end of each quarter;
- provide information regarding financial condition and business activities and is not limited to the contents of financial statements;
- provide other documents;
- provide periodic reports;
- comply with all legal demands;
- provide access to data/information on the Guarantee;
- allowing SMF to verify the collateral and guarantee documents;
- notify of any material case/claim/lawsuit faced by the Bank;
- notify if there is an Action:
 - There is a notification of the case
 - Cases or demands or lawsuits with a value of 30% or collectively 50% of
 - If lose the case and it affects business continuity
- responsible for storing guarantee documents;
- insure assets related to business activities and assets;
- obtain SMF approval in action:
 - Selling or disposing of assets outside of daily business activities
 - Carrying out consolidation, merger, takeover, liquidation
 - Guarantee KMG credit bills to other parties
 - Changing the articles of association related to the decrease in paid-up capital, the Bank's intent and purpose and business activities.

18. PINJAMAN YANG DITERIMA (LANJUTAN)

Pinjaman PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (Lanjutan)

Selama masa pinjaman, Bank memiliki kewajiban untuk memenuhi persyaratan antara lain: (lanjutan)

- n. melakukan segala upaya untuk mempertahankan kelangsungan usaha;
- o. melaporkan perubahan dokumen berikut ini:
 - 1) Akta Pendirian, Akta Perubahan Anggaran Dasar, Akta susunan pengurus
 - 2) Hasil Pemeringkatan Perusahaan
 - 3) NPWP terbaru
 - 4) Dokumen pembaharuan seluruh izin usaha
- p. melaporkan realisasi setiap 1 tahun sekali untuk posisi berakhir 31 Desember.

Tidak terdapat ketentuan rasio keuangan yang diwajibkan oleh pemberi pinjaman.

Terdapat aset Bank yang dijadikan agunan kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) berupa Fidusia atas Aset Keuangan KPR yaitu tagihan/piutang yang akan ada saat ini dan/atau akan ada di kemudian hari yang diperoleh dari penerbitan KPR termasuk hak agunan yang melekat padanya sesuai dengan kriteria yang telah disepakati.

Pinjaman KPR Sejahtera Tapak

Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Bank BPD Bali yang selanjutnya disebut dengan KPR Sejahtera Bank BPD Bali adalah kredit pemilikan rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang terdiri dari:

- a. KPR Sejahtera Tapak adalah kredit dengan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pemilikan Rumah Sejahtera Tapak yang dibeli dari pelaku pembangunan.
- b. KPR Sejahtera Susun adalah kredit dengan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pemilikan Satuan Rumah Sejahtera Susun yang dibeli dari pelaku pembangunan.

Sasarannya merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang berpenghasilan tetap maupun berpenghasilan tidak tetap.

Dana KPR Sejahtera Bank BPD Bali merupakan gabungan antara dana FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dan dana Bank dengan proporsi yaitu:

- 1) Dana FLPP sebesar 90% dari plafond kredit.
- 2) Dana Bank sebesar 10% dari plafond kredit.

Suku Bunga KPR Sejahtera Tapak BPD Bali 5% (lima persen) per tahun dengan metode perhitungan bunga anuitas bulanan.

Pinjaman KPR Sejahtera Tapak Porsi 75

Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Bank BPD Bali yang selanjutnya disebut dengan KPR Sejahtera Bank BPD Bali adalah kredit pemilikan rumah dengan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang terdiri dari :

- a. KPR Sejahtera Tapak Porsi 75 adalah kredit dengan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pemilikan Rumah Sejahtera tapak yang dibeli dari pelaku pembangunan.
- b. KPR Sejahtera Susun adalah kredit dengan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pemilikan Satuan Rumah Sejahtera Susun yang dibeli dari pelaku pembangunan.

Sasarannya merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang berpenghasilan tetap maupun berpenghasilan tidak tetap.

Dana KPR Sejahtera Bank BPD Bali merupakan gabungan antara dana FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dan dana Bank dengan proporsi yaitu :

- 1) Dana FLPP sebesar 75% dari plafond kredit.
- 2) Dana Bank sebesar 25% dari plafond kredit.

Suku Bunga KPR Sejahtera Bank BPD Bali 5% (lima persen) per tahun dengan metode perhitungan bunga anuitas bulanan.

18. BORROWINGS (CONTINUED)

Borrowing from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (Continued)

During the loan period, the Bank has an obligation to fulfill the following requirements: (continued)

- n. make every effort to maintain business continuity
- o. report document changes no later than 7 days after the reporting period
 - 1) Deed of Establishment, Deed of Amendment to the Articles of Association, Deed of management composition
 - 2) Company Ranking Results
 - 3) New NPWP
 - 4) Renewal documents for all business permits
- p. reporting realization once a year for positions ending December 31.

There are no financial ratio requirements required by lenders.

There are Bank assets which are used as collateral for PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) in the form of Fiduciary on KPR Financial Assets, i.e. bills / receivables which currently exists and/or will be obtained later from the issuance of KPR including collateral rights attached to it in accordance with agreed criteria.

KPR Sejahtera Tapak Loan

Bank BPD Bali's Prosperous Housing Loan, hereinafter referred to as KPR Sejahtera Bank BPD Bali, is a housing loan for Low-Income Communities (MBR) with the support of a housing finance liquidity facility consisting of:

- a. KPR Sejahtera Tapak is a loan with the support of housing finance liquidity facilities for low-income people in the framework of ownership of the Prosperous House which is purchased from development actors.
- b. KPR Sejahtera Susun is a loan with the support of housing finance liquidity facilities for low-income communities in the context of the ownership of the Flat Prosperous Housing Unit purchased from the developer.

The target is Low-Income Communities ("MBR") who earn permanent income or non-permanent income.

KPR Sejahtera Bank BPD Bali funds are a combination of FLPP funds (Housing Finance Liquidity Facility) and Bank funds in proportion, namely:

- 1) FLPP funds amounting to 90% of the credit ceiling.
- 2) Bank funds amounting to 10% of the credit ceiling.

Bank BPD Bali KPR Sejahtera Tapak Interest Rate 5% (five percent) per year with the monthly annuity interest calculation method.

KPR Sejahtera Tapak Loan Portions 75

Bank BPD Bali's Prosperous Housing Loan, hereinafter referred to as KPR Sejahtera Bank BPD Bali, is a housing loan with the support of housing finance liquidity facilities which consists of :

- a. KPR Sejahtera Tapak Portion 75 is a loan with the support of housing finance liquidity facilities for low-income people in the framework of ownership of the Prosperous House which is purchased from developer.
- b. KPR Sejahtera Susun is a loan with the support of housing finance liquidity facilities for low-income communities in the context of the ownership of the Flat Prosperous Housing Unit purchased from the developer.

The target is Low-Income Communities (MBR) who are permanent incomes or non-permanent income.

KPR Sejahtera Bank BPD Bali funds are a combination of FLPP funds (Housing Finance Liquidity Facility) and Bank funds in proportion, namely:

- 1) FLPP funds amounting to 75% of the credit ceiling.
- 2) Bank funds amounting to 25% of the credit ceiling.

Bank BPD Bali KPR Sejahtera Interest Rate 5% (five percent) per year with the monthly annuity interest calculation method.

18. PINJAMAN YANG DITERIMA (LANJUTAN)

KLBI KUT MT Tahun 1998/1999

Kredit modal kerja yang diberikan melalui Bank pemberi kredit kepada Koperasi Primer atau LSM sebagai pelaksana pemberian kredit untuk keperluan petani yang tergabung dalam kelompok tani guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija dan hortikultura.

Jangka waktu KUT ditetapkan maksimum 1 (satu) tahun atau menyesuaikan dengan jangka waktu pembiayaan komoditas sejak ditandatanganinya perjanjian penerusan KUT. Jangka waktu KLBI KUT ditetapkan maksimum 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan KLBI (SPK KLBI) kepada Bank.

Debitur merupakan Koperasi atau LSM, dengan Bunga Kredit Likuiditas 10,5%. Apabila Bank terlambat menyampaikan laporan pelunasan lebih cepat kepada BI maka kepada Bank akan dikenakan sanksi kewajiban membayar (mengacu pada SE Pengalihan Pengelolaan KLBI No. 5/56/INTERN tanggal 18 Nopember 2003 dan SE 6/37/INTERN tanggal 9 Juli 2004. *Risk Sharing* :

- Pemerintah : 52,25%
- Bank Indonesia : 42,75%
- Jamkrindo : 5%

18. BORROWINGS (CONTINUED)

KLBI KUT MT Year 1998/1999

Working capital loans provided through lending banks to Primary Cooperatives or Non-governmental organizations (NGO) executor of granting credit for the needs of farmers who are members of farmer groups to finance their farming business in the context of intensification of rice, secondary crops and horticulture.

The KUT period is set at a maximum of 1 (one) year or adjusted to the commodity financing term from the signing of the KUT forwarding agreement. The KL KUT period is set at a maximum of 2 (two) years from the date of the KLBI Approval Letter (SPK KLBI) to the Bank.

The debtor is a Cooperative or an NGO, with a Liquidity Loan Interest of 10.5%. If a bank is late in submitting a report on early repayment to BI, the Bank will be subject to a financial penalty (referring to SE Transfer of Management of KLBI No. 5/56/INTERN dated 18 November 2003 and SE 6/37/INTERN dated 9 July 2004. *Risk Sharing*:

- Government : 52.25%
- Bank of Indonesia : 42.75%
- Jamkrindo : 5%

19. PERPAJAKAN

a. Utang Pajak

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Pasal 25	9.350.028.412
Pasal 29	29.731.033.407
Pasal 21	17.014.599.990
Pasal 4 (2)	12.483.340.165
Pasal 23	480.741.069
PPN	46.455.896
Jumlah	69.106.199.029

b. Manfaat (Beban) Pajak

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Pajak Kini	
Tahun berjalan	(312.248.233.220)
Penyesuaian	
tahun sebelumnya	(31.551.354.943)
Sub Jumlah	(343.799.588.163)
Pajak Tangguhan	24.266.081.590
Jumlah	(319.533.506.573)

19. TAXATION

a. Taxes Payable

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	
	67.312.807.395	Article 25
	26.198.032.420	Article 29
	12.994.368.022	Article 21
	10.404.342.028	Article 4 (2)
	360.481.582	Article 23
	16.540.896	PPN
Total	117.286.572.343	

b. Tax Benefit (Expense)

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	
	(329.176.730.080)	Current Tax
		Current year
	(17.065.694.764)	Prior year adjustment
	(346.242.424.844)	Sub Total
	16.314.437.313	Deferred Tax
Total	(329.927.987.531)	

19. PERPAJAKAN (LANJUTAN)

19. TAXATION (CONTINUED)

c. Rekonsiliasi Pajak

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba sebelum beban pajak dan beban pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

c. Tax Reconciliation

The reconciliation between the tax expense computed by applying the applicable tax rate on the income before tax expense and the tax expense shown in statement of profit or loss the are as follows:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	31 Desember 2023 / December 31, 2023	
Laba Sebelum Beban Pajak	1.197.999.247.799	1.068.156.296.848	Income Before Tax Expense
Beda Waktu:			Temporary Difference:
Koreksi Positif :			Positive Correction:
Cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan	-	316.895.152.962	Allowance for Impairment Loss for loans
Cadangan kerugian penurunan nilai tagihan lainnya	10.094.297.118	-	Allowance for Impairment Loss for other bills
Penyisihan Cadangan Bonus dan Tantiem	187.552.435.752	157.611.744.039	Provision for Bonus and Tatiem
Penyisihan Cadangan dana pensiun	47.789.063.478	-	Provision for Pension Fund
Pembentukan Imbalan Pasca Kerja	43.148.062.936	25.059.590.501	Post-Employment Benefits Expense
Pembentukan Penghargaan Direksi	5.584.393.867	4.817.774.980	Director Service gratuity Expense
Pembentukan Penghargaan Dewan Komisaris	1.076.884.148	1.581.046.531	Board of Commissioners Services Gratuity Expense
Sub - Jumlah	295.245.137.299	505.965.309.013	Sub - Total
Koreksi Negatif :			Negative Correction:
Pembayaran Bonus dan Tantiem	157.611.744.040	128.856.557.432	Payment of Bonus and Tatiem
Cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan	2.718.723.769	-	Allowance for Impairment Loss for loans
Pembayaran Manfaat Imbalan Kerja	24.614.298.628	17.746.580.674	Post-Employment Benefits Paid
Sub - Jumlah	184.944.766.437	146.603.138.106	Sub - Total
Jumlah Beda Waktu	110.300.370.862	359.362.170.907	Total Temporary difference:
Beda Tetap :			Permanent Difference:
Koreksi Positif :			Positive Correction:
Biaya Promosi dan Pengembangan Bisnis	40.469.277.746	29.510.743.639	Bussiness Development Expense
Biaya Humas dan CSR	16.658.948.088	15.889.421.145	Cost of Public Relation and CSR
Pemantapan Pelaksanaan Ibadah	3.813.609.889	4.045.501.676	Strengthening Implementation of Worship
Biaya Pajak	31.975.660.033	2.428.186.771	Tax Expense
Tamu dan Souvenir	1.790.633.530	2.391.183.925	Entertainment and Souvenirs
Biaya Sumbangan	1.422.996.520	1.974.984.820	Donation
Biaya HUT Bank	2.252.138.142	1.279.995.071	Bank Anniversary Cost
Biaya Telepon,Telegram	480.381.709	68.751.944	Cost of Telephone, Telegram
Biaya Lain-lain	12.329.025.394	11.345.841.880	Other Expense
Sub - Jumlah	111.192.671.051	68.934.610.871	Sub - Total
Koreksi Negatif :			Negative Correction:
Pendapatan Sewa Gedung	182.138.134	195.213.900	Rental Income Buliding
Sub - Jumlah	182.138.134	195.213.900	Sub - Total
Jumlah Beda Tetap	111.010.532.917	68.739.396.971	Total Permanent Difference:
Jumlah Koreksi Fiskal	221.310.903.779	428.101.567.878	Total Fiscal Correction
Laba Kena Pajak	1.419.310.151.578	1.496.257.864.726	Estimated of Income Tax
Pembulatan	1.419.310.151.000	1.496.257.864.000	Rounded
Beban Pajak Penghasilan:			Income Tax Expense
22% x 1.419.310.151.000	312.248.233.220	--	22% x 1.419.310.151.000
22% x 1.496.257.864.000	--	329.176.730.080	22% x 1.496.257.864.000
Jumlah Pajak Kini	312.248.233.220	329.176.730.080	Total current taxes
Dikurangi:			Less:
Pajak Penghasilan			
Dibayar Dimuka Pasal 25	282.517.199.813	302.978.697.660	Prepaid Taxes Article 25
Kurang Pajak Penghasilan Badan	29.731.033.407	26.198.032.420	Income Tax Payable

Total laba kena pajak Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 menjadi dasar dalam pengisian SPT tahunan 2024 dan 2023.

The Bank's taxable income for the year ended December 31, 2024 and 2023 is the basis for preparing annual tax return for 2024 and 2023.

19. PERPAJAKAN (LANJUTAN)

19. TAXATION (CONTINUED)

d. Aset Pajak Tangguhan

d. Deferred Tax Assets

31 Desember 2024 / December 31, 2024					
	Saldo Awal / Beginning Balance	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi/ Charged to Profit or Loss	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif lain/ Charged to Other Comprehensive Income	Penyesuaian / Adjustment	Saldo Akhir / Ending Balance
Kerugian Penurunan Nilai Pinjaman yang Diberikan/ Provision for Impairment Losses on Loans	31.267.022.756	(598.119.229)	--	--	30.668.903.527
Kerugian Penurunan Nilai Tagihan Lainnya/ Provision for Impairment Losses on Other Bill	-	2.220.745.366	--	--	2.220.745.366
Penyisihan Cadangan Dana Pensiun/ Provision for Pension Fund	-	10.513.593.965	--	--	10.513.593.965
Penyisihan Cadangan Bonus dan Tantiem/ Provision for Bonus and Tantiem	34.517.541.069	6.586.952.177	--	--	41.104.493.246
Pembentukan Imbalan Pasca Kerja/ Post-Employee Benefit Expense	31.175.697.437	597.477.348	3.295.966.022	--	35.069.140.807
Pembentukan Imbalan Jangka Panjang/ Long Term Post Employee Benefit Expense	19.921.770.622	3.479.950.800	--	--	23.401.721.422
Pembentukan Pengabdian Direksi/ Director Service Gratuity Expense	5.719.072.634	1.228.566.651	--	(183.453.077)	6.764.186.208
Pembentukan Pengabdian Dewan Komisaris/ Commissioner Service Gratuity Expense	1.995.413.199	236.914.513	--	183.453.077	2.415.780.789
Aset Pajak Tangguhan/ Deferred Tax Asset	124.596.517.717	24.266.081.590	3.295.966.022	--	152.158.565.329

31 Desember 2023 / December 31, 2023					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi/ Charged to Profit or Loss	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif lain/ Charged to Other Comprehensive Income	Penyesuaian / Adjustment	Saldo Akhir / Ending Balance
Kerugian Penurunan Nilai Pinjaman yang Diberikan/ Provision for Impairment Losses on Loans	24.295.329.391	6.971.693.365	-	-	31.267.022.756
Penyisihan Cadangan Bonus dan Tantiem/ Provision for Bonus and Tantiem	28.191.400.016	6.326.141.053	-	-	34.517.541.069
Pembentukan Imbalan Pasca Kerja/ Post-Employee Benefit Expense	30.154.181.602	1.401.167.540	(379.651.705)	-	31.175.697.437
Pembentukan Imbalan Jangka Panjang/ Long term post Employee Benefit Expense	19.714.076.000	207.694.622	-	-	19.921.770.622
Pembentukan Pengabdian Direksi/ Director Service Gratuity Expense	4.659.162.138	1.059.910.496	-	-	5.719.072.634
Pembentukan Pengabdian Dewan Komisaris/ Commissioner Service Gratuity Expense	1.647.582.962	347.830.237	-	-	1.995.413.199
Aset Pajak Tangguhan/ Deferred Tax Asset	108.661.732.109	16.314.437.313	(379.651.705)	--	124.596.517.717

Manajemen berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan dapat dipulihkan dan dikompensasikan dengan laba fiskal pada masa mendatang.

Management believes that deferred tax assets can be utilized and can be compensated againsts future taxable income.

19. PERPAJAKAN (LANJUTAN)

e. Surat Ketetapan Pajak

Pada tanggal 30 Juli 2024, Bank menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk tahun pajak 2019 sebagaimana berikut :

- a. SKPKB Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Masa Desember 2019 Nomor : 00047/240/19/904/24 sebesar Rp3.244.667.670.
- b. SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Desember 2019 Nomor : 00067/201/19/904/24 sebesar Rp275.332.173.
- c. SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Desember 2019 Nomor : 00129/203/19/904/24 sebesar Rp10.232.394.
- d. SKPKB Pajak Penghasilan Tahun 2019 Nomor : 00052/206/19/904/24 sebesar Rp21.115.701.671 dibebankan pada beban pajak kini.
- e. SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Desember 2019 Nomor : 00116/207/19/904/24 sebesar Rp809.341.896.
- f. SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Juli 2019 Nomor : 00046/277/19/904/24 sebesar Rp425.113.
- g. SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Agustus 2019 Nomor : 00047/277/19/904/24 sebesar Rp417.575.
- h. SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa September 2019 Nomor : 00048/277/19/904/24 sebesar Rp416.222.
- i. SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Oktober 2019 Nomor : 00049/277/19/904/24 sebesar Rp408.412.
- j. SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Nopember 2019 Nomor : 00050/277/19/904/24 sebesar Rp411.982.
- k. SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Desember 2019 Nomor : 00051/277/19/904/24 sebesar Rp410.111.
- l. STP PPN Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Juli 2019 Nomor : 00009/177/19/904/24 sebesar Rp29.687.
- l. STP PPN Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Agustus 2019 Nomor : 00010/177/19/904/24 sebesar Rp29.160.
- m. STP PPN Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Agustus 2019 Nomor : 00010/177/19/904/24 sebesar Rp29.160.
- n. STP PPN Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa September 2019 Nomor : 00011/177/19/904/24 sebesar Rp29.066.
- o. STP PPN Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Oktober 2019 Nomor : 00012/177/19/904/24 sebesar Rp28.520.
- p. STP PPN Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa November 2019 Nomor : 00013/177/19/904/24 sebesar Rp28.770.
- q. STP PPN Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Desember 2019 Nomor : 00014/177/19/904/24 sebesar Rp28.639.
- r. STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Desember 2019 Nomor : 00082/107/19/904/24 sebesar Rp56.329.475.

Pada tanggal 7 Agustus 2024, Bank melakukan pembayaran terhadap pokok SKPKB dan STP sebagaimana dimaksud diatas sebesar Rp17.774.886.922 dan tanggal 9 Agustus 2024 diajukan permohonan keringanan sanksi sebesar 100% yang masih menunggu keputusan dari Kantor Pajak.

Pada tanggal 4 Desember 2024, Bank melakukan pembayaran terhadap kekurangan pajak tahun 2021 atas Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Nomor : BA-136/P2DK/KPP.170409/2024 sebesar Rp10.647.597.708. Dibebankan pada beban pajak kini sebesar Rp10.293.153.642, sisanya dibebankan di beban pajak.

Pada tanggal 6 Desember 2024, Bank melakukan pembayaran terhadap kekurangan pajak tahun 2020 atas Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Nomor : BA-185/WPJ.17/KP.0409/2024 sebesar Rp219.281.153. Dibebankan ke pajak kini sebesar Rp142.499.630, sisanya dibebankan di beban pajak.

19. TAXATION (CONTINUED)

e. Tax Assessment

On July 30, 2024, the Bank received the Tax Underpayment Assessment Letter (SKPKB) for the 2019 tax year as follows:

- a. Final Income Tax SKPKB Article 4 (2) December 2019 Period Number: 00047/240/19/904/24 amounting to Rp3,244,667,670.
- b. Income Tax SKPKB Article 21 December 2019 Period Number: 00067/201/19/904/24 amounting to Rp275,332,173.
- c. Income Tax SKPKB Article 23 December 2019 Period Number: 00129/203/19/904/24 amounting to Rp10,232,394.
- d. Income Tax SKPKB 2019 Number: 00052/206/19/904/24 amounting to Rp21,115,701,671 charged to current tax expense.
- e. SKPKB Value Added Tax on Goods and Services for December 2019 Number: 00116/207/19/904/24 amounting to Rp809,341,896.
- f. SKPKB Value Added Tax on Goods and Services for the Use of JKP from Outside the Customs Area for the Period of July 2019 Number: 00046/277/19/904/24 amounting to Rp425,113.
- g. SKPKB Value Added Tax on Goods and Services for Utilization of JKP from Outside the Customs Area for the Period of August 2019 Number: 00047/277/19/904/24 amounting to Rp417,575.
- h. SKPKB Value Added Tax on Goods and Services for the Use of JKP from Outside the Customs Area for the Period of September 2019 Number: 00048/277/19/904/24 amounting to Rp416,222.
- i. SKPKB Value Added Tax on Goods and Services for the Use of JKP from Outside the Customs Area for the Period of October 2019 Number: 00049/277/19/904/24 amounting to Rp408,412.
- j. SKPKB Value Added Tax on Goods and Services for Utilization of JKP from Outside the Customs Area for November 2019 Number: 00050/277/19/904/24 amounting to Rp411,982.
- k. SKPKB Value Added Tax on Goods and Services for the Use of JKP from Outside the Customs Area for the Period of December 2019 Number: 00051/277/19/904/24 amounting to Rp410,111.
- l. STP VAT on Goods and Services for Utilization of JKP from Outside the Customs Area for the July 2019 Period Number: 00009/177/19/904/24 amounting to Rp29,687.
- l. STP VAT on Goods and Services for Utilization of JKP from Outside the Customs Area for the Period of August 2019 Number: 00010/177/19/904/24 amounting to Rp29,160.
- m. STP VAT on Goods and Services for Utilization of JKP from Outside the Customs Area for the Period of August 2019 Number: 00010/177/19/904/24 amounting to Rp29,160.
- n. STP VAT on Goods and Services for Utilization of JKP from Outside the Customs Area Period of September 2019 Number: 00011/177/19/904/24 amounting to Rp29,066.
- o. STP VAT on Goods and Services for Utilization of JKP from Outside the Customs Area for the Period of October 2019 Number: 00012/177/19/904/24 amounting to Rp28,520.
- p. STP VAT on Goods and Services for Utilization of JKP from Outside the Customs Area for November 2019 Number: 00013/177/19/904/24 amounting to Rp28,770.
- q. STP VAT on Goods and Services for Utilization of JKP from Outside the Customs Area for the Period of December 2019 Number: 00014/177/19/904/24 amounting to Rp28,639.
- r. STP Value Added Tax for Goods and Services for the Period of December 2019 Number: 00082/107/19/904/24 amounting to Rp56,329,475.

On August 7, 2024, the Bank made payment of the SKPKB and STP principal as referred to above amounting to Rp17,774,886,922 and on August 9, 2024 a request for 100% sanction relief was submitted which is still awaiting a decision from the Tax Office.

On December 4, 2024, the Bank made a payment for the 2021 tax shortfall based on the Letter of Request for Explanation of Data and/or Information (SP2DK) Number: BA-136/P2DK/KPP.170409/2024 amounting to Rp10,647,597,708. Charged to current tax expense of Rp10,293,153,642, the remainder is charged to tax expenses.

On December 6, 2024, the Bank made a payment for the 2020 tax shortfall based on the Letter of Request for Explanation of Data and/or Information (SP2DK) Number: BA-185/WPJ.17/KP.0409/2024 amounting to Rp219,281,153. Charged to current tax expense of Rp142,499,630, the remainder is charged to tax expenses.

20. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Rupiah	
Biaya bunga deposito yang masih harus dibayar	17.081.274.947
Biaya bunga tabungan yang masih harus dibayar	5.513.924.628
Biaya bunga lainnya yang masih harus dibayar	-
Sub - Jumlah	22.595.199.575
Mata uang asing	
Biaya bunga deposito yang masih harus dibayar	231.124
Biaya bunga tabungan yang masih harus dibayar	39.433
Sub - Jumlah	270.557
Jumlah	22.595.470.132

20. ACCRUED EXPENSES

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	
Rupiah		Rupiah
Accrued Deposit Interest	14.202.797.814	Accrued Deposit Interest
Accrued Saving Interest	4.789.881.083	Accrued Saving Interest
Accrued Other Interest	1.031.833.333	Accrued Other Interest
Sub Total	20.024.512.230	Sub Total
Foreign Currency		Foreign Currency
Accrued Deposit Interest	167.057	Accrued Deposit Interest
Accrued Saving Interest	26.483	Accrued Saving Interest
Sub- Total	193.540	Sub- Total
Total	20.024.705.770	Total

21. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Bank memberikan imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja kepada para karyawannya yang memenuhi syarat yang terdiri dari program pensiun, cuti berimbalan jangka panjang, penghargaan masa bakti dan penghargaan masa bakti proporsional, imbalan masa bebas tugas yang dihitung berdasarkan Peraturan Perusahaan yang telah sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No.11/2020.

Penilaian aktuarial atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja pada 31 Desember 2024 dihitung oleh aktuarial independen Kantor Konsultan Aktuarial I Gde Eka Sarmaja, FSAI & Rekan dengan menggunakan metode *projected unit credit* dari laporan aktuarial pada tanggal 7 Januari 2025.

Program pensiun Bank dikelola oleh Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Bali. Kontribusi pegawai adalah sebesar 5% (lima persen) dari gaji dasar karyawan yang bersangkutan dan sisanya ditanggung oleh Bank.

Program penghargaan masa bakti dikelola sendiri oleh Bank dan diatur dalam peraturan yang terakhir ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 0060/KEP/DIR/SDM/2024 tanggal 7 Februari 2024. Imbalan penghargaan masa bakti berupa pembayaran yang jumlahnya sebesar masing-masing 3 (tiga) kali, 5 (lima) kali, 6 (enam) kali dan 7 (tujuh) kali dari penghasilan bulan terakhir kepada pegawai dengan masa kerja 15 tahun, 25 tahun, 30 tahun dan 35 tahun dengan syarat-syarat tertentu.

Program penghargaan masa bakti proporsional dikelola sendiri oleh Bank dan diatur dalam peraturan yang terakhir ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 0060/KEP/DIR/SDM/2024 tanggal 7 Februari 2024. Imbalan penghargaan masa bakti proporsional berupa pembayaran yang diberikan kepada pegawai yang berhenti dengan mendapat hak pensiun dan/atau memasuki masa bebas tugas dengan masa dinas efektif di atas 20 tahun.

Imbalan masa bebas tugas dikelola sendiri oleh Bank dan merupakan program imbalan kerja bagi karyawan yang akan memasuki masa pensiun.

Program cuti berimbalan jangka panjang dikelola sendiri oleh Bank dan merupakan program imbalan kerja bagi karyawan untuk penggantian hak cuti besar.

Liabilitas imbalan kerja terdiri dari:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Program Imbalan Kerja	147.916.251.836
Program Dana Pensiun	11.488.933.649
Imbalan Jangka Panjang Lainnya	106.371.461.005
Saldo Akhir Nilai Kini	
Imbalan Pasti	265.776.646.490

21. POST-EMPLOYMENT BENEFIT OBLIGATION

The Bank provides long-term employee benefits and post-employee benefit to the eligible employees of the pension plan, long service leave, service reward benefit and service reward benefit proportional, severance compensation are calculated based on the Company Regulation, which comply with Omnibus Law No.11/2020.

Actuarial assessment of long-term employee benefits and post- employee benefit as of December 31, 2024 is calculated by an independent actuary Kantor Konsultan Aktuarial I Gde Eka Sarmaja, FSAI & Rekan, using the projected unit credit method from the actuarial reports on January 7, 2025.

The Bank's pension plan managed by Bali Regional Development Bank Pension Fund. Employee contribution is 5% (five percent) of basic salary of those employees and the Bank bear the difference.

Service reward benefit managed by the Bank and set out in the final regulations stipulated by the Directors Decree No.0060/KEP/DIR/SDM/2024 dated February 7, 2024. Compensation of service reward benefit amount for 3 (three) times, 5 (five) times, 6 (six) and 7 (seven) times that of last month's employee's salary with tenure of 15 years, 25 years, 30 years and 35 years and certain conditions.

The service award benefit - proportional managed by the Bank and set out in the final regulations stipulated by the Directors Decree No. 0060/KEP/DIR/SDM/2024 dated February 7, 2024. Compensation of service award proportional paid to employees who cease to receive pension rights and entering a period of duty-free with effective service in over 20 years.

Severance compensation managed by the Bank and is an employee benefits program for employees who will retire.

Long service leave benefit managed by the Bank and is an employee benefits program for employees for reimbursement of leave entitlements.

The liability for employee benefits consists of:

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	
Employee Benefits Program	141.707.715.620	Employee Benefits Program
Pension Fund Program	-	Pension Fund Program
Other Long term benefit	90.553.502.824	Other Long term benefit
Ending Balance of Defined benefit	232.261.218.444	Ending Balance of Defined benefit

21. LIABILITAS IMBALAN KERJA (LANJUTAN)

Beban yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain berdasarkan klasifikasi akun adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	31 Desember 2023 / December 31, 2023
Biaya Karyawan (Catatan 31)	43.148.062.936	25.059.590.501
Pengukuran Kembali atas Liabilitas Imbalan Kerja - Kerugian (Keuntungan) Aktuarial	14.981.663.737	(1.725.689.570)
Beban yang Diakui Dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	58.129.726.673	23.333.900.931

Dana Pensiun

Program Pensiun Manfaat Pasti

Program penghargaan masa bakti proporsional dikelola sendiri oleh Bank dan diatur dalam peraturan yang terakhir ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 0060/KEP/DIR/SDM/2024 tanggal 7 Februari 2024. Imbalan penghargaan masa bakti proporsional berupa pembayaran yang diberikan kepada pegawai yang berhenti dengan mendapat hak pensiun dan/atau memasuki masa bebas tugas dengan masa dinas efektif di atas 20 tahun.

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	31 Desember 2023 / December 31, 2023
Tingkat Diskonto	7,00%	7,00%
Tingkat Kenaikan Penghasilan dasar pensiun per tahun	2,50%	2,50%
Tingkat Mortalita	1=TMI'2019	1=TMI'2019
Tingkat Pengunduran Diri per Tahun		
< 30 tahun	6,00%	6,00%
54 - 56 tahun	0,00%	0,00%
Tingkat Cacat	10% dari tingkat kematian / 10% from mortality rate	10% dari tingkat kematian / 10% from mortality rate

a. Aset program neto

Program penghargaan masa bakti proporsional dikelola sendiri oleh Bank dan diatur dalam peraturan yang terakhir ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No.0060/KEP/DIR/SDM/2024 tanggal 7 Februari 2024. Imbalan penghargaan masa bakti proporsional berupa pembayaran yang diberikan kepada pegawai yang berhenti dengan mendapat hak pensiun dan/atau memasuki masa bebas tugas dengan masa dinas efektif di atas 20 tahun.

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	31 Desember 2023 / December 31, 2023
Nilai Wajar Aset Program	472.419.692.559	456.682.153.707
Nilai Kini Kewajiban	(483.908.626.208)	(448.939.989.741)
Status Pendanaan	(11.488.933.649)	7.742.163.966

Rekonsiliasi yang menunjukkan pergerakan selama periode dalam kewajiban bersih (atau aset) yang diakui dalam laporan posisi keuangan:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	31 Desember 2023 / December 31, 2023
Saldo Awal Tahun	-	-
Beban	11.623.967.498	11.966.745.653
Iuran	(8.110.515.310)	(8.146.604.292)
Pengukuran Kembali atas Liabilitas Imbalan Kerja - Kerugian (Keuntungan) Aktuarial	7.975.481.461	(3.820.141.361)
Saldo Akhir Kewajiban Bersih	11.488.933.649	-

21. POST-EMPLOYMENT BENEFIT OBLIGATION (CONTINUED)

Expenses recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income based on account classification are as follows :

Employee Costs (Note 31)
Remeasurement of Liability for Employee Benefit - Actuarial (Gain) Loss

Expense Recognized in the Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

Pension Funds

Defined Benefit Pension Programme

The service award benefit - proportional managed by the Bank and set out in the final regulations stipulated by the Directors Decree No. 0060/KEP/DIR/SDM/2024 dated February 7, 2024. Compensation of service award proportional paid to employees who cease to receive pension rights and entering a period of duty-free with effective service in over 20 years.

Discount Rate
Salary Increase Rate
Basic Pension Per Year
Mortality Rate
Resignation Rate
Age <30
Age 54 - 56
Disability Rate

a. Program Net Asset

The service award benefit - proportional managed by the Bank and set out in the final regulations stipulated by the Directors Decree No. 0060/KEP/DIR/SDM/2024 dated February 7, 2024.. compensation of service award proportional paid to employees who cease to receive pension rights and entering a period of duty-free with effective service in over 20 years.

Fair Value of Asset Program
Present Value of Benefit Obligation

Funded Status

Reconciliation showing the movements during the period in the net liability (or asset) recognized in the balance sheet:

Beginning Balance
Interest on defined benefit Contribution
Remeasurement of Liability for Employee Benefit - Actuarial (Gain) Loss

Ending Balance for Net Liability

21. LIABILITAS IMBALAN KERJA (LANJUTAN)

21. POST-EMPLOYMENT BENEFIT OBLIGATION (CONTINUED)

b. Rekonsiliasi nilai wajar aset program bank adalah sebagai berikut:

b. The reconciliation of the fair value of the bank's plan assets is as follows:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	31 Desember 2023 / December 31, 2023	
Saldo Awal Tahun	456.682.153.707	438.552.496.851	Beginning Balance
Bunga atas Imbalan Pasti	32.400.307.518	32.095.878.395	Interest on defined benefit
luran	11.227.735.178	11.258.920.476	Contribution
Pembayaran Manfaat	(27.890.503.844)	(25.225.142.015)	Benefits paid
Saldo Akhir Nilai Wajar Aset Program	472.419.692.559	456.682.153.707	Ending Balance for Value of Asset Program

c. Beban imbalan kerja adalah sebagai berikut:

c. Employee benefit expense are as follows :

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	31 Desember 2023 / December 31, 2023	
Biaya Jasa Kini	13.088.587.236	13.155.051.264	Current Service Cost
Biaya Jasa Lalu	-	-	Past Service Cost
Biaya Bunga	30.393.736.302	28.889.299.499	Interest Cost
Hasil yang Diharapkan Dari Aset Program	(32.400.307.518)	(32.095.878.395)	Expected return on Plan assets
Bunga atas Dampak Batas atas Dari Aset	541.951.478	2.018.273.285	Interest on asset ceiling Impact of asset
Beban Imbalan Kerja	11.623.967.498	11.966.745.653	Employee Benefit Expense

d. Perubahan nilai kini liabilitas imbalan pasti adalah sebagai berikut:

d. The change in the present value of defined benefit liability are as follows:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	31 Desember 2023 / December 31, 2023	
Saldo Awal Tahun	448.939.989.741	410.714.244.639	Beginning Balance
Biaya Jasa Kini	13.088.587.236	13.155.051.264	Current Service Cost
Biaya Jasa Lalu	-	-	Past Service Cost
Biaya Bunga	30.393.736.302	28.889.299.499	Interest Cost
Pembayaran Manfaat	(24.773.283.976)	(22.112.825.831)	Benefits Paid
Kerugian aktuarial	16.259.596.905	18.294.220.170	Actuarial Loss
Saldo Akhir Nilai Kini Imbalan Pasti	483.908.626.208	448.939.989.741	Ending Balance Present Value Benefit Liability

e. Analisa tingkat sensitivitas untuk risiko tingkat diskonto

e. Sensitivity level analysis for discount rate risk

Tabel berikut menunjukkan analisa sensitivitas nilai kini kewajiban dan biaya jasa kini diasumsikan terdapat perubahan atas tingkat diskonto (tidak diaudit):

The tables below shows the sensitivity analysis of the present value of employee benefit obligation and current service cost in the assumed changes in the discount rate (unaudited):

31 Desember 2024 / December 31, 2024		
Tingkat Diskonto/ Discount Rate	Nilai Kini Kewajiban/ Present Value of Obligation	
	Jumlah/ Amount	Perubahan / Changes
7,00%	483.908.626.208	0%
-1%	544.246.254.914	12,47%
+1%	434.496.132.769	-10,21%
31 Desember 2023 / December 31, 2023		
Tingkat Diskonto/ Discount Rate	Nilai Kini Kewajiban/ Present Value of Obligation	
	Jumlah/ Amount	Perubahan / Changes
7,00%	448.939.989.741	0%
-1%	504.055.565.997	12,28%
+1%	403.678.772.840	-10,08%

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefit obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the benefit obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the defined benefit obligation liability recognized in the statement of financial position.

21. LIABILITAS IMBALAN KERJA (LANJUTAN)

Program Imbalan Kerja

Program imbalan dihitung sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No.11/2020. Termasuk dalam program ini adalah THT.

Berikut ini adalah asumsi-asumsi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan kerja pada laporan aktuaris tertanggal 3 Januari 2025 dan 3 Januari 2024 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Tingkat Diskonto	6,75% - 7,00%
Tingkat Kenaikan Penghasilan dasar pensiun per tahun	2,50%
Tingkat Mortalita	1=TMI'2019
Usia Pensiun	56 tahun / 56 years
Tingkat Cacat	10% dari tingkat kematian / 10% from mortality rate

a. Liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Kerja	265.776.646.490
Nilai Wajar Aset Program	--
Liabilitas Yang Diakui Dalam Laporan Posisi Keuangan	265.776.646.490

b. Beban yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk program imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Biaya Jasa Kini	7.901.681.438
Biaya Jasa Lalu	-
Biaya Bunga	9.015.884.729
Beban yang Diakui Dalam Laporan Laba Rugi	16.917.566.167
Pengukuran Kembali Atas Liabilitas Imbalan Kerja-Neto	
Dampak karena perubahan asumsi finansial	(2.384.613.854)
Dampak karena penyesuaian pengalaman	9.390.796.130
Diakui dalam Penghasilan Komprehensif Lain	7.006.182.276

c. Perubahan penyisihan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Saldo Awal Tahun	141.707.715.620
Penambahan Tahun Berjalan	16.917.566.167
Nilai Yang Diakui Dalam Penghasilan Komprehensif Lain	7.006.182.276
Pembayaran Manfaat	(17.715.212.227)
Saldo Akhir Nilai Kini Imbalan Pasti	147.916.251.836

21. POST-EMPLOYMENT BENEFIT OBLIGATION (CONTINUED)

Employee Benefits Program

The rewards program is calculated in accordance with Omnibus Law No. 11/2020. Included in the program is THT.

The following are assumptions used in the calculation of the employee benefit pension plan as of January 3, 2025 and January 3, 2024 respectively for the years ended December 31, 2024 and 2023 are as follow:

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	
Tingkat Diskonto	6,75% - 7,00%	Discount Rate
Tingkat Kenaikan Penghasilan dasar pensiun per tahun	2,50%	Annual pension Based salary increase rates per year
Tingkat Mortalita	1=TMI'2019	Mortality Rate
Usia Pensiun	56 tahun / 56 years	Retirement Age
Tingkat Cacat	10% dari tingkat kematian / 10% from mortality rate	Disability Rate

a. The liabilities recognized in the statement of financial position are as follows:

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Kerja	232.261.218.444	Present Value of Benefit Obligation
Nilai Wajar Aset Program	--	Fair Value of Asset Program
Liabilitas Yang Diakui Dalam Laporan Posisi Keuangan	232.261.218.444	Liability Recognized in the Statement of Financial Position

b. Expenses recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income for employee benefits program are as follows:

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	
Biaya Jasa Kini	7.962.978.966	Current Service Cost
Biaya Jasa Lalu	-	Past Service Cost
Biaya Bunga	9.375.094.197	Interest Cost
Beban yang Diakui Dalam Laporan Laba Rugi	17.338.073.163	Expenses Recognized in the Profit or Loss Statements
Pengukuran Kembali Atas Liabilitas Imbalan Kerja-Neto		Remeasurement of the net Liability for employee benefits - Net
Dampak karena perubahan asumsi finansial	(1.372.966.583)	Effect to changes in financial assumptions
Dampak karena penyesuaian pengalaman	(352.722.987)	Effect to experience adjustments
Diakui dalam Penghasilan Komprehensif Lain	(1.725.689.570)	Recognized in other Comprehensive Income

c. The allowance changes are as follows:

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	
Saldo Awal Tahun	137.064.461.828	Beginning Balance
Penambahan Tahun Berjalan	17.338.073.163	Addition during the year
Nilai Yang Diakui Dalam Penghasilan Komprehensif Lain	(1.725.689.570)	Amount recognized in other Comprehensive Income
Pembayaran Manfaat	(10.969.129.801)	Benefit Paid
Saldo Akhir Nilai Kini Imbalan Pasti	141.707.715.620	Ending Balance of Current cost Defined Benefits

21. LIABILITAS IMBALAN KERJA (LANJUTAN)

Imbalan jangka panjang lainnya

d. Beban yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk imbalan jangka panjang adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Biaya Jasa Kini	7.128.617.584
Biaya Bunga	5.757.999.729
Keuntungan Aktuarial atas Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain	9.830.427.268
Beban Yang Diakui Dalam Laporan Laba Rugi	22.717.044.581
(Keuntungan) Kerugian Aktuarial	-
Beban Yang Diakui Dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	22.717.044.581

e. Perubahan liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Saldo Awal Tahun	90.553.502.824
Penambahan Tahun Berjalan	12.886.617.313
Keuntungan Aktuarial yang diakui Tahun Berjalan	9.830.427.268
Pembayaran Manfaat	(6.899.086.400)
Saldo Akhir Nilai Kini Imbalan Pasti	106.371.461.005

21. POST-EMPLOYMENT BENEFIT OBLIGATION (CONTINUED)

Other long-term benefit

d. Expenses recognized in the statements of income and other comprehensive income for long-term benefits are as follows:

	31 Desember 2023 / December 31, 2023
	7.654.375.881
	5.874.921.679
	(5.807.780.222)
	7.721.517.338
	--
	7.721.517.338

Current Service Cost
Interest Cost
Actuarial Gain of
Other Long Term
Employee Benefit

Expenses Recognized in the
Income Statements

Actuarial Gain/ Loss
Expenses Recognized in the
Income Statements and
Other Comprehensive
Income

e. Changes in the liabilities recognized in the statement of financial position are as follows:

	31 Desember 2023 / December 31, 2023
	89.609.436.359
	13.529.297.560
	(5.807.780.222)
	(6.777.450.873)
	90.553.502.824

Beginning Balance
Additions during the year
Net Actuarial Gain
Recognized
during the Year
Benefits Paid

Ending Balance of Present Value
of Defined Benefit

22. LIABILITAS SEWA

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Mesin ATM	10.685.885.947
Kendaraan	2.544.985.357
Tanah	1.825.689.638
Bangunan	-
Jumlah	15.056.560.942

22. LEASE LIABILITIES

	31 Desember 2023 / December 31, 2023
	8.333.477.034
	3.536.153.131
	1.697.200.545
	9.403.136
	13.576.233.846

ATM Machine
Vehicles
Land
Buildings

Total

23. LIABILITAS LAIN-LAIN

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Jasa Produksi dan Tantiem	186.838.605.662
Rupa-rupa Kewajiban	61.016.719.743
Cadangan Iuran Pensiun	47.789.063.478
Penghargaan Direksi	30.746.300.943
Penghargaan Dewan Komisaris	10.980.821.765
Penangguhan Remunerasi Pengurus dan karyawan	10.211.596.802
Estimasi Kerugian atas Transaksi Rekening Administratif	615.586.506
Titipan Pajak Dan Retribusi Daerah	470.824.670
Titipan Pembayaran Lainnya	405.880.412
Provisi Bank Garansi Diterima Di Muka	398.284.556
Pendapatan Bunga Kredit Yang Ditangguhkan	145.291.127
Lainnya	1.734.262.093
Jumlah	351.353.237.757

23. OTHER LIABILITIES

	31 Desember 2023 / December 31, 2023
	156.897.913.950
	56.212.643.655
	-
	25.837.990.826
	9.227.853.866
	7.663.020.256
	3.645.055.910
	865.830.545
	5.044.246.518
	499.135.368
	179.603.445
	2.196.694.893
	268.269.989.232

Production Service Bonus and Tantiem
Other Liabilities
Allowance Pension Contribution
Service Gratuity for the Directors
Service gratuity for Board
of Commissioners
Deferral of Management
Remuneration and employee
Estimated Losses on Transactions of
Administration Account
Deposit of Local Taxes and Retribution
Other Payment Deposit
Advance Bank Guarantee Fees
Deferred Interest Income
for Loans
Others
Total

23. LIABILITAS LAIN-LAIN (LANJUTAN)

Rupa-rupa kewajiban terdiri dari imbal jasa penjamin dan lainnya terdiri dari dana titipan, setoran jaminan *safe deposit box*, dan setoran jaminan bank garansi lainnya.

Cadangan kerugian ekspektasian atas transaksi rekening administratif adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Saldo awal tahun	3.645.055.910
Penyisihan (pemulihan) Tahun Berjalan	(3.029.469.404)
Jumlah	615.586.506

23. OTHER LIABILITIES (CONTINUED)

Other liabilities consist of guarantor fees and others consist of safe deposit funds, safe deposit box guarantee deposits, and other bank guarantee deposits.

Expected credit losses on transactions of administration account are as follows:

	31 Desember 2023 / December 31, 2023
Saldo awal tahun	7.277.666.006
Penyisihan (pemulihan) Tahun Berjalan	(3.632.610.096)
Jumlah	3.645.055.910

Balance, beginning of year
Provision (reversal)
during the year
Balance, end of period

24. MODAL SAHAM

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

24. SHARE CAPITAL

As of December 31, 2024 and 2023, the shareholders composition are as follows:

Pemegang Saham/ Shareholder	31 Desember 2024 / December 31, 2024		
	Jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh/ Number of shares issued and fully paid	Jumlah dalam Rupiah/ Amount in Rupiah	Persentase kepemilikan/ Ownership percentage
Pemerintah Provinsi Bali / Province of Bali	719.912	719.912.000.000	29,91%
Pemerintah Kota Denpasar / Denpasar City Government	300.000	300.000.000.000	12,46%
Pemerintah Kabupaten / Regencies Government			
- Badung	1.050.617	1.050.617.000.000	43,65%
- Gianyar	100.000	100.000.000.000	4,15%
- Buleleng	80.000	80.000.000.000	3,32%
- Karangasem	43.550	43.550.000.000	1,81%
- Jembrana	37.092	37.092.000.000	1,54%
- Klungkung	31.423	31.423.000.000	1,31%
- Tabanan	31.006	31.006.000.000	1,29%
- Bangli	13.577	13.577.000.000	0,56%
Jumlah / Total	2.407.177	2.407.177.000.000	100,00%

Pemegang Saham/ Shareholder	31 Desember 2023 / December 31, 2023		
	Jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh/ Number of shares issued and fully paid	Jumlah dalam Rupiah/ Amount in Rupiah	Persentase kepemilikan/ Ownership percentage
Pemerintah Provinsi Bali / Province of Bali	719.912	719.912.000.000	35,11%
Pemerintah Kota Denpasar / Denpasar City Government	214.476	214.476.000.000	10,46%
Pemerintah Kabupaten / Regencies Government			
- Badung	850.617	850.617.000.000	41,49%
- Buleleng	80.000	80.000.000.000	3,90%
- Karangasem	42.550	42.550.000.000	2,08%
- Jembrana	37.092	37.092.000.000	1,81%
- Klungkung	31.423	31.423.000.000	1,53%
- Tabanan	31.006	31.006.000.000	1,51%
- Gianyar	29.604	29.604.000.000	1,45%
- Bangli	13.577	13.577.000.000	0,66%
Jumlah / Total	2.050.257	2.050.257.000.000	100,00%

Selama periode 31 Desember 2024, pemegang saham Bank telah memberikan kontribusi tambahan.

During the period December 31, 2024, the Bank's shareholders have made additional contributions.

Berdasarkan Akta No. 15 tanggal 13 Mei 2024 oleh Notaris I Made Widiada, S.H., di Bali disetujui penambahan modal disetor oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar sebanyak 70.396 (tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan puluh enam) lembar saham atau bernilai nominal sebesar Rp70.396.000.000 (tujuh puluh miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) sehingga sekarang menjadi sebanyak 100.000 (seratus ribu) lembar saham atau bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp 100.000.000.000 (Seratus miliar rupiah) dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0109170 tanggal 14 Mei 2024.

Based on Deed no. 15 dated May 13, 2024 by Notary I Made Widiada, S.H., in Bali, the Gianyar Regency Government approved an increase in paid-in capital of 70,396 (seventy thousand three hundred and ninety six) shares or a nominal value of Rp70,396,000,000 (seventy billion three hundred and ninety six million rupiah) so that now there are 100,000 (one hundred thousand) shares or a total nominal value of Rp100,000,000,000 (one hundred billion rupiah) and has received approval from the Ministry of Law and Human Rights based on Letter No. AHU-AH.01.03-0109170 dated May 14, 2024.

24. MODAL SAHAM (LANJUTAN)

Berdasarkan Akta No. 36 tanggal 23 Juli 2024 oleh Notaris I Made Widiada, S.H., di Bali disetujui penambahan modal disetor oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham atau bernilai nominal sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sehingga sekarang menjadi sebanyak 43.550 (empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh) lembar saham atau bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp43.550.000.000 (empat puluh tiga miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-074845 tanggal 23 Juli 2024.

Berdasarkan Akta No. 31 tanggal 23 Oktober 2024 oleh Notaris I Made Widiada, S.H., di Bali disetujui penambahan modal disetor oleh Pemerintah Kota Denpasar sebanyak 85.524 (delapan puluh lima ribu lima ratus dua puluh empat) lembar saham atau bernilai nominal sebesar Rp85.524.000.000 (delapan puluh lima miliar lima ratus dua puluh empat juta rupiah) sehingga sekarang menjadi sebanyak 300.000 (tiga ratus ribu) lembar saham atau bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar rupiah) dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0203654 tanggal 23 Oktober 2024.

Berdasarkan Akta No. 78 tanggal 24 Desember 2024 oleh Notaris I Made Widiada, S.H., di Bali disetujui penambahan modal disetor oleh Pemerintah Kabupaten Badung sebanyak 200.000 (dua ratus ribu) lembar saham atau bernilai nominal sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah) sehingga sekarang menjadi sebanyak 1.050.617 (satu juta lima puluh ribu enam ratus tujuh belas) lembar saham atau bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.050.617.000.000 (satu triliun lima puluh miliar enam ratus tujuh belas juta rupiah) dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0228472 tanggal 27 Desember 2024.

Tambahan setoran modal tersebut telah dilaporkan dan dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan.

24. SHARE CAPITAL (CONTINUED)

Based on Deed no. 36 dated July 23, 2024 by Notary I Made Widiada, S.H., in Bali, the Karangasem Regency Government approved an increase in paid-in capital of 1,000 (one thousand) shares or a nominal value of Rp1,000,000,000 (one billion rupiah) so that now there are 43,550 (forty three thousand five hundred and fifty) shares or a total nominal value of Rp43,550,000,000 (fourty three billion five hundred and fifty million rupiah) and has received approval from the Ministry of Law and Human Rights based on Letter No. AHU-AH.01.03-074845 dated July 23, 2024.

Based on Deed No. 31 dated October 23, 2024 by Notary I Made Widiada, S.H., in Bali, it was approved that the Denpasar City Government increase its paid-up capital by 85,524 (eighty five thousand five hundred twenty four) shares or with a nominal value of Rp85,524,000,000 (eighty five billion five hundred twenty four million rupiah) so that now it is 300,000 (three hundred thousand) shares or with a total nominal value of Rp300,000,000,000 (three hundred billion rupiah) and has received approval from the Ministry of Law and Human Rights based on Letter No. AHU-AH.01.03-0203654 dated October 23, 2024.

Based on Deed No. 78 dated December 24, 2024 by Notary I Made Widiada, S.H., in Bali, it was approved that the Badung Regency Government increase its paid-up capital by 200,000 (two hundred thousand) shares or with a nominal value of Rp200,000,000,000 (two hundred billion rupiah) so that now it is 1,050,617 (one million fifty thousand six hundred and seventeen) shares or with a total nominal value of Rp1,050,617,000,000 (one trillion fifty billion six hundred and seventeen million rupiah) and has received approval from the Ministry of Law and Human Rights based on Letter No. AHU-AH.01.03-0228472 dated December 27, 2024.

Those additional paid-in capital have been reported for registration to and recorded by Financial Services Authority.

25. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Selama 31 Desember 2024 dan 2023, para pemegang saham Bank melakukan penambahan setoran modal dan saldo tambahan modal disetor pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

25. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

During December 31, 2024 and 2023, the Bank's shareholders have additional capital contributions and the balance of additional paid-in capital as at December 31, 2024 and 2023 are as follows:

31 Desember 2024 / December 31, 2024				
Pemegang saham/ Shareholders	1 Januari 2024/ January 1, 2024	Penambahan Modal Disetor/ Additional Paid In Capital	Reklasifikasi Ke Modal Disetor Penuh/ Reclassification to Share Capital	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Pemerintah Provinsi Bali / Province of Bali	-	-	-	-
Pemerintah Kota Denpasar / Denpasar City Government	-	85.524.000.000	(85.524.000.000)	-
Pemerintah Kabupaten/ Regencies Government				
- Badung	-	200.000.000.000	(200.000.000.000)	-
- Buleleng	312.707	-	-	312.707
- Jembrana	642.847	-	-	642.847
- Karangasem	-	1.000.000.000	(1.000.000.000)	-
- Klungkung	200.202	-	-	200.202
- Gianyar	458.456	70.395.541.544	(70.396.000.000)	-
- Bangli	726.126	-	-	726.126
	2.340.338	356.919.541.544	(356.920.000.000)	1.881.882

25. TAMBAHAN MODAL DISETOR (LANJUTAN)

Selama 31 Desember 2024 dan 2023, para pemegang saham Bank melakukan penambahan setoran modal dan saldo tambahan modal disetor pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2023 / December 31, 2023				
Pemegang saham/ Shareholders	1 Januari 2023 / January 1, 2023	Penambahan Modal Disetor/ Additional Paid In Capital	Reklasifikasi Ke Modal Disetor Penuh/ Reclassification to Share Capital	31 Desember 2023 / December 31, 2023
Pemerintah Provinsi Bali / Province of Bali	-	75.000.000.000	(75.000.000.000)	-
Pemerintah Kota Denpasar / Denpasar City Government	-	30.000.000.000	(30.000.000.000)	-
Pemerintah Kabupaten/ Regencies Government				
- Buleleng	312.707	5.557.000.000	(5.557.000.000)	312.707
- Jembrana	642.847	-	-	642.847
- Karangasem	-	1.500.000.000	(1.500.000.000)	-
- Klungkung	200.202	-	-	200.202
- Gianyar	458.456	-	-	458.456
- Bangli	726.126	-	-	726.126
	2.340.338	112.057.000.000	(112.057.000.000)	2.340.338

Seluruh jumlah setoran di atas sementara dicatat sebagai Tambahan Modal Disetor dan baru akan dipindahkan sebagai Modal Saham setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta di catat di Otoritas Jasa Keuangan.

25. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (CONTINUED)

During December 31, 2024 and 2023, the Bank's shareholders have additional capital contributions and the balance of additional paid-in capital as at December 31, 2024 and 2023 are as follows:

The entire amount of the contribution above is temporarily recorded as Additional Paid-in Capital and the shares will be transferred as capital share after obtaining approval from the Minister of Law and Human Rights and recorded at the Financial Services Authority.

26. PENGGUNAAN SALDO LABA

Penggunaan laba bersih tahun 2023 ditetapkan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 41 tanggal 23 Februari 2024, Notaris I Made Widiada, S.H.

Penggunaan laba bersih tahun 2022 ditetapkan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 47 tanggal 22 Februari 2023, Notaris I Made Widiada, S.H.

Berdasarkan keputusan RUPS tersebut di atas, penggunaan laba tahun 2023 dan 2022 ditetapkan sebagai berikut:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Dividen	553.671.231.988
Cadangan Umum	184.557.077.329
Jumlah	738.228.309.317

Jumlah dividen yang diumumkan untuk masing-masing periode adalah sebagai berikut:

Periode	Jumlah / Total
Distribusi pada tahun 2024 untuk laba tahun 2023	553.671.231.988
Distribusi pada tahun 2023 untuk laba tahun 2022	452.637.208.122

Jasa produksi dan beban Corporate Social Responsibility dibukukan sebagai beban pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

26. APPROPRIATION OF RETAINED EARNINGS

Distribution of net income on 2023 determined based on Deed of Shareholders Annual General Minutes of Meeting No. 41 dated February 23, 2024, Notary I Made Widiada, S.H.

Distribution of net income on 2022 determined based on Deed of Shareholders Annual General Minutes of Meeting No. 47 dated February 22, 2023, Notary I Made Widiada, S.H.

Based on the above Shareholder Annual General Minutes of Meeting, the distribution of income in 2023 and 2022, are as follows:

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	
Dividen	452.637.208.122	Dividends
Cadangan Umum	150.879.069.374	General reserve
Jumlah	603.516.277.496	Total

The amount of dividends declared for each period are as follows:

Per Saham / Per Share	Period
230.009	Distribution in 2024 for 2023 profit
220.771	Distribution in 2023 for 2022 profit

Employee bonus and Corporate Social Responsibility expenses are recorded as expense in the current year statement of profit and loss and other comprehensive income.

27. PENDAPATAN BUNGA

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	31 Desember 2023 / December 31, 2023
Pinjaman yang diberikan	2.487.122.926.271	2.467.518.399.507
Efek - efek	680.646.557.515	559.874.059.736
Penempatan pada Bank Lain	164.315.110.379	55.007.669.522
Penempatan pada Bank Indonesia	15.770.845.656	18.565.385.419
Jumlah	3.347.855.439.821	3.100.965.514.184

Loans
Marketable Securities
Placements with Other Bank
Placements with
Bank Indonesia
Total

28. BEBAN BUNGA

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	31 Desember 2023 / December 31, 2023
Simpanan dari Nasabah		
Deposito Berjangka	380.619.852.053	373.359.912.172
Tabungan	316.146.838.574	258.018.359.336
Giro	88.668.684.765	76.050.287.284
Penjaminan	82.863.726.126	66.974.110.847
Premi Asuransi Untuk Program Penjaminan Dana Nasabah	67.269.494.280	54.274.346.129
Simpanan dari Bank Lain	17.286.668.096	17.989.824.483
Call Money dan Repo	8.856.564.263	7.047.384.724
Pinjaman yang Diterima	3.403.699.034	3.645.413.972
Beban Bunga SGU	1.948.858.914	1.523.359.567
Pinjaman yang diberikan	1.775.460.347	403.289.970
Subsidi Kredit	1.280.160.000	10.665.663
Jumlah	970.120.006.452	859.296.954.147

Deposits from Customers
Time Deposits
Savings Account
Current Accounts
Guarantee
Insurance Premium for
Premium on Deposit Insurance
The Customer
Deposits from Another Bank
Call Money and Repo
Borrowings
Interest Expense SGU
Loans
Subsidized Credit
Total

29. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	31 Desember 2023 / December 31, 2023
Administrasi	74.812.490.187	65.680.060.457
Penerimaan Kembali Kredit		
Hapus Buku	82.060.634.698	52.972.639.564
Fee	38.882.314.900	33.566.290.439
Denda Kredit	11.862.632.872	12.180.818.784
Tata Usaha Kredit	5.970.151.840	5.586.457.204
Valuta Asing	1.049.398.683	611.302.424
Tabungan Pasif dan Tutup	1.160.092.618	587.682.098
Keuntungan penjualan penyertaan saham	-	299.291.000
Safe Deposit Box	88.120.000	87.280.000
Sub - Jumlah	215.885.835.798	171.571.821.970
Pendapatan Provisi dan Komisi		
Jasa Bank	9.767.737.892	8.763.715.438
Sub - Jumlah	9.767.737.892	8.763.715.438
Lain-lain	1.085.572.298	988.475.730
Jumlah	226.739.145.988	181.324.013.138

Administration
Recovery of Account
Written-off
Fees
Loan Penalties
Loan Administration
Foreign Exchange Gain
Savings Passive and Closed
Gain from sale of share investments
Safe Deposit Box
Sub - Total
Provision Income and Commissions
Bank Services
Sub - Total
Others
Total

30. PEMBENTUKAN (PEMULIHAN) CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	31 Desember 2023 / December 31, 2023
Pinjaman yang Diberikan	139.150.563.768	336.861.975.904
Tagihan lainnya	10.094.297.118	-
Giro pada Bank Lain	12.789.130	2.013.027
Penempatan pada Bank-bank Lain	(284.184.479)	1.683.933.735
Efek-efek	(28.500.000)	(206.814.100)
Penyertaan	-	(75.000.000)
Jumlah	148.944.965.537	338.266.108.566

Loans
Other Bills
Current Accounts with Other Banks
Placements with Other Banks
Securities
Investment In Shares
Total

30. PROVISION (RECOVERY) FOR IMPAIRMENT LOSSES

31. GAJI DAN TUNJANGAN KARYAWAN

31. SALARIES AND EMPLOYEE BENEFITS

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	31 Desember 2023 / December 31, 2023	
Tunjangan dan Insentif	302.649.446.855	180.121.901.643	Benefits and Incentives
Gaji, Upah dan Honorarium	244.931.232.370	213.234.852.179	Salaries, Wages and Honorarium
Jasa Produksi dan Tantiem	187.552.435.752	157.611.744.039	Production Services and Tantiem
Imbalan Pasca Kerja (Catatan 21)	43.148.062.936	25.059.590.501	Post-Employment Benefits (Note 21)
Makan dan Lembur	32.195.136.464	33.295.212.636	Meal and Overtime
Representasi dan Penghargaan	22.388.750.692	22.208.323.998	Representation and Service Awards
Pendidikan dan Latihan	21.869.430.485	14.766.371.849	Education and Training
Lain-lain	2.636.263.447	2.334.274.788	Others
Jumlah	857.370.759.001	648.632.271.633	Total

Jumlah gaji kotor, tunjangan dan bonus Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite dan Pejabat Eksekutif masing-masing adalah sebesar Rp113.650.175.097 dan Rp67.978.620.391 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

For the years ended December 31, 2024 and 2023, the amount of gross salaries, benefits and bonuses of the Board of Commissioners, Directors, Committee and Executive Officers, amounted to Rp113,650,175,097 and Rp67,978,620,391 a respectively, with details as follows:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024				
	Jumlah Anggota/ Total Members	Gaji/ Salary	Tunjangan/ Benefit	Bonus dan Penghargaan/ Bonusses and Service Guarantee	Jumlah/ Total
Direksi/ Directors	5	5.982.000.000	22.344.170.622	37.856.355.031	66.182.525.653
Dewan Komisaris/ Board of Commissioners	5	3.229.200.000	5.429.176.200	8.198.017.697	16.856.393.897
Pejabat Eksekutif / Executive Officers	28	2.343.390.000	14.898.874.132	12.050.928.401	29.293.192.533
Komite Audit/ Audit Committee	2	360.000.000	41.731.507	257.300.000	659.031.507
Komite Pemantau Risiko/ Risk Monitoring Committee	1	180.000.000	23.066.759	184.800.000	387.866.759
Komite Remunerasi dan Nominasi/ Remuneration and Nomination Committee	1	180.000.000	18.664.748	72.500.000	271.164.748
Jumlah	42	12.274.590.000	42.755.683.968	58.619.901.129	113.650.175.097

	31 Desember 2023 / December 31, 2023				
	Jumlah Anggota/ Total Members	Gaji/ Salary	Tunjangan/ Benefit	Bonus dan Penghargaan/ Bonusses and Service Guarantee	Jumlah/ Total
Direksi/ Directors	5	5.292.000.000	11.296.385.006	19.017.605.344	35.605.990.350
Dewan Komisaris/ Board of Commissioners	5	1.665.320.000	2.374.405.319	3.723.863.396	7.763.588.715
Pejabat Eksekutif / Executive Officers	27	1.991.724.664	11.603.638.540	9.652.334.723	23.247.697.927
Komite Audit/ Audit Committee	2	210.000.000	38.568.804	234.675.000	483.243.804
Komite Pemantau Risiko/ Risk Monitoring Committee	2	210.000.000	37.352.587	219.675.000	467.027.587
Komite Remunerasi dan Nominasi/ Remuneration and Nomination Committee	1	180.000.000	26.397.008	204.675.000	411.072.008
Jumlah	42	9.549.044.664	25.376.747.264	33.052.828.463	67.978.620.391

32. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Outsourcing	61.277.633.936
Otomasi	60.657.001.114
Tamu, Souvenir, Sumbangan	40.533.434.629
Penyusutan Aset Tetap (Catatan 11)	29.099.874.001
Pemeliharaan dan Perbaikan	18.283.045.302
Rumah Tangga Kantor dan Lainnya	18.010.303.727
Amortisasi Aset Hak Guna (Catatan 13)	17.339.107.163
Biaya Iuran OJK	16.407.334.023
Biaya CSR	15.227.359.885
Iklan dan Promosi	14.408.543.686
Ongkos Bank	12.450.190.055
Listrik, Air dan Telepon	11.677.731.559
Perjalanan Dinas	10.276.536.420
Sewa	8.968.681.600
Premi Asuransi	6.700.036.803
Jasa Profesional	6.391.030.731
Amortisasi Aset Takberwujud (Catatan 12)	4.738.667.375
Rapat	4.269.528.291
Keamanan	1.802.928.200
Pajak	634.612.906
Denda dan Sanksi	359.469.657
Lain-lain	13.245.449.937
Jumlah	372.758.501.000

32. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	
Outsourcing	50.858.455.706	Outsourcing
Otomasi	50.192.262.984	Automation
Tamu, Souvenir, Sumbangan	31.280.940.811	Guest, Souvenirs, Donation
Penyusutan Aset Tetap (Catatan 11)	22.168.887.496	Depreciation of Fixed Assets (Note 11)
Pemeliharaan dan Perbaikan	15.634.425.507	Maintenance and Repairs
Rumah Tangga Kantor dan Lainnya	18.761.284.275	Office Expenses and Others
Amortisasi Aset Hak Guna (Catatan 13)	17.435.903.236	Amortization of Right-of-Use Assets (Note 13)
Biaya Iuran OJK	15.934.676.237	OJK Contribution Expenses
Biaya CSR	14.727.808.442	CSR Expenses
Iklan dan Promosi	14.408.477.479	Advertising and Promotion
Ongkos Bank	23.973.415.912	Bank Charges
Listrik, Air dan Telepon	10.319.724.517	Electrical, Water and Telephone
Perjalanan Dinas	9.898.002.625	Travel Expenses
Sewa	7.693.471.939	Rent Expenses
Premi Asuransi	6.194.948.651	Insurance Premium
Jasa Profesional	8.290.029.258	Professional Fee
Amortisasi Aset Intangible Assets (Catatan 12)	3.741.819.939	Amortization of Intangible Assets (Note 12)
Rapat	4.162.161.066	Meeting
Keamanan	1.778.701.000	Security
Pajak	525.731.318	Taxes
Denda dan Sanksi	42.040.000	Penalty
Lain-lain	13.034.495.314	Others
Jumlah	341.057.663.712	Total

33. PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Pendapatan Non - Operasional	
Selisih Kurs	1.544.065.747
Laba Penjualan Inventaris Kantor (Catatan 11)	-
Sewa	182.138.134
Pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai uang muka pajak	48.424.954.723
Lain-lain	5.040.301.635
Sub - Jumlah	55.191.460.239
Beban Non - Operasional	
Pemantapan Pelaksanaan Ibadah	(3.813.609.889)
Beban Pajak	(30.512.362.123)
Duka	(563.016.196)
Kerugian Penghapusan Inventaris Kantor (Catatan 11)	(386.736.454)
Lain-lain	(5.805.394.876)
Sub - Jumlah	(41.081.119.538)
Jumlah	14.110.340.701

33. NON - OPERATING INCOME (EXPENSES)

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	
Non Operating Income		
Selisih Kurs	452.142.697	Foreign Exchange Difference
Laba Penjualan Inventaris Kantor (Catatan 11)	244.343.541	Gain from Sale of Office Equipment (Note 11)
Sewa	195.213.900	Rent
Pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai uang muka pajak	-	Recovery from impairment
Lain-lain	4.431.670.483	Impairment loss of tax advance Others
Sub - Total	5.323.370.621	Sub - Total
Non - operating expense		
Pemantapan Pelaksanaan Ibadah	(4.045.501.676)	Strengthening Implementation of Worship
Beban Pajak	(1.267.032.520)	Tax Expense
Duka	(519.035.952)	Grief
Kerugian Penghapusan Inventaris Kantor (Catatan 11)	-	Loss from Disposal of Office Equipment (Note 11)
Lain-lain	(4.972.191.994)	Others
Sub - Jumlah	(10.803.762.142)	Sub - Total
Jumlah	(5.480.391.521)	Total

34. KOMITMEN DAN KONTINGJENSI

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Komitmen	
Fasilitas Kredit Kepada Debitur yang Belum Digunakan	386.981.506.950
Jumlah Liabilitas	
Komitmen - Bersih	386.981.506.950
Kontinjensi	
Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian	80.268.037.878
Sub - Jumlah	80.268.037.878
Liabilitas Kontinjensi	
Bank Garansi yang Diterbitkan	(104.919.480.197)
Sub - Jumlah	(104.919.480.197)
Jumlah Liabilitas	
Kontinjensi - Bersih	(24.651.442.318)

34. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	
Commitment Liabilities		
Fasilitas Kredit Kepada Debitur yang Belum Digunakan	537.270.109.026	Unused Credit Facilities to Debtors
Total Commitments		
Liability - Net	537.270.109.026	Liability - Net
Contingencies		
Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian	115.121.429.956	Interest Income in Settlement
Sub - Total	115.121.429.956	Sub - Total
Contingent Liabilities		
Bank Garansi yang Diterbitkan	(177.581.312.056)	Bank Guarantee Issued
Sub - Total	(177.581.312.056)	Sub - Total
Total Contingent		
Liability - Net	(62.459.882.101)	Liability - Net

35. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan normal usaha, Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak - pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat telah disepakati bersama.

35. RELATED PARTY TRANSACTIONS

In the normal course of business, Bank enter into certain transactions with parties which are related to the management and/or owned by the same ultimate shareholder. All transactions with related parties have met the agreed terms and conditions.

Pihak Berelasi / Related Parties	Sifat dari Hubungan / Nature of Relationship	Sifat dari Transaksi / Nature of Transactions
Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten se Wilayah Bali / Provincial, City, and Regency Governments of Bali Region	Pemegang Saham / Shareholders	Simpanan / Deposits
Manajemen Kunci / Key Management	Komisaris, Direktur dan Pejabat Eksekutif / Commissioners, Directors and Executive Officers	Pinjaman yang Diberikan dan Simpanan / Loans and Deposits
Perusahaan yang Dimiliki oleh Pemegang Saham / Ownership of Shareholders	Pengendalian Bersama oleh Pemegang Saham / Joint Control by the Shareholders	Pinjaman yang Diberikan dan Simpanan / Loans and Deposits
Dalam kegiatan usahanya, Bank juga mengadakan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi-transaksi pada saldo tersebut meliputi:		
In the normal course of business, the Bank entered into certain transactions with related parties. The transactions in the balance consist of:		
31 Desember 2024 / December 31, 2024		
31 Desember 2023 / December 31, 2023		
Pinjaman yang diberikan		Loans
Keluarga Direksi dan Karyawan Kunci	26.419.046.747	25.561.390.510
Komisaris	3.214.217.807	151.067.630
Lainnya	2.588.719.600	1.729.406.954
Jumlah Pinjaman yang Diberikan	32.221.984.154	27.441.865.094
Persentase terhadap Jumlah Aset	0,08%	0,08%
Simpanan dari Nasabah		Deposits from Customers
Giro	540.226.399.665	126.572.763.689
Tabungan	25.296.065.082	16.377.822.782
Deposito	25.126.901.368	19.436.223.037
Jumlah Simpanan dari Nasabah	590.649.366.115	162.386.809.508
Persentase terhadap Jumlah Liabilitas	1,76%	0,54%
31 Desember 2024 / December 31, 2024		
31 Desember 2023 / December 31, 2023		
Kompensasi Kepada Personil Manajemen Kunci		Compensation of Key Management Personnel
Bonus dan Penghargaan	58.619.901.129	33.052.828.463
Tunjangan	42.755.683.968	25.376.747.264
Gaji	12.274.590.000	9.549.044.664
Jumlah Kompensasi Kepada Personil Manajemen Kunci	113.650.175.097	67.978.620.391
Persentase Terhadap Kompensasi Kepada Personil Manajemen Kunci	0,13%	0,10%

Tidak terdapat kerugian penurunan nilai atas saldo transaksi selama tahun berjalan dengan personil manajemen kunci, dan tidak ada penyisihan khusus yang dibuat untuk kerugian penurunan nilai atas transaksi dengan personil manajemen kunci dan kerabat dekat mereka pada akhir tahun.

There were no impairment losses on the transaction balance during the year with key management personel, and no special allowance for impairment losses on transactions with key management personnel and their close relatives at the end of the year.

36. ASET DAN LIABILITAS DALAM VALUTA ASING

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	
Valuta Asing / Foreign Exchange	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	
Aset Moneter		
Kas		
Kas Harian Teller	21.891	352.335.645
Giro pada		
Bank Indonesia	51.500	828.892.500
Giro pada Bank Lain	1.899.150	30.566.821.020
Liabilitas Moneter		
Giro	4.761	76.629.583
Tabungan	82.535	1.328.396.640
Simpanan Berjangka	151.800	2.443.221.000
Rupa-rupa Liabilitas	8.029	129.223.053
Rekening Perantara Valuta	1.723.613	27.741.543.509

36. MONETARY ASSET AND LIABILITIES IN FOREIGN CURRENCIES

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	
Valuta Asing / Foreign Exchange	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	
Monetary Assets		
Cash		
Teller daily cash	64.690	996.031.930
Current Accounts with Bank Indonesia	51.500	792.945.500
Current Accounts with Other Bank	1.314.661	20.241.832.646
Monetary Liabilities		
Current Account	4.892	75.329.053
Savings	60.004	923.880.972
Term Deposits	110.500	1.701.368.500
Other Liabilities	8.021	123.499.953
Currency intermediary Account	1.246.183	19.187.485.348

37. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

37. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSET AND LIABILITIES

Tabel di bawah ini adalah nilai tercatat dan nilai wajar atas aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

The table below sets out the carrying values and fair values of financial assets and liabilities in statements of financial position as December 31, 2024 and 2023:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024		31 Desember 2023 / December 31, 2023		
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value	
Aset Keuangan					Financial Assets
Biaya perolehan diamortisasi					Measured at amortised cost
Kas	580.735.597.835	580.735.597.835	569.570.584.235	569.570.584.235	Cash
Giro pada Bank Indonesia	2.694.875.382.728	2.694.875.382.728	2.393.875.393.891	2.393.875.393.891	Current Account with Bank Indonesia
Giro pada Bank Lain bersih	45.087.137.075	45.087.137.075	70.081.387.110	70.081.387.110	Current Account with Other Bank Net
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain Bersih	3.143.158.664.835	3.143.158.664.835	2.526.747.434.599	2.526.747.434.599	Placement with Bank Indonesia and Other Bank net
Pinjaman yang Diberikan-Bersih	21.525.087.396.052	21.525.087.396.052	19.918.053.709.375	19.918.053.709.375	Loans - Net
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	-	-	3.965.877.652.040	3.965.877.652.040	Marketable Securities Purchased Under Resale Agreement
Aset Lain-lain	229.637.221.111	229.637.221.111	213.233.323.524	213.233.323.524	Other Assets
Efek-efek	9.760.077.271.692	9.760.077.271.692	4.356.007.703.645	4.356.007.703.645	Securities
Jumlah Aset Keuangan	37.978.658.671.328	37.978.658.671.328	34.013.447.188.419	34.013.447.188.419	Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan					Financial Liabilities
Liabilitas Segera	74.679.631.081	74.679.631.081	103.394.989.302	103.394.989.302	Liabilities Due Immediately
Simpanan dari Nasabah	32.167.791.208.809	32.167.791.208.809	27.948.417.302.868	27.948.417.302.868	Deposit from Customers
Simpanan dari Bank Lain	661.691.987.042	661.691.987.042	1.550.582.212.168	1.550.582.212.168	Deposit from Other Bank
Pinjaman yang Diterima	24.433.647.846	24.433.647.846	66.730.442.083	66.730.442.083	Borrowings
Beban yang Masih Harus Dibayar	22.595.470.132	22.595.470.132	20.024.705.770	20.024.705.770	Accrued Expense
Liabilitas Sewa	15.056.560.942	15.056.560.942	13.576.233.846	13.576.233.846	Lease Liabilities
Liabilitas lain-lain	351.353.237.757	351.353.237.757	268.269.989.232	268.269.989.232	Other Liabilities
Jumlah Liabilitas Keuangan	33.317.601.743.609	33.317.601.743.609	29.970.995.875.269	29.970.995.875.269	Total Financial Liabilities

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diukur dengan dasar sebagai berikut:

The fair value of financial assets and financial liabilities is measured on the following basis:

Aset Keuangan

Financial Assets

Nilai wajar atas aset keuangan jangka pendek (umumnya kurang dari satu tahun) seperti giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dan aset lainnya adalah sebesar nilai tercatat karena telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

The fair value of short-term financial assets (generally less than one year), such as current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks and other assets are carried at carrying amount due to their approximate fair value.

Nilai wajar atas efek-efek ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar terakhir yang dipublikasikan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

The fair value of securities is determined by reference to the latest market quotes published as of December 31, 2024 and 2023.

Estimasi nilai wajar pinjaman yang diberikan (umumnya kredit dengan bunga mengambang) merupakan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima yang didiskontokan pada suku bunga pasar. Pinjaman yang diberikan disajikan bersih setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

The estimated fair value of loans (generally floating rate loans) represents the present value of estimated future expected future cash flows discounted at market rates. Loans are presented net of allowance for impairment losses.

37. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (LANJUTAN)

Liabilitas Keuangan

Nilai wajar liabilitas keuangan jangka pendek (umumnya kurang dari satu tahun) seperti simpanan dari nasabah, simpanan dari bank lain dan liabilitas lainnya adalah sebesar nilai tercatat karena telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

Estimasi nilai wajar simpanan tanpa jatuh tempo adalah sebesar jumlah terutang ketika utang tersebut harus segera dibayar pada saat ditagih.

Pengukuran nilai wajar yang diakui pada laporan posisi keuangan:

- Tingkat pertama pengukuran nilai wajar berasal dari kuotasi harga (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset dan liabilitas yang identik.
- Tingkat kedua pengukuran nilai wajar berasal dari masukan lain selain dari kuotasi harga pasar yang sudah termasuk dalam tingkat pertama yang dapat diamati untuk aset maupun liabilitas, baik secara langsung (contohnya harga) atau tidak langsung (contohnya yang berasal dari harga).
- Tingkat ketiga pengukuran nilai wajar yang berasal dari teknik penilaian yang meliputi input untuk aset atau liabilitas jika tidak berdasarkan data pasar yang dapat diamati (masukan yang tidak dapat diamati).

37. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSET AND LIABILITIES (CONTINUED)

Financial Liabilities

The fair value of short-term financial liabilities (generally less than one year) such as deposits from customers, deposits from other banks and other liabilities are at carrying amount due to their approximate fair value.

The estimated fair value of unsecured deposits amounts to the amount owed when the debts are due immediately to be paid at the time of collection.

Fair value measurement recognized in the statement of financial position:

- The first level of measurement of fair value derives from price quotes (not adjusted) in the active market for identical assets and liabilities.
- The second level of fair value measurement comes from other inputs other than quoted market prices that are included in the first observable level for assets or liabilities, either directly (e.g. price) or indirectly (e.g., price-derived).
- The third level of fair value measurement derived from valuation techniques that includes inputs for assets or liabilities if not based on observable market data (inputs that can not be observed).

38. INFORMASI SEGMENT

Bank melaporkan segmen wilayah geografis sebagai informasi segmen utama.

38. SEGMENT INFORMATION

The Bank reported geographical segment as its primary segment information.

31 Desember 2024 / December 31, 2024				
Dalam Jutaan Rupiah/ In Million Rupiah				
Bali/	Mataram/	Jumlah/		
Bali	Mataram	Total		
Pendapatan Bunga	3.260.460	87.395	3.347.855	Interest Income
Beban Bunga	(919.030)	(51.090)	(970.120)	Interest Expenses
Pendapatan Bunga - Bersih	2.341.430	36.305	2.377.735	Interest Income - Net
Pendapatan Operasional Lainnya	222.357	4.382	226.739	Other Operating Income
Gaji dan Tunjangan Karyawan	(842.551)	(14.820)	(857.371)	Salaries and Employee Benefits
Umum dan Administrasi	(368.454)	(4.305)	(372.759)	General and Administrative
Beban Modifikasi	(44.021)	(520)	(44.541)	Modification Expense
Pembentukan Cadangan Kerugian				Allowance for Impairment
Penurunan Nilai	(146.242)	327	(145.915)	Losses
Laba Operasional	1.162.519	21.369	1.183.888	Operating Income
Laba Bersih	857.198	21.267	878.465	Net Profit
Jumlah Aset	37.561.666	751.016	38.312.682	Total Assets
Jumlah Liabilitas	33.449.364	203.121	33.652.485	Total Liabilities

31 Desember 2023 / December 31, 2023				
Dalam Jutaan Rupiah/ In Million Rupiah				
Bali/	Mataram/	Jumlah/		
Bali	Mataram	Total		
Pendapatan Bunga	3.021.586	79.380	3.100.966	Interest Income
Beban Bunga	(811.998)	(47.299)	(859.297)	Interest Expenses
Pendapatan Bunga - Bersih	2.209.588	32.081	2.241.669	Interest Income - Net
Pendapatan Operasional Lainnya	174.963	6.361	181.324	Other Operating Income
Gaji dan Tunjangan Karyawan	(636.501)	(12.131)	(648.632)	Salaries and Employee Benefits
Umum dan Administrasi	(337.222)	(3.836)	(341.058)	General and Administrative
Beban Modifikasi	(24.945)	(87)	(25.032)	Modification Expense
Pembentukan Cadangan Kerugian				Allowance for Impairment
Penurunan Nilai	(330.336)	(4.297)	(334.633)	Losses
Laba Operasional	1.055.547	18.091	1.073.638	Operating Income
Laba Bersih	720.237	17.991	738.228	Net Profit
Jumlah Aset	33.552.162	758.550	34.310.712	Total Assets
Jumlah Liabilitas	30.111.445	209.099	30.320.544	Total Liabilities

39. RISIKO KREDIT

Dalam mengelola risiko kredit, PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah memiliki kerangka kerja yang lengkap, yang memuat panduan-panduan mengenai proses perencanaan dan implementasi serta melakukan penyempurnaan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) terus dilakukan sejalan dengan pedoman Bank Indonesia, fokus penyempurnaan adalah melakukan pemisahan proses keputusan kredit per masing-masing segmen debitur. Hal ini didukung pula oleh kajian berkala dari panduan-panduan tersebut, guna mencapai perbaikan yang berkesinambungan. Beberapa faktor kunci dalam kerangka kerja manajemen risiko kredit adalah:

- Penentuan cakupan dan parameter-parameter yang digunakan dalam menyusun profil risiko kredit;
- Perencanaan dan penetapan kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk menjaga risiko kredit sesuai dengan *Risk Appetite* Bank, antara lain pemberian wewenang kepada pejabat kredit, dan
- Membangun sistem *database* yang kuat.

Sesuai dengan karakteristiknya, kredit yang ada di Bank saat ini terbagi dalam kredit produktif dan kredit konsumtif. Untuk mengelola risikonya, Bank mengukur risiko kredit dari portofolio yang ada baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Hal ini untuk memastikan kemungkinan kerugian dari tidak dibayarnya pinjaman yang diberikan menjadi seminimal mungkin, baik untuk debitur individual maupun secara keseluruhan.

Sistem dan prosedur kredit Bank telah dibakukan untuk menjamin diterapkannya kebijakan dan pelaksanaan pemberian pinjaman secara konsisten. Untuk kredit produktif, Bank menggunakan model *Internal Credit Risk Rating* untuk menganalisis risiko bisnis dan finansial dari debitur secara objektif dan memberikan *rating* kepada nasabahnya. Selain itu, Bank juga menggunakan *Credit Risk Capital Allocation and Pricing* untuk mengkuantifikasi risiko kredit dan menentukan harga yang sesuai berdasarkan risiko kredit.

Untuk kredit konsumtif dan produktif, Bank menggunakan model *Internal Credit Scoring* untuk menganalisis dan menghitung risiko dari pemberian kredit kepada konsumen.

Dalam rangka menerapkan prinsip pemberian kredit yang sehat, Bank menerapkan prinsip *Four Eyes* (pengambilan keputusan kredit yang dilakukan oleh dua orang atau lebih) pada setiap Kantor Cabang dengan penggunaan *Credit Scoring* dan *Credit Reviewer*.

Risiko kredit, yaitu:

- Bidang perkreditan, meliputi *Non Performing Loan* (NPL), kecukupan agunan dan pertumbuhan pinjaman yang diberikan.
- Bidang *treasury* dan investasi, meliputi *Non Performing Portfolio treasury* dan investasi, konsentrasi portofolio *treasury* dan investasi serta kecukupan pembentukan cadangan.

Berikut ini adalah rasio kredit bermasalah/*Non Performing Loan* (NPL) dan rasio kualitas aset produktif Bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Ratio NPL - Bruto	0,92%
Ratio NPL - Bersih	0,02%
Ratio Kualitas Aset Produktif	0,58%

Rasio kualitas aset produktif merupakan rasio aset yang diklasifikasikan sebagai *non performing* dibandingkan dengan jumlah aset produktif.

39. CREDIT RISK

To manage credit risk, PT Bank Pembangunan Daerah Bali has had a complete framework, which includes guidelines on planning and implementation process and continuously improve the Standard Operating Procedures (SOP) to be in line with the guidelines of Bank Indonesia, improvement focus is to conduct the separation process of decision loan for each segment. And Bank periodically review the guidelines, in order to achieve continuous improvement. Some of the key factors in credit risk management framework are:

- Determination of the scope and parameters used in preparing the credit risk profile;
- The planning and setting of the policies required to safeguard credit risk in accordance with *Risk Appetite* Bank, among others, authorization to credit officials, and
- Establish strong database system.

In accordance with the loan characteristics, the Bank's loan are classified into productive loans and consumer loans. In order to manage the risk, the Bank measure credit risk arising from the existing portfolios quantitatively and qualitatively to ensure that the potential losses from default loans are minimized, both for individual borrowers and the overall portfolio.

The Bank's credit system and procedures have been formalized to ensure consistent implementation and policy in credit approval. For productive loans, the Bank uses the *Internal Credit Risk Rating* model to analyze the business and financial risk of debtors objectively and to give ratings to debtors. In addition, the Bank also use *Credit Risk Capital Allocation and Pricing* in quantifying credit risk and determining the appropriate pricing.

For both consumer and productive loans, the Bank use the *Internal Credit Scoring* model to analyze and calculate the credit risk for consumer.

To implement a healthy credit granting process, the Bank apply the *Four Eyes Principle* (credit decision-making by two person or more) at each branch office by using *Credit Scoring* and *Credit Reviewer*.

Credit risk are:

- Lending, including *Non-Performing Loans* (NPL), collateral adequacy and credit growth.
- Treasury and investment, including *Non-Performing Portfolio of treasury and investment*, treasury and investment portfolio concentration and the adequacy of reserves.

The following are the *Non-Performing Loans* (NPL) ratio and the earnings asset quality ratio of the Bank as of December 31, 2024 and 2023:

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	
	1,29%	NPL Ratio - Gross
	0,02%	NPL Ratio - Net
	0,83%	Asset Quality Earning Ratio

Earnings asset quality ratio is the ratio of assets classified as earning assets which classified - non performing to total earning assets.

39. RISIKO KREDIT (LANJUTAN)

Sistem pengelolaan manajemen risiko kredit Bank telah dibakukan dalam suatu Buku Pedoman Perusahaan (BPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan dikaji secara periodik.

- (i) Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan kredit lainnya.

Eksposur risiko kredit terhadap aset pada laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	31 Desember 2023 / December 31, 2023	
Keterangan	Eksposur maksimum / Maximum exposure		Description
Pinjaman yang Diberikan	21.525.087.396.052	19.918.053.709.375	Loans
Efek-efek	9.760.077.271.692	4.356.007.703.645	Securities
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	3.143.158.664.835	2.526.747.434.599	Placement with Bank Indonesia and Other Bank
Giro pada Bank Indonesia	2.694.875.382.728	2.393.875.393.891	Current Account with Bank Indonesia
Giro pada Bank Lain	45.087.137.075	70.081.387.110	Current Account with Other Bank
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	-	3.965.877.652.040	Marketable Securities Purchased Under Resale Agreement
Jumlah	37.168.285.852.382	33.230.643.280.660	Total

Eksposur risiko kredit terhadap rekening administratif pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	31 Desember 2023 / December 31, 2023	
Keterangan	Eksposur maksimum / Maximum exposure		Description
Garansi yang Diterbitkan	104.919.480.197	177.581.312.056	Guarantee Issued
Fasilitas Kredit Kepada Debitur yang Belum Digunakan	(386.981.506.950)	(537.270.109.026)	Credit Facilities to Debtors that Have not Been Used
Jumlah - Bersih	(282.062.026.753)	(359.688.796.970)	Total - Net

Bank menetapkan jenis dan nilai agunan yang dijaminkan sesuai skema kredit dan perkiraan tingkat risiko kredit dari *counterparty* sebagai *second way out* yang ditetapkan. Jenis dari agunan terdiri dari:

- Physical Collateral*, berupa tanah dan bangunan.
- Financial Collateral*, berupa simpanan (tabungan, giro dan deposito), surat berharga, dan lain-lain.
- Lainnya berupa garansi, lembaga penjamin, dan lain-lain.

Pemberian kredit yang dilaksanakan oleh Bank diatur dalam kebijakan dan prosedur perkreditan dimana untuk setiap jenis atau skema kredit telah ditentukan agunan minimal yang harus dipenuhi.

Untuk segmen kredit komersial, sesuai dengan ketentuan perkreditan wajib dijamin oleh agunan yang memadai. Agunan dapat berupa *physical collateral*, *financial collateral* atau lainnya berupa tagihan usaha atau garansi. Untuk seluruh agunan khususnya *physical collateral* akan dilakukan retaksasi dimana nilai likuidasi atas agunan tersebut yang akan dipergunakan dalam menentukan kecukupan nilai agunan (*coverage ratio*).

Selain aspek agunan untuk meminimalkan risiko kredit, pemberian kredit oleh Bank selalu dilakukan berdasarkan evaluasi dan analisa kelayakan sehingga kemampuan pengembalian kredit (*first way out*) dapat dipastikan.

Adanya keharusan bagi debitur untuk memenuhi agunan yang dipersyaratkan, evaluasi atas kelayakan kredit, pengikatan kredit secara legal dan prosedur *pre screening* akan menurunkan *credit risk* eksposur Bank ke tingkat yang layak dan dapat diterima.

Saat ini Bank sedang mengembangkan dan melengkapi lebih lanjut *internal rating* dan *internal scoring* yang ada agar sejalan dengan *Advanced Internal Rating Based Approach* (A-IRB Approach), yaitu dengan mengembangkan *Basel II Risk Parameter Model Probability of Default* (PD), *Loss Given Default* (LGD) dan *Exposure At Default* (EAD) untuk segmen *Wholesale*, *Retail* dan *Consumer*. Hal ini juga dalam rangka mempersiapkan komponen-komponen model untuk perhitungan *Expected Credit Loss* yang dibutuhkan untuk penerapan perhitungan CKPN berdasarkan IFRS 9 (PSAK 109).

39. CREDIT RISK (CONTINUED)

The Bank credit risk management system has been standardized in the Bank's Guidelines (BPP) and Standard Operating Procedures (SOP) and reviewed periodically.

- (i) The maximum credit risk exposure without calculating the collateral and other credit.

As of December 31, 2024 and 2023, credit risk exposure to assets in the statement of financial position, are as follows:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	31 Desember 2023 / December 31, 2023	
Keterangan	Eksposur maksimum / Maximum exposure		Description
Pinjaman yang Diberikan	21.525.087.396.052	19.918.053.709.375	Loans
Efek-efek	9.760.077.271.692	4.356.007.703.645	Securities
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	3.143.158.664.835	2.526.747.434.599	Placement with Bank Indonesia and Other Bank
Giro pada Bank Indonesia	2.694.875.382.728	2.393.875.393.891	Current Account with Bank Indonesia
Giro pada Bank Lain	45.087.137.075	70.081.387.110	Current Account with Other Bank
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	-	3.965.877.652.040	Marketable Securities Purchased Under Resale Agreement
Jumlah	37.168.285.852.382	33.230.643.280.660	Total

As of December 31, 2024 and 2023, credit risk exposure on the administrative accounts is as follows:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	31 Desember 2023 / December 31, 2023	
Keterangan	Eksposur maksimum / Maximum exposure		Description
Garansi yang Diterbitkan	104.919.480.197	177.581.312.056	Guarantee Issued
Fasilitas Kredit Kepada Debitur yang Belum Digunakan	(386.981.506.950)	(537.270.109.026)	Credit Facilities to Debtors that Have not Been Used
Jumlah - Bersih	(282.062.026.753)	(359.688.796.970)	Total - Net

The Bank determined the type and value of collateral according to the loan scheme as well as estimated credit risk level from the counterparty as a second way out. The types of collateral are as follows:

- Physical Collateral*, such as land and buildings.
- Financial Collateral*, such as third party funds (savings, current accounts and time deposits), securities, etc.
- Others, such as guarantees, guarantee institution, etc.

The loan granting conducted by the Bank is stipulated in the loan policy and procedure in which every loan type or scheme has minimum determinable collaterals that should be fulfilled.

For commercial loans segment, according to the loan policy has to be collateralized adequately. The collaterals can be physical collateral, financial collateral or others such as accounts receivable or guarantees. All collaterals particularly for physical collateral will be assessed in which the collateral's liquidation value will be use in determining the coverage ratio.

In addition collateral aspect to minimize credit risk, loan granting is conducted based on evaluation and feasibility analysis so that the loan repayment ability (*first way out*) can be ascertained.

The necessity for debtors to comply with collaterals requirement, loan feasibility evaluation, notarial agreement and pre screening procedures will decrease the Bank's credit risk exposure to the acceptable level.

The Bank is currently developing and further complementing internal rating and internal scoring to align with the Advanced Internal Rating Based Approach (A-IRB Approach), namely by developing the Basel II Risk Parameters Probability of Default (PD) Model, Loss Given Default (LGD) and Exposure At Default (EAD) Exposure for Wholesale, Retail and Consumer segments. This is also in order to prepare the components of the model for the calculation of Expected Credit Loss needed for the application of CKPN calculations based on IFRS 9 (SFAS 109).

39. RISIKO KREDIT (LANJUTAN)

39. CREDIT RISK (CONTINUED)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit oleh rekanan

(ii) Concentration of financial asset risk with credit risk exposure by counter parties

Sektor Industri

Industry Sector

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit Bank pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan sektor industri.

The following table describes the detail of the Bank's credit exposure at the carrying amount (without calculation the collateral or other credit support), which are categorized by industry sector.

31 Desember 2024 / December 31, 2024

	Pemerintah (Termasuk Bank Indonesia) / Government (Including Bank Indonesia)	Perorangan / Individual	Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non-Bank Financial Institutions	Bank / Bank	Perusahaan Lainnya / Other companies	Jumlah / Total
Giro pada Bank Indonesia/ Current Account with Bank Indonesia	2.694.875.382.728	--	--	--	--	2.694.875.382.728
Giro pada Bank Lain/ Current Accounts with Other Banks	--	--	--	45.119.172.455	--	45.119.172.455
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain/ Placement with Bank Indonesia and Other Bank	599.912.525.513	--	--	2.545.024.832.578	--	3.144.937.358.091
Efek-efek/Marketable Securities	9.394.077.271.692	--	--	366.000.000.000	--	9.760.077.271.692
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali/ Marketable Securities Purchased Under Agreement to Resell	-	--	--	-	--	-
Pinjaman yang Diberikan/ Loans	-	20.897.886.901.390	41.536.081.374	7.806.085.208	1.882.940.345.472	22.830.169.413.444
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ Allowance for Impairment Losses	-	(812.624.274.589)	(5.523.983.068)	(1.821.216.655)	(486.923.271.716)	(1.306.892.746.028)
Jumlah - Bersih/ Total - Net	12.688.865.179.933	20.085.262.626.801	36.012.098.306	2.962.128.873.586	1.396.017.073.756	37.168.285.852.382

31 Desember 2023 / December 31, 2023

	Pemerintah (Termasuk Bank Indonesia) / Government (Including Bank Indonesia)	Perorangan / Individual	Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non-Bank Financial Institutions	Bank / Bank	Perusahaan Lainnya / Other companies	Jumlah / Total
Giro pada Bank Indonesia/ Current Account with Bank Indonesia	2.393.875.393.891	-	-	-	-	2.393.875.393.891
Giro pada Bank Lain/ Current Account with Other Bank	-	-	-	70.100.633.360	-	70.100.633.360
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain/ Placement with Bank Indonesia and Other Bank	99.985.425.169	-	-	2.428.824.887.165	-	2.528.810.312.334
Efek-efek/Marketable Securities	3.980.036.203.645	-	-	376.000.000.000	-	4.356.036.203.645
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali/ Marketable Securities Purchased Under Agreement to Resell	3.965.877.652.040	-	-	-	-	3.965.877.652.040
Pinjaman yang diberikan/ Loans	822.519.643	19.321.184.836.503	46.160.326.028	8.499.666.667	1.773.913.656.646	21.150.581.005.487
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ Allowance for Impairment Losses	(2.117.999.978)	(957.375.448.541)	(6.313.613.819)	(178.786.087)	(268.652.071.672)	(1.234.637.920.097)
Jumlah - Bersih/ Total - Net	10.438.479.194.410	18.363.809.387.962	39.846.712.209	2.883.246.401.105	1.505.261.584.974	33.230.643.280.660

39. RISIKO KREDIT (LANJUTAN)

39. CREDIT RISK (CONTINUED)

31 Desember 2024 / December 31, 2024						
Pemerintah (Termasuk Bank Indonesia) / Government (Include Bank Indonesia)	Perorangan / Individual	Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non-Bank Financial Institutions	Bank / Bank	Perusahaan Lainnya / Other companies	Jumlah / Total	
Garansi yang Diterbitkan/ Guarantee Issued	-	-	-	104.919.480.197	104.919.480.197	
Fasilitas Kredit Kepada Debitur yang Belum Digunakan/ Credit Facilities to Borrowers which Have not Used	-	76.266.729.556	731.319.688	1.157.420.000	308.826.037.706	386.981.506.950
Jumlah - Bersih/ Total - Net	-	76.266.729.556	731.319.688	1.157.420.000	413.745.517.903	491.900.987.147
31 Desember 2023 / December 31, 2023						
Pemerintah (Termasuk Bank Indonesia) / Government (Include Bank Indonesia)	Perorangan / Individual	Lembaga Keuangan Bukan Bank / Non-Bank Financial Institutions	Bank / Bank	Perusahaan Lainnya / Other companies	Jumlah / Total	
Garansi yang Diterbitkan/ Guarantee Issued	-	-	-	179.713.105.094	179.713.105.094	
Fasilitas Kredit Kepada Debitur yang belum Digunakan/ Credit Facilities to Borrowers which Have not Used	1.954.231.920	112.266.569.986	592.938.017	470.000.000	421.986.369.096	537.270.109.019
Jumlah - Bersih/ Total - Net	1.954.231.920	112.266.569.986	592.938.017	470.000.000	601.699.474.190	716.983.214.113

Tabel di atas menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit bagi Bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya. Untuk aset pada laporan posisi keuangan, eksposur di atas ditentukan berdasarkan nilai tercatat bersih seperti yang diungkapkan pada laporan keuangan.

The above table shows the maximum exposure to credit risk for the Bank as of December 31, 2024 and 2023 without calculating the collateral or other credit support. For the statement of financial position of assets, the exposure is determined based on net carrying amount as disclosed in the financial statements.

Manajemen yakin akan kemampuan Bank untuk mengendalikan dan memelihara eksposur risiko kredit yang berasal dari pinjaman yang diberikan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

Management believes on the Bank's ability to control and maintain the its credit risk exposure arising form loans based on the following:

- Bank telah memiliki pedoman tertulis mengenai kebijakan dan proses kredit yang mencakup seluruh aspek pemberian kredit yang dilakukan. Setiap pemberian kredit harus senantiasa mengacu pada kebijakan tersebut.
- Bank telah memiliki sistem deteksi dini permasalahan melalui "early warning system" dan pemantauan yang disiplin.

- The Bank has written guidelines regarding credit policies and processes that cover all aspects of loans granted. Each granting of credit should always refer to such policy.
- The Bank has an "early warning system" and disciplined monitoring.

(iii) Efek Covid-19 pada risiko kredit

Dampak langsung dan tidak langsung atas pandemi Covid-19 mempengaruhi perekonomian global, pasar, dan pihak lawan maupun debitur dari Bank. Manajemen telah melakukan langkah-langkah untuk memitigasi dampak terhadap bisnis Bank sebagai berikut:

(iii) Effect of Covid-19 in credit risk

Direct and indirect effects of the Covid-19 outbreak affects the global economy, markets, and the counterparties and debtor of the Bank. Management has taking actions to mitigate the impacts on the Bank's business as follow:

- Mempersiapkan skema restrukturisasi/relaksasi kredit sementara untuk debitur yang terdampak Covid-19.
- Melakukan penyaluran kredit yang diberikan secara selektif dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.
- Meningkatkan upaya penagihan dan penyelesaian kredit bermasalah.
- Melakukan efisiensi biaya operasional.
- Menerapkan manajemen risiko likuiditas secara optimum untuk menjaga posisi likuiditas Bank.

- Establish various temporary credit restructuring/relaxation scheme for customers affected by Covid-19.
- Provide loans to customers selectively with prudent principles.

Manajemen juga telah melakukan analisa berdasarkan risiko atas sektor-sektor yang paling terkena dampak penurunan akibat Covid-19, dan melakukan review kualitatif atas perhitungan ECL terhadap sektor-sektor tersebut untuk meyakinkan bahwa ECL mencukupi.

Management also performs a risk-based assessment of those sectors most impacted by the Covid-19 downturn, and performs a qualitative review of the ECL calculation associated with those sectors to ensure that overall ECL is sufficient.

Debitur yang masih memiliki prospek usaha serta kemampuan membayar diberikan relaksasi kredit antara lain dalam bentuk perpanjangan tenor disesuaikan dengan siklus usaha debitur (pada umumnya untuk masa hingga 1 tahun). Sementara untuk debitur yang membutuhkan waktu pemulihan relatif lebih lama, diberikan restrukturisasi kredit, antara lain dalam bentuk pemberian masa tenggang/penundaan pembayaran dan/atau penurunan suku bunga.

Debtors who still have good business prospects and the ability to pay, the Bank provide loan relaxation, among others through tenor extension in accordance with the debtor's current business cycle (generally for period up to 1 year). Meanwhile, for debtors who need relatively longer recovery time, it can be given loan restructuring, among others in the form of grace period/payment holiday and/or a reduction in interest rates.

39. RISIKO KREDIT (LANJUTAN)

(iii) Efek Covid-19 pada risiko kredit (Lanjutan)

Sehubungan dengan hal tersebut, pihak regulator juga telah mengeluarkan beberapa peraturan yaitu, antara lain:

1. POJK No. 19 tanggal 28 Oktober 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana.
2. POJK No. 17/POJK.03/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.
3. POJK No. 48/POJK.03/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Perubahan atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.
4. POJK No. 11/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran COVID-19 yang bertujuan untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
5. Surat OJK No. S-12/D.03/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Kebijakan Relaksasi Lanjutan Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional Sektor Perbankan.
6. Siaran pers OJK No. SP28/DHMSOJK/IV/2020 tentang Panduan Penerapan PSAK 109 dan PSAK 113 untuk Perbankan di Masa Pandemi COVID-19 tanggal 16 April 2020.

Manajemen telah melakukan evaluasi dampak pandemi Covid-19 terhadap perhitungan kerugian kredit ekspektasian, antara lain penyesuaian terhadap variabel ekonomi makro yang mempengaruhi kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (Stage 1) dan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan (Stage 2 dan Stage 3). Mengingat model perhitungan kerugian kredit ekspektasian tidak sepenuhnya dapat menghasilkan estimasi kerugian yang akurat dalam kondisi ekonomi yang abnormal, maka manajemen juga sudah memperhitungkan beberapa faktor penyesuaian untuk memastikan nilai kerugian kredit ekspektasian yang diakui dalam laporan keuangan dinyatakan secara wajar.

Dengan membaiknya kondisi perekonomian dari dampak pandemi Covid-19, selanjutnya regulator menerbitkan POJK 19 tanggal 28 Oktober 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana yang berakhir pada 24 Maret 2024 yang ditegaskan juga melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK No. 34/KDK.03/2022 tanggal 25 November 2022 tentang Penetapan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum, Sektor Tekstil dan Produk Tekstil serta Alas Kaki, Segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Provinsi Bali sebagai Sektor dan Daerah yang Memerlukan Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank. Bank telah mempertimbangkan berbagai informasi relevan yang tersedia, termasuk kebijakan pemberian restrukturisasi kepada debitur-debitur yang masih belum pulih sepenuhnya dari dampak pandemi Covid-19. Sesuai kondisi normal, penjadwalan ulang atau restrukturisasi pinjaman akan menunjukkan peningkatan risiko kredit yang signifikan dan pindah ke Stage 3.

Bank telah menerapkan pembentukan pencadangan dengan prinsip yang konservatif dengan membentuk ECL atas kredit-kredit bermasalah dengan kategori putus hubungan.

39. CREDIT RISK (CONTINUED)

(iii) Effect of Covid-19 in credit risk (Continued)

In relation to these, the regulators has also issued several regulations as follows:

1. POJK No. 19 dated October 28, 2022 concerning Special Treatment for Financial Services Institutions in Certain Regions and Sectors in Indonesia Affected by Disasters.
2. POJK No. 17/POJK.03/2021 dated September 10, 2021 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Financial Services Authority Number 11/POJK.03/2020 regarding National Economy Stimulus as the Coronavirus Disease 2019 Outbreak Impact Countercyclical Policy.
3. POJK No. 48/POJK.03/2020 dated December 1, 2020 concerning the Amendment to the Regulation of the Financial Services Authority Number 11/POJK.03/2020 regarding National Economy Stimulus as the Coronavirus Disease 2019 Outbreak Impact Countercyclical Policy.
4. POJK No. 11/POJK.03/2020 dated 16 March 2020 regarding National Economy Stimulus as the COVID-19 Outbreak Impact Countercyclical Policy with the objective to push the optimisation of Bank's performance specifically for the intermediation function, manage the stability of the financial system, and support the economic growth.
5. OJK Letter No. S-12/D.03/2020 dated 27 May 2020 regarding Additional Relaxation Policy to Support the National Economic Recovery Program in the Banking Sector.
6. OJK press release No. SP28/DHMSOJK/IV/2020 concerning Guidelines for the Implementation of SFAS 109 and SFAS 113 for Banking during the COVID-19 Pandemic dated 16 April 2020.

Management has evaluated the impact of the Covid-19 pandemic on calculating expected credit loss, including adjustments to macroeconomic variables that affect 12-month expected credit losses (Stage 1) and expected credit losses over the life of the financial assets (Stage 2 and Stage 3). Considering that the expected credit loss calculation model cannot produce an accurate estimation of losses in abnormal economic conditions, Management has also taken into account several adjustment factors to ensure the expected value of the expected credit loss recognised in the financial statements is stated fairly.

With the improving economic conditions from the impact of the Covid-19 pandemic, the regulator then issued POJK 19 dated October 28, 2022 concerning Special Treatment for Financial Services Institutions in Certain Regions and Sectors in Indonesia Affected by Disasters which ended on March 24, 2024 which was also confirmed through the Decree of the OJK Board of Commissioners No. 34/KDK.03/2022 dated November 25, 2022 concerning the Determination of the Accommodation and Food and Beverage Provision Sector, the Textile and Textile Products and Footwear Sector, the Micro, Small, and Medium Enterprises Segment, and the Province of Bali as Sectors and Regions Requiring Special Treatment for Bank Credit or Financing. The Bank has considered various relevant information available, including the policy of providing restructuring to debtors who have not fully recovered from the impact of the Covid-19 pandemic. Under normal conditions, rescheduling or restructuring of loans will indicate a significant increase in credit risk and move to Stage 3.

The Bank has implemented the establishment of reserves with a conservative principle by forming ECL for problematic loans in the disconnected category.

39. RISIKO KREDIT (LANJUTAN)

39. CREDIT RISK (CONTINUED)

(iv) Pinjaman yang diberikan

(iv) Loans

Ikhtisar pinjaman yang diberikan adalah sebagai berikut:

Summary of loans are as follows:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024			
	Tidak Mengalami Penurunan Nilai/ Not Impaired	Mengalami Penurunan Nilai/ Impaired	Jumlah/ Total	
Rumah Tangga	9.797.623.881.458	73.923.468.412	9.871.547.349.870	Household
Perdagangan Besar dan Eceran	5.873.478.193.965	174.801.952.656	6.048.280.146.621	Wholesale and Retail Trade
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.689.795.040.102	27.145.823.863	1.716.940.863.965	Agriculture, forestry and Fishery
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	1.842.963.215.716	23.224.204.725	1.866.187.420.441	Accommodation and culinary supplying
Konstruksi	665.719.705.509	99.944.737.806	765.664.443.315	Construction Leasing and Leasing
Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	291.299.104.878	2.842.332.714	294.141.437.592	Activities Without Employment Options Travel Agencies and Other Business Support
Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	546.652.545.383	3.693.784.664	550.346.330.047	Human Health Activities And Social activity
Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	15.540.940.934	191.557.052	15.732.497.986	Arts, Entertainment and Recreation
Industri Pengolahan	492.263.094.522	10.393.288.957	502.656.383.479	Processing Industry
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	-	-	-	Government administration defense and social welfare
Real Estate	14.999.773.035	-	14.999.773.035	Real Estate
Informasi dan Komunikasi	12.766.609.653	390.082.990	13.156.692.643	Information and Communication
Pengangkutan dan Pergudangan	143.131.170.505	473.867.378	143.605.037.883	Transportation and Warehousing
Aktivitas Keuangan dan Asuransi	52.174.461.991	3.204.298.644	55.378.760.635	Financial and Insurance Activities
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	8.035.714.286	-	8.035.714.286	Procurement of Electricity, Gas, Steam/Hot Water and Cold Air
Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah dan Aktivitas Remediasi	109.122.571.358	98.500.000	109.221.071.358	Water Management, Wastewater Management, Waste Management and Recycling and Remediation activities
Pendidikan	67.617.717.247	-	67.617.717.247	Education
Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	9.213.487.508	850.993	9.214.338.501	Household Activities as Employer, Activities That Produce Goods And Services By Households Used To Fulfill Own Needs
Pertambangan dan Penggalian	-	76.889.421	76.889.421	Mining and Excavation
Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis	83.542.049.759	1.600.687.916	85.142.737.675	Professional, Scientific And Technical Activities
Aktivitas Jasa Lainnya	679.318.135.466	12.905.671.978	692.223.807.444	Other Service Activities
Jumlah	22.395.257.413.275	434.912.000.169	22.830.169.413.444	Total
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(940.706.643.862)	(364.375.373.530)	(1.305.082.017.392)	Allowance for Impairment Losses
Jumlah - Bersih	21.454.550.769.413	70.536.626.639	21.525.087.396.052	Total - Net

39. RISIKO KREDIT (LANJUTAN)

39. CREDIT RISK (CONTINUED)

(iv) Pinjaman yang diberikan (Lanjutan)

(iv) Loans (Continued)

		31 Desember 2023 / December 31, 2023			
	Tidak Mengalami Penurunan Nilai/ Not Impaired	Mengalami Penurunan Nilai/ Impaired	Jumlah/ Total		
Rumah Tangga	9.576.688.478.621	80.588.857.990	9.657.277.336.611	Household	
Perdagangan Besar dan Eceran	5.360.256.942.663	195.960.216.367	5.556.217.159.030	Wholesale and Retail Trade	
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.511.227.447.742	38.098.132.778	1.549.325.580.520	Agriculture, forestry and Fishery	
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum	1.375.221.243.068	18.740.195.535	1.393.961.438.603	Accommodation and culinary supplying	
Konstruksi	763.369.883.139	6.799.460.831	770.169.343.970	Construction Leasing and Leasing	
Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	241.345.773.105	2.780.611.496	244.126.384.601	Activities Without Employment Options Travel Agencies and Other Business Support	
Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	461.967.531.579	1.988.138.752	463.955.670.331	Human Health Activities And Social activity	
Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	15.275.532.311	-	15.275.532.311	Arts, Entertainment and Recreation	
Industri Pengolahan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	388.202.373.258	5.735.854.355	393.938.227.613	Processing Industry Government administration defense and social welfare	
Real Estate	240.048.753	-	240.048.753	Real Estate	
Informasi dan Komunikasi	18.828.557.044	412.638.895	19.241.195.939	Information and Communication	
Pengangkutan dan Pergudangan	22.741.815.273	1.075.431.889	23.817.247.162	Transportation and Warehousing	
Aktivitas Keuangan dan Asuransi	137.810.108.750	511.696.065	138.321.804.815	Financial and Insurance Activities	
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	59.313.054.007	2.946.077.307	62.259.131.314	Procurement of Electricity, Gas, Steam/Hot Water and Cold Air	
Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah dan Aktivitas Remediasi	18.750.000.000	-	18.750.000.000	Water Management, Wastewater Management, Waste Management and Recycling and Remediation activities	
Pendidikan	113.436.712.371	156.896.834	113.593.609.205	Education	
Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	49.497.037.853	-	49.497.037.853	Household Activities as Employer, Activities That Produce Goods And Services By Households Used To Fulfill Own Needs	
Pertambangan dan Penggalian	12.093.517.872	89.002.901	12.182.520.773	Mining and Excavation	
Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis	-	76.889.421	76.889.421	Professional, Scientific And Technical Activities	
Aktivitas Jasa Lainnya	74.455.730.525	3.318.180.963	77.773.911.488	Other Service Activities	
Jumlah	581.985.537.548	8.595.397.626	590.580.935.174		
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	20.782.707.325.482	367.873.680.005	21.150.581.005.487	Total	
Jumlah - Bersih	(936.923.855.340)	(295.603.440.772)	(1.232.527.296.112)	Allowance for Impairment Losses	
	19.845.783.470.142	72.270.239.233	19.918.053.709.375	Total - Net	

40. RISIKO LIKUIDITAS

Risiko likuiditas terutama terjadi karena potensi ketidaksesuaian jatuh tempo antara aset dan liabilitas, serta terjadinya konsentrasi dana.

Risiko likuiditas mencakup:

- Bidang perkreditan meliputi kemampuan likuiditas, tenor atau jangka waktu kredit.
- Bidang *treasury* dan investasi meliputi *net cash outflow*.
- Bidang pendanaan meliputi konsentrasi jangka waktu sumber dana, konsentrasi sumber dana dan ketergantungan pada dana antar bank.

Risiko terjadinya kerugian yang merupakan akibat dari adanya kesenjangan antara sumber pendanaan yang pada umumnya berjangka pendek dan aktiva yang pada umumnya berjangka panjang. Besar kecil risiko likuiditas ditentukan antara lain:

- Kecermatan dalam perencanaan arus kas atau arus dana berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana, termasuk mencermati tingkat fluktuasi dana;
- Ketepatan dalam mengatur struktur dana termasuk kecukupan dana;
- Ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas;
- Kemampuan menciptakan akses ke pasar antar bank atau sumber dana lainnya, termasuk fasilitas *lender of last resort*.

Apabila kesenjangan tersebut cukup besar maka akan menurunkan kemampuan Bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi terjadinya risiko likuiditas, maka diperlukan manajemen likuiditas, yang merupakan bagian dari pengelolaan liabilitas.

Kebijakan likuiditas Bank ditujukan untuk memastikan bahwa kebutuhan dana dapat dipenuhi, baik untuk membayar deposito pada saat jatuh tempo atau untuk memenuhi fasilitas kredit yang belum digunakan.

Pengelolaan kelebihan dana likuiditas yang tidak terserap penyaluran kredit, teroptimalisasi melalui pengelolaan *treasury*.

Sebagian besar kelebihan dana likuiditas tersalurkan melalui instrumen-instrumen yang berjangka pendek dan aman. Umumnya, kondisi likuiditas Bank terjaga baik dimana penarikan dana nasabah dapat terpenuhi sekaligus kelebihan dana teroptimalkan dengan imbal hasil yang optimal.

Sumber dana dan waktu jatuh tempo deposito dikelola untuk menghindari adanya dana yang *idle* dan menentukan jumlah serta instrumen aset likuid yang tepat untuk menjamin tingkat likuiditas yang terkendali secara terus menerus.

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai pemetaan aset dan liabilitas keuangan dalam skala waktu tertentu (*maturity buckets*) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (*remaining maturity*) pada tanggal 31 Desember 2024:

40. LIQUIDITY RISK

Liquidity risk mainly occurs because of the potential maturity mismatch between assets and liabilities, and the concentration of funds.

Liquidity risk consist of:

- Lending includes the ability of liquidity, tenure or loan period.
- Treasury and investment consist of net cash outflow.
- Funding covers a period of funding concentration sources, the concentration of financial resources and dependence on interbank funds.

The risk loss resulting from the gap between short-term funding and long-term assets. The size of the liquidity risk is determined, i.e:

- Accuracy in cash flow or flow of fund planning based on financing and fund growth prediction, include observe the fund rate volatility;
- The precision in managing the fund structure, including the adequacy of
- The availability of asset that is ready to be converted into cash;
- Ability to create access to the interbank market or other funding sources, including the lender of last resort facilities.

If the gap is large enough it will reduce the Bank's ability to meet its liabilities at maturity. Therefore, liquidity management is needed to anticipate liquidity risk, which is a part of the management liability.

The Bank's policy is aimed to ensure that fund requirement can be fulfilled, either to pay time deposits at maturity or to fulfill unused loan facility.

Managing the excess of liquidity fund, which are not absorbed by loans, disbursement will be optimized through managing treasury.

Most of the excess of liquidity will be placed in short-term and secured instruments. In general, the Bank's liquidity condition is well maintained where the customers withdrawal can be fulfilled while the excess fund can be optimized with optimum return.

Sources of funds and time deposits maturing managed to avoid any idle funds and determine the amount of liquid assets and appropriate instrument to ensure the level of liquidity in continuously controlled.

The table below presents information on the mapping of financial assets and liabilities in a certain time scale (*maturity buckets*) based on the remaining term until maturity (*remaining maturity*) on December 31, 2024:

31 Desember 2024 / December 31, 2024						
	Total	Sampai dengan 1 bulan	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 6 bulan	Lebih dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo
Kas / Cash	580.735.597.835	580.735.597.835	--	--	--	--
Giro pada Bank Indonesia/ Current Account with Bank Indonesia	2.694.875.382.728	2.694.875.382.728	--	--	--	--
Giro pada Bank Lain/ Current Accounts with Other Banks	45.087.137.075	45.087.137.075	--	--	--	--
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain/ Placement with Bank Indonesia and Other Bank	3.143.158.664.835	3.143.158.664.835	--	--	--	--
Efek-efek/Marketable Securities	9.760.077.271.692	432.986.196.836	3.533.886.735.189	3.398.237.897.390	2.394.966.442.277	--
Pinjaman yang Diberikan/ Loans	21.525.087.396.052	287.366.608.882	511.492.916.542	454.666.868.215	20.271.561.002.413	--
Aset lain-lain/ Other Asset	229.637.221.111	--	--	--	--	229.637.221.110
Jumlah - Bersih/ Total - Net	37.978.658.671.328	7.184.209.588.191	4.045.379.651.731	26.519.432.210.295	22.666.527.444.690	229.637.221.110

40. RISIKO LIKUIDITAS (LANJUTAN)

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai pemetaan aset dan liabilitas keuangan dalam skala waktu tertentu (*maturity buckets*) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (*remaining maturity*) pada tanggal 31 Desember 2024: (lanjutan)

40. LIQUIDITY RISK (CONTINUED)

The table below presents information on the mapping of financial assets and liabilities in a certain time scale (*maturity buckets*) based on the remaining term until maturity (*remaining maturity*) on December 31, 2024: (continued)

31 Desember 2024 / December 31, 2024						
	Total	Sampai dengan 1 bulan	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 6 bulan	Lebih dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo
Liabilitas Segera/ <i>Liabilities due Immediately</i>	74.679.631.081	--	--	--	--	74.679.631.081
Simpanan dari Nasabah/ <i>Deposits from Customers</i>	32.167.791.208.809	24.853.653.118.669	2.711.305.439.899	1.682.636.750.831	2.920.195.899.410	--
Simpanan dari Bank Lain/ <i>Deposits from Other Bank</i>	661.691.987.042	491.930.024.732	156.661.962.310	--	13.100.000.000	--
Pinjaman yang diterima/ <i>Borrowings</i>	24.433.647.846	626.683.151	--	--	23.806.964.695	--
Beban yang Masih Harus Dibayar / <i>Accrued Expense</i>	22.595.470.132	--	--	--	--	22.595.470.132
Liabilitas Sewa/ <i>Lease Liabilities</i>	15.056.560.942	--	468.094.236	1.787.490.368	12.800.976.338	--
Liabilitas Lain-lain/ <i>Others Liabilities</i>	351.353.237.757	--	--	--	--	351.353.237.756
Jumlah - Bersih/ Total - Net	33.317.601.743.609	25.346.209.826.552	2.868.435.496.445	1.684.424.241.199	2.969.903.840.443	448.628.338.969

41. RISIKO PASAR

Dalam rangka pengelolaan secara hati-hati atas layanan dan produk finansial yang semakin beragam sehingga profil risiko juga semakin tinggi Bank terus mengembangkan dan menyempurnakan infrastruktur sesuai dengan kerangka kerja yang telah ditetapkan. Kegiatan ini meliputi penyusunan dan perubahan kebijakan dan prosedur, penetapan limit risiko pasar yang jelas, pengembangan sumber daya manusia dan sistem informasi manajemen yang handal serta meningkatkan fungsi kontrol dan pemantauan.

Risiko pasar mencakup:

- Eksposur kredit, *treasury* maupun investasi terhadap volatilitas suku bunga.
- Volatilitas nilai tukar *treasury* dan investasi.
- Posisi Devisa Neto (PDN).

41. MARKET RISK

In order to manage financial services and products which are increasingly diverse, its became the higher risk profile of the Bank continues to develop and improve infrastructure in accordance with a predetermined framework. These activities include preparation and changes in policies and procedures, establishing limit of market risk, human resource development and information management systems that are reliable and to improve control and monitoring functions.

Market risk consist of:

- Credit exposure, *treasury* and investment to interest rate volatility.
- Exchange rate volatility on *treasury* and investment.
- Net Open Position (NOP).

41. RISIKO PASAR (LANJUTAN)

Tabel di bawah ini merupakan kisaran tingkat bunga per tahun untuk aset dan liabilitas yang signifikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024	
	Rupiah/ Rupiah	Mata Uang Asing/ Foreign Exchange
Aset		
Giro pada Bank Lain	0,00% - 1,25%	0,00%
Penempatan pada Bank		
Indonesia dan Bank Lain :		
Pada Bank Lain		
Deposit Facilities	5,25%	0,00%
Interbank Call Money	6,38% - 6,53%	0,00%
Deposito Berjangka	0,00%	0,00%
Tabungan	0,00%	0,00%
Efek - efek		
SUN Seri FR 0042	10,25%	0,00%
SUN Seri FR 0043	-	0,00%
SUN Seri FR 0045	9,75%	0,00%
SUN Seri FR 0081	6,50%	0,00%
SUN Seri VR 0033	6,04%	0,00%
SUN Seri FR 0084	7,25%	0,00%
SUN Seri FR 0086	5,50%	0,00%
SUN Seri FR 0090	5,125%	0,00%
SUN Seri FR 0095	6,375%	0,00%
SUN Seri FR 0101	6,875%	0,00%
SUN Seri FR 0104	6,50%	0,00%
SUN Seri FR 0033	6,04%	0,00%
PT BPD Sulawesi Selatan		
dan Sulawesi Barat	0,00%	0,00%
PT Bank Mantap	0,00%	0,00%
PT Bank BTPN Tbk	7,00%	0,00%
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	6,25%	0,00%
PT Bank Mandiri, Tbk	5,80% - 7,75%	0,00%
PT Bank Tabungan Negara, Tbk	5,50%	0,00%
PT Bank Negara Indonesia, Tbk	6,35%	0,00%
PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk	6,35%	0,00%
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia		
SRBI	6,81% - 7,53%	0,00%
Efek-efek yang Dibeli dengan		
Janji Dijual Kembali	0,00%	0,00%
Pinjaman yang diberikan	2% - 16,00%	0,00%
Liabilitas		
Simpanan dari Nasabah		
Giro	0% - 1,90%	0% - 0,15%
Tabungan	0% - 3,45%	0% - 0,20%
Deposito Berjangka	2,90% - 4,00%	0,20%
Simpanan dari Bank Lain:		
Giro	0% - 1,90%	0,00%
Tabungan	0% - 3,45%	0,00%
Deposito Berjangka	2,90% - 4,00%	0,00%
Interbank Call Money	0,00%	0,00%
Pinjaman yang Diterima	0,50% - 6,75%	0,00%

Risiko nilai tukar timbul sebagai akibat adanya Posisi Devisa Neto (PDN) pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif baik pada sisi aset maupun liabilitas yang berasal dari transaksi produk-produk individual dan perusahaan dan dari perdagangan mata uang asing di pasar uang antar bank.

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 6/20/PBI/2004 tanggal 15 Juli 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/10/PBI/2010 tanggal 1 Juli 2010, Bank diwajibkan memelihara PDN setinggi-tingginya 20% atas modal tier I dan tier II. PDN secara keseluruhan adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari selisih bersih aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan liabilitas baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing.

41. MARKET RISK (CONTINUED)

The table below summarizes the range of interest rates per annum for significant assets and liabilities for the years ended December 31, 2024 and 2023:

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	
	Rupiah/ Rupiah	Mata Uang Asing/ Foreign Exchange
Assets		
Current Account with Other Bank	0,00% - 1,25%	0,00%
Placements with Bank		
Indonesia and		
Other Banks		
Deposit Facilities	5,25%	0,00%
Interbank Call Money	6,25% - 6,60%	0,00%
Time Deposits	5,75%	0,00%
Savings	0,00%	0,00%
Marketable Securities		
SUN Seri FR 0042	10,25%	0,00%
SUN Seri FR 0043	-	0,00%
SUN Seri FR 0045	9,75%	0,00%
SUN Seri FR 0081	6,50%	0,00%
SUN Seri VR 0033	6,04%	0,00%
SUN Seri FR 0084	7,25%	0,00%
SUN Seri FR 0086	5,50%	0,00%
SUN Seri FR 0090	5,125%	0,00%
SUN Seri FR 0095	6,375%	0,00%
SUN Seri FR 0101	0,000%	0,00%
SUN Seri FR 0104	0,000%	0,00%
SUN Seri FR 0033	0,000%	0,00%
PT BPD Sulawesi Selatan		
dan Sulawesi Barat	6,45%	0,00%
PT Bank Mantap	6,50%	0,00%
PT Bank BTPN Tbk	0,00%	0,00%
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	6,25%	0,00%
PT Bank Mandiri, Tbk	5,80% - 7,75%	0,00%
PT Bank Tabungan Negara, Tbk	5,50%	0,00%
PT Bank Negara Indonesia, Tbk	6,35%	0,00%
PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk	6,35%	0,00%
Securities Rupiah Bank Indonesia		
(SRBI)	6,50% - 7,05%	0,00%
Marketable Securities Purchased		
Under Resale Agreement	6,00% - 6,70%	0,00%
Loans	2,00% - 16,00%	0,00%
Liability		
Deposits from Customers		
Current Account	0% - 1,90%	0% - 0,15%
Savings	0% - 3,5%	0% - 0,20%
Time Deposit	2,90% - 4,00%	0,20%
Deposits from Other Bank		
Current Account	0% - 1,90%	0,00%
Savings	0% - 3,50%	0,00%
Time Deposit	2,65% - 4,00%	0,00%
Interbank Call Money	6,15% - 6,45%	0,00%
Borrowings	0,00%	0,00%

Exchange rate risk arising as a result of the Net Open Position (NOP) on the statement of financial position and administrative account on either the assets or liabilities resulting from transactions between individual and companies products and from money market foreign currency trading among the banks.

In accordance to Bank Indonesia Regulation No. 6/20/PBI/2004 dated July 15, 2004 as last amended by Bank Indonesia Regulation No. 12/10/PBI/2010 dated July 1, 2010, the Bank is required to maintain NOP maximum of 20% on capital tier I and tier II. NOP as a whole is a number that is the sum of the absolute value of the net difference between assets and liabilities in the statement of financial position for each foreign currency plus the net difference between bills and liabilities which are either commitments or contingencies in the administrative account for each foreign currency.

41. RISIKO PASAR (LANJUTAN)

41. MARKET RISK (CONTINUED)

Berikut adalah PDN pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 per mata uang (dalam ekuivalen rupiah) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia:

On December 31, 2024 and 2023 the Bank's NOP (the rupiah equivalent) in accordance with Bank Indonesia Regulation:

	31 Desember 2024 / December 31, 2024			
	Asset/ Assets	Liabilitas/ Liability	Posisi Devisa Neto/ Net Open Position	
Mata Uang Keseluruhan (Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif)				Currencies Aggregate (Statement of Financial Position and Off Balance Sheet)
Dolar Amerika Serikat	31.719	3.849	27.870	United States Dollar
Jumlah Modal			4.541.874	Total Capital
Posisi Devisa Neto (PDN)			0,61%	Net Open Position (NOP)
	31 Desember 2023 / December 31, 2023			
	Asset/ Assets	Liabilitas/ Liability	Posisi Devisa Neto/ Net Open Position	
Mata Uang Keseluruhan (Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif)				Currencies Aggregate (Statement of Financial Position and Off Balance Sheet)
Dolar Amerika Serikat	22.012	2.701	19.311	United States Dollar
Jumlah Modal			4.051.427	Total Capital
Posisi Devisa Neto (PDN)			0,48%	Net Open Position (NOP)

42. RISIKO OPERASIONAL

42. OPERATIONAL RISK

Bank menaruh perhatian yang besar terhadap kegiatan di bidang manajemen risiko operasional selama tahun 2024. Keberhasilan manajemen risiko ini merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas operasional guna mendorong pertumbuhan bisnis.

The Bank consider with operational risk management during 2024. The success of this risk management is a very important role in supporting efforts to improve the quantity and quality of operations to encourage business growth.

Manajemen risiko operasional mencakup bidang yang luas, yakni meliputi proses rekonsiliasi, proses pencegahan dan penanganan kejahatan Bank, penanganan keluhan nasabah, perencanaan kesinambungan bisnis, pengembangan pengetahuan karyawan dalam bidang risiko operasional serta proses evaluasi bagi produk, jenis transaksi, pengembangan produk, pola transaksi maupun sistem teknologi.

Operational risk management covering the reconciliation process, the Bank prevention process and handling the crime, handling customer complaints, business continuity planning, developing employee knowledge in operational risk and evaluation process for the product, transaction type, product development, the transactions pattern or technology systems.

Risiko operasional mencakup:

- Sistem administrasi kredit, *treasury* maupun investasi,
- Kesalahan akuntansi,
- Kecurangan,
- *Force majeure*,
- Hubungan dengan debitur,
- Kegagalan sistem.

Operational risk consist of:

- Loan administrative, treasury and investment administration system
- Accounting Error,
- Fraud,
- Force majeure,
- Relationship with debtor,
- System failure.

43. MANAJEMEN MODAL DAN RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM

43. CAPITAL MANAGEMENT AND MINIMUM REQUIRED CAPITAL ADEQUACY RATIO

Tujuan manajemen permodalan Bank adalah untuk mempertahankan posisi modal yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan mempertahankan investor, deposan, pelanggan dan kepercayaan pasar. Dalam pengelolaan permodalan, Bank mempertimbangkan faktor-faktor, seperti: pengembalian modal yang optimal pada pemegang saham, menjaga keseimbangan antara keuntungan yang lebih tinggi dengan *gearing ratio* serta keamanan yang diberikan oleh posisi modal yang sehat.

The Bank's capital management objectives is to maintain a strong capital position to support business growth and to sustain investor, depositor, customer and market confidence. In managin its capital, the Bank considers factors such as: providing optimal capital rate of return to shareholders and maintaining a balance between high return gearing ratio and safety provided by a sound capital position.

Bank BPD Bali mengatur struktur modal dan membuat penyesuaian atas perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko kegiatannya. Tidak terdapat perubahan tujuan, kebijakan dan proses dari tahun sebelumnya.

Bank BPD Bali's manages its capital structure and makes adjustments to it in the light changes in economic conditions and the risk characteristics of its activities. No changes were made in the objectives, policies and processes from the previous period.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Bank telah memenuhi semua persyaratan modal yang diwajibkan.

As of December 31, 2024 and 2023, the Bank has complied with all capital requirements.

43. MANAJEMEN MODAL DAN RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (LANJUTAN) **43. CAPITAL MANAGEMENT AND MINIMUM REQUIRED CAPITAL ADEQUACY RATIO (CONTINUED)**

Rasio Liabilitas Penyediaan Modal Minimum

Rasio Liabilitas Penyediaan Modal Minimum (*Capital Adequacy Ratio (CAR)*) adalah rasio modal terhadap aset tertimbang menurut risiko (*Risk - Weighted Assets (RWA)*). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, jumlah modal untuk risiko kredit terdiri dari Modal Inti ("Tier I") dan Modal Pelengkap ("Tier II") dikurangi penyertaan pada Entitas Anak. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 dan Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan Surat Edaran OJK No. 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional, sejak 1 Juli 2020, Cadangan Tujuan tidak dapat lagi diperhitungkan sebagai komponen Modal Bank.

Rasio kewajiban penyediaan modal minimum pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut (dalam jutaan rupiah):

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Aset Tertimbang Menurut Risiko	
Risiko Kredit	15.945.083
Risiko Pasar	36.951
Risiko Operasional	1.238.086
Modal	
Modal Inti	4.526.744
Modal Pelengkap	199.618
Jumlah Modal	4.726.362

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Dengan memperhitungkan risiko kredit tetapi tanpa memperhitungkan risiko pasar dan risiko operasional	29,64%
Dengan memperhitungkan risiko kredit dan risiko pasar tetapi tanpa memperhitungkan risiko operasional	29,57%
Dengan memperhitungkan risiko kredit dan risiko operasional tetapi tanpa memperhitungkan risiko pasar	27,51%
Dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional	27,45%
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan	
Pilar 1	8,00%
Pilar 2	9,21%

Capital Adequacy Ratio

The Capital Adequacy Ratio (CAR) is the ratio of the Bank's capital over its Risk - Weighted Assets (RWA). Based on Financial Services Authority Regulation, the total capital for credit risk consists of core capital (Tier I) and supplementary capital (Tier II) less investments in Subsidiaries. In accordance with OJK Regulation No. 11/POJK.03/2016 and OJK Regulation No. 34/POJK.03/2016 concerning the Minimum Capital Requirement for Commercial Banks and OJK Circular Letter No. 9/SEOJK.03/2020 on Transparency and Publication Conventional Commercial Bank Report, since the end of the month of July 1, 2020, Specific Reserves can no longer be taken into account as a component of Capital Bank.

The capital adequacy ratio as of December 31, 2024 and 2023 are as follows (in million of rupiah):

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	
		Risk Weight Asset
	14.873.124	Credit Risk
	19.311	Market Risk
	1.114.397	Operational Risk
		Capital
	3.867.582	Core Capital
	186.628	Supplementary Capital
	4.054.210	Total Capital

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	
		Calculating the credit risk but without market risk and operational risk
	27,32%	Calculating the credit risk and market risk but without operational risk
	27,28%	Calculating the credit risk and operational risk but without market risk
	25,41%	Calculating the credit risk, market risk, and operational risk
	25,38%	The minimum capital requirement ratio required by Financial Service Authority
	8,00%	Tier 1
	9,21%	Tier 2

44. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM **44. GOVERNMENT GUARANTEE FOR PAYMENT LIABILITY OF COMMERCIAL BANKS**

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tanggal 22 September 2004 yang berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 (Perppu No. 3/2008) tanggal 13 Oktober 2008.

Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin kewajiban tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan, maka pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp2.000.000.000 untuk per nasabah per bank. Simpanan nasabah dijamin hanya jika suku bunganya sama dengan atau di bawah 4,25% dan 3,75% pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Pada tanggal 13 Januari 2009, Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Perpu No. 3/2008 menjadi Undang-Undang.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Bank adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

Based on Law No. 24 dated September 22, 2004, which was effective on September 22, 2005 and subsequently amended by the Government Regulation No. 3 (Perppu No. 3/2008) dated October 13, 2008.

The Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS) was formed to guarantee certain liabilities of commercial banks under the applicable guarantee program, the amount of such guarantee being subject to change if the situation complies with certain valid criteria.

Based on the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 66 of 2008 dated October 13, 2008 concerning the Amount of Deposits Guaranteed by the Deposit Guarantee Institution, then on December 31, 2024 and 2023, total deposits guaranteed by LPS are deposits of up to Rp2,000,000,000 for each customer per bank. Customer deposits are guaranteed only if the interest rates are equal to or below 4.25% and 3.75% as of December 31, 2024 and 2023.

On January 13, 2009, the Government of the Republic of Indonesia stipulated Perpu No. 3/2008 to become a law.

As of December 31, 2024 and 2023, the Bank is a member of government guarantee programs.

45. LABA PER SAHAM

Laba tahun berjalan per saham dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan rata-rata tertimbang jumlah lembar saham biasa yang beredar pada tahun bersangkutan.

	31 Desember 2024 / December 31, 2024
Laba untuk perhitungan laba per saham	878.465.741.226
Rata-rata tertimbang total saham	2.135.735
Laba per saham (dalam rupiah penuh)	411.318

45. EARNINGS PER SHARE

Earnings per share is computed by dividing income for the year by the weighted average number of shares of outstanding common stock during the related year.

	31 Desember 2023 / December 31, 2023	
	738.228.309.317	Income for computation of earnings per share
	2.015.729	Weighted average number of shares
	366.234	Earnings per share

46. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2024 / January 1, 2024	Arus Kas / Cash Flow
Pinjaman yang diterima	66.730.442.083	(42.296.794.237)
Liabilitas sewa	13.576.233.846	(9.624.383.458)
Jumlah	80.306.675.929	(51.921.177.695)

	1 Januari 2023 / January 1, 2023	Arus Kas / Cash Flow
Pinjaman yang diterima	57.216.440.132	9.514.001.951
Liabilitas sewa	16.213.804.103	(10.518.129.535)
Jumlah	73.430.244.235	(1.004.127.584)

46. SUPPLEMENTARY CASH FLOW INFORMATION

Changes in liabilities arising from financing activities in the cash flow statement are as follows:

	Lain-lain / Others	31 Desember 2024 / December 31, 2024	
	-	24.433.647.846	Borrowings
	11.104.710.554	15.056.560.942	Lease liabilities
	11.104.710.554	39.490.208.788	Total

	Lain-lain / Others	31 Desember 2023 / December 31, 2023	
	-	66.730.442.083	Borrowings
	7.880.559.278	13.576.233.846	Lease liabilities
	7.880.559.278	80.306.675.929	Total

47. PERIKATAN-PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN

Bank memiliki perikatan-perikatan yang signifikan dan penting pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

- Pada tanggal 3 Januari 2023 Bank menandatangani addendum perjanjian kerjasama dengan PT Bima Sakti Alterra terkait penyediaan *Smart Integrated System* Tagihan Pelanggan dengan perjanjian No. 002/SPK/DIR/DJA/2023 - 001.b/ADD-BSA/PPOB&SIBS/I/2023.
- Pada tanggal 3 Januari 2023 Bank menandatangani perjanjian kerjasama dengan Perusahaan Umum Daerah Air minum Tirta Mangutama terkait layanan penerimaan pembayaran tagihan rekening air minum dan tagihan lainnya secara elektronik dengan perjanjian No. PERUMDA TM.01.3/PRJ/I/2023 dan 0004/SPK/DIR/DJA/2023.
- Pada tanggal 13 Januari 2023 Bank menandatangani perjanjian kerjasama dengan Koperasi Bali Dwipa Sejahtera terkait sinergitas sistem pembayaran menggunakan layanan *E-Link* dan akuisisi *merchant* dengan perjanjian No. 0039/SPK/DIR/DJA/2023 - 003/PKS/KBDS/I/2023.
- Pada tanggal 17 Januari 2023 Bank menandatangani perjanjian kerjasama dengan Koperasi Simpan Pinjam Guna Prima Dana terkait layanan *merchant* QRIS dan akuisisi *merchant* dengan perjanjian No. 0058/SPK/DIR/DJA/2023 - 0010/KSP-GPD/PKS/I/2023.
- Pada tanggal 20 Januari 2023 Bank menandatangani perjanjian kerjasama dengan Yayasan Penyelenggara Pendidikan Latihan dan Pelayanan Kesehatan Bali terkait Pelayanan dan Pemanfaatan Jasa Bank BPD Bali dengan perjanjian No. 0069/SPK/DIR/DJA/2023 - 0147/YPPLPK/KS/IX/2023.
- Pada tanggal 31 Januari 2023 Bank menandatangani perjanjian kerjasama dengan Perusda Air Minum Tirta Amertha Buana Kabupaten Tabanan terkait layanan penerimaan pembayaran tagihan rekening air minum dan tagihan lainnya secara elektronik dengan perjanjian No. TAB.16/SPP.REK.AIR/2023 - 0096/SPK/DIR/DJA/2023.

47. SIGNIFICANT CONTRACTS

Bank has significant engagements as of December 31, 2024 and 2023 as follows:

- On January 3, 2023, the Bank signed an addendum to the cooperation agreement with PT Bima Sakti Alterra regarding the provision of a smart Integrated Customer Billing System with agreement No. 002/SPK/DIR/DJA/2023 - 001.b/ADD-BSA/PPOB&SIBS/I/2023.
- On January 3, 2023, the Bank signed a cooperation agreement with the Regional Perusahaan Umum Daerah Air minum Tirta Mangutama, regarding the service of accepting payments for drinking water bills and other bills electronically with agreement No. PERUMDA TM.01.3/PRJ/I/2023 and 0004/SPK/DIR/DJA/2023.
- On January 13, 2023, the Bank signed a cooperation agreement with the Koperasi Bali Dwipa Sejahtera regarding the synergy of payment systems using E-Link services and merchant acquisition with agreement No. 0039/SPK/DIR/DJA/2023 - 003/PKS/KBDS/I/2023.
- On January 17, 2023, the Bank signed a cooperation agreement with the Koperasi Simpan Pinjam Guna Prima Dana regarding QRIS merchant services and merchant acquisition with agreement No. 0058/SPK/DIR/DJA/2023 - 0010/KSP-GPD/PKS/I/2023.
- On January 20, 2023, the Bank signed a cooperation agreement with the Bali Education, Training and Health Services Organizing Foundation regarding the Services and Utilization of Bali BPD Bank Services with agreement No. 0069/SPK/DIR/DJA/2023 - 0147/YPPLPK/KS/IX/2023.
- On January 31, 2023, the Bank signed a cooperation agreement with Perusda Air Minum Tirta Amertha Buana, Tabanan Regency regarding services for accepting payments for drinking water bills and other bills electronically with agreement No. TAB.16/SPP.REK.AIR/2023 - 0096/SPK/DIR/DJA/2023.

47. PERIKATAN-PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

- g. Pada tanggal 1 Februari 2023 Bank menandatangani perjanjian kerjasama dengan Koperasi Maju Bersama terkait sinergitas sistem pembayaran menggunakan layanan *E-Link* dan akuisisi *merchant* dengan perjanjian No. 0106/SPK/DIR/DJA/2023 - 09/KMB/II/2023.
- h. Pada tanggal 2 Februari 2023 Bank menandatangani kesepakatan bersama dengan Universitas Warmadewa terkait kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan perjanjian No. 286/UNWAR/PD-15/2023 - 0111/SPK/DIR/DJA/2023.
- i. Pada tanggal 6 Februari 2023 Bank menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Bank Perkreditan Rakyat Tridarma Putri terkait layanan *technical assistance* BPD Bali melalui *E-Link* BPR dengan perjanjian No. 0012/SPK/DIR/DJA/2023 - 12/TDP/II/2023.
- j. Pada tanggal 10 Februari 2023 Bank menandatangani perjanjian kerjasama dengan Politeknik Negeri Bali terkait investasi jangka pendek (deposito) PNB tahun 2023 dengan perjanjian No. 352/PL8/KS,00,01/2023 - 0126/SPK/DIR/DJA/2023.
- k. Pada tanggal 17 Februari 2023 Bank menandatangani perjanjian kerjasama dengan Koperasi Simpan Pinjam Bhuwana Sardula terkait sinergitas sistem pembayaran menggunakan layanan *E-Link* dan akuisisi *merchant* dengan perjanjian No. 0167/SPK/DIR/DJA/2023 - 027/KBS/II/2023.
- l. Pada tanggal 20 Februari 2023 Bank menandatangani perjanjian kerjasama dengan VIDA terkait layanan E-KYC untuk *online onboarding* dengan perjanjian No. 35/LGC/IDI-CA/BPDB/II/2023 dan 0176/SPK/DIR/DJA/2023.
- m. Pada tanggal 21 Februari 2023 Bank menandatangani perjanjian kerjasama dengan CV Kamini Daksayini Harsa terkait kerjasama promosi bersama Univlox dengan perjanjian No. 072/UNV-LV/BDG/II/2023 - 0182/SPK/DIR/DJA/2023.
- n. Pada tanggal 28 Februari 2023 Bank menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Bank Perkreditan Rakyat Pusaka terkait layanan *merchant* QRIS dan akuisisi *merchant* dengan perjanjian No. 0216/SPK/DIR/DJA/2023 - 0048/BPR.BP/III/Dpr/2023.
- o. Pada tanggal 28 Februari 2023 Bank menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Bank Perkreditan Rakyat Pusaka terkait layanan *technical assistance* BPD Bali melalui *E-Link* BPR dengan perjanjian No. 0215/SPK/DIR/DJA/2023 - 0047/BPR.BP/III/Dpr/2023.
- p. Pada tanggal 2 Maret 2023 Bank menandatangani perjanjian kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali terkait integrasi sistem aplikasi pembayaran dengan perjanjian No. 0221/SPK/DIR/DJA/2023 - PKS/27/III/KA/HK.02./2023/BNNP.
- q. Pada tanggal 7 Maret 2023 Bank menandatangani perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung terkait pelayanan jasa perbankan dan sistem elektronik terhadap retribusi (E-Retribusi) pada Dinas Koprasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan Kabupaten Klungkung dengan perjanjian No. 075/14/PKS/B.Pem.Kes/2023 - 0251/SPK/DIR/DJA/2023.
- r. Pada tanggal 14 Maret 2023 Bank menandatangani perjanjian kerjasama dengan Rumah Sakit Surya Husadha terkait pemberian layanan transaksi perbankan dengan perjanjian No. 0473/SPK/DIR/DJA/2023 - 009/PTSH/KS/IV/2023.
- s. Pada tanggal 17 Mei 2023 Bank menandatangani perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung terkait pelayanan jasa perbankan dan sistem elektronik terhadap retribusi (E-Retribusi) pada UPTD pengelolaan pasar dengan perjanjian No. 075/24/KB/B.Pem.Kes/2023 - 0568/SPK/DIR/DJA/2023.
- t. Pada tanggal 17 Mei 2023 Bank menandatangani perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung terkait pelayanan jasa perbankan dan sistem elektronik terhadap retribusi (E-Retribusi) pada UPTD pengelolaan pasar dengan perjanjian No. 075/25/PKS/B.Pem.Kes/2023 - 0569/SPK/DIR/DJA/2023.

47. SIGNIFICANT CONTRACTS (CONTINUED)

- g. On February 1, 2023, the Bank signed a cooperation agreement with the Koperasi Maju Bersama regarding the synergy of payment systems using *E-Link* services and merchant acquisition with agreement No. 0106/SPK/DIR/DJA/2023 - 09/KMB/II/2023.
- h. On February 2, 2023, the Bank signed a joint agreement with Warmadewa University regarding cooperation in the fields of education, research and community service with agreement No. 286/UNWAR/PD-15/2023 - 0111/SPK/DIR/DJA/2023.
- i. On February 6, 2023, the Bank signed a cooperation agreement with PT Bank Perkreditan Rakyat Tridarma Putri regarding technical assistance services for BPD Bali via *E-Link* BPR with agreement No. 0012/SPK/DIR/DJA/2023 - 12/TDP/II/2023.
- j. On February 10, 2023, the Bank signed a cooperation agreement with the Bali State Polytechnic regarding short-term investments (deposits) for PNB in 2023 with agreement No. 352/PL8/KS,00,01/2023 - 0126/SPK/DIR/DJA/2023.
- k. On February 17, 2023, the Bank signed a cooperation agreement with the Koperasi Simpan Pinjam Bhuwana Sardula regarding the synergy of payment systems using *E-Link* services and merchant acquisition with agreement No. 0167/SPK/DIR/DJA/2023 - 027/KBS/II/2023.
- l. On February 20, 2023, the Bank signed a cooperation agreement with VIDA regarding E-KYC services for online onboarding with agreement No. 35/LGC/IDI-CA/BPDB/II/2023 and 0176/SPK/DIR/DJA/2023.
- m. On February 21, 2023, the Bank signed a cooperation agreement with CV Kamini Daksayini Harsa regarding promotional cooperation with Univlox with agreement No. 072/UNV-LV/BDG/II/2023 - 0182/SPK/DIR/DJA/2023.
- n. On February 28, 2023, the Bank signed a cooperation agreement with PT Bank Perkreditan Rakyat Pusaka regarding QRIS merchant services and merchant acquisition with agreement No. 0216/SPK/DIR/DJA/2023 - 0048/BPR.BP/III/Dpr/2023.
- o. On February 28, 2023, the Bank signed a cooperation agreement with PT Bank Perkreditan Rakyat Pusaka regarding technical assistance services for BPD Bali via *E-Link* BPR with agreement No. 0215/SPK/DIR/DJA/2023 - 0047/BPR.BP/III/Dpr/2023.
- p. On March 2, 2023, the Bank signed a cooperation agreement with the National Narcotics Agency of Bali Province regarding the integration of payment application systems with agreement No. 0221/SPK/DIR/DJA/2023 - PKS/27/III/KA/HK.02./2023/BNNP.
- q. On March 7, 2023, the Bank signed a cooperation agreement with the Klungkung Regency Government regarding banking services and electronic systems for levies (E-Retribution) at the Department of Cooperatives, small and medium enterprises, industry and trade in Klungkung Regency with agreement No. 075/14/PKS/B.Pem.Kes/2023 - 0251/SPK/DIR/DJA/2023.
- r. On March 14, 2023, the Bank signed a collaboration agreement with Surya Husadha Hospital regarding the provision of banking transaction services with agreement No. 0473/SPK/DIR/DJA/2023 - 009/PTSH/KS/IV/2023.
- s. On May 17, 2023, the Bank signed a cooperation agreement with the Klungkung Regency Government regarding banking services and electronic systems for levies (E-Retribution) on UPTD market management with agreement No. 075/24/KB/B.Pem.Kes/2023 - 0568/SPK/DIR/DJA/2023.
- t. On May 17, 2023, the Bank signed a cooperation agreement with the Klungkung Regency Government regarding banking services and electronic systems for levies (E-Retribution) on UPTD market management with agreement No. 075/25/PKS/B.Pem.Kes/2023 - 0569/SPK/DIR/DJA/2023.

47. PERIKATAN-PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

- u. Pada tanggal 31 Mei 2023 Bank menandatangani perjanjian kerjasama dengan RSUP Prof. DR. IGNG Ngoerah terkait penempatan deposito dengan perjanjian No. 0617/SPK/DIR/DJA/2023 - HK.03.01/D.XVII.4.3.1/25527/2023.
- v. Pada tanggal 16 Juni 2023 Bank menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Taspen (Persero) terkait pembayaran tabungan hari tua, pensiun, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian melalui rekening Bank dengan perjanjian No. 0686/SPK/DIR/DJA/2023 - JAN-02/C.5.4/2023.
- w. Pada tanggal 21 Juni 2023 Bank menandatangani kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung terkait pemanfaatan layanan jasa perbankan untuk menerima pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dengan perjanjian No. 100.3.7.1/41/KB/B.Pem.Kes/2023 - 0830/SPK/DIR/DJA/2023.
- x. Pada tanggal 21 Juni 2023 Bank menandatangani kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung terkait pemanfaatan layanan jasa perbankan untuk menerima pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dengan perjanjian No. 100.3.7.1/41/KB/B.Pem.Kes/2023 - 0831/SPK/DIR/DJA/2023.
- y. Pada tanggal 11 Juli 2023 Bank menandatangani kesepakatan bersama dengan Pemerintah Provinsi Bali terkait Penyimpanan Uang Daerah dengan perjanjian No. B.00.415.4/45900/Setda - 1199/SPK/DIR/DJA/2023.
- z. Pada tanggal 13 September 2023 Bank menandatangani kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Gianyar terkait penyimpanan dan pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah dan Rekening Pemerintah Daerah Lainnya dengan perjanjian No. 018/13/KSB/B.Tapem/IX/2023 - 0986/SPK/DIR/DJA/2023.
- aa. Pada tanggal 6 Agustus 2023 Bank menandatangani kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Badung terkait Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Badung dengan perjanjian No. 134.4/9632/PKS/TKKSD-Bdg/2023 - 0644/SPK/DIR/DJA/2023.
- ab. PT Bank Pembangunan Daerah Bali menandatangani perjanjian sewa menyewa atas tanah dengan Pemerintah Provinsi Bali dengan perjanjian Akta Notaris Luh Made Yogi Mawarwati, SH No. 14 tanggal 4 September 2023 dengan jangka waktu 30 tahun.
- ac. Pada tanggal 10 Oktober 2023 Bank menandatangani kesepakatan bersama dengan Universitas Mahasaraswati terkait Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dengan perjanjian No. K-2620/C.06.01/Unmas/X/2023 - 1064SPK/DIR/DJA/2023.
- ad. Pada tanggal 17 Oktober 2023 Bank menandatangani kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung terkait Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Klungkung dengan perjanjian No. 100.3.7.1/67/NOTA KESEPAKATAN/B.PEM.KES/2023 - 1086/SPK/DIR/DJA/2023.
- ae. Pada tanggal 6 Desember 2023 Bank menandatangani kesepakatan bersama dengan Pemerintah Provinsi Bali terkait Penyediaan Sistem Layanan Perbankan, Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Serta Integrasi Sistem dan Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Secara Elektronik di Provinsi Bali dengan perjanjian No. B.00.415.4/50139/Setda dan 1271/SPK/DIR/DJA/2023.
- af. Pada tanggal 7 Desember 2023 Bank menandatangani kesepakatan bersama dengan Pemerintah Provinsi Bali terkait Penyediaan Sistem Layanan Perbankan, Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Serta Integrasi Sistem dan Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Secara Elektronik di Provinsi Bali dengan perjanjian No. 415.4/70/PKS/B.Pem.Kesra/XII/2023 dan 1276/SPK/DIR/DJA/2023.
- ag. Pada tanggal 1 Januari 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan LPD Desa Adat Beng terkait Sinergitas Sistem Pembayaran Menggunakan Layanan *E-Link* dan Akuisisi *Merchant* dengan perjanjian Nomor : 0015/SPK/DIR/DJA/2024 - 39/LPD/B/II/2024.

47. SIGNIFICANT CONTRACTS (CONTINUED)

- u. On May 31, 2023, the Bank signed a collaboration agreement with RSUP Prof. DR. IGNG Ngoerah regarding deposit placement with agreement No. 0617/SPK/DIR/DJA/2023 - HK.03.01/D.XVII.4.3.1/25527/2023.
- v. On June 16, 2023, the Bank signed a cooperation agreement with PT Taspen (Persero) regarding the payment of old age savings, pensions, work accident insurance and death insurance through a bank account with agreement No. 0686/SPK/DIR/DJA/2023 - JAN-02/C.5.4/2023.
- w. On June 21, 2023, the Bank signed a joint agreement with the Klungkung Regency Government regarding the use of banking services to receive payment of fees for acquiring land and building rights under (BPHTB) agreement No. 100.3.7.1/41/KB/B.Pem.Kes/2023 -0830/SPK/DIR/DJA/2023.
- x. On June 21, 2023, the Bank signed a joint agreement with the Klungkung Regency Government regarding the use of banking services to receive payment of fees for acquiring land and building rights under (BPHTB) agreement No. 100.3.7.1/41/KB/B.Pem.Kes/2023 - 0831/SPK/DIR/DJA/2023.
- y. On July 11, 2023, the Bank signed a joint agreement with the Bali Provincial Government regarding regional money storage with agreement No. B.00.415.4/45900/Setda - 1199/SPK/DIR/DJA/2023.
- z. On September 13, 2023, the Bank signed a joint agreement with the Gianyar Regency Government regarding the storage and management of Regional General Cash Accounts and Other Regional Government Accounts with agreement No. 018/13/KSB/B.Tapem/IX/2023 - 0986/SPK/DIR/DJA/2023.
- aa. On August 6, 2023, the Bank signed a joint agreement with the Badung Regency Government regarding the Implementation of the Badung Regency Public Service Mall with agreement No. 134.4/9632/PKS/TKKSD-Bdg/2023 - 0644/SPK/DIR/DJA/2023.
- ab. PT Bank Pembangunan Daerah Bali signed cooperation agreement for lease of land with Bali Provincial Government Province with a Notarial deed agreement Luh Made Yogi Mawarwati, SH No. 14 dated September 4, 2023 with a term of 30 years.
- ac. On October 10, 2023, the Bank signed a joint agreement with Mahasaraswati University regarding the Implementation of the Tridharma of Higher Education with agreement No. K-2620/C.06.01/Unmas/X/2023 - 1064SPK/DIR/DJA/2023.
- ad. On October 17, 2023, the Bank signed a joint agreement with the Klungkung Regency Government regarding the Implementation of the Klungkung Regency Public Service Mall with agreement No. 100.3.7.1/67/NOTA KESEPAKATAN/B.PEM.KES/2023 - 1086/SPK/DIR/DJA/2023.
- ae. On December 6, 2023, the Bank signed a joint agreement with the Bali Provincial Government regarding the Provision of a Banking Service System, Construction and Development of the Bali Province Regional Original Income Management Information System and Electronic Integration of Regency/City Regional Original Income Systems and Data in the Province of Bali with agreement No. B.00.415.4/50139/Setda and 1271/SPK/DIR/DJA/2023.
- af. On December 7, 2023, the Bank signed a joint agreement with the Bali Provincial Government regarding the Provision of a Banking Service System, Construction and Development of the Bali Province Regional Original Income Management Information System and Electronic Integration of Regency/City Regional Original Income Systems and Data in the Province of Bali with agreement No. 415.4/70/PKS/B.Pem.Kesra/XII/2023 and 1276/SPK/DIR/DJA/2023.
- ag. On January 1, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with the LPD Desa Adat Beng regarding the Synergy of Payment Systems Using E-Link Services and Merchant Acquisition with agreement Number: 0015/SPK/DIR/DJA/2024 - 39/LPD/B/II/2024.

47. PERIKATAN-PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

- ah. Pada tanggal 26 Januari 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi Bali dan PT Bank Central Asia, Tbk terkait Pengalihan Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor: 075/29/PKS/B.PEM.KESRA/X/2022 dan 015/PKS-BPG-ECM/DST/2022 tentang Pemberian Fasilitas BCA E-Commerce Payment Gateway untuk Mendukung Pelaksanaan Penerimaan Kontribusi Wisatawan dengan perjanjian No : B-00.415.4/4778/Setda - 0103/SPK/DIR/DJA/2024 - 010/PKS-ECM/DST/2024.
- ai. Pada tanggal 26 Januari 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Bank Central Asia Tbk terkait Penyedia dan Pendistribusian Kartu Cobranding BPD Bali-Flazz dengan perjanjian No : 0104/SPK/DIR/DJA/2024 - 0232/PKS/CKT/2024.
- aj. Pada tanggal 26 Januari 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Bank Central Asia Tbk terkait Penyedia Pemrosesan Transaksi dan Kanal Pembayaran Non Tunai Dalam Rangka Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dengan perjanjian No : 0102/SPK/DIR/DJA/2024 - 009/PKS-ECM/DST/2024.
- ak. Pada tanggal 2 Februari 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma terkait Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan Untuk Penerimaan Pembayaran Tagihan Rekening Air Minum dan Tagihan Lainnya Dengan Sistem Komputer Secara Online dengan perjanjian No : Perumda.10/PRJ/II/2024 - 0136/SPK/DIR/DJA/2024.
- al. Pada tanggal 5 Februari 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana terkait Layanan Penerimaan Pembayaran Tagihan Rekening Air Minum dan Tagihan Lainnya dengan perjanjian No : 19/Perumda/PKS/II/2024 - 0147/SPK/DIR/DJA/2024.
- am. Pada tanggal 7 Februari 2024 Bank menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Provinsi Bali terkait Penyediaan Sistem Layanan Perbankan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Serta Integrasi Sistem dan Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten / Kota Secara Elektronik di Provinsi Bali dengan perjanjian No : B.00.415.4/7057/Setda - 0158/SPK/DIR/DJA/2024.
- an. Pada tanggal 7 Februari 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi Bali terkait Penyediaan Sistem Layanan Perbankan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Serta Integrasi Sistem dan Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten / Kota Secara Elektronik di Provinsi Bali dengan perjanjian No : B.00.415.4/7058/Setda - 0159/SPK/DIR/DJA/2024.
- ao. Pada tanggal 7 Februari 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sanjiwani Kabupaten Gianyar terkait Layanan Penerimaan Pembayaran Tagihan Rekening Air Minum dan Tagihan Lainnya Secara Elektronik dengan perjanjian No : 14/PUDAM.TS/SPJ/II/2024 - 0154/SPK/DIR/DJA/2024.
- ap. Pada tanggal 7 Februari 2024 Bank menandatangani Addendum Perjanjian Kerja Sama dengan Politeknik Negeri Bali terkait Investasi Jangka Pendek (Deposito) Politeknik Negeri Bali dengan perjanjian No : 00987/PL8/KU/2024 - 0157/SPK/DIR/DJA/2024.
- aq. Pada tanggal 22 April 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait Pemanfaatan Data dan Informasi pada aplikasi BOS SALUR dengan perjanjian No : 6990/C/PR.04.01/2024 - 0462/SPK/DIR/DJA/2024.
- ar. Pada tanggal 13 Mei 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terkait pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan dalam layanan perbankan lingkup PT Bank Pembangunan Daerah Bali dengan perjanjian No : 100.4.7.1/5583/DUKCAPIL - 0558/SPK/DIR/DJA/2024.

47. SIGNIFICANT CONTRACTS (CONTINUED)

- ah. On January 26, 2024 the Bank signed a Cooperation Agreement with the Bali Provincial Government and PT Bank Central Asia, Tbk regarding the Transfer of Rights and Obligations in Cooperation Agreement Number: 075/29/PKS/B.PEM.KESRA/X/2022 and 015/PKS -BPG-ECM/DST/2022 concerning Providing BCA E-Commerce Payment Gateway Facilities to Support the Implementation of Accepting Tourist Contributions with agreement No: B-00.415.4/4778/Setda - 0103/SPK/DIR/DJA/2024 - 010/PKS - ECM/DST/2024.
- ai. On January 26, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with PT Bank Central Asia Tbk regarding the Provision and Distribution of BPD Bali-Flazz Cobranding Cards with agreement No: 0104/SPK/DIR/DJA/2024 - 0232/PKS/CKT/2024.
- aj. On January 26, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with PT Bank Central Asia Tbk regarding Providers of Transaction Processing and Non-Cash Payment Channels in the Context of Local Government Transaction Electronification (ETPD) with agreement No: 0102/SPK/DIR/DJA/2024 - 009/ PKS-ECM/DST/2024.
- ak. On February 2, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Tirta Sewakadarma Regional Public Water Company regarding the Utilization of Banking Services for Accepting Payments for Drinking Water Bills and Other Bills Using an Online Computer System with agreement No: Perumda.10/PRJ/II/ 2024 - 0136/SPK/DIR/DJA/2024.
- al. On February 5, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Regional Public Drinking Water Company Tirta Amertha Jati, Jembrana Regency regarding the Service for Receiving Payments for Drinking Water Bills and Other Bills with agreement No: 19/Perumda/PKS/II/2024- 0147/SPK/DIR/DJA/2024.
- am. On February 7, 2024, the Bank signed a Joint Agreement with the Bali Provincial Government regarding the Provision of a Banking Service System, Development and Development of the Information System for Management of Regional Original Income in the Province of Bali and Integration of Regency/City Regional Original Income Systems and Data Electronically in the Province of Bali with agreement No: B .00.415.4/7057/Setda - 0158/SPK/DIR/DJA/2024.
- an. On February 7, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Bali Provincial Government regarding the Provision of a Banking Service System, Development and Development of the Bali Province Regional Original Income Management Information System and Electronic Integration of Regency/City Regional Original Income Systems and Data in the Province of Bali with agreement No: B.00.415.4/7058/Setda - 0159/SPK/DIR/DJA/2024.
- ao. On February 7, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Tirta Sanjiwani Regional Public Company for Drinking Water, Gianyar Regency regarding Services for Accepting Payments for Drinking Water Bills and Other Bills Electronically with agreement No: 14/PUDAM.TS/SPJ/II/2024 - 0154 /SPK/DIR/DJA/2024.
- ap. On February 7, 2024, the Bank signed an Addendum to the Cooperation Agreement with the Politeknik Negeri Bali regarding Short Term Investments (Deposits) of the Politeknik Negeri Bali with agreement No: 00987/PL8/KU/2024 - 0157/SPK/DIR/DJA/2024.
- aq. On April 22, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Directorate General of Early Childhood Education, Elementary Education and Secondary Education of the Ministry of Education, Culture, Research and Technology regarding the Utilization of Data and Information on the BOS SALUR application with agreement No: 6990/C/PR.04.01/2024 - 0462/SPK/DIR/DJA/2024.
- ar. On May 13, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Directorate General of Population and Civil Registration, Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia regarding the granting of access rights and utilization of population data in banking services within the scope of PT Bank Pembangunan Daerah Bali with agreement No: 100.4.7.1/5583/DUKCAPIL - 0558/SPK/DIR/DJA/2024.

47. PERIKATAN-PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

- as. Pada tanggal 21 Mei 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten Badung terkait Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Badung dengan perjanjian No : 134.4/11017/PKS/TKKSD-Bdg/2024 - 0596/SPK/DIR/DJA/2024.
- at. Pada tanggal 22 Mei 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Taspen (Persero) terkait Pembayaran Tabungan Hari Tua, Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Melalui Rekening Bank dengan perjanjian No : Jan-01/C.4.5/052024 - 0601/SPK/DIR/DJA/2024.
- au. Pada tanggal 31 Mei 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem terkait Layanan Penerimaan Pembayaran Tagihan Rekening Air Minum dan Tagihan Lainnya Secara Elektronik dengan perjanjian No : 690/127/KEU,PERUMDA/V/2024 - 0623/SPK/DIR/DJA/2024.
- av. Pada tanggal 27 Juni 2024 Bank menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Kabupaten Karangasem terkait Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyediaan, Penggunaan Produk dan Jasa Serta Pengembangan Sistem Informasi Layanan Perbankan yang Terintegrasi dengan perjanjian No : 075/02/KB/PEM/2024 - 0720/SPK/DIR/DJA/2024.
- aw. Pada tanggal 11 Juli 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng terkait Penyediaan Sistem Layanan Perbankan, Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Serta Integrasi Sistem Pengelolaan Penerimaan Daerah dengan perjanjian No : 100.3.7.1/23/PKS/PEM/2024 - 0780/SPK/DIR/DJA/2024.
- ax. Pada tanggal 12 Juli 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Rumah Sakit Umum Payangan terkait Pengelolaan, Penyediaan dan Penggunaan Jasa Perbankan dengan perjanjian No : 445/9098/VII/1.01/RSP/2024 - 0801/SPK/DIR/DJA/2024.
- Pada tanggal 19 Juli 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan ay. Pemerintah Kabupaten Klungkung terkait Penggunaan Produk dan Jasa Perbankan dengan perjanjian No : 100.3.7.1/23/PKS/B.Pem.Kes/2024 - 0833/SPK/DIR/DJA/2024.
- az. Pada tanggal 22 Juli 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) terkait Penerimaan Pembayaran Tagihan Listrik dan Tagihan Lainnya secara Terpusat dengan perjanjian No : 0368.AMD/HKM.02.01/F01070300/2024 - 0837/SPK/DIR/DJA/2024.
- ba. Pada tanggal 9 Agustus 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Jasa Raharja terkait Pelayanan dan Pemanfaatan Jasa Bank dengan perjanjian No : P/31.2/SP/2024 - 0977/SPK/DIR/DJA/2024.
- bb. Pada tanggal 14 Agustus 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Angkasa Pura terkait Sewa Ruang dan Pembagian Pendapatan (*Revenue Sharing*) Kepada AP1 Untuk Kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai - Bali dengan perjanjian No : 0003020007968/HK.06.02/2023/GM,DPS - 01352/SPK/DIR/DJA/2024.
- bc. Pada tanggal 20 Agustus 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Equity Life Indonesia terkait Pemasaran Produk Asuransi Bali Dwipa *Multi Protection* dengan Model Bisnis Referensi Tidak Dalam Rangka Produk Bank dengan perjanjian No : 082/ELI/LGL/VIII/24 - 1003/SPK/DIR/DJA/2024.
- bd. Pada tanggal 30 September 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) terkait Pengelolaan Dana Atas Sistem Pembayaran Tagihan Listrik dan Non Tagihan Listrik Secara Terpusat dengan perjanjian No : 1570.Pj/HKM.02.01/F01070300/2024 dan 1129/SPK/DIR/DJA/2024.
- be. Pada tanggal 30 September 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Indonesia Comnets Plus terkait Pelindungan, Pemrosesan dan Penyediaan Akses Data Atas Sistem Pembayaran Tagihan Listrik dan Non-Tagihan Listrik Secara Terpusat dengan perjanjian No : 1856.Pj/HKM.02.01/IC010205/2024 - 1143/SPK/DIR/DJA/2024.

47. SIGNIFICANT CONTRACTS (CONTINUED)

- as. On May 21, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Badung Regency Government regarding the Implementation of the Badung Regency Public Service Mall with agreement No: 134.4/11017/PKS/TKKSD-Bdg/2024 - 0596/SPK/DIR/DJA/2024.
- at. On May 22, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with PT Taspen (Persero) regarding Payment of Old Age Savings, Pension, Work Accident Insurance and Death Insurance Through Bank Accounts with agreement No: Jan-01/C.4.5/052024 - 0601/SPK/DIR/DJA/2024.
- au. On May 31, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with Perumda Tirta Tohlangkir, Karangasem Regency regarding Services for Accepting Payments for Drinking Water Account Bills and Other Bills Electronically with agreement No: 690/127/KEU, PERUMDA/V/2024 - 0623/SPK/DIR/DJA/2024.
- av. On June 27, 2024 the Bank signed a Joint Agreement with the Karangasem Regency Government regarding Regional Financial Management, Provision, Use of Products and Services and Development of an Integrated Banking Service Information System with agreement No: 075/02/KB/PEM/2024 - 0720/SPK/DIR/DJA/2024.
- aw. On July 11, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Buleleng Regency Government regarding the Provision of Banking Service Systems, Development and Development of Information Systems and Integration of Regional Revenue Management Systems with agreement No: 100.3.7.1/23/PKS/PEM/2024 - 0780/SPK/DIR/DJA/2024.
- ax. On July 12, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with Payangan General Hospital regarding the Management, Provision and Use of Banking Services with agreement No: 445/9098/VII/1.01/RSP/2024 - 0801/SPK/DIR/DJA/2024.
- ay. On July 19, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with the Klungkung Regency Government regarding the Use of Banking Products and Services with agreement No: 100.3.7.1/23/PKS/B.Pem.Kes/2024 - 0833/SPK/DIR/DJA/2024.
- az. On July 22, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) regarding the Centralized Acceptance of Electricity Bill Payments and Other Bills with agreement No: 0368.AMD/HKM.02.01/F01070300/2024 - 0837/SPK/DIR/DJA/2024.
- ba. On August 9, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with PT Jasa Raharja regarding Services and Utilization of Bank Services with agreement No: P/31.2/SP/2024 - 0977/SPK/DIR/DJA/2024.
- bb. On August 14, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with Angkasa Pura regarding Space Rental and Revenue Sharing to AP1 for Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Activities at I Gusti Ngurah Rai International Airport - Bali with agreement No: 0003020007968/HK.06.02/2023/GM,DPS - 01352/SPK/DIR/DJA/2024.
- bc. On August 20, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with PT Equity Life Indonesia regarding the Marketing of Bali Dwipa Multi Protection Insurance Products with a Reference Business Model Not Within the Context of Bank Products with agreement No: 082/ELI/LGL/VIII/24 - 1003/SPK/DIR/DJA/2024.
- bd. On September 30, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) regarding the Management of Funds for the Centralized Electricity Bill and Non-Electricity Bill Payment System with agreement No: 1570.Pj/HKM.02.01/F01070300/2024 and 1129/SPK/DIR/DJA/2024.
- be. On September 30, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with PT Indonesia Comnets Plus regarding the Protection, Processing and Provision of Data Access to the Centralized Electricity Bill and Non-Electricity Bill Payment System with agreement No : 1856.Pj/HKM.02.01/IC010205/2024 - 1143/SPK/DIR/DJA/2024.

47. PERIKATAN-PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

- bf. Pada tanggal 2 Oktober 2024 Bank menandatangani Kesepakatan Bersama dengan PT Nusa Satu Inti Artha (DOKU) terkait Kerjasama Optimalisasi Penerimaan Daerah Provinsi Bali Melalui Kerja Sama Perluasan Perluasan Kanal Bayar Retribusi Pariwisata Bali dengan kesepakatan bersama No : 1153/SPK/DIR/DJA/2024 - 074/MOU DOKU/IX/2024
- bg. Pada tanggal 11 Oktober 2024 Bank menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Bima Sakti Alterra terkait Penyediaan *Smart Integrated Billing System* Tagihan Pelanggan dengan perjanjian No : 1208/SPK/DIR/DJA/2024 - 145/ADD-BSA/PPOB&SIBS/X/2024.
- bh. Pada tanggal 22 Oktober 2024 Bank menandatangani perjanjian Kerja Sama dengan Primakara University terkait Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan perjanjian No : 006/KB/ RKTR/VIII/2024 - 1248/SPK/DIR/DJA/2024.

47. SIGNIFICANT CONTRACTS (CONTINUED)

- bf. On October 2, 2024, the Bank signed a Joint Agreement with PT Nusa Satu Inti Artha (DOKU) regarding the Cooperation in Optimizing Regional Revenue of Bali Province Through Cooperation in Expanding the Bali Tourism Retribution Payment Channel with a joint agreement No : 1153/SPK/DIR/DJA/2024 - 074/MOU DOKU/IX/2024.
- bg. On October 11, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with PT Bima Sakti Alterra regarding the Provision of Smart Integrated Billing System for Customer Bills with agreement No : 1208/SPK/DIR/DJA/2024 - 145/ADD-BSA/PPOB&SIBS/X/2024.
- bh. On October 22, 2024, the Bank signed a Cooperation Agreement with Primakara University regarding the Implementation of the Tri Dharma of Higher Education with Agreement No : 006/KB/RKTR/VIII/2024 - 1248/SPK/DIR/DJA/2024.

48. KONTINJENSI

Bank saat ini mempunyai aset/liabilitas kontinjensi yang signifikan terkait dengan beberapa perkara perdata sebagai berikut:

Perkara perdata Nomor 138/Pdt.G/2019/PN. Jkt.Sel., terhadap Bank BPD Bali tidak ada tuntutan pada gugatan, hanya sebagai pihak Turut Tergugat yang saat itu menempatkan dana sebesar Rp195.000.000.000 dalam bentuk *Deposit on Call*. Dalam artian permasalahan terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat. Telah diputus oleh Mahkamah Agung RI No. 2685 K/PDT/2024 tanggal 25 Juli 2024 dengan putusan MENOLAK permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat (*Inkrah*).

Perkara perdata Nomor 89/Pdt.G/2022/PN. Amp., tentang Gugatan I Gede Mungghah Dkk., selaku Para Penggugat kepada Kantor Cabang Karangasem, bahwa Bank dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan lelang terhadap jaminan/objek sengketa tanpa adanya Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dari orang yang berhak. Sesuai dengan Risalah Pemberitahuan Putusan Kasasi Perkara No. 4622 K/PDT/2023 Jo 89/Pdt.G/2022/PN Amp tanggal 26 April 2024 disampaikan "Mahkamah Agung Republik Indonesia MENOLAK Permohonan Kasasi I Gede Mungghah, Dkk. (*Inkrah*).

Perkara perdata Nomor 169/Pdt.G/2022/PN. Gin., tentang gugatan I Wayan Sedantha, Dkk., selaku Para Penggugat kepada Kantor Cabang Pembantu Sukawati bahwa Bank BPD Bali Capem Sukawati diminta menyerahkan sisa hasil lelang jaminan. Sesuai Berdasarkan informasi dari SIPP PN Gianyar tanggal 1 Agustus 2024, Perkara telah diputus Mahkamah Agung RI No. 4774 K/Pdt/2023 dengan putusan MENOLAK permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat (*Inkrah*).

Perkara perdata Nomor 275/Pdt.G/2022/PN. Gin., tentang gugatan I Wayan Artawan, Dkk., selaku penggugat kepada Cabang Ubud terkait Bank dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena melaksanakan lelang Eksekusi Hak Tanggungan. Penggugat menyatakan Kasasi atas Putusan Banding di Pengadilan Tinggi Denpasar yang menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar yang menyatakan Gugatan Penggugat Ditolak. Sesuai dengan Risalah Pemberitahuan Putusan Kasasi Perkara No. 4115 K/PDT/2024 Jo 263/Pdt/2023/PT.Dps. Jo 275/Pdt.G/2022/PN Gin tanggal 20 Desember 2024 disampaikan "Mahkamah Agung Republik Indonesia MENOLAK Permohonan Kasasi I Wayan Artawan dkk. (*Inkrah*).

Perkara perdata Nomor 145/Pdt.G/2023/PN. Dps., tentang gugatan I Nyoman Suweca kepada Capem Mengwi terkait Bank BPD Bali Capem Mengwi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan lelang eksekusi terhadap agunan penggugat karena Penggugat masih membayar angsuran kredit. Sesuai dengan Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi Perkara No. 2943 K/PDT/2023 Jo No.145/Pdt.G/2023/PN.Dps tanggal 16 Oktober 2024 disampaikan Mahkamah Agung Republik Indonesia MENOLAK Permohonan Kasasi I Nyoman Suweca. (*Inkrah*).

48. CONTINGENCIES

The Bank currently has significant contingent assets/liabilities in connection with several civil cases as follows:

Civil case Number 138/Pdt.G/2019/PN. Jkt.Sel., against Bank BPD Bali. There are no claims in the lawsuit, only as a Co-Defendant who at that time placed funds amounting to Rp195,000,000,000 in the form of *Deposit on Call*. In the sense that the problem occurred between the Plaintiff and the Defendants. It has been decided by the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 2685 K/PDT/2024 dated 25 July 2024 with the decision to REJECT the cassation request from the cassation applicant/plaintiff (*Inkrah*).

Civil case Number 89/Pdt.G/2022/PN. Amp., concerning the Lawsuit of I Gede Mungghah et al., as Plaintiffs against the Karangasem Branch Office, that the Bank was declared to have committed an unlawful act because it conducted an auction of collateral/disputed objects without the Power of Encumbrance of Encumbrance from the right person. In accordance with the Minutes of Notification of Cassation Decision Case No. 4622 K/PDT/2023 Jo 89/Pdt.G/2022/PN Amp dated 26 April 2024 submitted "The Supreme Court of the Republic of Indonesia REJECTS the Cassation Petition of I Gede Mungghah, et al. (*Inkrah*).

Civil case Number 169/Pdt.G/2022/PN. Gin., regarding the lawsuit of I Wayan Sedantha, et al., as Plaintiffs to the Sukawati Sub-Branch Office that Bank BPD Bali Sukawati Sub-Branch was asked to hand over the remaining proceeds from the collateral auction. According to information from the SIPP Gianyar District Court dated August 1 2024, the case has been decided by the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 4774 K/Pdt/2023 with the decision to REJECT the cassation petition from the cassation applicant/plaintiff (*Inkrah*).

Civil case Number 275/Pdt.G/2022/PN. Gin., regarding the lawsuit of I Wayan Artawan, et al., as the plaintiff against the Ubud Branch regarding the Bank being declared to have committed an unlawful act because it carried out an auction of the Execution of Mortgage Rights. The plaintiff filed a cassation against the Appeal Decision at the Denpasar High Court which stated that it confirmed the Gianyar District Court Decision which stated that the Plaintiff's Lawsuit was Rejected. In accordance with the Minutes of Notification of the Cassation Decision for Case No. 4115 K/PDT/2024 Jo 263/Pdt/2023/PT.Dps. Jo 275/Pdt.G/2022/PN Gin dated December 20, 2024, it was stated that "The Supreme Court of the Republic of Indonesia REJECTS the Cassation Application of I Wayan Artawan et al. (*Inkrah*).

Civil case Number 145/Pdt.G/2023/PN. Dps., concerning the lawsuit of I Nyoman Suweca against Mengwi Sub-Branch regarding Bank BPD Bali Mengwi Sub-Branch was declared to have committed an unlawful act because it conducted an execution auction against the plaintiff's collateral because the Plaintiff was still paying credit installments. In accordance with the Release of Notification of the Cassation Decision for Case No. 2943 K/PDT/2023 Jo No.145/Pdt.G/2023/PN.Dps dated October 16, 2024, the Supreme Court of the Republic of Indonesia REJECTED I Nyoman Suweca's Cassation Application. (*Inkrah*).

48. KONTINJENSI (LANJUTAN)

Perkara perdata Nomor 431/Pdt.G/2023/PN. Sgr., tentang gugatan Ni Luh Senti dan Made Selamat kepada Cabang Pembantu Pupuan yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena menetapkan harga lelang tidak sesuai dengan nilai pasar. Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 15 Februari 2024 menyatakan "Gugatan Penggugat Tidak diterima". (*Inkracht*).

Perkara perdata Nomor 264/Pdt.G/2023/PN. Amp., tentang gugatan Nengah Gitar kepada Cabang Karangasem yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi ketentuan/klausula pada Pasal 18 Perjanjian Kredit. Pada saat ini Penggugat menyatakan Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura yang menyatakan "Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya".

Perkara perdata Nomor 251/Pdt.G/2023/PN. Amp., tentang gugatan Ni Kadek Arie Sulestarini kepada Cabang Karangasem yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagaimana pasal 1320 KUHPdt. Perkara telah dinyatakan selesai karena mediasi telah mencapai kesepakatan perdamaian dari para pihak berperkara.

Perkara perdata Nomor 162/Pdt.G/2023/PN. Bli., tentang gugatan I Nengah Artha kepada Cabang Bangli yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena menetapkan nilai limit jaminan tidak sesuai dengan nilai pasar. Perkara telah dinyatakan selesai karena mediasi telah mencapai kesepakatan perdamaian dari para pihak berperkara.

Perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2024/PN. Dps., tentang gugatan Ni Ketut Suartini kepada Cabang Renon yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan lelang tanpa melakukan restrukturisasi terlebih dahulu dan melakukan lelang tidak sesuai dengan harga pasar. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 19 Agustus 2024 telah membacakan Putusan yang Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya. (*Inkracht*).

Perkara perdata Nomor 41/Pdt.G/2023/PN.Amp., tentang gugatan I Gede Rai R. kepada Cabang Karangasem yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena melelang semua jaminan Tergugat I/Debitur termasuk jaminan milik penggugat. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar (Banding) tanggal 12 November 2024 menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan "Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya".

Perkara perdata Nomor 211/Pdt.Bth/2024/PN. Sgr., tentang gugatan Wajan Budiarsa kepada Cabang Singaraja yang dinyatakan Bank tidak beritikad baik karena menetapkan harga lelang tidak sesuai pasar dan memohon pembatalan harga lelang. Pembantah/Penggugat menyatakan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 12 November 2024 yang menyatakan Gugatan Pembantah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Perkara perdata Nomor 885/Pdt.G/2024/PN.Dps., tentang gugatan Ahmad Ase kepada Cabang Pembantu Gatsu Barat yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena melelang jaminan milik Penggugat. Penggugat menyatakan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 November 2024 yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Perkara perdata Nomor 978/Pdt.G/2024/PN.Dps., tentang gugatan Mohammad Ridwan, Dkk kepada Cabang Renon yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan lelang tanpa melakukan restrukturisasi terlebih dahulu dan melakukan lelang tidak sesuai dengan harga pasar. Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya.

Perkara perdata Nomor 209/Pdt.G/2024/PN. Nga., tentang gugatan H.Saleh, Dkk kepada Cabang Pembantu Pekutatan yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan lelang tanpa pemberitahuan kepada Debitur. Saat ini masih dalam tahap persidangan.

48. CONTINGENCIES (CONTINUED)

*Civil case Number 431/Pdt.G/2023/PN. Sgr., concerning the lawsuit by Ni Luh Senti and Made Selamat to the Pupuan Sub-Branch who were declared to have committed an unlawful act because they set the auction price not in accordance with market value. The decision of the Singaraja District Court dated February 15 2024 stated "The plaintiff's lawsuit is not accepted". (*Inkracht*).*

Civil case Number 264/Pdt.G/2023/PN. Amp., regarding Nengah Gitar's lawsuit against the Karangasem Branch which was declared to have committed an unlawful act because it did not fulfill the provisions/clauses in Article 18 of the Credit Agreement. At this time the Plaintiff is submitting an appeal against the Denpasar High Court Decision which upholds the Amlapura District Court Decision which states "Rejects the Plaintiff's Claim in Entirety".

Civil case Number 251/Pdt.G/2023/PN. Amp., regarding Ni Kadek Arie Sulestarini's lawsuit against the Karangasem Branch who was declared to have committed an unlawful act because the Credit Agreement signed by the Plaintiff did not meet the formal requirements as stated in Article 1320 of the Criminal Code. The case has been declared closed because mediation has reached a peace agreement between the parties involved.

Civil case Number 162/Pdt.G/2023/PN. Bli., regarding I Nengah Artha's lawsuit against the Bangli Branch who was declared to have committed an unlawful act because the collateral limit value was not in accordance with market value. The case has been declared closed because mediation has reached a peace agreement between the parties involved.

*Civil case Number 63/Pdt.G/2024/PN. Dps., regarding Ni Ketut Suartini's lawsuit against the Renon Branch who was declared to have committed an unlawful act because he held an auction without restructuring first and held the auction not in accordance with market prices. The Denpasar District Court Judge on August 19 2024 read out the Decision rejecting the Plaintiff's lawsuit in its entirety. (*Inkracht*).*

Civil case Number 41/Pdt.G/2023/PN.Amp., regarding I Gede Rai R.'s lawsuit against the Karangasem Branch who was declared to have committed an unlawful act because he auctioned off all of Defendant I/Debtor's guarantees including the plaintiff's guarantees. The Plaintiff declared an Appeal against the Decision of the Panel of Judges at the Denpasar District Court on November 12, 2024 which stated "Rejects the Plaintiff's Lawsuit in its entirety."

*Civil case Number 211/Pdt.Bth/2024/PN. Sgr., regarding Wajan Budiarsa's lawsuit against the Singaraja Branch which was declared by the Bank to be in bad faith because it set an auction price that was not in accordance with the market and requested the cancellation of the auction price. The Objector/Plaintiff stated an Appeal against the Decision of the Singaraja District Court dated November 12, 2024 which stated that the Objector's Lawsuit was inadmissible (*niet ontvankelijke verklaard*).*

*Civil case Number 885/Pdt.G/2024/PN.Dps., concerning Ahmad Ase's lawsuit against the Gatsu Barat Sub-Branch which was declared to have committed an unlawful act because it auctioned off the Plaintiff's collateral. The Plaintiff filed an Appeal against the Denpasar District Court Decision dated November 25, 2024 which stated that the Plaintiff's Lawsuit was unacceptable (*niet ontvankelijke verklaard*).*

Civil case Number 978/Pdt.G/2024/PN.Dps., regarding the lawsuit of Mohammad Ridwan, et al. against the Renon Branch which was declared to have committed an unlawful act because - conducting an auction without first restructuring and conducting an auction not in accordance with market prices. The plaintiff stated that he withdrew his lawsuit.

Civil case Number 209/Pdt.G/2024/PN. Nga., concerning the lawsuit of H.Saleh, et al against the Pekutatan Sub-Branch which was declared to have committed an unlawful act because it held an auction without notifying the Debtor. Currently still in the trial stage.

48. KONTINJENSI (LANJUTAN)

Perkara perdata Nomor 4/Pdt.Eks/2024/PN. Nga., tentang Bank BPD Bali mengajukan permohonan eksekusi Hak Tanggungan atas Jaminan milik Debitur, karena sebelumnya terdapat perkara gugatan dari Pihak Ketiga yang mana putusan Pengadilan Negeri Negara menyatakan Objek Perkara (dalam hal ini adalah menjadi jaminan di Bank BPD Bali) dilakukan Sita Persamaan. Setelah Aanmaning II, yang dihadiri oleh pihak Pemohon dan Pihak Termohon Eksekusi yang mana Termohon Eksekusi tidak keberatan untuk dilakukan eksekusi atas jaminan miliknya maka selanjutnya akan dilakukan proses lelang melalui KPKNL. Saat ini masih pada tahap penilaian jaminan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Perkara Pidana No. 199/Pid.Sus/2024/PN. Dps., dengan terdakwa Giri Hendrayana. Bank BPD Bali selaku pelapor atas terjadinya tindak pidana ilegal akses. Putusan Kasasi tanggal 15 November 2024 menyatakan "Menjatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan".

Perkara Kepailitan Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Sby., oleh PT Mastrada Surya, PT Waskita Prima Guna dan PT Anis Jaya Raya sebagai Pemohon lalu PT Karya Cipta Putra Pratama sebagai Termohon dengan PT Bank BPD Bali selaku pihak yang berkepentingan atas Perkara ini. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 10/PKPU/2015/PN.NIAGA.SBY tanggal 15 Agustus 2016 yang menyatakan : "Termohon PT Karya Cipta Putra Pratama berkedudukan di Jalan Kutisari Indah Utara IV/72, Surabaya berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya." Bank BPD Bali selaku Kreditor Separatis telah melaksanakan haknya untuk melakukan lelang sendiri seperti tidak dalam kepailitan dengan waktu selama 60 hari sebelum aset dalam pailit diserahkan kepada Kurator, sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Pasal 55 ayat (1). Pelelangan aset telah menjadi kewenangan Kurator. Saat ini Kurator sedang pada tahap pemberesan harta pailit.

Perkara Kepailitan Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby., oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai Pemohon kepada PT Hakadikon Beton Pratama dan Herman Sudarta sebagai Termohon dengan PT Bank BPD Bali selaku pihak yang berkepentingan atas Perkara ini. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby., tertanggal 5 Mei 2023 yang menyatakan : "Termohon PT. Hakadikon Beton Pratama dan Herman Sudarta berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya." Saat ini Kurator sedang melakukan pencatatan daftar piutang para Debitur.

49. STANDAR AKUNTANSI YANG DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) baru. Standar akuntansi tersebut akan berlaku efektif atau diterapkan pada laporan keuangan Bank yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025:

- PSAK 117: Kontrak Asuransi;
- Amendemen PSAK 117: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 117 dan PSAK 109 – Informasi Komparatif; dan
- Amendemen PSAK No. 221, "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing – Kekurangan Ketertukaran".

Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan ini, manajemen Bank masih mengevaluasi dampak potensial dari perubahan standar akuntansi tersebut terhadap laporan keuangannya.

50. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN KEUANGAN

Tidak terdapat kejadian penting setelah periode pelaporan keuangan posisi 31 Desember 2024 yang mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

51. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali bertanggung jawab atas penyajian dan penyusunan laporan keuangan 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sebagaimana diuraikan di muka yang telah diselesaikan pada tanggal 10 Januari 2025.

48. CONTINGENCIES (CONTINUED)

Civil case Number 4/Pdt.Eks/2024/PN. Nga., regarding Bank BPD Bali filed a request for execution of Mortgage Rights on Collateral owned by the Debtor, because previously there was a lawsuit case from a Third Party where the decision of the Negara District Court stated that the Object of the Case (in this case being collateral at Bank BPD Bali) was subject to Equity Seizure. After Aanmaning II, which was attended by the Applicant and the Execution Respondent, where the Execution Respondent did not object to the execution of his collateral, the auction process will then be carried out through the KPKNL. Currently still at the stage of collateral assessment from the Public Appraisal Services Office (KJPP).

Criminal Case No. 199/Pid.Sus/2024/PN. Dps., with defendant Giri Hendrayana. Bank BPD Bali as the reporter for the occurrence of illegal access. The Cassation Decision dated November 15, 2024 stated "Sentencing the defendant to 1 (one) year and 6 (six) months in prison and a fine of Rp50,000,000 (fifty million rupiah) with the provision that if the fine is not paid, it will be replaced with imprisonment for 3 (three) months".

Bankruptcy Case Number 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Sby., by PT Mastrada Surya, PT Waskita Prima Guna and PT Anis Jaya Raya as Petitioners then PT Karya Cipta Putra Pratama as Respondent with PT Bank BPD Bali as the party involved interested in this case. Commercial Court Decision at Surabaya District Court No. 10/PKPU/2015/PN.NIAGA.SBY dated 15 August 2016 which stated: "Respondent PT Karya Cipta Putra Pratama domiciled at Jalan Kutisari Indah Utara IV/72, Surabaya is in bankruptcy with all the legal consequences." Bank BPD Bali as the Separatist Creditor has exercised its right to conduct its own auction as if it were not in bankruptcy with a period of 60 days before the assets in bankruptcy are handed over to the Curator, in accordance with the Bankruptcy Law and PKPU Article 55 paragraph (1). Auction of assets has become the authority of the Curator. Currently the Curator is at the stage of settling the bankruptcy estate.

Bankruptcy Case Number 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby., by PT Bank Danamon Indonesia Tbk as Petitioner to PT Hakadikon Beton Pratama and Herman Sudarta as Respondent with PT Bank BPD Bali as the interested party in this Case. Commercial Court Decision at the Surabaya District Court 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby., dated May 5, 2023 which stated: "Respondent PT. Hakadikon Beton Pratama and Herman Sudarta are in bankruptcy with all the legal consequences." Currently the Curator is recording the list of Debtors' receivables.

49. ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE ACCOUNTING STANDARDS

The Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK-IAI) has issued new or amendment to the following Indonesian Financial Accounting Standards ("SFAS") and Its Interpretation to Financial Accounting Standards ("IFAS"). The accounting standards will be effective or applicable on the Bank's financial statements for the period beginning on or after January 1, 2025:

- SFAS 117: Insurance Contract;
- Amendments to SFAS 117: Insurance Contract Regarding Initial Application of SFAS 117 and SFAS 109 - Comparative Information; and
- Amendment to SFAS No. 221, "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates – Lack of Exchangeability".

As of authorization date of these financial statements, the Bank's management is still evaluating the potential impact on these amended accounting standards on its financial statements.

50. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

There are no significant events that occurred after the date of reporting period of financial statements as of December 31, 2024 which affects the decision of the users of the financial statements PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

51. THE COMPLETION OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The Bank's Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Bali is responsible for the presentation and completion of the financial statements as of December 31, 2024 and the year then ended which was completed on January 10, 2025.



BANK BPD BALI



BANK BPD BALI

PT Bank Pembangunan Daerah Bali

Jalan Raya Puputan Niti Mandala Denpasar 80235 Bali

Telpon : +62 361 223301 ext. 5

Fax : +62 361 237691

Email : info@bpd Bali.co.id



www.bpd Bali.co.id